NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

HAND-OUT DISCUSSION ~ PESANTREN PERGERAKAN

MATERI KADERISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)

MANY HAVE EYES BUT DO NOT SEE

PROGRAM KHUSUS PESANTREN PERGERAKAN SE-NUSANTARA

PONPES AL-MADANIYYAH AS-SALAFIYYAH GUMILIR-CILACAP-JAWA TENGAH

6-30 JUNI 2016 M/1-25 RAMADHAN 1437 H (KARANTINA 25 HARI)

PONPES AL-MADANIYYAH AS-SALAFIYYAH
GUMILIR-CILACAP-JAWA TENGAH

JARINGAN INTELEKTUAL MUDA
NAHDLATUL ULAMA

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
JARINGAN INTI IDEOLOGIS

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KOMISARIAT AL-GHOZALI CILACAP

Dengan Menyebut Nama Allah
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,
[1] Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?,
[2] Itulah orang yang menghardik anak yatim,
[3] dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin,
[4] Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
[5] (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
[6] orang-orang yang berbuat riya’
[7] dan enggan (menolong dengan) barang berguna.
(Q.S. Al-Maa’uun [107]: 1-7)

HAND-OUT DISCUSSION
MATERI KADERISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
PROGRAM KHUSUS PESANTREN PERGERAKAN SE-NUSANTARA
PONPES AL-MADANIYYAH AS-SALAFIYYAH GUMILIR-CILACAP-JAWA TENGAH
6-30 JUNI 2016 M/1-25 RAMADHAN 1437 H (KARANTINA 25 HARI)

DISUSUN OLEH:

NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA
DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL AND SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA
DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP
CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA)
E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com / FB: nur sayyid santoso kristeva,
PIN BBM: 5221 7134, Website: www.negaramarxis.blogspot.com

PROGRAM KHUSUS PESANTREN PERGERAKAN SE-NUSANTARA INI DISELENGGARAKAN OLEH

PONPES AL-MADANIYYAH AS-SALAFIYYAH GUMILIR-CILACAP-JAWA TENGAH
JARINGAN INTELEKTUAL MUDA NAHDLATUL ULAMA
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JARINGAN INTI IDEOLOGIS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KOMISARIAT AL-GHOZALI CILACAP

ALAMAT KEGIATAN

KOMPLEKS PONPES AL-MADANIYYAH AS-SALAFIYYAH
GUMILIR-CILACAP-JAWA TENGAH JL. PUCANG D.37, KELURAHAN GUMILIR,
KECAMATAN CILACAP-UTARA, KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH.
KODE POS. 53231/ KOMPLEKS MASJID AL-MUHAJIRIN/ SMP MAKMUR 1 CILACAP

TESTIMONI Penulis

Syukur alhamdulilah acara pesantren pergerakan ini dapat terselenggara. Acara ini sengaja dibuat sebagai media transformasi pengetahuan serta kebutuhan ideologis untuk menciptakan mata rantai pengetahuan dilevel kaderisasi PMII. Kemunduran tradisi intelektual merupakan kegelisahan yang ingin dijawab dalam forum ideologis ini. Akselerasi wacana sebagai sumbu gerak pemikiran dan gerakan, adalah sebuah keniscayaan, maka ruang kaderisasi kultural inklusif ini mudah-mudahan menjadi jawaban atas degradasi intelektual dan mampu mengatasi kelemahan kaderisasi PMII.

Saya pribadi selaku penggagas acara ini memiliki ekspektasi yang besar dan dalam jangkauan yang panjang atas nama solifdaritas dan perjuangan PMII, yaitu dimana alumnus pesantren pergerakan ini diharapkan terbentuk aspek-aspek kematangan kader, diantaranya: terbentuknya dalam diri kader aspek militansi, semangat perjuangan, semangat membangun PMII, semangat ber-pengetahuan, semangat pengorbanan, loyalitas yang takkan pernah mati, intelektualitas yang mumpuni, nalar kritis-progresif, spiritualitas agama & sosial, dedikasi dan integritas diri, berkorban untuk menjaga PMII, Negara, Bangsa Indonesia, serta memperjuangkan Islam Rahmatan lil 'Alamin.

Jika masih diberi umur panjang, maka perjuangan ini akan saya lakukan terus-menerus tanpa pamrih dan hanya mengharap Ridho Allah SWT. Ingatlah sahabat, bahwa nyawa, tenaga, darah, pikiran, kehendak, naluri, rasa, hasrat, keinginan, yang ada dalam jiwa dan tubuh kita ini hanya akan menjadi debu tanpa arti jika tidak kita abadikan dalam perjuangan, pengabdian, pengorbanan, dan perwujudan harapan-harapan suci nan mulia. Maka, sekecil apapun manfaat dari kegiatan ini saya yakin adalah sebuah pengabdian yang besar atas nama nilai, solidaritas, pengetahuan, katauhidan dan suatu usaha meneladani alim ulama di negeri ini.

Sahabatku seperjuangan! Marilah terus membunuh waktu, terus berjuang, terus-menerus bunuh diri kelas, terus menasbihkan diri dalam cita-cita perubahan sosial. Kita jadikan pesantren sebagai sentrum gerakan pemikiran dan gerakan sosial. Perubahan kita mulai dari diri sendiri. Kita semua adalah ummat terbaik yang diberi amanah untuk mendorong perbuatan baik dan mencegah dari kemungkaran. Hiduplah yang mulia, atau matilah dengan syahid!

“Progresifitas sejarah akan berjalan dengan hukum-hukumnya sendiri. Progresifitas sejarah adalah gerak hidup manusia diselingkupan bumi, garis hidup kemanusiaan. Yang menentang, apakah itu kelompok, suku, bangsa atau perorangan akan kalah. Dan aku tahu betul, itulah yang akan terjadi, entah kapan, entah cepat, entah lambat.” - “Bunuhlah waktumu dengan aktifitas produktif dan progresif, jangan engkau terbunuh waktu karena aktifitas yang mengasingkan rasionalitas.”

1 Ramadhan 1437 H / 6 Juni 2016 M
Kamar Refleksi dan Kontemplasi
Ponpes Al-Madaniyyah As-Salafiyyah Cilacap

NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA

MATERI 01
ASWAJA & NILAI DASAR PERGERAKAN PMII

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.
ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

Orang-orang kafir dalam arah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menumpuk kekayaan dan terus membiarkan kezaliman dalam masyarakat serta merintangi upaya-upaya menegakkan keadilan. seorang mukmin sejati bukanlah sekedar orang yang percaya kepada Allah akan tetapi juga ia harus seorang mujahid yang berjuang menegakkan keadilan, melawan kezaliman dan penindasan. ***(Asghar Ali Engineer).***

Sejarah Kemunculan Persoalan Persoalan Kalam[1]

Kemunculan persoalan kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Mu'awiyah dan Ali bin Abi Thalib mengkristal menjadi *Perang Siffin* yang berakhir dengan keputusan *tahkim* (arbitrase). Sikap Ali yang menerima tipu muslihat Amr bin Al-Ash, utusan dari pihak Mu'awiyah dalam *tahkim,* sungguhpun dalam keadaan terpaksa, tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka berpendapat bahwa persoalan yang terjadi saat itu tidak dapat diputuskan melalui *tahkim.* Putusan hanya datang dari Allah dengan kembali pada hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. *La hukma illa lillah* (tidak ada hukum selain dari hukum Allah) atau *La hukma illa Allah* (tidak ada perantara selain Allah) menjadi semboyan mereka. Mereka memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat salah sehingga mereka meninggalkan barisannya. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan nama *Khawarij,* yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri atau *secerders.*[2] Diluar pasukan yang membelot Ali, ada pula yang sebagian besar mendukung Ali. Mereka inilah yang kemudian memunculkan kelompok Syi'ah. Menurut W. Montgomery Watt, Syi'ah muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Mu'awiyah yang dikenal dengan *Perang Siffin.* Sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap *arbitrase* yang ditawarkan Mu'awiyah, pasukan Ali terpecah menjadi dua, satu kelompok mendukung sikap Ali, kelak disebut Syi'ah dan kelompok lain menolak sikap Ali, kelak disebut Khawarij.[3]

Harun Nasution, lebih lanjut melihat bahwa persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan sipa yang bukan kafir. Dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap dalam Islam. *Khawarij* sebagaimana telah disebutkan, memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa *tahkim,* yakni Ali, Mu'awiyah, Amr bin Ash, Abu Musa Al-Asy'ari, adalah kafir berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 43-44.[4]

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ
يَتَوَلَّوْنَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *"Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang didalamnya (ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu (dari putusanmu)? Dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman."*

Persoalan ini telah menimbulkan tiga aliran teologi dalam Islam, yaitu:

1. Aliran *Khawarij,* menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir, dalam arti telah keluar dari Islam, atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh.
2. Aliran *Murji'ah,* menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya, hal itu terserah kepada Allah untuk mengampuni atau menghukumnya.
3. Aliran *Mu'tazilah,* yang tidak menerima kedua pendapat diatas, bagi mereka orang yang berdosa besar nukan kafir, tetapi buan pula mukmin. Mereka mengambil posisi antara mumin dan kafir, yang dalam bahasa Arab-nya terkenal dengan istilah *al-manzilah manzilatain* (posisi diantara dua posisi).[5]

---

[1] Abdul Razak dan Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2003) hlm. 27-29.
[2] W. Montgomery Watt, *Pemikiran Teologi & Filsafat Islam,* Terj. Umar B. (Jakarta: P3M, 1987). hlm. 10.
[3] *Ibid.*, hlm. 6-7.
[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.* hlm. 8.

Dalam Islam, timbul pula dua aliran teologi yang terkenal dengan nama *Qadariyah* dan *Jabariyah.* Menurut *Qadariyah,* manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Adapun *Jabariyah,* berpendapat sebaliknya bahwa manusia tidak mempunyai kehendak dalam kehendak dan perbuatannya.[6] Aliran *Mu'tazilah* yang bercorak rasional mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hanbali, yaitu pengikut-pengikut Ibn Hanbal. Mereka menantang ini kemudian mengambil bentuk aliran teologi tradisional yang dipelopori Abu Al-Hasan Al-Asy'ari (935 M). disamping aliran *Asy'ariyah* timbul pula aliran Samarkand yang juga bermaksud menentang aliran *Mu'tazilah*. Aliran ini didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi (w. 944 M). Aliran ini kemudian terkenal dengan nama teologi *Al-Maturidiyah*.[7]

A. Kerangka Berfikir Aliran-Aliran Ilmu Kalam

Aliran teologi yang sering disebut-sebut memiliki cara berfikir teologi rasional adalah *Mu'tazilah.* Oleh karena itu, *Mu'tazilah* dikenal sebagai aliran yang bersifat rasional dan liberal. Adapun teologi yang sering disebut-sebut memiliki metode berfikir tradisional adalah *Asy'ariyah.* Disamping pengkategorian akibat adanya perbedaan kerangka berfikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kalam:[8]

1. Aliran Antroposentris.

Aliran Antroposentris menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat intrakosmos dan impersonal. Ia berhubungan erat dengan masyarakat kosmos, baik yang natural maupun yang supranatural dalam arti unsur-unsurnya. Manusia adalah anak kosmos. Unsur supranatural dalam dirinya merupakan sumber kekuatannya. Tugas manusia adalah melepaskan unsur natural yang jahat. Dengan demikian, manusia harus mampu menghapus kepribadian kemanusiaan untuk meraih kemerdekaan dengan lilitan naturalnya. Orang yang tergolong dalam kelompok ini berpandangan negatif terhadap dunia karena menganggap keselamatan dirinya terletak pada kemampuannya untuk membuang semua hasrat dan keinginannya. Sementara ketaqwaan lebih diorientasikan kepada praktek-praktek pertapaan dan konsep-konsep magis. Tujuan hidupnya bermaksud menyusun kepribadiannya kedalam realita impersonalnya.[9]

Anshari menganggap manusia yang berpandangan antroposentris sebagai sufi adalah mereka yang berpandangan mistis dan statis. Padahal manusia antroposentris sangat dinamis karena menganggap hakikat realitas transenden yang bersifat intrakosmos dan impersonal datang kepada manusia dalam bentuk daya sejak manusia lahir. Daya itu berupa potensi yang menjadikannya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Manusia yang memilih kebaikan akan memperoleh keuntungan melimpah (surga), sedangkan manusia yang memilih kejahatan, ia akan memperoleh kerugian melimpah pula (neraka). Dengan daya, manusia mempunyai kebebasan mutlak tanpa campur tangan realitas transenden. Aliran teologi yang termasuk dalam kategori ini adalah *Qadariyah, Mu'tazilah* dan *Syi'ah.*

2. Aliran Teologi Teosentris.

Aliran teosentris menganggap bahwa hakikat realitas transenden bersifat suprakosmos, personal, dan ketuhanan. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang ada di kosmos ini. Ia dengan segala kekuasaan-Nya, mampu berbuat apa saja secara mutlak. Sewaktu-waktu ia dapat muncul pada masyarakat kosmos. Manusia adalah ciptaan-Nya sehingga harus berkarya hanya untuk-Nya. Di dalam kondisinya yang serba relatif ciri manusia ialah migran abadi yang segera akan kembali kepada Tuhan. Untuk itu manusia harus mampu meningkatkan keselarasan dengan realitas tertinggi dan transenden melalui ketakwaan. Dengan ketakwaannya, manusia akan memperoleh kesempurnaan yang layak sesuai dengan naturalnya. Dengan kesempunaan itu pula manusia akan menjadi sosok yang ideal, yang mampu memancarkan atribut-atribut ketuhanan dalam cermin dirinya. Kondisi semacam inilah yang pada saatnya nanti akan menyelamatkan nasibnya di masa yang akan datang.[10]

Manusia teosentris adalah manusia yang statis karena sering terjebak dalam kepasrahan mutlak kepada Tuhan. Sikap kepasrahan, menjadikan ia tidak mempunyai pilihan. Baginya segala perbuatannya pada hakikatnya adalah aktivitas Tuhan. Ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali apa yang telah ditetapkan Tuhan. Dengan cara itu Tuhan menjadi penguasa mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Tuhan dapat saja memasukkan manusia jahat ke dalam keuntungan yang melimpah (surga). Begitu pula, Dia dapat saja memasukkan manusia yang taat kedalam situasi serba rugi yang terus-menerus (neraka).

---

[6] *Ibid.* hlm. 9.

[7] *Ibid.*

[8] Muhammad Fazlur Rahman Ansari, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern,* Terj. Juniarso Ridwan, dkk., (Bandung: Risalah, 1984) hlm. 92.

[9] *Ibid.,* hlm. 92.

[10] *Ibid.*

Aliran teosentris menganggap daya yang menjadi potensi perbuatan baik atau jahat manusia bisa datang sewaktu-waktu dari Tuhan. Oleh sebab itu, adakalanya manusia mampu melaksanakan suatu perbuatan tatkala ada daya yang datang kepadanya. Sebaliknya ia tidak mampu melaksanakan suatu perbuatan apapun tatkala tidak ada daya yang datang kepadanya. Dengan perantaraan daya, Tuhan selalu campur tangan. Bahkan, manusia dapat dikatakan tidak mempunyai daya sama sekali terhadap segala perbuatannya. Aliran teologi yang tergolong dalam kategori ini adalah: *Jabariyah.*

3. Aliran Konvergensi/ Sintesis

Aliran *konvergensi* menganggap hakikat realitas transenden bersifat supra sekaligus intrakosmos, personal dan impersonal, *lahut* dan *nashut*, Makhluk dan Tuhan, sayang dan jahat, lenyap dan abadi, tampak dan abstrak, dan sifat lain yang dikotomik. Ibn-Arabi menamakan sifat-sifat semacam ini dengan *insijam al-azali* (*pre-estabilizad harmony*).[11] Aliran ini memandang bahwa manusia adalah *al-azali* atau cermin *asma* dan sifat-sifat *realitas mutlak* itu. Bahkan seluruh alam (kosmos), termasuk manusiajuga merupakan cermin *asma* dan *sifat-sifat-Nya* yang beragam. Oleh sebab itu, eksistensi kosmos yang dikatakan sebagai penciptaan pada dasarnya adalah penyingkapan asma dan sifat-sifat-Nya yang azali.

Aliran konvergerisi memandang bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu selalu berada dalam ambigu (serba ganda), baik secara substansial maupun formal. Secara substansial sesuatu mempunyai nilai-nilai batini, *huwiyah*, dan eternal (qudim) karena merupakan gambaran *Al-Haq*. Dari sisi ini, sesuatu tidak dapat dimusnahkan, kecuali atas kehendak-Nya yang mutlak. Secara formal sesuatu mempunyai nilai-nilai *zahiri*, *inniyah*, dan temporal (*huduts*) karena merupakan cermin *Al-Haq*. Dari sisi ini, sesuatu dapat dimusnahkan kapan saja karena sifat makhluk adalah profane dan relative. Eksistensinya sebagai makhluk adalah mengikuti *suunatullah* atau *natural law* (hukum alam) yang berlaku.

Aliran ini berkeyakinan bahwa hakikat daya manusia merupakan proses kerjasanm antar daya yang transendental (Tuhan)—dalam bentuk kebijaksanaan—dan daya temporal (manusia) dlam bentuk teknis. Dampaknya, ketika daya manusia tidak berpartisipasi dalam proses peristiwa yang terjadi pada dirinya, daya yang transendental yang memproses suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, ia tidak memperoleh pahala atau siksaan dari Tuhan. Sebaliknya, ketika terjadi suatu peristiwa pada dirinya, sementera ia sendiri telah berusaha melakukannya, maka pada dasarnya kerjasama harmonis antara daya transendental dan daya temporal. Konsekuensinya, manusia akan memperoleh pahala atau siksaan dari Tuhan, sebanyak andil temporalnya dalam mengaktualkan peristiwa tertentu.

Kebahagiaan, bagi para penganut ailiran konvergensi terletak pada kermampuannya membuat pendulum agar selalu berada tidak jauh ke kanan atau ke kiri, tetapi tetap di tengah-tengah antara berbagai ekstrirmitas. Dilihat dari sisi ini, Tuhan adalah sekutu manusia yang tetap, atau lebih luas lagi bahwa Tuhan adalah sekutu makhluk-Nya, sedangkan makhluk adalah sekutu Tuhannya. Ini karena, baik manusia atau makhluk merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan sebagaimana keterpaduan antara dzat Tuhan dan asma serta sifat-sifat-Nya. Kesimpulannya, kemerdekaan kehendak manusia yang profan selalu berdampingan dengan *determinisme transcendental* Tuhan yang sakral dan menyatu dalam daya manusia. Aliran teologi yang dapat dimasukkan ke dalam kategori ini adalah *Asy'ariyah*.

4. Aliran Nihilis.

Aliran nihilis menganggap bahwa hakikat realitas transendental hanyalah iiusi. Aliran ini pun menolak Tuhan yang mutlak, terapi menerima berbagai variasi Tuhan kosmos. Manusia hanyalah bintik kecil dari aktivitas mekanisme dalam suatu masyarakat yang serba kebetulan. Kekuatan terletak pada kecerdikan diri manusia sendiri sehingga mampu melakukan yang terbaik dari tawaran yang terbutuk. Idealnya, manusia mempunyai kebahagiaan yang bersifat fisik, yang merupakan titik sentral perjuangan seluruh manusia.[12][].

---

[11] Lihat Asy-Syikh Al-Akbar Muhyi Ad-Diin bin Arabi, *Fushuh Al-Hikam,* Komentar A.R. Nicholsom, Jilid II, t.t. hlm. 22.
[12] *Ibid*., hlm. 92.

Pengertian Ahlussunah Wal Jama’ah

Pengertian Ahlussunah Wal Jama’ah dijelaskan oleh Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani:

فالسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين رحمة الله عليهم أجمعين .

(الغنية لطالبي طريق الحق ، ج ١ ص ٨٠)

Artinya: “*Yang dimaksud dengan As-Sunah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW (meliputi ucapan, perilaku serta ketetapan beliau). Sedangkan pengertian Al-Jama’ah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para Sahabat Nabi Muhammad SAW pada masa Khulafaurrashidin yang empat telah diberi hidayah (mudah-mudahan Allah SWT member Rahmat pada mereka semua).”* (*Al-Ghunyah li Thalibi Thariq Al-Haqq*, Juz II., Hal. 80).

Syaikh Abi Al-Fadhl bin Abdussyukur menjelaskan pengertian Ahlussunah Wal Jama’ah:

أهل السنة والجماعة الذين لازموا سنة النبي وطريقة الصحابة في العقائد الدينية والأعمال البدنية والأخلاق القلبية . (الكواكب اللماعة ، ص ٨-٩)

Artinya: *“Yang disebut Ahlussunah Wal Jama’ah adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada As-Sunah Nabi Muhammad SAW dan jalan pada sahabatnya dalam masalah aqidah keagamaan, amal-amal lahiriyah serta akhlaq hati.”* (Al-Kawakib al-Lamma’ah, Hal. 8-9).

Mengenai dasar apa saja Sumber Hukum Islam yang dipakai oleh aliran Ahlussunah wal Jama’ah dalam menentukan hukum Islam, adalah sesuai dengan firman Allah SWT:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . (النساء ، ٥٩)

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu kepada Allah SWT, dan patuhlan kamu kepada Rasul serta Ulu Al-Amri diantara kamu sekalian, kemudian jika kamu berselisih paham tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, jika benar-benar kamu beriman pada hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S. An-Nisa: 59).

Berdasarkan ayat ini, ada empat dalil yang dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum, yakni Al-Qur’an, Al-Hadits, Ijma’ dan Qiyas.

Dari sinilah ditemukan bahwa makna Aswaja adalah ajaran yang mengikuti apa yang Rasul, dan Sahabat kerjakan. Dengan demikian pada dasarnya aswaja sudah ada pada zaman Rasul. tetapi Aswaja pada waktu itu hanya sebagai realitas komunitas muslim belum ada. Atau dengan kata lain kaum muslimin pada masa Rasulullah itulah Aswaja. Dengan demikian *Ahlusunnah waljama'ah* secara umum dapat diartikan sebagai "para pengikut tradisi Nabi Muhammad dan ijma (kesepakatan) ulama".[13]

[13] Zamakhsyari Dhofier, *Tradi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994) hlm.148

Ahlussunnah Wal Jama'ah sebagai sebuah aliran (aliran yang menganut faham aswaja/berkonsepkan Aswaja) muncul karena adanya sebuah respon terhadap aliran Mu'tazilah yang terkesan terlalu rasional sampai mengenyampingkan Sunnah.[14] Dalam hal ini aliran Ahlussunnah Wal Jama'ah dibagi menjadi dua golongan diantaranya adalah Asy'ariyyah yang dipelopori oleh Abu Hasan Asy'ari, dan Maturidhiyyah yang dipimpin oleh Abu Mansur Al Maturidi. Dan yang menyebar ke Indonesia adalah aliran Asy'ariyyah menjelma menjadi NU yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari.

Namun disini NU tidak hanya sebagai sekedar cabang dari asy'ariyyah, tapi NU adalah organisasi keagamaan yang sangat patuh, dan konsisten dalam menggunakan aswaja sebagai konsepnya, dan menggunkannya dengan sangat baik, sehingga NU tidak bisa dilepaskan dengan Aswaja atau boleh kita katakana ketika menyebutkan NU sama dengan menyebutkan Aswaja. Pada awalya makna Aswaja Indonesia adalah sama dengan pemahaman sebelumnya, yaitu ajaran yang sesuai dengan Hadits, dan ijma' ulama. Namun, dalam hal ini terdapat spesifikasi yang lebih menyesuaikan dengan kultur Indonesia yang majemuk. Menurut KH Bisri Musthofa, definisi Aswaja, yaitu, paham yang menganut pola madzhab fikih yang empat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Selain itu, dalam bidang akidah mengikuti Asy'ari, dan Maturidi. Dalam bidang tasawuf mengikuti Junaid al Baghdâdî dan al Ghazâlî.[15] Aswaja juga disebut paham yang mengikuti Asy'ari, dan Maturidi.

Adapun salah satu konsep dari pemahaman Aswaja di sini, yaitu *tawasuth*, *tasamuh*, *tawazun* dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Yang dimaksud tawasuth (moderat) ini, sebuah sikap keberagamaan yang tidak terjebak terhadap hal-hal yang sifatnya ekstrim. Tasamuh, sebuah sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang menerima kehidupan sebagai sesuatu yang beragam. Tawazun (seimbang), sebuah keseimbangan sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang bersedia memperhitungkan berbagai sudut pandang, dan kemudian mengambil posisi yang seimbang dan proporsional. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.[16]

Aswaja sebagai paham keagamaan yang di dalamnya mempunyai konsep moderat (tawasut), setidaknya harus memandang, dan memperlakukan budaya secara proporsional (wajar). Karena budaya, sebagai kreasi manusia yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa terjamin. Budaya memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial. Dalam hal ini asawaja dalam NU lebih condong bersifat substansial dari pada teknis.[17]

Dalam hal ini, berlaku sebuah kaidah fikih "*al muhâfazhah alâ al qadîm al shalîh wal al akhzu bil jadidî al ashlâh*", melestarikan kebaikan yang ada dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Dengan menggunakan kaidah ini, pengikut Aswaja memiliki pegangan dalam menyikapi budaya. Jadi tidak semuanya budaya itu jelek, selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan mengandung kebaikan maka bisa diterima. Bahkan bisa dipertahankan dan layak untuk diikutinya. Ini sesuai dengan sebauh kaidah fikih, "*al adah muhakkamah*" bahwa budaya atau tradisi (yang baik) bisa menjadi pertimbangan hukum.

Berangkat dari paradigma Aswaja tersebut maka tampak jelas bahwa kaum Aswaja tidak mudahmengkafirkan atau mensyirikkan orang lain hanya karena dia menggunakan takwil atas teks-teks agama. Ini tentu berbeda dengan perilaku sebagian kelompok Islam garis keras di Indonesia dewasa ini. Kaum Aswaja bahkan juga tidak mudah menuduh sesat (bid'ah) terhadapmereka yang berseberangan pendapat menyangkut pengembangan tradisi masyarakat dan pemikiran keagamaan. Dalam tradisi fiqh sikap Aswaja ini dikemukakan dalam ucapan paraulama fiqh : “Ra'yuna shawab yahtamil al khata' wa ra'yu ghairina khatha yahtamil al Shawab”(penda pat kami benar meski mungkin keliru, dan pendapat orang lain keliru tapi mungkin sajabenar). Pada sisi lain kaum Aswaja tidak sepenuhnya membiarkan berkembangnyapemahaman yang serba menghalalkan segala cara (ibahiyyah). Untuk menjembatanikesenjangan pemahaman antar umat, kaum Sunni mengemukakan prinsip “musyawarah” atau“syura” untuk mencapai kesepakakan dengan damai, tanpa kekerasan.

Paradigma Aswaja di atas diyakini banyak pihak masih memiliki relevansi untuk mengatasi problem politik umat Islam Indonesia yang tengah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Aswajalah golongan yang dapat menjawab secara telak tuduhan “ekstrimis” atau “teroris” yang dialamatkan kepada Islam. Hal ini karena Aswaja tidak pernah mengenal penggunaan cara-cara radikal atau cara-cara kekerasan atas nama atau simbol agama terhadap orang lain meski mereka berbeda aliran keagamaan bahkan terhadap mereka yang berbeda agamanya.[18]

Aswaja juga tidak pernah menganjurkan pengikutnya untuk memulai perang terhadap orang kafir/non muslim. Perang dapat dijalankan hanya dalam rangka membela diri dari serangan mereka. Jika ada kemunkaran yang terjadi dalam masyarakat, doktrin Aswaja mengajarkan “Amar Ma'ruf Nahi Munkar”, melalui “hikmah” (ilmu pengetahuan), mau'izhah hasanah (nasehat yang santun) dan mujadalah billati hiya ahsan (berdebat dengan cara yang terbaik). Cara lain adalah melalui aturan-aturan hukum yang adil dan

---

[14] Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 65

[15] Mujamil Qomar, , *NU Liberal; Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 62

[16] Masyhudi Muchtar, *Aswaja An-Nahdliyah, Ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, Cet. I., Maret 2007) hlm. 51-52

[17] Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tak Perlu Dibela*, (Yogyakarta: LKIS, cet v, 2010) hlm.37

[18] Artikel KH. Husein Muhammad**,** *Aswaja Di Antara Dua Kutub Ekstrimitas***,** Jumat, 02 November 2007.

dilaksanakan dengan konsekuen. Hukum yang adil adalah pilar utama bagi kehidupan bersama masyarakat bangsa.

Dengan demikian, terdapat terobosan merenovasi dalam berbagai bidang pemikiran, dengan tujuan kemaslahatan kaum muslimin secara menyeluruh, dan melindungi hak-hak asasi manusia, sebagai realisasi Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta. Hal yang paling mendesak untuk dirumuskan pada era modern ini adalah sebagai berikut, *pertama*, hubungan Islam dan negara yang sudah terkotak dalam nation state. *Kedua*, hubungan Syariah Islam dengan hukum publik baik nasional maupun internasional. *Ketiga*, konsep pemberdayaan rakyat menuju masyarakat yang musyawarah, dan terbebas dari belenggu penghambaan. *Keempat*, konsep keadilan ekonomi, politik dan hukum.

Garis-Garis Besar Doktrin Aswaja

Islam, iman dan ihsan adalah trilogi agama (*addîn*) yang membentuk tiga dimensi keagamaan meliputi *syarî'ah* sebagai realitas hukum, *tharîqah* sebagai jembatan menuju *haqîqah* yang merupakan puncak kebenaran esensial. Ketiganya adalah sisi tak terpisahkan dari keutuhan risalah yang dibawa Rasulullah saw. yang menghadirkan kesatuan aspek eksoterisme (lahir) dan esoterisme (batin). Tiga dimensi agama ini (islam, iman dan ihsan), masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Keislaman seseorang tidak akan sempurna tanpa mengintegrasikan keimanan dan keihsanan. Ketiganya harus berjalan seimbang dalam perilaku dan penghayatan keagamaan umat, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya.* (QS. Albaqarah: 208)

Imam Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, *"hakikat Islam adalah aktifitas badaniah (lahir) dalam menjalankan kewajiban agama, hakikat iman adalah aktifitas hati dalam kepasrahan, dan hakikat ihsan adalah aktifitas ruh dalam penyaksian (musyâhadah) kepada Allah"*.

Dalam perkembangan selanjutnya, kecenderungan ulama dalam menekuni dimensi keislaman, melahirkan disiplin ilmu yang disebut fiqh.Kecenderungan ulama dalam menekuni dimensi keimanan, melahirkan disiplin ilmu tauhid. Dan kecenderungan ulama dalam dimensi keihsanan, melahirkan disiplin ilmu tasawuf atau akhlak. Paham ASWAJA mengakomodir secara integral tiga dimensi keagamaan tersebut sebagai doktrin dan ajaran esensialnya. Karena praktek eksoterisme keagamaan tanpa disertai esoterisme, merupakan kemunafikan.Begitu juga esoterisme tanpa didukung eksoterisme adalah klenik. Semata-mata formalitas adalah tiada guna, demikian juga spiritualitas belaka adalah sia-sia. Imam Malik mengatakan: *Barang siapa menjalani tasawuf tanpa fiqh, maka dia telah zindiq, barang siapa memegang fiqh tanpa tasawuf, maka dia telah fasiq, dan barang siapa menyatukan keduanya, maka dia telah menemukan kebenaran.*

1. Doktrin Keimanan

Iman adalah pembenaran (*tashdîq*) terhadap Allah, Rasul dan segala risalah yang dibawanya dari Allah. Dalam doktrin keimanan, yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang tauhid (teologi/kalam) ini, ASWAJA berpedoman pada akidah islamiyah (*ushûluddîn*) yang dirumuskan oleh Abu Alhasan Al'asy'ari (260 H./874 M. – 324 H./936 M.) dan Abu Manshur Almaturidi (w. 333 H.).

Kedua tokoh ASWAJA ini nyaris sepakat dalam masalah akidah islamiyah, meliputi sifat-sifat wajib, mustahil dan ja'iz bagi Allah, para rasul dan malaikatNya, kendati keduanya berbeda dalam cara dan proses penalaran. Kedua tokoh ini hanya berbeda dalam tiga masalah yang tidak berakibat fatal. Yaitu dalam masalah *istitsnâ'*, *takwîn*, dan iman dengan taqlid.

Pertama istitsna', atau mengatakan keimanan dengan *insya'Allah*, seperti *"Saya beriman, insya'Allah",* menurut Maturidiyah tidak diperbolehkan, karena *istitsnâ* demikian mengisyaratkan sebuah keraguan, dan keimanan batal dengan adanya ragu-ragu. Menurut Asyâ'irah diperbolehkan, karena maksud *istisnâ'* demikian bukan didasari keraguan atas keimanan itu sendiri, melainkan keraguan tentang akhir hidupnya dengan iman atau tidak, *na'ûdzu billah min dzalik*. Atau, *istitsnâ'* demikian maksudnya keraguan dan spekulasi terhadap kesempurnaan imannya di hadapan Allah.

Kedua sifat *takwîn* (mewujudkan), menurut Asyâ'irah sifat *takwîn* (تكوين) tidak berbeda dengan sifat Qudrah. Sedangkan menurut Maturidiyah, *takwîn* adalah sifat tersendiri yang berkaitan dengan sifat Qudrah.

Dan *ketiga*, tentang imannya orang yang taqlid (ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya). Menurut Maturidi, imannya *muqallid* sah dan disebut *arif* serta masuk surga. Sedangkan Menurut Abu Alhasan Al'asy'ari, keimanan demikian tidak cukup. Sedangkan Asyâ'irah (pengikut Abu Alhasan Al'asy'ari) berbeda pendapat tentang imannya *muqallid*. Sebagian menyatakan mukmin tapi berdosa karena tidak mau berusaha mengetahu melalui dalil; sebagian mengatakan mukmin dan tidak berdosa kecuali jika mampu mengetahui dalil; dan sebagian yang lain mengatakan tidak dianggap mukmin sama sekali.

Dari tingkatan tauhid ini, selanjutnya ada empat strata keimanan. Ada iman *bittaqlîd*, iman *biddalîl*, iman *bil iyyân* dan iman *bil haqq*. Pertama, iman *bittaqlîd* adalah keimanan melalui ungkapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya secara langsung. Keimanan seperti ini keabsahannya masih diperselisihkan. Kedua, iman *biddalîl* (*ilmul yaqîn*) ialah keyakinan terhadap *aqâ'id* lima puluh dengan dalil dan alasan filosofinya. Dua strata keimanan ini masih terhalang (محجوب) dalam mengetahui Allah.

Ketiga, iman *bil iyyân (‘ainul yaqîn*) ialah keimanan yang senantiasa hatinya *muraqabah* kepada Allah. Artinya, dalam kondisi apapun, Allah tidak hilang dari kesadaran hatinya. Dan keempat, iman *bil haqq* (*haqqul yaqîn*) yaitu keimanan yang telah terlepas dari segala yang *hadîts* dan tenggelam dalam *fanâ' billah*. Mempelajari ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, hanya akan menghasilkan iman *biddalîl* (*ilmul yaqîn*), dan jika keimanan ini senantiasa disertai kesadaran hati dan penghayatan amaliah, maka naik ke strata iman *biliyyân* (‘*ainul yaqîn*) hingga puncaknya mencapai pada iman *bil haqq* (*haqqul yaqîn*).

Doktrin keimanan terhadap Allah, berarti tauhid atau meng-Esakan Allah dalam *af'âl*, *shifah* dan *dzât*. Dengan demikian, tauhid terbagi menjadi tiga: *Tauhid fi’li*, yaitu *fana’* dari seluruh perbuatan; *tauhid washfi*, yaitu *fana’* dari segala sifat; dan *tauhiddzati*, yaitu *fana’* dari segala yang *maujûd*. *Fana’ fi’li* disebut juga dengan *ilmul yaqîn*, *fana’ washfi* disebut juga dengan ‘*ainul yaqîn,* dan *fana’ dzati* juga disebut dengan *haqqul yaqîn*. Level tauhid demikian ini merupakan puncak prestasi dari penghayatan firman Allah: *Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.*(QS. Ashshafat: 96). Sebagian ulama *'arif billah* menyatakan: *Barang siapa dapat menyaksikan makhluk tidak memiliki perbuatan, maka ia telah beruntung, barang siapa menyaksikannya tidak hidup, maka itu diperbolehkan, dan barang siapa menyaksikannya praktis tiada, maka ia telah wushul.*

Konsep tauhid ASWAJA mengenai *af'âl* (perbuatan) Allah, berada di tengah antara paham Jabariyah di satu pihak dan Qadariyah dan Mu'tazilah di pihak lain. Ketika Jabariyah menyatakan paham peniadaan kebebasan dan kuasa manusia atas segala kehendak dan perbuatannya secara mutlak, sementara Qadariyah dan Mu’tazilah menyatakan makhluk memiliki kebebasan dan kuasa mutlak atas kehendak dan perbuatannya, maka lahirlah ASWAJA sebagai sekte moderat di antara dua paham ektrim tersebut. ASWAJA meyakini bahwa makhluk memiliki kebebasan kehendak (*ikhtiyar*) namun tidak memiliki kuasa (*qudrah*) perbuatan selain sebatas *kasb* (upaya). Dalam keyakinan ASWAJA, secara dhahir manusia adalah 'kuasa' (memiliki *qudrah*), namun secara batin, manusia adalah *majbûr* (tidak memiliki *qudrah* apapun).

Dalam doktrin keimanan ASWAJA, keimanan seseorang tidak dianggap hilang dan menjadi kafir, dengan melakukan kemaksiatan. Seseorang yang melakukan maksiat ataupun bid'ah, sementara hatinya masih teguh meyakini dua kalimat syahadat, maka ASWAJA tidak akan menvonis sebagai kafir, melainkan sebagai orang yang sesat (*dhalâl*) dan durhaka. ASWAJA sangat berhati-hati dan tidak gampang dalam sikap *takfîr* (mengkafirkan). Karena memvonis kafir seseorang yang sejatinya mukmin akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Rasulullah saw. bersabda: *Ketika seseorang berkata kepada saudaranya: ”wahai seorang yang kafir”, maka salah satunya benar-benar telah kafir.* (HR. Bukhari)

Keimanan seseorang akan hilang dan menjadi kafir (murtad) apabila menafikan wujud Allah, mengandung unsur syirik yang tidak dapat dita’wil, mengingkari kenabian, mengingkari hal-hal yang lumrah diketahui dalam agama (*ma'lûm bi adldlarûri*), dan mengingkari hal-hal *mutawâtir* atau *mujma’ ‘alaih* yang telah lumrah diketahui. Tindakan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir bisa meliputi ucapan, perbuatan atau keyakinan, yang mengandung unsur-unsur di atas ketika telah terbukti (*tahaqquq*) dan tidak bisa dita’wil.

2. Doktrin Keislaman

Doktrin keislaman, yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang fiqh yang meliputi hukum-hukum legal-formal (*ubudiyah, mu'amalah, munakahah, jinayah, siyasah* dan lain-lain), ASWAJA berpedoman pada salah satu dari empat madzhab fiqh: Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Ada alasan mendasar mengenai pembatasan ASWAJA hanya kepada empat madzhab ini. Di samping alasan otentisitas madzhab yang terpercaya melalui konsep-konsep madzhab yang terkodifikasi secara rapi dan sistematis, metodologi pola pikir dari empat madzhab ini relatif *tawâzun* (berimbang) dalam mensinergikan antara dalil *aql* (rasio-logis) dan dalil *naql* (teks-teks keagamaan). Empat madzhab ini yang dinilai paling moderat dibanding madzhab Dawud Adhdhahiri yang cenderung tekstualis dan Madzhab Mu'tazilah yang cenderung rasionalis.

Jalan tengah (*tawâsuth*) yang ditempuh ASWAJA di antara dua kutub ekstrim, yaitu antara rasioalis dengan tekstualis ini, karena jalan tengah atau moderat diyakini sebagai jalan paling selamat di antara yang selamat, jalan terbaik diantara yang baik, sebagaimana yang ditegaskan Nabi saw. dalam sabdanya: *Sebaik-baiknya perkara adalah tengahnya.*

Dengan prinsip inilah ASWAJA mengakui bahwa empat madzhab yang memadukan dalil Alqur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas (analogi), diakuinya mengandung kemungkinan lebih besar berada di jalur kebenaran dan keselamatan. Hal ini juga dapat berarti bahwa kebenaran yang diikuti dan diyakini oleh ASWAJA hanya bersifat kemungkinan dan bukan kemutlakan. Dalam arti, mungkin benar dan bukan mutlak benar. Empat dalil (*Alqur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas*) ini dirumuskan dari ayat: *Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)* (QS. Annisa': 59)

Dalam ayat ini secara implisit ditegaskan, bahwa ada empat dalil yang bisa dijadikan tendensi penggalian (*istinbâth*) hukum, yaitu Alqur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Perintah taat kepada Allah dan utusanNya, berarti perintah berpegang pada Alqur'an dan Hadits, perintah taat kepada *ulil amri* berarti

perintah berpegang pada Ijma' (konsensus) umat (*mujtahidîn*), dan perintah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan RasulNya berarti perintah berpegang pada Qiyas sepanjang tidak ada *nash* dan *ijma'*. Sebab, Qiyas hakikatnya mengembalikan sesuatu yang berbeda pada hukum Allah dan utusanNya.

Disamping itu, ASWAJA juga melegalkan taqlid, bahkan mewajibkannya bagi umat yang tidak memiliki kapasitas dan kualifikasi keilmuan yang memungkinkan melakukan ijtihad. Taqlid hanya haram bagi umat yang benar-benar memiliki kapasitas dan piranti ijtihad sebagaimana yang dikaji dalam kitab Ushul Fiqh. Dengan demikian, ASWAJA tidak pernah menyatakan pintu ijtihad tertutup. Pintu ijtihad selamanya terbuka, hanya saja umat Islam yang agaknya dewasa ini 'enggan' memasukinya. Mewajibkan ijtihad kepada umat yang tidak memiliki kapasitas ijtihad, sama saja memaksakan susuatu di luar batas kemampuannya. Maka kepada umat seperti inilah taqlid dipahami sebagai kewajiban oleh ASWAJA berdasarkan firman Allah: *Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.* (QS. Annahl: 43)

3. Doktrin Keihsanan

Tasawuf adalah sebuah manhaj spiritual yang bisa dilewati bukan melalui teori-teori ilmiah semata melainkan dengan mengintegrasikan antara ilmu dan amal, dengan jalan melepaskan (*takhallî*) baju kenistaan (*akhlaq madzmûmah*) dan mengenakan (*tahallî*) jubah keagungan (*akhlaq mahmûdah*), sehingga Allah hadir (*tajallî*) dalam setiap gerak-gerik dan perilakunya, dan inilah manifestasi konkret dari ihsan dalam sabda Rasulullah SAW: *Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatNya, dan jika engkau tidak melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.*

Doktrin keihsanan, yang selanjutnya termanifestasi ke dalam bidang tasawuf atau akhlaq ini, ASWAJA berpedoman pada konsep tasawuf *akhlaqi* atau *amali*, yang dirumuskan oleh Imam Aljunaid Albaghdadi dan Alghazali. Limitasi (pembatasan) hanya kepada kedua tokoh ini, tidak berarti manafikan tokoh-tokoh tasawuf falsafi dari kelompok ASWAJA, seperti Ibn Al'arabi, Alhallaj dan tokoh-tokoh sufi 'kontroversial' lainnya.

Dari uraian di atas, dapat dimengerti bahwa kelompok yang masuk kategori ASWAJA meliputi ahli tauhid (kalam), ahli fiqh (syariat), ahli tasawuf (akhlak) dan bahkan ahli hadits (*muhadditsîn*). Dari kelompok-kelompok ini masing-masing memiliki konsep metodologis dan tema kajian sendiri-sendiri yang tidak bisa diuraikan di makalah ringkas ini.

Metodologi Pemikiran (*Manhajul fikr*) Aswaja

Jika kita mencermati doktrin-doktrin paham ASWAJA, baik dalam akidah (iman), syariat (islam) ataupun akhlak (ihsan), maka bisa kita dapati sebuah metodologi pemikiran (*manhaj alfkr*) yang tengah dan moderat (*tawassuth*), berimbang atau harmoni (*tawâzun*), netral atau adil (*ta'âdul*), dan toleran (*tasâmuh*). Metodologi pemikiran ASWAJA senantiasa menghidari sikap-sikap *tatharruf* (ekstrim), baik ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Inilah yang menjadi esensi identitas untuk mencirikan paham ASWAJA dengan sekte-sekte Islam lainnya. Dan dari prinsip metodologi pemikiran seperti inilah ASWAJA membangun keimanan, pemikiran, sikap, perilaku dan gerakan.

1. *Tawasuth* (Moderat)

Tawassuth ialah sebuah sikap tengah atau moderat yang tidak cenderung ke kanan atau ke kiri.Dalam konteks berbangsa dan bernegara, pemikiran moderat ini sangat urgen menjadi semangat dalam mengakomodir beragam kepentingan dan perselisihan, lalu berikhtiar mencari solusi yang paling *ashlah* (terbaik). Sikap ini didasarkan pada firman Allah: *Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.* (QS. Albaqarah: 143).

2. *Tawâzun* (Berimbang)

Tawâzun ialah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil (pijakan hukum) atau pertimbangan-pertimbangan untuk mencetuskan sebuah keputusan dan kebijakan.Dalam konteks pemikiran dan amaliah keagamaan, prinsip *tawâzun* menghindari sikap ekstrim (*tatharruf*) yang serba kanan sehingga melahirkan fundamentalisme, dan menghindari sikap ekstrim yang serba kiri yang melahirkan liberalisme dalam pengamalan ajaran agama. Sikap *tawâzun* ini didasarkan pada firman Allah: *Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.* (QS. Alhadid: 25).

3. *Ta'âdul* (Netral dan Adil)

Ta'âdul ialah *sikap* adil dan netral dalam melihat, menimbang, menyikapi dan menyelesaikan segala permasalahan. Adil tidak selamanya berarti sama atau setara (*tamâtsul*). Adil adalah sikap proporsional berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing. Kalaupun keadilan menuntut adanya kesamaan atau kesetaraan, hal itu hanya berlaku ketika realitas individu benar-benar sama dan setara secara persis dalam segala sifat-sifatnya. Apabila dalam realitasnya terjadi *tafâdlul* (keunggulan), maka

keadilan menuntut perbedaan dan pengutamaan (*tafdlîl*). Penyetaraan antara dua hal yang jelas *tafâdlul*, adalah tindakan aniaya yangbertentangan dengan asas keadilan itu sendiri. Sikap *ta'âdul* ini berdasarkan firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*. (QS. Alma'idah: 8).

4. *Tasâmuh* (toleran)

Tasâmuh ialah sikap toleran yang bersedia menghargai terhadap segala kenyataan perbedaan dan keanekaragaman, baik dalam pemikiran, keyakinan, sosial kemasyarakatan, suku, bangsa, agama, tradisi-budaya dan lain sebagainya.Toleransi dalam konteks agama dan keyakinan bukan berarti kompromi akidah. Bukan berarti mengakui kebenaran keyakinan dan kepercayaan orang lain. Toleransi agama juga bukan berarti mengakui kesesatan dan kebatilan sebagai sesuatu yang haq dan benar.Yang salah dan sesat tetap harus diyakini sebagai kesalahan dan kesesatan. Dan yang haq dan benar harus tetap diyakini sebagai kebenaran yang haq. Dalam kaitannya dengan toleransi agama, Allah SWT berfirman: *Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku.* (QS. Alkafirun: 6). *Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.* (QS. Ali Imran: 85)

Toleransi dalam konteks tradisi-budaya bangsa, ialah sikap permisif yang bersedia menghargai tradisi dan budaya yang telah menjadi nilai normatif masyarakat. Dalam pandangan ASWAJA, tradisi-budaya yang secara substansial tidak bertentangan dengan syariat, maka Islam akan menerimanya bahkan mengakulturasikannya dengan nilai-nilai keislaman.

Dengan demikian, *tasâmuh* (toleransi), berati sebuah sikap untuk menciptakan keharmonisan kehidupan sebagai sesama umat manusia. Sebuah sikap untuk membangun kerukunan antar sesama makhluk Allah di muka bumi, dan untuk menciptakan peradaban manusia yang madani. Dari sikap *tasâmuh* inilah selanjutnya ASWAJA merumuskan konsep persaudaraan (*ukhuwwah*) universal. Meliputi *ukhuwwah islamiyyah* (persaudaan keislaman), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaaan) dan *ukhuwwah basyariyyah* atau *insâniyyah* (persaudaraan kemanusiaan). Persaudaraan universal untuk menciptakan keharmonisan kehidupan di muka bumi ini, merupakan implementasi dari firman Allah SWT: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.* (QS. Alhujurat; 13). *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".* (QS. Albaqarah: 30)

Prinsip Aswaja Sebagai *Manhaj*

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi Aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak dan bidang sosial-politik.

1. Bidang Aqidah

Dalam bidang Aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah *Ahlussunnah wal-Jama'ah* diantaranya yang pertama adalah aqidah *Uluhiyyah* (Ketuhanan), berkait dengan ikhwal eksistensi Allah SWT. Pada tiga abad pertama Hijriyah, terjadi banyak perdebatan mengenai Esksitensi sifat dan asma Allah SWT. Dimana terjadi diskursus terkait masalah apakah Asma Allah tergolong dzat atau bukan. Abu Hasan Al-Asy'ari (w. 324 H) secara filosofis berpendapat bahwa nama (*ism*) bukanlan yang dinamai *(musamma)*, Sifat bukanlah yang disifati (*mausuf*), sifat bukanlah *dzat*. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama (*Asma'*) Nya. Tetapi nama-nama itu bukanlah Allah dan bukan pula selain-Nya. Aswaja menekankan bahwa pilar utama ke-Imanan manusia adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap Muslim bahwa Allah-lah yang Menciptakan, Memelihara dan Mematikan kehidupan semesta alam. Ia Esa, tidak terbilang dan tidak memiliki sekutu.

Pilar yang kedua adalah *Nubuwwat*, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rosul sebagai utusannya. Sebuah wahyu yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan ummat manusia dalam menjalani kehidupan menuju jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam doktrin *Nubuwwat* ini, ummat manusia harus meyakini dengan sepebuhnya bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, yang membawa *risalah* (wahyu) untuk umat manusia. Dia adalah Rasul terakhir, yang harus diikuti oleh setiap manusia.

Pilar yang ketiga adalah *Al-Ma'ad*, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapat imbalan sesuai amal dan perbuatannya (*yaumul jaza'*). Dan mereka semua akan dihitung (*hisab*) seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka yang banyak beramal baik akan masuk surga dan mereka yang banyak beramal buruk akan masuk neraka.

2. Bidang Sosial Politik

Berbeda dengan golongan *Syi'ah* yang memiliki sebuah konsep negara dan mewajibkan berdirinya negara *(imamah)*, Ahlussunnah wal-jama'ah dan golongan sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban fakultatif *(fardhu kifayah)*. Pandangan *Syi'ah* tersebut juga berbeda dengan golongan *Khawarij* yang membolehkan komunitas berdiri tanpa *imamah* apabila dia telah mampu mengatur dirinya sendiri. Bagi *ahlussunnah wal jama'ah*, negara merupakan alat untuk mengayomi kehidupan manusia untuk menciptakan dan menjaga kemashlahatan bersama *(mashlahah musytarakah)*.

Ahlussunnah wal-Jama'ah tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas dasar teokrasi, aristokrasi (kerajaan) atau negara-modern/demokrasi, asal mampu memenuhi syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah otoritas (wewenang) pemimpin negara tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

a) Prinsip Syura (musyawarah)

Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan musyawarah adalah sebagai berikut: *"Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan- perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. (QS Al-Syura, 42: 36-39).*

b) Prinsip Al-'Adl *(Keadilan)*

Keadilan adalah salah satu Perintah yang paling banyak ditemukan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Berikut ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan keadilan. *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS An-Nisa, 4: 58)*

c) Prinsip Al-Hurriyyah *(kebebasan)*

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warganya. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi setiap manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam Syari'ah dikenal dengan *Al-Ushulul-Khams* (prinsip yang lima), yaitu:

- *Hifzhu al-Nafs* (menjaga jiwa); adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk menjamin kehidupan setiap warga negara; bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang dalam wilayahnya.
- *Hifzhu al-Din* (menjaga agama); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan setiap orang memeluk, meyakini dan menjalankan Agama dan Kepercayaannya. Negara tidak berhak memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negara.
- *Hifzhu al-Mal* (menjaga harta benda); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.
- *Hifzhu al-Nasl*; bahwa negara wajib memberikan jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mangunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu. *Hifzhu al-Nasl* berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di wilayah negaranya.
- *Hifzh al-'Irdh;* jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara.

  Al-Ushulul Khams identik dengan konsep Hak Azazi Manusia yang lebih dikenal dalam dunia modern – bahkan mungkin di kalangan *ahlussunnah wal-jama'ah*. Lima pokok atau prinsip di atas menjadi ukuran baku bagi legitimasi sebuah kepemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin di kelak kemudian hari.

d) **Prinsip Al-Musawah *(Kesetaraan Derajat)***

Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah SWT. Antara satu manusia dengan mausia lain, bangsa dengan bangsa yang lain tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. Dalam surat Al-Hujuraat disebutkan: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujuraat, 49: 13)*

Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan keniscayaan teologis yang Dikehendaki oleh Allah SWT. Demikian disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. *Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya* Allah *menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Al-Maidah; 5: 48)*

Dalam sebuah negara kedudukan warga negara adalah sama. Orang-orang yang menjabat di tubuh pemerintahan memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara. Mereka memiliki jabatan semata-mata adalah untuk mengayomi, melayani dan menjamin kemashlahatan bersama, dan tidak ada *privilege* (keistimewaan) khususnya di mata hukum. Negara justru harus mampu mewujudkan kesetaraan derajat antar manusia di dalam wilayahnya, yang biasanya terlanggar oleh perbedaan status sosial, kelas ekonomi dan jabatan politik.

Dengan prinsip-prinsip di atas, maka tidak ada doktrin Negara Islam, Formalisasi Syari'at Islam dan Khilafah Islamiyah bagi Ahlussunnah wal-Jama'ah. Sebagaimana pun tidak didapati perintah dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas untuk mendirikan salah satu di antara ketiganya. Islam hanya diharuskan untuk menjamin agar sebuah pemerintahan – baik negara maupun kerajaan – harus mampu memenuhi 4 (empat) kriteria di atas.

3. Bidang Istinbath Al-Hukm *(Pengambilan Hukum Syari'ah)*

Hampir seluruh kalangan Sunni menggunakan empat sumber hukum yaitu:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ijma'
4. Qiyas

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum *(istinbath al-hukm)* tidak dibantah oleh semua madzhab fiqh. Sebagai sumber hukum *naqli* posisinya tidak diragukan. Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Sementara As-Sunnah meliputi al-Hadist dan segala tindak dan perilaku Rasul SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh para Shabat dan Tabi'in. Penempatannya ialah setelah proses *istinbath al-hukm* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, atau digunakan sebagai komplemen (pelengkap) dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an. As-Sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan yang bervariasi. Ada yang terus-menerus *(mutawatir),* terkenal *(masyhur)* ataupun terisolir *(ahad).* Penentuan tingkat As-Sunnah tersebut dilakukan oleh *Ijma' Shahabah*.

Menurut Abu Hasan Ali Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Amidi, *Ijma'* adalah *Kesepakatan kelompok legislatif (ahl al-halli wa al-aqdi) dan ummat Muhammad pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus. Atau kesepakatan orang-orang mukallaf dari ummat Muhammada pada suatu masa terhadap suatu hukum dari suatu kasus.* Dalam Al-Qur'an dasar *Ijma'* terdapat dalam QS An-Nisa', 4: 115 *"Dan barang siapa menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."* Dan *"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.."* QS Al-Baqarah, 2: 143. *Qiyas*, sebagai sumber hukum Islam, merupakan salah satu hasil *ijtihad* para Ulama. *Qiyas* yaitu mempertemukan sesuatu yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *'illat* hukum. *Qiyas* sangat dianjurkan untuk digunakan oleh Imam Syafi'i.

4. Bidang Tasawuf

Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi menjelaskan "Tasawuf artinya Allah mematikan dirimu dari dirimu, dan menghidupkan dirimu dengan-Nya; Tasawuf adalah engkau berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apa pun."
Imam Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazali menjelaskan "Tasawuf adalah menyucikan hati dari apa saja selain Allah… Aku simpulkan bahwa kaum sufi adalah para pencari di Jalan Allah, dan perilaku mereka adalah

perilaku yang terbaik, jalan mereka adalah jalan yang terbaik, dan pola hidup mereka adalah pola hidup yang paling tersucikan. Mereka telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah dan menjadikannya sebagai saluran tempat mengalirnya sungai-sungai yang membawa ilmu-ilmu dari Allah." *"berada semata-mata bersama Allah SWT tanpa keterikatan apapun"* kata Imam Al-Junaid, lalu *"menyucikan hati dari apa saja selain Allah…. Mereka* (kaum Sufi) *telah membersihkan hati mereka dari berbagai hal selain Allah..,"* kata Imam Al-Ghazali. Seorang sufi adalah mereka yang mampu membersihkan hatinya dari keterikatan selain kepada-Nya.

Ketidakterikatan kepada apapun selain Allah SWT adalah proses batin dan perilaku yang harus dilatih bersama keterlibatan kita di dalam urusan sehari-hari yang bersifat duniawi. *Zuhud* harus dimaknai sebagai ikhtiar batin untuk melepaskan diri dari keterikatan selain kepada-Nya tanpa meninggalkan urusan duniawi. Mengapa? karena justru di tengah-tengah kenyataan duniawi posisi manusia sebagai Hamba dan fungsinya sebagai Khalifah harus diwujudkan. Banyak contoh sufi atau ahli tasawuf yang telah zuhud namun juga sukses dalam ukuran duniawi. Kita lihat saja Imam Al-Junaid adalah adalah pengusaha botol yang sukses, Al-Hallaj sukses sebagai pengusaha tenun, Umar Ibn Abd Aziz adalah seorang sufi yang sukses sebagai pemimpin negara, Abu Sa'id Al Kharraj sukses sebagai pengusaha konveksi, Abu Hasan al-Syadzily sukses sebagai petani, dan Fariduddin al-Atthar sukses sebagai pengusaha parfum. Mereka adalah sufi yang pada maqomnya tidak lagi terikat dengan urusan duniawi tanpa meninggalkan urusan duniawi.

Urusan duniawi yang mendasar bagi manusia adalah seperti mencari nafkah (pekerjaan), kemudian berbuntut pada urusan lain seperti politik. Dari urusan-urusan itu kita lantas bersinggungan dengan soal-soal ekonomi, politik-kekuasaan, hukum, persoalan sosial dan budaya. Dalam Tasawuf urusan-urusan tersebut tidak harus ditinggalkan untuk mencapai zuhud, justru kita mesti menekuni kenyataan duniawi secara total sementara hati/batin kita dilatih untuk tidak terikat dengan urusan-urusan itu. Di situlah zuhud kita maknai, yakni zuhud di dalam batin sementara aktivitas sehari-hari kita tetap diarahkan untuk mendarmabaktikan segenap potensi manusia bagi terwujudnya masyarakat yang baik.

Peradaban Barat versus Peradaban Islam

Berbicara strategi kebudayaan dan peradaban Islam, tesis Samuel P Huntington tentang *The Clash of Civilization* dapat dijadikan langkah awal dalam melihat posisi peradaban Islam di tengah konstalasi peradaban global. Huntington menyebutkan di dunia ini terdapat tiga poros peradaban besar: Barat, Cina, dan Islam. Menurutnya, kontradiksi-kontradiksi antar peradaban tersebut akan menciptakan konflik yang berakar dari benturan peradaban besar yakni hegemoni Barat, intoleransi Islam, dan arogansi Cina.

Meskipun tesis Huntington menyebutkan tiga poros peradaban yang menjadi mainstream di abad modern saat ini, namun ada dua kutub yang seringkali dipertentangkan secara diametral yaitu peradaban Barat versus peradaban Islam. Wacana benturan peradaban ini didasari fakta-fakta konkret tentang adanya perbedaan bangunan fundamental antara kedua peradaban tersebut.

Secara *ontologis*, peradaban Barat termanifestasi dalam bentuk hasil kreativitas manusia yang diarahkan pada pencarian kebutuhan material keduniaan yang sarat dengan nuansa hedonisme. Sedangkan peradaban Islam merupakan akumulasi kreativitas manusia yang diarahkan tidak hanya pada pencarian kebutuhan hidup material, tetapi sekaligus juga pencarian kepuasan ruhani (spiritual).

Secara *epistemologis*, peradaban Barat diperoleh melalui pendekatan-pendakatan akademis yang didasarkan pada rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Dengan begitu, perkembangan peradaban Barat berjalan linier dan sarat nuansa sekularisme. Sementara itu, peradaban Islam digali dari teks-teks suci yang dibumikan secara kontekstual. Dengan demikian, pendekatan saintifik dalam peradaban Islam selalu sarat nilai-nilai Islam. Secara aksiologis, peradaban Barat akan bernilai ketika mampu menjawab seluruh kebutuhan dan tantangan kehidupan manusia. Sementara itu, peradaban Islam tidak hanya bertujuan pragmatis temporal, tapi melampaui batas-batas kebutuhan lahiriah duniawiyah. Menurut Islam, sebuah peradaban akan bernilai bila mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, peradaban Islam juga terkait dengan persoalan eskatologis yang merupakan salah satu aspek penting dalam bangunan teologi Islam.

Islam Tradisional

Istilah ini biasanya dilekatkan ke bangunan keislaman komunitas tradisional, yang sering diasosiasikan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Istilah ini sendiri sesungguhnya bukan label yang diciptakan sendiri oleh mereka, namun dilekatkan oleh aktor di luar diri mereka, entah peneliti, atau organisasi keagamaan lain. Secara sederhana kata tradisional mengacu ke suatu adat kebiasaan. Tradisi bermakna kebiasaan yang terus menerus direproduksi dan dilembagakan oleh masyarakat. Tradisional adalah kata sifat dari sesuatu, sehingga tradisional berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi kebiasaan tadi. Dalam teori politik, faham yang memegang teguh tradisi disebut dengan tradisionalisme. Dalam dataran itu, tradisionalisme memiliki makna pejoratif sebab dikarakterisasikan sebagai komunitas yang konservatif.

Dalam konteks pemikiran keislaman, Islam tradisional, jika itu mengacu ke NU mendefinisikan dirinya sebagai pemikiran keislaman yang dari sisi pemikiran kalam mengacu ke kalam Asy'ari dan Al--Maturidi, dari sisi hukum Islam membatasi diri pada *nzazahibul ar-ba'ah,* dan dari sisi tasawuf mistik,

mengacu ke Al-Ghozali dan Al-Junaidi. Kalangan luar mendefinisikan sebagai corak ke-Islaman yang bercampur baur dengan budaya masyarakat setempat seperti Jawa. Ciri khas pemikiran tradisional adalah menundukkan realitas di bawah teks dan manifestasi sosialnya nampak dalam berbagai kegiatan ritual keagamaan seperti ziarah, *khaul,* dan lainnya. Namun teks yang dimaksud lebih mengacu, meski tidak secara mutlak, ke kitab-kitab yang sering disebut dengan *kutulrul mu'tabarah.* Kitab kitab Taqrib, Mu'in, l'anah, Wahhab, al-Mahalli, Mughnil Muhtaj, Bughyah, Asybah, Syarqowi, Jami'ul Jawami', Majmu', Jalalain, Ummul Barahin, Ihya', Hikam, untuk sekedar menyebut contoh, adalah referensi kuncinya.

Islam Modernis

Sama dengan istilah tradisional, Islam Modernis juga terkait erat dengan pengertian sosiologis dan epistemologis. Secara sosiologis, lahir dari kalangan masyarakat perkotaan, atau katakanlah kelas menengah ke atas. Secara historis, dapat dipandang sebagai antitesa terhadap praktek keberagamaan kaum tradisional yang dipandang menyimpang. Secara kelembagaan sering diasosiasikan dengan Muhammadiyah dan Persis. Istilah ini mengacu pada makna dasar kata modern itu sendiri. Yang sering diidentikkan dengan pembaharuan (modernisasi) alias rasionalisasi. Di Barat istilah Kiri dapat dilacak sejak *renaissance* yang mendeklarasikan kedaulatan manusia sebagai subjek yang otonom, menolak dominasi rezim kebenaran gereja, dan menumpukan akal sebagai basis paling otoritatif. Modernisasi di Barat berjalan seiring dengan industrialisasi atau perkembangan kapitalisme.

Qalam konteks keislaman, makna modern setidak-tidaknya mengacu ke dua hal. *Pertama,* pada teknologisasi infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas termasuk sistem pembelajaran model kelas. *Kedua,* berbeda dengan *renaissance* yang meneraikan agama, maka di sini yang dieraikan adalah epistemologi model kitab kuning. Sebagai gantinya, langsung kembali ke teks otentik Islam: Al Qur' an dan Hadits. Menolak kewajiban bermazhab, dan lumayan anti terhadap berbagai budaya lokal secara antropologis-sosiologis tidak bertolak dari teks.

Rethinking Islam

JND Anderson dan John L Esposito, dua sarjana Barat yang menggeluti isu pembaruan pemikiran Islam di dunia Muslim, berkesimpulan bahwa hukum Islam merupakan wilayah paling stagnan dalam Islam. Menurut keduanya, hukum Islam mengalami kejumudan, karena metode yang umumnya dikembangkan para pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih betumpu pada pendekatan ad hoc dan terpilah-pilah dengan menggunakan prinsip *takhayyur* dan *talfiq*. *Takhayyur* ialah suatu metode yurisprudensi yang karena situasi spesifik seseorang dibolehkan meninggalkan mazhab yang dianutnya dan memilih mengikuti mazhab lain. Sementara, *talfiq* ialah suatu metode mengkombinasikan berbagai mazhab untuk membentuk suatu peraturan tertentu. Pengamatan Anderson dan Esposito dituangkan masing-masing dalam bukunya Law Reform in the Muslim World (1976) dan Women in Muslim Family Law (1982). Kita tidak bermaksud mendiskusikan keterbatasan produk fikih akibat penggunaan kedua prinsip tadi, melainkan hendak mencoba menguji keabsahan tesis Anderson dan Esposito. Benarkah hukum Islam sama sekali stagnan? Apa saja yang dilakukan para pembaru hingga abad ke-21 ini? Apakah tidak ada yang genuine dalam reformasi metodologis yang mereka lakukan?

Stagnasi pemikiran Islam?

Para penulis sejarah fikih (tarikh al-tasyri') umumnya sepakat, setelah abad ke-9 dan ke-10 Masehi atau abad-3 dan ke-4 Hijriah, hukum Islam mengalami kejumudan tekstual atau lebih dikenal dengan istilah taklid (taqlid). Selama periode taklid ini tidak ada perkembangan berarti dalam epistimologi hukum Islam, kecuali mengikuti produk ijtihad yang telah dihasilkan ulama-ulama terdahulu. Dalam bidang ushul fiqh, metodologi perumusan hukum yang diarsiteki Imam Syafi'i begitu dominan, sehingga tidak ada yang berhasil melampaui batas-batas epistimolgis yang telah ditetapkan Syafi'i. Bahkan, kematangan di bidang ini sempat menggiring ulama untuk mendeklarasikan "pintu ijtihad" telah tertutup.

Tertutupnya pintu ijtihad ini dianggap bencana oleh ulama-ulama yang berorientasi pembaruan. Jamaluddin Afghani, misalnya, menyebut tertutupnya pintu ijtihad sebagai biang keladi stagnasi intelektual dalam Islam. Abduh juga menolak doktrin taklid, sembari mempertanyakan kenapa generasi-generasi terdahulu dianggap lebih berkualifikasi untuk melakukan ijtihad, sementara ilmu pengetahuan lebih banyak tersedia sekarang. Rasyid Rida juga menuduh praktik taklid telah menghancurkan agama Islam dan dunia Muslim. Penegasan serupa disuarakan ulama Damaskus Jamaluddin al-Qasimi dan mantan rektor Al-Azhar Mustafa al-Maraghi. Bahkan, Mahmud Syaltut, ulama berpengaruh yang dibawah kepemimpinannya Al-Azhar diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional Mesir, melihat taklid sebagai pemicu sektarianisme. Pendek kata, taklid kerap dihubungkan dengan kebuntuan intelektual, kemunduran, dan perpecahan.

Penolakan taklid ini berarti juga penolakan atas otoritas ulama tradisional sebagai satu-satu yang memiliki kualifikasi menafsirkan teks keagamaan. Karena itu, mereka menyerukan agar kaum Muslim kembali pada al-Quran dan hadis, dan bukannya terpaku pada hasil ijtihad ulama terdahulu. Semangat back to Quran ini sebenarnya telah disuarakan ulama sebelumnya, terutama sejak Ibn Taymiyah. Namun, semangat back to Quran belakang lebih bermuatan dekonstruksi terhadap segala bentuk pemaknaan

tunggal dan serba mutlak, untuk kemudian memasukkan unsur rasionalitas dengan menyerap semangat kekinian. Keinginan untuk merekonsiliasi akal dengan wahyu yang menjadi tren kaum pembaru abad ke-19 dan ke-20 berujung pada pembatasan penggunaan teks keagamaan dalam merumuskan hukum. *Pertama*, memetakan secara sempit sumber-sumber skriptural yang bisa diterima. Abduh, misalnya, menegaskan bahwa hanya hadis mutawir (ditransmisikan secara luas) yang diterima sebagai sumber hukum. Abduh berkesimpulan, penggunaan banyak hadis yang tidak jelas asal-usulnya telah menyumbat peran akal. Hadis ahad bisa digunakan sepanjang didukung bukti lain, dan itupun tidak boleh bertentangan dengan akal.

Kedua, cara lain untuk membatasi penggunaan teks keagamaan adalah mengaitkan berbagai ketentuan dalam al-Quran dan hadis dengan konteks historis tertentu. Abduh, sekali lagi kita jadikan contoh, menggunakan prinsip ini dalam kasus pindah agama (riddah). Pandangan yang dianut banyak ahli hukum, berdasarkan hadis Nabi, bahwa orang yang pindah agama dihukum bunuh. Abduh mengkontekstualisasikan doktrin ini dengan menegaskan bahwa hadis yang menuntut eksekusi bagi orang yang pindah agama diumumkan pada waktu perang. Dalam situasi perang, pindah agama berarti desersi (membelot) yang dalam sistem militer manapun dihukum berat. Dalam situasi di mana orang yang pindah agama tidak menyerang Islam, hukum mati itu tidak lagi berlaku.

Beberapa ulama mutakhir, terutama pemikir Suriah Muhammad Shahrur, melangkah lebih maju. Dalam bukunya al-Kitab wal Qur'an, Shahrur memosisikan wahyu sebagai suatu konteks. Artinya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berupaya menafsirkan al-Quran dalam konteks zamannya, dan kita seyogiayanya menafsirkannya dalam konteks zaman kita. Mengikuti Nabi bukan dengan memegang teguh ketentuannya, melainkan dengan mengikuti bagaimana beliau mempertimbangkan semangat zamannya dalam memahami wahyu. Lebih dari itu, Shahrur percaya bahwa kemajuan ilmu pengetahuan memungkinkan setiap generasi berada dalam situasi yang lebih baik dalam memahami al-Quran daripada para pendahulunya.

Lompatan metodologis

Sampai pada poin ini saya menyangsikan kesimpulan Anderson dan Esposito. Sejauh yang bisa diamati, pembaruan pemikiran Islam dan proses rethinking Islam tidak pernah berhenti. Jika kita cermat mengamati, kita akan menyaksikan berbagai lompatan metodologis dahsyat yang telah dicapai para ulama pembaru. Alih-alih larut dalam stagnasi intelektual, para ulama pembaru terbukti berhasil melakukan pembongkaran epistimologis yang sekian lama dianggap telah mapan. Untuk membuktikan tesis ini, kita hendak mendiskusikan dua konsep yang nyaris tak tersentuh, yakni ijma' (kesepakatan) dan qiyas (analogi).

Umumnya ulama sepakat, ijma' dan qiyas merupakan dua sumber hukum Islam setelah al-Quran dan hadis. Pemaknaan ijma' sebagai suatu kesepakatan berkembang dari masa ke masa. Awalnya, ijma' dipahami sebagai kesepakatan seluruh komunitas Muslim, lalu dipersempit kesepakatan ulama, bahkan kini Rasyid Rida mencukupkan sebagai suara mayoritas. Artinya, ijma' bisa dipahami sebagai prinsip 'mayoritarian' dalam demokrasi. Dalam konteks kekinian, Syaltut merujuk ijma' sebagai keputusan Dewan Legislatif.

Dalam konteks ini, kendati ijma' bersifat mengikat (binding), tapi ia dapat direvisi dan bahkan diganti dengan keputusan berikutnya sesuai prinsip kemaslahatan yang terus berubah. Syaltut menyoal pendapat ulama terdahulu bahwa ijma' tidak bisa diganti dengan ijma' lain. Baginya, logika ini rapuh. Sebab, ijma' merupakan produk pemikiran, kenapa tidak bisa diganti dengan produk pemikiran lain yang lebih menyentuh kemaslahatan masa kini?

Wacana kemaslahatan (mashlahah) ini belakangan mendapat perhatian besar para ulama pembaru. Jika setiap ketentuan disyariatkan demi kemaslahatan manusia, seharusnya konteks kemaslahatan ini menjadi tolok ukur segala produk fikih. Banyak ulama mengusulkan agar konsep qiyas diganti dengan mashlahah, karena qiyas menjadi sia-sia belaka apabila kita menetapkan mashlahah sebagai kriteria dalam merumuskan hukum. Sebagai contoh, dalam qiyas, seorang ahli hukum mencari 'illah (sandaran) atau ratio legis suatu hukum. Misalnya, ratio legis diharamkannya khamr karena "memabukkan." Maka, setiap minuman beralkohol juga haram karena "memabukkan." Dengan menggunakan teori mashlahah, seorang ahli berada satu langkah lebih maju. Ia tidak perlu mengidentifikasi berbagai kemungkinan ratio legis, tapi cukup menetapkan bahwa melindungi akal dari segala hal yang merusak adalah mashlahah, karenanya segala yang merusak akal itu haram.

Jadi, rumusnya bukan "jika .... maka" (jika ratio legis-nya benar, maka ketetapan hukumnya benar), melainkan "karena .... maka" (karena mashlahah adalah tujuan hukum, maka segala ketentuan yang mengandung kemaslahatan sesuai tujuan hukum). Konsep mashlahah ini memberi ruang bagi perubahan dan penggantian hukum atas dasar bahwa hukum tersebut tidak lagi memenuhi tujuannya. Misalnya, masalah pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana pernah diwacanakan Prof Munawir Sjadzali. Jadi, proses rethinking Islam sebenarnya masih berlangsung dan perlu terus dikembangkan. Sejauh ini, untuk menghindari pemahaman keagamaan yang literalis dan rigid, para ulama mengajukan dua strategi penafsiran. *Pertama*, mengkontekstualisasikan teks untuk menemukan -- pinjam istilah Nasr Abu Zayd -- makna alegorisnya. *Kedua*, menggiring rasionalitas hukum dari penalaran deduktif menuju penalaran induktif. Tugas generasi kita dan generasi mendatang adalah menguji dua strategi ini dan coba mengajukan kerangka penalaran yang lebih solid.

Tantangan Global

Sepintas, peradaban Barat memang lebih maju dari peradaban Islam, antara lain dibuktikan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan stabilitas kehidupan sosial-politik yang dicapai Barat. Dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat fisik material, fenomena kebangkitan peradaban Barat merupakan keniscayaan. Namun bila dikaji lebih dalam, kemajuan sains dan teknologi yang menjadi basis fundamental bangunan peradaban Barat justru telah menelantarkan dunia di ambang pintu krisis global yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Menurut Fritjof Capra (1975), krisis global yang dihadapi umat manusia di planet ini telah menyentuh hampir seluruh dimensi kehidupan seperti bidang kesehatan, teknologi, ekonomi, politik, ekologi, dan hubungan sosial. Krisis juga melanda dimensi-dimensi intelektual, moral, dan spiritual.

Krisis-krisis global yang disebutkan di atas dapat dilacak secara langsung pada cara pandang dunia (world view) Barat. Pandangan dunia yang diterapkan selama ini adalah pandangan dunia mekanistik linier ala Cartesian dan Newtonian. Paradigma Cartesian-Newtonian ini, di satu sisi berhasil mengembangkan sains dan teknologi yang membantu kehidupan manusia, namun di sisi lain mereduksi kompleksitas dan kekayaan kehidupan manusia itu sendiri. Paradigma Cartesian-Newtonian memperlakukan manusia dan sistem sosial seperti mesin besar yang diatur menurut hukum-hukum obyektif, mekanis, deterministik, linier, dan materialistik. Cara pandang ini menempatkan materi sebagai dasar dari semua bentuk eksistensi, dan menganggap alam kosmos sebagai suatu kumpulan obyek-obyek terpisah yang terkait menjadi sebuah mesin raksasa. Di antara tokoh-tokoh revolusi ilmiah yang turut membentuk cara pandang seperti itu adalah Francis Bacon, Copernicus, Galileo, Descartes, dan Newton.

Revolusi ilmiah itu telah membawa para saintis pada satu kesimpulan bahwa kehidupan dunia tidak lagi begitu menarik untuk diperbincangkan. Betapa tidak, hampir seluruh realitas telah dapat diterangkan secara jelas oleh penemuan-penemuan sains. Terlebih jika dunia dilihat dengan formula matematis gaya Albert Einstein atau Stephen Hawking, maka bisa jadi yang kita jumpai adalah sebuah dunia yang sudah selesai. Artinya, manusia telah merasa berhasil menyadap the mind of God, sehingga Tuhan memang telah tiada. Yang ada hanyalah konstruksi dan persepsi manusia sebagaimana dinyatakan oleh Nietzsche atau Karl Marx. Dengan demikian, masuk akal jika peradaban Barat mencapai puncaknya pada saat mereka meninggalkan (independen dari) Tuhan. Karena mereka menyandarkan nasibnya semata pada kekuatan sendiri dan mengabaikan aspek-aspek spiritualitas, maka bisa dipahami jika mereka kehilangan orientasi (disoriented).

Refleksi Kritis

Kerapuhan fondasi peradaban Barat sebagaimana disebutkan di atas merupakan peluang besar bagi umat Islam untuk membangun peradaban alternatif yang berdimensi moral dan spiritual. Agenda utama yang harus dikedepankan antara lain membangun kesadaran eksistensial manusia yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Keyakinan terhadap kehadiran Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan akan memberikan kekuatan sekaligus kedamaian dalam hati setiap manusia yang menjadi aktor pendukung setiap peradaban. Belajar dari realitas objektif sejarah Islam pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan reformasi peradaban secara total, starting point yang tepat adalah melalui reformasi ideologi, teologi, dan kultural. Penguasaan dan pengembangan sains dilandasi semangat iqra (scientific discovery) sesuai tuntunan Alquran. Atas dasar itulah, umat Islam di masa lalu mampu mewujudkan peradaban tinggi.

Bertolak dari realitas objektif di atas, untuk mewujudkan peradaban Islam masa depan diperlukan upaya-upaya rekonstruktif dengan mempertimbangkan elemen-elemen: (1) semangat tajdid dari semua pihak secara menyeluruh, (2) pembumian wahyu melalui kontekstualisasi ajaran Islam, (3) political will dari pihak penguasa, (4) eksplorasi, penguasaan, dan pengembangan sains dan teknologi, serta (5) membangun moralitas umat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam otentik. Dengan kekuatan dan potensi umat yang begitu besar, tidak tertutup kemungkinan bahwa fajar kebangkitan peradaban Islam akan bersinar dari negeri Indonesia. *Wallahu a’lam bishawab.*

NILAI DASAR PERGERAKAN PMII

Terminologi NDP

Nilai Dasar Pergerakan (NDP) adalah nilai-nilai yang secara mendasar merupakan sublimasi nilai-nilai ke-Islaman, seperti kemerdekaan *(al-hurriyyah),* persamaan *(al-musawa),* keadilan *('adalah),* toleran *(tasamuh),* damai (*al-shuth*), dan ke Indonesiaan (pluralisme suku, agama, ras, pulau, persilangan budaya) dengan kerangka paham ahlussunah wal jama' ah yang menjadi acuan dasar pembuatan aturan dan kerangka pergerakan organisasi. NDP merupakan pemberi keyakinan dan pembenar mutlak, Islam mendasari dan memberi spirit serta elan vital pergerakan yang meliputi iman (aspek aqidah), Islam (aspek syariah), ihsan (aspek etika, akhlaq dan tasawuf) dalam rangka memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akherat. Dalam upaya memahami, menghayati dan mengamalkan Islam tersebut, PMII menjadikan ahlussunah wal jama'ah sebagai *manhaj al-fikr* sekaligus *manhaj al-taghayyur al-ijtima'i* (perubahan sosial) untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi bentuk-bentuk pemahaman dan aktualisasi ajaran-ajaran agama yang toleran, humanis, anti-kekerasan, dan kritis transformatif.

Fungsi NDP

Pertama, **Kerangka Refleksi**. Sebagai kerangka refleksi NDP bergerak dalam pertarungan ide-ide, paradigma, nilai-nilai yang akan memperkuat level kebenaran-kebenaran ideal. Subtansi ideal tersebut menjadi suatu yang mengikat, absolut, total, universal berlaku menembus ruang dan waktu (muhlamul qat'i) kerangka refleksi ini menjadi moralitas gerakan sekaligus sebagai tujuan absolut dalam mencapai nilai-nilai kebenaran, kemerdekaan, kemanusiaan.

Kedua, **Kerangka Aksi**. Sebagai kerangka aksi NDP bergerak dalam pertarungan aksi, kerja-kerja nyata, aktualisasi diri, analisis sosial untuk mencapai kebenaran faktual. Kebenaran sosial ini senantiasa bersentuhan dengan pengalaman historis, ruang dan waktu yang berbeda dan berubah. Kerangka aksi ini memungkinkan warga pergerakan menguji, memperkuat dan bahkan memperbaharui rumusan kebenaran historisitas atau dinamika sosial yang senantiasa berubah.

Ketiga, **Kerangka Ideologis**. Kerangka ideologis menjadi rumusan yang mampu memberikan proses ideologisasi disetiap kader, sewkaligus memberikan dialektika antara konsep dan realita yang mendorong proses progressif dalam perubahan sosial. Kerangka ideologis juga menjadi landasan pola pikir dan tindakan dalam mengawal perubahan sosial yang memberikan tempat pada demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedudukan NDP

Pertama, NDP menjadi sumber kekuatan ideal-moral dari aktivitas pergerakan. Kedua, NDP menjadi pusat argumentasi dan pengikat kebenaran dati kebebasan berfikir, berucap, bertindak dalam aktivitas pergerakan.

Rumusan NDP

Tauhid

Mengesakan Allah SWT merupakan nilai paling asasi dalam sejarah agama samawi. Didalamnya terkandung hakikat kebenaran manusia. (Al-Ikhlas, AI-Mukmin: 25, AI-Baqarah: 130-131). Subtansi tauhid;

(1) Allah adalah Esa dalam Dzat, sifat dan perbuatan-Nya,
(2) Tauhid merupakan keyakinan atas sesuatu yang lebih tinggi dari alam semesta, serta merupakan manifestasi dati kesadaran dan keyakian kepada hal yang ghaib (AI-Baqarah:3, Muhammad:14-15, AI-Alaq: 4, A l-Isra: 7),
(3) Tauhid merupakan titik puncak keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan dan perwujudan nyata lewat tindakan,
(4) Dalam memaharni an mewujudkannya pergerakan telah memilih *ahlussunah wal jama' ah* sebagai metode pemahaman dan keyakinan itu.

Hubungan Manusia dengan Allah.

Allah SWT adalah pencipta segala sesuatu. Dia mencipta manusia sebaik-baik kejadian dan menempatkan pada kedudukan yang mulia. Kemuliaan manusia antara lain terletak pada kemampuan berkreasi, berfikir dan memiliki kesadaran moral. Potensi itulah yang menempatkan posisi manusia sebagai khalifah & hamba Allah (AI-Anam:165, Yunus: 14.)

Hubungan Manusia dengan Manusia.

Allah meniupkan ruh dasar pada materi manusia. Tidak ada yang lebih utama antara yang satu dengan yang lainnya kecuali ketaqwaannya (AI-Hujurat:13). Pengembangan berbagai aspek budaya dan tradisi dalam kehidupan manusia dilaksanakan sesuai dengan nilai dari semangat yang dijiwai oleh sikap kritis dalam kerangka religiusitas. Hubungan antara muslim dan non-muslim dilakukan guna membina kehidupan manusia tanpa mengorbankan keyakinan terhadap kebenaran universalitas Islam.

Hubungan Manusia dengan Alam.

Alam semesta adalah ciptaan Allah. Allah menunjukkan tanda-tanda keberadaan, sifat dan perbuatan Allah. Berarti juga tauhid meliputi hubungan manusia dengan alam (As-Syura: 20) Perlakukan manusia dengan alam dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan dunia dan akherat. Jadi manusia harus mentransendentasikan segala aspek kehidupan manusia.

NDP yang digunakan PMII dipergunakan sebagai landasan teologis, normatif dan etis dalam pola pikir dan perilaku. Dati dasar-dasar pergerakan tersebut muaranya adalah untuk mewujudkan pribadi muslim yang berakhlaq dan berbudi luhur, dan memiliki konstruksi berfikir kritis dan progressif.

NDP: Landasan Gerak Berbasis Teologis

NDP adalah sebuah kerangka gerak, ikatan nilai atau landasan pijak. Didalam PMII maka kita akan kenal dengan istilah NDP (Nilai Dasar Pergerakan). NDP adalah sebuah landasan fundamental bagi kader PMII dalam segala aktivitas baik-vertical maupun horizontal. NDP sesungguhnya kita atau PMII akan mencoba berbicara tentang posisi dan relasi yang terkait dengan apa yang akan kita gerakkan. PMII berusaha menggali sumber nilai dan potensi insan warga pergerakan untuk kemudian dimodifikasi didalam

tatanan nilai baku yang kemudian menjadi citra diri yang diberi nama Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII. Hal ini dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti motifasl, wawasan pergerakan dan sekaligus memberikan dasar pembenar terhadap apa saja yang akan mesti dilakukan untuk mencapai cita-cita perjuangan.

Insaf dan sadar bahwa semua ini adalah keharusan bagi setiap kader PMII untuk memahami dan menginternalisasikan nilai dasar PMII tersebut, baik secara personal maupun secara bersama-sama, sehingga kader PMII diharapkan akan paham betul tentang posisi dan relasi tersebut. Posisi dalam artia, di diri kita sebagai manusia ada peran yang harus kita lakukan dalam satu waktu sebagai sebuah konsekuensi logis akan adanya kita. Peran yang dimaksud adalah diri kita sebagai hamba, diri kita sebagai makhluq, dan diri kita sebagai manusia.

Ketiga posisi di atas merupakan sebuah kesatuan yang koheren dan saling menyatu. Sehingga Relasi yang terbentuk adalah relasi yang saling topang dan saling menyempurnakan. Akibat dari posisi tersebut maka akan muncul relasi yang sering diistilahkan sebagai *hablun mina Allah, hablun mina an-naas dan mu'amalah.*

Dalam ihtiar untuk mewujudkan perintah Tuhan Yang Maha Kuasa maka ketiga relasi di atas harus selaiu dan selalu berangkat dari sebuah keyakinan IMAN, prinsip ISLAM, dan menuju IHSAN. Inilah yang nantinya akan menjadi acuan dasar bagi setiap warga pergerakan dalam melakukan segala ihtiar dalam segala posisi.

Pemaknaan dan Arti NDP

Secara esensial NDP PMII adalah suatu sublimasi nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an dengan kerangkan pemahaman Ahfussunnah waf Jama'ah yang terjiwai oleh berbagai aturan, memberi arah, mendorong serta menggerakkan apa yang dilakoni PMII sebagai sumber keyakinan dan pembenar mutlak. Islam mendasarl dan menginspirasi NDP yang meliputi cakupan Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq dalam upaya memperolah kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dalam kerangka inilah PMII menjadikan *Ahussunah wal Jama'ah* sebagai *Manhaj af-fikr* (methodologi mencari) untuk mendekonstruksi bentuk-bentuk pemahaman keagamaan yang benar.

Fungsi, Peran dan Kedudukan NDP

Secara garis besarnya Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII akan berfungsi dan berperan sebagai :

Landasan Pijak PMII

Landasan pijak dalam artian bahwa NDP diperankan sebagai landasan pijak bagi setiap gerak dan langkah serta kebijakan yang dilakukan oleh PMII.

Landasan Berfikir PMII

Bahwa NDP menjadi landasan pendapat yang dikemukakan terhadap persoalan-persoalan yang akan dan sedang dihadapi oleh PMII.

Sumber Motifasi PMII

NDP juga seyogyanya harus menjadi pendorong bagi anggota PMII untuk berbuat dan bergerak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dan terkandung didalamnya.

Sedangkan kedudukan NDP dalam PMII bisa kita letakkan pada, *Pertama*; NDP haruslah menjadi rumusan nilai-nilai yang dimuat dan menjadi aspek ideal dal.am berbagai aturan dan kegiatan PMII. *Kedua*; NDP harus menjadi pemicu dan pegangan bagi dasar pembenar dalam berfikir, bersikap dan berprilaku.

Rumusan dan Isi NDP

Selain itu kita juga harus paham betul tentang isi ataupun rumusan atas Nilai Dasar Pergerakan kita yang dapat kita gambarkan seperti berikut :

I. Ketuhanan atau Tauhid.

Pengertian ketuhanan adalah bagaimana kita memaknai ketauhidan kita alas Tuhan. Men-Esa-kan Allah SWT, merupakan nilai paling asasi dalam sejarah agama samawi. Hal ini sesungguhnya mengandung makna, *Pertama*; Allah adalah Esa dalam segala totalitas, dzat, sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya. Allah SWT adalah dzat, yang fungsional, dalam artian menciptakan, memberi petunjuk, memerintah dan memelihara alam semesta. Allah SWT juga menanamkan pengetahuan, membimbing, menolong manusia. *Kedua*; pada saat keyakinan yang pertama kita wujudkan maka keyakinan terhadap sesuatu yang lebih tinggi seperti keyakinan terhadap alam semesta, serta kesadaran' keyakinan kepada yang ghaib merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan. *Ketiga*; dari kedua hal tersebut, maka tauhid merupakan titik puncak. Mendasari, memandu dan menjadi sasaran keimanan yang mencangkup keyakinan dalam hati nilai dari ketahuhidan tersebut harus termanifestasikan dan tersosialisasikan ke sekelilingnya lewat pemahaman dan penginternalisasian ahlussunah wal jama'ah sebagai tahapan yang terakhir.

II. Hubungan Manusia dengan Tuhan-Nya (Allah SWT)

Pemaknaan hubungan manusia dengan Allah SWT haruslah dimaknai dengan kaffah dan konferehenshif, artinya bahwa Allah SWT adalah sang pencipta yang maha segalanya, termasuk telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya *(ahsanut taqwin)* dan telah menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia. Kedudukan tersebut ditandai dengan pemberian daya fikir, kemampuan berkreasi untuk dilakukan memfungsikan alam sebagai modal dasar sekaligus perangkat mewujudkan kemaslahatan. Kesemua aktifitas yang coba tidak pernah terlepas dari sebuah essensi melarutkan dan mengejawantahkan nilai-nilai ke-tauhid-an dengan berpijak wahyu dan seluruh ciptaan-Nya.

Teologi sebagai Dasar Filosofi Pergerakan

Internalisasi dari nilai-nilai teologis tersebut menumbuhkan filosofi gerak PMII yang disandarkan pada dua nilai yang sangaf fundamental yakni liberasi dan independensi. Liberasi merupakan kepercayaan dan komitmen kepada pentinya (dengan epistemologi gerak-paradigma) untuk mencapai kebebasan tiap-tiap individu. Praktek dan pemikian liberasi mempunyai dua tema pokok. *Pertama*; tidak menyetujui adanya otoritas penuh yang melingkupi otoritas masyarakat. *Kedua*; menentang segala bentuk ekspansi dan hegemoni negara (kekuasaan) terhadap keinginan keinginan bebas individu dan masyarakat dalam berkreasi, berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan lain sebagainya.

Liberasi didasarkan oleh adanya kemampuan (*syakilah*) dan kekuatan (*wus'a*) yang ada dalam setiap individu. Dengan bahasa lain setiap individu mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengembangkan dirinya. tanpa harus terkungkung oleh pemikiran, kultur dan struktur yang ada disekitarnya, sehingga pada akhirnya akan melahirkan apa yang namnya keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al- musawah*), dan demokrasi (*as-syura*).

Kebebasan dalam arti yang umum mempuntai dua makna, yakni kebebasan dari (*fredom from*) dan kebebasan untuk (*fredom for*). Kebebasan dari merupakan kebebasan dari belenggu alam dan manusia. Sedangkan kebebasan untuk bermakna bebas untuk berbuat sesuatu yang pada dasarnya sebagai fungsi untuk mencapai tingkat kesejahteraan seluruh manusiadi muka bumi. Dalam kaitan ini makasesungguhnya capaian yang harus memuat pada *Usulul al-Khamsah* (lima prinsip dasar) yang meliputi; *Hifdz al-nasl wa al-irdh, hifdzul al-'aql, hifdzul ai-nasi,* dan *hifdz al-mal.*[]

Referensi

Abbas, Sirojuddin, *I'tiqad Ahlussunah Wal Jama'ah* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1992).
Abdurrahman, Moeslim, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)
Amin, Masyhur, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: ISF, 2004)
Al-Jabiri, M. Abed, *Al-Aql Al-Siyasi Al-Arabi: Muhadidah wa Tajalliyatuh (Nalar Politik Arab: Faktor-faktor Penentu & Manifestasinya),* Beirut, Markaz Dirasah Al-Wihdah Al-Arabiyah, 1995.
_______, *Post Tradsionalisme Islam,* Yogyakarta, LKiS, 2000.
Abbas, Zainal Abidin, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, (Medan: Firma lslamiyah, 1957 M/ 1376 H)
Assmin, Yudian Wahyu, *Aliran dan Teori Filsafat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
Aziz, Aceng Abdul Dy dkk, *Islam Ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia; Sejahtera, Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama,* Pustaka Ma'arif NU, 2006.
Nasir, Sahilun, *Pemikiran Kalam* (Jakarta: Rajawali 2010).
Blekker, *Pertemuan Agama-agama Dunia* (Bandung: Sumur Bandung, 1985).
Bakry Hasbullah, *Disekitar Skolastik Islam* (Jakarta: Tintamas, 1984)
Badri, Yatim, *Sejarah peradaban islam*, 2001, Jakarta: Raja Grafindo Jaya.
Barton, Greg (ed.), *Radikalisme Tradisional*, Yogyakarta, LKiS, 1999.
Baihaqi, Imam, (ed.), *Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan & Reinterpretasi,* Yogyakarta, LKiS, Cet.II., 2000.
Dahlan Abd. Rahman dan Ahmad Qarib, *Aliran Politik dan 'Aqidah dalam Islam* (Jakarta: LPH, 1996)
Dhofier, Zamakhsyari, *Tradi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994)
Esack, Farid, *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme,* Bandung, Mizan, 2000.
Engineer, Asghar Ali, *Islam and Liberation Theology*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.
Feillard, Andre, *NU vis-à-vis Negara*, Yogyakarta, LKiS, 1999.
Hanafi, A., *Pengantar Teologi Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru Jakarta, 2003)
Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Mesir: Maktabah Tijdriyah, t.t.)
Karim, Abdul, *Reformulasi Aswaja Sebagai Manhajul-Fikr & Manhajul-Amal,* Aswaja Center Pati, 2012.
Lowy, Michael, *Teologi Pembebasan* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 2003)
Leaman, Oliver, *Pengantar Filsafat Islam* (Bandung: Mizan, 2001).
Muzadi, Abdul Muchith, *Mengenal NU* (Surabaya: Kalista, 2006)
_______, *NU Perspektif Sejarah dan Ajaran* (Surabaya: Kalista, 2006)
Muchtar, Masyhudi, *Aswaja An-Nahdliyah, Ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, Cet. I., Maret 2007)
Muhammad**,** Husein, *Aswaja Di Antara Dua Kutub Ekstrimitas***,** Artikel, 02 Nov. 2007
Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspek, Jilid I & II.*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008.
_______, *Teologi Islam : Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan,* Jakarta : UI Press, 1986.
_______, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
_______, *Filsafat dan Mistisisme Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
Qomar, Mujamil, *NU Liberal; Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002
Razak, Abdul dan Anwar, Rosihon, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
Shimogaki, Kasuo, *Kiri Islam* (Jogjakarta: LKIS, 2011).
Van Bruinessen, Martin, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, & Pencarian Wacana Baru,*Yogyak arta, LKiS, 1996.
Watt, W. Montgomery, *Pemikiran Teologi dan Filsafat Islam,* Terj. Umar Basalim (Jakarta: P3M, 1987)
Wahid, Abdurrahman, *Tuhan Tak Perlu Dibela*, (Yogyakarta: LKIS, cet v, 2010)
Wahid, Abdurahman, *Konsep-Konsep Keadilan*, dalam B. Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta, Para, 1994.

MATERI 02
ASWAJA SEBAGAI MANHAJUL-FIKR WAL HARAKAH

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

A. Prawacana

Secara harfiah arti ***Ahlussunnah wal jama'ah*** adalah sebagai berikut: 1) ***Ahl*** secara bahasa berarti keluargaa Nabi SAW, sahabat Nabi dan tabi'in (pengikut nabi), jika dikaitkan dengan aliran atau madzhab maka artinya adalah pengikut aliran atau pengikut madzhab. **2) *As-Sunnah*** secara bahasa berasal dari kata: "sanna yasinnu", dan "yasunnu sannan", dan "masnuun" yaitu yang disunnahkan. Sedangkan "sanna amr" artinya menerangkan (menjelaskan) perkara. *As-Sunnah* juga mempunyai arti "*at-Thariqah*" (jalan/metode/pandangan hidup) dan "*As-Sirah*" (perilaku) yang terpuji. secara bahasa juga mempunyai arti jalan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi SAW, di samping memiliki arti al-Hadist. Secara istilah pengertian *As-Sunnah* adalah Yaitu petunjuk yang telah ditempuh oleh rasulullah SAW dan para Sahabatnya baik berkenaan dengan ilmu, 'aqidah, perkataan, perbuatan maupun ketetapan. *As-Sunnah* juga digunakan untuk menyebut sunnah-sunnah (yang berhubungan dengan) ibadah dan 'aqidah. Lawan kata "sunnah" adalah "bid'ah". 3) ***Al-Jama'ah*** secara bahasa berarti Jama'ah diambil dari kata "*jama'a*" artinya mengumpulkan sesuatu, dengan mendekatkan sebagian dengan sebagian lain. Seperti kalimat "*jama'tuhu*" (saya telah mengumpulkannya); "*fajtama'a*" (maka berkumpul).Dan kata tersebut berasal dari kata "ijtima'" (perkumpulan), ia lawan kata dari "*tafarruq*" (perceraian) dan juga lawan kata dari "*furqah*" (perpecahan).. Jama'ah adalah sekelompok orang banyak; dan dikatakan juga sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Secara istilah *Al-Jama'ah* adalah adalah pendahulu ummat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan nabi SAW sampai hari kiamat; dimana mereka berkumpul berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah dan mereka berjalan sesuai dengan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW baik secara lahir maupun bathin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang telah memerintahkan kaum Mukminin dan menganjurkan mereka agar berkumpul, bersatu dan tolong-menolong. Dan Allah melarang mereka dari perpecahan, perselisihan dan permusuhan. Allah SWT berfirman: *"Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai."* (Ali Imran: 103). Dia berfirman pula, *"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka."* (Ali Imran: 105). Sehingga, ***Ahlusunnah wal Jama'ah*** adalah orang-orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjahui perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Atau dalam pengertian yang lain adalah 0rang- orang yang mengikuti jalan Nabi, Para Shahabat dan tabi'in.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa ***Ahlusunnah wal Jama'ah*** adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka, baik dalam hal 'aqidah, perkataan maupun perbuatan, juga mereka yang istiqamah (konsisten) dalam ber-ittiba' (mengikuti Sunnah Nabi SAW) dan menjauhi perbuatan bid'ah. Mereka itulah golongan yang tetap menang dan senantiasa ditolong oleh Allah sampai hari Kiamat. Oleh karena itu mengikuti mereka (Salafush Shalih) berarti mendapatkan petunjuk.

Sedangkan menurut Syekh Abu al-Fadl Abdus Syakur As-Senori dalam karyanya "*Al-Kawakib al-Laama'ah fi Tahqiqi al-Musamma bi Ahli as-Sunnah wa al-Jamaah"* menyebutkan definisi Ahlussunnah wal jamaah sebagai kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi SAW dan thoriqoh para sahabatnya dalam hal akidah, amaliyah fisik (fiqh) dan akhlaq batin (tasawwuf). Dan menurut Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani dalam kitabnya, *Al-Ghunyah li Thalibi Thariq al-Haq juz I hal 80* mendefinisikan Ahlussunnah wal jamaah sebagai berikut "Y*ang dimaksud dengan assunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW (meliputi ucapan, perilaku serta ketetapan Beliau). Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian jamaah adalah segala sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi SAW pada masa empat Khulafa'ur-Rosyidin dan telah diberi hidayah Allah* ".

Dalam sebuah hadits dinyatakan :

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وتفرقت النصارى الى إثنين وسبعين :عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
هم الذي على الذي أنا عليه وأصحابي :ومن هم يا رسول الله ؟ قال :فرقة ، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار الاّ واحدة ، قالوا.
رواه أبو داود والترميذي وابن ماجه

"Dari Abi Hurairah r.a., Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Dan umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berkata para sahabat : "Siapakah mereka wahai Rasulullah?'' Rasulullah SAW menjawab : "Mereka adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku.". HR. Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibnu Majah.

B. Sejarah Ahlussunnah Wal Jama'ah

Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin, debat meliputi soal kalam mengenai status Al-Qur'an apakah ia makhluk atau bukan, kemudian debat antara Sifat-Sifat Allah antara ulama Salafiyyun dengan golongan Mu'tazilah, dan seterusnya. Di wilayah sejarah, proses pembentukan Aswaja sebenarnya dimulai sejak zaman *Al-Khulafa' Ar-Rasyidun*, yakni dimulai sejak terjadi Perang Shiffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib RA dengan Muawiyah. Bersama kekalahan Khalifah ke-empat tersebut, setelah melalui taktik arbitrase (tahkim) oleh kubu Muawiyah, ummat Islam makin terpecah kedalam berbagai golongan. Di antara mereka terdapat Syi'ah yang secara umum dinisbatkan kepada pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib, golongan Khawarij yakni pendukung Ali yang membelot karena tidak setuju dengan tahkim, dan ada pula kelompok Jabariyah yang melegitimasi kepemimpinan Muawiyah.

Selain tiga golongan tersebut masih ada Murjiah dan Qadariah, faham bahwa segala sesuatu yang terjadi karena perbuatan manusia dan Allah tidak turut campur (af'al al-ibad min al-ibad) – berlawanan dengan faham Jabariyah. Di antara kelompok-kelompok itu, adalah sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa'id Hasan ibn Hasan Yasar al-Bashri (21-110 H/639-728 M), lebih dikenal dengan nama Imam Hasan al-Bashri, yang cenderung mengembangkan aktivitas keagamaan yang bersifat kultural (tsaqafiyah), ilmiah dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian politik antara berbagai faksi politik (firqah) yang berkembang ketika itu. Sebaliknya mereka mengembangkan sistem keberagamaan dan pemikiran yang sejuk, moderat dan tidak ekstrim. Dengan sistem keberagamaan semacam itu, mereka tidak mudah untuk mengkafirkan golongan atau kelompok lain yang terlibat dalam pertikaian politik ketika itu. Seirama waktu, sikap dan pandangan tersebut diteruskan ke generasi-generasi Ulama setelah beliau, di antaranya Imam Abu Hanifah Al-Nu'man (w. 150 H), Imam Malik Ibn Anas (w. 179 H), Imam Syafi'i (w. 204 H), Ibn Kullab (w. 204 H), Ahmad Ibn Hanbal (w. 241 H), hingg tiba pada generasi Abu Hasan Al-Asy'ari (w 324 H) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 333 H). Kepada dua ulama terakhir inilah permulaan faham Aswaja sering dinisbatkan; meskipun bila ditelusuri secara teliti benih-benihnya telah tumbuh sejak dua abad sebelumnya.

Asy`ariyah adalah sebuah paham aqidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy`ariy. Beliau lahir di Bashrah tahun 260 Hijriyah bertepatan dengan tahun 935 Masehi. Beliau wafat di Bashrah pada tahun 324 H/975-976 M . Awalnya Al-Asy`ari pernah belajar kepada Al-Jubba`i, seorang tokoh dan guru dari kalangan Mu`tazilah. Sehingga untuk sementara waktu, Al-Asy`ariy menjadi penganut Mu`tazilah, sampai tahun 300 H. Namun setelah beliau mendalami paham Mu`tazilah hingga berusia 40 tahun, terjadilah debat panjang antara dia dan gurunya, Al-Jubba`i dalam berbagai masalah terutama masalah Kalam. Debat itu membuatnya tidak puas dengan konsep Mu`tazilah dan dua pun keluar dari paham itu kembali ke pemahanan Ahli Sunnah Wal Jamaah . Al-Asy`ariyah membuat sistem hujjah yang dibangun berdasarkan perpaduan antara dalil nash (naql) dan dalil logika (`aql). Dengan itu belaiu berhasil memukul telak hujjah para pendukung Mu`tazilah yang selama ini mengacak-acak eksistensi Ahlus Sunnah. Bisa dikatakan, sejak berdirinya aliran Asy`ariyah inilah Mu`tazilah berhasil dilemahkan dan dijauhkan dari kekuasaan. Secara umum dan singkat bisa dipahami dengan melihat dalam tabel berikut:

No	Periode	Momen Sejarah
1.	Abu Bakar	Embrio pepecahan umat islam dimulai Pasca rasulullah wafat, terbukti banyak umat islam yang keluar dari agama islam, untungnya hal ini mampu di selesaikan oleh Abu Bakar sehingga persatuan umat islam tetap terjaga Beliau juga mampu Menumpas Gerakan Nabi Palsu Dan Kaum Murtad. Dalam Hubungan Luar Negeri, Penyerangan Terhadap Basis-Basis Penting Romawi Dan Persia Dimulai.
2.	Umar Bin Khattab	Setelah Abu Bakar, benih perpecahan semakin menjadi terutama dari mereka bani Umayah yang tidak senang terhadap pemimpin baru mereka yaitu Umar Ibnu Khattab mereka mulai menghembuskan fitnah-fitnah terhadap Umar sampai kemudian mampu membuat rekayasa social, yang akhirnya terbunuhlah Umar oleh seorang majusi yaitu Abu lu'lu Al-Majusi– sebelum beliau wafat Romawi berhasil diusir Dari Tanah Arab-Terjadi Pengkotakan Antara Arab Dan Non-Arab – Wilayah Islam mencapai Cina dan Afrika Utara.
3.	Utsman Bin Affan	Al-qur'an dikondifikasi dalam mushaf Utsmani –oerpecahan mencapai puncaknya– pemerintah labil karena gejolak politik dan isu KKN – Armada maritim dibangun.
4.	Ali bin Abi Thalib	Perang Jamal – pemberontakan Mua'wiyah – arbitrase Shiffin memecah belah umat menjadi tiga kelompok besar : Syi'ah, Khawarij, Murjiah – Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar mengkonsolidir gerakan awal Aswaja yang tidak memihak kepada pihak manapun dan lebih memusatkan perhatian pada penyelamat Al-qur'an dan sunnah – Akhir dari sistem Syura.
5.	Bani Umayah	Kembalinya negara Klan atau dinasti Islam mencapai Andalusia dan Asia tengah – madzhab-madzhab teologis bermunculan; terutama Qodariyah, Jabariyah, Murjiah moderat dan Mu'tazilah – Aswaja belum terkonsep secara baku (Abu Hanifah)
6.	Bani Abbasiyah	Mu'tazilah menjadi ideology Negara Mihnah dilancarkan terhadap beberapa Imam Aswaja, termasuk Ahmad bin Hambal – Fiqih dan Ushul Fiqih Aswaja disistematisasi

		oleh al-Syafi'ie, teologi oleh al-Asy'ari dan al-Maturidi, Sufi oleh al Junaid dan Al-Ghazali – terjadi pertarungan antara doktrin aswaja dengan kalangan filosof dan tasawuf falsafi – Kemajuan ilmu pengetahuan sebagai wujud dari dialektika pemikiran – Perang Salib dimulai – Kehancuran Baghdad oleh Mongol menjadi awal penyebarannya umat beraliran Aswaja sampai ke wilayah Nusantara.
7.	Umayah Andalusia	Aswaja menjadi madzhab dominan – kemajuan ilmu pengetahuan menjadi awal kebangkitan Eropa – Aswaja berdialektika dengan fisafat dalam pemikiran Ibnu Rusyd dan Ibnu 'Arabi.
8.	Turki Utsmani	Aswaja menjadi ideology negara dan sudah dianggap mapan – kesinambungan pemikiran hanya terbatas pada syarah dan hasyiyah – Romawi berhasil diruntuhkan – perang salib berakhir dengan kemenangan umat Islam – kekuatan Syi'ah (safawi) berhasil dilumpuhkan – Mughal berdiri kokoh di India.
9.	Kolonialisme	Masuknya paham sekularisme – pusat peradaban mulai berpindah ke Eropa – Aswaja menjadi basis perlawanan terhadap imperialisme – kekuatan kekuatan umat Islam kembali terkonosolidir.
10.	Akhir Turki Utsmani	Lahirnya turki muda yang membawea misi restrukturissi dan reinterpretasi Aswaja – gerakan Wahabi lahir di Arabia-kekuatan Syi'ah terkonsolidir di Afrika urata – Gagasan pan-Islamisme dicetuskan oleh al-Afghani – Abduh memperkenalkan neo-Mu'tazilah – al-Ikhwan al-Muslimun muncul di Mesir sebagai perlawanan terhadap Barat – Berakhirnya sistem kekhalifahan dan digantikan oleh nasionalisme (nation-state) – Aswaja tidak lagi menjadi ideologi Negara.
11.	Pasca PD II	Aswaja sebagai madzhab keislaman paling dominant – diikuti usaha-usaha kontekstualisasi aswaja di negara-negara Muslim-lahirnya negara Muslim Pakistan yang berhaluan aswaja – kekuatan Syi'ah menguasai Iran – lahirnya OKI namun hanya bersifat simbolik belaka.

Adapun mengenai sejarah Perjalanan ASWAJA Dalam Sejarah Nusantara (Ke-Indonesia-an) bisa dilacak pada awal mula masuknya islan ke nusantara. Memang banyak perdebatan tentang awal kedatangan Islam di Indonesia, ada yang berpendapat abad ke-8, ke-11, dan ke-13 M. Namun yang pasti tonggak kehadiran Islam di Indonesia sangat tergantung kepada dua hal: pertama, Kesultanan Pasai di Aceh yang berdiri sekitar abad ke-13, dan kedua, Wali Sanga di Jawa yang mulai hadir pada akhir abad ke-15 bersamaan dengan runtuhnya Majapahit.

Namun, dalam perkembangan Islam selanjutnya, yang lebih berpengaruh adalah Wali Sanga yang dakwah Islamnya tidak hanya terbatas di wilayah Jawa saja, tetapi menggurita ke seluruh pelosok nusantara. Yang penting untuk dicatat pula, semua sejarawan sepakat bahwa Wali Sanga-lah yang dengan cukup brilian mengkontekskan Aswaja dengan kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga lahirlah Aswaja yang khas Indonesia, yang sampai saat ini menjadi basis bagi golongan tradisionalis, NU dan PMII. Secara singkat bisa dipahami dalam tabel berikut:

No	Periode	Momen sejarah
1.	Islam Pra Wali Songo	Masyarakat muslim bercorak maritim-pedagang berbasis di wilayah pesisir – mendapat hak istimewa dari kerajaan-kerajaan Hindu yang pengaruhnya semakin kecil – fleksibilitas politik – dakwh dilancarkan kepada para elit penguasa setempat.
2.	Wali Songo	Konsolidasi kekuatan pedagan muslim membentuk konsorsium bersama membidani berdirinya kerajaan Demak dengan egalitarianisme Aswaja sebagai dasar Negara – sistem kasta secara bertahap dihapus – Islamisasi dengan media kebudayaan – Tercipta asimilasi dan pembauran Islam dengan budaya lokal bercorak Hindu-Budah – Usaha mengusir Portugis gagal.
3.	Pasca Wali Songo – Kolonialisme Eropa	Penyatuan jawa oleh Trenggana menyebabkan dikuasainya jalur laut Nusantara oleh Portugis – kekuatan Islam masuk ke padalaman – kerajaan Mataram melahirkan corak baru Islam Nusantara yang bersifat agraris-sinkretik – Mulai terbentuknya struktur masyarakat feodal yang berkelindan dengan struktur kolonial mengembalikan struktur kasta dengan gaya baru – kekuatan tradisionalis terpecah belah, banyak pesanten yang menjadi miniatur kerajaan feudal – kekuatan orisinil aswaja hadir dalam bentuk perlawanana agama rakyat dan perjuangan menentang penjajahan – Arus Pembaruan Islam muncul di minangkabau melalui kaum Padri – Politik etis melahirkan kalangan terpelajar pribumi – Ide nasionalisme mengemuka – kekuatan islam mulai terkonsolidir dalam Sarekat Islam (SI). Muhammadiyah berdiri sebagai basis muslim modernis.
4.	Kelahiran NU	Komite Hijaz sebagai embrio, kekuatan modernis dengan paham wahabinya sebagai motivasi, SI tidak lagi punya pengaruh besar, jaringan ulama' tradisional dikonsolidir dengan semangat meluruskan tuduhan tahayyul, bid'ah, dan khurafat, Qanu Asasi disusun sebagai landasan organisasi NU, aswaja (tradisi) sebagai basis perlawanan terhadap kolonialisme, fatwa jihad mewarnai revolusi kemerdekaan.
5.	NU Pasca Kemerdekaan	NU menjadi partai politik, masuk dalam aliansi Nasakom – PMII lahir sebagai underbow di wilayah mahasiswa – Berada di barisan terdepan pemberantasan PKI – Ikut membidani berdirinya orde baru – Ditelikung GOLKAR dan TNI pada pemilu 1971 –

		Deklarasi Munarjati menandai independennya PMII – NU bergabung dengan PPP pada pemilu 1977 – kekecewaan akan politik menumbuhkan kesadaran akan penyimpangan terhadap Qanun Asasi dan perlunya Khittah.
6.	NU Pasca Khittah	Nu Kembali menjadi organisasi kemasyaratan – menerima Pancasila sebagai asas tunggal – Menjadi kekuatan utama civil society di Indonesia – posisi vis a vis Negara – Bergabung dalam aliansi nasional memulai reformasi menjatuhkan rezim orde baru.
7.	NU Pasca Reformasi	Berdirinya PKB sebagai wadah politik nahdliyyin – Naiknya Gus Dur sebagai presiden – NU mengalami kegamangan orientasi – kekuatan civil society mulai goyah – PMII memulai tahap baru interdependensi – (pasca Gus Dur sampai saat ini, kekuatan tradisionalis menjadi terkotak-kotak oleh kepentingan politis).

Mengingat Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah terbesar di dunia. Mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah penganut madzhab Syafi'i, dan sebagian terbesarnya tergabung – baik tergabung secara sadar maupun tidak – dalam jam'iyyah Nahdlatul 'Ulama, yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam ala Ahlussunnah wal-Jama'ah. Dimana lahirnya Nahdatul Ulama (konservatif-tradisiolis) di indonesia pada 31 Januari 1926 /16 Rajab 1344 H yang ditetapkan di surabaya merupakan bentuk respon atas aliran wahabi yang terpusat di arab saudi yang menamakan diri sebagai aliran pembaharu islam (modernis-reformis).

C. Aswaja dalam Pemahaman PMII

Ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) adalah madzhab keislaman yang menjadi dasar jam'iyyah Nahdlatul Ulama' (NU) sebagaimana dirumuskan oleh Hadlratus Syaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari dalam Qanun Asasi . Yaitu : Dalam ilmu aqidah/teologi mengikuti salah satu dari Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam syari'ah/fiqh mengikuti salah satu Imam empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Dalam tashawuf/akhlaq mengikuti salah satu dua Imam: Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Namun pemahaman seperti ini tidak memadai untuk dijadikan pijakan gerak PMII. Sebab, pemahaman demikian cenderung menjadikan Aswaja sebagai sesuatu yang beku dan tidak bisa diutak-atik lagi. Pemaknaannya hanya dibatasi pada produk pemikiran saja. Padahal produk pemikiran, secanggih apapun, selalu tergantung pada waktu dan tempat (konteks) yang menghasilkannya. Padahal untuk menjadi dasar sebuah pergerakan, Aswaja harus senantiasa fleksibel dan terbuka untuk ditafsir ulang dan disesuaikan dengan konteks saat ini dan yang akan datang. Inilah yang dinamakan sebagai ideologi terbuka.

PMII memaknai Aswaja sebagai ***manhajul fikr*** yaitu metode berpikir yang digariskan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in yang sangat erat kaitannya dengan situasi politik dan sosial yang meliputi masyarakat muslim waktu itu (Said Aqil Siradj, 1996). Dari manhajul fikr inilah lahir pemikiran-pemikiran keislaman baik di bidang aqidah, syari'ah, maupun akhlaq/tasawuf, yang walaupun beraneka ragam tetap berada dalam satu ruh. PMII juga memaknai Aswaja sebagai ***manhaj al-taghayyur al-ijtima'i*** yaitu pola perubahan sosial-kemasyarakatan yang sesuai dengan nafas perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pola perubahan ini akan kita lihat nanti dalam arus sejarah peradaban masyarakat muslim. Inti yang menjadi ruh dari Aswaja baik sebagai manhajul fikr maupun manhaj al-taghayyur al-ijtima'i adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah : *ma ana 'alaihi wa ashabi* (segala sesuatu yang datang dari rasul dan para sahabatnya). Inti itu diwujudkan dalam empat nilai: tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazun (keseimbangan), dan ta'adul (keadilan).

Selama ini proses reformulasi Ahlussunnah wal Jama'ah telah berjalan dari masa ke masa, bahkan masih berlangsung hingga saat ini. Tahun 1994, dimotori oleh KH Said Agil Siraj muncul gugatan terhadap Aswaja yang sampai saat itu diperlakukan sebagai sebuah madzhab. Padahal di dalam Aswaja terdapat berbagai madzhab, khususnya dalam bidang fiqh. Selain itu, gugatan muncul melihat perkembangan zaman yang sangat cepat dan membutuhkan respon yang kontekstual dan cepat pula. Dari latar belakang tersebut dan dari penelusuran terhadap bangunan isi Aswaja sebagaimana selama ini digunakan, lahirlah gagasan ahlussunnah wal-jama'ah sebagai manhaj al-fikr (metode berpikir).

PMII melihat bahwa gagasan tersebut sangat relevan dengan perkembangan zaman, selain karena alasan muatan doktrinal Aswaja selama ini yang terkesan terlalu kaku. Sebagai manhaj, Aswaja menjadi lebih fleksibel dan memungkinkan bagi pengamalnya untuk menciptakan ruang kreatifitas dan mencipkan ikhtiar-ikhtiar baru untuk menjawab perkembangan zaman.

Bagi PMII Aswaja juga menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna bagi setiap tempat dan zaman. Islam tidak diturunkan untuk sebuah masa dan tempat tertentu. Kehadirannya dibutuhkan sepanjang masa dan akan selalu relevan. Namun relevansi dan makna tersebut sangat tergantung kepada kita, pemeluk dan penganutnya, memperlakukan dan mengamalkan Islam. Di sini, PMII sekali lagi melihat bahwa Aswaja merupakan pilihan paling tepat di tengah kenyataan masyarakat kepulauan Indonesia yang beragam dalam etnis, budaya dan agama.

D. Aswaja sebagai Madzhab

Aswaja, selama ini sering dipandang hanya sebagai mazhab (aliran, sekte, ideologi, atau sejenisnya). Hal ini menyebabkan aswaja dianut sebagai sebuah doktrin yang diyakini kebenarannya, secara apriori (begitu saja). Kondisi ini menimbulkan kritik, apalagi mempertanyakan keabsahannya. Jadi, tatkala menganut aswaja sebagai mazhab, seseorang hanya mengamalkan apa yang menjadi doktrin Aswaja. Doktrin-doktrin ini sedemikian banyak dan menyatu dalam kumpulan kitab yang pernah dikarang para ulama terdahulu. Di kalangan pesantren Nusantara, kiranya ada beberapa tulisan yang secara eksplisit menyangkut dan membahas doktrin Aswaja.

Hadrotus-Syeikh Hasyim Asy'ari menjelaskan Aswaja dalam kitab Qanun NU dengan melakukan pembakuan atas ajaran aswaja, bahwa dalam hal tauhid aswaja (harus) mengikuti Al-Maturidi, ulama Afganistan atau Abu Hasan Al Asy'ari, ulama Irak. Bahwa mengenai fiqh, mengikuti salah satu di antara 4 mazhab. Dan dalam hal tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali atau Al-Junaidi.

E. Aswaja sebagai *Manhaj Al-Fikr*

Dalam wacana metode pemikiran, para teolog klasik dapat dikategorikan menjadi empat kelompok. Pertama, kelompok rasioalis yang diwakili oleh aliran Mu'tazilah yang pelapori oleh Washil bin Atho', kedua, kelompok tekstualis dihidupkan dan dipertahankan oleh aliran salaf yang munculkan oleh Ibnu Taimiyah serta generasi berikutnya. Ketiga, kelompok yang pemikirannya terfokuskan pada politik dan sejarah kaum muslimin yang diwakili oleh syi'ah dan Khawarij, dan keempat, pemikiran sintetis yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi.

Didalam PMII Aswaja dijadikan Manhajul Fikri artinya Aswaja bukan dijadikan tujuan dalam beragama melainkan dijadikan metode dalam berfikir untuk mencapai kebenaran agama. Walaupun banyak tokoh yang telah mencoba mendekontruksi isi atau konsep yang ada dalam aswaja tapi sampai sekarang Aswaja dalam sebuah metode berfikir ada banyak relevasinya dalam kehidupan beragama, sehingga PMII lebih terbuka dalam mebuka ruang dialektika dengan siapapun dan kelompok apapun.

Rumusan aswaja sebagai manhajul fikri pertama kali diintrodusir oleh Kang Said (panggilan akrab Said Aqil Siradj) dalam sebuah forum di Jakarta pada tahun 1991. Upaya dekonstruktif ini selayaknya dihargai sebagai produk intelektual walaupun juga tidak bijaksana jika diterima begitu saja tanpa ada discourse panjang dan mendalam dari pada dipandang sebagai upaya 'merusak' norma atau tatanan teologis yang telah ada. Dalam perkembangannya, akhirnya rumusan baru Kang Said diratifikasi menjadi konsep dasar aswaja di PMII. Prinsip dasar dari aswaja sebagai manhajul fikri meliputi ; tawasuth (mederat), tasamuh (toleran) dan tawazzun (seimbang). Aktualisasi dari prinsip yang pertama adalah bahwa selain wahyu, kita juga memposisikan akal pada posisi yang terhormat (namun tidak terjebak pada mengagung-agungkan akal) karena martabat kemanusiaan manusia terletak pada apakah dan bagaimana dia menggunakan akal yang dimilikinya. Artinya ada sebuah keterkaitan dan keseimbangan yang mendalam antara wahyu dan akal sehingga kita tidak terjebak pada paham skripturalisme (tekstual) dan rasionalisme. Selanjutnya, dalam konteks hubungan sosial, seorang kader PMII harus bisa menghargai dan mentoleransi perbedaan yang ada bahkan sampai pada keyakinan sekalipun. Tidak dibenarkan kita memaksakan keyakinan apalagi hanya sekedar pendapat kita pada orang lain, yang diperbolehkan hanyalah sebatas menyampaikan dan mendialiektikakakan keyakinan atau pendapat tersebut, dan ending-nya diserahkan pada otoritas individu dan hidayah dari Tuhan. Ini adalah menifestasi dari prinsip tasamuh dari aswaja sebagai manhajul fikri. Dan yang terakhir adalah tawazzun (seimbang). Penjabaran dari prinsip tawazzun meliputi berbagai aspek kehidupan, baik itu perilaku individu yang bersifat sosial maupun dalam konteks politik sekalipun. Ini penting karena seringkali tindakan atau sikap yang diambil dalam berinteraksi di dunia ini disusupi oleh kepentingan sesaat dan keberpihakan yang tidak seharusnya. walaupun dalam kenyataannya sangatlah sulit atau bahkan mungkin tidak ada orang yang tidak memiliki keberpihakan sama sekali, minimal keberpihakan terhadap netralitas. Artinya, dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa memandang dan menposisikan segala sesuatu pada proporsinya masing-masing adalah sikap yang paling bijak, dan bukan tidak mengambil sikap karena itu adalah manifestasi dari sikap pengecut dan oportunis.

1. *Tawwasuth* (Moderat)

Tawassuth bisa dimaknai sebagai berdiri di tengah, moderat, tidak ekstrim (baik ke kanan maupun ke kiri), tetapi memiliki sikap dan pendirian.hal ini sesuai dengan sabda Nabi muhammad SAW bahwa *Khairul umur awsathuha* (Paling baiknya sesuatu adalah pertengahannya). *Tawassuth* merupakan nilai yang mengatur pola pikir, yaitu bagaimana seharusnya kita mengarahkan pemikiran kita. Dalam rentang sejarah, kita menemukan bahwa nilai ini mewujud dalam pemikiran para imam yang telah disebut di atas.

Di bidang aqidah *atau* teologi, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi hadir sebagai dua pemikir yang tawassuth. Di satu sisi mereka berusaha untuk menghindari pemikiran Mu'tazilah yang terlalu rasional dan memuja-muja kebebasan berpikir sehingga menomorduakan al-quran dan sunnah rasul. Tetapi di sisi lain beliau tidak sepakat dengan golongan Salafi yang sama sekali tidak memberi tempat bagi akal

dan memaknai al-quran dan hadits secara tekstual. Mereka berusaha menggabungkan dua pendekatan itu dan kemudian melahirkan dua konsep teologi yang saling melengkapi.

Di bidang fiqih atau hukum Islam kita juga mendapatkan Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal sebagai para pemikir yang moderat. Mereka berempat dengan ciri khasnya masing-masing membangun konsep fiqih Islam yang di dasarkan kepada Al-quran dan hadits, namun pemahamannya tidak terjebak kepada fiqh yang terlalu bersandar kepada tradisi ataupun kepada rasionalitas akal belaka.

Di bidang tasawuf Al-Junaid tampil dengan pemikiran tasawuf yang berusaha mencari sinergitas antara kelompok falsafi dengan konservatif. beliau berhasil melahirkan konsep tasawuf sunni yang *menjadikan* taqwa (syari'ah) sebagai jalan utama menuju haqiqah. Dengan demikian, beliau berhasil mengangkat citra tasawuf yang waktu itu dianggap sebagai ajaran sesat sebab terlalu menyandarkan diri kepada filsafat Yunani dan tidak lagi mematuhi rambu-rambu syari'ah, seperti ajaran sufi Al-Hallaj. Apa yang dilakukan oleh al-Junaid sama dengan Wali Sanga pada masa awal Islam di Jawa ketika menolak ajaran tasawuf Syekh Siti Jenar.

Dalam sejarah filsafat Islam pun kita mendapatkan seorang Al-Ghazali yang mampu mempertemukan *antara* konsep-konsep filosofis dengan al-quran dan hadits. Dia terlebih dahulu mementahkan teori-teori filsafat yang menurutnya menyimpang dari ajaran Islam seperti Ikhwan al-Shafa. Kemudian menjadikan nilai-nilai al-quran dan hadits sebagai pemandu pemikiran filosofis. Bukan filsafat yang ditolak Al-Ghazali, melainkan silogisme–silogisme filosofis yang bertentangan dengan al-quran dan hadits.

2. *Tasammuh* (Toleran)

Pengertian tasamuh adalah toleran. Sebuah pola sikap yang menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan merasa benar sendiri. Nilai yang mengatur bagaimana kita harus bersikap dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Tujuan akhirnya adalah kesadaran akan pluralisme atau keragaman, yang saling melengkapi bukan membawa kepada perpecahan.

Kita bisa menengok sejarah, bagaimana sikap para imam yang telah disebutkan di atas terhadap para penentang dan ulama-ulama lain yang berbeda pendapat dengan mereka. Para Imam tidak pernah menyerukan pelaknatan dan pengadilan kepada mereka, selama ajaran mereka tidak mengancam eksistensi agama Islam. Lihat pula bagaimana sikap Wali Sanga terhadap umat beragama lain (Hindu-Budha) yang sudah lebih dulu ada di Jawa. Yang terpenting bagi mereka adalah menciptakan stabilitas masyarakat yang dipenuhi oleh kerukunan, sikap saling menghargai, dan hormat-menghormati.

Di wilayah kebudayaan, kita bisa menengok bagaimana Wali Sanga mampu menyikapi perbedaan ras, suku, adat istiadat, dan bahasa sebagai élan dinamis bagi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Perbedaan itu berhasil direkatkan oleh sebuah cita-cita bersama untuk membentuk masyarakat yang berkeadilan, keanekaragaman saling melengkapi*, Unity in plurality*.

3. *Tawwazun* (Seimbang)

Tawazun berarti keseimbangan dalam pola hubungan atau relasi baik yang bersifat antar individu, antar struktur sosial, antara Negara dan rakyatnya, maupun antara manusia dan alam. Keseimbangan di sini adalah bentuk hubungan yang tidak berat sebelah, tidak menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Tetapi, masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi dari pihak yang lain. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kedinamisan hidup.

Dalam ranah sosial yang ditekankan adalah egalitarianisme (persamaan derajat) seluruh umat manusia. Tidak ada yang merasa lebih dari yang lain, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Tidak ada dominasi dan eksploitasi seseorang kepada orang lain, termasuk laki-laki terhadap perempuan . Maka kita lihat dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW dan khulafaurrasyidun dengan tegas menolak dan berusaha menghapus perbudakan. Bagitu juga, sikap NU yang dengan tegas menentang penjajahan dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia.

Dalam wilayah politik, tawazun meniscayakan keseimbangan antara posisi Negara (penguasa) dan rakyat. Penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang, menutup kran demokrasi, dan menindas rakyatnya. Sedangkan rakyat harus selalu mematuhi segala peraturan yang ditujukan untuk kepentingan bersama, tetapi juga senantiasa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kita lihat bagaimana sikap Ahmad bin Hanbal kepada Al-Makmun yang menindas para ulama yang menolak doktrin mu'tazilah. Dia membangun basis perlawanan kerakyatan untuk menolak setiap bentuk pemaksaan Negara, walaupun dia dan para ulama yang lain harus menahan penderitaan dan hukuman yang menyakitkan. Namun kita juga bisa melihat contoh lain sikap seorang al-Ghazali terhadap pemimpin yang adil bernama Nizam al-Muluk. Dia ikut berperan aktif dalam mendukung setiap program pemerintahan, memberi masukan atau kritik, dan hubungan yang mesra antara ulama' dan umara' pun

tercipta. Kita juga bisa membandingkannya dengan posisi Wali Sanga sebagai penasehat, pengawas dan pengontrol kerajaan Demak.

Dalam wilayah ekonomi, tawazun meniscayakan pembangunan sistem ekonomi yang seimbang antara posisi Negara, pasar dan masyarakat. Kita melihat bagaimana Umar bin Abdul Azis mampu membangun ekonomi Islam yang kokoh dengan menyeimbangkan fungsi Negara (baitul mal) sebagai pengatur sirkulasi keuangan dan pendistribusian zakat; Mewajibkan setiap pengusaha, pedagang, dan pendistribusi jasa (pasar) untuk mengeluarkan zakat sebagai kontrol terhadap kekayaan individu dan melarang setiap bentuk monopoli; Serta menyalurkan zakat kepada rakyat yang tidak mampu sebagai modal usaha dan investasi. Sehingga dalam waktu tiga tahun saja telah terbangun struktur ekonomi yang stabil dan kesejahteraan hidup terjamin. Dalam wilayah ekologi, tawazun meniscayakan pemanfaatan alam yang tidak eksploitatif (israf) dan merusak lingkungan. Banyak contoh dalam sejarah yang menunjukkan sikap ramah terrhadap lingkungan. Larangan menebang pohon waktu berperang misalkan, atau anjuran untuk reboisasi (penghijauan) hutan. Begitu juga ketika para intelektual muslim semacam al-Khawarizmi, al-Biruni, dan yang lain menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dan lahan penelitian ilmu pengetahuan.

4. *Ta'addul* (Adil)

Yang dimaksud dengan ta'adul adalah keadilan, yang merupakan pola integral dari tawassuth, tasamuh, dan tawazun. Keadilan inilah yang merupakan ajaran universal Aswaja. Setiap pemikiran, sikap dan relasi, harus selalu diselaraskan dengan nilai ini. Pemaknaan keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan sosial. Yaitu nilai kebenaran yang mengatur totalitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sejarah membuktikan bagaimana Nabi Muhammad mampu mewujudkannya dalam masyarakat Madinah. Bagitu juga Umar bin Khattab yang telah meletakkan fundamen bagi peradaban Islam yang agung.

F. Implementasi Aswaja dalam Nilai-Nilai Gerakan

Aswaja sebagai *manhaj al-taghayyur al-ijtima'i* bisa kita tarik dari nilai-nilai perubahan yang diusung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat ketika merevolusi masyarakat Arab jahiliyah menjadi masyarakat yang tercerahkan oleh nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal. Ada dua hal pokok yang menjadi landasan perubahan itu:

1. **Basis Nilai,** yaitu nilai kebenaran qurani dan sunnah nabi yang diimplementasikan secara konsekwen dan penuh komitmen.
2. **Basis Realitas**, yaitu keberpihakan kepada kaum tertindas dan masyarakat lapisan bawah.

Dua basis ini terus menjadi nafas perubahan yang diusung oleh umat Islam yang konsisten dengan aswaja, termasuk di dalamnya NU dan PMII. Konsistensi di sini hadir dalam bentuk élan dinamis gerakan yang selalu terbuka untuk dikritik dan dikonstruk ulang, sesuai dengan dinamika zaman dan lokalitas. Dia hadir tidak dengan klaim kebenaran tunggal, tetapi selalu berdialektika dengan realitas, jauh dari sikap eksklusif dan fanatik.

Maka empat nilai yang dikandung oleh aswaja, untuk konteks sekarang harus kita tafsirkan ulang sesuai dengan perkembangan teori-teori sosial dan ideologi-ideologi dunia.

1. ***Tawassuth*** sebagai pola pikir, harus kita maknai sebagai tidak mengikuti nalar kapitalisme-liberal di satu sisi dan nalar sosialisme di sisi lain. Kita harus memiliki cara pandang yang otentik tentang realitas yang selalu berinteraksi dalam tradisi. Pemaknaannya ada dalam paradigma yang dipakai oleh PMII yaitu paradigma kritis transformatif.
2. ***Tasamuh*** sebagai pola sikap harus kita maknai sebagai bersikap toleran dan terbuka terhadap semua golongan selama mereka bisa menjadi saudara bagi sesama. Sudah bukan waktunya lagi untuk terkotak-kotak dalam kebekuan golongan, apalagi agama. Seluruh gerakan dalam satu nafas pro-demokrasi harus bahu membahu membentuk aliansi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik, bebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. PMII harus bersikap inklusif terhadap sesama pencari kebenaran dan membuang semua bentuk primordialisme dan fanatisme keagamaan.
3. ***Tawazun*** sebagai pola relasi dimaknai sebagai usaha mewujudkan egalitarianisme dalam ranah sosial, tidak ada lagi kesenjangan berlebihan antar sesama manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara kelas atas dan bawah.Di wilayah ekonomi PMII harus melahirkan model gerakan yang mampu menyeimbangkan posisi Negara, pasar dan masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme yang memusatkan orientasi ekonomi di tangan pasar sehingga fungsi negara hanya sebagai obligator belaka dan masyarakat ibarat robot yang harus selalu menuruti kehendak pasar; atau sosialisme yang menjadikan Negara sebagai kekuatan tertinggi yang mengontrol semua kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada kebebasan bagi pasar dan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya. Di wilayah politik, isu yang diusung adalah mengembalikan posisi seimbang antara rakyat dan negara. PMII tidak menolak kehadiraan negara, karena Negara melalui pemerintahannya merupakan implementasi dari kehendak rakyat. Maka yang perlu dikembalikan adalah fungsi negara sebagai pelayan dan pelaksana setiap kehendak dan kepentingan rakyat. Di bidang ekologi, PMII harus menolak setiap bentuk eksploitasi alam hanya semata-mata demi memenuhi kebutuhan manusia yang berlebihan.

Maka, kita harus menolak nalar positivistik yang diusung oleh neo-liberalisme yang menghalalkan eksploitasi berlebihan terhadap alam demi memenuhi kebutuhan bahan mentah, juga setiap bentuk pencemaran lingkungan yang justru dianggap sebagai indikasi kemajuan teknologi dan percepatan produksi.

4. ***Ta'adul*** sebagai pola integral mengandaikan usaha PMII bersama seluruh komponen masyarakat, baik nasional maupun global, untuk mencapai keadilan bagi seluruh umat manusia. Keadilan dalam berpikir, bersikap, dan relasi. Keadilan dalam ranah ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan seluruh ranah kehidupan. Dan perjuangan menuju keadilan universal itu harus dilaksanakan melalui usaha sungguh-sungguh, bukan sekadar menunggu anugerah dan pemberian turun dari langit.[19]

G. Otoritas & Kontekstualisasi Aswaja di PMII

Secara singkat posisi Aswaja di PMII dapat dilihat sebagai berikut. Dalam upaya memahami, menghayati, dan mengamalkan Islam, PMII menjadikan ahlussunnah wal jama'ah sebagai manhaj al-fikr sekaligus manhaj al-taghayyur al-ijtima'i (perubahan sosial) untuk mendekonstruksikan sekaligus merekonstruksi bentuk-bentuk pemahaman dan aktualisasi ajaran-ajaran agama yang toleran, humanis, anti-kekerasan, dan kritis-transformatif (dalam NDP dan PKT PMII).

Bagi PMII, Aswaja merupakan basis dasar nilai organisasi. Hal ini berarti kehidupan dan gerakan PMII senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai tersebut sehingga secara langsung membentuk identitas komunitas. Lebih dari itu, Aswaja merupakan inspirasi gerakan dan sekaligus alat bergerak yang membimbing para aktivisnya dalam memperjuangkan cita-cita kebangsaan dan kemanusiaan. Ini sudah dibuktikan misalnya komitmen gerakan yang tidak melenceng dari cita-cita kebangsaan itu, sementara di sisi lain tetap berkomitmen dengan cita-cita Islam yang humanis, pluralis, demokratis, egaliter, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Di atas landasan ini pula organisasi PMII bergerak membangun jati diri komunitasnya dan arah gerakannya. Berikut ini beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam Aswaja PMII: 1) Maqosidu Al-Syar`iy (Tujuan Syariah Islam); 2) Hifdzunnafs (menjaga jiwa); 3) Hifdzuddin (menjaga agama); 4) Hfdzul `aqli (menjaga aqal); 5) Hifdzulmaal (menjaga harta); 6) Hifdzul nasab (menjaga nasab)

Kontekstualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Maqosidu Al-Syar`iy: 1) Hifzunnafs Menjaga hak hidup (hak azazi manusia); 2) Hifdzuddin pluralisme (kebebasan berkeyakinan); 3) Hfdzul `aqli (kebebasan berfikir); 4) Hifdzulmaal (kebebasan mencari penghidupan); 5) hifdzul nasab (kearifan local)

Karakteristik ulama ahlussunnah waljama`ah dalam berfikir dan bertindak: 1) Tasamuh (toleran); 2) Tawazun (menimbang-nimbang); 3) Ta'adul (berkeadilan untuk semua); 4) Adamu ijabi birra`yi (tidak merasa paling benar); 5) Adamuttasyau` (tidak terpecah belah); 6) Adamulkhuruj (tidak keluar dari golongan); 7) Alwasatu (selalu berada ditengah-tengah); 8) Luzumuljamaah (selalu berjamaah); 9) Adamu itbailhawa (tidak mengikuti hawa nafsu); 10) Puncak dari semuanya adalah Ta'awun (saling tolong menolong).

H. Aswaja sebagai *Mahajul Harokah*

1. Perspektif Sosial Ekonomi

Menyangkut bagaimana Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah dikerangkakan sebagai alat baca, perlu kiranya kita mulai pembacaan dan identifikasi persoalan yang dilanjutkan dengan perumusan kerangka teoritis dengan dilengkapi kerangka tawaran langkah-langkah yang akan kita ambil baik strategis maupun taktis.

Pertama, perlunya pembacaan yang cukup cermat atas realitas sosial ekonomi Indonesia. Ini diperlukan terutama untuk mengurai lapis-lapis persoalan yang ada dan melingkupi kehidupan sosial-ekonomi kita. Di antara beberapa persoalan yang harus kita dekati dalam konteks ini adalah:

a) Fenomena kapitalisme global yang termanifestasikan melalui keberadaan WTO, world bank dan juga IMF, serta institusi-institusi pendukungnya.
b) Semakin menguatnya institusi-institusi ekonomi kepanjangan tangan kekuatan global tersebut di dalam negeri. Kekuatan-kekuatan tersebut memanifest melalui kekuatan bisnis modal dalam negeri yang berkolaborasi dengan kekutaan ekonomi global, ataupun melalui TNC atau MNC.
c) Liberalisasi barang dan jasa yang sangat berdampak pada regulasi barang dan jasa ekspor -impor.

Fenomena pertama berjalan dengan kebutuhan pasar dalam negeri yang sedang mengalami kelesuan investasi dan kemudian mendorong pemerintah untuk mengajukan proposal kredit kepada IMF dan WB. Pengajuan kredit tersebut membawa konsekuensi yang cukup signifikan karena Indonesia semakin terintegrasi dengan ekonomi global. Hal ini secara praktis menjadikan Indonesia harus tunduk pada berbagai klausul dan aturan yang digariskan baik oleh WB maupun IMF sebagai persyaratan pencairan kredit. Dan aturan-aturan itulah yang kemudian kita kenal dengan structural adjustment program (SAP), yang antara lain berwujud pada;

a) Pengurangan belanja untuk pembiayaan dalam negeri yang akan berakibat pada pemotongan subsidi masyarakat.
b) Dinaikkannya pajak untuk menutupi kekurangan pembiayaan akibat diketatkan APBN.

[19] Sumber: Muhammad Nichal Zaki, *Aswaja*, 2012.

c) Peningkatan suku bunga perbankan untuk menekan laju inflasi.
d) Liberalisasi pasar yang berakibat pada terjadinya konsentrasi penguasaan modal pada segelontir orang dan liberalisasi perdagangan yang mengakibatakan munculnya penguasaan sektor industri oleh kelompok yang terbatas.
e) Privatisasi BUMN yang berakibat pada penguasaan asst-aset BUMN oleh para pemilik asing.
f) Restrukturisasi kelayakan usaha yang mengakibatkan munculnya standar usaha yang akan mempersulit para pelaku usaha menengah dan kecil.

Karakter umum liberalisasi yang lebih memberikan kemudahan bagi arus masuk barang dan jasa (termasuk invesasi asing) dari luar negeri pada gilirannya akan mengakibatkan lemahnya produksi domestic karena harus bersaing dengan produk barang dan jasa luar negeri. Sementara di level kebijakan pemerintah semakin tidak diberi kewenangan untuk mempengaruhi regulasi ekonomi yang telah diambil alih sepenuhnya oleh pasar. Sebuah ciri dasar dari formasi sosial neo-liberal yang menempatkan pasar sebagai aktor utama. Sehingga pengelolaan ekonomi selanjutnya tunduk pada mekanisme pasar yang float dan fluktuatif.

Implikasi yang muncul dari pelaksanaan SAP ini pada sektor ekonomi basis (petani, peternak, buruh, dan lain sebagainya) adalah terjadinya pemiskinan sebagai akibat kesulitan-kesulitan stuktural yang mereka hadapi akibatnya menguntungkan investor asing. Terlebih ketika sektor ekonomi memperkenalkan istilah foreign direct investment (FDI) yang membawa arus deras investor asing masuk ke Indonesia secara langsung. Derasnya arus investasi yang difasilitasi oleh berbagai kebijakan tersebut pada gilirannya akan melemahkan para pelaku usaha kecil dan menengah.Dari akumulasi berbagai persoalan tersebut, ada beberapa garis besar catatan kita atas realitas sosial-ekonomi;

a) Tidak adanya keberpihakan Negara kepada rakyat. Ini bisa kita tengarai dengan keberpihakan yang begitu besar terhadap kekeutan-kekuatan modal internasional yang pada satu segi berimbas pada marjinalisasi besar-besaran terhadap kepentingan umat. Terhadap persoalan tersebut kita perlu mengerangkan sebuah model pengukuran pemihakan kebijakan. Dalam khazanah klasik kita mengenal satu kaidah yang menyatakan bahwa kebijakan seorang imam harus senantiasa mengarah kepada tercapainya kemaslahatan umat (Tasarruf al-Imam ‘ala al-Raiyati manuntun bi al-Maslahah).
b) Tidak terwujudnya keadilan ekonomi secara luas. Arus investasi yang mendorong laju industrialisasi pada satu segi memang positif dalam hal mampu menyerap tenaga kerja dalam negeri. Namun pada segi yang lain menempatkan pekrja pada sebagi pihak yang sangat dirugikan. Dalam point ini kita menemukan tidak adanya keseimbngan distribusi hasil antara pihak investor dengan tenaga kerja. investor selalu berada dalam posisi yang diuntungkan, sementara pekerja selalu dalam posisi yang dirugiakn. Sebuah kondisi yang akan mendorong terjadinya konglomerasi secara besar-besaran. Sehingga diperlukan pemikiran untuk menawarkan jalan penyelesaian melalui apa yang kita kenal dengan profit sharing. Yang dalam khazanah klasik kita kenal dengan mudharabah ataupun mukhabarah. Sehingga secara opertif pemodal dan pekerja terikat satu hubungan yang saling menguntungkan dan selanjutnya berakibat pada produktifitaas kerja.
c) Pemberian reward kepada pekerja tidak bisa menjawab kebutuhan yang ditanggung oleh pekerja. Standarisasi UMR sangat mungkin dimanipulasi oleh perusahaan dan segi tertentu mengkebiri hak-hak pekerja. Ini terjadi karena hanya didasarkan pada nilai nominal dan bukan kontribusi dalam proses produksi. Dalam persoalan ini kita ingin menawarkan modal manajemen upah yang didasarkan pada prosentasi kontribusi yang diberikan oleh pekerja kepada perusahaan ataupun proses produksi secara umum. Standarisasi yang kita sebut dengan UPH (upah prosentasi hasil) pada seluruh sektor ekonomi. Salah satu pertimbangan usulan ini adalah kaidah atau sebuah ayat bahwa harus ada distribusi kekayaan dalam tubuh umat itu secara adil dan merata untuk mencegah adanya konglomerasi ekonomi.
d) Tidak adanya perlindungan hukum terhadap pekerja. Hal ini bisa kita lihat dari maraknya kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Ataupun contoh lain yang mengindikasikan satu kecenderungan bahwa kebijakan-kebijakan Negara lebih banyak diorientasikan semata untuk menarik investasi sebesar-besarnya tanpa pernah memikirkan implikasi yang akan muncul dilapangan. Termasuk potensi dirugikannya masyarakat baik secara ekologis (lingkungan dalam kaitannya dengan limbah industri), ekonomis (tidak berimbangnya penghasilan dengan daya beli), ataupun secara geografis (dalam hal semakin berkurangnya lahan pertanian ataupun perkebunan). Hampir tidak ada klausul level ini kita menuntut pemberlakuan undang-undang pasal 28b UUD 1945 serta perlakuan perlindungan hak pekerja yang dicetuskan kepada konferensi ILO.
e) Perlunya masyaraakat dilibatkan dalam pembicaraan mengenai hal-hal penting berkaitan dengan pembuatan rencana kebijakn investasi dan kebijakan-kebijakan lain yang berhubungan secara langsung dengan hajat hidup orang banyak. Ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi resistan yang ada dalam masyarakat termasuk scenario plan dari setiap kebijakan. Berkaitan dengan ini smapai di level kabupaten/kotamadya bahkan tingkat desa masih terdapat ketidakadilan informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat hampir-hampir tidak mengetahui apa yang telah, sedang

dan akan dilakukan pemerintah di wilayah mereka. Kondisi demikian pada banyak level akan merugikan masyarakat yang seharusnya mengetahui informasi-informasi tersebut secara merata.

Hal lain yang juga menyangkut persoalan ekonomi adalah perlunya elaborasi atas rujukan-rujukan fiqhiyah (termasuk ushul fiqh) bagi kerangka-kerangka operasional Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah sebagai manhaj al-fikr. Kebutuhan akan elaborasi ini dirasa sangat mendadak, terutama mengingat adanya kebingungan di beberapa tempat menyangkut ideologi dasar PMII dan kerangka paradigmanya terlebih jika dikaitkan dengan kemapuan Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah untuk menyediakan kerangka operatif yang akan memandu kader-kader PMII dilapangan masing-masing.

Pembicaraan mengenai berbagai persoalan tersebut mengantar kita untuk menawarkan langkah praktis berupa kerangka pengembangan ekonomi yang kemudian kita sebut sebagai konsep ekonomi bedikari. Konsep ini secara umum bisa kita definisikan sebagai konepsi pengelolaan ekonomi yang dibangun di atas kemampuan kita sebagai sebuah Negara.untuk mendukung tawaran tersebut, lima langkah stategis diusulkan;

a) Adanya penyadaran terhadap masyarakat tentang struktur penindasan yang terjadi.
b) Penghentian hutang luar negeri
c) Adanya internalisasi ekonomi Negara.
d) Pemberlakuan ekonomi political dumping.
e) Maksimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan pemanfaatan tekhnologi berbasis masyarakat lokal (society-based technology).

2. Perspektif Sosial Politik, Hukum & HAM

Akar permasalahan sosial, politik, hukum dan HAM terletak pada masalah kebijakan (policy). Satu kebijakan seyogyanya berdiri seimbang di tengah relasi "saling sadar" antara pemerintah, masyarakat dan pasar. Tidak mungkin membayangkan satu kebijakan hanya menekan aspek kepentingan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Dalam satu kebijakan harus senantiasa melihat dinamika yang bergerak di orbit pasar. Dalam kasus yang lain tidak bias jika kemudian pemerintah hanya mempertimbangkan selera pasar tanpa melibatkan masyarakat didalamnya.

Persoalan muncul ketika: 1). kebijakan dalam tahap perencanaan, penetapan, dan pelaksanaannya seringkali monopoli oleh pemerintah. Dan selama ini kita melihat sedikit sekali preseden yang menunjukan keseriusan pemerintah untuk melibatkan masyarakat.2). kecendrungan pemerintah untuk selalu tunduk kepada kepentingan pasar, sehingga pada beberapa segi seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat.

Kedua kondisi tersebut jika dibiarkan akan menggiring masyarakat pada posisi yang selalu dikorbankan atas nama kepentingan pemerintah dan selera pasar. Dan akan menciptakan kondisi yang memfasilitasi tumbuhnya dominasi dan bahkan otoritarianisme baru.

Kemudian kaitannya dengan Ahlussunnah wal Jama'ah yang juga menjadi nilai dasar (NDP) PMII, dimana substansinya adalah jalan tengah, maka sudah sepatutnya bahwa PMII memposisikan diri di tengah untuk mencari titik temu sebagai solusi. Dengan sikap seperti itu, PMII mengikuti nilai Ahlussunnah wal Jama'ah. Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah seperti tawazun, akan dapat melahirkan nilai Ahlussunnah wal Jama'ah yang ta'adul. Dalam hal ini, yang menjadi titik tekan adalah dengan strategi dapat meruntuhkan kekuasaan dominan dan otoriter yang pada akhirnya bermuara menjadi gerakan revolusiner.

Sekali lagi, cara revolusioner merupakan langkah akhir ketika ada alternatif lain win win solution atau ishlah bisa ditawarkan, maka cara revolusioner meski dihindarkan. Saat ini kondisi sosial politik Indonesia mengalami degradasi luar biasa. Ada empat variabel yang dapat membantu mencari akar persoalan.

Pertama, Negara dan pemerintahan. Dalam hal ini belum mampu menjawab tuntutan masyarakat kelas bawah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sebtulnya tidak berpihak pada rakyat, seperti adanya kenaikan harga-harga, merupakan salah satu pemicu munculnya ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara Negara. *Kedua*, militer. Pada dasarnya adanya militer adalah karena untuk mengamankan Negara dari ancaman, bukan malah mengancam. Selama 32 tahun masyarakat Indonesia mempunyai pengalaman pahit dengan perlakuan-perlakuan militer. Meski, dalam hal tersebut harus ada pemilihan, secara institusional, institusi dan secara personal. Keinginan menjadikan militer professional merupakan cerminan adanya keinginan militer untuk berubah lebih baik. Namun, penegasan dan upaya ke arah professionalitas militer masih belum cukup signifikan dan menampakkan hasil. Peran militer terutama pada wilayah sosial politik menjadi cataan tersendiri yang harus dikontrol. Bukan berarti mengeliminir hak-hak militer sebagai salah satu komponen Negara yang juga berhak mengapresiasikan kehendaknya. Tetapi karena menyadari betul, militer sangat dibutuhkan pada wilayah dan pertahanan Negara, maka tidak seharusnya menarik-narik militer ke medan politik yang jelas-jelas bukanlah arena militer. *Ketiga,* kalangan sipil. Ironisnya, ketika ada keinginan membangun tatanan civil society, yang arahnya ingin membangun supermasi sipil, namun kenyataannya kalangan sipil terutama politisi sipil acapkali mengusung urusan Negara

(pemerintahan) serta militer ke wilayah politik yang lebih luas. Sehingga yang terjadi adalah ketidakjelasan peran dan fungsi masing-masing.

Fungsi dan peran (pemerintahan) adalah sebagai penyelenggara bukanlah sebagai penguasa tunggal. Oleh karena itu Negara selalu dikontrol. Namun contoh yang semestinya berasal dari masyarakat ataupun kalangan poitisi yang mewakili di parleman kecendrungannya seperti dijelaskan sebelumnya, menyeret-nyeret dan seringkali mencampuradukkan urusan pemerintah dan militer ke dalam wilayaah politik. Oleh karena itu dari ketiga variabel tersebut pada kondisi kekinian yang ada, perlu penegasan dan penjelasan terhadap peran dan fungsi serta posisinya masing-masing. Terutama bagi kalangan sipil yang tereduksi menjadi kalangan politisi untuk tidak membawa kepentingan-kepentingan politiknya memasuki arena lain. Jika itu tetap berlangsung (ketidakjelasan peran dan fungsi Negara, militer dan parlemen atau parpol bahkan lembaga peradilan) maka niscaya ketidakpercayaan rakyat semakin mengkristal terhadap semua institusi tersebut.

3. Perspektif Sosial Budaya

Persoalan social-budaya di Indonesia dapat dilihat dengan menggunakan; ***Pertama***, analisa terhadap kondisi social budaya masyarakat, baik pada tingkatan lokal atau pada tingkat global. ***Kedua,*** analisa nilai-nilai budaya yang kemudian didalamnya terdapat nilai-nilai ke-Ahlussunnah wal Jama'ah-an sebagai nilai yang terpatri untuk melakukan perubahan ketika kondisi sosial budaya menjadi dasar pijakan. Dari itu semua, pembentukan karakter budaya menjadi tujuan akhirnya.

Ahlussunnah wal Jama'ah dalam konteks sosial budaya dijadikan nilai-nilai yang kemudian menjadi alat untuk melakukan perubahan sosial budaya. Ekplorasi terhadap permasalahan lokal maupun global merupakan cara untuk mengetahui akar persoalan sosial budaya yang terjadi. Bahwa pada kenyataannya globalisasi ternyata mengikis budaya lokal didalam seluruh aspek kehidupan. Globalisasi tanpa kita sadari telah merusak begitu dalam sehingga mengaburkan tata sosial budaya Indonesia. Ironsnya, masyarkat menikmati produk-produk globalisasi sementara produk lokal menjadi teralienasi. Berangkat dari kondisi tersebut, perlu adanya strategi budaya untuk melakukan perlawanaan ketika hegemoni kapitalisme global semakn "menggila". Salah satu straegi itu mnejadikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai dasar strategi gerakan. Strategi yang dimaksud bisa dalam bentuk penguatan budaya-budaya lokal.

Dalam konteks sosial budaya, posisi Negara dengan masyarakat bukanlah *vis-a-vis* tetapi sebagaimana Negara, pasar dan globalisasi secara umum dapat sejajar. Terkait denga itu, PMII harus dapat menjembatani keinginan-keinginan masyarakat terhadap Negara agar kebijakan-kebijakan Negara tidak lagi merugikan masyarakat dan tidak lagi menguntungkan kapitalis global.

PMII harus secara tegas mengambil posisi ini untuk membantu mengantisipasi dampak ekonomi pasar dan globalisasi terhadap masyarakat.Terutama untuk penerjemahan kebijakan Negara, kebijakan ekonomi pasar kemudian globalisasi secara umum yang berdampak pada pihak local yang sebetulnya menjadi sasaran distribusi barang. Juga mempengaruhi budaya. Disisnilah peran PMII dengan seperangkat nilai-nilai idealnya seperti tawazun,tasamuh dan ta'adul menjadi dasar guna menjembatani kesenjangan antara wilayah internal masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal itu maka pilihan agregasi PMII harus senantiasa diorientasikan untuk mengerangkakan formulasi rekayasa sosial yang diabdiakn sebesar-besarnya bagi pemberdayaan masyarakat dihadapan Negara maupun pasar. Sehingga dapat tercipta perimbangan kekuatan yang akan memungkinkan terbentuknya satu tatanan masyarakat yang relasional-partisipatif antara Negara, pasar, PMII dan masyarakat, dimana PMII dengan masyarakat merupakan kesatuan antara system dengan subsisitem yang mencoba menjembatani masyarakat, Negara dan pasar. PMII dengan demikian berdiri dalam gerak transformasi harapan dan kebuthan masyarakat dihadapan Negara dan pasar.

I. Aswaja & Tantangan Masa Depan

Sebelum kelompok-kelompok teologis dalam Islam lahir, Ahlussunnah Wal Jamaah (selanjutnya disebut Aswaja) adalah umat Islam itu sendiri. Namun setelah kelompok-kelompok teologis muncul, Aswaja berarti para pengikut Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Manshur al-Maturidi. Dalam pengertian terakhir ini, Aswaja sepadan dengan kelompok-kelompok teologis semisal Mu'tazilah, Syiah, Khawarij dan lain-lain.

Dalam sejarahnya, kemunculan kelompok-kelompok ini dipicu oleh masalah politik tentang siapakah yang berhak menjadi pemimpin umat Islam (khalifah) setelah kewafatan Rasulullah, Muhammad SAW. Setelah perdebatan antara kelompok sahabat Muhajirin dan Anshor dituntaskan dengan kesepakatan memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, kesatuan pemahaman keagamaan umat Islam bisa dijaga. Namun menyusul huru-hara politik yang mengakibatkan wafatnya khalifah ketiga, Utsman Bin Affan, yang disusul dengan perang antara pengikut Ali dan Muawiyah, umat Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok Syiah, Khawarij, Ahlussunnah dan –disusul belakangan, terutama ketika perdebatan menjadi semakin teologis oleh—Mu'tazilah dan lain-lain.

Aswaja melihat bahwa pemimpin tertinggi umat Islam ditentukan secara musyawarah, bukan turun-temurun pada keturuan Rasulullah SAW sebagaimana pandangan Syiah. Aswaja memandang keseimbangan fungsi nalar dan wahyu, tidak memposisikan wahyu di atas nalar sebagaimana pandangan

Mu'tazilah. Aswaja melihat manusia memiliki kekuasaan terbatas (*kasb*) dalam menentukan perbuatan-perbuatannya, bukan semata disetir oleh kekuatan absolut di luar dirinya (sebagaimana pandangan Jabariyah) atau bebas absolut menentukan perbuatannya (sebagaimana pandangan Qadariyah dan Mu'tazilah).

Pada wilayah penggalian hukum fiqh, Aswaja (sebagaimana diwakili oleh Imam yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) bersepakat menggunakan empat sumber hukum: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas; dan tidak bersepakatan dalam menggunakan sumber-sumber yang lain semisal*: istihsan, maslahah mursalah, amal ahl al madinah* dan lain-lain. Setelah melalui evolusi sejarah panjang, Aswaja sekarang ini menjadi mayoritas umat Islam yang tersebar mulai dari Jakarta (Indonesia) hingga Casablanca (Maroko), disusul oleh Syi'ah di Iran, Bahrain, Lebanon Selatan; dan sedikit Zaidiyah (pecahan Mu'tazilah) di sejumlah tempat di Yaman. Dengan mengacu pada ajaran Muhammad Bin Abdulwahhab, rezim Saudi Arabia berafiliasi kepada apa yang disebut Wahabi. Sementara di Asia Selatan (Afganistan dan sekitarnya) reinkarnasi Khawarij menemukan tanah pijaknya dengan sikap-sikap keras dalam mempertahankan dan menyebarkan keyakinan.

Di Indonesia, Aswaja kurang lebih sama dengan nahdliyin (sebutan untuk jamaah Nahdlatul Ulama), meskipun jamaah Muhammadiyah adalah juga Aswaja dengan sedikit perbedaan pada praktik hukum-hukum fiqh. Artinya, arus besar umat Islam di Indonesia adalah Aswaja. Yang paling penting ditekankan dalam internalisasi ajaran Aswaja di Indonesia adalah sikap keberagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawassuth*) dan konsisten pada sikap adil (*i'tidal*). Ciri khas sikap beragama macam inilah yang menjadi kekayaan arus besar umat Islam Indonesia yang menjamin kesinambungan hidup Indonesia sebagai bangsa yang plural dengan agama, suku dan kebudayaan yang berbeda-beda.

Ada dua kekuatan besar yang menjadi tantangan Aswaja di Indonesia sekarang ini dan di masa depan: kekuatan liberal di satu pihak dan kekuatan Islam politik garis keras di pihak yang lain. Kekuatan liberal lahir dari sejarah panjang pemberontakan masyarakat Eropa (dan kemudian pindah Amerika) terhadap lembaga-lembaga agama sejak masa pencerahan (renaissance) yang dimulai pada abad ke-16 masehi; satu pemberontakan yang melahirkan bangunan filsafat pemikiran yang bermusuhan dengan ajaran (dan terutama lembaga) agama; satu bangunan pemikiran yang melahirkan modernitas; satu struktur masyarakat kapital yang dengan globalisasi menjadi seolah banjir bandang yang siap menyapu masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Sebagai reaksinya, sejak era perang dingin berakhir dengan keruntuhan Uni Soviet, Islam diposisikan sebagai "musuh" terutama oleh kekuatan superpower: Amerika Serikat dan sekutunya. Tentu saja bukan umat Islam secara umum, namun sekelompok kecil umat Islam yang menganut garis keras dan secara membabi-buta memusuhi non muslim. Peristiwa penyerangan gedung kembar pusat perdagangan di New York, Amerika, 11 September 2001, menjadikan dua kekuatan ini behadap-hadapan secara keras. Akibatnya, apa yang disebut 'perang terhadap terorisme' dilancarkan Amerika dan sekutunya dimana-mana di muka bumi ini.

Yang patut digaris bawahi: dua kekuatan ini, yang liberal dan yang Islam politik garis keras, bersifat transnasional, lintas negara. Kedua-duanya menjadi ancaman serius bagi kesinambungan praktik keagamaan Aswaja di Indonesia yang moderat, toleran, seimbang dan adil itu.

Gempuran kekuatan liberal menghantam sendi-sendi pertahanan nilai yang ditanamkan Aswaja selama berabad-abad dari aspeknya yang sapu bersih dan meniscayakan nilai-nilai kebebasan dalam hal apapun dengan manusia (perangkat nalarnya) sebagai pusat, dengan tanpa perlu bimbingan wahyu. Gempuran Islam politik garis keras menghilangkan watak dasar Islam (Aswaja lebih khusus lagi) yang ramah dan menyebar rahmat bagi seluruh alam semesta.[]

MATERI 03
TEOLOGI PEMBEBASAN & EPISTEMOLOGI ISLAM PROGRESIF

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

Prawacana

Teologi Pembebasan adalah sebuah paham tentang peranan agama dalam ruang lingkup lingkungan sosial. Dengan kata lain Teologi Pembebasan adalah suatu usaha kontekstualisasi ajaran-ajaran dan nilai keagamaan pada masalah kongkret di sekitarnya. Teologi Pembebasan adalah upaya berteologi secara kontekstual. Teologi Pembebasan yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris *Liberation Theology* menjadi keharusan bagi kegiatan gereja-gereja dalam komitmen kristianinya pada kehidupan sosial. Teologi pembebasan lahir sebagai respons terhadap situasi ekonomi dan politik yang dinilai menyengsarakan rakyat. Masalah-masalah itu dijabarkan dalam penindasan, rasisme, kemiskinan, penjajahan, bias ideologi dsb. Pada kalangan Jesuit, baik di Asia termasuk Indonesia, Brazil , Amerika Latin, dan Afrika Selatan Teologi ini berkembang pesat sebagai dampak dari hermeneutika Alkitab secara kontekstual untuk menjawab persoalan yang dihadapi umat manusia. Teologi Pembebasan merupakan refleksi bersama suatu komunitas terhadap suatu persoalan sosial. Karena itu masyarakat terlibat dalam perenungan-perenungan keagamaan. Mereka mempertanyakan seperti apa tanggung jawab agama dan apa yang harus dilakukan agama dalam konteks pemiskinan struktural.

Teologi Pembebasan muncul pada abad ke-20 seiring banyaknya permasalahan dunia yang sedang tidak merdeka dinilai dari sudut pandang keadilan sebagai manusia yang sama di hadapan Tuhan. Dunia harus merdeka dari tindakan yang menindas sesamanya, bahkan seharusnya yang kaya dan memiliki jabatan harus membela dan memperhatikan kebutuhan rakyat kecil dan miskin. Kemunculan pertamanya di Eropa yang berkonsentrasi pada persoalan globalisasi, berprihatin pada dosa sosial yang terdapat pada sistem pemerintahan sebuah negara. Teologi Pembebasan menawarkan sistem sosial yang mengedepankan keadilan sebagai warga negara dan warga dunia dalam pandangan agama (manusia yang adil, tidak tertindas)yang dirusak oleh manusia sendiri. Sementara itu, teologi pembebasan yang lahir di Amerika Latin berfokus pada gerakan perlawanan yang kebanyakan dilakukan oleh para agamawan terhadap kekuasaan yang hegemoni dan otoriter.

Sumber Pemikiran Teologi Pembebasan

Pemikiran teologi pembebasan bermula dari Hermeneutika Alkitab. Setelah menafsirkan pesan-pesan dalam Alkitab berdasarkan tindakan Yesus yang membela dan menolong orang-orang lemah, sakit, dan tertindas, maka peran agama juga seharusnya demikian. Dalam agama Kristen sendiri, hal ini menjadi tanggung jawab gereja sebagai lembaga agama yang memiliki pengaruh, baik kepada jemaatnya, masyarakat di mana dia tinggal, maupun kepada pemerintahannya. nilai-nilai yang muncul itu biasanya dilihat dari perikemanusiaan dan perikeadilan. Pelanggaran nilai-nilai ini di sejumlah negara telah membangkitkan keprihatinan di kalangan aktivis Teologi Pembebasan. Nilai-nilai yang didapat dari tafsir Kitab Sucinya masing-masing.

Sebagai contoh, Umat Kristen dengan ajaran Kristologi yang menafsirkan bahwa Kristus (Tuhan) adalah seorang yang hadir dalam situasi karut marut dan membawa pembebasan bagi rakyat kecil dan tertindas. Dari dasar inilah, maka orang Kristen mengikuti teladan Yesus dan menentang ketidakadilan. Mereka merasa mendapat tugas untuk meneruskan perjuangan Tuhan yang disembahnya.

Tokoh-tokoh Teologi Pembebasan

Aloysius Pieris mengkritik Teologi Pembebasan dari Amerika Latin dan Afrika kurang cocok untuk masyarakat Asia. Kemiskinan yang dilihat dari kacamata Marxisme belumlah efektif ketika tidak melihat akar permasalahan secara lebih dalam di Asia sendiri. Hal penting lain yang perlu dipertimbangkan dari konteks Asia adalah pendekatan multikulural. Asia oleh Pieris disebut sebagai ‘dunia ketiga’ yang memiliki akar ‘religio-kultural‘ yang tidak terpisahkan. ‘Reoligio-Kultural’ ini setidaknya diuraikan oleh Pieris dalam tiga hal; 1. heterogenitas linguistik, 2. integrasi unsur-unsur kosmik dan metakosmik dalam agama-agama di Asia, dan 3. kehadiran luar biasa dari ajaran-ajaran keselamatan (*soteriologis') bukan Kristen.* Kiai Abdurahman Wahid, Tokoh Indonesia; Abdurahman Wahid dan Romo Mangun Wijaya pada tahun 1980-an yang pernah memperjuangkan hak rakyat kecil dari arogansi pemerintahan. Peran Abdurahman Wahid adalah dalam bidang pluralisme, yang menghargai kebebasan manusia dalam beragama, yaitu dengan menjamin kebebasan itu melalui pengajaran kepada masyarakat melalui seminar-seminar, kemudian juga melalui perubahan undang-undang negara di Indonesia. Romo Mangun Wijaya, Sedangkan Romo Mangung Wijaya terkenal dengan tindakannya membela kelompok masyarakat di daerah tertentu (Kalo Code dan Lokasi pembangunan Waduk Kedung Ombo)yang terkena gusur oleh pemerintah.

Teologi Pembebasan Di Amerika Latin

Gustavo Gutiérrez Merino, O.P adalah seorang teolog Peru dan imam Dominikan yang dianggap sebagai pendiri Teologi Pembebasan. Ia menjabat sebagai Profesor John Cardinal O'Hara dalam bidang Teologi di Universitas Notre Dame. Ia pernah menjadi profesor di Universitas Katolik Kepausan di Peru dan profesor tamu di banyak universitas terkemuka di Amerika Utara dan Eropa. Ia adalah anggota Akademi Bahasa Peru, dan pada 1993 ia dianugerahi Legiun Kehormatan oleh pemerintah Perancis untuk karyanya yang tak mengenal lelah. Gustavo Gutiérrez menawarkan teologi kepada umat Kristen suatu tema baru secara etis melalui praksis. Artinya adalah bahwa etika masyarakat seharusnya dibangun berdasarkan perenungan bersama yang dilakukan secara nyata dalam kehidupannya. Teologinya berpusat pada pengentasan rakyat miskin yang diperlakukan tidak adil oleh sistem masyarakat kelas yang memisahkan manusia dalam kategori borjuis (para bangsawan yang biasanya kaya) dan proletar (rakyat jelata yang hanya punya anak namun tanpa harta). Ini sebagai respons terhadap kritik Karl Marx terhadap 'masyarakat kelas' akibat dominasi kapitalisme. Teologi Pembebasan yang dimaksud oleh Gutiérrez adalah pengentasan di bidang politik dan sosial. Sekalipun bermula dari pemahaman politik, namun ini bukanlah penyusutan paham iman, melainkan refleksi iman yang malampaui refleksi sosial dan politik. Jadi teologinya berpusat pada yudaisme Yesus Kristus secara historis. Gutiérrez menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah "Si orang miskin" yang disamakan dengan orang-orang yang tertindas saat ini di dunia. Hal ini didasarkan pula dari Alkitab Injil Matius 5:10. Pembebasan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib memerankan dua aspek, yaitu membebaskan manusia dari penindasan duniawi (kehidupan fisik sosial politik) dan penindasan iman (dosa, kematian, kefanaan dsb). Gutiérrez juga berteologi dengan memakai sumber Alkitab, yaitu kisah Ayub yang bergumul dengan kisah sengsara yang dipandang oleh kaum Teodise sebagai kejahatan. Gutierrez dan Ayub memandang bahwa kejahatan dan penderitaan bukan berasal dari Allah, malainkan sebuah nilai moral yang melampuai hukum manusia. Melalui kisah Ayub yang berdebat dengan para sahabatnya yang mengatakan bahwa penderitaan Ayub adalah akibat dosa, maka pandangan ini secara otomatis tidak bersifat mutlak lagi, sebab penderitaan dan kejahatan adalah peleburan cinta kasih Allah melalui kasih yang tak bersyarat.

Sejarah Teologi Pembebasan Amerika Latin &
Pemikiran Teologi Pembebasan Islam

Berbicara tentang teologi pembebasan dalam diskusi-diskusi resmi atau tak resmi memang terasa problematik. Seringkali diskusi seperti ini dicurigai sebagai gerakan pemikiran kekiri-kirian yang diasosiasikan dengan pendukung komunisme atau dianggap menyebarkan pemikiran subversif. (khususnya pada era Orde Baru lalu). Setelah Orba jatuh dan kebebasan berpikir mulai terbuka diskusi semacam ini juga dianggap tabu dan dipandang dengan mata sinis oleh sebagian kalangan.

Rupanya persepsi itu disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, adanya kesalahpahaman mengenai term teologi pembebasan *(liberation theology)* itu sendiri. *Kedua*, karena teologi pembebasan adalah terminologi yang lahir dari tradisi Kristiani, khususnya di Amerika Latin, dan tidak pernah dikenal secara eksplisit dalam khazanah pemikiran Islam. Dan *ketiga*, karena teologi pembebasan sedikit banyak diinspirasikan oleh ideologi kiri dari pemikiran Marxisme yang dalam sejarah perpolitikan Indonesia dianggap memiliki cacat yang tak termaafkan setelah peristiwa G 30 S.

Tulisan reflektif ini dimaksudkan untuk sedikitnya mengklarifikasikan asumsi-asumsi yang menjadi keberatan berbagai kalangan terhadap wacana teologi pembebasan. Dan untuk tujuan ini saya berusaha menyelami sejarah sekaligus menemukan makna dan signifikansi teologi pembebasan bagi pemahaman keagamaan kita ke arah pengertian yang lebih transformatif, rasional dan fungsional.

Terminologi Teologi Pembebasan

Pada mulanya istilah teologi pembebasan atau liberation theology diperkenalkan oleh para teolog Katolik di Amerika Latin pada pertengahan abad lalu. Para teolog ini mau membedakan antara metode teologi pembebasan dengan teologi tradisional. Teologi tradisional adalah teologi yang membahas tentang Tuhan semata-mata, sementara teologi pembebasan adalah cara berteologi yang berasal dari refleksi iman di tengah realitas konkrit yang menyejarah. Yakni teologi yang memprihatini nasib dan solider kepada mereka yang menderita ketidakadilan, kalah, miskin, ditindas dan menjadi korban sejarah; teologi yang mau mentransformasikan dunia.

Atau dalam ungkapan Gustavo Gutierrez: *This is a theology which does not stop with reflecting on the world, but rather tries to be part of the process through which the world is transformed. It is theology which is open in the protest against trampled human dignity, in the struggle against the plunder of the vast majority of humankind, in liberating love, and in the building of a new, just, and comradely society to the gift of the Kingdom of God.* (Ini teologi pembebasan] adalah sebuah teologi yang tidak hanya merefleksikan dunia, melainkan juga mencoba melakukan proses transformasi terhadapnya. Ia [teologi pembebasan] adalah teologi yang berupaya untuk melawan pelecehan terhadap martabat manusia, melawan perampasan oleh mayoritas, berupaya untuk membebaskan cinta dan membangun suatu masyarakat baru yang adil dan penuh persaudaraan untuk meraih rahmat dari Kerajaan Tuhan)(Alfred T. Hennelly, SJ, 1995: 16)

Ada banyak macam penamaan yang secara subtansial amat dekat dengan gagasan teologi pembebasan ini, diantaranya: teologi pemerdekaan (Romo Mangun), teologi Kiri (Kiri Islam ala Hassan Hanafi), teologi kaum mustadh'afin, teologi kaum tertindas, dan lain-lainnya. Masing-masing penamaan ini hendak mengartikulasikan suatu cara beragama yang otentik, yang lahir dari situasi, sejarah dan keprihatinan atas penderitaan kaum miskin dan tertindas. Oleh karena itu dengan pengertian tersebut jelas sekali teologi pembebasan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan bebas semau gue atau sikap permisif sebagaimana yang sudah disalahpahami. Anggapan seperti itu tentu saja salah alamat dan menunjukkan kebodohan saja. Untuk lebih jelas mengenai karakter dan jalan yang ditempuh teologi pembebasan, mari sejenak melihat teologi pembebasan Amerika Latin.

Belajar dari Teologi Pembebasan Amerika Latin

Teologi pembebasan di Amerika Latin merupakan sebuah entitas gerakan sekaligus juga doktrin. Gerakan ini muncul karena perpaduan dari perubahan-perubahan internal dan eksternal. Secara internal gerakan ini muncul berbarengan dengan perkembangan aliran-aliran teologis dan keterbukaan terhadap perkembangan sains sosial modern. Sementara secara eksternal ia didorong oleh dua situasi: pertama adalah keterbelakangan, ketergantungan, keterpinggiranm ketertindasan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh proses industrialisasi sejak tahun 1950-an di seluruh benua di bawah arahan modal multinasional; dan kedua meningkatnya perjuangan sosial, gerakan-gerakan gerilya, pergantian pemerintah melalui kudeta militer dan krisis keabsahan sistem politik, sejak meletusnya revolusi Kuba tahun 1959.

Gerakan teologi pembebasan ini melibatkan sektor-sektor penting gereja (para romo, pengamal tarekat atau ordo-ordo, para uskup), gerakan keagamaan orang awam, keterlibatan pastoral yang merakyat serta kelompok-kelompok basis masyarakat gereja yang menghimpun diri menentang sebab-sebab penghisapan dan penindasan, atas dasar nalar moral dan kerohanian yang diilhami oleh budaya keagamaan mereka. Dorongan moral dan keagamaan inilah yang merupakan faktor hakiki yang menggerakkan semangat ribuan aktifis dalam serikat-serikat buruh, kerukunan-kerukunan tetangga, dan front-front kerakyatan untuk melawan penindasan dan kemiskinan.

Adapun doktrin atau ajaran-ajaran penting yang menggerakkan mereka di antaranya adalah: *pertama*, gugatan moral dan sosial yang amat keras terhadap ketergantungan pada kapitalisme sebagai suatu sistem yang tidak adil dan tidak beradab, sebagai suatu bentuk dosa struktural. *Kedua*, penggunaan alat analisis Marxisme dalam rangka memahami sebab musabab kemiskinan, pertentangan-pertentangan dalam tubuh kapitalisme dan bentuk-bentuk perjuangan kelas. *Ketiga*, pilihan khusus bagi kaum miskin dan kesetiakawanan terhadap perjuangan mereka menuntut kebebasan. *Keempat*, pengembangan basis kelompok-kelompok masyarakat agama di kalangan orang-orang miskin sebagai suatu bentuk baru keagamaan dan alternatif terhadap cara hidup individualis yang dipaksakan oleh sistem kapitalis. *Kelima*, suatu penafsiran baru Kitab Suci yang memberikan perhatian penting pada bagian-bagian yang mengusung paradigma perjuangan pembebasan rakyat yang diperbudak. *Keenam*, perlawanan terhadap permberhalaan sebagai musuh utama agama, yakni berhala-berhala baru: uang, kekayaan, kekuasaan, keamanan nasional, negara, militerisme, peradaban Barat. *Ketujuh*, sejarah pembebasan manusia adalah antisipasi akhir dari Keselamatan. Dan *kedelapan*, kecaman terhadap teologi tradisional yang bercorak platonik yang memisahkan antara sejarah kemanusiaan dan ketuhanan (Michel Lowy, 1999: 25-30).

Dari susunan doktrin teologi pembebasan di atas nampak jelas sekali bahwa gerakan tersebut tidak semata-mata diilhami oleh spirit moral dan keagamaan, melainkan juga oleh keterbukaan para pemrakarsa dan aktivisnya terhadap pemikiran-pemikiran filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern, khususnya Marxisme. Rupanya karena itulah dalam perjalanannya model teologi pembebasan ini juga banyak menerima kritik bahkan cemoohan dan tentangan dari berbagai kalangan. Di antara para pengkritik sendiri adalah para agamawan konservatif yang masih mempertahankan ortodoksi.

Mereka pada umumnya berada, berlindung dan mengambil untung dari kekuasaan yang ada yang justeru lalim dan menindas, dan untuk itu mereka menggunakan dalil-dalil keagamaan untuk mempertahankan status quo. Para pengkritik lain menganggap teologi pembebasan cenderung menggunakan jalan kekerasan sebagai alat perlawanan. Hal ini dipandang berkebalikan dengan nilai agama yang membawa pesan cinta kasih dan perdamaian.Teologi pembebasan tentu sangat berbeda dengan pandangan teologis kaum konservatif di atas yang menggunakan agama sebagai instrumen status quo. Kaum konservatif telah memperlakukan agama sebagai candu untuk mencapai kenikmatan sesaat, seraya mengabaikan panggilan profetik kenabian yang bersolidaritas terhadap kaum miskin dan tertindas. Di tangan kaum konservatif ini pulalah energi agama yang sesungguhnya menjadi kekuatan untuk melawan kezaliman, ketidakadilan dan penindasan menjadi susut dan akhirnya musnah. Konservatisme biasanya juga selalu berkarakter sempit dalam cara berpikir dan tertutup dalam wawasan.

Mereka menolak keterbukaan karena dianggap mengurangi kadar keimanannya. Sehingga dalam beberapa kesempatan mereka menolak teologi pembebasan yang telah memakai analisis kelas yang dikembangkan Marxisme. Bagi mereka konflik kelas dalam Marxisme telah menyebabkan agama telah kehilangan watak spiritualitasnya sekaligus menjadi sekadar gerakan sosial yang kerap diperjuangkan dengan cara-cara kekerasan. Oleh pandangan-pandangan yang sempit inilah, lalu dalam setiap wacana dan

gerakannya teologi pembebasan banyak disalahpahami dan dicibir. Bukannya menjadi sarana belajar dan refleksi kritis atas praksis untuk memperkaya pemahaman keagamaan yang sudah usang.

Ada beberapa tokoh atau teolog di Amerika Latin yang mulai membangun dan merumuskan teologi pembebasan. Di antara mereka yang berpengaruh dan sedikit disinggung di sini adalah Gustavo Gutierrez dan Joan Luis Segundo. Gutierrez dalam bukunya berjudul A Theology of Liberation menyatakan: *If faith is a comitment to God and to human beings, it is not possible to believe in today world without a comitment to the process of liberation.* (Bila iman adalah suatu komitmen kepada Allah dan umat manusia, maka mustahil keberimanan kita pada hari ini mengabaikan komitmen kepada proses pembebasan umat manusia (dari segala kemiskinan dan penindasan) (Alfred T. Hannelly, 1995: 11).

Di sini jelas bagi Gutierrez bahwa pembelaan terhadap kaum miskin dan perlawanan terhadap para penindas sesungguhnya adalah konsekuensi dari iman seseorang kepada Allah. Iman seseorang tidak bermakna apapun tanpa keterlibatan dirinya dalam praksis sosial dan sejarah. Karena bagi Gutieres, makna teologi itu sendiri sebenarnya adalah suatu refleksi kritis terhadap praksis dalam terang Kitab Suci. Oleh karena itu pula makna spiritualitas selalu terkait langsung dengan tindakan.

Gutierrez menunjukkan tiga karakteristik teologi pembebasan (Alfred T. Hannelly, 1995: 12). *Pertama*, teologi pembebasan adalah pemahaman yang progresif dan terus menerus atas dasar komitmen kemanusiaan dan keberimanan yang selalu hidup. Oleh karena itu teologi sesungguhnya adalah praksis pembebasan dari belenggu ekonomi, sosial, politik, dan dari sistem masyarakat yang mengingkari kemanusiaan dan dari kedosaan yang merusak hubungan manusia dengan Allah. *Kedua*, teologi adalah sebuah refleksi yang lahir dari tindakan. Gutierrez menulis dalam sebuah paragraf yang cantik: *Theology is a reflection that is, a second act, a turning back, a reflecting, that comes after action. Theology is not first; the commitment is first. Theology is the understanding of commitment, and the commitment is action. The central action is charity, which involves commitment, while theology arrives later on.* (Teologi adalah sebuah refleksi, yakni suatu tindakan kedua, suatu gerak balik, sebuah perefleksian yang dilakukan setelah bertindak. Jadi bukan teologi, melainkan komitmenlah yang pertama. Teologi adalah hasil pemahaman dari komitmen, dan komitmen itu adalah kesediaan untuk bertindak. Inti tindakan adalah kemurahan hati yang disertai komitmen, setelah itu baru teologi hadir).

Oleh karena itu teologi harus menjadi kritis ketika berhadapan dengan masyarakat maupun terhadap institusi keagamaan. Ia harus menjadi pembebas bagi kedua institusi sosial itu dari berbagai macam ideologi, keberhalaan dan alienasi. Sehingga teologi itu sendiri pada akhirnya akan memberikan orientasi dan inspirasi bagi aksi tindakan selanjutnya. Inilah yang disebut dengan keberimanan dalam praksis sejarah, keberimanan yang transformatif. Dan ketiga, setiap tindakan kita harus disertai dengan refleksi untuk memberi orientasi masa depan yang diyakini dan diharapkan dan koherensi agar ia tidak jatuh pada aktivisme.

Meskipun Gutierrez telah memberikan ancangan rumusan metode teologi pembebasan, baru kemudian Juan Luis Segundo yang berhasil mensistematisasi rumusan metodologi teologi pembebasan. Sistematisasi inilah yang nantinya menjadi acuan berbagai metode teologi-teologi pembebasan (*liberation theologies*) lainnya di dunia. Dalam salah satu tulisannya *Two Theologies of Liberations*, ada pernyataan menarik dari Segundo yang dikutip oleh Michel Lowy (Michel Lowy, 1999). Ia menyatakan, Jangan lupa kita hidup di tanah-tanah yang paling agamis dan di tanah-tanah yang paling tidak berprikemanusiaan. Pernyataan ini tampaknya menyembunyikan tapi sekaligus menyingkap suatu ironi. Bagaimana mungkin penindasan justeru terjadi dalam masyarakat yang mayoritas beragama yang meyakini bahwa ajaran agamanya melawan ketidakadilan dan penindasan.

Mengapa tidak ada protes atau perlawanan atas kondisi ini dari pihak kaum agamawan? Apakah kaum agamawan buta atau membutakan diri terhadap situasi yang ada? Segundo menyadari bahwa ketidakmampuan mengambil sikap yang diperlihatkan para agamawan itu disebabkan ketidakmampuannya melihat persoalan sosial dan menganalisis struktur-struktur penindasan yang ada. Bukan hanya itu, berlanjutnya penindasan karena agama mengalami impotensi karena pemahaman terhadap teologi dan kitab suci didominasi oleh tafsir yang justeru tidak sensitif terhadap persoalan masyarakat tertindas. Oleh karena itu menurutnya perlu dilakukan deideologisasi terhadap realitas sosial dan superstruktur serta deideologisasi terhadap interpretasi kitab suci, agar iman kita bisa merespon situasi konkrit penindasan dan ikut berjuang bersama-sama kaum tertindas melawan para penindas.Kebekuan agamawan dalam merespon situasi konkrit ini mendorong Segundo untuk menawarkan metode berteologi yang bukan hanya sebagai usaha ortodoksi tapi juga suatu ortopraksis. Yang dimaksud adalah bahwa berteologi bukan hanya untuk memperteguh dan memantapkan ajaran, tapi juga menjadikan pengalaman konkrit sebagai basis menerapkan sebuah rumusan ajaran. Segundo merumuskan hal ini dalam suatu bentuk lingkaran hermeneutik.

Apakah yang Dimaksud dengan Lingkaran Hermeneutik?

Hermeneutika adalah proses interpretasi untuk membuat pesan kitab suci relevan dengan zamannya, sedangkan lingkaran menunjukkan bahwa usaha interpretasi itu bertitik tolak pada realitas baru yang lalu menuntut kita menginterpretasikan ajaran kitab suci secara baru pula dalam rangka mengubah realitas sebagaimana dituntutkan, dan akhirnya kembali kepada usaha menginterpretasikan kembali firman

Allah, dan seterusnya. Menurut Segundo, lingkaran hermeneutik bisa berlangsung dengan dua syarat: pertama, kesangsian-kesangsian atas situasi nyata sungguh-sungguh dalam memperkaya, dan kedua, interpretasi atas kitab suci juga bersifat sungguh-sungguh dalam dan memperkaya (Fr. Wahono Nitiprawiro, 2000: 36-37).

Dalam lingkaran hermeneutik ini sang penafsir dituntut untuk terus menerus melakukan kritik terhadap realitas yang ada sekaligus mengkritik pula pemahaman teologis terhadap realitas tersebut, dan lalu menafsirkannya kembali demi perubahan realitas tersebut. Dengan kata lain, di belakang kritik tersebut sesungguhnya kita selalu dituntut untuk selalu mencurigai suatu tafsir. Atau mencurigai status iman seseorang kepada siapa dia mengabdikan imannya. Pengandaiannya adalah bahwa iman itu sendiri bersifat ideologis karena ia lahir dari tanggapan yang menyejarah dan subjektif terhadap wahyu Allah. Oleh karena itu praksis iman seseorang harus senantiasa diberi kritik dengan selalu membenturkannya dengan realitas konkrit. Baru dengan begitu, makna keberimanan seseorang akan membawa transformasi bagi kehidupan ke arah yang lebih baik.

Dari model lingkaran hermeneutika tampak ada 4 langkah penafsiran yang diajukan Segundo (Fr. Wahono Nitiprawiro, 2000: 36-37; Alfred T. Hannelly, 1999: 28). Langkah itu bisa diuraikan sebagai berikut:

Langkah *pertama*: cara kita mengalami realitas yang terumuskan mendorong kita pada posisi kecurigaan ideologis. Pada tahap ini, dalam pengamatan Segundo, Harvey Cox dalam bukunya The Secular City (1966) gagal memasuki kesangsian ideologis karena ia bersikap anti pragmatisme sosial. Cox terlalu sibuk pada langkah pertama yakni cara yang kaya dan mendalam mengalami realitas, dia hanya menyangsikan cara lama mengalami realitas yang bertumpu pada kaidah-kaidah nilai kemanusiaan tertinggi, dan mengajukan alternatif cara baru mengalami realitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai efisiensi teknologis tanpa menelisik kepentingan ideologis di balik realitas itu.

Langkah *kedua*: menerapkan kecurigaan ideologispada seluruh superstruktur ideologis dan khususnya pada teologi. Dalam konteks ini, menurut Segundo, Marx sukses membongkar ideologi dalam masyarakat, tapi gagal membangun transformasi dalam agama, bahkan tidak menyentuh sedikitpun. Marx sukses pada langkah pertama mengalami realitas sejarah sebagai perjuangan kelas. Ia juga memiliki komitmen mentranformasikan dunia dalam konsepnya tentang materialisme sejarah, yakni sebuah patokan bahwa basis hubungan sosial ekonomi menentukan superstruktur ideologi, budaya dan agama. Oleh karena itu dalam rangka menghilangkan cengkeraman penguasa borjuis, hubungan sosial ekonomi itu harus diubah dari feodalisme ke kapitalisme, dari kapitalisme ke sosialisme yang akhirnya ke komunisme. Letak kesangsian ideologis Marx adalah keyakinannya bahwa ideologi yang berkuasa selalu merupakan ideologi dari kelas yang sedang berkuasa. Namun sayangnya komitmen transformasi masyarakat Marx berhenti, ia tidak melanjutkan logikanyamengubah superstruktur untuk pula mengubah agama (sebagai salah satu unsur superstruktur).

Langkah *ketiga*: Dari cara baru mengalami realitas teologis mendorong kita pada kecurigaan eksegesis. Kita mulai mengangsikan interpretasi Kitab Suci yang ada karena tidak mengikutsertakan data yang penting. Menurut Segundo, Max Weber dalam The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism (1904-1905) sukses melihat peranan agama. Weber secara sosio-psiko-historis berhasil mencari peranan superstruktur (agama, etika protestan) terhadap hubungan sosial ekonomi (gairah usaha untuk memperoleh untung, kerja keras, berhemat, menabung dan menumpuk harta spirit kapitalisme). Tapi sebagai seorang Calvinis ia tidak memiliki komitmen terhadap transformasi masyarakat.

Langkah *keempat*: kita mencapai hermeneutika baru dengan menginterpretasikan Kitab Suci secara baru, lebih kaya dan mendalam. Dengan demikian kita juga mengalami realitas secara baru pula.

Menurut Segundo, James H. Cone adalah seorang teolog asal Arkansas, negara bagian Amerika Serikat yang dengan komitmennya terhadap transformasi pembebasan manusia berhasil melalui tahap-tahap penafsiran teologi pembebasan dalam praksis sosial melalui karyanya A Black Theology of Liberation (1970). Cone merumuskan teologi pembebasan kulit hitam dalam rangka memberikan acuan teologis dan praktis untuk pembebasan warga kulit hitam yang miskin, tertindas, dan terdiskriminasi. Ia bertolak dari praksis iman yang dialaminya yakni pembebasan kelas kulit hitam di Amerika Utara, yang ditindas oleh kelas kulit putih lengkap dengan ideologi dan teologi pembenaran status quo-nya yang menindas.

Cone mepresentasikan Black Theology-nya ke dalam 4 langkah. Langkah *pertama* Cone mengalami realitas di Amerika Utara sebagai perjuangan pembebasan kelas kulit hitam dan makna ketuhanannya dihubungkan dengan solidaritas dengan mereka yang dibelenggu penindasan.

Langkah *kedua* setelah melakukan analisis sosial untuk membongkar sistem-sistem dominasi, seperti rasisme, seksisme, kolonialisme, kapitalisme dan militerisme, Cone sampai pada kecurigaan ideologis terhadap pendapat kelas kulit putih bahwa warna kulit jangan dijadikan titik perbedaan demi kesatuan dan universalitas manusia.

Langkah *ketiga* Cone mengalami kecurigaan eksegesis terhadap cara berteologi kelas kulit putih yang berpusat pada universalitas konteks, yang menutup kemungkinan mendekati Kristus yang terikat dengan kebudayaan tertentu. Dalam hal ini Cone berupaya menafsirkan kembali pesan-pesan Kitab Suci yang sudah didistorsi dan menjadikan Allah menjadi spirit pemberdayaan masyarakat agar lebih manusiawi. Terakhir Cone menekankan cara baru yang kaya dan mendalam mengalami Kitab Suci sebagai wahyu yang relevan bagi perjuangan kelas kulit hitam untuk pembebasan zaman kita sekarang. Termasuk juga disini

kebutuhan terhadap bahasa teologi baru yang hadir di dalam cerita-cerita, dongeng-dongeng, nyanyian, kotbah, dan ajaran-ajaran yang lebih bernada membebaskan.Dari uraian di atas, tampak sekali bahwa Cone benar-benar merumuskan model cara beragama sekaligus penghayatan iman secara baru. Yakni iman yang diterangi oleh Kitab Suci yang senantiasa berdialog dengan realitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa teologi pembebasan bukanlah semacam teologi yang sempit, kolot, dan tertutup yang hanya terkesima oleh warisan masa lalu. Melainkan teologi yang selalu berdialog dengan realitas yang membuatnya selalu relevan bagi pemeluknya.

Cara berteologi yang demikian itu menyadari betul bahwa iman sendiri sesungguhnya adalah refleksi individual atau penghayatan terhadap Firman Allah dalam situasi konkrit dan menyejarah. Dengan demikian, berteologi semacam ini sungguh-sungguh akan mendorong untuk lebih bersikap dewasa dan terbuka kepada realitas dan perkembangan pengetahuan yang bisa menjadi bahan untuk memperkaya keberagamaan kita, terutama dalam mengambil sikap terhadap realitas sejarah yang selalu bergerak dinamis.

Teologi Pembebasan Islam, Adakah?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama kita perlu mengetahui kenyataan bahwa gema teologi pembebasan sejak lahirnya pada tahun 50-an dan 60-an abad lalu telah menjadi inspirasi berharga bagi perkembangan teologi-teologi pembebasan lainnya. Di Amerika Utara misalnya ada teologi pembebasan feminis yang digerakkan oleh beberapa tokoh berpengaruh, misalnya: Elizabeth Schussler Fiorenza, Rosemary Radford Ruether, Elizabeth Johnson, Jacquelyn Grant, dan lain-lain; lalu teologi kulit hitam dengan tokoh-tokohnya, seperti James H. Cone, Martin Luther King, Jr, Malcolm X., dan Delores S. Williams; ada teologi pembebasan Hispanik dengan tokoh-tokohnya Allan Figueroa Deck, dan Mujesrista Theology; ada teologi pembebasan Afrika dengan tokoh-tokohnya Benezit Bujo, Mercy Amba Oduyoye; dan tak ketinggalan teologi pembebasan Asia dengan beberapa tokohnya Aloysius Pieris, Raimundo Panikkar, dan Chung Hyun Kyung.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa semangat dan prinsip teologi pembebasan bisa tumbuh di manapun dan dalam kebudayaan apapun ketika sistem dan struktur sosial dalam masyarakat berjalan timpang, diwarnai dengan kemiskinan, ketidakadilan, diskriminasi, serta adegan penindasan kelompok satu atas kelompok lainnya. Munculnya spirit pembebasan ini didorong oleh dua kecenderungan. *Pertama*, dalam diri manusia sebenarnya menyimpan potensi fitrah, yakni kesadaran akan kemerdekaan diri. Potensi itu akan dirasakan dan tampak manakala manusia merealisasikan kebebasan dirinya dalam tindakan-tindakan konkrit. Ketika manusia merasakan dirinya tertekan oleh beban penindasan maka dalam dirinya muncul resistensi dan kehendak untuk membebaskan diri. *Kedua*, dalam sebuah komunitas tertentu kesadaran pembebasan itu sudah ada dan tumbuh (minimal secara potensial) dalam tradisi budaya atau dalam dunia simbolik yang diyakini kebenarannya secara kolektif.

Misalnya dalam dongeng, cerita sejarah, mitos, atau dalam teks-teks Kitab Suci. Fakta mengenai tumbuh suburnya ragam gerakan pembebasan di Asia dan Afrika di atas menunjukkan sekali lagi bahwa ia tidak sekadar dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga faktor internal dalam budaya itu sendiri. Oleh karena itu jika teologi pembebasan bisa tumbuh di berbagai kebudayaan, maka berdasarkan kedua hal tersebut di atas jawaban mengenai ada-tidaknya teologi pembebasan dalam Islam tampaknya bisa diperoleh pula. Pertama berdasarkan kesadaran internal umat Islam yang berkehendak mencari pembebasan dan melakukan transformasi sosial, dan kedua itu dilakukan melalui reinterpretasi terhadap sejarah dan kebudayaan umat Islam atau dengan melakukan rekonstruksi atas pesan-pesan normatif pembebasan dalam Islam sendiri.

Michael Amaladoss membuat penelitian yang sangat menarik mengenai berbagai bentuk teologi pembebasan, khususnya di Asia. Setelah mengkaji berbagai potensi dan watak pembebasan dalam agama-agama di Asia yang meliputi: agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristiani, Islam dan agama-agama Kosmis, Amaladoss menyimpulkan bahwa berbagai teologi tersebut menunjukkan bahwa semua agama memiliki segi-segi yang membebaskan, dan para nabi telah berusaha menyoroti unsur-unsur yang membebaskan itu dalam menafsirkan kembali tradisi agama mereka secara kreatif dan relevan (Michael Amaladoss, 2000: 270). Adapun untuk mengetahui lebih lanjut secara diskursif wacana pembebasan dalam Islam, dalam bagian berikutnya kita akan melihat sekilas beberapa sarjana muslim seperti Ali Syariati, Asghar Ali Engeneer dan tentu saja Hasan Hanafi, yang telah mengangkat elemen-elemen pembebasan dalam Islam baik melalui pendekatan tekstual maupun pendekatan rekonstruksi simbolis dalam sejarah Islam.

Tentang Teologi Pembebasan Rasional

Sejak lebih dari dua dekade yang lalu di kalangan umat Islam Indonesia dihadapkan pada gagasan tentang betapa perlu menghidupkan kembali “teologi rasional”. Usaha menghidupkan kembali “teologi rasional” itu dianggap perlu untuk mengejar keterbelakangan umat Islam yang diakibatkan, menurut penganjur gagasan tersebut, antara lain karena mereka terbelenggu oleh “teologi tradisional” yang mereka anut. Teologi ini terutama dikaitkan dengan paham jabariah atau fatalisme, yang dianggap melahirkan sikap pasif, pasrah dan m.enyerah pada suratan takdir.

Prof. Dr. Harun Nasution adalah salah seorang penganjur utama “teologi rasional” itu. Karena itu beliau dianggap sebagai pelopor kebangkitan apa yang disebut sebagai “Neo-Mu’tazilah”. Tentu saja kita bisa mempertanyakan validitas konstatasi tersebut dilihat dari segi faktual. Bersamaan dengan itu menyembul pula gaga san tentang keperluan usaha pembaharuan dalam pemikiran umat Islam. Salah seorang penganjur utamanya adalah Cak Nur (Dr. Nurcholish Madjid) yang mencanangkan ide “liberalisasi” dan ‘sekularisasi”. Gagasan pembaharuan itu rnakin menggema dengan lontaran-lontaran ide Gus Dur (KH Abdurrahrnan Wahid).

Ia menganggap gerakan “kultural” yang sibuk dalam tataran ide saja belum cukup, akan tetapi ia juga menentang gerakan “politik” yang cenderung mernanipulasi agarna untuk memperoleh kekuasaan. Gus Dur lebih menekankan perhatian dan pemikirannya pada gerakan “sosio-kultural yang bermuara pada transformasi sosial urnat Islam daIam konteks kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam perspektif ini terasa “teologi rasional” saja tidak memadai dan tidak menjawab tantangan nyata yang dihadapi umat Islam. Kontroversi antara “teologi rasional” versus “teologi tradisional” bagi kalangan aktivis yang concern pada berbagai fen omena ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat tidaklah relevan.

Dirasakan keperluan untuk merumuskan sejenis teologi yang lain, “teologi transformatif”. Beberapa pemikir muslim mencoba menggali dan merumuskan “teologi transformatif” itu. Kesadaran tentang keperluan “teologi transformatif” itu rupanya tidak hanya muncul di Indonesia, akan tetapi juga di negeri-negeri muslim lainnya. Kita bisa menyebut Dr. Hassan Hanafi (Mesir) yang terkenal dengan gagasan AI- Yasari ‘l-Islami (Kiri Islam) dan menulis karya monumental “Mina ‘l-Aqidah ila ‘l-Thawrah” (Dari Teologi ke Revolusi) sebanyak 5 jilid. Juga Ziaul Haque (Pakistan, bukan Zia ul Haq yang rnantan Presiden) yang menulis tulisan yang cukup provokatif, “Revelation and Revolution in Islam” (Wahyu dan Revolusi dalam Islam).

Selain itu harus pula disebut nama Asghar Ali Engineer (India), yang terjemahan tulisannya “Islam and Its Relevance to Our Age” ada di tangan pembaea sekarang ini. Berbeda dengan kedua nama yang disebutkan di atas, Asghar Ali Engineer bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga seorang aktifis. Kebetulan, ia merupakan pernimpin salah satu kelompok Syi’ah Isma’iliyah, Daudi Bohras (Guzare Daudi) yang berpusat di Bombay India. MeIalui wewenang keagamaan yang ia rniliki, Asghar Ali berusaha menerapkan gagasan-gagasannya. Untuk itu ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, mempertahankan kemapanan.

Untuk memahami latar belakang keagamaan Asghar AIi, ada baiknya diketahui sepintas laIu kelompok Daudi Bohras ini. Para pengikut Daudi Bohras dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki Amiru1 Mukminin. Mereka mengenal 21 orang Imam. Imam mereka yang terakhir Mawlana Abul-Qasim al-Thayyib yang menghilang pada tahun 526 H. Akan tetapi mereka masih pereaya bahwa ia masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para Da’i (dari perkataan itu berasal ungkapan Daudi) yang selalu berhubungan dengan Imam terakhir itu. Untuk diakui sebagai seorang Da’i tidaklah mudah. Ia harus mempunyai 94 kualifikasi yang diringkas dalam 4 kelompok: (1) kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) kualifikasi-kualifikasi moral dan teoritikal, dan (4) kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian.

Yang menarik adalah bahwa di antara kualifikasi itu seorang Da’i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang meIawan kezaliman. Asghar Ali adalah seorang Da’i. Dengan memahami posisi Asghar di atas kita tidak heran mengapa Asghar Ali Engineer sangat vokal dalam menyoroti kezaliman dan penindasan. Ia menganjurkan bukan sekedar merumuskan “teologi transformatif” akan tetapi lebih dari itu. Asghar Ali menghimbau generasi muda Islam untuk merekonstruksi”teologi radikal transformatif”. Ketika gagasan TeoIogi Pembebasan muncuI di kalangan gereja Katolik di Amerika Latin, yang temyata tidak direstui Vatikan, ia menulis artikeI “Teologi Pembebasan daIam Islam”.

Tulisan-tulisan daIam tulisan ini sarat dengan analisa filosofikal dan historikal untuk merumuskan “Teologi Pembebasan dalam konteks modem” seperti diinginkan oleh Asghar Ali Berdasarkan telaah kesejarahan terhadap dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW di masa-masa permulaan, misaInya, Asghar Ali sampai pada kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang revolusioner, baik dalam ucapan maupun dalam tindakan, dan beliau berjuang untuk melakukan perubahan-perubahan seeara radikal dalam struktur masyarakat di zamannya. Bertolak dari situ, agaknya, lalu Asghar Ali Engineer merevisi konsep dan pengertian mukmin dan kafir, yang berbeda dengan apa yang umum dipahami oleh umat Islam sekarang.

Ia menulis: “ ... orang-orang kafir dalam arah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menumpuk kekayaan dan terus membiarkan kezaliman dalam masyarakat serta merintangi upaya-upaya menegakkan keadilan”. Dengan demikian bagi Asghar Ali, seorang mukmin sejati bukanlah sekedar orang yang percaya kepada Allah akan tetapi juga ia harus seorang mujahid yang berjuang menegakkan keadilan, melawan kezaliman dan penindasan.

Jadi, kalau ia tidak berjuang menegakkan keadilan dan meIawan kezaliman serta penindasan, apaIagi kalau ia justru mendukung sistem dan struktur masyarakat yang tidak adil, walaupun ia percaya kepada Tuhan, orang itu, dalam pandangan Asghar, masih dianggap tergolong kafir. Pemahaman dan penafsiran konsep mukmin dan kafir ini, saya rasa, adalah kunci untuk memahami pemikiran Asghar Ali yang pasti, untuk banyak orang akan mengagetkan.

Dari situ ia menyodorkan reinterpretasi dan rekonseptualisasi tentang berbagai terma-terma keagamaan, dan menawarkan reevaluasi terhadap berbagai gerakan-gerakan umat Islam di masa lalu dalam perspektif Teologi Pembebasan yang menuntut perubahan struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Asghar bahkan memaksa kita untuk mernikirkan kembali asumsi-asumsi kepercayaan, pemikiran dan sikap keberagamaan kita secara radikal. Tulisan Asghar disini membantu kita untuk melakukan pemikiran kembali itu.

Analisis Pemikiran Tokoh Teologi Pembebasan Islam

1. Ali Syariati dan Humanisme Islam

Ali Syariati adalah seorang sarjana muslim yang disebut-sebut sebagai seorang ideolog revolusi Islam di Iran. Ia melahap habis pemikiran filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern, dan secara cerdik menggunakan hazanah tersebut secara kritis untuk menganalisis kondisi sosial politik umat Islam. Usaha besar Syariati terletak pada upayanya untuk membeberkan kekhususan ideologi dan kebudayaan Islam, yang dengan demikian menunjukkan terdapat beberapa asas pokok pembebasan dalam agama Islam.

Ali Syariati menganalisis bahwa sesungguhnya dalam diri manusia terdapat nilai-nilai humanisme sejati yang bersifat ilahiyah sebagai warisan budaya moral dan keagamaan. Manusia adalah makhluk yang sadar-diri, dapat membuat pilihan-pilihan dan dapat menciptakan, sehingga di sepanjang sejarah umat manusia berusaha merealisasikan nilai-nilai humanisme tersebut meski yang didapatinya adalah kegetiran dan petaka saat melawan kekuasaan jahat dan penindas. Mengenai hal ini Syariati menyajikan tokoh-tokoh simbolik Kain dan Habel untuk menjelaskan dan menganalisis sejarah kekuasaan.

Menurut Qur'an Kain dan Habel mempersembahkan kurban kepada Allah. Hanyak kurban Habel yang diterima, sementara Kain, karena iri hati, membunuh Habel. Kain adalah petani dan Habel adalah gembala. Syariati melihat hal ini sebagai munculnya monopoli produksi pertanian dan hak milik pribadi yang menyebabkan munculnya ketidaksamaan ekonomis dan adanya dominasi kekuasaan. Dalam pandangan Syariati figur simbolis Kain dan Habel ini hadir di tengah sejarah kita dalam tiga bidang: uang, kekuasaan dan agama. Fir'aun adalah tokoh simbolis yang melambangkan kekuasaan, Croesus melambangkan kekayaan, dan Balaam memerankan kaum rohaniawan dan agamawan yang memonopoli agama sebagai sistem upacara ritual. Ketiganya tak henti-hentinya berkolaborasi satu sama lain dalam membangun dan melestarikan kecenderungan sejarah. Di abad Pertengahan, manusia dikurung oleh Gereja Abad Pertengahan dan sistem teokrasi yang menindas, lalu di abad Modern yang menjunjung tinggi asas liberalisme manusia dijanjikan demokrasi sebagai kunci pembebasan namun yang didapatinya adalah teokrasi baru di tangan kapitalisme. Demikian juga komunisme yang menjanjikan persamaan dan kesetaraan ternyata menghasilkan fanatisme kekuasaan yang sama mengerikannya dengan Gereja Pertengahan. Di sisi lain kapitalisme telah menjadi imperialisme dan terus berkembang menjadi sebuah sistem yang mendominasi ekonomi dan kebudayaan negara-negara dunia ketiga.

Kapitalisme telah menciptakan kebudayaan materialis yang seragam dan dalam proses melucuti akar-akar kebudayaan dan keagamaan rakyat, melucuti jati diri dan kemanusiaan mereka sehingga menjadi objek-objek yang mudah dieksploitasi. Dan celakanya dominasi budaya Barat ini dilestarikan secara sukarela oleh para intelektual setempat tanpa memahami hakikat baru penjajahan atas negara-negara dunia ketiga ini. Dalam pandangan Ali Syariati semua ideologi dunia ini telah gagal membebaskan manusia dan sebaliknya menciptakan bentuk-bentuk ketidakadilan baru dan penindasan baru pula dalam ungkapan dan sarana yang berbeda. Karenanya untuk mengatasi problem sosial ini harus dicari jalan baru, sebuah jalan ketiga yang menurut Ali Syariati bisa diperankan oleh Islam. Dalam konteks ini Ali Syariati nampaknya memimpikan lahirnya nabi-nabi baru. Nabi-nabi baru yang diperankan oleh para pemimpin spiritual atau intelektual sebagai para pemikir bebas yang telah memperoleh pencerahan.

Menurut hemat penulis, gagasan Ali Syariati ini sangat dekat dengan gagasan Gramsci yang memberi arti penting bagi keberadaan intelektual organik. Sebagaimana Gramsci, Ali Syariati menggambarkan nabi-nabi baru atau para pemikir bebas ini sebagai pemimpin spiritual atau intelektual yang mampu berbahasa selaras dengan bahasa rakyat pada zamannya, juga mampu merumuskan pemecahan-pemecahan masalah sesuai dengan suara-suara dan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Mereka membimbing dan bekerja demi keadilan, serta berjuang demi pembebasan umat manusia dari ketidakadilan, penindasan, pemiskinan dan penjajahan. Inilah makna kesyahidan menurut Ali Syariati, yang harus dijalani oleh para Nabi yang dalam tradisi Syiah pernah dihadapi oleh Imam Husayn (Michael Amaladoss, 2000: 238-240).

Ali Syariati membubuhkan spirit pembebasan Islam dalam sebuah bait doa dalam Martyrdom berikut ini: *Ya Allah, Tuhan orang-orang yang terampas! Engkau hendak merahmati, Orang-orang yang terampas di dunia ini, Orang kebanyak yang bernasib tak berdaya, Dan kehilangan hidup, Orang yang diperbudak sejarah,Korban-korban penindasan, Dan penjarahan waktu, Orang-orang celaka di atas bumi ini, Menjadi pemimpin-pemimpin umat manusia, Dan pewaris-pewaris bumi, Sekarang sudah tiba waktunya, Dan orang-orang terampas di atas bumi ini, Merupakan pengharapan akan janji-Mu.*

2. Asghar Ali Engineer dan Elemen Pembebasan dalam Qur'an

Jika Ali Syariati menggali spirit pembebasan melalui pemaknaan atas tokoh-tokoh simbolis dalam hazanah kebudayaan Islam, maka Asghar Ali Engineer, seorang ahli teologi dan aktivis HAM ini, cenderung menggunakan pendekatan tekstual untuk menggali elemen-elemen dan prinsip-prinsip pembebasan dalam Islam yang terangkum dalam penegasannya mengenai persamaan dan keadilan (Michael Amaladoss, 2000: 240-249). Namun demikian rupanya keduanya juga memiliki kedekatan konseptual. Sebagaimana Ali Syariati, Asghar Ali juga menganggap penting peran kenabian, terutama keberadaan Nabi Muhammad SAW dalam pembaruan sosial. Nabi Muhammad bukan sekadar guru, melainkan juga seorang pejuang dan aktivis yang diutus untuk membebaskan rakyat dari kebodohan dan penindasan. Ia membebaskan rakyat Mekkah dari ketidakadilan sosial dan ekonomi serta memberikan inspirasi pengikutnya untuk membebaskan dirinya dan masyarakat lain dari penindasan oleh kerajaan Romawi dan Sassanid.

Lebih jauh secara doktriner, menurut Asghar Ali, ajaran tawhid yang disampaikan Nabi tidak hanya mengandung makna teologis tentang konsep monoteisme Tuhan, tetapi juga memuat makna sosiologis sebagai kesatuan sosial. Argumentasi ini didasarkan pada firman Allah berbunyi: Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu semua dari seorang laki-laki dan perempuan, dan telah membuat kamu menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang termulia dari antara kamu semua di mata Allah adalah orang yang paling jujur (dan adil)**.** Lebih lanjut kesatuan sosial yang diajukan Qur'an ini bukan hanya bermatra rasial dan etnis, tetapi juga meliputi penghapusan ketidakadilan akibat dari perbedaan ekonomis. Argumentasi ini didasarkan pada dua kata yang digunakan dalam Qur'an yang menyatakan keadilan, yakni adl dan qist. Adl bermakna ganda, bisa berarti keadilan juga bisa berarti menyamakan atau meratakan. Lawannya adalah zulm yang berarti penindasan. Sedangkan qist bermakna distribusi yang sama, yang adil, yang wajar, atau pemerataan. Distribusi yang sama ini juga merujuk pada sumber-sumber daya jasmani, yang juga meliputi distribusi kekayaan sebagaimana dikukuhkan dalam Qur'an. Kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan kamu orang-orang kaya (Qur'an, 59: 7).

Dari ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap orang tidak boleh menyimpan lebih banyak dari yang perlu, apalagi ditujukan untuk hidup berlebihan, bermewah-mewah dan berpamer ria. Karena cara hidup yang demikian itu akan mengantarkan pada kehancuran.Dan bila kami akan menghancurkan sebuah kota, kami mengirimkan perintah kepada penghuninya yang hidup bermewah-mewah, dan kemudian mereka melakukan hal yang menjijikkan di dalamnya, dan dengan demikian dunia (terkutuk) terjadi padanya, dan kami membinasakannya sampai musnah sama sekali. (Qur'an, 17: 16). Selain teks-teks di atas, Qur'an juga secara eksplisit menunjukkan pembelaannya terhadap orang-orang miskin dan tertindas (kaum mustadh'afin). Berikut ini petikan ayat tersebut:Mengapa kamu tidak mau berjuang demi kepentingan Allah dan orang-orang lemah di tengah-tengah rakyat, dan demi kepentingan kaum perempuan dan anak-anak yang berkata: Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kota yang orang-orangnya penindas ini(Qur'an, 4: 75). Juga: Dan kami ingin menunjukkan perkenan kepada orang-orang yang tertindas di atas bumi, dan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris (Qur'an, 28: 5). Demikian sentralnya konsep keadilan ini di dalam agama Islam, Qur'an berungkali menegaskan perintah dan ajakan untuk bersikap adil dalam segala urusan ketika berhubungan dengan semua orang dengan latar belakang apapun dan dalam situasi bagaimanapun. Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman jadilah saksi-saksi teguh akan Allah dalam keadilan, dan jangan kamu biarkan kebencian akan orang-orang manapun membujuk kamu sehingga kamu tidak berbuat adil. Berbuat adillah, itu lebih dekat dengan kesalehan (Qur'an, 5: 8) Allah juga memberikan penegasan mengenai larangan berbuat royal dan boros yang menunjukkan hidup bermewah-mewahan: Perhatikan perhiasanmu di setiap tempat ibadah dan makan serta minumlah, tetapi jangan menjadi orang pemboros (peroyal) (Qur'an, 7: 31). Selain berbagai seruan untuk berbuat adil di atas, Islam juga mencontohkan bagaimana mempraktekkan tindakan yang adil itu dalam kehidupan. Melalui konsep zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam, setiap individu umat Islam diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaannya kepada kaum miskin yang tidak bisa terlibat dalam proses-proses produksi. Allah berfirman:Dan dalam kekayaan mereka orang-orang yang berkekurangan dan melarat (fakir miskin) mempunyai bagian semestinya (Qur'an, 51: 19)

Dalam bagian lain Allah berkata: Apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Dialah yang menyingkirkan yatim piatu dan tidak mendesak orang-orang lain untuk memberikan makan orang-orang yang berkekuarangan. Celakalah orang-orang yang menjalankan shalat tapi tidak perduli dengan shalat mereka: yang pamer kesalehan tetapi tidak memberikan sedekah kepada orang-orang yang melarat (Qur'an, 107: 1-7). Demikianlah prinsip-prinsip dan semangat pembebasan dalam Islam yang dipantulkan melalui berbagai ayat dalam Kitab Suci Qur'an. Kenyataan itu semakin meneguhkan bahwa dalam tradisi Islam sendiri sesungguhnya memuat spirit pembebasan yang potensial menjadi suatu gerakan masif. Yakni suatu gerakan untuk melawan segala bentuk penindasan dan penjajahan yang membuat rakyat miskin dan terpinggirkan. Bahkan di bawah panji-panji keadilan dan kesamaan, teologi pembebasan dalam Islam melampaui berbagai ranah, mulai dari bersikap adil terhadap kaum perempuan sampai penghormatan dan sikap terbuka serta toleran terhadap agama-agama dan keyakinan lain yang dianut oleh umat manusia.

3. Hassan Hanafi dan Kiri Islam

Hassan Hanafi adalah seorang pemikir revolusioner, reformis tradisi intelektual Islam klasik, dan sekaligus penerus gerakan Al-Afghani. Ia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Sorbonne, Paris, pada 1966, dan menjadi guru besar pada fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia menjadi terkenal setelah meluncurkan proyek pemikiran revolusionernya dalam sebuah jurnal *Al-Yasar al-Islami: Kitabat fi Al-Nahdla Al-Islamiyah* (Kiri Islam: Beberapa Esei tentang Kebangkitan Islam) yang terbit pada 1981 segera setelah kemenangan revolusi Islam di Iran.

Sejak saat itulah pemikiran Hassan Hanafi akrab diidentikkan dengan Kiri Islam yang merupakan manifesto ideologi pembebasan dalam Islam. Seperti apakah konsep Kiri Islam itu? Dalam sebuah artikel panjang berjudul Madza yakni al-yasar al-islami (Apakah Kiri Islam itu?) yang dimuat dalam jurnal Al-Yasar al-Islami, Hassan Hanafi menegaskan bahwa Kiri Islam adalah nama ilmiah atau istilah akademik yang menunjuk pada gagasan yang berpihak kepada orang-orang yang dikuasai, kaum tertindas, dan orang miskin. Kiri Islam adalah gerakan transformasi sosial untuk mengubah kesadaran individual menjadi kesadaran kolektif dalam rangka menyuarakan mayoritas yang diam di antara umat Islam, membela kepentingan seluruh umat manusia, mengambil hak-hak kaum miskin dari tangan orang-orang kaya, memperkuat orang-orang yang lemah dan menjadikan manusia sama dan setara. Salah satu elemen revolusionernya bisa ditemukan dalam Qur'an berbunyi: Dan Aku menhendaki kemenangan orang-orang yang tertindas di bumi, dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dan pewaris-pewaris (Qur'an, 28: 5) (Kazuo Shimogaki, 1993: 85-90).

Sebagaimana Ali Syariati, Hassan Hanafi yang memperoleh pendidikan Barat di Paris memanfaatkan hazanah filsafat dan ilmu-ilmu sosial modern untuk menganalisis kondisi sejarah dan realitas umat Islam di Arab dan di bagian dunia lain yang terpuruk dalam kemisikinan dan penjajahan. Melalui analisisnya yang tajam terhadap imperialisme Barat dan kondisi internal umat Islam inilah Hassan Hanafi akhirnya sampai pada gagasannya mengenai Kiri Islam. Hassan Hanafi memperingatkan pembacanya akan bahaya imperialisme kultural Barat yang bisa menghapus kekayaan budaya bangsa-bangsa serta menciptakan keterbelakangan. Liberalisme dan kapitalisme yang telah bermetamorfosis menjadi imperialisme budaya (pengetahuan) dan kapitalisme multinasional ternyata didikte oleh kebudayaan Barat yang berperilaku seperti kolonial yang hanya melayani kelas-kelas elit yang menguasai aset negara.

Sementara di sisi lain mayoritas rakyat tetap tertindas, miskin dan terpinggirkan dari proses-proses sejarah yang menentukan ini. Celakanya, menurut Hassan Hanafi, pengaruh eksternal tersebut memperoleh dukungannya dari kondisi internal umat Islam sendiri. Tendensi keagamaan umat Islam telah terkooptasi kekuasaan yang hanya meletakkan Islam sebagai ritus dan kepercayaan ukhrawi. Tekstualisme dalam penafsiran Kitab Suci secara dramatis telah menjauhkan umat Islam dari kondisi eksistensi realnya, berupa keterbelakangan, kemiskinan dan ketertindasan. Alih-alih bisa membebaskan dari kondisi-kondisi ini, fenomena ritualisme itu telah menjadi topeng yang menyembunyikan dominasi Barat dan kapitalisme nepotis. Selain kedua hal di atas, bahaya lain juga datang dari Marxisme yang berpretensi mewujudkan keadilan dan menentang kolonialisme ternyata tidak diikuti dengan pembebasan rakyat dan pengembangan khazanah mereka (yakni khazanah agama-agama) sebagai energi untuk mewujudkan tujuan-tujuan kemerdekaan nasional. Sementara nasionalisme revolusioner sendiri yang tampak berhasil membuat perubahan-perubahan radikal dalam sistem politik dan ekonomi ternyata tidak berumur lama. Karena ia berhenti hanya sebatas slogan sehingga tidak mampu mempengaruhi kesadaran mayoritas rakyat (Kazuo Shimogaki, 1993: 91-92).

Akhirnya berlandaskan analisis sosial politik inilah Hassan Hanafi menganggap penting upaya untuk memperkuat jati diri umat Islam, yakni dengan memasuki medan percaturan yang paling mendasar dalam kebudayaan dan kesadaran historis masyarakat. Dan Kiri Islam ditujukan untuk kepentingan ini. Yakni membekali pribadi dan menggugah kesadaran untuk menyongsong kebangkitan rakyat melalui upaya revitalisasi pemikiran keislaman dengan memantapkan posisi rakyat dalam sejarah (Shimogaki, 1993: 140).

Proyek Kiri Islam Hassan Hanafi setidaknya meliputi dua aspek penting. Pertama, merevitalisasi dimensi revolusioner dalam khazanah intelektual Islam klasik. Kedua menantang peradaban Barat yang hegemonik. Pada aspek pertama, Kiri Islam telah menggali paradigma independen pemikiran keagamaan yang menekankan arti penting gerakan rasionalisme, naturalisme dan kebebasan manusia. Dalam hal ini Hassan Hanafi menilai mu'tazilah telah mewariskan tradisi yang berharga mengenai kebebasan dan tanggung jawab manusia atas perbuataannya, sehingga manusia menyadari perannya untuk selalu berusaha mewujudkan kebaikan melalui perbuatannya yang disertai dengan keyakinan iman. Dalam hal ini kepemimpinan umat islam harus berdasarkan pemilihan demokratis dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap muslim. Demikian juga sesuai dengan tanggung jawabnya, manusia dituntut teguh untuk merebut hak-haknya dan mengembalikan martabatnya yang dirampas. Kiri Islam juga juga memperhitungkan semangat kaum Syi'ah yang menancapkan harga diri Islam melawan kolonialisme dan westernisme.

Dalam kehidupan sosial dan politik, Kiri Islam menggunakan pendekatan kemaslahatan serta membela kepentingan rakyat dalam penetapan hukum. Ini dianut berdasarkan paradigma fiqh dan usul-fiqh Malikiyah yang berasal dari tradisi Abdullah ibn Mas'ud yang dikembangkan dari Umar ibn Khattab yang membela kemaslahatan umat secara realistis dan mengetahuinya meskipun belum ada petunjuk wahyu

hingga datang wahyu yang membenarkan pendapatnya. Oleh karena itulah dalam menafsirkan teks, Kiri Islam senantiasa menggunakan akal seoptimal mungkin sebagaimana yang dilakukan Hanafiyah dan memadukannya dengan cermin realitas sebagaimana Syafi'iyah, dengan tanpa meninggalkan komitmen pada teks itu sendiri sebagaimana dilakukan Hambaliyah. Ini karena bagi Kiri Islam, teks adalah refleksi atas realitas itu sendiri.Kiri Islam memperoleh akarnya dari filsafat rasional yang sudah dibangun oleh Al-Kindi dan Ibnu Rusyd, juga pada ilmu-ilmu rasional murni dalam khazanah klasik. Kiri Islam berpretensi untuk mengangkat kembali ilmu-ilmu klasik sepertimatematika, fisika, arsitektur, kimia, kedokteran, biologi, farmasi, dan sebagainya dalam pangkuan Islam. Kiri Islam juga berakar pada ilmu-ilmu kemanusiaan yang sudah diletakkan dasarnya oleh pendahulu kita, seperti ilmu bahasa, sastra, geografi, sejarah, psikologi dan sosiologi. Selain itu Kiri Islam juga memiliki akar pada ilmu-ilmu normatif tradisional murni (al-ulum al-naqliyah al-khalizhah), yakni ilmu yang pertama kali berkembang di sekitar wahyu seperti: ilmu-ilmu Qur'an, Hadist, Tafsir dan Fiqh.

Beberapa cabang itu bisa dikembangkan secara kontemporer. Misalnya asbab al-nuzuli dalam ilmu-ilmu Qur'an dimaksudkan untuk mengutamakan realitas, ilmu nasikh wa al-mansukh untuk melihat aspek gradualisme dalam penerapan syariah, dan lainnya. Semua ini bisa dikembangkan menjadi ilmu eksperimental, seperti statistik, sosiologi, historiografi, ideologi, sistem politik dan ekonomi.Kiri Islam juga mengkaji kembali ajaran tentang ibadah yang selama ini menjadi seolah-olah tujuan padahal sesungguhnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Menurut Hanafi, orang yang berhenti pada sarana tanpa pernah sampai tujuan maka ia sesungguhnya tak pernah shalat, puasa, haji dan syahadat. Syahadat tidak semata-mata mengucapkan Asyhadu an-la Ilaha Illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Melainkan sebuah persaksian yang aktif, yang dimulai dengan bentuk negatif la Ilaha yang bermakna negasi atas kekuatan penindas dan tuhan-tuhan palsu di sekitar kita, baik dalam bentuk uang maupun kekuasan; lalu penetapan Illa Allah berarti hanya Allah yang Maha Perkasa (Kazuo Shimogaki, 1993: 95-106). Demikianlah dengan merevitalisasi seluruh khazanah intelektual klasik ini hendak ditunjukkan bahwa kebangkitan masyarakat Islam akan datang dari dalam, yakni melalui pengembangan dimensi internal umat Islam sendiri. Adapun aspek kedua dari proyek Kiri Islam adalah melawan hegemoni kebudayaan Barat. Dalam konteks ini tugas Kiri Islam adalah menghadapi ancaman imperialisme ekonomi korporasi multinasional dan imperialisme kebudayaan yang menggerogoti jati diri dan kemandirian umat. Tugas Kiri Islam adalah melokalisir Barat, yakni mengembalikan Barat kepada batas-batas alamiahnya dan menepis mitos bahwa Barat adalah pusat peradaban dunia yang berambisi menjadi paradigma kemajuan bagi bangsa-bangsa lain. Dengan penolakan ini berarti bangsa-bangsa non-Barat berusaha melawan dominasi dan hegemoni yang telah merenggut kemerdekaan dan kepribadian bangsa-bangsa lain, sehingga bisa menentukan nasib dan kesejahteraannya sendiri (Kazuo Shimogaki, 1999: 106-108).

Kongklusi

Dari paparan di atas, maka setidaknya dapat disimpulkan dalam catatan penutup ini bahwa teologi pembebasan adalah teori ketuhanan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pembebasan kaum tertindas baik secara kultural maupun secara struktural. *Pertama*, teologi pembebasan lahir dari pembacaan yang kaya terhadap khazanah pemikiran maupun kebudayaan internal masing-masing agama atau tradisi komunitas tertentu. Dengan menyadari ini kita akan memperoleh kesimpulan bahwa sesungguhnya spirit pembebasan sudah ada dalam pengalaman dalam tiap-tiap agama dan kebudayaan, termasuk dalam agama Islam. *Kedua*, semangat pembebasan hanya mungkin manifes jika perumusan teologi diorientasikan pada solidaritas dan pembebasan terhadap umat manusia yang lemah. Oleh karena itu dibutuhkan kehendak, kesadaran diri, kebebasan dan tanggung jawab setiap individu untuk bersama-sama melakukan transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih adil, setara dan manusiawi. Inilah makna teologi pembebasan dalam masyarakat Islam. Praktek ritual adalah penting namun ia memerlukan indikator sosial. Indikator material ibadah yang diterima Tuhan adalah keberhasilannya menegakkan kebenaran dan keadilan (QS. Al Maidah; 8). Sedangkan indikator sosial ibadah yang tidak diterima adalah membiarkan ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertindasan di sekitar kita. (QS. Al Maa'un). Akhirnya, hadirnya teologi pembebasan dalam agama-agama sesungguhnya adalah cermin bagi diri umat beragama untuk selalu terbuka terhadap pengetahuan dan realitas alam yang diwahyukan Tuhan. Karena realitas inilah yang ikut memperkaya wawasan kita tentang iman dan cara berteologi yang relevan dengan konteks zaman. [Catatan tambahan: Dalam tulisannya berjudul *Al-din wa al-tsaurah* (Agama dan Pembebasan), Hassan Hanafi tidak saja mengakui bahwa Kiri Islam diilhami oleh momentum kesuksesan Revolusi Islam Iran dan mengklaim sebagai kelanjutan dari jurnal Al-Urwatul Wutsqa-nya Jamaluddin Al-Afghani yang gigih melawan imperialisme Barat dan berobsesi mempersatukan umat islam. Kiri Islam juga diinspirasikan oleh revolusi agama-agama lain. Seperti revolusi yang terjadi dalam sejarah Yudaisme dan Kristiani, perlawanan Ibnu Uqaibah melawan Romawi, pemberontakan petani di Jerman abad XVI, teologi pembebasan di Amerika Latin dan revolusi Gereja Hitam di Amerika Utara. Selain itu juga revolusi di luar agama-agama monoteis seperti revolusi Budhis di Vietnam, revolusi Konfusionisme di Cina dan revolusi agama-agama Afrika melawan penjajah Kulit Putih di Afrika Utara.[]

APPENDIKS 1:
TELAAH KRITIS PEMIKIRAN HASSAN HANAFI

A. Riwayat Hidup dan Kondisi Sosio-Kultural Mesir

Hassan Hanafi adalah Guru Besar pada fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, di dekat Benteng Salahuddin, daerah perkampungan Al-Azhar. Kota ini merupakan tempat bertemunya para mahasiswa muslim dari seluruh dunia yang ingin belajar, terutama di Universitas Al-Azhar. Meskipun lingkungansosialnya dapat dikatakan tidak terlalu mendukung, tradisi keilmuan berkembang di sana sejak lama. Secara historis dan kultural, kota Mesir memang telah dipengaruhi peradaban-peradaban besar sejak masa Fir'aun, Romawi, Bizantium, Arab, Mamluk dan Turki, bahkan sampai dengan Eropa modern. Hal ini menunjukkan bahwa Mesir, terutama kota Kairo, mempunyai arti penting bagi perkembangan awal tradisi keilmuan.

B. Hassan Hanafi Masa kecil

Hanafi berhadapan dengan kenyataan-kenyataan hidup di bawah penjajahan dan dominasi pengaruh bangsa asing. Kenyataan itu membangkitkan sikap patriotik dan nasionalismenya, sehingga tidak heran meskipun masih berusia 13 tahun ia telah mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan perang melawan Israel pada tahun 1948. Ia ditolak oleh Pemuda Muslimin karena dianggap usianya masih terlalu muda. Di samping itu ia juga dianggap bukan berasal dari kelompok Pemuda Muslimin. Ia kecewa dan segera menyadari bahwa di Mesir saat itu telah terjadi problem persatuan dan perpecahan. Ketika masih duduk di bangku SMA, tepatnya pada tahun 1951, Hanafi menyaksikan sendiri bagaimana tentara Inggris membantai para syuhada di Terusan Suez. Bersama-sama dengan para mahasiswa ia mengabdikan diri untuk membantu gerakan revolusi yang telah dimulai pada akhir tahun 1940-an hingga revolusi itu meletus padatahun 1952.

Atas saran anggota-anggota Pemuda Muslimin, pada tahun ini ini pula ia tertarik untuk memasuki organisasi Ikhwanul Muslimin. Akan tetapi, di tubuhIkhwan; pun terjadi perdebatan yang sama dengan apa yang terjadi di Pemuda Muslimin. Kemudian Hanaafi kembali disarankan oleh para anggota Ikhwanul Muslimin untuk bergabung dalam organisasi Mesir Muda. Ternyata keadaan di dalamtubuh Mesir Muda sama dengan kedua organisasi sebelumnya. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan Hanafi atas cara berpikir kalangan muda Islam yang terkotak-kotak. Kekecewaan ini menyebabkan ia memutuskan beralih konsentrasi untuk mendalami pemikiran-pemikiran keagamaan, revolusi, dan perubahan sosial. Ini juga yang menyebabkan ia lebih tertarik pada pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb, seperti tentang prinsip-prinsip Keadilan Sosial dalam Islam.

Sejak tahun 1952 sampai dengan 1956 Hanafi belajar di Universitas Cairo untuk mendalami bidang filsafat. Didalam periode ini ia merasakan situasi yang paling burukdi Mesir. Pada tahun 1954 misalnya, terjadi pertentangan keras antara Ikhwan dengan gerakan revolusi. Hanafi berada pada pihak Muhammad Najib yang berhadapan dengan Nasser, karena baginya Najib memiliki komitmen dan visi keIslaman yang jelas. Kejadian-kejadian yang ia alami pada masa ini, terutama yang ia hadapi di kampus, membuatnya bangkit menjadi seorang pemikir, pembaharu, dan reformis. Keprihatinan yang muncul saat itu adalah mengapa umat Islam selalu dapat dikalahkan dan konflik internal terus terjadi. Tahun-tahun berikutnya, Hanafi berkesempatan untuk belajar di Universitas Sorborne; Perancis, pada tahun 1956 sampai 1966.

Di sini ia memperoleh lingkungan yang kondusif untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan mendasar yang sedang dihadapi oleh negerinya dan sekaligus merumuskan jawaban-jawabannya. Di Perancis inilah ia dilatih untuk berpikir secara metodologis melalui kuliah-kuliah maupun bacaan-bacaan atau karya-karya orientalis. Ia sempat belajar pada seorang reformis Katolik, Jean Gitton; tentang metodologi berpikir, pembaharuan, dan sejarah filsafat. Ia belajar fenomenologi dari Paul Ricouer, analisis kesadaran dari Husserl, dan bibingan penulisan tentang pembaharuan Ushul Fikih dari Profesor Masnion. Semangat Hanafi untuk mengembangkan tulisan-tulisannya tentang pembaharuan pemikiran Islam semakin tinggi sejak ia pulang dari Perancis pada tahun 1966. Akan tetapi, kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel tahun 1967 telah mengubah niatnya itu. Ia kemudian ikut serta dengan rakyat berjuang dan membangun kembali semangat nasionalisme mereka. Pada sisi lain, untuk menunjang perjuangannya itu, Hanafi juga mulai memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan akademis yang telahis peroleh dengan memanfaatkan media massa sebagai corong perjuangannya. Ia menulis banyak artikel untuk menangggapi masalah-masalah aktual dan melacak faktor kelemahan umat Islam.

Di waktu-waktu luangnya, Hanafi mengajar di UniversitasKairo dan beberapa universitas di luar negeri. Ia sempat menjadi profesor tamu di Perancis (1969) dan Belgia (1970). Kemudian antara tahun 1971 sampai 1975 iamengajar di Universitas Temple, Amerika Serikat. Kepergiannya ke Amerika, sesungguhnya berawal dari adanya keberatan pemerintah terhadap aktivitasnya di Mesir, sehingga ia diberikan dua pilihan apakah ia akan tetap meneruskan aktivitasnya itu atau pergi ke Amerika Serikat. Pada kenyataannya, aktivitasnya yang baru di Amerika memberinya kesempatan untuk banyak menulis tentang dialog antar agama dengan revolusi.

Baru setelah kembali dari Amerika ia mulai menulis tentang pembaruan pemikiran Islam. Ia kemudian memulai penulisan buku *Al-Turats wa al-Tajdid*. Karya ini, saat itu, belum sempat ia selesaikan karena ia dihadapkan pada gerakananti-pemerintah Anwar Sadat yang pro-Barat dan"berkolaborasi" dengan

Israel. Ia terpaksa harus terlibat untuk membantu menjernihkan situasi melalui tulisan-tulisannya yang berlangsung antara tahun 1976 hingga 1981. Tulisan-tulisannya itulah yang kemudian tersusun menjadi buku *Al Din wa Al-Tsaurah*. Sementara itu, dari tahun 1980 sampai 1983 ia menjadi profesortamu di Univer-sitas Tokyo, tahun 1985 di Emirat Arab. Ia pun diminta untuk merancang berdirinya Universitas Fes ketika ia mengajar di sana pada tahun-tahun1983-1984.

Hanafi berkali-kali mengunjungi negara-negara Belanda, Swedia, Portugal, Spanyol, Perancis, Jepang, India, Indonesia, Sudan, Saudi Arabia dan sebagainya antara tahun 1980-1987. Pengalaman pertemuannya dengan para pemikir besar di negara-negara tersebut telah menambah wawasannya untuk semakin tajam memahami persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia Islam.Maka, dari pengalaman hidup yang ia peroleh sejak masih remaja membuat ia memiliki perhatian yang begitu besar terhadap persoalan umat Islam.

Karena itu, meskipun tidak secara sepenuhnya mengabdikan diri untuk sebuah pergerakan tertentu, ia pun banyak terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan pergerakan-pergerakan yang adadi Mesir. Sedangkan pengalamannya dalam bidang akademis dan intelektual, baik secara formal maupun tidak, dan pertemuannya dengan para pemikir besar dunia semakin mempertajam analisis dan pemikirannya sehingga mendorong hasratnya untuk terus menulis dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru untuk membantu menyelesaikan persoalan-persolan besar umat Islam.

C. Perkembangan Pemikiran dan Karya-karyanya

Untuk memudahkan uraian pada bagian ini, kita dapat mengklasifikasikan karya-karya Hanafi dalam tiga periode seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa penulis yang telah lebih dulu mengkaji pemikiran tokoh ini: Periode pertama berlangsung pada tahun-tahun 1960-an; periode kedua pada tahun-tahun 1970-an, dan periode ketiga dari tahun-tahun 1980-an sampai dengan 1990-an.

Pada awal dasawarsa 1960-an pemikiran Hanafi dipengaruhi oleh faham-faham dominan yang ber-kembang di Mesir, yaitu *nasionalistik-sosialistik populistik* yang juga dirumuskan sebagai *ideologi Pan Arabisme*, dan oleh situasi nasional yang kurang menguntungkan setelah kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel pada tahun1967. Pada awal dasawarsa ini pula (1956-1966), sebagaimana telah dikemukakan, Hanafi sedang beradadalam masa-masa belajar di Perancis.

Di Perancis inilah, Hanafi lebih banyak lagi menekuni bidang-bidang filsafat dan ilmu sosial dalam kaitannya dengan hasrat dan usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam. Untuk tujuan rekonstruksi itu, selama berada di Perancis ia mengadakan penelitian tentang, terutama, metode interpretasi sebagai upaya pembaharuan bidang ushul fikih (teori hukum Islam, *Islamic legal theory*) dan tentang fenomenologi sebagai metode untuk memahami agama dalam konteks realitas kontemporer. Penelitian itu sekaligus merupakan upayanya untuk meraih gelar doktor pada Universitas Sorbonne (Perancis), dan ia berhasil menulis disertasi yang berjudul *Essai sur la Methode d'Exegese* (Esai tentang Metode Penafsiran). Karya setebal 900 halaman itu memperoleh penghargaan sebagai karya ilmiah terbaik di Mesir pada tahun 1961. Dalam karyanya yaitu jelas Hanafi berupaya menghadapkan ilmu ushul fikih pada mazhab filsafat fenomenologi Edmund Husserl.

Pada fase awal pemikirannya iru, tulisan-tulisan Hanafi masih bersifat ilmiah murni. Baru pada akhir dasawarsa itu ia mulai berbicara tentang keharusan Islam untuk mengembangkan wawasan kehidupan yang progresif dan berdimensi pembebasan (taharrur, liberation). Ia mensyaratkan fungsi pembebasan jika memang itu yang diinginkan Islam agar dapat membawa masyarakat pada kebebasan dan keadilan, khususnya keadilan sosial, sebagai ukuran utamanya. Struktur yang populistik adalah manifestasi kehidupannya dan kebulatan kerangka pemikiran sebagai resep utamanya. Hanafi sampai pada kesimpulan bahwa Islam sebaiknya berfungsi orientatif bagi ideologi populistik yang ada. Pada akhir periode ini, dan berlanjut hingga awal periode 1970-an, Hanafi juga memberikan perhatian utamanya untuk mencari penyebab kekalahan umat Islam dalam perang melawan Israel tahun 1967. Oleh karena itu, tulisan-tulisannya lebih bersifat populis. Di awal periode 1970-an, ia banyak menulis artikel di berbagai media massa, seperti *Al Katib, Al-Adab, Al-Fikral-Mu'ashir,* dan *Mimbar Al-Islam.*

Pada tahun 1976, tulisan-tulisan itu diterbitkan sebagai sebuah buku dengan judul *Qadhaya Mu'ashirat fi Fikrina al-Mu'ashir*. Buku ini memberikan deskripsi tentang realitas dunia Arab saat itu, analisis tentang tugas para pemikir dalam menanggapi problema umat, dan tentang pentingnya pembaruan pemikiran Islam untuk menghidupkan kembali khazanah tradisional Islam. Kemudian, pada tahun 1977, kembali ia menerbitkan *Qadhaya Mu`ashirat fi al Fikral-Gharib*. Buku kedua ini mendiskusikan pemikiran parasarjana Barat untuk melihat bagaimana mereka memahami persoalan masyarakatnya dan kemudian mengadakan pembaruan. Beberapa pemikir Barat yang ia singgung itu antara lain Spinoza, Voltaire, Kant, Hegel, Unamuno, Karl Jaspers, Karl Marx, Marx Weber, Edmund Husserl, dan Herbert Marcuse.

Kedua buku itu secara keseluruhan merangkum dua pokok pendekatan analisis yang berkaitan dengan sebab-sebab kekalahan umat Islam; memahami posisi umat Islam sendiri yang lemah, dan memahami posisi Barat yang superior. Untuk yang pertama penekanan diberikan pada upaya pemberdayaan umat, terutama dari segi pola pikirnya, danyang kedua ia berusaha untuk menunjukkan bagaimana menekan superioritas Barat dalam segala aspek kehidupan. Kedua pendekatan inilah yang

nantinya melahirkan dua pokok pemikiran baru yang tertuang dalam dua buah karyanya, yaitu *Al-Turats wa al-Tajdid* (Tradisi dan Pembaruan), dan *Al-Istighrab* (Oksidentalisme).

Pada periode ini, yaitu antara tahun-tahun 1971-1975, Hanafi juga menganalisis sebab-sebab ketegangan antara berbagai kelompok kepentingan di Mesir, terutama antara kekuatan Islam radikal dengan pemerintah. Pada saat yang sama situasi politik Mesir mengalami ketidakstabilan yang ditandai dengan beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengan sikap Anwar Sadat yang pro-Barat dan memberikan kelonggaran pada Israel, hingga ia terbunuh pada Oktober 1981. Keadaan itu membawa Hanafi pada pemikiran bahwa seorang ilmuan juga harus mempunyai tanggung jawab politik terhadap nasib bangsanya. Untuk itulah kemudian ia menulis *Al-Din waal-Tsaurah fi Mishr* 1952-1981. Karya ini terdiri dari 8 jilid yang merupakan himpunan berbagai artikel yang ditulis antara tahun 1976 sampai 1981 dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1987. Karya itu berisi pembicaraan dan analisis tentang kebudayaan nasional dan hubungannya dengan agama, hubungan antara agama dengan perkembangan nasionalisme, tentang gagasan mengenai gerakan “Kiri Keagamaan” yang membahas gerakan-gerakan keagamaan kontemporer, fundamentalisme Islam, serta “Kiri Islam dan Integritas Nasional”. Dalam analisisnya Hanafi menemukan bahwa salah satu penyebab utama konflik berkepanjangan di Mesir adalah tarik-menarik antara ideologi Islam dan Barat dan ideologi sosialisme.

Ia juga memberikan bukti-bukti penyebab munculnya berbagai tragedi politik dan, terakhir, menganalisis penyebab munculnya radikalisme Islam. Karya-karya lain yang ia tulis pada periode ini adalah *Religious Dialogue and Revolution* dan *Dirasat al-Islamiyyah.* Buku pertama berisi pikiran-pikiran yang ditulisnya antara tahun 1972-1976 ketika ia berada di Amerika Serikat, dan terbit pertama kali pada tahun1977. Pada bagian pertama buku ini ia merekomendasikan metode hermeneutika sebagai metode dialog antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Sedangkan bagian kedua secara khusus membicarakan hubungan antara agama dengan revolusi, dan lagi-lagi ia menawarkan fenomenologi sebagai metode untuk menyikapi dan menafsirkan realitas umat Islam.

Sementara itu *Dirasat Islamiyyah*, yang ditulis sejak tahun 1978 dan terbit tahun 1981, memuat deskripsi dan analisis pembaruan terhadap ilmu-ilinu keIslaman klasik, seperti ushul fikih, ilmu-ilmu ushuluddin, dan filsafat. Dimulai dengan pendekatan historis untuk melihat perkembangannya, Hanafi berbicara tentang upaya rekonstruksi atas ilmu-ilmu tersebut untuk disesuaikan dengan realitas kontemporer. Periode selanjutnya, yaitu dasawarsa 1980-an sampai dengan awal 1990-an, dilatarbelakangi oleh kondisipolitik yang relatif lebih stabil ketimbang masa-masa sebelumnya.

Dalam periode ini, Hanafi mulai menulis *Al-Turats wa al-Tajdid* yang terbit pertama kali tahun 1980. Buku ini merupakan landasan teoretis yang memuat dasar-dasar ide pembaharuan dan langkah-langkahnya. Kemudian, ia menulis *Al-Yasar Al-Islamiy* (Kiri Islam), sebuah tulisan yang lebih merupakan sebuah “manifesto politik” yang berbau ideologis, sebagaimana telah penulis kemukakan secara singkat di atas. Jika Kiri Islam baru merupakan pokok-pokok pikiran yang belum memberikan rincian dari program pembaruannya, buku *Min Al-Aqidah ila Al-Tsaurah* (5 jilid), yang ditulisnya selama hampir sepuluh tahun dan baru terbit pada tahun 1988. Buku ini memuat uraian terperinci tentang pokok-pokok pembaruan yang ia canangkan dan termuat dalam kedua karyanya yang terdahulu. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan jika buku ini dikatakan sebagai karya Hanafi yang paling monumental. Satu bagian pokok bahasan yang sangat penting dari buku ini adalah gagasan rekonstruksi ilmu kalam.

Pertama-tama ia mencoba menjelaskan seluruh karya dan aliran ilmu kalam, baik dari sisi kemunculannya, aspek isi dan metodologi maupun perkembangannya. Lalu ia melakukan analisis untuk melihat kelebihan dan kekurangannya, terutama relevansinya dengan konteks modernitas. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa pemikiran kalam klasik masih sangat teoretis, elitis dan statis secara konsepsional. Ia merekomendasikan sebuah teologi atauilmu kalam yang antroposentris, populis, dan transformatif.

Selanjutnya, pada tahun-tahun 1985-1987, Hanafi menulis banyak artikel yang ia presentasikan dalam berbagai seminar di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Timor Tengah, Jepang, termasuk Indonesia. Kumpulan tulisan itu kemudian disusun menjad isebuah buku yang berjudul *Religion, Ideology, and Development* yang terbit pada tahun 1993. Beberapa artikel lainnya juga tersusun menjadi buku dan diberi judul *Islam in the Modern World* (2 jilid). Selain berisi kajian-kajian agama dan filsafat, dalam karya-karyanya yang terakhir pemikiran Hanafi juga berisi kajian-kajian ilmu sosial, seperti ekonomi dan teknologi. Fokus pemikiran Hanafi pada karya karya terakhir ini lebih tertuju pada upaya untuk meletakkan posisi agama serta fungsinya dalam pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Pada perkembangan selanjutnya, Hanafi tidak lagi berbicara tentang ideologi tertentu melainkan tentang paradigma baru yang sesuai dengan ajaran Islam sendiri maupun kebutuhan hakiki kaum muslimin. Sublimasi pemikiran dalam diri Hanafi ini antara lain didorong oleh maraknya wacana nasionalisme-pragmatik Anwar Sadat yang menggeser popularitas paham sosialisme Nasser di Mesir pada dasawarsa 1970-an. Paradigma baru ini ia kembangkan sejak paroh kedua dasawarsa 1980-an hingga sekarang.

Pandangan universalistik ini di satu sisi ditopang oleh upaya pengintegrasian wawasan keIslaman dari kehidupan kaum muslimin ke dalam upaya penegakan martabat manusia melalui pencapaian otonomi individual bagi warga masyarakat; penegakan kedaulatan hukum, penghargaan pada HAM, dan penguatan (*empowerment*) bagi kekuatan massa rakyat jelata. Pada sisi lain, paradigma universalistik yang diinginkan

Hanafi harus dimulai dari pengembangan epistemologi ilmu pengetahuan baru. Orang Islam, menurut Hanafi, tidak butuh hanya sekadar menerima dan mengambil alih paradigma ilmu pengetahuan modern Barat yang bertumpu pada materialisme, melainkan juga harus mengikis habis penolakan mereka terhadap peradaban ilmu pengetahuan Arab. Seleksi dan dialog konstruktif dengan peradaban Barat itu dibutuhkan untuk mengenal dunia Barat dengan setepat-tepatnya. Dan upaya pengenalan itu sebagai unitkajian ilmiah, berbentuk ajakan kepada ilmu-ilmu kebaratan (*al-Istighrab*, Oksidentalisme) sebagai imbangan bagi ilmu-ilmu ketimuran (*al-Istisyraq*, Orientalisme). Oksidentalisme dimaksudkan untuk mengetahui peradaban Barat sebagaimana adanya, sehingga dari pendekatan ini akan muncul kemampuan mengembangkan kebijakan yang diperlukan kaum muslimin dalam ukuran jangka panjang.

Dengan pandangan ini Hassan Hanafi memberikan harapan Islam untuk menjadi mitra bagi peradaban-peradaban lain dalam penciptaan peradaban dunia baru dan universal. Sekitar Pandangan Hassan Hanafi tentang *Teologi Tradisional Islam* di muka telah kita lihat, meskipun dalam beberapa hal menolak dan mengkritik Barat, Hanafi banyak menyerap dan mengonsentrasikan diri pada kajian pemikir Barat pra-modern dan modern. Oleh karena itu, Shimogaki mengkatagorikan Hanafi sebagai seorang modernis-liberal, karena ide-ide liberalisme Barat, demokrasi, rasionalisme dan pencerahan telah banyak mempengaruhinya.

Pemikiran Hanafi sendiri, menurut Isaa J. Boulatta dalam *Trends and Issues in Contemporary Arabs Thought* bertumpu pada tiga landasan: 1) tradisi atau sejarah Islam; 2) metode fenomenologi, dan; 3) analisis sosial Marxian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa gagasan semacam Kiri Islam dapat disebut sebagai pengetahuan yang terbentuk atas dasar watak sosial masyarakat (*socially contructed*) berkelas yang merupakan ciri khas tradisi Marxian. Dalam gagasannya tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual sistem kepercayaan (teologi) sesuai dengan perubahan konteks ssosial-politik yang terjadi. Teologi tradisional, kata Hanafi, lahir dalam konteks sejarah ketika inti keIslaman sistem kepercayaan, yakni transendensi Tuhan, diserang oleh wakil-wakil dari sekte-sekte dan budaya lama. Teologi itu dimaksudkan untuk mempertahankan doktrin utama dan untuk memelihara kemurniannya.

Dialektika berasal dari dialog dan mengandung pengertian saling menolak; hanya merupakan dialektika kata-kata, bukan dialektika konsep-konsep tentang sifat masyarakat atau tentang sejarah. Sementara itu konteks sosio-politik sekarang sudah berubah. Islam mengalami berbagai kekalahan di berbagai medan pertempuran sepanjang periode kolonisasi. Karena itu, lanjut Hanafi, kerangka konseptual lama masa-masa permulaan, yang berasal dari kebudayaan klasik harus diubah menjadi kerangka konseptual baru, yang berasal dari kebudayaan modern. Teologi merupakan refleksi dari wahyu yang memanfaatkan kosa kata zamannya dan didorong oleh kebutuhan dan tujuan masyarakat; apakah kebutuhan dan tujuan itu merupakan keinginan obyektif atau semata-mata.manusiawi, atau barangkali hanya merupakan cita-cita dan nilai atau pernyataan egoisme murni.

Dalam konteks ini, teologi merupakan hasil proyeksi kebutuhan dan tujuan masyarakat manusia ke dalam teks-teks kitab suci. Ia menegaskan, tidak ada arti-arti yang betul-betul berdiri sendiri untuk setiap ayat Kitab Suci. Sejarah teologi, kata Hanafi, adalah sejarah proyeksi keinginan manusia kedalam Kitab Suci itu. Setiap ahli teologi atau penafsir melihat dalam Kitab Suci itu sesuatu yang ingin mereka lihat. Ini menunjukkan bagaimana manusia menggantungkan kebutuhan dan tujuannya pada naskah-naskah itu. Teologi dapat berperan sebagai suatu ideologi pembebasan bagi yang tertindas atau sebagai suatu pembenaran penjajahan oleh para penindas. Teologi memberikan fungsi legitimatif bagi setiap perjuangan kepentingandari masing-masing lapisan masyarakat yang berbeda. Karena itu, Hanafi menyimpulkan bahwa tidak ada kebenaran obyektif atau arti yang berdiri sendiri, terlepas dari keinginan manusiawi.

Kebenaran teologi, dengan demikian, adalah kebenaran korelasional atau, dalam bahasa Hanafi, persesuaian antara arti naskah asli yang berdiri sendiri dengan kenyataan obyektif yang selalu berupa nilai-nilai manusiawi yang universal. Sehingga suatu penafsiran bisa bersifat obyektif, bisa membaca kebenaran obyektif yang sama pada setiap ruang dan waktu. Hanafi menegaskan bahwa rekonstruksi teologi tidak harus membawa implikasi hilangnya tradisi-tradisi lama. Rekonstruksi teologi untuk mengkonfrontasikan ancaman-ancaman baru yang datang ke dunia dengan menggunakan konsep yang terpelihara murni dalam sejarah. Tradisi yang terpelihara itu menentukan lebih banyak lagi pengaktifan untuk dituangkan dalam realitas duniawi yang sekarang. Dialektika harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan, bukan hanya terdiri atas konsep-konsep dan argumen-argumen antara individu-individu, melainkan dialektika berbagai masyarakat dan bangsa di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Rekonstruksi itu bertujuan untuk mendapatkan keberhasilan duniawi dengan memenuhi harapan-harapan dunia muslim terhadap kemendekaan, kebebasan, kesamaan sosial, penyatuan kembali identitas, kemajuan dan mobilisasi massa. Teologi baru itu harus mengarahkan sasarannya pada manusia sebagai tujuan perkataan (kalam) dan sebagai analisis percakapan. Karena itu pula harus tersusun secara kemanusiaan.

Asumsi dasar dari pandangan teologi semacam ini adalah bahwa Islam, dalam pandangan Hanafi, adalah protes, oposisi dan revolusi. Baginya, Islam memiliki makna ganda. *Pertama*, Islam sebagai ketundukan; yang diberlakukan oleh kekuatan politik kelas atas. *Kedua*, Islam sebagai revolusi, yang diberlakukan oleh mayoritas yang tidak berkuasa dan kelas orang miskin. Jika untuk mempertahankan

status-quo suatu re-zim politik, Islam ditafsirkan sebagai tunduk. Sedang jika untuk memulai suatu perubahan sosial politik melawan status-quo, maka harus menafsirkan Islam sebagai pergolakan.

Secara generik, istilah *aslama* adalah menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan kepada apa pun yang lain. Pengertian ini secara langsung menyatakan sebuah tindakan ganda; Yaitu menolak segala kekuasaan yang tidak transendental dan menerima kekuasaan transendental. Makna ganda dari kata kerja *aslama* dan kata benda Islam ini, menurut Hanafi, dengan sengaja disalahgunakan untuk mendorong Islam cenderung pada salah satu sisinya, yakni tunduk. Maka rekonstruksi teologi tradisional itu berarti pula untuk menunjukkan aspek lain dari Islam yang, menurutnya, sengaja disembunyikan, yakni penolakan, oposisi dan pergolakan yang merupakan kebutuhan aktual masyarakat muslim. Di dalam hal ini, karena selalu terkait dengan masyarakat, refleksi atas nilai-nilai universal agama pun mengikuti bentuk dan struktur kemasyarakatan, struktur sosial dan kekuatan politik.[]

APPENDIKS 2:
TENTANG ASGHAR ALI ENGINEER UNTUK PERBANDINGAN
Sekilas tentang Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir di Salumbar, Rajasthan, pada 10 Maret 1939. Ayahnya, Shaikh Qurban Hussain, adalah seorang ulama di komunitas Muslim Dawoodi Bohra, sebuah cabang dari tradisi Isma'ili dalam Islam Syi'ah. Komunitas Dawoodi Bohra pada masa awal perkembangannya sempat mengalami persekusi baik dari komunitas Sunni maupun Syiah arus utama, sebelum kemudian mereka bermigrasi ke India dan aktif dalam dunia perdagangan dan proyek-proyek komunitas dan filantropis, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, perumahan dan fasilitas umum lainnya, seminar dan berbagai program pendidikan komunitas, serta promosi kesenian dan arsitektur Islam. Dalam konteks inilah Engineer tumbuh. Sedari kecil, Engineer juga menekuni studi Islam dari berbagai aspeknya.

Sebelum memfokuskan dirinya pada dunia pemikiran dan aktivisme, Engineer berprofesi sebagai insinyur di kota Mumbai selama 20 tahun. Kebetulan, sewaktu kuliah, ia mengambil jurusan teknik sipil di Universitas Vikram. Latar belakang inilah yang menyebabkan ia mendapat julukan 'Engineer.' Selama karirnya, ia mendirikan dan mengepalai sejumlah lembaga yang bergerak dalam penyebaran ide-ide progresif, seperti *Institute of Islamic Studies, Center for Study of Society and Secularism* dan *Asian Muslim Action Network,* dan menjadi editor sejumlah jurnal seperti *Indian Journal of Secularism, Islam and Modern Age* dan *Secular Perspective.* Tidak hanya itu, Engineer adalah seorang pemikir yang amat produktif, menulis lebih dari 50 buku dan ratusan artikel lainnya, baik populer maupun ilmiah. Semasa hidupnya, ia juga aktif mempromosikan penghargaan atas keberagaman masyarakat di India. Atas dedikasinya terhadap perubahan sosial, ia dianugerahi *Rights Livelihood Award* pada tahun 2004, yang juga disebut sebagai hadiah Nobel alternatif.

Islam dan Teologi Pembebasan menurut Asghar Ali Engineer

Dalam kajian sejarah Islam dan teologi pembebasan, kita dapat melihat pokok-pokok pemikiran Engineer dalam salah satu karyanya *Islam and Its Relevance to Our Age* (1987). Di sini, sebagaimana diungkapkan oleh para pengkaji karya Engineer dan Engineer sendiri, kita juga dapat melihat pengaruh Marxisme dalam analisa Engineer mengenai sejarah Islam dan konsepsinya tentang teologi pembebasan. Menurut Engineer, kedatangan Islam di jazirah Arab merupakan sebuah momen yang revolusioner. Perlu diingat, bahwa terdapat banyak kontradiksi dalam masyarat Arab pra-Islam waktu itu: di satu sisi, masyarakat Arab pra-Islam memiliki tradisi kesusastraan dan perdagangan yang kuat, namun, di sisi lain, terdapat perbagai penindasan atas berbagai kelompok dalam masyarakat tersebut – seperti perempuan, kelas bawah dan para budak. Yang revolusioner dari ajaran Nabi Muhammad adalah tuntutan-tuntutannya yang bersifat egalitarian: seruan atas tatanan sosial yang egaliter baik dalam ritual (seperti shalat dan zakat), kehidupan sosial (penghapusan perbudakan secara perlahan-lahan), ekonomi-politik (penentangan atas akumulasi kekayaan dan monopoli ekonomi oleh sejumlah pedagang besar yang bersifat eksploitatif) dan hubungan antar agama (dengan para penganut agama lain). Tetapi, seruan revolusioner yang universal dari Al-Qur'an ini juga tidak melupakan konteks sosial masyarakat Arab pra-Islam waktu itu: penghapusan perbudakan misalnya, dilakukan secara gradual. Di sini, kita dapat melihat sebuah pola pembacaan yang menarik dari Engineer: ada unsur teologis dan transedental dari sejarah munculnya Islam, namun ia tidak menegasikan atau menafikan peranan manusia dalam membuat sejarah itu. Pembacaan 'materialis' atas sejarah Islam ini juga mempengaruhi rumusan Engineer mengenai teologi pembebasan. Engineer memulai pembahasannya mengenai sejarah sosial berbagai variasi teologi pembebasan dalam Islam. Penulis menyebutnya sebagai 'sejarah sosial' karena Engineer tidak hanya membahas pemikiran berbagai aliran teologis dalam Islam namun juga berusaha mengaitkannya dengan konteks sosial-politik di mana aliran atau mazhab tersebut muncul. Sejumlah aliran teologi yang dibahas oleh Engineer antara lain adalah Mu'tazilah, Qaramitah dan Khawarij.

Alirah Mu'tazilah muncul di masa kenaikan Kekhalifahan Abbasiyah yang menantang Kekhalifan Umayyah yang mulai bersifat eksploitatif dan opresif. Kehalifahan Abbasiyah mendapat dukungan 'dari bawah' dari rakyat, terutama kelompok-kelompok non-Arab, dan 'dari atas', terutama dari para elit kelompok Persia. Karenanya, di masa awal perkembangan Kekhalifahan Abbasiyah, iklim pemerintahannya cenderung

lebih terbuka dan inklusif: cendekiawan Persia diakomodir dalam kekuasaan, penerjemahan karya-karya sains dan filsafat dari Yunani dan India dipromosikan dan hak-hak masyarakat non-Arab lebih diakomodir. Dalam konteks inilah, aliran Mu'tazilah, yang mempromosikan teologi rasional dan peranan usaha (*ikhtiyar*) serta kebebasan manusia dalam menentukan nasibnya (*Qadariyah*), muncul. Ironisnya, ketika Kekhalifahan Abbasiyah mulai bersifat opresif dan mempersekusi lawan-lawan politiknya, aliran Mu'tazilah kemudian dijadikan dogma: aliran Mu'tazilah dijadikan paham teologi resmi negara oleh Khalifah Al-Ma'mun, dan mereka yang menolak atau mengkritisi beberapa ajaran dari Mu'tazilah tidak hanya dicap 'sesat' namun juga 'pembangkang' terhadap pemerintah dan dihukum. Imam Hambali, pendiri Mazhab Hambali, bahkan tidak luput dari hukuman ini.

Aliran Qaramitah juga muncul dalam konteks penentangan atas Kekhalifahan Umayyah. Aliran Qaramitah berasal dari tradisi Isma'ili dalam Islam Syi'ah, yang juga terpengaruh oleh ide-ide kebebasan manusia ala Mu'tazilah dan filsafat Yunani dalam perlawanannya atas Kekhalifahan Umayyah. Kelompok Isma'ili bahkan tetap melanjutkan perlawanannya di masa Kekhalifahan Abbasiyah yang mulai menampakkan tendensi opresifnya. Namun, dalam perkembangannya, kelompok Isma'ili kemudian mendirikan Kekhalifahannya sendiri, Kekhalifahan Fatimiyah, memberi justifikasi terhadap politik ekspansi imperium. Aliran Qaramitah adalah 'pecahan' dari kelompok Isma'ili yang tetap berkomitmen terhadap politik revolusioner dan melawan baik Kekhalifahan Abbasiyah maupun Kekhalifahan Fatimiyah. Bahkan, aliran Qaramitah berusaha menghapuskan kepemilikan pribadi dan mengorganisir berbagai komune. Salah satu tokoh sufi terkemuka, Al-Hallaj, juga merupakan anggota dari aliran Qaramitah yang kemudian dihukum mati oleh Kekhalifahan Abbasiyah dengan tuduhan konspirasi untuk menjatuhkan rejim.

Aliran Khawarij, yang awalnya adalah pendukung Khalifah Keempat dalam Islam, Ali bin Abi Thalib, yang kemudian membangkang, lebih terkenal dengan doktrinnya 'tidak ada hukum kecuali hukum Tuhan', memiliki kebiasaan untuk mengkafirkan kelompok Islam lain di luar mereka dan aksi-aksi teroristiknya. Namun, terlepas dari perkembangannya di kemudian hari, menurut Engineer, aliran Khawarij sesungguhnya merupakan ekspresi politik dari kelompok Arab Badui, kaum 'proletariat internal' dalam Islam, mengutip istilah Toynbee, dalam menanggapi krisis kepemimpinan dalam masyarakat Muslim pada waktu itu. Mengutip Mahmud Isma'il, menurut Engineer, aliran atau faksi Khawarij sesungguhnya mempromosikan semangat keadilan kolektif yang terpinggirkan di tengah pertarungan politik seputar kepemimpinan atas masyarakat Muslim. Singkat kata, dalam eksplorasinya atas sejarah awal Islam dan sejarah sosial teologi pembebasan dalam Islam, Engineer berusaha menunjukkan beberapa hal. *Pertama,* ada tradisi dan kesinambungan sejarah teologi pembebasan dari masa awal Islam hingga sekarang. *Kedua,* pembacaan 'materialis' dan 'sejarah sosial' atas masyarakat Islam membantu kita lebih memahami potensi ide-ide egalitarian dalam Islam dan relevansinya bagi masyarakat modern – tanpa memahami konteks sejarah ini, tentu kita akan merasa aneh melihat pembahasan atas aliran Mu'tazilah yang rasional dan aliran Khawarij yang ekstrimis dalam satu tarikan napas. *Ketiga,* dan yang paling utama, Engineer kemudian menawarkan rumusannya atas teologi pembebasan dalam Islam: dalam pertentangan antara kaum Mustakbirin (penindas) dan Mustadh'afin (tertindas), maka agama harus berpihak kepada mereka yang tertindas demi mewujudkan tatanan sosial yang egaliter dan bebas dari eksploitasi.

Isu-isu Kontemporer dalam Pandangan Asghar Ali Engineer

Sebagai aktivis sosial, Engineer juga aktif dalam berbagai mempelajari isu-isu kontemporer seperti hubungan agama-negara, hak-hak perempuan dan kaum minoritas, isu-isu pembangunan dan hubungan antar etnis. Di waktu kecil, Engineer sendiri sempat mengalami diskriminasi sebagai seorang Muslim. Agaknya, pengalaman itu juga yang membentuk pandangan Engineer mengenai berbagai isu kontemporer. Benang merah yang menyatukan pandangan Engineer atas isu-isu tersebut adalah pentingnya menghindari esensialisme alias kecenderungan untuk melihat fenomena sosial sebagai kesatuan yang monolitik. Dalam tulisannya tentang hak-hak perempuan dalam Islam (2006), Engineer menyadari bahwa ada diskriminasi dan marginalisasi atas hak-hak perempuan dalam masyarakat Islam. Namun, Engineer juga berhati-hati di sini: patriarkhi dan pengekangan hak-hak perempuan bukanlah sesuatu yang unik yang melekat pada masyarakat Islam. Dengan kata lain, bukan Islamnya, melainkan patriarkhinya yang bermasalah. Patriarkhi, menurut Engineer, terjadi karena kenyataan sosiologis dalam perkembangannya seringkali dianggap sebagai konsep atau doktrin teologis (hlm. 166). Kesimpulan yang sama dapat kita lihat dalam analisanya mengenai hubungan agama-negara (2009). Engineer mengingatkan bahwa institusi keagaaman bukanlah institusi yang serta merta suci; ia tidak terlepas dari berbagai kepentingan 'duniawi.' Engineer juga menyerukan pentingnya 'mengembangkan kritik yang jujur atas otoritarianisme dalam sejarah kaum Muslim' (hlm. 117). Karenanya, meskipun Engineer mempromosikan nilai-nilai agama dalam bentuknya yang paling spiritual sekaligus paling progresif, ia juga kritikus terdepan atas berbagai bentuk politisasi dan fundamentalisme agama, baik di negerinya sendiri, India, maupun di negara-negara berpenduduk Muslim lain seperti Pakistan. Posisi Engineer mengenai hubungan agama-negara dan hak-hak kaum minoritas mengingatkan penulis atas ide 'toleransi kembar' (*twin tolerations*) yang dipromosikan oleh Alfred Stepan (2000), yaitu ada perbedaan antara otoritas keagamaan dan politik sekaligus kebebasan bagi otoritas keagamaan untuk menyebarkan idenya dan mempengaruhi pengikutnya tanpa memegang kekuasaan politik secara langsung. Agaknya, posisi Engineer tidaklah jauh berbeda dengan ide ini.

Bidang lain yang sangat ditekuni oleh Engineer adalah studi konflik dan hubungan antar etnis. Engineer tidak hanya menulis artikel reguler di harian *Economic and Political Weekly* mengenai kondisi hubungan antar etnis di India, namun juga melakukan studi yang mendalam atas berbagai komunitas minoritas termasuk komunitas Muslim di India. Dalam studi-studinya, Engineer berusaha memperlihatkan kapasitasnya sebagai seorang ilmuan. *Pertama,* ia berusaha menggabungkan metode-metode sejarah dan antropologis dalam berbagai studinya tentang kelompok minoritas. *Kedua,* dalam melakukan studinya ia berkolaborasi dengan berbagai institusi dan ilmuwan-aktivis yang lain. *Ketiga,* studi yang mendalam ini juga dijadikan 'senjata' bagi Engineer untuk mempromosikan harmoni, toleransi dan pengertian dalam hubungan antar etnis. Prinsip-prinsip ini dapat dilihat misalnya dalam studinya tentang komunitas Muslim di Gujarat (1989). Sekali lagi, benang merah yang menyatukan berbagai studi Engineer tentang komunitas Muslim dan minoritas adalah pandangannya yang anti-esensialis: Engineer menunjukkan bahwa terdapat keberagaman yang begitu luar biasa dalam komunitas Muslim, dan, komunitas Muslim tidaklah kurang kadar 'keIndiaan'nya dibandingkan komunitas dan kelompok etnis yang lain.

Bukan kebetulan jika Engineer juga mendukung 'nasionalisme campuran' alih-alih nasionalisme Muslim ala Liga Muslim yang dipandangnya agak sektarian. Ia menyatakan kekagumannya terhadap Jami'atul Ulama 'il-Hindi, sebuah organisasi Muslim yang mendukung perjuangan kemerdekaan India dan integrasi masyarakat Muslim ke dalam masyarakat India (2009). Terakhir, Engineer juga merupakan seorang kritik atas praktek-praktek pembangunan yang eksploitatif. Ia misalnya, mengkritik rejim Jendral Zia-ul-Haq di Pakistan yang mempromosikan 'Islamisasi' dalam artiannya yang sempit namun menolak program-program nasionalisasi sektor-sektor ekonomi strategis, reformasi pertanahan dan kebijakan-kebijakan lain yang bersifat redistribusionis. Di India, secara konsisten ia juga menolak politik sayap kanan yang dipromosikan oleh Partai BJP yang mempromosikan fundamentalisme Hindu di satu sisi dan kebijakan neoliberal di sisi lain.

APPENDIKS 3:
REFLEKSI PEMIKIRAN TEOLOGI PEMBEBASAN ALI SYARI'ATI

Tauhid:
Dari Teologi Menjadi Ideologi
Dari Pemahaman Menuju Pembebasan
Dari Teosentris Hingga Teomorphis

Mukaddimah:
Bagi Dia, Tauhid berarti Keesaan (Oneless)
Bagi kita, Tauhid adalah kesatuan (unity)
KepadaNya, Tauhid berarti penghambaan
Kepada kita, Tauhid bermakna pembebasan
Untuk Dia, Tauhid adalah pemujaan tanpa syarat
Untuk kita, Tauhid adalah persamaan tanpa kelas.

Banyak di antara kita yang memiliki kesulitan besar dalam memahami bagaimana Tauhid terkait dengan pembebasan. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena kita telah dikondisikan untuk memiliki tingkat keimanan yang terbatas hanya pada *taqlid* dan ritus, Ibadah keagamaan dan dogma teologis. Iman (keyakinan) kita seperti jubah di dalam masjid. Walhasil, Islam dengan Tauhid sebagai fondasi ajaran menjadi tak bertuah bagi kemanusiaan, jangankan menjadi rahmat, justru Islam sering dijadikan dalih (pembenaran) yang melanggengkan kezaliman (hal yang sejatinya paling dilawan oleh Islam).

Secara praksis, menurut Hassan Hanafi, teologi yang diyakini secara dogmatik tak mampu menjadi "pandangan yang benar-benar hidup" yang memberi motivasi tindakan dalam kehidupan kongkret manusia. Hal ini dikarenakan penyusunan doktrin teologi tidak didasarkan atas kesadaran murni dan nilai-nilai perbuatan manusia. Sehingga muncul keterpecahan (*split*) antara keimanan teoritis dan keimanan praktis dalam umat Islam, yang pada gilirannya akan menghasilkan sikap-sikap moral ganda atau "sinkretisme kepribadian". Fenomena sinkretis ini tampak jelas, menurut Hassan Hanafi, dengan adanya paham keagamaan dan sekularisme (dalam kebudayaan), tradisional dan modern (dalam peradaban), Timur dan Barat (dalam politik), Konservatisme dan progresifisme (dalam sosial), serta kapitalisme dan sosialisme (dalam ekonomi).

Melihat efek regresif dari teologi dogmatik yang hari ini menjadi *mainstreem* utama dalam khasanah teologi Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam, meniscayakan perlunya digagas suatu konstruk teologi Islam yang mampu menjawab persoalan-persoalan umat Islam, perlu dikonstruk teologi yang mempu memantik spirit, menjadi *inspiring,* dan menjadi pandangan dunia yang membebaskan umat Islam dari keterjajahan, keterbelakangan, dan keterbodohan. Rekonstruksi teologi Islam adalah satu hal yang sangat urgen dalam rangka pembenahan kondisi umat Islam menuju keadaan yang lebih baik. Teologi Islam yang lebih bercorak liberasi (membebaskan) adalah corak teologi yang sangat dibutuhkan dalam menjawab kondisi kekinian umat Islam yang terpuruk pada keterbelakangan dan ketertinggalan dari umat-

umat yang lain. Dalam rangka menyusun format kerangka teologi yang bersifat liberasi sangat dibutuhkan penafsiran baru yang rasional dan ilmiah, serta tetap berdasarkan pada *nash* suci (Alquran dan hadis) sebagai rujukan doktrinal dalam menyusun kerangka teologi yang konstruktif bagi umat Islam.

Menurut Toshio Kuroda, dalam menyusun konstruk teologi yang memiliki relevansi dalam menjawab persoalan-persoalan yang senantiasa muncul dalam perjalanan manusia sepanjang zaman. Didasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah norma kehidupan yang sempurna dan mampu beradaptasi pada setiap bangsa dan setiap waktu. Firman Allah adalah abadi dan universal yang menyangkut seluruh aktivitas dari seluruh suasana aktivitas kemanusiaan tanpa perbedaan apakah ia aktivitas mental atau aktivitas duniawi.

Berdasarkan pernyataan Toshio Kuroda tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam mencakup bidang-bidang keduniaan, mental, dan sekaligus ketuhanan. Dengan demikian teologi (Tauhid) memiliki fungsi vital dalam pemikiran umat Islam, dalam lembaga-lembaga sosial politik Islam, dan dalam peradaban. Tauhid haruslah bermakna penyatuan atau kesatuan antara dimensi transenden (spiritual) dan imanen (sosial). Antara realitas ilahiyah yang transenden dengan realitas alam dan manusia yang imanen tak memiliki keterpisahan yang kaku sehingga harus diposisikan secara biner. Dalam pandangan Murtadha Muthahhari, konstruksi teologi yang akhirnya menjadi sebuah pandangan dunia (*world view*) Tauhid yang bersifat *unipolar* dan *uniaxial*.

Secara universal, seluruh aspek kehidupan sosial Islam harus diintegrasikan ke dalam "jaringan relasional Islam". Jaringan ini diderivasikan dari pandangan dunia Tauhid, yang mencakup aspek keagamaan dan keduniawian, spiritual dan material, individual dan sosial. Jaringan relasional Islam ini akhirnya teruji dalam bentuk praksis ibadah ritual yang merupakan kewajiban yang mesti dijalankan oleh umat Islam. Selain itu, perlu digagas relasi Tauhid dan pembebasan, implementasi Tauhid dalam konteks penindasan, dan masyarakat seperti apa yang diinginkan dalam konteks Tauhid.

Ali Syari'ati merupakan salah seorang tokoh intelektual muslim abad modern yang *concern* pada tema-tema pembebasan dari agama. Berbasis pandangan dunia Tauhid beliau menjadi propagandis yang membakar semangat anak muda Iran di tahun 1970-an untuk bangkit melawan penindasan rezim Pahlevi. Tak bisa dipungkiri, beliau adalah salah seorang tokoh teologi pembebasan Islam, yang bahkan mempersembahkan nyawanya untuk misinya tersebut.

Biografi Singkat Ali Syari'ati

Ali Syari'ati terlahir dengan nama Ali Mazinani, pada tanggal 24 November 1933 di Mazinan, sebuah daerah dekat kota suci Masyhad, sebuah kota yang dianggap suci oleh para penganut Syiah imamiyah Itsna 'Asyariyah, karena di kota tersebut dimakamkan imam mereka yang kedelapan, yakni imam Ali bin Musa al-Ridha. Ayah beliau adalah Muhammad Taqi Syari'ati dan ibu beliau bernama Zahrah. Nama Syari'ati sendiri yang kemudian dikenal sebagai namanya, beliau gunakan pertama kali pada paspornya untuk mengelabui petugas imigrasi, sewaktu beliau akan meninggalkan Iran menuju Inggris, pada tanggal 16 Mei 1977 (beberapa hari sebelum beliau meninggal).

Orang tua beliau adalah tokoh masyarakat yang cukup disegani ditengah-tengah masyarakatnya sebagai tokoh spiritual. Meskipun demikian, keluarga Syari'ati tetaplah hidup sederhana selayaknya penduduk desa yang lain. Dari keluarganya inilah Ali Syari'ati membentuk kepribadiannya, mentalitas, dan jati dirinya, utamanya melalui sang ayah yang berperan sebagai orang tua, guru, dan pembimbing spiritualnya. Masa muda Syari'ati dihabiskan dengan belajar, membantu orang tuanya mencari nafkah dan ikut aktif dalam perjuangan-perjuangan politik dan melakukan propaganda menentang rezim Syah Pahlevi yang sedang berkuasa di Iran pada saat itu.

Selain terpengaruh oleh ayahnya, pembentukan jiwa Ali Syari'ati juga cukup terpengaruh oleh kakeknya *Akhund* Ahmad dan paman dari ayahnya Najib Naysapuri. Dari merekalah Ali Syari'ati kecil mempelajari fiqih, sastra, dan filsafat. Ali Syari'ati cukup mewarisi tradisi keilmuan yang diturunkan dari ayahnya, kakeknya, dan paman ayahnya.tersebut. Hal ini tebukti dengan jejak langkah Ali Syari'ati selanjutnya yang memiliki kecendrungan yang cukup tinggi terhadap berbagai jenis keilmuan dan gerakan sosial keagamaan sebagaiamana ayah, kakek, dan paman ayahnya tersebut.

Syari'ati kecil memulai pendidikan formalnya di sebuah sekolah swasta di Masyhad. Pada saat usianya yang menginjak masa remaja, Syari'ati cukup intens melakukan pengkajian terhadap filsafat, mistisisme, sastra, dan masalah-masalah kemanusiaan. Ketika memasuki usia dewasa, Ali Syari'ati telah aktif menyibukkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan sosial politik keagamaan. Di usianya yang masih terbilang muda, Syari'ati aktif di "Gerakan Sosialis Penyembah Tuhan" yang didirikan oleh ayahnya. Pada tahun 1950-1951, ketika usia beliau masih 17 tahun, Ali Syari'ati terlibat dalam gerakan nasionalisme yang dilancarkan oleh Perdana Mentri Iran, Muhammad Mussaddeq untuk menggulingkan rezim Syah Pahlevi. Setelah Mussaddeq gagal dalam melancarkan kudetanya pada tahun 1953, Ali Syari'ati bergabung bersama ayahnya ikut aktif dalam "Gerakan Perlawanan Nasional" cabang Masyhad yang didirikan oleh Mehdi Bazargan. Akibat gerakannya itu, beliau bersama ayahnya dipenjara selama delapan bulan di penjara Teheran. Masih pada tahun 1950-an ini juga, Syari'ati mendirikan Asosiasi Pelajar di Masyhad dan melakukan gerakan untuk menasionalisasi perusahaan industri minyak Iran.

Pada tahun 1959, Ali Syari'ati lulus sebagai sarjana sastra dari Universitas Masyhad. Selanjutnya pada tahun 1960, beliau mendapat bea siswa dari pemerintah untuk melanjutkan study di Universitas Sorbone di Prancis. Di Prancis inilah Syari'ati tinggal selama lima tahun dan banyak menimba beragam ilmu serta terlibat aktif dalam berbagai gerakan pembebasan. Di Prancis, beliau banyak berkenalan dan berguru pada beberapa filosof dan ilmuwan terkemuka Prancis, seperti Alexist Carrel, Jean Paul Sartre, Henry Bergson, Frans Fanon, Louis Massignon, Albert Camus, dan tokoh-tokoh pemikir Prancis yang lainnya. Diantara tokoh Prancis yang sangat mempengaruhi pemikiran beliau adalah Alexist Carrel, seorang ilmuwan Prancis. Bahkan beliau menerjemahkan dan mengembangkan buku karangan Alexist Carrel yang berjudul *de Prayer* kedalam bahasa Arab dengan judul *al-Du'a.* Diantara tokoh pemikir eksistensialisme yang cukup mempengaruhi pemikiran Ali Syari'ati adalah Jean Paul Sartre, Soren Abeye Kierkegard, dan Nikholas Bordayev. Selain itu Syari'ati juga banyak mengkaji pemikiran-pemikiran Marxisme yang sedang *booming* pada masa itu di dunia.

Selama di Prancis, beliau aktif dalam gerakan politik pembebasan iran bersama Mustafa Chamran dan ibrahim Yazdi. Di saat yang sama, beliau juga aktif dalam gerakan "Front Nasional Kedua". Selama tinggal di Prancis, Syariati juga ikut aktif dalam gerakan pembebasan Aljazair. Setelah beliau berhasil menyelesaikan program doktoralnya di Prancis, pada bulan September 1964, beliau meninggalkan Prancis dan kembali ke kampung halamannya di Iran.

Sesampainya di Iran, Syari'ati ditangkap dan ditahan selama 1,5 bulan atas tuduhan terlibat aktif dalam gerakan politik melawan pemerintah selama beliau di Prancis. Setelah dibebaskan, beliau kemudian diterima mengajar di Universitas Masyhad. Selain itu, Syari'ati juga mengajar di beberapa sekolah di Masyhad. Karena aktivitas politiknya yang cukup membahayakan, Syari'ati kemudian dikeluarkan dari Universitas Masyhad, dan selanjutnya beliau bersama Murtadha Muthahhari, Husein Behesyti, serta beberapa ulama Syiah yang lain mendirikan lembaga pendidikan *Huseiniyah Irsyad,*Syari'ati sendiri terlibat sebagai salah satu pengajarnya. Masa antara tahun 1967-1873 adalah masa di mana Syari'ati menyibukkan dirinya untuk mengajar di *Huseiniyah Irsyad* serta terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik melawan rezim Syah. Selama mengajar di *Huseiniyah Irsyad* beliau banyak memberikan kuliah yang cukup membakar semangat anak muda Iran untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Akibat kegiatannya ini, akhirnya beliau kembali dipenjarakan selama lima ratus hari oleh pemerintah. Syari'ati baru dibebaskan oleh pemerintah Iran pada bulan Maret 1975, itu pun setelah adanya desakan dari berbagai organisasi internasional serta para tokoh intelektual Prancis dan Aljazair.

Setelah dibebaskan, Syari'ati menyadari bahwa dirinya tidak bebas melakukan aktivitas politik selama tinggal di iran. Akhirnya pada tanggal 16 Mei 1977, beliau meninggalkan Iran menuju ke Eropa. Tujuan pertama beliau adalah singgah di inggris dan selanjutnya hendak ke Amerika Serikat untuk mengunjungi anaknya yang kuliah di sana. Tapi, belum sempat beliau pergi ke Amerika, pada tanggal 19 juni 1977, beliau ditemukan meninggal secara misterius di rumah keluarganya, di Schoumpton, Inggris. Pemerintah Iran(rezim Syah) menyebutkan beliau meninggal akibat serangan jantung, namun dugaan terkuat beliau dibunuh oleh agen SAVAK (agen intelejen Iran).

Karena aktivitas politiknya yang begitu padat dan usia beliau yang cukup singkat, Ali syari'ati hanya sempat menulis dua buku secara khusus, yaitu *Hajj* (Haji) dan *Kavir* (Gurun Pasir), selebihnya adalah kumpulan kuliah dan ceramah beliau yang kemudian dibukukan. Selain itu juga sempat menerjemahkan dan menggubah beberapa buku, seperti *Abu Dzar*, *Salman al-Farisi,* dan *de Prayer* karya Alexist Carrel. Telah banyak karya beliau yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau yang cukup filosofis dan revolusioner telah cukup banyak mempengaruhi pemikiran Islam modern yang berkembang di Indonesia

Memahami Pikiran dan Bahasa Ali Syari'ati

Pemikiran Syari'ati bersfat multi dimensi … Syari'ati dapat disebut pemikir politik keagamaan -politico religio thinker- (Azyumardi Azra).

Memahami pemikiran Ali Syariati terkait dengan berbagai macam hal dan diskursus keilmuan, tentu bukan merupakan hal yang mudah, mengingat posisinya yang begitu getol dalam menanggapi segala hal yang dihadapi, bisa dikata bahwa Syariati adalah salah satu tokoh yang melahirkan berbagai macam diskurus kewacanaan terkait dengan kompleksnya kehidupan. Ghulam Abbas Tawassuli, memuji Syari'ati sebagai sosok yang memiliki kesadaran dan intuisi yang tajam, keberanian berpikir, dan ketinggian jiwa, dan hal tersebut adalah sebagian dari karakter manusia terpuji yang dimiliki oleh Ali Syari'ati.

Memahami sosok dan pemikiran Syari'ati adalah memahami sosok seorang perenung yang resah, spiritualis yang humanis, muslim (Syiah) yang taat, intelektual yang tercerahkan, dan orator yang propagandis dan puitis. Karena itulah, Memahami pikiran seorang Ali Syari'ati tidaklah mudah, melihat kompleksitas diri dan pikirannya. Ali Syari'ati tahu dan sadar betul bahwa ia hidup di tengah-tengah masyarakat muslim (khususnya bangsa Iran) yang sedang berada dalam suasana penindasan, kesaliman, keterbelakangan, kebodohan, apatisme. Di sisi lain, Ali Syari'ati diperhadapkan pada fenomena kaum intelektual dan ulama yang diam, intelektual yang hanya sibuk ber*asyik-ma'syuk* dengan keilmuan tapi tak mampu menjadi intelektual yang membawa pencerahan, atau ulama yang hanya sibuk dengan pengajaran dogama keagamaan dan abai terhadap spirit pemebbasan dari agama (Islam). Bahkan yang lebih miris lagi,

sebagain intelektual dan ulama tersebut makin melegitimasi kelanggengan kezaliman dan penindasan. Pada situasi seperti inilah, Ali Syari'ati hidup dan merenungkan kehidupannya.

Di sisi lain Ali Syari'ati adalah seorang spiritualis yang humanis, Seerti yang dituturkan oleh Ali Rahmena, pada tahun 1964, Ali Syari'ati gnostisisme yang telah ia alami sejak masa kanak-kanak akhirnya menjadi "halilintar" yang mentransformasikan kehidupannya dan memikatnya kepada sufisme. Tulisan-tulisan Ali Syari'ati pada masa ini bisa dipandang sebagai bukti pencarian gnostiknya. Dengan menjelaskan proses pencarian jiwa dan pencapaian kebenaran, Ali Syari'ati menggambarkan pencariannya terhadap kesempurnaan tujuan semua sufi. Sebagai seorang spiritualis, Ali Syari'ati tidak serta-merta larut dalam keasyikan spiritual dan abai terhadap dunianya, Ali Syari'ati benar-benar meyakini bahwa spiritualitas harus berbanding lurus dengan pencerahan dan pembebasan. Spiritualis sejati adalah seperti sosok imam Ali dan Imam Husein yang tampil sebagai agen yang memperjuangkan pembebasan umat. Sosok Ali Syari'ati yang spiritualis-humanis ini tampak pada pemikiran beliau mengenai haji. Dalam pandangan Syari'ati, haji adalah sebuah ritual yang membawa kita pada sebuah refleksi evolusi eksistensial dan setiap ritus haji mengantarkan manusia pada makna pembebasan yang sesungguhnya.

Aspek lain yang tak bisa kita lupakan dalam memahami sosok Ali Syari'ati adalah bahwa beliau sebagai seorang penganut Syiah yang fanatik yang percaya bahwa Syiah adalah ideologi yang revolusioner. Refleksi seorang Ali Syari'ati sebagai sosok muslim Syiah yang taat dan revolusioner dapat kita lihat dalam berbagai tulisan-tulisan beliau yang menjadikan beberapa doktrin khas Syiah seperti*imamah, asyura,* Mahdiisme, dan lainnya sebagai basis dari pikiran-pikiran revolusioner beliau. Ali Syari'ati adalah orang yang percaya betul terhadap doktrin Syiah, hanya saja refleksi beliau terhadap doktrin-doktrin tersebut menjadikan nuansa yang berbeda dari pemahaman banyak kalangan Syiah lainnya.

Selain sebagai seorang muslim (Syiah) yang taat, sosok Syari'ati juga harus dipahami sebagai seorang intelektual yang tidak eksklusif pada suatu pemikiran tertentu. Pengalaman beliau kuliah di Sorbone University Paris, membuat Ali Syari'ati makin dekat dengan pemikiran-pemikiran Barat, sosok pemikir Barat seperti Franz Fanon, Alexist Carrel, Jean paul Sartre, bahkan Karl Marx, dan lain-lain banyak menginspirasi konstruksi pemikiran Ali Syari'ati. Karena begitu banyak terpengaruh oleh pemikiran Barat, Ali Syari'ati kerap dituduh sebagai agen rahasia Marxisme dan Babisme. Sebagai seorang inteletual yang banyak *concern* pada tema-tema sosiologi, Ali Syari'ati sangat tertarik pada hubungan dialektis antara teori dan praktek, antara ide dan kekuatan sosial, dan antara kesadaran dan eksistensi kemanusiaan. Ali Syar'ati memiliki komitmen yang tinggi untuk peragian (*decay*) gerakan-gerakan revolusioner, khususnya agama radikal.

Ali Syari'ati juga mesti dpahami sebagai seorang orator ulung yang tampil sebagai propagandis revolusi Islam Iran. Beliau tampil sebagai orator yang bersemangat, retoris, dan artikulatif dan sangat banyak memikat orang, khususnya kaum muda Iran. Sebagai seorang propagandis, Ali Syari'ati kerap menggunakan jargon-jargon yang mengkritik tajam institusi-institusi yang sudah mapan. Karena sebagai seorang propagandis yang berbahaya inilah, Ali Syari'ati kemudian "dibereskan" oleh agen SAVAK (intelejen Iran di masa Syah Pahlevi) saat beliau berada di London pada tahun 1977. Sebagai seorang orator dan propagandis ulung, Ali Syari'ati kerap menggunakan gaya bahasa yang simbolik dan provokatif yang kerap keseluruhan maksudnya sangat sulit ditangkap, penggunaan bahasa simbolik inilah yang membuat sedikit kesulitan dalam melacak maksud dari pemikiran Ali Syari'ati. Pemilihan bahasa simbolik dilakukan secara sadar oleh Syari'ati. Ia secara sadar memilih bahasa simbolik dibandingkan bahasa*expository* yang lugas. Menurut Syari'ati bahasa simbolik (dan puitik) yang menyatakan makna lewat simbol-simbol dan imaji adalah bahsa yang paling indah dan halus dibanding bahasa yang pernah dikembangkan oleh manusia. Bahasa simbolik jauh lebih universal, lebih mendalam, dan lebih abadi dibandingkan bahasa eksposisi yang maksud dan kejelasannya terbatas pada waktu dan tempat. Rupanya Ali Syari'ati ingin mengabadikan pesan-pesannya untuk semua waktu dan tempat, meski konsekuensinya menjadi sulit melacak pemikiran Ali Syari'ati. Pemilihan Ali Syari'ati pada bahasa simbolik dalam menyampaikan pesan-pesannya, sangat dipengaruhi pula oleh transformasi spiritual yang ia alami. Menurut Ali Rahmena, Ali Syari'ati menggunakan seni membuka konsep, sebuah bahsa yang memiliki sebuah makna yang kelihatan dan superfisila yang sementara menutupi sejumlah teka-teki.

Sosok Ali Syari'ati yang multi-atribut sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya membuat pemikrian Ali Syari'ati bersifat multi dimensi, dan karenanya *multi interpretable.* Namun demikian, kita tetap masih bisa melihat konsistensi pandangan dunia dalam tulisan-tulisan beliau. Pandangan-pandangan Ali Syari'ati yang menonjol adalah menyangkut hubungan antara agama dan politik, yang dapat dikatakan menjadi dasar dalam ideologi pergerakannya. Dalam konteks inilah, Azyumardi Azra menyebut Ali Syari'ati sebagai pemikir politik keagamaan (*politico religio thinkeri*).

Memahami epistemologi atau *manhaj* pemikiran Ali Syari'ati tak lepas dari memahami sosok Ali Syari'ati secara utuh, sosok Ali Syari'ati yang multi atribut dan multi dimensi. Ali Syari'ati menghadirkan pikirannya melalui dialektika antara idealita konsep dengan kenyataan serta praktek sosial, Ali Syari'ati adalah orang yang gemar melakukan refleksi kritis terhadap doktrin-doktrin (baik teologi maupun ritual) Islam guna menghadirkan muatan ideologi Islam yang revolusioner. Ali Syari'ati adalah pemikir inklusif yang sangat terbuka terhadap pemikrian Barat dan menjadikannya sebagai *inspiring* dalam memahami ajaran Islam. Dan yang terpenting dari memahami pemikiran Ali Syari'ati adalah beliau menggunakan bahasa

simbolik dalam mengemas pikiran-pikiran yang beliau sampaikan kepada publik. Ali Syari'ati lebih tampak sebagai pemikir reflektif dibandingkan pemikir epistemik. Beliau tidak meninggalkan sistematika atau konstruksi epistemologis yang jelas (sebagaimana Murtadha Muthahhari), tapi beliau meninggalkan banyak catatan mengenai refleksi kritis atas doktrin, teori, dan kenyataan sosial. Hal ini jualah yang membuat kita menjadi sulit memahami pemikiran Ali Syari'ati secara sistemik, tapi, seperti apa pun, sosok Ali Syari'ati dan pemikirannya adalah *inspring* yang tak pernah kering. Karena Ai Syariati, sebagaiaman diungkapkan oleh Sayyid Ali Khamene'i (pemimpin spiritual Iran) adalah pelopor penjelasan masalah-masalah terbaru yang disingkap Islam modern, masalah-masalah yang sulit dijawab dan dipahami generasi masa itu.

Ali Syari'ati tentang Pandangan Dunia dan Ideologi

Ideologilah yang mampu mengubah masyarakat (Ali Syari'ati).

Pada dasarnya dalam menjalani kehidupan, manusia sangat bergantung pada pola atau kerangka pikir yang kemudian disebut sebagai pandangan dunia atau *worldview.* Secara sederhana pandangan dunia adalah kerangka yang kita buat untuk melihat dunia dan berbagai kejadian yang menyertainya. Berbagai kejadian dan peristiwa kita beri makna dalam kerangka ini. Menurut Murtadha Muthahhari, pandangan dunia inilah yang kemudian menjadi dasar dari ideologi yang dianut oleh setiap individu dan golongan. Perbedaan pada ideologi yang dianut oleh setiap manusia disebabkan perbedaan dalam hal menyusun kerangka pandangan dunia Pandangan dunia, adalah bentuk dari sebuah kesimpulan, penafsiran, dan hasil kajian yang ada pada seseorang berkenaan dengan Tuhan, alam semesta, manusia, dan sejarah.

Gagasan apa pun yang lahir dari seseorang pasti dipengaruhi oleh mazhab pemikiran yang ia anut. Jika seseorang percaya pada mazhab pemikiran tertentu, maka kepercayaan, emosi, jalan hidup, aliran politik, pandangan-pandangan sosial, konsep-konsep intelektual, keagamaan dan etikanya tidaklah terpisah dengan pandangan dunianya, dan karenanya pula maka mazhab pemikiran pada akhirnya dapat menciptakan gerakan, membangun dan melahirkan kekuatan sosial.

Pandangan tentang dunia menurut Ali Syari'ati adalah pemahaman yang dimiliki seseorang tentang wujud atau eksistensi. Misalnya, seseorang yang menyakini bahwa dunia ini mempunyai Pencipta Yang Sadar dan mempunyai kekuatan atau kehendak, dan bahwa dari catatan dan rekaman akurat yang disimpan, ia akan menerima ganjaran atas amal perbuatannya atau dia akan dihukum lantaran amal perbuatannya itu, maka ia adalah orang yang mempunyai pandangan tentang dunia religius. Berdasarkan pandangan tentang dunia inilah seseorang lalu mengatakan: "Jalan hidupku mesti begini dan begitu dan aku mesti mengerjakan ini dan itu", inilah makna memiliki ideologi agama. Dengan demikian, idealism Hegel, materialisme dialektik Marx, eksistensialisme Heiddeger, Taoisme Lao Tsu, *wihdatul wujud* al-Hallaj, semuanya adalah pandangan tentang dunia. Setiap pandangan tentang dunia ataupun mazhab pemikiran pasti akan memperbincangkan konsep manusia sebagai konsep sentral.

Pandangan tentang dunia seseorang dipengaruhi oleh aspek-aspek spiritual dan material yang khas dari masyarakatnya. Menurut Henry Bergson, dunia yang dipandang oleh seorang individu yang hidup dalam suatu masyarakat tertutup merupakan suatu dunia yang terkungkung. Begitu juga sebaliknya, seorang individu yang hidup dalam masyarakat yang terbuka memandang dunia luar sebagai sesuatu yang tidak terbatas, ekspansif dan senantiasa bergerak. Masyarakat dan agama selalu menentukan visi manusia tentang dunia yang kemudian mempengaruhi tindakan-tindakannya. Oleh karena itu, membahas pandangan tentang dunia pada hakikatnya membahas tentang manusia sebagai subjek. Karena pandangan tentang dunia mempengaruhi seseorang dalam mengambil pilihan tindakannya, maka mempelajari pandangan hidup suatu komunitas sosial atau bangsa berarti mempelajari tipe-tipe dari bentuk-bentuk dan pola kebudayaan serta berbagai karakteristik yang dikembangkan oleh komunitas atau bangsa tersebut.

Di tengah dominasi pandangan tentang dunia yang materialistik sekarang ini, Ali Syari'ati menegaskan dirinya pada pilihan pandangan dunia religius. Jenis pandangan dunia ini yakin bahwa jagat raya adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, sadar dan responsif terhadap tuntutan-tuntutan spiritual serta aspirasi manusia. Hanya saja, kerangka dasar pandangan dunia yang bersifat religius yang dimaksud adalah cara pandang yang berbasis pada hasil riset ilmiah yang bersifat saintifik bukan bentuk yang ortodoks atau ekstrim. Ali Syari'ati mengambil pilihan pandangan hidup sintetik di antara kutub ekstrim di atas yaitu pandangan hidup *religius humanistik* yang mensublimasi unsur manusia sebagai makhluk yang progresif, selalu mencari kesempurnaan dan sangat manusiawi.

Ali Syari'ati menawarkan gagasan pandangan tentang dunia *religius humanistik* untuk memerangi dualisme kelas antara kelas penguasa dan yang dikuasai, antara kelas borjuasi dan proletariat, sehingga manusia akan menemukan keesaan yang orisinil dalam rangka membangun kesadaran manusia pada misinya sebagai wakil atau khalifah Tuhan di muka bumi. Menurutnya, manusia adalah makhluk merdeka dan memiliki potensialitas tanpa batas untuk menentukan nasibnya sendiri dan bukan ditentukan oleh kekuatan eksternal dengan membangun semangat Tauhid.

Pandangan dunia akhirnya bermetamorfosa dan membentuk ideologi sebagai keyakinan dan cita-cita yang dianut oleh kelompok tertentu. Ali Syari'ati melakukan redefenisi tentang pemahaman ideologi. Dimulai dari pendekatan etimologis, Ali Syari'ati menjelaskan bahwa ideologi terdiri atas dua kata, *idea* dan*logi*. *Idea* berati pemikiran, gagasan, keyakinan, cita-cita, dan kata *logi* yang berarti logika, ilmu, atau pengetahuan, dengan demikian ideologi adalah ilmu tentang cita-cita atau keyakinan. Menurut

pengertian ini, seorang ideolog adalah seorang pembela suatu ideologi atau keyakinan tertentu. Dengan demikian, ideologi terdiri dari berbagai keyakinan dan cita-cita yang dianut oleh suatu kelompok tertentu, kelas sosial tertentu, atau suatu bangsa.

Menurut Ali Syari'ati, ideologi adalah fitrah yang paling penting dan bernilai serta merupakan kesadaran diri yang istimewa dalam diri manusia. Kesadaran ideologis, menurut Ali Syari'ati merupakan kesadaran khusus yang khas bagi manusia tanpa terkecuali. Hal tersebut dikarenakan, ideologi menjadi "kebutuhan" manusia yang paling mendasar untuk memberi arah atau petunjuk dalam mengungkap kebenaran sampai ke tingkat melakukan verifikasi atas tindakan masyarakat serta kondisi-kondisi sosial yang melingkupinya. Secara sederhana, ideologi berperan dalam pemberian cara pandang, membentuk pemahaman, serta mengarahkan prilaku manusia dalam berinteraksi dengan dunianya.

Berkebalikan dengan pandangan Marx dan Weber yang berpandangan ideologi dibentuk oleh struktur masyarakat. Syari'ati justru menyatakan bahwa, dengan kesadaran diri (ideologi) inilah manusia membentuk masyarakat. Ideologi menempati posisi yang begitu kuat dalam pikiran dan keyakinan manusia. Dan ideologi, tetap diperpegangi sebagai penuntun hidup yang paripurna bagi para penganutnya. Bagi Ali Syari'ati hanya ideologilah yang mampu merubah masyarakat, karena sifat dan keharusan ideologi yang meliputi keyakinan, tanggung jawab, dan keterlibatan untuk komitmen. Pandangan Ali Syari'ati ini, senada dengan pandangan Antonio Gramsci, yang menyatakan bahwa ideologi, lebih dari sekedar sistem ide. Ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis (ideologi memberikan spirit perjuangan). Selain itu, ideologi mengatur dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak dan, mendapatkan kesadaran mengenai posisi mereka maupun perjuangan mereka dalam kehidupannya. [*Tentang Pemikiran Ali Syari'ati disadur penuh dari tulisan Sabara, M.Fil.I*]

MATERI 04
SEJARAH GERAKAN MAHASISWA INDONESIA

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

Pelacakan Gerakan Mahasiswa Level Makro

Kecenderungan menguatnya neo-Iiberalisme terjadi dimana-mana, terutama di negara berkembang atau negara dunia ketiga. Kecenderungan itu ditunjukkan oleh peran membesar yang dipermainkan oleh berbagai intitusi perekonomian dunia, seperti; International Monetary Fund (IMF), International Bank for Recontruction of Development (IBRD), World Trade Organization (WTO). Institusi yang didukung penuh oleh negara-negara maju begitu ganas mempromosikan struktur perekonomian dunia yang leizes-fair (membiarkan sesuai mekanisme pasar) dan meminimalisir campur tangan negara yang dihegemoni. Neo-liberalisme temyata menjadi gurita panas yang mengecam kekuatan ekonomi di negara berkembang. Pandangan bebasa ini menjadi paradoks dengan sedemikian rupa mengatur mekanisme perekonomian dunia. Dengan melihat struktur perekomian negara-negara *pheriphery* bisa disimpulkan bahwa kecenderungan neo-liberalisme ini sangat mempengaruhi perekonomian di tingkat akar rumput. Mainstream kapitalisme global dengan wajah baru telah merasuk dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kebijakan di masing-masing negara berkembang. Menghadapi konsekuensi buruk kapitalisme global dan neoIiberalisme itu menjadi tesis runtuhnya negara berkembang. Perkembangan global kontemporer dipicu oleh perkembangan teknologi produksi, informasi, telekomunikasi, dan globalisasi. Kekuatan negara menjadi sernakin rapuh untuk mengontrol fluktuasi ekonomi politik. Keterpurukan negara berkembang setelah tidak bisa mengembalikan tatanan ekonomi ditambah lagi dengan pengabaian Human Right (HAM), komflik etnis, pelecehan seksual, eksploitasi buruh, konflik atas nama agama, inkonsistensi para birokrat, dan sekian rnasalah yang menjadi entitas problem.

Dalam hal perekonomian ciri-ciri struktur keterbelakangan negara indonesia diindikasikan dalam bemagai faktor kehidupan. Salah satu yang menjadi momok besar atau kesulitan menjadi negara maju adalah bahwa Indonesia tidak sanggup untuk bergabung dengan kapitalisme global, teritama sejak ORBA berkuasa tahun 60-an. Indonesia temyata msuk dalam kungkungan anak kandung kapitalisme yaitu developmentalisme (pembangunanisme). Ideologi developmentalisme temyata memaksa Indonesia untuk larut dalam gaya pembangunan kapitalis yang direpresentasikan melauli kebijakan negara yaitu REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), kebijakan ini berdampak pada jaminan kesestabilan politik untuk menarik investor asing. Kestabilan politik ORBA ini dicapai dengan melakukan tindakan yang sangat dominatif dan bersifat Otoritarian-Birokratik terhadap kedaulatan rakyat. Indikasi dari gaya pemerintahan Otoritarian-Birokratik adalah berkuasanya militer secara institusional, penyingkaran dari partisipasi, kooptasi terhadap organisasi massa. Gaya pemerintahan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan filsafat trickle down effek mengisaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang Iebih tinggi harus dicapai terlebih dahulu sebelum dibagikan secara m.erata kepada seluruh masyarakat harus dibayar dengan diberangusnya hak-hak politik rakyat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tinggi ini hanya dinikmati oleh minoritas-hal ini berdampak terjadinya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.

Strategi Gerakan Sosial

Empat landasan dalam menyusun strategi gerakan sosial, yaitu: *Pertama*, Ideologi, dasar filosofi gerakan merupakan nilai-nilai yang menjadi landasan pergerakan mahasiswa. Sebuah institusi kemahasiswaan yang mengemban idealisme yang tinggi harus memakai filsafat gerakan pembebasan (liberasi) dan kemandirian (interdependensi). Liberasi adalah sebuah metode alternatif untuk mencapai kebebasan individu, sehingga individu tersebut mempunyai kualitas dan mental yang kuat untuk mendobrak dan menggeser kekuasaan negara yang represif dan totaliter dan melakukan perlawaman atas ekspansi hegemoni negara, untuk mengembalikan kekuasaan tersebut kepada otoritas dan kedaulatan rakyat. Liberasi ini juga memberikan kebebasan berekspresi dan kebebasan berfikir tanpa dipasung oleh sebuah rezim. Interdependensi adalah kemandirian dalam mengembangkan kreatifitas, keterbukaan, rasa tanggungjawab dalam dinamika pergerakan untuk membangun moralitas dan intelektualitas sebagai senjata dan tameng dalam setiap aksi. Aksi yang diiringi dengan interdependensi akan mewujudkan kesadaran mahasiswa dalam menjaga jarak dan hubungan dengan kekuasaan, sehingga aksi mahasiwa merupakan kekuatan murni untuk membela kepentingan rakyat dan melakukan transformasi sosial tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik kelompok manapun.

Kedua, Falsafah Gerakan, strategi ini lebih kepada falsafah bertindak dengan model pendekatan (appoach methode). Dalam pendekatan ini gerakan mahasiswa berupaya mengambil jarak dengan negara tanpa menafikan keberadaan dan legitirnasinya, sehingga kekuatan negara dapat diimbangi oleh kekuatan masyarakat. Model pendekatan ini adalah proses; (a) transformasi dari orientasi massa ke individu, (b)

transformasi dari struktur ke kultur, (c) transfornzasi dari elitisme ke populisme, (d) transformasi dari negara ke masyarakat.

Ketiga, Segmenting, strategi ini merupakan pilihan wilayah gerak. Yang harus dipahami bahwa terbentuknya Student Government adalah sebagai upaya taktis untuk melakukan proses transformasi sosial, berangkat dari student movement menuju ke social movement. Transformasi sosial merupakan wahana yang paling kondusif untuk membebaskan kaum tertindas menuju masyarakat mandiri (civil society). Gerakan mahasiswa juga harus mengarah pada advokasi akan hak-hak kaum bawah, sehingga posisi mahasiswa merupakan penyambung lidah dan jerit kaum yang termarginalkan oleh penguasa. Kebijakan pemerintah yang sentralistik tanpa melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan publik, serta konstalasi politik yang carut marut merupakan lahan garapan mahasiswa baik yang ada di intra parlemen yaitu BEM atau organisasi ektra perlementer atau luar kampus seperti PMII, HMI MPO, HMI DIPO, IMM, KAMMI, FPPI, LMND dan organisasi ekstra palementer lainnya.

Keempat, Positioning, artinya adalah bahwa lembaga eksekutif tersebut harus meletakkan dasr organisasi sebagai institusi profit atau non-profit. Idealnya menurut hemat penulis bahwa lembaga eksekutif ini yang berada pada jalur intra parlementer lembaga kemahasiswaan ini menggeser paradigrna yang tadinya dari gerakan student movement menjadi social movement. Sehingga aras gerak yang dilakukan lebuih kepada pemberdayaan rakyat keeil yang tertindas dan terhegemoni oleh kekuasaan yang represif.

Mahasiswa dan Globalisasi: Sebuah Kajian Sejarah

Gerakan mahasiswa, baik dikomando oleh intra maupun ekstra tidak pernah muneul dalam ruang hampa. Sebuah pergerakan akan tetap muncul dalam fase sejarah apapun. Entah itu fase feodalisme, kolonialisme, kemerdekaan, totalitarianisme, liberalisme, Namun demikian gerakan mahasiswa bukanlah entitas yang seragam. Ada pandangan bahwa "gerakan" akan muncul sebagai sebuah reaksi spontan walaupun tidak terorganisir denganjelas. Misalnya gerakan mahasiswa akan muneul jika harga sembako naik, BBM melambung tinggi, atau isu-isu lainnya yang anggap populis. Namun demikian pada hakekatnya sebuah gerakan (movement) merupakan upaya melakukan antitesa dari kondisi status-quo yang konservatif dan tidak memiliki kepekaan akan cita-cita masyarakat yang lebih maju. Mereka percaya atas "testamen" pernyataan sejarah bahwa tidak ad~ yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Toh, manusia akan selalu ada dalam pergulatan dialektik untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Berangkat dari kondisi inilah saya akan coba memaparkan pandangan tentang hakikat gerakan perubahan yang di dalarnnya terkandung subjek sejarah yaitu gerakanmahasiswa. (Saya orang yang pereaya bahwa hakikat dari gerakan politik mahasiswa pada umurnnya adalah perubahan). Ia (GM-red) tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk digantikan dengan situasi yang di anggap lebih memenuhi harapan. Philip G. Albach dalam bukunya Student in Reoolt, melihat posisi gerakan mahasiswa berada dalam dua level yaitu sebagai proses peru bahan, yaitu menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik (Insyaallah sudah diterjemahkan oleh sahabat dari Litera berjudul Revolusi Mahasiswa tetapi sampai saat ini saya tidak memberikan pendapat apakah terjemahannya bagus atau tidak). Sejarah juga banyak mencatat bagaimana GM bisa bergerak dalam level sistem politik yang akan meluas pada pengaruh kebudayaan dan sosial. Hidup di negara berkembang seperti Indonesia kita memiliki banyak referensi tentang gerakan mahasiswa baik perkembangan waktu, berbagai perubahan ideologi maupun strategi dan taktiknya. Seeara historis tulisan ini akan melaeak mengapa gerakan mahasiswa dibutuhkan dalam konteks perkembangan masyarakat negara Dunia Ketiga.

Legitimasi Sejarah Gerakan Mahasiswa

Mari kita laeak latar belakang mengapa gerakan mahasiswa banyak muneul di negara berkembang. *Pertama*, modernisme dalam banyak bidang ekonomi politik, terutama dalam rangkaian dengan kekuasaan, oleh kekuatan dan dominasi ekonomi politik negara-negara Utara terhadap negara-negara Selatan, menyebabkan terjadinya transformasi sosial dalam bentuk kolonialisme, imperialisme sampai neo liberalisme yang terjadi hingga sekarang ini. Fakta akan adanya dominasi dan kesenjangan kelas semakin kentara dan tidak bisa di tutup-tutupi. Ini yang menjadi latar belakang utama kemunculan gerakan-gerakan pembebasan yang banyak didominasi kelompok muda intelektual yaitu mahasiswa. Dalam banyak hal keterlibatan gerakan mahasiswa dalam gerakan-gerakan terutama gerakan politik banyak mendapat pengaruh dari kondisi domestik maupun global. Namun hal yang eukup menjadi dorongan utama adalah kondisi politik dalam negeri. Misalnya saja kediktatoran pemerintaham militer Soeharto atau kediktatoran rezim yang sarna di Amerika Latin menjadi pemicu awal dari tumbuhnya gerakan-gerakan demokratik mahasiswa.

Kedua, di Indonesia Gerakan Mahasiswa mendapat suatu legitimasi sejarah atas keturutsertaannya terlibat dalam gerakan kemerdekaan dan semenjak berdirinya negara menjadi bagian yang di akui dari sistem politik. Jika kita telusuri, misalnya, perjuangan kemerdekaan Nasional yang didorong Soekarno Cs lewat kelompok-kelompok studinya, Hatta lewat Perhimpunan Indonesianya, temyata efektif dan mampu seeara luas membangkitkan perasaan untuk sesegera mungkin lepas dari belenggu kolonialisme. Kelompok yang dulunya di sebut "pemuda pelajar" ini menjadi semaeam "martir kelompok terdidik" yang membawa angin perubahan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat akan

kemerdekaan. *Ketiga*, kekurangan lembaga dan struktur politik yang mapan. Akibat dari itu adalah relatif mudahnya bagi setiap kelompok yang terorganisir untuk mempunyai dampak langsung tehadap politik. Eksistensi politik GM muncul ketika kebutuhan tersebut hadir. Apalagi di barisan bawah gerakangerakan yang disponsori rakyat belum terakomodasi menjadi kekuatan perubahan yang signifikan. GM mulai membentuk suatu elit, sehingga merasa berperan dalam kemungkinan terjadinya transformasi sosial yang lebih luas. Akses informasi tentang situasi perpolitikan memungkinkan banyak telaah untuk pembuktian bahwa proses regimentasi politik totaliter harus mendapat tanggapan yang serius dan diterjemahkan dalam bentuk gerakan-gerakan yang lehih konkrit. Banyak di antara universitas yang berada di perkotaan yang sebagian besar populasi mahasiswa berada dalam jarak jangkauan yang mudah terhadap pusat kekuasaan. Ini memungkinkan GM mudah melakukan sebuah aksi untuk memblow-up isu yang potensial dalam upaya pemobilisasian kesadaran massa yang lebih maju. Beberapa fenomena politik mahasiswa menjadi makin membesar karena ia di lakukan di tempat-tempat yang relatif mudah di jangkau media. Peristiwa 1965, 1974, sampai peristiwa mei 98 menjadi semaeam pilot project radikalisme mahasiswa yang bergerak di lini oposisi pemerintahan. GM kemudian meneuat menjadi semaeam gerakan-gerakan ujung tombak (avant garde), dan eksistensinya semakin menjadi jelas ketika di dalam pereaturan politik di tingkatan negara dan massa akar rumput (grass roots), merasa kekurangan oposisi dari sistem politik rezim parlementarian atau sentralisme. Sehingga GM seringkali menjadi "cabang keempat" dari sistem pemerintahan. Berbagai faktor seperti situasi ekonomi poUtik yang memprihatinkan kehidupan umum, ketidakadilan sosial, kebijaksanaan luar negeri pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, politik yang telah menjadi tidak demokratis, dari semua faktor tersebut, mahasiswa kemudian membuat jalinan ideologis yang dalamjangka waktu panjang akan menimbulkan gerakan transformasi sosial. Beberapa dekade terakhir GM meneoba untuk membedkan tawaran yang lebih jauh mengenai hubungannya dengan realitas rakyat yang menderita akibat perlakuan rezim. Pasea diberlakukan NKK/ BKK di semua perguruan tinggi, GM yang memilih untuk tetap menjaga jarak dengan kekuasaan langsung bersentuhan dengan kegiatan advokasi permasalahan rakyat.I<asus Badega, Kedung Ombo, Rancamaya, dB, menjadi saksi kegigihan GM yang tidak lagi mengemukakan ekspresi teoritik dalam diskusi-diskusi tapi langsung bergerak dalam llevel praksis. Sampai dengan tahun 1998 klimaks GM terjadi dan dalam skala luas memperoleh dukungan luas dari rakyat.

Gerakan Mahasiswa Mengusung Isu Pendidikan

Selain kondisi-kondisi di atas, sebenarnya faktor penting keterlibatan mahasiswa dalam gerakan-gerakan politik yaitu faktor subjektif posisi kelas mahasiswa. Mahasiswa yang terdefinisikan dalam wilayah akademisnya terutama mengenai kondisi pendidikan seringkali menjadi pemieu yang eukup material dalam memotivasi GM. Seringkali mahasiswa dari kelas menengah bawah merasa ia adalah generasi yang tersingkirkan terutama saat ideologi developmentalisme gencar dipaksakan oleh rezim orde baru. Sehingga ada gejala para lulusan PT yag kurang memenuhi "kualifikasi" pembangunan dianggap merupakan faktor tersier yang tidak produktif dalam perekonomian. R. Michels merumuskan nya sebagai kelas sosial proletar intelektual. Sampai saat ini, kondisi pendidikan yang masih didominasi oleh kenyataan tidak bisa menjadi jaminan sosial seperti harapan untuk mejadi orang-orang yang sukses dan bisa memperoleh kemapanan hidup, memancing keresahan. Bayangan banyaknya generasi lulusan yang menganggur, yang tercatat sampai 20% dengan kenaikan 2-3 persen per tahun, membuat banyak mahasiswa kebat-kebit meyaksikan ini. Harapan perubahan yang berkembang rnenjadi upaya transformasi sosial, membuat kelompok-kelompok mahasiswa bereksperimen membentuk komunitas yang bisa secara lugas akar penyebab ketidak adilan ini Sehingga saya pikir cara-cara baru sosialisasi, pengembangan pendidikan yang antiotoriter, serta bentuk-bentuk persahabatan baru, kesemuanya ini bukan hanya upaya untuk mengubah pola-pola masyarakat yang ada tetapi juga usa aha memecahkan persoalan-persoalan pribadi mereka. Apalagi sistem pendidikan menjadi sangat rancu dan berorientasi pada pengukuhan dominasi idelogis negara hadir dengan kuatnya. Peran ideologisasi pragmatisme negara menyebabkan mahasiswa merasa teralienasi. Konsensus kelas menengah mengenai nilai dan norma pendidikan yang hams mengacu pada kebutuhan masyarakat konsumtif, dalam beberapa hal justru menjadikan rnahasiswa sadar akan posisi konsumennya" sehinggga dalam aksi-aksinya mahasiswa mulai mengidentifikasikan kelompoknya sebagai penolakan atas alienasi struktural ini. GM seringkali hadir untuk menjematani gejala alienasi ini untuk secara partsipatif berkenalan dengan realitas sosial.

Mahasiswa dan Pusaran Arus Neoliberalisme

Apa yang tersisa dari GM saat ini? Benarkah ia berada dalam kondisi stagnan? Realitas historis apa yang di hadapi GM saat ini ? Benarkah GM masih terjebak dalam mimpi historis masyarakat yang utopia, yaitu masyarakat imajiner dengan pemenuhan atas hasrat kemanusiaan yang mendalam, mimpi-mimpi paling agung, dan aspirasi-aspirasi kemanusiaan yang paling tinggi. Semua daya fisik, dan sosial bekerja bersama, dalam keselarasan untuk memungkinkan semua hal yang dirasa perlu dan diinginkan oleh rakyat. Untuk menjawab hal tersebut kita mungkin tidak bisa begitu saja membiarkanya menjadi semacam "mimpi kebablasan." Semua yang bergerak tentu memakai prinsip sebab akibat. Inilah prinsip sejarah yang diperkenalkan Marx sebagai fase dialektika historis yang panjang. Kemampuan self of determination hanya bisa terjadi jika ada fakta material historis yang mendukungnya, yaitu masih dominannya penindasan

manusia atas manusia dengan konflik kelasnya. Sehingga ini bisa menjawab kekhawatiran adanya pelegitimasian sejarah masa lampau yang buta dan tidak konteks dengan kondisi kontemporer. Kekhawatiran yang diintrodusir oleh Karl Popper ini sebenamya mengada-ada.

Jika demikian dasar pemikirannya, tentulah kita diharuskan menganalisa ulang situasi ekonomi politik yang berkembang saat ini, agar bisa melihat kenapa GM seolah terjebak dalam lingkar kevakuman dan tidak lagi mejadi instrumen politik yang signifikan. Persoalan GM saat ini rnasih dihadapkan pada tiga permasalahan besar, *pertama*, antara upaya membuka ruang demokrasi nasional dengan harapan munculnya gejolak demokrasi arus bawah yang massif, *kedua*, persoalan perubahan dinamika ekonomi politik global yang bermetamorfosis menjadi kekuatan Neo-liberal yang kuat, yang sekarang ditambah variabel isu terorisme yang dipicu peristiwa "black september", dan *ketiga*, dan yang masih krusial, adalah bagaimana mendesign ulang format gerakan yang lebih terkonsolidir dan maju.

Ketiga, permasalahan di atas akan terurai dengan kenyataan objektif yang ada di lapangan. Di tingkatan upaya memangun demokrasi nasional masih dihadapkan pada keterbatasan negara. Ketika Gus-Dur naik ada setitik harapan terjadinya transformasi yang signifikan dalam periode transisi demokrasi. Tuntutan pembersihan negara dari unsur kekuatan lama (Golkar, Milter, dan borjuasi korup) mengalami kebuntuan. Jelas ini sebuah kekalahan gerakan demokratik. Bahkan ketika terjadi konspirasi parlemen untuk menjatuhkan Gus Dur, gerakan Prodem, terutarna GM, seolah tidak berdaya. Upaya keras mewujudkan transisi demokrasi seperti membentur dinding tebal yang di pasang kekuatan lama dan "generasi oportunis" yang merasa tidak nyaman dengan upaya perubahan yang ada.

Nakknya Megawati semakin membawa ketidakjelasan arah gerakan perubahan. Ha ini bisa terlihat dari kenyataan pasca-pemerintahan yang menganut prinsip sentralisme politik menjadi rezim parlementarisme, prinsip demokrasi menjadi ajang jual beli dan menguntungkan kekuatan politik yang memiliki akses kekuasaan yang besar. Tarik ulur kekuasaan mengarah pada bandul otoritarianisme baru. Kedekatan Megawati dengan mantan penjahat HAM seperti letjend. Sutiyoso, dan jendral lainnya, membuat agenda pengadilan HAM terlupakan. Belum lagi permasalahan ekonomi yang semakin runyam dikarenakan pemerintah tidak tegas dalam menyikapi ketergantungan yang diciptakan oleh para agen Neo-liberal, seperti IMF, WB, CGI, dll. Imbas dari kesemuanya adalah indonesia terperangkap dalam jerat hutang berkisar 3000 trilyun yang akan jatuh tempo 2003 ini. Juga, persoalan pengangguran yang mencapai 59, 84 % dari 95, 7 juta angkata kerja, dan penjualan banyak aset negara untuk diswastakan ke perusahaan multinasional yang punya modal besar. Yang paling ironis adalah munculnya lagi gerakan intimidasi/teror ketakutan terhadap gerakan prodem terutama GM dengan kekerasan, penangkapan, dan upaya memobilisasi kekuatan reaksioner untuk mengalau gerakan Prodem. Dalam kondisi yang seperti ini tentu harus ada posisi yang tegas dari GM, konsolidasi demokratik antarelemen GM yang lemah dan menjadi kritik yang terbuka. Sebab isolasi sosial akan tetap menjadi kemungkinan karena GM sangat rentan untuk dimarginalisasi dan dialienasi dari sistem politik dan sosial, hanya dengan sitgma-stigma yang menciptakan ketakutan. Komunisme masih mejadi "momok" historis dan ini yang terus di eksploitasi. Pasea gemerlap "booming" gerakan mahasiswa 1998 yang mejadi sorotan luas perishwa politik nasional, saatini gerakan mahasiswa mesti sudah mengetahui kelemahan strategi dan taktik gerakan yang kurang bisa melakukan injeksi kesadaran massa yang meluas lewat pendidikan politik yang lebih maju dan nir-kekerasan. Karena isolasi so sial yang dialami eM juga tidak terlepas dari kebanyakan masyarakat dunia ke-3. Johan ealtung menyebumya sebagai hasil dari "kekerasan struktural" yang berasal dari penerapan konflik kepentingan negara dan rakyat yang dikondisikan untuk memenuhi prasyarat Living Condition masyarakat pinggiran, yang berusaha menerapkan butir-butir proyek imperialisasi dunia. eM, dalam kondisi ini harus meneari jawaban bersama, karena dalam kegilaan sistem yang ada saat inimasyarakat, termasuk mahasiswa, akan semakin terseret pada upaya pragmatis untuk membenarkan penindasan yang dilakukan masyarakat industri seperti yang dikatakan H. Mareuse sebagai Masyarakat/ manusia satu dimensi (one dimention man).

Lalu seperti apakah posisi GM di tengah zaman bergerak (age of motion), fase milenium, di mana isu internasional yang berkembang adalah terorisme dan pasar bebas/neo liberalisme. Di tengah konteks seperti ini ada yang menilai bahwa polarisasi orientasi gerakan semakin menajam. Ada analisa yang mengemukakan gerakan-gerakan di dunia akan bergerak pada juga kategori. Kategori pertama adalah gerakan fundamentalis, yang tercitrakan lewat gerakan militansi agama yang dogmatis, kedua adalah gerakan Nasionalisme, gerakan ini rnuncul dan massif ketika gerakan fassis nasonalis mulai menjadi anearnan di banyak negara. Di Prancis, Kekuatan fasis Jean Marie Lepen, hampir membuka sentiman itu, di Belanda, bahkan di Indonesia mulai banyak bermunculan fasisme gaya baru berupa pensakralan simbol-simbol primordialisme dan ketakutan pemberontakan yang berlebih-lebihan. Ketiga, gerakan anti globalisasi dan neo liberalisme. Pada ban yak gerakan demokratik di dunia, termasuk Indonesia, sangat marak tentang penolakan atas situasi ini. Ada banyak tipe gerakan, ada LSM, individu, dan organisasi massa yang solid dan punya garis politik seperti eM. eM dalam ban yak diskursus mesh menempatkan situasi ini untuk melaunching platform Anti imperialisme. Karena kapitalisme, dalam coraknya yang paling progressif adalah lewat irnperialisme. Hal ini tepat seperti yang diramalkan V.l Lenin bahwa "imperialisme adalah puncak kapitalisrne". Imperialisme gaya baru ini tentu menimbulkan fase baru penindasan yang lebih licik dan terorganisir.

Kemudian yang juga cukup krusial adalah permasalahan internal eM. Banyak krihk otokritik yang bisa menjadi pelajaran berharga. Namun seringkali memang itu tidak bisa berjalan dengan sempuma. Banyak eM yang mulai memperhatikan pula tentang upaya pendemokratisasian kampus. Persoalan domestik ini menjadi krusial karena bisa menjembatani "kesadaran apolitis" mahasiswa dengan realitas objektif berupa ketidakbeeusan negara dalam mengurusi pendidikan sekalipun. Dalam beberapa hal, memang jumlah gerakan dalam bentuk demonstrasi maupun aktivitas militansi mahasiswa saat ini tidak bisa dibandingkan dengan gemuruh 98-an, namun aksi-aksi seeara sporadis yang menyikapi banyak permasalahan domeshk seperti pendidikall, memberikan indikasi bahwa kesadaran politik di dalam gerakan mahasiswa tidak sepenuhnya meluntur dan bahkan isu-isu yang "dramatis" seperti persolan mekanisme demokratisasi kampus dapat memobilisasi mahasiswa.

Feodalisme pendidikan dalam bentuk "in loco parentis" di tingkatan universitas juga kembali memperoleh perhahan dari eM. Seeara tidak langsung situasi pendidikan yang konservatif, yang masih kaku dalam memenuhi rasa keingintahuan mahasiswa akan dunia politik ini mempengaruhi dinamika mahasiswa. Berbagai macam proyek Iiberalisasi pendidikan yang dalam perkiraan akan menimbulkan kebebasan berekspresi mahasiswa, justru berkebalikan. Pendidikan tetap tidak bisa menampilkan wajahnya yang humanis ini visa terdeteksi dengan melambungnya biaya pendidikan dan pembatasan-pembatasan akademik lainnya yang membatasimahasiswa di dalamnya. Permasalahan komunikasi politik, sebagai bagian dari sosialisasi program dan sikap politik harus tetap menjadi sebuah prioritas utama. Media komunikasi dalam bentuk terbitan, seperti yang di lakukan kawankawan PMII ini, harus tetap di genearkan. Oalam ban yak hal komunikasi politik "bawah tanah" ini mendapat sambutan yang lebih luas karena ia bisa menjadi semaeam media dalam mata rantai komunikasi yang membantu pembentukan pandangan-pandangan ideologis dan mengkomunikasikan pandangan tersebut. Kemudian, jika saya amah, aktivitas GM mahasiswa saat ini kembali kepada masa "keakuan," yang seringkali justru menjadi kendala sulit untuk melakukan kembali konsolidasi dalam menyikapi perubahan yang berlangsung eepat. Jika dulu seringkali ativitas gerakan berfungsi sebagai saluran bagi impuls-impuls mahasiswa yang nakal atau pemberontak, namun saat ini gerakan harus menjadi sesuatu hal yang padu antara intelektualisme dengan praksis gerakan yang radikal. GM sekarang, secara dewasa tentu tidak lagi berdebat tentang permasalahan apakah harus kritik moral ataukah gerakan politik yang lebih luas. Karena jelas, bahwa tentu sebagian besar dari kita sebagai aktivis GM, bisa menjelaskan radikalisme yang muncul sebagai tanggapan atas kesenjangan cita-cita rnasyarakat yang ideal dengan kondisi aktual yang jelas bertentangan dengan cita-cita tersebut. Sehingga jelas gerakan yang kemudian muncul akan beririsan tegas dengan struktur ekonomi politik negara suprastruktur.

Progresifitas Gerakan Mahasiswa

Kesadaran elit yang abstrak berbaur dengan ketakutan relatif hilangnya posisi kelas (deklassierung). Sejalan dengan kesadaran elit yang abstrak, pada massa yang akan datang sulit akan membayangkan bisa berjalan harapan akan "mesianisme" massa GM. Persoalan peran rnahasiswa sebagai intermediary antara state dan society, seringkali menjebak GM hanya pada posisi netral. Konstruksi ini menjadikan GM seringkali sebagi wadah "rornantis-romantisan" bagi orang-orang yang ingin melampiaskan syahwat mudanya. Sementara yang lebih penting adalah bahwa perubahan yang harus terus dilakukan tidak bisa berhenti begitu saja. GM tidak saja harus mengimbangi otoritaranisme negara tetapi ke dalam dan antarelemen saling memberikan pengalarnan dan pendidikan politik. Di tengah deru neo liberalisme yang hampir akan menjadi ideologi dominan, GM makin dituntut untuk bisa membaca dengan jelas berbagai macam kontradiksi di dalam rnasyarakat industrial. Sehingga ada analisa yang jelas dan konkret mengenai pertanyaan "what's to be done" . GM tentu tidak akan berdiri sendiri, ia harus berhubungan dengan sektor perubahan yang lannya seperti buruh, tani, KMK, dll. Namun akan semakin susah jika gerakan-gerakan sektoral yang sedianya akan menjadi sekutu dekat GM semakin terjebak dalam lingkar pragmatisme konflik yang menyeret kesadaran politis kelas pekerja menjadi sekedar gerakan-gerakan normatif yang tak berujung pangkal.

Saya sering membayangkan bahwa ada saja kemungkinan GM terperangkap dalam "politik abu-abu" I grey area yang di pasang negara maupun penguasa modal, dengan jalan memberikan respon-respon gerakan yang bisa tidak menyentuh substansi perubahan, yaitu mewujudkan bentuk demokrasi nasional yang akan meluas menjadi revolusi nasional. Semisal saja tentang kebijakan pemerintah di bidang perburuhan, hanya rnampu meciptakan diskursus dan gerakan normatif. Sementra untuk perubahan kesejahteraan tidak pemah terwujud. Begitu pula tentang berbagai isu tentang HAM, separatisme, terorisme, amandemen, dll, seolah mengajak kita untuk terus-menerus berskap reaksioner dan mudah terprovokasi.

Dalam berbagai kasus di Eropa dan Amerika, ketika mahasiswa terjebak dalam kefrustasian konflik masyarakat industrial yang rnakin pelik, ada kemungkinan akan terjebak dalam bemtuk fundamentalisme gerakan. Bahkan mungkin akan menyerempet menjadi gerakan-gerakan teror. Di Italia mungkin rnasih kita ingat bagaimana GM yang cukup radikal di sana yaitu brigate ross brigade merah) atau autonomia operaia menjadi gerakan teror yang menakutkan, di Jerman faksi baader- meinhoff I sempalan SDS menjadi faksi frustasi yang akhimya menjadi gerakan teror, atau di Jepang GM berubah menjadi pasukan seikegunItentara merah yang banyak menebar teror dalam tiap aksinya. Di sini, mungkin akan berbeda situasinya. Indonesia

yang merupakan negara marjinal dan terbelakang, GM akan bersimbiosis erat dengan kekuatan sektoral. Karena masih jelas bentuk kontradiksi yang dihadapi kelas pekerja, bentuk krisis sosial dan ekonorni politik sernakin menghebat, dalam beberapa waktu mendatang akan memberikan sebuah realitas historis agar rakyat turut bergerak. Kefrustasian GM akan justru akan terjawab dengan kontradiksi yang lebih terbuka ini. Apalagi ada indikasi melemahnya pusat kekuasan kapitalisme di Amerika mungkin dalam jangka yang akan panjang menyebabkan pula perubahan pola kepemimpinan ekonomi politik dunia. Dalam resesi yang akan berlanjut, posisi gerakan demokratik terutarna GM akan mengalarni fase yang bisa jadi seperti era 98-an, di mana akan memicu keresahan dalam skala yang cukup luas dan ini akan menjadi semacam "reedukasi" perlawanan yang dengan bekal pengalaman sebelumnya akan menjadi gerakan politik yang lebih matang. Mari kita bekerja, berkarya dan bercinta dengan satu hal: Kemerdekaan.

GENEOLOGI GERAKAN MAHASISWA INDONESIA

Akar Sejarah di Indonesia

Gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun di luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa. Sejarah Gerakan mahasiswa yang tertua yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah Perhimpoenan Indonesia di Belanda, yang didirikan pada 1922 oleh Mohammad Hatta, yang saat itu sedang belajar di Nederland Handelshogeschool di Rotterdam. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkar kekuasaan Orde Baru, di antaranya Akbar Tanjung, Cosmas Batubara Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, dll. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabibet pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Baru Dalam perkembangannya di kemudian hari, Orde Baru juga banyak mendapatkan koreksi dari germa seperti dalam gerakan-gerakan berikut:

1. Gerakan anti korupsi yang diikuti oleh pembentukan Komite Anti Korupsi, yang diketuai oleh Wilopo (1970).
2. Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang.
3. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut.
4. Gerakan mahasiswa Indonesia 1974. Gerakan memprotes PM Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia pada 1974. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, yang mengakibatkan dihapuskannya jabatan Asisten Pribadi Presiden.

Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia 1955-1978

Tahun 1955 merupakan tahun ke-5 Indonesia menganut sistem pemerintahan liberal. Eksperimentasi ini dianggap gagal oleh Sukarno, sang bapak bangsa. Parameternya, tidak satupun partai mampu memerintah dalam waktu yang cukup lama untuk dapat memapankan satu satu konsep pemerintahan. Pemerintahan yang terlama bertahan tidak lebih dari 2 tahun. Hal ini terjadi karena tidak ada partai mayoritas di parlemen. Empat partai besar, PNI, Masyumi, Nu, dan PKI, memiliki jumlah kursi yang hampir sama di parlemen.

Namun demikian, pada tahun tersebut, sempat terlaksana peristiwa yang dimaksudkan sebagai jalan keluar dari pertikaian politik yang berlangsung sejak berdirinya NKRI. Pemilihan Umum (PEMILU) yang diagendakan oleh Kabinet Ali I (walaupun dilaksanakan pada masa kabinet yang berbeda karena kabinet Ali I sudah jatuh sebelum sempat melaksanakan agendanya) bisa berjalan dengan baik

Jatuhnya kabinet Ali I merupakan akibat dari konflik politik di tubuh angkatan darat yang berawal sejak 17 Oktober 1952. Sebagai puncaknya adalah pemboikotan terhadap Bambang Utoyo yang dilantik sebagai Komando Strategi Angkatan Darat (KSAD) pada 22 Juni 1955. Berbagai partai dan mass media menunjukkan simpatinya yang mendorong munculnya mosi tidak percaya terhadap menteri pertahanan yang diprakarsai oleh Zainal Baharudin.

Kondisi ekonomi yang amburadul, antara 1954 hingga 1959, akibat inflasi yang meninggi, semakin memmermatang kontradiksi social. Disertasi Hermawan Sulistyo menunjukkan bahwa defisit anggaran, suplai uang, dan biaya hidup meningkat hampir tiga kali lipat. Uang kartal yang beredar menunjukkan angka yang semakin meninggi (Palu Arit di Ladang Tebu,). Pada saat yang sama lapisan elit tidak menunjukkan *sense of crisis* yang kuat dengan mempertonkan kemewahan di hadapan rakyat melarat.

Ekonomi biaya tinggi akibat inefisiensi dan korupsi di kalangan birokrasi banyak berperan terhadap mundurnya perekonomian di Indoneisa. Faktor yang memperburuk situasi adalah impor, sebagian besar dalam bentuk barang konsumsi, yang meningkat tajam dari 499 juta dolar AS pada tahun 1955 menjadi 644 juta dolar AS pada tahun 1960. Kontradiksi social ini akhirnya melahirkan perlawanan seperti pemogokan yang dilakukan oleh serikat buruh Partai Sosialis Indonesia (PSI) sekitar Mei 1955.

Sebelum jatuhnya kabinet Ali I, yang kemudian digantikan oleh kabinet Burhanudian Harahap, sempat terlaksana Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955. Jalinan kerjasama dengan negara-negara Asia-Afrika dirintis sejak dari sini di mana Indonesia menjadi salah satu penyelenggara pertemuan tersebut. Selain itu Indoneisa berhasil mempererat jalinan kerjasama dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dengan kesepakatan yang berkaitan dengan kewarganegaraan setelah membuka kedutaan besar di Cina sejak Mei 1953. Kendala yang dihadapi adalah upaya diplomasi untuk mendapatkan Irian Barat.

Situasi di atas juga berpengaruh dalam tubuh gerakan mahasiswa. Terutama tarikan dalam medan politik. Menjelang pemilu 1955, tercatat semua Partai Politik (Parpol) besar telah memiliki *underbow* di kalangan masyarakat, baik organisasi buruh, tani, dan tidak terkecuali mahasiswa dan pelajar. Setelah sebelumnya aktifitas politik mahasiswa agak melemah karena keluarnya Persatuan Perhimpunan-Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) dari Front Pemuda Indonesia (FPI–hasil dari kongres pemuda seluruh Indonesia pada 8 Juni 1950), pemilu 1955 menjadi suatu momentum bagi gerakan mahasiswa.

Selain situasi nasional, gerakan mahasiswa juga tidak terlepas dari pertarungan global yang melibatkan dua kutub kontras ideology, yakni Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet. *International Union Student* (IUS) yang kongres pertamanya terlaksana di Praha, Cekoslowakia, Agustus 1946 dan *Internasional Student Conference* (ISC, 1950) telah mengakibatkan terpecahnya gerakan mahasiswa dalam dua kubu ideologi besar dunia.

Di tingkatan nasional, tahun 1955 menjadi titik penting perpecahan gerakan mahasiswa. Kebutuhan parpol untuk memiliki kaki di kalangan mahasiswa menjadikan gerakan mahasiswa menjasi salah satu medan pertarungan politik. Sejarah pun mencatatm Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berafiliasi ke PNI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Germasos) yang berbasis di UI berafiliasi dengan PSI, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) berafiliasi ke Masyumi, berbagai organ local yang dikemudian hari terkonsolidir dalam CGMI berafiliasi ke PKI. Sedangkan PPMI memilih untuk tidak terlibat dalam konstelasi kekuasaa praktis (apolitis), dengan konsekuensi kehilangan populisme mediatik karena tersingkir dari dunia politik

Afiliasi organisasi mahasiswa ke Parpol bukan tanpa persaingan yang tajam di kalangan mahasiswa. Hubungan antara mahasiswa dan antara kampus semakin meruncing karena perbedaan aliran ideologi yang di anut oleh masing-masing Parpol. Pertentangan lama antara front kiri dan partai-partai kanan semakin jelas, implementasinya di sektor gerakan mahasiswa adalah perpecahan antara CGMI, GMNI, dan GMKI dengan HMI, PMKRI, dan Germasos. Kepemimpinan di PPMI sendiri kemudian dipegang oleh Germasos.

Pengganti kabinet Ali I, Kabinet Burhanudin Harahap hanya mampu bertahan sampai dengan 4 Maret 1956. Tidak banyak yang bisa dicapai oleh kebinet ini kaitannya dengan kondisi Indonesia. Hanya pada tanggal 2 Maret 1956 kabinet berhasil menandatangani bantuan kredit pangan dari AS senilai $ 96.700.000 yang akan diserahkan dalam jangka waktu 2 tahun.

Mulai tahun 1956 militer mulai melakukan penetrasi kedalam gerakan mahasiswa. Kondisi ekonomi politik tidak jauh berbeda. Kehidupan pembangunan perekonomian dan pertikaian politik tidak kunjung membaik, termasuk distribusi kekayaan pemerintah yang terdistribusi tidak merata di setiap daerah yang mengakibatkan gejolak protes di berbagai daerah yang nantinya banyak menimbulkan pemberontakan bersenjata di seluruh pelosok negeri.

Organisasi mahasiswa di direpresentasikan oleh PPMI dan merasa terjebak dengan keanggotaan IUS masih berkutat dengan persoalan ini. 15 Mei 1956 berlangsung Konferensi Mahasiswa Antara Indonesia (KMAI) untuk membahas masalah ini di asrama Daksinapati UI. Namun, yang terjadi justru persaingan untuk memperebutkan kepemimpinan politik dunia mahasiswa yang memang dipegang oleh PPMI.

KMAI termasuk upaya untuk mempersiapkan delegasi Indonesia untuk mengikuti Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika (KMAA). Sejumlah negara yang semula direncanakan mengukuti forum ini menolahdengan alasan KMAA didalangi oleh IUS atau paling tidak panitia didomisasi oleh mahasiswa anggota IUS. Negara-negara yang menolak tersebut antara lain: Muangthai, India, dan Birma.

Menurut Dahlan Ranuwiharjo peristiwa tersebut, disatu sisi merupakan prestasi PPMI, namun di sisi lain, KMAA justru satu titik balik. Golongan kiri yang 9 tahun sejak 1947 merasa tidak bisa menggeser dominasi HMI, PMKRI, GMKI, dan organisasi non komunis lain dalam PPMI mulai mengadakan ofensi politik guna merongrong posisis PPMI. Dan di dunia internasional perang dingin pun mencekam kehidupan mahasiswa dunia dalam bentuk konfrontasi antara IUS dan ISC yang mewarnai perbagai pertemuan mahasiswa internasional.

Indonesia semakin carut marut di tahun 1957. Sejak akhir 1956 aksi protes diberbagai wilayah Indoneisa mulai diwarnai dengan kekerasan bersenjata. Kerusuhan itu terutama sekali dipelopori oleh panglima tentara di daearah-daearah. Terbentuknya Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di

Sumatera Utara, dan Permesta di Sulawesi Selatan sebagai buktinya. Kondisi Indonesia yang seperti itu tidak bisa membuat kabinet Ali II bertahan, Januari 1957 kabinet Ali II jatuh.

Sukarno mengambil langkah dengan mengumumkan berlakunya keadaan darurat perang di seluruh Indonesia. Ketegangan hubungan Sukarno-Hatta berawal pada masa-masa ini. Tindakan Sukarno lebih lanjut adalah membubarkan Dewan Konstituante dan membentuk Kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional. Ternyata konsepsi Sukarno justru menambah ketegangan karena mumunculkan pertentangan baru antara golongan yang pro dan kontra terhadapnya. Termasuk ketidakakuran dengan Hatta yang berakhir dengan pengunduran dirinya sebagai wakil presiden.

Pergolakan politik pada tahun ini tidak begitu merubah keadaan ekonomi. Harga-harga relatif stabil. Sebabnya adalah impor surplus hasil bumi dari AS. Kerjasama yang ditandatangani 2 Maret 1956 ternyata berjalan dengan baik. Salah satu hasilnya adalah pembangunan pabrik semen Gresik.

Salah satu sebab pembubaran Badan Konstituante adalah kegagalannya untuk menghasilkan sebuah UUD untuk menggantikan UUDS 1950. Kontroversi utama ditimbulkan oleh partai-partai Islam yang berusaha untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam konstitusi baru.

Gerakan mahasiswa ternyata terseret juga dalam konflik ini. Aktivis mahasiswa yang berbasis di UI Jakarta menggalang senat-senat dari berbagai Universitas dan membentuk federasi Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI). Mulai detik ini PPMI terpaksa harus berebut pengaruh dengan MMI.

Aspirasi politik yang disebarluaskan oleh partai-partai terlalu berpengaruh pada MMI yang tidak memiliki perhatian terhadap problem-problem konkret rakyat. Misalnya, perjuangan merebut Irian Barat tidak dianggap sebagai bagian dari perjuangan Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Padahal menurut penelitian para ahli di Irian Barat ada kemungkinan terdapat Uranium di mana AS berusaha untuk menguasainya melalui perjanjian yang di buat dengan Belanda. Kepentingan strategis akan Irian Barat bagi AS adalah usaha merelokasi rencana digunakannya Irian Barat sebagai garis strategis militer sepanjang kepulauan Bismark-Solomon-New Britania. Investasi kapital AS secara bertahap dapat menggeser investasi Belanda: di sektor pengeboran minyak, Sorong, perbandingan modal wakti tiu telah menjadi 60% (40 % Stanvack dan 20% Caltex) : 40 %. Juga terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa AS akan membantu Belanda di PBB untuk persoalan Irian Barat dan sebagai balas jasanya AS diperbolehkan mengambil alih pertambangan tembaga yang pada waktu itu dieksploitasi oleh Belanda.

Pada 24 April berlangsung Deklarasi Hari Solidaritas Internasional Menentang Kolonialisme dan Imperialisme yang dipelopori oleh PPMI, FPI, dan Perserikatan Organisasi Pemuda Islam Seluruh Indonesia (Porpisi) dan MMI tidak mengambil peran dalam peristiwa ini.

Tahun 1957 adalah tahun yang suram bagi organisaasi baik mahasiswa maupun masyarakat. Peranan politik berangsur menurun yang akarnya adalah penandatanganan kerjasama antara pemuda dengan Angkatann Darat (AD), 17 Juni 1957. Perjanjian ini ditandatagani oleh Sukatno (Sekjend Pemuda Rakyat), S.M Thaher (Pemuda Demokrat), A Bochori (GPII), Wahib Wahab (Ansor) dari pihak pemuda, dan Letkol Pamuraharjo dari pihak militer. Strukturalisasi kerjasama ini dikukuhkan dalam bentuk Badan Kerjasama Pemuda-Militer (BKS-PM), yang diresmikan 26 Juli 1957. 125 organisasi pemuda dari 6 federasi memiliki perwakilan di Dewan Penasehat BKS-PM. Dampaknya adalah keterbatasan ruang gerak organisasi mahasiswa.

Bukan hal yang aneh jika militer memanjangkan tangan ke Rektor ITB dan UI karena kekuatan mahasiswa (Universitas) pada dasarnya sangat harus diperhitungkan. DI UI, kepemimpinan Iwa Kusumasumantri diganti oleh Prof. Thoyib (Menteri Pendidikan). Pun urusan mahasiswa yang belajar di luar negeri ada dalam pengawasan militer.

Sementara itu elit politik di Indonesia diributkan dengan pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah. Peranan militer dalam dunia politik juga bahan percekcokan yang berlarut-larut. Kondisi seperti ini dicoba diperbaiki dengan merubah sistem pemerintahan di Indonesia.

Kemudian Sukarno menunjuk Djuanda, PM.KK sebagai Perdana Menteri pertama mengawali masa Demokrasi terpimpin. Manifesto politik yang berintikan UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, dan ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia (USDEK) merupakan GBHN masa demokrasi terpimpin. Salah satu kebijakannya adalah kembali memberlakukan UUD 1945. Sedikit banyak PPMI punya peran di sini. Pada 11 Juni 1959 beberapa anggota PPMI berangkat ke Bandung dengan tujuan memberikan tekanan agar kembali ke UUD 1945 pada Badan Kontituante yang bersidang di Bandunhg. Selanjutnya keluarlah Dekrit 5 Juli 1959.

Tahun 1959 adalah masa geger Manipol USDEK. Tembok-tembok dan atap rumah penuh dengan coretan-coretan antusiasme masyarakat terhadap Manipol USDEK. Parpol/Ormas dipaksai untuk menyesuaikan diri dengan situasi ini. Organisasi mahasiswa mau tidak mau harus merubah anggaran dasarnya dengan mencantumkan Manipol USDEK. Parpol /Ormas yang dianggap tidak progresif revolusioner atau kontra revolusioner dibubarkan. Masyumi dan PSI menjadi korban. Anak organisasinya; Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Gerakan Pemuda Sosialis (GPS), serta Gerakan Mahasiswa Sosialis dikucilkan.

Sementra itu perekonomian di tahun ini semakin memburuk Salah satu tindakan untuk menyelamatkan keuangan negara yang dilanda inflasi ialah melakukan *sanering* terhadap rupiah yang diumumkan pemerintah pada 25 Agustus 1959, nilai rupiah tinggal 10 persen saja dari nilai nominal.

Perkiraan bahwa nilai uang akan kembali normal ternyata meleset. Jumlah uang yang beredar bertambah cepat dan harga barang cepat pula membumbung tinggi. Menurut Drs. G. Moedjanto, M.A beberapa hal yang menyebabkannya antara lain: *Pertama,* penghasilan negara memang berkurang akibat dari turunnya ekspor karena pergolakan di berbagai daerah tidak kunjung reda. *Kedua,* nasionalisasi perusahaan Belanda tidak cukup membantu karena Indonesia tidak mempunyai tenaga-tenaga manajemen yang cakap dan berpengalaman. *Ketiga,* PN, PDN, PPN yang didirikan pemerintah dengan maksud dijadikan salah satu jalan untuk mempercepat tercapainya sosialisme di Indonesia, hanya menguntungkan elite yang menjadi Orang Kaya Baru (OKB). *Keempat,* persiapan penyelenggaraan ASEAN Games IV memakan biaya yang tidak sedikit. *Kelima,* Sukarno semakin sering mengadakan perjalanan keluar negeri (dengan biaya negara), dan *keenam,* modal asing sama sekali tidak tertarik untuk masuk ke Indonesia karena iklim politik Indonesia yang terlalu panas. *Terakhir,* Indonesia sedang fokus pada permasalahan Irian Barat.

Seringnya presiden bepergian ke luar negeri menjadikan perannya semakin kecil dan tergantikan oleh Nasution. Bahkan tentara terbukti banyak campur tangan dalam perekonomian. Pedagang Arab, India, dan terutama Cina mendapat perlakuan keras dari tentara, pelarangan berdagang sampai pengusiran dari tempat tinggal. Karena permasalahan ini, hubungan Jakarta-Cina merenggang. Cina melakukan tekanan diplomatik yang sangat besar terhadap Jakarta. Di sisi lain, Sukarno bersama PKI mati-matian membela orang-orang Cina. Salah satu dampak instabilitas komunitas perdagangan tersebut adalah terjadinya dislokasi ekonomi, penimbunan barang, dan tingkat inflasi yang semakin serius.

Untuk bersaing dengan kekuasaan Nasution, Sukarno menempuh 2 taktik pokok. Mendapatkan dukungan dari Parpol yang berpusat di Jawa dan merangkul Angkatan Udara (AU) berhubung AD sudah dipegang oleh Nasution (Sejarah Indonesia Modern, 1991).

Sementara itu, pada tahun 1960 PSI dan Masyumi yang tidak sehaluan dengan Sukarno dibubarkan. Dilanjutkan dengan pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. PSI, Masyumi, dan beberapa sekutunya atas dorongan Hatta membentuk Liga Demokrasi untuk menghalagi langkah-langkah Sukarno.

Kursi DPR-GR antara 17%--25% diisi oleh orang-orang PKI. Demikian pula ketika Sukarno membentuk MPRS, banyak orang PKI yang mengambil peran, hanya saja PKI memang tidak terwakili dalam kabinet.

Indonesia semakin condong kepada Uni Soviet, PKI semakin besar. Kebutuhan militer untuk melancarkan serangan guna merebut Irian Barat menambah kedekatan kepada Uni Soviet. Melihat keadaan ini, pemerintah AS tidak tinggal diam. Januari 1960 Khrushchev berkunjung ke Indonesia dan memberikan kredit sebesar 250 juta Dollar AS. Namun Sukarno juga berhasil memperoleh pinjaman sebesar 450 juta Dollar dalam bentuk persenjataan dari Unisoviet pada Januari 1961.

Angkatan bersenjata bertambah kuat. Mencapai jumlah sekitar 300.000 prajurit pada tahun 1961 dan 330.000 prajurit pada akhir 1962. Indonesia banyak mendapat peralatan militer dari Unisoviet, termasuk pesawat-pesawat tempur modern dan pesawat-pesawat pengebom jarak jauh. Persenjataan tersebut sebagian besar jatuh ke AU dan AL yang dipandang Sukarno lebih kooperatif.

Pemberontakan diberbagai daerah masih terus berlangsung,. PKI makin berkibar. Anggota terus bertambah dengan beberapa organ taktisnya, BTI mencapai 5,7 juta orang yang konom merupakan ¼ dari keseluruhan jumlah petani dewasa. SOBSI mencapai hampir 3,3 juta orang. Awal 1963jumlah anggota Pemuda Rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) mencapai 1,5 juta orang. Jumlah anggota PKI sendiri pada akhir tahun 1962 mencapai lebih dari 2 juta orang. PKI adalah partai komunis terbesar di negara non komunis manapun (Sejarah Indonesia Modern, 1991).

AS yang cemas melihat perkembangan di Indonesia mencoba mendesak Belanda untuk merundingkan penyelesaian Irian Barat. Perundingan-perundingan baru yang muncul kemudian disetir oleh AS. Akhirnya pada 15 Agustus 1962 sengketa selesai. 1 Oktober 1962 Belanda akan menyerahkan wilayah itu kepada PBB untuk kemudian diserahkan kepada Indonesia 1 Mei 1962.

Justru, selesainya sengketa Irian Barat membawa akibat buruk pada demokrasi terpimpin. Pihak militer takut UU darurat perang akan dicabut dan belanja militer dikurangi, PKI takut bahwa politik yang kurang radikal akan merintangi perkembangannya, Sukarno takut semangat rakyat yang berkobar selama masa kampanye Irian Barat akan surut.

Pada organisasi mahasiswa, kedekatan dengan militer semakin jelas. Mahasiswa ikut berperan dalam pertahanan sipil secara profesional. Dimulai dari pembentukan Resimen Mahasiswa (Menwa) Mahawarman Bandung tanggal 13 Juni 1956. Terbentuknya organisasi ini menjalari Universitas-Universitas di Indonesia.

Trikora yang dikeluarkan Sukarno 19 Desember 1961 mendapat dukungan sepenuhnya dari golongan tersebut. Gerakan politis pun dilakukan. MMI dan PPMI membawa persoalan Irian Barat pada level nasional maupun internasional (melalui IUS & ISC). Namun, akhir persengketaan Irian Barat yang lebih diplomatis menjauhkan organisasi mahasiswa dari dunia politik.

Pada Juli 1961 PPMI sempat melaksanakn kongres ke IV. Kongres ini membentuk presidium yang terdiri dari GMNI,PMKRI,GMD,CGMI,PMB,dan MMB –Eksekutif yang dianggap beroroentasi kiri. Pada saat yang sama Germasos dan HMI berhasil masuk ke organisasi-organisasi lokal di Jakarta, Bandung,

Yogyakarta, dan Surabaya. Mereka kemudian membentuk SOMAL. Dalam berbagai kesempatan, Somal selalu menegur agar PPMI jangan terlalu terlibat dalam isu/peristiwa politis, jadi jelas sekali aspirasi ini adalah suara MMI.

Sehubungan dengan insiden rasial di Bandung Mei 1963, konsulat PPMI Bandung mengeluarkan pernyataan: Bahwa yang sebenarnya peristiwa tersebut bukan bermotif rasial, akan tetapi merupakan isu sosial yang diakibatkan oleh gap antara si kaya dan si miskin yang terus mendalam. Dalam kasus tersebut, konsulat PPMI Bandung pecah. 4 anggota PPMI Bandung membentuk organ yang serupa dengan Biro Aksi Mahasiswa. Keadaan ini dimanfaatkan oleh MMI, mereka bergabung dengan organ pecahan PPMI di Bandung tersebut dan membentuk Majelis Permusyawaratan Indonesia (MAPEMI) Agustus 1965.

Harus dicatat bahwa eksekutif MMI terdapat perwakilan dari Akademi Hukum Militer (AKM) dan Perguruan Tinggi Kepolisian (PTIK), sehingga tidak mengherankan bila kepemimpinan dipegang oleh perwira tingkat menengah AD fan Kepolisian.

Tragedi 1965 merupakan kulminasi dari kondisi Indonesia yang semakin semrawut semenjak 1963. Kenaikan harga tidak berimbang dengan penghasilan yang diperoleh, khususnya yang berpenghasilan dari butuh, pegawai negeri, dan ABRI.

1963, tarif kereta api naik 500%, tarif bus berlipat dan tarif angkatan udara menanjak sampai 500%. Tarif jasa umum seperti listrik dan air minum mencapai 400%. Dampak kenaikan ini terasa pada harga-harga di pasar. Dalam kuartal 1963 harga rata-rata beras, daging, ikan, telur, susu, gula, minyak kelapa, garam, sabun, di Jakarta naik 2 kali lipat dari tahun 1962 (Indeks 1953:100,1958:203,!962:1006, dan kuartal ke dua 1963:2302).

Angkatan bersenjata pun tidak lepas dari persoalan keuangan. Sejak 1963, angkatan bersenjata tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya. Akibatnya, mereka sulit memperoleh dan merawat alat-alat perang. Suku cadang untuk pesawat tempur, radar, kapal dan sistem persenjataan lain tidak tersedia, sehingga banyak persenjataan modern kala itu yang tidak dapat dioperasikan (Hermawan Sulistyo,).

Kondisi keuangan riil militer lebih rinci yakni: Pada 1959, anggaran militer (termasuk operasi-operasi militer) dialokasikan 32,26% dari anggaran pemerintah. Untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 34,99% (1960), 29,28 (1961),34,72% (1962), 22,10% (1963), 26,71 (1964), dan 41,54% (1965).

Masalah luar negeri yang paling mencolok adalah usaha pembentukan negara malaysia yang terdiri dari persekutuan tanah Melayu, Singapura, dan sabah yang terwujud pada tanggal 16 September 1963. Pengaruhnya ke dalam negeri berupa lebih seringnya dilakukan penggerakan massa untuk menghadiri rapat-rapat raksasa dengan tema anti Malaysia, anti kolonialisme, dan anti imperialisme.

Kesukaran hidup rakyat dininabobokan dengan semboyan “Amanat Penderitaan Rakyat, Berdiri di atas Saki Sendiri”. Deklarasi ekonomi (Dekon) 23 Maret 1963 Justru memprioritaskan pembangunan yang tidak bersifat produktif (Sarinah Department Store, Tugu Nasional, Gedung DPR//MPR, dll). Pemikiran secara series terhadap perbaikan ekonomi hampir tidak ada. Pesta Olahraga *“Games of New Emerging Forces”* (Ganefo) juga makan biaya yang banyak.

PKI dengan Ormasnya semakin menambah keruh suasana, di bidang budaya terutama. Paling menonjol adalah aksi-aksi yang dilancarkan untuk mengganyang film-film AS dengan segala macam tuduhan, misalnya, menjadi sarang CIA. Pertarungan pendapat menyebar dikalangan seniman seniman, pengarang, orang-orang perfilman, organisasi wartawan, PWI,orang-orang pelajar, IPPI, bahkan organisasi non politis, seperti, BKSKMI, BKMI, IPMI, YAFMI (sejak 1953 muncul organisasi-organisasi profesional dan fungsional).

Kericuhan dalam dunia kampus disulut oleh aksi GMNI Mei 1962 yang menuntut dr. Muchtar Kusumaatmadja, SH keluar dari Universitas Pajajaran. Dia dianggap anti Manipol USDEK. Pro dan kontra akan aksi ini mewarnai dunia Universitas menyulut terjadinya peristiwa perkelahian di kampus ITB antara seorang mahasiswa pribumi dengan non pribumi. Peristiwa ini berkepanjangan dan mencapai puncaknya pada 10 Mei 1963.

Peristiwa rasialis tersebut menjadi jalan saling menyudutkan antar organisasi mahasiswa, berakibat dibekukannya konsulat PPMI Bandung. Kemudian mereka membentuk satu wadah baru MAPEMI, akan tetapi tidak berhasil.

Kongres IV MMI dilaksanakan awal April 1964 di Malino, Sulawesi Selatan. Perdebatan yang panjang terjadi, salah satunya mengenai kepemimpinan di MMI. Kongres berakhir dengan kemenangan di pihak yang sepaham dengan kelompok non pancasila dan komunis yang dipimpin oleh unsur-unsur CGMI dan GMNI (Pemuda Indonesia, kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga).

Pada tahun 1964, sengketa dengan Malaysia mencapai puncaknya dengan dikeluarkannya Dwikora. Bagi rakyat, masalah ini memang berbeda dengan pembebasan Irian Barat dengan Trikoranya. Kesulitan ekonomi terlebih lagi membuat rakyat acuh tak acuh.

Hal itu diperpanas dengan terpilihnya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dk-PBB pada 7 Januari 1965. hal tersebut mendorong Indonesia menjalin hubungan dengan Cina yang tidak diterima menjadi anggota PBB dengan pembentukan poros Jakarta-Peking (meniru model poros Roma-Berlin).

Perkembangan selanjutnya, pada 1965 ketegangan sosial politik semakin meninggi. Hubungan Sukarno-AD tegang. Pada tahun itulah terjadi Gerakan 30 September 1965. (sejarah tentang ini multiperspektif, dan belum ada tafsir sejarah pun yang diakui paling memadahi).

Di dunia internasional, harapan AS untuk menghentikan pembelokan ke kiri di Indonesia sia-sia tampaknya. Komitmen AS di Vietnam Selatan semakin bertambah berat dan sulit, terutama setelah terjadinya krisis kaum Budhis yang terjadi pada tahun 1963. AS menduga besar kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis atau pro komunis.

Pada tahun 1964 Robert F Kennedy menguruskan suatu gencatan senjata malaysia-Indonesia. Akan tetapi ketika dia masih berusaha mewujudkannya, para buruh PKI mulai mengambil alih perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan Inggris. Lagi-lagi pihak tentara turun memimpin perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan tersebut. Perundingan-perundingan Malaysia-Indonesia-Filipina mengalami kebuntuan. Pernyataan *Go to hell Amerika* beserta bantuannya meresmikan pengaruh AS dari Jakarta. **100%?**

Perang perbatasan Indonesia-Malaysia di hutan-hutan Kalimantan dimenangkan oleh pasukan Malaysia dan Inggris. Tentara Indonesia enggan melibatkan terlampau banyak tentara karena kemungkinan terjadinya krisis sangat besar.

Akhir tahun 1964 kampanye PKI menggunakan tindak kekerasan. Pada waktu itu sedang terjadi suatu ledakan di dalam negeri, tetapi komplotan-komplotan yang ada di balik peristiwa itu tentu saja tidak jelas. Keresahan akibat merosotnya taraf ekonomi maupun pertarungan bidang politik (AD/PKI?) melibatkan juga Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Eropa. Mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan politis yang menimbulkan perpecahan, antara yang hanya studi oriented dan yang tidak ingin ketinggalan dengan perkembangan politik di Indonesia.

Pertarungan pro dan kontra PKI di dalam negeri lebih jelas lagi. CGMI mengadakan aksi-aksi untuk mempersempit ruang gerak lawan-lawannya. Diantaranya pelarangan HMI di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya oleh Sekretaris FH cabang Jember, Prof, SH. Alasannya HMI terlibat dalam PRRI/Permesta.

Musyawarah PPMI dan Front Pemuda konsulat Yogyakarta 3 Juni 1964 oleh CGMI, GMNI, Germindo, Perhimpunan Pemuda Rakyat, GPM mau diperalat untuk membubarkan HMI, namun usaha itu gagal. Tetapi dalam pertarungan selanjutnya HMI kalah. Presidium PPMi pada sidang tanggal 6-7 Juli 1964 membenarkan tindakan konsulat-konsulatnya.

Aksi protes terhadap keputusan tersebut berupa munculnya pamflet-pamflet gelap di seluruh Yogyakarta. Sedangkan di Jakarta perang pamflet terjadi antara CGMI dengan HMI. Dan PKI dengan manis memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan HMI dengan kampanye pada rapat-rapat besar. Pada tanggal 21 Oktober 1964 HMI resmi dipecat dari keanggotaan PPMI dengan surat keputusan no 74d/KPTS/1964.

Antara 1960-1965 politik Pki tergolong sukses. Di bidang ideologi, Marxime, telah diajarkan di mana-mana sebagai pelajaran resmi dii sekolah-sekolah dan isntansi-instansi pemerintah. Isu-isu tentang *kabir* koruptor, dan, imperialisme As terus menguat.

Penentangan terhadap PKI dipelopori oleh sekelompok wartawan yang dipimpin oleh Adam Malik. Dengan membentuk badan pendukung Sukarnoisme berusaha untuk memisahkan Sukarno dari PKI. Badan ini dibubarkan oleh Sukarno 17 Desember 1964.

Unisoviet pun berusaha untuk mengurangi komitmen Sukarno dan PKI kepada Cina dengan meningkatkan pengaruhnya terhadap militer dan partai Murba. Tetapi usaha ini tidak terlampau berhasil. * Partai Murba kemudian dibubarkan leh Presiden dengan surat keputusan no 291/1965 tertanggal 21 September. Walaupun bantuan utama utama ekonomi dan militer berasal dari Unisoviet, militer dalam latihanlebih banyak berhubungan dengan AS. Selama 1958-1965 kurang lebih 400.000 orang telah dikirim ke AS untuk menjalani latihan militer.

Sukses dan peran PKI berakhir di penghujung tahun 1965. Diawali dengan peristiwa 1 Oktober 1965 sampai meletusnya G 30/S/PKI. Dan menjelang lengsernya Sukarno dari kursi kepresidenan, kondisi sosial politik Indonesia kacau. Gerakan di tubuh mahasiswa pecah, antara yang pro dan kontra PKI. Apalagi dengan masuknya pengaruh politisi-politisi masa itu, tidak terkecuali militer.

Meski demikian, demonstrasi-demonstrasi yang berlangsung masih kental dengan isu-isu yang memperjuangkan kepentingan rakyat.Devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah yang diduga sebagai upaya untuk menggalihkan perhatian masyarakat dari pembantaian besar-besaran terhadap PKI dan simpatinya menggerakkan mahasiswa untuk mengadalkan aksi-aksi menentang kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat.

Percaya bahwa dibelakang peristiwa-peristiwa 1965 adalah PKI, maka isu-isu pun mengarah ke sana. 4 Oktober 1965 mahasiswa Bandung (Unpad dan ITB) mulai bergerak. Mereka memasang spanduk "bubarkan PKI" disekeliling kampus.

Di Jakarta, suasana lebih tegang lagi, sangat sulit untuk mendeteksi siapa kawan siapa lawan. Pemuda Muhamadiyah mendirikan komando kesiap-siagaan Angkatan Muda Muhamadiyah. Diikuti pula dengan pertemuan antara HMI, Pemuda Muhamadiyah,PPI,,dan PMKRI untuk menjalin kerjasama menghadapi berbagai kemungkinan akbat Gerakan 30 September.

Awal tahun 1966 secara bertahap peran-peran politik Suharto mulai tampak. Militer sendiri punya basis yang cukup kuat untuk mendorong mahasiswa memusuhi sukarno. Francois Railon menulis, bahwa proses peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto dijalankan atas dasar Partnership antara tentara dan mahasiswa.

Tahun-tahun ini peran PPMI menurun tergantikan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang lahir 17 Oktober 1965 atas dorongan militer (Politik dan Ideologi Mahasiswa,1985). Dalam banyak demonstrasi mahasiswa selalu mendapat dukungan dari militer. Terlihat dari isu-isu yang mencerminkan kedekatan mahasiswa dengan militer.

Pertemuan dan aksi untuk menunjukkan dukungan terhadap Sukarno danmembendung usaha pengambilalihan kekuasaan negara oleh PKI disamping melenyapkan seluruh elemen yang pro komunis terjadi di mana-mana. Anehnya tidak ada sedikitpun isu yang menunjukkan bahwa semua permasalahan yang dihadapi Indonesia waktu itu bersumber dari Sukarno yang tidak becus mengendalikan pemerintahan (bawahan-bawahannya).

Dari catatan Soe Hoek Gie dapat dilihat bahwa kesalahan-kesalahan lebih banyak ditimpakan kepada menteri-menteri. Dan ini memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dari tangan Sukarno ke Suharto.

KAMI dengan cepat menjadi besar dan memiliki pengaruh yang kuat dalam organisasi-organisasi mahasiswa. Tidak sulit untuk kemudian merekrut organ-organ yang memang tidak sepaham dengan PKI seperti HMI,PMII,PMKRI,GMKI,SOMAL,PELMASI (Pelopor Mahasiswa Sosialis Indoensia) Gemsos, dan IMKI. KAMI mengibarkan ideologi anti komunis dan pembekuan organisasi-organisasi yang bernaung di bawahnya. KAMI resmi menjadi wadah tunggal organisasi mahasiswa setelah pembubaran PPMI 29 Desember 1965.

10 Januari 1966 aksi KAMI secara besar-besaran berlangsung. Keadaan Ekonomi yang kacau (inflasi 600%), inefisiensi pemerintahan (termasuk kabinet 100 menteri) dan sikap Sukarno yang tidak tegas menimbulkan ketidakpuasan. Aksi tersebut kemudian melahirkan Tritura. Aksi berlangsung selama 60 hari sampai turunnya Supersemar, Surat Perintah Sebelas Maret.

Kesalahan terbesar yang dilakukan Sukarno adalah tindakannya mereshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966. Upaya untuk membentuk barisan Sukarno pun gagal karena barisan ini dilarang di Kodam-Kodam daerah.

24 Februari KAMI mengadakan aksi untuk menhalangi pelantikan menteri-menteri baru. Aksi ini menimbulkan kemarahan Sukarno dan berakibat dibubarkannnya KAMI pada 25 Februari 1966 kepres no 41/Kogam/1966. Walaupun pembubaran KAMI secara deyure tidak lansung membunuh KAMI sama sekali. Aksi tersebut membawa korban tertembaknya mahasiswa UI Arif Rahman Hakim.

Pembubaran KAMI tidak banyak menolong Sukarno. Bersama KAPPI, Ex- KAMI terus mengadakan aksi massa. Untuk mengahadapi KAPPI, Subandrio berusaha untuk mengagitasi GSNI pada tanggal 28 Februari 1966 (baca Drs G. Moendjatno,1989).

Gerakan-gerakan penumbangan Sukarno tidak lepas dari peran pers mahasiswa. Di tahun-tahun kritis pemerintahan Sukarno penerbitan-penerbitan seperti Harian KAMI, Salemba, Kampus, Gelora Mahasiswa, dan Mahasiswa Indonesia menulis pandangan-pandangan kritis masa kepemimpinan Sukarno.

Mulai April 1966, Ad melancarkan gerakan kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekwen, yang kemudian mendapat bentuk sebagai ORBA, lawan dari ORLA. Suharto sendiri memegang tampuk kekuasaan tertinggi mulai 20 Februari 1967 dipertegas dengan ketetapan MPRS Tap XXXIII/MPRS/1967 sebagai pejabat presiden.

Langkah-langkah yang kemudian di ambil Suharto antara lain: mengubah susunan MPRS dan sebagai pijakan pemerintahannya mulai menjalankan kebijakan-kebijakan stabilitasi dan pembangunan ekonomi. Sampai dengan 1973 ORBA menunjukkan perkembangan yang positif di bidan stabilitas dan ekonomi.H.C Ricklefs menulis, toleransi beragama menguat, tingkat inflasi menurun (!(66:600%, 1967:100%, 1968:85 %, 1964:10 %). Sebagian besar keberhasilan ini dimungkinkan karena besarnya bantuan dari luar negeri (IGGI). Ekspor minyak Indonesia mengalami kenaikan harga dari 2,96 dolar AS perbarel menjadi 4,75 Dolar AS perbarel. Pada tahun 1974 minyak merupakan 74 % dari nilai ekspor sebelumnya pada tahun 1966 hanya 30 %.

ORBA sejak awal merintis hubungan dengan negara-negara non komunis sebagai upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh negara komunis. AS dan Jepang dipilih sebagai mitra kerja. Sengketa dengan Malaysia segera diakhiri dan menjalari terbentuknya ASEAN di tahun 1967.

Di masa-masa awal Orba peran-peran politik organisasi mahasiswa mulai luntur. Mereka labih disibukkan dengan permasalahan intern. Secara politis upaya untuk menghalangi gerak KAMI juga dilakukan oleh pemerintah (Revolusi Pemuda, Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga). Sampai dengan 1970 bahkan tidak ada langkah yang berhasil untuk memperbiki kondisi KAMI. Pada musyawarah Nasional Indonesia di Bogor 14-21 Desember 1970 menghasilkan keputusan bahwa wadah fisik belum perlu dibentuk, karena belum kelihatan mendesak betul (H.C Ricklefs,1981)

Langkah pembangunan Orba dimulai dengan pembentukan BAPPENAS (Badan Perancang Pembangunan Nasional). Rencana pembangunan direalisasikan dalam Repelita I yang dilaksanakan mulai 1969-1974. Titik berat pembangunan pada sarana dan prasarana pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan industri.

Legitimasi kekuasaan Suharto tercapai dengan lebih sempurna setelah pemilu 1971. 9 Partai yang mengikuti Pemilu antara lain: PKRI, PSII, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PWI, PNI, Perti, IPKI, dan Golkar. Kemenangan mutlak diperoleh Golkar dengan mendapatkan 236 kursi (masih ditambah 25 berdasarkan

pengankatan. Golkar kemudian memegang peranan besar dengan mendominasi jumlah kursi baik di DPR maupun MPR.

Permasalahn sosial yang dihadapi ORBA sejak awal adalah korupsi dan penyelundupan (Indonesia abad 20 II, 1988). Perkembangan ini terus dipantau oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Mereka bersuara melalui laskar Ampera. Gerakan anti korupsi seperti “mahasiswa menggugat”, “Komite Anti Korupsi”, “Angkatan Pelajar Indonesia”, dicetuskan leh mahasiswa dan pelajar. Ini ditanggapi pemerintah dengan dibentuknya Tim Pemberantasa Korupsi (TPK) pada 17 Desember 1967.

Tim tersebut selama 5 bulan menghasilkan 7 buah surat kepada Suharto yang dikirim tanggal 27 Februari dan 30 Juni 1970. Laporan dan sasaran yang dikemukakan meliputi kerja kejaksaan Agung dan TPI, PN; Pertamina, Bulog, penyederhanaan struktur/administrasi serta kebijakan di bidang pemberantasa korupsi.

Anti korupsi dan penghematan dana menjadi tema gerakan mahasiswa di tahun 70-an. Pemerintah berusaha meredamnya dengan mangadakan operasi-operasi penertiban. Aksi-aksi mereda. Kegiatan kemudian lebih pada konseptualisasi berupa seminar-seminar dan diskusi. Pertemuan-pertemuan serius kemudian melahirkan kelompok cibulan. Furom ini membahas permasalahan-permasalahn bangsa. Dari diskusi Cibulan lahirlah kelompok cipayung 22 Januari 1972 yang disepakati oleh Akbar Tanjung (Ketua Umum PB HMI), Suerjadi (Ketua Umum DPP GMNI), Chris Siner Key Timu (Ketua Presidium PP PMKRI), Dan Binsar Sianipar (Ketua Umum PP GMKI). PMII masuk pada pertemuan Cipayung III pada Januari 1976.

Kritik atas masuknya modal-modal asing juga mewarnai dunia kampus. Peranan perusahaan-perusahaan Jepang yang kian besar mengundang perhatian massa. Gelombang protes ini memuncak diawal 1974 yang kemudian dikenal dengan peristiwa MALARI. Pembakaran dan pengrusakan terjadi diseluruh pelosok Jakarta sebagai ekses dari protes terhadap kedatangan perdana menteri Jepang, Kakui Tanaka.

Sementara itu, kebutuhan akan adanya organ pemersatu mahasiswa makin terasa dibutuhkan. Upaya ini dirintis mulai tahun 1972 dari PNPKB (panitia Nasional Pemuda Untuk Seminar-Seminar Keluarga Berencana). Pertemuan-pertemuan mahasiswa dilaksanakan beberapa kali di Jakarta. Konsolidasi terus berlangsung sampai terbentuknya KNPI di tahun 1973. Proses terbentuknya KNPI diikuti oleh Pemuda Ansor, GPM,Pemuda Muhamadiyah, GPI,HMI,GMNI,PMKRI,GMKI,PMII, dan Koordinasi Pemuda Golkar

Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia 1978-1997

Pasca pemilu 1977, empat kota besar di Indonesia diwarnai serangkaian aksi mahasiswa. Sejumlah mahasiswa Bandung membentuk gerakan anti kebodohan (GAK) dan berhasil merangsang mahasiswa-mahasiswa lain memainkan kembali peran politiknya. Namun tindakan represif yang diberikan ABRI tidak bisa ditolak. Sejumlah kampus diduduki militer dan dewan mahasiswa semua universitas dibekukan Kopkamtib. Kekuatan politik mahasiawa semakin terpuruk dengan munculnya NKK/BKK.

Pada tanggal 19 April 1978, Menteri P&K, Prof. Daoed Joesoef, mengeluarkan SK. No. 0156 /U/1978 tentang normalisasi kehidupan kampus (NKK). Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 1979 menyusul SK. No. 037/U/1979 yang mengatur organisasi kemahasiswaan di lingkungan perguruan tinggi Departemen P&K. Setiap kegiatan mahasiswa berada di bawah pengawasan rektor. Adapun dalam merencanakan kegiatan mahasiswa, rekror dibantu badan koordinasi kemahasiswaan (BKK).

Dengan segala cara pemerintah berusaha “menjinakan” mahasiswa. Aparat birokrasi kampus tidak lain adalah perpanjangan tangan pemerintah perguruan tinggi untuk mengontrol kampus. Mahasiswa telah “dikandangkan”. Siapa yang berani keluar, skorsing dan drop out (DO) tidak segan-segan menghampiri mahasiswa. Rupanya upaya pemerintah “menjinakan” mahasiswa masih kurang. Menteri P&K mengeluarkan SK. No. 0124 yang mewajibkan pemberlakuan system kredit semester (SKS) di setiap perguruan tinggi. Mahasiswa dituntut focus pada kuliahnya, dengan kewajiban menyelesaikan sejumlah beban studi untuk setiap semester. Hal ini mengahambat jalannya aktivitas moral mahasiswa. Mereka disibukan dengan kuliah dan “dibentuk” menjadi mahasiswa berpikiran pragmatis. Sehingga tidak sedikit mahasiswa yang *apolitis*.

Di tingkat dunia, terjadi krisis ekonomi sebagai dampak dari *Oil Shock* 1971. namun dampaknya lebih banyak menimpa negara-negara industri maju dan negara-negara lain pengimpor minyak. Sebagai negara pengekspor migas, Indonesia mengalami *boom oil*.

Memasuki awal 1980, melalui Tap MPR No. 11/MPR/1978 pemerintah memberlakukan penataran P-4. Dengan metode indoktrinasi, diharapkan masyarakat menghayati dan mengamalkan ideologi pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal.

Sebagai organisasi ekstra universitaas, HMI menolak pancasila sebagai ideology tunggal, yang berbuntut pada pecahnya HMI menjadi HMI DIPO dan HMI MPO. Penerapan asas tunggalpun berlaku pada ORMASS dan ORPOLL. Bermula dari pidato Presiden Soeharto di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 1982, menyusul Sidang Umum MPR 1983 yang menetapkan bahwa organisasi social politik wajib menganut hanya ideology pancasila. Perkembangan selanjutnya organisasi keagamaanpun diwajibkan menganut asas tunggal, Pancasila. Asas tunggal tidak lain adalah alat yang digunakan orde baru untuk melihat “mana kawan-mana lawan.” Yang tidak menggunakan pancasila sebagai satu-satunya ideology sudah jelas menjadi lawan orde baru.

Dengan ketetapan asas tunggal, mudah sekali untuk menyingkirkan lawan. Ormass dan Orpol yang tidak menggunakan pancasila sebagai satu-satunya asas dengan mudah di bubarkan. Tindakan represif pemerintah pada 1978 telah membangkitkan mahasiswa untuk bergerak di luar kampus. Era 1980-1990-an muncul format baru dalam gerakan mahasiswa (GM). Secara sembunyi-sembunyi mahasiswa melakukan aktivitas politiknya dengan membentuk kelompok studi, diskusi dan ada juga yang gabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM). Berbagai ide yang tergolong "controversial" dikembangkan. Gerakan–gerakan di luar kampus ini semakin menjamur. Pemerintah tidak berhasil melacak keberadaan mereka, sehingga pemerintah tidak bisa mengawasi bahkan mengatur idealisme mahasiswa.

Pertengahan 80-an, di kampus-kampus bermunculan terbitan-terbitan kritis. Lembaga pers mahasiwa (LPM) dalam peranannya sebagai pers "moral" menghadirkan pemikiran-pemikiran kritis-konseptual di kalangan mahasiswa disamping terjun dalam pengorganisasian protes. Sayangnya usaha pers mahasiswa (Persma) ini tidak bisa bertahan lama. Tindakan represif pemerintah dimunculkan kembali melalui Permenpen RI No. 01/Per/menpen/1975 dan surat edaran Dikti No. 849/D/T/1989, mengenai penerbitan kampus di perguruan tinggi. Permenpen menggolongkan bahwa persma sebagai penerbitan khusus yang bersifat non-pers. Dampak yang dirasa aktivis persma adalah pembatasan terhadap persoalan yang boleh diangkat. Selain persoalan akademik (kampus), jangan harap persma dapat leluasa.

Daya kritis mahasiswapun mengalami hambatan. Tidak sedikit pembredelan dilakukan pemerintah karena tidak sejalan dengan kebijakan orde baru. Seperti; pembredelan pers kampus IAIN Sunankalijaga, ARENA, pembredelan majalah OPINI FISIP UNDIP, majalah DIALOGE FISIP UNAIR Sebagai salah satu unsure utama prodemokrasi, sangat disayangkan dalam perkembangan selanjutnya LSM justru menciptakan kelas-kelas dalam tubuhnya sendiri; dibentuknya BINGO, MINGO, dan LINGO. Mekanisme kerja LSM-LSM besar yang hanya sibuk dengan urusan birokrasi, mendapat sorotan dan kritik dari kalangan aktivis. Walaupun banyak mahasiswa yang masuk**,** LSM dinilai eksklusive dan kurang menyeluruh dalam persoalan-persoalan kemahasiswaan dan kerakyatan.

Kesan "elitis"pun dilekatkan pada kelompok-kelompok studi. Mereka dikritik bahwa gerak mereka hanya sebatas diskusi dan diskusi. Isu-isu yang diangkatpun parsial, seperti *clean government*, kemandirian bangsa, korupsi dan sebagainya. Berbeda dengan komite aksi (student movement) yang langsung mengarah pada pengelolaan isu yang menjadi pilar utama orde baru, seperti Dwi fungsi ABRI, 5 Paket UU Politik dan lain-lain. Konsekuensi dari kelompok aksi adalah turun ke jalan untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Untuk mengurangi pertentangan antara kelompok studi dengan kelompok aksi yang hanya akan merugikan mahasiswa itu sendiri, dibentuklah koalisi antara kelompok studi, aksi dan persma. Format baru inilah yang dapat bertahan dalam perkembangan organ perlawanan mahasiswa pada 90-an.

Pada pertengahan 80-an, struktur ekonomi Indonesia dipegang oleh swasta. Dari kalangan elite negara banyak bermunculan pemilik modal baru yang mempunyai posisi dan pengaruh di pemerintahan. Pemilik modal baru itu berwenang atas kontrak-kontrak serta berbagai konsesi dengan cara mentransformasikan dana kedalam bentuk investasi modal. Seiring dengan resesi perekonomian dunia pada 80-an, harga migas turun dan harga minyak bumi mencapai US$ 12/barel. Maka penerimaan migas turun 36% yang berdampak pada merosotnya pertumbuhan ekonomi Indonesia 1982 pada tingkat 2,2%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali bangkit; harga migas naik hingga mencapai diatas US$ 15/barel. Upaya pemerintah telah dilakukan sejak 1983 dengan pembaharuan system perpajakan dan dan deregulasi moneter. Arah yang diambil adalah liberalisasi ekonomi, dengan tanda-tanda[1]; *pertama*, proses ekonomi makin mengikuti mekanisme pasar bebas, *kedua*, system perekonomian makin terintegrasi kedalam perekonomian dunia atau makin masuk kedalam proses globalisasi, dan *ketiga*, peranan swasta sebagai pelaku ekonomi berkurang, Salah satu fenomena menarik untuk diamati adalah munculnya kelas-kelas menengah di perkotaan.

Kelas-kelas baru ini lahir dari industrialisasi yang cepat. Pemerintah melakukan pembangunan luar biasa dengan mengabaikan hak-hak politik rakyat dan HAM. Era 80-an ditandai dengan masuknya globalisasi ke Indonesia. Informasi lebih mudah menembus masyarakat dan mahasiswa berkembang dengan wacana-wacana kritis dari luar. Gerakan mahasiswa 80-an mulai bersentuhan dengan masyarakat. Isu-isu bertema kerakyatan mulai tampak. Demikian juga dengan kecenderungan membangun jaringan dan koordinasi antar kota untuk mendampingi kasus kedung ombo dan kasus tanah di Kaca Piring Jawa Barat.

Menjelang pertengahan 1980-1990-an NKK/BKK berakhir. Melalui PP No. 30/1990 yang diikuti dengan SK No. 0457/U/1990 diberlakuan Ormawa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Wadah tunggal di tingkat universitas kembali diberlakukan. Dalam perjalanannya SMPT tidak bisa membawa aspirasi mahasiswa. Kampus masih mempunyai otoritas tertinggi dalam pemberian izin kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa. Mengenai dana SMPT masih tergantung pada universitas. Hal ini menambah kuat keotoritasan universitas terhadap SMPT. Apa boleh buat, hanya melalui SMPT-lah aspirasi mahasiswa dianggap legal.

Bersamaan dengan munculnya SMPT, GM 90-an mengalami penurunan. Selain itu di kalangan aktivis GM pun banyak terjadi perpecahan yang disebabkan ketidaksepakatan terhadap isu-isu yang

[1] Raharjo, M. Dawam, *Orde Baru dan Orde Transisi: Wacana Kritis Atas Penyalahgunaan Kekuasaan dan Krisis Ekonomi,* Yogya: UII Press'99, Hal. 52

diangkat. Perpecahan terjadi pada FKMY (Forum komunikasi Yogyakarta) yang melahirkan faksi DMPY dan faksi SMJ (solidaritas mahasiswa Jakarta) dan PIJAR (pusat informasi jaringan aksi reformasi). Namun kecenderungan GM 90-an dalam mengangkat isu, adalah seputar isu kampus, isu keadilan social dan ekonomi, isu HAM, hukum dan kekerasan. Selain isu-isu diatas, ada pula isu-isu tambahan yang menjadi perhatian mahasiswa, yaitu isu-isu moral, lingkungan, dan internasional.

Aktivis mahaiswa 90-an kebanyakan menggunakan tema "rakyat" dalam mengangkat isu ketidak adilan social ekonomi, seperti Komite Pergerakan Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (KPMURI). Orde baru mulai menampakkan "watak aslinya." Tindakan represif berupa penangkapan, pengadilan, tuduhan "subversif" ditujukan terhadap mahasiswa. Maraknya kasus SDSB mendorong aktivis mahasiswa Islam bergabung dalam aliansi PMIB (persatuan mahasiswa islam bandung) untuk mengadakan aksi protes pada bulan oktober 1992. Kemunculan PRD, STN, JAKKER, SMID, dan PBI menandakan perlawanan GM yang radikal. Malahan, PRD membuat partai yang nampak sekali melawan rejim Orba.

Kebangkitan aktivis Islam membuat Orba melirik dan mendekati. Terlebih lagi hubungannya dengan militer semakin memburuk. Namun pembentukan ICMI pada 6 desember 1990 membawa angin segar bagi Soeharto. ICMI tidak lain adalah organisasi yang disponsori Soeharto dan dirancang untuk memobilisasi dukungan umat Islam pada saat satu segmen militer menentang Soeharto[2]. Kemenangan GOLKAR dalam setiap Pemilu tidak lepas dari dukungan militer. Nah, untuk menghadapi Pemilu 1992, Orba mendekati kalangan muslim.

Pada awal 90-an, janji manis Orba tentang keterbukaan diulang kembali pada pidato kenegaraan menyongsong tahun 1994. Ironisnya Orba masih melancarkan tindakan represif terhadap lawannya. Hal itu tebukti atas pembredelan yang dilakukan terhadap beberapa media massa, seperti DETIK, Tempo dan Editor

Setelah peristiwa Malari 1974, kerusuhan 27 Juli 1996 (kuda tuli-red) merupakan huru-hara yang luar biasa. Banyak korban berjatuhan dan gedung-gedung dibakar. PRD dituduh sebagai dalang kerusuhan dan dianggap sebagai bentuk lain OTB. Kalau meminjam istilah Hefner, gaya politik Orba adalah "gaya politik belah bamboo," yaitu melawankan kawan dengan kawan. Orba berhasil melawankan PDI-Mega dengan PDI-Soerjadi. Namun untuk "mencuci tangan," PRD menjadi sasaran "pengkambinghitaman."

Menjelang Pemilu 1997, mahasiswa kembali bergejolak. Mereka mengangkat isu menolak Pemilu 1997 disamping isu-isu lainnya (isu HAM, isu keadilan social, isu internal kampus). Sementara di Jogja, isu kampanye "golput" mulai marak. Selain isu penolakan pemilu, mahasiswapun menuntut; pencabutan paket 5 UU politik, UU Subversi, pencabutan Dwi fungsi ABRI. Semakin mendekati pemilu, aksi-aksi menolak pemilu terus merebak. Pada 20 Mei'97 di Jogja, KMAP (komite mahasiswa anti penindasan) menyatakan menolak pemilu '97, menuntut paket 5 UU politik, UU anti subversi dan Dwi fungsi ABRI. Pasca pemilu'97 aksi mahasiswa berlanjut. Di Semarang, FARI (front aksi rakyat Indonesia) menuntut agar pemilu diulang.

Agustus 1997, Indonesia mengalami krisis moneter atau krisis mata uang. Nilai rupiah merosot terhadap dolar AS. Sumber krisis berawal dari utang swasta. Berdasarkan data Lee Kuan Yew, mantan perdana menteri Singapore, sekitar 800 debitur berutang sekitar US$ 68-US$ 69 miliar. Diawal krisis rupiah, pemerintah telah meminta bantuan IMF, dengan harapan dapat mencegah krisis uang. Namun, bantuan IMF hanya "menjerat" dan memperparah krisis. Harga dolar terus meroket, sehingga nilai utang dalam rupiah semakin membengkak. Mendengar kabar kalau Indonesia mengalami krisis, pasar mengalami "kelangkaan" sembako. Masyarakat berlomba-lomba menimbun sembako, khawatir terjadi kenaikan harga. Namun, hal itu malah membuat harga semakin melambung. Karena, ya itu tadi pasar mengalami "kelangkaan". Tidak hanya sembako, kenaikan juga terjadi pada BBM, obat-obatan, pendidikan dan lain-lain.

Sejarah Gerakan Mahasiswa Indonesia 1978

Gerakan yang mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional pada 1977-1978 yang mengakibatkan untuk pertama kalinya kampus-kampus perguruan tinggi Indonesia diserbu dan diduduki oleh militer. Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia. Pasca diberlakukannya NKK/BKK, jalur perjuangan lain ditempuh oleh para aktivis mahasiswa dengan memakai kendaraan lain untuk menghindari sikap represif pemerintah, yaitu dengan meleburkan diri dan aktif di Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti HMI (himpunan mahasiswa islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) atau yang lebih dikenal dengan kelompok Cipayung. Mereka juga membentuk kelompok-kelompok diskusi dan pers mahasiswa. Gerakan yang menuntut kebebasan berpendapat dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di dalam kampus pada 1987 - 1990 sehingga akhirnya demonstrasi bisa dilakukan mahasiswa di dalam kampus perguruan tinggi. Saat itu demonstrasi di luar kampus termasuk menyampaikan aspirasi dengan longmarch ke DPR/DPRD tetap terlarang. Gerakan mahasiswa Indonesia 1998. Gerakan yang menuntut reformasi dan dihapuskannya "KKN" (korupsi, kolusi dan nepotisme) pada 1997-1998, yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Berbagai tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa dilakukan pemerintah untuk meredam

---

[2] Hefner, W. Robert, *Civil Islam: Muslims and Democratization In Indonesia*, Yogya: Institut Studi Arus Informasi'01, Hal. 22

gerakan ini di antaranya: Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II , Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga pemilu 1999.

Gerakan mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa tahun sembilan puluhan yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru dengan ditandai lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan ini diawali dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Gedung wakil rakyat, yaitu Gedung DPR/MPR dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Organ mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain adalah FKSMJ,Forum Kota, HMI MPO, KAMMI karena mempelopori pendudukan gedung DPR/MPR. Perjuangan mahasiswa menuntut lengsernya sang Presiden tercapai, tapi perjuangan ini harus melalui tragedi Trisakti dan tragedi semanggi dengan gugurnya beberapa mahasiswa akibat bentrokan dengan aparat militer.

NKK/BKK

Normalisasi Kehidupan Kampus/ Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah format organisasi kemahsiswaan dengan melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, yaitu dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dimana Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT (senat mahasiswa perguruan tinggi). NKK/BKK menjadi dua akronim yag menjadi momok bagi aktivis Gerakan Mahasiswa tahun 1980-an. Istilah tersebut mengacu pada kebijakan keras rezim Soeharto pada tahun 1978 melalui Menteri Pendidikan & Kebudayaan Daoed Joesoef untuk membungkam aksi kritis mahasiswa terhadap jalannya pembangunan & kebijakan pemerintah saat itu.

Latar Belakang Perlawanan

Simbol institusi perlawanan mahasiswa saat itu adalah Dewan Mahasiswa, organisasi intra kampus yang berkembang di semua kampus. Karena Dewan Mahasiswa menjadi pelopor gerakan mahasiswa dalam menolak pencalonan Soeharto pasca pemilu 1977, kampus dianggap tidak normal saat itu dan dirasa perlu untuk dinormalkan. Lahirlah kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) sekaligus pembubaran dan pelarangan organisasi intra universitas di tingkat perguruan tinggi yaitu Dewan Mahasiswa. Dan sejak 1978 itulah, ketika NKK/BKK diterapkan di kampus, aktivitas kemahasiswaan kembali terkonsentrasi di kantung-kantung Himpunan Jurusan dan Fakultas. Mahasiswa dipecah-pecah dalam disiplin ilmu nya masing-masing. Ikatan mahasiswa antar kampus yang diperbolehkan juga yang berorientasi pada disiplin ilmunya, misalnya ada Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI), Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) dan sebagainya.

Penolakan Pembentukan BKK

Perjalanan upaya realisasi organisasi kemahasiswaan terpusat dalam kemahasiswaan di kampus-kampus Indonesia berjalan sangat beragam. Pemerintah memang mengganti keberadaan Dewan Mahasiswa (Universitas) dengan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Menurut peraturan menteri, Ketua BKK adalah dosen yaitu Pembantu Rektor III. Bayangkan absurd-nya dan aneh-nya peraturan itu. Sebuah Lembaga Kemahasiswaan, tetapi Ketua nya Dosen. Di ITB, kampus yang paling keras menolak kebijaksanaan tersebut, BKK nyaris tak pernah jelas eksistensinya. Para dosen juga tampaknya enggan bermusuhan dengan para yunior-nya, mahasiswa yang jelas menentang habis keberadaan BKK. Di UGM, de facto BKK memang ada namun juga tidak berjalan. Tidak ada Senat Mahasiswa di tingkat Fakultas yang peduli dengan lembaga tersebut. Yang ajaib di UII Yogyakarta. Di Kampus Perguruan Tinggi Islam tertua di Indonesia itu, Dewan Mahasiswa memang dibubarkan. Tetapi reinkarnasi menjadi BKK. Hanya saja Ketua BKK adalah mahasiswa juga, jadi masih dalam format Dewan Mahasiswa juga. Di Salatiga, Kampus Universitas Kristen Satya Wacana juga melakukan kreasi serupa. Keberadaan BKK diakui namun pengurusnya berasal dari mahasiswa sendiri. Sedangkan di ibukota negara, Universitas Indonesia memang memiliki BKK tetapi fungsi sehari-hari dijalankan oleh Forum para Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, dan dinamakan Forkom UI. Beberapa anggota DPR sempat mengusulkan pengajuan hak interpelasi oleh Syafi'i Sulaiman dan kawan-kawan tentang NKK/BKK, pada tahun 1979. Pengusul adalah anggota Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dari Nahdlatul Ulama (NU), sedangkan para 24 pengusul lainnya terdiri dari anggota F-PP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI). Inilah satu-satunya usul interpelasi dalam era Orde Baru sejak pemilu 1977.

GENESIS GERAKAN MAHASISWA 1998

Sejarah Gerakan Tahun 1998

Sejarah perkembangan Gerakan Mahasiswa (GM) di Indonesia selalu menarik karena tidak dapat dilepaskan dengan sejarah perkembangan negara Indonesia. Bahkan, keberadaan GM selalu berpengaruh pada situasi politik nasional. Meskipun sudah berkali-kali "diberangus" oleh penguasa di setiap jamannya, GM selalu muncul dengan sikap kritis dan tuntutan untuk memperbaiki keadaan politik nasional. Secara historis, peran GM dalam perubahan politik di Indoensia sangatlah besar. Misalnya, perubahan kekuasaan dari rejim Orde Lama ke rejim Orde Baru pada tahun 1965, peran GM sangat besar dalam melegitimasi kekuasaan Sukarno. Begitu pula pada tahun 1998, tanpa kehadiran ribuan GM di gedung MPR/DPR, sangatlah sukar untuk membuat Soeharto mundur dari jabatan presiden. Bahkan, jika dilihat jauh ke belakang, peran GM lah yang membidani lahirnya negara Indonesia. Sebagai misal adalah didirikannya Boedi Oetomo pada 1908, yang meskipun bersifat primordial etnik, organisasi GM pertama di Jawa ini telah berhasil memberikan semangat kepada mahasiswa dan pemuda lainnya untuk bercita-cita merdeka.

Diskusi mengenai GM mahasiswa di Indonesia penuh dengan dinamika, karena selalu mengalami perubahan karakter dan bentuk pada setiap jamannya. Soewarsono (1999: 1) menyebut bahwa sejarah awal Indonesia moderen tentang GM memiliki empat "tonggak", yaitu "angkatan 1908", "angkatan 1928", "angkatan 1945" dan "angkatan 1966". Selanjutnya, Soewarsono menyebut bahwa keempat angkatan tersebut adalah generasi-generasi dalam sebuah "keluarga", yaitu sebuah catatan-catatan prestasi "satu generasi baru" tertentu. Masing-masing dari keempat angkatan di atas memiliki bentuk dan karakter serta relasi-relasi dengan kelompok yang lain yang khas dibanding angkatan-angkatan yang lain. Namun, tidaklah dapat dikatakan bahwa tiap-tiap angkatan tersebut selalu membawa perubahan dan kemajuan bagi jamannya. Tetapi, tiap-tiap angkatan tersebut dapat pula menjadi pengekor atau epigon yang menerima melalui pewarisan (Soewarsono, 1999: 1-2). Dengan demikian, diskusi mengenai GM di Indonesia, tidak selalu berbicara mengenai perubahan yang positif, tetapi juga dapat sebaliknya. Hal ini tergantung dengan konteks situasi dan relasi-relasi yang dibangun oleh GM itu sendiri.

Selain keempat angkatan tersebut, terdapat satu angkatan generasi lagi yang paling mutakhir dan sangat bepengaruh tidak hanya pergantian politik kekuasaan saja, tetapi juga pada proses demokratisasi di Indonesia, yaitu "angkatan 1988". Pada angkatan ini, GM telah berhasil menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sebelumnya telah berkuasa selama 32 tahun. Selain itu, GM juga mempengaruhi munculnya wacana demokratisasi dan civil society. Meskipun demokrasi dan civil society secara relatif belum sepenuhnya berhasil diterapkan dalam realitas politik di Indonesia, namun peran GM telah menyebabkan proses-proses tersebut dapat dimulai. Tulisan ini akan mendiskusikan tentang GM angkatan 1998 dengan menggunakan pendekatan prosesual. Pendekatan ini akan melihat keragaman dan kesamaan antar kelompok GM, perubahan-perubahan karakternya dan strategi-strategi yang digunakan untuk melawan rejim penguasa serta kontinyuitasnya. Proses dan peristiwa-peristiwa dari suatu fenomena sosial merupakan suatu rangkaian yang saling berkesinambungan. Pemahaman tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan berlangsungnya relasi-relasi antara peristiwa satu dengan peristiwa lain merupakan bagian dari penjelasan yang harus dilakukan (Winarto, 1999). Untuk itu, suatu kajian tentang proses harus mampu menunjukkan hubungan yang berangkai dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dengan keterkaitan satu sama lain (Winarto, 1999). Selain itu, pendekatan ini juga menekankan adanya perbedaan (difference). Konsep-konsep mengenai emosi, agen, gender dan tubuh individu, secara kultural telah dibentuk melalui perbedaan-perbedaan. Dalam artikelnya yang berjudul "Theories of Culture Revisited", Keesing (1994) menyatakan bahwa selayaknya teori kebudayaan yang dikembangkan tidak akan membuat asusmi-asumsi dengan batas-batas yang tertutup, tetapi biarkan dia memberikan konsep-konsep yang kompleks dan beragam. Aspek lain yang perlu ditekankan dalam pendekatan ini adalah memotret adanya dinamika suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan mempunyai karakter yang dinamis dan selalu mengalami perubahan. Untuk itu, antropolog hendaknya menekankan bagaimana mekanisme dan proses yang berlangsung dalam suatu kelompok masyarakat, hingga hal-hal tersebut dimiliki bersama atau tidak, vice-versa (Winarto, 1999: 26).

Gerakan Mahasiswa 1998

GM telah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perubahan kekuasaan dari rejim Orde Baru Soeharto ke rejim yang konon katanya "reformasi". Ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR di senayan pada bulan Mei 1998 telah membuat anggota dewan tidak dapat bekerja secara efektif. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi anggota dewan untuk memenuhi tuntuan mahasiswa melengserkan Soeharto dari jabatan presiden. Peristiwa tersebut bukanlah peristiwa yang pertama kali dalam sejarah perubahan kekuasaan di Indonesia. Pada tahun 1965, GM juga telah berhasil memelopori perubahan kekuasaan dari rejim Sukarno ke rejim Orde Baru Soeharto. Sebelumnya, pada 1945, peranan mahasiswa dan pemuda sangatlah penting sehingga Sukarno bersedia membacakan teks proklamasi. Keberadaan GM tidaklah taken for granted yang tiba-tiba muncul begitu saja. Perkembangan GM selalu berkaitan erat dengan situasi sosial dan politik, dimana ia merupakan respon dari ketidak-beresan situasi sosial dan politik yang menurut mereka tidak adil. GM akan selalu bergerak dan terus bergerak jika melihat kekuasaan yang menindas rakyat. GM ini sangat sulit untuk dibendung gerakannya, meskipun sudah dilarang oleh penguasa. Sebagai misal adalah GM 1998, yang sejak tahun 1978 telah "ditertibkan" oleh Orde Baru melalui

serangkaian regulasi yang membuat GM sulit bergerak. Namun, ternyata GM selalu terus bergerak dengan strategi yang justru lebih kreatif. Berikut ini adalah sejarah kehadiran GM 1998 serta serangakan strategi yang digunakannya.

Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK)

Peristiwa penting yang patut dicatat dalam sejarah GM 1998 adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K), Dr. Daoed Joesoef. Nomor: 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kebijakan ini dianggap telah mematikan GM karena membebani mahasiswa dengan serangkaian kewajiban kuliah dan melarang kegiatan politik di kampus. Pada intinya kebijakan ini adalah menjustifikasi pembubaran dan dihilangkannya organisasi mahasiswa yang selama ini merupakan sarana demokratis mahasiswa berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan mahasiswa (Harahap dan Basril, 1999: 55). Sebelumnya, lembaga kemahasiswaan merupakan sarana untuk menentang kebijakan pemerintah maupun perguruan tinggi. Dengan dibubarkannya lembaga pemerintahan kampus, pemerintah Orde Baru berharap GM tidak lagi turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi politik.

Dikeluarkannya kebijakan NKK ini merupakan respon pemerintah atas serangkain peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh GM pada tahun 1973-1978. Terutama setelah peristiwa Malapetaka 17 Januari 1974 (Malari 1974), GM diawasi secara ketat.2 Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 028/1974 yang dianggap membatasi aktivitas GM. Antara tahun 1975-976, protes yang dilakukan oleh GM terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru sedikit mereda. Namun, setelah pemilu tahun 1977, gelombang aksi meningkat lagi. Di Jakarta, mahasiswa UI kembali melakukan aksi memprotes pelaksanaan pemilu yang dianggap tidak adil, karena pihak birokrasi dan militer dianggap memihak ke Golkar. Mereka mengganggap tidak sah dan menolak kemenangan Golkar pada pemilu 1977. Aksi serupa juga terjadi di beberapa daerah, misalnya di Bandung, mahasiswa ITB membentuk Gerakan Anti Kebodohan (GAK), di Yogyakarta, mahasiswa UGM mengusung "keranda matinya demokrasi", bahkan di Surabaya, sejumlah mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

Peristiwa penting yang patut dicatat adalah ketika ketua Dewan Mahasiswa (DM) UI, Lukman Hakim berhasil mengadakan pertemuan 67 DM dan Senat Mahasiswa (SM) se-Indonesia dengan menggunakan dana kegiatan mahasiswa yang berasal dari SPP. Peristiwa tersebut telah membuat khawatir penguasa. Sanit (1999: 58) menuliskan kekhawatiran pemerintah dengan mengutip pernyataan Soedomo sebagai berikut: "…Staf Komando Soedomo menyatakan bahwa secara sistematis melalui DM, mahasiswa telah melawan hukum dan konstitusi; mahasiswa telah menggunakan diskusi untuk membangun opini untuk mengganti kepemimpinan nasional; tuduhan melalui Ikrar Mahasiswa tanggal 28 November di Bandung bahwa presiden telah menyeleweng dari UUD 1945 adalah melawan kekuasaan MPR; kedatangan DM se-Indonesia ke MPR untuk menyatakan ketidakpercayaan kepada lembaga itu pada tanggal 7 Januari 1978 merendahkan lembaga itu;.."

Segera setelah Soedomo mengeluarkan surat pernyataan tersebut, beberapa tindakan represif diambil oleh pemerintah Orde Baru. Sejumlah kampus diduduki oleh militer dan beberapa koran seperti Kompas, Sinar harapan, Merdeka, Pelita, Indonesian Times, Sinar Pagi dan Pos Sore dilarang terbit (Sanit, 1999: 58). Selanjutnya, untuk menunjukkan sikapnya terhadap GM tersebut, pemerintah melalui Menteri P dan K, Dr. Daoed Joesoef mengeluarkan keputusan Nomor: 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kemudian, di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, Menteri P dan K juga mengeluarkan SK No. 0124 yang memberlakukan Sistem Kredit Semerter (SKS) dengan mekanisme mengajar dan belajar terprogram secara intensif. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah mewajibkan mahasiswa menyelesaikan sejumlah beban studi untuk setiap semester yang secara keseluruhan terdiri dari 8 sampai 12 semester untuk jenjang S-1 (Sanit, 1999: 59-60). Akibat dari kebijakan tersebut telah membuat aktivitas politik GM menjadi berkurang. Selain harus menyelesaikan beban studi ang berat, ketatnya pembinaan non akademik mahasiswa telah menyebabkan terbatasnya waktu mahasiswa untuk melakukan gerakan-gerakan kritik terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melakukan "pembinaan ideologi" terhadap mahasiswa melalui penataran P-4 (Pendidikan, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Kelompok Diskusi dan Pers Mahasiwa

Serangkaian tindakan represif dan kebijakan yang dilakukan untuk meredam GM ternyata sangat efektif. Dapat dikatakan bahwa sejak tahun awal 1980-an, aktivitas GM mulai surut. Namun, keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Untuk menghindari tindakan represif dari rejim Orde Baru, mahasiswa merubah strateginya. Mereka tidak lagi berteriak turun ke jalan, tetapi dengan membentuk kelompok-kelompok studi (KS) sebagai cara merespon dan mengekspresikan kekecewaannya kepada penguasa. Pada tahun 1983, beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara membentuk Kelompok Studi Proklamasi (KSP) yang bermarkas di jalan Proklamasi. KS ini kemudia diikuti oleh mahasiswa dari UI, IAIN, Unas dan IKIP Jakarta. Diskusi yang biasanya diselenggarakan pada Minggu siang mendiskusikan topik ekonomi dan politik. Setelah KSP, di Jakarta muncul Kelompok Studi Indonesia (KSI), Lingkaran Studi Indonesia (LS), Indonesian Students Forum for International Studies (ISAFIS), KS Pena dan lain-lain. Kemudian, di beberapa kota lainnya lain juga muncul fenomena yang sama: di Bandung muncul KS Thesa, KS Free School for Socio-Analysis; di Yogyakarta muncul KS Palagan, KS Teknosofi, KS Girli, KS F-16; di

Surabaya muncul Kelompok Diskusi Surabaya dan Kelompok Analisa Sosial. Selain membentuk KS, GM di beberapa kampus juga mengaktifkan penerbitan kampus atau pers mahasiswa (persma). Beberapa media yang lahir pada masa pertengahan 1980-an adalah: majalah Suara Mahasiswa di UI; majalah Balairung di UGM: majalah Arena di IAIN Yogyakarta dan majalah Himmah di UII; majalah Opini dan Manunggal di Undip; dan majalah Dialogue di Unair. Meskipun diterbitkan dengan cara yang sederhana dan oplah yang terbatas, kehadiran majalah kampus ini sempat menjadi media alternatif mengenai berita-berita sosial dan politik yang tidak dimuat di media umum nasional dan lokal. Munculnya KS dan persma tidak lantas membuat mahasiswa berpuas diri. Sebagian dari mereka masih merasa kurang puas hanya dengan melakukan diskusi dan menulis. Mereka tetap mencari cara lain yang lebih efektif untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap ketidakadilan sosial dan politik. Salah satu alternatifnya adalah membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Badan Koordinasi Mahasiswa (BKM)

Masih tidak puas dengan bentuk-bentuk aktivitas yang sudah dilakukan di atas, GM kembali membentuk jaringan lebih yang lebih luas. Di Bandung muncul Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung (BKMB) dan Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta (BKMJ). Pembentukan komite-komite ini merupakan realisasi dari apa yang menjadi topik-topik diskusi sebelumnya. Mereka merasa bahwa berdiskusi saja tidak cukup, untuk itu mereka membentuk jaringan aksi untuk membentuk solidaritas antara mahasiswa. Jaringan aksi tersebut merespons isu-isu yang dianggap tidak adil bagi rakyat. Salah satu jaringan yang melibatkan mahasiswa di beberapa di beberapa kota seperti Salatiga, Yogyakarta, Semarang, Bandung dan Jakarta adalah Kelompok Solidaritas Korban Pembanguan Kedung Ombo (KSKPKO). Kelompok ini melakukan advokasi terhadap warga korban penggusuran pembangunan waduk di Kedung Ombo, Boyoloali Jawa Tengah dengan mengadakan aksi di kantor Depdagri, Jakarta dan di depan kantor Kodim Boyolali pada 24 Maret 1989.

Isu lain yang cukup menonjol adalah kasus tanah Kacapiring, Jawa Barat. Di Bandung, aktivis Bandung dan Kelompok Mahasiswa Jakarta (KMJ) melakukan aksi dialog dengan walikota Bandung. Aksi ini berakhir dengan bentrok dan 33 mahasiswa ditahan. Kemudian pada 12 April 1989, sekitar 3000 mahasiswa dari Jakarta dan Bandung aksi di depan kantor Poltabes Bandung untuk menuntut pembebasan rekan mereka yang ditahan. Selanjutnya, pada 17 April 1989 mahasiswa melanjutkan aksi di kampus ITB dengan isu yang sama. Pada akhir tahun 1980-an, GM ditandai dengan tumbuhnya komite-komite rakyat yang menjadi bentuk organ dan jaringannya. Antar kelompok GM di berbagai kota saling berkomunikasi dan saling mengunjungi untuk membangun solidaritas. Salah satu bentuk solidaritas adalah bentuk aksi dukungan suatu kelompok GM terhadap aktivitas yang dilakukan kelompok GM di kota lain. Mereka ini selalu sharing mengenai isu-isu sosial dan politik paling mutakhir. Pola-pola semacam ini terus dikembangkan di beberapa wilayah. Mereka semakin memperkuat jaringan dan solidaritas tidak hanya antar universitas di kota, tetapi juga antar kota.

Setelah menjalani masa-masa "bersama", antar kelompok GM mulai terlihat tidak sejalan. Terutama pada tahun 1990-1993, terdapat kecenderungan bubarnya aliansi dan terbentuknya aliansi baru (Gayatri, 1999: 91). Antar kelompok GM tampaknya tidak selalu sejalan, baik dalam hal pemilihan isu maupun pemilihan kelompok mana yang dapat diajak aliansi. Perpecahan ini lebih disebabkan karena egoisme kelompok dan selebihnya ideologi serta pilihan aksi. Egoisme tampak ketika mereka masih mempersoalkan primordialisme universitas sebagai acuan aliansi GM.

Misalnya, di Bandung kelompok GM terpecah menjadi dua, yaitu antara kelompok GM dari ITB dengan kelompok dari Unpad. Perbedaan ideologi dan pilihan bentuk aktivitas tampak terjadi di Jakarta dan Yogyakrta. Gabungan antar KS, persma dan LSM yang telah menghasilkan Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY) terpecah menjadi dua kelompok. Perpecahan ini berbaringan dengan perpecahan GM di Jakarta yang juga terpecah menjadi dua. FKMY terpecah menjadi Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta (DMPY) dan Serikat Mahasiswa Yogyakarta (SMY). DMPY yang berasosiasi dengan kubu Skephi di Jakarta, yang menonjol dengan gaya parlemen jalanan dan empirisisme yang didominasi watak gerakan LSM yang praktis dan kongkrit, sedangkan SMY berasosiasi dengan kubu Infight yang menonjol dengan watak teoritk ideologis yang kuat yang menjadi ciri khas KS (Gayatri, 1999: 91).

Pada pertengahan tahun 1990-an, kedua kelompok ini kemudian membentuk jaringan sendiri-sendiri, sehingga terdapat dua jaringan besar kelompok GM yang tersebar di berbagai kota. Perpecahan yang muncul pada awal tahun 1990-an tersebut ternyata telah meluluhkan jaringan solidaritas yang telah dibangun sebelumnya, dan kemudian membentuk jaringan solidaritas yang baru. Kelompok DMPY pada akhirnya nanti menjadi Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), sedangkan dan SMY pada akhirnya menjadi jaringan Persatuan Rakyat Demokratik (PRD).3 Komunikasi di antara kedua kelompok tersebut sangat buruk, bahkan dalam beberapa hal mereka cenderung menjadi rivalitas. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah ketika PRD dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Orde Baru karena dituduh terlibat sebagai dalang peristiwa 27 Juli 1996. Sejak saat itu para aktivis PRD diburu dan ditangkap oleh aparat keamanan. Akan tetapi, yang kemudian ditangkap tidak hanya kelompok PRD, tetapi juga kelompok-kelompok GM yang lain termasuk FPPI. Akibat peristiwa tersebut, hingga sekarang antara kedua kelompok tersebut masih saling menyalahkan. Rivalitas antara kedua kelompok tersebut masih terus

berlangsung hingga pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi yang menghantam di Indonesia dan beberapa negara Asia telah menjadi momen yang penting bagi munculnya GM turun ke jalanan. Kedua kelompok ini, dan juga muncul kelompok GM yang baru seperti Forkot, dan kelompok mahasiswa ekstra kampus semakin aktif turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi dan pergantian kekuasaan. Mereka ini secara maraton dari pertengahan 1997 hingga Mei 1998 terus menerus melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota.

Gerakan Moral dan Gerakan Politik

Muridan S. Widjojo (1999a: 234-289) telah merumuskan dengan baik mengenai GM 1998 dalam dua kelompok, yaitu "gerakan moral" dan "gerakan politik". Pembagian menjadi dua kelompok ini didasarkan pada wacana yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dalam GM itu sendiri. Gerakan moral mengacu pada wacana yang dikembangkan oleh GM yang mengkritisi kebijakan rejim Orde Baru. Muridan menyebut kelompok ini sebagai Gerakan Kritik Orde baru (GKOB). Sedangkan gerakan politik mengacu pada wacana untuk merobohkan rejim Orde Baru, dan menyebut kelompok ini sebagai Gerakan Anti Orde Baru (GAOB). "Gerakan moral" mendasarkan diri pada pandangan bahwa perubahan politik dapat dilakukan dengan cara "menghimbau" atau "mengingatkan" kepada elit politik. Berbeda dengan "gerakan politik", gerakan moral ini tidak secara tegas ingin mengganti kekuasaan politik Orde Baru Soeharto saat itu.

Paham ini menekankan "suara" atau "gagasan" sebagai inti gerakan. Ini berati bahwa kapasitas operasi yang diharapkan dari gerakan moral mahasiswa adalah sebatas "menghimbau" dan atau "mengingatkan". Dari sini juga dapat dilihat bahwa penganut paham ini percaya bahwa suatu rejim politik bisa diubah dengan cara "dihimbau" atau "diingatkan" (Widjojo, 1999a: 240). Sedangkan gerakan politik secara tegas ingin mengganti kekuasaan rejim Orde Baru Soeharto. Kelompok ini menolak semua kerangka asumsi yang dibangun Orde Baru. Sebelum tahun 1997, pemerintah rejim Orde Baru telah melarang mahasiswa terjun ke gerakan politik karena hal tersebut bukan karakter mahasiswa. Menurut pemerintah Orde Baru, mahasiswa harus belajar dan menunjukkan prestasi di kampusnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa gerakan politik adalah hal yang tabu bagi mahasiswa saat itu. Akan tetapi tidak bagi kelompok GAOB. Mereka justru ingin menggunakan gerakan politik sebagai senjata untuk melawan pemerintah Orde Baru. Kelompok ini menyatakan bahwa mahasiswa tidak perlu menggunakan pemahaman yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru, karena hal tersebut dapat membatasi peran GM itu sendiri. Dengan menganggap GM sebagai gerakan politik, maka ruang pergerakannya menjadi luas, sehingga dengan demikian dapat berjuang bersama-sama rakyat. Konsekuensi bagi suatu gerakan politik, yaitu menyatunya antara berbagai kekuatan, termasuk dengan rakyat. Kelompok ini secara tegas menginginkan adanya hubungan dengan massa pengilkut di luar kampus. Mengutip sebuah wawancara dengan seorang aktivis dari Unila, Lampung, Widjojo menulis: *Pertama kami tegaskan, gerakan kami adalah gerakan politik dan bukan gerakan moral. Langkah yang kami tempuh berupa aksi atau pergerakan massa* (Widjojo, 1999a: 243). Gagasan untuk menggabungkan kekuatan GM dengan massa di luar kampus ini telah menjadi perdebatan yang sengit diantara kelompok GM sendiri. Kelompok yang dikategorikan sebagai GKOB yang menolak unsur non mahasiswa atau rakyat biasa sebagai kekuatannya. Karena GKOB ingin bahwa GM harus steril dari infiltrasi kelompok-kelompok di luar mahasiswa. Sehingga dalam setiap aksinya, GKOB hanya melibatkan mahasiswa sebagai massanya. Hal ini berbeda dengan GAOB yang justru mengundang kelompok non mahasiswa, yang mereka sebut dengan rakyat untuk mendukung gerakannya.

Akibat dari bersatunya kekuatan mahasiswa dan non mahasiswa ini, GM di beberapa kampus mengalami perbedaan yang sangat tajam, terutama pada pandangan mengenai kekuasaan dan strategi aksi. Tidak jarang antara GKOB dengan GAOB tidak dapat melakukan aksi bersama karena alasan di atas. Bahkan secara ekstrem ada kelompok yang menolak bergabung dengan kelompok GM dari universitas lain. Misalnya, Misalnya pada 4 Maret 1998, GKOB dari Universitas Indonesia menolak ajakan mahasiswa IPB untuk melakukan aksi bersama di jalan (Widjojo, 1999b). Berikut ini daftar kelompok GM yang dikategorikan sebagai GKOB dan GAOB yang dibuat oleh Widjojo (1999a: 290-376): GKOB Kelompok aksi yang dapat dikategorikan ke dalam GKOB adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Kelompok ini merupakan produk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) X di Universitas Muhammadiyah Malang pada 29 Maret 1998. Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 200 aktivis masjid kampus tersebut telah menghasilkan "Deklarasi Malang". Meskipun aktivitas gerakannya telah dimulai sebelumnya, namun peresmian sebagai organisasi massa formal, baru diputuskan pada 1-4 Oktober 1998. Menurut aktivis Fahri Hamzah, kelahiran KAMMI ini diilhami keberadaan GM tahun 1966, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Sebagian besar aktivis KAMMI ini berlatar belakang aktivis LDK yang berasal dari organisasi massa besar seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kelompok ini membentuk basis-basis gerakan di beberapa universitas besar seperti UI, UGM, ITB, IPB, Unair, Undip dan lain-lain. Dalam setiap aksinya, baik yang ada di kota Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Surabaya, KAMMI mampu menghadirkan massa yang cukup banyak. Orientasi KAMMI adalah reformasi politik dan ekonomi yang dilandasi moral dan ahlak. Namun, kelompok ini tidak secara tegas menyatakan ingin mengganti rejim kekuasaan. "Tujuan gerakan KAMMI adalah memastikan adanya perubahan yang bermanfaat bagi umat Islam dan dalam jangka panjang berupaya membentuk forum yang mapan" (Widjojo, 1999a: 366). KAMMI mengganggap bahwa dialog merupakan saran yang efektif untuk menghindari anggapan bahwa KAMMI adalah kelompok yang fundamentalis.

GERAKAN ANTI ORDE BARU (GAOB)

Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI)

Seperti telah disinggung di atas, bahwa GM 1990 terpecah menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok ini mengembangkan jaringannya sendiri-sendiri. Salah satu jaringan besar itu adalah FMPY di Yogyakarta. Kelompok ini mengembangkan jaringanya dari Surabaya, Solo, Semarang, Purwokerto dan Jakarta. Di tiap-tiap kota jaringan ini memiliki organ-organ kecil sendiri, yang sangat khas lokal dan tidak tergantung dengan jaringan besarnya. Begitu juga dalam menyikapi isu-isu sosial dan politik, mereka tidak diharuskan mempunyai kesamaan sikap dan pilihan aksinya. Jaringan ini tidak lebih sebagai bentuk solidaritas dan sharing informasi.

Dalam hal ideologi, jaringan kelompok ini memperlakukan ideologi sebagai pengetahuan, karena belum pernah ada kesepakatan secara eksplisit oleh para aktivisnya (Widjojo, 1999: 303). Namun, jika dilihat dari wacana-wacana yang dikembangkan, kelompok ini menganut paham Sosialisme, Islam dan Nasionalisme. Kelompok ini memandang bahwa realitas politik di Indonesia bersifat unik, karena itu ideologi-ideologi besar tidak relevan bagi gerakan politik (Widjojo, 1999: 303).

Meskipun aktivitasnya sudah lama berjalan, namun sebagai organ resmi yang berskala nasional baru disepakati pada 13 Nopember 1998 di Magelang. Jauh hari sebelum menjadi FPPI, organ-organ dalam jaringan kelompok ini telah aktif melakukan aksi-aksi dalam menuntut reformasi dan melengserkan Soeharto. Beberapa organ-organ tersebut adalah: di Yogyakarta muncul Pusat Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY), Solidaritas Orang Pinggiran untuk Kemanusiaan (SOPINK), Fampera, Fropera; di Jakarta muncul Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) dan Gerakan Mahasiswa Pancasila untuk Reformasi (Gempur); di Purwokerto muncul Aliansi Kebebasan Rakyat Berpendapat (AKRAB) yang kemudian melahirkan Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat (FAMPR), Komite Mahasiswa untuk Demokrasi Indonesia (Komarudin); di Salatiga muncul Semesta, Serikat Mahasiswa Independen (SMI); di Semarang muncul Forum Mahasiswa Sadar Lingkungan (Formasal); di Surabaya muncul Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS); di Malang muncul Gerakan Reformasi untuk Rakkyat Malang (Gerram); di Jombang muncul Forum Mahasiswa Jombang (Formajo); dan di Jember muncul Gerakan Mahasiswa Pecinta Rakyat (Gempar).

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

LMND merupakan organ nasional yang merupakan metamorfosis dari PRD, yang memiliki jaringan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Solo, Purwokerto. Meskipun tidak dinyatakan secara ekspilit, kelompok ini memilih ideologi Sosialis Demokratik Kerakyatan (Widjojo, 1999: 326). Kelompok ini memiliki organisasi yang cenderung senafas dengan format yang "sentralisme demokratik" (Widjojo, 1999: 327). Berbeda dengan FPPI, organ-organ yang tergabung dalam kelompok ini memiliki pilihan bahasa yang sama serta isu-isu besar yang sama. Secara organisasi, kelompok lebih rapi dibanding dengan FPPI. Dalam mengantisipasi "incaran" pihak keamanan, kelompok ini menggunakan strategi memilih nama organ "sekali pakai", yaitu menggunakan nama kelompok terntentu hanya pada saat aksi isu tertentu pula dan setelah itu, organ tersebut tidak terdengar lagi. Strategi ini terutama dijalankan setelah peristiwa 27 Juli 1996 hingga akhir tahun 1997.

Adapun organ-organ yang tergabung dalam kelompok ini adalah: di Yogyakarta muncul Komite Nasional Penegak Demokrasi (KNPD), Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP); di Solo muncul Komite Mahasiswa untuk Keadilan dan Demokrasi (KMKD), Dewan Rakyat dan Mahasiswa Surakarta (DRMS), Dewan Ampera Sukoharjo, Dewan Reformasi Rakyat Sragen (DRRS), Dewan Reformasi Rakyat Boyolali (DRRB); di Lampung muncul Persatuan Mahasiswa Pemuda Lampung (PMPL) yang kemudian membentuk Komite Peduli Rakyat (KPR), Komite Mahasiswa Pemuda Rakyat Pelajar Lampung (KMPRPL), Aliansi Demokrasi Indonesia (ALDI); di Jakarta muncul Keluarga Besar UI (KBUI), Kobar, Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi (Komrad); di Bandung muncul Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Perubahan (GMIP); di Semarang muncul Forum Pembebasan, Komite Aksi Rakyat Semarang (Keras); dan di Surabaya muncul Aliansi Bersama Rakyat Indonesia (ABRI).

Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabotabek (FKMsJ/Forum Kota)

Dalam setiap aksinya, FKMsJ (kemudian berubah menjadi Forkot) yang didirikan pada 7 Maret 1998 mampu menarik massa cukup besar. Kelompok ini dibangun disimpul-simpul kampus yang sebelumnya telah memiliki tradisi perlawanan, seperti ISTN, APP, UKI dan IKIP Jakarta (Widjojo, 1999: 342). Forkot memandang bahwa GM yang dibangunnya sebagai kelompok penekan dalam proses menuju reformasi total (Widjojo, 1999: 342). Forkot sangat populer dan mampu menarik perhatian mahasiswa non aktivis sehingga pada setiap aksinya selalu dihadiri ribuan massa. Ideologi yang dibangun oleh kelompok ini belum begitu jelas, kecuali tuntutannya untuk membentuk Komite Rakyat Indonesia sebagai alternatif pemerintahan transisi paska Soeharto. Konsep ini berasal dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dipersiapkan menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kelompok ini pernah membangun jaringan di beberapa kota melalui pertemuan mahasiswa se Jawa dan Bali. Namun, hingga sekarang tidak ada tindak lanjutnya.

Front Nasional & Pusat Infromasi & Jaringan Aksi untuk Reformasi (PIJAR)

Selain Forkot, di Jakarta terdapat dua kelompok GM yang cukup signifikan dalam melakukan aksi-aksi demontrasi menuntut reformasi, yaitu Front Nasional dan PIJAR. Kedua kelompok ini berpusat di Unas. Sama seperti mereka menuntut penyelesaian krisis ekonomi dan melengserkan Soeharto sebagai presiden.

HMI Majelis Penyelamatan Organisasi (MPO)

Agak sulit memposisikan kelompok HMI MPO dalam dikotomi GKOB dengan GAOB. Tanpa alasan yang cukup jelas, Widjojo (1999a: 369-369) mengkategorikan HMI MPO sebagai GKOB. Kemungkinan, alasannya karena HMI MPO dianggap memiliki gen organisasi yang sama dengan HMI, yang terbukti beberapa mantan aktivisnya menjadi pembantu presiden Soeharto. Namun, sesungguhnya terdapat perbedaan mendasar antara HMI dengan HMI MPO, yaitu penolakannya terhadap kebijakan "asas tunggal Pancasila". Dari penolakan ini jelas bahwa HMI MPO sejak awal telah berseberangan dengan rejim Orde Baru Soeharto. Bahkan, antara tahun 1985 hingga pertengahan 1998, HMI MPO ini dianggap sebagai organisasi yang ilegal oleh pemerintah Orde Baru.

HMI MPO membentuk tujuh komite aksi yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Semarang (FKMIS), Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Ujung Pandang (FKMIU), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Purwokerto (FKMIP), Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Kendari (FKMIK) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Palu (FKMIP). Komite-komite aksi ini akan mempertanggung-jawabkan kegiatannya kepada Dewan Pimpinan Cabang HMI MPO kota setempat. Di Jakarta kelompok ini memiliki basis di Universitas Jayabaya, ABA-ABI, IAIN, Unisma, Universitas Muhammadiyah. Di Yogyakarta, kelompok ini berbasis di Jamaah Shalahuddin UGM dan aktivis HMI MPO di beberapa universitas swasta di Yogyakarta.

Antara tahun 1990-an hingga 1997 akhir, isu-isu yang paling sering diangkat dalam setiap aksinya oleh kelompok ini adalah persoalan perilaku keagamaan. Misalnya, isu jilbab, isu lemak babi, isu haram Sumbangan Sosial Berhadiah (SDSB) dan isu-isu politik internasional seperti isu pro Saddam, anti Israel, dan isu anti Amerika. Pada tahun 1993-1994, kelompok ini mulai melontarkan isu politik dan ekonomi tentang ketidak-beresan perilaku kekuasaan rejim Orde Baru dengan mengangkat isu kredit macet. Menjelang akhir tahun 1997, kelompok ini mulai mengangkat isu anti Orde baru Soeharto. Bahkan LMMY beberapa kali melakukan aksi bersama dengan kelompok kiri radikal seperti PRD.

DINAMIKA GM PASKA MEI 1998

Pasca kejatuhan Soeharto 1998

Paska kejatuhan Soeharto 1998, antara kelompok-kelompok GM maupun dalam internal kelompok GM mengalami perbedaan pendapat yang sangat tajam. Perbedaan ini mulai muncul ketika mensikapi naiknya Habibie sebagai presiden. Bagi kelompok GKOB menganggap bahwa perjuangan mereka telah selesai, sedangkan bagi GAOB masih menganggap bahwa Habibie merupakan perpanjangan tangan dari Soeharto.

Akibat dari perbedaan tersebut, pada tanggal 22 Mei 1998, di gedung DPR hampir terjadi bentrok antara kelompok yang mendukung Habibie sebagai presiden melawan ribuan mahasiswa yang menentang Habibie sebagai presiden. Kelompok yang mendukung Habibie antara lain adalah KISDI, Humanika dan kelompok preman yang menamakan dirinya pendekar banten. Humanika ini adalah kelompok yang sebagian aktivisnya merupakan mantan anggota HMI sewaktu mereka menjadi mahasiswa tahun 1978-an. Mereka ini kelompok yang cukup dekat dengan Habibie, terutama setelah Habibie menjadi ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dukungan yang diberikan terhadap Habibie yang ICMI diharapkan akan membawa keuntungan bagi KISDI dan Humanika. Pada 23 Mei 1998, KAMMI Solo dan Salatiga melakukan aksi menerima Habibie sebagai presiden. Sementara di Semarang, pada 25 Mei 1998, kelompok yang menamakan diri SMPT se Jateng mendukung Habibie. Di daerah-daerah lain seperti di Surabaya, Ujung Pandang dan Bandung, kelompok-kelompok yang dikategorikan GKOB secara serempak melakukan aksi mendukung Habibie.

Tetapi di lain pihak, pada tanggal 28 Mei 1998, Forkot dan FKSMJ aksi di gedung DPR RI menolak Habibie serta menuntut dibentuknya KRI, untuk membentuk eksekutif dan DPRS/MPRS serta menyelenggarakan kabinet sementara serta mempercepat pemilu dan Sidang Istimewa. Tuntutan tersebut bertentangan dengan keinginan kelompok GKOB untuk menjadikan Habibie sebagai presiden. Pada 22 Mei 1998, LMMY, PMII, GKMI dan kelompok GAOB lainnya di Yogyakarta juga melakukan aksi menolak Habibie dan kabinetnya. DRMS Solo juga melakukan aksi menolak Habibie dengan melakukan aksi di Balaikota Solo. Penolakan yang sama juga dilakukan oleh AMRS di Semarang pada 23 Mei 1998 di Kantor Gubernur Jawa dan FKPI di depan gedung DPRD I pada 25 Mei 1998. Aksi yang sama juga dilakukan oleh kelompok GAOB di seluruh kota-kota besar di Indonesia untuk menolak Habibie sebagai presiden.

Pertentangan tersebut terus mewarnai demonstrasi-demonstrasi di Jakarta dan beberapa kota lainnya antara akhir Mei hingga September 1999. Tetapi, kuantitas aksi demonstrasi mulai menuntut dan menolak habibie mulai berkurang pada bulan Juli hingga September 1998. Tetapi, wacana tentang perbedaan tersebut makin menajam di antatra kelompok GKOB dengan GAOB pada bulan Oktober 1998. Misalnya pada 28 Oktober 1998 di Bandung hampir terjadi bentrok di antara kelompok tersebut. Pasalnya,

aksi yang sebelumnya dilakukan oleh kelompok GAOB dengan memasang spanduk anti Habibie, tiba-tiba dirubah oleh kelompok GKOB menjadi dukungan terhadap Habibie. Ketegangan-ketegangan tersebut juga terjadi di beberapa kota besar di Indonesia.

Perbedaan ini terus berlanjut dalam menyikapi perkembangan politik nasional. Kedua kelompok di atas seringkali mengambil posisi yang berseberangan dalam menghadapi isu-isu penting nasional. Catatan tambahan: Peristiwa Malari 1974 bermula dari aksi mahasiswa menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka sebagai simbol untuk menentang investasi modal asing. Namun peristiwa tersebut akhirnya berubah menjadi kerusuhan yang telah menyebabkan 9 orang meninggal, 23 orang terluka dan beberapa banguan termasuk pasar Senen terbakar. Dari peristiwa tersebut, pihak keamanan telah menahan 700 orang dan 45 diantaranya diajukan ke pengadilan. Pada saat yang sama, pemerintahan membredel beberapa koran yang telah memberitakan peristiwa tersebut (Sanit, 1999: 53-54).

Pada tahun 1983, pemerintah rejim Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi yang ada di Indonesia. Kebijakan ini telah berpengaruh pada organisasi HMI yang pada tahun 1984 terpecah menjadi dua kelompok, yaitu HMI Dipo (yang diakui pemerintah Orde Baru) yang menerima asas tunggal Pancasila dan HMI MPO yang menolak asas tunggal Pancasila. Penyebutan HMI Dipo karena kelompok HMI ini bermarkas di jalan Diponegoro, sedangkan HMI MPO berkenginan menyelamatkan organisasi dari campur tangan kekuasaan.

GERAKAN MAHASISWA INTRA KAMPUS

Dewan Mahasiswa dan Majelis Mahasiswa adalah Lembaga intra Kemahasiswaan tingkat Universitas. Dewan Mahasiswa ini sangat independen, dan merupakan kekuatan yang cukup diperhitungkan sejak Indonesia Merdeka hingga masa Orde Baru berkuasa. Ketua Dewan Mahasiswa selalu menjadi kader pemimpin nasional yang diperhitungkan pada jamannya. Dewan Mahasiswa berfungsi sebagai lembaga eksekutif sedangkan yang menjalankan fungsi legislatifnya adalah Majelis Mahasiswa. Di Fakultas-fakultas dibentuklah Komisariat Dewan Mahasiswa (KODEMA), atau di beberapa perguruan tinggi disebut Senat Mahasiswa. Para Ketua Umum KODEMA atau Ketua Umum Senat Mahasiswa ini secara otomatis mewakili Fakultas dalam Majelis Mahasiswa. Keduanya dipilih secara langsung dalam Pemilu Badan Keluarga Mahasiswa untuk masa jabatan dua tahun. Sedangkan Ketua Umum Dewan Mahasiswa dipilih dalam sidang umum Majelis Mahasiswa. Masa Dewan Mahasiswa dan juga Majelis Mahasiswa di Indonesia berakhir pada tahun 1978-an ketika Pemerintah memberangus aksi kritis para mahasiswa dan Dewan Mahasiswa dibekukan. Kegiatan politik di dalam kampus juga secara resmi dilarang. Kebijakan itu dikenal dengan nama Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan pengganti lembaga tersebut adalah Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).

Senat Mahasiswa

Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intra universiter yang dibentuk pada saat pemberlakuan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Sejak 1978-1989, Senat Mahasiswa hanya ada di tingkat fakultas, sedangkan di tingkat universitas ditiadakan. Di tingkat jurusan keilmuan dibentuk Keluarga Mahasiswa Jurusan atau Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang berkoordinasi dengan Senat Mahasiswa dalam melakukan kegiatan intern. Pada umumnya Senat Mahasiswa dimaksudkan sebagai Lembaga Eksekutif, sedangkan fungsi legislatifnya dijalankan organ lain bernama

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM).

Pada tahun 1990, pemerintah mengizinkan dibentuknya Senat Mahasiswa tingkat Perguruan Tinggi namun model student government ala Dewan Mahasiswa tidak diperbolehkan. Senat Mahasiswa yang dimaksudkan adalah kumpulan para Ketua-Ketua Lembaga Kemahasiswaan yang ada: Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas, Ketua Umum BPM dan Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa. Model seperti ini di beberapa perguruan tinggi kemudian ditolak, dan dipelopori oleh UGM, Senat Mahasiswa memakai model student government. Senat Mahasiswa menjelma menjadi Lembaga Legislatif, termasuk di tingkat Fakultas. Lembaga Eksekutifnya adalah Badan Pelaksana Senat Mahasiswa. Belakangan nama Badan Pelaksana diganti dengan istilah yang lebih praktis: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Awalnya BEM dipilih, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Sidang Umum Senat Mahasiswa namun sekarang pengurus kedua institusi sama-sama dipilih langsung dalam suatu Pemilihan Raya.

Unit Kegiatan Mahasiswa

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para aktivis yang ada di dalamnya. Unit Kegiatan Mahasiswa sebetulnya adalah bagian/organ/departemen dari Dewan Mahasiswa. Ketika dilakukan pembubaran Dewan Mahasiswa, departemen-departemen Dewan Mahasiswa ini kemudian berdiri sendiri-sendiri menjadi unit-unit otonom di Kampus.

Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari tiga kelompok minat : Unit-unit Kegiatan Olahraga, Unit-unit Kegiatan Kesenian dan Unit Khusus (Pramuka, Menwa, Pers Mahasiswa, Koperasi Mahasiswa, Unit Kerohanian dan sebagainya).

Badan Perwakilan Mahasiswa

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) adalah organisasi mahasiswa Intra Universiter di Indonesia yang dibentuk pada saat pemberlakuan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. Sejak 1978-1989, Badan Perwakilan Mahasiswa hanya ada di tingkat Fakultas bersama-sama dengan Senat Mahasiswa. Ada kerancuan istilah BPM dengan Senat Mahasiswa karena sama-sama berarti wakil. Hanya saja menurut aturan main, BPM dianggap berfungsi sebagai badan legislatif sedangkan Senat Mahasiswa menjalani fungsi eksekutif. Akhirnya, karena ketidakjelasan fungsi BPM itu ketika era Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi atau SMPT fungsi BPM digantikan Senat Mahasiswa. BPM sendiri dihapuskan. Senat Mahasiswa yang tadinya badan eksekutif berubah menjadi badan legislatif. Sedangkan badan eksekutifnya dibentuk Badan Pelaksana Senat Mahasiswa, yang lantas diubah lagi menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Istilah ini bertahan hingga saat ini.

Badan Eksekutif Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ialah lembaga kemahasiswaan yang menjalankan organisasi serupa pemerintahan (lembaga eksekutif). Dipimpin oleh Ketua/Presiden BEM yang dipilih melalui pemilu mahasiswa setiap tahunnya. Di beberapa kampus seperti Universitas Indonesia, masih digunakan nama Senat Mahasiswa (SM).

Himpunan Mahasiswa Jurusan

Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi mahasiswa intra universiter di Indonesia yang terdapat pada jurusan keilmuan dalam lingkup fakultas tertentu. Umumnya bersifat otonom dalam kaitannya dengan organisasi mahasiswa di tingkat Fakultas seperti Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan umumnya dalam konteks keilmuan, penalaran dan pengembangan profesionalisme. Nama lain Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah Keluarga Mahasiswa Jurusan atau Korps Mahasiswa Jurusan. Sebagai contoh : Himpunan Mahasiswa Budi Daya Pertanian (Fakultas Pertanian), Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil (Fakultas Teknik), Himpunan Mahasiswa Sejarah (Fakultas Ilmu Budaya), Korps Mahasiswa Komunikasi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Himpunan Mahasiswa Jurusan kelompok sejenis banyak yang membentuk jaringan dengan HMJ lainnya di lain Perguruan Tnggi sehingga seperti juga Senat Mahasiswa. Maka ada Ikatan Himpunan Mahasiswa Jurusan sejenis skala nasional. Sebut saja nama Ikatan Mahasiswa Komunikasi Indonesia yang menghimpun HMJ Komunikasi Fisip, beberapa diantaranya berstatus Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Atau Ikatan Mahasiswa Administrasi Indonesia. Juga ada Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia atau IMAHAGI.

Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus

Organisasi kemahasiswaan yang bersifat ekstra kampus pada umumnya terkait dengan aliran politik atau ideologi tertentu seperti: FMN, GMNI, HMI, PMII, GMKI, PMKRI, Mapancas dan sebagainya. Ada pula organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang didasarkan pada ikatan asal daerah, misalnya Himpunan Mahasiswa Jawa Timur (HIMAJATI), atau Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Timur (KPMKT). Untuk organisasi kemahasiswaan yang bersifat kedaerahan umumnya sekretariatnya sekaligus merupakan Asrama Mahasiswa asal daerah yang bersangkutan. Meskipun tidak semua mahasiswa asal daerah tersebut merupakan anggota organisasi atau tinggal di Asrama Mahasiswa daerah yang bersangkutan.

ORGAN GERAKAN MAHASISWA 1998

Daftar Organ gerakan mahasiswa yang berperan dalam gelombang aksi reformasi pada 1998 dan setelahnya. **Aceh:** SMUR - Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat. **Medan:** DEMUD, Agresu - Aliansi Gerakan Reformasi Sumatera Utara. **Bandung:** FKMB - Forum Komunikasi Mahasiswa Bandung, FIM B - Front Indonesia Muda Bandung, FAMU - Front Aksi Mahasiswa Unisba, GMIP - Gerakan Mahasiswa Indonesia Untuk Perubahan, KPMB - Komite Pergerakan Mahasiswa Bandung, FAF - Front Anti Fasis, KM ITB - Keluarga Mahasiswa ITB, KM Unpar - Komite Mahasiswa Unpar. **Jakarta:** LMND - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, FKSMJ - Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta, Forkot/Forum Kota-Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabotabek, Famred - Front Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi, Front Nasional, Front Jakarta, KamTri - Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti, KAMMI - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, HMI MPO - Himpunan Mahasiswa Islam -Majelis Penyelamat Organisasi, KB UI - Keluarga Besar Mahasiswa UI, FAM UI - Front Aksi Mahasiswa UI, Komrad - Komite Mahasiswa dan Rakyat untuk Demokrasi, Gempur - Gerakan Mahasiswa untuk Perubahan, Forum Bersama / Forbes, Jaringan Kota / Jarkot, LS-ADI Jakarta - Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia, HMR - Himpunan Mahasiswa Revolusioner. **Bogor:** KBM-IPB - Keluarga Besar Mahasiswa - Institut Pertanian Bogor. **Yogyakarta:** SMKR - Solidaritas Mahasiswa Untuk Kedaulatan Rakyat, KPRP - Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan, FKMY - Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta, PPPY - Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta, FAMPERA - Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat, LMMY - Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta. **Solo:** SMPR - Solidaritas Mahasiwa Peduli Rakyat. **Bali:** Posperra - Posko Perjuangan Rakyat, Frontier - Front Demokrasi Perjuangan Rakyat.**Surabaya:** AbrI - Aksi bersama rakyat Indonesia, APR - Arek Pro Reformasi, ASPR - Arek Surabaya Pro Reformasi, FORMAD - Forum Madani FPM - Front Perjuangan Mahasiswa, KAMI - Kesatuan Aksi Mahasiswa ITS. **Malang:** FKMM - Forum Komunikasi Mahasiswa Malang. **Makassar:** KONTRA-Komunitas Pelataran Kerakyatan Unhas.

KONDISI POLITIK 1998

Agen-agen neolib yang ingin menjadikan dunia ke tiga sebagai ajang perampasan atau perampokan menemui kendala yang sangat serius di Indonesia, yaitu adanya monopoli penguasa yang otoriter dan keluarganya. Tapi hal itu tidak menjadi kendala bagi negri penjajah (barat) untuk tetap menyerang pasaran di negri ini, karena di Indonesia merupakan pasar yang sangat strategis untuk dapat meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Salaha satu yang dilakukan oleh agen neoliberal di Indonesia yaitu tepatnya pada paruh kedua 1997 adalah menarik dolar dari pasaran, yang mengakibatkan bencana ekonomi Indonesia, ditandai oleh melemahnya nilai rupiah.

International Monetary Fund (IMF) mengumumkan paket bantuan keuangan senilai $ 23 miliyar pada oktober 1997, lalu di ikuti oleh pemerintah melikuidasi 16 bank pada I November 1997 sampai Januari 1998, krisis mulai memburuk. Nilai rupiah sudah sangat lemah, dari sekitar Rp 4000 menjadi Rp 11.000 per $1. RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang dibacakan Suharto pada 6 Januari 1998 tidak menunjukkan kesungguhan rezim deru (Orde Baru) untuk melakukan reformasi ekonomi dan masih mengatakan bahwa *badai pasti berlalu*.

Kritik keras dari IMF pada konsistensi pemerintah Indonesia segera memunculkan rumor di dalam dan diluar negri bahwa IMF akan menghentikan pencairan dana bantuan tahap ke dua sebesar $ 3 miliyar, akibatnya pada menilai negatif dan rupiah semakin melemah menjadi 12.000. Sementara itu kebutuhan-kebutuhan pokok dipasaran semakin melangit harganya, bahkan banyak perusahaan yang gulung tikar akibat krisis ini, PHK terjadi besar-besaran, angka pengangguran dan kemiskinan pun naik drastis.

Realitas Gerakan Mahasiswa

Keresahan masyarakat atas melambungnya harga-haraga sembilan bahan pokok (sembako) dan ancaman putus kuliah serta masa depan yang suram dikalangan mayoritas mahasiswa, menjadi faktor penggerak tersendiri bagi kalangan kampus, mahasiswa dan civitas akademica untuk menyatakan keprihatinanya. Aksi mimbar bebas dan keprihatinan di kampus menyerukan tuntutan menurunkan harga-harga barang, terutama sembako, diikuti oleh tuntutan yang berkaitan dengan krisis ekonomi lainya, yakni agar penimbun barang ditindak, masalah pengangguran yang semakin meluas ditangani, dan tuntutan agar kebijakan ekonomi lebih berpihak pada kepentingan mayoritas rakyat. Pada Februari 1998 kuantitas massa aksi demonstrasi mahasiswa memang semakin meningkat. Di luar Jawa mahasiswa mulai aktif; Palu, Bima, Lahat, Samarinda, dan yang terbanyak Ujung Pandang. Sementara itu di kota-kota lain GA deru (Gerakan Anti Orde Baru) mahasiswa semacam Bandung, Solo, Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Semarang juga semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. *Turunkan harga* justru yang menjadi isue politik utama selama Februari 1998, yaitu 31 kasus dan yang *Tolak Suharto* (6 kasus).

Pelaku baru gerakan protes dan perlawanan mahasiswa yang oleh beberapa kalangan disebut GK deru (Gerakan Koreksi Orde Baru) mulai menonjol pada akhir Februari 1998. Aksi-aksi gerakan mahasiswa tidak lagi digerakkan oleh kelompok-kelompok radikal yang mempunyai tradisi perlawanan dan pemikiran yang sangat kuat juga sudah lama terjun melawan kekerasan pemerintahan otoriter deru (Orde Baru). Yaitu sejak akhir 80-an sampai era 90-an.

Kalangan aktivis kampus dari organisasi resmi semacam SMTP (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan organ setengah resmi KM (Keluarga Mahasiswa) atau Presidium senat mahasiswa fakultas-fakultas, yang menyebut gerakan mereka sebagai *gerakan moral*, dengan format aksi keprihatinan didalam kampus, mulai muncul dan meluas. Elmen Gerakan mahasiswa (Gema) yang baru ini kebanyakan didukung oleh staf pengajar dan pimpinan perguruan tinggi, yang dinamakan Gema civitas academika. Mimbar terbuka diantaranya di UI yang dihadiri atau didukung beberapa tokoh dan mantan rektor UI Prof. Mahar Maharjono dan beberapa Guru Besar lainya. Mimbar terbuka ini ditutup dengan tindakan simbolis mahasiswa UI yaitu " Kampus Perjuangan Orde Baru" yang terpampang dibaliho besar didepan kampus ini menandai berkurangnya dukungn civitas academika UI terhadap deru (Orde Baru). Kejadian dikampus UI tersebut juga melanda beberapa kampus besar lainya, diantaranya 5 Maret 1998 di Unair Surabaya, 6 Maret 1998 di Universitas Yarsi Jakarta, 7 Maret Unpad Bandung, 9 Maret di Universitas Pasundan, Undip Semarang, UNS Solo, 10 Maret di Unila Lampung dan di UII Jogjakarta, 11 Maret di UGM. Pada kurun waktu maret terjadi 15 aksi di 10 kota yang melibatkan Dosen, Guru Besar, pejabat Dekanat dan Rektorat.

Rezim Suharto tampaknya menyadari gawatnya keadaan politik, berkaitan dengan gerakan mahasiswa yang terus membesar meskipun sudah dilakukan pemberangusan pasca 27 juli 1996. Rezim yang begitu percaya pada teori dalang beranggapan bahwa para pimpinan gerakan mahasiswa yang masih aktif dan cenderung radikal harus dilenyapkan agar gerakan itu bisa dihentikan, maka dibentuklah tim mawar dari Kopassus yang waktu itu dipimpin oleh *menantu* Suharto. Belasan aktivis diculik, sebagian besar adalah aktivis mahasiswa. Penculikan ini malahan memperbesar demonstrasi mahasiswa, terbukti pada bulan Maret 1998. Dari aksi mahasiswa pada Februari 1998 langsung melonjak mencapai 247 aksi pada Maret 1998. Aksi mahasiswa merata di 20 kota dari 10 Provinsi. Rekor terbanyak di buat oleh mahasiswa Surabaya kurang lebih(35 aksi), Ujung Pandang kurang lebih(32 aksi), Jogjakarta kurang lebih (25 aksi), Solo kurang lebih (19 aksi), Malang kurang lebih (17 aksi), dan Semarang kurang lebih (16 aksi), aktivis dikota-kota lain juga memulai aksi demonstrasinya.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa kian dapat memobilisasi massa semakin besar, rekor terbesar dilakukan oleh KM UGM yang berhasil memobilisasi massa kurang lebih sampai Lima Belas Ribu pada Maret 1998. Dalam aksianya mahasiswa yang mengangkat isue *anti Suharto* semakin meluas. Ada 14 aksi yang tercatat secara eksplisit *tolak Suharto,* lainya isue yang diangkat adalah masalah pergantian kepimimpinan nasiosal, tolak pertanggungjawaban presiden (ITS Surabaya 6 Maret 1998), aktivis-aktivis organisasi *resmi* kampus baik KM, BEM, Senat, KB lebih merupakan pernyataan sikap kprihatinan atas krisis ekonomi, politik yang melanda Indonesia sejak 1998. Tuntutan dan isue politiknya pun umum dan mengambang yakni *reformasi ekonomi dan politik*. Selain itu tuntutan mereka adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, turunkan harga sembako, tolak kekerasan militer, audit kekayaan pejabat, kembalikan kedaulatan rakyat, menolak IMF. Pada bulan April 1998 aksi demonstrasi semakin meningkat yakni kurang lebih 299 aksi. Aksi semakin merata dan meluas ke lebih dari 33 kota dari 17 provinsi, kota Jogjakarta dan Bandung mencatat rekor paling tinggi, masing-masing 40 aksi, diikuti Jakarta 38 aksi, Ujung Pandang 36 aksi, Semarang 19 aksi, Solo 16 aksi, Banjarmasin dan Medan masing-masing 12 aksi, Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah 20 aksi. Selain aksi di kota-kota dan kampus-kampus besar demonstrasi juga semakin mewabah ke kota atau kampus-kampus kecil yang selama ini tidak pernah aksi. Kalangan birokrat dan staf pengajar juga ikut mendukung aksi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa, salah satunya adalah Prof. Dr. Ichlasul Amal yang menjadi rektor UGM waktu itu.

Situasi politik Indonesia semakin terpuruk, gerakan mahasiswa tidak menunjukkan tanda berhentinya, bentrokan aparat dan massa aksi terjadi setiap hari, membuat Pangab Wiranto ingin mengadakan dialog dengan mahasiswa, bulan April *isue tolak dialog* juga menjadi landasan beberapa organ pergerakan untuk aksi. Aksi menuntut reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dan masyarakat Indonesia membuahkan hasil dengan mundurnya Presiden otoriter RI H.M. Suharto pada tanggal 21 mei 1998 pukul 09:02:45. Ini bukan berarti berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Hal itu dapat ditangkap dari beberapa aksi mahasiswa pasca 21 Mei 1998, yang masih meneriakkan tuntutan reformasi total.

Pengumuman pelimpahan wewenang dari Suharto ke wakil Presiden waktu itu Habibie sebagai presiden baru. *Tolak Habibie* menggema dibeberapa kota selama 21 dan 22 Mei 1998. Ribuan massa dari FAMPR (Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat) membentuk barisan dan berpawai sepanjang 2 Km. Di Solo Dua Puluh Ribu massa dari DRMS(Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta) berkumpul di depan kantor DPRD kota Solo untuk menolak Habibie, menuntut pembubaran DPR/MPR nasionalisasi kekayaan Suharto, cabut paket 5 UU politik dan hapus Dwi Fungsi ABRI. Di Denpasar ribuan massa rakyat yang bergabung dengan mahasiswa Udayana, dikampus menolak Ida Bagus Oka sebagai mentri dan tolak 3H (Harmoko, Hartono dan Habibie). Di Jakarta ribuan mahasiswa Forkot dan Front Nasional memasuki gedung DPR/MPR Senayan sambil menuntut Habibie turun, percepat pemilu ulang, usut kekayaan Suharto. Disisi lain tuntutan reformasi total yang bagi mahasiswa GA deru (Gerakan Anti Orde Baru) berarti juga penolakan terhadap Habibie, ternyata menghadapkan mereka dengan kelompoklain yang mendukung Habibie. Situasi ini terlihat jelas saat ribuan massa Forkot dan Front Nasional hampir bentrok dari massa aksi dari pendukung Habibie yang diantaranya Pendekar Banten, GPI, Yayasan Pedagang Muslim Sukabumi, GPA, GPII, PPII, HMII, DDII, IMM, PII di pelataran gedung MPR/DPR Senayan pada 22 Mei 1998.

Proses perubahan politik yang terjadi dimanapun pasti menghadapi dua pokok persoalan yaitu stabilisasi dan legitimasi. Kondisi sosial politik menyusul kenaikan Habibie justru meperlihatkan meluasnya aksi-aksi massa akibat tersumbatnya seluruh jalur politik konvensional dimasa Orde Baru. Aksi-aksi mahasiswa pada pertengahan bulan Mei sampai menjelang SI MPR bulan September 1998 memperlihatkan kecenderungan peningkatan tuntutan untuk membentuk pemerintahan transisi. Bagi aktivis Gerakan Anti Orde Baru (GA deru), persoalan legitimasi pemerintahan Habibie merupakan awal untuk menyatakan tuntutan-tuntutan selanjutnya. Sejak 21 sampai akhir Mei 1998, tercatat 90 aksi mahasiwa di berbagai daerah, dengan isue utama *Tolak Habibie*, percepat SI MPR, pemilu ulang. Dari jumlah total demonstrasi bulan itu sebanyak kurang lebih 536 kali. Memasuki bulan Juni kurang lebih 274 demonstrasi, dengan isue utama *SI MPR segera, adili Suharto*.

Aksi-aksi menuntut perbaikan ekonomi dan politik juga terjadi di beberapa daerah. Mahasiswa tidak lagi turun ke jalan sendirian tetapi sekarang banyak yang melibatkan rakyat. Di tingkat lokal rakyat dan mahasiswa menuntut pemberantasan KKN didalam unsur-unsur pejabat Pemda dan perubahan struktur pemerintah daerah. Buruh menuntut pembubaran organisasi profesi buatan Orde Baru, kenaikan upah, serta ganti rugi bagi ribuan karyawan yang terkena PHK. Salah satunya adalah yang dilakukan AMRS di Semarang, aksi demo yang diikuti oleh Seribuan massa didepan kantor Gubernur seraya menuntut terhdap pengadilan Suharto, perbaikan ekonomi rakyat. Bulan Juni dan Juli banyak dipenuhi oleh aksi-aksi menuntut mundurnya pejabat-pejabat pemerintah yang dinilai *tidak bersih* secara politik, yang cukup menonjol adalah tuntutan mundur terhadap pejabat yang dinilai ikut andil dalam kasus 27 Juli 1996, ini juga terjadi di Ujung Pandang dengan massa aksi dari berbagai elmen masyarakat antara lain mahasiswa, pengacara, aktivis prodemokrasi, aktivis mapala. Di Jogjakarta pada saat yang sama mahasiswa ISI bersama wartawan Bernas menuntut mundur Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo karena dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Udin wartawan Bernas. Memasuki bulan Oktober aksi menuntut dihapusnya Dwi Fungsi ABRI mengiringi peringatan ulang tahun ABRI yang ke-53, pada 5 Oktober 1998.

Demontrasi secara menyeluruh dilakukan oleh berbagai kelompok aksi baik di Jakarta sebagai pusat pemerintahan maupun di daerah-daerah. Umumnya disertai tuntutan agar ABRI bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM, ketidakmampuan ABRI mengatasi kerusuhan sosial di Jakarta selama 13 sampai 15 Mei1998, keputusan sanksi administratif bagi pelaku penembakan pada waktu tragedi Trisakti, ketidakjelasan nasib 14 aktivis prodemokrasi yang hilang, berbagai tindakan atas nama keamanan, ketertiban stabilitas nasional kesemuanya mengkristal dalam satu tuntutan, *cabut Dwi Fungsi ABRI*.

Banyak pengamat politik menyimpulkan bahwa gerakan mahasiswa akan kebingungan, gagap dan terpecah setelah Suharto tidak lagi berkuasa, kelompok-kelompok pergerakan memang tidak pernah berada dalam satu wadah tunggal, bahkan cenderung menolaknya. Ini dilakukan supaya aparat pemerintah tidak mudah mematikan atau *mengkooptasi* gerakan mereka. Selama satu dasawarsa membangun basis di kampus-kampus maupun diluar kampus, musuh bersama bagi kaum gerakan dan aktivis prodemokrasi yang dapat mempersatukan gerakan sepintas lalu adalah isu *turunkan Suharto*. Isue bersama tersebut bersumber dari serangkaian perdebatan yang menghasilkan kesimpulan bahwa akumulasi pembusukan politik, sosial, budaya, yang mengkristal menjadi keresahan dan kebangkrutan nasional yang disebabkan oleh pemerintahan Orde Baru, karena itu dia harus bertanggung jawab atas *chaos* politik setelah berada 32 tahun dikursi kekuasaan. Kemunculan partai-partai baru dan tokoh-tokoh lama yang loyalis terhadap Orde Baru yang mendadak berwajah reformis serta saling berlomba mengklaim sebagai *paling reformis,* kali ini siap menggantikan peran aktivis yang berada di garis depan menuntut perubahan total.

Berbagai Macam Gerakan

Dalam gerakan mahasiswa 1998 menurut banyak kalangan dapat digolongkan menjadi dua tipologi berdasarkan sikap dasar mereka terhadap rezim Orde Baru yaitu Gerakan Anti Orde Baru (GA deru) dan Gerakan Koreksi Orde Baru (GK deru), semakin menemukan format gerakan mereka setelah Suharto turun. Gerakan moral atau Gerakan politik merupakan alternatif yang mengemuka kembali di dalam kalangan para aktivis pasca Suharto. Gerakan moral memandang krisis multi dimensi yang dihasilkan oleh sistem Orde Baru semata-mata merupakan salah urus dan ketidakmampuan perangkat pemerintah menjalankan fungsinya. Mereka tidak menolak sistem politik yang ada, namun mengedepankan koreksi terhadap praktek politik Orde Baru. Inilah gerakan mahasiswa yang dikatagorikan sebagai Gerakan Koreksi Orde Baru (GK deru), gerakan ini umumnya yaitu gerakan resmi kampus KM,BEM, Senat mahasiswa, atau semacam gerakan yang sudah mapan pada waktu Orde Baru berkuasa, semacam FKSMJ (Forum Komunikasi Mahasiswa Jakarta), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), HMI MPO yang terdiri dari kumpulan mahasiswa dari pergerakan Ekstra kampus.

Aktivis yang radikal dan independen lebih melihat *salah urus* yang ada sebagai kesenjangan yang dilakukan secara sistematik, produk desain Orde Baru yang mengebiri hak rakyat, konsistensi mereka tetap terlihat pada era pasca Suharto. Yaitu hantaman terhadap pilar-pilar utama Orde Baru, cabut Dwi Fungsi ABRI dan paket lima UU politik, masih bergema pada aksi-aksi setelah Habibie menjadi Presiden. Gerakan ini disebut sebagai Gerakan Anti Orde Baru (GA deru), gerakan ini kebanyakan diwakili oleh aktivis tradisional yang sudah matang dalam tataran wacana maupun praksis, dan juga mendukung adanya demokrai (Prodemokrasi),ini semacam PPPY Jogjakarta, FAMPR Purwokerto, Formosal Salatiga, Semesta Semarang, Gempur Jakarta, Famred Jakarta, APR Surabaya, Ampera Wonosobo, KPMB Bandung, FKMM Malang, KKPS Probolinggo, Formajo Jombang, FPPHR Bogor. Bagi aktivis GK deru turunya Suharto adalah terget antara dari perubahan menyeluruh, karena itu seluruh elmen-elmen Orde Baru seharusnya tidak lagi bertengger dalam struktur pemerintahan baru. Kekecewaan karena naiknya Habibie sebagai kepanjangan tangan Suharto terlihat ketika Forkot, Front Nasional, serta kelompok GA deru lainya berteriak selama berhari-hari setelah 21 Mei. Meskipun demikian, dalam aksi-aksi menuntut turunya Suharto kedua kelompok tersebut tidak saling menegasikan, dan juga mempunyai kontribusi sama pentingnya dalam mempercepat laju proses reformasi dan tergulingnya Suharto.

Perpecahan demikian sering kali disebutkan oleh pengamat politik dikalangan aktivis dan organ gerakan mahasiswa pasca Suharto, tidak dapat disimpulkan semata-mata perbedaan isue politik yang muncul, meskipun isue dapat dijadikan agenda bersama. Selain itu kompleksitas organ gerakan itu sendiri berbeda-beda, maka kondisi gerakan di Jakarta misalnya, tidak bisa dijadikan parameter, sehingga diperoleh kontribusi *gerakan mahasiswa tidak satu suara*, atau ungkapan sejenis lainya. Kontinuitas atau diskontinuitas berkorelasi dengan berbagai faktor, diantaranya seberapa jauh organ tersebut membangun wacana dan tradisi gerakan, serta proses dialektika yang terjadi didalamnya. Aktivis kelompok mahasiswa yang mempunyai sejarah pergerakan yang panjang di kencah pertarungan konsep maupun praksis, tidak akan rela terjebak pada aktivisme belaka. Pergulatan pemikiran melalui intensitas diskusi dalam rapat-rapat, bahkan *tur* politik, untuk merumuskan ideologi, *platfrom* dan visi gerakan memerlukan rentang waktu yang lama. Memahami konteks ini bisa dihindari kecenderungan labelisasi atau tuduhan, bahkan pengkultusan terhadap gerakan mahasiswa.

Selama rezim Orde Baru, perbedaan pendapat selalu di tekan, sedangkan dibawah pemerintahan Habibie keterbukaan tampaknya cukup kondusif bagi pertarungan politik. Mulai terlihat kepentingan kelompok diutamakan dari pada langkah-langkah konkrit yang dapat memulihkan negara dari krisis multi dimensi. Pertarungan kepentingan tersebut akhirnya menyeret gerakan mahasiswa dalam arti berkaitan

dengan kepentingan politik dimasing-masing pihak, dan bahkan semata-mata sebagai perbedaan politik. Disamping itu muncul pelaku politik baru yang cenderung *mengiterupsi* mahasiswa, yaitu partai-partai politik baru yang siap menjalankan proses politik lebih *demokratis*.

Keterbukaan politik yang merupakan konsesi pemerintah baru disatu sisi membuka partisipasi politik bagi rakyat. Tetapi, pemerintah baru ternyata segera mengeluarkan rambu-rambu untuk mencegah kekuatan terutama dianggap mengganggu jalanya proses reformasi. Watak Orde Baru yang anti perubahan muncul kembali dalam berbagai tindakan represivitas aparat dalam mengahadapi berbagai demonstrasi, kejadian bentrok antara massa aksi dengan aparat pada bulan Maret terjadi kurang lebih 11 aksi, April kurang lebih 34 kali, Mei kurang lebih 40 kali. Menyusul dikeluarkanya UU No. 9/1998 mengenai unjuk rasa. Pemerintahan baru menerjemahkan tuntutan reformasi total, khususnya oleh Gerakan Anti Orde Baru (GA deru), sebagai upaya *makar*, untuk menggulingkan kekuasaan, dan mengumumkan bahaya kebangkitan komunis, serta stigma ekstrim lainya terhadap para aktivis. Politik kambing hitam yang menempatkan mahasiswa sebagai elmen penggagu stabilitas secara konsisten juga dilakukan yaitu memperlawankan mahasiswa dengan massa yang dimobilisasi dengan menggunakan atribut tertentu, dalam hal ini diwakili kekuatan yang menggunakan atribut Islam.

Bagi pemerintahan baru, *komunis* adalah hantu yang bisa muncul setiap saat, jadi logika Orde Baru aksi mahasiswa akan surut sendirinya jika di tuding sebagai anti Islam, komunis, dan memaksakan kehendak, disamping asumsi bahwa rakyat mulai kehilangan simpati terhadap aksi mahasiswa, karena bisa diprovokasi dan menyulut kerusuhan.

Pemilu yang digelar tahun 1999 oleh pemerintahan Habibie menurut banyak kalangan adalah pemilu yang paling demokratis dibanding dengan pemilu yang pernah digelar dinegera ini. Semua komponen masyarakat ikut serta dalam mengawal jalanya pemilu ini, termasuk mahasiswa. Didalam pemilu ini mahasiswa diuji apakah mereka tidak akan larut melebur ke dalam salah satu partai kontestan pemilu, atau malahan ingin menjadi seperti character murni yang mereka miliki, yaitu sebagai sosok yang dinamis, idealis, intelektual, memiliki komitmen terhadap masa depan bangsa dan memiliki orientasi yang utuh terhadap masyarakat bangsanya, dengan semua atribut budaya yang dimilikinya, ataukah diam dan hanya melihat permainan politik para elit politik dinegri ini, diantaranya adalah orang-orangnya orde baru yang telah mereka gulingkan ditahun 1998.

Naiknya Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI yang ke-4 telah mengecewakan beberapa pihak yang merasa paratainya menang tetapi tidak bisa mengegolkan Capres nya. Ini dikarenakan koalisi antar partai terjalin dengan baik dan di perkuat lagi melalui pendapat para kalangan Islam yang tidak menyetujui adanya seorang pemimpin perempuan, walaupun ada alasan politik lain yang juga sangat berpengaruh.

Sejak Gus Dur menduduki jabatan presiden, sejak itu pulalah pintu kebebasan terbuka lebar. Setelah lebih dari 50 tahun dibawah cengkraman dua orang diktator (Sukarno dan Suharto), Gus Dur tampil sebagai penyelamat bangsa dari penyakit kronis " kepemimpinan yang cenderung diktatorial". Tekanan batin selama 50 tahun lebih tanpa kebebasan itu meledak tiba-tiba begitu Gus Dur membuka pintu hati manusia Indonesia yang ingin berkata dan berpendapat sejak 1945, termasuk para mahasiswa.

Dalam menjalankan roda pemerintahanya, Gus Dur menganut pendekatan yang sangat bertentangan dengan pendekatan pendahulunya. Suakarno menggunakan pendekatan nasionalisme dan patriotisme untuk menghipnotis orang agar tetap tunduk dan taat kepada pimpinanya. Sedangkan Suharto menggunakan pendekatan keaman dengan dalih "demi pembangunan yang berkesinambungan" dengan menutup semua pintu lain yang bertentangan dengan pendekatanya. Suharto telah membuat orang lain untuk harus setuju dengan apa yang dikatakanya dan dibuatnya. Keduanya bisa disebut diktator, karena mereka berdua bersama-sam lebih menonjolkan kepribadian dan golongan mereka atas nama nasionalisme dan pembangunan.

Gus Dur tampil sebagai bapak reformasi dan membangun tahtanya dengan kemanusiaan dan demokrasi, bukan sekedar pembangunan dan nsionalisme. Gus Dur pernah mengatakan bahwa dia telah sukses melaksanakan revolusi sosial. Sukarno, 50 tahun lebih yang lalu pernah mengatakan Indonesia perlu revolusi simultan dan revolusi multi complex, tetapi menurut saya beliau hanya berhasil dengan revolusi sosial dan revolusi politik. Setelah bertahta selama 20 tahun Indonesia ditinggalkan sebelum revolusi itu tuntas, kerajaan Suahrto muncul dan pembantaian api-api revolusi ini yang dilakukan oleh pemerintahanya. Gus Dur tampil dengan revolusi ulang dari revolusi sosial. Dia telah mengambil langkah untuk revolusi politik, rupanya langkah yang dilakukanya telah meruntuhkan kerajaan yang dibangun atas dasar kemanusiaan edan demokrasi. Ketidak sepahaman antara pemerintah Gus Dur dengan agen-agen neoliberalisme di negara ini atau orang-oarng Orde Baru yang masih bertengger di pemerintahan menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur berbeda jauh sekali dengan harapan para orang-orang disekitarnya, salah satunya adalah kecondongan Gus Dur yang telah menjalin atau membuka hubungan dagang dengan pemerintahan China. Lembaran baru yang dilakukan Gus Dur ini sangat menyimpang dengan kebiasaan para pendahulunya, dan yang dilakukanya ini adalah penggeseran peta perekonomian dari timur (Jepang) agak geser sedikit ke barat.

Selain itu, Gus Dur juga sangat getol dalam membombardir kekuatan militer yang terkenal sangat tiran dalam mengendalikan tampuk kekuasaan, terlihat ketika ABRI pecah menjadi dua yaitu POLRI dan TNI, atau memburu para koruptor besar. Ini sangat bertentangan sekali degan apa yang dikehendaki para

kawan politiknya seperti (poros tengah), karena masih banyak sekali orang-orang Orde Baru yang terlibat KKN melakukan kerjasama dengannya, dari sini mungkin awal perpecahan suatu koalisi para elit politik dimulai. Pertikaian antar elit plitik akhirnya pun terjadi, Gus Dur di serang oleh isue tentang ketrlibatanya dalam masalah Bulogate I.

Memang dalam menegakkan sebuah negara yang berlandaskan demokrasi membutuhkan waktu yang tidak pendek dan korban yang tidak begitu sedikit. Orang yang adil akan selalu tersingkirkan dari komunitas manusia yang sudah terbiasa dengan korupsi, orang yang jujur akan selalu tersingkir dari komunitas manusia yang tidak jujur, apakah kita rela, sebagai generasi muda bangsa dikatakan bahwa itu adalah salah satu dari kebudayaan bangsa kita.

Realitas Gerakan Mahasiswa

Setelah melewati masa-masa yang sulit (32 tahun) akhirnya mahasiwa berhasil keluar dari sarangnya dan berhasil juga dalam menggulingkan sebuah rezim yang otoriter yaitu Orde Baru. Dalam kontek gerakan reformasi waktu itu, nampaknya mahasiswa tidak saja memerankan agen kontrol sosial tetapi juga sebagai agen pembaharu. Mahasiswa telah menjembatani kekosongan yang terjadi antara kepentingan rakyat dan penguasa. Pada saat itu gerakan mahasiswa merupakan lambang kekuatan moral yang bersih dan dalam melakukan kontrol sosial tidak dilatar belakangi unsur politik. Idealisme mereka terjaga dengan baik. Selain itu hubungan komunikasi antar organ pergerakan cukup solid, sehingga memungkinkan mereka melakukan koordinasi dengan baik. Keberhasilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari beberapa faktor pendukung. *Pertama ;* Mahasiswa memiliki satu musuh bersama, *Kedua;* Banyaknya dukungan dari beberapa unsur masyarakat mengenai gerakan mereka, *Ketiga;* Kenyataan persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Selain dari faktor yang saya paparkan ini, mungkin masih banyak faktor-faktor lain yang ikut andil dalam masalah penggulingan pemerintahan Suharto.

Tetapi itu semua sirna ketika terbentuk pemerintahan yang dipilih secara demokratis, yaitu ketika pemerintahan Abdurrahman Wahid berjalan kurang lebih satu tahun. Gerakan mahasiswa mulai mengalami kemunduran ideologi, ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama,* gerakan yang sudah setahun biasanya mengalami fragmentasi. Fragmentasi gerakan ini biasanya terurai, mungkin dari gerakan moderat sampai ekstrem.kemunduran gerakan mahasiswa ini karena terjadinya radikalisasi gerakan. Dalam kasus ini biasanya berbagai rambu-rambu prinsip demokrasi sering dilupakan dan dilanggar. *Kedua,* adanya perubahan latar gerakan itu sendiri. Semula gerakan bersandar pada kekuatan moral perlahan-lahan berubah menjadi kekuatan politik. *Ketiga,* terjadi pergeseran dalam ideologi gerakan mahasiswa.

Pertikaian yang terjadi antar kelompok di dalam pemerintahan telah berimbas pada gerakan mahasiswa, terlihat nyata sekali dalam menyikapi isue keterlibatan presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus Bulogate I, padahal Abdurrahman Wahid sendiri tidak terbukti terlibat pada masalah kasus tersebut, ini menunjukkan isue penentangan terhadap Gus Dur, kurang matang dalam membaca isue politik yang dilancarkan oleh para elit musuh politik politik Gus Dur. Gerakan mahasiswa pada saat itu terpecah antar yang *pro* dengan yang *kontra*. Gerakan yang *pro* kebanyakan adalah gerakan mahasiswa yang *pro* demokrasi atau seperti yang pada 1998 disebut GK deru (Gerakan Anti Orde Baru), dalam aksinya tidak langsung mengatasnamakan mahasiswa tetapi lebih banyak yang bergerak dibelakang gerakan massa yang mendukung jalanya pemerintahan Gus Dur, Seperti pengerahan massa dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, walaupun ada sedikit yang mengatasnamakan langsung dari mahasiswa. Gerakan yang kontra melibatkan beberapa elmen mahasiswa antara lain adalah gerakan mahasiswa yang terkena *monay politic* dari lawan politik Presiden dipemerintahan atau yang pada 1998 sering disebut GK deru (Gerakan Koreksi Orde Baru) dan gerakan yang tidak puas dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI (karena partai pemenang pemilu tidak bisa mengegolkan Capres nya sebagai presiden).

Isue sentral yang diangkat oleh beberapa elmen mahasiswa waktu itu juga berbeda. PMII, Forkot, Famred dan beberapa elmen kiri mahasiswa atau gerakan yang pro demokrasi mengangkat isue tentang pembubaran Golkar, pengadilan Suharto dan percepat pemilu, karena mereka menganggap bahwa masih banyak orang-oarang yang dulu pada masa Orde Baru sangat loyal sekali pada Suharto, dan setelah Suharto jatuh mereka berlomba-lomba mencuci tangan dan menyebut diri mereka paling reformis. Sementara itu gerakan kanan yang diwakili oleh KAMMI, HMI, BEMSI, KM atau gerakan yang pada waktu 1998 sering disebut GK deru (Gerakan Koreksi Orde Baru)mengusung isue tuntutan turun terhadap Gus Dur, seperti yang terjadi ketika Gus Dur mau berkunjung kekampus UGM, tapi dihadang oleh mahasiswa yang mengatasnamakan dari Keluarga Mahasiswa UGM, alasan mereka adalah tidak ingin kampus mereka dimasuki oleh kekuatan politik dari pihak manapun, padahal kejadian ini malah justru ditunggangi oleh kekuatan elit politik yang menjadi musuh Gus Dur didalam pemeritahan. Sebaliknya kelompok ini akan mengangkat isue lain ketika elit mereka terlibat dalam masalah KKN, seperti ketika Akbar Tanjung yang terlibat dalam kasus Buloget II, mereka malah mengangkat isue menentang kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Lucu sekali macam gerakan mahasiswa waktu itu apabila mereka menyebut dirinya sebagai *gerakan moral*, tetapi malahan sangat kelihatan sekali dalam membela elit mereka sendiri.

Pada saat itu sejumlah pengamat sosial politik mengingatkan para aktivis mahasiswa agar tidak ikut terjebak dalam lingkaran kekerasan dengan melakukan dialog-dialog diantara sesama mereka. Imbauan itu diserukan sehubungan dengan peningkatan eskalasi aksi-aksi mahasiswa yang mulai menghadapkan

antara satu gerakan mahasiswa dengan gerakan mahasiswa lainya. Bentrok antar mahasiswa berlangsung hari kamis (8/2) malam usai dialog mahasiswa dengan presiden Abdurrahman Wahid.

Ini adalah gambaran gerakan mahasiswa dari waktu ke waktu, mereka tidak bisa lepas dari politik praktis yang dimainkan oleh para elit politik. Sangat sulit sekali mencari gerakan mahasiswa yang memang murni dari gerakan moral, tidak terlibat dalam aksi dukung-mendukung, dan lebih mengedepankan isue-isue yang sama dalam gerakanya. Dalam sejarahnya, kata M. Hatta mahasiswa yang banyak mewakili pemuda adalah harapan bangsa dan pelopor setiap perjuangan.

Pernyataan Hatta tersebut sangat relevan sekali bila digunakan dalam keadaan waktu itu atau sekarang, khususnya sebagai pemecut semangat dan progresifitas gerakan mahasiswa yang cenderung melemah. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi gerakan mahasiswa untuk tidak bergerak dan menyatukan langkah dalam menegakkan kebebasan dan keadilan. Pada dasarnya, gerakan mahasiswa merupakan sebuah gerakan budaya, karena itu mempunyai dampak politik yang sangat luas. Oleh sebab itu mereka tidaklah cepat boleh puas dengan hasil yang dicapai. Gerakan mereka juga harus senantiasa menegakkan asas kebenaran politik dan pengungkapan kebenaran publik sekaligus. Maka, budaya Indonesia yang cenderung cepat puas dengan keadaan tidak perduli perkembangan karena sibuk sendirian, tidaklah patut menjadi paradigma gerakan.

Agar gerakan mahasiswa menjadi progresif, dinamis, revolusioner, dan inklusif. Gerakan mahasiswa meniscayakan hal berikut ini. *Pertama*, proaktif merespon keadaan dan teguh pendirian. Gerakan mahasiswa harus bersatu dalam visi penegakan keadilan dan penumpasan kemunafikan. Hal ini bisa dilakukan saling memasok informasi untuk selanjutnya dilanjutkan pada penyusunan agenda aksi dan gerakan mahasiswa haruslah bersifat independen dan tidak menjadi perpanjangan tangan para seniornya. Karena hal ini biasanya hanya akan menimbulkan friksi dikalangan sendiri dan saling merebutkan proyek demontrasi. *Kedua,* melakukan dialog transformatif-meminjam istilah Jurgen Habermas untuk menciptakan masyarakat komunikatif dan demokratis. *Ketiga,* mendorong para aktivisnya untuk membentuk kapasitas intelektual yang memadai dan berjiwa intelektual organik meminjam istilah Gramsci. Hal ini berguna agar para aktivis gerakan tidak hanya sibuk dilapangan, kurang melakukan refleksi dan cenderung bergerak secara pragmatis.[]

MATERI 05
OPERASIONALISASI PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF

(MELACAK NALAR PARADIGMATIK, TRANSFORMASI STRATAK GERAKAN PMII, DAN OPERASIONALISASI PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF (PKT): ANALISIS TEORETIK DALAM PERPEKTIF TEORI PERUBAHAN SOSIAL, TEORI REVOLUSI SOSIAL & STRATEGI-TAKTIK GERAKAN)

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

Kelahiran suatu pikiran sering menyamai kelahiran seorang anak. Ia didahului dengan penderitaan-penderitaan pembawaan kelahirannya. Marx pernah berkata: "Proletariat tak akan kehilangan sesuatu miliknya, kecuali belenggu budaknya". Kalimat ini dapat kita gunakan di Indonesia lebih luas. Disini anasir-anasir bukan proletar berada dalam penderitaan yang sama dengan buruh industri, karena di sini tak ada industri nasional, perdagangan ansional. Dalam bentrokan yang mungkin terjadi antara imperialisme Belanda dan rakyat Indonesia tak seorang Indonesia pun akan kehilangan miliknya karena bentrokan itu. Di Indonesia kita dapat serukan kepada seluruh rakyat: "Kamu tak akan kehilangan sesuatu milikmu kecuali belenggu budakmu". Jika kita dapat mulai melancarkan pukulan stategis, demikian itu tidak hanya tergantung pada kualitas organisasi kita, akan tetapi juga pada keadaan ekonomi politik, baik pun di dalam maupun di luar negeri. Akan tetapi pukulan strategis itu akan mempunyai harapan lebih besar akan berhasil, jika tiap-tiap aksi politik atau ekonomi dapat kita lancarkan dengan sukses. Ini berarti, bahwa kita, seandainya kita tak mendapatkan kemenangan yang lengkap, kita sedapat mungkin dapat menghindarkan kekalahan, yang dapat melemahkan organisasi-organisasi kita buat waktu yang lama tetapi bukannya menghindarkan perjuangan dan pada buruh ditanamkan khayalan seolah-olah dalam masyarakat kapitalis perjuangan dapat dihindarkan, akan tetapi karena kegiatan persiapan dan kecakapan revolusioner.

[Naar de 'Republiek Indonesia' Menuju Republik Indonesia, Tan Malaka (1925)]

BAGIAN 1: PRAWACANA; PERDEBATAN PARADIGMATIK GERAKAN PMII

Sebuah gerakan yang rapi dan massif harus mengandaikan terbentuknya faktor-faktor produksi, distribusi dan wilayah perebutan. Tanpa mengunakan logika ini maka gerakan akan selalu terjebak pada heroisme sesaat dan kemudian mati tanpa meninggalkan apa-apa selain kemasyuran dan kebanggaan diri belaka. Katakanlah kita sedang akan membangun sebuah gerakan maka dimana wilayah perebutan yang akan kita temui dan oleh karena itu apa yang harus kita produksi dan mengunakan jalur distribusi seperti apa agar produk-produk gerakan kita tidak disabotase di tengah jalan. Rangkaian produksi-distribusi-perebutan ini adalah sebuah mata rantai yang tidak boleh putus, karena putusnya sebuah mata rantai ini berati matinya gerakan atau setidak-tidaknya gerakan hanya akan menjadi tempat kader-kadernya heroisme-ria. Dan yang lebih penting bahwa gerakan semacam ini akan lebih mudah untuk di aborsi.

Yang pertama-tama perlu di kembangkan di PMII adalah bahwa sejarah itu berjalan dengan masa lalu, bukan karena semata-mata masa lalu itu ada, tetapi karena masa lalu telah membentuk hari ini dan hari esok. Artinya capaian tertinggi dari sebuah gerakan adalah ketika satu generasi telah berhasil mengantar generasi berikutnya menaiki tangga yang lebih tingi. Visi historis inilah yang akan menjadikan PMII sebagai organisasi besar yang berpandangan kedepan dan universal, karena PMII tidak didirikan hanya untuk bertahan selama sepuluh atau dua puluh tahun, tetapi PMII didirikan untuk melakukan perubahan tata struktur dan sistem. Dengan demikian paradigma menempati posisi yang sangat vital dalam membangun gerakan PMII ke depan, bukan semata-mata karena kita membutuhkan paradigma, tetapi karena paradigma itu seharusnya memandu gerakan PMII dalam bingkai dunia.

Selama ini, perdebatan paradigmatik di PMII hanya bersifat reaksioner, bukan sebuah inisiatif yang didasarkan pada gerak maju yang terencana. Kondisi seperti inilah yang kemudian membatasi ruang lingkup gerakan PMII yang hanya melingkar di orbit internal NU dan tidak mampu melakukan pendudukan dan perebutan sektor-sektor strategis yang memiliki resonansi luas kepada publik. Sejauh berkaitan dengan perubahan struktural yang dicitakan PMII, maka pendudukan dan perebutan sektor-sektor publik adalah suatu keniscayaan. Masalahnya selama ini yang di puja-puja oleh sebagaian besar aktifis PMII adalah gerakan kultural *an sich* yang mengabaikan segala sesuatu yang bersifat struktur. Katakanlah dikotomi gerakan kultural-struktural yang menjadikan PMII sebagai penjaga gerbang kultural sementara organisasi kemahasiswaan yang lainnya, misalnya sebagai pemain struktural telah menimbulkan kesesatan berfikir sedari awal tentang gerakan yang dibayangkan (*imagined movement*) oleh kader-kader PMII, bahwa PMII cukup hanya bergerak di LSM-LSM saja dan tidak perlu berorientasi di kekuasan. Jadi paradigma merupakan suatu keniscayaan yang di bangun berdasakan atas pandangan PMII tentang dunia dalam realitas globalisasi dan pasar bebas yang saat ini sedang berjalan.

Indonesia Dalam Globalisasi & Pasar Bebas Sebagai Realitas dan Modal Gerakan

Dalam peradapan baru dunia global, kemajuan tekhnologi dan informasi menjadi infrastruktur penopang bergeraknya globalisasi dan liberalisasi ekonomi (baca neoliberal). Sebagai contohnya keberadaan pasar maya yang merupakan sistem dan tatanan baru bagi keuangan internasional yang kemudian banyak disebut dengan disebut dengan pasar modal dan pasar uang. Kemajuan elektronik global, membuat para pemegang modal diberbagai sektor seperti keuangan, perbankan, investasi langsung dan lain-lain, dengan mudahnya dapat memindahkan modalnya dalam jumlah besar dari negara yang lain ke negara yang lainnya hanya dengan memencet mouse komputer dengan jaringan internet yang terakses langsung disemua negara di dunia. Sehingga dengan mudahnya mereka malakukan intervensi terhadap perekonomian satu negara bahkan satu kawasan. Karena pergerakan aliran lalu lintas modal global sangat mempengaruhi pasar modal dalam satu negara. Selain itu terpakunya standar pertukaran internasional hanya pada dollar AS, mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi perputaran dan pergerakan pasar uang global. Sistem dunia akan terus bergerak dan mempunyai kecenderungan untuk bergerak linier yang akan berproses secara kompleks serta akan selalu memunculkan kontradiktif atau pertentangan. Sistem dunia juga akan merasuki semua aspek kehidupan manusia dan negara, sehingga ada kecenderungan suatu negara tak terkecuali Indonesia akan kehilangan sebagian kekuatan ekonominya. Dilain pihak globalisasi akan mendorong kekuatan-kekuatan lokal (baca kearifan lokal) untuk mampu bertahan dalam dunia yang menglobal ini.

Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, “Globalisasi tidak hanya berkaitan dengan sistem-sistem besar, seperti tatanan keuangan dunia, globalisasi bukan sekedar apa yang ada diluar sana terpisah, dan jauh dari orang perorang. Ia juga merupakan fenomena di sini yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan kita yang intim dan pribadi. Perdebatan mengenai nilai-nilai keluarga yang tengah berlangsung di banyak negara misalnya, mungkin terkesan sangat jauh dari pengaruh globalisasi. Tidak demikian halnya, dibanyak belahan dunia, sistem keluarga tradisional kian berubah atau terdesak khususnya setelah kaum perempuan menuntut kesetaraan yang lebih besar. Sepanjang yang kita ketahui dari catatan sejarah, belum pernah ada masyarakat yang kaum perempuannya hampir setara dengan pria. Ini sunguh merupakan revolusi global dalam kehidupan sehari-hari yang konsekwensinya dirasakan diseluruh dunia , dari wilayah kerja hingga wilayah politik”. (Anthony Giddens: 2001)

Keberadaan Indonesia tidak lepas dari pergerakan di luar apalagi dalam dunia yang menglobal. Dinamika perpolitikan internasional yang akan mendorong semakin menguatnya trend global kedepan dan trend ini tentunya akan terus berubah mengikuti irama pasar. Sistem dunia yang didukung sepenuhnya negara-negara di dunia pertama, sehingga mereka memainkan peran setrategis setiap pengambilan kebijakan mengenai aturan-aturan internasional melalui lembaga-lembaga tertentu. Sebagai contoh adalah adanya ISO (international Standart Organisation) yang menjadi salah satu aturan internasional dalam perdaganan barang lintas negara. Cara pandang penetapan aturan dengan mengunakan cara pandang barat, yang sudah barang tentu berbeda dengan cara pandang, kondisi dan potensi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ketiga. Aturan seperti ini sudah barang tentu akan mengalalahkan daya saing negara-negara ketiga, karena aturan ISO memiliki kecenderungan untuk menghadapkan pada hokum besi mekanisme pasar.

Mekanisme pasar sejauh membuka kesempatan kepada semua pihak untuk berinteraksi secara setara dapat di terima. Tetapi dalam sistem neoliberal seperti yang sekarang kita temui ini, dijumpai sebuah kondisi dimana prinsip kesetaraan tidak ada, atau terjadi interaksi yang asimetris. Prinsip perdagangan bebas yang dipandu dengan sistem monetarisme hampir-hampir tidak menyisakan ruang bagi ekonomi kecil untuk survive. Para pemilik modal besarlah yang memiliki kesempatan emas untuk bermain dalam sistem ini. Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas dengan diresmikannya AFTA, tetapi jika di analisis lebih dalam Indonesia tidak akan dapat berbuat banyak dihadapan modal-modal asing raksasa. Kita dapat membayangkan bagaimana seandainya sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak akan di kuasai oleh segelintir individu yang dengan laluasa akan dapat memainkannya untuk kepentingan pribadinya. Negara yang seharusnya mengabdi demi hajad hidup orang banyak telah di pereteli kekuasaanya oleh pasar, sehingga tidak lebih hanya akan bertindak sebagai agen pasar berhadapan dengan masyarakat sendiri.

Dengan agenda payung privatisasi misalnya kita telah dan akan melihat bagaimana banyak BUMN di privatisasi demi memenuhi budget pemerintah yang telah mengalami defisit. Yang menarik adalah privatisasi itu terjadi atas desakan IMF yang merupakan kepanjangan tangan negara-negara core dalam moneter dunia. Ini secara gamblang menjelaskan bagaimana pemerintah (baca : negara) tidak berdaya di hadapan sistem pasar yang telah mapan (neoliberalisme). Yang sangat ironis, ditengah kencangnya gerak maju neoliberalisme justru tidak ada struktur lokal yang mampu menghadapinya. Struktur lokal telah terfragmentasi sedemikian rupa sehinga neoliberalisme dapat menjebol benteng Indonesia tanpa perlawanan sama sekali. Dalam hubungan antar negara bangsa, pemerintah dan rakyat yang sama sekali tidak saling terkait kita menyaksikan bahwa Indonesia telah benar-benar terkunci dalam gerak sejarah. Jika hari ini adalah lima puluh tahun yang silam dan kita telah memiliki keawasan seperti hari ini, niscaya kita akan memilih Mao Tse Tung atau Tan Malaka yang memilih kemerdekaan sepenuh-penuhnya, bukan negociated independence seperti yang kita alami. Seandainya kita memiliki kesempatan untuk berbenah diri

ke dalam tanpa harus mengintegrasikan diri dalam interaksi global yang asimetris ini, maka politik isolasi mungkin adalah pilihannya. Resikonya adalah seperti apa yang telah di alami Cina (RRC), selama beberapa dekade sibuk berbenah diri melakukan reformasi struktur internal dan kemudian dalam hitungan dekade kelima telah mampu bersaing dengan hegemon dunia. Tentu Cina memiliki kekhasan yang tidak bisa disamakan dengan Indonesia, tetapi paling tidak ia merupakan gambaran bahwa there in (an) Alternative (TIA) selain blue-print AS yang harus di ikuti oleh negara pery-pery.

Konsolidasi politik negara-negara Eropa dan Amerika yang banyak menganut demokrasi liberal pasca perang dunia ke-2, untuk menciptakan format baru penjajahan dari kolonialisme dan imperalisme lama. Konsolidasi yang menghasilkan adanya pertukaran politik global sehingga memunculkan imperium global yag diikuti dengan perkembangan diplomasi multerateral dan regulasi internasional dan pembentukan instritusi-institusi politik global, seperti PBB dan institusi regional seperti Uni Eropa, NAFTA dan lain-lain. Institusi politik internasional inilah yang akan menciptakan aturan main percaturan politik global berskala internasional khususnya yang menyangkut isu-isu perdagangan, perang dan perdamaian. Perkembangan politik internasional yang ditopang dengan aturan internasional tersebut akan menghilangkan sekat-sekat batas negara sehingga akan memunculkan rezim internasional yang mempunyai pengaruh cukup signifikan dan memiliki otoritas untuk menentukan masa depan negara-negara yang lain. Perkembangan internasionalisasi dan transnasional politik yang mempunyai kecenderungan hilangnya peran negara atas warganya, dan kecenderungan untuk membangun satu pemerintahan rezim global yang berlapis dengan kekuasaan mayanya, tetapi mampu mengerakkan struktur sosial dan politik dari sebuah negara. Konsekwensi dari politik transnasional ini adalah miunculnya hukum-hukum internasional yang kosmopolitan. Posisi Indonesia yang merupakan bagian dari dunia, tidak akan mungkin lagi terhindar dari proses internasionalisasi politik tersebut apalagi dengan kondisi geo-geografis Indonesia yang strategis. Indonesia akan kehilangan banyak peran dan hanya menjadi bagian kecil dalam pentas dunia. Pemerintah Indonesia dan negara-negara ketiga lainnya akan semakin kehilangan kontrol atas arus informasi, teknologi, penyakit, migrasi, senjata, dan transaksi finansial baik legal maupun ilegal yang melintasi batas-batas wilayahnya. Aktor non-negara, mulai dari kalangan bisnis hingga organisasi-organisasi non-profit akan semakin memainkan peranan penting dalam lingkup nasional maupun internasional. Kualitas pemerintahan nasional dan internasional akan ditentukan oleh tingkat keberhasilan negara dan masyarakat dalam mengatasi kekuatan-kekuatan global di atas. Oleh karena itu, kita perlu melihat Indonesia dalam gambar dan ruang lebih besar lagi yaitu dunia. Dengan melihat Indonesia sebagai bagian dari sebuah sistem dunia yang sedang berjalan, kita dapat mengenali relasi apa yang sedang terjadi dalam sebuah peristiwa. Dengan mengenali relasinya kita dapat melihat pola-pola yang di gunakan oleh sistem tersebut untuk beroperasi, katakanlah kita perlu melihat dengan perspektif sistem dunia ini, lalu bagaimana kita menghubungkan perubahan-perubahan internal Indonesia dengan sistem dunia ini ?

Adalah Emanuel Wellerstain dan teman-temannya di Fernan Broudell Center Binghamton University yang mencoba memperkenalkan perspektif sistem dunia ini sebagai alat baca. Dalam pandangan para world sistemizer dunia ini terbagi ke dalam tiga wilayah kerja (*internasional division of labour*) yaitu:

1. *Core*, terdiri dari negara yang memiliki proses-proses produksi yang cangih, didaerah ini borjuis indigenous memiliki industri otonom yang memproduksi komoditas manufaktur untuk pasar dunia. Pola-pola kontrol buruh yang dominan adalah wage labour dan self-employment, negara-negara core biasanya dengan strong state machinesries. Negara core pada umumnya Northwest Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Australia.
2. *Periferi*, terdiri dari negara-negara yang memiliki proses produksi yang sederhana. Biasanya produk-produk negara periferi ikut menyumbang proses akumulasi kapital dinegara-negara core karena dagang memerlukan pertukaran-pertukaran yang tidak seimbang. Kontrol buruh juga dijalankan dengan kekerasan, dengan struktur negara yang lemah. Negara periferi menurut Wallerstain's tidak cukup kuat untuk mengintervensi lajunya komoditas, kapital dan buruh antar zona ini denfgan zona yang lainnya dalam system dunia. Tetapi cukup kuat untuk memfasilitasi flows yang sama.
3. *Semi Periferi*, mempunyai kompleksitas kegiatan ekonomi, modus kontrol buruh, mesin negara yang kuat dan sebagainya. Fungsi politik periferi adalah sebagai buffer zone antara dua kekuatan yang saling berlawanan. Secara historis, semi periferi terdiri dari negara-negara yang sedang naik atau turun dalam system dunia.

POLA HISTORIS GLOBALISASI POLITIK

FAKTOR	Pra-Awal Modern (Abad 14 –18)	Modern (Abad 19 – 20)	Kontemporer (1945 –)
Ekstensitas	Sebagian besar bersifat intra-teritorial dan intra-regional tetapi juga memulai ekspansi imperial.	Emperium global; Muncul sistem negara bangsa	Sistem negara global; Muncul tataan politik global; Regionalisasi politik dan inter-regionalisme
Intensitas	Volumenya rendah, tetapi melonjak ketika para kompetitor politik atau ekonomi bertemu dan berbenturan	Volumenya meningkat dan terjadi ekspansi hubungan	Terjadi peningkatan drastis pada kesepakatan-kesepakatan internasional, jaringan dan berbagai hubungan formal maupun informal.

Percepatan	Terbatas; Sporadis	Meningkat	Terjadi percepatan pada interaksi politik global seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi.
Pengaruh (negatif)	Sedikit; tetapi terkonsentrasi	Meningkatnya konsekuensi-konsekuensi institusional dan struktural	Tinggi: saling terkait, sensitif dan rentan.
Infra-struktur	Minimal; kerangka kerja amultilateral bergerak sangat lamban, mulai dari traktat hingga konferensi organisasi	Munculnya Organisasi dan rejim-rejim internasional maupun transnasional.	Perubahan besar baik pada ukuran, bentuk, jumlah rejim, organisasi internasional dan transnasinal serta mekanisme hukum. Komunikasi global "realtime" dan infrastruktur media.
Institusio-nalisasi	Minimal, tetapi mulai ada diplomasi dan regularisasi jaringan kerja antar negara.	Perkembangan rejim-rejim, peraturan-peraturan dan hukum internasional bersifat tentatif tetapi rentan.	Ditandai dengan pengembangan rejim, hukum internasional, dasar-dasar hukum kosmopolitan serta struktur organisasi antar pemerintah maupun organisasi transnasional (swasta).
Stratifikasi	Perkembangan tatanan dunia yang Eropa sentris. Organisasi politik lemah, tersebar dan tidak merata melintasi batas teritotial.	Hirarki kekuatan politik, militer dan ekonomi terkonsentrasi di Barat/Utara. Kapabilitas politik dikembangkan, tetapi hubungan yang tidak seimbang (asimetris) tetap dipertahankan.	Dari Dunia yang Bipolar (perang dingin) ke Multipolar. Kesenjangan Utara dan Selatan mulai dikikis seiring dengan munculnya NICs (Negara Industri Baru) dan aktor-aktor non-negara.
Pola Interaksi	Persaingan; perang-perang terbatas; Konfliktual/Koersif; Imperialis.	Teritorial; Diplomatik; Geopolitik/Koersif; Imperialis; Konflik dan Kompetisi; Pembentukan ke arah "total war"	Deteritorialisasi dan reteritorialisasi. "Reason of State" diupayakan dalam kerangka hubungan kerjasama (kooperatif) dan kolaboratif.;Kerjasama dan Persaingan;Geo-ekonomik dan End of empire

Sumber: Derrived from Global Transformations; Politic, Economic and Culture, David Held and Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton, Polity Press, UK, 1999.

Proses pergeseran tatanan politik dunia baru sebagaimana yang tersebut di atas, akan menopang struktur ekonomi global, dengan menyiapkan infrastruktur aliran dan lalu lintas modal baik langsung maupun tidak langsung. Aturan main internasional sebagai hasil dari kebijakan lembaga-lembaga politik dan ekonomi internasional seperti, PBB, IMF, world Bank, WTO dll, juga akan mempengaruhi Indonesia untuk tetap bisa *survive* didalamnya. Pertumbuhan negara, kemampuan negara meningkatkan pendapatan, mengatasi kemiskinan dan menguranggi pengangguran akan sangat tergantung kondisi dan tatanan ekonomi internasional. Tak terkecuali adalah lalu lintas modal dalam negara, karena kesemuannya dikemas dalam hukum kosmopolitan yang namanya mekanisme pasar, yang menghadapkan individu , negara dengan pasar.

Perekonomian global akan sangat ditentukan juga oleh negara-negara adi kuasa yang secara kemampuan memiliki kelebihan-kelebihan struktur ekonomi, seperti Cina, AS, Inggris, Swedia, kanada dll. Kemampuan untuk mengsuplay kebutuhan-kebutuhan negara di dunia, akan memunculkan pemenang-pemenang ekonomi, karena hegemoni ekonomi global akan menentukan gaya hidup borjuis, hiperbalis dengan tingkat konsumerisme yang tinggi di masyarakat, sehingga akan mengakibatkan tingkat ketergantungan penduduk dan negara di dunia ketiga akan semakin tinggi terhadap negara-negara suplayer, tak terkecuali Indonesia. Hal ini akan semakin membuat keberadaan kemiskinan yang meningkat di negara-negara dunia ketiga dan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi.

Review: Paradigma Berbasis Kenyataan

Membangun paradigma gerakan memang sesulit membaca kenyataan yang semestinya menjadi pijakan paradigma itu. Gerakan yang dibangun tidak diatas landasan kenyataan hanya akan menjadi struktur apalagi peradaban. Paradigma yang baik adalah paradigma yang mampu menjadikan sejarah sebagai bahan penyusun yang dipadukan dengan kenyataan hari ini. Kenapa sejarah menjadi penting dalam penyusunan paradigma gerakan? Sebagaimana diketahui bahwa sejarah itu menyimpan masa lalu yang telah menyusun masa kini dan masa depan. Jadi, dengan mengkombinasikan sejarah dengan real-life hari ini, kita akan mampu membaca kenyataan secara benar sehingga kita tidak akan terjebak dalam kenyataan mediatik yang manipulatif dan menyesatkan.

Dengan selalu berangkat dari kenyataan real, kita akan mampu menangkap struktur apa yang saat ini sedang bergerak dan geraka yang kita jalankan akan mampu memutus roda-gila (free-wheel) peradaban yang hegemonik. Selama ini, nalar mainstrem yang digunakan dalam penyusunan paradigma di PMII adalah nalar yang berangkat dari asumsi yang belum tentu terkait dengan kenyataan yang sehari-hari terjadi. Jadi, konsep ideal (logos) itu dianggap lebih penting dan ideal dari pada kenyataan.

a) Belajar Dari Sejarah Gerakan Mahasiswa

Realitas politik memang mengatakan independensi perguruan tinggi yang notabene adalah basis pendidikan nasional, sehingga banyak harapan akan adanya pemikiran-pemikiran baru tentang ke-Indonesiaan yang dihasilkan dari institusi ini. Selain civitas akademika yang merepresentasikan kelompok intelektual, mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan gagasan dan ide-ide ke-Indonesiaan, dengan beragam aktualisasi. Selain sebagai kelompok intelektual, ternyata dinamika perpolitikan negara juga cukup signifikan untuk mengerakkan mahasiswa menjadi satu kekuatan gerakan ekstra parlementer sebagai salah satu pilihan aktualisasinya. Melalui peran ini, mahasiswa tentunya ingin mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi politiknya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, yang kesemuanya itu dibingkai dalam kerangka menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat dan atas nama demokrasi, yang mencoba untuk berbareng bergerak bersama rakyat, sehingga akan menjadi satu gerakan *people power* yang masiff dan progresif. Cita-cita luhur para mahasiswa Indonesia, ternyata hanya menjadi utopi, karena gerakan mahasiswa Indonesia hanya menjadi alat dari kelompok-kelompok kepentingan yang mengatasnamakan rakyat. Hal ini tentunya didasari pada beberapa fakta dari proses sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia. *Pertama,* gerakan mahasiswa tahun 1945-1966, mahasiswa bangkit karena melihat kondisi negara yang sedang mengalami kegoncangan sistem politik nasional yang selalu mengalami perubahan bentuk pemerintahan, mulai dari RIS, Demokrasi Terpimpin dan kembali lagi ke Republik, yang disebabkan oleh lemahnya posisi negara atas rakyatnya. Sebagaiman ditulis Fachri Aly “Kondisi ini diperlihatkan dengan gejala kemiskinan massal di perkotaan ataupun di daerah pedesaan, hancurnya sarana dan prasarana ekonomi sehingga menyebabkan kehancuran ekonomi dan tingginya tingkat utang serta rusaknya atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana transportasi, komunikasi dan modernisasi”(Fachry Ali : 1985).

Kekuatan mahasiswa memang mampu mengulingkan kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966, tapi perlu diingat bahwa kekuatan mahasiswa tidak muncul dengan sendirinya, Badan Kerja Sama Pemuda Militer yang terbentuk tahun 1957, adalah bentuk infiltrasi politik ABRI, yang waktu itu itu mulai menunjukkan sifat kohesinya yang kuat dalam kehidupan politik, sebagai respon atas pertentangan ideologi, sehingga melirik mahasiswa sebagai kelompok independen untuk menjadi mitra. Hasil perjuangan mahasiswa telah mampu menaikkan Jenderal Soeharto untuk menduduki kursi RI-1, justru mahasiswa yang kritis atas situasi perpolitikan negara harus berhadapan dengan strategi de-politisasi oleh pemerintah berkuasa, karena Presiden Soeharto lebih tertarik untuk berkoalisi dengan intelektual dan tekhnokrat murni yang selama ini tidak pernah concern dengan persoalan politik.

Kedua, gerakan mahasiswa tahun 1974/1975, juga sempat terprofokasi oleh isu-isu anti Jepang sehingga pada tanggal 15 Januari 1975 yang kemudian di kenal dengan Malari, terjadi pembakaran produk-produk Jepang di Indonesia, padahal ini tidak lebih akibat dari pertarungan untuk memperebutkan pasar antara AS dan Jepang. Gerakan yang kemudian dijawab oleh pemerintah dengan dikeluarkannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). *Ketiga,* gerakan Mahasiswa tahun 1998-pun tidak jauh beda. Mahasiswa terprovokasi oleh isu-isu yang di buat oleh pihak luar, meskipun gelombang aksi terjadi di seluruh penjuru Indonesia, tetapi yang lebih signifikan untuk mendorong pemerintah Soeharto mundur adalah fluktuatifnya kurs rupiah atas dollar AS dan berhentinya pasar modal dalam negeri, sebagai respon atas kekuasaan Soeharto berlebihan yang hanya berorientasi membangun istana ekonomi keluarga dan kroni, sehingga menutup peluang investasi pengusaha-pengusaha asing khususnya AS dan mengamcam kepentinagn internasional AS. Situasi pemerintahan yang seperti ini, sehingga memunculkan isu-isu populis yang kemudian terkenal dengan 6 visi reformasi (Adili Soeharto, Cabut Dwi Fungsi ABRI, Hapus KKN, Tegakkan Supremasi Hukum, Otonomi Daerah dan Amandemen UUD`1945) yang entah dari mana datangnya, namun tiba-tiba mengema dan menjadi simbul perlawanan yang disuarakan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Momentum gerakan mahasiswa yang kemudian dimanfaatkan oleh elit tertentu. ”Gerakan reformasi ini telah dimanipulasi para elit politik, baik elit politik yang lama maupun yang baru, yang masih berambisi meraih kekuasaan bagi diri dan kelompoknya dengan cara saling kompromi diantaranya lewat pemilu yang dilaksanakan tahun 1999” (Meluruskan Arah Perjuangan Reformasi Dan Merajut kembali Merah-Putih Yang Terkoyak: Iluni UI). Akankah kita para mahasiswa sekarang kembali akan menjadi alat dan terprovokasi dengan isu-isu populis tertentu yang ternyata hanya menguntungkan kelompok tertentu dan jauh dari kepentingan riil masyarakat ?

b) Gerakan Moral Mahasiswa

Terlepas dari sejarah panjang perjalanan gerakan mahasiswa di Indonesia, kekuatan mahasiswa hanya mampu menjadi kelompok *preasure group* yang ternyata di dorong oleh kepentingan kelompok tertentu. Pada sisi lain mahasiswa tidak mampu memberikan satu rumusan konseptual dan solusi atas

berbagai problematika transisi. Kegagalan-kegagalan yang tetap harus kita akui sebagai bentuk kelemahan kita bersama, yang salah satunya disebabkan keterjebakan kita dalam stigma gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral.

Sejarah panjang mengenai peran gerakan mahasiswa di Indonesia, memang telah mengoreskan tinta sejarah dengan menyebut gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral. Hal ini tentunya dilatar belakangi dengan keberhasilan gerakan mahasiswa menumbangkan rezim Soekarno tahun 1966, Soeharto tahun 1998 dan Gus Dur tahun 2001, yang konon katanya digerakkan oleh berhentainya proses demokratisasi, penegakan HAM, tidak berjalannya supremasi sipil dan supremasi hukum serta lain-lainnya. Latar belakang inilah yang kemudian cukup signifikan mempengaruhi kemunculan stigma gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral yang katanya akan selalu menyuarakan kepentingan rakyat banyak dengan idiom-idiom demokrasi, HAM, supremasi sipil dan lain-lain.

Meminjam istilah Ben Anderson dalam bukunya Revolusi Pemuda, mengenai peran pemuda yang sangat besar dalam menentukan masa depan sebuah bangsa. Dimana dalam peran ini mahasiswa menjadi bagian didalamnya. Selain itu adanya pepatah Arab yang berbunyi "*Syubhanul yaum rijaalul ghoddi (Pemuda Sekarang Adalah pemimpin masa depan)".* Kedua hal tersebut di atas paling tidak menjadi landasan epistimologi yang akan semakin menguatkan stigma gerakan mahasiswa sebagai gerakan moral, sebagaimana kuatnya memori kolektif masyarakat yang menyebut bahwa pemuda Indonesia pada tahun 1908 telah mempunyai andil yang cukup besar terhadap bangsa Indonesia dengan keberahasilannya melaksanakan sumpah pemuda, dimana masyarakat tidak pernah paham mengenai kenyataan empiris tentang kondisi dan situasi sosial-politik dan ekonomi dalam negeri serta tren politik global pada waktu itu.

Budiaman Sudjatmiko pada tahun 2000 dalam tulisannya Demoralisasi Gerakan Mahasiswa menyebutkan bahwa yang disebut dengan demoralisasi gerakan mahasiswa diartikannya dengan surutnya atau tidak adanya kekompakkan berbagai elemen gerakan mahasiswa pada waktu itu dalam merespon isu-isu yang berkembang saat itu, yang menarik pengertian dari pemengalan kata demoralisasi, dengan mengartikan bahwa *de-* yang artinya tidak atau mengecil dan *moral* yang diartikan respon mahasiswa yang mengunakan idiom-idiom demokratisasi, HAM, supremasi hukum dan lain-lain.

Gerakan mahasiswa tidak pernah mengunakan gerakan moral sebagai pilihan bentuk aktualisasinya, tetapi yang dilakukannya adalah gerakan politik. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, *pertama,* gerakan mahasiswa dalam orientasinya yang ingin melakukan perubahan, selalu mengunakan ukuran perubahan struktur atau lebih spesifik perubahan kebijakan sebagai ukuran keberhasilannya. Fenomena tentang perubahan struktur atau perubahan kebijakan yang terjadi di Indonesia selalu dihasilkan dari proses gerakan politik bukan gerakan moral. *Kedua,* stigma gerakan moral tidak lain adalah bentuk justifikasi dari kebenaran akademis yang kelahirannya dilatar belakangi karena independensi perguruan tinggi, yang berimplikasi pada cara pandang bahwa gerakan mahasiswa adalah gerakan yang masih murni dan independen yang sangat jauh dari kepentingan pragmatis dan kepentingan politik tertentu. Padahal realitas empiriknya gerakan mahasiswa banyak mendapatkan donor dari partai politik, pemerintah, founding internasional dan lain-lain. *Ketiga,* gerakan mahasiswa yang mengklaim dirinya menyuarakan aspirasi rakyat dengan mengunakan idiom demokrasi, HAM, supremasi sipil, supremasi hukum dan yang lainnya, telah menjadikan idiom-idiom tersebut sebagai standar moral gerakan. Standar moral yang cenderung dikotomis karena pada realitasnya, moral kemudian kemudian menjadi alat untuk mengukuhkan eksistensi gerakan mahasiswa dan menyerang lawan (baca : negara) yang pada sisi lain negara yang dalam perwujudannya sebagai bentuk dari konsep trias politika (eksekuti, legeslatif dan yudikatif) juga mengunakan idiom yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi kemudian mengapa gerakan structural negara dalam kontes yang sama tidak disebut sebagai gerakan moral tetapi lebih cenderung disebut gerakan politik yang identik dengan relasi kuasa. *Keempat,* moral dalam gerakan mahasiswa sebenarnya hanya menyetuh pada aspek psikologi, emosional dan romantisme, bukan moral yang menjadi élan dan subtansi dari gerakan, karena kebangkitan gerakan mahasiswa lebih signifikan dipengaruhi faktror eksternal yang lebih massif. Contohnya adalah terbentuknya Badan Kerja Sama Pemuda-Militer (BKSPM) yang terbentuk tahun 1957, adalah bentuk infiltrasi politik ABRI. dan gerakan mahasiswa tahun 1974/1975 yang melakukan pembakaran produk-produk Jepang di Indonesia, yang terkenal dengan Malari, sebenarnya hanyalah akibat dari pertarungan antara AS dan Jepang untuk memperebutkan pasar di Indonesia.

Untuk itu, refleksi bersama atas internal gerakan mahasiswa yang katanya sebagai tulang punggung masa depan bangsa harus segera mungkin dilakukan. Keberadaan moral dalam gerakan mahasiswa tidak lain adalah bentuk pelarian dari individu seorang mahasiswa yang tidak mampu membebaskan diri dari belenggu moral dalam konteks pribadi, yang kemudian membawanya dalam komunitas gerakan mahasiswa. Tidak bebasnya belenggu disini meliputi, *Pertama,* belenggu moral dalam prespektif teologis yang mengikat relasi manusia dengan Tuhan dalam menjalankan hukum agama dan kewajiban sebagai seorang hamba-Nya dimana terdapat penilaian atas perilaku individu yang kemudian disebut dengan dosa atau tidak dosa dan halal atau haram. *Kedua,* belenggu dalam perspektif norma yang mengikat hubungan antar individu dan masyarakat, dimana terdapat penilaian masyarakat terhadap perilaku individu yang kemudian disebut bermoral atau amoral karena perilakunya yang keluar dari batasan-batasan norma, etika dan adat yang berlaku di masyarakat.

Dari penjelasan di atas, maka moral sebenarnya adalah system nilai yang berlaku universal bagi individu bukan komunitas (baca gerakan) dan menjadi alat mekanisme kontrol atas perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c) Belajar Dari Sejarah PMII

Sebagai sebuah organisasi yang telah berusia hampir setengah abad, semestinya PMII telah mencapai periode kamatangan, sejak didirikan pada 17 April 1960 sebagai bagian integral dari organisasi NU, PMII memang berfungsi sebagai sayap mahsiswa NU di samping GP Ansor di sayap pemuda, Muslimat di sayap ibu-ibu, Fatayat di sayap remaja putri dan IPNU/IPPNU di sayap pelajar serta Banom-Banom lain, maka komitmen PMII kapada jam`iyah NU adalah suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka keterlibatan PMII di masa-masa awal berdirinya sebagai penyokong Partai NU adalah sebuah keharusan. Pada tahun 1974 ketika NU telah melakukan fusi politik dengan partai-partai Islam lain, dalam PPP, maka deklarasi independensi di Munarjati Malang juga merupakan pilihan sejarah yang sangat penting. Dengan tegas PMII menyatakan independen dari NU karena PMII memang harus menegaskan visinya bukan sebagai bagian partai politik.

Demikian pula, deklarasi interdependensi pada dekade 1980-an, yang kembali menegaskan ke saling tergantungan antara PMII-NU adalah bukti bahwa PMII tidak akan dapat meninggalkan komitmennya terhadap jam`iyah NU. Pilihan-pilihan dependensi-independensi-interdependensi ini sebenarnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Perdebatan-perdebatan selama tiga dekade awal PMII tampaknya hanya berkisar di sekitar pilihan-pilihan ini belaka. Ini berakibat pada terbengkalainya rancangan-rancangan kedepan yang berada di luar batas-batas NU. Ini tentunya kontra produktif terhadap PMII sebagai sebuah gerakan yang mengandaikan adanya perubahan sistem dan struktur dalam jangka panjang, karena tidak akan perubahan dapat bergerak keluar dari batas-batas kulturalnya. Ini yang kemudian disebut sebagai jebakan primodialisme dalam gerakan, karena PMII tidak akan dapat pernah berperan sebagai agen transformasi kedalam NU yang nyata-nyata adalah komunitas dari mana ia lahir, alih-alih menjadi bagian dari kemapanan NU yang membekukan.

Dengan demikian komitmen PMII terhadap NU adalah komitmen yang mengambil bentuknya dalam clas of strugle yang akan mengawal visi dan misi NU kedepan disamping transformasi internal tersebut. Perdebatan yang lebih produktif baru muncul dekade 1990-an seiring dengan semakin luasnya pengaruh pemikiran Gus Dur di kalangan muda NU, terutama PMII. Figuritas Gus Dur sebagai tokoh demokrasi dan pengusung civil society yang kritikal terhadap pemerintahan rezim Soeharto sangat berpengaruh dalam pembentukan pola fikir aktifis-aktifis PMII.

Yang perlu di catat adalah bahwa secara paradigmatik kepengurusan sahabat A. Muhaimin Iskandar pernah mensosialisasikan (paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran) yang implikasinya sangat luas terhadap pola gerakan PMII hampir diseluruh Indonesia. Dipandu oleh gagasan *free market of ideas* periode ini menyaksikan sebuah massive enlightenment di tubuh PMII. Selama setidak-tidaknya, paruh kedua dekade 1990-an PMII dengan gigih memperjuangkan demokrasi dan civil society sebagai nilai-nilai pembebasan. Dari masa inilah muncul optimisme baru tentang gairah gerakan di PMII. Selama ini, kepengurusan di PMII dan organisasi-organisasi mahasiswa ekstra lainnya semisal HMI, IMM, PMKRI, GMNI dan GMKI adalah sebagai batu loncatan untuk menduduki kursi-kursi di KNPI yang didukung oleh pemerintah. Nyata-nyatanya hanya organisasi-organisasi pro pemerintah yang pada akhirnya mendapatkan kursi di KNPI dan selanjutnya kursi di DPR/MPR RI. Organisasi-organisasi kritis tidak akan mendapatkan tempat dalam kultur politik orde baru yang sangat nepotis. Artinya, antrian menuju kursi kekuasaan tidak akan pernah sampai kecuali dengan melalui setrategi lain yang berada di luar mainstream. Dan PMII melakukan itu tak kala HMI menjadi rival utamanya selama ini justru sedang bermesraan dengan rezim orde baru melalui politik ijo royo-royo dimana lebih dari 300 orang anggota MPR RI adalah alumni HMI.

Akhirnya, PMII bersama organ-organ mahasiswa forum Cipayung minus HMI mendirikan sebuah forum bernama Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) sebagai bentuk keprihatinan atas mentalnya politik aliran di Indonesia yang ditandai dengan semakin massifnya kelompok-kelompok yang tergabung di dalam ICMI, mengusung bendera representasi Islam yang mayoritas di dalam kekuasaaan. Dengan dukungan pemerintah Soeharto, ICMI melakukan ekspansi ke berbagai lini dengan mengusung isu-isu Islamisasi, baik di sektor ekonomi dengan mendirikan Bank Muamalat, di media dengan mendirikan Republika yang diasumsikan sebagai koran Islam, maupun di permodalan dengan mendirikan BPR-BPR syariah. Disektor ekonomi, isu yang diusung adalah kemandirian ekonomi umat dan anti cina, sebagai kelompok yang dianggap menghancurkan ekonomi Indonesia.

Klimaks dari resistensi terhadap pemerintahan rezim oede baru adalah gerakan mahasiswa di penghujung dekade 1990-an dimana PMII berdiri di barisan paling depan dalam menghancurkan rezim orde baru, sebagaimana NU juga berdiri di barisan paling depan dalam menganyang PKI pada paruh ke-dua tahun 1960-an. Paradigma arus balik masyarakat pingiran yang di pandu oleh gagasan *free market of ideas* tersebut berhasil menciptakan kader-kader PMII yang kritis dan memiliki militansi gerakan yang memadai dan sikap yang terbuka. Keterbukaan itu ditandai dengan luasnya pergaulan aktifis-aktifis PMII dengan kelompok-kelompok minoritas yang selama ini selalu terkucilkan. Dengan bekal pemahaman teologis yang inklusif para kader mampu melampaui sekat-sekat agama yang selama ini di pelihara demi kelanggengan

kekuasaan. Hampir di semua level, komunikasi (baca: silaturahmi) kader-kader PMII dengan kalangan katolik, misalnya berjalan dengan natural dan tidak di buat-buat. Sampai sekarang pergaulan lintas agama ini telah jauh melampaui gagasan dialog agama atau konsep masyarakat multi kultur yang didukung kuat oleh *funding agency*. Jika orang-orang masih ramai berbicara tentang teologi inklusif melalui dialog-dialog formal, maka kader-kader PMII telah jauh berinteraksi dan secara timbal balik meresap di dalam keberagamaan itu sendiri. Singkatnya, *don`t teach me how to act inclusively since i`m coming from such a society!*

Namun, diluar keberhasilan paradigma arus balik FMN (forum mahasiswa nahdliyin) tersebut, selalu ada yang terasa belum selesai dibangun di PMII, indikasi yang paling jelas adalah ketika KH Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI yang ke-4 pada november 1999. Secara serta merta para aktifis PMII (dan NU dan juga aktifis-aktifis civil society pada umumnya) mengalami kebingungan apakah perjuangan civil society harus berakhir ketika Gus Dur yang selama ini menjadi tokoh dan simbul perjuangan civil society di Indonesia telah naik ketampuk kekuasan. Nampaknya sikap para kader PMII terbelah dua pada saat itu. Ada yang menghendaki agar PMII tetap bergerak di jalur kultural dan ada pula yang menghendaki agar PMII harus membela Gus Dur. Dari sinilah kemudian mulai muncul dikotomi NU kultural dan NU struktural, yang secara otomatis juga terjadi di PMII. PMII kultural dan PMII struktural, yang kedua-duanya tidak saling bertemu dan cenderung saling menyalahkan. Sampai sekarang, dikotomi itu masih sedikit terasa sekalipun telah kehilangan relevansinya semenjak Gus Dur di jatuhkan oleh sebuah konspirasi politik maha tinggi.

Artinya paradigma arus balik telah patah disini. Paradigma ini kemudian di ganti dengan paradigma Kritis-Transformatif yang nalar penyusunannya tidak juah beda dengan nalar penyusunan paradigma arus balik. Dengan kata lain, paradigma ini melanjutkan kagagapan PMII dalam bersinggungan dengan kekuasan. Setidak-tidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskan patahnya ke dua paradigma ini. ***Pertama,*** keduanya di desain hanya untuk melakukan resistensi terhadap otoritarianisme tanpa kompleksitas aktor di level nasional yang selalu terkait dengan perubahan di tingkat global dan siklus politik-ekonomi yang terjadi. Sebagai contoh maraknya LSM pro demokrasi dan gencarnya isu anti militerisme pada dekade 1990-an adalah akibat dari runtuhnya Uni Soviet sebagai rival USA dalam kompetisi hegemoni dunia. Secara siklis dapat dijelaskan sebagai berikut, Soeharto berhasil merebut tampuk kekuasaan dari Presiden Soeharto pada tahun 1966 melalui supersemar dengan dukungan penuh dari politik luar negeri AS yang sedang gencar-gencarnya melakukan *containment* terhadap komunisme. Saat itu adalah sedang panas-panasnya persaingan antara blok barat yang kapitalis dan blok timur yang komunis. Posisi Indonesia demikian pentingnya pada waktu itu karena seandainya Indonesia jatuh ketangan komunisme maka negara-negara yang berada disebelah utara Indonesia seperti Malaysia, Thailand, Filipina dll secara otomatis akan jatuh. Maka, Indonesia harus di bebaskan dari hantu komunisme (*le spectre de la communisme*)

Dan Soeharto adalah seorang jenderal tentara yang dapat menjalankan misi AS tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, komunisme jatuh pada tahun 1989 dan ini berakibat pada merosotnya dukungan AS kepada Soeharto. Dengan kata lain Soeharto harus di jatuhkan. Dari saat inilah kemudian AS mulai mendorong demokratisasi di Indonesia melalui Isu-isu HAM dan civil society, melalui berbagai LSM yang danai melalui *funding agency*, pada sisi lain Soehartopun menjalin kekuatan dengan kelompok-kelompok Islam yang justru selama ini di marginalkannya. Puncaknya adalah berdirinya ICMI pada awal dekade 1990-an, sebagai sayap politik baru Soeharto pasca hilangnya dukungan AS kepada pemerintahannya. Dari sini, kemudian juga terjadi pembelahan, mereka yang bergerak dengan isu HAM dan civil society melawan rezim otoriter Soeharto yang mulai didukung oleh organisasi-organisasi Islam politik dibawah payung ICMI. Dan PMII terlibat di sini di pihak pertama sebagai pengusung isu demokrasi dan civil society. Sebenarnya, jika para aktor politik Indonesia tidak terjebak pada peristiwa-peristiwa politik lokal dan mencoba sedikit melihat keluar, hampir di pastikan Soeharto dapat di jatuhkan tanpa harus menunggu terlalu lama.

Kedua, kedua paradigma ini hanya menjadi bunyi-bunyian yang tidak pernah secara real menjadi habitus atau laku di PMII. Akibatnya, bentuk resistensi yang muncul adalah resisten tanpa tujuan, yang penting melawan. Sehingga ketika perlawanan itu berhasil menjatuhkan Soeharto terlepas ada aktor utama yang bermain, PMII dan organ-organ pro demokrasi lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Dari sini, dapat di baca bahwa paradigma itu tidak disertai dengan semacam *contingency plan* yang dapat menyelamatkan organisasi dalam situasi apapun.

Ketiga, pilihan paradigma ini tidak didorong oleh setrategi (*not strategy-driven paradigm*) sehingga paradigmanya di anggap sebagai suatu yang baku. Mustinya, ketika medan pertempurannya telah berganti, maka strateginyapun harus berbeda. Ketika medan pertempuran melawan otoritarianisme orde baru telah di kalahkan, PMII masih berpikir normatif dengan mempertahankan nalar paradigma lama. Ini membuktikan bahwa PMII tidak berpikir strategis.

Berangkat dari berbagai pengalaman di atas, maka sudah saatnya kita berpikir relistis atas kondisi bangsa kita saat ini. Membangun Indonesia yang benar-benar demokratis dengan menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para founding *father* kita dalam UUD `1945. Bagimanapun demokrasi adalah gagasan yang paling mengairahkan yang kemunculannya sejak abad XX, sehingga banyak negara-negara di belahan dunia berlomba untuk bisa mengkalin dirinya sebagai negara yang demokratis. Kompleknya persoalan-persoalan bangsa kita, mulai dari kemiskinan, beban hutang, KKN, ancaman disintegarsi, penegakan HAM, dan lain-lain menjadi tantangan Indonesia yang harus segera

diselesaikan. Krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997, memang telah menghancurkan struktur ekonomi dan politik kita. Namun sebagai manusia Indonesia memang kita dilahirkan atas dasar naluri individual dan kebebasan, tapi tidak dilahirkan dengan pengetahuan yang membuat struktur ekonomi dan politik menjadi kebebasan yang akan dinikmati secara Cuma-Cuma, namun pilihan untuk berdemokrasi harus menjadi implementatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi ciri dalam berinteraksi antar warga negara. Sebagaimana disebut Karim Suryadi, "Menata demokrasi belum cukup hanya dengan mendirikan kelembagaan demokrasi, demokrasi yang sehat untuk sebagian besar bergantung pada pengembangan budaya warga negara yang demokratis *(democratic civic culture)*, budaya dalam artian perilaku, praktek-praktek dan norma-norma yang mencerminkan kemampuan rakyat untuk mengatur diri mereka sendiri, terlebih dalam hal menyikapi konflik, melakukan kompromi dan konsensus". (Karim Suryadi:1999)

Untuk itu diperlukan yang namanya pendidikan demokrasi kepada warga negara dan harusnya menjadi satu perhatian mendasar bagi pemerintah dan partai politik sebagai infrastruktur politik negara. Hal ini didasari pada kepentingan bersama yaitu, pengakuan dan penghormatan atas hak asasi, harkat dan martabat individu diakui, penegakan aturan hukum, menjalankan kewajiban bersama dan menempatkan kepentingan umum menjadi kepedulian bersama. Untuk membangun satu struktur ekonomi dan politik Indonesia kedepan yang akan mengerakkan berjalannya proses demokratisasi, kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal lainnya.

Suatu persoalan kompleks yang selama ini tidak pernah muncul dalam pikiran kita bersama. Sebagaimana disebut Jacob Oetama,"ekonomi pasar dalam bentuknya yang liar justru berlawanan dengan visi, orientasi dan nilai-nilai Indonesia, sangat besar bahkan sangat menentukan peranan kepemimpinan dalam pemerintahan dan masyarakat, dalam lembaga-lembaga pemrintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga ekonomi masyarakat seperti usaha-usaha swasta" (Jacob Oetama : 2001). Berbagai hal ini harusnya bisa diantisipasi sejak dulu jika pemerintah waktu itu tegas melaksanakan pendekatan integralistik yang berbasiskan pada beragamnya entitas etnik dalam konteks ke-Indonesiaan. Sebagai mana disebut Dr.Ir.H. Bunyamin Ranto, SE, "secara sederhana, makna konsep integralistik dalam konteks ke-Indonesiaan adalah sebuah konsep yang senantiasa mengacu kepada azas keterpaduan yang dilandaskan pada prinsip-prinsip keserasian, keselarasan dan keseimbangan" (Dr.Ir.H. Bunyamin Ranto, SE: 1995)

Selama ini, nalar penyusunan gerakan di Indonesia setelah Tan Malaka lebih bersifat akademik. Artinya diawali dengan berbagai konsep ideal tentang masyarakat atau negara yang berasal dari barat. Konsep-konsep yang dipakai dikalangan akademis kita semuanya berbau liberalisme, sehingga secara akademis tidak ada kemungkinan untuk meloloskan diri dari arus liberalisme. Semenjak dari pikiran, gerakan itu memang tidak akan pernah berhasil. Yang dibayang kan disini, setiap konsep itu berlaku secara universal tanpa mempertimbangkan kenyataan yang menjadi setting aplikasi konsep tersebut. Contoh yang sering dikemukan tentang tidak nyambungnya antara konsep ideal-barat dengan kenyataan Indonesia adalah konsep-konsep politik-ekonomi yang dibawa oleh para elit politik dan tokoh gerakan Indonesia semenjak kemerdekaan sampai sekarang ini. Apada awal-awal kemerdekaan isu "revolusi" menjadi semacam isu tunggal, dengan asumsi revolusi ala Mark yang mengandaikan adanya pertentangan kelas-kelas sosial. Soekarno yang dengan gigih mengusung isu revolusi ini justru akhirnya gagal dan terguling dengan kekuasaanya. Demikian pula dengan isu " pembangunan" yang diusung oleh rezim orde baru, yang diasumsikan bahwa setelah mengikuti beberapa tahapan yang telah digariskan Indonesia akan dapat melakukan tinggal landas menjadi negara industri maju.

Konsep-konsep revolusi dan pembangunan yang di negeri asalnya berjalan dengan baik, justru tidak berjalan di Indonesia. Apa yang salah ? Konsepnyakah yang memang mempunyai keterbatasan kontekstual ataukah memang kondisinya yang salah sehingga konsep-konsep ideal itu tidak dapat bersanding dengan kenyataan real yang setiap hari di jalani oleh masyarakat. Atau belum lama ini muncul gagasan tentang ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat Indonesia pribumi. Anehnya isu kemudian malah menjadi praksis bukan lagi ekonomi karakyatannya, tetapi isu anti cina yang selama ini di anggap menjadi biang kerok hancurnya ekonomi Indonesia. Isu ekonomi kerakyatan berubah menjadi isu rasial yang sangat merugikan Indonesia karena etnik Cinalah yang secara real memegang jalur-jalur distribusi ekonomi sampai level yang paling bawah. Jika isu anti Cina yang di usung oleh beberapa gelintir elit pribumi yang dikompromi oleh rezim hegemoni dunia tersebut menjadi kenyataan, maka yang paling di rugikan adalah masyarakat Indonesia sendiri.

Dari sini, kita melihat bahwa di kepala para elit kita sekalipun belum terbentuk satu cara pandang yang memadai dalam membaca kenyataan Indonesia dan kemudian mencoba mengunakan hasil bacaan tersebut sebagai pijakan untuk menjadikan Indonesia naik kelas. Dengan kata lain persoalan sulitnya membangun paradigma berbasis kenyataan di PMII itu pararel dengan kesulitan membuat agenda nasional yang berangkat dari kenyataan Indonesia. Sehingga, apabila PMII merintis sebuah paradigma semacam itu, sekalipun untuk sementara akan tersisih dari pergaulan mainstream, maka suatu hari nanti sejarah akan mencatat PMII sebagai gerakan sosial yang menjadi pelopor Indonesia baru yang benar-benar merdeka. Memang, saat ini orang selalu berpikir Instan dan hanya mau melihat hasil tanpa mau melihat bagaimana sebuah proses terjadi untuk mewujudkan utopia. Sehinga benturan pertama bagi sebuah paradigma untuk

berjalan adalah dampak jangka pendeknya, atau dengan kata lain problem survaival menuntut kita untuk meningalkan pikiran-pikiran panjang kita. Gerakan harus mampu berkayuh di antara gelombang panjang dan gelombang pendek, agar gelombang panjang tetap terkejar dan gelombang pendek tidak cukup kuat untuk menghancurkan biduk kita yang rapuh. Bagaimanapun untuk membangun gerakan kita harus mendahulukan realitas ketimbang logos.

Strategi Bergerak Dengan Paradigma Berbasis Kenyataan

Akhir abad XX dan awal abad XXI ini telah menyaksikan maraknya gerakan anti globalisasi yang telah mengharu-biru Seattle sampai Genoa dan sekarang mulai menyebar kenegara-negara dunia ke tiga. Gerakan seperti ini akan mengalami kegagalan dalam situasi seperti ini karena nalar anti globalisasi sama dengan nalar globalisasi. Tidak ada ruang setrategi yang tersisa dengan gerakan yang demikian frontral. Dinegara-negara maju gerakan semacam ini dimungkinkan karena di topang oleh kesadaran setrategis yang mendalam, sementara di negara-negara peryphyery seperti Indonesia gerakan ini berubah menjadi semacam gerakan konsorsium LSM anti globalisasi yang mengajukan diri untuk mendapatkan kucuran dari funding agency sebagai kepanjangan tangan langsung dari suatau pemerintah. Artinya gerakan anti globalisasi di Indonesia menjadi lelucon bahan tertawaan di siang hari.

Atau katakanlah gerakan itu benar-benar didasari oleh suatu keyakinan bahwa globalisasi telah membunuh ekonomi masyarakat kecil, tetapi karena gerakan itu tidak mempertaruhkan sebuah skenario pasca perlawanan (skenario sukses) maka gerakan itu akan berubah bentuk menjadi heroisme individu-individu belaka, yang justru dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk maraih keuntungan dari gerakan ini, lantas apakah gerakan yang tepat adalah gerakan pro globalisasi atau reserve ?

Gerakan pro globalisasi tanpa reserve berati menghanyutkan diri dalam arus globalisasi tanpa pengetahuan yang cukup bagaimana harus menepi, karena sekali tersedot arus maka akan sulit untuk kembali. Bentuknya yang paling kongkrit adalah menjadi agen kepentingan-kepentingan global baik pada aras wacana maupun pada aras operasi khusus mereka. Hanyut dalam arus neoliberalisme berati menjadikan uang sebagai tanah air dan bangsa, karena ideologi pasar bebas tidak mengenal batas-batas teretori negara-bangsa, yang dikenal adalah hambatan-hambatan tarif, proteksi, subsidi, nasionalisasi. Itulah batas-batas negara-pasar (market-state).

Gerakan yang berangkat dari kedua paradigma di atas, yaitu gerapan pro dan anti globalisasi akan mengalami kegagalan karena tidak mempertaruhkan sesuatu yang lebih besar dari pada proyek politik isu tunggal dan heroisme belaka. Atau gerakan ini memang tidak didesain untuk melakukan perubahan sistem dalam jangka panjang. Karena nalarnya yang mediatik (ukuran keberhasilannya di ukur dari coverage media terhadap aksi-aksinya) maka sangat jelas bahwa orientasi hanya bersifat jangka pendek. Gerakan-gerakan inilah yang didorong justru oleh struktur neoliberalisme karena gampang di patahkan dan di aborsi.

Mari kita mencoba melihat nalar masing-masing gerakan ini. Gerakan anti globalisasi (jika sungguh-sungguh) didominasi oleh nalar anti asing (xenophobia) yang melihat setiap orang luar yang masuk ke dalam wilayahnnya sebagai ancaman tanpa mencoba mengambil manfaat dari interaksi yang mungkin terjadi antara keduanya. Karena globalisasi berintikan pemain-pemain asing yang dilihat sebagai ancaman, maka untuk melawannya harus dengan gerakan anti globalisasi. Gerakan ini menafikkan interaksi dan komunikasi, pertukaran antara global structure dengan local structure. Nalar anti asing ini bermanfaat jika secara setrategis dapat digunakan untuk membangkitkan semangat dan kreatifitas internal berhadapan dengan global threat tadi. Tetapi dampak yang ditimbulkan oleh nalar semacam ini adalah isolasi diri dari pergaulan dunia tanpa mencoba untuk belajar dari keberhasilan negara-negara lain, walaupun tidak harus mengikuti jalan mereka.

Sementara nalar para pendukung buta globalisasi adalah nalar agent (baca : marsose) jika diletakkan dalam kondisi kerapuhan dan fragmentasi struktur lokal ini. Nalar ini bekerja sesuai dengan keinginan supplier dan produsennya, tidak mempunyai kesetiaan terhadap komunitas besar dari mana ia berasal dan menghanyutkan diri dalam hiruk-pikuk kepentingan sang juragan. Yang menarik di level praksis gerakan anti globalisasi akan dihadapkan dengan agen-agen ini. Jadi medan pertempuran kedua gerakan ini tetap di dalam kampung sendiri sehingga ketika pertempuran usai hanya menyisakan puing-puing sementara barang-barang berharga milik kampungnya telah di jarah oleh sang juragan.

Kedua model gerakan ini tidak memiliki contigensy plan karena memang tidak didesain untuk dapat survive, ini dapat terlihat dari jalur0jalur produksi-distribusi-warring position. Gerakan seharusnya ditujukan untuk kemajuan komunitas besar dari mana ia berasal. Kamajuan dalam pengertian naik-kelas dari komunitas yang tidak dapat berbuat apa-apamenjdi bersuara dan didengar oleh orang lain.Tentu naik-kelas disini berada pada level dunia Kerja-kerja gerakan adalah kerja-kerja sistem dunia (baca peradaban) sehingga para aktivis gerakan tidak terjebak dalam kenikmatan sesaat yang ditawarkan oleh sistem yang hendak di ubahnya.

Dalam situasi dan kondisi kuatnya penetrasi struktur global atas fragmentasi struktur lokal, maka setrategi gerakan yang paling dimungkinkan dan memiliki tingkat survival yang tinggi adalah gerakan yang mampu bermain di tengah-tengah tekanan ini. Dari sini gerakan ini setidaknya melakukan perebutan (warring position) di tiga front sekaligus, yaitu local front, global front dan internal-movement front. Karena itu setrategi yang harus di gunakan adalah multi level setrategy. Kita harus meninggalkan single setrategy yang

selama ini kita gunakan dengan dalih konsistensi gerakan. Jika bukan lagi *anti-systemic movement* ala Wallerstein, bukan juga *systemic movement* karena itu dapat terpeleset menjadi korban. Bukan *systemic movement* pun karena tidak ditujukan untuk memperkuat sistem yang berjalan, tetapi *non systemic movement* berjalan dalam sistem tersebut sambil menciptakan conditions of possibilities untuk membangun sistem yang sama sekali berbeda. Ini terkait erat dengan setrategy gerakan *multi-level* dalam *front* yang berbeda. Dengan demikian, ini meniscayakan *multi centers* yang saling memahami posisi masing-masing, dalam tataran tertentu memang diperlukan *central-planner.*

Gerakan di tiga front tersebut secara terpusat memerlukan kelenturan yang luar biasa, ini terkait denganh energi di ketiga front. Pada suatu ketika struktur global diperlukan untuk menghapuskan local structural constraints yang membahayakan gerakan. Demikian pula struktur lokal juga diperlukan untuk menghambat gerak maju struktur global tersebut. Diluar keduanya front dalam gerakan (internal-movement) menempati posisi yang paling penting dalam kontinuitas gerakan membangun sistem karena front ini adalah home-base bagi kedua yang lain. Justru energi yang diperoleh dari perebutan di front lokal dan global tersebut harus dipertaruhkan untuk memperkuat front ini. Disinilah hidup mati gerakan.

Ditingkat operasional paradigma ini dapat dimulai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Untuk front global dapat dimulai dengan membangun sebuah pusat kajian untuk pasar bebas, pusat kajian Cina dan lain sebagainya. Sementara untuk *front lokal* dapat dimulai dengan membangun kajian tentang kerja-sama antar pulau (*insular cooperation*) untuk membangun jalur-jalur konvensional patah. Pada gilirannya front dalam gerakan menyediakan mekanisme kaderisasi yang terus menerus menyediakan para pemain untuk mendidtribusikan disemua front. Sebagai *home-base* maka front ini harus *totally secured*, secara *akumulatif-sirkular*, gerakan ini akan memperbesar ruang pengaruhnya (*spare of influence*) sehingga berhasil membangun tata peradaban baru.

BAGIAN 2: MEMBACA SEJARAH GERAKAN MAHASISWA

Pergerakan Mahasiswa di Indonesia tidaklah terlepas dari sejarah panjang perjuangan merebut kembali kedaulatan bangsa. Berawal dari tahun 1908 berdirilah sebuah organisasi kepemudaan, organisasi yang dinamakan Budi Oetomo merupakan organisasi yang menghimpun segenap kekuatan serta potensi seorang pemuda untuk kemudian diarahkan kepada semangat nasionalisme untuk mengembalikan kedaulatan bangsa. Organisasi yang didirikan oleh sekelompok mahasiswa yang belajar di lembaga pendidikan STOVIA ini, merupakan wadah yang membentuk sikap kritis mahasiswa terhadap kolonialisme Belanda yang sudah sepatutnya dilawan dan sudah selayaknya pula rakyat dibebaskan dari segala bentuk pembodohan sertapenguasaan sumber daya alam yang telah dilakukan oleh penjajah Belanda terhadap bangsa Indonesia.

Pada tahun 1928 peringatan sumpah pemuda Indonesia, yang menjadi sebuah integritas perjuangan pemuda Indonesia, dengan semangat nasionalisme yang teramat tinggi melahirkan sumpah sekaligus janji yang menjadi bukti kecintaan pemuda terhadap bangsa Indonesia. Di tahun 1945 pun pemuda kembali membuktikan keberaniannya melalui peristiwa penculikan sekaligus pendesakkan kepada presiden Soekarno di Rengasdengklok, sebuah gebrakan pemuda untuk sebuah kemerdekaan Repulik Indonesia yang telah lama dicita-citakan masyarakat Indonesia.

Tidak hanya berhenti sampai kemerdekaan Indonesia semata, pergerakan mahasiswa Indonesia tetap berlanjut pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Pasca kemerdekaan, muncullah berbagai organisasi perherakan mahasiswa yang berawal dari organisasi mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selain organisasi tersebut dibentuklah Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang didirikan melalui kongres mahasiswa di Malang. Tidak hanya itu, pada waktu yang bersamaan terbentuk pula organisasi mahasiswa antara lain Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berhaluan pada ideologi Marhaenisme Soekarno, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (GAMSOS) yang lebih cenderung ke ideologi Sosialisme Marxist, dan Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang lebih berpandangan komunisme sehingga cenderung lebih dekat dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Berawal dari kemenangan PKI pada pemilu 1955, organisasi CGMI cenderung lebih terlihat dominan dibandingkan denga organisasi lainnya, namun justru menjadi cikal bakal perpecahan pergerakan mahasiswa pada saat itu. Hal ini terjdi karena kecenderungan CGMI terhadap PKI yang justru dipenuhi oleh berbagai kepentingan politik PKI. Organisasi CGMI yang menjadi boneka politik PKI pada akhirnya semakin menjadi-jadi, serangan yang dilakukan secara terus menerus terhadap organisasi mahasiswa lainnya yang secara ideology bertentangan dengan ideology mereka. Pada akhirnya organisasi mahasiswa yang terdiri dari HMI, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), PMKRI, PMII, Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI) sepakat untuk membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Dimana tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan.

Berawal dari semangat kolektifitas mahasiswa secara nasional inilah perjuangan mahasiswa yang dikenal sebagai gerakan angkatan ‘66 inilah yang kemudian mulai melakukan penentangan terhadap PKI dan ideologi komunisnya yang mereka anggap sebagai bahaya laten negara dan harus segera dibasmi dari bumi nusantara. Namun, di tengah semangat idealisme mahasiswa pada saat itu timbullah kepada mereka

beberapa godaan yang pada akhirnya melunturkan idealisme perjuangan mereka, dimana setelah masa orde lama berakhir, mereka yang dulunya berjuang untuk menruntuhkan PKI mendapatkan hadiah oleh pemerintah yang sedang berkuasa dengan disediakan kursi MPR dan DPR serta diangkat menjadi pejabat pemerintahan oleh penguasa orde baru.

Ditengah gelombang peruntuhan idealime mahasiswa tersebut, ternyata ada sesosok mahasiswa yang sangat dikenal idealismenya hingga saat ini dan sampai sekarang tetap menjadi panutan para aktivis mahasiswa di Indonesia, yaitu Soe Hok Gie. Seuntai kalimat inspiratif yang dituturkan oleh Soe Hok Gie yang sampai sekarang menjadi inspirasi perjuangan mahasiswa di Indonesia, secara lantang ia mengatakan kepada kawan - kawan seperjuangannya yang telah berbelok idealimenya dengan kalimat "lebih baik terasingkan daripada hidup dalam kemunafikan".

Pada periode 1974, mahasiswa berkonfrontasi dengan pihak militer yang mereka anggap telah menjadi alat penindas bagi rakyat. Perlawanan di tahun 1974 bermula karena dinaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta isu pemberantasan korupsi yang digalakkan mahasiswa kepada pemerintahan agar secara tegas menindak koruptor yang terdiri dari pejabat pemerintahan. Bersamaan deng isu ini maka muncullah gerakan yang sering disebut "Mahasiswa Menggugat". Protes akan kedua isu ini semakin berkembang ketika harga kebutuhan semakin melambung tinggi sekaligus korupsi dikalangan pejabat semakin banyak. Protes ini dikenal dengan peristiwa Malari tahun 1974. Melalui peristiwa inilah kemudian lahir tuntutan baru yaitu Bubarkan Asisten Pribadi dan Turnkan Harga.

Pada masa tahun 1978, kemudian gerakan mahasiswa mulai dimatikan oleh pemerintahan, yaitu semenjak terpilihnya Soeharto untuk ketiga kalinya. Guna meredam sikap kritis mahasiswa dikeluarkanlah Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) melalui SK No.0156/U/1978. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim pada saat itu. Bukan hanya itu, bahkan pemerintah Orde Baru, Soeharto kembali mengeluarkan kebijakan terkait organisasi dewam mahasiswa dengan digantikan struktur organisasi yang disebut Badan Koordinasi Kampus (BKK) berdasarkan Surat Keputusan menteri P&K No.037/U/1979 kebijakan ini membahas tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan dimantapkan dengan penjelasan teknis melalui Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi tahun 1978 tentang pokok-pokok pelaksanaan penataan kembali lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Melalui kebijakan inilah secara praktis, kondisi kehidupan mahasiswa dalam melakukan pergerakan politik menjadi lumpuh, yang kemudian pada akhirnya menyebabkan mahasiswa hanya berfokus kepada urusan akademik semata dan cenderung bersikap apatis. Sehingga pada saat itu kondisi rezim semakin kuat dan tegak berdiri tanpa ada yang mengawal serta mengkritisi segala kebijakan pemerintahan orde baru pada saat itu. Gerakan mahasiswa tahun 1977/1978 kembali dilakukan oleh mahasiswa namun gerakannya hanya terfokus kepada skala kecil dalam kampus karena gerakan mahasiswa sangatlah dibatasi oleh pemerintahan orde baru. Pada tanggal 28 Oktober 1977, delapan ribu anak muda di depan kampus ITB. Mereka berikrar satu suara, "Turunkan Suharto!". Namun keesokan harinya semua yang berteriak pada aksi itu, raib dijebloskan ke terali besi. Kampus segera berstatus darurat perang. Namun, sekejap kembali tentram.

Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1977 gerakan mahasiswa kembali aksi turun kejalan. Di Surabaya dipenuhi tiga ribu mahasiswa berkumpul kemudian berjalan kaki menuju Tugu Pahlawan. Hari pahlawan dianggap sebagai moment yang tepat untuk membangkitkan nurani yang hilang. Sementara di kota-kota lain, peringatan hari Pahlawan juga semarak. Di Jakarta, 6000 mahasiswa berjalan kaki lima kilometer dari Rawamangun (kampus IKIP/UNJ) menuju Salemba (kampus UI), membentangkan spanduk,"Padamu Pahlawan Kami Mengadu". Gejolak yang terjadi pada tahun 1980 kembali disuarakan mahasiwa berawal mula dengan konsolidasi gerakan mahasiwa dengan isu penurunan Soeharto. Tahun 1990 pun tuntutan Soeharto mundur dari kursi pemerintahan kembali digencarkan. Pada akhirnya ditahun 1997-1998 didorong oleh keadaan politik serta krisis ekonomi yang sedang mengalami keterpurukan akibat krisis moneter yang dialami Indonesia membuat perekonomian terguncang hebat. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa yang akhirnya animo pergerakannya mulai bangkit setelah sebelumnya mengalami mati suri yang cukup panjang. Sehingga pada akhirnya timbullah berbagai aksi demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pun akhirnya semakin merebak dan meluas. Di Jakarta sendiri, ribuan mahasiswa telah berhasil menduduki gedung MPR/DPR RI pada tanggal 19 Mei 1998. Atas berbagai tekanan yang terjadi itulah akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00, presiden RI pada saat itu, yaitu Soeharto resmi mengundurkan diri dan era Reformasi pun dimulai dengan diawali oleh runtuhnya rezim Orde Baru. Tidak hanya berhenti sampai dengan tahun 1998 saja, pergerkkan mahasiswa terus hidup seperti halnya tahun 2001 jatuhnya presiden Abdurahman Wahid, serta tahun 2003 berupa perlawanan atas rezim Mega yang tidak berpihak pada rakyat.

Fungsi Mahasiswa

Peradaban bangsa mengalami perubahan tak lain karena ada peran pemuda mahasiswa di dalamnya. Catatan sejarah tersebut setidaknya telah menjadi bukti bahwa mahasiswa selalu menempatkan diri dalam setiap perubahan historik dan patriotik di negeri ini. Dalam setiap masa mahasiswa memiliki fungsi-fungsi dominan dalam perannya sebagai garda depan perubahan bangsa, diantara funsi tersebut adalah: [1] **Agent Of Change** (Fungsi Pembaharuan). Sebagai fungsi pembaharu yang menjadi agen setiap

perubahan peradaban kehidupan bangsa khususnya di Indonesia. Setidaknya catatan sejarah panjang perjuangan bangsa telah membuktikan bahwasannya mahasiswa selalu menjadi garda depan peradaban bangsa. [2] **Iron Stock** (Fungsi Investasi Masa Depan). Investasi Kepemimpinan masa depan & Investasi intelektual profesional pada disiplin ilmunya. [3] **Direct of Change** (Fungsi Perubahan). [4] **Moral Force** (Fungsi Moral) Kekuatan moral mahasiswa dalam berjuang pada intinya apa yang ia buat adalah semata-mata berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang, yang kedua adalah kekuatan intelektualitasnya, melalui ilmu pengetahuan yang ia raih di bangku pendidikan, senantiasa ingin mengaplikasiakan segenap keilmuannya untuk gerakan moral dan pengabdian kepada masyarakat, karena bagi seorang mahasiswa ilmu merupakan suatu amanah dan tanggung jawab yang harus diamalkan, yang ketiga adalah mahasiswa sebagai seorang pemuda memiliki semangat dan jiwa muda yang merupakan karakter alami yang pasti dimiliki oleh setiap pemuda secara biologis, dimana melingkupi kekuatan otak dan fisik yang bisa dikatakan maksimal, lalu kratifitas, responsifitas, serta keaktifannya dalam membuat inovasi yang sesuai dengan bidang keilmuannya. [5] **Sosial Control** (Fungsi Kontrol Sosial). Dalam menjalankan fungsinya sebagai sosial kontrol mahasiswa dalam hal ini memiliki peranan yang sangat vital keberadaannya sebagai pengawal serta pengawas terhadap segala kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang sedang menjalankan aktifitas pendidikan yang terbilang tinggi sehingga ilmu yang mereka didapatkan merupakan sebuah senjata pamungkas untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Secara biologis pemuda memiliki kondisi yang fresh untuk berpikir dan bertindak secara fisik. Mahasiswa sebagai pemuda juga memiliki keingintahuan dan sikap kritis yang tinggi terhadap kondisi di sekitarnya, dan dengan modal intelektualitas yang dimilikinya, mahasiswa senantiasa mampu untuk memperjuangkan kondisi sosial yang dilihatnya agar menjadi lebih ideal dan dinamis.

Repositioning PMII: Ditengah Arus Demokrasi & Globalisasi

Dilihat dari aspek historis Indonesia adalah warisan kolonial belanda yang sampai sekarang watak masyarakat Indonesia masih tercerabut dari akar tradisi. Untuk menata kembali butuh sistem negara yang jelas, dan yang paling vital adalah bagaimana merumuskan sistem pemerintahan yang demokrastis. Belum lagi terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini, kebijakan belum berpihak kepada masyarakat yang belum mampu. Hegemoni negara tentu sangat bersinggungan dengan kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat sipil, sehingga kekuasaan Negara dan harus dipisahkan dari mata rantai kepentingan politik sesaat. Kemajuan peradaban yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi berimplikasi pada moralitas manusia. Efek globalisasi misalnya telah merambah berbagai sektor kehidupan manusia, mulai dari alat komunikasi, transportasi, dunia maya, dan kecanggihan teknologi lainnya. Globalisasi telah berdampak pada mainstream bahwa manusia harus bisa mengendalikan teknologi.

Globalisasi ditandai dengan ketersinggungan antara negara, pasar atau sistem ekonomi global dan masyarakat sipil. Kalau diurai maka persoalan gerakan PMII tidak hanya masalah penataan sistem kaderisasi, sistem organisasi, out-put kaderisasi, relasi politik, jaringan prodemokrasi, paradigma gerakan PMII, dan persoalan internal penyelenggaraan organisasi lainnya. Tapi lebih dari itu ada faktor eksternal yang juga sangat berpengaruh pada PMII sebagai instrument gerakan sosial yaitu persoalan rakyat miskin sehingga tidak mampu sekolah, disorientasi kebijakan pemerintah, relasi kekuasaan negara, dan pusaran arus globalisasi. Rumusan paradigma PMII tentu jangan sampai lemah karena terseret arus globalisasi. Sehingga tidak mengorbankan nilai-nilai yang terkandung dalam Nilai Dasar Pergerakan dengan memaksa out-put untuk diterjunkan ke sistem Negara dalam masa transisi demokrasi. Karena globalisasi tidak bisa dibendung maka sikap kita adalah harus berdapasi secara arif tanpa harus menolaknya.

Diskursus PMII dan Kekuasaan Negara

Akar tradisi kehidupan bangsa Indonesia adalah negara maritim dan negara agraris. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya sehingga banyak negara yang sudah maju berusaha untuk mengekspoitasi kekayaan. Kolonialiasme dan imperealisme dengan dalih akumulasi kapital telah membawa dampak keterbelakangan masyarakat Indonesia. Setelah mengalami trauma yang berkepanjangan Indonesia berusaha bangkit merekonstruksi seluruh sistem tata negara dalam berbagai sektor. Yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah masyarakat sipil dilibatkan menjadi penentu kebijakan. Sehingga formulasi kebijakan negara yang diimplementasikan dalam kehidupan publik merepresentasikan kepentingan komunitas sipil. Hal ini menjadi persoalan serius untuk diapresiasi karena seringkali watak hegemonik dan represif negara masih menjadi karakter. Disinilah peran PMII dibutuhkan. Jelasnya bahwa masyarakat sipil yang selalu dijadikan objek pemerintah, masyakakat Indonesia tidak ditempatkan dalam diskursus liberal kebebasan—berkumpul, berpendapat, berorganisasi, berekspresi terutama pada rezim Orde Baru. Proses depolitisasi sebagai praktek hegemonik rezim yang berwatak *otoritarian-birokratik* telah efektif melemahkan kritisisme dan progressifitas masyarakat sipil. *Govermentaly* tidak memahami negara dan masyarakat sipil dalam pengertian oposisi biner, yang selalu bertentangan satu sama lain dan berusaha saling melemahkan pengaruh pihak lain. Kekuasaan bukanlah persoalan menerangkan belenggu pada warga negara dengan tujuan 'membuat' mereka mampu mengemban bentuk kebebasan yang terkontrol. Otonomi personal bukanlah antitesis dari kekuasaan politik, melainkan

merupakan istilah kunci dari praktik kekuasaan politik, karena sebagian besar individu hanya menjadi subyek kekuasaan tetapi juga berperan menjalankan operasi kekuasaan itu.

Ketika praktik kekuasaan berimplikasi pada gerakan PMII, maka PMII akan terjebak sebagai alat untuk melanggengkan status penguasa. Hal ini pernah terjadi ketika pemerintahan Abudurahman Wahid berkuasa. Disinilah independensi PMII dipertanyakan. Selain telikungan kekuasaan negara gerakan PMII di Indonesia juga dihadapkan pada krisis multidimensi. Multi krisis yang ditandai dengan timbulnya konflik, ketegangan, dan aksi kekerasan antar kelompok sosial, etnis, suku dan agama dan antar partai politik seperti yang terjadi berbagai belahan nusantara telah membawa kerugian yang terhingga terhadap masyarakat sipil.

BAGIAN 3: PARADIGMA KRITIS TRANSFORMATIF

Prawacana

Paradigma merupakan sesuatu yang vital bagi pergerakan organisasi, karena paradigma merupakan titik pijak dalam membangun konstruksi pemikiran dan cara memandang sebuah persoalan yang akan termanifestasikan dalam sikap dan dan perilaku organisasi. Disamping itu, dengan paradigma ini pula sebuah organisasi akan menetukan dan memilih nilai-nilai yang universal dan abstrak menjadi khusus dan praksis operasional yang akhirnya menjadi karakteristik sebuah organisasi dan gaya berpikir seseorang.

Organisasi PMII selama ini belum memiliki paradigma yang secara definitive menjadi acuan gerakan. Cara pandang dan bersikap warga pergerakan selama ini mengacu pada nilai dasar pergerakan (NDP). Karena tidak mengacu pada kerangka paradigmatik yang baku, upaya merumuskan dan membnagun kerangka nilai yang dapat diukur secara sistematis dan baku, sehingga warga pergerakan sering dihadapkan pada berbagai penafsiran atas nilai-nilai yang menjadi acuan yang akhirnya berujung pada terjadinya keberagaman cara pandang dan tafsir atas nilai tersebut. Namun demikian, dalam masa dua periode kepengurusan terakhir (sahabat Muhaimin Iskandar dan sahabat Saiful Bachri Anshori) secara factual dan operasional ada karakteristik tertentu yang berlaku dalam warga pergerakan ketika hendak melihat, menganalisis, dan menyikapi sebuah persoalan, yaitu sikap kritis dengan pendekatan teorti kritis. Dengan demikian secara umum telah berlaku paradigma kritis dalam tubuh warga pergerakan. Sikap seperti ini muncul ketika PMII mengusung sejumlah gagasan mengenai demokratisasi, civil society, penguatan masyarakat dihadapan negara yang otoriter, sebagai upaya aktualisasi dan implementasi atas nilai-nilai dan ajaran kegamaan yang diyakini.

Pengertian Paradigma dalam khazanah ilmu sosial, ada beberapa pengertian paradigma yang dibangun oleh oleh para pimikir sosiologi. Salah satu diantaranya adalah G. Ritzer yang memberi pengertian paradigma sebagai pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu. Paradigma membantu apa yang harus dipelajari, pertanyaan yang harus dijawab, bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma merupakan kesatuan consensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu dan membedakan antara kelompok ilmuwan. Menggolongkan, mendefinisikan dan yang menghubungkan antara eksemplar, teori, metode serta instrumen yang terdapat di dalamnya.

Mengingat banyaknya difinisi yang dibentuk oleh para sosiologi, maka perlu ada pemilihan atau perumusan yang tegas mengenai definisi paradigma yang hendak dimabil oleh PMII. Hal ini perlu dilakukan untuk memberi batasan yang jelas mengenai paradigma dalam pengertian komunitas PMII agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai paradigma. Berdasarkan pemikiran dan rumusan yang disusun oleh para ahli sosiologi, maka pengertian paradigma dalam masyarakat PMII dapat dirumuskan sebagai titik pijak untuk menentukan cara pandang, menyusun sebuah teori, menyusun pertanyaan dan membuat rumusan mengenai suatu masalah.

Lewat paradigma ini pemikiran seseorang dapat dikenali dalam melihat dan melakukan analisis terhadap suatu masalah. Dengan kata lain, paradigma merupakan cara dalam “mendekati”obyek kajianya (*the subject matter of particular dicipline*) yang ada dalam ilmu pengetahuan. Orientasi atau pendekatan umum (general orientations) ini didasarkan pada asumsi-asumsi yang dibangun dalam kaitan dengan bagaimana “realitas” dilihat. Perbedaan paradigma yang digunakan oleg seseorang dalam memandang suatu masalah, akan berakibat pada timbulnya perbedaan dalam menyusun teori, membuat konstruk pemikiran, cara pandang, sampai pada aksi dan solusi yang diambil. Pilihan Paradigma PMII disamping terdapat banyak pengertian mengenai paradigma, dalam ilmu sosial ada berbagai macam jenis paradigma. Melihat realitas yang ada di masyarakat dan sesuai dengan tuntutan keadaan masyarakat PMII baik secara sosiologis, politis dan antropologis maka PMII memilih paradigma kritis-transformatif sebagai pijakan gerakan organisasi.

Paradigma Kritis-Transformatif PMII

Dari penelusuran yang cermat atas paradigma kritis, terlihat bahwa paradigma kritis sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia. Dengan demikian ia adalah *secular*. Kenyataan ini yang membuat PMII dilematis, karena akan mendapat tuduhan secular jika pola pikir tersebut diberlakukan. Untuk menghindari tudingan tersebut, maka diperlukan adanya reformulasi penerapan paradigma kritis dalam tubuh warga pergerakan. Dalam hal ini, paradigma kritis diberlakukan hanya sebatas sebagai kerangka

berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan. Dengan sendirinya ia harus diletakkan pada posisi tidak diluar dari ketentuan agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan dan memfungsikan ajaran agama yang sesungguhnya sebagaimana mestinya. Dalam hal ini penerapan paradigma kritis bukan menyentuh pada hal-hal yang sifatnya sacral, tetapi pada pesoalan yang profan.

Lewat paradigma kritis di PMII berupaya menegakkan sikap kritis dalam berkehidupan dengan menjadikan ajaran agama sebagai inspirasi yang hidup dan dinamis. Sebagaimana dijelaskan di atas, *pertama*, paradigma kritis berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari berbagai belenggu yang diakibatkan oleh proses sosial yang bersifat profan. *Kedua*, paradigma kritis melawan segala bentuk dominasi dan penindasan. Ketiga, paradigma kritis membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonic. Semua ini adalah semangat yang dikandung oleh Islam. Oleh karenanya, pokok-pokok pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak paradigma kritis di kalangan warga PMII. Contoh yang paling konkrit dalam hal ini bisa ditunjuk pola pemikiran yang menggunakan paradigma kritis dari berbagai intelektual Islam diantaranya:

Hassan Hanafi

Penerapan paradigma kritis oleh Hasan Hanafi ini terlihat jelas dalam konstruksi pemikiranya terhadap agama. Dia menyatakan untuk memperbaharui masyarakat Islam yang mengalami ketertingalan dalam segala hal, pertama-tama diperlukan analisis sosial. Menurutnya selama ini Islam mengandalkan otoritas teks kedalam kenyataan. Dia menemukan kelemahan mendasar dalam metodologi ini. pada titik ini dia memberikan kritik tajam terhadap metode trandisional teks yang telah mengalami ideologis. Untuk mengembalikan peran agama dalam menjawab problem sosial yang dihadapi masyarakat, Hasan Hanafi mencoba menggunakan metode “kritik Islam” yaitu metode pendefinisian realitas secara kongkret untuk mengetahui siapa memiliki apa, agar realitas berbicara dengan dirinya sendiri. Sebagai realisasi dari metode ini, dia menawarkan “desentralisasi Ideologi” dengan cara menjalankan teologi sebagai antropologi. Pikiran ini dimaksudkan untuk menyelamatkan Islam agar tidak semata-mata menjadi sistem kepercayaan (sebagai *teologi parexellence*), melainkan juga sebagai sistem pemikiran. Usaha Hasan Hanafi ini ditempuh dengan mengadakan rekontruksi terhadap teologi tradisional yang telah mengalami pembekuan dengan memasukkan hermeneutika dan ilmu sosial sebagai bagian integral dari teologi. Untuk menjelaskan teologi menjadi antropologi, Hanafi memaknai teologi sebagai Ilmu Kalam. Kalam merupakan realitas menusia sekaligus Ilahi. Kalam bersifat manusiawi karena merupakan wujud verbal dari kehendak Allah kedalam bentuk manusia dan bersifat Ilahi karena datang dari Allah.

Dalam pemikiran Hanafi, kalam lebih besifat “praktis” dari pada “logis”, karena kalam sebagi kehendak Allah-memiliki daya imperaktif bagi siapapun kalam itu disampaikan. Pandangan Hanafi tentang teologi ini berbeda dengan teologi Islam yang secara tradisional dimengerti sebagai ilmu yang berkenaan dengan pandangan mengenai akidah yang benar. *Mutakallimin* sering disebut sebagai *“ahl al-ra’yu wa al-nadaar”* yang muncul untuk menghadapi “ahl-albid’ah” yang mengancam kebenaran akidah Islam. Dua kelompok ini akhirnya berhadapan secara dialektis. Akan tetapi dialektika mereka bukanlah dialektika tindakana, tetapi dialektika kata-kata. Gagasan teologi sebagai antropologi yang disampaikan oleh Hasan Hanafi sebenarnya justru ingin menempatkan ilmu kalam sebagai ilmu tentang dialektika kepentingan orang-orang yang beriman dalam masyarakat tertentu. Dalam pemikiran Hassan Hanafi, ungkapan “teologi menjadi antropologi” merupakan cara ilmiah untuk mengatasi ketersinggungan teologi itu sendiri. Cara ini dilakukan melalui pembalikan sebagaimana pernah dilakukan oleh Karl Marx terhadap filasafat Hegel. Upaya ini tampak secara provokatif dalam artikelnya “ideologi dan pembangunan “lewat sub-judul; dari tuhan ke bumi, dari keabadian ke waktu, dari taqdie ke hendak bebas, dan dari otoritas ke akal, dari teologi ke tindakan, dari kharisma ke partisipasi massa, dari jiwa ke tubuh, dari eskatologi ke futurology.

Mohammad Arkoun

Arkoun menilai bahwa pemikiran Islam, kecuali dalam beberapa usaha pembaharuan kritis yang bersifat sangat jarang dan mempunyai ruang perkembangan yang sempit sekali, belum membuka diri pada kemodernan pemikiran dan karena itu tidak dapat menjawab tantangan yang dihadapi umat muslim kontemporer. Pemikiran Islam dianggapnya “naif” karena mendekati agama atas dasar kepercayaan langsung tanpa kritik. Pemikiran Islam tidak menyadari jarak antara makna potensial terbuka yang diberikan wahyu Ilahi dan aktualisasi makna itu dalam sejumlah makna yang diaktualisasikan dan dijelmakan dalam berbagai cara pemahaman, penceritaan dan penalaran khas masyarakat teetentu ataupun dalam berbagai wacana khas ajaran teologi dan fiqh tertentu. Pemikiran Islam juga tidak menyadari bahwa dalam proses itu bukan hanya pemahaman dan penafsiran tertentu ditetapkan dan diakui, melainkan pemahaman dan penafsiran lain justru disingkirkan. Hal-hal itu baru didalami oleh berbagai ilmu pengetahuan modern, yang ingin dimasukkan arkoun ke dalam pemikiran Islam.Karena krituknya terlalu krirtis ini, Arkoun sering memberikan jawaban diluar kelazimanumat Islam (*Uncommon Answer*) ketika menjawab problem-prolem kehidupan yang dialami umat Islam. Jawaban seperti inu terlihat jelas dalam penerapan teori pengetahuan (*theory of knowledge*).

Teori pengetahuan ini meliputi landasan epistimpologi kajian tentang studi–studi agama Islam. Dalam hal ini Arkoun membedakan wacana ideologis, wacana rasional, dan wacana profetis. Setiap wacana

memiliki watak yang berbeda sehingga diperlukan kesesuaian dengan wataknya. Selama ini orang dengan mudah menyatakan melakukan kajian secara ilmiah, akan tetapi itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang muslim, melainkan juga oleh orang-orang barat yang mengideologikan sikap mereka dalam memandang Islam. Salah satu corak ideologi adalah unsur kemadegan (tidak dinamis), resistensi (tidak kritis) dan demi kekuatan (tidak transformatif). Untuk merealisasikan jawaban tersebut Arkoun berusaha meletakkan dogma, interpretasi dan teks secara proporsional. Upaya ini dilakukan untuk membuka dialog terus-menerus antara agama dengan realitas untuk menentukan wilayah-wilayah mana dari agama yang bisa didialogkan dan diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya. Kedua pola pikir dari intelektaual Islam di atas merupakan sedikit contoh yang bisa dijadikan model bagaimana paradigma kritis diberlakukan dalam wilayah pemikiran keagamaan.

Disamping kedua pemikir Islam diatas sebenarnya masih banyalk pemikir lain yang menerapkan pemikiran kritis dalam mendekati agama, misalnya Abdullah Ahmed An-naim, Asghar Ali Enggineer, Thoha Husein, dan sebagainya. Dari kedua contoh diatas terlihat bahwa paradigma kritis sebenarnya berupaya membebaskan manusia dengan semangat dan ajaran agama yang lebih fungsional. Dengan kata lain, kalau paradigma kritis Barat berdasarkan pada semangat revolusioner sekuler dan dorongan kepentingan sebagai dasar pijakan, maka paradigma kritis PMII justru menjadikan nilai-nilai agama yang terjebak dalam dogmatisme itu sebagai pijakan untuk membangkitkan sikap kritis melawan belenggu yang kadang disebabkan oleh pemahaman yang distortif.Jelas ini terlihat ada perbedaan yang mendasar penerapan paradigma kritis antara barat dengan Islam (yang diterapkan PMII). Namun demikian harus diakui adanya persamaan antara keduanya yaitu dalam metode analisa, bangunan teoritik dan semangat pembebasan yang terkandung didalamnya. Jika paradigma kritis ini bisa diterapkan dikalangan warga pergerakan, maka kehidupan keagamaan akan berjalan dinamis, berjalanya proses pembentukan kultur demokratis dan penguatan civil society akan segera dapat terwujud. Dan kenyataan ini terwujud manakala masing-masing anggota PMII memahami secara mendalam pengertian, kerangka paradigmatic dan konsep teoritis dari paradigma kritis yang dibangun oleh PMII. Dalam pandangan PMII, paradigma kritis saja tidak cukup untuk melakukan transformasi sosial, karena paradigma kritis hanya berhenti pada dataran metodologis konsepsional untuk mewujudkan masyarakat yang komunikatif dan sikap kritis dalam memandang realitas. Paradigma kritis hanya mampu menelanjangi berbagai tendensi ideologi, memberikan perspektif kritis dalam wacana agama dan sosial, namun ia tidak mampu memberikan perspektif perubahan pasca masyarakat terbebaskan. Pasca seseorang terbebaskan melalui perspektif kritis, paradigma kritis tidak memberikan tawaran yang praktis. Dengan kata lain, paradigma kritis hanya mampu melakukan analisis tetapi tidak mampu melakukan organizing, menjembatani dan memberikan orientasi kepada kelompok gerakan atau rakyat. Paradigma kritis masih signifikan untuk digunakan sebagai alat analisis social, tetapi kurang mampu untuk digunakan dalam perubahan sosial. Karena ia tidak dapat memberikan perspektif dan orientasi sebagai kekuatan bersejarah dalam masyarakat untuk bergerak. Karenanya, paradigma kritis yang digunakan di PMII adalah kritik yang mampu mewujudkan perubahan sehingga menjadi paradigma kritis transformatif. Paradigma kritis transformatif PMII dipilih sebagai upaya menjembatani kekurangan-kekurangan yang ada dalam paradigma kritis pada wilayah-wilayah turunan dari bacaan kritisnya terhadap realitas. Dengan demikian paradigma kritis transformatif dituntut untuk memiliki instrumen-instrumen gerak yang bisa digunakan oleh PMII mulai dari ranah filosofis sampai praksis.

Dasar Pemikiran Paradigma Kritis Transformatif PMII.

Ada bebarapa alasan yang menyebabkan PMII harus memilih paradigma kritis sebagai dasar untuk bertindak dan mengaplikasikan pemikiran serta menyusun cara pandang dalam melakukan analisa: *Pertama*, masyarakat Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern. Kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu titik yaitu budaya massa kapitalisme dan pola pikir positivistic modernisme. Pemikiran-pemikiran seperti ini sekarang telah menjadi sebuah berhala yang mengahruskan semua orang untuk mengikatkan diri padanya. Siapa yang tidak melakukan, dia akan ditinggalkan dan dipinggirkan. Eksistensinya-pun tidak diakui. Akibatnya jelas, kreatifitas dan pola pikir manusia menjadi tidak berkembang. Dalam kondisi seperti ini maka penerapan paradigma kritis menjadi suatu keniscayaan.

Kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, baik etnik, tradisi, kultur maupun kepercayaan. Kondisi seperti ini sangat memerlukan paradigma kritis, karena paradigma ini akan memberikan tempat yang sama bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan kreatifitasnya secara maksimal melalui dialog yang terbuka dan jujur. Dengan demikian potensi tradisi akan bisa dikembangkan secara maksimal untuk kemanusiaan.

Ketiga, sebagaimana kita ketahui selama pemerintahan Orde Baru berjalan sebuah sistem politik yang represif dan otoriter dengan pola yang hegemonic. Akibatnya ruang publik (*public sphere*) masyarakat hilang karena direnggut oleh kekuatan negara. Dampak lanjutannya adalah berkembangnya budaya bisu dalam masyarakat, sehingga proses demokratisasi terganggu karena sikap kritis diberangus. Untuk mengembangkan budaya demokratis dan memperkuat civil society dihadapan negara, maka paradigma kritis merupakan alternatif yang tepat.

Keempat, selama pemerintahan orde baru yang menggunakan paradigma keteraturan (order paradigma) dengan teori-teori modern yang direpresentasikan melalui ideologi developmentalisme, warga

PMII mengalami proses marginalisasi secara hampir sempurna. Hal ini karena PMII dianggap sebagai wakil dari masyarakat tardisional. Selain itu, paradigma keteraturan memiliki konsekuensi logis bahwa pemerintah harus menjaga harmoni dan keseimbangan social yang meniscayakan adanya gejolak social yang harus ditekan seecil apapun. Sementara perubahan harus berjalan secara gradual dan perlahan. Dalam suasana demikian, massa PMII secara sosilogis akan sulit berkembangkarena tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengembangkan diri, mengimplementasikan kreatifitas dan potensi dirinya.

Kelima, Selain belenggu sosial politik yang dilakukan oleh negara dan sistem kapitalisme global yang terjadi sebagai akibat perkembangan situasi, factor yang secara spesifik terjadi dikalangan PMII adalah kuatnya belenggu dogmatisme agama dan tradisi. Dampaknya, secara tidak sadar telah terjadi berbagai pemahaman yang distortif mengenai ajaran dan fungsi agama. Terjadi dogmatisme agama yang berdampak pada kesulitan membedakan mana yang dogma dan mana yang pemikiran terhadap dogma. Agamapun menjadi kering dan beku, bahkan tidak jarang agama justru menjadi penghalang bagi kemajuan dan upaya penegakan nilai kemanusiaan. Menjadi penting artinya sebuah upaya dekonstruksi pemahaman keagamaan melalui paradigma kritis.

Apakah Paradigma itu?

Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Khun, seorang ahli fisika teoritik, dalam bukunya "*The Structure Of Scientific Revolution",* yang dipopulerkan oleh Robert Friederichs (*The Sociologi Of Sociology*; 1970), Lodhal dan Cardon (1972), Effrat (1972), dan Philips (1973). Sementara Khun sendiri, seperti ditulis Ritzer (1980) tidak mendefinisikan secara jelas pengertian paradigma. Bahkan menggunakan kata paradigma dalam 21 konteks yang berbeda. Namun dari 21 pengertian tersebut oleh Masterman diklasifikasikan dalam tiga pengertian paradigma.

1. Paradigma metafisik yang mengacu pada sesuatu yang menjadi pusat kajian ilmuwan.
2. Paradigma Sosiologi yang mengacu pada suatu kebiasaan sosial masyarakat atau penemuan teori yang diterima secara umum.
3. Paradigma Konstrak sebagai sesuatu yang mendasari bangunan konsep dalam lingkup tertentu, misalnya paradigma pembangunan, paradigma pergerakan dll.

Masterman sendiri merumuskan paradigma sebagai "pandangan mendasar dari suatu ilmu yang menjadi pokok persoalan yang dipelajari *(a fundamental image a dicipline has of its subject matter).* Sedangkan George Ritzer mengartikan paradigma sebagai apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dipelajari, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka, jika dirumuskan secara sederhana sesungguhnya paradigma adalah *"How to see the Word"* semacam kaca mata untuk melihat, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan respon sosial yang memandu arahan pergerakan.

Apakah yang disebut Teori kritis ?

Apa sebenarnya *makna* "Kritis"? Menurut kamus ilmiah populer, kritis adalah *Tajam/ tegas dan teliti dalam menanggapi atau memberikan penilaian secara mendalam.* Sehingga teori kritis adalah teori yang berusaha melakukan analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas. Secara historis, berbicara tentang teori kritis tidak bisa lepas dari Madzhab Frankfurt. Dengan kata lain, teori kritis merupakan produk dari institute penelitian sosial, Universitas Frankfurt Jerman yang digawangi oleh kalangan neo-marxis Jerman. Teori Kritis menjadi disputasi publik di kalangan filsafat sosial dan sosiologi pada tahun 1961. Konfrontasi intelektual yang cukup terkenal adalah perdebatan epistemologi sosial antara Adorno (kubu Sekolah Frankfurt–paradigma kritis) dengan Karl Popper (kubu Sekolah Wina–paradigma neo-positivisme/ neo-kantian). Konfrontasi berlanjut antara Hans Albert (kubu Popper) dengan Jürgen Habermas (kubu Adorno). Perdebatan ini memacu debat positivisme dalam sosiologi Jerman. Habermas adalah tokoh yang berhasil mengintegrasikan metode analitis ke dalam pemikiran dialektis Teori Kritis.

Teori kritis adalah anak cabang pemikiran marxis dan sekaligus cabang marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx (*Frankfurter Schule*). Cara dan ciri pemikiran aliran Frankfurt disebut ciri teori kritik masyarakat "*eine Kritische Theorie der Gesselschaft"*. Teori ini mau mencoba memperbaharui dan merekonstruksi teori yang membebaskan manusia dari manipulasi teknokrasi modern. Ciri khas dari teori kritik masyarakat adalah bahwa teori tersebut bertitik tolak dari inspirasi pemikiran sosial Karl Marx, tapi juga sekaligus melampaui bangunan ideologis marxisme bahkan meninggalkan beberapa tema pokok Marx dan menghadapi masalah masyarakat industri maju secara baru dan kreatif. Beberapa tokoh Teori Kritis angkatan pertama adalah Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno (musikus, ahli sastra, psikolog dan filsuf), Friedrich Pollock (ekonom), Erich Fromm (ahli psikoanalisa Freud), Karl Wittfogel (sinolog), Leo Lowenthal (sosiolog), Walter Benjamin (kritikus sastra), Herbert Marcuse (murid Heidegger yang mencoba menggabungkan fenomenologi dan marxisme, yang juga selanjutnya Marcuse menjadi "nabi" gerakan *New Left* di Amerika). Pada intinya madzhab Frankfurt tidak puas atas teori Negara Marxian yang terlalu bertendensi determinisme ekonomi. Determinisme ekonomi berasumsi bahwa perubahan akan terjadi apabila masalah ekonomi sudah stabil. Jadi *basic strurtur* (ekonomi) sangat menentukan *supra truktur* (politik, sosial, budaya, pendidikan dan seluruh dimensi kehidupan manusia).

Kemudian mereka mengembangkan kritik terhadap masyarakat dan berbagai sistem pengetahuan. Teori kritis tidak hanya menumpukkan analisisnya pada struktur sosial, tapi teori kritis juga memberikan perhatian pada kebudayaan masyarakat (*culture society*). Seluruh program teori kritis Madzhab Frankfurt dapat dikembalikan pada sebuah manifesto yang ditulis di dalam *Zeischrift* tahun 1957 oleh Horkheimer. Dalam artikel tentang "Teori Tradisional dan teori Kritik" *(Traditionelle und KritischeTheorie)* ini, konsep "Teori kritis" pertama kalinya muncul. Tokoh utama teori kritis ini adalah Max Horkheimer (1895-1973), Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) dan Herbert Marcuse (1898-1979) yang kemudian dilanjutkan oleh Generasi kedua mazhab Frankfurt yaitu Jurgen Habermas yang terkenal dengan teori komunikasinya.

Diungkapkan Goerge Ritzer, secara ringkas teori kritis berfungsi untuk mengkritisi :

1. Teori Marxian yang deterministic yang menumpukan semua persoalan pada bidang ekonomi;
2. Positivisme dalam Sosiologi yang mencangkok metode sains eksak dalam wilayah sosial-humaniora katakanlah kritik epistimologi;
3. Teori- teori sosiologi yang kebanyakan hanya memperpanjang status quo;
4. Kritik terhadap masyarakat modern yang terjebal pada irrasionalitas, nalar teknologis,nalar instrumental yang gagal membebaskan manusia dari dominasi;
5. Kritik kebudayaan yang dianggap hanya menghancurkan otentisitas kemanusiaan.

Madzhab Frankfrut mengkarakterisasikan berpikir kritis dengan empat hal :

1. Berpikir dalam totalitas (dialektis);
2. Berpikir empiris-historis;
3. Berpikir dalam kesatuan teori dan praksis;
4. Berpikir dalam realitas yang tengah dan terus bekerja *(working reality)*.

Pengertian 'Kritik' dalam Tradisi Teori Kritis

Mereka mengembangkan apa yang disebut dengan kritik ideology atau kritik dominasi. Sasaran kritik ini bukan hanya pada struktur sosial namun juga pada ideologi dominan dalam masyarakat. Teori Kritis berangkat dari 4 (empat sumber) kritik yang dikonseptualisasikan oleh Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx dan Sigmund Freud.

1. Kritik dalam pengertian Kantian.

Immanuel Kant melihat teori kritis dari pengambilan suatu ilmu pengetahuan secara subyektif sehingga akan membentuk paradigma segala sesuatu secara subyektif pula. Kant menumpukkan analisisnya pada aras epistemologis; tradisi filsafat yang bergulat pada persoalan "isi" pengetahuan. Untuk menemukan kebenaran, Kant mempertanyakan *"condition of possibility"* bagi pengetahuan. Bisa juga disederhanakan bahwa kitik Kant terhadap epistemologi tentang (*kapasitas rasio dalam persoalan pengetahuam)* bahwa rasio dapat menjadi kritis terhadap kemampuannya sendiri dan dapat menjadi 'pengadilan tinggi'. Kritik ini bersifat transendental. Kritik dalam pengertian pemikiran Kantian adalah kritik sebagai kegiatan menguji kesahihan klaim pengetahuan tanpa prasangka.

2. Kritik dalam Arti Hegelian.

Kritik dalam makna Hegelian merupakan kritik terhadap pemikiran kritis Kantian. Menurut Hegel, Kant berambisi membangun suatu "meta-teori" untuk menguji validitas suatu teori. Menurut Hegel pengertian kritis merupakan *refleksi-diri dalam upaya menempuh pergulatan panjang menuju ruh absolute*. Hegel merupakan peletak dasar metode berpikir dialektis yang diadopsi dari prinsip tri-angle-nya Spinoza Diktumnya yang terkenal adalah *therational is real, the real is rational.* Sehingga, berbeda dengan Kant, Hegel memandang teori kritis sebagai proses totalitas berfikir. Dengan kata lain, kebenaran muncul atau kritisisme bisa tumbuh apabila terjadi benturan dan pengingkaran atas sesuatu yang sudah ada. Kritik dalam pengertian Hegel didefinisikan sebagai refleksi diri atas tekanan dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri-rasio dalam sejarah manusia.

3. Kritik dalam Arti Marxian.

Menurut Marx, konsep Hegel seperti orang berjalan dengan kepala. Ini adalah terbalik. Dialektika Hegelian dipandang terlalu idealis, yang memandang bahwa, yang berdialektika adalah pikiran. Ini kesalahan serius sebab yang berdialektika adalah kekuatan-kekuatan material dalam masyarakat. Pikiran hanya refleksi dari kekuatan material (modal produksi masyarakat). Sehingga teori kritisbagi Marx sebagai usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan elienasi yang dihasilkan oleh penguasa di dalam masyarakat. Kritik dalam pengertian Marxian berarti usaha untuk mengemansipasi diri dari alienasi atau keterasingan yang dihasilkan oeh hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

4. Kritik dalam Arti Freudian.

Madzhab frankfrut menerima Sigmun Freud karena analisis Freudian mampu memberikan basis psikologis masyarakat dan mampu membongkar konstruk kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Freud memandang teori kritis dengan refleksi dan analisis psikoanalisanya. Artinya, bahwa orang bisa melakukan sesuatu karena didorong oleh keinginan untuk hidupnya sehingga manusia melakukan perubahan dalam dirinya. Kritik dalam pengertian Freudian adalah refleksi atas konflik psikis yang menghasilkan represi dan

memanipulasi kesadaran. Adopsi Teori Kritis atas pemikiran Freudian yang sangat psikologistik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ortodoksi marxisme klasik.

Berdasarkan empat pengertian kritis di atas, teori kritis adalah teori yang bukan hanya sekedar kontemplasi pasif prinsip-prinsip obyektif realitas, melainkan bersifat emansipatoris. Sedang teori yang emansipatoris harus memenuhi tiga syarat : *Pertama,* bersifat kritis dan curiga terhadap segala sesuatu yang terjadi pada zamannya. *Kedua,* berfikir secara historis, artinya selalu melihat proses perkembangan masyarakat. *Ketiga,* tidak memisahkan teori dan praksis. Tidak melepaskan fakta dari nilai semata-mata untuk mendapatkan hasil yang obyektif.

Tiga Jenis Utama Paradigma

Paradigma Kritis; Sebuah Sintesis Perkembangan Paradigma Sosial: William Perdue, menyatakan dalam ilmu sosial dikenal adanya tiga jenis utama paradigma:

1. Order Paradigm (Paradigma Keteraturan).

Inti dari paradigma keteraturan adalah bahwa masyarakat dipandang sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan sistemik. Asumsi dasarnya adalah bahwa: Setiap struktur sosial adalah fungsional terhadap struktur lainnya. Kemiskinan, peperangan, perbudakan misalnya, merupakan suatu yang wajar, sebab fungsional terhadap masyarakat. Ini yang kemudian melahirkan teori strukturalisme fungsional. Secara eksternal paradigma ini dituduh a historis, konservatif, pro-satus quo dan karenanya, anti-perubahan. Paradigma ini mengingkari hukum kekuasaan : *setiap ada kekuasaan senantiasa ada perlawanan.* Untuk memahami pola pemikiran paradigma keteraturan dapat dilihat skema berikut:

Elemen Paradigmatik	Asumsi dasar	Type ideal
Imajinasi sifat dasar manusia	Rasional, memiliki kepentingan pribadi, ketidakseimbangan personal dan berpotensi memunculkan dis integrasi sosial	Pandangan hobes mengenai konsep dasar Negara
Imajinasi tentang masyarakat	Consensus, kohesif/fungsional struktural, ketidakseimbangan sosial, ahistoris, konservatif, pro-status quo, anti perubahan	Negara Republic Plato
Imajinasi ilmu pengetahuan	Sistematic, positivistic, kuantitatif dan prediktif.	Fungsionalisme Auguste Comte, fungsionalisme Durkheim, fungsionalisme struktural Talcot Parson

2. Conflic Paradigm (Paradigma Konflik)

Secara konseptual paradigma Konflik menyerang paradigma keteraturan yang mengabaikan kenyataan bahwa: Setiap unsur-unsur sosial dalam dirinya mengandung kontradiksi-kontradiksi internal yang menjadi prinsip penggerak perubahan. Perubahan tidak selalu gradual; namun juga revolusioner. Dalam jangka panjang sistem sosial harus mengalami konflik sosial dalam lingkar setan *(vicious circle)*tak berujung pangkal Kritik itulah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi paradigma konflik. Konflik dipandang sebagai inhern dalam setiap komunitas, tak mungkin dikebiri, apalagi dihilangkan. Konflik menjadi instrument perubahan. Untuk memahami pola pemikiran paradigma konflik dapat dilihat skema berikut:

Elemen paradigmatik	Asumsi dasar	Type ideal
Imajinasi sifat dasar manusia	Rasional,kooperatif, sempurna	Konsep homo feber hegel
Imajinasi tentang masyarakat	Integrasi sosial terjadi karena adanya dominasi, konflik menjadi instrument perubahan, utopia	Negara Republic plato
Imajinasi ilmu pengetahuan	Filsafat materialisme, histories, holistic, dan terapan	Materialisme historis marx

3. Plural Paradigm (Paradigma plural)

Dari kontras atau perbedaan antara paradigma keteraturan dan paradigma konflik tersebut melahirkan upaya membangun sintesis keduanya yang melahirkan paradigma plural. Paradigma plural memandang manusia sebagai sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas serta otonomi untuk melakukan pemaknaan dan menafsirkan realitas sosial yang ada disekitarnya. Untuk memahami pola pemikiran paradigma plural dapat dilihat skema berikut:

Elemen paradigmatik	Asumsi dasar	Type ideal
Imajinasi sifat dasar manusia	Manusia bertindak atas kesadaran subyektif, memiliki kebebasan menafsirkan realitas/aktif	Konsep kesadarn diri imanuel kant
Imajinasi tentang masyarakat	Struktur internal yang membentuk kesadaran manusia, kontrak sosial sebagai mekanisme control.	Konsep kontrak sosial J.J Rousseau
Imajinasi ilmu pengetahuan	Filsafat idealisme, tindakan manusia tidak dapat diprediksi	Metode verstehen Weber

Terbentuknya Paradigma Kritis

Ketiga paradigma di atas merupakan pijakan-pijakan untuk membangun paradigma baru. Dari optic pertumbuhan teori sosiologi telah lahir Paradigma kritis setelah dilakukan elaborasi antara paradigma pluralis dan paradigma konflik. Paradigma pluralis memberikan dasar pada paradigma kritis terkait dengan asumsinya bahwa manusia merupakan sosok yang independent, bebas dan memiliki otoritas untuk menafsirkan realitas. Sedangkan paradigma konflik mempertajam paradigma kritis dengan asumsinya tentang adanya pembongkaran atas dominasi satu kelompok pada kelompok yang lain.

Apabila disimpulkan apa yang disebut dengan paradigma kritis adalah paradigma yang dalam melakukan tafsir sosial atau pembacaan terhadap realitas masyarakat bertumpu pada:

1. Analisis struktural: membaca format politik, format ekonomi dan politik hukum suatu masyarakat, untuk menelusuri nalar dan mekanisme sosialnya untuk membongkar pola dan relasi sosial yang hegeminik, dominatif, dan eksploitatif.
2. Analisis ekonomi untuk menemukan fariabel ekonomi politikbaik pada level nasional maupun internasional.
3. Analisis kritis yang membongkar “the dominant ideology” baik itu berakar pada agama, nilai-nilai adat, ilmu atau filsafat. Membongkar logika dan mekanisme formasi suatu wacana resmi dan pola-pola eksklusi antar wacana.
4. Psikoanalisis yang akan membongkar kesadaran palsu di masyarakat.
5. Analisis kesejarahan yang menelusuri dialektika antar tesis-tesis sejarah, ideologi, filsafat, actor-aktor sejarah baik dalam level individual maupun sosial, kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat.

Kritis dan Transformatif

Namun Paradigma kritis baru menjawab pertanyaan: struktur formasi sosial seperti apa yang sekarang sedang bekerja. Ini baru sampai pada logika dan mekanisme *working-sistem* yang menciptakan relasi tidak adil, hegemonik, dominatif, dan eksploitatif; namun belum mampu memberikan prespektif tentang jawaban terhadap formasi sosial tersebut; strategi mentransformasikannya; disinilah “Term Transformatif” melengkapi teori kritis. Dalam perspektif Transformatif dianut epistimologi perubahan non-esensialis. Perubahan yang tidak hanya menumpukan pada revolusi politik atau perubahan yang bertumpu pada agen tunggal sejarah; entah kaum miskin kota (KMK), buruh atau petani, tapi perubahan yang serentak yang dilakukan secara bersama-sama. Disisi lain makna tranformatif harus mampu mentranformasikan gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tindakan praksis ke masyarakat. Model-model transformasi yang bisa dimanifestasikan pada dataran praksis antara lain:

1. Transformasi dari Elitisme ke Populisme.

Dalam model tranformasi ini digunakan model pendekatan, bahwa mahasiswa dalam melakukan gerakan sosial harus setia dan konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, semisal isu advokasi buruh, advokasi petani, pendampingan terhadap masyarakat yang digusur akibat adanya proyek pemerintah yang sering berselingkuh dengan kekuatan pasar (kaum kapitalis) dengan pembuatan mal-mal, yang kesemuanya itu menyentuh akan kebutuhan rakyat secara riil. Fenomena yang terjadi masih banyak mahasiswa yang lebih memprioritaskan isu elit, melangit dan jauh dari apa yang dikehendaki oleh rakyat, bahkan kadang sifatnya sangat *utopis*. Oleh karena itu, kita sebagai kaum intelektual terdidik, jangan sampai tercerabut dari akar sejarah kita sendiri. Karakter gerakan mahasiswa saat ini haruslah lebih condong pada gerakan yang bersifat horisontal.

2. Transformasi dari Negara ke Masyarakat.

Model tranformasi kedua adalah transformasi dari Negara ke masyarakat. Kalau kemudian kita lacak basis teoritiknya adalah kritik yang dilakukan oleh Karl Marx terhadap G.W.F. Hegel. Hegel memaknai Negara sebagai penjelmaan roh absolute yang harus ditaati kebenarannya dalam memberikan kebijakan terhadap rakyatnya. Disamping itu, Hegel mengatakan bahwa Negara adalah satu-satunya wadah yang paling efektif untuk meredam terjadinya konflik internal secara nasional dalam satu bangsa. Hal ini dibantah Marx. Marx mengatakan bahwa justru masyarakatlah yang mempunyai otoritas penuh dalam menentukan

kebijakan tertinggi. Makna transformasi ini akan sesuai jika gerakan mahasiswa bersama-sama rakyat bahu-membahu untuk terlibat secara langsung atas perubahan yang terjadi disetiap bangsa atau Negara.

3. Transformasi dari Struktur ke Kultur.

Bentuk transformasi ketiga adalah transformasi dari struktur ke kultur, yang mana hal ini akan bisa terwujud jika dalam setiap mengambil keputusan berupa kebijakan-kebijakan ini tidak sepenuhnya bersifat sentralistik seperti yang dilakukan pada masa orde baru, akan tetapi seharusnya kebijakan ini bersifat desentralistik. Jadi, aspirasi dari bawah harus dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan, hal ini karena rakyatlah yang paling mengerti akan kebutuhan, dan yang paling bersinggungan langsung dengan kerasnya benturan sosial di lapangan.

4. Transformasi dari Individu ke Massa.

Model transformasi selanjutnya adalah transformasi dari individu ke massa. Dalam disiplin ilmu sosiologi disebutkan bahwa manusia adalah mahluk sosial, yang sangat membutukan kehadiran mahluk yang lain. Bentuk-bentuk komunalitas ini sebenarnya sudah dicita-citakan oleh para *foundhing fathers* kita tentang adanya hidup bergotong royong. Rasa egoisme dan individualisme haruslah dibuang jaung-jauh dari sifat manusia. Salah satu jargon yang pernah dikatakan oleh Tan Malaka (*Sang Kiri Nasionalis*), adalah adanya aksi massa. Hal ini tentunya setiap perubahan meniscayakan adanya *power* atau kekuatan rakyat dalam menyatukan program perjuangan menuju perubahan sosial dalam bidang apapun (*ipoleksosbudhankam*).

Paradigma Kritis Transformatif (PKT) yang diterapkan di PMII?

Dari paparan diatas, terlihat bahwa PKT sepenuhnya merupakan proses pemikiran manusia, dengan demikian dia adalah sekuler. Kenyataan ini yang membuat PMII dilematis, karena akan mendapat tuduhan sekuler jika pola pikir tersebut diberlakukan. Untuk menghindari dari tudingan tersebut, maka diperlukan adanya reformulasi penerapan PKT dalam tubuh warga pergerakan. Dalam hal ini, paradigma kritis diberlakukan hanya sebagai kerangka berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan. Dengan sendirinya dia tidak dilepaskan dari ketentuan ajaran agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan dan memfungsikan ajaran agama sebagaimana mestinya.

PKT berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari belenggu, melawan segala bentuk dominasi dan penindasan, membuka tabir dan selubung pengetahuan yang munafik dan hegemonik. Semua ini adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Islam. Oleh karenanya pokok-pokok pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak penerapan PKT di kalangan warga PMII. Contoh yang paling kongkrit dalam hal ini bisa ditunjuk pola pemikiran yang menggunakan paradigma kritis dari beberapa intelektual Islam, diantaranya Hassan Hanafi dan Arkoun.

Mengapa PMII memilih Paradigma Kritis Transformatif?

“Berpikir Kritis & Bertindak Tansformatif” itulah Jargon PMII dalam setiap membaca tafsir sosial yang sedang terjadi dalam konteks apapun. Dan ada beberapa alasan yang menyebabkan PMII harus memiliki Paradigma Kritis Transformatif sebagai dasar untuk bertindak dan mengaplikasikan pemikiran serta menyusun cara pandang dalam melakukan analisa terhadap realitas sosial. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Masyarakat Indonesia saat ini sedang terbelenggu oleh nilai-nilai kapitalisme modern, dimana kesadaran masyarakat dikekang dan diarahkan pada satu titik yaitu budaya massa kapitalisme dan pola berpikir positivistik modernisme.
2. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk/plural, beragam, baik secara etnis, tradisi, kultur maupun kepercayaan (adanya *pluralitas society*).
3. Pemerintahan yang menggunakan sistem yang represif dan otoriter dengan pola yang hegemonik (sistem pemerintahan menggunakan paradigma keteraturan yang anti perubahan dan pro *status quo*).
4. Kuatnya belenggu dogmatisme agama, akibatnya agama menjadi kering dan beku, bahkan tidak jarang agama justru menjadi penghalang bagi kemajuan dan upaya penegakan nilai kemanusiaan.

Beberapa alasan mengenai mengapa PMII memilih Paradigma Kritis Tansformatif untuk dijadikan pisau analisis dalam menafsirkan realitas sosial. Karena pada hakekatnya dengan analisis PKT mengidealkan sebuah bentuk perubahan dari semua level dimensi kehidupan masyarakat (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan dll) secara bersama-sama. Hal ini juga tercermin dalam *imagened community* (komunitas imajiner) PMII yang mengidealkan orientasi out-put kader PMII yang diantaranya adalah : *Intelektual Organik, Agamawan Kritis, Profesional Lobbiyer, Ekonom Cerdas, Budayawan Kritis, Politisi Tangguh, dan Praktisi Pendidikan yang Transformatif.*

BAGIAN 4: PERSPEKTIF TEORI PERUBAHAN SOSIAL

Proses Perubahan Sosial[20]

Ada tiga hal yang berkenaan dengan proses perubahan sosial. Pertama, bagaimana ideas mempengaruhi perubahan-perubahan sosial. Kedua, bagaimana tokoh-tokoh besar dalam sejarah menimbulkan perubahan besar di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, sejauh mana peranan gerakan-gerakan sosial dan revolusi menimbulkan perubahan struktur sosial dan norma-norma sosial.

Dalam Marxisme, yang kita kenal sebagai materialisme sejarah (*historical materialism*), ada anggapan bahwa yang merubah sejarah, masyarakat dan bangsa bukanlah ide atau gagasan, tetapi tehnologi, struktur ekonomi, atau penggunaan alat-alat produksi. Marx membagi struktur masyarakat ke dalam dua bagian: supratruktur dan infrastruktur.

Yang termasuk infrastruktur suatu kebudayaan misalnya, struktur ekonomi atau tehnologi kebudayaan itu sendiri; sedangkan suprastrukturnya adalah ideologi, kepercayaan, agama, *ideas, belief,* dan lain-lain. Menurut Marx, suprastruktur ditentukan oleh infrastruktur. Ideologi akan sangat ditentukan oleh ekonomi. Keadaan ekonomi misalnya akan menentukan kesadaran kelas; bukan sebaliknya. Agama kita sangat ditentukan oleh posisi ekonomi kita ditengah-tengah masyarakat. Versi-versi keberagaman kita sangat ditentukan oleh letak kita didalam status sosial ekonomi. Apa yang dirumuskan Marx sebetulnya merupakan antitesis dari; *ideas* akan menentukan sejarah.

Kekuatan sejarah akan sangat ditentukan oleh *ideas* (gagasan-gagasan). Ideologilah yang akan menentukan perubahan ekonomi, sistem sosial dan struktur politik. Jika ideologi suatu masyarakat berubah, berubah pulalah infrastruktur masyarakat itu. Berbeda dengan pandangan Marx, teori ini menganggap bahwa *ideas*-lah yang paling menentukan prubahan sosial. Teori yang sekaligus menjadi kritik terhadap Marx ini dikemukakan oleh Max Weber.

Suatu masyarakat dikatakan mengalami perubahan sosial jika sistem sosial juga berubah. Jadi, dalam perkembangan masyarakat itu, individu tidak berperan apa-apa. Mereka hanyalah pion-pion kecil yang digerakkan oleh sistem sosial, politik dan ekonomi. Dulu, para sosiolog melacak perubahan-perubahan masyarakat pada perubahan-perubahan institusi; individu sama sekali tidak memegang peranan. Sebagai contoh utamanya dalam tesis Marx. Namun Weber membalikkan pandangan itu dengan mengatakan bahwa semua perubahan sosil dimulai dari perubahan tingkah laku manusia, perubahan dari *human actions,* perubahan dari tindakan-tindakan manusia yang ada di masyarakat. Karena itu, banyak ahli menganggap Weber sebagai pendiri dari apa yang kita sebut sebagai *sosiologi humanis,* sosiologi yang (kembali) menempatkan peranan manusia dalam perubahan-perubahan sosial. Kalau kita bicara tentang rekayasa sosial, basis teori yang kita pergunakan adalah *humanist sociology,* yakni bahwa kita, sebagai manusia dapat mempengaruhi perubahan sosial. Berbeda dengan Marx, Weber berpendapat bahwa *superstruktur, soft belief system, ideology* adalah faktor yang sangat aktif dan efektif dalam mengubah sejarah. Tesis Weber ini terbuksi dengan munculnya kapitalisme.

Kapitalis adalah sebuah sistem sosial yang ditegakkan diatas dasar pencarian keuntungan dan tindakan-tindakan rasional. Kata Max Weber,kapitalis adalah pengantar menuju masyarakat modern. Bersamaan dengan lahirnya kapitalisme, lahir pula institusi-institusi dan pengusaha-pengusaha baru yang independen. Pandangan baru tentang pasar (*market*) juga mulai muncul ke permukaan. Menurut Weber, sebagai sebuah sistem sosial, kelahiran kapitalisme di Eropa Barat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan manusia. Ada perubahan dalam tingkah laku manusia (*human actions*) menjelang kelahiran kapitalisme. Ada sekelompok orang yang perilakunya berbeda dengan kebanyakan orang pada zaman itu. Kapitalisme muncul karena sekelompok orang—yang disebut Weber sebagai *new enterpreneur* (pengusaha-pengusaha baru)—melakukan serangkaian tindakan (*human actions*). Tindakan itu didasarkan pada semangat kapitalisme (*spirit of capitalism*). Semangat kapitalisme terdiri dari tiga hal; motif memperoleh laba (profit motive), hidup zuhud dan sederhana (*ascetic orientation*) semangat misi (*ideas of calling*).

Masyarakat Industri[21]

Masyarakat baru yang didasarkan atas cara berfikir yang rasional dan positif itu adalah masyarakat industri. Kelahiran dan pertumbuhan industri telah menjadi gejala paling menyolok dalam abad lampau. Industri itu dimengerti sebagai penyebab perubahan sosial yang besar sekali. Raymond Aron, sarjana sosiologi pada Universitas Sorbone di Paris, dalam bukunya *Main Currens in Sociological Thought* (1965) meyebut enam ciri proses industrialisasi, yang disaksikan dalam abad ke-18 dan ke-19, yaitu:

Pertama, industri merupakan rasionalisasi proses kerja. Cara kerja ditinjau dan diatur kembali menurut prinsip-prinsip ilmu pengetahuan positif dengan tujuan untuk menghasilkan *out-put* semaksimal mungkin.

Kedua, penemuan-penemuan dibidang ilmu alam, yang diterapkan dalam proses kerja, menghasilkan kemungkian dan kemampuan tiba-tiba untuk mengolah dan menguasai sumber-seumber kekayaan alam demi suatu kemakmuran yang tak ada bandingnya dalam sejarah.

---

[20] Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial; Reformasi atau Revolusi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I., 1999) h. 103-106.

[21] Veeger, *Realitas Sosial; Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, Cet. IV., 1993) h. 26-27.

Ketiga, berkembangnya industri mengakibatkan konsentrasi kaum buruh di dekat pabrik dan tambang, serta urbanisasi. Suatu kelas sosial baru lahir, yaitu kelas buruh, yang hidup dan nasibnya tergantung dari orang lain.

Keempat, konsentrasi kaum buruh itu di kawasan-kawasan industri mengakibatkan antagonisme (pertentangan)—yang entah masih terpendam atau sudah terbuka—antara dua kelas sosial, yaitu kaum proletar dan kaum bermodal.

Kelima, rasionalisasi metoda kerja tadi membawa rejeki besar bagi sebagian kecil manusia, tetapi kemikinan yang mencemaskan bagi banyak orang lain. Kemiskinan itu disebabkan oleh produksi yang terlalu banyak (*overproduction*). Kemiskinan yang meluas itu mengecutkan semua pihak, dan oleh pendukung zaman baru dilihat sebagai tantangan dan ujian bagi akal-budi manusia.

Keenam, akhirnya muncul liberalisme dibidang ekonomi dengan slogannya *laissez faire, laissez aller* (biarlah orang berbuat sendiri, biarlah orang mencari jalan sendiri). Setiap intervensi pemerintah dalam proses produksi ditolak dengan berdalih bahwa dunia ekonomi adalah dunia otonom yang mempunyai hukumnya sendiri dan sendiri mencari keseimbangan. Persaingan bebas harus diizinkan.[22]

Raymond Aron mencatat bahwa optimisme Comte dan kepercayaannya akan masa depan membuat dia agak meremehkan hal-hal negatif seperti antagonisme kelas dan kemiskinan kaum buruh. Ia menilai itu sebagai akibat sampingan yang disebabkan oleh kekurangan-kekurangan teknis. Mereka semantara saja! Masalah transisi! Ibarat penyakit kanak-kanak yang dengan sendirinya akan dapat diatasi kelak pada waktunya. Inti hakikat masyarakat industri ialah rasionalisasi metoda kerja, konsentrasi kaum buruh secara besar-besaran, dan bertumpuknya modal besar dalam tangan segelintir kecil orang. Comte membenarkan hak milik perseorangan atas sarana-saran produksi, juga hak untuk megumpulkan kekayaan besar.

Hal-hal yang oleh Comte dianggap pada dasarnya sehat dan progresif, kemudian akan dicela dan ditolak oleh Karl Marx dan pengikutnya. Bagi mereka justru pertentangan kelas dan pemilikan atas modal besar dan sarana produksi oleh individu merupakan penyakit permanen dan kronis yang ada hubungan langsung dengan inti hakikat dan sifat dasar sistem sendiri, yang mesti mengakibatkan kehancuran, Marx dan pengikutnya pesimistis terhadap perkembangan masyarakat industri.

Filsafat Perubahan Sosial[23]

Dalam materialisme dialektik, tindakan adalah yang pertama dan fikiran adalah yang kedua. Aliran ini mengatakan bahwa tak terdapat pengetahuan yang hanya merupakan pemikiran tentang alam; pengetahuan selalu dikaitkan dengan tindakan. Pada zaman dahulu, menurut Marx, para filosof telah menjelaskan alam dengan cara yang berbeda-beda. Kewajiban manusia sekarang adalah untuk mengubah dunia, dan ini adalah tugas dan misi yang bersejarah dari kaum komunis. Dalam melakukan tugas ini, mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan dan menggunakan kekerasan guna mencapai maksud mereka. Sesungguhnya,kebanyakanorang komunis percaya bahwa kekerasan adalah perlu untuk menghilangkan kejahatan dari masyarakat.

Masyarakat, seperti benda-benda lain, selalu dalam proses perubahan. Ia tidak dapat diam (statis) karena meteri itu sedniri bergerak (dinamis). Akan tetapi perubahan atau proses perkembangan itu tidak sederhana, lurus atau *linear.* Selalu terjadi perubahan-perubahan yang kecil, yang tidak terlihat, dan kelihatannya tidak mengubah watak benda yang berubah itu, sampai terjadilah suatu tahap dimana suatu benda tidak dapat berubah tanpa menjadi benda lain. Pada waktu itu terjadi suatu perubahan yang mendadak. Sebagai contoh, air dipanaskan pelan-pelan, ia menjadi bertambah panas sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya secara mendadak, pada suatu tahap, ia menjadi uap, dan terjadilah perubahan keadaan. Ada perkembangan yang lalu dari perubahan kuantitatif yang sangat kecil dan tidak berarti, kemudian menjadi perubahan yang penting terbuka dan kemudian menjadi perubahan kualitas; terjadi juga suatu perkembangan dimana perubahan kualitatif terjadi dengan lekas dan mendadak, berupa suatu loncatan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain.[24] Begitu juga dalam hubungan ekonomi dari suatu masyarakat dan dalam pertarungan kepentigan antara kelas, situasi revolusioner akan muncul. Jika ditafsirkan dengan cara ini maka materialisme dialektik memberi dasar kepada perjuangan kelas dan tindakan revolusioner.

Pada tahun 1848 Karl Marx dan Freidrich Engels menerbitkan *Manifesto Komunis*, suatu dokumen yang banyak mempengaruhi gerakan revolusioner. Akhirnya Karl Marx menerbitkan karyanya yang besar, Das Kapital, Jilid pertama terbit pada tahu 1867. Marx membentuk interpretasi ekonomi tentang sejarah, dan interpretasi tersebut telah berpengaruh kuat selama seratus tahun terakhir ini. Bagi Marx faktor ekonomi adalah faktor yang menentukan dalam perkembangan sejarah manusia. Sejarah digambarkan sebagai pertempuran kelas, dimana alat-alat produksi, didistribusi dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi dari masyarakat menyebabkan perubahan dalam hubungan kelas, dan ini semua mempengaruhi kebiasaan dalam tradisi politik, sosial, moral dan agama.

---

[22] Raymond Aron, *Main Currens in Sociological Thought,* 2 Jilid-1965 (Anchor Book Edition 1968) h. 83-84. dalam Veeger, *Realitas Sosial; Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, Cet. IV., 1993) h. 26-27.

[23] Titus Smith Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, *Op. Cit.,* h. 304-306.

[24] Joseph Stalin, *Dialectical and Historical Materialism* (New York: International Publisher, 1950) h. 8.

Terdapat lima macam sistem produksi, empat macam telah muncul bergantian dalam masyarakat manusia. Sistem kelima diramalkan akan muncul pada hari esok yang dekat, dan sekarang sudah mulai terbentuk. Yang *pertama* adalah sistem komunisme primitif. Sistem ini adalah tindakan ekonomi yang pertama dan mempunyai ciri-ciri pemilikan benda secara kolektif, hubungan yang damai antar perorangan dan tidak adanya tehnologi. Tingkat *kedua* adalah sistem produksi kuno yang didasarkan atas perbudakan. Cirinya adalah timbulnya hal milik pribadi, yang terjadi ketika pertanian dan pemeliharaan binatang mengganti perburuan sebagai sarana hidup. Dengan lekas, kelompok aristokrat dan kelas tinggi memperbudak kelompok lain. Pertarungan kepentingan timbul ketika kelompok minoritas menguasai sarana hidup. Tingkatan *ketiga* adalah tingkatan dimana kelompok-kelompok feodal menguasasi penduduk-penduduk. Pembesar-pembesar feodal menguasai kelebihan hasil para penduduk yghanya dapat hidup secara sangat sederhana.

Pada tingkatan *keempat*, timbulah sistem borjuis atau kapitalis dengan meningkatnya perdagangan, penciptaan dan pembagian pekerjaan; sistem pabrik menimbulkan industrialis kapitalis, yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi. Si pekerja hanya memiliki kekuatan badan, dan terpaksa menyewakan dirinya. Sebagai giliran tangan menimbulkan masyarakat dengan pengusaha kapitalis.

Sejarah masyarakat mulai pecahnya masyarakat primitif bersama adalah sejarah pertarungan kelas. Selama seratus lima puluh tahun terakhir, kapitalisme industri dengan doktrin *self-interest* (kepentingan diri sendiri)-nya telah membagi masyarakat menjadi dua kelompok yang bertentangan: borjuis atau kelompok yang memiliki dan proletar atau kaum buruh. Oleh karena kelas yang memiliki menguasai lembaga-lembaga kunci dari masyarakat dan tidak mengizinkan perubahan besar dengan jalan damai, maka jalan keluarnya adalah penggulingan kondisi sosial yang ada dengan kekerasan.

Setelah revolusi, menurut materialisme dialektik dan filsafat komunis, akan terdapat dua tingkat masyarakat. Pertama tingkat peralihan, yaitu periode kediktatoran dari kaum proletar. Dalam waktu tersebut orang mengadakan perubahan sosial yang revolusioner, dan kelas-kelas masyarakat dihilangkan dengan dihilangkannya hak milik pribadi terhadap sarana produksi, distribusi dan pertukaran (*excange*). Tingkat kedua setelah revolusi adalah tingkat kelima dan tipe terakhir dari sistem produksi. Itu adalah “masyarakat tanpa kelas” atau komunisme murni. Pada tingkatan tersebut bentrokan dan eksploitasi akan telah selesai, dan semua orang, pria dan wanita akan terjamin kehidupannya yang layak. Negara tidak lagi menjadi alat kelas dan dialektik tidak berlaku lagi dalam masyarakat tanpa kelas. Akan terdapat kemerdekaan, persamaan, perdamaian dan rizki pun melimpah. Masyarakat akan menyaksikan realisasi kata-kata: dari setiap orang menurut kemauannya, bagi setiap orang menurut kebutuhannya.

Kritik Teori Sosial Marx[25]

Diantara para teoretikus Marx, barangkali Habermaslah orang yang paling tekun menelusuri asal-usul teoretis dari Marxisme, sampai pada pikiran-pikiran sebelum Marx. Sekilas usaha semacam ini tampaknya membuang-buang waktu, tetapi persis sebenarnya disini letak ketajaman Habermas. Sebuah “hermeneutik” atas Marxisme dapat mengembalikan pada maksud asli Marx sendiri sebagai seorang yang prihatin terhadap situasi zamannya. Dengan cara itu Habermas menunjukkan mengapa teori Marx itu menjadi semakin kritis pada zamannya. Dalam esainya, *Between Philoshopy and Science: Marxisme as Critique*[26], “hermeneutik” macam itu sungguh sangat menarik, bukan saja untuk mengetahui bagaimana konsep Habermas tentang sebuah teori sosial yang kritis, tetapi juga darimana teori Marx meraih sifat kritisnya.

Sudah jelas bagi Habermas sendiri bahwa Marxisme yang dipertahankan terus dalam bentuk ortodoknya[27] itu sudah ketinggalan zaman. Karl Marx itu hidup pada zaman abad ke-19, saat pesatnya industrialisasi dan mekanisme pasaran bebas. Itulah zaman kapitalisme liberal. Zaman sekarang, abad ke-20 ini, kapitalisme sudah berkembang semakin kompleks. Habermas menyebut tahap kapitalisme dewasa ini sebagai *Spatkapitalismus* atau kapitalisme lanjut. Pada tahap ini, analisis-analisis Marx menjadi tidak relevan.

Habermas mengemukakan empat alasan. *Pertama,* berbeda dari zaman kapitalis liberal saat ekonomi menentukan kebijakan-kebijakan politis, dewasa ini, karena intervensi negara ke pasar politik bukan lagi merupakan ”superstruktur”. Pengandaian dasar Marx bahwa basis ekonomi menentukan superstruktur kesadaran menjadi tidak relevan. *Kedua,* perkembangan standar hidup dewasa ini sudah begitu jauh, sehingga revolusi sudah tidak bisa dikobarkan lewat istilah-istilah ekonomi. Dewasa ini juga terjadi kompromi kelas-kelas sosial, sehingga antagonisme kaum buruh dan kapitalis ala Marxisme itu juga menjadi tidak relevan, sebab kecemburuan sosial tidak hanya dirasakan kaum buruh, tapi juga kelas-kelas lain. *Ketiga,* karena itu, kaum proletar tidak bisa dijadikan tumpuan harapan sebagai agen perubahan. Perjuangan kelas pada taraf nasional sudah distabilkan, tetapi sebagai gantinya, terjadi ketegangan global antar negara-negara kapitalis dan komunis. *Keempat,* berdirinya raksasa Uni Soviet memadamkan diskusi kritis mengenai Marxisme, sehingga Marxisme lambat laun kehilangan daya tariknya sebagai ilmu.

---

[25] Franscisco Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1993) h. 53-69.
[26] Jurgen Habermas, *Legitimation Crisis* (Boston: Beacon Press, 1973).
[27] Franz Magnis-Suseno, *Hegel, Filsafat Kritis dan Dialektika,* dalam Driyarkara Tahun XVIII No. 3.

Proses Perubahan Sosial dalam Konteks Global[28]

Globalisasi mau tidak mau harus dilalui oleh seluruh negara di dunia ini. Hubungan antar negara menjadi sedemikian penting pengaruhnya dalam mewujudkan kehidupan masin-masing negara terlebih ketika era globalisasi tiba. Menjadi suatu keniscayaan apabila sebuah negara harus bekerjasama dengan negara lain bahkan lebih ekstremnya lagi memerlukan bantuan negara lain. Pola-pola hubungan antar negara menjadi bahasan penting dalam membedah perubahan sosial yang terjadi saat ini.

Selain peran negara lain (negara maju), perubahan sosial di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh organisasi internasional dan bahkan perusahaan multi nasional. Dominasi negara maju dapat dilihat dari berbagai bantuan yang masuk ke nagara berkembang atas nama modernisasi. Modernisasi diangap sebagai jalan untuk meraih kemajuan negara berkembang. Organisasi internasional mempunyai peran yang hampir sama dengan negara maju. Berbagai kesepakatan dan kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak yang sangat nyata bagi negara berkembang. Hal ini terjadi karena memang organisasi internasional didominasi oleh negara maju.

Analisis Hubungan Antar Negara dan Globalisasi

Ketidaksamaan menjadi dasar pemikiran dalam mengulas pola relasi antar negara. Kita sadari bahwa ketidaksamaan antar negara yang menyebabkan timbulnya pola-pola relasi tertentu. Secara garis besar pembagian negara dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar, yaitu negara kaya dan miskin. Terdapat lima pola relasi antar negara, yaitu sistem feodal, sistem campuran, sistem kelas, sistem egalitar dan sistem plural.

Teori ala Barat merupakan pandangan yang disampaikan oleh kelompok negara maju yang tidak berideologi komunis. Bagi negara barat, hubungan antar negara menekankan pada kemerdekaan politik masing-maising negara. Suatu keadaan yang menjadi prasyarat lahirnya hubungan antar negara adalah tertib internasional. Peran lembaga internasional semacam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sangat penting untuk mewujudkan tertib hukum internasional.

Negara berkembang harus melalui jalan yang disebut dengan modernisasi untuk mencapai tahap kemajuan seperti halnya yang telah dijalani oleh negara maju. Negara maju mempunyai tanggung jawab untuk membantu negara berkembang. Negara berkembang menjadi sebuah sarana pertahanan ideologi bagi negara barat. Pertentangan dengan negara komunis dalam penyebaran ideologi pada negara berkembang menjadi alasan negara barat dalam membina hubungan harmonis dengan enagra berkembang.

Kubu negara komunis juga mempunyai teori sendiri, walaupun secara nyata terdapat perbedaan antara USSR dan RRC. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan ideologi dan kepentingan. USSR melihat masyarakat dunia sebagai keseluruhan negara-negara, yang kesemuanya tumbuh menjadi negara komunis. Tahap yang harus dilalui adalah; (1) masyarakat primitif, (2) masyarakat feodal, (3) masyarakat kapitalis, (4) masyarakat sosialis dan terakhir (5) masyarakat komunis.

USSR membedakan negara-negara di dunia dalam tiga kelompok besar, yaitu negara sosialis, negara imperialis dan negara koloni. Saat ini USSR sudah berada pada posisi yang “sempurna” sehingga layak untuk menjadi pemimpin bagi negara lainnya. RRC melihat bahwa negara-negara berkembang dalam posisi yang terjepit di tengah-tengah persaingan antara USA dan USSR. Pandnagan RRC ini didasarkan pada posisinya yang “merasa” sebagai bagian dari negara dunia ketiga.

Sebuah teori yang menggambarkan adanya “derajat” suatu negara dikemukakan oleh Balandier dan dikenal dengan teori stratifikasi sosial. Meskipun secara ideal posisi masing-masing negara di dunia adalah sejajar, namun pada kenyataannya sungguh bertolak belakang. Secara nyata kita dapat lihat adanya stratifikasi berdasarkan ekonomi yang ditentukan oleh tingkat perkembangan teknologi dan ekonomi, potensi ekonomi, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan kemungkinan untuk mengembangkan peluang ekonomi.

Akibat dari adanya ketidaksamaan ini menimbulkan tiga pola hubungan, yaitu adanya upaya meniru negara maju oleh negara berkembang untuk meraih kesejajarannya. Kemungkinan kedua adalah negara yang mempunyai posisi sejajar saling bergabung dan berusaha untuk memperbaiki atau mempertahankan posisinya. Terakhir, tibulnya pola relasi patron klien antara negara berkembang dan negara maju.

Berangkat dari teori stratifikasi sosial, muncullah teori perjuangan kelas. Kemungkinan yang diharapkan terjadi adalah adanya kemauan untuk bergabung dan berkelompok antar negara yang mempunyai posisi sejajar sehingga membentuk kelas. Konsekuensi dari teori ini adalah akan timbulnya dua kelompok negara-negara di dunia, yaitu kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang.

Asumsi dasar teori ketergantungan menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi global, dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau

---

[28] Disadur dari makalah, *Proses Perubahan Sosial dalam Konteks Global*, Slamet Widodo (Tahun 2008). Rujukan tulisan: Inglehart, R. 1995. *Changing Values, Economic Development and Political Change.* International Social Sciences Journal no. 145. September 1995. Schoorl, J.W. 1980. *Modernisasi; Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang.* Jakarta. PT. Gramedia. Seabrook, J. 1998. *Para Perintis Perubahan*. Jakarta. Yayasan obor Indonesia. Sztompka, P. 1994. *The Sociology of Social Change*. Oxford. Blackwell Publisher.

tak akan pernah melahirkan pembangunan. Terbelakang adalah label untuk negara dengan kondisi teknologi dan ekonomi yang rendah diukur dari sistem kapitalis. Frank adalah penyebar pertama dependensi. Menurut Frank, modernisasi mengabaikan sejarah (ahistoris) karena telah mengabaikan kenyataan hancurnya struktur masyarakat dunia ketiga. Frank mengumpamakan hubungan hubungan negara-negara maju dengan negara dunia ketiga sebagai rangkaian hubungan dominasi dan eksploitasi antara metropolis dengan satelitnya. Lebih jauh Roxborough menyatakan bahwa terdapat peranan struktur kelas di negara dunia ketiga yang juga berperan dalam hubungan dominasi tersebut.

Santos menyatakan, bahwa ada tiga bentuk keterantungan, yaitu: ketergantungan kolonial, ketergantungan industri keuangan, dan ketergantungan teknologi industri. Pada ketergantungan kolonial, negara dominan, yang bekerja sama dengan elit negara tergantung, memonopoli pemilikan tanah, pertambangan, tenaga kerja, serta ekspor barang galian dan hasil bumi dari negara jajahan.

Menurut Roxborough teori imprealisme memberikan perhatian utama pada ekspansi dan dominasi kekuatan imprealis. Imprealis yang ada pada abad 20 pertama-tama melakukan ekspansi cara produksi kapitalis ke dalam cara produksi pra-kapitalis. Tujuan ekspansi tersebut ke negara ketiga pada mulanya hanyalah untuk meluaskan pasar produknya yang sudah jenuh dalam negeri sendiri, serta untuk pemenuhan bahan baku. Namun, pada pekembangan lebih jauh, ekspansi kapitalis ini adalah berupa cara-cara produksi, sampai pada struktur ekonomi, dan bahkan idelologi. Struktur ketergantungan secara bertingkat mulai dari negara pusat sampai periferi disampaikan oleh Galtung. Imprealisme ditandai satu jalur kuat antara pusat di pusat dengan pusat di periferi.

Teori sistem dunia masih bertolak dari teori ketergantungan, namun menjelaskan lebih jauh dengan merubah unit analisisnya kepada sistem dunia, sejarah kapitalisme dunia, serta spesifikasi sejarah lokal. Menurut Wallerstein, dunia ini cukup dipandang hanya sebagai satu sistem ekonomi saja, yaitu sistem ekonomi kapitali. Negara-negara sosialis, yang kemudian terbukti juga menerima modal kapitalisme dunia, hanya dianggap satu unit saja dari tata ekonomi kapitalis dunia. Teori ini berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri dari ekonomi kapitalis yang mendunia. Usaha menginterpretasikan perkembangan historis kapitalisme dilakukan oleh Wallerstein dalam sejarah global dunia. Ia memandang kapitalisme sebagai suatu sistem dunia yang mempunyai pembagian kerja yang kompleks secara geografis. Sebagaimana teori dependensi, teori sistem dunia membagi sistem ekonomi kapitalis dunia menjadi pusat, semi pinggiran, dan pinggiran.

Globalisasi budaya menjadi bahan perhatian ketika sebagian ahli telah tersadar akan adanya fenomena kontak, benturan dan konflik budaya. Fenomena ini terjadi ketika kontak antara negara maju dan negara berkembang menjadi sedemikian kuatnya. Kuatnya penetrasi budaya modern membawa konsekuensi semakin terpinggirkannya budaya tradisional yang telah hidup berabad lamanya di negara berkembang.

Fenomena ini melahirkan dua tanggapan yang saling bertentangan. Sebagian antropolog melihat fenomena ini sebagai sebuahgejala imperialisme kebudayaan yang menimbulkan bencana besar. Semakin lunturnya budaya tradisional mau tidak mau menjadi sebuah akibat pasti dari kontak kebudayaan tersebut. Namun terdapat pandangan lainnya yang menyatakan bahwa peradaban sekaligus kebudayaan barat dianggap lebih baik dan bermartabat dibandingkan dengan kebudayaan tradisional. Anggapan ini lahir ketika era kolonialisme dan imperialisme.

Saat ini budaya barat berkembang dengan pesatnya di negara berkembang. Modernisasi yang dianggap tidak ubahnya sebagai westernisasi telah menggerus budaya tradisional. Negara maju dianggap memiliki kebudayaan yang lebih modern sehingga perlu ditiru oleh negara berkembang. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi faktor yang semakin memperkuat penetrasi budaya barat pada budaya tradisional. Menjadi sebuah ketidakadilan ketika arus pertukatan budaya hanya bersifat searah, yaitu dar negara maju ke negara berkembang.

Telaah Tulisan Inglehart dan Seabrook

Modernisasi yang menjadi pilihan untuk mencapai kemajuan oleh banyak negara berkembang telah lama menimbulkan debat berkepanjangan. Dua kubu yang berhadapan adalah Marxian dan Weberian. Kubu Marxian melihat bahwa pembangunan ekonomi, politik dan budaya memiliki kesalingterkaitan karena pembangunan ekonomi menentukan karakteristik sosial politik masyarakat. Pihak Weberian memberikan pandangan bahwa kebudayaan membentuk kehidupan ekonomi dan politik. Walaupun keduanya bertentangan, namun pada dasarnya mempunyai persamaan pendapat bahwa perubahan sosial ekonomi mengikuti suaitu pola yang dapat diramalkan.

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan faktor ideologi menjadi bahan kajian Weber sehingga melahirkan etika protestan dan semangat kapitalismenya. Weber melihat bahwa pada wilayah Eropa yang mempunyai perkembangan industrial kapital pesat adalah wilayah yang mempunyai penganut protestan. Bagi Weber, ini bukan suatu kebetulan semata. Nilai-nilai protestan menghasilkan etik budaya yang menunjang perkembangan industrial kapitalis. Protestan Calvinis merupakan dasar pemikiran etika protestan yang menganjurkan manusia untuk bekerja keras, hidup hemat dan menabung. Pada kondisi material yang hampir sama, industrial kapital ternyata tidak berkembang di wilayah dengan mayoritas Katholik, yang tentu saja tidak mempunyai etika protestan.

Modernisasi telah membawa perubahan berupa sekulerisasi dan birokratisasi. Gejala ini terjadi di beberapa negara maju seperti USA, eropa barat dan asia. Bentuk sekularisasi dapat kita lihat dari semakin lunturnya nilai agama. Gerakan liberal serta demokrasi seakan "menghalalkan" adanya fenomena gay, lesbian dan aborsi. Fenomena ini sudah menjadi gejala yang umum dan mendapatkan banyak tantangan dari gereja (ortodoks).

Lahirnya gerakan fundamental agama, terutama Islam pada negara maju (kaya) seperti Iran dan Libya tidak dapat dikatakan sebagai sebuah "anomali" modernisasi. Hal ini dikarenakan Iran dan libya bukan merupakan negara maju hasil dari modernisasi. Kemajuan (kekayaan) Iran dan Libya merupakan hasil dari kekayaan alam terutama minyak yang melimpah dan bukan dari hasil industrialisasi via modernisasi. Penurunan nilai tradisioanl mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang membedakan antara modenisasi dan post-modernisasi. Post-modernisasi tidak berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.

Seabrook mengungkapkan beberapa aksi yang dilakukan oleh peraih Right Livelihood Award. Para penerima penghargaan ini telah dianggap berjasa dalam memberikan tawaran solusi masalah lingkungan, ketidakadilan sosial, pelanggaran HAM dan kemiskinan orang-orang pribumi. Sebagai dampak globalisasi, negara berkembang semakin terperosok dalam penderitaan dan lebuh tepatnya dapat dikatakan sebagai korban globalisasi via modernisasi. Berbagai kebijakan yang diambil oleh negara maju melalaui organisasi internasional seringkali ridak dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Bantuan seringkali hanya dinikmati oleh kalangan elit di negara berkembang.

Post-modernisme dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap modernisme yang dianggap telah banyak memberikan dampak negatif daripada positif bagi pembangunan di banyak negara berkembang. Post-modernisme bukan hanya bentuk perlawanan melainkan memberikan jawaban atau alternatif model yang dirasa lebih tepat. Post-modernisme merupakan model pembangunan alternatif yang ditawarkan oleh kalangan ilmuan sosial dan LSM. Isu strategis yang diusung antara lain anti kapitalisme, ekologi, feminisme, demokratisasi dan lain sebagainya. Modernisme dianggap tidak mampu membawa isu-isu tersebut dalam proses pembangunan dan bahkan dianggap telah menghalangi perkembangan isu strategis itu sendiri. Post-modernisme dinyatakan sebagai model pembangunan alternatif karena memberikan penawaran konsep yang jauh berbeda dengan modernisme. Tekanan utama yang dibawa oleh post-modernisme terbagi dalam tiga aspek, yaitu agen pembangunan, metode dan tujuan pembangunan itu sendiri.

Pembangunan dengan basis pertumbuhan ekonomi yang diusung oleh paradigma modernisme memiliki banyak kekurangan dan dampak negatif. Pendekatan ini hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan indikator GDP yang tidak mencerminkan adanya pemerataan. Kesenjangan antar penduduk mungkin saja terjadi sehingga indikator pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan keberhasilan semu saja. Akumulasi modal yang berhasil dihimpun sebagian besar merupakan investasi asing yang semakin memuluskan jalannya kapitalisme global.

Perkembangan paradigma pembangunan alternatif sebagai bentuk kritik sekaligus perlawanan modernisme semakin pesat seiring dengan semakin berkembangnya LSM baik dari kuantitas maupun kualitas. Posisi tawar LSM yang semakin baik terhadap pemerintah memberikan kontribusi berupa diterimanya ide-ide pembangunan yang selama ini mereka dengungkan. Faktor yang kedua adalah meningkatnya kesadaran akan pembangunan berkelanjutan yang peka terhadap isu ekologi. Modernisme selama ini dianggap sebagai pembawa kerusakan lingkungan dengan industrialisasinya. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ternyata diiringi pula oleh meningkatnya kerusakan lingkungan. Kegagalan paradigma pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara berkembang, terlebih setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1990-an.

Penulis	Topik Kajian	Anit Analisis	Konsep Pokok	Variabel Perubahan
Schoorl	Perubahan global	Makro (hubungan antar negara)	Teori barat, teori komunisme, teori stratifikasi sosial, teori perjuangan kelas, teori ketergantungan, teori imperialisme.	Hubungan antar negara, bantuan asing, ideologi, tingkat pertumbuhan ekonomi, demografi.
Sztompka	Perubahan global dan dampak globalisasi	Makro (hubungan antar negara)	Teori imperialisme, teori ketergantungan, teori sistem dunia, globalisasi budaya.	Hubungan antar negara, pergeseran budaya, bantuan asing, pertumbuhan ekonomi.
Inglehart	Perubahan global dan dampak globalisasi	Meso (negara)	Modernisasi dan Post-modernisasi	Pergeseran nilai, tingkat pertumbuhan ekonomi (GNP)
Seabrook	Dampak globalisasi	Mikro (komunitas atau masyarakat)	Pembangunan berbasis lokalitas ("pemberdayaan")	n/a

Sintesis

Perubahan pada tingkat global dipengaruhi oleh pola hubungan antar negara. Negara berkembang cenderung hanya sebagai "objek" perubahan yang dihasilkan oleh negara maju. Berbagai teori yang menjelaskan hubungan antar negara memberi gambaran bahwa peran negara maju dalam modernisasi menghasilkan gejala globalisasi. Globalisasi ini yang meluluhlantakan nilai budaya tradisional.

Ketidakpuasan akan modernisasi melahirkan pemikiran post-modernisasi yang mencoba menolak pengaruh perkembangan ekonomi terhadap perubahan budaya. Berbagai pengalam telah membuktikan bahwa perubahan di tingkat global tidak hanya dimonopoli oleh negara maju saja, namun negara berkembang memiliki peran dalam perubahan global tersebut. Munculnya ide pembangunan berbasisi lokalitas dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap modernisasi ini. Keberhasilan pembangunan di tingkat lokalitas diharapkan dapat membawa perubahan di tingkat global utamanya mengurangi ketergantungan negara berkembang dengan negara maju.

BAGIAN 5: STRATEGI-TAKTIK GERAKAN DAN KADERISASI PMII

I. Perubahan Geopolitik Global

Globalisasimerupakan fenomena empat hal. Pertama, e*tno-scape* adalah orang modern yang terus menerus memperbaharui kemodernannya dengan cara mendatangi etnis yang menurutnya terbelakang. Kedua, *capital-scape* adalah perputaran uang pada ranah global sehingga uang itu sendiri tidak memiliki "kewarganegaraan" lagi. Ketiga, *ideo-scape,* artinya ide yang dapat melewati batas trans-national. Sebagai contoh, gejala terorisme yang ada di Timur Tengah dapat merembet ke Indonesia. Keempat, *media-scape* yang mendorong dan mengkonstruksi pemikiran kita. Saat ini kita tidak dapat membendung arus informasi yang semakin kuat pasca adanya teknologi, seperti internet. Konsekuensi dari globalisasi adalah ancaman perang asimetris.

Asymetrical warfare (perang asimetris) mulai dikenal dalam perang Franco-Spanish pada tahun 1823, dan sekarang semakin dianggap sebagai salah satu komponen utama dari peperangan generasi keempat*(fourth generation warfare)* yaitu perang atau konflik ditandai oleh kaburnya batas antara perang dan politik atau antara tentara dan sipil, dengan ciri menonjol dari peperangan ini adalah melibatkan dua aktor atau lebih, dengan kekuatan yang tidak seimbang yang mencakup spektum peperangan yang sangat luas. Kerajaan Belanda mempraktekan peperangan asimetris ini ketika menjajah Indonesia dengan menjalankan politik *devide et impera* atau politik pecah belah yang merupakan kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan dan mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat sehingga mampu memerdekakan diri.

Perkembangan mutakhir dari *asymetrical warfare* ini terlihat jelas dalam kasus *Arab Spring*[29] di mana sepeninggal rezim-rezim mapan terpecahnya masyarakat yang menolak dikuasai satu sama lain. Mengkristalkan konflik horizontal berdasarkan aliran keagamaan, ideologi, etnik, atau klan. Melalui Arab spring, destabilisasi dan ketidakbersatuan, negara-negara kuat-lama berkehendak mempertahankan hegemoni dan dominasi atas pasokan minyak.

Setelah menggunakan taktik *hard power* (invasi) berhasil di Afghanistan dan Irak maka langkah berikutnya adalah dengan menggunakan *softpower* yang menggunakan berbagai kelompok LSM untuk menggalang gerakan sosial menumbangkan rezim. Jika upaya damai terhambat maka langkah berikutnya adalah dengan memberikan donasi, suplai senjata, mengaktifkan para pelarian di luar negeri, dan melegitimasi pihak oposisi sebagai perwakilan resmi negara.

Terjadi juga perebutan pengaruh kawasan di Jalur-jalur perdagangan dan kawasan sumberdaya alam antar kekuatan ekonomi besar dan aliansinya. Hal ini misalnya dapat dilihat dari ketegangan di Selat Hormuz (Teluk Persia). Bisa dibayangkan jika meletus peperangan di Teluk Persia, maka distribusi 40% minyak dunia ke berbagai belahan bumi dari Teluk akan macet, dan sebagai dampak langsung ialah naiknya harga-harga barang dan jasa akibat melambungnya harga energi karena kelangkaan. Inilah hikmah yang dapat dipetik, betapa tinggi urgensi sebuah selat bagi geostrategi banyak negara. Perebutan pengaruh ini juga terlihat di negara-negara sekitar Selat Malaka yang menjadi jalur perairan tersibuk (di dunia) setelah Selat Hormuz di Teluk Persia. Keberadaan tersebut membuat Selat Malaka dijuluki *chokepoints of shipping in the world* baik untuk ekspor-impor, sosial politik, keamanan, lingkungan maupun militer dan lain-lainnya. Data Kementerian Pertahanan menyebut, sejak tahun 1999-2008 kapal-kapal yang melewati Selat Malaka meningkat 74% dan era 2020-an nanti prakiraan hilir mudik pelayaran mencapai 114.000 kapal. Menurut Goldman Sachs, kelompok negara yang bakal menguasai perekonomian tahun 2050 kelak adalah Brasil, Rusia, India dan Cina (BRIC), terutama sekali Cina dan India yang paling aktif melintasi baik Selat Malaka, Selat Sunda, maupun Selat Lombok. Bagi Indonesia sendiri, selain Selat Malaka atau selat-selat lainnya, tampaknya Selat Sunda tergolong sebagai lintasan utama dalam konteks pelayaran dunia, terutama di

[29] Arab spring tidak hanya sekedar mengganti rezim-rezim di Timur Tengah tetapi juga secara perlahan menghabisi kekuatan sosial-politik Islam Ahlussunah wal Jama'ah (Aswaja). Faksionalisasi kelompok Islam saat ini diarahkan hanya kepada dua kelompok wahabi atau salafi, yang kerap menyebut diri sebagai Sunni, dan Syi'ah.

lingkungan Asia Tenggara, ASEAN dan kawasan Asia Pasifik. Lebih utama lagi, kevitalan Selat Sunda, adalah pelayaran dari Laut China Selatan menuju Lautan Hindia.

Dalam konteks geopolitik global yang juga perlu dicermati adalah terbentuknya organisasi-organisasi kerjasama baru.

Pertama, terbentuknya BRICS. BRICS merupaka akronim dari Brazil, Russia, India, Cina, dan disusul Afrika Selatan (South Africa) yang didirikan di Yaketirinburg, Rusia pada tahun 2009. Kumpulan negara industri baru (*new industrial countries*) yang semula terkategorisasi sebagai *underdevelopment* atau *third world* ini pada tahun 2012 mewakili 40 persen populasi dunia, 25 persen daratan, 20 persen GDP, dan mengontrol 43 persen cadangan devisa global. Kelompok ini bermula hanya fokus pada situasi peningkatan ekonomi dan reformasi institusi keuangan global. Belakangan orientasi BRICS sudah bergeser, sebagaimana dikutip dari pernyataan Presiden Cina, Hu Jintao, baru-baru ini bahwa BRICS merupakan penjaga dan promotor bagi negara-negara berkembang dan sebagai kekuatan perdamaian dunia. Tampilnya negara-negara BRICS menjadi kekuatan besar ekonomi dunia berdampak pada peningkatan anggaran pertahanan. Situs *europiangeostrategy* mengklasifikasi Cina sebagai *potentialsuperpower* di bawah AS yang masuk sebagai *superpower*, Rusia dan India sebagai *great power* di tingkat regional, dan Brazil sebagai *middle power*. Berdasarkan kekuatan ekonomi dan pertahanan maka BRICS memiliki daya tekan yang luar biasa dalam isu-isu ekonomi dan keamanan dunia.

Kedua, terbentuknya Shanghai Cooperation Organization (SCO). Organisasi kerjasama keamanan ini semula bernama Shanghai Five yang didirikan pada tahun 1996 di Shanghai, Cina. Terdiri dari Rusia, Cina, Kazakhstan, Kyrgistan, dan Tajikistan. Setelah masuknya Uzbekistan, tahun 2001, organisasi ini mengalami perubahan nama. SCO berfokus pada kerjasama keamanan, ekonomi, budaya, dan aktivitas militer. Tahun 2004 Mongolia ditetapkan sebagai peninjau dalam partisipasinya di dalam SCO. India, Pakistan, dan Iran menyusul di tahun berikutnya.

Ketiga, terbentuknya “Uni-Eurasia”. Gagasan ini dilontarkan Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin. Dalam artikelnya yang berjudul "Proyek Integrasi Eurasia Baru: Masa Depan yang Dimulai Hari Ini" (Harian Izvestia, 4 Oktober 2011). Gagasan yang memiliki tujuan "persatuan baru" negara-negara bekas Uni Soviet tersebut berpotensi menjadikan euro-asia sebagai poros kekuatan baru di bawah tatanan baru dunia Rusia dan Cina. Gagasan itu dimunculkan Putin di tengah menurunnya pengaruh Amerika Serikat dan Jepang di Asia-Pasifik, dan melemahnya Uni-Eropa akibat krisis ekonomi. Selain itu Putin juga bermaksud menaikkan pamor Rusia setelah diterima dalam East Asia Summit (EAS). Apa konsekuensinya? Tatanan dunia baru akan menempatkan pengaruh yang kuat Rusia dan Cina atas negara-negara Asia Tengara dan Pasifik Barat Daya yang nantinya mampu mengurangi dominasi Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Poros kekuatan baru dunia tersebut menjadi sangat strategis karena membentuk satu aliansi dengan potensi kekayaan alam yang besar. Banyak pengamat yang menganggap gagasan Putin ini sebagai "Uni Soviet" dengan wajah baru dimana Cina tetap merupakan sekutu tradisonalnya. Selain itu, perkembangan wacana geopolitik global tersebut merupakan upaya Rusia untuk menggiatkan tatakelola multilateralnya dengan negara-negara bekas Uni Soviet dan Asia.

Beberapa bentuk organisasi kerjasama multilateral maupun ide baru yang muncul belakangan merefleksikan perubahan geopolitik dunia. Laju dunia saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh Amerika Utara dan Eropa Barat tetapi juga sangat mempertimbangan eksistensi negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi dan militer baru.

Kekuatan lama tidak tinggal diam menerima keadaan dalam menyikapi perubahan pergeseran kekuatan dari Atlantik ke Pasifik. AS telah membangun pangkalan militernya di Darwin dan tetap mempertahankan pangkalan militernya di Jepang untuk mengimbangi pesatnya kekuatan militer Cina. *War of position*, meminjam istilah Gramsci, dilakukan oleh AS yang memproyeksikan penempatan bertahap 60 persen armada lautnya berada di Pasifik pada tahun 2020 sebagaimana disampaikan oleh Leon E. Panetta, Menteri Pertahanan AS, pada Juni 2012 dalam Shangri-La Dialog di Singapura. Perlombaan pembelian dan produksi senjata canggih di Asia terlihat jelas dari hampir imbangnya anggaran pertahanan negara-negara Asia yang mencapai US $ 262 trilyun pada tahun 2011 dengan negara-negara Eropa yang tergabung di dalam NATO yang berada di bawah kisaran US $ 270 trilyun. Dari jumlah tersebut, anggaran pertahanan Cina mengambil porsi tertinggi sebanyak 30 persen.

II. Membaca Dinamika Perubahan Nasional

Sejak 1998 Indonesia mengalami satu perubahan besar. Perubahan ini menyangkut sejumlah hal: reformasi kelembagaan, reformasi ekonomi, dan transformasi masyarakat secara luas. *Pertama*, reformasi kelembagaan di tingkat Negara yang berhasil menggusur pemerintahan yang otoritarian dan sentralistik ke bentuk pemerintahan yang mencerminkan hubungan pusat dan daerah yang bersifat desentralistik dan memberi ruang bagi otonomi daerah yang lebih luas. Bersamaan dengan itu pula tumbuh lembaga-lembaga baru yang berfungsi melakukan pengawasan kekuasaan, seperti Komnas HAM, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lainnya. Lembaga-lembaga baru ini menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik, namun secara umum ditujukan untuk merespon tuntutan masyarakat akan kebebasan (berpendapat, berkumpul dan berserikat), demokratisasi, dan pengelolaan sistem pemerintah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip *good governance*

seperti transparansi, akuntabilitas dan *rule of law*. Perubahan ini juga mencakup kebebasan pers yang memungkinkan tumbuhnya banyak media massa cetak maupun elektronik (*online*) yang membawa konsekuensi-konsekuensi besar baik negatif maupun positif.

Kedua, reformasi ekonomi. Krisis moneter 1997-1998 yang menyebabkan kebangkrutan ekonomi yang luar biasa, membuat pemerintah RI terjerat utang yang menumpuk dan terpaksa patuh pada lembaga-lembaga donor dan lembaga keuangan internasional untuk melakukan reformasi kebijakan ekonomi. Akibatnya, sejumlah perundang-undangan yang direkayasa dan disusun dibawah tekanan lembaga-lembaga donor itu mendorong pemerintah untuk meliberalisasi perdagangan dan privatisasi pengelolaan sumberdaya ekonomi di sector-sektor strategis seperti Migas, Minerba, dan lainnya. Dalam hal ini kita kalah dalam "strategi": lewat aturan perundang2an, dan SDM kalah Berbeda dg strategi Cina yg menyekolahkan dulu SDM dipersiapkan untuk mengelola SDA sendiri

Terjerat pinjaman utang yang bukannya tanpa syarat itu, pemerintah RI berhasil didikte untuk mengubah *"space of law",*seperti UU Migas, UU Minerba, dan lain-lain yang pada akhirnya membuka *"space of place"* (ruang wilayah) seperti megaproyek MP3EI dan eksploitasi sumber-sumber daya alam strategis yang dimiliki rakyat. Oleh karena itu, meskipun negara ini mampu keluar dari krisis, semua "kemajuan" (mis. diukur dari pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%) harus dibayar dengan hilangnya aset-aset strategis negara, melemahnya kemandirian pengelolaan sumberdaya alam, dan pertumbuhan ekonomi yang tak menyentuh sektor-sektor ekonomi riil masyarakat. Reformasi ekonomi harus diakui cenderung dinikmati oleh sekelompok elit belaka, baik elit lama maupun elit baru yang berhasil merapat atau memeroleh sokongan dan membentuk oligarki politik-ekonomi baru.

Gejala perubahan besar yang *ketiga* adalah transformasi kemasyarakatan dan kebudayaan yang begitu cepat dan bisa dianggap "liar" yang entah itu berkaitan langsung ataukah tidak langsung secara struktural dan institusional dengan dua perubahan besar di atas. Di ranah ini, sikap pragmatis, hedonis dan konsumeris menjadi gaya hidup utama kehidupan sehari-hari. Arus globalisasi yang diterima tanpa filter (sebagai alat/sarana sekaligus nilai) telah mengkooptasi kesadaran sosial yang membuat selera pasar bukan hanya menjadi penanda status sosial seseorang, tetapi menjadi tempat perburuan kenikmatan yang tanpa ujung, tanpa jeda, dan tanpa mempertanyakan cara apapun bisa ditempuh (termasuk suap dan korupsi).

Praktek menghalalkan segala cara (budaya instan) bukan hanya dikatalisasi oleh globalisasi produk-produk budaya, nilai dan gaya hidup, tetapi juga kesempatan yang tersedia dan kebutuhan akan identitas atau *prestise* pada masyarakat transisi yang salah satunya ditandai oleh mobilitas vertikal yang sangat cepat. Mobilitas mendadak ini melahirkan *culture shock* yang menggunakan semangat "aji mumpung" untuk meraih dambaan material sebesar-besarnya sebagai pelampiasan dendam kemiskinan masa lalu. Sementara bagi mereka yang sudah mapan membutuhkan sabuk pengaman *(safety belt)* untuk melestarikan kenyamanan baik setelah mereka pensiun maupun untuk kelangsungan anak cucu.

Transformasi kebudayaan ini mencakup sikap-sikap materialisme dimana kekayaan material menjadi satu-satunya ukuran kesuksesan. Simbol-simbol material dan prestise yang bersifat artifisial dikejar lewat jalan pintas dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, termasuk merampas ruang publik (media, pendidikan) dan mencuri hak-hak publik (korupsi pajak, perampasan tanah, dan sumber daya alam). Tanpa suatu *counter-culture* yang memadai, konsumsi budaya material semacam ini ikut menjerat masyarakat dan kita ke dalam budaya pasar dan mendorong masuk ke dalam suatu prilaku anarkis baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Di tengah situasi masyarakat yang prihatin, konsumerisme dan hasrat mengejar prestise yang artifisial semacam itu adalah pertunjukan kekuasaan atau sejenis ketamakan yang diam-diam dipamerkan. Di lain tempat atau di ruang politik, korupsi dan money-politics dalam proses-proses pemilu adalah sejenis penghinaan terhadap rakyat.

Dalam situasi yang akumulatif seperti ini kita menemukan ironisme. Demokrasi memang berkembang secara prosedural, tapi nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat justeru merosot. Pemilu digelar secara rutin dan agen-agen politisi baru menempati lembaga-lembaga penentu kebijakan. Tapi justru di situlah agen-agen mediokratik ini menikmati hak-hak demokrasi tanpa memproduksi nilai-nilai kepublikan. Elit politik dengan mudah mengisi ruang demokrasi itu dengan persengkongkolan bisnis-politik untuk kepetingan menjarah negara baik sumber-sumber ekonominya maupun nilai-nilai dasar kepublikan politiknya. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa setelah lebih dari satu dekade umur reformasi Indonesia belum benar-benar keluar dari ***krisis***. Demokrasi menjadi kemerosotan nilai, kebebasan bergeser menjadi anarki. Gejala-gejala krisis ini paling tidak mengambil bentuk hal-hal berikut ini:

Gejala 1: Korupsi dan suap menjadi praktek sosial: Bukan rahasia lagi, para pejabat yang berkuasa banyak melakukan berbagai praktek penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan menerima suap. Mereka berasal dari lembaga-lembaga negara mulai eksekutif (menteri, birokrat, kepala daerah), lembaga legislative (DPR dan DPRD) dan lembaga yudisial (hakim), serta melibatkan lembaga penegak hukum (polisi dan jaksa). Bentuknya bisa beraneka ragam mulai dari yang paling terang-terangan sampai gelap-gelapan. Spektrumnya bisa sangat luas dari menghapus atau menyelipkan pasal-pasal ketika menyusun perundang-undangan, sampai kongkalingkong antara actor politik dan pengusaha atau antara petugas dan pembayar pajak. Kendatipun upaya-upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, tidak bisa dimungkiri bahwa kenyataannya selalu ada upaya serangan balik dari para koruptor atau pihak-pihak yang

kepentingannya terancam, untuk menggagalkan atau melemahkan institusi pemberantasan korupsi. Bila kita cermati fenomena korupsi dan praktek suap yang akut ini maka bisa dianalisasi bahwa akar politik-ekonominya adalah anarki dalam perebutan alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi, sementara akar budayanya dibalut oleh pengejaran tanpa akhir terhadap kedudukan, status sosial, gaya hidup dan prestise sosial dengan konsumsi budaya material sebagai penyangga utamanya. *Pragmatisme individual dan kenikmatan pribadi ditonjolkan, sebaliknya kepentingan bangsa ditinggalkan*.

Gejala 2: Produk Perundang-undangan yang merugikan rakyat: Ada banyak produk peraturan perundang-undangan yang berpotensi kuat merugikan rakyat karena lahir dari sistem perekonomian Indonesia yang berwatak kolonial. Sejak awal reformasi ekonomi bahkan sebagian jauh sebelumnya pada era Orde Baru, berbagai revisi perundangan-undangan bercorak liberal dilakukan untuk memenuhi tekanan internasional yang menghendaki system perekonomian Indonesia yang pro-pasar seluas-luasnya. Ini adalah bagian dari skema ekonomi yang sepenuhnya didikte oleh kepentingan lembaga-lembaga donor dan keuangan internasional yang berkolaborasi dengan korporasi multnasional untuk mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Dengan dalih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lembaga-lembaga tersebut bukan saja menggelontorkan utang kepada RI, tetapi juga menuntut konsesi agar RI membuka diri terhadap investasi asing, privatisasi dan liberalisasi perdagangan dan keuangan lewat reformasi kebijakan. Situasi ini semakin berlanjut ketika RI dililit utang saat krisis ekonomi 1997 dan IMF kembali memaksakan resep ekonomi dalam bentuk program penyesuaian structural *(structural adjustment policy)* agar pemerintah membuka seluas-luasnya terhadap pasar dan investasi. Sejumlah peraturan perundangan-perundangan pun lahir, seperti UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU Migas, UU Sumberdaya Air dan lainnya. Selain RI dijajah lewat perundang-undangan, lemahnya SDM dan teknologi yang ketinggalan menjadi alasan penyerahan pengelolaan SDA dan sector finansial dikuasi asing. Dus, *sistem hukum ekonomi RI tidak berpihak pada kemandirian, sementara aktor-aktor dalam pemerintah tidak memiliki keberpihakan pada rakyat*.

Gejala 3: Merosotnya kebajikan bersama *(common good)* dan kesukarelaan: Ada fenomena sosial yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat kita belakangan ini yakni suatu praktis sosial yang ditandai oleh merosotnya kesadaran bersama tentang tanggung jawab, kebajikan bersama, saling percaya dan kesukarelaan. Dalam hampir semua kagiatan, uang dan imbalan materi lainnya menjadi dasar bagi berlangsungnya partisipasi warga. Dalam semua kegiatan itu, segala aktivitas dijalankan secara transaksional. Sementara kesukarelaan, keikhlasan, dan altruism sebagai basis tindakan sosial kolektif berkurang. Datang ke pertemuan-pertemuan komunitas, rapat-rapat organisasi, kampanye partai, preferensi pilihan dalam pemilu, kesediaan untuk membantu dan bersolidaritas dan lain-lainnya hampir-hampir saja mustahil tanpa melibatkan imbalan dalam bentuk yang berbeda-beda. Secara sinikal fenomena ini dinyatakan lewat ungkapan “wani piro?” pada sebuah iklan produk di televisi dan tiba-tiba menjadi sedemikian popular dalam perbincangan sehari-hari. *Pada giliran gejala ini menjadi habitus sosial dimana imbalan dan uang tiba-tiba menjadi sangat penting dan menentukan kebaikan bersama (common good).*

Gejala 4: Intoleransi dan Kekerasan: Apa yang membuat gusar kita hari ini adalah bahwa demokrasi menjadi “democrazy”, dan kebebasan menjadi anarki. Orde reformasi yang mengakhiri belenggu otoritarianisme dan sentralisme pemerintahan Orde Baru, ternyata berkembang sedemikian jauh sehingga kebebasan terasa melampaui batas yang menghancurkan ikatan batin kita sebagai sebuah bangsa. Meningkatnya intoleransi terhadap perbedaan identitas dan disharmoni sosial yang diwarnai dengan aksi kekerasan seolah-olah menjadi harga yang harus dibayar. Kekerasan dan intimidasi semacam ini seringkali digunakan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, sementara dialog rasional, kritis dan dari hati ke hati dianggap sebagai jalan yang bertele-tele. Hal yang amat menggelisahkan kita juga adalah capaian demokrasi yang menyediakan kebebasan ternyata digunakan oleh sebagian kelompok untuk memaksakan keyakinannya atas yang lain berdasarkan superioritas dan klaim kebenaran tunggal. Dalam konteks ini, *kebersamaan dilukai dan kebhinnekaan dicampakkan.*

Gejala 5: Media Massa sebagai alat propaganda ekonomi, politik dan budaya: Pers bebas dianggap sebagai salah satu elemen pilar demokrasi. Fungsinya sebagai medium informasi public sangat efektif untuk menyampaikan pesan, protes dan bahkan alat control kekuasaan. Kendati demikian, media massa baik cetak maupun elektronik tak diragukan lagi menjadi salah satu kekuatan penting dalam pembentukan opini public ketimbang sekedar menyalurkan pandangan dan pendapat masyarakat. Sering kita lihat media massa membawa sendiri pesan politiknya atau bahkan membawa pesan pesanan orang lain. Kerap kali pula media massa menyamarkan peran sebenarnya sebagai actor yang juga memiliki kepentingan politik atau ekonomi terkait *owner*-nya. Dalam konteks ini, media massa seringkali menyajikan berita atau informasi yang terseleksi dan tidak berimbang bahkan pada momen-momen tertentu bersifat disinformatif dimana public dihadapkan pada situasi yang sulit mencerna antara informasi yang benar, gossip atau propaganda politik. Lebih dari itu semua, media massa cenderung menampakkan diri sebagai alat ideologis dari suatu kebudayaan besar yang memanfaatkan pasar konsumen Indonesia sebagai objek distribusi produk-produk luar yang dibarengi dengan industri gaya hidup yang hedonis dan konsumeris yang merayu public. *Dus, media massa hari ini bukan hanya agen informasi yang merepresentasi kepentingan ekonomi dan politik kelompok-kelompok kepentingan tertentu, tetapi sekaligus agen kebudayaan penting yang melemahkan kepribadian kebudayaan masyarakat sendiri.*

Gejala 6: Ekstrimisme agama: Ekstrimisme keagamaan muncul karena pandangan melampaui batas yang dianut oleh sekelompok aliran yang memahami ayat-ayat suci secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial, kesejarahan dan lokalitas. Di Indonesia, ekspresi ekstrimisme keagamaan ini muncul dalam bentuk mulai dari sesat-menyesatkan, kafir-mengkafirkan, kengganan untuk berdialog secara sehat dan adil, hingga tindak kekerasan dan kehendak untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi khilafah. Tidak bisa dimungkiri bahwa ideologi ekstrimisme ini terus menerus diproduksi dan direproduksi baik melalui perebutan masjid-masjid maupun lewat sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Yang lebih menggusarkan lagi, semakin lama ideologi ini berkembang di kalangan mahasiswa dan anak-anak muda yang bagaimanapun keberadaannya bisa merobek-robek corak pandangan keagamaan masyarakat yang tawasuth dan ramah terhadap tradisi budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Bagaimana cara memahami secara lebih tepat gejala-gejala krisis politik dan kebudayaan di Indonesia yang sedang berubah ini dengan situasi dan kondisi-kondisi yang terjadi di arena global? Kapan situasi local terkait dengan situasi global, dan kapan pula yang local berkembang dalam dinamikanya? Adalah globalisasi yang memungkinkan peristiwa yang terjadi di suatu tempat berpengaruh terhadap kejadian di tempat lain yang berbeda. Globalisasi dicirikan oleh “intensifikasi relasi-relasi sosial mendunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas yang berjauhan dalam satu cara yang sedemikian rupa sehingga kejadian yang berlangsung di suatu tempat tertentu dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi bermil-mil jaraknya, dan demikian pula sebaliknya”. Secara kelembagaan relasi-relasi mengglobal ini didukung oleh kapitalisme, industrialisme, sistem negara bangsa, dan militerisme. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memungkinkan kemajuan pesat pula pada empat institusi di atas sehingga relasi-relasi antar peristiwa dan kejadian semakin intensif.

Globalisasi juga ditandai oleh konsep-konsep seperti e*tno-scape* dimana orang modern terus menerus memperbaharui kemodernannya dengan cara mendatangi etnis yang menurutnya terbelakang; *capital-scape* dimana perputaran uang pada ranah global sehingga uang itu sendiri tidak memiliki “kewarganegaraan” lagi; *ideo-scape,* artinya ide yang dapat melewati batas trans-national. Sebagai contoh, gejala terorisme yang ada di Timur Tengah dapat merembet ke Indonesia; dan *media-scape* yang mendorong dan mengkonstruksi pemikiran kita. Saat ini kita tidak dapat membendung arus informasi yang semakin kuat paska adanya teknologi, seperti internet. Misalnya: peristiwa G30S terkait dengan perebutan pengaruh dalam perang dingin antara blok Barat dan Blok Timur; demonstrasi aktifis PKS di KFC Surabaya berhubungan erat dengan film “The Innocence of Muslim” yang dibuat di Amerika; atau naiknya harga minyak di pelosok desa Kulon Progo terkait erat dengan ketegangan politik dan militer di Selat Hormuz, Teluk Persia. Kendati demikian, bukan berarti lokalitas sepenuhnya ditentukan secara total dan menyeluruh oleh situasi global. Lokalitas juga memiliki dinamika sendiri akibat dari basis material dan kebudayaan dimana proses persaingan dan aspirasi kepentingan, pandangan hidup dan ide-ide antar actor dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut berlangsung. Dinamika antar aktor ini sangat menentukan apakah lokalitas tunduk pada skenario global, mengabsorbsi, menegosiasi atau justeru melawannya. Situasi ini sebenarnya bisa diprediksi dan diramal meskipun tidak secara tepat sempurna. Karena itu selalu ada jalan untuk mengantisipasi, membangun strategi, dan menyusun agenda bersama.

III. Membaca Kondisi PMII

Dalam satu dekade terakhir kita menyadari bahwa organisasi pergerakan kita telah berkembang sedemikian pesat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Terbukti bahwa PMII sudah berada di hampir semua universitas dan perguruan tinggi di Indonesia dengan kuantitas kader yang sangat bervariasi. Di antara organisasi sejenis pun PMII menjadi organisasi dengan jumlah cabang dan cakupun wilayah terbesar di Indonesia. Era reformasi telah membuka peluang pengembangan PMII secara lebih massif. Apalagi dukungan kader alumni yang berhasil melakukan mobilitas vertikal dan menempati jabatan-jabatan politik di birokrasi pemerintah, lembaga-lembaga negara non-departemen (KPU, Panwaslu, KPI, misalnya) maupun lembaga legislatif (jadi tidak hanya di LSM saja) tidak bisa dimungkiri sangat membantu perkembangan ini. Namun demikian, di luar perkembangan positif yang kita rasakan, kita juga mencatat sejumlah hal yang kurang membesarkan hati. Sebelum bergerak ke berbagai masalah internal PMII berikut diajikan sejumlah data yang didapat selama Rakornas Bidang Kaderisasi tanggal 14-18 Februari 2012 bertempat di Jakarta.

Ruang lingkup rekrutmen:1) mayoritas kader PMII memiliki keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama, seperti dalam bentuk latar belakang keluarga, masyarakat, dan pendidikan; 2) sebanyak 95% menyatakan bahwa anggota/kader PMII tidak berlatar belakang keluarga PMII; 3) secara umum, proses rekrutmen anggota PMII di beberapa kampus tidak melalui proses pendekatan akademik (ilmiah), tapi melalui proses pertemanan dan 56% responden menyatakan kader yang bergabung di PMII tidak didasari oleh minat (keinginan dengan sadar) untuk bergabung ke PMII; 4) kebanyakan (65%) responden menyatakan tidak melakukan test identifikasi potensi diri dan test kecenderungan aktif di PMII dalam proses rekruitmen anggota. Sebanyak 51% responden juga menyatakan tidak pernah melakukan kegiatan pra Mapaba dalam proses rekruitmen, dan; 5) faktor penghambat yang dominan dalam proses pengkaderan di kampus adalah keterbatasan aspek *financial,* intervensi kampus, dan stigma buruk anggota/kader PMII. Sedangkan keberadaan PMII sebagai organisasi minoritas, dalam suatu kampus, tidak dinilai sebagai hambatan.

Ruang lingkup ideologisasi: 1) Sekitar 80% responden menyatakan dalam 1 tahun melakukan Mapaba lebih dari 1 kali dan 78% menganggap materi yang ada di Mapaba masih efektif sebagai sarana ideologisasi; 2) Sebanyak 49% responden menyatakan materi Mapaba tidak sesuai dengan karakteristik kampus umum dan ada 17% menyatakan materi tersebut tidak sesuai dengan karakteristik kampus agama, dan 73% responden menganggap metode yang digunakan saat ini sudah membantu proses ideologisasi yang diharapkan; 3) Sebanyak 88% responden menyatakan bahwa pemateri Mapaba saat ini sudah memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi; 4) Sebanyak 61% responden tidak mengacu pada buku *multi level strategi* dalam pelaksanaan Mapaba, dan ada 5% (2 cabang) yang menyatakan belum pernah mengenal buku *multi level strategi*; 5) 78% responden menyatakan perlu ada materi tambahan dalam menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) anggota/kader terhadap organisasi, dan; 6) Secara umum, kegiatan *follow up* Mapaba yang paling banyak dilakukan oleh PC dalam bentuk diskusi nonformal.

Ruang lingkup peran aktif dan daya juang: 1) Sebanyak 83% responden tidak bisa melaksanakan PKD lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Sebanyak 56% menyatakan terdapat pengurus komisariat yang belum lulus PKD. Padahal, 78% responden menilai PKD adalah proses penempaan utama untuk membangun kompetensi kader dalam mengorganisasikan institusinya; 2) Ada sebanyak 44% responden menilai materi PKD tidak sesuai dengan karakteristik kampus umum dan ada 20% menilai materi tersebut juga tidak sesuai dengan karakteristik kampus agama; 3) Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa pemateri PKD saat ini sudah memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi dan 73% menganggap materi PKD sudah mampu menumbuhkan kesadaran berperan aktif dan berdaya juang bagi kader PMII; 4) Sebanyak 44% responden menyatakan pelaksanaan PKD tidak mengacu pada buku *multilevel strategi*, dan; 5) *Follow up* yang dilakukan oleh cabang setelah PKD sebagian besar dilakukan dalam bentuk diskusi nonformal dan informal.

Ruang lingkup supporting system dan leading sector: 1) Sebanyak 93% responden menyatakan tidak bisa melakukan PKL lebih dari 1 kali dalam 1 tahun; 2) Sebagian besar (63%) responden meyakini, kader yang lulus PKL tidak memiliki orientasi untuk menduduki *the leading sectors,* dan 66% materi dan metode yang dilaksanakan dalam PKL tidak mendukung kader untuk *survive* di ranah *the leading sectors;* 3) sebanyak 54% responden menyatakan pemateri yang ada saat ini tidak memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi PKL, dan; 4) Mayoritas responden menghendaki, model PKL yang diharapkan dapat mengarah pada *survive* kader pada ranah *the leading sectors* (spesialisasi profesi) adalah dalam bentuk penugasan *social research*dan pelatihan keprofesian.

Ruang lingkup assesment dan evaluasi: 1) Sebanyak 63% mengaku melakukan penilaian terhadap daya serap peserta setelah menerima materi dalam setiap jenjang pengkaderan atau pelatihan. Dan sebanyak 83% mengaku melakukan penilaian terhadap setiap metode dan narasumber dalam pengkaderan dan pelatihan; 2) sebanyak 56% responden juga mengaku melakukan penilaian terhadap perkembangan akademik dan peran aktif kader dalam berorganisasi, dan; 3) Sebanyak 41% responden menyatakan melakukan penilaian dan evaluasi kinerja organisasi setiap 3 bulan sekali dan 31% menyatakan tidak pernah melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja organisasinya.

Ruang lingkup relasi PMII dengan alumni: 1) Sebanyak 73% responden menyatakan bahwa alumni membantu secara *financial* setiap pengkaderan yang dilakukan. Sebanyak 45% juga menyatakan bahwa bantuan *financial* dari alumni dalam setiap pengkaderan kurang dari 25% biaya yang dibutuhkan; 2) Sebanyak 85% responden juga menyatakan bahwa alumni senantiasa memberikan gagasan konstruktif dalam penguatan institusi dan pengembangan kualitas kader; 3) Sebanyak 68% responden menyatakan keberadaan organisasi alumni (IKA PMII) tidak mampu mendorong peningkatan peran alumni pengembangan dan penguatan institusi PMII, dan; 4) Sebanyak 61% responden juga menyatakan, bahwa alumni tidak melakukan peran distribusi kader potensial ke ranah produktif.

Sesi analisa potensi diri dan tantangan secara kuantitatif tersusun dalam empat ruang lingkup: potensi kader dan mandat sosial, proyeksi realitas dan visualisasi tantangan, kapasitas yang dibutuhkan kader, dan pemetaan pilihan kebutuhan kader. Sesi ini berlangsung pada tanggal 16 Februari 2012 bertempat di Gedung Serbaguna 3 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Secara garis besar, angket potensi diri dan tantangan dapat disimpulkan sebagai berikut: Ruang lingkup potensi kader dan mandat sosial: 1) latar belakang kampus kader sebanyak 41% kampus umum dan 59% berasal dari kampus agama; 2) kampus agama negeri 65% dan sisanya berasal dari kampus swasta; 3) kampus umum negeri 64% dan sisanya berasal dari kampus swasta; 4) 53% kader berasal dari jurusan tarbiyah atau pendidikan, syariah atau hukum 15%, FISIP, ekonomi, dan TIK masing-masing 6%, teknik, Mipa, filsafat atau ushuludin, kesehatan, dan pertanian masing-masing 3%; 5) pekerjaan orang tua yang berasal dari unsur petani dan nelayan sebanyak 50%, wiraswasta 24%, buruh atau karyawan sebanyak 15 %, PNS sebanyak 9%, dan guru sebanyak 3%; 6) latar belakang pendidikan orang tua sebanyak 47% lulusan SD, 35% sekolah menengah, 15% perguruan tinggi, dan 6% tidak tamat sekolah dasar; 7) sumber pembiayaan kuliah dari orang tua sebanyak 65%, mandiri dan beasiswa sebanyak 29%, dan hanya dari beasiswa sebanyak 6%; 8) latar belakang pendidikan kader sebelum atau pra kuliah sebanyak 61% alumni madrasah aliyah, 27% alumni SMU, dan 12% alumni SMK; 9) fokus akademik yang diminati sebanyak 74% menyatakan sesuai dengan disiplin akademik dan sisanya sebanyak 26% menyatakan tidak sesuai; 10) potensi ekonomi wilayah kader sebanyak 53% menyatakan berada di wilayah dengan potensi pertanian,

perkebunan, perikanan atau kelautan, dan peternakan, 15% di kawasan industrial, 12% perkebunan dan perikanan, 9% di daerah perdagangan dan jasa, 9% di daerah perkebunan dan pertambangan, dan pertambangan sebanyak 3%;

Ruang lingkup proyeksi realitas dan visualisasi tantangan: sebanyak 29% menyatakan terbatasnya network (jaringan), kapasitas atau kompetensi kader mencapai 27%, lingkungan sosial, budaya, dan politik sebesar 18%, keterbatasan modal ekonomi 12%, terbatasnya lowongan pekerjaan 10%, dan aspek birokrasi yang menghambat sebanyak 4%.

Ruang lingkup kapasitas yang dibutuhkan kader: sebanyak 44% menjawab kapasitas yang dibutuhkan adalah ideologi, kepemimpinan, *network*, dan kompetensi, menyatakan hanya kompetensi sebesar 21%, kompetensi 16%, network 16%, dan ideologi 3%.

Ruang lingkup pemetaan pilihan sektor kader: sebanyak 26% ingin menjadi akademisi atau intelektual, 26% ingin menjadi entrepreneur atau industriawan, 18% ingin menjadi PNS atau berada di dalam lembaga negara, 15% ingin menjadi profesional, 9% ingin berkiprah sebagai aktivis lembaga sosial kemasyarakatan, dan 6% menjadi politisi.

Dari data kuantitatif dan kualitatif selama Rakornas Bidang Kaderisasi setidaknya tersaji delapan masalah sebagai berikut:

Masalah Pertama: Sumberdaya Anggota: Kaderisasi dijalankan setiap tahun dan menghasilkan anggota yang melimpah. Tapi harus diakui, semua proses di dalamnya belum menjamin terciptanya kader-kader yang mumpuni dibidangnya dan berkarakter sebagai *leader*. hendak berkecimpung dan berkontribusi pada sektor-sektor kehidupan sosial, ekonomi, akademik dan politik. Hampir di semua universitas dan perguruan tinggi di Indonesia, sudah ada rayon atau komisariat PMII di sana. Tetapi di sejumlah kampus memperlihatkan bahwa organisasi PMII belum menjadi pilihan utama, bahkan di beberapa kampus negeri atau swasta yang dinilai *qualified* PMII belum ada apalagi untuk berkembang pesat. Mengenai hal ini ada beberapa sebab. *Pertama,* PMII dianggap kurang memberi nilai tambah bagi mahasiswa dan para anggotanya sehingga kurang memiliki daya tarik secara kualitatif (prestasi). *Kedua,* aktivitas pemikiran dan kegiatan-kegiatan PMII tidak nyambung dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di lingkungan kampus yang selalu bersifat khas. *Ketiga,* PMII kurang memiliki daya tarik psikologis dan simbolik kepada mahasiswa karena kurang mampu mengelola organisasinya sebagai institusi mahasiswa bergengsi dan mengemas citra kadernya sebagai agen perubahan sesuai dengan citra diri kader PMII.

Masalah Kedua: Kehidupan Intelektual: Ada sejumlah hal yang kurang menggembirakan dalam dunia intelektual kita. Gairah intelektual tak sebergairah masa lalu. Sebenarnya ini sangat ironis, karena banyak informasi dan bacaan yang tersedia di internet. Bahan-bahan bacaan juga bisa diakses lewat perpustakaan. Memang semangat untuk meraih prestasi kesarjanaan (akademis) sudah sangat maju dan tak perlu khawatir bahwa semangat ini akan terus berkembang di kalangan warga pergerakan. Hanya saja ada gejala baru yang khas modern, yakni menurunnya kegemaran membaca ide-de besar dan bergulat dengan gagasan-gagasan besar. Sekarang ini iklim mahasiswa cenderung pragmatis, mereka memilih terjun pada pengetahuan yang sempit dan terspesifikasi. Kendati demikian, PMII jangan meratapi penurunan membaca ide-ide besar ini, karena memang ada konteks akademis yang berubah. Watak keilmuan sudah berbeda dan semakin terspesialisasi. Tapi kita tidak boleh rela dengan penurunan ini. Spesialisasi keilmuan warga pergerakan sangat penting karena negara ini membutuhkan para ahli yang mendalami pengetahuan yang spesifik dan kompeten dalam bidang-bidang yang khas. Karakter intelektual semacam ini memang dibutuhkan agar negara maju mengejar ketertinggalan. Meskipun begitu sebagai organisasi yang berupaya mencetak kader menjadi seorang *leader,* pengetahuan yang spesifik ini tidaklah cukup. Seorang kader PMII harus memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang tertentu sekaligus juga memiliki visi *leadership*.

Masalah Ketiga: Reputasi Organisasi: Reputasi organisasi menyangkut wibawa institusi, pimpinan dan kader pergerakan. Idealnya reputasi organisasi ini ditentukan oleh integritas, prestasi akademik dan sepak terjang kadernya di medan pergerakan. Misalnya sejaumana kader-kader pergerakan mencerminkan nilai-nilai dan pergerakan dan citra diri kader di lingkungan akademik dan sosialnya, dan pada akhirnya peran mereka dalam mengambil kepemimpinan untuk merespon isu-isu sosial dan politik yang berkembang di sekitarnya. Memiliki kader-kader yang berprestasi atau menempati jabatan-jabatan sosial-politik dan dilingkungan kampus jelas akan meningkatkan reputasi PMII sebagai organisasi kader, begitu pula inisiatif-inisitif untuk mendorong tampilnya PMII dalam pentas pergerakan. Membangun reputasi sangat penting untuk menambah daya tarik organisasi dihadapan calon-calon anggota, dan bagi anggota kader sendiri untuk menambah kebanggaan dan kepercayaan dirinya. Masyarakat juga tidak akan meragukan kiprah PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki integritas, responsive dan mengemban tanggung jawab sosial. Bagaimanapun reputasi PMII masih kalah dengan organisasi-organisasi lain yang lebih tua meskipun peran yang dimainkan belakangan ini semakin meningkat.

Masalah Keempat: Kesiapan Menempati Sektor-Sektor Strategis: Diantara kegusaran yang kita alami sekarang ini adalah minimnya kader-kader PMII yang mempersiapkan diri untuk berkiprah di sektor-sektor penting seperti finansial, pertambangan dan perminyakan. Umumnya dunia politik masih merupakan wilayah pengabdian favorit kader pergerakan dalam menjalani karirnya. Sebagian besar berkecimpung di dunia akademik di kampus-kampus, meskipun kenyataannya kuantitasnya masih belum menggembirakan terutama kiprahnya di kampus-kampus negeri maupun swasta bergengsi. Padahal

kenyataannya sektor-sektor yang tersebut di atas terbukti sangat menentukan kehidupan perekonomian nasional. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang sepenuhnya oleh pertambangan yang diekploitasi secara besar-besaran. Ironisnya, sebagian besar sector ini dikuasai oleh asing yang berkolaborasi dengan elit-elit bisnis-politisi nasional yang memiliki kepentingan untuk ikut menjarah kekayaan negara. Kebanyakan kader-kader PMII enggan memasuki sektor-sektor ini, atau memang tidak ada kader PMII yang mengambil spesialisasi dan kompetensi di bidang-bidang tersebut. Bisa dikatakan bahwa sektor ini merupakan wilayah asing, tak tersentuh dan terisolasi dari wacana dan *social activism* kader PMII. Kendatipun kaderisasi sudah berekspansi ke kampus-kampus umum, fakultas-fakultas favorit dalam bidang-bidang tersebut masih belum dijangkau.

Masalah Kelima: Perangkat nilai yang konstruktif dan sistemik: Sebagaimana setiap organisasi, sistem nilai adalah ruh pergerakan, adapun struktur dan perangkat organisasi merupakan tubuhnya. Tanpa sistem nilai atau ideologi ini mustahil organisasi tersebut bisa bergerak, dan struktur dan perangkat tersebut tak mungkin pula ia merealisasikan tujuan hidup dan keberadaannya. Sistem nilai PMII ini terumuskan dalam suatu doktrin normative bernama NDP atau Nilai-Nilai Dasar Pergerakan, yang isinya merupakan sublimasi dari nilai-nilai keaswajaan dan keindonesiaan. “Keaswajaan” sendiri bisa dikatakan satu dimensi *spiritualisme* ideologis kaum pergerakan yang bersifat khas kaum *ahlus-sunnah wal-jamaah* dimana segala aktivitas PMII pada dirinya sendiri adalah suatu bentuk *ibadah* kepada Sang Penguasa Semesta Jagad Raya.

Dalam doktrin Aswaja, manusia adalah *kholifah fil-ardh*, pemimpin/penguasa di dunia. Karena itu menjadi tugas besar setiap kader pergerakan untuk memanggul tanggung jawab itu dalam rangka merealisasikan visi *rahmatan lil-alamin*. Dan seorang pemimpin, atau kolektivitas kepemimpinan, adalah pemimpin dunia yang pada akhirnya harus menghadapi realitas “dunia yang apa adanya dengan seluruh seluk beluknya”. Dengan kata lain, seorang kholifah (PMII sebagai “kholifah kolektif”) perlu dilengkapi satu perangkat metodologis untuk memahami “dunia yang apa adanya dengan seluruh seluk beluknya” itu untuk memandu gerak langkah kaum pergerakan untuk mencapai cita-citanya abadinya. Perangkat itulah yang kita namakan: “paradigma gerakan”.

Masalah kita adalah kini dirasakan oleh para kader pergerakan akan pentingnya suatu paradigm gerakan yang relevan dengan gerak jaman, dengan situasi dunia yang sedang berubah. Masalah itu tercermin dari satu pertanyaan: Apakah Paradigma Kritis Transformatif (PKT) masih relevan bagi PMII kini dan yang akan datang? Sebagian berpendapat bahwa argumen-argumen yang mendasari PKT sudah rontok. Dengan demikian, PKT sudah tidak relevan sama sekali. Sayangnya, dasar alasannya kurang diuraikan: kurang menjawab mengapa rontok, bagian mana yang rontok; apakah rontoknya pada sebagian asumsi ataukah rontok pada asumsi-asumsinya secara keseluruhan. Lalu pendapat ini menawarkan suatu paradigma baru yang diberi nama “Paradigma Berbasis Realitas”. Terhadap paradigma baru ini pun masih bisa diajukan satu pertanyaan: apakah paradigm ini berbasis pada filsafat pragmatisme? Lalu apakah paradigm baru ini koheren dengan seluruh sistem nilai yang selama ini dianut oleh PMII?

Selain Paradigma Berbasis Realitas, ditawarkan pula “Paradigma Menggiring Arus” (PMA). Di dalam ilmu sosial atau ilmu politik dan hubungan internasional, sebenarnya tidak dikenal jenis paradigma semacam ini. Nampaknya gagasan ini dicetuskan dari hasil bacaan baru terhadap dinamika realitas dunia belakangan ini dalam wawasan geopolitik dan teori sistem dunia. Namun harus diakui perspektif PMA tetaplah bersifat “kritik struktural” sebagaimana asumsi dasar yang digunakan dalam PKT Hanya saja yang membedakan keduanya adalah pada “unit analisis”-nya. Jika unit analisis PKT adalah negara, maka unit analisis PMA adalah sistem-dunia. Dan bila PKT masih kuat terpengaruh oleh teori modernisasi, pada PMA kuat terpengaruh oleh varian dalam teori globalisasi. Kendati begitu keduanya (baik PKT maupun PMA) disatukan oleh perspektif “kritik struktural”. Dus, paradigmanya tetaplah paradigma kritik.

Walhasil, apakah PKT benar-benar habis sudah atau rontok seluruh daging dan tulang-tulangnya? Ataukan ada sebagian asumsi PKT yang masih relevan dan sebagian lainnya perlu direvisi? Lalu apa nama yang tepat untuk paradigma ini? Apa relevansi dan koherensi upaya revisi tersebut dengan doktrin *al-muhafadzatu ‘alal-qodimis-sholih wal-akhdzu bil-jadidil-ashlah*? Banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk memerkokoh sistem nilai dan ideologi kita.

Masalah Keenam: Strategi dan taktik sebagai prasyarat gerak: Nampaknya harus diakui bahwa di kalangan kader pergerakan, ideologi, strategi dan taktik gerakan PMII belum dipahami betul. Sehingga seringkali terjadi perdebatan dan diskusi tanpa ujung dengan membawa akibat-akibat kesalahpahaman atau konflik berlarut-larut yang memecah belah diri sendiri. Masalah kita adalah apa sebenarnya strategi dan bagaimana taktik gerakan PMII? Apakah kita memiliki kedua-duanya, atau jangan-jangan kita hanya berjalan *natural* saja? Kaburnya pembedaan yang jernih antara aspek ideologi, strategi dan taktik ini seringkali membawa kesalahpahaman berikutnya. Misalnya kita perlu menjernihkan masalah yang dipertanyakan kader-kader kita, yakni: apakah “Menggiring Arus” dalam PMA (Paradigma Menggiring Arus) sebenarnya adalah suatu strategi, dan taktiknya adalah anti/non-sistemik yang ujudnya bisa kolaborasi, adaptasi, negosiasi dan ataukah perlawanan frontal? Sebagaimana disinggung diatas taktik adalah penjabaran operasional jangka pendek agar strategi dapat diterapkan. Maka suatu taktik tertentu kita pilih, kita ambil dan kita jalankan atas dasar pertimbangan situasi aktual dan kenyataan riil di lapangan. Dan oleh karena itu sudah sewajarnya bila suatu taktik tertentu selalu harus berbasis realitas, kenyataan riil! Lalu

kita pun bisa bertanya: apakah yang kita sebut “Berbasis Realitas/Kenyataan” dalam PBA (Paradigma Berbasis Realitas) sebenarnya adalah bahasa yang digunakan dengan pengertian yang sama dengan taktik yang dipahami disini? Tentu hal ini bukan semata masalah linguistik, bukan?!

Masalah Ketujuh: Membangun Akumulasi Kesadaran dan Pengetahuan Bersama: Kesenjangan pengetahuan dan keterbatasan wawasan membuat diskusi untuk membicarakan masalah-masalah substansial seolah bertele-tele dan dianggap buang-buang waktu atau terlalu teoritis. Seringkali anggapan ini diperburuk oleh egoisme sektoral, perbedaan otoritas, senioritas dan gengsi diri yang terlalu berlebihan. Pada akhirnya faktor-faktor ini telah menghalangi kesediaan untuk bekerjasama, saling mendengarkan, saling menghormati dan menghargai. Oleh karena itu tidak mengherankan bila kesepakatan-kesepakatan atau keputusan-keputusan penting yang bersifat substansial tidak mudah dicapai atau diambil tanpa masukan-masukan serta pertimbangan kritis, konstruktif dan solutif. Padahal sesungguhnya tradisi semacam inilah yang memungkinkan proses-proses akumulasi pengetahuan bersama dan memupuk kesadaran kolektif. Di dalamnya mencakup *sharing* ide dan pemikiran, praktek berbagi pengalaman, kegelisahan dan keprihatinan, serta berbagi ketahuan dan ketidaktahuan. Tradisi ini hanya bisa dicapai jika satu sama lain di dalam “lingkaran kader-kader penting” organisasi ini memiliki kesabaran untuk mendengarkan, saling menghargai dan *tepo seliro*, saling memperkaya dan mengakui kekurangan, serta saling mencari titik temu atas berbagai pendapat yang berbeda. Bagaimanapun setiap perbedaan pendapat dalam diskusi pada akhirnya harus tunduk pada kesepakatan bersama yang dicapai secara maksimal dan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab terhadap visi, amanat dan strategi kolektif pergerakan.

Masalah Kedelapan: Etika Komunitas Pergerakan: Terkait dengan poin di atas, kita jelas merasakan kurang tumbuhnya etika pergerakan yang positif, konstruktif dan bersifat metodis. Yang dimaksudkan adalah etika komunitas pergerakan dalam praktek hidup sehari-hari yang merupakan pengejawantahan dari etika keaswajaan yang bersifat menyeluruh, koheren dan sistematik. Ini tidak hanya terbatas pada sikap normative seperti *tawasuth, tawazun,* dan *i'tidal,* tetapi juga mencakup habituasi nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, keberanian, kepercayaan diri, saling kerjasama, kooperasi, gotong royong, kesantunan publik, saling percaya, saling menghormati, relasi junior-senior yang konstruktif, semangat kreativitas dan entreprenership, optimistik, teguh pada prinsip, dan lain-lainnya yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari warga pergerakan. Etika semacam ini bukan hanya bersifat konstruktif bagi terbangun kohesi sosial dan pemupukan modal sosial yang kuat. Tetapi juga menjadi spirit yang bisa dipraktekkan secara metodis dalam hubungannya dengan kurikulum tersembunyi *(hidden curriculum)* kaderisasi guna memperkuat daya *resilency*, kedisiplinan, dan membentuk tradisi *counter-culture* (oposisi-budaya) terhadap anarkisme politik dan kebudayaan yang kita hadapi.

IV. Strategi-Taktik Gerakan

Posisi paradigma dalam gerakan PMII sangatlah vital. Ini lantaran paradigma memberikan keyakinan metodologis bagi setiap kader PMII dalam memahami dan memaknai setiap peristiwa, atau kenyataan sosial. Pada puncaknya dari hasil pemaknaan bersama itu lalu bisa dirumuskan model sebuah gerakan kolektif, strategi, dan taktik perjuangan. Gerak tanpa paradigma bukanlah sebuah gerakan dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah kerumunan, gerak acak tak beraturan.

Setiap pergerakan haruslah memiliki strategi perjuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain strategi juga diperlukan taktik. Strategi biasanya berkaitan dengan “apa” yang seharusnya kita lakukan, yakni mengerjakan sesuatu yang benar *(doing the right things)*. Sementara taktik berkaitan dengan “bagaimana” untuk mengerjakan sesuatu itu, yakni mengerjakan sesuatu dengan benar *(doing the things right)*. Dalam organisasi militer, strategi dianalogikan sebagai seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran. Adapun taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari strategi agar strategi tersebut dapat diterapkan. Strategi sendiri merupakan alat/program-program indikatif untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ia bersifat menyatu *(unified)* yakni menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi; menyeluruh *(comprehensive)* dalam arti mencakup seluruh aspek dalam organisasi; dan integral *(*integrated*)* yakni seluruh strategi akan cocok/sesuai untuk seluruh tingkatan (organisasi, kegiatan dan fungsinya).Biasanya strategi dibuka untuk publik, sementara taktik cenderung dirahasiakan.

Penggunaan paradigma PKT, sementara dalam proses revitalisasinya, tidak hanya sekedar menekankan kekuatan kritik pada wilayah nalar tetapi juga transformasi melalui gerakan. Nalar dan gerakan PMII tidak seharusnya hanya melihat negara semata-mata sebagai arena bagi para “setan” berkuasa tetapi juga dapat menjadi “malaikat” kebaikan bagi warganya. Negara merupakan arena kontestasi warga negara yang memiliki afiliasi nilai atau ideologi untuk berkuasa. Sesat pikir bahwa PMII selamanya *vis a vis* dengan negara hanya membuat PMII menjadi *phobia* dengan kekuasaan dan *output*-nya hanya berada di LSM atau Ormas. Strategi gerakan PMII bertumpu pada kekuatan untuk mengantisipasi perubahan di masa mendatang di tiga front sekaligus: *global front*, *local front*, dan *internal-movement front*. Berdasarkan berbagai bacaan dan *input* maka terdapat dua strategi gerakan PMII: menjadi *avant-garde* gerakan dan penguasaan *the leading sectors*.

Menjadi *Avant-garde* Gerakan

Mungkin, sudah tidak ada yang menyangsikan bahwa PMII merupakan gerakan *extra- universiter* yang kerap terlibat dalam memperjuangkan perubahan di tingkat nasional dan daerah. Lewat doktrin *liberation theology* berupa keberpihakan terhadap kaum *mustadh'afin* serta paradigma kritis transformatif kader-kader PMII begitu terampil memainkan perannya sebagai aktor gerakan sosial. Radikalisasi nilai di dalam PMII ditujukan untuk membangun resistensi atas ketidakadilan. Supaya gerakan tidak sekedar menjadi "asal gerak" maka PMII menggunakan *multi-level strategy* sebagai strategi gerakan PMII.Multi-level strategi merupakan langkah mengatasi kuatnya penetrasi struktur global atas penetrasi struktur lokal.[30] Dalam bacaan PMII, perubahan tidak hanya ditentukan dari struktur lokal tetapi juga di pengaruhi oleh struktur global. Oleh karena itu, gerakan PMII berupaya melakukan perebutan (*warring position*) di tiga front: *global front*, *local front*, dan *internal-movement front*. Perebutan tiga front tadi memerlukan *central planner* untuk mengatur ritme di *multi centers*. Secara praktis, gerakan di tiga front memerlukan kelenturan atau fleksibilitas. Misalnya, struktur global diperlukan untuk menghapus *local struktur constraint* yang membahayakan gerakan atau merugikan masyarakat di tataran lokal. Sementara struktur lokal diperlukan untuk menghambat gerak maju struktur global tersebut. Dalam tesis Andre Gunder Frank dan Marta Fuentes kita bisa menghambat penetrasi struktur global dengan melepas kopling (*delinking*) melalui tiga mekanisme: pasar, hukum, dan parlemen. Penggunaan mekanisme pasar adalah dengan upaya memboikot produk atau upaya secara luas melaui kampanye berupa iklan atau tekanan opini di surat kabar. Adapun melalui mekanisme hukum adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan mekanisme parlemen digunakan untuk memberikan tekanan melalui pemotongan anggaran, kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan pembuatan regulasi. Skema gerakan di tiga front ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
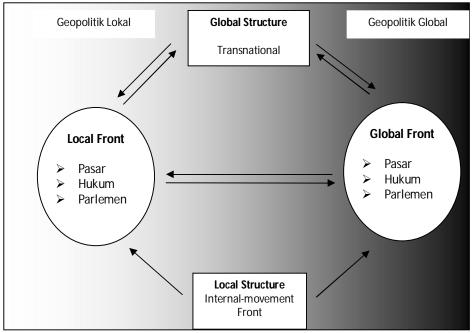
Contoh penggunaan skema di atas dengan menggunakan isu kerusakan hutan yang melibatkan perusahaan transnasional adalah sebagai berikut. PMII bersama dengan kelompok masyarakat tercerahkan lainnya melakukan advokasi secara langsung dengan melobi parlemen untuk menghentikan laju kerusakan hutan. Hasil lobinya bisa berupa regulasi yang memaksa penghentian eksploitasi hutan. Cara berikutnya adalah dengan melakukan *judicial review* atas regulasi yang merugikan melalui Mahkamah Konstitusi atau membawa bukti-bukti kerusakan lingkungan ke meja pengadilan agar terjadi penghentian dan terjadi ganti rugi. Jika kedua cara ini tidak mempan maka melakukan kampanye boikot produk dari perusahaan tersebut yang dipasarkan di Indonesia. Ketiga cara ini bisa dilakukan di tingkat nasional maupun daerah melalui tiap tahap atau ketiga tahap sekaligus. Apabila ketiga mekanisme tersebut kandas di tingkat lokal maka PMII harus melakukan pertempuran di *global front* misalnya dengan membangun jejaring kelompok gerakan sosial lainnya untuk melakukan hal serupa di negara di mana perusahaan transnasional tersebut berpusat. Kelompok gerakan sosial yang menjadi rekan seperjuangan PMII dapat melakukan kampanye boikot produk hasil hutan Indonesia, meminta anggota parlemen untuk menekan pemerintah dan pemilik perusahaan, dan melakukan upaya hukum sesuai dengan aturan yang berlaku di negaranya. Pelibatan organisasi gerakan sosial global lainnya di *global front* sangat dimungkinkan untuk menghadapi ganjalan dari *domestic*

[30]*Multi-level strategy* secara legal digunakan oleh PMII berdasarkan keputusan Muspimnas 2004 Nomor 09.MUSPIMNAS 2004.PMII.03.2004.

comprador classes. Mekanisme inilah yang disebut *delinking.* Di luar contoh di atas masih terdapat banyak lagi contoh lainnya, misalnya terkait advokasi Blok Migas yang akan habis masa kontraknya dan advokasi terhadap UU yang diinisiasi atau disponsori oleh lembaga-lembaga asing sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Blok Migas yang Habis Masa Kontrak 2013-2021

No	Tahun	Nama Blok	Kontraktor	Lokasi
1	2013	Blok Siak	PT Chevron Pacific	Riau
2	2015	Blok Gebang	JOB Pertamina – Costa	Sumatera Selatan
3	2017	Blok Offshore Mahakam	Total E & P Indonesia	Kalimantan Timur
4	2017	Blok ONWJ	PT Pertamina HE	Laut Jawa
5	2017	Blok Attaka	Inpex Corp	Kalimantan Timur
6	2017	Blok Lematang	PT Medco E & P Indonesia	Sumatera Selatan
7	2018	Blok Tuban	JOB Pertamina – Petrochina	Jawa Timur
8	2018	Blok Ogan Komering Ilir	JOB Pertamina – Talisman	Sumatera Selatan
9	2018	Blok NSO B	Exxon Mobil	Sumatera Utara
10	2018	Southeast Sumatera	CNOOC	Sumatera Selatan
11	2018	Blok Tengah	Total EP	Kalimantan Timur
12	2018	NSO-NSO Extent	Exxon Mobil	Sumatera Utara
13	2018	Blok Sanga-sanga	Vico	Kalimantan Timur
14	2018	Blok W Pasir dan Attaka	Chevron Indonesia Company	Kalimantan Timur
15	2019	Blok Bula	Kalrez Petroleum	Maluku
16	2019	Seram-Non Bula Block	Citic	Pulau Seram
17	2019	Blok Pendapa dan Raja	JOB Pertamina – Golden Spike	Sumatera Selatan
18	2019	Blok Jambi Merang	JOB Pertamina – HESS	Sumatera Selatan
19	2020	Blok South Jambi B	Conoco Philips	Jambi
20	2020	Blok Selat Malaka	Kondur Petroleum	Riau
21	2020	Blok Brantas	Lapindo	Jawa Timur
22	2020	Blok Salawati	JOB Pertamina – Petrochina	Papua
23	2020	Blok Kepala Burung A	Petrochina International Bermuda	Papua
24	2020	Blok Sengkang	Energy Equity	Sulawesi Selatan
25	2020	Blok Makassar Strait	Chevron Indonesia Company	Sulawesi Selatan
26	2021	Blok Bentu	Sagat Kalila	Riau
27	2021	Blok Rokan	Chevron Pacivic Indonesia	Riau
28	2021	Blok Muriah	Petronas	Jawa Tengah
29	2021	Blok Selat Panjang	Petroselat	Riau

Tabel Contoh Undang-undang yang Diinisiasi/ Disponsori oleh Lembaga-Lembaga Asing

No	Undang-undang	Keterangan
1	UU No. 5 Tahun 1999	Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2	UU No. 14 Tahun 2001	Tentang Paten
3	UU No. 15 Tahun 2001	Tentang Merek
4	UU No. 16 Tahun 2001	Tentang Yayasan
5	UU No. 22 Tahun 2001	Tentang Minyak dan Gas Bumi
6	UU No. 15 Tahun 2002	Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
7	UU No. 19 Tahun 2003	Tentang Hak Cipta
8	UU No. 18 Tahun 2003	Tentang Hak Advokat
9	UU No. 25 Tahun 2003	Tentang Perubahan atas RUU Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
10	UU No. 36 Tahun 1999	Tentang Telekomunikasi
11	UU No. 25 Tahun 1999	Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
12	UU No. 23 Tahun 1999	Tentang Bank Indonesia
13	UU No. 8 Tahun 1999	Tentang Perlindungan Konsumen
14	UU No. 16 Tahun 2000	Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.6 Th.1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
15	UU No. 17 Tahun 2000	Tentang Perubahan Ketiga atas UU No.7 Th.1983 Tentang Pajak Penghasilan
16	UU No. 24 Tahun 2000	Tentang Perjanjian Internasional
17	UU No. 25 Tahun 2000	Tentang Program PembangunanNasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004
18	UU No. 14 Tahun 2002	Tentang Pengadilan Pajak
19	UU No. 20 Tahun 2002	Tentang Ketenagalistrikan
20	UU No. 32 Tahun 2002	Tentang Penyiaran
21	UU No. 17 Tahun 2003	Tentang Keuangan Negara
22	UU No. 27 Tahun 2003	Tentang Panas Bumi
23	UU No. 3 Tahun 2004	Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
24	UU No. 7 Tahun 2004	Tentang Sumber Daya Air
25	UU No. 19 Tahun 2004	Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

Penggunaan skema di atas, baik di *global front* dan *local front*, harus sangat hati-hati karena perlu kedalaman analisis sehingga dapat menentukan siapa pihak yang bisa dijadikan sebagai *potential allies* (sekutu potensial), *contender* (lawan), dan *challenger* (penantang). Sangat mungkin posisinya bisa saling bergeser dalam menghadapi isu-isu tertentu. Perebutan atau pertarungan di *global front* dan *local front* sangat dipengaruhi oleh *internal-movement front* karena front inilah yang menyediakan mekanisme kaderisasi dan kontinuitas gerakan. *Internal-movement front* harus memastikan semua gerakan terencana dan terukur dengan menjadikan bacaan geopolitik lokal, geopolitik global, dan sejarah sebagai pijakan. Dengan demikian, pilihan pada isu harus dilakukan dengan tingkat kecermatan yang tinggi dengan tetap memprioritaskan *common will* (UUD 45 dan Pancasila) dan *national interest* (cita-cita kemerdekaan). Mengadopsi semua langkah di atas akan menjadi PMII sebagai *avant-garde* gerakan mahasiswa di Indonesia. Semua perencanaan gerakan dan proses kaderisasi harus *totally secured*.

Penguasaan*The Leading Sectors*

Sejauh ini, proses pelembagaan sistem demokrasi di Indonesia terus berlangsung dan dianggap oleh sebagian kelangan berada *on the track* menuju fase konsolidasi demokrasi atau sedang menuju kekhasan demokrasi *ala* Indonesia. Dari luar, proses *transform the system* dilakukan dan dikawal oleh berbagai elemen masyarakat sipil, pers, dan juga organisasi gerakan mahasiswa. Dari dalam, pilar-pilar demokrasi terus mengalami koreksi mendasar dan meskipun lambat terus mengalami perbaikan. Dalam situasi demikian, *political opportunity* untuk berada di dalam pusaran kekuasaan menjadi sangat terbuka bagi siapapun dengan latar belakang apapun. Kekuasaan menjadi sulit dimonopoli oleh salah satu unsur, seperti: militer, intelektual-aktivis, teknokrat, pengusaha atau industriawan, kalangan profesional, dan lain-lain sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.
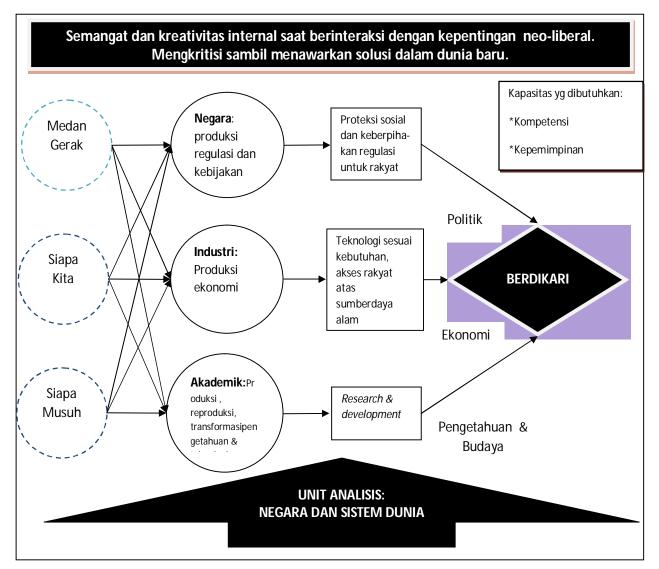
Terdapat berbagai tantangan dan pelajaran dalam relasi kenegaraan dan kebangsaan yang berpotensi menghambat atau memperkaya proses pematangan demokrasi yang berpijak terhadap kebaikan bersama, yakni: fundamentalisme agama yang berwujud pada terorisme dan tindakan intoleran, benturan identitas, tindakan separatis, konflik masyarakat dan korporasi di daerah pertambangan dan kawasan industrial, konflik agraria, kemiskinan, korupsi, dan liberalisasi pasar secara berlebihan. Adapun tantangan dari luar yang dampaknya berpengaruh adalah resesi ekonomi global, perang memperebutkan sumber daya alam dan batas-batas teritorial, dan kegagalan sistem demokrasi politik dan liberalisasi pasar. Bagi PMII, perubahan politik, ekonomi, dan sosial harus bisa direspon dengan menyiapkan *resources* yang bisa ditempatkan di berbagai sektor terutama yang berkategori sebagai *the leading sectors* (pemerintahan, industri, dan akademik) dalam perspektif sosiologi inovasi agar internalisasi nilai dapat terjadi.Internalisasi nilai perlu dilakukan mengingat PMII sebagai organisasi kader yang memiliki karakteristik nilai ke-Islam-an ahlussunah wal jama'ah dan ke-Indonesia-an yang bertujuan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam tujuan organisasinya. Tentu saja hal tersebut akan sulit diwujudkan jika ruang yang banyak dimasuki oleh kader-kader PMII cenderung monolitik akibat *resources* yang homogen

Penguasaan *leading sectors* mengandaikan bahwa perubahan dapat dilakukan dari dalam (*endogenous*). Perubahan bukan hanya berasal dari luar *exogenous* melalui intervensi, rekayasa, atau tekanan dari kelompok penekan (*pressure group*) lokal maupun global, TNC, atau negara lain. Tekanan yang dilakukan oleh PMII dalam berbagai bentuk protes sosial (*social protest*) pada gilirannya hanya akan sangat efektif jika aktor di dalam kekuasaan memiliki agenda yang sama, visi, misi, dan nilai-nilai yang ada di PMII. Proses ini mengandaikan bahwa internalisasi nilai-nilai PMII dilakukan oleh agen atau aktor, dalam hal ini kader-kader PMII, ke seluruh sektor strategis. Ketiga sektor yang harus dikuasai oleh kader-kader PMII post-struktur yakni: negara, industri, dan akademik. Ketiganya hanya dapat dikuasai jika proses kaderisasi sebagai kawah candradimuka kader PMII dapat terjadi dengan baik. Proses kaderisasi bukan lagi hanya dimaknasi sebagai proses internalisasi *values* melainkan juga peningkatan kapasitas atas kompetensi yang dibutuhkan di masa mendatang dan penempaan kualitas *leadership*. Hingga saat ini akselerasi kader-kader PMII di sektor-sektor strategis, lebih dari 50 tahun kelahirannya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tercermin dari sebaran alumninya.

Tabel Kelemahan dan Kekuatan di Sektor Strategis

Sektor Strategis	**Kelemahan**	**Kekuatan**
Pemerintah karir	Kementerian strategis	Kementerian non-strategis
Pemerintah non-karir	Partai besar	Partai kecil
Industri	Menengah-besar	kecil
Akademik	Kampus agama	Kampus Umum
Sektor Lain		
LSM/NGO	Pertambangan, pertanian Perikanan, perkotaan	Keagamaan, HAM perempuan, demokrasi
Profesi	scientist, advokat, dokter	pekerja kerah biru, pendidik
Lembaga negara non-departemen	ekonomi, hokum, keuangan	sosial, politik

Tabel di atas menjelaskan bahwa penguasaan kader PMII di ranah sektor strategis sangat kecil. Pemerintah karir yang dimaksud di sini adalah ranah birokrasi yang mencapai level eselon I. Sangat sulit menenemukan kader PMII yang mencapai eselon I kecuali di Kemenag. Baru muncul belakangan ada juga di Kemenkumham serta Kemendikbud dengan jumlah yang sangat kecil. Sementara di kementerian lain yang dianggap strategis atau berimplikasi terhadap hajat hidup orang banyak seperti di kementerian keuangan, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan ESDM, tidak terdapat satu pun kader PMII yang mencapai posisi eselon I. Bahkan, memang nyaris tidak ada sama sekali yang berkarir di dalamnya. Di ranah pemerintahan non-karir adalah kekuasaan di pemerintahan yang didapat dari mekanisme pemilu. Partai politik yang dimasuki oleh banyak kader PMII umumnya hanya menempati posisi menengah-bawah dalam tiap kali penyelenggaraan pemilu legislatif digelar. Posisi menengah-bawah membuatnya menjadi sulit dalam melakukan fungsi *controling*, legislasi, dan *budgeting*. Khusus penguasaan ranah eksekutif implikasinya adalah sukarnya mendudukkan kader-kader PMII dalam pemilukada bahkan atau pilpres.

Di sektor industri pun demikian. Nyaris tidak ada kader-kader PMII yang menjadi pemain besar padahal konsumen terbesar di Indonesia adalah nahdliyin. Umumnya mereka baru berada di sektor usaha menengah-bawah. Padahal, potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia sangat besar di masa mendatang.[31]

[31]Pada saat terjadinya krisis ekonomi global 2008-2009, ekonomi Indonesia berhasil bertahan bahkan menduduki peringkat atas dunia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6.5 persen. Potensi ekonomi Indonesia terlihat dari data-data sebagai berikut. Jumlah

Adapun di sektor akademik terlihat dari minimnya jumlah alumni yang menjadi rektor perguruan tinggi negeri (PTN). Dari 80-an PTN hanya dua orang yang berasal dari alumni PMII. Kebanyakan alumni PMII menjadi akademisi di kampus agama negeri maupun swasta. Inipun masih belum maksimal mengingat kampus agama negeri banyak dikuasai oleh bukan kader PMII. Oleh karena inti strategi ini terletak pada upaya menyiapkan kader PMII untuk dapat memiliki kapasitas spesialis dari berbagai disiplin akademik guna berkompetisi di semua sektor strategis maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas kader yang berasal dari berbagai disiplin akademik.Untuk menjalankan kedua strategi di atas maka taktik gerakan dan kaderisasi PMII adalah melakukan penguatan kaderisasi kampus umum, penguasaan organisasi intra-universitas, dan membangun *global-network*.

Penguatan kampus umum

Sejak lama PMII berupaya untuk membangun kekuatan di kampus umum. Berbagai rekayasa dilakukan meskipun sejauh ini masih menghadapi tantangan yang kuat. Perekayasaan ini secara kasat mata terlihat dari *background* 15 Ketua Umum PB PMII di mana sembilan di antaranya berasal dari kampus umum, antara lain: Mahbub Djunaidi (UI), Ahmad Bagja (IKIP Jakarta/UNJ), Muhyidin Arubusman (Unija), M. Aqbal Assegaf (IPB), Ali Masykur Musa (Unej), Muhaimin Iskandar (UGM), Nusron Wahid (UI), A. Malik Haramain (Unmer), dan M. Rodli Kaelani (Unsrat). Selain upaya untuk memotivasi dan memperkuat kaderisasi PMII di kampus umum, perekayasaan tersebut bertujuan untuk mengakselerasi kader PMII di level kepemimpinan nasional karena dianggap memiliki modal sosial lebih.

Di tingkat lokal, perekayasaan ini belum bisa berjalan secara sempurna. Terdapat beberapa kendala di antaranya: 1) kampus umum belum dilihat sebagai arena rekrutmen yang perlu mendapat prioritas dari pengurus cabang; 2) kesulitan mempertahankan kader yang terekrut karena gagal mengadaptasi model kaderisasi yang tepat; 3) pendekatan melalui materi-materi kaderisasi formal PMII diasumsikan sarat dengan pendalaman pengetahuan keislaman bagi mereka yang sudah terkategori di atas pemula, dan; 4) dalam kontestasi perebutan struktur di lingkup cabang kerap kali terkalahkan karena posisinya minoritas. Akibatnya, terjadi kefrustasian berupa hilangnya motivasi berorganisasi karena akses masuk ke dalam struktur menjadi macet.

Penguatan kampus umum harus dilihat sebagai sarana mereproduksi kader yang memiliki berbagai macam disiplin pengetahuan akademik. Untuk dapat mendudukkan kader di *leading sectors* maka mau tidak mau penguatan kampus umum menjadi prasyarat mutlak. Penguatan kampus umum bukan berarti menafikkan *resources* kader PMII yang berasal dari kampus agama tetapi harus dilihat semata-mata sebagai upaya memperkaya *resources* mengingat banyak kampus agama kini juga memiliki fakultas dan jurusan umum seperti di berbagai Universitas Islam Negeri. Keduanya harus sinergis.
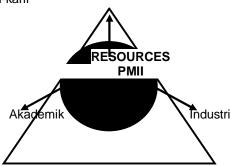
Sebelum melakukan penguatan kaderisasi di kampus umum ada baiknya melihat perbedaan karakteristik mahasiswa antara kampus agama dan umum sebagaimana yang terlihat di dalam gambar di bawah ini.

---

penduduk hampir 250 Juta Jiwa (3.41%)yang merupakan negara dengan penduduk terbesar ke 4 di dunia atau sekitar 6% dari total penduduk Asia dan 42% dari keseluruhan penduduk di ASEAN. Indonesia memiliki kekuatan tenaga kerja sebesar 116.5 juta jiwa, tahun 2010, yang tersasar di bidang pertanian (38.3%), industri (12.8%) dan jasa (48.9%). Selain itu, rata-rata usia penduduk 28 tahun. Dari populasi keseluruhan, 70% diantaranya berusia kurang dari 40 tahun.

Dilihat dari sisi pergerakan global, Indonesia adalah negara dengan pelabuhan tersibuk ke-12 di dunia dan merupakan peringkat ke-4 di ASEAN. International Air Transport Association (IATA) memperkirakan laju pertumbuhan penerbangan Indonesia, selama periode 2010-2014,dari penerbangan domestik bisa mencapai 10%/tahun sehingga pada 2014, jumlah penumpang domestik sebesar 38,9 juta orang (terbesar kesembilan di dunia), internasional 9,3%/tahun atau menduduki peringkat keenam di dunia sehingga pada 2014 jumlah penumpang internasional sekitar 22,7 juta orang. Kontribusi Indonesia dan negara di Asia-Pasifik mencapai 30%bagi lalu lintas penerbangan dunia pada 2014. Pada 2014, Amerika Utara hanya menyumbang 23%.

Tahun 2011 GDP Indonesia sebesar $823 billion. Meningkat cukup drastis hanya dalam waktu 2 tahun di mana pada tahun 2009 hanya sebesar $539 billion. Pertumbuhan ekonomi (*annual growth*) terus meningkat. Pada tahun 2009 (4.5%), 2010 (6.1%), dan 2011 (6.2%). Demikian juga dengan *income* per capita pada tahun 2010 sebesar $ 4,394. Di luar sumber daya manusia, potensi sumber daya alam Indonesia masih sangat besar.

Tipologi mahasiswa

	Kampus Agama	**Kampus Umum**
Kohesi sosial	solidaritas tinggi	solidaritas rendah-menengah
Strata sosial	menengah-bawah	menengah-atas
Latar pendidikan	MA/SMU Islam	SMU/SMK
Lingkungan sosial	rural	urban
Orientasi pengetahuan	non-eksakta	non-eksakta dan eksakta

Berdasarkan tipologi mahasiswa di atas maka berikutnya kita dapat melakukan upaya rekrutmen dengan skema *segmentasi-targeting-positioning.*
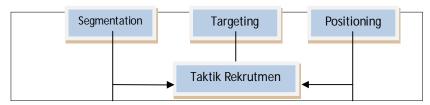
Segmentasi merupakan arena pembagian mahasiswa di dalam kampus yang heterogen ke dalam satuan-satuan yang bersifat homogen dilihat dari aspek geografis, demografis, dan psikografi. Setelah segmentasi membagi mahasiswa ke dalam identifikasi tertentu maka langkah berikutnya adalah melakukan targeting. *Targeting* merupakan merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah proses kampanye pengenalan PMII berdasarkan masing-masing segmen. Untuk melakukan upaya ini perlu memperhatikan empat langkah sebagai berikut: 1) memperhitungkan segala sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan; 2) menganalisa kekuatan sumber daya kompetitor lain, dalam hal ini berupa organisasi eksta-universitas lainnya; 3) melakukan komparasi kekuatan dengan organisasi ekstra-universitas lainnya; 4) mengambil keputusan bentuk dan media pengenalan yang akan digunakan untuk membangun pencitraan atau *image*. Hasilnya adalah *positioning* yang membedakan PMII dengan kompetitor lainnya. *Positioning* merupakan suatu proses menempatkan PMII ke dalam pikiran mahasiswa sesuai dengan keinginan pengurus PMII. Untuk bisa menentukan *positioning* maka perlu menentukan karakteristik berupa *added value* yang dimiliki oleh PMII. Skema di atas jika diturunkan sebagai berikut:

	Segmentasi	**Targeting**	**Positioning**
Geografi	Perkotaan	Hobi , *performance*	berbakat di luar bidang akademik
		peduli *life style*	Rapih, *fashionable*, tidak urakan
	Pedesaan	Ketekunan belajar	Cerdas
		Intens dalam berkawan	Solidaritas tinggi, kolektivitas
Demografi	Etnik	Asal daerah	Menghargai ikatan komunal dan budaya
	Agama	NU, non-afiliasi	Islam moderat, menghargai
pluralitas			
			Ritus keagamaan: tahlil, ziarah, dll.
Psikografi	Strata sosial	Menengah	Kritis, agen perubahan
	Karakter	Berorientasi prestasi	Prestasi akademik, prestasi
kompetisi			di dalam dan luar kampus

Berdasarkan kolom di atas maka *brand awareness* dalam *positioning* PMII di kampus umum adalah: berbakat di luar bidang akademik, rapih atau *fashionable*, cerdas, solidaritas tinggi atau punya semangat kolektivitas, menghargai ikatan komunal berdasarkan asal daerah atau etnik, berhaluan Islam-moderat dan menghargai pluralitas, menjalankan ritus keagamaan tertentu seperti tahlil atau ziarah, kritis, serta memiliki prestasi akademik di dalam dan luar kampus. Saat ini *positioning* PMII baru terbatas pada pemahaman Islam-moderat dan kekhasan dalam berbagai ritus ibadahnya. Untuk mencapai *positioning* maka dalam *targeting* perlu mendapatkan medium yang tepat berdasarkan pemetaan segmentasi yang sudah didapatkan.

Targeting	Media
Hobi, performance	UKM, klub hobby
Ketekunan belajar	Kelompok studi, perpustakaan
Asal daerah	organisasi kedaerahan,
	asrama mahasiswa, tempat kost
NU, non afiliasi	masjid kampus
Menengah	kelompok studi, kantin kampus
Berorientasi prestasi	kelompok studi, UKM,

Penggunaan besaran *targeting* ditentukan oleh kapasitas *resources* yang dimiliki. Peningkatan jumlah *targeting* bisa dilakukan seiring dengan terjadinya proses penambahan *resources*. Cara yang paling sederhana jika kekuatan sangat minimal yakni: 1) mencari alumni pesantren atau orang tua yang memiliki afiliasi keagamaan dengan NU. Cara ini bisa dilakukan melalui pendekatan kultural lewat jaringan alumni pesantren dan penilaian terhadap ritus keagamaan di masjid kampus. Khusus untuk mahasiswi bisa diidentifikasi dari jilbab yang dikenakannya; 2) jaringan pertemanan dalam satu sekolah umum; 3) mendorong produktivitas karya akademik kader-kader PMII yang sudah ada sehingga terlihat seperti *achievement*. Dorongan *achievement* ini diperlukan mengingat kebanyakan mahasiswa kampus umum berorientasi pada hasil. Kader PMII yang berprestasi akan menjadi magnet bagi teman seangkatan maupun junior-juniornya yang belum terekrut. Hal ini perlu dilakukan untuk mematahkan stigma bahwa aktif berorganisasi secara otomatis akan menghambat prestasi akademik.

Di luar tahapan-tahapan di atas, ada baiknya melakukan upaya pra-rekrutmen. Pra-rekrutmen adalah proses pengenalan PMII di SMU atau MA favorit yang dapat dilakukan oleh pengurus cabang. Sekolah favorit biasanya menjadi pemasok mahasiswa di perguruan tinggi umum negeri. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan. Pertama, dengan mengadakan program bimbingan belajar lulus UAN dan atau SPMB. Kedua, melibatkan perwakilan OSIS dalam kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh PMII misalnya dalam kegiatan diskusi publik. Biasanya, Mereka yang tergabung di dalam OSIS adalah siswa-siswi berprestasi dan mempunyai gairah berorganisasi yang tinggi. Setelah melakukan berbagai langkah di atas maka fase yang tidak kalah pelik adalah mempertahankan *positioning*. Mereka yang telah terekrut harus mendapat pembinaan yang terencana dan terukur sehingga *positioning* yang diharapkan dapat terbentuk dan bertahan. Program kegiatan hendaknya hanyak diprioritaskan pada dua hal besar: internalisasi nilai dan dorongan meraih prestasi. Adapun taktik pengembangannya adalah dengan mendorong berdiasporanya kader-kader PMII di berbagai klub studi/hobby, UKM, dan BEM sebagai sarana melakukan rekrutmen, mengakumulai pengetahuan akademik, menambah jejaring profesional dan alumni almamater, serta mewarnai (menginternalisasi) institusi dengan *values* PMII.

Penguasaan organisasi intra-universitas

Di hampir seluruh kampus, organisasi intra-universitas merupakan arena kontestasi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi gerakan baik dalam sekup lokal kampus maupun ekstra-universitas. Di luar kedua kelompok tadi biasanya terdapat berbagai kelompok berbasis hobby, etnik, maupun atas dasar disiplin akademik di jurusan atau fakultas. Organisasi intra-universitas perlu dikuasai karena memiliki tiga aspek yang dapat membantu pengembangan PMII. Pertama, dari aspek finansial, organisasi ini mendapatkan biaya dari pihak kampus dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya secara periodik. Kedua, dari aspek infrastruktur, organisasi ini memiliki sekretariat beserta perlengkapan kantor di dalam kampus. Ketiga, dari aspek legalitas, umumnya organisasi ini yang hanya boleh menjalankan berbagai kegiatan mahasiswa non-akademik di dalam kampus.

Penguasaan organisasi intra-universitas sangat bergantung dengan kekuatan PMII atau, dalam kasus tertentu, kekuatan personal kader PMII. Mengkalkulasi kekuatan menjadi penting untuk dapat menentukan organisasi intra-universitas yang diproyeksikan untuk direbut yang dalam wujudnya berbentuk UKM, Himaju, BEM Fakultas, BEM Universitas, dan DPM. Bila berhasil dikuasai maka pendanaan kegiatan PMII dapat disubsidi dari anggaran kampus melalui sisa anggaran kegiatan formal. Dari aspek infrastruktur dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh kampus, misalnya menjadikan sekretariat sebagai sarana untuk rapat dan berdiskusi kegiatan-kegiatan PMII. Adapun dari aspek legalitas, kegiatan-kegiatan yang dijalankan menjadi sarana sosialisasi kader-kader PMII. Dalam kegiatan-kegiatan formal tersebut dapat melihat dan menilai mahasiswa potensial yang sangat perlu untuk direkrut oleh PMII. Taktik penguasaan organisasi intra-universitas sesungguhnya dapat dijadikan ukuran sejauh mana tingkat penerimaan kualitas kepemimpinan dan ketrampilan berorganisasi kader-kader PMII bagi mahasiswa lainnya. Proses penempaan kepemimpinan akan menjadi berbeda mengingat tantangannya juga berbeda. Selain meningkatkan *skill* kepemimpinan dorongan untuk berada di organisasi intra-universitas bertujuan meningkatkan kompetensi berdasarkan potensi dan minat akademik

Membangun *Global-network*

Sebagai bagian pertarungan PMII di dalam *global front* maka langkah yang harus dilakukan adalah membangun *global-network* dengan organisasi gerakan sosial lainnya. *Global-network* akan sangat berfungsi manakala PMII menggunakan instrumen kekuatan global untuk turut memberikan tekanan dalam melakukan advokasi pada perebutan *local front*. Pada level pengembangan institusi, *global-network* dapat membantu untuk mengakselerasi pengetahuan dan jaringan. *Global-network*, selain organisasi gerakan sosial transnasional, yang di maksud dalam hal ini adalah negara. Sebagai organisasi kemahasiswaan, PMII dapat membuka (*opportunity*) berjejaring dengan berbagai aktor dalam negara. Modal sosial yang dimiliki adalah oleh PMII untuk berjejaring dengan negara adalah pengalaman dan kemampuannya dalam mengkampanyekan Islam moderat. Hal ini bisa menjadi alat tawar dalam membangun relasi internasional dengan negara-negara yang tergabung di dalam BRICS. Negara-negara BRICS memiliki potensi menjadi kekuatan baru di dunia dalam hal ekonomi, politik, teknologi, dan pertahanan.

Saat ini yang banyak terjadi di negara-negara tersebut adalah potensi distabilitas akibat separatisme atau konflik horizontal berbasis sentimen keagamaan. Di Cina, India, dan Rusia keberadaan umat Islam menduduki persentase yang cukup tinggi. Dan pastinya, negara-negara tersebut tidak ingin mengalami kendala ketika berambisi menjadi kekuatan baru.Kelebihan PMII dalam mempromosikan dan mempraktekkan Islam moderat tentu dapat menjadi "penggedor" dalam membangun relasi. Islam yang dikampanyekan bukan merupakan Islam berwatak konfrontatif yang memaksakan ajaran Islam diadopsi dalam sistem kenegaraan melainkan pemahaman Islam yang selaras atau dapat bernegosiasi dengan pembangunan (*development*) negara dan masyarakat. Pengalaman mengkampanyekan Islam moderat selama puluhan tahun yang dilakukan oleh PMII telah menjaga integritas nasional Indonesia dari berbagai isu sektarian (agama, etnik, dan golongan) yang berpotensi mengancam kedaulatan teritorial Indonesia dan konflik dalam skala massive di masyarakat. Hingga kini, keberagaman di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang tanpa harus takut terhadap terjadinya homogenisasi oleh kelompok sektarian tertentu.

Selain itu, potensi lain yang bisa di maksimalkan PMII adalah menggelorakan lagi semangat Konferensi Asia-Afrika di mana Indonesia menjadi pionirnya, solidaritas Selatan-selatan, dan terintegrasinya masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Jika *global-network* dengan negara, *civil society*, institusi pendidikan, institusi agama, dan institusi budaya, dan berbagai asosiasi kepemudaan berhasil dilakukan maka PMII akan menjadi organisasi gerakan mahasiswa yang bervisi global dan mendapatkan banyak akses untuk terlibat secara aktif. Secara khusus, *global-network* dimanfaatkan untuk mendapatkan akses pendidikan, berupa beasiswa untuk *up grading* disiplin akademik, bagi kader-kader PMII dan membangun ikatan emosional serta kerjasama dengan organisasi kepemudaan di negara-negara tersebut.[]

MATERI 06
SEJARAH REVOLUSI INDONESIA & KONSEPSI NASIONALISME

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

BAGIAN SATU: SEJARAH INDONESIA

Prasejarah

Secara geologi, wilayah Indonesia modern muncul kira-kira sekitar Zaman Pleistocene ketika wilayah itu masih berhubung dengan Asia Daratan. Pemukim pertama wilayah tersebut yang diketahui adalah manusia Jawa pada masa sekitar 500,000 tahun yang lalu. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya Zaman Es.

Era sebelum Penjajahan: Sejarah Awal

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau Kerajaan Jawa Dwipa Hindu di pulau Jawa dan Sumatera pada sekitar 200 SM. Kerajaan Taruma menguasai Jawa Barat pada sekitar tahun 400, dengan agama Buddha tiba di wilayah tersebut pada tahun 425. Pada Zaman Pembaharuan Eropa, Jawa dan Sumatera telah mempunyai warisan peradaban yang berusia ribuan tahun dan sepanjang dua buah kerajaan besar.

Kerajaan Hindu-Buddha

Berawal dari abad ke-4 di Kerajaan Kutai tepatnya di Kalimantan Timur merupakan Kerajaan Hindu pertama di Nusantara. kemudian perkembangan berlanjut antara abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddhisme Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. I Ching, penjelajah China, mengunjungi ibu kotanya di Palembang pada sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan SemenanJunig Tanah Melayu. Abad ke-14 juga memperlihatkan kebangkitan sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Antara tahun 1331 hingga tahun 1364, Gadjah Mada, patih Majapahit, berhasil menguasai wilayah yang kini merupakan sebagian besarnya Indonesia bersama-sama hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari zaman Gadjah Mada termasuk pengekodan undang-undang dan kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam roman kesateriaan *Ramayana*.

Kerajaan Islam

Islam tiba di Indonesia pada sekitar abad ke-12 dan melalui bercampur bebas, menggantikan agama Hindu sebagai agama yang terutama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera; hanya Bali yang tetap mempertahankan majoriti penganut Hindunya. Di kepulauan-kepulauan di timur, paderi-paderi Kristian dan ulama-ulama Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17 dan pada saat ini, adanya sebagian yang besar penganut kedua-dua agama ini di kepulauan-kepulauan tersebut. Penyebaran Islam didorong oleh hubungan perdagangan di luar Nusantara; umumnya para pedagang dan ahli kerajaanlah yang pertama menganut agama baru tersebut. Kerajaan-kerajaan yang penting termasuk Mataram di Jawa Tengah, serta juga Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku Timur.

Era penjajahan Portugis: Penjajahan Syarikat Hindia Timur Belanda

Mulai tahun 1602, Belanda memanfaatkan diri dengan perpecahan antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit, dan beransur-ansur menjadi penguasa wilayah yang kini merupakan Indonesia. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis yang tetap dikuasai oleh Portugal sehingga tahun 1975 ketika ia bergabung dengan Indonesia untuk dijadikan salah sebuah provinsi dengan nama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun kecuali dua waktu yang singkat, yakni ketika sebagian kecil dari Indonesia dikuasai oleh Britain selepas Perang Jawa Britain-Belanda, serta semasa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kuasa penjajah yang terkaya di dunia. Bagi sebagian orang, penjajahan Belanda selama 350 tahun adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian selepas Belanda mendekati daerah jajahannya. Pada abad ke-17 dan abad ke-18, Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh syarikat perdagangan yang bernama Syarikat Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: *Verenigde Oostindische Compagnie* atau *VOC*). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan kegiatan penjajah di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602, dengan ibu pejabatnya di Batavia yang kini dinamai Jakarta.

Tujuan utama Syarikat Hindia Timur Belanda adalah untuk mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempahnya di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan ancaman kekerasan terhadap para penduduk di kepulauan-kepulauan penanaman rempah, dan terhadap orang-orang bukan Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk

Kepulauan Banda terus menjual buah pala kepada pedagang Inggris, angkatan tentara Belanda membunuh atau mengusir hampir seluruh penduduknya, dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala kemudian dihantar untuk tinggal di pulau-pulau tersebut sebagai ganti. Syarikat Hindia Timur Belanda menjadi terlibat dalam politik dalaman Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

Penjajahan Belanda

Selepas Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB) menjadi muflis pada akhir abad ke-18 dan selepas penguasaan United Kingdom yang singkat di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih pemilikan SHTB pada tahun 1816. Belanda berjaya menumpaskan sebuah pemberontakan di Jawa dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenali sebagai *cultuurstelsel* dalam bahasa Belanda mula diamalkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dan sebagainya. Hasil-hasil tanaman itu kemudian dieksport ke luar negara. Sistem ini memberikan kekayaan yang besar kepada para pelaksananya-baik orang Belanda mahupun orang Indonesia. Sistem tanam paksa ini yang merupakan monopoli pemerintah dihapuskan pada masa yang lebih bebas selepas tahun 1870. Pada tahun 1901, pihak Belanda mengamalkan apa yang dipanggil mereka sebagai Politik Beretika (bahasa Belanda: *Ethische Politiek*) yang termasuk perbelanjaan yang lebih besar untuk mendidik orang-orang pribumi serta sedikit perubahan politik. Di bawah Gabenor JenderalJ.B. van Heutsz, pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang waktu penjajahan mereka secara langsung di seluruh Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan asas untuk negara Indonesia pada saat ini.

Gerakan Nasionalisme

Pada tahun 1908, Budi Utomo, gerakan nasionalis yang pertama, ditubuhkan, diikuti pada tahun 1912 oleh gerakan nasionalis besar-besaran yang pertama, Sarekat Islam. Belanda membalas dengan langkah-langkah yang menindas selepas Perang Dunia I. Para pemimpin nasionalis berasal dari sekumpulan kecil yang terdiri dari para profesional muda dan pelajar, mereka itu dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjarakan karena kegiatan politik mereka, termasuk juga Sukarno, presiden Indonesia yang pertama.

Perang Dunia II

Pada awal Perang Dunia II dalam bulan Mei 1940, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman, dan Hindia-Belanda mengumumkan keadaan berjaga-jaga. Pada bulan Juli, Hindia-Belanda mengalihkan eksport untuk Jepang ke Amerika Syarikat dan Britain. Perundingan-perundingan dengan Jepang tentang pembekalan bahan api kapal terbang gagal pada bulan Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara pada bulan Desember tahun tersebut. Pada bulan yang sama, Sumatera menerima bantuan Jepang untuk memulai pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda. Angkatan tentara Belanda yang terakhir dikalahkan oleh Jepang pada bulan Maret 1942.

Pendudukan Jepang

Pada bulan Juli 1942, Sukarno menerima tawaran Jepang untuk membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawapan kepada keperluan-keperluan tentara Jepang. Sukarno, Mohammad Hatta, dan Ki Bagus Hadikusumo diberipangkat dan jabatan oleh maharaja Jepang pada tahun 1943. Tetapi pengalaman Indonesia dari penguasaan Jepang amat berbeda-beda, bergantung kepada tempat duduk seseorang serta status sosialnya. Bagi mereka yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, penganiayaan seks kanak-kanak, penahanan sembarangan dan hukuman mati, serta kejahatan-kejahatan perang yang lain. Orang Belanda dan orang campuran Indonesia-Belanda merupakan sasaran yang utama untuk kezaliman pada zaman penguasaan Jepang di Indonesia.

Pada bulan Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Dalam keputusan pertamanya pada bulan Mei, Soepomo menyatukan negara dan membantah individualisme; sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus menuntut Sarawak, Sabah, Tanah Melayu, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang. Pada 9 Agustus 1945, Sukarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat terbang ke Vietnam untuk bertemu dengan Marsyal Terauchi. Akan tetapi mereka diberitahu bahwa angkatan tentara Jepang sedang menuju ke arah kehancuran. Walaupun demikian, Jepang berkeinginan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus .

Era Kemerdekaan

Persiapan Kemerdekaan

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti di atas, Sukarno membaca "Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia" pada hari berikutnya, yaitu 17 Agustus 1945. Berita tentang pelaksanaan kemerdekaan disebarkan melalui radio dan risalah,

sementara angkatan tentara Indonesia, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), serta para pemuda dan lain-lainnya berangkat untuk mempertahankan kediaman Sukarno.

Pada 29 Agustus 1945, kumpulan tersebut melantik Sukarno sebagai Presiden Indonesia, dengan Mohammad Hatta sebagai wakilnya, melalui lembaga yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara sehingga pilihanan umum dapat dijalankan. Lembaga tersebut menjalankan pemerintahan baru pada 31 Agustus, dengan Republik Indonesia terdiri dari 8 buah provinsi, iaitu:

1. Sumatera
2. Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei)
3. Pulau Jawa, iaitu Jawa Barat Jawa Tengah, dan Jawa Timur
4. Sulawesi
5. Maluku (termasuk Irian Barat/Papua)
6. Nusa Tenggara.

Perang Kemerdekaan INDONESIA: ERA 1945-1949
Teks Proklamasi

Antara tahun 1945 hingga tahun 1949, persatuan laut Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan Indonesia melarang segala pelayaran Belanda pada sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai sebarang dukungan logistik mahupun bekalan yang diperlukan untuk memulihkan kekuasaan penjajahannya di Indonesia.

Usaha-usaha Belanda untuk kembali berkuasa menghadapi pertentangan yang hebat. Selepas kembali ke Jawa, angkatan tentara Belanda segera merebut kembali ibu kota Batavia, dengan akibat bahwa para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai Ibu Negara mereka. Pada 27 Desember 1949, setelah empat tahun peperangan dan perundingan, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Persekutuan Indonesia. Pada tahun 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Demokrasi Parlementer

Tidak lama setelah itu, Indonesia meluluskan undang-undang baru yang mencipta sebuah sistem demokrasi parlementer yang dewan eksekutifnya dipilih oleh parlemen atau MPR dan bertanggungjawab kepadanya. MPR pada mula-mula terdiri dari partai-partai politik sebelum dan selepas pilihan raya umum yang pertama pada tahun 1955 sehingga pemerintahan yang stabil tercapai. Peranan Islam di Indonesia menjadi masalah yang rumit, dengan Sukarno cenderung memilih sebuah sistem pemerintahan sekular yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang terdiri dari syariat Islam.

Demokrasi Terpimpin

Pemberontakan di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau yang lain yang dimulakan sejak tahun 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan sebuah perlembagaan yang baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada tahun 1959, ketika Presiden Sukarno pada dirinya sendiri mengembalikan perlembagaan 1945 yang bersifat sementara dan yang memberikan kuasa presiden yang besar kepadanya, beliau tidak menghadapi pertentangan.

Antara tahun 1959 hingga tahun 1965, Presiden Sukarno memerintah melalui sebuah rejim yang autoritarian di bawah label “Demokrasi Terpimpin“. Beliau juga mengejar hubungan luar negeri, suatu langkah yang disokong oleh para pemimpin utama di negara-negara bekas jajahan yang juga menolak ikatan yang resmi dengan Blok Barat maupun Blok Kesatuan Soviet. Para pemimpin tersebut mengadakan Persidangan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 untuk mendirikan asas yang kelak menjadi Negara-negara Non-Blok (NAM).

Pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an, Sukarno bergerak lebih rapat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meskipun PKI merupakan partai komunis yang terbesar di dunia di luar Kesatuan Soviet dan China, orang ramai tidak menunjukkan sokongan kepada ideologi komunis seperti di negara-negara lainnya.

Konfrontasi Indonesia-Malaysia

Sukarno menentang pembentukan Persekutuan Malaysia karena menurut beliau, ini merupakan sebuah “rancangan neo-kolonialisme” yang bertujuan untuk melanjutkan keinginan perdagangan pihak Inggris di wilayah tersebut. Masalah ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara Indonesia dengan Malaysia dan United Kingdom.

Irian Barat

Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaannya terhadap bahagian barat pulau Nugini (Irian), dan mengizinkan langkah-langkah yang menuju ke arah pemerintahan sendiri serta persiapan kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Perundingan-perundingan dengan Belanda terhadap

penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dengan pasukan-pasukan laskar terjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara angkatan-angkatan tentara Indonesia dan Belanda pada tahun 1961 sehingga tahun 1962. Pada tahun 1962, Amerika Syarikat menekan Belanda agar setuju dengan perbincangan-perbincangan rahasia dengan Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dengan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei 1963.

Gerakan 30 September

Sehingga tahun 1965, PKI telah menguasai banyak perserikatan besar-besaran yang dibentuk oleh Sukarno untuk memperkuat dukungan terhadap rejimnya. Dengan persetujuan dari Sukarno, pertubuhan-pertubuhan tersebut memulai untuk membentuk “Angkatan Kelima“, dengan mempersenjatai para pendukungnya. Pihak tertinggi dalam angkatan tentara Indonesia menentang masalah ini. Pada 30 September 1965, enam orang jenderal kanan dan beberapa orang yang lain dibunuh dalam sebuah percobaan perebutan kekuasaan yang disalahkan kepada para pengawal istana yang taat setia kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mejar Jenderal Suharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Suharto kemudian mempergunakan keadaan ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang yang dituduh sebagai komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban pada tahun 1966 mencapai setidaknya 500.000 dengan pengorbanan yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

Era Orde Baru

Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Suharto untuk waktu lima tahun sebagai presiden Indonesia. Beliau kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Suharto memulai “Orde Baru“ dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatik mengubah dasar-dasar luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang diikuti oleh Sukarno pada akhir kepresidenannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan membubarkan struktur yang dikuasai oleh tentara atas nasihat dari ahli-ahli ekonomi didikan Barat. Selama waktu pemerintahannya, dasar-dasar ini dan eksploitasi sumber alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan amat dikurangkan pada dekade-dekade 1970-an dan 1980-an. Bagaimanapun, beliau juga memperkaya diri, keluarga, dan rakan-rakan rapatnya melalui amalan rasuah yang menular.

Irian Jaya

Setelah menolak pengawasan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah Indonesia menjalankan “Tindakan Pilihan Bebas “ (*Act of Free Choice*) di Irian Jaya pada tahun 1969 yang memilih 1,025 orang ketua daerah Irian untuk dilatih dalam bahasa Indonesia. Mereka akhirnya memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Sebuah ketetapan Perhimpunan Agung PBB kemudian mengesahkan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya selepas perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam suasana yang lebih terbuka selepas tahun 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

Timor Timur

Sejak dari tahun 1596 sehingga tahun 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenali sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat Revolusi Anyelir di Portugal, penjabat Portugal secara mendadak berundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pilihan raya tempatan pada tahun tersebut, Partai Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagiannya oleh orang-orang yang menyokong faham Marxisme, bersama-sama UDT, menjadi partai-partai yang terbesar, selepas sebelumnya membentuk organisasi untuk berkampanye agar memperoleh kemerdekaan dari Portugal.

Pada 7 Desember 1975, angkatan tentara Indonesia masuk ke Timor Timur. Indonesia yang mempunyai dukungan senjata dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan oleh Amerika Syarikat dan Australia, berharap bahwa dengan memiliki Timor Timur, mereka akan memperoleh tambahan sumber minyak dan gas asli serta lokasi yang strategis. Pada peringkat awal, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200,000 orang penduduk Timor Timur melalui pembunuhan langsung, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi semasa Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia. Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pungutan suara yang dijalankan oleh PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 75% memilih untuk merdeka. Setelah keputusan pungutan suara diumumkan, angkatan tentara Indonesia dengan segeranya melanjutkan pemusnahan di Timor Timur, umpamanya pemusnahan infrastruktur di daerah tersebut. Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yang menggabungkan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, dan Peralihan PBB (UNTAET) mengambil alih tanggungjawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002.

Krisis ekonomi

Suharto mengumumkan peletakan jabatannya didampingi B.J. Habibie. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia dilanda oleh krisis keuangan dan ekonomi Asia (baca: Krisis Keuangan Asia), disertai kemarau yang terburuk dalam waktu 50 tahun terakhir dan harga-harga minyak, gas asli dan komoditi-komoditi eksport yang lain yang semakin jatuh. Nilai rupiah jatuh, inflasi meningkat, dan perpindahan modal dipercepat. Unjuk rasa yang dipimpin oleh para mahasiswa mendesak peletakan jabatan Suharto. Di tengah-tengah kekacauan yang meluas, Suharto meletakkan jabatan sebagai presiden Indonesia pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya. Suharto kemudian memilih penggantinya, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Era Reformasi
Pemerintahan Habibie

Presiden Habibie dengan segera membentuk sebuah kabinet, dengan salah satu tugas yang utamanya memperolehan dukungan dari luar negeri untuk rancangan pemulihan ekonominya. Beliau juga membebaskan para tahanan politik dan melonggarkan kawalan terhadap kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pemerintahan Wahid

Pemilihan umum untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999, dengan Partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri, anak perempuan Sukarno, muncul sebagai pemenang dalam pilihan raya parlemen dengan mendapatkan 34%; Golkar (partai Suharto yang sebelumnya selalu merupakan pemenang dalam pemilu) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil Presiden untuk waktu lima tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan rombakan kabinetnya pada Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokrasi dan perkembangan ekonomi di bawah keadaan-keadaan yang berlawanan. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antara kelompok-kelompok etnik dan antara agama-agama, khususnya di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan oleh rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang diakibatkan oleh para orang militan Timor Timur pro-Indonesia menimbulkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin menentang kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

Pemerintahan Megawati

Dalam MPR pertama pada bulan Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggungjawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan penunjuk perasaan menyerbu MPR dan mendesaknya agar meletakkan jabatan atas alasan keterlibatannya dalam skandal. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki pemerintahannya, beliau mengumumkan keputusan yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada Megawati, wakil presidennya. Megawati mengambil alih jabatan presiden tidak lama kemudian.

Pemerintahan Yudhoyono

Pada tahun 2004, pemilu diadakan, dengan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal jabatannya menghadapi pengalaman yang pahit seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang membinasakan sebagian Aceh serta gempa bumi di Sumatera pada bulan Maret 2005. Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang berpanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.

BAGIAN DUA: SEJARAH INDONESIA (1945-1949)

Indonesia: Era 1945-1949 dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.

1945: Kembalinya Belanda bersama Sekutu
Latar belakang

Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya.

Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya (*South West Pacific Area Command/ SWPAC*).

Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (*South East Asia Command*) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentera Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu (*Recovered Allied Prisoners of War and Internees/ RAPWI*).

Mendaratnya Belanda diwakili NICA

Berdasarkan *Civil Affairs Agreement*, pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration - pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (*statkundige concepti* atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang di antara anggotanya ialah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda.

Pertempuran melawan Sekutu dan NICA

Terdapat berbagai pertempuran yang terjadi pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah:

1. Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya.
2. Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya.
3. Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur
4. Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya.

Ibukota pindah ke Yogyakarta

Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api, pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibukota. Meninggalkan Sjahrir dan kelompok yang pro-negosiasi dengan Belanda di Jakarta.

Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api, yang disebut dengan singkatan KLB (Kereta Luar Biasa). Orang lantas berasumsi bahwa rangkaian kereta api yang digunakan adalah rangkaian yang terdiri dari gerbong-gerbong luar biasa. Padahal yang luar biasa adalah jadwal perjalanannya, yang diselenggarakan diluar jadwal yang ada, karena kereta dengan perjalanan luar biasa ini, mengangkut Presiden beserta Wakil Presiden, dengan keluarga dan staf, gerbong-gerbongnya dipilihkan yang istimewa, yang disediakan oleh Djawatan Kereta Api (DKA) untuk VVIP.

1946: Perubahan sistem pemerintahan

Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda. Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia (dari sistem Presidensiil menjadi sistem Parlementer) memungkinkan perundingan antara pihak RI dan Belanda. Dalam pandangan Inggris dan Belanda, Sutan Sjahrir dinilai sebagai seorang moderat, seorang intelek, dan seorang yang telah berperang selama pemerintahan Jepang.

Diplomasi Syahrir

Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan (*Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen*), J.H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: “*Mereka sendiri [Sjahrir dan Kabinetnya] dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan*”. Logemann sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945, “*Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka, kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr Soekarno, kita akan berunding dengan Sjahrir*”. Tanggal 6 Maret 1946 kepada van Mook, Logemann bahkan menulis bahwa Soekarno adalah *persona non grata*.

Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensiil menjadi Parlementer, karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Ir Soekarno menolak hal ini, sebaliknya Sjahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahnya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerah-daerah dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Masalah dalam negeri akan dihadapi dengan suatu parlemen yang dipilih secara demokratis dan orang-orang Indonesia akan merupakan mayoritas. Kementerian akan disesuaikan dengan parlemen tetapi akan dikepalai oleh wakil kerajaan. Daerah-daerah yang bermacam-macam di Indonesia yang dihubungkan bersama-sama dalam suatu susunan federasi dan persemakmuran akan menjadi rekan (*partner*) dalam Kerajaan Belanda, serta akan mendukung permohonan keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB.

Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu: "*mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari*". Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan *de facto* Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Sjahrir tidak dapat menerima syarat-syarat ini, konferensi itu bubar dan ia bersama teman-temannya kembali pulang.

Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan *surat rahasia* kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingan yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Dalam surat Sjahrir yang khusus ini, ada penerimaan yang samar-samar tentang gagasan van Mook mengenai masa peralihan sebelum kemerdekaan penuh diberikan kepada Indonesia; ada pula nada yang lebih samar-samar lagi tentang kemungkinan Indonenesia menyetujui federasi Indonesia - bekas Hindia Belanda dibagi menjadi berbagai negara merdeka dengan kemungkinan hanya Republik sebagai bagian paling penting. Sebagai kemungkinan dasar untuk kompromi, hal ini dibahas beberapa kali sebelumnya, dan semua tokoh politik utama Republik mengetahui hal ini. Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, van Mook mengirim kawat ke Den Haag: "*menurut sumber-sumber yang dapat dipercaya, usul balasan (yakni surat Sjahrir) tidak disetujui oleh Soekarno dan ketika dia bertemu dengannya, dia marah. Tidak jelas, apa arah yang akan diambil oleh amarah itu*". Pada waktu yang sama, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas-desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan *de facto* Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra.

Penculikan terhadap PM Sjahrir

Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Sjahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Sjahrir. Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Sjahrir, yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". Sjahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandan Batalyon setempat. Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan, "*Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946, untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah*". Selama sebulan lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan; namun baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet.

Kembali menjadi PM

Tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri, Sjahrir kemudian berkomentar, "*Kedudukan saya di kabinet ketiga diperlemah dibandingkan dengan kabinet kedua dan pertama. Dalam kabinet ketiga saya harus berkompromi dengan Partai Nasional Indonesia dan Masyumi... Saya harus memasukkan orang seperti Gani dan Maramis lewat Soekarno; saya harus menanyakan pendapatnya dengan siapa saya membentuk kabinet.*"

Konferensi Malino - Terbentuknya “negara” baru

Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian; Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.

1946-1947: Peristiwa Westerling

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda *Depot Speciale Troepen* pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer *Counter Insurgency* (penumpasan pemberontakan).

Perjanjian Linggarjati

Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jendral datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Loard Killean. Bertempat di bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat -terutama Inggris- dari luar negeri, dicapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya sebagai berikut :

- Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949,
- Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia
- Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Hal ini akan memajukan kepentingan bersama dalam hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan dan masalah ekonomi serta kebudayaan. Indonesia Serikat akan mengajukan diri sebagai anggota PBB. Akhirnya setiap perselisihan yang timbul dari persetujuan ini akan diselesaikan lewat arbitrase.

Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November 1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres.

Peristiwa yang terjadi terkait dengan hasil perundingan Linggarjati

Parade Tentara Republik Indonesia (TRI) di Purwakarta, Jawa Barat, pada tanggal 17 Januari 1947. Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S M Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dalam sidang tersebut membahas apakah Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak Kepergian S M Kartosoewirjo ini dikawal oleh para pejuang Hizbullah dari Jawa Barat, karena dalam rapat tersebut kemungkinan ada dua kubu yang bertarung pendapat sangat sengit, yakni antara sayap sosialis (diwakili melalui partai Pesindo), dengan pihak Nasionalis-Islam (diwakili lewat partai Masyumi dan PNI). Pihak sosialis ingin agar KNPI menyetujui naskah Linggarjati tersebut, sedang pihak Masyumi dan PNI cenderung ingin menolaknya Ketika anggota KNIP yang anti Linggarjati benar-benar diancam gerilyawan Pesindo, Sutomo (Bung Tomo) meminta kepada S M Kartosoewirjo untuk mencegah pasukannya agar tidak menembaki satuan-satuan Pesindo.

DR H J Van Mook kepala Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3 pulau ini Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan presiden Sukowati, lewat Konferensi Denpasar tanggal 18 - 24 Desember 1946.

Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia 29 Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan.

Proklamasi Negara Pasundan

Usaha Belanda tidak berakhir sampai di NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa, memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947. Secara militer negara baru ini sangat lemah, ia benar benar sangat tergantung pada Belanda, tebukti ia baru eksis ketika Belanda melakukan Agresi dan kekuatan RI hengkang dari Jawa Barat. Di awal bulan Mei 1947 pihak Belanda yang memprakarsai berdirinya Negara Pasundan itu memang sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan. Namun mereka pun menyadari begitu besarnya biaya yang ditanggung untuk pemeliharaan suatu pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif, merupakan pemborosan keuangan yang serius yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur diakibatkan perang. Oleh karena itu untuk mempertahankan pasukan ini maka pihak Belanda memerlukan komoditi dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatera (khususnya minyak dan karet).

Agresi Militer I

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda;
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama);
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.

Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik.

Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus “mengembalikan ketertiban” dengan “tindakan kepolisian”. Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam (tepatnya 21 Juli 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama.

Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten), dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa Di Sumatera, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi- instalasi minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda.

Menghadapi aksi Belanda ini, bagi pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Dan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menimbulkan keinginan untuk melanjutkan aksinya kembali. Beberapa orang Belanda, termasuk van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak, tetapi pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai 'aksi polisional' tersebut serta menggiring Belanda untuk segera menghentikan penaklukan sepenuhnya terhadap Republik.

Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri

Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I pada bulan Juli, pengganti Sjahrir adalah Amir Syarifudin yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia menggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Seperti yang dijelaskan dalam sepucuk suratnya kepada Soekarno dan Amir Syarifudin, dia menolak kursi menteri karena “*ia belum terlibat dalam PSII dan masih merasa terikat kepada Masyumi*”.

S.M. Kartosoewirjo menolak tawaran itu bukan semata-mata karena loyalitasnya kepada Masyumi. Penolakan itu juga ditimbulkan oleh keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat. Akibat menyaksikan kondisi politik yang tidak menguntungkan bagi Indonesia disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda. Di samping itu Kartosoewirjo tidak menyukai arah politik Amir Syarifudin yang kekiri-kirian. Kalau dilihat dari sepak terjang Amir Syarifudin selama manggung di percaturan politik nasional dengan menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sangat jelas terlihat bahwa Amir Syarifudin ingin membawa politik Indonesia ke arah Komunis.

1948: Perjanjian Renville

Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB, atas desakan Australia dan India, mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-Jasa Baik, yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan itu .

Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville, ternyata menghasilkan persetujuan lain, yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zone demiliterisasi Indonesia Serikat akan didirikan, tetapi atas garis yang berbeda dari persetujuan Linggarjati, karena plebisit akan diadakan untuk menentukan apakah berbagai kelompok di pulau-pulau besar ingin bergabung dengan Republik atau beberapa bagian dari federasi yang direncanakan Kedaulatan Belanda akan tetap atas Indonesia sampai diserahkan pada Indonesia Serikat.

Pada tanggal 19 Januari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggarjati : hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa - Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi militer. Perdana menteri Belanda menjelaskan mengapa persetujuan itu ditandatangani agar Belanda tidak “menimbulkan rasa benci Amerika”.

Sedikit banyak, ini merupakan ulangan dari apa yang terjadi selama dan sesudah perundingan Linggarjati. Seperti melalui persetujuan Linggarjati, melalui perundingan Renville, Soekarno dan Hatta dijadikan lambang kemerdekaan Indonesia dan persatuan Yogyakarta hidup lebih lama, jantung Republik terus berdenyut. Ini kembali merupakan inti keuntungan Seperti sesudah persetujuan Linggarjati, pribadi lain yang jauh dari pusat kembali diidentifikasi dengan persetujuan -dulu Perdana Menteri Sjahrir, kini Perdana Menteri Amir- yang dianggap langsung bertanggung jawab jika sesuatu salah atau dianggap salah.

Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Hatta sebagai Perdana Menteri

Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu 'kabinet presidentil' darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

Dengan terpilihnya Hatta, dia menunjuk para anggota yang duduk dalam kabinetnya mengambil dari golongan tengah, terutama orang-orang PNI, Masyumi, dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai. Amir dan kelompoknya dari *sayap kiri* kini menjadi pihak oposisi. Dengan mengambil sikap sebagai oposisi tersebut membuat para pengikut Sjahrir mempertegas perpecahan mereka dengan pengikut-pengikut Amir dengan membentuk partai tersendiri yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI), pada bulan Februari 1948, dan sekaligus memberikan dukungannya kepada pemerintah Hatta.

Memang runtuhnya Amir datang bahkan lebih cepat ketimbang Sjahrir, enam bulan lebih dulu Amir segera dituduh -kembali khususnya oleh Masyumi dan kemudian Partai Nasional Indonesia- terlalu banyak memenuhi keinginan pihak asing. Hanya empat hari sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari 1948, Amir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari 1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap memangku jabatan sebagai Wakil Presiden.

Tampaknya kini lebih sedikit jalan keluar bagi Amir dibanding dengan Sjahrir sesudah Perundingan Linggarjati; dan lebih banyak penghinaan. Beberapa hari sesudah Amir berhenti, di awal Februari 1948, Hatta membawa Amir dan beberapa pejabat Republik lainnya mengelilingi Provinsi. Amir diharapkan menjelaskan Perjanjian Renville. Pada rapat raksasa di Bukittinggi, Sumatra Barat, di kota kelahiran Hatta -*dan rupanya diatur sebagai tempat berhenti terpenting selama perjalanan*- Hatta berbicara tentang kegigihan Republik, dan pidatonya disambut dengan hangat sekali.

Kemudian Amir naik mimbar, dan seperti diuraikan Hatta kemudian: “*Dia tampak bingung, seolah-olah nyaris tidak mengetahui apa ayang harus dikatakannya. Dia merasa bahwa orang rakyat Bukittinggi tidak menyenanginya, khususnya dalam hubungan persetujuan dengan Belanda. Ketika dia meninggalkan mimbar, hampir tidak ada yang bertepuk tangan*”

Menurut peserta lain: “*Wajah Amir kelihatannya seperti orang yang sudah tidak berarti*”. Sjahrir juga diundang ke rapat Bukittinggi ini; dia datang dari Singapura dan berpidato. Menurut Leon Salim -kader lama Sjahrir- “*Sjahrir juga kelihatan capai dan jarang tersenyum*”. Menurut kata-kata saksi lain, “*Seolah-olah ada yang membeku dalam wajah Sjahrir*” dan ketika gilirannya berbicara “*Dia hanya mengangkat tangannya dengan memberi salam Merdeka dan mundur*”. Hatta kemudian juga menulis dengan singkat tentang pidato Sjahrir: “*Pidatonya pendek*”. Dipermalukan seperti ini, secara psikologis amat mungkin menjadi bara dendam yang menyulut Amir untuk memberontak di kemudian hari.

Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan di Linggarjati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian, dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948, Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu, melaporkan bahwa Indonesia mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang.

1948-1949: Agresi Militer II

Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Perjanjian Roem Royen

Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Roem Royen.

Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta

Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan.

Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Yang menghasilkan kesepakatan:

- Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
- Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

Penyerahan kedaulatan oleh Belanda

Bung Hatta di Amsterdam, Belanda menandatangani perjanjian penyerahan kedaulatan. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, selang empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika *soevereiniteitsoverdracht* (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan *politionele acties* (Aksi Polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal.

BAGIAN TIGA: SEJARAH REVOLUSI INDONESIA

Pecahnya Revolusi

Desas-desus bahwa Jepang harus, atau akan mengadakan kapitulasi dengan Sekutu memicu aksi beberapa organisasi bawah tanah yang telah bersepakat untuk bangkit melawan Jepang bila Sekutu, mendarat. Bahkan pada tanggal 10 Agustus 1945, setelah mendengar siaran radio yang kebetulan tidak disegel oleh pemerintah militer Jepang bahwa Jepang sudah memutuskan untuk menyerah, Sjahrir mendesak Hatta agar dia bersama Soekarno, segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan meyakinkannya, bahwa dia akan didukung para pejuang bawah tanah dan banyak unit Peta. Sepulangnya Soekarno dan Hatta dari Dalat pada tanggal, 14 Agustus, Sjahrir memberitahukan mereka bahwa Jepang sudah minta diadakan gencatan senjata dan sekali lagi berusaha mendesak mereka memproklamirkan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta yang belum begitu yakin bahwa Jepang telah menyerah, merasa bahwa kelompok-kelompok bawah tanah belum lagi mampu menghimpun kekuatan untuk mengalahkan Jepang, dan khawatir bila hal ini mengakibatkan pertumpahan darah yang sia-sia.

Namun demikian, Sjahrir yang percaya bahwa Soekarno bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan dengan deklarasi kemerdekaan berisi kata-kata sangat anti-Jepang yang telah disiarkan Sjahrir dan kawan-kawannya, segera mengorganisir kelompok-kelompok bawah tanah dan pelajar Jakarta untuk mengadakan demonstrasi umum dan kerusuhan-kerusuhan militer. Tembusan dan deklarasi kemerdekaan mereka yang anti-Jepang itu sudah dikirim ke semua pelosok pulau Jawa untuk segera diterbit begitu Soekarno memproklamirkan kemerdekaan yang diharap bakal terlaksana pada tanggal 15. Setelah persiapan-persiapan mulai dilakukan, menjadi jelas bahwa Soekarno dan Hatta tidak bersedia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 15. Sjahrir tidak dapat menghubungi semua pemimpin organisasinya pada waktu yang tepat untuk memberitahukan pembatalan ini. Revolusipun meletus secara terpisah di Cirebon pada tanggal 15 di bawah Dr. Sudarsono, tetapi berhasil dipadamkan oleh Jepang.

Soekarno dan Hatta masih berharap untuk menghindari pertumpahan darah, sedangkan kelompok-kelompok bawah tanah mengikuti tuntutan Sjahrir untuk segera memproklamirkan kemerdekaan berdasarkan syarat-syarat yang begitu anti-Jepang sehingga menuntut seluruh rakyat Indonesia harus berbaris di belakangnya untuk secara mendadak bersama-sama menggulingkan Jepang. Sementara itu, gerakan bawah tanah pimpinan Soekarni yang didukung oleh sejumlah kelompok Persatuan Mahasiswa telah kehilangan kesabaran, dan pada tanggal 16, jam 4.00 pagi, mereka menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke garnisun Peta di rengasdengklok. Di sana mereka meyakinkan Soekarno dan Hatta, bahwa Jepang sudah benar-benar menyerah. Kemudian mereka berusaha mendesak keduanya untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Soekarni berkeras bahwa ada 15.000 pemuda bersenjata di sekitar pinggiran kota Jakarta yang siap masuk kota begitu proklamasi diucapkan. Soekarno dan Hatta yakin bahwa kekuatan bersenjata yang dikatakan Soekarni itu jumlahnya dibesar-besarkan, dan bahwa Jepang dengan mudah dapat menumpas usaha semacam itu. Jelas mereka merasa bahwa ada kemungkinan Jepang mau memahaminya dan karenanya tidakakan menentangnya dengan kekuatan militer. Demi menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu, setidak-tidaknya mereka ingin memastikan dulu sikap para pejabat militer Jepang sebelum menggerakkan pemberontakan rakyat. Lebih-lebih lagi, keduanya merasa bahwa setiap deklarasi harus benar-benar meliputi seluruh penduduk Indonesia, karena itu, harus dilaksanakan lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Menurut mereka, dengan cara itu seluruh rakyat Indonesia akan bangkit bersama-sama menegaskan kemerderdekaan, dan akan lebih banyak kesempatan menggerakkan penduduk cara berhasil melawan Jepang. Suatu rapat panitia tersebut direnungkan akan diadakan pada tanggal 17, jam 10.00 pagi, dan kemudian mereka mengusulkan untuk memproklamirkan kemerdekaan; Sementara itu, Jepang sudah mengetahui perihal penculikan itu, dan Subardjo yang punya hubungan dekat dengan kelompok Soekarni pergi ke Rengasdengklok, jelas sepengetahuan Mayeda, atau setidaknya juga para pejabat militer Jepang, untuk membujuk Soekarni dan para pemimpin mahasiswa itu kembali dengan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Ini meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang mengetahui rencana besar tentang proklamasi kemerdekaan itu, dan mereka menjadi lebih percaya bahwa kekuatan bersenjata Indonesia di pinggiran ibu kota itu tidak memadai dan sejak itu mereka tidak terpikir lagi untuk mengadakan serangan mendadak.

Begitu kembali ke Jakarta pada tanggal 16 tengah malam Hatta segera mengadakan hubungan dengan tangan-kanan Panglima Angkatan perang Jepang di Jawa. Pejabat ini memberitahukannya bahwa menurut syarat-syarat penyerahan Jepang, Jepang hanya “menjadi agen sekutu”, dan bahwa mereka sama sekali tidak mungkin menyetujui suatu deklarasi kemerdekaan oleh orang Indonesia. Jadi jelaslah bagi Hatta dan Soekarno, bahwa pertumpahan darah tidak mungkin dan cara yang disarankan oleh Sjahrir, Sukarni, Wikana dan pemimpin gerakan bawah tanah lainnya adalah satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian Sjahrir menemui Soekarno dan memperoleh janji dari Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan; akan tetapi ia tidak dapat memperoleh jaminan dari Soekarno bahwa proklamasi itu akan dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat anti-Jepang seperti yang disarankan Sjahrir dan kelompoknya.

Orang Jepang sekarang sudah waspada, dan gerakan-gerakan semua pemimpin Indonesia diawasi dengan ketat. Suatu tema rapat yang bebas dari mata-mata Kempetai sangat penting. Sekitar tengah malam, Hatta menghubungi Marsekal Muda Mayeda yang mau menyediakan rumahnya untuk dipakai sebagai tempat rapat kaum nasionalis. Mayeda meninggalkan rumahnya dan pada tanggal 17, jam 2.00 pagi, Soekarno dan Hatta mengadakan pertemu dengan Panitia Persiapan dan Subardjo, Wikana serata Sukami untuk merencanakan suatu proklamasi kemerdekaan. Setelah berdebat lama, teks proklamsi ditentukan, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi, Soekarno membacakan proklamasi itu di hadapan sekelompok kecil di depan rumah pribadinya. Segera setelah bersama pesan pribadi Hatta kepada sahabat-sahabat nasionalis proklamasi itu disiarkan di seluruh radio Domei Indonesia jaringan telegraf oleh para pegawai Indonesia di balik pintu terkunci kantomya di Jakarta (Batavia).

Revolusi Indonesia sudah dilancarkan, dan mendapat reaksi hebat di seluruh pelosok Nusantara, meskipun tidak segera diketahui di Jakarta. Jepang cepat mengadakan reaksi. Atas perintah panglima militer Jepang di Jawa, Mayeda beserta seluruh stafnya ditangkap, dan pengumuman kemerdekaan yang dikirimkan lewat pos ke seluruh pelosok kota dirobek oleh Kempetai. Pada hari berikutnya, Jepang mengumumkan pembubaran Peta, Hei Ho dan semua organisasi Indonesia bersenjata.

Namun demikian, jelas bahwa para pejabat Jepang semula ragu-ragu tentang tindakan apa yang harus mereka ambil terhadap soekarno dan Hatta. Pada tanggal 19, didorong oleh kelompok-kelompok bawah tanah, kedua pemimpin ini mengadakan rapat raksasa yang dihadiri oleh orang-orang Indonesia yang antusias di lapangan pusat Jakarta yang luas. Rapat ini berusaha dicegah oleh tank-tank dan mobil-mobil bersenjata Jepang, dan keinginan mereka yang pertama adalah menangkap Soekarno dan Hatta. Namun demikian, makin besarnya entusias kerumunan rakyat yang besar semakin banyak itu menyebabkan mereka berubah pikiran. Soekarno berpidato di depan massa secara singkat dengan kata-kata yang moderat, tetapi tetap pada tuntutan akan kemerdekaan. Soekarno kemudian menghimbau puluhan ribu orang Indonesia yang mendengarkan pidatonya itu untuk meninggalkan lapangan secara diam-diam dan pulang dengan damai ke rumah masing-masin. Mereka menurut. Tidak ada yang dapat dilakukan Jepang, kecuali terkesan pada demonstrasi kekuatan yang terkendali ini.

Dimana jumlah mereka tidak terlalu sedikit, unit-unit Peta di seluruh wilayah luas di Jawa menolak perintah Jepang untuk meniggalkan senjatanya. Mereka mempertahankan senjatanya bertempur dengan Jepang, dan di beberapa tempat, mereka sendiri melucuti unit-unit tentara Jepang. Garnisun Jepang memang dapat pertahankan kekuasaan militernya di kota-kota yang lebih besar, akan tetapi di daerah-daerah yang mulai dikuasai kelompok-kelompok kelompok bersenjata Indonesia, Peta, atau unit-unit organisasi pemuda yang sudah memperoleh senjata dari formasi kecil Jepang, baik secara paksa atau dalam banyak hal karena komandannya merasa gentar dan menyerah, bahkan kadang-kadang menyerah begitu saja. Bendera kebangsaan Indonesia dilarang oleh Jepang. Akan tetapi Soekarno yang menganggap bendera itu simbol revolusioner, memerintahkan untuk dikibarkan di semua gedung umum. Para pemuda Indonesia mulai mempertaruhkan nyawanya untuk mengibarkan bendera tersebut. Ini jelas memancing pertempuran dengan Jepang yang segera berusaha menurunkannya. Dalam waktu enam minggu, bendera yang merupakan bukti nyata simbol kemerdekaan itu, sudah berkibar di setiap gedung umum di Jawa. Para, mahasiswa yang menjadi ujung tombak revolusi itu, memimpin para pemuda yang ditarik dari organisasi-organisasi pemuda yang disponsori Jepang, dan bersama mereka merebut senjata dari orang-orang Jepang, menyeret para perwira Jepang keluar mobil mereka mengusir para fungsionaris Jepang dari gedung-gedung pemerintahan dan secara umum menjadi kekuatan pendorong utama belakang Republik baru yang dipimpin Soekarno itu.

Komandan militer Jepang menjadi bingung. Perintah-perintah yang diterima dari Allied Southeast Asia Command jelas menyuruhnya mempertahankan status quo politiknya hingga pasuka Sekutu mengambil alih. Namun mereka percaya, dan Soekarno berjuang mati-matian untuk menambah keyakinannya, bahwa setiap usaha menekan Republik yang baru saja diproklamirkan itu di pergerakan kebangsaan yang mendukungnya, akan berakibat suatu pertempuran berdarah yang hebat. Orang Jepang mungkin saja memenangkan pertempuran semacam itu, tetapi harus dibayar dengan korban yang besar. Hingga kedatangan pasukan Sekutu pada akhir bulan September, kebijakan Jepang tidak pasti, maju-mundur, dan penuh kompromi, serta berusaha menghindari konfrontasi dengan revolusi Indonesia. Mereka pada umumnya takut terang-terangan menentang pembetukan suatu pemerintah Indonesia, tetapi dengan lebih bersemangat berusaha menghentikan pertumbuhan kekuat militer Indonesia.

Pembentukan suatu pemerintah untuk Republik yang baru saja diproklamirkan itu berlangsung dengan cepat. Pada rapat yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemedekaan menambah enam anggotanya, Subardjo, Kasman Singodimejo (komandan garnisun Peta di Jakarta), Sukami, Wikana dan Chaerul Saleh. Panitia yang makin besar, itu memilih Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Panitia ini menunjuk suatu komisi yang terdiri dari tujuh orang-Soekarno, Hatta, Profesor Soepomo, Subardjo, Otto Iskandar Dinata, Mr. Mohammad Yamin, dan Mr. Wongsonegoro—untuk mengadakan perubahan-perubahan terakhir dan diperlukan dalam Undang-undang Dasar Negara, yang sebagian besar sudah disusun selama bulan terakhir sebelum kapitulasi Jepang. Dalam waktu satu minggu, konsep terakhir Undang-undang Dasar Indonesia sudah diselesaikan, dan meskipun sepenuhnya dianggap sementara, segera disebarluaskan. Dengan diberikannya ruang yang luas bagi perubahan sosial ekonomi, maupun politik, undang-undang dasar itu segera menjadi suatu simbol kekuasaan besar yang revolusioner, suatu pertanda hari cerah setelah digulingkannya kekuasaan asing.

Suatu simbol revolusioner yang lebih meluas, simbol revolusioner yang mengandung persamaan dan persaudaraan, adalah rasa panggilan yang diperkenalkan oleh Soekarno yang segera menjadi populer di seluruh Republik Indonesia. Kata Bung paling tepat diterjemahkan sebagai “Saudara”, dan dalam arti kasar bisa dibandingkan dengan kata “citizen (rakyat)” dalam Revolusi Perancis kalau “kamrad” di Rusia. Kata ini diambil dari bahasa Indonesia dialek jakarta, abang, atau kakak laki-laki (kata ini juga umum dipakai di Jawa Timur). Namun demikian, sebutan ini tidak membedakan Antara kakak laki-laki atau adik laki-laki. Gagasan yang dikandungnya mungkin paling dapat dianggap sebagai suatu sintesa dari “saudara revolusioner”, “saudara nasionalis Indonesia”, dan “saudara Republiken”. Tua dan muda, kaya dan miskin. Presiden dan petani boleh dan biasanya saling memanggil dengan sebutan ini. Seorang pengunjung restoran memanggil pelayan dengan kata “bung”, orang menteri kabinet atau petani Indonesia yang paling miskin menyebut Presiden Soekarno sebagai “bung Karno”.

Kepala-kepala departemen di bawah pemerintah Jepang segera mengakui pemerintah yang baru. Bersama dengan beberapa orang pilihan baru—Soekarno dan Hatta serta orang-orang yang telah bekerja dengan Jepang (seperti Subarjo), begitu pula yang tidak bekerja dengan jepang (seperti Amir Sjarifuddin dan Ir. Suraehman—mereka menyusun kabinet pertama Republik baru itu. Suatu kabinet di bawah Undang-undang Dasar bertanggung jawab kepada Soekarno, Presiden. Berikut ini adalah keanggotaan kabinet pertama Republik Indonesia (31 Agustus, 1945 -14 November, 1945) :

1. Menteri Luar Negeri - Mr. Achmad Subardjo
2. Menteri Dalam Negeri - E.A.A. Wiranata Koesoema
3. Menteri Kehakiman - Profesor Soepomo
4. Menteri Bidang Ekonomi - Ir. Suraehman
5. Menteri Keuangan - Dr. Samsi
6. Menteri Pendidikan - Ki Hajar Dewantoro

7. Menteri Sosial - Mr. Iwa Kusuma Sumantri
8. Menteri Penerangan - Mr. Amir Sjarifuddin
9. Menteri Kesehatan - Dr. Buntaran Martoatmojo
10. Menteri Perhubungan - Abikusno Tjokrosujoso
11. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Dr. Amir
12. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Wachid Hasjim
13. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Mr. Sartono
14. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Mr. Sartono
15. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Mr. A.A. Maramis
16. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Otto Iskandar Dinata
17. Menteri Negara (tanpa potfolio) - Soekardjo Wirjopranoto.

Setelah tanggal 1 Sepetember 1945, kepala-kepala departemen yang dulu bekerja di bawah pemerintahan Jepang, dan orang-orang baru yang dipilih oleh Soekarno dan Hatta sebagai kepala departemen, diberi mandat sebagai menteri Republik. Soekarno membuat dekrit bahwa semua pegawai negeri Indonesia harus tidak mengacuhkan perintah-perintah dari Jepang, dan hanya patuh ke perintah pemerintah Republik saja. Departemen-departemen dikepalai oleh para menterinya segera menerima dukungan hampir semua personil pemerintah Indonesia. Tanpa personlia pemerintah Jepang tidak dapat berfungsi. Waktu itu pengaruh militer di pusat-pusat pedesaan yang besar memang dapat dipertahankan oleh Jepang, tetapi mereka tidak berdaya mencegah masuknya fungsionaris-fungsionaris yang mau bekerja untuk Republik.

Pada tanggal 29 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan dibubarkan oleh Soekarno dan diganti dengan Komite Nasional Indonesia Pusat yang kemudian dikenal sebagai KNIP. Komite ini hanya bertugas sebagai suatu badan penasehat Presiden dan kabinetnya. Tidak mempunyai fungsi dalam perundang-undangan. Dengan bantuan Hatta, Soekarno menunjuk 135 orang (termasuk bekas anggota PPKI) yang dianggap sebagai nasionalis terkemuka dan pemimpin paling penting kelompok utama etnis, agama, sosial dan ekonomi di Indonesia sebagai anggota badan baru itu. Keduanya tidak hanya memilih tokoh-tokoh politik yang dapat diandalkan, tetapi juga pria dan wanita yang hampir semuanya menjadi pemimpin terkemuka masyarakat Indonesia yang disukai dan didukung banyak orang. Dengan suatu dekrit yang dikeluarkan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus, Indonesia sudah dibagi menjadi delapan provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Soekarno memilih seorang Gubernur untuk masing-masing provinsi dari kalangan penduduk setempat, dan KNIP memberi mandat kepada salah seorang anggota dari masing-masing daerah untuk membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) di setiap provinsi guna membantu para gubernur dalam menjalankan pemerintahan. Dengan cepat terbentuklah KNI setempat secara spontan di tingkat distrik maupun kotapraja. Selama suatu periode yang lama, komite-komite setempat yang revolusioner berfungsi sebagai kekuatan pemerintah yang sebenarnya di daerah masing-masing. Semula daerah-daerah itu diatur menurut kehendak pemimpin setempat yang diakui, tetapi kemudian sejak akhir bulan November, diatur menurut suatu pola peraturan yang seragam. Di Jawa dan Madura, dengan suatu akta Pemerintah tanggal 23 November 1945, dibentuklah badan penasehat semacam itu di semua karesidenan, distrik, kota-praja, dan wilayah-wilayah seperti yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. (Pada tanggal 30 Oktober, Sultan Yogya mendekritkan pembentukan badan penasehat yang serupa di wilayahnya sendiri). Menjelang tahun 1946, di mana keadaan dianggap memungkinkan, KNI dibentuk berdasarkan pemilihan setempat.

Pada tanggal 29 Agustus, pemerintah yang baru itu mulai mengorganisir suatu angkatan perang. Berdasarkan unit-unit Peta yang dipersenjatai, dan dari jenjang beberapa organisasi pemuda, dibentuklah BKR (Badan Keamanan Rakyat) yang bermarkas besar di Jakarta. Unsur pokok tentara yang bebas terorganisir ini terdiri dari unit-unit yang sangat otonom dan pada dasarnya bebas bergabung karena punya suatu basis wilayah dan di masing-masing daerah tergantung pada berbagai derajat pengawasan KNI yang bertugas mengurus pemeliharaan dan pengadaannya. Mulai tanggal 5 Oktober 1945, nama angkatan perang nasional diubah dari BKR menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat?) Selama beberapa bulan berikutnya, unit-unit unsur pokoknya, diatur dari pusat dengan derajat pengawasan yang lebih besar tetapi sering tidak efektif. Unit-unit BKR segera terlibat dalam perjuangan revolusioner. Mereka membantu merebut gedung-gedung pemerintah dari orang. Jepang dan menangkap mereka yang menolak untuk meninggalkan gedung-gedung tersebut.

Pertempuran yang tak menentu antara orang Jepang dan Indonesia terjadi makin sering dan makin luas sepanjang bulan September. Usaha-usaha orang Indonesia untuk menguasai senjata, Jepang dan memadamkan perlawanan Jepang terhadap penguasa sipil Indonesia menimbulkan makin banyak lagi pertempuran Pasukan Inggris yang pertama mendarat di Jakarta pada tanggal 2 September 1945, tepat ketika usaha orang Indonesia merebut kekuasaan militer dan sipil dari Jepang sedang memuncak. Selama di minggu pertama bulan Oktober, terjadi pertempuran hebat antar, pasukan Indonesia dan pasukan Jepang untuk menguasai kota-toko Bandung, Carut, Surakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya Pasukan Indonesia dapat menguasai sementara kota Bandun Carut, dan Surabaya, serta berhasil sepenuhnya menguasai kota Yoyakarta hingga tanggal 19 Desember 1948. Pasukan Inggris memasuki kota Semarang

pada tanggal 19 Oktober setelah pasukan Indonesia mengorbankan sekitar 2.000 orang untuk menumpas habis garnisun Jepang.

Tugas pasukan Ingrris yang baru datang itu sangat berat. Instruksi-instruksi kepala Staf Sekutu yang dijabarkan oleh Lord Mountbatten, panglima Sekutu untuk Asia Tenggara, menyuruhnya menerima penyerahan kekuatan bersenjata Jepang, membebaskan. tawanan perang Sekutu dan tahanan sipil, serta melucuti. dan mengumpulkan orang]epang sehingga siap untuk dikirim kembali ke]epang. Di samping itu, mereka harus membentuk dan menjalankan keamanan dan ketertiban di Indonesia, sampai pemerintah Hindia Belanda sudah dapat berfungsi sendiri. Tentu saja instruksi terakhir ini disebabkan karena sekutu kurang mengerti kejadian-kejadian di Indonesia. Para perwira Inggris di Jawa dan Sumatra, dan perwira Australia di bagian-bagian Sulawesi dan Sunda Kelapa, terikat pada instruksi-instruksi yang berdasarkan syarat-syarat yang tidak lagi absah terhadap kondisi-kondisi di Hindia Belanda. Pasukan Inggris dan Australia yang mendarat di Indonesia pada bulan Oktober, 1945, menghadapi suatu situasi dalam keadaan tidak siap sama sekali. Di kebanyakan daerah, di Jawa dan Sumatra khususnya, pemerintah sipil sudah berjalan dengan derajat efisiensi yang tidak mengherankan pasukan Sekutu.

Soekarno dan Hatta mengeluarkan suatu perintah umum untuk tidak berurusan dengan pasukan Inggris, dan kelompok-kelompok mahasiswa pergi ke lapangan untuk menjelaskan keadaan itu kepada unit-unit Jibaku, dan mengawasi kalau-kalau mereka melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggungjawab. Bagaimanapun juga, tidak hanya Jibaku, tetapi semua orang Indonesia menjadi curiga terhadap tujuan-tujuan Inggris. Tanggal 29 September, Laksamana Patterson, komandan garis belakang Skuadron Tempur Kelima Inggris, mengumumkan bahwa pasukan-pasukan Sekutu datang untuk melindungi rakyat dan untuk “memulihkan keamanan dan ketertiban hingga pemerintah Hindia Belanda yang berwenang berfungsi kembali”. Katanya, hukum Belanda harus diterapkan dan ditingkatkan oleh para pejabat pemerintah Belanda di Jawa yang hanya akan tunduk kepada perintah yang diberikan oleh Laksamana Mountbatten. Pada hari yang sama, Letnan Jendral Sir Philip Christison, panglima Sekutu untuk Hindia Belanda, mengumumkan bahwa pasukan-pasukan Jepang di Jawa sementara harus dipakai untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Pengumuman ini segera diikuti oleh pendaratan kontinen-kontinen kecil pasukan Belanda di bawah perlindungan Inggris. Soekarno dan para pemimpin Republik lainnya berkali-kali memperingatkan Inggris untuk menghentikan pendaratan-pendaratan yang dilindunginya itu. Mereka meyakinkan bahwa penduduk Indonesia yang sudah curiga dan menentang pengumuman Patterson dan Christison, pasti akan menganggap kedatangan pasukan Belanda itu sebagai petunjuk positif dari suatu keinginan menggulingkan Republik itu dan kembalinya status penjajahan di Indonesia. Para pemimpin Indonesia: khawatir bila reaksi umum terhadap realisasi ini akan menimbulkan penganiayaan terhadap beribu-ribu tawanan Belanda yang masih ditahan dalam kamp-kamp konsentrasi Jepang.

Setiap keragu-raguan yang masih ada di pihak pendudu Indonesia terhadap keinginan Belanda, dengan cepat menjadi kepastian oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pasukan-pasukan kolonial Belanda. Pengamat militer Amerika Serikat yang termasuk staf Jendral Christison, Mayor F.B. Crockett menyatakan:

> *Berbarengan dengan kedatangan]endral van Dyen, di jalan-jalan (Jakarta) mulai tampak barisan patroli Belanda dan Ambon (serdadu KNIL) yang getol menembak. Mereka menembak segala yang tampak mencurigakan, dan bila tidak ada yang dapat dijadi sasaran, mereka tidak segan-segan merampas rumah penduduk, dan tanpa tuduhan atau peringatan, menyeret keluar beberapa atau seluruh penghuninya ..... “ Insiden-insiden” itu meningkat. Kaum nasionalis mendapat perintah bahwa setiap perlawanan dari pihak mereka akan ditumpas oleh para penguasa. Untuk mencegah ..... , Soekarno memerintahkan agar semua orang Indonesia menyingkir dari jalan-jalan di Batavia pada malam hari. Menjelang jam 8.00 malam, jalan sudah kosong kecuali barisan patroli Belanda yang mondar-mandir. Ini adalahcontoh mengesankan cara Soekarno memerintah rakyat .*

Aktivitas semacam itu secara efektif merongrong kemungkinan pelaksanaan kebijakan non intervensi dalam hubungan politik antara Republik dan Belanda yang diharapkan Let. Jen. Chritison dapat dijalankannya setelah mengetahui keadaan setempat. Analisis Mayor Crockett tentang situasi ini dan keprihatinan yang timbul dalam hatinya, juga dirasakan oleh para pemimpin Republik. Menurut Crockett:

> *Dari apa yang saya lihat, jelas bagi saya bahwa ditinjau dari sudut pengumuman Inggris tentang tidak campur tangan secara politik, Belanda akan berusaha dan terus berusaha agar Inggris tidak bisa melepaskan diri dengan merangsang ketidaktenteraman di kalangan penduduk pribumi. Kekurangajaran patroli Belanda itu tidak dapat dije1askan dengan akal sehat. Apa yang bakal mereka peroleh dari taktik-taktik semacam itu sudah jelas: mereka akan membuat Inggris terlalu sibuk sehingga tidak sempat melucuti]epang (ini adalah alasan utama kedatangan mereka ke sini, dan mereka akan memaksa Inggris memasukan lebih banyak lagi pasukan ke dalam wilayah itu.*

Ini berarti Inggris akan lebih banyak lagi terlibat. Aktivitas paukan-pasukan Belanda seperti itu, yaitu bahwa mereka terus mendarat di bawah perlindungan Inggris, dan pengumuman-pengumuman Inggris yang kurang tegas, secara bersama-sama menunjukkan kepada kebanyakan orang Indonesia, bahwa pernyataan tegas kemerdekaan mereka sedang ditantang dasini memancing reaksi mereka yang tajam.

Djibaku tidak dapat lagi ditahan. Unit-unitnya dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok tempur yang kecil dan hal ini segera diikuti oleh berbagai unit pemuda bersenjata, yang mengadakan serangan keras terhadap patroli Belanda dan Inggris. Dalam beberapa kasus, biasanya di mana Barisan Pelopor terlibat, sasaran serangan-serangan itu, tidak terbatas kepada pasukan-pasukan asing, tetapi meluas hingga para tahanan sipil Belanda yang tidak bersenjata, termasuk wanita dan anak-anak. Berbarengan dengan itu, semua unit orang Indonesia bersenjata meningkatkan usaha mereka merebut senjata dan kekuasaan dari]epang.

Komando Sekutu kini memberi prioritas utama kepada usaha pemulihan keamanan dan ketertiban di bawah kekuasaan Inggris di kota-kota besar dan pelabuhan-pelabuhan di jawa dan Sumatera, dan perlucutan jepang akan dipikirkan nanti. Komando Sekutu memerintahkan para komandan Jepang untuk menyerang dan merebut kembali kota-kota yang sudah dikuasai orang Indonesia seperti Bandung. Dipakainya pasukan jepang oleh Sekutu untuk melawan Republik selanjutnya mendorong orang Indonesia untuk melawan Inggris sekaligus Belanda, dan memperkuat kecurigaan mereka bahwa Indonesia ingin dikembalikan kepada status penjajahan lagi. Selama bulan November dan Desember, pertempuran yang luas dan terus menerus berkobar di hampir seluruh]awa dan banyak wilayah Sumatera dan Bali. Pertempuran paling hebat terjadi selama paruh pertama bulan November di Surabaya di mana beberapa organisasi pemuda Indonesia yang bebas bergabung di bawah BKR bertempur melawan satu setengah divisi pasukan Inggris dan India selama 10 hari dan menderita korban yang sangat besar.

Meskipun Inggris dilengkapi dengan pesawat-pesawat terbang dan meriam dalam pertempuran mereka di pelabuhan dan setelah pertempuran yang lama dan pahit akhimya berhasil menguasai kota, perang itu tetap dan masih dianggap suatu kemenangan oleh orang Indonesia, karena pertempuran di Surabaya merupakan suatu titik balik dalam perjuangan kemerdekaan mereka. Ini merupakan suatu demonstrasi di hadapan Inggris tentang kekuatan berperang dan kesediaan mengorbankan jiwa raga yang ada di balik gerakan yang sedang ditentang Inggris itu. Ini menyadarkan Inggris akan adanya kenyataan bahwa Republik itu didukung oleh massa Indonesia, tidak secara apatis, tetapi secara positif dan entusias. Pertempuran di Surabaya menyadarkan Inggris secara mengejutkan, akan kenyataan bahwa jika rnereka tidak bersedia ke Indonesia rnencurahkan kekuatan tentara dan perlengkapan yang jauh lebih besar ke Indonesia, mereka harus meninggalkan kebijakan-kebijakan mereka yang sebelumnya dan mencari tempat berpijak yang sama dengan para pemimpin Republik. Setelah ini menjadi jelas bagi Inggris, maka mereka mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap penolakan Belanda untuk berurusan dengan Republik, dan dengan keras mendesak mereka mengadakan perundingan yang mungkin pada akhirnya akan membawa kompromi seeara damai. Jadi, bersama dengan contoh-contoh lain tentang perlawanan orang Indonesia, Pertempuran di Surabaya membuka jalan bagi diadakannya perundingan-perundingan diplomatik selama tahun 1946 dan awal tahun 1947 antara Belanda dan Indonesia.

Selama periode selanjutnya, pertempuran sama sekali tidak berhenti, tetapi keadaanya yang umum dan intensitasnya sangat berkurang dibandingkan dengan yang terjadi selama 10 minggu terakhir tahun 1945. Di]awa dan Sumatera, Inggris dan kemudian Belanda, membatasi hampir semua operasinya hanya di daerah-didaerah yang mereka kuasai sekitar Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Padang, Medan, dan Palembang. Di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kelapa, Belanda tidak menemui banyak kesulitan di hampir semua wilayah dan segera memasukkan (cukup pasukan untuk mengambil alih tugas pasukan Australia yang mudah melucuti pasukan Jepang yang menguasai daerah itu.

Namun demikian, Bali, daerah Minahasa di Sulawesi Utara, dan Sulawesi barat daya, merupakan perkecualian. Pertempuran antara pasukan Belanda dan Republik terus berlangsung di Bali hingga pertengahan tahun 1948. Perlawanan Republik di Sulawesi barat daya yang padat penduduknya itu begitu alot hingga Belanda I harus mencari takti-taktik yang paling brutal untuk memenangkannya. Pada awal tahun 1946, Belanda menugaskan Kapten Westerling I yang kejam itu untuk “menenteramkan” wilayah itu; sejumlah besar orang Indonesia, sipil maupun gerilyawan, dicurigai dan dengan tuduhan yang dicari-cari dibunuh oleh pasukan tembaknya. Para penguasa Republik menegaskan bahwa hampir 30.000 orang Indonesia dibunuh dengan cara ini dan dalam pertempuran. Sumber tidak resmi militer Belanda menyatakan bahwa hanya 4.000 orang yang menjadi korban. Pemerintah Belanda mengirim suatu komisi Unluk meneliti kebrutalan di pihak tentara Belanda, tetapi tidak pernah ada laporan yang dikeluarkan. Kebanyakan pempimpin yang memberikan perlawanan tetapi tidak terbunuh, dimasukkan ke dalam penjara. Lebih dari seperempat penguasa bangsawan Indonesia di Sulawesi Barat daya (termasuk tokoh mereka yang paling penting) disingkirkan oleh Belanda dan diganti dengan orang-orang yang dipercaya lebih dapat loyalitasnya. Dengan demikian maka bagi yang masih berkuasa, ini peringatan bahwa kedudukan mereka, tergantung pada dukungan mereka kepada kebijakan Belanda.

Di Minahasa, pada bulan Februari 1946, serdadu KNIL Indonesia memberontak melawan Belanda, menyatakan memihak Republik, dan dengan bantuan penduduk sipil setempat, berhasil berkuasa selama satu bulan. Kecuali beberapa periode gencatan senjata yang semuanya sangat pendek kecuali satu, empat tahun pertama dari kehidupan Republik didominasi oleh peperangan melawan musuh-musuh yang kuat—suatu peperangan yang hasilnya dianggap oleh para pemimpinnya sebagai menentukan bagi hidup atau matinya Republik. Baik perundingan-perundingan yang alot antara Republik dan Belanda maupun politik internal revolusi Indonesia, harus dilihat berdasarkan latar belakang kenyataan ini. Selama beberapa bulan terakhir sebelum penarikan mundur pasukan pendudukan Inggris pada akhir November 1946, dan selama

satu atau dua bulan setelah Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947, merupakan masa yang relatif damai. Periode gencatan senjata satu-satunya yang lama adalah setelah Perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948. Sejak itu hingga serangan Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, pertempuran antara pasukan Belanda dan Republik hanya terbatas pada bentrokan antar patroli, Namun demikian, bahkan hampir seluruh periode ini dirasa tegang karena terus-menerus siaga terhadap serangan Belanda besar-besaran, terutama setelah bulan Juni, 1948. Pada umumnya tekanan militer yang sungguhan atau yang berupa ancaman dari luar oleh musuh yang kuat, tetap merupakan faktor yang menentukan hubungan-hubungan politik internal maupun eksternal Republik sejak kelahirannya hingga akhir tahun 1949.

BAGIAN EMPAT: KONSEPSI NASIONALISME

Prawacana

Saat ini banyak pihak yang mulai meragukan nasionalisme dalam diskursus publik, terutama dalam konteks globalisasi, sampai perlu tercetus istilah “pasca nasional-isme”. Seringkali nasionalisme dibelenggu oleh dawai romantisme sejarah, sekalipun dilantunkan dengan begitu heroik. Nasionalisme menjadi istilah yang terdengar tanpa kesejukan dan hanya menjadi sebuah retorika politik belaka dengan argumen historistik partial sehingga menutup dirinya untuk diartikulasikan dalam konteks kekinian. Nasionalisme menjadi sebuah ortodoksi religius ketika ia dibekukan dengan serangkaian ritual dan simbolisasi tertentu yang menghilangkan tujuan awal dari kebangkitan Nasionalisme.

Nasion dirumuskan sebagai *kolektivitas politik egaliter-otosentris*, yang koterminus dengan wilayah politiknya serta lahir dari atau dirujukkan bersama pada-rangkaian dialektika atau aksiden sejarah yang sarat makna dengan proyeksi eksistensial tanpa batasan waktu kemasa depan. Rumusan ini sengaja menggaris bawahi kata “kolektivitas politik” dengan *wilayah politik* perlu ditekankan disini, sebab itulah yang membedakan (sic) *nasion* dari *nasionalisme. Nasion* adalah *kolektivitas politik nyata* dengan wilayah politik yang juga nyata. *Nasionalisme,* sesuai namanya, *barulah impian menuju*, suatu kolektivitas politik. sejauh kolektivitas politik itu belum terwujud, wilayah politiknya pun begitu.[32]

Kegelisahan kalangan “pasca nasionalisme” dapat dipahami pada saat “nasionalisme” dapat dengan mudah berubah menjadi `fanatisme fasistis'. Nasionalisme juga sering kali “disalah-gunakan” sebagai landasan filosofis untuk memaksakan kehendak pada saat praktek “Nasionalisme” itu dipaksa berdefinisi tunggal. Contohnya pada saat penguasa India menggunakan slogan “Nasionalisme” untuk mengklaim dan mengendalikan Kasmir sejak tahun 1947. Penguasa India menempatkan satu orang tentara untuk tujuh orang penduduk Kasmir. Lebih dari 1 juta pengungsi, tiga perang besar dan ratusan ribu orang terbunuh adalah hasil dari praktek “nasionalisme para penguasa India”. Praktek-praktek semacam ini semakin mengaburkan pemaknaan terhadap Nasionalisme hingga Albert Einstein menyebut “nasionalisme” sebagai tidak lebih dari penyakit campak bagi kemanusiaan. Tidak mudah mengurai makna istilah “nasionalisme” secara semantik, mengingat penggunaannya yang bersifat luas yang mengacu pada makna yang berbeda-beda. Istilah “nasionalisme” sering diidentikan dengan istilah bangsa (nation), kebangsaan (nationality), dan negara (state). Namun secara etimologis terlihat bahwa nasionalisme berakar pada bangsa dan meluas pada istilah kebangsaan. Variasi pemaknaan istilah “nasionalisme” bertambah rumit pada saat “nasionalisme” dipermainkan oleh para politikus dan menjadi praktek “gerakan oposisi politik” dalam terminologi John Breuilly.

Pengertian Nasionalisme

Pengertian Nasionalisme berasal dari kata *nation* (bahasa Inggris) atau *natie* (bahasa Belanda) yang berarti bangsa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang diam di wilayah tertentu dan memiliki hasrat serta kemauan untuk bersatu karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan tujuan. Dengan demikian, nasionalisme dapat diartikan sebagai semangat kebangsaan, yakni cinta terhadap bangsa dan tanah air. Dengan kata lain nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi seseorang ditujukan kepada negara kebangsaannya.

Dalam ranah antropologi, nasionalisme dipandang sebagai sistem budaya yang mencakup perasaan, komitmen, dan kesetiaan pada bangsa dan negara, serta rasa memiliki terhadap bangsa dan negara itu. Menurut Benedict Anderson: *Nation* (bangsa) adalah suatu komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dibayangkan (*immagined communities*). Komunitas ini dikatakan sebagai imagined communities sebab tidak mungkin seluruh warga dalam suatu komunitas dapat saling mengenal, saling berbicara, dan saling mendengar. Akan tetapi, mereka memiliki bayangan yang sama tentang komunitas mereka. Suatu bangsa dapat terbentuk, jika sejumlah warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan atau bayangkan.

Menurut Ernest Renan: Unsur utama dalam nasionalisme adalah *le desir de'etre ensemble* (kemauan untuk bersatu). Kemauan bersama ini disebut nasionalisme yaitu suatu paham yang memberi ilham kepada

[32] Frederick R. Goff, *The Permenence of Johhan Gutenberg*, Humanities Research Center, The University of Texas at Austin, 1969, hal. 24. dalam Benedict Anderson, *Imagined Communities, Komunitas-komunitas Terbayang,* Jogjakarta, Insist Press & Pustaka Pelajar, Cet. III., 2008, hal. xxix.

sebagian besar penduduk bahwa *nation state* adalah cita-cita dan merupakan bentuk organisasi politik yang sah, sedangkan bangsa merupakan sumber semua tenaga kebudayaan dan kesejahteraan ekonomi.

Nasionalisme adalah salah satu kekuatan yang menentukan dalam sejarah modern. Paham ini berasal dari Eropa Barat pada abad ke-18. Selama abad ke-19 ia telah tersebar di seluruh Eropa dan dalam abad ke-20,ia telah menjadi suatu pergerakan dunia.[33] Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi inividu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Sebelum lahir paham nasionalisme, kesetiaan orang tiak ditujukan kepada negara kebangsaan, tetapi kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik atau raja feodal, kesatuan ideologi seperti suku atau clan, negara kota, kerajaandinasti, gereja atau golongan keagamaan.

Unsur-unsur nasionalisme yang selalu ada di sepanjang sejarah: perasaan ikatan yang erat dengan tanah air, dengan tradisi-tradisi setempat, dan dengan penguasa-penguasa resmi di daerahnya. Nation/bangsa merupakan golongan-golongan yang beragam dan tidak dapat dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lainnya, seperti persamaan keturunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat-istiadat, tradisi, dan perasaan agama. Akan tetapi, tidak satu pun di antara faktor-faktor ini bersifat mutlak untuk merumuskan bangsa. Rakyat Amerika tidak mensyaratkan bahwa mereka harus seketurunan untuk menjadi bangsa Amerika, dan rakyat Swis menggunakan tiga atau empat bahasa, tetapi merupakan bangsa yang memiliki pembatasan kebangsaannya secara tegas.

Faktor-faktor obyektif itu memang penting untuk merumuskan suatu bangsa, namun yang paling penting adalah kemauan bersama untuk bersatu (menurut Ernest Renan le desir d'etre ensemble) sebagai suatu bangsa. Kemauan bersama ini dinamakan nasionalisme, yaitu suatu paham yang memberi ilham kepada sebagian besar penduduk bahwa nation state (negara kebangsaan) adalah cita-cita dan merupakan bentuk organisasi politik yang sah, dan bangsa adalah sumber semua tenaga kebudayaan dan kesejahteraan ekonomi. Bangsa adalah komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dicita-citakan atau diangankan. Komunitas politik itu dikatakan sebagai imagined, karena anggota komunitas itu tidak pernah saling mengenal, saling bertemu, atau bahkan saling mendengar. Yang ada dalam pikiran masing-masing anggota komunitas tersebut adalah hanya gambaran tentang komunitas mereka. Suatu bangsa akan terbentuk, jika sejumlah besar warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan.[34]

Nasionalisme adalah ideologi yang mencakup prinsip kebebasan (liberty), kesatuan (unity), kesamarataan (equality), serta kepribadian yang menjadi nilai kehidupan kolektif suatu kemunitas untuk merealisasikan tujuan politik yaitu pembentukan dan pelestarian negara nasional.[35] Nasionalisme berakar dari timbulnya kesadaran kolektif tentang ikatan tradisi dan deskriminasi pada masa kolonial yang sangat membatasi ruang gerak bangsa Indonesia. Reaksi terhadap situasi itu merupakan kesadaran untuk membebaskan diri dari tradisi dan untuk melawan pengingkaran terhadap identitas bangsa.Jaringan komunikasi yang semakin meluas membuka kesempatan untuk melembagakan pengelompokan kaum terpelajar, yang sekaligus menjadi wahana untuk memobilisasi peserta dalam pergerakan, dan merupakan forum untuk menyelenggarakan dialog yang kemudian dapat menjelma sebagai arena politik.

Dalam studi semantik Guido Zernatto (1944), kata nation berasal dari kata Latin "natio" yang berakar pada kata "nascor" yang berarti 'saya lahir'. Perkembangan nasionalisme sebagai sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah gagasan politik bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya. Tetapi tampaknya, Zernatto mengambil prinsip `tanah kelahiran' dari pada faktor etnis, agama, ras, bahasa sebagai landasan interpretasi nasionalisme-nya. Kasus Dr. Tio Oen Bik, seorang etnis Tionghoa kelahiran Tuban, yang menyatakan diri sebagai wakil Rakyat Indonesia dalam Brigade Internasional anti fasisme Jenderal Franco dapat mendukung argument bahwa Nasionalisme itu tidak ada kaitannya dengan faktor etnisitas. Menurut Louis L. Snyder istilah "kebangsaan" (nationality) mengacu atau digunakan dalam makna (obyektif atau eksternal) yang kongkrit (bahasa nasional, wilayah, negara, peradaban, dan sejarah), atau dalam makna (subyektif, internal, atau ideal) yang abstrak (kesadaran nasional, atau sentimen).

Penjelasan Snyder lebih jauh dikembangkan oleh Miroslav Hroch-seorang teoritikus politik penting Czech-dalam uriannya tentang faktor-faktor kelahiran sebuah bangsa dan proses nation-building. Hroch menyimpulkan bahwa sebuah kelompok sosial tidak hanya dibentuk oleh kombinasi antara relasi objektif (ekonomi, politik, bahasa, budaya, agama, daerah, sejarah) dan refleksi subjektif dalam kesadaran kolektif. Bagi Hroch terdapat tiga hal yang tak dapat diabaikan dalam proses nation-building yaitu 1. `Ingatan' kolektif akan sejarah bersama, 2. Kedekatan hubungan kebudayaan, 3. Konsepsi kesetaraan dari seluruh anggota kelompok yang terorganisir sebagai civil society. Dengan demikian Nasionalisme itu tidak lahir dengan sendirinya dan bebas dari faktor-faktor pendukung proses kelahiran semangat Nasionalisme. Adanya faktor subjektif dalam membentuk rasa Nasionalisme itu menyulitkan kita untuk menemukan parameter yang sahih

---

[33] Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984).

[34] Benedict Anderson, *Imagined Communities Reflections on The Origin and Spread of Nationalism* (London: Thetford Press Limited, 1983).

[35] Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Keadaran dan Kebudayaan Nasional* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993)

untuk mengukur dan menilai kualitas nasionalisme seseorang. Seseorang tak dapat menilai kualitas nasionalisme orang lain serta menjadi "hakim nasionalisme" hanya melalui keseragaman "ritual dan simbol". Agaknya kita hanya perlu menciptakan ruang yang kondusif agar Nasionalisme itu dengan sukarela dirasakan oleh anggota ke-Bangsa-an Indonesia daripada mempertanyakan `kadar Nasionalisme' orang lain, terlebih lagi pada saat Nasionalisme itu disamarkan dan identik dengan rasialisme.

Nasionalisme Para Tokoh Bangsa

Ki Hajar Dewantara menulis; "Dalam pendidikan harus senantiasa diingat bahwa kemerdekaan bersifat tiga macam: berdiri sendiri (*zelstandig*), tidak tergantung pada orang lain (*onafhankelijk*), dan dapat mengatur dirinya sendiri (*vrijeid, zelfsbeschikking*)." Kalau istilah Belanda itu diterjemahkan kedalam jargon yang lebih dikenal sekarang, maka ketiga komponen kemerdekaan itu ialah *self-reliance, independence,* dan *self-determination.*

Sukarno lebih menekankan *independence,* yaitu terlepasnya Indonesia dari penguasaan oleh suatu bangsa dan penguasaan asing. Hatta dan Syahrir lebih menekankan *self-reliance* yaitu otonomi setiap individu dalam memutuskan apa yang harus dikerjakan. Tan Malaka selepas sekolah guru di Harlem, Belanda, memilih menjadi guru untuk anak-anak para kuli kontrak di perkebunan Deli, melihat kemerdekaan sebagai *self-determination,* yaitu kesanggupan setiap kelompok sosial menentukan nasibnya sendiri dan tidak menggantungkan peruntungannya pada kelompok sosial lainnya.

Tampilnya Soekarno dengan nasionalismenya disadari sebagai pembuka kran-kran idiologis bangsa guna merefleksikan dan mengaktualisasikan ke dalam konsep pendidikan humanistis agar dapat mengalir sesuai dengan arus perjuangan. Soekarno adalah sosok pribadi yang kompleks. Lewat atribut revolusionernya, dia berusaha untuk memodernisasikan kaum konservatif dengan tidak bisa lari jauh dari eksistensi manusia sendiri yang secara kodrati sebagai makhluk yang dikarunia oleh Tuhan beberapa hak yang tidak bisa dimonopoli, termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini tidak lepas dari latar belakang Soekarno sendiri sebagai orang yang jauh di bawah elitisme. Bagi Soekarno, bangsa, kebangsaan atau nasionalisme dan tanah air merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.[36]

Nasionalisme menurut Soekarno merupakan kekuatan bagi bangsa-bangsa yang terjajah yang kelak akan membuka masa gemilang bagi bangsa tersebut. Dengan nasionalismelah bangsa Indonesia akan mendirikan syarat-syarat hidup mereka yang bersifat kebatinan dan kebendaan.[37] Kecintaan kepada bangsa dan tanah air merupakan alat yang utama bagi perjuangan Soekarno. Nasionalisme Soekarno dapat dikatakan sebagai nasionalisme yang komplek, yaitu nasionalisme yang dapat beriringan dengan Islamisme yang pada hakekatnya non-natie dan relatif bergerak secara leluasa di dataran marginalitas yang mengenyampingkan pada intrik ras dan etnisitas. Nasionalisme telah memegang peranan penting dan bersifat positif dalam menopang tumbuhnya persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai demokratisasi yang pada gilirannya akan mampu melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan rakyat. Hal ini karena konsep nasionalisme merupakan dorongan yang mendasar dalam pengaktualisasian pendidikan humanisme yang mengarah pada eksistensi manusia merdeka, merdeka geraknya, merdeka lahir batinnya, sekaligus merdeka alam fikirnya.

Perbedaan tekanan itu menjadi lebih jelas kalau dilihat dari hubungan dengan apa yang hendak ditentang. Kemerdekaan sebagai *independence* secara telak menolak penjajahan. Kemerdekaan sebagai *self-reliance* membatalkan ketergantungan. Sedangkan kemerdekaan sebagai *self-determination* menampik segala jenis penindasan dan pembodohan. Para pejuang Indonesia tanpa kenal lelah melawan segala bentuk penindasan dan hegemoni walaupun mereka dibuang dan diasingkan dalam pembuangan di digul dan selanjutnya di Banda Niera (Januari 1935-Januari 1942). Sampai pada saat-saat yang sangat sulit yaitu tatkala keadaan politik pada awal 1946 memaksakan dipindahkannya Ibu Kota RI ke Jogjakarta.

Konsep Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan

Konsep nasionalisme dan wawasan kebangsaan mengacu pada kesadaran suatu warga negara akan pentingnya ketunggalan bangsa, *nation state.*[38] Konsep tersebut bersifat idiologis dan disosialisasikan kepada setiap anggota (warga) negara. Nasionalisme dan wawasan kebangsaan mengikat warga negara dalam beberapa hal, yakni (a) memiliki kesadaran sebagai satu bangsa, yang dapat memperkuat rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, (b) jiwa, semangat, dan nilai-nilai patriotik, yaang berkaitan dengan perasaan cinta tanah air, cinta kepada tanah tumpah darah, cinta kepada negara dan bangsa, cinta kepada milik budaya bangsa sendiri, kerelaan untuk membela tanah airnya, (c) jiwa, semangat dan nilai-nilai kreatif dan inovatif, dan (d) jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang mampu membentuk kepribadian, watak dan budi luhur bangsa.[39]

---

[36] Nazaruddin Sjamsuddin (ed.), *Soekarno, Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek.,* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), hlm. 38.

[37] *Ibid*.

[38] Refly, H.Z. 1993. *"Nasionalisme, Universalisme, dan Struktur Kesadaran,"* Makalah dalam Panel Forum Indonesia Pasca-Nasional diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, 21-22 april 1993.

[39] Mustopo, M. Habib. 1983. *Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam suasana jiwa pasca-Indonesia pengertian nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya akan lebih jernih dan menjelma sampai ke esensi. Hal itu disebabkan nasionalisme kini berarti berjuang dalam membela kaum manusia yang terjajah, miskin dalam segala hal termasuk miskin kemerdekaan dan hak penentuan pendapat diri sendiri; manusia yang tak berdaya menghadapi para penguasa yang sewenang-wenang yang telah merebut bumi dan hak pribadinya dan memaksakan kebudayaan serta seleranya kepada si kalah. Nasionalisme kini lebih pada hikmah jati diri perjuangan melawan sang kuasa lalim yang secara peroangan maupun struktural dan demi hari depan yang lebih baik dan adil. Perjuangan tersebut bersifat universal bersama-sama dengan kawan sesama segenerasi muda dan dari segala penjuru dunia.

Konsep kebangsaan tidak semata-mata mengacu pada adanya keragaman kultural. Kebangsaan adalah suatu konsep politik, yang perwujudannya hanya bisa diraih lewat upaya-upaya politik pula. Dan upaya politik paling penting adalah menciptakan keadilan sosial, tegasnya keberpihakan pada mereka yang lemah. Hanya dengan kebangsaan yang menjamin hak politik warga negara untuk menentukan dirinya sesuai dengan kulturalnya, maka masing-masing kelompok etnis dan budaya yang tergabung di dalamnya akan terjamin menghayati identitasnya.[40]

Kebangsaan itu sendiri terjadi dan terbentuk sesuai dengan penjadian dan pembentukan sejarah. Oleh karena sejarah bersifat terbuka maka pembentukan dan penjadian itu tidak mengenal bentuk akhir atau finalitas. Jadi kebangsaan bukanlah suatu kenyataan, melainkan suatu cita-cita, aspirasi dan tuntutan khas Indonesia. Kebangsaan itu adalah suatu persatuan Indonesia merdeka yang mengusahakan keadilan sosial, terutama bagi mereka yang tertindas.

Nasionalisme Indonesia tidak dapat dipisahkan dari imperialisme dan kolonialisme Belanda, karena sebenarnya nasionalisme merupakan rekasi terhadap bentuk kolonialisme. Hubungan antara keduanya dapat dilihat dalam dua tataran, yaitu tataran universal dan tataran kontekstual.[41] Dalam tataran universal nasionalisme Indonesia pertama-tama adalah sebuah gerakan emasipasi, keinginan mendapatkan atau membangun kembali sebuah dunia yang luas, bebas, yang di dalamnya dan dengannya manusia dapat menghidupkan dan mengembangkan serta merealisasikan dirinya sebagai subjek yang mndiri dan bebas. Nasionalisme yang demikian ini dipertentangkan dan imperialisme, yakni upaya melawan segala gerakan yang menghendaki dominasi, superioritas. Dalam tataran universal ini nasionalisme seiring dengan gagasan pembebasan manusia pada umumnya.

Sementara itu dalam tataran kontekstual, nasionalisme Indonesia merupakan kehendak untuk membangun sebuah dunia yang di dalamnya manusia Indonesia, sebagai bagian dri budaya ke-Timur-an, dapat merealisasikan dirinya secara bebas. Di samping itu, manusia Indonesai bisa terlepas dari tekanan dan dominasi penjajahan Belanda, sebagai representasi budaya Barat. Tataran kontekstual ini membatasi gagasan pembebasan hanya pada hubungan antar-bangsa yang dapat membuatnya bertentangan dengan gagasan pembebasan pada tataran yang lebih rendah.

Dalam usaha untuk mewujudkan kehendak di atas orang-orang Indonesia tertarik ke dua arah yang berlawanan, yaitu (1) ada yang bergerak ke masa lalu, dan (2) ada yang bergerak ke masa depan. Mereka yang bergerak ke masa lalu menganggap dunia itu sudah ada sebelumnya dan dapat ditemukan kembali. Sementara yang bergerak ke masa depan mengganggap dunia itu sebagai sebuah bangunan yang akan atau sedang dalam proses pembentukan.

Apabila kita merunut sejarah dapat dideskripsikan cita-cita kebangsaan tersebut. Di awal abad ini berupa cita-cita Indonesia untuk merdeka. Kemudian, di era 45-60 berupa tekad untuk menjaga keutuhan negara. Selanjutnya generasi 66 ingin memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dan menyejahterakan rakyat melalui pembangunan ekonomi. Begitu seterusnya cita-cita kebangsaan tersebut harus selalu dirumuskan dan dipahami oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Setiap individu ynag berada dalam lingkaran suatu generasi mempunyai kewajiban sejarah utntuk menggali dan merumuskan cita-cita kebangsaan sebagai upaya menambah ukiran sejarah perjalanan bangsa.

Sejarah Nasionalisme Indonesia

Terbentuknya Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan kesadaranseluruh komponen bangsa tanpa mempersoalkan latar belakang agama, suku dan bahasa. Kesadaran itu lahir dari kehendak bersama untuk m mbebaskan diri dari belenggu penjajahan dan kolonialisme yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Semangat ini menjadi modal dasar dan landasan kuat untuk menyatukan dan meleburkan diri dengan penuh kerelaan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan untuk bernegara ini tercermin secara nyata dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang melahirkan nasionalisme Indonesia yang sekaligus mampu mendorong dalam proses pencapaian kemerdekaan Republik Indonesia.

Perjuangan masyarakat Indonesia untuk menyatukan berbagai bentukkepentingan yang ada pada saat itu, terutama pada masa kerajaan sangatlah tidak mudah. Hal ini karena berbagai corak pemikiran maupun cita-cita masing-masing daerah dipengaruhi oleh karakteristik budaya dan prilaku pemimpin daerah masing-masing. Jika dilihat dari dimensi Sejarah bangsa Indonesia pada awalnya terdiri dari beberapa

---

[40] Sindhunata. 2000. "*Politik Kebangsaan dan Keadilan Sosial".* Kompas, Juli 2000.

[41] Faruk. 1995. *Perlawanan Tak Kunjung Usai: Sastra, Politik, Dekonstruksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kerajaan, yang masing-masing kerajaan mempunyai hukum ketatanegaraan sendiri-sendiri, misalnya kerajaan Sriwijaya (+ abad ke-7 s/d abad 13) dan kerajaan besar lainnya yakni, kerajaan Majapahit (+ abad ke-13 s/d abad 15)[42] serta masih banyak kerajaan yang timbul pada masa itu termasuk kerajaan-kerajaan Islam yang muncul pada abad-abad sesudahnya.

Setelah VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) masuk pada tahun 1602[43] maka kerajaaan-kerajaan Islam yang kokoh dan kuat satu persatu jatuh ke tangan VOC dan pemerintah Hindia-Belanda. Sehingga terciptalah kesatuan Indonesia di bawah rezim penjajahan Belanda. Inilah yang sering dikenal dengan nama Pax Neerlandica (Perdamaian Neerlandika) yang mengandung arti Unification and Pasification (Penyatuan dan Penentraman).[44]

Dengan masuknya VOC ke Indonesia, maka imperialisme terhadap Negara Indonesia dimulai. Dengan membawa misi dagang hingga finishnya menjadi eksploitasi ekonomi, dominasi politik dan pemaksaan kebudayaan. Kondisi seperti ini akhirnya membawa rakyat Indonesia kepada misi perlawanan. Namun perlawanan rakyat Indonesia itu masih secara sektarian dan masih bersifat primordial, belum ada inisiatif untuk mengadakan perlawanan secara kolektif. Misalnya perang Diponegoro, perang Pattimura, perang Imam Bonjol, perang Goa (perang yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin) dan lain-lain.[45]

Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang kemudian ditetapkan sebagai /Hari Kebangkitan Nasional,[46] yang juga disebut sebagai angkatan perintis, yaitu merintis dan mengevaluasi kembali perjuangan bangsa Indonesia sebelumnya yang masih bersifat sektarian, saat itu pulalah mereka menunjukkan misi perlawanannya yang revolusioner. Gerakan-gerakan nasional yang mulai mengembangkan sayapnya pada awal abad 20, dimana Budi Utomo (dengan gendang kaum priyayi konservatifnya) serta Serikat Islam (dengan punggawa kaum intelektual muslimnya) sebagai dominator pergerakan nasional lainnya mulai mengalami keberhasilan dalam upaya menggempur kekuatan imperialisme Barat (kaum penindas). Dengan propaganda pergerakan dan perjuangan menuju kemerdekaan yang dikumandangkan oleh para tokoh pergerakan tersebut telah membawa organisasi-organisasi nasional Indonesia pada umumnya meniti benang emas menuju puncak pergerakan sesuai dengan visinya serta meninggalkan semua atribut kesederhanaannya, sehingga hampir mendekati garis keberhasilan.

Kolektifisme yang dipropagandakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional belum mampu memporak porandakan imperialisme Belanda yang masih terlalu kuat. Sehingga pada waktu tahun 1927-an nyaris pergerakan nasional mengalami kemandegan (stagnan). Hal ini diantaranya karena PKI (Partai Komunis Indonesia) yang memberontak pada tahun 1926 dan 1927 terhadap Pemerintah Hindia Belanda telah dikebiri sama sekali sehingga tidak berdaya. Organisasi Politik dan Sosial Islam yang pernah jaya dimasa Serikat Islam dengan para pemimpinya H.O.S. Cokroaminoto dan H. Agus Salim sudah letih terkulai.[47]

Kondisi bangsa yang fakum tersebut tidak disia-siakan oleh para tokoh nasionalis dan sekuler serta sosial demokrat, seperti Soekarno, Mr. Sartono, Dr. Sutomo, Moh. Hatta, Mr. Syahrir dan lain-lain yang segera tampil di tengah pergulatan politik. Sehingga kondisi yang demikian dapat dinetralisir dengan rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Pupuk nasionalisme yang ditaburkan oleh para tokoh pergerakan sebelumnya telah menumbuh suburkan pemikiran dan jiwa Soekarno bersama kawan-kawan yang lain. Bagi tokoh-tokoh nasionalisme tersebut secara simbolik ide nasionalisme yang dimunculkan oleh para tokoh pergerakan sebelumnya, secara implisit telah memberikan sebuah kontribusi pendidikan patriotisme yang nantinya akan mendasari gerakan tersebut.

Nasionalisme Kebangsaan Indonesia

Dalam konteks Indonesia, saya kira, Nasionalisme itu bersifat Nasionalisme-Kebangsaan. Nasionalisme Kebangsaan Indonesia itu berbeda dari etno-race chauvanisme seperti yang dibangun oleh Johann Gottfried von Herder. Ia merupakan pendewasaan dari konsepsi nasionalisme sektarian seperti konsepsi 'nasionalisme Jawa' yang dicetuskan oleh Soetatmo Soerjokoesoemo pendiri Komite Nasionalisme Jawa (1918). Nasionalisme Kebangsaan Indonesia juga bukan alat 'political legitimacy' untuk praktek 'nasionalisme keagamaan' seperti yang dianut oleh Zionis Israel. Ia juga berada di atas diferensiasi ideologi politik. Tetapi keunikan Nasionalisme Kebangsaan Indonesia adalah sifat yang tidak antagonis terhadap fakta multi-etnik, multi-kultur, multi-agama, multi-lingual. Bhinekka Tunggal Ika dan Pancasila mencegah Nasionalisme Indonesia berubah menjadi Fasisme a la Indonesia. Hal ini dipertegas oleh Bung Karno dalam pidato 'Lahirnya Pancasila' dengan mengatakan. "Sila Ke-Bangsaan mengandung unsur kuat Ke-Manusiaan yang adil dan beradab. Oleh karenanya tidak akan mungkin meluncur ke arah chauvinisme dan menentang

[42] G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 I Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm 15.

[43] VOC adalah kongsi dagang yang didirikan pada tahun 1602 dengan mendapat hak-hak kedaulatan antara lain: a. Hak mengadakan perjanjian dengan negara lain, b. Hak memerintah daerah-daerah di luar Nederland dan mendirikan badan-badan pengadilan, c. Hak membentuk tentara dan mendirikan benteng, d. Hak mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Peletakan dasar penjajahan VOC di Indonesia adalah J.P. Coen, Gubernur Jenderal pada tahun-tahun 1619-1623 dan 1627-1629, yang membangun kota Batavia pada tahun 1619 menjadi pusat kegiatan VOC di Asia. (Baca, Ibid., hlm 16.)

[44] *Ibid*, hlm. 15.

[45] Mohamad Sidky Daeng Materu, *SejarahPergerakan Nasional Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 2.

[46] *Op. Cit.,* hlm 28.

[47] W.H. Frederick dan S. Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 430-431.

pikiran-pikiran rasialisme". Dengan demikian, Nasionalisme Kebangsaan Indonesia membuka pintu bagi siapa saja untuk berpartisipasi membangun negara Republik Indonesia tanpa prejudice rasialis, etnis, agama dan orientasi politik.

Seperti halnya dengan kebangkitan nasionalisme bangsa-bangsa Asia-Afrika lainnya, Nasionalisme Kebangsaan Indonesia adalah kuliminasi inspirasi Kemerdekaan yang bersandar pada akumulasi pengalaman penjajahan (kolonisasi) Eropa dan seharusnya dibumikan pada pengalaman aktual saat ini. Secara esensial Nasionalisme Kebangsaan Indonesia dibentuk berdasarkan suatu differance sebagai bentuk resistensi terhadap dominasi kolonialisme. Sedangkan esensi resistensi terhadap kolonialisme itu hendaknya tidak berhenti pada kolonialisme Eropa dan menisbikan bentuk-bentuk 'kolonialisme oleh bangsa sendiri' serta 'kolonialisme Eropa dalam bentuk baru'. Refungsionalisasi Nasionalisme yang sarat dengan esensi pembebasan itu akan mencegah Nasionalisme disempitkan hanya menjadi sekedar "ideologi untuk berperang".

Saat ini, ribuan kasus pertikaian komunal yang dilatar-belakangi oleh ketidak-mampuan dalam menerima perbedaan agama dan etnisitas serta ketidak-konsistenan terhadap penegakan hukum positif merupakan penodaan terhadap semangat Nasionalisme Kebangsaan Indonesia. Ironisnya, jargon-jargon "nasionalisme" seringkali dipakai oleh kelompok "juragan-politisi" sebagai alat untuk mendeskreditkan dan memojokan segolongan warga bangsa dengan memanipulasi sejarah dengan tujuan untuk menghilangkan `ingatan kolektif sejarah bersama' di mana peran historis segolongan etnis tertentu dengan sengaja dihapus, merevisi `kedekatan hubungan kebudayaan' yang telah terjalin berabad-abad, dan membentuk konsepsi yang `tidak-setara' antar berbagai golongan masyarakat Indonesia.

Kalau dahulu Nasionalisme Kebangsaan Indonesia berfungsi sebagai landasan pemersatu dan tonggak kelahiran Republik Indonesia dalam konteks melawan kolonialisme klasik maka Nasionalisme Kebangsaan Indonesia saat ini dapat menjadi alat mempertahankan persatuan serta menjadi elemen spiritual dalam kerangka mencari format untuk memperbaiki/membangun Indonesia secara menyeluruh ditengah-tengah tantangan era "global paradox". Benedict Anderson berpendapat bahwa nasionalisme masyarakat pascakolonial di Asia dan Afrika merupakan hasil emulasi dari apa yang telah disediakan oleh sejarah nasionalisme di Eropa. Para elite nasionalis di masyarakat pascakolonial hanya mengimpor bentuk modular. *Wallahu a'alm bishawab.*[]

Referensi Primer

Anderson, Benedict, *Imagined Communities, Komunitas-komunitas Terbayang,* Jogjakarta, Insist Press & Pustaka Pelajar, Cet. III., 2008.

Anderson, Benedict, *Imagined Communities Reflections on The Origin and Spread of Nationalism* (London: Thetford Press Limited, 1983).

Daeng Materu, Mohamad Sidky, *SejarahPergerakan Nasional Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985).

Efendi, Anwar, *Gagasan Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan dalam Novel Indonesia*, FBS Universitas Negeri Yogyakarta.

Faruk. 1995. *Perlawanan Tak Kunjung Usai: Sastra, Politik, Dekonstruksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Goff, Frederick R., *The Permenence of Johhan Gutenberg*, Humanities Research Center, The University of Texas at Austin, 1969.

G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 I Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

Kahin, George McTurnan, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme & Revolusi Indonesia*, Jakarta, UNS Press-Pustaka Sinar Harapan, Cet.II., 1995.

Kohn, Hans, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984).

Kartodirdjo, Sartono, *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Keadaran dan Kebudayaan Nasional* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993)

Mustopo, M. Habib. 1983. *Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.* Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

Philpott, Simon, *Meruntuhkan Indonesia; Politik Poskolonial & Otoritarianisme,* Jogjakarta, LKiS, Cet.I., 2003.

Refly, H.Z. 1993. *"Nasionalisme, Universalisme, dan Struktur Kesadaran,"* Makalah dalam Panel Forum Indonesia Pasca-Nasional diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, 21-22 april 1993.

Sjamsuddin, Nazaruddin (ed.), *Soekarno, Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek.,* (Jakarta: CV. Rajawali, 1988).

Sindhunata. 2000. "*Politik Kebangsaan dan Keadilan Sosial".* Kompas, Juli 2000.

Soerojo, Soegiarso, *Siapa Manabur Angin Akan Menuai Badai (G30S/PKI dan Apa Peran Bung Karno),* Jakarta, Rola Sinar Perkasa, Cet.I., 1988.

W.H. Frederick dan S. Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia, Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

MATERI 07
STRATEGI-TAKTIK PENGEMBANGAN GERAKAN PMII

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

Rencana Strategi (renstra) Pembinaan dan Pengembangan Pergerakan Mahaiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan garis-garis besar pembinaan dan pengembangan dan perjuangan sebagai pernyataan kehendak warga PMII yang hakekatnya adalah pola dasar dan umum program jangka panjang dalam mewujudkan tujuan organisasi. Renstra ini menjadi penting supaya langkah PMII menjadi terarah, terpadu dan sustainable (berkelanjutan) setiap kebijakan, program dan garis perjuangan. Renstra pembinaan dan pengembangan PMII merupakan implementasi dari berbagai idea dalam ketentuan ideal konstitusional dan produk-produk historias serta analisis antisipatif dan prediksi PMII ke Depan, Sebagai arah dalam rangkaian program-program yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Rangkaian strategi dan program yang terus menerus tersebut dimaksud untuk mewujudkan tujuan PMII seperti termaktub dalam Anggaran Dasar Bab IV pasa 4 yaitu : *"terbentuknya pribadi muslim Indonesia berilmu yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dari komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia"*

A. Pembinaan dan Pengembangan PMII

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun informal yang dilaksanakan secara sadar, terencana. Terarah, terpadu, teratur dan bertanggungjawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan membimbing dan mengembangkan suatu kepribadian yang utuh. Pembinaan dan pengembangan diserahkan untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian serta membentuk sikap mental spritual berakhalkul-karimah sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan sebagai bekal selanjutnya, atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungan yang optimal . dari bekal yang dicapai melalui pembinaan dan pengembangan tersebut merupakan jaminan gerak sistem perjuangan PMII dalam mencapai cita-citanya.

B. Modal Dasar

1. PMII merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang eksistensinya dijaman oleh UUD 1945 dan karena itu menjadi aset bangsa dalam melakukan proses pembinaan, dan pengembangan generasi muda khususnya mahasiswa.
2. NDP sebagai nilai prinsip ajaran Islam Aswaja merupakan sumber motivasi dan inspirasi pergerakan, sekaligus sebagai pendorong, penggerak dan landasan berpijak dalam kehidupan pribadi insan PMII.
3. PMII sebagai organisasi mahasiswa islam mempunyai keterikatan dan tanggung jawab dengan seluruh masyarakat bangsa indonesia yang menganut sistem berfikir keagamaan, dan kemasyarakatan yang sama yaitu ASWAJA dan sistem kebangsaan.
4. Peran kesejarahan PMII telah menunjukkan kepelaporan dan patriotismenya dalam menegakkan dan membela agama. Selain itu, PMII sebagai elemen *civil sopciaty* telah terbukti perannya dalam melakukan pendampingan masyarakat, dalam usaha melakukan proses demokratisasi dikalangan masyarakat dan sebagainya. Peran PMII dalam setiap perubahan, terutama dalam menegakkan reformasi secara total, dalam segala lapis kehidupan kemasyarakatan.
5. Jumlah dan persebaran anggota PMII yang berada di seluruh wilayah Indonesia sebagai sumber daya yang potensial. Dengan kemapanan struktur organisasi dari tingkat pusat samapi daerah, maka sosilisasi nilai dan gagasan serta kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
6. Ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan acuan dasar dan sekaligus menjadi Inspirasi bagi peningkatan Kualitas Diri menuju kesempurnaan Hidup manusia sebagai hamba Allah SWT.
7. Jumlah dan penyebaran profesi alumni PMII merupakan bagian potensi bagi pengembangan organisasi dan masyarakat.
8. Tipologi kader yang beragam warga PMII merupakan modal utama dalam menyusun renstra gerakan PMII. Setidaknya, ada 5 tipologi dan kecenderungan. *Pertama,* intelektual baik akademik (scholar) maupun organik (analisis/praktis). *Kedua,* gerakan mahasiswa (Student Movement), baik yang nenggunkan baju organisasi maupun organ gerakan lainnya. *Ketga*, advokasi sosial baik yang intens dengan pendampingan sosial kemasyarakat maupun advokasi wacana. *Keempat,* politisi baik keterlibatan dalam panggungpun kontelasi politik maupun persinggungan dengan dunia poltik. *Kelima,* kecenderungan profesional dan *enterpreneur.* Hanya saja persebaran tipologi kader ini tidak merata, sehingga cenderung ada disparitas pranata satu cabang dengan lainnya.

C. Faktor dominan

Dalam menggerakkan dan memanfaatkan modal dasar untuk mencapai tujuan PMII dengan landasan serta azas-azas di atas, perlu diperhatikan faktor-faktor dominan tersebut:

1. Ideologi merupakan aspek dominan dari organisasi PMII yang berisi padangan hidup, cita-cita sserta sistem yang memberikan arah terhadap tingkah laku dari setiap anggota PMII. PMII beraqidah Ahlussunah Waljamaah dan atas dasar aqidah itulah PMII dengan penuh kesadaran berideologi pancasila dalam kehidupan berbagsa dan bernegara di Indonesia. Aqidah dan Ideologi tersebut merupakan faktor pendorong dan penggerak dalam proses pembinaan, pembinaan, pengembangan dan perjuangan organisasi sekaligus sebagai dasar berbijak dalam menghadapi proses perubahan dan gonjangan-gonjangan ditengah-tengah masyarakat. Padangan terhadap wacana Islam yang inklusif dan paradigma Kritis Transformatif dalam membangun masyarakat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diri PMII. Pola pandang keagamaan ini, merupakan faktor dominan yang dimiliki PMIIdalam rangka pengembangan mendatang.
2. Komunitas Islam Ahlussunnah Waljamaah sebagai sekelompok masyarakat terbesar Indoensia merupakan wahana dan tempat pengabdian yang jelas bagi PMII.
3. Jumlah anggota PMII yang setiap tahunnya bertambah dengan kuantitas yang cukup besar yang merupakan faktor strategis yang menentukan usaha pembinaan generasi muda dalam proses kelahiran kader bansa, sekaligus menjadi pelanjut kepemimpinan organisasi.
4. Jumlah alumni yang setiap tahunnya bertambah, sejak berdirinya PMII tahun 1960 tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan bergerak dalam berbagai profesi dan disiplin ilmu yang mengabdikan pada agama, masyarakat dan negara.
5. Sumber dana dan fasilitas yang tersebar di berbagai komunitas dan kelompok terutama umat Islam merupakan aset yang perlu dikoordinir, dikembangkan sebagai sumber dana perjuangan. Oleh karena itu PMII harus mampu menjalin hubungan organisasi yang saling bermanfaat dan memberikan nilai lebih antara keduanya yang pada akhirnya PMII mempunyai sumber dana secara mandiri.

D. Menegaskan tujuan

Tujuan pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII diarahkan pada terbentuknya pribadi dan kondisi organisasi yang dapat mencapai tujuan dan cita-cita PMII. Pribadi dan kondisi organisasi yang dimaksud adalah tercapainya suatu sikap dan perilaku:

a) Terwujudnya kader-kader penerus perjuangan PMII yang bertaqwa kepada Allah SWT, berpegang teguh pada ajaran agamaIslam Aswaja serta Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara.

b) Terwujudnya penghayatan dan pengalaman nilai-nilai ajaran agama islam Aswaja dan moral bangsa untuk memperkokoh alas pijak dalam rangka menempuh kehidupan bermasyarakat, berbengsa dan bernegara yang berkembang cepat sebagai akibat lajunya perkembangan IPTEK serta arus globalisasi dan informasi.

c) Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas, dinamika dan pola berfikir yang mencerminkan budaya pergerakan, selektif, akomodatif, integratif dan konstruktif dalam menghadapi dan menyelesaikan setiappermasalaahn baik secara individu, organiasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d) Tumbuh dan berkembangnya sikap orientasi ke masa depan, orientasi fungsi dan produktifitas serta mengutamakan prestasi.

e) Terciptanya suatu organisasi sebagai kehidupan organisasi sebagai suatu sistem yang sehat dan dinamis karena didukung oleh nilai, aparat, sarana dan fasilitas serta teknik pengolahan yang memadai sesuai dengan tuntutan PMII maupun tyuntutan lingkyunagn yang senantiasa berkembang.

f) Terciptanya suatu kehidupan organisasi yang dinamis, kritis dan cerdas dalam merebut tanggung jawab dan peran sosial sebagai bentuk partisipasi dan pengalaman nyata pergerakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga PMII dapat benar-benar menjadilembaga altenatif baik pada dimensi pemikiran maupun kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia.

g) Tumbuhnya suatu situasi dan kondisi yang mencerminkan kekokohan PMII yang betpijak pada nilai-nilai dan tradisi yang dimilikinya serta mampu mencari alternatif yang paling mungkin dalam usaha untuk tidak terseret pada polarisasi dan opini yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dapat merugikan perjuangan mewujudkan cita-cita PMII.

h) Tersedianya kader-kader yang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai konsekuensi logis dari arah PMII s3ebagai organisasi pembinaan,pengembangan dan perjuangan yang dikhidmatkan kepada agama, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

E. Strategi

Strategi yang dimaksud disini adalah adanya suatu kondisi serta langkah-langkah yang mendasar, konsistensi dan aplikatif yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita PMII.

Dari memahami strategi itulah maka untuk mencapai tujuan pembinaan pengembangan dan perjuangan yang telah ditetapkan diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Iklim yang mampu menciptakan suasana yang sehat, dinamis dan kompetitif yang selalu dibimbing dengan bingkai taqwa, inteleqtualitas dan profesionalitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, terbangunnya suasana kekeluargaan dalam menjalankan tugas suci keorganisasian, kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Kepemimpinan harus difahami sebagai amanat Allah yang menempatkan setiap insan PMII sebagai Da'I untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Sehingga kepemimpinannya selalu tercermin sikap bertanggung jawab melayani, barani, jujur, adil dan ikhlas serta di dalam menjalankan kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif bijaksana, terbuka dan demokratis.
3. Untuk mewujudkan suasana taqwa, intelektualitas dan profesionalitas serta kepemimpinan sebagai amanat Allah SWT diperlukan suatu gerakan dan mekanisme organisasi yang bertumpu pada kekuatan dzikir dan fikir dalam setiap tata perilaku baik secara individu maupun organisatoris.
4. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik sehingga dapat mewujudkan sistem dan mekanisme organisasi yang efektif dan efisien, mampu mewadai dinamika intern organisasi serta mampu merespon dinamika perubahan eksternal.
5. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas menjadi panduan konsitutif, sehingga tercipta aturan mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian hukum dari tingkat pengurus besar samapai pengurus rayon.
6. Pola komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi individual dan kelembagaan, yaitu terciptanya komunikasi timbal balik dan berdaulat serta mampu membedahkan antara hubungan individual dan hubungan kelembagaan ; baik kedalam maupun keluar.
7. Pola kaderisasi yang dikembangkan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman kini dan mendatang, sehingga fungsi kekhalifahan yang terjewantahkan dalam prilaku keseharian, baik selaku kader bangsa maupun agama.[]

MATERI 08
PARADIGMA SOSIOLOGI & ANALISIS SOSIAL

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.
ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

RETHINGKING TEORI PERUBAHAN SOSIAL[48]

Prawacana

Sudah lama dirasakan adanya jurang yang memisahkan antara dunia teoretis dari kalangan akademisi yang membicarakan teori perubahan sosial maupun paradigma pembangunan dan dunia para praktisi perubahan sosial untuk keadilan sosial (*social justice*) yang bekerja di dalam berbagai aksi maupun proyek perubahan sosial bersama kelompok-kelompok marginal seperti kaum buruh, para petani dan nelayan, perempuan miskin di pedesan, maupun anak jalanan serta masyarakat adat di berbagai daerah. Terdorong oleh keinginan untuk menjembatani dialog antara teori dan praktik perubahan sosial di akar rumput, maka suatu refleksi kritis ini disistematisasikan dan dinarasikan sebagai bahan yang memfasilitasi terjadinya perenungan dan pembangkitan kesadaran kritis para teoritisi maupun praktisi lapangan. Sebagai suatu refleksi, tulisan ini tidak berpretensi menjadi acuan teoretik mengenai teori perubahan sosial. Tulisan ini ditulis karena didorong oleh keinginan untuk membuka ruang dialog kritik ideologi terhadap proses dan teori perubahan sosial, bukan ditulis dari hasil studi akademik dari kalangan universitas, melainkan lebih banyak refleksi dari aksi dan dialog yang panjang dari bahan bacaan yang diperoleh secara tidak sistematik maupun hasil refleksi dari keterlibatan berbagai program bersama rakyat di akar rumput di dunia selatan.

Meskipun demikian, tulisan ini memang tidak dimaksud untuk memberikan uraian teoretik tentang teori perubahan sosial dan pembangunan. Akan tetapi, lebih didasarkan pada refleksi terhadap pengalaman dan pengamatan penulis serta sejumlah aktivis pergerakan sosial di Indonesia, untuk merefleksikan kaitan teori-teori perubahan sosial dan praktik lapangan program-program pemberdayaan mayarakat serta dorongan untuk menghentikan kecenderungan ketimpangan dalam dunia teori sosial dalam pengertian semakin kuatnya monopoli informasi dan pengetahuan oleh kalangan akademisi elitis, yakni mereka yang mempunyai kesempatan luas untuk membaca, membahas, dan mendiskusikan paradigma dan berbagai teori pembangunan di dalam lingkungan universitas, sementara mereka yang bekerja di masyarakat, yakni aktivis sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan yang terjun ke masyarakat untuk melakukan aksi sosial, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai teori tersebut di universitas. Dengan demikian, tulisan ini ditulis dengan keinginan ganda. Selain menyediakan bahan bacaan untuk khalayak umum dan aktivis lapangan tentang paradigma dan teori pembangunan, juga didorong oleh suatu semangat untuk merobohkan anggapan bahwa urusan ideologi, paradigma, dan teori perubahan sosial hanya patut dan khusus dibaca, dipahami, dan dikontrol oleh kalangan akademisi dan birokrasi, dan tabu untuk dibaca oleh kalangan masyarakat biasa. Dengan kata lain, tulisan ini melakukan demistifikasi terhadap bahan kajian ilmiah untuk menjembatani jarak antara para aktivis lapangan dan berbagai paradigma dan teori ilmu sosial di univeritas.

Selain itu, semangat penulisan tulisan ini juga didorong oleh adanya gejala timbulnya kerancuan teoretik dan paradigmatik dari banyak aktivis lapangan. Yang dimaksudkan dengan kerancuan teoretik ini adalah persoalan yang dihadapi oleh mereka yang bekerja untuk melakukan perubahan sosial di lapangan, yakni para pekerja sosial masyarakat, baik kalangan aktivis lapangan ornop maupun tokoh keagamaan, yang tanpa disadari telah menggunakan dasar teoretik dan visi ideologis mengenai suatu perubahan sosial yang menjadi landasan dan aktivitas praktis sehari-hari, tetapi sesungguhnya hakekat teori yang sedang dipraktikkannya tersebut secara teoretik bertolak belakang dengan tujuan yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, tuntutan akan perlunya pemahaman mengenai paradigma dan berbagai teori perubahan sosial yang mereka jadikan pijakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menangani masalah-masalah kemasyarakatan semakin meningkat. Lemahnya visi ideologi dan teori mengenai perubahan sosial ini juga mempengaruhi metodologi yang diterapkan, seperti bagaimana banyak organisasi sosial menempatkan masyarakat sebagai obyek, padahal sementara itu bercita-cita melakukan pemberdayaan masyarakat. Demikian halnya dalam merencanakan, menyusun, dan menetapkan program pengembangan masyarakat, maupun dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Kegiatannya banyak mencerminkan anti-pemberdayaan masyarakat. Ketidakjelasan visi dan teori ini tidak saja telah melahirkan inkonsistensi antara cita-cita dan teori yang digunakan, tetapi juga telah berakibat menghambat peran atau partisipasi masyarakat dalam perubahan sosial, yakni peranan masyarakat sipil (*civil society*) sebagai pelaku sejarah utama dalam upaya demokratisasi ekonomi, politik, budaya, gender, serta aspek sosial lainnya.

---

[48] Sebuah pengantar diadaptasi dan diulas kembali dari, Mansour Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press, Cet. I., 2001) h. 1-16.

Gejala kerancuan teoretik ini terlihat dalam bagaimana para aktivis sosial di lapangan mendefinisikan masalah kemasyarakatan dan memandang teori *'mainstream'* perubahan sosial pembangunan dewasa ini. Namun demikian, sesungguhnya di kalangan aktivis sosial telah timbul kesadaran akan perlunya secara kritis mempertanyakan kembali paradigma, teori, serta implikasinya terhadap metodologi dan teknik lapangan. Kegairahan di kalangan aktivis sosial untuk memahami berbagai teori politik ekonomi dan perubahan sosial dalam pendidikan politik dan advokasi mendorong penulis untuk segera merampungkan tulisan teori perubahan sosial ini. Namun demikian, secara garis besar motivasi utama penyusunan tulisan ini didorong untuk memenuhi kebutuhan bacaan teoretis dan memfasilitasi perdebatan teoretik bagi mereka yang bekerja di lapangan. Secara umum tulisan ini merupakan pengkajian teoretis dan mendasar, membahas kerangka ideologi, paradigma, dan teori tentang perubahan sosial, yang diharapkan mampu memacu pembaca untuk merefleksikan kegiatan lapangan mereka dengan berbagai ideologi dan aliran teori perubahan sosial. Selain itu tulisan ini juga merupakan refleksi kritik terhadap posisi teoretik berbagai teori yang dominan tentang perubahan sosial dan pembangunan. Kritik ini diharapkan akan memberikan bekal teoretik bagi pembaca, khususnya yang terlibat dalam proses perubahan sosial dan yang sedang memikirkan paradigma alternatif perubahan sosial. Terakhir, secara khusus tulisan ini disajikan bagi aktivis lapangan untuk mendorong mereka melakukan refleksi dan dialog tentang berbagai teori perubahan sosial sebagai bagian dari aktivitas lapangan sehari-hari.

Sebuah Refleksi Teoretik bagi Aktivis Sosial

Maksud terutama penyusunan tulisan ini adalah dalam rangka memfasilitasi para praktisi untuk melakukan refleksi terhadap aksi yang selama ini mereka lakukan di tingkat akar rumput. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa seorang aktivis lapangan atau praktisi perubahan sosial dalam memperjuangkan "*social justice*", politik dan ekonomi yang demokratis, serta pengembangan masyarakat menuju masyarakat adil sejahtera sangat membutuhkan teori sebagai acuan, refleksi, maupun motivasi. Tugas utama suatu teori sosial pada dasarnya tidak sekedar memberi makna terhadap suatu realitas sosial sehingga memungkinkan lahimya kesadaran dan pemahaman terhadap suatu realitas sosial. Akan tetapi, teori sosial juga bertugas untuk *"mengubah realitas sosial*" yang dianggapnya bermasalah dan tidak adil sehingga sampai sekarang masalah tersebut masih diperdebatkan. Tanpa disadari setiap pekerja dan aktivis sosial seperti guru, akivis sosial, wartawan, dan pemimpin agama terlibat dalam pertarungan teoretis secara nyata. Pertarungan tersebut berupa penerapan teori dalam kegiatan mereka sehari-hari dan tanpa disadari teori sosial juga memiliki dimensi penerapan. Dengan demikian, penulis berpendirian bahwa tugas ilmu sosial tidak sekedar mencoba memahami suatu realitas sosial, tetapi juga mengubahnya.

Berbagai teori sosial, ekonomi, politik, dan budaya lahir tidak saja dalam rangka pertarungan memberi makna terhadap suatu realitas sosial, tetapi juga berimplikasi pada perubahan sosial karena pada dasamya perubahan sosial dibangun di atas pemahaman teoretik dan suatu teori sangat berpengaruh dalam membentuk suatu program aksi di lapangan. Meskipun pada realitas sosial yang sama, dua teori selalu memberi makna berbeda atau bahkan bertolak belakang dan akibatnya akan membawa perubahan sosial secara berbeda pula. Misalnya saja dalam melihat hubungan 'buruh-majikan' satu teori melihatnya sebagai hubungan yang 'saling menguntungkan', tetapi teori lain justru menganggapnya sebagai hubungan eksploitasi. Atas asumsi teoretik ini, bagaimana suatu perubahan hubungan masa depan antara buruh dan majikan akan diproyeksikan. "*Rekayasa sosial"* yang oleh satu teori dianggap sebagai keharusan pendekatan, tetapi oleh teori lain justru dianggap sebagai suatu bentuk dominasi dan 'penindasan' dari ilmuwan sosial terhadap masyarakat. Perbedaan asumsi tersebut tidak saja mempengaruhi berbagai metode penelitian dan pendidikan sosial, tetapi juga membawa perbedaan visi dan orientasi hubungan antara ilmuwan sosial dan masyarakat dalam proses perubahan sosial. Dengan demikian, teori sosial membantu aktivis lapangan ataupun pekerja sosial untuk menyadari apa yang mereka lakukan serta kemana dan model apa suatu perubahan sosial akan dituju. Tanpa pemahaman akan teori ilmu sosial, dalam menjalankan program sosial ekonomi di masyarakat, seorang aktivis tidak saja bekerja tanpa visi dan orientasi, tetapi juga bisa melakukan kegiatan yang sesungguhnya bertentangan dengan keyakinannya. Seorang aktivis sosial akan selalu dihadapkan pada pilihan untuk memihak antara *status quo* dan perubahan; antara pertumbuhan dan keadilan; antara rekayasa sosial dan partisipasi, antara tirani dan demokrasi, dan seterusnya. Dalam kaitan itulah teori sangat membantu memahami relasi sosial secara kritis.

Dalam praktik lapangan, dewasa ini terdapat dua paham teori sosial yang kontradiktif yang melibatkan setiap pekerja sosial, yakni antara teori-teori sosial yang digolongkan pada *"teori sosial regulasi"* berhadapan dengan *teori-teori sosial emansipatori* atau juga yang dikenal dengan kritis. Teori sosial regulasi yang bersemboyan bahwa ilmu sosial harus mengabdi pada stabilitas, pertumbuhan, dan pembangunan, bersifat objektif serta secara politik netral dan bebas nilai. Dalam pandangan ini teori sosial dikontrol oleh teorisi sedangkan masyarakat dilihat hanya sebagai obyek pembangunan mereka. Pandangan teori sosial ini berhasil memunculkan kaidah 'rekayasa sosial' yang menempatkan masyarakat sebagai obyek para ahli, direncanakan, diarahkan, dan dibina untuk berpartisipasi menurut selera yang mengontrol. Teori sosial telah menciptakan birokrasinya: di mana teoretisi memiliki otoritas kebenaran untuk mengarahkan praktisi dan masyarakat. Dalam hubungan ini aktivis sosial lapangan dan masyarakat hanya diletakkan sebagai pekerja sosial tanpa kesadaran ideologis dan teoretis secara kritis.

Sementara itu, bagi aliran kritis tugas ilmu sosial justru melakukan penyadaran kritis masyarakat terhadap sistem dan struktur sosial *'dehumanisasi'* yang membunuh kemanusiaan. Gramsci menyebut proses ini sebagaj upaya counter hegemoni. Proses dehumanisasi tersebut terselenggara melalui mekanisme kekerasan, baik yang fisik dan dipaksakan, maupun melalui cara penjinakan yang halus, yang keduanya bersifat struktural dan sistemik. Artinya, kekerasan dehumanisasi tidak selalu berbentuk jelas dan mudah dikenali. Kemiskinan struktural misalnya, pada dasarnya adalah suatu bentuk kekerasan yang memerlukan analisis untuk menyadarinya. Bahkan, kekerasan sebagian besar terselenggara melalui proses hegemoni, yakni cara pandang, cara berpikir, ideologi, kebudayaan, bahkan *'selera'* golongan yang mendominasi telah dipengaruhkan dan diterima oleh golongan yang di dominasi. Dengan begitu kegiatan sosial bukanlah arena netral dan apolitik. Kegiatan sosial tidaklah berada dalam ruang dan masa yang steril, tetapi merupakan kegiatan politik menghadapi sistem dan struktur yang bersifat hegemonik.

Bagi paham kritis, dalam dunia yang secara struktural tidak adil, ilmu sosial yang bertindak tidak memihak, netral, objektif, serta berjarak atau *detachment* adalah suatu bentuk sikap ketidakadilan tersendiri, atau paling tidak ikut melanggengkan ketidakadilan. Paham ini menolak objektivitas dan netralitas ilmu sosial dengan menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh dan tidak mungkin pernah netral. Oleh karena itu, teori sosial haruslah subjektif, memihak dan penuh atau sarat dengan nilai-nilai demi kepentingan politik dan ekonomi golongan tertentu. Teori ilmu-ilmu sosial, termasuk juga paham kebudayaan dan pandangan keagamaan dalam paradigma kritis ini selalu memihak dan mengabdi demi kepentingan tertentu. Masalahnya, kepada golongan yang mana suatu teori sosial harus mengabdi. Itulah makanya, dalam pandangan ini, teori sosial dan praktik pengabdian masyarakat yang netral dan objektif, sementara masyarakat berada pada suatu sistem dan struktur sosial yang tidak adil dan dalam proses *'dehumanisasi'*, ilmuwan dan pekerja sosial dianggap menjadi tak bermoral karena ikut melanggengkan ketidakadilan.

Sesungguhnya sudah cukup lama diperdebatkan mengenai masalah objektivitas, hakikat, dan tugas ilmu sosial. Apakah teori sosial dan aktivis sosial harus netral, tidak memihak, ataukah harus mengabdi demi kepentingan tertentu seperti golongan lemah. Namun, dalam perspektif teori sosial kritis, ilmu sosial tidaklah sekedar diabdikan demi kepentingan golongan lemah dan tertindas, tetapi lebih mendasar daripada itu, teori sosial haruslah berperan dalam proses pembangkitan kesadaran kritis, baik yang tertindas maupun yang menindas, terhadap sistem dan struktur sosial yang tidak adil. Teori sosial harus mengabdi pada proses transformasi sosial yakni terciptanya hubungan (*struktur*) yang baru dan lebih baik. Dengan kata lain, dalam prespektif teori sosial kritis, ilmu sosial tidaklah sekedar memihak kepada yang tertindas dan yang termarjinalisasi belaka, tetapi lebih berusaha menciptakan ruang yang akan menumbuhkan kesadaran, baik bagi golongan menindas dan yang tertindas untuk menyadari bahwa mereka telah berada dalam sistem sosial yang tidak adil. Teori sosial harus membangkitkan kesadaran kritis. baik bagi yang mendominasi maupun yang didominasi, untuk perubahan menuju terciptanya suatu hubungan (*struktur*) dan sistem sosial yang secara mendasar lebih baik, yakni suatu sistem masyarakat tanpa eksploitasi, tanpa penindasan, tanpa diskriminasi, dan tanpa kekerasan. Dengan demikian, tugas teori sosial adalah memanusiakan kembali manusia yang telah lama mengalami dehumanisasi, baik yang menindas maupun yang ditindas.

Teori Perubahan Sosial dan Teori Pembangunan: Suatu Penjelasan

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, *'pembangunan'* disejajarkan dengan kata "*perubahan sosial*". Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti, pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan sosial.

Sementara itu, di lain pihak terdapat suatu pandangan lebih minoritas yang berangkat dari asumsi bahwa kata *'pembangunan'* itu sendiri adalah sebuah discourse, suatu pendirian, atau suatu paham, bahkan merupakan suatu ideologi dan teori tertentu tentang perubahan sosial. Dalam pandangan yang disebut terakhir ini konsep pembangunan sendiri bukanlah kata yang bersifat netral, melainkan suatu "aliran" dan keyakinan ideologis dan teoretis serta praktik mengenai perubahan sosial. Dengan demikian, dalam pengertian yang kedua ini pembangunan tidak diartikan sebagai kata benda belaka, tetapi sebagai aliran dari suatu teori perubahan sosial. Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosialisme, dependensia, ataupun teori lain. Oleh karena itulah banyak orang menamakan teori pembangunan sebagai pembangunanisme (*developmentalism*). Dengan demikian pengertian seperi ini menolak teori-teori, seperti teori pembangunan berbasis rakyat, atau teori integrated rural development, atau bahkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan merupakan alternatif dari pembangunanisme, melainkan variasi-variasi lain dari ideologi pembangunanisme.

Oleh karena itu, tulisan ini pada dasarnya lebih memfokuskan pembahasan mengenai seluk-beluk paradigma dan teori perubahan sosial, yakni teori tentang bagaimana suatu masyarakat berubah serta dinamika dan proses sekitar perubahan tersebut. Dengan demikian, teori dan kritik terhadap pembangunan

yang banyak dibahas dalam tulisan ini nanti, dalam hubungan ini dipahami dan diletakkan sebagai salah satu ideologi dan teori serta salah satu bentuk dari teori perubahan sosial. Dengan kata lain, salah satu dari teori perubahan sosial yang akan dibahas adalah teori pembangunan. Sebagai salah satu dari berbagai teori perubahan sosial, teori pembangunan, dewasa ini telah menjadi mainstream dan teori yang paling dominan mengenai perubahan sosial. Pembangunan sebagai salah satu teori perubahan sosial adalah fenomena yang luar biasa, karena sebuah gagasan dan teori begitu mendominasi dan mempengaruhi pikiran umat manusia secara global, terutama di bagian dunia yang disebut sebagai "*dunia ketiga*". Gagasan dan teori pembangunan, bagi banyak orang bahkan mirip 'agama baru' yakni menjanjikan harapan baru untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di dunia ketiga.

Istilah pembangunan atau development tersebut kini telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini oleh rakyat di hampir semua negara, khususnya dunia ketiga, dengan setelah diterjemahkannya ke dalam bahasa dengan menggunakan kata yang sesuai dengan bahasa lokal di masing-masing negara. Di negara-negara Amerika Latin, misalnya, kata ini disamakan dengan kata *dessarollo*. Bahkan, di negara yang belum memiliki bahasa nasional seperti Filipina, misalnya, kata yang digunakan untuk melokalkan *'development'* adalah dalam tiga bahasa daerah utama, yakni *pang-unlad* untuk bahasa Tagalok, sedang dalam bahasa Ilongo adalah *Pag-uswag,* dan dalam bahasa Ilocano menjadi *progreso*. Di Indonesia, kata *development* diterjemahkan dengan *'pembangunan'*.

Kata 'pembangunan' menjadi diskursus yang dominan di Indonesia erat kaitannya dengan munculnya pemerintahan orde baru. Selain sebagai semboyan mereka, kata 'pembangunan' juga menjadi nama bagi pemerintahan orde baru, hal itu bisa dilihat bahwa nama kabinet sejak pemerintahan orde baru selalu dikaitkan dengan kata 'pembangunan', meskipun kata 'pembangunan' sesungguhnya telah dikenal dan digunakan sejak masa orde lama. Kata pembangunan dalam konteks orde baru, sangat erat kaitannya dengan *discourse-development* yang dikembangkan oleh negara negara Barat. Uraian berikut mencoba melakukan penyelidikan secara kritis terhadap discourse development, yang menjadi sumber dari diskursus *'pembangunan'* di Indonesia. Oleh karena itu, perhatian uraian ini tidaklah mengusahakan tinjauan dari segi bahasa, tetapi mencoba menstudi politik ekonomi dalam permulaan discourse development, dan bagaimana development disebar-serapkan ke dunia ketiga, serta hubungannya dengan diskursus 'pembangunan' di Indonesia sejak pemerintahan militer orde baru, yakni suatu pemerintahan militer selama 32 tahun, yakni sejak militer Indonesia mengambil alih kekuasaan Presiden Sukarno tahun 1967 hingga kejatuhan rezim militer ini oleh suatu revolusi sosial tahun 1998.

Namun, jika dilihat secara lebih mendalam dari pengertian dasarnya, pembangunan merupakan suatu istilah yang dipakai dalam bermacam-macam konteks, dan seringkali digunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada banyak kata yang mempunyai persamaan makna dengan kata pembangunan, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, progres, dan modernisasi. Dari kata-kata tersebut hanya istilah perubahan sosial yang memberi makna perubahan ke arah lebih positif. Oleh karena makna pembangunan bergantung pada konteks siapa yang menggunakannya dan untuk kepentingan apa, uraian mengenai pengertian pembangunan akan dilihat dari konteks sejarah bagaimana istilah tersebut dikembangkan.

Pertanyaan dasarnya adalah apakah konsep "pembangunan" itu adalah suatu kategori tersendiri, atau jenis dari suatu yeng lebih besar. Dalam tulisan ini penulis meletakkan pembangunan sebagai suatu teori dibawah payung teori perubahan sosial. Dengan kata lain, salah satu bahasan dalam ilmu-ilmu sosial adalah masalah perubahan sosial. Banyak teori dan dimensi pendekatan perubahan sosial, di antaranya: dimensi evolusi dan revolusi sosialistik dan kapitalistik, dan dimensi-dimensi lainnya. Salah satu teori perubahan sosial tersebut adalah teori pembangunan. Lambat-laun, pembangunan sebagai teori berubah dan menjadi suatu pendekatan dan ideologi, bahkan menjadi suatu paradigma dalam perubahan sosial. Selama orde baru, bahkan pembangunan oleh para birokrat dan akademisi diperlakukan lebih dari sekedar teori perubahan sosial. Selain berhasil menjadi ideologi orde baru, pembangunan juga dinamakan kabinet selama kekuasaan orde baru dibawah presiden Suharto.

PARADIGMA DAN PERANNYA DALAM MEMBENTUK TEORI PERUBAHAN SOSIAL[49]

Prawacana

Sebelum dibahas lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya mengenai berbagai aliran ideologi dan keyakinan serta teori tentang perubahan sosial dan kritik pembangunan, maka terlebih dahulu dalam bagian ini diuraikan dan dijelaskan mengenai apa latar belakang yang mempengaruhi terbentuknya teori-teori tersebut. Salah satu dari banyak hal yang sangat mempengaruhi dan membentuk suatu teori adalah apa yang dikenal dengan istilah paradigma (*paradigm*). Untuk itu uraian pada bagian kedua buku ini akan memfokuskan pembahasan untuk memahami apa yang sesungguhnya dimaksud dengan paradigma, mengapa dan bagaimana suatu paradigma terbentuk, serta apa pengaruh paradigma terhadap terbentuknya teori-teori perubahan sosial dan praktik pembangunan. Pembahasan mengenai masalah paradigma ini perlu dilakukan mengingat pentingnya paradigma dalam membentuk dan mempengaruhi teori maupun analisis seseorang. Pada dasarnya tidak ada suatu pandangan atau teori sosial pun yang bersifat netral dan objektif,

---

[49] Mansour Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Insist Press, Cet. I., 2001) h. 17-43.

melainkan salah satunya bergantung pada paradigma yang dipergunakan. Namun, sebelum melangkah lebih lanjut, uraian ini akan dimulai dengan menjawab pertanyaan dasar apa sesungguhnya yang dimaksud dengan paradigma itu?

Paradigma secara sederhana dapat diartikan bagai kacamata atau alat pandang. Namun, pengertian yang lebih akademis dapat dipahami dari beberapa pemikiran yang akan diuraikan berikut. Pada dasarnya, istilah paradigma menjadi sangat terkenal justru setelah Thomas Khun menulis karyanya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Dalam buku itu Khun menjelaskan tentang model bagaimana suatu aliran teori ilmu lahir dan berkembang menurutnya disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh pandangan teori yang lain. Paradigma diartikan sebagai satu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Berkembangnya suatu paradigma erat kaitannya dengan seberapa jauh suatu paradigma mampu melakukan konsolidasi dan mendapat dukungan dari berbagai usaha seperti penelitian, penerbitan, pengembangan, dan penerapan kurikulum oleh masyarakat ilmiah pendukungnya. Oleh karena itu, untuk memahami berkembang maupun runtuhnya suatu teori perubahan sosial dan pembangunan erat kaitannya dengan persoalan yang dihadapi oleh paradigma masing-masing yang menjadi landasan teori tersebut.

Selain Khun, peneliti pemikir lain seperti Patton (1975) juga memberikan pengertian paradigma yang tidak jauh dengan apa yang didefinisikan oleh Khun, yakni sebagai *"a world view, a general perspective, a way of breaking down the complexity of the real world*"[50] Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, selain dipergunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial, untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial.[51] Paradigma merupakan tempat kita berpijak dalam melihat suatu realitas. Justru kekuatan sebuah paradigma terletak pada kemampuannya membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat se-suatu, apa yang kita anggap masalah, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta apa metode yang kita gunakan dalam meneliti dan berbuat. Paradigma, sebaliknya, mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, tidak ingin kita lihat, dan tidak ingin kita ketahui.[52] Oleh karena itu, jika ada dua orang melihat suatu realitas sosial yang sama, atau membaca ayat dari sebuah kitab suci yang sama, akan menghasilkan pandangan berbeda, menjatuhkan penilaian dan sikap yang berbeda pula. Paradigma pulalah yang akan mempengaruhi pandangan seseorang tentang apa yang "*adil dan yang tidak adil*", bahkan paradigma mempengaruhi pandangan seseorang ataupun teori tentang baik buruknya suatu program kegiatan. Misalnya saja hubungan lelaki prempuan pada suatu masyarakat, atau hubungan antara majikan dan buruh, oleh suatu paradigma pemikiran disebutkan sebagai "*harmonis saling membantu*" dan tidak ada masalah, oleh paradigma yang lain, akan dilihat sebagai hubungan hegemonik, dominasi gender ataupun bahkan dianggap eksploitatif. Dalam hal perbedaan paradigma seperti itu, tidak relevan membicarakan siapa yang salah dan siapa yang benar, karena masing-masing menggunakan alasan, nilai, semangat, dan visi yang berbeda tentang fenomena tersebut.

Oleh karena itu, dominasi suatu paradigma terhadap paradigma yang lain sesungguhnya bukanlah karena urusan "salah atau benar, yakni yang benar akan memenangkan paradigma yang lain. Ritzer (1975) mengungkapkan bahwa kemenangan satu paradigma atas paradigma yang lain lebih disebabkan karena para pendukung paradigma yang menang ini lebih memiliki kekuatan dan kekuasaan (*power*) dari pengikut paradigma yang dikalahkan, dan sekali lagi bukan karena paradigma yang menang tersebut lebih benar atau 'lebih baik dari yang dikalahkan".[53] Demikian halnya dalam memahami dipilihnya atau diterapkannya suatu aliran teori perubahan sosial maupun pembangunan juga erat kaitannya dengan kekuasaan penganut paradigma perubahan sosial yang bersangkutan untuk memenangkannya. Dengan demikian, dominasi atau berkuasanya suatu teori perubahan sosial ataupun teori pembangunan, adalah lebih karena teori tersebut yang merupakan hasil atau dibentuk oleh suatu paradigma tertentu, ada kaitannya dengan kekuatan dan kekuasaan bagi penganut teori tersebut, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kebenaran teori tersebut. Lantas pertanyaannya mengapa dan bagaimana kita harus memilih satu paradigma atau teori perubahan sosial tertentu?

Meskipun penjelasan Kuhn sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana paradigma mempengaruhi terciptanya teori, tetapi penjelasan Kuhn tentang proses pergantian paradigma menurutnya berjalan secara revolusioner. Dengan kata lain, bergantinya suatu paradigma melalui pergantian, paradigma lama mati dan diganti oleh paradigma baru. Penjelasan mengenai pergantian paradigma ini sudah banyak dibantah orang. Dalam kenyataannya telah terjadi berbagai fenomena yang tidak dibayangkan oleh Kuhn dalam teorinya. Pertama telah terjadi pluralitas dan konvergensi teori. Kuhn berpendapat bahwa paradigma akan selalu menggantikan posisi paradigma lama, dan jika tidak, para ilmuwan tidak memiliki kerangka kerja

[50] Lihat: Michael Quin Patton, *Alternative Evaluation Research Paradigm*. Grand Forks: University North Dakota, 1970.

[51] Definisi ini meminjam uraian Popkewitz. Lihat Popkewitz, Thomas. *Paradigm and Ideology in Educational Research*. New York: Palmer Press, 1984.

[52] Thomas Khun (1970) dikenal orang pertama yang membuat terkenal istilah paradigma. Ia tertarik pada perkembangan dan revolusi ilmu pengetahuan, dengan menganalisis hubungan antara berbagai paradigma dan penelitian ilmiah. Untuk uraian mengenai paradigma lihat: Thomas Kuhn. *The Structures of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

[53] Lihat Ritzer, "*Sociology: A Multiple Paradigm Science"* dalam Jumal The American Sociologist No. 10, 1975. hal: 156-157.

yang mapan. Dalam ilmu alam, pandangan seperti ini memang terjadi. Namun, dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial menunjukkan kecenderungan semakin menguatnya pertikaian antar paradigma, atau bahkan terjadi dialog antara dua paradigma atau lebih pada era yang sama. Bahkan, proses teori pada dasarnya adalah terjadinya saling dialog antar teori dan proses kemampuan teori untuk menyesuaikan diri. Marxisme, misalnya, telah berkembang setelah berdialog dengan semakin canggihnya kapitalisme. Sebaliknya, terjadi penguatan gejala dimana teori-teori sosial yang bersandar pada keyakinan kapitalisme berkembang ke arah penyesuaian diri terhadap kritik. Dalam perkembangan Marxisme, misalnya, perkembangan dan kritik interen terhadap praktik perkembangannya, hal ini menghasilkan masuknya analisis hegemoni kultur dan ideologi dalam Marxisme, sesuatu yang membuat analisis Marxisme saat ini telah bergeser dari pikiran Marx pertama kali yang lebih memfokuskan pada analisis ekonomi. Demikian halnya maraknya perkembangan teologi pembebasan (*liberation theology*) di Amerika Latin dan tempat-tempat lain adalah suatu adaptasi akibat dari suatu dialog paradigma. Demikian halnya, perkembangan paham dan teori kapitalisme dalam perkembangannya hingga seperti saat ini justru belajar dan mendapat keuntungan dari kritik yang dilakukan oleh teori Marxisme. Kapitalisme sesungguhnya banyak belajar dan menyesuaikan diri karena mendapat kritikan dari Marxisme.

Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa manfaat dan sikap yang diperlukan dalam memahami paradigma sosial. Pada dasarnya memahami paradigma dan teori perubahan sosial seharusnya tidak sekedar untuk mempelajari dan memahaminya. Suatu teori ataupun paradigma dipelajari dan dipahami dalam rangka menegakkan komitmen untuk suatu proses emansipasi, keadilan sosial dan transformasi sosial. Persoalan pilihan terhadap pardigma dan teori perubahan sosial maupun teori pembangunan pada dasarnya bukanlah karena alasan benar dan salahnya teori tersebut, pilihan suatu teori lebih karena dikaitkan dengan persoalan mana teori yang akan berakibat pada penciptaan emansipasi dan penciptaan hubungan-hubungan dan struktur yang secara mendasar lebih baik. Oleh karena itu, memilih paradigma dan teori perubahan sosial adalah suatu pemihakan dan berdasarkan nilai-nilai tertentu yang dianut. Pertanyaan yang penting diajukan di sini adalah siapa dan dengan tujuan apa sesungguhnya kegiatan dan aksi kita diabdikan? Masalah siapa yang ingin kita pecahkan melalui aksi dan program kegiatan kita? Jadi, masalahnya bukanlah apakah kita harus memihak, karena pemihakan adalah mustahil untuk dapat dihindarkan bagi semua teori perubahan sosial dan teori pembangunan, tetapi masalahnya adalah kepada siapa atau kepada apa pemihakan tersebut diabdikan.[54] Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan pemahaman paradigma sosiologi yang menjadi kacamata dan dasar bertindak dibalik setiap teori perubahan sosial maupun pembangunan.

Paradigma-paradigma Ilmu-ilmu Sosial

Untuk memberikan bingkai bagaimana memahami teori perubahan sosial, termasuk di dalamnya teori pembangunan, kita perlu mengenal peta paradigma dalam ilmu sosial. Ada beberapa peta pendekatan yang telah dihasilkan oleh para ahli ilmu sosial. Dalam rangka itu, berikut diuraikan beberapa model paradigma dalam melihat masalah sosial. Pertama adalah model pemetaan paradigma sosial yang diuraikan oleh salah seorang penganut mazhab Frankfurt, terutama Jurgen Habermas. Model pembagian paradigma kedua adalah dengan mengikuti tokoh pemikir pendidikan kritis asal Brazil, Paulo Freire. Sedangkan model ketiga adalah peta paradigma sosiologi yang dibuat oleh Barnel dan Morgan (1979).

Ilmu Sosial Paradigma Dominatif Lawan Emansipatoris

Meminjam analisis Habermas yang secara sederhana membagi paradigma ilmu-ilmu sosial menjadi tiga paradigma, dapat digunakan untuk memahami suatu sudut perbedaan paradigma dalam ilmu-ilmu sosial. Habermas pada dasarnya membagi paradigma ilmu sosial dalam pembagian yang secara sederhana dapat dipahami sebagai berikut. Menurutnya ilmu sosial dapat dibedakan menjadi tiga paradigma yang dapat secara sederhana diuraikan sebagai berikut;

Pertama, yang disebutnya sebagai *instrumental knowledge.* Dalam perspektif paradigma *'instrumental'* ini, pengetahuan lebih dimaksudkan untuk menaklukkan dan mendominasi objeknya. Yang dimaksud Habermas dengan paradigma pengetahuan instrumental ini sesungguhnya adalah *paradigma positivisme*. *Positivisme* pada dasarnya adalah ilmu sosial yang dipinjam dari pandangan, metode, dan teknik ilmu alam dalam memahami realitas. Positivisme adalah aliran filsafat yang berakar pada tradisi ilmu sosial yang dikembangkan dengan mengambil cara ilmu alam menguasai benda, yakni dengan kepercayaan adanya *universalisme* dan *generalisasi*, melalui metode determinasi, *fixed law* atau kumpulan hukum teori (Schoyer, 1973). Positivisme berasumsi bahwa penjelasan sifat universal, artinya cocok atau *appropriate* untuk semua, kapan saja, di mana saja suatu fenomena sosial. Oleh karena itu, mereka percaya babwa riset sosial harus didekati dengan metode ilmiah, yakni obyektivitas, netral, dan bebas nilai. Pengetahuan selalu menganut hukum ilmiah yang bersifat universal, prosedur harus dikuantifikasi dan diverifikasi dengan

[54] Pertanyaan ini kami adaptasi dan pinjam dari Becker, yang membahas tentang pilihan-pilihan dalam paradigma dan teori penelitian. Lihat tulisan Becker, *"Whose side are we on?* dalam buku yang di edit oleh W.J. Fisltead (Ed.). *Qualitative Methodology* Chicago: Markham, 1970.

metode scientific atau ilmiah. Dengan kata lain, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai (*values*) dalam rangka menuju pemahaman objektif atas realitas sosial.

Sebutan "*kaum positivist"* berkesan sentimen dan merupakan diskursus yang di dalamnya memuat suatu strategi daripada mengacu pada pengertian bahasa yang mendalam dan bermanfaat untuk menjelaskan kata positif lawan yang negatif dari konsep itu. Istilah itu digunakan untuk mengacu pada suatu sikap dan pendirian epistemologis tertentu. Positivisme sering dicampur-adukkan dengan *'empirisme'* sehingga membuat rancu beberapa pengertian pokoknya. Pendirian epistemologis kaum positivis kalau ditelaah lebih dalam didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam "ilmu alam," atau dengan kata lain, lebih jelas dapat dikatakan bahwa ilmu sosial positivistik, pada dasamya meminjam cara, metodologi, sikap dan visi bagaimana ilmu alam menghadapi objek studi mereka yakni benda dan fenomena alam. Perbedaan utamanya terletak pada istilah yang digunakan dan objek yang dihadapi. Dalam ilmu alam objeknya adalah benda dan fenomena alam, sedangkan positivisme memberlakukan masyarakat atau manusia seperti ilmu alam memperlakukan benda dan fenomen alam. Tatanan sosial dapat dibuktikan kebenarannya melalui penelitian eksperimental, atau laboratorium, meskipun sering terjadi hipotesis keliru yang tak pernah dapat dibuktikan kebenarannya. Kaum *verifikasionis* (membuktikan kebenaran, dan *falsifikasionis* (membuktikan kekeliruan) hipotesis tentang tatanan sosial, sependapat bahwa pengetahuan hakikatnya merupakan proses akumulasi di mana pemahaman baru diperoleh sebagai tambahan atas kumpulan pengetahuan atau penghapusan atas hipotesis salah yang pernah ada.

Dengan pendekatan seperti itu, ilmu sosial dengan paradigma positivisme lebih mensyaratkan sikap-sikap tertentu yang tercermin dalam metodologi dan teknik kajian mereka. Di antara banyak sikap yang kemudian disebutkan sebagai sikap "ilmiah" tersebut adalah bahwa ilmu sosial dan penelitian sosial haruslah bersikap netral dan tidak memihak. Selain itu, ilmu sosial bagi paradigma positivisme juga tidak boleh bersifat subjektif, melainkan harus objektif, rasional, tidak boleh emosional, komitmen dan empati. Ilmu sosial juga harus mampu menjaga jarak (*detachment*) terhadap objek studi dan hasil kajian, bersikap universal, dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja.

Untuk memahami lebih lanjut pendirian paradigma positivisme, kita dapat memahaminya melalui pendirian teori-teori anti-positivisme. Meskipun epistemologis kaum antipositivis beragam jenisnya, semuanya tidak menerima berlakunya kaidah-kaidah universalitas, bahwa yang terjadi pada suatu tatanan sosial tertentu tidak secara serta merta akan berlaku pada semua tatanan atau peristiwa sosial. Realitas sosial adalah nisbi, hanya dapat dipahami dari pandangan orang per orang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial tertentu. Mereka menolak kedudukan sebagai *'peneliti* dan *pengamat'* atau pengembang masyarakat ahli luar seperti layaknya kedudukan kaum positivis. Seorang hanya bisa "*mengerti*" dengan *'memasuki'* kerangka pikir orang yang terlibat langsung atau diri mereka sendiri sebagai peserta atau pelaku dalam tindakan. Seseorang hanya mengerti dari sisi dalam, bukan dari luar realitas sosial, betapa pun ahlinya karena ilmu sosial bersifat subjektif, dan menolak anggapan bahwa ilmu pengetahuan dapat ditemukan sebagai pengetahuan objektif.

Kalau kita pelajari secara mendalam, sesungguhnya ada dua tradisi pemikiran besar yang mewamai perkembangan ilmu dan analisis sosial selama lebih dari dua ratus tahun terakhir, yakni pertikaian antara postivisme dan idealisme Jerman. Aliran ini mewakili pandangan yang berusaha menerapkan cara dan bentuk penelitian alam ke dalam pengkajian peristiwa kemanusiaan. Realitas sosial disamakan dengan realitas alam. Dengan meniru kaum realis dalam ontologinya, epistimologi kaum positivis, pandangan deterministik mengenai sifat manusia dan nomotetis metodologinya. Sementara itu, lawannya adalah tradisi "idealisme Jerman". Aliran ini menyatakan bahwa realitas tertinggi bukan kenyataan lahir yang dapat dilihat indera, tetapi justru pada "ruh" atau gagasan". Oleh karena itu epistiomologi mereka anti-positivis di mana sifat subjektivitas dari peristiwa kemanusiaan lebih penting dan menolak cara dan bentuk penelitian ilmu alam.

Kedua, adalah paradigma interpretative. Latar belakang perkembangan paradigma interpretatif ini dapat ditelusuri dari pergumulan dalam teori ilmu sosial sebelum tahun 1970 ketika telah mulai berkembang suatu tradisi besar terutama di bidang filsafat sosial dengan munculnya fenomenologi, etnometodologi dan teori-teori aksi. Aliran-aliran filsafat sosial ini selain menyatakan pendiriannya sendiri sering juga menentang aliran sosiologi positivisme. Aliran-aliran ini dapat dipahami dengan baik dengan mengenali perbedaan-perbedaan anggapan dasarnya masing-masing. Aliran *hermeneutic knowledge* atau juga dikenal dengan *paradigma interpretative*, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pengetahuan dan khususnya ilmu-ilmu sosial dan penelitian sosial dalam paradigma ini 'hanya' dimaksud untuk memahami secara sungguh--sungguh. Dasar filsafat paradigma interpretative adalah phenomenology dan hermeneutics, yaitu tradisi filsafat yang lebih menekankan minat yang besar untuk memahami. Semboyan yang terkenal dari tradisi ini adalah *"biarkan fakta bicara atas nama dirinya sendiri*". Namun dalam paradigma ini pengetahuan tidak dimaksudkan sebagai proses yang membebaskan. Misalnya saja yang termasuk dalam paradigma ini adalah ethnography dalam tradisi kalangan antropolog.

Ketiga, adalah paradigma yang disebut sebagai "*paradigma kritik*" atau *critical/ emancipatory knowledge.* Ilmu sosial dalam paradigma ini lebih dipahami sebagai proses *katalisasi* untuk membebaskan manusia dari segenap ketidakadilan. Melalui kritik yang mendasar terhadap ilmu sosial yang mendominasi (*instrumental knowledge*), paradigma kritis ini menganjurkan bahwa ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu

sosial tidak boleh dan tidak mungkin bersifat netral. Paradigma kritis memperjuangkan pendekatan yang bersifat holistik, serta menghindari cara berpikir deterministik dan reduksionistik. Oleh sebab itu, mereka selalu melihat realitas sosial dalam perspektif kesejarahan. Paradigma kritis tidak hanya terlibat dalam teori yang spekulatif atau abstrak, tetapi lebih dikaitkan dengan pemihakan dan upaya emansipasi masyarakat dalam pengalaman kehidupan mereka sehari-hari.

Implikasi dari kritik paradigma ini terhadap positivisme menyadarkan kita akan perlunya perenungan tentang moralitas ilmu dan penelitian sosial. Oleh karena teori dan penelitian sosial begitu berpengaruh terhadap praktik perubahan sosial seperti program pembangunan, maka paradigma ilmu dan penelitian sosial adalah faktor penting yang menentukan arah perubahan sosial. Itulah mengapa paradigma kritik selalu mempertanyakan "mengapa rakyat dalam perubahan sosial" selalu diletakkan sebagai *passive objects* untuk diteliti, dan selalu menjadi objek "*rekayasa sosial*" bagi penganut positivisme. Positivisme percaya bahwa rakyat tidak mampu memecahkan masalah mereka sendiri. Perubahan sosial harus didesain oleh ahli, perencana yang bukan rakyat, kemudian dilaksanakan oleh para teknisi. Rakyat dalam hal ini dilihat sebagai masalah dan hanya para ahli yang berhak untuk memecahkannya.

Sebaliknya, pandangan paradigma kritik justru menempatkan rakyat sebagai subjek utama perubahan sosial. Rakyat harus diletakkan sebagai pusat proses perubahan dan penciptaan maupun dalam mengontrol pengetahuan mereka. Inilah yang menjadi dasar sumbangan teoretik terhadap perkembangan participatory research. Kritik terhadap positivisme dilontarkan karena pengetahuan tersebut menciptakan dominasi yang irasional dalam masyarakat modern. Ilmu sosial harus mampu memungkinkan setiap orang untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya. Pemikiran tersebut mempengaruhi arah ilmu sosial kritis yang menekankan pentingnya subjektivitas manusia, pemihakan dan kesadaran dalam proses membangun teori. Paradigma kritis inilah yang memberikan legitimasi terhadap ilmu sosial pembebasan, yang tadinya dianggap 'tidak ilmiah' tersebut. Itulah sebabnya paradigma kritik sekaligus merupakan kritik terhadap paradigma dominasi dan interpretasi.

Dengan kerangka peta pembagian paradigma seperti itu, kita dapat memahami dan menyadari segenap perkembangan, asumsi, dan konflik antar berbagai teori perubahan sosial dan kritik terhadap teori-teori pembangunan yang menjadi fokus utama pembahasan-pembahasan dalam berbagai uraian pada bagian-bagian berikutnya.

Dari Paradigma Reformasi ke Transformasi

Arena perbedaan paradigma yang lain yang juga berpengaruh dalam perkembangan dan kajian teori perubahan sosial dan teori pembangunan adalah dengan meminjam pembagian paradigma yang dikembangkan oleh Paulo Freire. Ketika Freire (1970) menerbitkan buku *Pedagogy of the Oppressed* yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 1970, umumnya orang menyangka bahwa ia sedang melakukan kritik terhadap dunia pendidikan. Namun, dengan membaca karya Freire lainnya, terutama mendengar dialognya dengan tokoh *social movement* Amerika Serikat, Miles Horton, yang dibukukan dengan judul *We Making the Road by Walking* (1990), orang baru sadar bahwa Freire sedang berbicara soal yang lebih luas dari dunia pendidikan yakni mengenai paradigma perubahan sosial. Dia mengakui sangat dipengaruhi oleh Gramsci, seorang pemikir kebudayaan yang radikal yang pertama kali mengupas bahwa sesungguhnya peperangan yang terpenting pada abad modern ini adalah ideologi, yang disebutnya sebagai proses *'hegemony'*. Dari situlah orang baru menyadari bahwa Freire sedang membicarakan pendidikan dalam kaitannya dengan struktur dan sistem budaya, ekonomi, dan politik yang lebih luas.

Tugas teori sosial menurut Freire adalah melakukan apa yang disebutnya sebagai *conscientizacao* atau proses penyadaran terhadap sistem dan struktur yang menindas, yakni suatu sistem dan struktur. Proses dehumanisasi yang membunuh kemanusiaan. Gramsci menyebut proses ini sebagai upaya *counter hegemony*. Proses dehumaniasi tersebut terselenggara melalui mekanisme kekerasan, baik yang fisik dan dipaksakan, maupun melalui cara penjinakan yang halus, yang keduanya bersifat struktural dan sistemik. Artinya kekerasan dehumanisasi tidak selalu berbentuk jelas dan mudah dikenali. Kemiskinan struktural, misalnya, pada dasarnya adalah suatu bentuk kekerasan yang memerlukan analisis untuk menyadarinya. Bahkan, kekerasan sebagian besar terselenggara melalui proses hegemoni: cara pandang, cara berfikir, ideologi, kebudayaan, bahkan selera, golongan yang mendominasi telah dipengaruhkan dan diterima oleh golongan yang didominasi. Dengan begitu, pendidikan dan ilmu pengetahuan, sebagaimana kesenian, bukanlah arena netral tentang estetika belaka. Kesenian dan kebudayaan tidaklah berada dalam ruang dan masa yang steril, melainkan dalam sistem dan struktur yang bersifat hegemonik.

Freire (1970) membagi ideologi teori sosial dalam tiga kerangka besar yang didasarkan pada pandangannya terhadap tingkat kesadaran masyarakat.[55] Tema pokok gagasan Freire pada dasarnya mengacu pada suatu landasan bahwa pendidikan adalah "*proses memanusiakan manusia kembali".* Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat, menjadikan masyarakat mengalami proses *'dehumanisasi'*. Pendidikan, sebagai bagian dari sistem masyarakat, justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci Freire menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis tentang kesadaran atau pandangan hidup

[55] Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Praeger, 1986.

masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis *(magical consciousnees),* kesadaran naif (*naival consciousnees*) dan kesadaran kritis *(critical consciousness).* Bagaimana kesadaran tersebut dan kaitannya dengan sistem pendidikan dapat secara sederhana diuraikan sebagai berikut.[56]

Pertama, *kesadaran magis*, yakni suatu keadaan kesadaran, suatu teori perubahan sosial yang tidak mampu mengetahui hubungan atau kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya saja suatu teori yang percaya akan adanya masyarakat miskin yang tidak mampu, kaitan kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih mengarahkan penyebab masalah dan ketakberdayaan masyarakat dengan faktor-faktor di luar manusia, baik *natural* maupun *super natural*. Dalam teori perubahan sosial jika proses analisis teori tersebut tidak mampu mengaitkan antara sebab dan musabab suatu masalah sosial, proses analisis teori sosial tersebut dalam perspektif Freirean disebut sebagai teori sosial *fatalistik*. Suatu teori sosial bisa dikategorikan dalam model pertama ini jika teori yang dimaksud tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat. Masyarakat secara dogmatik menerima 'kebenaran' dari teoretisi sosial tanpa ada mekanisme untuk memahami 'makna' ideologi setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

Yang *kedua* adalah apa yang disebutnya sebagai "*Kesadaran Naif*". Keadaan yang dikategorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat 'aspek manusia' sebagai akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini 'masalah etika, kreativitas, *'need for achievement'* dianggap sebagai penentu dalam perubahan sosial. Jadi, dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi analisis kesadaran ini, adalah disebabkan oleh kesalahan masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki jiwa kewiraswastaan, atau tidak memiliki budaya 'pembangunan', dan seterusnya.[57] Oleh karena itu, *man power development* adalah sesuatu yang diharapkan, akan menjadi pemicu perubahan. Teori perubahan sosial dalam konteks ini berarti suatu teori yang tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik dan benar, merupakan faktor given dan, oleh sebab itu, tidak perlu dipertanyakan. Tugas teori sosial adalah bagaimana membuat dan mengarahkan agar masyarakat bisa beradaptasi dengan sistem yang sudah benar tersebut. Paradigma inilah yang dikategorikan sebagai paradigma perubahan yang bersifat reformatif dan bukanlah paham perubahan yang bersifat transformatif.

Kesadaran *ketiga* adalah yang disebut sebagai kesadaran kritis. Kesadaran ini lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari *blaming the victims* dan lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan bagaimana kaitan tersebut berakibat pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam teori perubahan sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi 'ketidakadilan' dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas teori sosial dalam paradigma kritis adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat dalam suatu proses dialog "penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik atau lebih adil". Kesadaran ini pula yang disebut sebagai kesadaran transformatif.

Diagram 01

Peta analisis kesadaran masyarakat, Paulo Freire (1970)

KESADARAN MAGIS	KESADARAN NAIF	KESADARAN KRITIS
Magical Consciousness	***Naival Consciousness***	***Critical Consciousness***
Perubahan sosial ditentukan oleh: NATURAL, SUPERNATURAL	Perubahan sosial ditentukan oleh: ETIKA, KREATIFITAS, NEED FOR ACHIEVEMENT	Perubahan sosial ditentukan oleh: SISTEM SOSIAL, EKONOMI, POLITIK & BUDAYA
Berimplikasi pada: Kesadaran Fatalistik	Berimplikasi pada: Kesadaran Reformatif	Berimplikasi pada: Kesadaran Transformatif

Dengan menggunakan paradigma yang dikembangkan Freire ini membantu kita untuk dapat memahami bagaimana logika berbagai teori sosial yang akan dibahas dikembangkan. Dengan demikian, teori modernisasi dan pembangunan serta berbagai teori pendukung setelahnya dalam epistimologi, atau menurut paradigma kesadaran Freire dapat digolongkan dalam kesadaran naif, karena bukan struktur yang lebih dipersoalkan melainkan manusianya dan oleh karenanya bersifat reformatif. Sementara itu, paradigma dan teori perubahan sosial kritik yang dibahas dalam bab berikutnya dalam perspektif Freire dapat

[56] Lihat Smith, *Themaning of Conscientacao: The Goal of Paulo Freire's Pedagogy* Amherst: Center for International Education, UMASS, 1976.

[57] Pemikiran yang bisa dikategorikan dalam analisis ini adalah para penganut modernisasi dan developmentalisme. Paham modernisasi selanjutnya menjadi aliran yang dominan dalam ilmu-i1mu sosial. Misalnya saja dalam antropologi, pikiran Kuncaraningrat tentang budaya pembangunan sangat berpengaruh bagi kalangan akademik dan birokrat. Paham modernisasi juga *'berpengaruh'* dalam pemikiran Islam di Indonesia. Adanya yang salah dalam teologi fatalistik yang dianut umat Islam dianggap sebagai penyebab keterbelakangan. Asumsi itu dianut oleh kaum modemis sejak Muhammad Abduh atau Jamaluddin Afgani sampai kelompok pembaharu saat ini seperti Nurcholish Madjid c.s. Lihat: Dr. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam,* Jakarta; Bulan Bintang, 1978. serta majalah ulasan tentang "*Gerakan Pembaharuan Islam*" dalam *Ulumul Quran* tahun 1993.

digolongkan dalam kesadaran kritis dan merupakan proses perubahan sosial menuju lebih adil yang bersifat transformatif.

Uraian pembagian peta paradigma yang dipinjam dari analisis Freire tersebut, selain dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami dan memetakan teori-teori perubahan sosial dan teori-teori pembangunan, peta paradigma tersebut juga sangat berpengaruh terhadap para praktisi pengembangan masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat di akar rumput. Banyak praktisi pembangunan dalam berhadapan maupun mengembangkan program-programnya di masyarakat dipengaruhi oleh jenis kesadaran yang mendominasi pemikiran dan analisis para praktisi sehingga sangat berpengaruh terhadap pendekatan maupun metodologi program mereka. Para praktisi pengembangan masyarakat yang mengembangkan program "pemberdayaan masyarakat", tetapi dalam melakukan analisis terhadap "masalah kemiskinan" masyarakat bersandar pada analisis kesadaran naif dan reformatif, akan melahirkan program yang berbeda dengan jika mereka dipengaruhi oleh analisis yang bersandar pada kesadaran kritis untuk transformasi sosial.

Paradigma-paradigma Sosiologi

Untuk lebih mempertajam pemahaman dan seluk-beluk peta paradigma yang dapat digunakan untuk memahami teori-teori perubahan sosial dan teori pembangunan, maka perlu juga kita memetakan secara lebih luas paradigma dalam ilmu sosiologi. Untuk itu dalam bagian ini dikemukakan dan disajikan peta paradigma sosiologi yang dikembangkan oleh Burnell dan Morgan (1979). Burnell dan Morgan membuat suatu pemetaan paradigma sosiologi yang dapat membantu kita untuk memahami 'cara pandang' berbagai aliran dan teori ilmu-ilmu sosial. Mereka membantu memecahkan sumber utama keruwetan peta teori ilmu sosial dengan mengajukan peta filsafat dan teori sosial.[58] Secara sederhana mereka mengelompokkan teori sosial ke dalam empat kunci paradigma. Empat paradigma itu dibangun atas pandangan yang berbeda mengenai dunia sosial. Masing-masing pendirian dalam kebenarannya dan melahirkan analisis tentang kehidupan sosial. Sejak tahun 1960-an sesungguhnya telah muncul berbagai aliran pemikiran sosiologi yang dalam perkembangannya justru tidak membantu untuk memperjelas peta paradigma sosiologi. Namun pada awal tahun 1970-an terjadi kebutuhan dalam perdebatan sosiologi mengenai sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat seperti halnya terjadi pada tahun 1960-an. Untuk memecahkan kebuntuan itu mereka usulkan untuk menggunakan kembali unsur penting dari perdebatan 1960-an, yakni cara baru dalam menganalisis empat paradigma sosiologi yang berbeda. Empat paradigma itu ialah: Humanis Radikal, *srukturalis radikal,* interpretatif dan Fungsionalis. Keempat paradigma itu satu dengan yang lain memiliki pendirian masing-masing, karena memang memiliki dasar pemikiran yang secara mendasar berbeda.

Sifat dan kegunaan empat paradigma tersebut adalah selain untuk memahami dan menganalisis suatu praktik sosial, juga untuk memahami ideologi dibalik suatu teori sosial. Paradigma sebagai anggapan-anggapan meta-teoretis yang mendasar yang menentukan kerangka berpikir, asumsi dan cara bekerjanya teori sosial yang menggunakannya. Di dalamnya tersirat kesamaan pandangan yang mengikat sekelompok penganut teori mengenai cara pandang dan cara kerja dan batas-batas pengertian yang sama pula. Jika ilmuwan sosial menggunakan paradigma tertentu, berarti memandang dunia dalam satu cara yang tertentu pula. Peta yang digunakan di sini adalah menempatkan empat pandangan yang berbeda mengenai sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat yang didasarkan pada anggapan-anggapan meta-teoretis. Empat paradigma itu merupakan cara mengelompokkan kerangka berpikir seseorang dalam suatu teori sosial dan merupakan alat untuk memahami mengapa pandangan-pandangan dan teori-teori tertentu dapat lebih menampilkan sentuhan pribadi dibanding yang lain. Demikian juga alat untuk memetakan perjalanan pemikiran teori sosial seseorang terhadap persoalan sosial. Perpindahan paradigma sangat dimungkinkan terjadi, dan hal ini sama bobotnya dengan pindah agama. Misalnya, apa yang pernah terjadi pada Karl Marx yang dikenal Marx tua dan Marx muda, yakni perpindahan dari humanis radikal ke strukturalis radikal Perpindahan ini disebut *epistemological break.*

Paradigma Fungsionalis

Paradigma fungsionalisme sesungguhnya merupakan aliran pemikiran yang paling banyak dianut di dunia. Pandangan fungsionalisme berakar kuat pada tradisi sosiologi keteraturan. Pendekatannya terhadap permasalahan berakar pada pemikiran kaum obyektivis. Pemikiran fungsionalisme sebenarnya merupakan sosiologi kemapanan, ketertiban sosial, stabilitas sosial, kesepakatan, keterpaduan sosial, ke-setiakawanan, pemuasan kebutuhan, dan hal-hal yang nyata (empirik). Oleh karenanya, kaum fungsionalis cenderung realis dalam pendekatannya, positivis, deterministis dan nomotetis. Rasionalitas lebih diutamakan dalam menjelaskan peristiwa atau realitas sosial. Paradigma ini juga lebih berorientasi pragmatis, artinya berusaha melahirkan pengetahuan yang dapat diterapkan, berorientasi pada pemecahan masalah yang berupa langkah-langkah praktis untuk pemecahan masalah praktis juga. Mereka lebih mendasarkan pada *"filsafat rekayasa sosial"* (*social engineering*) sebagai dasar bagi usaha perubahan sosial, serta menekankan pentingnya cara-cara memelihara, mengendalikan atau mengontrol keteraturan, harmoni, serta stabilitas

[58] Burnell and Morgan, *Sociological Paradigms and Organizational Analysis* London: Heinemann, 1979.

sosial. Paradigma ini pada dasamya berusaha menerapkan metode pendekatan pengkajian masalah sosial dan kemanusiaan dengan cara yang digunakan ilmu alam dalam memperlakukan objeknya. Paradigma ini dimulai di Prancis pada dasawarsa pertama abad ke-19 karena pengaruh karya Comte, Spencer, Durkheim, dan Pareto. Aliran ini berasal dari asumsi bahwa realitas sosial terbentuk oleh sejumlah unsur empirik nyata dan hubungan antar semua unsur tersebut dapat dikenali, dikaji, diukur dengan pendekatan dan menekankan alat seperti yang digunakan dalam ilmu alam. Menggunakan kias ilmu mekanika dan biologi untuk menjelaskan realitas sosial pada dasarnya adalah prinsip yang umumnya digunakan oleh aliran ini. Namun demikian, sejak awal abad ke-20, mulai terjadi pergeseran, terutama setelah dipengaruhi oleh tradisi pemikiran idealisme Jerman seperti pemikiran Max Weber, Geroge Simmel dan George Herbet Mead. Sejak saat itu banyak kaum fungsionalis mulai meninggalkan rumusan teoretis dari kaum objektivis dan mulai bersentuhan dengan paradigma interpretatif yang lebih subjektif. Kias mekanika dan biologi mulai bergeser melihat manusia atau masyarakat, suatu pergeseran pandangan menuju para pelaku langsung dalam proses kegiatan sosial.

Pada tahun 1940-an pemikiran sosiologi "perubahan radikal" mulai menyusupi kubu kaum fungsionalis untuk meradikalisasi teori-teori fungsionalis. Sungguhpun telah terjadi persentuhan dengan paradigma lain, paradigma fungsonalis tetap saja secara mendasar menekankan pemikiran objektivisme dan realitas sosial untuk menjelaskan keteraturan sosial. Karena persentuhan dengan paradigma lain itu sebenarnya telah lahir beragam pemikiran yang berbeda atau campuran dalam paham fungsionalis.

Paradigma Interpretatif (Fenomenologi)

Paradigma interpretatif sesungguhnya menganut pendirian sosiologi keteraturan seperti halnya fungsionalisme, tetapi mereka menggunakan pendekatan objektivisme dalam analisis sosialnya sehingga hubungan mereka dengan sosiologi keteraturan bersifat tersirat. Mereka ingin memahami kenyataan sosial menurut apa adanya, yakni mencari sifat yang paling dasar dari kenyataan sosial menurut pandangan subjektif dan kesadaran seseorang yang langsung terlibat dalam peristiwa sosial bukan menurut orang lain yang mengamati. Pendekatannya cenderung nominalis, antipositivis dan ideografis. Kenyataan sosial muncul karena dibentuk oleh kesadaran dan tindakan seseorang. Karenanya, mereka berusaha menyelami jauh ke dalam kesadaran dan subjektivitas pribadi manusia untuk menemukan pengertian apa yang ada di balik kehidupan sosial. Sungguhpun demikian, anggapan-anggapan dasar mereka masih tetap didasarkan pada pandangan bahwa manusia hidup serba tertib, terpadu dan rapat, kemapanan, kesepakatan, kesetiakawan. Pertentangan, penguasan, benturan sama sekali tidak menjadi agenda kerja mereka. Mereka terpengaruh lansung oleh pemikiran sosial kaum idealis Jerman yang berasal dari pemikiran Kant yang lebih menekankan sifat hakikat rohaniah daripada kenyataan sosial. Perumus teori ini yakni mereka yang penganut filsafat fenomenologi antara lain Dilttey, Weber, Husserl, dan Schutz.

Paradigma Humanis Radikal

Para penganut humanis radikal pada dasamya berminat mengembangkan sosiologi perubahan radikal dari pandangan subjektivis yakni berpijak pada kesadaran manusia. Pendekatan terhadap ilmu sosial sama dengan kaum interpretatif yaitu nominalis, antipositivis, volunteris dan ideografis. Kaum humanis radikal cenderung menekankan perlunya menghilangkan atau mengatasi berbagai pembatasan tatanan sosial yang ada. Namun demikian, pandangan dasar yang penting bagi humanis radikal adalah bahwa kesadaran manusia telah dikuasai atau dibelenggu oleh supra struktur idiologis di luar dirinya yang menciptakan pemisah antara dirinya dengan kesadarannya yang murni (*alienasi*), atau membuatnya dalam kesadaran palsu (*false consciousness*) yang menghalanginya mencapai pemenuhan dirinya sebagai manusia sejati. Karena itu, agenda utamanya adalah memahami kesulitan manusia dalam membebaskan dirinya dari semua bentuk tatanan sosial yang menghambat perkembangan dirinya sebagai manusia. Penganutnya mengecam kemapanan habis-habisan. Proses-proses sosial dilibat sebagai tidak manusiawi. Untuk itu mereka ingin memecahkan masalah bagaimana manusia bisa memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka dalam pola-pola sosial yang mapan untuk mencapai harkat kemanusiaannya. Meskipun demikian, masalah-masalah pertentangan struktural belum menjadi perhatian mereka Paulo Freire misalnya dengan analisisnya mengenai tingkatan kesadaran manusia dan usaha untuk melakukan "konsientisasi", yang pada dasarnya membangkitkan kesadaran manusia akan sistem dan struktur penindasan, dapat dikategorikan dalam paradigma humanis radikal.

Paradigma Strukturalis Radikal

Penganut paradigma strukturalis radikal seperti kaum humanis radikal memperjuangkan perubahan sosial secara radikal tetapi dari sudut pandang objektivisme. Pendekatan ilmiah yang mereka anut memiliki beberapa persamaan dengan kaum fungsionalis, tetapi mempunyai tujuan akhir yang saling berlawanan. Analisisnya lebih menekankan pada konflik struktural, bentuk-bentuk penguasaan dan pemerosotan harkat kemanusiaan. Karenanya, pendekatannya cenderung realis, positivis, determinis, dan nomotetis.

Kesadaran manusia yang bagi kaum humanis radikal penting, justru oleh mereka dianggap tidak penting. Bagi kaum strukturalis radikal yang lebih penting justru hubungan-hubungan struktural yang

terdapat dalam kenyataan sosial yang nyata. Mereka menekuni dasar-dasar hubungan sosial dalam rangka menciptakan tatanan sosial baru secara menyeluruh. Penganut paradigma strukturalis radikal terpecah dalam dua perhatian, pertama lebih tertarik pada menjelaskan bahwa kekuatan sosial merupakan kunci untuk menjelaskan perubahan sosial. Sebagian mereka lebih tertarik pada keadaan penuh pertentangan dalam suatu masyarakat. Paradigma strukturalis radikal diilhami oleh pemikiran setelah terjadinya perpecahan epistemologi dalam sejarah pemikiran Marx, di samping pengaruh Weber. Paradigma inilah yang menjadi bibit lahirnya teori sosiologi radikal. Penganutnya antara lain Luis Althusser, Polantzas, Colletti, dan beberapa penganut kelompok kiri baru.

Diagram 02

Peta Analisis Sosial Barnel & Morgan (1979)

SUBYEKTIVIS	Keteraturan Subyektivis	**PARADIGMA INTERPRETATIF (FENOMENOLOGI)**	**PARADIGMA FUNGSIONALISME**	Keteraturan Obyektivis	OBYEKTIVIS
	Pertentangan Subyektivis	**PARADIGMA HUMANIS RADIKAL**	**PARADIGMA STRUKTURALIS RADIKAL**	Pertentangan Obyektivis	

Dalam dunia sosiologi, terdapat pula beberapa paradigma antara lain paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Dalam membahas masalah ini yang pertama akan dijelaskan pengertian paradigma dan perkembangannya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya akan diuraikan lebih detail dua paradigma yang sangat populer dalam dunia pendidikan, yaitu paradigma perilaku sosial atau behaviorisme, dan perspektif konstruktivisme.

1. Pengertian Paradigma dan Perkembangannya

Paradigma adalah cara seseorang memandang kenyataan dalam kehidupan. Ritzer (1983) memberi pengertian paradigma sebagai cara bertanya, cara menjawab, menentukan masalah, dan memecahkannya. Di dalam paradigma mengandung berbagai nilai dan asumsi yang dijadikan dasar seseorang mengajukan pertanyaan dan menjawabnya.

Istilah paradigma populer karena pemikiran Thomas Kuhn (1970) dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* ketika menjelaskan revolusi ilmu pengetahuan. Kuhn menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dari masa awal pembentukkan, kemudian memperoleh pengakuan, dan kemudian berkembang menjadi sebuah paradigma. Pada tahap ini sebuah ilmu pengetahuan diakui sebagai suatu kebenaran dan dijadikan sebagai acuan masyarakat dalam merumuskan pertanyaan dan cara menjawab.

Pada saat inilah sebuah teori ditempatkan sebagai sebuah paradigma, yakni sebuah pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) dari suatu cabang ilmu. *Normal science* adalah periode berikutnya, yang dalam hal ini terjadi akumulasi ilmu pengetahuan. Para ilmuwan bekerja berdasarkan paradigma yang berpengaruh pada zamannya, asumsi yang mendasari dijadikan sebagai dasar memahami kenyataan.

Namun dalam perkembangannya, sejalan dengan perubahan masyarakat, apa yang diyakini sebagai kebenaran itu kemudian mengalami kegoncangan hingga kemudian mengalami kekacauan (*anomali*) karena asumsi-asumsi paradigma lama tidak lagi mampu menjawab persoalan yang muncul. Akibatnya timbul krisis karena validitas paradigma lama benar-benar tidak lagi bisa dipertahankan. Pada saatnya inilah terjadi apa yang disebut Kuhn dengan masa terjadinya revolusi ilmu pengetahuan. Pada saat revolusi ilmu pengetahuan terjadi, maka asumsi dan dasar-dasar pemikiran paradigma yang berlaku saat itu tidak lagi di anggap relevan untuk merumuskan pertanyaan dan mengajukan jawaban terhadap fenomena atau kehidupan yang ada. Setelah terjadi revolusi akan ditemukan teori baru, dan dari sinilah dimulai muncul paradigma baru.

Dalam ilmu sosial, menurut Ritzer ada tiga paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma pertukaran sosial.

1. **Paradigma fakta sosial**, berakar pada pemikiran Emile Durkheim (Perspektif Durkhemian) dan mendasarkan pada filsafat positivisme dari August Comte yang menyatakan segala sesuatu serba terukur dan berkembang mengikuti hukum sebab akibat. Tindakan seseorang diasumsikan merupakan fungsi dari sistem atau struktur dalam masyarakat.
2. **Paradigma definisi sosial**, berdasar dari Max Weber. Asumsi dasarnya mengatakan bahwa tindakan seseorang bukan karena faktor dari luar, melainkan datang dari dorongan diri sendiri. Tindakan seseorang merupakan hasil dari keinginan, motivasi, harapan, nilai-nilai serta berbagai bentuk penafsiran manusia sebagai individu terhadap dunia dimana dia hidup.
3. **Paradigma pertukaran sosial**, muncul dari gagasan Skinner. Menurut paradigma ini manusia bertindak berdasarkan stimulus dari luar. Penganut perspektif ini memandang siapa mendapat apa. Mereka berasumsi bahwa stimulus yang bagus akan menghasilkan respon yang bagus pula, sebaliknya stimulus yang buruk akan menghasilkan respon yang buruk pula.

2. Paradigma Behavioristik

Dalam dunia pendidikan selama ini dikenal paradigma klasik yang disebut dengan paradigma behavioristik. Paradigma ini muncul terutama pada tahun (1930-an. Paradigma ini dipelopori oleh Pavlov (1849-1936), Watson (1878-1958), Skinner dan Thorndike (1874-1949). Paradigma ini cukup berpengaruh dalam dunia pendidikan sampai pada tahun 1960-1970-an di Barat dan bahkan sampai 1990-an di Indonesia. Paradigma behavioristik atau perilaku sosial ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk pengembangan manajemen pendidikan yang mendasarkan pada pemikiran positivisme empirisme, teknokrasi dan manajerialisme. Ia merupakan reaksi terhadap model pembelajaran sebelumnya yang menganut perpektif *gestalt* yang memfokuskan pada cara kerja pemikiran kognitif. Perspektif yang dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky ini dianggap oleh penganut paradigma behavioristik memiliki kelemahan karena tidak memfokuskan langsung kepada gerakan-gerakan tubuh dan gejala-gejala internal tubuh yang bisa diamati.

3. Paradigma Kontruktivistik

Paradigma kontruktivistik pada filasafat humanisme dan fenomenologi. Dalam perkembangannya, paradigma ini juga mengambil sejumlah gagasan yang yang dikembangkan oleh filsafat rasionalisme dan bahkan juga positivisme, meskipun tidak sedominan seperti dalam paradigma behavioristik. Paradigma ini dikembangkan oleh Chomsky dalam linguistik, Simon dalam *Computer Scientist*, dan Bruner dalam pengetahuan kognitif dan belakangan beralih ke pendekatan sosial budaya. Dalam pendidikan dikaitkan dengan nama-nama seperti Piaget dan Vygotsky. Ahli psikkoanalisis juga bergabung dalam paradigma ini dan menambah perspektif ini menjadi lebih kaya, sehingga kemudian popularitas paradigma ini menggeser popularitas paradigma behavioristik pada tahun 1960-an. Paradigma konstruktivisme muncul sebagai reaksi kelemahan paradigma behavioristik. Penganut paradigma konstruktivisme memandang pembelajaran berdasar paradigma behavioristik hanya menghasilkan pendidikan atau pembelajaran yang terfokus pada perilaku yang bisa diamati. Paradigma behavioristik memiliki kelemahan dalam mencermati perilaku yang sulit diamati seperti afeksi, pemahaman (*understanding*), cara berfikir dan memandang masalah (*insight*)

EPILOG

Paradigma-paradigma sosiologi tersebut sangat mempengaruhi bagaimana seorang pemikir sosial dalam mengembangkan teori sosial. Misalnya saja, penganut paradigma interpretatif atau sosiologi fenomenologis akan mengembangkan teori perubahan sosial yang sama sekali berbeda dengan penganut fungsionalisme. Penganut aliran fenomenologis, karena dasar filsafatnya adalah mencoba memahami dan mendengarkan kehendak masyarakat, maka perubahan sosial lebih diutamakan ke arah yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut. Berbagai metodologi dikembangkan, seperti "*etnografi*" ataupun *"riset observasi*", untuk menangkap dan memahami simbol-simbol kehendak masyarakat.

Sementara bagi penganut fungsionalisme yang bersandarkan pada paradigma positivisme, mereka merasa berhak untuk melakukan "rekayasa sosial" sehingga akan berpengaruh ketika mereka berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat dalam proses perubahan sosial model positivisme dan rekayasa sosial, ditempatkan sebagai "objek" perubahan. Oleh karenanya, mereka diarahkan, dikontrol, direncanakan, serta dikonstruksi oleh kalangan ilmuwan, birokrat, dan bahkan koordinator program LSM yang menganut paham positivisme tersebut. Mereka memisahkan antara masyarakat sebagai objek perubahan, ilmuwan dan peneliti atau bahkan tenaga lapangan sebagai tenaga-tenaga ilmiah yang objektif, rasional, tidak memihak, dan bebas nilai, dan birokrat atau negara dalam proses perubahan sosial berperan sebagai pengambil-pengambil keputusan. Dengan demikian, proses perubahan sosial penganut paradigma ini, teori perubahan sosialnya bersifat elitis. Demikian halnya, penganut paradigma struktural akan memahami masalah sosial dan mengajukan teori perubahan sosial yang berbeda dibanding teori yang diajukan para penganut fungsionalis maupun fenomenologis. Bagi para penganut paradigma kritis transformatif, teori perubahan

sosial dimaksudkan sebagai proses yang melibatkan korban untuk perubahan transformasi sistem dan struktur menuju ke sistem yang lebih adil. Dengan demikian proses perubahan sosial berwatak subjektif, memihak, tidak netral, dan untuk terciptanya keadilan sosial dan oleh karenanya berwatak populis.

Dengan memahami berbagai peta paradigma perubahan sosial tersebut, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami apa motivasi dan dasar pikiran suatu teori perubahan sosial dan pembangunan. Dengan memahami paradigma sosiologi yang dianut oleh pencetusnya, kita juga dapat memahami berbagai metodologi dan pendekatan proyek pembangunan maupun aksi sosial di akar rumput. Hal ini karena, pada dasarnya, metodologi dan teknik program perubahan sosial maupun pembangunan, serta teori-teori perubahan sosial yang dikembangkan oleh seseorang atau suatu organisasi sangat konsisten dalam mengikuti paradigma yang diyakini maupun yang dianutnya. Paradigma sosiologis yang dianut tidak saja mempengaruhi bagaimana suatu teori sosial memberi makna terhadap realitas sosial, tetapi juga mempengaruhi visi dan misi suatu teoti sosial, bahkan mempengaruhi pula penentuan pendekatan ketika seseorang atau suatu organisasi melakukan penelitian serta aksi praktik manajemen pelaksanaan suatu teori sosial dalam bentuk program pengembangan masyarakat ataupun pembangunan, maupun pilihan pendekatan evaluasi terhadap program tersebut.[]

PETA DAN LANGKAH PRAXIS ANALISIS SOSIAL

Apakah Analisa Sosial Itu?

Suatu proses analisa sosial adalah usaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan-hubungan struktural, kultural dan historis. Sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas yang sedang dihadapi. Suatu analisis pada dasarnya "mirip" dengan sebuah "penelitian akademis" yang berusaha menyingkap suatu hal atau aspek tertentu. Dalam proses ini yang dilakukan bukan sekedar mengumpulkan data, berita atau angka, melainkan berusaha membongkar apa yang terjadi sesungguhnya, bahkan menjawab mengapa demikian, dan menemukan pula faktor-faktor apa yang memberikan pengaruh kepada kejadian tersebut. Lebih dari itu, analisis sosial, seyogyanya mampu memberikan prediksi ke depan: kemungkinan apa yang tetjadi.

Analisa sosial merupakan upaya untuk mengurai logika, nalar, struktur, atau kepentingan dibalik sebuah fenomena sosial. Analisa sosial bukan semata deskripsi sosiologis dari sebuah fenomena sosial. Analisa sosial hendak menangkap logika struktural atau nalar dibalik sebuah gejala sosial. Analisa sosial dengan demikian material, empiris, dan bukan sebaliknya, mistis, atau spiritualistik. Analisa sosial menafsirkan gejala sosial sebagai gejala material. Kekuatan dan gagasan ideologis dibalik gejala sosial harus dianalisa.

Wilayah Analisa Sosial

1. Sistem-sistem yang beroperasi dalam suatu masyarakat.
2. Dimensi-dimensi obyektif masyarakat (organisasi sosial, lembaga-lembaga sosial, pola perilaku, kekuatan-kekuatan sosial masyarakat)
3. Dimensi-dimensi subyektif masyarakat (ideologi, nalar, kesadaran, logika berpikir, nilai, norma, yang hidup di masyarakat).

Pendekatan Dalam Analisa Sosial

1. **Historis**: dengan mempertimbangkan konteks struktur yang saling berlainan dari periode-periode berbeda, dan tugas strategis yang berbeda dalam tiap periode.
2. **Struktural**: dengan menekankan pentingnya pengertian tentang bagaimana masyarakat dihasilkan dan dioperasikan, serta bagaimana pola lembaga-lembaga sosial saling berkaitan dalam ruang sosial yang ada.

Bagaimana Hasil Analisa Sosial?

Apakah hasil kesimpulan dari analisa sosial bersifat final? tentu saja tidak. Karena hasil dari analisa tersebut dapat dikatakan hanya merupakan kebenaran tentatif, yang bisa berubah sesuatu dengan fakta atau data dan temuan-temuan yang baru. Dengan demikian, analisa ini bersifat dinamis, terus bergerak, memperbarui diri, dikaji ulang dan terus harus diperkuat dengan fakta-fakta pendukung. Hasil analisa bukan suatu dogma, atau sejenis kebenaran tunggal.

Batas Analisa Sosial

1. Analisa sosial bukanlah kegiatan monopoli intelektual, akademisi, atau peneliti. Siapapun dapat melakukan analisa sosial.
2. Analisa sosial tidaklah bebas nilai.
3. Analisa sosial memungkinkan kita bergulat dengan asumsi-asumsi kita, mengkritik, dan menghasilkan pandangan-pandangan baru.

Siapa Pelaku Analisa Sosial?

Semua pihak atau pelaku sosial yang menghendaki untuk mendekati dan terlibat langsung dengan realitas sosial. Bicara tentang analisis sosial, pada umumnya selalu dikaitkan dengan dunia akademik, kaum cendikiawan, ilmuwan atau kalangan terpelajar lainnya. Ada kesan yang sangat kuat bahwa analisis sosial hanya milik "mereka". Masyarakat awam tidak punya hak untuk melakukannya. Bahkan kalau melakukan, maka disediakan mekanisme sedemikian rupa, sehingga hasil analisis awam itu dimentahkan.

Pemahaman yang demikian, bukan saja keliru, melainkan mengandung maksud-maksud tertentu yang tidak sehat dan penuh dengan kepentingan. Pengembangan analisis sosial di sini, justru ingin membuka sekat atau dinding pemisah itu, dan memberikatmya kesempatan kepada siapapun untuk melakukannya. Malahan mereka yang paling dekat dengan suatu kejadian, tentu akan merupakan pihak yang paling kaya dengan data dan informasi. Justru analisis yang dilakukan oleh mereka yang dekat dan terlibat tersebut akan lebih berpeluang mendekati kebenaran. Dengan demikian, tanpa memberikan kemampuan yang cukup kepada masyarakat luas untuk melakukan analisis terhadap apa yang terjadi di lingkungan mereka, atau apa yang mereka alami, maka mereka menjadi sangat mudah "dimanipulasi", "dibuat bergantung" dan pada gilirannya tidak bisa mengambil sikap yang tepat.

Mengapa Gerakan Sosial Membutuhkan Analisa Sosial ?

Kalau kita pahami secara lebih mendalam, aktivitas sosial adalah sebuah proses penyadaran masyarakat dari suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lain yang lebih baik (baca: kesadaran kritis). Kalau kita menggunakan istilah yang lebih populer, aktivitas semacam itu bisa juga disebut sebagai aktivitas pemberdayaan *(Empowerment)* untuk suatu entitas atau komunitas masyarakat tertentu. Dari statemen tersebut, maka akan termuat suatu makna bahwa sebenarnya kesadaran kritis atas realitas sosial ini pada dasarnya ada pada setiap diri manusia. Hanya saja tingkat kesadaran kritis pada masing-masing orang itu kadarnya berbeda-beda. Dan aktivitas sosial adalah alat untuk menyadarkan atau memotivasi bagi munculnya kesadaran tersebut. Meskipun, sebagaimana kita ketahui, bahwa membangun kesadaran kritis atas realitas sosial itu tidaklah semudah membalik tangan, karena kesadaran itu dilingkupi oleh persoalan-persoalan (sosial dan sebagainya), yang senantiasa membelenggunya. Kalau kita gambarkan, maka persoalan yang melingkupi kesadaran kritis akan realitas sosial itu adalah sebagai berikut:

Diagram 03: Peta Aktivitas Analisis Sosial, H.A. Taufiqurrahman (1999)

A: Kesadaran Kritis
Out-put: Aktivis Gerakan Sosial yang Kritis akan Realitas Sosial

Oleh karena itu, untuk masuk pada titik sentral kesadaran kritis atas realitas sosial sebagaimana dimaksud dalam gerakan sosial di atas, maka tidak mungkin untuk tidak membongkar, mengurai dan menganalisa persoalan-persoalan yang ada disekitarnya. Pada konteks inilah kompetensi analisis sosial dalam gerakan sosial.

Signifikansi Analisa Sosial

1. Untuk mengidentifikasikan dan memahami persoalan-persoalan yang berkembang (ada) secara lebih mendalam dan seksama (teliti); berguna untuk membedakan mana akar masalah (persoalan mendasar) dan mana yang bukan, atau mana yang merupakan masalah turunan.
2. Akan dapat dipakai untuk mengetahui potensi yang ada (kekuatan dan kelemahan) yang hidup dalam masyarakat.
3. Dapat mengetahui dengan lebih baik (akurat) mana kelompok masyarakat yang paling dirugikan (termasuk menjawab mengapa demikian).
4. Dari hasil analisa sosial tersebut dapat proyeksikan apa yang mungkin akan terjadi, sehingga dengan demikian dapat pula diperkirakan apa yang harus dilakukan.

Orientasi Analisa Sosial

1. Analisa sosial jelas didedikasikan dan diorientasikan untuk keperluan perubahan.
2. Analisa sosial adalah watak mengubah yang dihidupkan dalam proses identifikasi. Justru karena itu pula, maka menjadi jelas bahwa analisa sosial merupakan salah satu titik simpul dari proses mendorong perubahan.
3. Analisa sosial akan menghasilkan semacam peta yang memberikan arahan dan dasar bagi usaha-usaha perubahan.

Prinsip-Prinsip Analisa Sosial

1. Analisa sosial bukan suatu bentuk pemecahan masalah, melainkan hanya diagnosis (pencarian akar masalah), yang sangat mungkin digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah, karena analisa sosial memberikan pengetahuan yang lengkap, sehingga diharapkan keputusan atau tindakan yang diambil dapat merupakan pemecahan yang tepat.
2. Analisa sosial tidak bersifat netral, selalu berasal dari keberpihakan terhadap suatu keyakinan. Soal ini berkait dengan perspektif, asumsi-asumsi dasar dan sikap yang diambil dalam proses melakukan analisa. Karena pernyataan di atas, maka analisa sosial dapat digunakan oleh siapapun.
3. Analisa sosial lebih memiliki kecenderungan mengubah; tendensi untuk menggunakan gambaran yang diperoleh dari analisa sosial bagi keperluan tindakan-tindakan mengubah, maka menjadi sangat jelas bahwa analisa sosial berposisi sebagai salah satu simpul dan siklus kerja transformasi.
4. Analisa sosial selalu menggunakan ‘tindakan manusia’ sebagai sentral atau pusat dalam melihat suatu fenomena nyata.

Tahap-Tahap Analisa Sosial

1. Tahap menetapkan posisi, orientasi: pada intinya dalam tahap ini, pelaku analisa perlu mempertegas dan menyingkap motif serta argumen (ideologis) dari tindakan analisa sosial.
2. Tahap pengumpulan dan penyusunan data: tujuan dan maksud dari tahap ini, agar analisa memiliki dasar rasionalitas yang dapat diterima akal sehat. Ujung dari pengumpulan data ini adalah suatu upaya untuk merangkai data, dan menyusunnya menjadi diskripsi tentang suatu persoalan.
3. Tahap analisa: pada tahap ini, data yang telah terkumpul diupayakan untuk dicari atau ditemukan hubungan diantaranya.

Diagram 04

Peta Proses Analisis Sosial, H.A. Taufiqurrahman (1999)
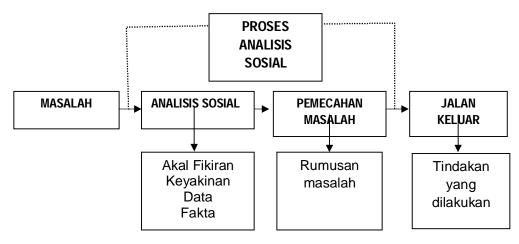
Apa Yang Penting Ditelaah dalam Melakukan Analisa Sosial

1. Kaitan Historitas (Sejarah Masyarakat).
2. Kaitan Struktur.
3. Nilai.
4. Reaksi yang berkembang dan arah masa depan.

Model Telaah dalam Analisa Sosial

1. **Telaah Historis,** dimaksudkan untuk melihat ke belakang. Asumsi dasar dari telaah ini bahwa suatu peristiwa tidak dengan begitu saja hadir, melainkan melalui sebuah proses sejarah. Dengan ini, maka kejadian, atau peristiwa dapat diletakkan dalam kerangka masa lalu, masa kini dan masa depan.

2. **Telaah Struktur.** Biasanya orang enggan dan cemas melakukan telaah ini, terutama oleh stigmatisasi tertentu. Analisa ini sangat tajam dalam melihat apa yang ada, dan mempersoalkan apa yang mungkin tidak berarti digugat. Struktur yang akan dilihat adalah: ekonomi (distribusi sumberdaya); politik (bagaimana kekuasaan dijalankan); sosial (bagaimana masyarakat mengatur hubungan di luar politik dan ekonomi); dan budaya (bagaimana masyarakat mengatur nilai).
3. **Telaah Nilai.** Penting pula untuk diketahui tentang apa nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat. Mengapa demikian. Dan siapa yang berkepetingan dengan pengembangan nilai-nilai tersebut.
4. **Telaah Reaksi.** Melihat reaksi yang berkembang berarti mempersoalkan mengenai siapa yang lebih merupakan atau pihak mana yang sudah bereaksi, mengapa reaksi muncul dan bagaimana bentuknya. Telaah ini penting untuk menuntun kepada pemahaman mengenai "peta" kekuatan yang bekerja.
5. **Telaah Masa Depan.** Tahap ini lebih merupakan usaha untuk memperkirakan atau meramalkan, apa yang terjadi selanjutnya. Kemampuan untuk memberikan prediksi (ramalan) akan dapat menjadi indikasi mengenai kualitas tahap-tahap sebelumnya.

Diagram 05
Peta Kerangka Pikir Analisas Sosial

Paradigma Konsensus		**Paradigma Konflik**
Konservatif	**Liberal**	**Konflik/ Transformis**
Dalam masyarakat ada kelas-kelas sosial, dan ada kerukunan kelas		Ada kelas sosial, ada konlik antar-kelas
Struktur sosial merupakan hasil konsensus antar anggota masyarakat, struktur sosial tidak pernah dipemasalahkan, bahkan dipertahankan		Struktur sosial adalah hasil konstruksi kelas sosial tertentu, yang dipaksakan untuk ditaati oleh masyarakat. Struktur sosial selalu dipermasalahkan
Akar pemasalahan terletak pada manusia itu sendiri, atau karena sesuatu kekuatan suprasejarah	Akar permasalahan terletak pada kesenjangan kesadaran, kurangnya kesempatan, kurangnya keterampilan, kesempatan, dan lainnya.	Akar permasalahan berakar pada struktur sosial yang tidak adil, menindas.
Meringankan beban korban	Modernisasi sosial	Mentransformasikan struktur yang tidak adil ke struktur yang adil
Pembagian sembako, bakti sosial, pengobatan gratis, khotbah, bantuan untuk kelaparan, pelayanan kaum cacat, himbauan moral, dan lainnya	Pelatihan, kurus, pembangunan infrastruktur	Pengorganisiran masyarakat, pendidikan politik, gerakan sosial, advokasi kebijakan,gerakan massa, pemogokan, pemboikotan, gagasan-gagasan sosial dan struktur alternatif
Masyarakat itu sendiri	Kaum elite, pemerintah, agamawan, LSM, dan lainnya	Masyarakat dan kepemimpinan perubahan/gerakan
Otoritas	Instruktif, konsultatif	Delegatif, kepemanduan, trasnformatif
Kasinh sayang, menolong orang miskin, kepedulian, rasa kemanusiaan	Persamaan hak dan kesempatan	Kesadaran struktural
Karitatif	Reformatif	Transformatif

Diagram 06
Model-Model Perubahan dan Implikasinya

Implikasi	Model EKonomi	Model Sosial	Model Politik
Ekonomi	Akumulasi kapital/kapitalisasi	(Re)Distribusi	Transformasi struktural
Politik	Stabilitas	Bantuan	Mobilisasi/trasnformasi politik
Kebudayaan	Pertumbuhan	Kesamaan	Trasnformasi kultural/Imajinasi
Transformasi	Pertumbuhan infrastruktur	Penguatan daya beli	Struktural
Missi	Panggilan kelas menengah	Bekerja dengan masyarakat marjinal	Mendorong trasnformasi struktural dalam semua level
Pendidikan	Peningkatan infrastruktur sekolah	Pemberian atau pencarian beasiswa	Akses struktural Pendidikan

Diagram 07

Model Perubahan Interpretatif

Variabel	Tradisional	Liberal	Radikal
Pandangan waktu	Siklis	evolusioner	Transformatif
Pandangan ruang	organis	pluralis	Interdependen
Prinsip pengatur	Otoritarian/ketertiban	Managerial/ Keseimbangan	Partisipatif/masyarakat
Perubahan utama	Biologis/ Tubuh	mekanistik	Transformasional
Sikap terhadap konflik	Menyerap atau menolak	Mengawasi	Mengelola konflik

Keterangan:

Tradisional
1. Siklis: kepingan-kepingan episode (maa lalu, kini, masa depan) dintegrasikan dalam keseluruhan sejaah
2. Organis: hanya ada susunan tunggal yang diatur sesuai kepentingan umum
3. Otoritarian: masyarakat dipandang seperti piramida yang dikendalikan dari puncak dengan sedikit partisipasi bawah
4. Biologis: masyarakat dipandang seperti organisme yang analog dengan tubuh manusia
5. Menyimpang: perubahan yang mengubah siklus sejarah dianggap menyimpang

Liberal
1. Evolusioner: perkembangan sejarah bersifat linear. Gerak sejarah bukan siklis, tapi kemajuan/progresif
2. Pluralis: ruang sosial disusun berdaasarkan berbagai macam bagian yang tidak terpisah dan tak berhubungan
3. Manajerial: menjaga keseimbangan semua unsur atau bagian
4. Mekanistik: masyarakat dipandang sebagai mesin yang bekerja
5. Pengawasan: perubahan sosial merupakan kehendak sejarah, namun tidak mengubah struktur dasar yang mendasarinya. Perubahan selalu diawasi agar tidak menyimpang

Transformatif
1. Transformatif: setiap peristiwa sejaah dipandang secara fundamental menimbulkan tahapan baru, masa lalu, sekarang, dan masa depan, terkait secara dialektik
2. Interdependen: masyarakat dianggap sebagai keseluruhan sistem yang kreatif, dialektik.
3. Partisipasi: kepentingan umum merupakan input masyarakat, hasil definisi masyarakat
4. Transformasi kultural: masyarakat terbentuk secara kreatif melalui dialog maupun cita-cita utopis anggotanya.
5. Kreatif: konflik merupakan penggerak sejarah, dan kemajuan.

Tahap Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial

Pada tahap ini, setelah berbagai aspek tersebut ditemukan, maka pada akhirnya suatu kesimpulan akan diambil; kesimpulan merupakan gambaran utuh dari suatu situasi, yang didasarkan kepada hasil analisa. Dengan demikian kualitas kesimpulan sangat bergantung dari proses tahap-tahap analisa, juga tergantung pada kompleksitas isu, kekayaan data dan akurasi data yang tersedia, ketepatan pertanyaan atau rumusan terhadap masalah, dan kriteria yang mempengaruhi penilaian-penilaian alas unsur-unsur akar masalah.

Dasar Penarikan Kesimpulan Analisa Sosial

Yang tidak kalah penting adalah menemukan apa yang menjadi akar masalah. Untuk menemukan akar masalah dapat dituntun dengan pertanyaan: *mengapa?* Untuk sampai kepada akar masalah, maka penting dilakukan kualifikasi secara ketat, guna menentukan faktor mana yang paling penting. Kesimpulan tidak lain berbicara mengenai faktor apa yang memberikan pengaruh paling dominan (paling kuat) dan demi kepentingan siapa unsur akar tersebut bekerja. Sebagaimana diungkapkan di depan, kesimpulan tidak menjadi sesuatu yang final, melainkan akan mungkin diperbaiki menurut temuan-temuan atau data baru.[]

MATERI 09
ANALISIS WACANA MEDIA & KORPORASI MEDIA

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

Apakah Wacana itu?

- Komunikasi pikiran dengan kata-kata; ekspresi ide-ide atau gagasan-gagasan; konversasi atau percakapan.
- Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subjek studi atau pokok telaah.
- Risalat tulis; disertasi formal; kuliah; ceramah; khotbah. (Webster, 1983: 522).

Sudjiman, 1993: 6

- Wacana ialah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, biasanya terdiri atas seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian yang satu dengan yang lain.
- Komunikasi itu dapat menggunakan bahasa lisan, dan dapat pula menggunakan bahasa tulisan.

Firth, Samsuddin, 1992: 2

- *Language as only meaningfull in its context of situation.* Makna suatu bahasa berada pada rangkaian *konteks* dan *situasi*.
- Pembahasan wacana pada dasarnya merupakan pembahasan terhadap hubungan antara konteks-konteks yang terdapat di dalam teks.
- Pembahasan itu bertujuan menjelaskan hubungan antara kalimat atau antara ujaran *(utterances)* yang membentuk wacana.

Foucault, Mills: 1994

- **Kontekstual Teoretis**; Wacana berarti domain umum dari semua pernyataan, yaitu semua ujaran/ teks yang mempunyai makna & efek dalam dunia nyata.
- **Konteks Penggunaan**; Wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokan kedalam kategori konseptual tertentu (Misalnya: *imperealisme/ feminisme*)
- **Metode Penjelasan**; Wacana berarti suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan.

Kebutuhan Dasar Wacana

- Keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain mengenai suatu hal.
- Keinginan untuk meyakinkan seseorang mengenai kebenaran suatu hal dan mempengaruhi sikap/pendapat orang lain.
- Keinginan untuk mendeskripsikan cita-rasa suatu bentuk, wujud, objek.
- Keinginan untuk menceritakan kejadian atau peristiwa yang terjadi. (Keraf, 1995: 6).

Bentuk Retorika Wacana

- **Wacana Transaksional**; jika yang dipentingkan ialah 'isi' komunikasi.
- **Wacana Interaksional**; jika yang dipentingkan hubungan timbal balik antara penyapa (*addresses*) dan pesapa (*addressee*). (Sudjiman, 1993: 6).

Otoritas Analisis Wacana

- **Dalam Linguistik**; Analisis wacana digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur yang luas melebihi batasan-batasan kalimat. (Sunarto, 2001: 119-120)
- **Dalam Teks Tertulis**; Analisis wacana bertujuan untuk mengeksplisitkan norma-norma & aturan-aturan bahasa yang implisit. Analisis wacana bertujuan untuk menemukan unit-unit hierarkis yang membentuk suatu struktur diskursif (Mills,1994)

Bahasa

- Manusia adalah mahluk berfikir. Demikian tesis klasik yang kita temukan dalam dunia filsafat. Konsekuensi logis dari tesis ini, bahwa manusia adalah mahluk berbahasa.
- Hubungan pikiran dan bahasa sangat erat. Bahasa menunjukkan jalan pikiran seseorang.

- Dalam bahasa terdapat sesuatu kekuatan yang tidak tampak yang diberi nama komunikasi. (Loren Bagus, 1990).

Filsafat Bahasa

- Dalam filsafat bahasa dikatakan, bahwa orang yang mencipta realitas dan menatanya lewat bahasa.
- Bahasa mengangkat kepermukaan hal yang tersembunyi sehingga menjadi kenyataan.
- Bahasa dapat dipakai untuk menghancurkan realitas orang lain. Bahasa dapat menjadi tiran. (Loren Bagus, 1990).

Fungsi Bahasa

- **Fungsi *Ideasional***: untuk membentuk, mempertahankan dan memperjelas hubungan diantara anggota masyarakat.
- **Fungsi *Interpersonal***: untuk menyampaikan informasi diatara anggota masyarakat.
- **Fungsi *Tekstual***: untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian diskursus (wacana) yang relevan dengan situasi *(features of the situation).* (Halliday, 1972: 140-165)

Makna

- Makna merupakan kata yang subjektif (Jalaluddin Rahmat, 1996)
- Para ahli filsafat dan linguis, membedakan antara struktur logis dan struktur bahasa, sehingga memudahkan kita untuk membedakan antara ungkapan yang tidak mengandung makna (*meaningless*) dan yang mengandung arti (*meaningfull*). (Mustansyir, 2001: 153-154)

Makna dalam Konteks Wacana

- Dalam konteks wacana, makna dapat dibatasi sebagai "hubungan antara bentuk dengan hal/ barang yang diwakilinya (*referen*-nya)" (Keraf, 1994: 25)
- Kata *rumah*: adalah *bentuk/ ekspresi*. Barang yang diwakili oleh kata *rumah*: sebuah bangunan yang beratap, berpintu, berjendela yang menjadi tempat tinggal manusia. Barang itu disebut *referen*. Hubungan bentuk dan referen menimbulkan *makna/ referensi.*
- *Makna* atau *referensi* kata *rumah* timbul akibat hubungan antara bentuk itu dengan pengalaman-pengalaman non linguistik atau barang yang ada di alam.

Jenis-jenis Makna

- Makna Emotif (*emotive meaning*)
- Makna Kognitif (*cognitive meaning)*
- Makna Deskriptif (*descriptive meaning)*
- Makna Referensial (*referential meaning)*
- Makna Piktorial (*pictorial meaning)*
- Makna Kamus (*dictionary meaning)*
- Makna Samping (*fringe meaning)*
- Makna Inti (*core meaning)* (Shipley, 1962)

Makna Denotatif & Konotatif

- **Makna *Denotatif***; Kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan.
- **Makna *Konotatif***; Kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu atau nilai rasa tertentu, disamping makna dasar yang umum. (Keraf, 1994: 27-31)

Perubahan & Pemberian Makna

- Makna yang dikode oleh pemirsa terjadi dalam ruang yang berbeda dan individu yang berbeda berdasarkan pada kemampuan kognitif dan kemampuan afektif pemirsa.
- Makna yang dikode oleh pemirsa tergatung pada bagaimana individu melakukan dekonstruksi terhadap iklan televisi/ tulisan di media cetak.
- Setiap individu memiliki kebebasan menentukan metode interpretasi, termasuk kepentingan dalam melakukan dekonstruksi. (Bungin, 2001: 199-200).

Peran Makna

- Peran tanda (*sign*) di dalam masyarakat (*semiotics*), makna-makna tanda (*semantics*), serta kode-kode sosial (*social codes*) dibalik tanda dan makna tersebut diperlukan dalam studi kebudayaan, oleh karena itu makna tersebut merupakan pembentuk (*construct*) utama dari kebudayaan. (Piliang, 2001: 308).

- Kata memperoleh maknanya melalui penggunaannya sehari-hari dalam konteks kebudayaan. (van Peursen, 1990: 2).

Bias Media
- Bias media terjadi karena media tidak berada dalam ruang vakum.
- Media sesungguhnya berada ditengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks dan beragam.

Louis Althusser, 1971
- Media dalam hubungannya dengan kekuasaan, menempati posisi strategis, terutama karena anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi.
- Media massa sebagaimana lembaga pendidikan, agama, seni, kebudayaan, merupakan bagian dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa (*ideological states apparatus).*

Antonio Gramsci, 1971
- Pandangan Althusser tentang media dianggap oleh Gramsci mengabaikan resistensi ideologis dari kelas tersubordinasi dalam ruang media.
- Media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi (*the battle ground for competing ideologies).*
- Media adalah ruang dimana ideologi direpresentasikan. Media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol wacana publik.
- Pada sisi lain, media bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan ideologi tandingan.

Kepentingan Media
- Althusser dan Gramsci sepakat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial.
- Ada berbagai kepentigan yang bermain dalam media massa. Kepentingan ideologis antara masyarakat dan negara, juga kepentingan lain, misalnya; kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan keberlangsungan (*suistainabilitas)* lapangan kerja bagi para karyawan.
- Dalam kondisi ini media harus bergerak dinamis diatara pusaran yang bermain. Hal inilah yang menyebabkan bias berita di media yang sulit dihindari.

Faktor Penyebab Bias Media
- Kapasitas dan kualitas pengelola media.
- Kuatnya kepentingan yang sedang bermain dalam realitas sosial.
- Taraf kekritisan dari masyarakat. (Winarko, 2000: xi)
- *[Dari ketiga faktor tersebut menimbulkan derajat bias media yang berbeda-beda)*

Makna Bahasa Menimbulkan Bias
- Dalam sebuah penelitian terhadap fenomena perkosaan dalam pemberitaan surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dan *Suara Merdeka,* ditemukan 22 kata yang digunakan untuk menggantikan kata "perkosaan", yaitu: 1) merenggut kegadisan, 2) mencabuli, 3) menggauli, 4) menggagahi, 5) menakali, 6) dianui, 7) dikumpuli, 8) menipu luar dalam, 9) digilir, 10) dinodai, 11) digarap, 12) dihamili, 13) korban cinta paksa, 14) dipaksa berhubungan intim, 15) berbuat tidak senonoh, 16) memaksa bersetubuh, 17) korban kuda-kudaan, 18) memaksa memenuhi nafsu birahi, 19) dipaksa melayani, 20) melakukan perbuatan asusila, 21) digelandang, 22) dipaksa melakukan permainan ibu-ibuan.
- Pilihan atau pemakaian istilah tersebut jelas menimbulkan bias (Winarko, 2000: 50)

Media & Politik Pemaknaan
- Politik pemberitaan media berhubungan dengan strategi media dalam meliput peristiwa, memilih dan menampilkan fakta serta dengan cara apa fakta itu disajikan—yang secara langsung atau tidak berpengaruh dalam merekonstruksi media. (Eriyanto, 2000)
- Makna media tidak bergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi lebih kepada praktik pemaknaan. Makna adalah suatu produksi sosial, suatu praktik konstruksi.
- Media massa pada dasarnya tidak mereproduksi, melainkan menentukan (*to define)* realitas melalui pemakaian kata-kata yang dipilih.

- Makna tidak secara sederhana bisa dianggap sebagai produksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial (*social struggle)* sebuah perjuangan dalam memenangkan wacana. Pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan tempat memasukkan bahasa didalamnya. (Hall, 1982: 67).

Bahasa Sebagai Sistem Simbol

- Proses komunikasi sebenarnya mencakup pengiriman pesan dari sistem saraf seseorang kepada sistem saraf orang lain, dengan maksud untuk menghasilkan sebuah makna yang sama dengan yang ada dalam benak sipengirim. Pesan verbal melakukan hal tersebut melalui kata-kata, yang merupakan unsur dasar bahasa, dan kata-kata sudah jelas merupakan simbol verbal. (Tubbs & Moss, 1994: 66)
- Bahasa adalah kombinasi kata yang diatur secara sistematis sehingga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Kata itu sendiri merupakan bagian integral dari simbol yang dipakai oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu kata bersifat simbolis. (Wibowo, 2001: 3-4)

Teori Wacana dalam Tradisi Filsafat

- Aliran strukturalisme berpendapat bahwa arti bahasa tidak tergantung dari maksud pembicara atau pendengar ataupun dari referensinya pada kenyataan tertentu; arti bergantung pada struktur makna itu sendiri.
- Yang dimaksud struktur disini ialah jaringan hubungan intern elemen-elemen terkecil bahasa yang membentuk suatu kesatuan otonom yang tertutup. (Hjelmslev, dalam Kleden, 1997: 34).

Pendekatan Analisis Wacana

- ***Pertama*,** Analisis wacana seluruhnya mengenai cara-cara wacana disusun, prinsip yang digunakan oleh komunikator untuk menghasilkan dan memahami percakapan atau tipe-tipe pesan lainnya.
- ***Kedua***, Analisis wacana dipandang sebagai aksi, cara melakukan segala hal dengan kata-kata.
- ***Ketiga***, Analisis wacana adalah suatu pencarian prinsip-prinsip yang digubakan oleh komunikator aktual dari perspektif mereka. (Littlejohn, 1996: 84-85).

Wacana Tulis, Teks & Konteks

- **Tulisan** bukan cuma sekedar "*literal pictographic"* atau sekedar inskripsi yang bersifat ideografik, tetapi tulisan dapat merupakan suatu totalitas, termasuk kemampuannya untuk melampaui apa yang hanya bisa ditunjuk secara fisik. (Derrida 1984, dalam Kleden-Probonegoro, 1998).
- **Teks** adalah fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. (Hidayat, 1996:129).
- **Konteks** memasukkan semua situasi dan hal yang berada diluar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dsb. (Eriyanto, 2001: 9).

Konteks

- **Konteks Fisik *(physical context),*** yang meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang disajikan dalam suatu peristiwa komunikasi itu, dan tindakan atau peilaku dari para peran dalam peristiwa komunikasi itu.
- **Konteks Epistemis *(epistemic context),*** yaitu latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh pembicara maupun pendengar.
- **Konteks Linguistik *(linguistic context),*** yaitu terdiri atas kalimat-kalimat atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam peristiwa komunikasi.
- **Koteks Sosial *(social context),*** yaitu relasi sosial dan latar setting yang melengkapi hubungan antara pembicara (penutur) dengan pendengar. (Syafi'ie, 1990, dalam Lubis, 1993: 58).

Wacana dan Ideologi

- Implikasi ideologi terhadap wacana; 1) ideologi secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau individual, ia membutuhkan *share* diantara anggota kelompok, organisasi atau kolektifitas, 2) ideologi meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara internal diatara anggota kelompok atau komunitas.
- Wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus melihat konteks, terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk wacana.
- Dalam teks berita misalnya, dapat dianalisis apakah teks yang muncul tersebut pencerminan dari ideologi seseorang, apakah feminis, kapitalis, sosialis, dsb. (Eriyanto, 2001: 13-14).

Karakteristik Analisis Wacana

- ***Pertama***, dalam analisisnya analisis wacana lebih bersifat kualitatif dibandingkan analisis isi yang umumnya kuantitatif.
- ***Kedua***, analisis isi kuantitatif pada umumnya hanya digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat *manifest (*nyata), analisis wacana berpretensi memfokuskan pada pesan *latent* (tersembunyi).
- ***Ketiga***, analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan "apa yang dikatakan" (*what)* tetapi tidak dapat menyelidiki "bagaimana ia dikatakan" (*how).*
- ***Keempat,*** analisis wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi. Karena peristiwa selalu bersifat unik, karena itu tidak dapat diperlakukan prosedur yang sama untuk isu dan kasus yang berbeda. (Eriyanto, 2001: 337-341).

Kerangka Analisis Wacana (Elemen Wacana Van Dijk)

Struktur wacana	Hal yang diamati	Elemen
Super Struktur	**TEMATIK** (Apa yang dikatakan?)	Topik
Struktur Makro	**SKEMATIK** (Bagaimana pendapat disusun dan dirangkai?)	Skema
Struktur Mikro	**SEMANTIK** (Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita)	Latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi
Struktur Mikro	**SINTAKSIS** (Bagaimana pendapat disampaikan?)	Bentuk kalimat, koheresi, kata ganti
Struktur Mikro	**STILISTIK** (Pilihan kata apa yang dipakai?)	Leksikon
Struktur Mikro	**RETORIS** (Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan?)	Grafis, metafora, ekspresi

Elemen-elemen Struktur Wacana

- **Tematik**: Informasi yang paling penting atau inti pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator.
- **Skematik**: dalam konteks penyajian berita ada dua kategori skema besar, 1) *Summary*; yang ditandai judul (*head line*) & teras berita (*lead*), 2) *Story*; isi berita secara keseluruhan.
- **Semantik**: makna tertentu dalam suatu bangunan teks, dimensi teks, presupposition, makna yang implisit atau eksplisit, makna yang sengaja disembunyikan. Struktur wacana juga bisa menggiring kearah tertentu dari suatu peristiwa.
- **Sintaksis**: seluk beluk wacana, kalimat, klausa dan frase. Dianalisis dari koherensi, bentuk kalimat, kata ganti.
- **Stilistik**: gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan maksudnya. Peristiwa yang sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Pilihan *leksikal* atau *diksi* pada dasarnya menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atai frase atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.
- **Retoris**: gaya yang diungkapkan ketika seseorang berbicara atau menulis. Misalnya *hiperbolik* (pemakaian kata yang berlebihan), *repetisi* (pengulangan), *aliterasi* (pemakaian kata seperti sajak), *interaksi* (bagaimana penulis menempatkan diri diatara khalayak), *metafora* (makna kiasan) *visual image* (membuat anggapan).

Penjelasan:

Yang diamati	Elemen
TEMATIK	▪ **TOPIK**: Informasi paling penting, inti pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator
SKEMATIK	▪ **HEAD LINE**: Judul berita utama (*to attrack the reader*) ▪ **LEAD**: Teras berita terletak pada paragraf pertama, bagian paling pokok dalam berita ▪ **STORY**: Isi berita secara keseluruhan; 1) *situasi*, yakni proses jalannya peristiwa, a] kisah utama dari peristiwa, b] latar untuk mendukung kisah utama dipakai untuk memberi konteks, 2) *komentar,* yang ditampilkan dalam teks, komentar dari pihak yang terlibat dengan peristiwa itu, a] reaksi/ komentar verbal dari tokoh yang dikutip wartawan, b] kesimpulan yang diambil wartawan dari berbagai tokoh.
SEMANTIK	▪ **LATAR**: Latar belakang peristiwa, hendak kemana makna suatu teks dibawa (Ex: Perselisihan politik, Krisis ekonomi, Konflik) ▪ **DETAIL**: Apakah sisi informasi tertentu diuraikan secara panjang atau tidak

	▪ **ILUSTRASI**: Apakah sisi informasi tertentu disertai contoh atau tidak ▪ **MAKSUD**: Apakah teks itu disampaikan secara eksplisit atau implisit ▪ **PRESUPPOSITION**: Pernyataan yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks ▪ **PENALARAN**: Elemen yang digunakan untuk memberi basis nasional, sehingga teks tampak benar dan meyakinkan.
SINTAKSIS	▪ **KOHERENSI**: Kata hubungan yang dipakai untuk menghubungkan fakta/ proposisi (Ex: Peristiwa penjarahan massal, "karena tingkat pendidikan mereka rendah"—dapat memberi kesan bahwa rendahnya pendidikan yang menyebabkan mereka melakukan penjarahan. ▪ **NOMINALISASI**: Sugesti kepada khalayak dengan generalisasi ▪ **ABSTRAKSI**: Apakah komunikator memandang objek sebagai suatu yang tunggal berdiri sendiri/ sebagai suatu kelompok (komunitas) ▪ **BENTUK KALIMAT**: Makna yang dibentuk oleh susunan kalimat, dengan cara berfikir logis (prinsip kausalitas). Dalam kalimat berstuktur aktif, seseorang menjadi subjek dari pernyataannya, dalam kalimat pasif, seseorang menjadi objek dari pernyataannya. ▪ **PROPOSISI**: Proposisi diatur dalam satu rangkaian kalimat. Prosisi mana yang ditempatkan diawal, dan mana yang diakhir kalimat. Penempatan itu dapat mempengaruhi makna yang timbul dan menunjukkan bagian mana yang lebih ditinjokan kepada khalayak. ▪ **KATA GANTI**: Kata ganti timbul untuk menghindari pengulangan kata (anteseden) dalam kalimat berikutnya. Dalam analisis wacana kata ganti merupakan alat yang dipakai komunikator untuk menunjukkan dimana posisi seseorang dalam wacana. (Ex: saya, kami, kita)
STILISTIK	▪ **STYLE**: Cara/ gaya bahasa yang digunakan seseorang untuk menyatakan maksudnya. Ciri-ciri penggunaan bahasa yang khas, kecenderungannya untuk secara konsisten menggunakan struktur bahasa tertentu, gaya bahasa pribadi seseorang. ▪ **PILIHAN LEKSIKAL/ DIKSI**: Bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atau frase atas berbagai kemungkinan frase yang tersedia. Pilhan kata/ frase yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Peristiwa yang sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. (Ex: Terorisme—pembela kebenaran, Pembunuhan—kecelakaan, Meninggal—mati, tewas, gugur, meninggal, terbunuh, menghembuskan nafas terakhir).
RETORIS	▪ **RETORIKA**: Gaya yang diungkapkan penulis, apakah menggunakan kata yang berlebihan (hiperbolik), atau retoris persuasif, apakah menggunakan pengulangan untuk penegasan makna (repetisi), apakah kata-kata sepeti sajak (aliterasi), apakah menggunakan retoris ejekan (ironi), atau menggunakan majas untuk menggantikan nama yang ada hubungannya dengan nama yang digantikan (metonimia). ▪ **INTERAKSI**: Bagaimana pembicara/ penulis menempatkan/ memposisikan dirinya diantara khalayak, apakah memakai gaya formal, informal atau santai yang menunjukkan kesan bagaimana ia menampilkan dirinya. ▪ **EKSPRESI**: Bagaimana ekspresi maksud penulis untuk membantu menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan. Dalam teks tertulis, ekspresi ini muncul misalnya dalam bentuk grafis, gambar foto, raster atau tabel untuk mendukung gagasan atau untuk bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan. ▪ **METAFORA**: Apakah ada kiasan, ungkapan, ornamen atau bumbu dari suatu teks. Metafora dipakai oleh komunikator secara strategis sebagai landasan berfikir, alasan pembenar atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik. ▪ **VISUAL IMAGE**: Dalam teks, elemen ini ditampilkan dengan penggambaran detail bebera hal yang ingin ditonjolkan. (Ex: Tentang pentingnya peran kelompok tertentu dalam masyarakat, dan sebagai konsekuensinya, memarginalkan kelompok lain yang menjadi lawannya, saingannya, atau kelompok yang akan mengancam eksistensi dan peran kelompok yang menjadi pilihannya.[]

Referensi

Brown, Gillian, George Yule (1996), *Analisis Wacana; Discourse Analysis*, Jakarta, Gramedia.

Cook, Mark Elsom (2001), *Principles of Interactive Multimedia*, USA, McGraw-Hill International.

Flournoy, Don Michael (ed.) (1989), *Analisis Isi Surat Kabar Indonesia,* Jogjakarta, Gadjah Mada University Press.

Santana K., Septiawan (2004), *Jurnalisme Investigatif*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Sobur, Alex (2002), *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing,* Bandung, Remaja Rosdakarya.

MATERI 10
IDEOLOGI GENDER & PERSPEKTIF FEMINISME

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.
ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

IDEOLOGI GENDER: Prawacana

Konsep penting yang harus dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (*jenis kelamin*) dan konsep gender (*konstruksi sosial*). Pemahaman terhadap perbedaan antara konsep seks dengan gender sangat diperlukan untuk melakukan analisis dan memahami persoalan-persoalan mengenai ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya kaitan antara perbedaan gender (*gender difference*) dan ketidakadilan gender (*gender inequlities*) dengan struktur keadilan masyarakat seeara lebih luas.

Pemahaman alas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep ini telah melahirkan suatu analisis gender. Analisis gender juga ikut mempertajam analisis kritis yang sudah ada. Misalnya analisis kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx ketika melakukan kritik terhadap sistem kapitalisme. Demikian halnya dengan analisis kritis lain seperti analisis hegemoni ideologi dan kultural yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, merupakan kritik terhadap kelas yang dianggap sangat sempit. Dalam bidang epistemologi dan riset misalnya analisis kritis (critical theory) dan penganut mazhab Frankfurt yang memuatkan perhatian kepada perkembangan akhir masyarakat kapitalisme dan dominasi epistemologi positivisme terutama kurang mendasar justru karena tidak ada pertanyaan tentang gender dalam kritiknya. Lahirnya epistemologi feminis dan riset feminis adalah penyempumaan dari kritis mazhab Frankfurt dengan adanya pertanyaan gender. Demikian pula analisis diskursus (*discourse analysis*) yang berangkat dari pemikiran Foucault dan Althusser yaitu merupakan kritik atas semangat reduksionisme dan anti pluralisme dari keseluruhan analisis di bawah pengaruh zaman modernisme.

Perbedaan anatomi biologis utara laki-laki dan perempuan cukup jelas, akan telapi efek yang timbul akibat perbedaan jenis kelamin inilah menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin seeara biologi (*seks*) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interprelasi budaya lerhadap jenis kelamin inilah yang disebut gender. Sesugguhnya atribut dan beban gender tidak mesti ditentukan oleh analisis biologis. Jadi dapat dibedakan antara pemilikan penis dan vagina sebagai peristiwa sosial budaya dan pemilikan penis dan vagina sebagai peristiwa biologis. Yang pertama dapat disebut alat kelamin biologi *(physical genital)* dan yang kedua dapal disebut alat kelamin budaya *(cultural genital).* Secara biologis, alat kelamin adalah kontruksi biologis karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan keadaan sosial budaya masyarakal *(gender less*). Akan tetapi seeara budaya, alat jenis kelamin menjadi faktor paling penting dalam melegitimasikan atribut gender Seseorang. Begitu atribut jenis kelamin kelihatan, maka pada saat itu kontruksi badaya mulai terbentuk. Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran dan stalus dalam masyankat.

Aksesori yang membedakan antara bayi laki-Iaki dan perempuan adalah atribut gender (*gender atribute*). Jika atribut gender sudah jelas, misalnya seorang anak mempunyai penis, maka ia dikonsepsikan sebagai anak laki-laki. Ia diberikan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana layaknya anak laki-laki lain. Jika mempunyai vagina, maka ia dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Ia diberikan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana layaknya anak perempuan lain. Kekhususan inilah yang melekat kepada diri anak tersebut yang kemudian disebut dengan identitas gender *(gender identity)*. Begitu anak dilahirkan bukan saja dijemput dengan idenlitas budaya tetapi juga nilai budaya, antara laki-laki dan perempuan memiliki peran badaya yang berbeda dalam masyarakat. Perbedaan peran budaya ini ini biasanya diistilahkan dengan beban gender (*gender Assignment*). Pola pembenar beban gender dalam lintsan budaya masyarakal (*cross cultural society*) lebih banyak mengacu pada jenis kelamin (*sex*)

Di dalam suatu negara yang masyarakatnya kental dengan nilai-nilai budaya dan teratama nilai-nilai ajaran agama Islam, merupakan suatu konsekuensi logis, apabila nilai-nilai tersebut menjadi sumber dari pembuatan berbagai produk hukum atau peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku terhadap nilai pembagian peran aturan laki-laki dan perempuan (baca: suami dan istri). Di dalam hukum Indonesia, kita mengenal sebuah undang-undang yang sangat strategis mengantar masalah pembagian peran ini, yakni undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang dalam pasalnya, antara lain pasal 31 dan 34 disebutkan, pria adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu ramah tangga. Selanjutnya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kemampuannya, sementara istri wajib mengantar ramah tangga sebaik-baiknya. Jadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya bisa ditinjau dari aspek sosial budaya, agama, polilik, hukum, dan aspek lain yang melingkupi sendi kehidupan manusia. Keberadaan budaya masyarakat inilah yang harus dinetralisisir dari segala bentuk kekerasan, sub-ordinasi dan marginalisasi terhadap hak asasi dan kehendak perempuan. Sehingga nantinya dalam proses transformasi sosial out-putnya akan terwujud masyarakat yang adi1 dan berperikemanusiaan.

Pengertian Gender

- Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris "gender" berarti "jenis kelamin". Dalam *Webter New World Dictionary,* gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku".
- Di dalam *Women Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membut pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
- Hilany M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender, an Introduction* mengatakan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural ecpectations for women and men*), Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum feminis seperli Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender *(what A given society difines as masculine or feminine is a component of gender).*
- HT. Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.
- Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstrukli sosial budaya. Ia menekankannya sebagai konsep analisis (an analytic concept) yang dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu.
- Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "gender". Gender diartikan sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian karya yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Dari berbagli definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentilikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. Konsep gender yakni suatu hal yang melekat pada kaum laki-laki alan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural sejarah perbedaan gender (*gender difference*) antara manum jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosia1iasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosil dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Perbedaan Sex dan Gender

Gender secara umum digunakan unttuk mengidentikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sedangkan sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Istilah sex berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial budaya, psikologis dan aspek-aspek non biologis lainnya. Secara fisik biologis, laki-laki dan perempuan tidak saja dibedakan oleh identitas jenis kelamin, bentuk dan anatomi biologi lainnya, melainkan juga komposisi kimia dalam tubuh. Perbedaan yang terakhir ini menimbulkan akibal-akibat fisik biologis seperti laki-laki yang mempunyai suara lebih besar, berkumis, berjenggot, pinggul lebih ramping dan dada yang datar. Sementara perempuan mempunyai suara lebih bening, buah dada menonjol, pinggul umumnya lebih besar dan organ reproduksi yang amat berbeda dengan laki-laki.

Implikasi Perbedaan Biologis Terhadap Manusia

Anatomi biologis dan kompotisi kimia tubuh manusia memiliki beberapa keunggulan sebagaimana dapat dilihat dalam perilaku manusia. Potensi keunggulan ini menjadikan manusia sebagai penguasa di kaumi *(khalifah fil Ard).* Perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh oleh sejumlah ilmuwan dianggap berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual masing-masing urgen, misalnya, mengidentifikasi perbedaan emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan yaitu:

Laki-laki (Masculine)	**Perempuan (Feminine)**
Sangat agresif	Tidak selalu agresif
Obyektif	Subyektif
Lebih logis	Kurang logis
Kompetitif	Kurang kompetitif
Mendunia	Konsentrasi dirumah

Kalangan feminis dan ilmuwan Marxis menolak anggapan diatas dan menyebutnya hanya sebagai bentuk stereotipe gender. Mereka membantah adanya skematisasi perilaku manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan anatomi tubuh dan genetika laki-laki dan perempuan didominisir dan dipolitisir terlalu jauh sehingga seolah-olah secara subtansial perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

Anggapan bahwa laki-laki 1ebih kuat, lebih cerdas, dan emosional, lebih stabil, sementara perempuan lemah, kurang cerdas dan emosinal, kurang stabil hanyalah stereotipe gender. Para feminis menunjuk beberapa faktor yang dianggap sebagai agen pemasyarakatan *(“agent of civilization”*) stereotip gender, antara lain penganut bahwa susana keluarga, kehidupan ekonomi dan susana sosial politik. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender *(gender inequelities)* bagi kaum laki-laki terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginnalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau dalam pelabelan negatif kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing kelidakadilan gender (*gender inequalities), sbb:*

Gender dan Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan. sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya; penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi, namun adalah satu bentuk pemiskinan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme protes marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum perempuan. Misalnya program adanya pangan atau revolusi hijau *(green revolution)* secara otonomi telah menyingkirkan kaum perempuan dan pekerjaannya sehingga memiaskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenatkan jenil padi unggul yang timbul lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan bibit tidak lagi memungkinkan pemanenan menggunakan ani-ani padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di dan termarginalkan yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan disawah padi musim panen. Berarti program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbankan aspek gender. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, tetapi rugi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur atau bahkan bangsa. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat maupun tafsir keagamaan misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.

Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga), dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga, masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil kepulusan untuk menyekolahkan anak-anaknya, maka anak-anak laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktis/ perbuatan seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

Gender dan Stereotipe

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya, stereotipe aelalu merugikan dan menimbulkan kelidakadilan. Stereotipe yang diberikan kepada suatu suku bangsa tertentu misalnya Yahudi di Barat, Cina dan Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu garis stereotipe itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan (*stereotipe*) yang dilakukan pada mereka. Misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka tiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini berakibat wajar sekali bila pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.

Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental pslikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarya berawal dari berbagai sumber, namun jelas satu kekerasan terhadap satu jenis ke1amin tertentu yang disebabkan oleh bias gender ini. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak maestrim dan bentuk kejahatan yang bila dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, terrnamk dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. *Kedua*, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di rumah tangga (*domestic violence*), termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*cild abuse*). *Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. *Keempat,* kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggerakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. *Kelima*, kekerasan dalam bentuk propaganda pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk jenis kekerasan non-fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan obyek demikian juga dengan seseorang. *Keenam*, kekerasan dalam bentuk sterilisasi dalam Keluarga berencana (*enforced sterilization*). Keluarga berencana di banyak tempat temyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. *Ketujuh*, adalah jenis kekerasan terselubung (*molestion*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dari berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan seperli ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bus. *Kedelapan*, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harrasment*.

Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan seksual, diantaranya adalah:

- Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara dirasakan dengan sangat sensitif.
- Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
- Menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.
- Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya.
- Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seizin dari yang bersangkutan.

Gender dan Beban Kerja (*Double Burden)*

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk margina1isasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja tersebut terjadi di berbagai tingkatan. *Pertama,* manifestasi ketidakadilan gender tersebut teljadi di tingkat negara. *Kedua*, manifestasi ketidakadilan gender terjadi di tempat kerja, organisasi, maupun dunia pendidikan. *Ketiga*, manifestasi ketidakadilan gender juga terjadi pada adapt-istiadat, masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku atau dalam tradisi keagamaan.

Perpektif Teori Gender

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut:

1. Teon Psikoanalisa/ Identifikasi

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (18561939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun atu tiga struktur. *Pertama*, id, sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafau seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. *Kedua,* ego, bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur antara keinginan subyektif individual dan tuntutan obyektif realitas sosia. *Ketiga*, super ego, berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar mencari kesenangan dan kepuasan.

2. Teori Funsionalis Struktural

Teori ini berangkat dariuumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut didalam masyarakat. Sebenamya teori struktura1is dan teori fangsionalis dibedakan oleh beberapa ah1i, seperti Hilany M. Lips dan SA. Shield. Teori strukturalis lebih condong ke persoalan sosiologis, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke persoalan psikoiogs. R. Dahrendolf, salah seorang pendukung teori ini, meringkaskan prinsip-prinsip teori ini:

- Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian.
- Sistem-sistem sosial senantiesa terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme kontrol.
- Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian-bagian itu dapat dipelihara dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama.
- Perubahan terjadi secara berangsur-angsur.
- Integrasi sosial dicapai melalui persepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Sistem nilai adalah bagian yang paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat.

3. Teori Konflik

Dalam soal gender, teori konflik diidentikkan dengan teoti Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teon ini berangkat dari usmsi bahwa dalam susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguaai smber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh Friedrich Engels mengemukakan satu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, tidak disebabkan oleh perbedaan sosioiogis, tetapi merupakan bagian dari penindasan, dari kelas yang berkumpil dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga (*family*). Hubungan suami dan istri tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan gender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis atau pemberian Tuhan (*divine creation*), tetapi karena konstruksi masyarakat (*social contribution*).

4. Teori-teori Feminis

Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok sebagai berikut:

a. Feminisme Liberal

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Faller (1810-1850), Harrief Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia laki-laki dan perempuan, diterapkan seimbang dan serari dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya.

b. Feminisme Marxis-Solialis

Aliran ini mulai berkembang di Jerman dan Rusia dengan menampilkan beberapa tokohnya, seperti Clara Zefkir (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin ini sesunggubnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam.

c. Feminisme Radikal

Aliran ini mulai muncul di awal abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan, karena *term* ini jelas-jelas menguntungkan laki-laki Lebih dari itu, di antara kaum feminis radikal ada yang lebih ekstrim, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan seksual, dalam arti kepuasan seksual juga diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolelir praktek lesbian.

5. Teori Sosio-Biologis

Teori ini dikembangkan oleh Pierre Van Den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox dan intinya bahwa semua pengaman peran jenis kelamin tercermin dari "*biogram*" dasar yang diwarnai manusia modern dari nenek moyang *primat* dan *hominid* mereka. Integritas keunggulan laki-laki tidak saja ditentukan oleh factor biologis tetapi juga elaborasi kebudayaan atau biogram manusia. Teori ini disebut "*bio-sosial*" karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan relasi gender.

Kodrat Perempuan dalam Islam

Kodrat berasal dari bahasa Arab *qadara/qadira*,- *yaqduru/ yaqdiru* - qudratan, Da1am kamus *Munjid fi al-lughah Wal al-A'lam*, kata ini diartikan dengan *qawiyyun 'ala as-syai* (kuasa mengerjakan senatu), *ja'alajhu 'ala miqdarih* (membagi sesuatu menurut porsinya), atau *qashshara* (memendekkan/membatasi). Dari akar kata *qadara*/ qadira ini juga lahir kata taqdir (*qaddra-yuqaddira - taqdir*). Bagaimana sesungguhnya pandangan Islam (a-Qur'an dan Hadits) dalam menempatkan perbedan jenis kelamin dalam konsep pranata sosial. Catatan sejarah tentang kedudukan dalam struktur sosial, khususnya masyarakat Arab pra-Islam sangat memprihatinkan. Perempuan dipandang tidak lebih dari "obyek", perlakuan seks kaum laki-laki dan dianggap sebagai beban dalam strata sosial. Itulah sebabnya, dalam budaya masyarakat Arab ketika itu bukan sesuatu yang naif untuk "menyingkirkan" perempuan dalam kehidupan dan pergaulan mereka. Tidak segan-segan mereka membunuh, bahkan mengubur anak perempuan mereka. Al-Qur'an sendiri secara langsung menyinggung hal ini dan menyindir mereka yang berpikiran picik yang menganggap anak, khususnya perempuan, hanya sebagai beban sosial dan ekonomi.

QS. Al-An'am (16): 151: … *Dan janganlah kamu membubuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dam kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yag tampak diataranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membubuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya".*

Islam mengakui adanya perbedaan (*distintion*) antara laki-Iaki dan perempuan, bukan pembedaan (*discrimination*). Perbedaan tersebut didasarkan atas kondisi fisik biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki., namun perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lainnya. Dalam Islam, kaum perempuan juga memperoleh berbagai hak sebagaimana halnya kawan laki-laki.

a. **Hak-Hak Dalam Bidang Politik.**
   Tidak ditemukan ayat/hadits yang melarang kaum perempuan untuk akill dalam dunia polilik. Hal ini terdapat dalam QS. &I-Taubah (9): 71, QS. al-Mumtahanah (160): 12.
b. **Hak-hak dalam Memilih Pekerjaan.**
   Memilih pekerjaan bagi perempuan juga tak ada larangan baik itu di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri atau secara kolektif, baik di lembaga pemerintah atau swasta. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan dan tetap memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.
c. **Hak memperoleh pekerjaan.**
   Kalimat pertama yang diturunkan daIam Al-Qur'an adalah kalimat perintah, yaitu perintah untuk membaca (*iqra'*). Perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan tidak hanya bagi kaum laki-Iaki lelapi juga perempuan "menuntut ilmu pengetahuan difardlukan kepada kaum Muslim laki-laki dan perempuan".

FEMINISME

Sejarah Gelombang Pertama

Feminisme[59] sebagai filsafat dan gerakan dapat dilacak dalam sejarah kelahirannya dengan kelahiran era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh *Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet*. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai *universal sisterhood.*

Kata feminisme dikreasikan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan center Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, *The Subjection of Women* (1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang Pertama. Pada awalnya gerakan ini memang diperlukan pada masa itu, dimana ada masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan lebih-lebih politik hak-hak kaum ini biasanya memang lebih inferior ketimbang apa yang dapat dinikmati oleh laki-laki, apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris cenderung menempatkan kaum laki-laki di depan, di luar rumah dan kaum perempuan di rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang gemanya kemudian melanda Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Suasana demikian diperparah dengan adanya fundamentalisme agama yang cenderung melakukan opresi terhadap kaum perempuan. Di lingkungan agama Kristen pun ada praktek-praktek dan kotbah-kotbah yang menunjang situasi demikian, ini terlihat dalam fakta bahwa banyak gereja menolak adanya pendeta perempuan bahkan tua-tua jemaat pun hanya dapat dijabat oleh pria. Banyak kotbah-kotbah mimbar menempatkan perempuan sebagai mahluk yang harus ´tunduk kepada suami!´

Dari latar belakang demikianlah di Eropa berkembang gerakan untuk ´menaikkan derajat kaum perempuan´ tetapi gaungnya kurang keras, baru setelah di Amerika Serikat terjadi revolusi sosial dan politik, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Di tahun 1792 Mary Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul *Vindication of the Right of Woman* yang isinya dapat dikata meletakkan dasar prinsip-prinsip feminisme dikemudian hari. Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan terhadap pemberantasan praktek perbudakan, hak-hak kaum prempuan mulai diperhatikan, jam kerja dan gaji kaum ini mulai diperbaiki dan mereka diberi kesempatan ikut dalam pendidikan dan diberi hak pilih, sesuatu yang selama ini hanya dinikmati oleh kaum laki-laki. Secara umum pada gelombang pertama dan kedua hal-hal berikut ini yang menjadi momentum perjuangannya: *gender inequality*, hak-hak perempuan, hak reproduksi, hak berpolitik, peran gender, identitas gender dan seksualitas. Gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari: rasisme, stereotyping, seksisme, penindasan perempuan, dan phalogosentrisme.

---

[59] Feminisme (tokohnya disebut Feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria.

Gelombang Kedua

Setelah berakhirnya perang dunia kedua, ditandai dengan lahirnya negara-negara baru yang terbebas dari penjajah Eropa, lahirlah Feminisme Gelombang Kedua pada tahun 1960. Dengan puncak diikutsertakannya perempuan dalam hak suara parlemen. Pada tahun ini merupakan awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut mendiami ranah politik kenegaraan.

Dalam gelombang kedua ini dipelopori oleh para feminis Perancis seperti Helene Cixous (seorang Yahudi kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Perancis) dan Julia Kristeva (seorang Bulgaria yang kemudian menetap di Perancis) bersamaan dengan kelahiran dekonstruksionis, Derrida. Dalam *the Laugh of the Medusa*, Cixous mengkritik logosentrisme yang banyak didominasi oleh nilai-nilai maskulin. Sebagai bukan white-Anglo-American-Feminist, dia menolak esensialisme yang sedang marak di Amerika pada waktu itu. Julia Kristeva memiliki pengaruh kuat dalam wacana pos-strukturalis yang sangat dipengaruhi oleh Foucault dan Derrida.

Secara lebih spesifik, banyak feminis-individualis kulit putih, meskipun tidak semua, mengarahkan obyek penelitiannya pada perempuan-perempuan dunia ketiga. Meliputi Afrika, Asia dan Amerika Selatan. Dalam berbagai penelitian tersebut, telah terjadi pretensi universalisme perempuan sebelum memasuki konteks relasi sosial, agama, ras dan budaya. Spivak membongkar tiga teks karya sastra Barat yang identik dengan tidak adanya kesadaran sejarah kolonialisme. Mohanty membongkar beberapa peneliti feminis barat yang menjebak perempuan sebagai obyek. Dan Bell Hooks mengkritik teori feminisme Amerika sebagai sekedar kebangkitan anglo-white-american-feminism karena tidak mampu mengakomodir kehadiran black-female dalam kelahirannya.

Banyak kasus menempatkan perempuan dunia ketiga dalam konteks "*all women*". Dengan apropriasi bahwa semua perempuan adalah sama. Dalam beberapa karya sastra novelis perempuan kulit putih yang ikut dalam perjuangan feminisme masih terdapat lubang hitam, yaitu: tidak adanya representasi perempuan budak dari tanah jajahan sebagai Subyek. Penggambaran pejuang feminisme adalah yang masih mempertahankan posisi budak sebagai yang mengasuh bayi dan budak pembantu di rumah-rumah kulit putih. Perempuan dunia ketiga tenggelam sebagai *Subaltern* yang tidak memiliki politik agensi selama sebelum dan sesudah perang dunia kedua. Selama sebelum PD II, banyak pejuang tanah terjajah Eropa yang lebih mementingkan kemerdekaan bagi laki-laki saja. Terbukti kebangkitan semua Negara-negara terjajah dipimpin oleh elit nasionalis dari kalangan pendidikan, politik dan militer yang kesemuanya adalah laki-laki. Pada era itu kelahiran feminisme gelombang kedua mengalami puncaknya. Tetapi perempuan dunia ketiga masih dalam kelompok yang bisu.

Dengan keberhasilan gelombang kedua ini, perempuan dunia pertama melihat bahwa mereka perlu menyelamatkan perempuan-perempuan dunia ketiga, dengan asumsi bahwa semua perempuan adalah sama. Dengan asumsi ini, perempuan dunia ketiga menjadi obyek analisis yang dipisah dari sejarah kolonialisasi, rasisme, seksisme, dan relasi sosial.

Perkembangan di Amerika Serikat

Gelombang feminisme di Amerika Serikat mulai lebih keras bergaung pada era perubahan dengan terbitnya buku *The Feminine Mystique* yang ditulis oleh Betty Friedan di tahun 1963. Buku ini ternyata berdampak luas, lebih-lebih setelah Betty Friedan membentuk organisasi wanita bernama *National Organization for Woman* (NOW) di tahun 1966 gemanya kemudian merambat ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang perundangan, tulisan Betty Fredman berhasil mendorong dikeluarkannya *Equal Pay Right* (1963) sehingga kaum perempuan bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, dan *Equal Right Act* (1964) dimana kaum perempuan mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang

Gerakan feminisme yang mendapatkan momentum sejarah pada 1960-an menunjukan bahwa sistem sosial masyarakat modern dimana memiliki struktur yang pincang akibat budaya patriarkal yang sangat kental. Marginalisasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya ekonomi dan politik, merupakan bukti konkret yang diberikan kaum feminis.

Gerakan perempuan atau feminisme berjalan terus, sekalipun sudah ada perbaikan-perbaikan, kemajuan yang dicapai gerakan ini terlihat banyak mengalami halangan. Di tahun 1967 dibentuklah *Student for a Democratic Society* (SDS) yang mengadakan konvensi nasional di Ann Arbor kemudian dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama, dari sinilah mulai muncul kelompok "feminisme radikal" dengan membentuk *Women´s Liberation Workshop* yang lebih dikenal dengan singkatan "Women´s Lib". Women´s Lib mengamati bahwa peran kaum perempuan dalam hubungannya dengan kaum laki-laki dalam masyarakat kapitalis terutama Amerika Serikat tidak lebih seperti hubungan yang dijajah dan penjajah. Di tahun 1968 kelompok ini secara terbuka memprotes diadakannya "Miss America Pegeant" di Atlantic City yang mereka anggap sebagai "pelecehan terhadap kaum wanita dan komersialisasi tubuh perempuan". Gema ´pembebasan kaum perempuan´ ini kemudian mendapat sambutan di mana-mana di seluruh dunia. Pada 1975, "Gender, development, dan equality" sudah dicanangkan sejak Konferensi Perempuan Sedunia Pertama di Mexico City tahun 1975. Hasil penelitian kaum feminis sosialis telah membuka wawasan jender untuk dipertimbangkan dalam pembangunan bangsa. Sejak itu, arus pengutamaan jender atau gender mainstreaming melanda dunia.

Memasuki era 1990-an, kritik feminisme masuk dalam institusi *sains* yang merupakan salah satu struktur penting dalam masyarakat modern. Termarginalisasinya peran perempuan dalam institusi sains dianggap sebagai dampak dari karakteristik patriarkal yang menempel erat dalam institusi sains. Tetapi, kritik kaum feminis terhadap institusi sains tidak berhenti pada masalah termarginalisasinya peran perempuan. Kaum feminis telah berani masuk dalam wilayah epistemologi sains untuk membongkar ideologi sains yang sangat patriarkal. Dalam kacamata eko-feminisme, sains modern merupakan representasi kaum laki-laki yang dipenuhi nafsu eksploitasi terhadap alam. Alam merupakan representasi dari kaum perempuan yang lemah, pasif, dan tak berdaya. Dengan relasi patriarkal demikian, sains modern merupakan refleksi dari sifat maskulinitas dalam memproduksi pengetahuan yang cenderung eksploitatif dan destruktif. Berangkat dari kritik tersebut, tokoh feminis seperti Hilary Rose, Evelyn Fox Keller, Sandra Harding, dan Donna Haraway menawarkan suatu kemungkinan terbentuknya genre sains yang berlandas pada nilai-nilai perempuan yang antieksploitasi dan bersifat egaliter. Gagasan itu mereka sebut sebagai sains feminis (*feminist science*).

Aliran Feminisme

1. Feminisme Liberal

Apa yang disebut sebagai Feminisme Liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia -demikian menurut mereka- punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakngan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai "Feminisme Kekuatan" yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki. Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkab wanita pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraaan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar prempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berprerspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminis liberal.

2. Feminisme Radikal

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi "perjuangan separatisme perempuan". Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang "radikal".

Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan dikotomi privat-publik. "The personal is political" menjadi gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan prempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan buruk (black propaganda) banyak ditujukan kepada feminis radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang RI no. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

3. Feminisme Post-Modern

Ide Posmo-menurut anggapan mereka-ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial.

4. Feminisme Anarkis

Feminisme Anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriaki-dominasi lelaki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.

5. Feminisme Marxis

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini—status perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaaan pribadi (private property). Kegiatan produksi yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendri berubah menjadi keperluan pertukaran (exchange). Laki-laki mengontrol produksi untuk exchange dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi bagian dari property. Sistem produksi yang berorientasi pada keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam masyarakat—borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang maka struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap perempuan dihapus.

6. Feminisme Sosialis

Sebuah faham yang berpendapat "Tak Ada Sosialisme tanpa Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan tanpa Sosialisme". Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender.

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran ini mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Agenda perjuagan untuk memeranginya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan.

7. Feminisme postkolonial

Dasar pandangan ini berakar di penolakan universalitas pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan prempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami pendindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. Beverley Lindsay dalam bukunya Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class menyatakan, “hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan.”

TEORI-TEORI FEMINIS TENTANG PEMBANGUNAN

Prawacana

Banyak isu yang diangkat oleh para teoretikus Marxis dan Poststrukturalis, dengan tema seperti kemajuan, modernitas, pembangunan, dan pencerahan, bersamaan dengan isu-isu lainnya seperti relasi-relasi gender, telah juga diangkat oleh para feminis. Pada gelombang pertama aktivisme dan politik feminis, sebagai sebuah gerakan terorganisir yang dimulai pada paruh akhir abad ke-19, pengecualian perempuan dari hak pilih mengungkapkan alam modern dan alam demokrasi politik yang parsial dan bias. Pada gelombang kedua aktivisme dan teori feminis, sepanjang tahun 1960-an, kapitalisme ditentang sebagai sesuatu hal yang bias, diskriminatif, dan tidak jujur. Gelombang ketiga, yang dimulai pada tahuan 1990-an sering diasosiasikan sebagai pintu masuk dari ide-ide post-struktural dan posmodern, sebagai feminisme yang lebih berbeda. Sepanjang gelombang-gelombang kedua dan ketiga, ketertarikan para feminis pada isu ketidaksetaraan, kemiskinan, dan relasi-relasi gender memproduksi tubuh yang signifikan terhadap ide-ide kritis mengenai pembangunan, dan isu-isu yang diangkat oleh para feminis secara secara signifikan berdampak pada agensi-agensi internasional yang mengurusi masalah-masalah pembangunan–menuju pada hal yang lebih luas bahwa teori feminis tentang pembangunan sekarang membentuk sistem konsep-konsep, wacana-wacana, dan praktik-praktik yang diakui.

Politik Feminis Tentang Pembangunan

Praktik feminis kontemporer diantara para aktivis dan akademisi telah secara partikular dipengaruhi oleh debat-debat yang dimulai oleh perempuan kulit berwarna dunia pertama dan perempuan ketiga mulai pada akhir tahun 1970-an. Sebagai pernyataan awal dari perkumpulan Combahee River (1984) mempertanyakan ide atau gagasan tentang identitas perempuan pada umumnya sebagai sebuah basis strategi politik. Para penyair dan pengarang, terutama Bell Hooks dan Audre Lordre, mengkritisi gerakan perempuan karena mengesampingkan (isu-isu tentang) perbedaan seksual, rasial, dan kelas. Karya-karya Chandra Mohanty (1991a, 1991b) dan Adrianne Rich (1986) menandai suatu gerak dari politik feminis dengan identitas umum-semisal lingkaran persaudaraan, dengan asumsi-asumsinya tentang opresi terstruktur terhadap semua perempuan–kepada lokasi politik feminis, yang menteoretisasi bahwa para perempuan adalah subjek bagi sekumpulan opresi tertentu dan kemudian bahwa seluruh perempuan muncul dengan identitas partikular daripada identitas generik. Gerakan-gerakan perempuan menjadi terikat melalui jaringan-jaringan menuju sesuatu yang erat kaitannya dengan praktik politik pada umumnya, tapi tidak lebih lama dipersatukan oleh suatu kepercayaan dalam karakteristik-karakteristik universal atau dipimpin oleh perempuan Barat yang progresif dalam gerak menuju pada emansipasi global. Secara khusus, Lorde, Mohanty, dan lainnya menyebut hal tersebut sebagai pergantian dramatis dalam praktik politik kolektif dan dalam pendirian para perempuan di Dunia Ketiga.

PBB selama sepuluh tahun kemajuan perempuan (1975-1985) memacu pertumbuhan kelompok-kelompok feminis secara mendunia (E. Friedman 1995; Miles 1996). Sebagai hasil dari tekanan dari gerakan feminis, secara virtual setiap organisasi pembangunan membangun beberapa proyek dan program untuk meningkatkan posisi perempuan dalam lingkup ekonomi dan sosial. Asumsi yang hampir menyeluruh dibelakang proyek-proyek ini adalah bahwa permasalahan perempuan bersumber pada terbatasnya ruang partisipasi (perempuan) dimana sebaliknya disana proses pertumbuhan ekonomi cenderung membaik. Ide liberal yang progressive adalah meningkatkan partisipasi perempuan dan juga meningkatkan pembagian dan akses mereka terhadap sumberdaya, kesempatan kerja, dan pendapatan dalam rangka memberikan efek dramatis terhadap perbaikan kondisi hidup mereka. Pada akir tahun 1970-an, beberapa studi mendokumentasikan fakta-fakta tentang kehidupan-kehidupan perempuan, seperti jumlah buruh perempuan yang tak diupah sebagaimana mestinya, semantara pada waktu yang sama, studi kualitatif *in-depth* melihat peranan perempuan pada komunitas-komunitas lokal. Sebagai hasilnya, rangkuman berikut yang disusun oleh PBB adalah:

- Perempuan adalah setengah dari populasi penduduk dunia
- Melakukan dua pertiga dari jam-jam kerja diseluruh dunia
- Mendapatkan sepersepuluh pemasukan (income) di dunia
- Memiliki hanya seperseratus properti di dunia

Namun, sepanjang PBB mengumumkan kepada para perempuan akan posisi mereka yang sebenarnya tambah parah, dalam hal penurunan akses terhadap sumber daya, nutrisi, dan pendidikan, dan dalam hal beban kerja yang semakin meningkat. Kegagalan ini mendramatisasi batasan kemanjuran dari pendekatan integrasionis, dan meradikalisasi studi tentang perempuan dan (*and*) pembangunan (Sen dan Grown 1987). Pada konferensi internasional tahunan perempuan yang diadakan di Meksiko 1975, dan di konferensi perempuan pertengahan dekade yang diadakan di Kopenhagen 1980, perdebatan panas memuncak seputar isu-isu yang relevan mengenai teori-teori feminis. Pada konferensi perempuan dan (*and)* pembangunan yang diadakan di Nairobi pada 1985, para perempuan Dunia Ketiga, sebagai mayoritas peserta, mendefinisikan isu-isu pokok, sementara hampir semua yang diorganisasikan dan didiskusikan hanya berkutat pada pertemuan-pertemuan alternatif selain program resmi PBB. Forum alternatif Nairobi menarik minat para perempuan untuk mendiskusikan kondisi-kondisi perempuan; tema utama dialamatkan pada kekerasan bias gender, pengesampigan perempuan dari kontrol terhadap sumber daya-sumber daya vita, feminisasi kemiskinan, dan keinginan untuk pendekatan-pendekatan radikal yang mempertanyakan struktur-struktur yang ada dalam masyarakat. Feminisme bergeser dari yang umumnya kepentingan para perempuan Eropa untuk suatu gerakan yag heterogen, menuju pada definisi yang lebih meluas merefleksikan keterlibatan yang lebih baik melalui organisasi-organisasi regional di negara-negara dunia ketiga.

Pada permulaan tahun 1980-an perempuan Dunia Ketiga mengemukakan teori-teori baru pembangunan yang merangkul feminisme, sementara konferensi-konferensi perempuan tentang pemberdayaan perempuan sebagai agen-agen, daripada melihat mereka sebagai masalah-masalah, dari pembangunan (Bunch dan Carillo 1990). Sebuah kejadian kunci adalah pendanaan DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era) di Bangladore, India, pada 1984. Pengalaman-pengalaman organisasi akar rumput yang dipimpin oleh para pediri organisasi ini untuk menghubungkan aktivitas-aktivitas mikrolevel kepada perspektif-perspektif makrolevel atas pembangunan:

> Pengalaman-pengalaman yang dirasakan setiap hari oleh para perempuan miskin Dunia Ketiga dalam perjuangan mereka untuk meyakinkan kelangsungan hidup secara mendasar bagi keluarga-keluarga mereka dan diri mereka sendiri...menyediakan lensa terjelas untuk memahami proses-proses

pembangunan. Dan ini adalah aspirasi merka dan perjuagan-perjuagan untuk masa depan yang bebas dari opresi-opresi ganda dari gender, ras, dan nasion yang dapat membentuk basis bagi visi-visi dan strategi-strategi baru yang dunia inginkan (Sen dan Grown 1987: 9-10).

Berdasarkan riset dan debat yang intensif, DAWN memproduksi kerja sebagai strategi-strategi pembagnuan alternatif yang sangat mempengaruhi riset dan aktivisme di lapangan. Pada dasrnya, kelompok tersebut berargumentasi bahwa pendekatan-pendekatan alternatif jangka pendek untuk meningkatkan kesempatan kerja perempuan tidak efektif kecuali jika mereka dikombinasikan dengan strategi-strategi jangka panjang untuk mendirikan kembali kontrol penduduk (terutama perempuan) terhadap keputusan-keputusan ekonomid yang membentuk kehidupan mereka: “suara perempuan harus memasuki definisi pembangunan dan membuat pilihan-pilihan kebijakan” (Sen dan Grown 1987: 82). Kecenderungan sejak kemudian telah harus untuk menguatkan suara-suara Dunia Ketiga dan untu mempromosikan “pendekatan pemberdayaan” untuk pembangunan perempuan. Pada konferensi perempuan dunia keempat tahun 1995 di Beijing, Platform Aksi adalah tentang hak-hak perempuan: hak-hak pendidikan, makanan, kesehatan, kekuatan politis yang lebih baik, dan bebas dari kekerasan (Bunch, et al. 1995).

Para perempuan di Dunia Ketiga telah mengorganisir diri untuk menghindari ancaman-ancaman dalam bidang ekonomi, lingkungan, hukum, budaya dan fisik, dan juga menentang bentuk-bentuk kediktatoran, militerisme, fundamentalisme, ketergantungan ekonomi, dan kekerasan terhdap perempuan. Gerakan-gerakan perempuan tidak secara penting diorganisir kedalam agenda-agenda feminis, tapi mereka benar-benar mempromosikan perspektif-perspektif perempuan: semisal, masuknya gerakan Chipko didaerah-daerah Himalaya, Gerakan Sabuk Hijau di Kenya, asosiasi Pekerja Perempuan Swamandiri di India, Pergerakan Para Ibu Hilang di Amerika (Miles 1996: 86). Terus meningkat, beberapa kelompok mengusulkan feminisme-feminisme kultural tertentu sebagai basis-basis politik mereka. Namun, feminis-feminis dunia meneruskan kesatuan isu-isu seputar keadilan ekonomi, hak-hak manusia, dan degradasi lingkungan, ide tentang kesatuan melalui diversitas.

Feminisme Sosialis

Telah sejak lama bahwa ada garis lurus antara feminisme dan sosialisme. Namun banyak perspektif-perspektif feminis sayap kiri justruk dimulai dengan memberikan kritik terhadap Marxisme. Feminis-feminis sosialis menyerang defisiensi-defisiensi dalam Marxisme klasik – yaitu analisisnya yang mengabaikan aktivitas-aktivitas dan relasi-relasi fundamental mengenai eksistensi perempuan – namun banyak juga yang melanjutkan mengagumi bentuk pemahaman materialisme historis dan apa yang di janjikan dalam misi pembebasan Marxisme. Feminis-feminis Sosialis scara khusus telah mengkritik penekanan Marxisme klasik atas ekonomi dan kebungkaman relatif mereka dalam menyuarakan perempuan (mitchell 1966). Teoretikus feminis awal, Heide Hartman (1984), berpendapat bahwa categori-categori analitis Marxisme “buta-sex,” dimana penyebab-penyebab ketidaksetaraan gender (dominasi laki-laki terhadap perempuan) luput dari perhatian sepanjang analisis Marxisme struktural terhadap ketidaksetaraan kelas (dominasi kelas yang berkuasa terhadap para pekerja). Dia menginginkan analisis khusus dari seorang feminis untuk membongkar karakter sistematis ketidakstaraan gender. Dia juga mengkritisi analisis feminis pada umumnya yang kurang materialis dan historis. Namun analisis Marxis, terutama identifikasi patriarki sebagai suatu struktur sosial dan historis, harus dihapuskan jika kita ingin mengerti bagaimana perkembangan masyarakat kapitalis barat dan keadaan sulit perempuan didalamnya” (Hartmenn 1984: 3).

Perhatian utama feminisme sosialis telas melibatkan penteorisasian kembali signifikansi kerja wanita. Juliet Mitchell (1966), dan Universitas Cambridge, membedakan antara beberapa struktur yang mengafeksi kondisi perempuan − produksi, reproduksi, sosialisasi, dan seksualitas−dengan ruang-ruang kerja wanita, dimana yang pertama adalah ruang ekonomi nondomestik, dan kedua adalah perannya sebagai Istri dan sekaligus Ibu. Masing-masing memiliki kontrdiksi-kontradiksi dan dinamika yang berbeda, tapi kesemuanya membntuk kesatuan dalam pengalaman perempuan, dalam gambaran-gambaran keluarga secara seksual, reproduktif, dan mensosialisasikan fungsi-fungsi dominan. Kerja domestik prempuan dirumah dan keluarga membuat relasi yang berbeda terhadap alat-alat produksi yang dimiliki oleh laki-laki. Aktivitas-aktivitas ini, perawatan dan reproduksi merupakan beban tambahan (berlawanan) dalam relasi produksi. Mariarosa Dalla Costa (1973) menekankan kualitas hidup dan relasi-relasi dalam kerja domestik sebagai pendeterminasian tempat perempuan dalam masyarakat tidak peduli dalam lingkungan tempat atau kelas. Para isteri adalah para pekerja yang tereksploitasi, dimana surplus digunakan secara tidak langsung oleh para suami sebagai instrumen opresi. Dibawah kapitalisme, Dalla Costa berpendapat, para perempuan menjadi budak dari budak upahan.

Dalam feminisme sosialis, sebagaimana debandingkan dengan Marxisme, penekanannya ditempatkan pada pembagian kerja secara seksual atau tipe-tipe praksis seksual yang berbeda (diinterpretasikan secara luas) sebagai basis-basis perbedaan-perbedaan fisik dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Para perempuan dilihat sebagaimana terkonstitusikan oleh relasi-relasi sosial yang mereka jalani dan tipe-tipe kerja yang mereka lakukan. Dimulai dengan gagasan Marxis terhadap produksi untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan, feminisme sosialis berpendapat bahwa kebutuhan mengasuh dan membesarkan anak adalah sama pentingnya dengan kebutuhan-kebutuhan material (makanan dan tempat tinggal). Jadi, demikian juga

halnya dengan kebutuhan pemuasan hasrat seksual dan pemeliharaan emosional. Semua kebutuhan ini menginginkan adanya (biasanya perempuan) pekerja. Perjuangan gender terhadap aktivitas reproduktif sangat fundamental, namun sering diabaikan oleh teori Marxis tradisional. Teori-teori feminis sosialis mengelaborasi beberapa implikasi posisi mendasar ini. Nancy Chodorow (1978), seorang sosiolog Universitas Barkeley di California, berpendapat bahwa maskulinitas dan feminitas dikonstruksikan dalam keluarga, terutama dalam hubungan antara anak-anak dan Ibunya. Anak-anak laki-laki tumbuh dan mendapatkan orientasi kelelakian mereka ketika mulai diadaptasikan kepada kerja didalam atau diluar rumah; anak-anak perempuan tumbuh menjadi perempuan dewasa dengan cara diadaptasikan kepada kerja emosional didalam atau diluar rumah. Relasi-relasi antara ekonomi, prokreasi, dan dominasi laki-laki dikonseptualisasikan oleh Ann Ferguson and Nacy Forlbre sebagai "produksi seks-affektif," serangkaian aktivitas spesifik dan historis yang membatasi opsi-opsi dan renumerasi perempuan. Para feminis sosialis pada umumnya menteorisasikan aktivitas-aktivitas prokreatif dan produksi ruang publik sebagai interdependen mutual, yang mana tidak ada salah satu yang saling mendeterminasi satu sama lain, daripada yang publik mendeterminasi yang privat. Distingsi publik/privat, pemikiran para femnis sosialis, merasionalisasikan eksploitasi para perempuan. Pada umumnya ide bahwa para perempuan melakukan kerja yang tidak dibayar dalam mereproduksi kekuatan kerja sebagai suatu bentuk subsidi kapital, sama baiknya dengan kerja langsung untuk kapital sebagai buruh-buruh pabrik atau penghasil-[enghasil komonitas. Kemudian para perempuan sangat dieksploitasi oleh kelas pekerja.

Dua kecenderungan muncul dari pernyataan-pernyataan kritis seperti ini. Pertama, ada beberapa yang berharap untuk mengembangkan ide-ide Marxian sebagai arahan dalam memikirkan (kondisi) para perempuan (Vogel 1983). Pernyataan Hartmann bahwa Marx dan Engels sevara analitis buta-seks hanya sepertiganya saja yang benar: Engels telah mengusahakan satu matanya setengah terbuka. Dalam pernyataan umumnya yang sama seperti yang dikutip sebelumnya (dalam Bab 4), Engels berkata:

> Menurut konspsi materialistik, faktor yang menentukan dalam sejarah adalah, dalam contoh final, produksi dan reproduksi kehidupan secara tidak langsung. Ini, sekali lagi, adalah suatu karakter yang berlipat ganda: pada satu sisi, produksi alat-alat (means) eksistensi, untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan perkakas (tools) penting untuk produksi tersebut; pada sisi lainnya, produksi umat manusia itu sendiri, perkembangbiakan spesies. Organisasi sosial dimana orang-orang pada epos partikular historis dan kehidupan partikular pedesaan ditentukan oleh kedua produksi tersebut: melalui panggung perkembangan kerja pada satu sisi dan keluarga pada sisi yang lain (1972 ed: 71-72).

Engels berpendapat bahwa perkembangan produksi diasosiasikan dengan peningkatan properti swasta, pertukaran, perbedaan-perbedaan kekayaan, antagonisme kelas, dan relasi-relasi seksual; posisi perempuan secara secara relatif bagi laki-laki yang diperburuk dengan datangnya masyarakat kelas. Dalam sebuah elaborasi yang signifikan terhadap wawasan ini, dua antropolog Mona Etienne dan Eleanor Leacock (1981) memperdebatkan kepentingan primer dari relasi-relasi sosial untuk memahami ketidaksetaraan seksual dan sosio-ekonimik dan hirarki-hirarki. Dalam pendapat merek, asal-usul semua ketidak setaraan ini tak dapat dipungkiri lagi terikat satu sama lain. Mereka mengembangkan suatu kerangka kerja historis untuk mempertimbangkan relasi-relasi sosio-ekonomik dan hirarki-hirarki seksual dengan mendefinisikan tipe-tipe relasi produksi:

1. Relasi-relasi egeliterian diantara hamir semua pemburu-peramau dan banyak masyarakat holtikultural, sebagai bagian yang mana wanita memiliki otonomi, peran-peran ekonomik yang berama, dan kekuatan untuk mengambil keputusan.
2. Ketidaksetaraan dalam masarakat tribal berpangkat (ranking) yang diatributkan berdasarkan pertumbuhan perdagangan, spesialisasi, dan reorganisasi relasi-relasi produksi. Secara partikular, suatu sektor publik ekonomi yang menaruh perhatian pada produksi untuk akumulasi dan perdagangan dibedakan dari rumah tangga privat atau sektor garis keturunan yang menyangkut produksi untuk subsistensi dan pembagian. Tanggung jawan para laki-laki dalam berburu dan perang sering menggiring nya secara lagsung kedalam perdagangan dan relasi-relasi politis eksternal, dan perkembangan ruang publik ini mendesak posisi wanita.
3. Relasi-relasi yang terstratifikasi dalam masyarakat-masyarakat pra-industrial diman rumah tangga partriarkis menjadi unit independen, dan kerja perempuan selanjutnya diprivatisasi.
4. Pengeksploitasian dalam masyarakat kapitalis industrial dimana penaklukkan oran-orang pada umumnya dipararelkan dengan penaklukkan perempuan secara spesial (Etienne dan Leacock 1980: 8-16).

Poin pertama analisis historis ini tidak sedang memformulasikan detail-detail ketidaksetaraan gender, tapi melihat mata rantai hubungan mode-mode produksi dengan bentuk-bentuk sosial relasi-relasi gender. Tidak hanya memulai untuk menteorisasikan transisi dari relasi-relasi egaliter awal ke dominasi laki-laki belakangan, pemaparan diatas menghilangkan mitos bahwa peremapuan telah (secara natural) selalu menjadi subordinat dari laki-laki.

Kedua, bagaimanapun juga, beberapa feminis memiliki masalah dengan ragam kerja karena kelihatannya, menurut mereka, analisis Marxis tradisional terlalu sederhana dalam memformulasikan teori, mengabaikan beban ganda dan keletihan perempuan selama ini. Alih-alih, beberapa fefeminis Marxis memproklamirkan bahwa sangat penting untuk melakukan analisis kategori-kategori baru untuk “partriarki.” Kemudian, Hartmann (1984: 14) mendefinisikan partriarki sebagai “seperangkat relasi-relasi antara laki-laki, yang memiliki basis material, dan yang, secara hirarkis, memapankan atau menciptakan interdependensi dan solidaritas diantara para laki-laki sehingga membuat mereka dapat mendominasi perempuan.” Basis material partriarki menjadi dasar kontrol laki-laki atas kekuatan kerja perempuan. Kontrol ini dipelihara dengan mengeksklusikan permpuan dari akses terhadap sumber-sumber daya produktif yang esensial. Disini potensial analitis terletak pada penghubungan institusi-institusi sosial yang mengkoersi dan melegitimasi relasi-relasi kekuatan yang tidak setara dengan proses-proses personal psikologi dan kesadaran melalui mana orang-orang, terutama perempuan, menerima dan merasionalisasikan posisi-posisi mereka dalam masyarakat.

Kemajuan-kemajuan signifikan kemudian dibuat oleh para feminis dalam memperluas konsepsi Marxian terhadap reproduksi material kehidupan. Teori-teori feminis sosialis tentang pembangunan memberi penekanan pada produksi dan reproduksi sebagai aspek-aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun eksistensi, dan kemudian sebagai bagian-bagian signifikan yang ekual dalam teori pembangunan. Konsepsi lebih luas mengenai pembangunan mengalamatkan gender sebaik relasi-relasi kelas, kerja-kerja perempuan dalam ruang domestik dan publik, membesarkan anak dan sosialisasi, dan keluarga sebagai lokus khusus reproduksi. Pada umumnya proses-proses produktif dan reproduktif sejarah manusia terjadi pada waktu bersamaan dan dalam lokasi geografis yang sama − sebagai aspek-aspek pembeda yang terlihat jelas pada jalan kehidupan secara menyeluruh. Baru-baru ini, dan “pembangunan” yang semakin meningkat, aspek-aspek yang beragam terpisah kedalam ruang-ruang sosial dan spasial yang berbeda. Ruang-ruang ini terikat secara bersamaan dengan relasi-relasi ketidaksetaraan dan dominasi. Keseluruhan sistem surplus produksi ditanggung oleh para pekerja wnita yang tidak dibayar. Ideologi-ideologi, yang menawarkan banyak pemahaman (sophisticated), melegitimasi sistem sistem eksploitatif ini sebagai sesuatu yang alamiah (“para wanita selalu sebagai seks yang lebih lemah). Pembangunan kemudian adalah determinasi-gender sama halnya dengan sebuah proses kelas. Tentunya, gender dan kelas berinterseksi untuk menyusun spesifikasi-spesifikasi proses pembangunan. Kontradiksi-kontradiksi antara aspek-aspek yang beragam dari proses kehidupan ini telah menjadi kekuatan penggerak perubahan sosial masyarakat. Masyarakat-masyarakat yang didomiasi secara kelas dan gender, yang dikarakterisasikan oleh eksploitasi, dominasi,dan kondisi-kondisi kehidupan yang tidak ekual, berkembang dalam bentuk-bentuk yang bias dan berbeda. Feminis sosialis percaya seluruhnya perbedaan bentuk-bentuk atau kondisi-kondisi pembangunan berdasarkan atas transformasi relasi-relasi gender. Feminisme sosialis tetap berkomitmen pada perhatian Marxis terhadap kreasi historis dan sosial alam manusia dalam suatu proses yang meliputi gender, ras, etnisitas, dan distingsi-distingsi lainnya, layaknya kelas itu sendiri. Feminisme sosialis menuntut demokrasi reproduktif, termasuk kontrol kolektif dan parsipatoris terhadap keluarga dan keputusan-keputusan prokreatif, sedemikian juga dengan kontrol terhadap produksi komoditas.

Epistemologi Feminis

Beberapa pertanyaan mengenai epistemologi, banyak yang menguraikan bahwa awal mulanya adalah 1970-an sampai permulaan 1980-an, menjadi fokus utama perhatian para peminis pada pertengahan hingga akhir 1980-an. Secara partikular, ide-ide Pencerahan mengenai akal budi (reason), kemajuan, dan emansipasi menggarisbawahi perkembangan modern yang dipelajari oleh feminis, sedemikian juga halnya dengan poststruktural, kritisisme. Dalam *The man of Reason* Genevieve Lloyd (1984), seorang profesor filsafat di Universitas New South Wales, Australia, berpendapat bahwa ideal rasionalitas yang berkembang pada abad ke tujuh belas oleh Descartes, Spinoza, dan ahli filsafat lainnya dikarakterisasikan sebagai “kelaki-lakian,” yaitu bahwa pembicaraan para ahli filsafat tentang idela-ideal “manusia” sebenarnya merupakan pembicaraan tentang ideal-ideal “kedewasaan lelaki” (Manhood). Filsuf Abad ke tujuh belas Rene Descartes memisahkan pemikiran (akal budi) yang cerah dan penuh pemahaman (*distinct*), yang dia atributkan kepada para laki-laki, dari kemampuan (emosi-emosi) sensual dan imajinatif, yang dia atributkan kepada perempuan. Spinoza berpikir bahwa emosi-emosi dalam pernyataan-pernyataan orisinal mereka, semisal nafsu-nafsu, merupakan persepsi-persepsi yang membingungkan dalam memahami realitas yang dapat ditransformasikan kedalam emosi-emosi intelektual melalui pemahaman objektif seorang manusia/laki-laki yang kuat mengenai universalitas dan kebutuhan transhistoris. Selama periode Pencerahan, nafsu dan ketidakrasionalan pada umumnya dilihat secara lebih positif, sebagai asal muasal (mata air) tindakan, Lloyd berpendapat. Namun mereka tidak ditransendensikan, atau ditransformasikan, melalui medium akal budi, menuju mode-mode pemikiran yang “lebih tinggi.” Romantisisme abad ke 19, Lloyd berpendapat, sekali lagi merevaluasi nafsu-nfsu, tapi menempatkan perempuan pada satu tumpuan, meninggalkan keutuhan “Manusia akal budi,” mengawetkan dan tentunya mengabsahkan dikotomi modern antara akal dan perasaan. Dalam disafeksi feminis poststruktual dia menemukan tidak hanya kritisisme gagasan Pencerahan bahwa seluruh masalah dapat diselesaikan secara aktual melalui kemajuan akal, tapi ide yang lebih radikal bahwa banyak masalah sebenarnya bermuasal-muasal dari akal (laki-laki) itu sendiri.

Dalam sebuah argumen yang pararel, Sandra Harding, seorang profesor filsafat Universitas Delaware, berpendapat bahwa kritisisme ilmiah feminis bergerak dari suatu posisi yang semata-mata olmu pengetahuan yang maju, kepada suatu transformasi dasar-dasar ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang difavoritkan berdasarkan nilainya:

> Posisi feminis radikal berkeyakinan bahwa epistemologi, metafisika, etika, dan politik bentuk-bentuk ilmu alam yang dominan adalah androsentris (berpusat pada lelaki) dan saling mendukung secara mutual; yang meskipun keyakinan kultural Barat tertanam secara mendalam dalam kemajuan intrinsik ilmu alam, ilmu alam sekaran melayani secara primer kecenderungan-kecenderungan sosial regresif; dan bahwa struktur sosial ilmu alam, kebanyakan aplikasi dan teknologinya, mode-mode pendefinisian masalah-masalah riset dan perancangan eksperimen-eksperimen, cara-caranya membangun dan mencari makna-makna, tidak hanyak seksis tapi juga rasis, klasis, dan koersif secara kultural. Dalam analisis mereka tentang bgaimana simbolisme gender, pembagian kerja secara seksual berdasarkan gender, dan konstruksi identitas gender individual telah mengafeksi sejarah dan filsafat ilmu alam, para pemikir feminis telah menantang aturan-aturan sosial dan intlektual pada fondasi mereka yang sebenarnya (1986: 9)

Kebenaran-kebenaran metodologis dan transedental yang diambil supaya bersifat inklusif kemanusiaan membawa penanda-penanda gender, kelas, ras, dan budaya. Teknik-teknik kritik sastra, sekarang bekerja untuk “membaca ilmu alam sebagai sebuah teks,” mengungkapkan makna-makna sosial tersembunyi terhadap klaim-klaim dan praktik-praktik yang dianggap bebas-nilai. Epistemologi-epistemologi feminis meletakkan basis pemahaman alternatif terhadap ragam pengalaman untuk mengubur keyakinan-keyakinan yang dihormati sebagai ilmu pengetahuan. Kritik-kritik ilmiah feminis tersebut, harding berkata, menantang identitas personal kepada inti pra-Rasionalnya.

Harding menguraikan tiga perangkat pendirian feminis secara epistemologis terhadap ilmu alam: *empirisme feminis* berpendapat bahwa kesetiaan yang lebih tegas kapada norma-norma penelitian yang ada oleh ilmuwan-ilmuwan perempuan dapat membenarkan bias-bias sosial dalam ilmu alam; *teori sudut pandang feminis,* berasal dari pemikiran Hegelian dan Marxian, benpendapat bahwa dominasi laki-laki mengakibatkan secara parsial, pemahaman-pemahaman jahat, padahal posisi wanita yang ditaklukkan secara potensial memberikan pemahaman yang lebih lengkap; *posmodernisme feminis* menantang asumsi-asumsi universal dua posisi yang berbeda, menekankan keretakan identitas yang retak yang diciptakan oleh kehidupan modern dan alam teoretisasi yang multipel. Harding bertanya apakah para feminis seharusnya menyerah mencoba mengadakan *satu* cerita feminis yang benar akan realitas ketika berkonfrontasi dengan aliansi-aliansi kuat antara ilmu alam, dan seksis, proyek-proyek sosial rasis. Dia menyimpulkan bahwa gagasan-gagasan epistemologis feminis memiliki permasalahannya sendiri dan tendensi-tendensi yang saling berkontradiksi, namun kritisisme feminis telah meningkatkan pemahaman androposentrime dalam ilmu alam (Harding 1986: 29).

Namun bahkan sebagaimana kemapanan posisi-posisi ini, keseluruhan proyek feminis (Barat) diarahkan tentang oleh kritik pedas dari para perempuan kulit bewarna, lesbian, dan perempuan dunia ketiga. Bagi Audre Lodre, seorang sarjana lesbi berkulit hitam, feminis mengklaim bahwa seluruh perempuan mengalami opresi hanya karena mereka perempuan yang tidak menyukai benda-benda partriarki yang beragam, dan (laki-laki) menghiraukan bagaimana benda-benda yang serupa dapat berguna bagi sesama wanita. Menurut Lorde, perbedaan-perbedaan diantara perempuan seharusnya dilihat sebagai kantung kekuatan − mereka adalah, dia berkata, “polaritas-polaritas diantara mana kreativitas dapat berpijar seperti sebuah dialektika” (Lorde 1981: 99). Tanpa komunitas, pikirnya, tidak akan ada kebebasan. Tapi komunitas tidak dimaksudkan untuk menghasilkan perbedaan-perbedaa, tidak juga bermuatan “pretensi patetis” bahwa perbedaan-perbedaan diantara perempuan tidak bisa eksis. Kegagalan para feminis akademis untuk menghormati perbedaan sebagai sebuah kekuatan adalah sebuah kegagalan untuk meraih melebihi pelajaran patriarkis − “Membagi dan menjajah” − yang, bagi Lorde, telah harus ditransformasikan kedalam “Menegaskan dan memberdayakan.”

Gagasan Norde tentang tempat pengetahuan, yaitu, diferensial-diferensial dalam kekuatan untuk menteorikan perbedaan, diekspresikan dengan kekuatan partikular oleh para perempuan Dunia Ketiga. Trinh Minh-ha (1989) berpikir bahwa perbedaan seharusnya tidak didefinisikan oleh seks dominan, terlebih lagi hal tersebut boleh jadi didominasi oleh budaya (Barat) dominan. Dibawah perlindungan “kartografi-kartografi perjuangan” Chandra Mohanty (1991a, 1991b), dari Universitas Oberlin, secara kritis memeriksa beberapa tulisan feminis yang memproduksi “wanita Dunia Ketiga” sebagai suatu subjek yang singular, monolitis sebagai konsekuensi dari apa yang ia sebut sebagai “kolonisasi diskursif.” Disini ia bermaksud untuk melihat appropriasi dan kodifikasi ilmu pengetahuan dan pengetahuan melalui kategori-kategori analitis yang membawa kepentingan-kepentingan feminis yang diartikulasikan Barat sebagai referensi primer mereka. Bagi Mohanty, kolonisasi menyiratkan suatu relasi dominasi struktural yang melibatkan yang mensupresi heterogenitas subjek-subjek Dunia Ketiga. Para penulis feminis “secara diskursif mengkolonisasi heterogenitas-heterogenitas materil dan historis kehidupan perempuan di dunia ketiga, dengan demikian

memproduksi/merepresentasi suatu komposit, ‘perempuan dunia ketiga’ yang singular −sebuah *imej* yang tampak dikonstruksi secara arbitrer, tapi bagaimanapun juga membawa bersamanya tanda tangan otoritas wacana humanis Barat” (Mohanty 1991b: 53). Kebanyakan karya feminis akan para perempuan Dunia Ketiga, katanya, dikarakterisasikan oleh asumsi-asumsi privilese dan universalitas etnosentris, dan tidak cukup sadar-diri tentang efek-efek ilmu pengetahuan Barat. Analisis-analisis berdasarkan atas lintas budaya singular, gagasan-gagasan partriarki monolitis atau dominasi laki-laki menggiring kepada gagasan reduktif yang serupa mengenai “perbedaan Dunia Ketiga,” sebuah opresi sistematis terhadap perempuan yang ia sendiri mengolah kekuatan opresif. Mohanty menemukan kesamaan-kesamaan yang tidak ditunjukkan antara posisi-posisi feminis tersebut dan proyek humanisme Barat pada umumnya. Humanisme melibatkan penyembuhan “Timur” dan “Perempuan” sebagai Yang Lain dalam logika biner dimana istilah pertama (Identitas, Universalitas, Kebenaran), yang pada faktanya bersifat skunder dan derivatif, adalah terlalu privilese, dan penjajahan, istilah kedua (perbedaan, temporalitas, eror), yang pada faktanya bersifat primer yang origninatif − hanya karena Perempuan dan Timur didefinisikan sebagai pereiferal atau Yang Lain dapat membuat Manusia Barat mrepresentasikan dirinya sendiri sebgai pusat atau Sama. Sebagaimana Mohanty menguraikannya, “bukanlah pusat yang mendeterminasi periferi, namun periferilah yang, dalam keterbatasannya, mendeterminasi pusat” (1991b: 73-74). Para teoretikus feminis poststruktural Prancis, seperti Julia Kristeva (1980) dan Helene Cixious (1980), telah mendekonstruksi antrofomisme laten dalam wacana Barat; Mohanty menyarankan strategi pararel, antrofomisme latent dalam tulisan feminis mengenai prempuan Dunia Ketiga.

Pernyataan Mohanty yang dihasilakan dari sebuah posisi feminisme ‘Other’ sangat mengacaukan mode wacana feminis yang sedang berlaku, yang telah mengambil bentuk posisi-posisi persaingan politis dalam alam dunia yang diasumsikan secara kebarat-baratan dan privilese. Gagasan suatu gerakan perempuan singular progressif mulai dipertanyakan secara secara tajam dan tegas. Juga, sebagaimana era 1980-an telah beralih kepada era 1990-an, tekanan penuh dari gerakan perempuan posmoderen dalam filsafat dan teori sosial mulai mengafeksi teori feminis. Feminisme posmoderen menemukan akal budi modern yang menormalisasi, barat, prejudis maskulin yang “pencerahan” telah mewujud dalam rasionalisme ilmiah yang menjajah. Para feminis posmodern berpendapat bahwa akal budi melahirkan kalim-klaim kebenaran yang diasumsikan secara opresif, universal, dan dogmatis dengan mengoposisi subjek pengetahuan maskulin terhadap objek terjajah (biasanya feminin) yang dikuasai. Bagi beberapa feminis, Pencerahan dan feminisme dioposisi secara prinsipil; karena yang lain, masalahnya belum begitu jelas. Jane Flax (1990: 42), seorang profesor ilmu politik di Universitas Harvard, menetapkan bahwa teori feminis mestinya berada pada ranah filsafat posmodern: “gagasan-gagasan feminis tentang diri, pengetahuan, dan kebenaran adalah terlalu kontradiktif terhadap apa saja yang berisi kategori-kategori Pencerahan. Jalan menuju pada masa depan feminis tidak boleh tidur nyaman dalam revival atau appropriasi konsep-konsep pencerahan mengenai orang atau pengetahuan.” Beberapa teori feminis tersebut mulai merasakan motto Pencerahan “beranilah menggunakan akalmu sendiri” (kant), yang tersisa dalam perasaan diri gender yang berakar dan pada muslihat diri. Kecurigaan menyebar bahwa seluruh klaim transendental merefleksikan dan mereifikasi pengalaman sekelompok kecil orang saja, yang mayoritas adalah laki-laki Barat kulit putih.

Posisi-posisi tersebut, menyambut posmodernisme dengan “antusiasme,” diserang balik oleh teoretikus sosial feminis lainnya yang masih menemukan hal-hal potensial dalam kritik humanisme Barat (Johnson 1994). Kemudian Kristine Di Stefano (1990) berpendapat bahwa feminisme secara kuat, jika bersifat ambivalen, dilokasikan dalam etos-etos modernis dengan penekanannya pada kepentingan gender. Klaim-kalaim feminis dalam perlawanannya terhadap posmodernisme adalah bahwa:

1. Posmodernisme mengekspresikan sebuah kontituensi (putih, laki-laki privilese Barat industrial) yang telah memiliki Pencerahan untuk dirinya sendiri dan bahwa (mereka) sekarang telah siap dan bersedia untuk mempermasalahkan warisan tersebut melalui penelitian kritis.
2. Objek-objek upaya posmodernisme yang berbeda secara kritis dan dekonstruktif telah menjadi kreasi-kreasi konstituensi yang sama secara spesifik dan parsial (dimuali dari Sokrates, Plato, Aristoteles).
3. Teori mainstream Posmodernisme (Derrida, Lyotard, Rorty, foucault) telah mengomentari secara membabi-buta dan tidak sensitif terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang gender dalam pembacaannya akan sejarah, politik, dan budaya.
4. Proyek posmodern, jika diadopsi secara serius oleh para feminis, akan membuat kemiripan dari kesatuan politik feminis menjadi mustahil.

Kemudian banyak para feminis kiri mendorong skeptisisme akan kritisisme anti-Pencerahan. Luce Irigaray (1985) bertanya, Apakah posmodernisme merupakan tipu muslihat partriarki? Nancy Hartsock (1985) berkata bahwa posmodernisme muncul untuk membela kelompok-kelompok marjinal, tapi dia menemukan posmodernisme hanya mengganggu daripada menolong; teori-teori posmodern hanya memberikan sedikit petumjuk, dan parahnya hanya semata-mata merekapitulasi efek-efek teori-teori pencerahan.

Banyak teoretikus feminis, seperti Flax dan Di Stefano, bersikap ambivalent dalam memilih antara modernisme dan posmodern. Bagaimanapun juga, daripada berusaha untuk meyelesaikan ambivalensi ini (dengan memfavoritkan satu sisi daripada yang lain), Sandra Harding (1990: 86) berpendapat bahwa "ambivalensi tersebut agaknya lebih kuat dan prisipil" − yang berarti, dia memperdebatkan kesadaran diri dan ambivalensi yang diartikulasikan secara teoretis ketegangan-ketegangan dan kontradiksi-kontradiksi dalam dunia yang dihuni oleh para feminis. Meskipun begitu, Harding berkesimpulan, feminisme berdiri berpijak pada Pencerahan dalam kepercayaannya bahwa teori-teori yang lebih maju berkontribusi terhadap progress sosial. Dia berpendapat bahwa penyelidikan feminis dapat memproduksi representasi-representasi yang sedikit parsial tanpa memaksakan ketercukupan mereka secara absolut, universal, atau abadi. Kedua teoretikus feminis ilmiah dan kritikus feminis posmodern tersebut "berdiri dengan satu kaki diatas modernitas dan satunya lagi di ranah yang lain" (Harding 1990: 100). Dia berpikir bahwa feminisme membutuhkan *kedua* agenda-agenda Pencerahan dan posmodersn.

Berada pada posisi antara, Donna Haraway (1991), dari Universitas Santa Cruz di California, memperdebatkan penggunaan doktrin objektivitas feminis yang dia sebut sebagai "pengetahuan-pengetahuan yang disituasikan." Dalam konsepsi ini, objektivitas dicermati sebagai perwujudan partikular dan spesifik, dan bukan visi transenden yang palsu: "Hanya visi objektif yang menjanjikan perspektif-perspektif parsial....Objektivitas feminis adalah tentang lokasi yang dibatasi dan pengetahuan yang disituasikan, bukan tentang transendensi dan pemisahan subjek dan objek. Dalam cara ini kita boleh jadi bertanya-tanya apakah yang kita pelajari untuk tahu" (Haraway 1991: 190). Menurut haraway, feminisme berusaha untuk menteorisasikan dasar-dasar untuk mempercayai posisi berdiri yang menguntungkan bagi mereka yang kalah (dilihat dari perferi dan kedalaman). Pengaturan posisi mereka yang kalah ini tidak juga bebas dari kritik, tapi kelihatan lebih disukai karena mereka setidaknya menunda kekritisan, inti pengetahuan interpretatif (dalam hal ini kita melihat sisa-sisa dari sudut pandang feminis). Pertanyaanya, bagi haraway, adalah *Bagaimana* caranya melihat dari bawah? Pengaturan posisi yang disukai tersebut adalah sama menunjukkan sikap bermusuhannya seperti relativisme sebagaimana ia menginginkan adanya totalisasi dan visi tunggal. Alternatifnya adalah pengetahuan kritis, bisa diatur-tempatkan, dan parsial yang menopang jaringan-jaringan koneksi dalam politik dan perbincangan epistemologi, padahal relativisme adalah tidak dimana-mana, namun mengkalim berada dimana-mana (sebuah "trik yang licik"). Bersama para feminis lainnya, Haraway memperdebatkan sebuah praktik bojektivitas yang memprivilese-kan kontestasi, dekonstruksi, konstruksi, koneksi-koneksi berjaringan, transformasi, dan pemposisian secara mobil, dan ketidakberpihakan yang bernafsu:

> Saya menentang politik dan epistemologi lokasi, pemposisian, dan pensituasian, dimana parsialitas dan bukan universalitas adalah kondisi dari yang didengarkan untuk membuat klaim-klaim pengetahuan rasional. Mereka adalah klaim-klaim atas kehidupan khalayak: penglihatan dari tubuh, selalu sebuah tubuh yang menstruktur dan terstruktur yang kompleks dan kontradiktif, melawan penglihatan dari atas, dari tidak dimana-mana, dari simplisitas. Hanya tipuan licik yang dilarang (Haraway 1991: 195).

Jadi jalan satu-satunya untuk menemukan visi yang lebih luas adalah dengan berada pada suatu tempat (cf. "berpikir lokal" pada bab 5). Pertanyaan ilmiah feminis berkisar pada objektivitas sebagaimana rasionalitas yang diposisikan. Imej-nya dihasilkan dari menghubungkan pandangan-pandangan parsial dan suara-suara yang terputus kedalam sebuah posisi subjek kolektif, serangkaian pandangan dari suatu tempat.

Kritisisme Feminis atas Teori Pembangunan

Serangan feminis ke jantung epistemologi modern, bersamaan dengan pertumbuhan dan diferensiasi pemikiran feminis radikal dan sosialis secara umum, membawa kepada pemeriksaan kembali teori pembangunan secara kritis sebagai perusahaan maskulinis. Dalam sebuah contoh terkemuka, Catherine Scott (1995), seorang profesor ilmu politik di Perguruan Tinggi Agenes Scott melihat teori ketergantungan dan modernisasi yang mengkonseptualisasikan tema-tema seperti modernitas, pembangunan, percaya kepada diri sendiri, dan revolusi dalam sebuah visi yang diinformasikan oleh pra pendudukan dan konsepsi-konsepsi gender; perluasan terhadap kebijakan-kebijakan dominan dan praktik-praktik agensi internasional dan pemerintahan revolusioner adalah sama. Dalam teori modernisasi, Scott (1995: 5) berargumen, modernitas dan sebuah ruang publik yang didominasi laki-laki, kelihatan menonjol, dan rasional dikontraskan dengan yang "difeminisasi," masyarakat tradisonal yang tertinggal, sementara prestasi modernitas dilihat sebagai pertarungan kekuasaan dengan feminin dalam menuju "kedewasaan." Dalam modernisasi, pembangunan menghendaki kemunculan manusia industrial yang rasional, reseptif terhadap ide-ide baru, punctual, optimistik, dan universalistik, dengan pembagian kerja yang ditentukan di dalam pemerintahan modern yang efisien dan memiliki mekanisme dominasi dan kekuasaannya yang baru. Bagi Scot, model universal dari proses modernisasi pada faktanya berdasarkan pada sebuah versi modernitas maskulin yang sering diidealisasi. Dalam pendekatan ini, para wanita secara bergantian menjadi tidak kelihatan, terancam secara paternalistik, atau digunakan untuk "tes lakmus" untuk menentukan derajat keterbelakangan suatu

negara. Modernisasi membutuhkan manusia-manusia yang bisa bergerak dengan sendirinya untuk meninggalkan rumah tangga, mengabaikan tradisi, dan mengasumsikan tempat mereka diantara para manusia yang rasional. Perempuan dan rumah tangga dipahami sebagai bagian dari masa lalu, merepresentasikan pandangan dunia yang berbahaya bahwa alam tidak dapat diubah dan orang-orang tidak memiliki kekuatan untuk mengontrolnya. Modernisasi melibatkan subordinasi tradisi, alam, dan feminin. Bagi Scott, teori-teori modernisasi juga mereplikasikan dikotomi publik/private yang mencolok dalam pikiran Barat: ruang privat dan perempuan bersifat inferior dan derivatif atau komplementer yang terbaik terhadap ruang publik dan laki-laki.

Teori ketergantungan menentang modernisasi sebagai representasi kapitalisme dan intensifikasi eksploitasi. Scott berpendapat bahwa ketengantung, dalam versi Amerika-nya, tidak menantang gagasan kapitalisme yang secara inheren progressif dan dinamik selekasnya memungkinkan sebuah akhir dari persyaratan-persyaratan kebutuhan material yang menekan. Sebagaimana Marx dengan gagasannya menganai Asia yang tidak berubah, teoretikus ketergantungan melihat formasi-formasi sosial prakapitalis sebagai pembangunan yang otonom di wilayah periferi. Namun teori ketergantungan, menurutnya, memberikan oposisi dikotomis teori modernisasi antara ruang produksi sosial yang rasional dan privat, dunia prakapitalis dalam sebuah logika biner antara pusat dan periferi. Teori ketergantungan juga memotret industrialisasi ruang publik sebagai paradigma pembangunan ekonomi dengan mana struktur-struktur sosial prakapitalis sebagai penghalang. Teori ketergantungan berbagi dengan marxisme definisi pembangunan sebagai penguasaan dan transformasi alam, memusatkan konseptualisasi perjuangan sosial seputar aktivitas produktif, mengecualikan perjuangan antara laki-laki dan perampuan, dan mempertahankan (secara implisit) gagasan-gagasan alam sebagai feminin.

Scott bahwa teoretikus modernisasi dan ketergantungan dapat belajar banyak dari pembacaan kembali ide-ide mereka secara kritis. Hal ini dapat mengarah kepada pertimbangan kembali makna modernisasi, industrialisasi, kerja, dan pembangunan. Pembacaan kembali memperkenankan teori pembangunan ditempatkan dalam krisis afeksi teori sosial Barat dalam mempertanyakan secara mendalam pokok-pokok teori; dikotomis maskulinis; seperti modern dan trasional, pusat dan periferi, Dunia Pertama dan Ketiga; dan aturan teori dalam menegakkan kategori-kategori esensialis yang memungkinkan dominasi. Scott menawarkan teori posisi berdiri feminis sebagai perspektif. Hal ini memungkinkan sensitivitas terhadap kelangsungan jalan struktur kekuasaan sistemik yang memiliki posibilitas untuk penulisan kembali makna pembangunan dalam rangka supa orang bisa tetap melanjutkan usaha-usaha untuk merealisasikan aspirasi mreka.

Perempuan, Pembangunan, Teori

Dalam respon terhadap kritisisme tersebut, para aktivis feminis dan pembangunan melakukan serangkaian usaha untuk mereformulasikan teori. Isu utama adalah: Dengan banyaknya tanggungan kerja perempuan, jika bukan hampir semuanya, di Dunia Ketiga, kenapa mreka dieksIusikan dari teori pembangunan, dan apa perbedaan yang terjadi jika teori direformulasikan ke pusat disekitar pengalaman-pengalaman perempuan dan relasi-relasi gender? Menempatkan relasi-relasi gender apa pusat teorisasi, teoretikus feminsi pembangunan berpendapat, mereorientasikan wacana pembangunan. Area-area tradisional yang menjadi perhatian pembangunan dilihat dari suatu titik yang menguntungkan yang berbeda dimana aspek-aspek yang sbelumnya diperlakukan secara marginal menjadi (sebagai gantinya) fokus perhatian yang utama − sebagai contoh, industrialisasi di Dunia Ketiga mempekerjakan bukan buruh (yang diasumsikan sebagai laki-laki) tapi para pekerja perempuan, sedangkan relasi-relasi gender, yang sebelumnya dikesamping, menjadi esensial untuk memahami aktivitas produktif. Sebagai konsekuensinya, aspek-aspek baru tentang pembangunan menajdi fokus; semisal, sektor-sektor ekonomi informal dan rural, ruang reproduktif sebagai komponen vital pembangunan, atau relasi-relasi antara produksi dan reproduksi. Para pendukung pandangan baru ini mengklaim bahwa ini merupakan lebih daripada sekedar perubahan dalam teori pembangunan: teori ini secara aktual memajukan atau mentranformasikan teori sebelumnya.

Untuk menjadikannya lebih konkret, kita sebaiknya memikirkan kembali pembangunan dari posisi teori sudut pandang feminis yang diuraikan secara garis besar dalam *Uang, Seks, Kekuasaan* oleh Nancy Hartsock (1985), profesor ilmu politik Universitas Washington. Dalam karya Hartsock, teori sudut pandang feminis memposisikan serangkaian level realitas, dimana level yang lebih dalam termasuk dan menjelaskan permukaan-permukaan atau penampakan-penampakan. Teori sudut pandang feminis memperkuat kemungkinan-kemungkinan pembebasan yang diwujudkan dalam pengalaman perempuan. Sudut pandang feminis bertalian dengan sudut pandang kelas pekerja, namun perlu dicermati secara seksama, karena secara partikular perempuan hampir melakukan semua kerja termasuk juga reproduksi kekuatan buruh. Kontak buruh laki-laki dengan alamnya diluar pabrik dimediasi oleh perempuan; namun perempuan memiliki pengalaman yang lebih mendalam akan alam. Bagi Hartsock, pengalaman perempuan dalam reproduksi merepresentasikan kesatuan dengan alam yang melampaui pengalaman proletar akan perubahan material/metabolis. Keibuan menghasilkan konstruksi eksistensi perempuan yang berpusat pada nexus relasional yang kompleks dan berfokus pada tubuh perempuan. Pengalaman manusia (laki-laki) dikarakterisasikan oleh dualitas konkret melawan abstrak yang berasal dari pemisahan antara kehidupan rumah tangga dan publik. Dualisme maskulin tersebut menandai teori sosial phallosentris, sebuah sistem

duslisme hirarkis (abstrak/konkret, pikiran/tubuh, budaya/alam, statis/berubah, Dunia Pertama/Dunia Ketiga, dsb). Berdasarkan perbandingan:

> Konstruksi diri perempuan dalam relasinya dengan yang lain membawa kepada arah yang berlawanan − terhadap oposisi kepada dualisme apapun; penilaian tentang yang konkret, kehidupan sehari-hari; rasa pengertian akan berbagai keterhubungan dan keberlanjutan dengan orang lain dan dengan dunia natural. Jika kehidupan material menstrukturasi kesadaran, eksistensi prempuan didefinisikan secara relasional, pengalaman keterbatasan tantangan tubuh dan aktivitas yang mentransformasikan objek-objek fisik fisik dan manusia seharusnya diharapkan sehingga membuat pandangan dunia yang dikotomis menjadi asing. (Hartsock 1985: 242)

Teori sudut pandang feminis, pikir Hartsock, seharusnya didasrkan pada komunalitas dalam pengalaman-pengalaman perempuan, tapi ia tidak jelas atau berdasrkan bukti/keterangan diri sendiri − ia menginginkan pembacaan ulang, pengembangan dan penyebarluasan. Namun, bagi Hartsock, aktivitas kehidupan perempuan secara spesifik membentuk basis materialisme feminis dan, kita bisa secara spesifik menambahkan, sebuah teori pembangunan feminis. Mengeneralisasi kemungkinan-kemungkinan terkini dalam aktivitas kehidupan perempuan terhadap keseluruhan sistem sosial bisa meningkatkan untuk pertama kalinya dalam sejarah daripada (sekedar) pemisahan dan oposisi" (Hartsock 1985: 247). Menyambut hangat hal ini, para feminis sosialis ingin mereformulasikan pembangunan dalam suatu cara yang mengkombinasikan, daripada memisahkan, kehidupan sehari-hari dan dimensi sosialnya, seluruh aktivitas produktif yang dipertimbangkan sebagai sebuah totalitas daripada terbagi-bagi kedalam tipe-tipe hirarkis, dan relasi-relasi dengan alam yang ditempatkan pada jantung keputusan atas apa, dan berapa banyak, untuk memproduksi.

Interaksi antara teori feminis dan pembangunan telah mengambil lima bentuk utama dalam literatur: Perempuan dalam Pembagnunan (WID); Perempuan dan Pembangunan (WAD); Gender dan Pembangunan (GAD); Perempuan, Lingkungan, Alternatif-Alternatif untuk Pembangunan (WED); dan Posmodern dan Pembangunan (PAD) (Rathgeber 1990; Young 1992) Visvanathan et. Al 1997). Masing-masing trend ini didiskusikan dibawah istilah-istilah asli mereka, posisi dalam teori-teori feminis dan pembangunan, penggarisbawahan asumsi-asumsi, strategi-strategi, dan permasalahan mereka.

Perempuan dalam Pembangunan (WID)

Mazhab in berasal dari publikasi Esther Boserup *Women dalam Pembangunan Ekonomi* (1970), analisi awal oleh feminis awal tentang pembagian kerja secara seksual di dunia ketiga dan relasinya terhadap dampak negatif strategi-strategi pembangunan atas perempuan. Boserup berargumen bahwa perempuan di masyarakat agrikultul memiliki status sebagai penghasil makanan. Proses modernisasi, yang diawasi oleh otoritas kolonial yang diilhami gagasan Barat akan pembagian kerja secara seksual, menempatkan teknologi-teknologi baru dibawah kontrol laki-laki, yang kemudian memarginalisasi perempuan, mereduksi status mereka, dan merendahkan kekuatan dan pendapatan mereka. Modernisasi tidak akan progresif dengan sendirinya. Bagaimanapun juga, kebijakan-kebijakan yang lebih mencerahkan yang dilakukan oleh agensi-agensi pemerintah nasional bisa mengkoreksi kesalahan-kesalahan ini. Sebagaimana Jane Jaquette (1990: 55) berkata: "Sedikit panduan dalam karya Boserup membantu mendefinisikan arena baru pembuatan kebijakan dan menandai area baru keahlian profesional. Amerika serikat dan negra-negara lain yang menjadi donor utama dalam bantuan pembangunan menganmbil beberapa langkah untuk mempromosikan integrasi perempuan dalam proses pembangunan."

Istilah "Perempuan dalam Pembangunan" pertama kali digunakan oleh Komite Perempuan Washington, DC, pada bab Masyarakat untuk Pembangunan Internasional sebagai sebuah strategi untuk menarik perhatian perempuan Dunia Ketiga (Rathgeber 1990: 490). Di Amerika Serikat, Amandemen Percy terhadap Akta Bantuan Luar Negeri tahun 1973 menyita perhatian khusus terhadap proyek-proyek yang mengintegrasikam perempuan kedalam usaha ekonomi nasional di negara-negara lain, dengan demikian meningkatkan status dan membantu usaha pembangunan. Sebuah "kantor Perempuan dalam Pembangunan" didirikan dalam organisasi U.S AID tahun 1977. Kantor ini memfokuskan layanan pada sebuah jaringan peneliti dan praktisi di beberapa universitas, lembaga-lembaga riset (Semisal , the International Center for Research on Women), dan donor-donor besar yang tertarik pada pembangunan (yang mana Ford Foundation tampak menonjol). Juga, setelah tahun 1975 Konferensi Perempuan Internasional di Meksiko, PBB mendirikan UNIFEM (Program Bantuan PBB untuk Perempuan), sebagi cara untuk menjangkau para perempuan termiskin diseluruh dunia. Ketika ditanyai apa yang paling mereka inginkan, para perempuan menjawab pendapatan untk menyokong anak-anak dan diri mereka sendiri (Snyder 1995). Sekarang ini, ide utama telah sedang membawa perempuan kedaam proses pembangunan (Mueller 1987). WID menerima pemberlakuan teroi modernisasi sewaktu-waktu − yaitu, pembangunan sebagai proses linear pertumbuhan ekonomi. Argumen modernisasi adalah bahwa perbedaan antara modern dan tradisional berasal dari kurangnya kontak. Pengaplikasian ide ini terhadap perempuan, para teoretikus WID berargumen bahwa perempuan Dunia Ketiga tertinggal dalam proses pembangunan; kate Young (1993) menyebut ini sebagai pengakuan "invisibilitas" perempuan. Pada pertengahan tahun 1970

agensi-agensi donor mengimplementasikan “program-program intervensi melalui transfer teknologi, perpanjangan kredit dan pelayanan yang akan memperbaiki beban berat perempuan” (Rathgeber 1990: 491).

Caroline Moser (1993) telah mencatat lima variasi dalam aliran WID yang merefleksikan perubahan-perubahan dalam kebijakan-kebijakan agensi-agensi pembangunan barat:

1. “Pendekatan Kesejahteraan” terutama tahun 1970 yang berfokus pada aturan-aturan reproduktif prempuan dan hubungannya dengan isu-isu populasi, dengan program-program yang menginisiasikan kontrol kelahiran; Chowdrey (1995) berargumen bahwa pendekatan ini mengilustrasikan representasi WID perempuan “Dunia Ketiga” sebagai *zenana* (dunia domestik, privat).
2. “Pendekatan Ekuitas” yang merefleksikan tuntutan-tuntutan akan kesetaraan yang datang dari Dekade PBB untuk Perempuan. Hal ini menimbulkan resistensi dari laki-laki.
3. “Pendekatan Anti-Kemiskinan” yang berfokus pada perempuan yang siap kerja atau memiliki akses terhadap aktivitas-aktivitas yang menghasilkan pendapatan (income); Chowdry (1995) menunjuk bahw aperempuan masih dianggap sebagai penghuni ruang domestik dan privat, dikecualikan dari urusan-urrusan politik dan ekonomi masyarakat.
4. “Pendekatan Efisiensi” yang bekerja sama dengan program-program penyesuaian struktural IMF dan menekankan partisipasi perempuan dalam ekonomi yang direstrukturisasi baru-baru ini.
5. “Pendekatan Pemberdayaan” yang merefleksiakan tulisan-tulisan feminis Dunia Ketiga, pengorganisasian *grassroot*, dan keinginan perempuan untuk mentransformasikan hukum dan struktur melalui pendekatan *bottom-up.*

Dalam seluruh pendekatan ini perempuan direpresentasikan sebagai korban. Chowdry (1995: 26) berargumen bahwa WID, sebagai diimplementasikan oleh agensi-agensi pembangunan internasional, berawal dari dua wacana modernis yaitu wacana kolonial, dan wacana liberal atas pasar. Wacana kolonial menghomogenisasi dan mengesensialisasi orang-orang Dunia Ketiga, terutama dengan menggunakan imej “perempuan miskin/lemah.” Wacana liberal mempromosikan pasar bebas, pemilihan secara sukarela, dan individualisme, yang melemahkan perempuan Dunia Ketiga. WID mengaliansikan dirinya dengan feminisme liberal, meskipun ia juga menggunakan imej perempuan miskin sewaktu-waktu untuk mengevokasi simpati dan mendapatkan pendanaan. Banyak praktisi WID merupkan para feminis yang berpendidikan tinggi; dalam WID pandangan feminis liberal akan rasionalistas dan pemberdayaan diri secara individual berlaku. Ada penekanan atas “model-model aturan” atau “perempuan terkemuka yang mendapatkan penghargaan sosial dalam ruang publik” (Young 1993: 129). WID cenderung menerima struktur-struktur sosial dan kekuasaan yang eksis, yang bekerja sama dengan mereka untuk pemberdayaan. Oleh karenanya pembagian kerja secara seksual diterima apa adanya atau sebagai sesuatu yang natural tanpa menterorisasikan bagaimana perempuan diopresi oleh laki-laki. Aspek-aspek ideologis gender, responsibilitas yang tidak ekual antara laki-laki dan perempuan, dan ninali yang tidak ekual yang ditempatkan pada aktivitas-aktivitas laki-laki dan perempuan sepenuhnya diabaikan.

Sebagai sebuah pendekatan ahistoris, WID tidak mempertimbangkan beberapa hal yang mempengaruhi perempuan seperti kelas, ras, atau budaya. Fokus ekslusif WID atas perempuan dan penhindarannya terhadap relasi-relasi gender menjadikannya sebagai analisis yang dangkal. WID menekankan kemiskinan dan bukan opresi; terlebih lagi, kemiskinan tidak dilihat sebagai outcome opresi laki-laki terhadap perempuan. Karenanya strategi-strategi pembangunan yang didasarkan pada WID akan cacat, lebih parah lagi membatasi kemampuan mereka membawa perubahan. WID fokus semata-mata aspek produktif (secara formal) kerja wanita, mengabaikan atau menghilangkan aktivitas-aktivitas reproduktif. Berkaca pada teori modernisasi, pembangunan dalam WID dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi yang hanya dapat terjadi (secara formal) dalam aktivitas produktif. Hal ini membawa kepada analisis parsial tentang peran-peran dan relasi-relasi perempuan. Semisal, akivitas-aktivitas yang disokong oleh WID menyediakan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan penghasilanb (income) yang baik, namun WID tidak menawarkan strategi apapun untuk mereduksi beban tugas-tugas rumah tangga atau meningkatkan teknologi reproduktif. WID mengadopsi pendekatan nonkonfrontasional yang hanya setengah hati dalam menyelesaikan subordinasi dan opresi terhadap perempuan. Penekanannya pada kemiskinan juga menciptakan pemisahan tuntutan/permintaan antara para feminis Dunia Pertama dan para feminis Dunia Ketiga sebagaimana WID terlibat dengan kebutuhan2 para perempuan “diluar sana” di negara-negara maju, sementara para teoretikus feminis sendiri tetap menjadi bagian dari budaya Barat − dengan begitu sebuah bentuk maternal baru, tatapan yang memilukan. Lebih umum lagi, telah ada pelalaian dalam mempertanyakan keseluruhan asumsi dan tujuan paradigma pembangunan dominan dari teori modernisasi (Rathgeber 1990; Young 1993).

Para feminis posmodern mengklaim bahwa para teoretikus dan praktisi yang bekerja dala aliran WID cenderung merepresentasikan para perempuan Dunia Ketiga sebagai terbelakang, mudah disakiti (karena lemah), dan membutuhkan pertolongan dari Dunia Pertama. Jane Parpart, dari Universitas Dalhouise, dan Marianne Marchand, dari Perguruan tinggi Middlebury (1995: 16), berargumen bahwa “Wacana WID telah secara general membantu perkembangan praktik-praktik yang mengabaikan perbedaan, pengetahuan lokal, dan keahlian khusus (lokal) sementara ia melegitimasi solusi-solusi asing dalam penyelesaian permasalahan

para perempuan di Selatan." Kritik Postruktural WID yang terkemuka datang dari Adelle Muller (1987). Memakai gagasan-gagasan Foucault (1980a) tentang koneksi-koneksi antara kekuasaan dan pengetahuan, dan ide-ide Dorothy Smith tentang konstruksi sosial realitas dokumenter, Muller menyimpulkan bahwa prosedur-prosedur dokumenter yang digunakan oleh program-program WID berfungsi untuk memindahkan kontrol dari setting Dunia Ketiga menuju pada markas besar agensi pembangunan yang berpusat di Washington, Otawa, dan Geneva. Pembangunan didefiniskan sebagai masalah teknis yang membutuhkan metodologi-metodologi handal yang hanya tersedia di Dunia Pertama. Laporan perempuan Dunia Ketiga ditulis dalam sebuah bahasa polis yang setuju dengan praktik-praktik agensi-agensi pembangunan yang sedang berlangsung. "Pengintegrasian perempuan kedalam pembangunan" pada dasarnya melibatkan pembelajaran untuk bicara bahasa kebijakan birokratis. Penemuan utama Meueller (1987: 2) adalah bahwa hal tersebut "jauh dari apa yang disebut kekuatan pembebas dalam gerakan perempuan sedunia, wacana Perempuan dalam Pembangunan diproduksi dalam dan masuk kedalam prosedur-prosedur instirusi Pembangunan dalam rangka mengatur danmengatur divisi-divisi hirarkis tatanan dunia kapitalis." Sebagai respon terhadap keterbatasan teoretis, politis, dan praktis, dan masih banyak lagi, sebuah paradigma baru membuka diri kepada kiri (the left), Perempuan dan Pembangunan.

Perempuan dan Pembangunan

Pendekatan WID beragumen abahwa perempuan seharusnya dibawa kepada modernisasi. Perspektif WAD berargumen bahawa perempuan telah selalu menjadi bagian dari proses pembangunan dan bahwa sebenarnya yang justru membuat mereka miskin adalah hubungan mereka dengan modernisasi itu sendiri. WAD menawarkan pendekatan terhadap *underdevelopment* yang sedikit banyak berasal dari teori ketergantungan dan neo-Marxis. Isu-isu seperti asal-usul partriarki, intensifikasi partriarki melalui penyebaran kapitalisme, dan analisis Engels (1945 ed) tentang meningkatnya properti privat (sepanjang revolusi agrikultural dan domestifikasi hewan) membentuk latar belakang historis bagi aliran pemikiran ini (Bandarage 1984; Mies 1986). Rathgeber (1990) menyatakan bahwa perspektif WAD berfokus kepada relasi-relasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan selalu memainkan perenan penting dalam ekonomi di masyarakat mereka sebagai aktor yang produktif sekaligus reproduktif. Tepatnya ketika perempuan terintegrasi dengan kapitalisme global-lah marjinalisasi dan opresi itu terjadi, semisal, perempuan digunakan sebagai buruh murah oleh korporasi-korporasi multinasional dalam zona-zona produksi barang ekspor.

Disini analisis klasik tentang pembagian kerja internasional dipresentasikan oleh Maria Mies (1986). Menurut Mies, Sosiolog Jerman, perkembangan historis pembagian kerja (sistem spesialisasi dalam tipe-tipe kerja) adalah sebuah proses yang kejam, partriarkis dimana kelas tertentu manusia (laki-laki), melalui kebaikan senjatan dan kesejahteraan, membangun hubungan eksploitatif dengan perempuan, kelas-kelas lain, dan penduduk lain. Akumulasi kekayaan yang cepat memproduksi konsepsi progres yang menjadikan pemuasan kebutuhan-kebutuhan subsistensi komunitas tampak terbelakang dan ketinggalan jaman. Sang predator, pembagian kerja secara partriarkal didasrkan pada pemisahan dan subordinasi umat manusia, laki-laki dari perempuan, atau penduduk lokal dari orang asing, yang meluas meliputi pemisahan manusia (laki-laki) dari alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi keuatan-kekuatan produktif utama melalui mana manusia (laki-laki) dapat mengemasipasi diri mereka sendiri dari perempuan dan alam. Dibawah pembagian kerja secara internasional yang baru yang dibentuk oleh industrialiasi parsial negara-negara Dunia Ketiga terpilih sejak tahun 1970-an, pemanfaatan manusia yang mudah dikendalikan (docile), buruh perempuan yang murah (ibu rumah tangga daripada pekerja), di Dunia Ketiga berhubungan dengan menipulasi perempuan sebagai konsumen di Dunia Pertama. Oleh kerena itu strategi feminis untuk pembebasan seharusnya membidik pada abolisi total seluruh relasi kemajuan (progress) retrogessif ini; akhir eksploitasi perempuan dan alam oleh manusia (laki-laki), akhir eksploitasi negara-negara kolono oleh Dunia Pertama, dan kelas-kelas oleh para elit. Secara partikular Mies mengembangkan konsepsi feminis tentang buruh yang mengambil modelnya bukan pada laki-laki yang bekerja berdasarkan upah (bukan gaji), namun ibu, yang selalu mengerjakan beban berat dan sekaligus menikmati. Bagi para Ibu, keberlangsungan kerja sebagai *peasant* dan *artisant* berhubungan dengan produksi langsung kehidupan dengan segera, daripada semata-mata memproduksi benda-benda dan kekayaan. Konsepsi feminis tentang buruh juga diorientasikan kepada sebuah konsepsi waktu dimana kerja, kegembiraan, dan istirahat adalah saling berselingan dan berkeseimbangan. Kerja dapat menjadi interaksi langsung dan sensual dengan alam, zat-zat organik, dan organisme yang hidup, namun juga perlu bagi penduduk yang melakukannya dan bagi mereka yang ada disekitarnya; hal ini bertujuan membawa secara bersamaan proses produksi dan konsumsi kedalam satu daerah. Keseluruhan kuantitas dalam ekonomi alternatif ini bisa mencukupi diri sendiri.

Naila kabeer (1994) membedakan antara dua kelompok dalam aliran WAD. Feminisme ketergantungan menggunakan kerangka kerja feminis-Marxis tradisional dan melihat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan oleh ekonomi global yang lebih besar; analisis ini memperluas kritikan WAD terhadap teori pembangunan mainstream. Yang kedua yang berfokus pada partriarki kapitalis global dan kekerasan oleh laki-laki" beraliansi dengan feminisme radikal, yang melihat bahwa gender harus lebih diutamakan daripada kelas. Jaringan internasional para peneliti perempuan Dunia Ketiga DAWN sebagian besar memakai perspektif WAD.

Dalam sebuah dokumen riset utama yang diproduksi oleh DAWN, Gita Sen dan Caren Grown (1987) berargumen bahwa perspektif perempuan yang miskin/lemah dan diopresi memberikan sudut pandang yang kuat untuk menguji efek-efek program-program dan strategi-strategi pembangunan. Ini dikarenakan para perempuyan yang mengalami opresi mengerti tentang kemiskinan, namun para perempuan yang kerjanya dinilai rendah bagaimanapun juga sifatnya vital terhadap reproduksi sosial. Pengalaman-pengalaman dengan pertumbuhan ekonomi tersebut dideterminasi oleh gender dan kelas. Struktur ekonomi dan politk yang ada, sering merupakan warisan dominasi koonial, sering menunjukkan ketidaksetaraan antara nasion, kelas, gender, dan kelompok etnis. konflik-konflik fundamental muncul antara ekonomi kesejahteraan dan proses pembangunan mainstream perempuan. Karena pertumbuhan ekonomi berbahay terhadap kebutuhan para penduduk miskin dan kebutuhan dasar dimarjinalkan dari struktur produksi dominan, usaha untuk survival menjadi sangat sulit:

> Sistem-sistem dominasi laki-laki pada satu sisi, menyangkal atau membatasi akses (perempuan) terhadap sumberdaya ekonomi dan partisipasi politik, dan pada sisi lainnya, membebankan pembagian kerja secara seksual yang mengalokasikan mereka tugas-tugas yang berat, padat karya, namun miskin penghargaan baik didalam maupun diluar rumah, tidak ubahnya dengan menanggung jam kerja terpanjang. Kemudian program-program pembangunan memiliki efek-efek negatif, hal ini dirasakan secara akut oleh para perempuan (Sen dan Grown 1987: 26).

Perempuan dikontrol melalui kererasan seksual. Sebagai contoh, ruang-ruang publik secara fisik didominasi oleh laki-laki, mempersulit perempuan untuk membangun kehidupan di sektor formal ("publik"). Pendidikan modern dan media masa mengekalkan stereotip-stereotip yang bias seks. Serangkaian krisis yang saling berhubungan (meningkatnya kemiskinan, krisis makanan (pangan), kekacauan finansial, degradasi lingkungan, tekanan demografis) memperparah masalah yang ada, sehingga mayoritas penduduk dunia kesulitan untuk bertahan hidup. Daripada menyalurkan sumberdaya kedalam program-program anti kemiskinan, dan mereduksi beban subordinasi gender, bangsa-bangsa memiliterisasi sementara agensi-agensi donor mengekspresikan keputusasaan dan kurangnya perhatian. Agensi-agensi seperti Bank Dunia tidak menekankan perhatiannya pada kebutuhan-kebutuhan secara mendasar, namun malah mendukung penyesuaian struktural (structural adjustment).

Perbandingannya, pendekatan yang dimulai dari perspektif perempuan miskin Dunia Ketiga (dalam versi teori sudut pandang feminis) akan mereorientasikan analisis pembangunan kepada aspek-aspek kritis penggunaan dan penyalahgunaan sumberdaya, untuk mendominasi buruh perempuan dalam hal pemenuhan kebutuhan, dengan fokus perhatian pada kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan memberikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam memberdayakan perempuan (ada banyak contoh usaha-usaha pengorganisiran para perempuan miskin yang bekerja secara mandiri). Pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimotori oleh agensi-agensi seperti Bank Dunia tahun 1970-an melibatkan pinjaman untuk daerah-daerah urban dan pelayanan-pelayanan, social forestry, dan bantuan untuk para petani kecil, namun hanya dibawah metodologi komersialisasi dan integrasi pasar, dan dalam konteks ketidaksetaraan, yang membawa kepada pembusukan permasalahan-permasalahan yang semestinya diselesaikan. Program pembangunan menggunakan pendekatan top-down untuk identifikasi proyek, perencanaan, dan impelementasi. Menurut Sen da Grown (1987: 40-41), kebijakan-kebijakan harus diorientasikan untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk. Mereka menganggap absennya partisipasi lokal bukan hanya tida demokratis namun juga tidak efisien. Pendekatan "penintegrasian perempuan dalam pembangunan" yang digunakan sepanjang Dekade PBB untuk Perempuan mempunyai beberapa cacat yang mendasar, tidak hanya karena kesulitan-kesulitan dalam mengatasi sikap atau pandangan dan prasangka kultural yang telah mendarah daging, tapi juga karena alam dari program-program pembangunan dalam mana perempuan diintegrasikan. Sen dan Grown berargumen bahwa "pendekatan-pendekatan amelioratif jangka-pendek untuk memperbaiki kesempatan-kesempatan kerja perempuan tidak efektif kecuali jika mereka dikombinasikan dengan strategistrategi jangka panjang untuk membangun kembali kontrol penduduk − terutama perempuan − terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang membentuk kehidupan mereka." Melalui yang terakhir tadi mereka bermaksud untuk menghancurkan struktur ketidaksetaraan antara gender dan kelas dan merencanakan perubahan-perubahan untuk mereorientasikan produksi untuk mempertemukannya dengan kebutuhan-kebutuhan mereka yang miskin. Hal ini berarti liberasi nasional, sebuah pergeseran dari orientasi ekspor yang untuk memenuhi kebutuhan internal, yang mereduksi anggaran militer, dan mengontrol korporasi-korporasi multinasional − yaitu, lebih kepada transformasi sosial daripada penyesuaian struktural.

Meskipun demikian, berdasarkan kritik Eva rathgeber (1990), dari Pusat Riset Pembangunan Internasional di Ottawa, Kanada, WAD mengabaikan relasi sosial gender dalam kelas dan tidak secara lengkap mempertimbangkan variasi-variasi partriarki dalam mode-mode produksi yang berbeda dan bagaimana hal ini berdampak pada perempuan. Daripada partriarki, pendekatan WAD menekankan relasi-relasi perempuan dalam struktur-struktur ketidaksetaraan kelas secara internasional. Kabeer (1994) berpendapat bahwa para Marxis yang bekerja dalam aliran ini kurang memberikan perhatian pada reproduksi. Juga, ketika datang kreasi dan implementasi proyek-proyek pembangunan, para kritikus

mengkalim bahwa WAD, seperti WID cenderung mengelompokan perempuan secara bersama-sama tanpa memberikan banyak perhatian pada ras, kelas, atau etnisitas − namun, kita boleh menambahkan, hal ini mengabaikan penekanan Sen dan Grown yang jelas atas para perempuan miskin. Juga ada kesulitan dalam merubah struktur-struktur fundamental. Kabeer (1994) berpendapat bahwa para marxis dan feminis ketergantungan mengambil posisi berdiri yang tidak berkompromi yang mencegah mereka dalam membuat perubahan-perubahan efektif dan relaistis. Lebih jauh lagi, kritikus poststruktural melihat analisis-analisis Sen dan Grown (1987) yang menguniversalisasikan pembagian kerja secara seksual Barat dan mempekerjakan kategori-kategori seperti "buruh" dan "produksi" berakar dari budaya modernitas kapitalis yang tidak setara dalam mendeskripsikan masyarakat-masyarakat "lain." Konsep-konsep tersebut diabstraksikan dari pengalaman-pengalaman historis Manusia Barat yang merepresi tidak hanya perempuan, tapi juga masyarakat "lain." Para feminis yang menggunakan paradigma marxis belum mengatasi batasan-batasan ini. Secara luas paradigma ini merepresi, mendistorsi, dan mengaburkan banyak aspek eksistensi perempuan. Tambahan lagi, Sen dan Grown dikatakan mengkonstruksi para perempuan miskin dunia Ketida dalam imej-diri feminisme yang narsisistik. Daripada melindungi "para perempuan miskin Dunia Ketiga," dianjurkan bahwa supaya kita harus belajar untuk belajar dari mereka, yang berarti mengapresiasi keluasan heterogenitas dilapangan. Para feminis Dunia Pertama seharusnya belajar untuk berhenti merasa privilese sebagai prempuan (Spivak 1988: 135-136). Konsekuensinya visi-visi alternatif Sen dan Grown dinyatakan terjerumus dalam pemikiran Androsentris Barat; mereka gagal menyediakan alternatif sejati untuk pembangunan mainstream (Hirsman 1995).

Gender dan Pembangunan

Pada mulanya perspektif WAD berawal dari para perempuan yang bekerja di Institute Studi Pembangunan, Universitas Sussex tahun 1970-an. Kelompok feminis ini tertarik dalam menganalisa pokok permasalahan dari relasi-relasi gender antara laki-laki dan prermpuan. Mereka pada awalnya melihatnya dari analisis-analisis Amrxis tentang perubahan sosial dan analisis-analisis feminis tentang partriarki (Young 1993: 134). GAD berbeda dari WID dalam konseptualisasinya tentang pembagian kerja secara seksual. Sementara WID cenderung menerima pembagian kerja secara seksual, namun berargumen bahwa nilai lebih seharusnya ditempatkan pada tugas-tugas yang dijalankan wanita, GAD menolak pemabagian kerja secara seksual, karena menurutnya hal tersebut merupakan sebuah sistem dimana laki-laki dan prempuan menjadi saling tergantung (dependen) satu sama lain, dan menyimpulkan bahwa alokasi tugas-tugas seharusnya diubah. Karya/kerja DAWN juga sangat memberikan kontribusi terhadap pendekatan GAD (Chowdry 1995; Rathgeber 1990).

Bagaimanapun juga, dalam pendekatan GAD, relasi-relasi gender daripada "Perempuan" menjadi kategori analitis utama, sementara sejumlah asumsi-asumsi yang diabaikan oleh WID dan WAD dieksplorasi secara lebih mendalam. Sebagai contoh, GAD berpendapat bahwa perempuan bukan merupakan sebuah kelompok yang homogen, namun dibagi berdasarkan kelas, ras, dan kepercayaan. Aturan-aturan perempuan dalam masyarakat seharusnya tidak dilihat sebagai otonom terhadap relasi-relasi gender. Ini menjadi suatu cara pandang terhadap struktur-struktur dan proses-proses yang memberikan perbaikan terhadap posisi perempuan yang kurang menguntungkan. Ketidakberuntungan datang dati ideologi global yang pervasif mengenai superioritas laki-laki; laki-laki memiliki kontrol terhadap perempuan. Kate Young (1993: 134-135), direktur eksekutif Kaum Perempuan Seluruh Dunia, berkata bahwa GAD adalah sebuah pendekatan holistik dimana gender diasumsikan sebagai prinsip hirarki sosial pokok yang membentuk sebuah orde; bentuk-bentuk kebudayaan tententu mengenai ketidaksetaraan dan pemisahan yang terjadi, dan gender diinterrelasikan dewngan hirarki yang dikreasikan secara sosial dan menyeluruh ini. Konsekuensinya, gender harus diakui sebgai bagian dari sistem internasional yang lebih luas. Sebagai contoh, kapitalisme menggunakan relasi-relasi gender untuk memproduksi cadangan buruh, sementara buruh perempuan rumah tangga yang tidak dibayar merupakan suatu cara korporasi-korporasi global untuk menciptkan kekayaan.

Ketika datang praktik pembangunan, GAD dilihat sebagai sebuah pintu masuk bagi perempuan sebagai aktor-aktor sosial diantara struktur-struktur *constraint* yang lebih luas:

> Oleh karena itu penting adanya untuk mengalisis bagaimana tekanan-tekanan lainnya ini (poitis, religius, rasial, dan ekonomis) berinterseksi dan mendinamiskan relasi-relasi gender, yang memprovokasi dalam beberapa hal respon-respon struktural daripada individul untuk memproduksi konfigurasi-kongurasi rasional yang bisa menjadi penekanan kembali bentuk-bentuk lama atau malah menjadi sesuatu yang baru. Sebagai gantinya, respon-respon individual boleh memanfaatkan momentum dan masifikasi yang menggiring mereka kepada suatu perubahan struktural (Young 1993: 139).

Tidak seperti WID dan WAD, GAD melihat menganggap negara sebagai aktor penting yang mempromosikan emansipasi perempuan. Rathgeber (1990) berpendapat bahwa GAD telah melangkah lebih jauh daripada WID atau WAD dalam mempertanyakan struktur-struktur politik, ekonomi, sosial yang mendasar. Hal ini menjadikan rekomendasi-rekomendasinya sulit untuk diimplementasikan, karena mereka tergantung pada

perubahan struktural secara signifikan. Bagaimanapun juga, Kabeer (1994) berpendapat bahwa GAD juga membuka strategi-strategi untuk intervensi feminis. Pendekatan multivarian GAD membedakan antara kapitalisme, partriarki, dan rasisme, dan memungkinkan feminisme untk mengidentifikasikan tempat-tempat dalam kebijakan-kebijakan resmi untuk intervensi-intervensi strategis. Sementara beberapa memandang strategi-strategi ini penting bagi feminis untuk merespon kebutuhan-kebutuhan para perempuan miskin (Visvanathan 1997: 24), yang lainnya berpendapat bahwa GAD tidak bisa melepaskan dirinya dari tendensi-tendensi feminis, namun tetap mengesensialisasikan para perempuan miskin:

Si miskin, perempuan Selatan yang rentan adalah sebuha imej yang kuat, dan adopsi gampangannya terhadap kedua teoretikus dan praktisi mainstream & pembangunan alternatif dapat dimengerti....Namun imej yang sebenarnya ini memperkuat dan mempertahankan wacana modernitas sangat esensial bagi hegemoni dan praktik-praktik pembangunan Utara. (Parpart dan Marchand 1995: 16-17).

Fokus pada imej dan wacana yang berawal dari pengaruh ide-ide posstruktural dan posmodern atas perdebatan tentang gender. Namun, sebelum kita mendiskusikan posmodernisme, kita kembali terlebih dahulu pada cabang penting pendekatan-pendekatan WAD dan GAD, sesuatu yang lebih berfokus pada relasi-relasi antara perempuan, pembangunan, dan lingkungan alam.

Perempuan, Lingkungan, dan Pembangunan

Perspektif ini bermula padatahun 1970-an sebagaimana para feminis menggambarkan hubunga pararel antara kontrol laki-laki terhadap alam dan kontrol laki-laki terhadap perempuan dan mengkoneksikan ilmu pengetahuan maskulin dan industrialisasi dengan perusakan-perusakan kesehatan ekologis planet ini. Carolyn Merchant (1980) melacak akar-akar dilema pembangunan dunia terhadap dunia luas yang dikembangkan oleh para penemu ilmu-ilmu pengetahuan modern (Francis Bacon, rene Descartes, Isaac Newton) yang mengkonseptualisasi realitas sebagai mesin daripada sebagai organisme yang hidup. Dia berpendapat bahwa konseptualisasi ini membawa dampak pada matinya alam sebagai makhluk hidup dan akselerasi eksploitasi manusia dan sumberdaya alam atas nama budaya dan kemajuan. Demikian juga, para ekofeminis yang tertarik pada Dunia Ketiga kontemporer, seperti Vandana Shiva dan Maria Mies, mengadopsi perspektif feminis radikal atas eksploitasi alam. Shiva (1989) berpendapat bahwa ilmu alam (pengetahuan) dan pembangunan bukan merupakan kategori-kategori universal namun lebih merupakan proyek-proyek spesial partriarki Barat yang sedang membunuh alam. Aktivitas pembangunan di Dunia Ketiga yang dilapisi oleh paradigma-paradigma ilmu pengetahuan dan ekonomi yang diciptakan oleh Barat, ideologi bias gender atas komunitas-komunitas yang sebelumnya (dianggap) terbenam dalam budaya-budaya berbeda dengan relasi-relasi dengan alam natural yang sama sekali berbeda. Sebagai korban kekerasan pembangunan partriarkis, perempuan menentang “pembangunan” untuk memproteksi alam dan mencadangkan makanan mereka:

> Para perempuan India telah berada digaris depan dalam perjuangan-perjuangan ekologis untuk mengkonservasi hutan-hutan, tanah dan air. Mreka telah menantang konsep Barat tentang alam, sebagai sebuah objek eksploitasi dan telah memproteksi diri mereka sebgai Prakriti, kekuatan yang hidup yang menyokong kehidupan. Mereka menantang konsep Barat tentang produksi profit dan akumulasi kapital dengan konsep mereka sendiri tentang ekonomi sebgai produksi makanan dan pemuasan kebutuhan. Ilmu pengetahuan yang tidak menghargai keinginan-keinginan alam dan sebuah pembangunan yang tidak menghargai kebutuhan-kebutuhan penduduk tidak dapat dipungkiri lagi mengancam *survival* (Shiva 1989: xvii).

Perjuangan ekologis secara simultan membebaskan alam dari eksploitasi yang membabi-buta dan perempuan dari marginalisasi yang tak kenal batas. Dalam sebuah analisis tentang efek-efek Revolusi Hijau di daerah Punjab, perbatasan India-Pakistan, Shiva berpendapat bahwa asumsi alam sebgai sumber kelangkaan, dengan teknologi sebagai sumber yang mengkompensasikan keberlimpahan, menciptakan disrupsi-disrupsi ekologis dan kultural yang berakhir pada kerusakan tanah, panen-panen yang digerogoti pestisida, bencana-bencana tanah longsor, petani-petani yang hidup tidak berkecukupan, dan tingkat-tingkat konflik dan kekerasan yang belum pernah ditemui sebelumnya.

Menurut Diane Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, dan Esther Wangari (1996), para teoretikus pembangunan universitas Clark, ada beberapa perbedaan gender yang nyata dalam pengelaman-pengalaman adalam dan tangggung jawab lingkungan yand diderivasi dari biology namun dari konstruksi-konstruksi sosial gender yang berbeda dengan kelas, ras, dan tempat. Mereka melihat sarjana feminis lingkungan mengambil sejumlah bentuk. Beberapa aliran pemikiran, seperti feminisme sosialis, tidak setuju dengan pelukisan-pelukisan secara biologis terhadap perempuan sebagai pengasuh (nurturer), dan melihat perempuan dan lingkungan lebih dalam hal aturan-aturan reproduktif dan produktif di negara-negara berkembang. Sebagai contoh, Bina Agarwal (1991) berargumen bahwa para perempuan di India menjadi aktif bukan karena beberapa relasi “natural” dengan lingkungan (sebgaimana halnya Shiva) namun karena mereka menderita secara gender tertentu dari destruksi lingkungan. Para feminis tersebut keluar dari penekanan pemahaman ekologi secara kultural dan politis menuju pada kontrol yang tidak seimbang atas sembur daya (Peet dan Wtts 1996), namun memperlakukan gender sebagai sebuah variabel kritis dalam

interaksi dengan kelas, ras, dan faktor-faktor lain yang membentuk proses-proses perubahan ekologis. Tiga tema dikelompokkan kedalam ekologi politis feminis: pengetahuan yang tergenderkan, yang direfleksikan dalam ilmu pengetahuan yang baru tumbuh tentang survival dalam rumah yang sehat, tempat kerja, dan ekosistem; hak-hak lingkungan yang tergenderkan, termasuk properti, sumberdaya, dan ruang; dan politik lingkungan yang tergenderkan, terutama keterlibatan perempuan dalam perjuangan-perjuangan kolektif terhadap sumberdaya-sumberdaya natural dan isu-isu lingkungan.

"Sustainable Development" menjadi isu sentral dalam perspektif WED. Gagasan ini menghubungkan ide-ide ekuitas antar generasi, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan lingkungan untuk memelihara/menghemat sumberdaya yang tidak terbarukan, dan mereduksi limbah dan polusi industrialisasi. 'Sustainable development' dilihat sebagai kesempatan untuk menantang Pembangunan = ekuasi Pertumbuhan ekonomi dari perspektif sebuah metodologi feminis. Ini artinya mendiferensiasikan feminisme bahkan dari gagasan-gagasan ekonomi dan pembangunan alternatif lainnya. Kemudian, menurut Wendi Harcourt (1994), alternatif "ilmu ekonomi *real-life*", yang menginginkan ekspansi gagasan pembangunan untuk menanggulangi degradasi lingkungan, kemiskinan, dan partisipasi, masih menginginkan demistifikasi untuk menyingkap seksismenya. Sebagai contoh, ilmu ekonomi dalam bentuk model-model-model matematis bersifat reduksionis dan tidak cukup untuk mengekspresikan ambiguitas dan kontradiksi-kontradiksi dalam proses-proses yang kompleks. Bagai Harcort, juga, "ilmu ekonomi *people-centered,"* sebuah serangan atas kepentingan-sendiri, sebuah ilmu ekonomi untuk menjadikan dunia lebih baik, advokasi pembangunan dan investasi skala lokal penduduk, bermula dari, sebuah sudut pandang Eropasentris, adalah sebuah model universal (dengan variasi-variasi), dan menggunakan residu-residu ("investasi pada penduduk") bahasa pertumbuhan ekonomi. Demikian juga, posdevelopmentalisme mengidealisasi relasi-relasi masyarakat tradisional dengan alam dan terlalu pesimistik, yang melihat tidak bergunanya modernitas Barat, padahal nyatanya kita harus berhadapan dengan kontradiksi-kontradiksi sebuah proses dimana tak dapat dipungkiri lagi kita telah terbenam didalamnya. Harcourt mendukung karya tentang budaya, ekonomi, dan modernisasi yang menunjukkan keretakan budaya-budaya oleh industrialisasi (Mazlish 1991). Hampir sama Frederique Apffel-Marglin dan Steven Marglin (1990), dari Perguruan Tinggi Smith, melihat ilmu ekonomi sebagai bagian sebuah *episteme* (sistem ide-ide dan wacana) berdasarkan logika dan rasionalitas yang dipisahkan dari konteks (logika instrumental kalkulasi); *techne* pengetahuan dengan pembandingan yang ditanamkan dalam praktik dan diperoleh melalui proses dalam sebuah komunitas; namun sivilisasi Barat hanya mengganggap *episteme* sebagai pengetahuan yang murni. Bagi para feminis, pergantian historis *techne* dengan *episteme* di Barat dan proses kontemporer penggantian kontemporer di Dunia Ketiga merendahkan wanita yang mengasuh (nurturing), dan keberlangsungan lingkungan. Ekonomi pembangunan Barat, dengan devaluasi alamnya, dan kegagalannya memperlakukan kebudayaan-kebudayaan lain secara bermartabat, dapat belajar dari mode-mode organisasi sosial lainnya daripada selalau mengasumsikan superioritas.

Posmodernisme dan Pembangunan

Perspektif PAD bereaksi terhadap titik singgung kontroversial dari kritik-kritik poststruktural dan posmodern kedalam teori feminis denga menanyakan apakah feminisme posmodern yang lebih aksesibel dan terpolitisasi memiliki relevansi dalam permasalahan-permasalah yang dihadapi para perempuan masyarakat Dunia Ketiga. Perspektif PAD mengkritisi pandangan GAD sebagai merepresentasikan para perempuan Dunia Ketiga sebagai "lain" atau adalam kasus WID, menggunakan tiga imej, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai objek seks, dan perempuan sebagai makhluk yang terasing. Para feminis posmodern menemukan bahwa pandangan WID yang tertanam dalam wacana kolonial/neokolonial dan yang diabadikan dalam wacana liberal terhadap pasar, keduanya memperlemah perempuan. Secara partikular seruan bagi para teoretikus PAD adalah penekanan posmodernisme akan perbedaaan, yang menyediakan ruang bagi suara-suara yang dimarginalkan (hooks 1984), atau mengacaukan representasi perempuan Selatan sebagai 'lain' yang tidak berbeda (Mohanty 1991). Juga, kritik posmodern terhadap subjek kebenaran menyarankan aliansi antara posmodernisme dan feminisme berdasarkan kritik umum *episteme* modernis. Secara spesifik, kritik-kritik posmodern yang mempertanyakan kepastian kajian-kajian pembangunan Eurosentris, dan yang mengkritisi pembisuan pengetahuan lokal dengan propagasi keahlian Barat, relevan untuk pembangunan perempuan. Beberapa tema yang datang dari pertemuan antara feminisme, posmodernisme, dan pembangunan termasuk: sebuah kritik kolonial dan konstruksi kontemporer perempuan "Dunia Ketiga" − apa yang Apffel-Marglin sebut sebagai "orientalisme feminis"; dekontruksi yang meningkat atas wacana pembangunan, yang memperlemah perempuan miskin secara partikular; recovery pengetahuan dan suara-suara perempuan; selebrasi perbedaan dan identitas ganda; dan sebuah fokus pada dialog konsultatif antara para praktisi pembangunan dan "klien-klien" mereka.

Sebuah contoh boleh jadi dokontruksi Jane Partpart (1995) terhadap "ahli" pembangunan, yaitu, orang dengan pengetahuan spesial dan teknis mengenai dunia modern, menurut pendapat Parpart, tertanam dalam pemikiran Pencaerahan Barat, dengan spesialisasi pengetahuannya − semisal, ekonomi pembangunan, sebagai "ilmu pengetahuan kemajuan ekonomi." Namun feminisme posmodern juga dikenal, secara ekstrem, dapat menghalangi aksi kolektif diantara perempuan, sementara jargon tulisan posmodern yang tak dapt ditembus adalh sebuah rintangan yang tak dapat diatasi bagi penduduk yang terjerumus

dalam buta-huruf dan krisis ekonomi (Parpart dan Marchand 1995). Daripada meolak pembangunan secara bersamaan, kebanyakan feminis posmodrn dalam hal ini menyadari permsalahan-permasalahan riil yang dihadapi oleh para perempuan miskin dan keinginan untuk mengalamantkan isu-isu pembangunan. Mereka menyukai pendekatan "yang menerima dan mengerti perbedaan dan kekuasaan wacana, dan yang membantu pengembangan dialog yang terbuka dan konsultatif yang dapat memberdayakan para perempuan Selatan untuk mengertikulasikan keinginan-keinginan dan agenda-agenda mereka (Parpart dan Marchand 1995: 19).

WID **Perempuan dalam Pembangunan** Teori modernisasi liberal Restrukturisasi program-program pembangunan, Kesejahteraan, hak kekayaan, anti-kemiskinan, pemberdayaan efisiensi	WAD **Perempuan dan Pembangunan** Feminisme Sosialis Pembangunan Alternatif Ketergantungan, Kapitalisme Global, Partriarki

GAD **Gender dan Pembangunan** Feminisme Radikal Emasnsipasi Wanita Kapitalisme, Partriarki, Rasisme

WED **Perempuan, Lingkungan, dan Pembangunan** Ekologi politis Feminis Pembangunan Berkelanjutan Pengetahuan Gender, hak-hak, & Politik	**PAD** **Posmodernisme dan Pembangunan** Feminisme Posmodern Pascapembangunan, Pembangunan yang Berbeda, Representasi, Wacana, Pengetahuan Lokal

Apa yang membedakan perspektif feminis terhadap proses pembangunan? Pembangunan sebagai sebuah praktik yang disadari, seperangkat kebijakan, merubah relasi-relasi perempuan terhdap laki-laki, yang menggeser sumberdaya dari wilayah kontrol laki-laki, yang menjadikan perempuan lebih rentan terhadap malapetaka, apakah itu secara natural atau sosial pada titik ia bermula. Sebagaimana sarjana feminis memperdalam, berusaha untuk menggambarkan sebab-sebab permasalahan ini demikian juga berhenti mempertimbangkan defisiensi-defisiensi dalam distribusi keuntungan material, untuk kemudian mengarah kepada ketidaksetaraan dalam kontrol terhadap sumber daya produktif, untuk kemudian menyerang androsentrisme, yang berpangkal dari ide-ide kultural Barat tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Carolyn Merchant (1980: 11) berkata bahwa teori feminis membuat masyarakat menjadi kacau balau. Dan pada pengamatan pertama kritik feminis terhadap pembangunan nampak memandang dunia secara terbalik, melihat yang normal sebagai tidak normal, yang patut dipuji sebagai yang patut dibenci, dan yang terlihat wajar sebagai tidak wajar. Dalam perasaan ini, kritisisme dari sudut pandang feminis cenderung membalikkan tren dominan, bergerak dalam mendukung antitesis, melihat apapun sebagai oposisi. Jadi "kebijakan pembangunan" yang diinspirasikan feminis (jika istilah-istilahnya tidak kontradiktif) akan melihat burh produktif sebagai kerja reproduktif.

Namun hal ini akan menyiratkan semata-mata kebalikannya sebagaimana kontribusi feminisme terhadap teori pembangunan. Terlebih lagi hal ini sedang melaju secara tidak pantas perspektif-perspektif feminis yang berubah-ubah (dari WID ke PAD). Pandangan teoretis yang berasal dari pemikiran tentang pengalaman-pengalaman kelompok-kelompok masyarkat tertentu, dan sejarah-sejarah ini adalah jauh melebihi reaksi-reaksi feminis terhadap dominasi laki-lai di Barat. Sebagaimana pemikiran feminis berubah, dibawah tekanan konstan dari kritik dan counterkritik, percobaan-percobaan secara meluas dilakukan untuk mengenali, dan bahkan berpikir dari, pengalaman-pengalaman penduduk dunia yang berbeda-beda (terutama dari kelompok-kelompok perempuan yang berbeda-beda), dari pengalaman-pengalaman, yang respeknya sama pada satu sisi, dan yang respeknya tidak bisa disamakan pada sisi yang lain. Tidak bisa disamakan maksudnya adalah bahwa para teoretikus perempuan Barat tidak boleh hanya membalikkan keterpusatan-pada laki-laki (male-centeredness) ala Barat, tapi lebih pada keharusan untuk menemukan hal-hal yang baru. Lebih penting lagi, pembalikan ala perempuan Barat bukan satu tradisi dalam pemikiran kritis feminis. Ada sebuah dunia pengalaman-pengalaman yang berbeda yang menunggu untuk dikenali, digambarkan, dikritisi, namun juga diapresiasi. Demikian juga, intervensi-intervensi terhadap proses pembangunan mempunyai banyak bentuk, beberapa diantaranya ada yang sama namun ada juga yang tidak bisa disamakan, satu sama lain, sehingga "feminisme global" dikatakan 'terbaik' jika ia merupakan

sebuah jaringan toleransi, namun dikatakan 'terburuk' jika ia merupakan pertengkaran yang tidak berisi sama sekali. Maksudnya adalah bahwa "pembangunan" seharusnya memahami sebagaimana reproduksi yang berpusat pada perbaikan mempunyai banyak bentuk yang beragam dimana kontinuitas atau kesamaan proyek akan mempersulit, dalam beberapa hal, tidak akan mungkin (*impossible*). Bahkan kata "proyek" atau "perbaikan" menyiratkan, ketaatan kepada perspektif PAD, pembaptisan kedalam pemikiran Barat, keterjebakan pada imaginasi oleh tema-tema kemajuan (progress) Barat. Bagi yang lain, dalam aliran WAD sebagai contoh, pembaptisan kedalam pemikiran Barat melibatkan interaksi antar tradisi, sehingga perjuangan-perjuangan anti-kolonial (dirumah dan dikoloni-koloni) adalah juga bagian-bagian tema kemajuan (progress) "Barat". Apakah tema-tema emansipatoris dan pembangunan suatu hal yang umum bagi para penduduk yang diopresi? Dan apakah mungkin untuk mensintesiskan perbedaan dan persamaan melalui suatu dialektika yang tidak menyelami perbedaan dalam persamaan? Kita berpikir bahwa hal seperti ini dicoba oleh posisi WAD dalam pembangunaisme feminis. Kita menemukan bahwa kritisisme WAD terlalu berlebihan, dan ingin wacana ini dikembalikan kepada agenda yang diatur oleh Sen dan Grown (1987) − yang meretakkan struktur ketidaksetaraan; mereorientasikan produksi untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan para penduduk miskin; yang mengkombinasikan perbaikan-[erbaikan tidak langsung, amelioratif dengan strategi-strategi jangka-panjang yang membangun kontrol perempuan atas keputusan-keputusan − tema-tema yang kita angkat lagi dalam bab kesimpulan, yang berasal dari sebuah sosialisme feminis.

Bagaimanapun juga, sementara membaca literatur terbaru tentang feminisme dan pembangunan, kita tidak bisa tidak harus mencatat keragu-raguan dari ide-ide yang diekspresikan, tendensi untuk mengulangi beberapa tema yang mapan, alam kesimpulan yang tidak lengkap. Secara virtual keseluruhan wacana perempuan dan pembangunan terdiri dari esay-esay, yang kebanyakan berupa studi kasus yang mengeksemplifikasi tema-tema general yang jarang atau belum pernah dinyatakan. Secara partikular ini merupakan kasus dengan proposal-proposal konkret untuk perubahan; studi-studi yang meneriakkan beberapa proposal mengenai apa yang harus dilakukan pada akhir dari situasi-situasi keputus-asaan dimana mereka sebaiknya mengusulkan, atau menyebutnya (secara aman) "penelitian lanjutan." Secara sekilas, permasalahan meliputi reluktansi feminis untuk "berbicara untuk yang lain" tidak hanya menyangkut resep dari para perempuan Barat untuk para perempuan non-Barat mengenai apa yang mereka harus lakukan demi perubahan, namun juga (resep) dari para perempuan elit non-Barat bagi para perempuan petani kecil (peasant) non-barat. Namun inti permasalahannya lebih kepada "berbicara untuk yang lain." Pemikiran feminis, ekstremnya, meliputi restrukturisasi imaginasi untuk berpikir dalam cara-cara yang sama sekal baru. Tapi bagaimana cara-cara baru pemikiran (bisa) berimaginasi ketika imaginasi itu sendiri telah terstruktur, apakah dengan proses pendidikan yang didominasi laki-laki, atau secara negatif oleh kritik-kritik androsentrisme dalam ilmu pengetahuan, teori, dan budaya.

BIBLIOGRAFI

Al-Jabiri, M. Abed, *Al-Aql Al-Siyasi Al-Arabi: Muhadidah wa Tajalliyatuh (Nalar Politik Arab: Faktor-faktor Penentu & Manifestasinya),* Beirut, Markaz Dirasah Al-Wihdah Al-Arabiyah, 1995.

_____, *Post Tradsionalisme Islam,* Yogyakarta, LKiS, 2000.

Arif, Saiful, *Menolak Pembagunanisme,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. I., 2000.

Arendt, Hannah, *Pembangunan Ekonomi, Studi Tentang Sejarah Pemikiran,* Jakarta, LP3ES, 1991

Anderson, Benedict (2008) *Imagined Communities; Komunitas-komunitas Terbayang*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.

Ashcroft, B. Griffiths, G. dan Tiffin, H. (ed.) (1995) *The Post-Colonial Studies Reader,* London: Routledge.

Brooks, Ann (2008) *Posfeminisme & Cultural Studies,* Yogyakarta: Jalasutra.

Butler, J. dan Scott, J.W. (ed.) *Feminists Theorise the Political,* London/ NY: Routledge.

Barton, Greg, (ed.), *Radikalisme Tradisional*, Yogyakarta, LKiS, 1999.

Baidhawy, Zakiyuddin, (ed.), *Wacana Teologi Feminis, Perspektif Agama, Geografis & Teori-teori,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet.I., 1997.

Budiman, Arif, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga,* Jakarta, Gramedia, Cet. IV., 2000.

_____, *State And Development*, Jakarta, Yayasan Padi & Kapas, 1991.

Binder, Leonard, *Islamic Liberalism,* Chicago, 1988

Clements, Kevin, *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan,* Yogyakarta, PP, 1997.

El-Sadawi, Nawal, *Perempuan dalam Budaya Pratriarki,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar,Cet.I., 2001.

_____, *Kabar Dari Penjara,* Yogyakarta, Tarawang, Cet. I., 2000.

Engineer, Asghar Ali, *Islam and Liberation Theology: Essai on Libetive Elements individu Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

Esack, Farid, *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme,* Bandung, Kelompok Penerbit Mizan, 2000.

Feillard, Andre, *NU vis-à-vis Negara*, Yogyakarta, LKiS, 1999.

Faqih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

_____, *Menggeser Konsepsi Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, PP, 1996.

_____, *Sesat Pikir Teori Pembangunan & Globalisasi,* INSIST, 2001.

Giddens, Anthony, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial,* Jakarta, Gramedia, 1999.

_____, *Kapitalisme & Teori Sosial Modern, Jakarta,* UI Press, 1986.

Gunew, S. dan Yeatman, A. (ed.) (1993) *Feminism and The Politics of Defference,* NSW: Allen & Unwin.
Hanafi, Hasan, *Min Al-Aqidah ila Al-Tsaurah, (Dari Teologi Ke Revolusi)* Vol. I-IV., Kairo, Maktabah, Madbuli, 1988.
_____, *Dirasat Falsafiyah,* Maktabatu Al-Anjalu al-Misriyyah, Qahira, 1987.
_____, *Kiri Islam* dalam Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: Antara Modernisme & Postmodernisme, Telaah Kritis atas Pemikiran Hasan Hanafi,* yK, LKiS, 1993.
_____, *Al-Turats wa al-Tajdid, Mauqifuna min al-Turats al-Qadim,* Al-Muassasah al-Jami'iyyah li al-Dirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi', Beirut, Cet. IV., 1992.
_____, *Perlunya Oksidentalisme,* Jurnal Ulumul Qur'an, No.5-6, Vol. IV, 1994.
Hutcheon, L. (1995) *'Circling the Downspout of Empire: Post-Colonialism and Posmodernism'*
Hum, M. (1989) *The Dictionary of Feminist Theory,* Hemel Hemstead: Simon & Schuster.
Khun, Thomas S., *The Structure of Scientivic Revolutions,* Chicago, The Universityof Chicago Press, 1970.
Komaruddin, *Pengantar untuk Memahami Pembangunan,* Bandung, Angkasa, 1985.
Kuncaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas & Pembangunan,* Jakarta, Gmd, Cet. XVIII., 1997.
Kunio, Yoshihara, *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, 1990.
Lauretis, Teresa de (1984) *Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema,* Bloommington: Indiana University Press.
Lowy, Michae,l *Teologi Pembebasan,* Yogyakarta, INSIST, 1999.
Larrain, J., *Theories of Development, Capitalism, Colonialism & Dependensy,* Dalas Brewely, 1989.
Mohanty, C.T. (1995) *'Under Western Eyes; Feminis Scholarship and Colonial Discourse'*
McRobbie, A. (1994) *Posmodernism & Popular Culture,* London/NY: Routledge.
Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin & Peradaban,* Jakarta, Paramadina, 1992.
Marcus, Lies M.i *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual & Kontekstual*, Jakarta, INIS, 1993.
Maguire, Pat, *Women in Development: An- Alternative Analysis,* Amherst MA: Center for Iternational Education. tt.
Mosse, Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, Terjemah Hartian Sulawati, Yogyakarta, 1996.
Marcuse, Herbert, *The Critical Spirit: Essay in Honor of Herbert Marcuse,* Boston, 1967.
Nasr, Sayyid Husein, *Knowledge & the Sacred,* Suhail Academi, Lahore, Pakistan, 1998.
_____, *Three Moslem Seges: Avicenna Shuhrawadi—Ibnu Arabi,* Harvard University Press, Cambridge, 1964.
_____, *Tradition Islam in the Modern World, Foundation for Traditional Studies*, Kuala Lumpur, 1978.
Nasution, Harun, *Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah, Analisis Perbandingan,* Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1972.
Pambudi, Himawani S. dkk., *Pendidikan Politik Perempuan Pedesaan*, Yogyakarta, Kp4 LAPPERA, Cet. I., 2003.
Popper, Karl, *The Open Society and Its Enemies,* 2 Jilid, G. Rotledge, London, 1945.
Parry, B. (1995) '*Problem in Current Theoriest of Colonial Discourse* (1987)
Ritzer, George & Goodman, Douglas J., (2005) *Modern Theory of Socology,* 6th Edition, McGraw-Hill 2003, [Terj]. Jakarta: Kencana.
Spivak, Gayatri Chakravorty (1992) *'French Feminism Revisited: Ethic and Politic,'*
_____, (1985a) *'Can the Subaltern Speak?: Speculation on Widow Sacrifice'* Wedge 7 (8) (Musim Dingin/ Musim Semi. hal. 120-130
_____, (1985b) '*The Rani of Simur '* dalam F. Barker (ed.) *Europe and Its Oyhers vol. 1. Proceeding of the Essex Gnference on the Sociology of Literature July 1984,* Colchester, University of Essex.
_____, (1986) '*Imperealism and Sexual Difference'*, Oxford Literary Review 8
Saputra, Asep Sabar, *Dekonstruksi Paradigma Kritis Komunitas Tradisional,* Jakarta, PB PMII, Cet.I., 2000.
Sanit, Arbi, *Pergolakan Melawan Kekuasaan, Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral & Politik,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar & INSIST, 1999.
Saptari, Ratna, *Perempuan, Kerja & Perubahan Sosial,* Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997.
Soedjatmoko, *Etika Pembebasan,* LP3ES, Jakarta, 1988.
_____, dkk., *Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga,* Yogyakarta, PLP2M, Cet. I., 1984.
Sritua, Arif, *Pembangunaisme dan Ekonomi Indonesia, Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi,* Bandung CPSM, Cet. I., 1998.
Strahm, H. Rudolf, *Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang,* Jakarta, Pustaka Cidesindo, 1999.
Trinh, T. Minh-ha (1989) *Woman, Native Other: Writing Poscoloniality and Feminism,* Bloomington: Indiana University Press.
Umar, Nasarudin, *Argumen Keseteraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Seri Disertasi), Jakarta, Paramadina, Cet. I., 1999.
van Bruinessen, Martin, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, & Pencarian Wacana Baru,* Yogyakarta, LKiS, Cet.II., 1996.
Wahid, Abdurahman, *Konsep-Konsep Keadilan*, dalam B. Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta, Para, 1994.
Weber, Max, *The Protestan Ethics and The Spirit of Capitalism,* Univin, Hymn, London, 1990.

MATERI 11
PENDIDIKAN KRITIS FREIRE, ILLICH, HABERMAS, POSTMAN, GIROUX

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

1. EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN KRITIS PAULO FREIRE (1921-1997)
Prawacana

Paulo Freire bagi banyak praktisi pendidikan adalah tokoh pendidikan yang penuh misteri. Banyak mitos yang menyelimuti pemikiran pendidikannya, sehingga banyak orang lebih menghafalkan jargon-jargon dan istilah yang dipergunakannya dalam bukunya yang terkenal, yakni *Pendidikan Kaum Tertindas (Pedagogy of The Opressed)* ketimbang memahami secara praktis kedalam proses belajar-mengajar yang membebaskan. Banyak tema pikiran pendidikan Freire yang tertuang dalam buku tersebut tidak mampu secara metodologis diterjemahkan ke dalam proses dan teknis belajar-mengajar oleh penganggumnya yakni kalangan praktisi pendidikan.

Itulah mengapa sebagian besar pendidik ataupun guru yang merasa jadi pengikutnya, hanya pandai menghafalkan mantra-mantra Freire yang terkenal, misalnya *"Pendidikan adalah Proses Pembebasan dan Pendidikan adalah Proses Membangkitkan Kesadaran Kritis".* Bahkan ironisnya banyak praktisi dengan menggunakan semboyan pendidikan pembebasan dan humanisasi, tanpa menyadari terjerumus dalam tindak praktik pendidikan penindasan dan dehumanisasi, yang justru menjadi agenda utama kritik Freire. Apa sesungguhnya yang dia maksud dengan *'pembebasan'* dan *'kesadaran kritis*,' lebih banyak dibicarakan dalam seminar dan diskusi mahasiswa maupun aktivis *ornop*, ketimbang dipraktikkan di lapangan. Namun demikian, ternyata terdapat banyak tafsiran mengenai apa yang dimaksud Freire dengan *'pendidikan pembebasan'* maupun *'pembangkitan kesadaran kritis'* yang menjadi tema pokok pendidikan Freire tersebut

Siapa Sebenarnya Paulo Freire?

Paulo Freire adalah seorang pendidik radikal berkebangsaan Brasil, yang lahir pada tanggal 19 September 1921, di kota Recife, Brasil, dan meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1997, di Sao Paulo, Brasil. Sejak bukunya terbit dalam bahasa Inggris pada tahun 1972 namanya menjadi terkenal sebagai tokoh pendidikan yang menemukan suatu model pendidikan untuk memberdayakan 'kaum tertindas' dan sistem penindasan di muka bumi ini. Ia mulai sebagai pendidikan radikal justru melalui kegiatan pemberantasan buta huruf (*literacy programs*), suatu pendidikan yang umumnya dianggap sebagai pendidikan apolitis dan tidak radikal sama sekali.

Freire berhasil mensubversikan kesadaran politik dalam proses pendidikan mengenal huruf dan belajar membaca tersebut. Dalam karyanya *Pedagogia do Oprimido* (1970; serta buku yang membuatnya termasyhur, *Pedagogy of the Oppressed*, yang terbit tahun 1972) Freire membongkar watak pasif dari praktik pendidikan tradisional yang melanda dunia pendidikan, Dia menganggap bahwa pendidikan pasif sebagaimana dipraktikkan pada umumnya pada dasarnya melanggengkan "*sistem relasi penindasan*". Freire mengejek sistem dan praktik pendidikan yang menindas tersebut, yang disebutnya sebagai pendidikan *'gaya bank'* dimana guru bertindak sebagai penabung yang menabung informasi sementara murid dijejali informasi untuk disimpan. Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan *'gaya bank'* itu sebagai berikut:

- Guru mengajar murid belajar.
- Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa.
- Guru berpikir, murid dipikirkan.
- Guru bicara, murid mendengarkan.
- Guru mengatur, murid diatur.
- Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti.
- Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya.
- Guru memilih apa yang akan diajarkan,
  murid menyesuaikan diri.
- Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid.
- Guru dalah subjek proses belajar, murid objeknya.

Sebagai antitesa, Freire mengajukan konsep tandingan terhadap pendidikan *'gaya bank'* tersebut dengan suatu *'pedagogy of libeartion'* yakni proses pendidikan hadap masalah *(problem posing of education)* yang justru mendorong dialog antara guru dan murid, serta suatu proses pendidikan yang mampu mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan menantang *'status quo'.* Paulo Freire mulai melancarkan model dan metode pendidikannya pada tahun 1950-an, ketika dia terlibat dalam

pengajaran membaca dan menulis dalam suatu kegiatan pendidikan pemberantasan buta huruf untuk petani miskin. Pengalaman itu membuktikan bahwa dengan penggunaan kata-kata sebari-hari selain mempercepat proses belajar membaca, ternyata pendidikan itu juga telah melahirkan kesadaran poiitik ekonomi para petani miskin. Jadi pendidikan telah melahirkan kesadaran politik maupun kesadaran kritis petani miskin. Pada tahun 1963 dia ditunjuk sebagai direktur Program Nasional Pemberantasan Buta Huruf Brasil. Tetapi setelah kudeta militer tahun 1964, pemerintah Junta Militer Brasil menjebloskan Freire ke penjara atas tuduhan subversi. Selepas dari penjara, Freire rnenghabiskan waktunya hidup di pengasingan diluar Brasil, dan membunuh waktunya dalam berbagai program *literacy* serta mengajar di berbagai universitas.

Pada tahun 1979 Paulo Freire kembali ke Brasil, disana ia dan kawan-kawannya memdirikan partai buruh berhalauan kiri. Akhirnya Freire diangkat menjadi sekretaris pendidikan di kota Sao Paulo pada tahun 1988, tetapi ia mengundurkan diri beberapa tahu setelahnya. Sebagai birokrat rupanya Freire kurang berhasil, namun sebagai pemikir, Freire cukup berhasil. Pegruh pikiran pendidikannya menembus batas bahasa dan wilayah benua. Freire menulis lebih dari 20 judul buku, dan beberapa karyanya dianggap sebagai bukuklasik dalam bidang pendidikan. Bahkan kini buku-bukunya telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa.

Freirean, Pendidikan untuk Bebas dari Dominasi dan Penindasan!

Freirean, atau aliran pendidikan Paulo Freire pada dasarnya adalah suatu pendekatan dan pemikiran yang berangkat dari asumsi bahwa pendidikan adalah proses pembebasan dari sistem yang menindas. Penganut pendidikan Freirean berangkat dari suatu kepercayaan bahwa pendidikan tidak pernah terbebas dari kepentingan politik ataupun terbebas demi melanggengkan sistem sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Sebaliknya pandangan ini juga berasumsi bahwa pendidikan bagi kekuasaan, selalu digunakan untuk melanggengkan ataupun melegitimasi dominasi mereka. Oleh karena itu hakikat pendidikan umumnya bagi mereka tidak lebih dari sebagai sarana untuk mereproduksi sisteotip dan struktur sosial yang tidak adil seperti sistem relasi kelas, relasi gender, relasi rasisme ataupun sistem relasi lainnya. Pandangan ini dikenal dengan '*teori reproduksi'* terhadap sistem yang tidak adil melalui pendidikan.

Berbeda dengan pandangan maupun teori *'reproduksi'* dalam pendidikan tersebut, ada pandangan maupun teori pendidikan yang juga datang dari kelompok pendidik radikal, yang justru berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa pendidikan adalah proses kesadaran kritis, seperti menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran gender, maupun kesadaran kritis lainnya. Pandangan kedua inilah yang dianut oleh aliran Freirean tersebut. Oleh karena itu pendidikan bagi kelompok Freirean merupakan proses pembebasan manusia. Pendirian Freirean berangkat dari asumsi bahwa manusia dalam sistem dan struktur sosial yang ada pada dasarnya memgalami proses dehumanisasi karena eksploitasi kelas, dominasi gender, maupun karena hegemoni dan dominasi budaya lainnya. Oleh karena itu pendidikan merupakan suatu sarana untuk *'memproduksi'* kesadaran untuk mengembalikan kemanusiaan, dan dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasyarat upaya untuk pembebasan. Freire percaya bahwa tugas pendidikan adalah memproduksi kesadaran kritis untuk suatu proses pembebasan.

Bagaimana proses pembebasan, pembangkitan kesadaran kritis, dan pembebasan itu dilakukan? Para praktisi dalam menjawab pertanyaan ini umumnya lebih konsentrasi pada metode pendidikan belaka. Namun sesungguhnya, pendidikan tidak pernah berdiri bebas tanpa berkaitan secara dialektis dengan lingkungan dan sistem sosial dimana pendidikan diselenggarakan. Oleh karena itu proses pendidikan sebagai proses pembebasan tidak pemah terlepas dari sistem dan struktur sosial, yakni konteks sosial yang menjadi penyebab atau yang menyumbangkan proses dehumanisasi dan keterasingan pada waktu pendidikan diselenggarakan. Dalam era globalisasi kapitalisme seperti saat ini, pendidikan dihadapkan pada tantangan bagaimana mengkaitkan konteks dan analisis isinya untuk memahami globalisasi secara kritis. Strategi umumnya pendidik lebih tertuju pada bagaimana membuat kelas mereka relevan terhadap formasi sosial yang dominant saat ini. Strategi seperti ini lebih berkesan menerima dan mensiasati dan yang paling penting melakukan penyesuaian terhadap ideologi dominan. Sementara itu jarang pendidikan yang mengintegrasikan analisis kritis dan bagaimana mereka berperan dengan proses kritik dan melakukan dekonstruksi, untuk menemukan solusi alternatif terhadap globalisasi, seperti misalnya menciptakan diskursus tandingan terhadap sistem dominan ataupun diskursus dominan dengan perspektif alternatif.

Untuk mendorong pendidikan menjadi peka terhadap persoalan ketidakadilan sosial, perlu setiap kelas secara otonom menentukan visi dan misi sesuai perkembangan formasi sosial, bagaimana mereka memperjelas keberpihakan terhadap proses ketidakadilan sosial, serta bagaimana mereka menterjemahkan semua itu dalam metodologi pendidikan. Oleh karena itu metode dan teknik pendidikan *'hadap masalah'* menjadi salah satu kegiatan strategis untuk merespon sistem dan diskursus yang dominan. Persoalannya, proses pendidikan kelemahannya dan sekaligus kekuatannya, seringkali menjadi arena yang paling tidak terkontrol dan tidak termonitor. Sehingga diperlukan mekanisme yang memungkinkan peserta didik menjadi subjek dan pusat kegiatanpendidikan. Oleh karena itu orientasi untuk setiap peserta pendidikan adalah menghayati visi dan misi pendidikan mereka. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran kritis peserta didik sangat diperlukan jika pendidikan hendak meletakkan peserta didik sebagai subjek dan pemonitor. Kesadaran kritis perlu agar proses dan metode pendidikan dapat menuju pada tujuan sesungguhnya yakni sebuah transformasi sosial.

Untuk itu perlu ditunjukkan bagaimana proses 'penyadaran kritis' itu beroperasi dalam metodologi pendidikan sehingga secara teknis metode tersebut dapat dilakukan. Secara konkret perlu dijabarkan bagaimana teori pendidikan 'konsientisasi' yang menjadi pemikiran dasar Paulo Freire dipraktikkan, dan disajikan dalam bentuk uraian yang mudah ditangkap. Dengan cara penyajian dan analisis seperti ini diharapkan memberi inspirasi bagi setiap kalangan yang ingin mengetahui lebih mendalam metode pendidikan Paulo Freire. Dasar terpenting dari metodologi Freire ini adalah meletakkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Secara lebih khusus melalui metodologi Freire akan ditunjukkan bagaimana ideologi di balik metode penyelenggaraan pendidikan dibongkar. Oleh karena itu pendirian teoretik dan paradigma pendidikan pembebasan Freirean memang akan memberikan inspirasi alternatif bagi semua, kalangan yang memerlukan perubahan pendidikan secara mendasar. Seperti, penting kiranya untuk dikupas secara lebih mendalam bagaimana operasionalisasi dari berbagai ideologi serta perspektif dunia pendidikan yang berkembang.

Dalam perspektif kritis, tugas pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap sistem dan 'ideologi yang dominan' yang tengah berlaku di masyarakat, serta menantang sistem tersebut untuk memikirkan sistem alternatif ke arah transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adi. Tugas ini dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan menciptakan ruang agar muncul sikap kritis terhadap sistem dan sruktur ketidakadilan sosial, serta melakukan dekonstruksi terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa netral, objektif maupun dari kondisi masyarakat sekitar lembaga pendidikan.

Visi kritis pendidikan terhadap sistem dominan digunakan sebagai bagian pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas. Metode ini digunakan bagi muneulnya sistem sosial baru yang lebih adil dan yang selama ini menjadi cita-cita pendidikan Freirean. Dalam perspektif Freirean, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain tugas utama pendidikan adalah *'memanusiakan'* kembali manusia yang mengalami *'dehumanisasi'* karena sistem dan struktur yang tidak adil. Paham pendidikan Freirean ini cocok dengan paradigma transformatif. Pendidikan dalam perpektif ini juga menjadi arena kritik ideologi. Dalam pelatihan bagi para buruh misalnya, peserta pendidikan perlu ditantang untuk memahami proses eksploitasi yang mereka alami, serta memikirkan proses pembebasan dari alienasi dan eksploitasi buruh, disamping penekanan pada teori motivasi kerja demi efisiensi yang hanya menguntungkan akumulasi kapital. Demikian halnya dalam konteks pendidikan pertanian misainya, para petani saat ini sering diarahkan hanya untuk memenuhi ambisi produktivitas dan efisiensi. Ambisi ini muncul karena pandangan peltanian yang didominasi oleh ideologi Revolusi Hijau dan rekayasa genetika. Dengan metodolog;i pendidikan Freirean, petani difasilitasi untuk mempertanyakan relasi kekuasaan yang selama ini mengambil peranan besar dalam mempermainkan keidupan mereka. Dalam konteks itulah pilihan paradigma pendidikan memainkan peran strategis untuk proses perubahan dan transformasi sosial.

Konsientisasi sebagai Tema Pokok Pendidikan Freire

Bagi penganut mazhab Freirean, hakikat pendidikan adalah demi membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasyarat proses humanisasi atau memanusiakan manusia. Kunci bagi proses pendidikan ini adalah 'konsientisasi' atau proses membangkitkan kesadaran kritis. Freire membagi ideologi pendidikan dalam tiga kerangka yang didasarkan pada kesadaran ideologi masyarakat. Dalam pandangan Freire pendidikan tak lain adalah 'proses memanusiakan manusia kembali. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, membuat masyarakat mengalami proses 'demumanisasi'. Pendidikan sebagai bagian dari sistem masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci dapat kita saksikan bagaimana pendidikan telah membungkam kesadaran kritis dan sukses dalam mengalienasikan peserta didik. Secara jernih Freire membagi-bagi tingkat perubahan kesadaran manusia dari kesadaran magis (*magical consciousness*), ke kesadaran naif (*naival consciousness*) dan bagaimana mencapai pada kesadaran kritis (*critical consciousness)*, dengan piawai. Melalui penjelasan Freire akan terbuka kedok kepentingan yang selama ini menyelubungi sistem pendidikan.

Membongkar kesadaran naif dan magis untuk ditransformasikan menuju kesadaran kritis memang bukanlah urusan sederhana, mengingat kuatnya pengaruh positivisme dalam diri banyak pendidik. Demikian juga kuatnya pengaruh budaya fatalisme dan teologi kepasrahan akibat dominasi ideologi dominan. Dunia pendidikan diam-diam telah mewarisi pikiran positivisme seperti objektivitas, mendewakan empirisme, netral dan tidak memihak pada yang teraniaya dan tertindas, berjarak dengan objek pendidikan (*detachment*), rasional dan bebas nilai. Dengan kandungan ideologi seperti ini pendidikan menghambat proses pembebasan dan menghilangkan watak dan benih emansipatoris pada setiap proses pendidikan. Pendidikan dalam perspektif positivistik merupakan proses *fabrikasi* dan mekanisasi pendidikan untuk memproduksi keluaran pendidikan yang harus sesuai dengan pasar kerja. Pendidikan juga tidak toleran terhadap segala bentuk *'non positivistic ways of knowing'* yang disebut sebagai tidak ilmiah.

Pendidikan menjadi a-historis, yakni mengelaborasi model masyarakat dengan mengisolasi banyak variabel dalam model tersebut. Peserta pendidikan dididik untuk tunduk pada struktur yang ada, mencari cara-cara dimana peran, norma, dan nilai-nilai dapat diintegrasikan dalam sistem tersebut. Asumsi yang

mendasari pendidikan itu adalah bahwa tidak ada masalah dalam sistem yang ada, masalahnya terletak pada sikap mental, pengetahuan, dan ketrampilan peserta didik, termasuk kreativitas, motivasi, dan keahlian teknis peserta. Oleh karena itu dalam perspektif positivisme, pendidikan lebih dimaksud untuk mengembangkan kecerdasan, ketrampilan, dan keahlian peserta didik belaka, sementara komitmen, kyakinan, dan kepercayaan terhadap sistem yang lebih adil dan motivasi untuk menantang terhadap sistem sosial yang tidak adil, tidak disentuh, namun lebih sibuk memfokuskan pada bagaimana membuat sistem yang ada bekerja. Dengan metodologi Paulo Freire, proses pengajaran menjadi bagian dari proses transformasi sosial dalam keseluruhan sistem perubahan sosial. Untuk meletakkan pendidikan dalam peran transformasi sosial, pertama pendidikan perlu melakukan analisis struktural tentang lokasi pemihakan pendidikan terlebih dahulu. Tanpa visi dan pemihakan yang jelas terhadap siapa, pendidikan sulit diharapkan menjadi institusi kritis untuk pembebasan dan perubahan sosial. Pendidikan juga perlu melakukan identifikasi isu-isu strategis dan menetapkan visi dan mandat mereka sebagai pendidikan untuk pemberdayaan. Tanpa pemihakan, visi, analisis, dan mandate yang jelas, pendidikan tanpa disadari telah menjadi bagian dari *'status quo'* dan ikut melanggengkan ketidakadilan. Bahkan tanpa pemihakan yang jelas, pendidikan hanyalah menjadi *alat penjinakan* atau *alat hegemoni diri sistem* dan ideologi kelompok dominan. Ideologi dan pendirian pendidikan ini akan berimplikasi terhadap metodologi dan pendekatan, serta yang lebih penting dalam proses belajar mengajar.

Pendidikan yang Memanusiakan Guru dan Peserta Didik

Dalam pandangan Freire peranan guru sangat strategis dalam setiap proses pendidikan. Inti dari pembebasan guru justru dengan mentransformasikan hubungan guru dengan peserta didik. Itu sebabnya dalam proses pendidikan, mengikuti pendekatan Freire, harus memungkinkan terjadinya proses tranasformasi hubungan antara guru dan peserta didik, dari yang mendominasi menjadi hubungan yang membebaskan. Dalam perspektif pendidikan yang menindas, para guru berperan dan menempatkan diri mereka justru sebagai subjek pendidikan, sementara itu peserta didik diletakkan sebagai objek pendidikan. Dalam metodologi Freire proses hubungan itu perlu dijernihkan yakni bagaimana mentrasformasikan hubungan antara guru dan peserta didik menjadi hubungari yang *'dialogis'*. Hubungan guru dan peserta didik di banyak pendidikan sering terjadi lebih bersifat hubungan atau relasi kekuasaan atau *'subjugation'* yakni proses penjinakan dan penundukan, terutarna pada pendidikan dan yang menjadikan peserta didik sebagai objek Bagi Freire, pendidikan yang meletakkan peserta didik sebagai objek pendidikan, adalah pendidikan penjinakan dan oleh karenanya yang berlangsung adalah proses dehumanisasi. Para guru Freirean menganut suatu paradigma pendidikan tidak saja membebaskan dan mentransformasikan pendidikan dengan struktur di luarnya, tapi juga bercita-cita mentransformasi relasi *knowledge/ power* dan dominasi hubungan yang 'guru-murid' terlebih dulu.

Sungguhpun banyak orang pesimis untuk menjadikan pendidikan menjadi alat independen untuk kesadaran kritis dan pembebasan, namun pendekatan Freire ini dapat membantu para guru optimis terhadap pendidikan yang membebaskan. Freire telah berjasa dalam memberikan landasan teoritik pendidikan sebagai proses transformasi dan pembebasan terutama relasi yang tidak demokratis di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Ini berarti menggugat watak otoriter dan penjinakan ideologis yang tersembunyi dalam setiap pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu usaha kolaborasi antara guru dan peserta didik untuk secara bersama-sama melakukan transformasi relasi mereka untuk terbebas dan sistem yang menindas. Tujuan utama pendidikan yang menggunakan ideologi Freire adalah pendidikan yang kritis, lebih egaliter, dan demokratis.

Postulasi: Freire Membela yang Terindas

Pendekatan Paulo Freire dapat menjadi ilham bagi dunia pendidikan kita yang penuh dengan masalah. Memang pandangan pedidikan Freire telah lama diperbincangkan oleh kalangan pendidik, namun hampir tidak terjangkau oleh praktisi pendidik yang memproklamasikan diri sebagai pengikut Freire. Ketidak terjangkauan ini mungkin karena masih sedikitnya buku-puku terjemahan Freire dan juga kecilnya dukungan dari pemerintah. Kini situasinya sudah banyak berubah, buku maupun kebijakan dapat didorong oleh kalangan pendidik untuk segera diubah. Karena pada dasarnya gagasah maupun pemikiran Freire akan menyumbang banyak bagi proses pernajuan pendidikan. Pikiran-pikiran Freire juga akan banyak membantu pemahamari dan menyibak secara terang kepentingan yang tersembunyi dalam praktik pendidikan sehari-hari. Untuk alasan-alasan itulah gagasan-gagasan Freire memiliki kemungkinan untuk dipraktikkan.

Lewat pendidikan gaya Freire, kaum tertindas, seperti kaum buruh yang tereksploitasi namun menerima eksploitasi mereka dengan sukarela, akan terbangun kesadarannya. Para buruh tani, kaum miskin kota, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok tertindas lainnya, melalui pendidikan Freire, didorong untuk membe'baskan diri dari segala bentuk penindasan. Dibebaskan untuk menjadi manusia kembali, manusia yang bebas dari penindasan. Dengan memanfaatkan metode Freire, pendidikan akan berlangsung dalam kesadaran yang membebaskan. Melalui metode Freire dominasi pada sistem pendidikan akan dienyahkan. Tentu ini adalah sebuah proses yang akan membawa negeri ini ke dalam masa depan yang lebih baik. Sebuah masa depan yang menjanjikan keberpihakan kepada kaum yang tertindas.

2. EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN KRITIS IVAN ILLICH (1926-2002)

Ivan Illich, sejarawan ikonoklastik dan kritikus sosial, mengabdi sebagai pastur gereja, pengelola dan guru besar universitas, direktur lembaga kajian, dosen dan penulis. Ia sangat terkenal dikalangan pendidikan atas karya-karya yang ditulisnya pada akhir tahun 1960-an dan 1970-an, terutama buku keduanya *Deschooling Society.* Ketika Illich menyebutkan "Barat sebagai penyeimbang wahyu", dapat dengan mudah disimpulkan bahwa kepercayaan teologisnya mempengaruhi kritik sosialnya. Namun kesimpulan yang sama tak akan diperoleh jika hanya membaca *Deschooling Society.* Didorong oleh kayakinannya bahwa kekuasaan sekuler atau aktivisme sosial berada dibalik misi khusus gereja, Illich menyatakan dalam sebuah essai mengenai perlunya "cita-cita humanis radikal" dan "ideologi sekuler" untuk merencanakan dan mencapai "solusi baru bagi masalah-masalah sosial". Sehingga sampai saat ini Illich menulis sebagai humanis radikal dengan bahasa sekuler untuk membahas permasalahan sosial. Oleh karena itu, mereka yang mempelajari Ivan Illich dianjurkan membacanya melalui kacamata teologis dan sekuler.

Lahir sebagai anak sulung dari tiga bersaudara pada September 1926 di Wina, Austria, ketaatan Illch pada Gereja tetap utuh selama masa mudanya yang bergolak. Saat merenungkan keberadaanya sebagai anak yang harus mengikuti orang tuanya dan tak pernah belajar di sekolah tertentu, Illich menyebutkan bahwa ia sempat berpindah-pindah tempat tinggal selama empat tahun di Dalmatia, Wina, dan Prancis, atau dimana pun orang tuanya berada. Baru di rumah kakeknya di Wina, ia bertempat tinggal selama tahun 1930-an. Saat masih anak-anak inilah, perkembangan intelektual Illich bertambah bukan hanya karena belajar dari sejumlah guru privat yang mengajarkan berbagai bahasa (dan dikuasainya kemudian) dan membaca buku-buku dari perpustakaan pribadi neneknya, melainkan juga interaksinya dengan cendekiawan-cendekiawan penting yang menjadi sahabat orang tuanya (seperti Rudolf Steiner, Raine Maria Rilke, dan Jacques Maritain, belum lagi dokter keluarganya Sigmund Freud). Illich dianggap terlalu muda bersekolah, sehingga ia tidak segera dimasukkan ke sekolah meskipun sudah menunjukkan kecerdasan. Pada tahun 1941, bersama ibu dan saudara kembarnya, mereka meninggalkan Austria dan tinggal di Italia. Walaupun ia sulit menjelaskan keputusannya, pada periode inilah Illich memasuki Biara.

Pada usia 24 tahun, ia ditasbihkan menjadi pastur dan meraih gelar master dalam bidang teologi dan filsafat dari Gregorian University, Roma. Tak lama kemudian ia memperoleh gelar doktor filsafat sejarah dari Uiversity of Salzburg. Di Salzburg dengan bimbingan profesor Albert Auer dan Michael Muechlin, Illich mulia berminat pada metode sejarah dan interpretasi askah lama. Auer, yang tulisannya mengenai teologi penderitaan (*theology of suffering*) abad ke-12 sangat relevan bagi Illich, membimbing Illich untuk menyelesaikan tesis doktoralnya tentang metode sejarah dan filsafat Arnold Toynbee. Illich juga mempelajari kimia lanjut (kristalografi) di University of Florence.

Para pembaca Illich tahu bahwa ia tidak memberi judul *Deschooling Society* untuk bukunya. Adalah Cass Canfield, Sr., Presiden penerbit Harper, yang memberikan judul itu untuk tujuan pamasaran. Illich tidak menganjurkan penghapusan sekolah, tetapi *disestablishment.* Maksudnya adalah dana publik jangan digunakan untuk membiayai sekolah. Sebaliknya, ia percaya bahwa sekolah harus membayar pajak, sehingga persekolahan menjadi barang mewah dan dengan demikian memberi dasar yang sah untuk menghentikan diskriminasi terhadap mereka yang tak bersekolah. Akibatnya, tercipta pemisahan antara sekolah dan negara sebagaimana pemisahan antara gereja dan negara yang diakui konstitusi Amerika Serikat. Illich juga percaya bahwa pendaptnya itu akan menghasilkan perbaikan kualitas pendidikan. Niat untuk belajar dapat diwujudkan dengan tujuan yang lebih otentik dan tanpa motif tersembunyi dari mereka yang ingin belajar dan pendidikan dapat diberikan sebagai kegiatan dikala senggang (*act of leisure*) dan sebagai berkah cinta dan ampunan bagi mereka yang mencaari pengetahuan, karena pendidikan tidak diwajibkan.

Lebih lanjut para pembaca Illich harus memahami bahwa pemikiran dan pendekatannya terhadap studi persekolahan dan pendidikan mulai bergeser bahkan sebelum penerbitan *Deschooling Society.* Secara metodologis, analisis fenomenologis yang digunakan dalam *Deschooling Society* bersumber dari minatnya terhadap *ecclesiology.* Bagi Illich *ecclesiology* adalah 'pendahulu sosiologi", dan didalamnya terdapat "kajian ilmiah terhadap komunitas tertentu yang menjadi cita-cita gereja dan *ecclesiology* yang sudah ada sejak abad ke-4". Didalam *ecclesiology* terdapat *liturgi,* yaitu cabang *ecclesiology* dengan fokus ritual dan tata cara yang "menciptakan komunitas yang kemudian menganggap dirinya gereja dan dipelajari *ecclesiology*". Oleh sebab itu, salah satu bab terpenting dalam *Deschooling Society* berjudul "The Ritualization of Progress". Dalam esai itu, Illich memaparkan bagaimana:

> Sistem sekolah saat ini menjalankan tiga fungsi umum gereja sepanjang sejarahnya, yakni menjadi gudang mitos masyarakat, pelembagaan kontradiksi dalam mitos tersebut, dan lokus ritual yang mereproduksi serta menyelubungi antara mitos dan realitas.

3. EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN KRITIS JURGEN HABERMAS (1929-…)

Jurgen Habermas adalah tokoh terkemuka generasi kedua Mahzab Frankfurt, yakni sekelompok filsuf, teoretikus sosial, dan kritikus budaya yang membentuk Institute for Social Research di Frankfurt tahun 1929. Habermas mengajar filsafat di University of Heidelberg dan University of Frankfurt, sebelum pindah ke Max Planck Institute pada 1972, dan kemudian sejak pertengahan tahun 1980-an, kembali pada jabatannya sebagai guru besar filsafat dan sosiologi di University of Frankfurt. Walaupun lebih dikenal sebagai teoretikus dan filsuf sosial daripada pemikir pendidikan, habermas memberikan pengaruh nyata pula pada pendidikan. Usaha awalnya adalah melanjutkan proyek teori kritik Mahzab Frankfurt dari para perintisnya (Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse) dengan kritiknya bahwa nalar instrumetal dan positivisme bersifat *scientistic* (kepercayaan bahwa pengetahuan yang berhargaadalah pengetahuan ilmiah, dan *technicist* (misalnya pemberlakuan orang dan situasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan), beserta niat politisnya untuk membebaskan (emansipasi) individu dan kelompok tidak berdaya menuju masyarakat egalitarian. Karya awal Habermas adalah upayanya untuk memberikan dasar epistemologi pada teori sosial, dan mengajukan pandangan yang secara tersurat bersifat mengarahkan (preskriptif) dan normatif, yakni perilaku apa yang *harus* ditunjukkan pada demokrasi sosial. Niatnya bukan sekedar memberikan ide tentang masyarakat dan perilaku, melainkan mewujudkan masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan dan demokrasi bagi semua anggotanya. Tujuan teorinya bukan sekedar memahami situasi, kekuasaan dan fenomena, melainkan mengubahnya dengan menghapuskan kesenjangan.

Karya awal Habermas berada pada tradisi kritik Mahzab Frankfurt yang didasarkan pada prinsip fundamental keadilan sosial, dukungan terhadap kesetaraan sosial, penciptaan dan pemeliharaan “kepentingan umum” (*generalizable interests*), serta komitmen pada pencapaian masyarakat demokratis. Habermas mendefinisikan ideologi sebagai "penindasan terhadap kepentingan umum" dimana sistem atau kelompok yang berkuasa beroperasi dengan cara-cara yang secara rasional lemah karn kekuasaan mereka didasarkan pada penaklukan kelompok lain, dengan kata lain prinsip perilaku mereka tidak bersifat universal (*universalizable*). Kritik ideologi merupakan kritik terhadap cara kerja kekuasaan dan dominasi cara kerja yang tidak sah dalam masyarakat kapitalis.

Teori kritik Habermas mengusulkan agenda pendidikan dan memiliki metodologinya sendiri terutama kritik ideologi dan riset aksi. Ideologi—nilai, kepercayaan, dan praktik yang berasal dari kelompok dominan tertentu—merupakan alat yang dipakai oleh kelompok berkuasa untuk mendukung dan melegitimasi kepentingan tertentu—kepentingan sektiral—mereka dengan mengorbankan kelompok lemah. Kritik ideologi dirancang untuk membongkar bekerjanya ideologi dalam pelbagai bidang kehudpan masyarakat dan pendidikan, serta bekerjanya kepentingan pribadi dibalik kedok kebaikan bersama, yang mungkin berlangsung secara sadar dengan memperlihatkan bagaimana ideologi tersebut mengabdikan suatu sistem yang memperkuat yang kaut dan memperlemah yang lemah, yakni menindas kepentingan umum. Situasi tersebut tidak bersifat alami, tetapi merupakan hasil atau proses, dimana kepentingan dan kekuasaan dilindungi serta ditindas. Salah satu tugas kritik ideologi adalah membongkar situasi tersebut.

Habermas berpendapat kritik ideologi dijalankan pada empat tahap; *Tahap Pertama,* deskripasi dan interpretasi situasi yang ada penyelidikan hermeneutik (menggunakan pendekatan *vestehem* dari paradigma interpretatif dari Max Weber). *Tahap Kedua,* penerapan nalar, kritik dengan melibatkan individu dan kelompok atas pandangan dan praktik mereka akibat distorsi ideologis. *Tahap Ketiga,* Penyusunan agenda untuk mengubah situasi-menuju masyarakat egaliter. *Tahap Keempat,* evaluasi terhadap pencapaian situasi baru dan egalitarian yang telah terwujud. Habermas membagi definisi pengetahuan yang berharga dan cara memahami dalam tiga kepentingan kognitif, yakni: *Pertama,* prediksi dan kontrol; *Kedua,* pemahaman dan interpretasi; *Ketiga,* emansipasi dan kebebasan (*freedom*). Ia menyebutnya sebagai kepentingan *teknis, praktis* dan *emansipatoris.*

Kepentingan *teknis* menjadi karakter bagi metode ilmiah—positivis—dengan menekankan pada hukum, aturan, prediksi, dan kontrol atas perilaku, degan objek dan riset yang pasif—dan pengetahuan instrumental. Kepentingan *praktis* dicontohkan dengan metodologi hermeneutik-interpretatif yang dijabarkan dalam pendekatan kualitatif untuk memahami dan meneliti pendidikan (contohnya interaksionisme simbolik). Metodologi penelitian ini berusaha menjelaskan, memahami dan menafsirkan komunikasi dari “subjek yang bertindak dan berbicara”. Hermeneutika terfokus pada interaksi dan bahasa, yaitu berusaha memahami situasi melalui cara pandang partisipan dengan mengadopsi prinsip *verstehen* dari Weber. Kepentingan *emansipatoris* mencakup dua kepentingan sebelumnya, namun melampaui bukan membutuhkan keduanya. Kepentingan ini berkaitan dengan *praksis,* yakni tindakan yang dilakukan dengan refleksi dan bertujuan mencapai emansipasi. Tujuan ganda dari kepentingan ini adalah mengungkapkan cara kerja kekuasaan dan menciptakan keadilan sosial dengan memperlihatkan bahwa dominasi dan penindasan menghambat perwujudan kebebasan individu dan sosial. Tugas dari kepentingan pembentuk pengetahuan, atau tugas teori kritik sendiri adalah menggugah kesadaran mereka yang tidak berdaya tentang adanya determinan perilaku tidak bebas yang tertindas, terkekang, dan tertusuk demi pembebasan mereka.

Pemikian Habermas berdampak besar pada pendidikan, mencakup antara lain rancangan, sasaran dan muatan kurikulum; pedagogi; evaluasi; dan penelitian. Dalam rancangan kurikulum, tiga kepentingan pembentuk pengetahuan dapat menghasilkan tiga rancangan kurikulum; *Pertama*, pandangan *rasionalis* dan *behavioris*; yaitu kurikulum sebagai produk, menunjukkan kepentingan teknis, sehingga menghasilkan

kurikulum birokratis. *Kedua,* Pandangan *humanistic, interpretative* dan *pragmatis,* yaitu kurikulum sebagai praktik, pendekatan proses dengan *hermenetik curriculum project* untuk mewujudkan kepentingan hermeneutik. *Ketiga,* pandangan *eksistensial* dan *kritik ideologi,* yaitu "kurikulum sebagai praksis", mewujudkan kepentingan emansipatoris. Kepentingan emansipatoris rnempermasalahkan kurikulum melalui riset aksi. Kurikulum merupakan wilayah pertarungan ideologi.

Kurikulum emansipatoris menyadarkan anak didik –baik dalam muatan dan proses pendidikan, mengembangkan demokrasi partisipatoris, keterlibatan, hak suara anak didik dan perwujudan kebebasan eksistensial individual secara kolektif. Kritik dan pratik berpadu menghasilkan kurikulum yang menyelidiki kebudayaan, pengalaman kekuasaan, dominasi, dan penindasan, yakni menjadikan sasaran, tujuan, dan muatan kurikulum sebagai subjek kritik ideologi dan menyusun sebuah agenda untuk mendorong pemberdayaan. Pedagogi kritis berpendaat bahwa para pendidik harus bekerja dengan dan berdasarkan pengalaman anak didik dalam proses pendidikan, bukan meerapkan kurikulum yang mereproduksi kesejangan sosial. Dalam pedagogi ini, guru harus mengubah pengalaman dominasi dalam diri anak didik dan memberdayakan mereka agar "terbebas" dalam tatanan demokrasi. Dalam konteks pendidikan, rasionalitas komunikatif Habermas menuntut perlunya mengurangi kecenderungan *technicist* dengan megontrol birokratisasi dan meningkatkan proses komunikasi serta berwacana, kritik ideologi yang rasional terhadap pendidikan, kurikulum, dan praktik-praktik pedagogi.

Pendidikan memiliki kekuatan politis dan ideologis dalam mengusung agenda perubahan sosial. Maka tak bisa dipungkiri bahwa institusi pendidikan selalu dijadikan medan dalam melanggengkan kekuasaan. Menjadi sebuah keniscayaan bahwa pendidikan mulal kehilangan fungsinya sebagai medan transformasi sosial dan mendidik masyarakat. Dari pemaparan tersebut jelaslah melacak epistemologi pendidikan menjadi diskursus penting dalam menggali dan merumuskan arah gerak perubahan kebijakan pendidikan yang berihak pada kaum lemah. Usaha strukturasi *(struturation)* yaitu penataan relasi-relasi sosial lintas ruang dan waktu harus menjadi agenda propaganda utama. Sebagaimana dikatakan oleh Antony Gidden, maka sangat perlu perlu diciptakan kesadaran diskursif *(discursive consciousness)* yaitu ekspresi verbal oleh aktor-aktor perubahan pemikiran dari gerakan sosial atas tindakan individu dan masyarakat. Pemikiran Habermas memberikan dasar teoretis yang kuat bagi suatu pemahaman bahwa kurikulum dan pedagogi ternyata bersifat problematis dan politis. Teori pendidikan dan penelitian memiliki agenda subtantif, misalnya menyelidiki hubungan antara sekolah dan masyarakat tentang kesenjangan dan konstruksi sosial.

4. EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN KRITIS NEIL POSTMAN (1931-…)

Postman telah menempuh jalan panjang untuk menjadi salah seorang filsuf paling tersohor dan berpengaruh serta penantang utama "pendidikan elektronik". karir akademis Postman dimulai sejak 1959 di kelas pendidikan Bahasa Inggris yang disebut American English Grammer. Pada 1961, sebagai *Associate Professor* dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris di New York University sebelum menjadi Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Budaya di universitas yang sama, Postman—yang telah mengetahui pengaruh televisi terhadap proses belajar—menganggap televisi sebagai sumber informasi yang mengandung daya tarik besar dan sumber pengalaman belajar yang utama. Benih-benih idenya untuk *Amusing Ourselves to Death* mulai tumbuh sejak tahun itu. Walaupun dalam *Telivison and Teaching of English* Postman memberikan motivasi, bantuan dan dorongan bagi para guru bahasa Inggris yang ingin menggunakan televisi, ia dengan jelas mensyaratkan agar pengunaan televisi harus bersifat informatif, diskriminatif (membeda-bedakan, lihat penjelasan berikut mengenai dampak televisi terhadap masa kanak-kanak), dan kreatif.

Dengan memulai karirnya sebagai guru sekolah dasar, Postman masih menganggap dirinya mempunyai pandangan romamtik mengenai pendidikan dan jiwa optimistis, meskipun budaya saat ini memperlemah proses mengajar. Buku terakhirnya, *The End of Education*—sehingga ia diundang ke Italia untuk menerima Salvatore Valitutti International Prize atas terjemahan buku tersebut ke dalam bahasa Italia, diharapkan dapat mengubah persekolahan denganmemperkenalkan kembali tujuan yang inheren (*inherent purposes*) di dalamnya, yakni "tujuan akhir" (*ends*). Namun, Postman memperingatkan bahwa tanpa dialog serius mengenai tujuan tersebut, persekolahan akan "berakhir", sebab "tanpa makna, proses belajar tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, sekolah akan menjadi rumah tahanan, bukan rumah tempat mencurahkan perhatian", "dan semakin cepat kita berusaha memperbaikinya akan semakin baik".

Walaupun demikian, bukan sekolah seperti ini—dan masyarakat serta budaya saat ini dengan dominasi tehnologi—yang menjadi fokusnya karena sekolah hanya cermin dari kepercayaan sosial dengan menempatkan dibelakang apa yang sudah ditempatkan masyarakat didepan cermin itu. Sekolah dihadapkan pada dua kepercayaan yang bertentangan. Kepercayaan pertama diarahkan menuju pemikiran kritis, yakni pemikiran mandiri dan ketrampilan yang cukup untuk melawan dan mengubah yang salah. Inilah yang disebut Postman dengan *mengajar sebagai kegiatan subversif* (*Teaching as Subversive Activity*). Kepercayaan kedua melihat sekolah sebagai sarana mengajar anak didik agar bisa menerima dunia apa adanya atau bahkan menjadi subordinat dari aturan, batasan, dan bahkan prasangka kebudayaan. Inilah yang disebut dengan *mengajar sebagai kegiatan memelihara* (*Teaching as Conserving Activity*).

Pendapat ini mencerminkan pendekatan dialektis Postman dan mitranya dalam menulis lima buku, Charles Weingartner, bahwa untuk setiap ide yang "benar" muncul ide alternatif, yakni lawan dari ide ynag

“benar”. Pendidikan bukan persekolahan, dan bagi Postman, persekolahan bisa menjadi kegiatan subversif atau kegiatan memelihara, namun terbatas. Postman menggambarkan jadwal kegiatan sekolah dengan kesan agak ironis, “(jadwal) sekolah mempunyai awal yang lambat dan akhir yang cepat. Diantara awal dan akhir itu terdapat libur musim panas dan libur lainnya. Alasan sakit dari anak didik (sehingga tidak perlu masuk sekolah) selalu bisa diterima. Postman tidak sepakat dengan surat kabar *The New York Times* ketika pada 1971 menjulukinya sebagai “teoretikus pendidikan radikal terkemuka”. Meskipun setahun sebelumnya. Postman dan Charles Weingartner menulis sebuah buku pegangan bagi anak didik berusia 15-25 tahun untuk sekolah dasar, *The Solf Revolution.*

Pada awal 1980-an, Postman mendesak dunia pendidikan untuk sadar akanhilangnya masa kanak-kanak dengan menerbitkan *Disappearance of Childhood* dan mengajukan pertanyaan “apakah masa kanak-kanak dapat dipertahankan?” lewat penerbitan *Childhood: Can It Be Preserved?* Jawaban Postman untuk pertanyaan itu sudah jelas. Jika kita terus terjebak dalam tehnologi kita—termasuk televisi, masa kanak-kanak sebagai suatu struktur sosial akan hilang. Televisi memerlukan persepsi, bukan konepsi, sementara “membaca melibatkan pemikiran, penalaran, imajinasi, dan penilaian”. Bahan bacaan bagaikan cetak biru untuk bangunan, dan darinya, tiap pembaca membangn struktur yang detailnya sesuai ciri khas masing-masing pembaca. Belajar membaca adalah belajar hidup dengan aturan tradisi legis dan retoris yang rumit dalam memperlakukan kalimat secara hati-hati dan tentu saja terus-menerus mengubah makna sebagai unsur-unsur baru yang terungkap secara berurutan. Mereka yang dapat membaca harus belajr untuk bersikap reflektif dan analitis, sabar dan tegas, serta selalu tenang, yakni melolak teks setelah mempertimbangkannya.

Dalam *The School Book* (1973), Postman menulis bahwa sekolah, sebagai media komunikasi dan sumber informasi, tengah mengalami kebangkrutan. Lebih lanjut, sekolah konvensional tidak dapat bertahan secara ekonomi dalam persaingan dengan media elektronik. Sehingga ramalannya untuk millenium ke-3 adalah bahwa sekolah akan seperti “mesin cuci belajar” (*Learning Laundromats*). Sekolah akan terdiri dari serangkaian stasiun belajar-mengajar yang memberikan akses pada apapun dan untuk siapapun yang ingin belajar. Stasiun tersebut bukan hanya melibatkan mata pelajaran dalam kurikulum sekolah umum saat itu (1973), tetapi juga mata pelajaran lain. Sekolah akan terdapat di setiap pemukiman dan terbuka selama 24 jam. Siapapun bisa mengulang-ulang pelajaran sesuai kebutuhan, tanpa gagal dalam tes atau menjadi sasaran ejekan dari guru atau murid lain karena dianggap bodoh.

5. EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN KRITIS HENRY GIROUX (1943-…)

Henry Giroux meraih gelar doktor dari Cmbridge-Mellon University pada 1977 dengan tesis doktoral tentang teori kurikulum, sosiologi dan sosiologi pendidikan. Ia pernah mengajar di Boston University (1977-1983) dan kemudian di Miamy University (1983-1992) menjadi *Professor of Education and Renowwed in Residence.* Sejak 1922, ia menjadi *Waterbury Chair Professor of Secondary Education* di Penn State University. Karya-karya Giroux memiliki beberapa fokus penting, yaitu kesetaraan; demokrasi; politik kebudayaan; pendidikan kritis; guru sebagai intelektual transformatif; peningkatan martabat manusia; dan penghapusan penindasan dalam bentuk apapun. Namun, Goroux tidak hanya menjabarkan fokus-fokus tersebut dalam semua karyanya,ia juga menambah persoalan keterkaitan antara pendidikan dengan pelbagai medan produksi kebudayaan dan pergualatan lainnya. Bagi Giroux, pendidikan harus meretas batas-batas persekolahan, masuk kedalam wilayah publik, dan bersifat politis.

Karya awal Giroux sangat dipengaruhi oleh Mahzab Frankfurt, khususnya Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse dan Jurgen Habermas. Ia mengkritik dominasi nalar instrumental yang mengontrol dan mengakibatkan dehumanisasi sehingga melestarikan ketimpangan dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa pendidikan lebih dari sekedar reproduksi kebudayaan untuk memperkuat mereka yang sudah kuat dalam masyarakat dan mempertahankan marginalisasi terhadap mereka yang lemah. Lebih lanjut, Giroux menyatakan bahwa sekolah harus menjadi medan untuk melakukan perlawanan, pergulatan, perjuangan kultural dan pertentangan terhadap hegemoni budaya yang telah melahirkan stigmatisasi, marginalisasi, penindasan dan pengabaian sebagian besar manusia. Ia menentang teoretisasi seperti Bowles, Gintis, dan Bourdieu karena pandangan mekanistik mereka tentang reproduksi sosial melalui pendidikan, dan pengabaian mereka terhadap kemungkinan untuk melakukan intervensi danmemutus siklus reproduksi. Menurut Giroux, ketiga pemikir tersebut terlalu mengandalkan struktur dan merendahkan kemampuan manusia sebagai agen perubahan sosial.

Sekolah, dalam pandangan Giroux, harus menjadi medan produksi dan transformasi kebudayaan, buka reproduksi kebudayaan. Sekolah juga harus menjadi ajang pemberdayaan dan pembebasan individu serta kelompok dalam sebuah masyarakat yang adil dengan mendorong otonomi individual dan kolektif dalam sistem demokrasi partisipatoris yang menghargai keragaman serta kemajemukan kelompok sosial dan budaya. Pendangan tersebut melihat demokrasi sebagai sebuah perayaan atas perbedaan dan keragaman, bukan untuk melayani agenda minoritas elite atau ideologi yang berkuasa. Ia berpendapat bahwa demokrasi melibatkan kritik ideologi, dan dengan demikian demokrasi dapat disamakan dengan demokrasi kritik. Demokrasi partisipatoris yang kritis dirancang untuk menciptakan keadilan guna mengatasi beragam “kesulitan”: kemiskinan, keputusasaan, pengangguran, stigmatisasi, generasi muda yang sakit,

budaya massa yang kabur, ketamakan, komodifikasi, chauvinisme, seksisme, realisme, materialisme, dehumanisasi, ideologi nasionalisme yang materialistik, dan kota yang terus-menerus bertambah besar.

Menurut Giroux, terciptanya masyarakat yang bebas di dalam dan melalui pendidikan harus melibatkan: (1) penolakan gagasan kebenaran dan otoritas transenden dan ahistoris, sebagai perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, hak dan suara—disini dan sekarang—serta harus melibatkan pengalaman ketertindasan; (2) politisasi hubungan interpersonal untuk meningkatkan solidaritas dalam “pluralisme radikal”; (3) menanamkan bahasa kritik dan bahasa kemungkinan kepada masyarakat; (4) redefinisi sekolah sebagai wilayah publik, dimana keterlibatan dan demokrasi dapat digali dalam perjuangan untuk mencapai “masyarakat demokratis radikal”.

Bagi Giroux, tugas pendidikan berarti membuat pedagogi lebih bersifat politis dan membuat politik lebih bersifat pedagogis. Pendidikan radikal, menurutnya, bukan hanya menjalankan seperangkat tehnik, melainkan mempertanyakan asumsi-asumsi yang diterima tentang hakikat, isi dan tujuan persekolahan. Dalam pandangannya tersebut, pendidikan radikal merupakan suatu bentuk “politik kebudayaan” yang mempertanyakan kebudayaan siapa yang direpresentasikan dalam pendidikan dan sejauh mana keabsahan kebudayaan tersebut. Pendidikan radikal mempertanyakan kategori dan status disiplin ilmu. Tujuannya adalah membangun masyarakat lebih demokratis, yang bergerak dari kritik ideologis dan historis atas masyarakat dan sekolah *sebagaimana adanya* (contohnya, sekolah yang melayani efesiensi) menuju suatu pandangan tentang masyarakat dan sekolah *sebagaimana seharusnya* (contohnya, sekolah yang mempersoalkan cara hidup dan mengembangkan otonomi individu dalam masyarakat egalitarian). Giroux mengakui gagasan tersebut bersumber dari Marxisme. Hubungan-hubungan pendidikan, kurikulum dan sekolah dapat saling bertentangan. Ketiganya syarat dengan muatan ideologi dan sering melayani kekuasaan serta struktur hubungan yang asimetris dalam masyarakat. Bagi Giroux, keadaan ini perlu dibongkar dan tidak boleh memperoleh legitimasi.

Giroux berpendapat bahwa para pendidikan dan anak didik perlu menyelidiki kurikulum siapa yang digunakan dan tidak digunakan di sekolah, atas kepentingan siapa kurikulum itu diterapkan, apa dampak penerapan kepentingan tersebut dalam masyarakat, serta sejaun mana keabsahan kurikulum dan pedagogi yang diterapkan di sekolah. Pembelaan Giroux terhadap hak-hak kelompok yang lemah dan tertindas untuk memperoleh pengakuan di dalam dan melalui pendidikan melibatkan keterlibatan intelektualnya yang luas dengan gerakan feminisme, antseksisme, antirasisme, dan antieksploitasi. Berkenaan dengannya, ia tidak segan mengkritik masyarakat dan kebijakan pendidikan Amerika Serikat kontemporer (dintandai dengan munculnya kekuatan konservatisme baru) yang dianggapnya sebagai perwujudan kolonialisme yang menggelisahkan di negeri sendiri.

Giroux menguraikan beberapa prinsip pendidikan kritis:

1. Perhatian yang diberikan kepada pendidikan seperti yang diberikan kepada kegiatan akademik tradisional, dengan menciptakan (kembali) sekolah sebagai wilayah publik yang demokratis.
2. Etika menjadi perhatian utama dalam pendidikan kritis yaitu dengan mempersoalkan praktik-praktik pendidikan yang melestarikan ketimpangan, eksploitasi dan penderitaan manusia.
3. Implikasi politis dari perayaan atas perbedaan dalam masyarakat demokratis harus dihadapi.
4. Bahasan yang mencakup beberapaveri solidaritas dan politik perlu dikembangkan.
5. Tidak ada teks atau narasi besar yang tunggal, tetapi terdapat beberapa teks, beberapa kurikulum, beberapa versi pendidikan yang perlu diteliti secara kritis sebab terdapat beberapa versi dan ajang eksploitasi serta penindasan dalam masyarakat yang saling terkait.
6. Representasi budaya dalam kurikulum harus dianggap sebagai wacana kekuasaan dan hubungan-hubungan kekuasaan yang asimetris.
7. Kurikulum adalah sebuah “teks kebudayaan” yang muatannya harus bisa dikritik.
8. Politik suara (*politics of voice*) memerlukan pengakuan atas keragaman dan hak-hak kelompok tertindas untuk memperoleh pengakuan dalam pendidikan.

Dalam pengembangan pendidikan kritis yang menghubungkan praktik pendidikan dengan masyarakat, guru dan pendidik harus bertindak sebagai “intelektual transformatif”, yaitu yang menganggap belajar dan mengajar sebagai aktivitas politik. Sekolah, bagi Giroux, merupakan medan perjuangan untuk memperoleh makna dan kekuasaan. Intelektual transformatif menggugah kesadaran anak didik pelbagai permasalahan dengan memperlakukan anak didik sebagai agen kritis yang mempertanyakan bagaimana pengetahuan—dan pengetahuan siapa—yang diciptakan serta disampaikan di sekolah dan atas kepentingan siapa proses tersebut bisa berjalan. Tujuan pendidikan kritis adalah membuat anak didik secara ideologis lebih kritis dan memiliki pandangan untuk mencapai emansipasi. Para guru mengajar berdasarkan pada pengalaman anak didik dan mendorong anak didik agar mampu menyelidiki dan mengkritik pengalaman-pengalaman mereka untuk memperoleh pesan ideologis. Tujuan selanjutnya adalah menyingkap penindasan, ketimpangan dan konstruksi identitas sosial dalam hubungan kekuasaan yang asimetris antara pelbagai kelompok, dan sekaligus anak didik mempunyai pandangan untuk melakukan transformasi cara pandang mereka terhadap situasi serta kesempatan hidup. Selanjutnya, mereka mangalami pemberdayaan dan emansipasi sebagai anggota komunitas dan kebudayaan yang beragam. Anak didikpun memiliki “suara” dalam sistem demokrasi partisipatoris.

MATERI 12
KAPITALISME PENDIDIKAN

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

BAGIAN I
Prawacana: Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan

Pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat agar dapat bersosialisasi dan beradaptasi dalam budaya yang mereka anut. Pendidikan menjadi salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dan budaya manusia. Dengan kata lain pendidikan adalah salah satu strategi budaya manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupan mereka. Hubungan antara individu, masyarakat dan negara pada dasarnya merupakan hubungan yang tidak berimbang. Diantara hubungan ketiga komponen tersebut, individu memiliki posisi yang paling lemah. Negara mempunyai kekuasaan yang sah dan dijamin oleh hak monopolinya untuk menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun secara administratif. Masyarakat juga memiliki kedudukan yang unggul terhadap individu karena masyarakat dapat menguasai individu lewat kekuatan dominasi dalam ekonomi, maupun lewat kekuatan hegemoni dalam kebudayaan. Dipandang dari sisi epistemologis manusia merupakan makhluk berakal yang dapat menggunakan pikirannya dengan bebas untuk mencari kebenaran dalam pengetahuannya *(truth).* Dan dari sisi etis manusia adalah makhluk yang memiliki hati nurani yang memungkinkannya mencapai kebenaran dalam sikap, keputusan dan tindakan-tindakannya *(rightness).*

Menelaah posisi manusia menurut filsafat Freire bertolak dari kehidupan nyata, bahwa di dunia ini sebagian besar manusia menderita sedemikian rupa, sedangkan sebagian lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan cara yang tidak adil dan yang menikmati ini justru bagian minoritas ummat manusia. Dilihat dari segi jumlah saja ini menunjukkan bahwa keadaan tersebut mempelihatkan kondisi yang tidak beribang dan tidak adil. Persoalan itu yang disebut Freire sebagai ‘situasi penindasan’. Bagi Freire situasi penindasan apapun nama dan alasannya adalah tidak manusiawi dan menafikan harkat kemanusiaan (*dehumanisasi*). Dehumanisasi bersifat ganda, dalam pengertian, terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas kaum penindas. Keduanya menyalahi kodrat manusia sejati. Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka dinistakan, karena mereka dibuat tak berdaya dan dibenamkan dalam ‘kebudayaan bisu’ *(submerged in the culture of silence).* Adapun minoritas kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakekat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi sesamanya.

Rekonstruksi Pendidikan Nasional

Semangat dan kritisisme tentang posisi pendidikan sebagai praktek pembebasan menurut hemat penulis juga menjadi ruh penulisan Ngainun Naim dalam bukunya yang segar dan akademis dengan tanpa kehilangan nalar kritis, dengan judul *Rekonstruksi Pendidikan Nasional; Membangun Paradigma yang Mencerahkan* (Yogyakarta: Teras, 2009). Kegelisahan yang dibarengi nalar kritik untuk membangun paradigma yang mencerahkan dimulai dengan analisa seputar paradigma kritis, membangun mentalitas, memperkokoh konsep diri, membentuk kepribadian terintegrasi, mendidik kecerdasan, dan tawaran baru paradigma pembelajaran.

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dengan formulasi tadi, sebelumnya Ngainun Naim mencoba untuk melacak dan mengurai persoalan pelik dan mendesak untuk segera diselesaikan mulai dari kurikulum yang tidak mencerdaskan, ekses negatif media, buruknya infrastruktur sekolah, kenakalan para pelajar dan fenomena masyarakat dengan budaya meninggikan status sosial dengan sederet gelar akademik. Saya sepakat bahwa pokok persoalan penting untuk mencapai kemajuan pendidikan adalah bagaimana membentuk masyarakat belajar (*learning society*), sebagaima disampaikan oleh Ngainun Naim:

> Adanya masyarakat belajar menandakan sebuah kedinamisan. Masyarakat belajar senantiasa melakukan usaha-usaha kreatif untuk menambah pengatahuannya, memproduksinya dalam konteks kehidupan sehari-hari, melakukan transformasi, dan pada akhirnya terus menerus meningkatkan kemajuan masyarakat.[60]

Sederet masalah pendidikan yang belum selesai yang khususnya berkaitan dengan internal birokrasi pendidikan masih diperparah oleh pengaruh eksternal terutama fenomena kapitalisasi dan globalisasi pendidikan. Masalah global sangat erat kaitannya dengan kekuatan imperialisme dan

---

[60] Ngainun Naim, Rekonstruksi *Pendidikan Nasional; Membangun Paradigma yang Mencerahkan* (Yogyakarta: Teras, 2009) h. 250-251.

penghisapan ekonomi sebuah negara, yang pada akhirnya timbulah kemiskinan. Fenomena kemiskinan ini mengakibatkan banyak warga negara yang tidak bisa mengenyam bangku pendidikan. Pendidikan kita pada akhirnya terjangkit logika kapitalis-pragmatis.

> Logika kapitalis-pragmatis nampaknya sulit kompromi untuk mendesain pendidikan berkualitas dengan biaya yang murah. Dalam pradigma ini, sekolah berkualitas dengan biaya murah merupakan suatu yang 'absurd' dan atau bahkan 'gila'. Tetapi sesungguhnya sekolah murah dan berkualitas sangat mungkin untuk diwujudkan. Hanya memang, dibutuhkan beragam prasayarat untuk mewujudkannya.[61]

Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi tidak serta merta berdampak positif terhadap masyarakat, tetapi juga mempunyai dampak negatif yang luar biasa. Media informasi yang begitu dahsyat mengumbar 'realitas kamuflase', telah meluluh-lantakkan tatanan nilai dan norma, serta telah menumpulkan budaya kritis masyarakat. Melihat fenomena ini maka, sekolah sesungguhnya tidak hanya diruang kelas, tepapi semua tempat dimana kita hidup adalah tempat belajar.

Maka, pendidikan sebagai instrumen yang efektif untuk membangun manusia berkualitas, pendidikan mestinya dikembalikan pada kerangka idealitasnya. Prinsip penting yang harus dipertimbangkan adalah harus ada langkah komprehensif dan integral dalam membuka seluruh masalah berikut dengan formulasi penyelesaiannya.

Selanjutnya, untuk menganalisis rekonstruksi paradigma pendidikan nasional saya berusaha mengurai kembali akar masalah pada level internasional, khususnya dalam analisa kritik-ekonomi politik, hal ini berkaitan dengan kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan. Globalisasi dan krisis masyarakat kapitalisme menjadi ancaman serius yang berimplikasi kuat dalam dunia pendidikan, yang juga saya akan urai lebih lanjut. Kita juga harus mengembalikan pendidikan pada hakikatnya sesuai dengan visi dan misi nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Tiga Fase Imperialisme: Implikasinya terhadap Kapitalisasi Pendidikan

Untuk mengawali proses diskusi dan berbicara mengenai pendidikan dalam perspektif ekonomi-politik, maka menurut hemat penulis perlu diuraikan mulai dari akar masalahnya. Berikut ini penulis uraikan sejarah imperialisme yang dipaparkan oleh Noam Chomsky,[62] dan selanjutnya penulis kaitkan dengan logika terjadinya proses sistemik dalam perspektif ekonomi-politik yang kemudian terjadi kapitalisasi pendidikan dalam era neo-liberalisme. Menurut Noam Chomsky, bahwa sepanjang beberapa dekade imperialisme telah menjadi bahan perdebatan serius diantara kalangan pemikir dan para pegiat gerakan revolusioner. Beberapa pemikir seperti Hannah Arendt, Eric J. Hobsbawm dan Vladimir Lenin adalah diantara orang-orang yang tercatat sebagai pemikir-pemikir yang meneorisasikan imperialisme. Seorang penggerak revolusi Rusia, Vladimir Ilyich mengaitkan antara imperialisme dengan perkembangan kapitalisme. Bagi Lenin, imperialisme adalah tahapan terkini yang tak terelakkan dalam logika perkembangan kapitalisme. Imperialisme lahir dari suatu krisis kapitalisme dari suatu negeri. Agar keluar dari krisis periodiknya, kapitalisme harus keluar untuk mencari pasar baru, mengekspansi batas-batas negara-bangsa untuk mencari lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan mentah untuk produksi kapitalis yang lebih murah. Dalam pandangan Lenin, imperialisme dicikan oleh lima hal, *pertama,* konsentrasi kapital, baik dalam bentuk konglomerasi maupun monopoli; *kedua,* meleburnya kekuasaan kapital finans, industri dan birokrasi; *ketiga,* ekspor kapital dalam bentuk investasi-investasi industrial, *keempat,* pembagian ekonomi dunia oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan korporasi transnasional melalui kartel internasional; *kelima,* pembagian politik dunia oleh negara-negara maju. Meskipun teori Lenin banyak dikritik, tetapi ia telah meletakkan bangunan teori imperialisme yang penting dalam perdebatan selanjutnya, utamanya pengaitannya dengan kapitalisme dan perkembangan kapital finans.

Pendekatan Lenin atas imperialisme ini salah satunya dikritik oleh Samir Amin, seorang Marxis berkebangsaan Mesir. Bagi Samir Amin, imperialisme bukan merupakan *tahap,* melainkan *inheren* dalam setiap ekspansi kapitalisme. Sepanjang sejarahnya imperialisme telah memasuki dua fase dan sedang memasuki fase yang ketiga.

Fase pertama terjadi pada masa ekspansi kapital Eropa Atlantis yang menghancurkan benua Amerika. Dua aktor utamanya adalah Spanyol dan Inggris. Hasil yang terjadi akibat dari penaklukan kolonialis ini adalah hancurnya peradaban Indian, terjadinya Hispano-Kristenisasi, dan genosida total atas masyarakat Indian, dimana negara Amerika Serikat berdiri diatasnya. Penaklukan ini masih dibumbui oleh kehendak untuk memperadabkan 'dunia lain' dengan dalih agama. Imperialisasi tahap pertama ini pada akhirnya melahirkan sejumlah perlawanan seperti pemberontakan kaum budak di Haiti, serta revolusi Meksiko dan Kuba.

Fase kedua terjadi pada masa revolusi industri Inggris yang berujung pada penaklukan Asia dan Afrika. Penundukan kolonial ini berupaya untuk berupaya untuk mencari dan membuka 'pasar baru' bagi

---

[61] *Ibid*., h. 270.

[62] Noam Chomsky, *Neo Imperalisme Amerika Serikat* (Yogyakarta: Resist Book, 2008) h. vii-x.

perdagangan Eropa. Cecil Jhon Rhodes adalah salah satu figur pendukung gagasan kolonialisme ini, dengan menyatakan bahwa kolonialisme Inggris di Afrika akan menyebabkan ekonomi Inggris bangkit kembali dan menghindarkan revolusi sosial di dalam negeri. Imperialisme fase kedua ini berakibat pada membesarnya jurang ketidakadilan sosio-ekonomi yang terus dihadapi oleh dunia hingga kini. Jika pada tahun 1800-an rasio ketidaksetaraan adalah dua berbanding satu, maka sejak terjadinya kolonilaisme hingga saat ini rasio ketidaksetaraan ini menjadi enampuluh berbanding satu, dengan sekitar 20% dari penduduk dunia yang bisa mengambil keuntungan dari sistem yang terjadi saat ini. Sementara 80% lainnya hidup dalam ketidakpastian dan ketidaksamaan sosio-ekonomi secara persisten. Imperialisme fase kedua ini menghasilkan perang-perang dunia besar antar kekuatan imperialis untuk mempertahankan koloninya. Namun juga mengahsilkan berbagai perlawanan yang terus menentang proyek-proyek imperialis, seperti lahirnya revolusi sosialis di Rusia dan China, dan tumbuhnya berbagai revolusi pembebasan nasional di negara-negara Asia dan Afrika.

Kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika tersebut tidak lantas menghancurkan sistem imperialis itu sendiri. Kekuatan-kekuatan imperialis, yang diantaranya merupakan kekuatan kolonialis lama seperti Belanda, Inggris dan Perancis serta negara kapitalis baru yang muncul pada Abad ke-19 seperti Jerman, Amerika Serikat dan Jepang, tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan ‘situasi baru’ ini. Kaum imperealis ini segera mengubah pandangan tradisionalnya bahwa pertumbuhan kapitalis mereka sangat tergantung dari berapa besar wilayah koloni yang mereka ekspansi. Dengan keunggulan yang dimiliki sebagai negara yang maju, kaya-raya dan memiliki sumber daya manusia serta tehnologi yang tinggi, mereka segera mengubah modus dominasinya menjadi imperialisme baru, imperialisme tanpa koloni.

Saat ini sedang memasuki fase imperialisme ketiga yang ditandai oleh runtuhnya sistem Soviet dan rezim-rezim nasionalis-populis di Dunia Ketiga. Pada dasarnya, tujuan dari imperealisme fase ini masih sama dengan fase-fase sebelumnya, yaitu untuk mengukuhkan dominasi kapital, memperluas dan mengekspansi pasar baru, menjarah sumber daya agraria, dan melakukan supereksploitasi pada tenaga kerja di negara-negara pinggiran. Berbagai wacana ideologis disiapkan untuk megukuhkan hegemoni imperialisme tahap ketiga ini, diataranya dengan menggembar-gemborkan demokrasi, humanitarianisme, hak asasi manusia, pasar bebas dan kesejahteraan, pemerintahan yang bersih dan baik. Tetapi wacana-wacana ini dikerjakan oleh model standar ganda dan hanya dilakukan demi mempermulus akumulasi kapital oleh negara-negara maju pada negara-negara pinggiran.

Fase ketiga ini juga berhadapan dengan suatu zaman yang dicirikan oleh terjadinya persenyawaan yang halus antara menguatnya kekuasaan ekonomi korporasi dengan globalisasi teknologi informasi dan pengetahuan. Berbagai fenomena globalisasi seperti: meningkatnya kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional dan perdagangan global, revolusi informasi dan ilmu pengetahuan, serta munculnya masyarakat yang berbasis jaringan (*network sosiety*), menguatnya peranan-peranan lembaga keuangan internasional, serta zona-zona perdagangan bebas yang melampaui negara-bangsa, membuat para teoretisi tidak bersepaham satu sama lain dalam memandang tatanan global pada zaman ini. Sebagian mendefinisikan tatanan global ini dengan cara pandang baru, sembari mendeklarasikan suatu zaman ‘pos-imperealis’. Sementara yang lain berpendapat bahwa imperialisme tak pernah berakhir, hanya memakai modus baru dengan motif lama yang tetap sama. Seperti anggur lama yang dituangkan dalam botol baru.

Dalam perspektif ekonomi-politik imperialisme ini berkaitan erat dengan sejarah perkembangan kapitalisme dan proses panjang transformasi masyarakat dari masyarakat feodal ke masyarakat modern, atau sering disebut dengan era globalisasi. Globalisasi inilah yang kemudia berdampak pada proses kapitalisme pendidikan.

Globalisasi dan Sejarah Ekonomi Internasional

Globalisasi kegiatan ekonomi dan persoalan pengelolaannya sering dianggap baru muncul setelah Perang Dunia II, khususnya pada tahun 1960-an. Masa sesudah tahun 1960-an adalah masa munculnya perusahaan multinasional (MNC) dan berkembangnya perdagangan internasional. Kemudian, setelah sistem nilai tukar setengah-tetap Bretton Woods ditinggalkan pada tahun 1971-1973, investasi dalam bentuk surat-surat berharga internasional dan pemberian kredit oleh bank mulai berkembang dengan cepat, seiring dengan meluasnya pasar modal ke seluruh dunia, yang menambah rumit hubungan ekonomi internasional dan membuka jalan bagi globalisasi ekonomi dunia yang terintegrasi dan saling tergantung.

Sejarah meluasnya kegiatan perusahaan ke seluruh dunia adalah sejarah yang teramat panjang, dan bukannya baru dimulai pada tahun 1960. kegiatan dagang, misalnya, telah ada sejak zaman peradaban kuno, tetapi pada Abad Pertengahan, barulah di Eropa, muncul kegiatan dagang yang teratur lintas Negara, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya korporasi swasta, meski seringkali mendapat dukungan dan bantuan yang besar dari pemerintahannya. Pada abad ke-14, para pedagang petualang memperdagangkan wol dan tekstil yang dihasilkan Inggris ke Belanda, Belgia, Luxemburg, dan Negara-negara lain. Selain itu, di Italia, perusahaan-perusahaan dagang dan bank-bank memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan ke seluruh dunia pada masa-masa awal Renaissance. Pada akhir abad ke-14, di Italia, ada sekitar 150 bank yang sudah melakukan kegiatan di berbagai Negara (Duning, 1993, hlm. 97-98). Dalam abad ke-17 dan ke-18 dukungan oleh Negara meluas dengan berdirinya perusahaan-perusahaan dagang besar kolonial, seperti Dutch East India Company, British East India Company, Muscovy

Company, Royal Africa Company dan Hudson Bay Company. Semua perusahaan ini mempelopori perdagangan berskala besar di wilayah yang kelak menjadi wilayah jajahan yang penting.

Tetapi, penyebaran industri ke seluruh dunialah, sebagai akibat dari revolusi industri, yang paling dekat dengan perusahaan multinasional di zaman modern. Di sini peranan perusahaan Inggris sebagai perusahaan multinasional pertama penghasil barang pabrik tampak jelas. Mula-mula Amerika Utara dan Amerika Selatan membuka peluang untuk penanaman modal yang paling menguntungkan, disusul kemudian oleh Afrika & Australia. Muncul perdebatan apakah "investasi kolonial" dapat dianggap pendahulu penanaman modal asing, tetapi yang pasti produksi untuk pasar lokal mulai dengan cara ini. Perkembangan teknik & organisasi setelah tahun 1870-an memungkinkan berbagai jenis barang yang sama dapat dihasilkan di dalam & di luar negeri oleh perusahaan yang sama, eksplorasi & pengelolaan bahan tambang & bahan baku lainnya juga menarik penanaman modal asing dalam jumlah besar (Dunning, 1993, Bab 5).

Namun, salah satu masalah dengan klasifikasi yang berlaku surut seperti itu adalah konsep model "penanaman modal asing" di satu pihak (ada pengendalian dari luar) dan investasi "potofolio" di pihak lain (jual beli surat berharga yang diterbitkan lembaga luar negeri untuk mendapat keuntungan tanpa ikut serta mengendalikan atau mengelola) baru pada tahun 1960-an muncul, bersamaan dengan munculnya istilah MNC *(multinational corporation)*. Meski tidak ada klasifikasi data yang konsisten, pada umumnya disepakati, MNC sudah ada dalam ekonomi dunia setelah pertengahan abad ke-19 dan berdiri kokoh tidak lama sebelum Perang Dunia I. kegiatan bisnis intenasional tumbuh pesat pada tahun 1920-an ketika perusahaan multinasioanl yang benar-benar terdiversifikasi dan terintegrasi kokoh, tetapi kemudian menurun selama masa depresi tahun 1930-an, hancur lebur karena perang pada tahun 1940-an, dan bangkit kembali setelah tahun 1950.[63]

Sejarah bangsa-bangsa adalah sejarah perang berbasis kepentingan ekonomi. Perang meliputi perang senjata, perang ekonomi, dan perang budaya. Perang senjata adalah perangnya antar Negara penjajah dalam memperebutkan daerah jajahan yang kaya sumberdaya alam. Perang yang demikian adalah perwujudan dari kerakusan sistem kapitalisme-kolonialisme dalam akumulasi modal melalui peperangan, akibatnya adalah Negara-negara terjajah bangkit rasa nasionalismenya melawan penjajah dan melahirkan Negara-negara merdeka, yang lazim disebut Negara Sedang Berkembang (NSB).[64]

Kapitalisme sebagai suatu sistem dunia bermula pada akhir abad 15 dan awal abad 16 ketika orang-orang Eropa yang menguasai pengetahuan pelayaran jarak jauh, menghambur keluar dari sudut kecil dunia mereka dan mengarungi tujuh lautan, untuk melanklukan, merampas dan berniaga. Sejak itu kapitalisme terdiri dari dua bagian yang berbeda tajam: di satu pihak ada sejumlah kecil Negara-negara dominan yang memeras, dan di pihak lain, dengan jauh lebih besar Negara-negara yang dikuasai dan diperas. Keduanya terjalin secara tak terpisahkan dan tidak ada kejadian dalam kedua Negara itu yang dapat dimengerti jika dilihat terpisah dari sistem itu yang menjadi sebuah keharusan. Penting untuk menekankan bahwa hal itu benar, baik untuk *"kapitalisme modern"*, dalam arti sistem kapitalisme masa kini, maupun ketika ia masih merupakan kapitalisme merkantilis dari masa sebelum revolusi industri.[65]

Seperti sejarah yang mengalir mengikuti perubahan zaman, pola eksploitasi kapitalisme internasional pun mengalami perubahan wujud eksploitasinya. Pada awal abad ke-16 di Inggris terjadi revolusi industri yang memacu laju perkembangan kapitalisme awal. Proses ini didorong lagi oleh munculnya revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu revolusi yang mengakhiri hegemoni kaum feodal di Eropa Barat dan mendorong matangnya kekuasan kaum borjuis. Di tangan para borjuis Eropalah kapitalisme mulai menanamkan kuku eksploitasinya sampai ujung dunia.

Ketika di Eropa Barat terjadi over-produksi akibat maraknya industrialisasi, maka yang kemudian harus dilakukan oleh Negara-negara Eropa adalah ekspansi ke daerah-daerah terbelakang seperti Asia, Afrika, Pasifik dan Amerika. Maka lahirlah pembagian kekuasaan atas wilayah-wilayah tersebut untuk memasarkan hasil industri dari Eropa dan juga untuk mengambil bahan-bahan mentah bagi kepentingan industrialisasi di Eropa. Daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang ketika itu belum mengalami proses perubahan sejarah masyarakat seperti Eropa Barat zaman itu. Karena perubahan kepentingan pula, maka dua Perang Dunia dihasilkan oleh kepentingan kapitalisme internasional, Perang Dunia Pertama pada tahun 1918-1939 dan kemudian Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-1945 adalah sejarah nyata di mana kapitalisme Vs kapitalisme berperang untuk menanamkan pengaruhnya terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Jadi perang yang dilakukan antara Blok Sekutu dan Blok Fasis adalah perang antara dua kapitalis yang ingin melebarkan sayap eksploitasinya terhadap Negara-negara dunia ketiga.

James Petras mengatakan bahwa globalisasi telah dimulai pada abad 15, yaitu sejak mulai berkembangnya kapitalisme yang ditandai dengan ekspansi, penaklukan dan penghisapan Negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan bahkan Amerika Utara dan Australia oleh kekaisaran global pada waktu itu, Spanyol dan Portugis. Karena itulah globalisasi selalu diasosiasikan dengan imperialisme, yaitu hubungan global yang didasarkan pada akumulasi untuk Eropa, penghisapan dunia ketiga untuk akumulasi

---

[63] Paul Hirst & Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos* (Jakarta: YOI, 2001) h. 31-34.

[64] Lihat P. Darsono, dalam *Globalisasi Suatu Strategi Penjajahan Bentuk Baru*, http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2006-november/000189.htm.

[65] Paul M Sweezy, "Kapitalisme Modern", dalam *Kapitalisme: Dulu dan Sekarang: Kumpulan Karangan dari berbagai sumber asing* (Jakarta: LP3ES, 1987) h. 5

dunia pertama. Menururt Pieterse, globalisasi dimulai sejak 1950-an. Menurut Marx dimulai 1500-an dengan tema kapitalisme modern. Wallerstein mencatat mulai 1500-an dengan tema sistem dunia baru. Robertson menilai globalisasi mulai 1870-1920-an dengan tema multidimensional, Giddens tahun 1800-an dengan tema modernitas, dan Tomilson tahun 1960-an dengan tema planetarisasi budaya.[66]

Sementara Scholte, menyatakan bahwa globalisasi berlangsung sejak tahun 1960-an, hal ini telah membantu memperluas jangkauan dalam tiga komodifikasi dalam tiga wilayah. ***Pertama,*** konsumerisme yang terhubungkan dengan produk-produk global yang diperluas oleh kapitalisme industri. ***Kedua,*** pertumbuhan lembaga-lembaga yang beroperasi dalam lingkup global *(supra territorial)* seperti *global banking* dan *global securities* sehingga memperluas jangkauan modal uang. ***Ketiga,*** globalisasi telah mendorong perluasan komodifikasi dalam wilayah baru yang melibatkan informasi dan komunikasi sebagai akibatnya, item-item *software* komputer dan telepon panggil telah menjadi objek akumulasi.[67]

Sebenarnya sejak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) berdiri pada tahun 1944 serta GATT (sekarang WTO) pada tahun 1947, praktis dunia sudah memasuki globalisasi ekonomi, karena masalah pembangunan menjadi tanggung jawab internasional. Bank Dunia mengucurkan dana pinjaman berbunga rendah bagi proyek-proyek pembangunan di berbagai Negara untuk memajukan ekonominya, sedangkan IMF memberikan pinjaman bagi Negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran luar negeri dan GATT berfungsi untuk mengatur perdagangan global.

Pada fase pasca PD II, strategi ekonomi politik yang dilancarkan oleh AS dan para sekutunya adalah strategi *Developmentalisme*[68] (pembangunanisme), untuk mengamankan investasi modalnya, kapitalisme internasional memberikan dukungan bagi orang-orang kuat di sejumlah negara dunia ketiga yang berasal dari jajaran militernya. Di Amerika Latin kita jumpai sejumlah regime yang dipimpin oleh militer (otoriter), di Asia Tenggara dan Selatan juga dijumpai regime otoriter yang kebanyakan dipimpin oleh militer. Militer pada zaman ini adalah anak emas yang dibesarkan oleh kapitalisme dengan tujuan mengamankan investasi modal. Pada fase ini (1960-1970-an)[69] dekolonisasi ditawarkan pada sejumlah Negara-negara jajahan Eropa Barat dan Amerika Serikat di Asia, Afrika dan Pasifik serta sebagian Negara-negara Amerika Latin.

Setelah perang dingin berakhir, komunis runtuh, Uni Sovyet pudar dan blok komunisme hancur, secara riil AS menghadapi musuh barunya: Negara-negara Eropa. Kelompok politik dan ekonomi ini telah menjadi musuh baru AS, sebab di satu sisi mereka memang mempunyai kemampuan untuk menyaingi AS dalam perdagangan dunia. Di sisi lain, Negara-negara Eropa itu telah mulai bergerak untuk menggabungkan Negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni Eropa setelah Negara-negara itu berpindah dari sosialisme ke sistem kapitalisme.

Pergeseran dan perubahan konstelasi politik internasional itu telah mendorong AS untuk mengumumkan kelahiran Tata Dunia Baru. Prinsip utama Tata Dunia Baru di bidang ekonomi, tak lain adalah perdagangan bebas dan pasar bebas. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia bagi perdagangan dan pendapatan AS. Untuk mewujudkan strategi ekonominya ini, AS berupaya memperlemah dan memperlambat gerak pasar bersama Eropa dengan membentuk blok-blok perdagangan baru, menghidupkan kesepakatan-kesepakatan lama dan mengaktifkan kembali, mendirikan NAFTA yang beranggotakan Canada, AS, dan Mexiko dan juga, membentuk APEC.

Pada bulan November 1992, atas undangan Presiden Clinton, telah diadakan pertemuan puncak untuk membentuk organisasi kerjasama ekonomi bagi Negara-negara Asia Pasifik itu (APEC). Pendirian organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas, membuka pasar-pasar, dan menekan bea masuk. Pendiriannya tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan ekonomi dan mata uang sebagaimana pasar bersama Eropa. Pendirian APEC justru untuk tetap mengamankan pasar Asia Pasifik bagi AS dari persaingannya dengan pasar bersama Eropa.

AS melihat bahwa Uni Eropa merupakan saingan kuat untuk menantang dan menyaingi AS di bidang ekonomi. Alasan-alasan AS itu adalah: ***Pertama,*** kesatuan Eropa secara politik dan ekonomi. ***Kedua,*** Eropa memiliki kemampuan bersaing di bidang perdagangan, sebab Eropa mempunyai kemampuan tinggi dalam produksi barang dan jasa. ***Ketiga,*** setelah berakhirnya perang dingin dan hancurnya Uni Sovyet, lenyaplah momok komunisme yang sebelumnya digunakan AS untuk mengancam Eropa. Eropa seluruhnya lalu berkonsentrasi dan bersiap-siap dengan serius untuk terjun ke dalam kancah ekonomi internasional. Diantara persiapan Eropa nampak dari fakta bahwa seluruh Eropa yang merupakan Negara-negara industri yang produktif telah menghilangkan hambatan bea masuk di antara mereka, membuka tapal batas Negara masing-masing untuk memudahkan pemindahan tenaga kerja, dan berusaha mewujudkan kesatuan mata

---

[66] Jan Nederveen Pieterse, *"Globalization as Hybridization",* individu Mike Featherstone et all. Edt, *Global Modernities* (London: Sage Publications, 1995) h. 47.

[67] Budi Winarno, *"Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi",* dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Edisi 1, Februari 2004, h. 7.

[68] Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi pembangunanisme. Developmen-talisme adalah sebuah istilah ekonomi-politik. Sebuah konsep atau kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang dicetuskan pada masa Presiden Harry S Truman pada tahun 1949 untuk menjawab berbagai permasalahan kemiskinan atau keterbelakangan *(Underdevelopment)* yang terjadi di Negara-negara dunia ketiga, sekaligus sebagai alat ideologi untuk membendung sosialisme.

[69] Fase di mana dekolonisasi ditawarkan bagi dunia ketiga dan terjadi proses eksploitasi kapitalisme dari yang bersifat kolonilistik kepada fase yang bersifat lunak

uang. Hal ini kemudian mendorong Eropa untuk memasuki pasar-pasar di Asia dan Afrika, di samping faktor utama bahwa Eropa memang mempunyai kapabilitas untuk bersaing dalam pasar bebas. Di samping itu AS terdorong pula untuk memperkokoh pasarnya di Asia dan Eropa dengan membentuk kelompok-kelompok ekonomi seperti APEC. Dan AS pun dalam hal ini telah sukses pula menunggangi WTO *(World Trade Orgazation)* untuk semakin melicinkan jalannya menguasai ekonomi dunia.

APEC mulai muncul ke permukaan sejak tahun 1989 atas prakarsa Australia. APEC menghimpun 17 negara yang berasal dari tiga benua; AS, Canada, Mexiko, Australia, Selandia Baru, RRC, Jepang, Hongkong, Papua Nugini, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Philipina, Korea Selatan, dan Thailand. Organisasi ekonomi internasional ini menggabungkan keanggotaan dua kelompok ekonomi besar, yaitu NAFTA yang beranggotakan Negara-negara Amerika Utara, dan ASEAN yang beranggotakan Negara-negara Asia Tenggara.

Negara-negara anggota APEC menguasai 40 % dari keseluruhan volume perdagangan dunia, sekaligus merupakan pasar yang jumlah konsumennya mencapai lebih dari 1 milyar jiwa. Dari seluruh penjelasan tersebut, nampak bahwa AS telah berhasil mencapai target-targetnya untuk merealisasikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan ekonominya. AS nampak terus mengembangkan dan membangunnya hingga stabil dan mantap, bahkan menjadikan prinsip-prinsipnya itu sebagai realitas global yang tidak bisa dihindari lagi. Akan tetapi, terwujud dan terbukanya pasar bebas secara internasional itu, niscaya akan menambah semangat untuk bersaing secara internasional pula. Di samping itu, produksi melimpah dari banyak Negara dan blok ekonomi akan terus melestarikan sikap saling bersaing, mendominasi, dan menguasai, yang didukung oleh kekuatan militer dan perluasan pengaruh untuk melindungi penimbunan-penimbunan produk yang melimpah.

Dalam analisis Friedman, dunia saat ini adalah dalam era globalisasi kedua, yang dimulai sejak tahun 1989 setelah AS, Inggris dkk, memenangkan perang dingin. Jadi setelah era perang dingin itulah tonggak globalisasi dengan tahapan yang lebih massif. Globalisasi kedua hakikatnya adalah suatu proses dunia menjadi satu atap di bawah hegemoni dan dominasi pemenang perang dingin. Negara-negara dunia ketiga atau Negara-negara sedang berkembang mau tidak mau harus menerima kenyataan yang demikian, yaitu menjadi bawahan AS dkk. Thomas L Friedman menyatakan bahwa globalisasi diberi makna modernitas *(the lexus)* di mana masyarakat harus berpersepsi fungsional melalui solidaritas organik[70] yaitu menempatkan manusia (bangsa) sebagai fungsi manusia lain (bangsa lain) untuk mencapai tujuannya. Lawan dari *the lexus* (modernisasi) adalah *the olive tree* yaitu masyarakat yang berpersepsi mistis, di mana mereka merasa menikmati hidup dalam kungkungan tradisi. *The lexus* adalah symbol dari Negara-negara maju (Canada, AS, Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris) dan *the olive tree* adalah symbol dari negara-negara sosialis dan Negara-negara sedang berkembang. T*he olive tree* harus menyesuaikan diri dengan *the lexus*, jika mereka ingin tetap eksis.[71]

Globalisasi kedua ini ditandai oleh lahirnya revolusi tekhnologi, revolusi telekomunikasi, dan revolusi informasi. Ketiga revolusi itu mengakibatkan biaya produksi kapitalis rendah dan kapital bisa menjelajah dunia tanpa kendala sehingga kapital dan komoditi Negara-negara maju *(the lexus)* dapat menguasai dunia. Bagi dunia kedua (blok sosialis) dan dunia ketiga harus menerima kenyataan ini. Anthony Giddens, bahkan mengatakan jika globalisasi yang ditopang oleh revolusi tekhnologi komunikasi tersebut tidak hanya baru, melainkan revolusioner.[72]

Akhirnya, globalisasi adalah bentuk baru hegemoni ekonomi, legitimasi baru terhadap pasar, kompetisi dan profit. Setelah dekolonisasi dan runtuhnya blok sosialis, globalisasi menjadi bentuk baru hegemoni atas nama pasar bebas, revolusi informasi, dunia sebagai satu dunia dan lain sebagainya. Akhir sejarah juga merupakan legitimasi baru kapitalisme setelah runtuhnya komunisme, seolah-olah sejarah berhenti dan waktunya habis. Revolusi informasi merupakan dalih baru untuk menyatukan dunia atas nama tekhnologi komunikasi baru, dunia sebagai satu desa dan hukum pasar.[73]

Globalisasi dan Krisis Masyarakat Kapitalisme

Dampak perkembangan konstelasi politik-ekonomi internasional adalah efek globalisasi yang telah masuk ke segala sendi kehidupan manusia di dunia internasional. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan telah timbul berbagai masalah. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan tidak mampu mengatasi, jurang yang besar antara Negara kaya dan miskin, masyarakat marginal, kelaparan, kemiskinan internasional, dan masalah perkembangan *indigeneous technology* di dunia ketiga.[74] Jelaslah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, dinamik yang menguasai jurusan-jurusan pertumbuhannya serta pilihan-pilihan masalahnya seperti juga tekhnologi, tidak berdiri sendiri, merupakan bagian dari sistem sosial,

---

[70] Istilah yang digunakan Talcot Person.

[71] Thomas L. Friedman, *The Lexus and The Oleive Tree* (London: Harper Collins Pub., 2000) h. 31

[72] Anthony Giddens, *Run Way World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita* (Jakarta: Gramedia, 2000) h. 5

[73] Hasan Hanafi, *Cakrawala Baru Peradaban Global: Revolusi Islam Untuk Globalisme, Pluralisme, Egalitarianisme Antar Peradaban* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003) h. 69

[74] Soedjatmoko, *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan tentang Agama Kebudayaan Sejarah dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1984) h. 277.

lengkap dengan tujuan-tujuan, kepentingan, prioritas, serta sistem nilainya.[75] Oleh karena itu pilihan tekhnologi tidak boleh diambil hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai implikasi sosialnya.[76]

Dalam hal ini ilmu pengetahuan dalam bidang tekhnologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan krisis di masyarakat kapitalisme. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang masyarakat kapitalisme, penulis paparkan lebih mendetail perihal relasi Negara, globalisasi dan logika neo-liberalisme. Karena paham tersebut merupakan sebuah ideologi sebagai dampak dari krisis kapitalisme. Dan tentunya seluruh sistem sosial.

Globalisasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor globalisasi yakni perusahaan-perusahaan transnasional (TNC, Trans-National Corporations) dan Bank Dunia/IMF melalui kesepakatan yang dibuat di World Trade Organization (WTO, Organisasi Perdagangan Dunia) sesungguhnya dilandaskan pada suatu ideologi yang dikenal dengan sebutan "neo-liberlisme". Neo-liberalisme pada dasarnya tidak ada bedanya dengan liberalisme. Para penganut neo-liberlisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil normal "kompetisi bebas". Mereka percaya bahwa 'pasar bebas" itu efisien, dan cara yang tepat untuk mengalokasikan sumberdaya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa menjadi indikator apakah sumberdaya telah habis atau masih banyak. Kalau harga murah, berarti persediaan memadai. Harga mahal artinya produksinya mulai langka. Harga tinggi maka orang akan menanam modal ke sana. Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Itulah alasan mengapa neo-liberalisme tidak ingin pemerintah ikut campur tangan dalam ekonomi. "Serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar", demikian keyakinan mereka. Keputusan individual atas interes pribadi diharapkan mendapat bimbingan dari *invisible hand* (tangan yang tidak tampak), sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individual tersebut. Kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut pada akhirnya akan *trickle down* (menetes ke bawah) kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu sedikit orang tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. Kalau perlu jangan dipajaki.

Krisis berkepanjangan yang menimpa kapitalisme awal abad 19, yang berdampak depresi ekonomi 1930-an berakibat tenggelamnya paham liberalisme. Pendulum beralih memperbesar pemerintah sejak Roosevelt dengan *"New Deal"* tahun 1935. Tetapi dalam perjalanan kapitalisme, di akhir abad 20 pertumbuhan dan akumulasi kapital menjadi lambat. Kapitalisme memerlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapital. Strategi yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi dan pasar bebas, dengan memberlakukan perlindungan hak milik intelektual, *good governance* (pemerintahan yang baik), penghapusan subsidi dan program proteksi rakyat, deregulasi, penguatan *civil society*, program anti-korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan suatu tatanan perdagangan global, dan sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan. Dengan demikian globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali paham liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neo-liberalisme. Neo-liberalisme sesungguhnya ditandai dengan kebijakan pasar bebas, yang mendorong perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggungjawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrat dan "parasit" pemerintah, yang tidak akan pernah mampu meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neo-liberal adalah "Liberalisasikan perdagangan dan keuangan", "Biarkan pasar menentukan harga", "Akhiri inflasi, Stabilisasi ekonomi-makro, dan privatisasi", "Pemerintah harus menyingkir dari menghalangi jalan". Paham inilah yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan *"consensus"* yang dipaksakan yang dikenal dengan "Globalisasi", sehingga terciptalah suatu tata dunia. Arsitek tata dunia ini ditetapkan dalam apa yang dikenal *"The Neo-Liberal Washington Consensus",* yang terdiri dari para pembela ekonomi swasta terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik.

Pokok-pokok pendirian neo-liberal meliputi, *pertama*, bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang perburuhan, investasi, harga serta biarkan perusahaan itu mangatur diri sendiri untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan. *Kedua*, hentikan subsidi Negara kepada rakyat karena bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Negara harus melakukan swastanisasi semua perusahaan Negara, karena perusahaan Negara dibuat untuk melaksanakan subsidi Negara pada rakyat. Ini juga menghambat persaingan bebas. *Ketiga*, hapuskan ideologi "kesejahteraan bersama" dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat "tradisional" karena menghalangi pertumbuhan. Serahkan manajemen sumberdaya alam kepada ahlinya, bukan kepada masyarakat "tradisional" (sebutan bagi masyarakat adaptif) yang tidak mampu mengelola sumberdaya alam secara efisien dan efektif.

Dari Imperialisme, Globalisme ke Kapitalisme Pendidikan

Pendidikan dimaknai oleh banyak pakar sebagai institusi untuk mendidik generasi manusia dengan berbagai disiplin ilmu. Peradaban manusia juga tidak terlepas dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia akan berubah menjadi maju atau bahkan mengalami kemunduran tergantung pada

[75] *Ibid.*
[76] *Ibid,* h. 282.

penguasaan pengetahuan. Dilihat dari aspek historis pendidikan di Indonesia adalah warisan kolonial belanda yang sampai sekarang watak pendidikan Indonesia masih tercerabut dari akar tradisi. Untuk menata kembali butuh sistem pendidikan yang jelas, dan yang paling vital adalah bagaimana merumuskan paradigma. Belum lagi terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini, kebijakan belum berpihak kepada masyakat yang belum mampu. Hegemoni negara tentu sangat bersinggungan dengan kebijakan pendidikan, sehingga kekuasaan dan pendidikan harus dipisahkan dari mata rantai kepentingan politik sesaat.

Kemajuan peradaban yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi berimplikasi pada moralitas manusia. Efek globalisasi misalnya telah merambah berbagai sektor kehidupan manusia, mulai dari alat komunikasi, transportasi, dunia maya, dan kecanggihan teknologi lainnya. Globalisasi telah berdampak pada mainstream bahwa manusia harus bisa mengendalikan teknologi. Globalisasi ditandai dengan ketersinggungan antara negara, pasar atau sistem ekonomi global dan masyarakat sipil. Kalau diurai maka persoalan pendidikan Indonesia tidak hanya masalah penataan kurikulum, profesionalitas guru, out-put lembaga pendidikan, paradigma pendidikan, dan persoalan internal penyelenggaraan lembaga pendidikan lainnya. Tapi lebih dari itu ada faktor eksternal yang juga sangat berpengaruh pada pendidikan Indonesia yaitu persoalan rakyat miskin sehingga tidak mampu sekolah, disorientasi kebijakan pemerintah, pendidikan *market oriented*, relasi kekuasaan negara, dan pusaran arus globalisasi.

Rumusan paradigma pendidikan tentu jangan sampai lemah karena terseret arus globalisasi. Sehingga tidak mengorbankan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan dengan memaksa out-put untuk diterjunkan ke dunia pasar kerja. Karena globalisasi tidak bisa dibendung maka sikap kita adalah harus berdapasi secara arif tanpa harus menolaknya. Kekuasaan negara yang berkolaborasi dengan kekuatan ekonomi global inilah yang menimbulkan dampak negatif dalam segala sektor negara termasuk dalam hal ini adalah dunia pendidikan.

Dehumanisasi oleh Rasionalitas Globalisasi

Manusia akan menjadi mekanistik karena harus menjalankan seluruh alat tehnologi. Teknologi tentu memudahkan kehidupan manusia tetapi dampak negatif yang timbul seringkali tidak sebanding dengan manfaatnya. Pusaran arus kapitalisme global yang bersumbu pada kekuatan pasar eropa tentu akan semakin mengendorkan kekuatan ekonomi negara-negara miskin dan berkembang. Berangkat dari refleksi tersebut kebijakan pendidikan harus kembali pada norma etik dengan beradaptasi atas fenomena global kekinian. Out put pendidikan harus memiliki moralitas tinggi, kepekaan sosial, menjunjung harkat dan martabat negara, dan ikut menentukan arah peradaban manusia.

Globalisasi merupakan suatu proses yang dinamis dari berbagai sektor dalam sejarah manusia. Aktor penting dalam proses ini terjadi pada akhir Perang Dunia II dengan lahirnya *Brettonwood System*, demikian pula muncul kerjasama bantuan internasional dalam bantuan sesudah perang dalam membangun kembali negara-negara yang hancur seperti eropa. Di Eropa dikenal rancangan kembali dalam bentuk Marshal Plan oleh Amerika Serikat. Di negara-negara Asia terjadi perubahan dalam integrasi tata ekonomi kolonial ke tata sistem ekonomi industri. Keseluruhannya telah menimbulkan munculnya perdagangan global yang kemudian terikat dalam perjanjian-perjanjian multilateral, maka munculah lembaga-lembaga internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF). Demikian juga Bank Dunia yang merupakan sumber dana dari pembangunan internasional. Dengan demikian proses globalisasi terus merasuk dalam pelbagai bentuk kehidupan manusia, politik, ekonomi, sosial budaya dan pembangunan manusia (*human development*).[77]

Tinjauan perspektif Kellner dari sudut pandang teori sosial kritis bahwa; globalisasi melibatkan pasar kapitalis dan seperangkat relasi sosial dan aliran komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk kultur dan penduduk yang melewati batas nasional via jaringan masyarakat global, transmutasi teknologi dan kapital bekerjasama menciptakan dunia baru yang menglobal dan saling menghubung. Revolusi teknologi yang menghasilkan jaringan komunikasi komputer, transportasi dan pertukaran merupakan pra-anggaran (*presupposition*) dari ekonomi global, bersama dengan perluasan sistem pasar kapitalis dunia yang menarik lebih banyak area dunia dan ruang produksi, perdagangan dan konsumsi kedalam orbitnya.[78]

Ketersinggungan globalisasi dengan sektor pendidikan telah mengakibatkan pergeseran paradigma. Ini terlihat dari mayoritas lembaga pendidikan berkompetisi menghasilkan out-put yang siap kerja (baca: berorientasi pasar) tentu cara pandang ini telah keluar dari nilai-nilai pendidikan. Kebutuhan pasar adalah tenaga kerja yang ahli atau mempunyai skill untuk mengoperasikan teknologi industri. Manusia menjadi mekanistik dan telah tercerabut dari harkat kemanusiaanya karena telah teralienasi, tereksploitasi dan terasing dari nilai-nilai humanisme.

---

[77] AsiaDHRRA, h. 301-308. *Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Umat Manusia*, lihat Antony Giddens, *Runaway World* (terjemah, 2001, *Dunia yang Lepas Kendali*). Lihat H.A.R Tilaar, *Kukuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesiatera, Cet. I., 2003) h.190.

[78] Kellner, *Theorizing Globalization, Sociological Theory,* 2002 dalam George Ritzer—Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern,* (Jakarta: Prenada Media, Cet. III., 2005) h. 590.

BAGIAN II

Pembajakan Sistemik Pendidikan Nasional oleh Pasar, Negara dan Rektorat[79]

Salah satu isu *living issue* global dan nasional adalah soal pendidikan. Setiap tahun selalu muncul isu pendidikan. Kontroversi pun merebak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan nasional. Kecenderungan internasional juga demikian. Terjadi pergeseran filsafat dan paradigma pendidikan seiring terjadinya pergeseran formasi sosial. Salah satu perkembangan terpenting yang kemudian menjadi medan makna perjuangan mahasiswa adalah proses integrasi pendidikan *secara total* dalam sistem kapitalisme. Artinya, pendidikan bukan sekedar proses social yang seolah bebas nilai. Namun sarat dengan muatan ekonomi politik yang strategis. Kajian kebudayaan menyebutnya sebagai bagian dari manifestasi komodifikasi kapitalisme. Disebut total sebab dalam kerangka tersebut, bukan hanya terjadi komodifikasi ilmu (Lyotard: 1997): Menemukan pergeseran bahwa universitas sekarang bukan lagi mementingkan penemuan apakah sesuatu itu benar atau tidak, melainkan apakah sesuatu itu *berguna/ dapat dijual atau tidak*, namun juga pendidikan berjalan di atas logika bisnis. Proses inilah yang menghantarkan pendidikan memproduksi nalar instrumental (Habermas), maupun rasionalitas teknologis (Marcuse).

Maka, tidak heran jika Susan Strange, ahli ekonomi politik, menyebut bahwa salah satu pilar dari empat pilar kapitalisme adalah *knowledge structure*. Mesin produksi pengetahuan tiada lain institusi-institusi pendidikan. Sekali dikonsolidasikan, universitas, seperti dikatakan seorang ahli pembangunan, menentukan persepsi dan realitas social. Inilah yang dipergoki kalangan poststrukturalis yang dengan jitu menelanjangi relasi kuasa pengetahuan. Setiap pengetahuan selalu mengandaikan relasi kuasa tertentu. Sebab pengetahuan berkaitan dengan subjek yang menyusun, menyebarkan, dan merepreduksi pengetahuan yang sarat dengan kepentingan kekuasaan. Di sinilah pendidikan sebagai instrumen transformasi sosial, atau, dalam bahasa Chiko Mendez, sebagai “awal pergerakan” menjadi realisme utopis. Pada logika inilah, dan, jika mengikuti mereka, logika pasar, mahasiswa sebagai salah satu *stakeholder* pendidikan, wacana dan praktek otonomi pendidikan (BHMN), seharusnya dibaca. Pembacaan ini akan diletakkan dalam konteks pergeseran di tingkatan global dan nasional.

Melacak Konteks Global

Konteks ekonomi politik global sudah dibahas dalam sesi pertama, karenanya tulisan ini hanya akan fokus dalam konteks pendidikannya. Dalam bahasa akademik, pendidikan juga menjadi entitas social yang *globalized*. Karenanya, memahami carut marut pendidikan nasional juga tidak lepas dari anarki structural global. Transformasi structural dalam dataran ekonomi dan politik secara tak terelakkan mempengaruhi dunia pendidikan. Kaitannya adalah transformasi ekonomi mempengaruhi struktur pasar tenaga kerja global. Tenaga kerja global (yang dalam bahasa globalisasi disebut mendorong pergerakan orang) berkaitan dengan terutama institusi pendidikan tinggi.[80]

Pertama, transformasi aktivitas industri (sector sekunder) menuju sector tersier membutuhkan bukan hanya kualifikasi tenaga kerja yang terampil, tapi menguasai system teknologi baru yang dipakai secara luas dunia profesional. Penguasaan teknologi ini penting untuk mempercepat pengambilan keputusan dengan akurasi tinggi. *Kedua*, proses neoliberalisasi telah meningkatkan mobilitas pasar tenaga kerja yang berkualitas. Gejala ini telah meningkatkan kompetisi tenaga kerja luar biasa. *Ketiga*, bersatunya kekuatan ekonomi dan politik Eropa meningkatkan arus kerja sama dalam berbagai bidang. Pendidikan akan menjadi jantung riset untuk inovasi-inovasi ekonomi, social, dan politik. *Keempat*, proses neoliberalisasi berdampak pada menunrunnya peran nation-state yang pada gilirannya mengurangi investasi sector-sektor strategis janka panjang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan system pensiun. Keempat proses tersebut mendorong pendidikan di Eropa semakin kian terprivatisasi, hingga menuju proses individualisasi.

Melacak Konteks Nasional

Konteks politik kebijakan otonomi pendidikan (No.61/1999) adalah pemerintahan Habibie. Artinya, periode tersebut merupakan periode transisional pasca lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Konteks ini dipahami fase transformasi struktural dari kapitalisme berbasis negara *(state-led-development)* ke fase neoliberalisme yang ditandai oleh tidak dilibatkannya lagi negara sebagai “aktor” akumulasi modal. Artinya transformasi struktural neoliberal didorong bukan hanya dalam wilayah ekonomi politik, namun juga dalam konteks pendidikan. Pergeseran kelembagaan ekonomi politik neoliberal relatif terkonsolidir, sedangkan di tingkatan aktor politik Habibie mendapatkan serangan kuat terhadap legitimasi politik kepemimpinannya.

Konteks ekonomi saat itu adalah masih dalam *fase recovery* ekonomi akibat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Namun karena paradigma recovery ekonomi yang dipakai adalah neoliberal, bukannya populis, atau sosialistik, maka pinjaman hutang kepada lembaga keuangan internasional (IMF/ WB) tak terelakkan. Pada saat yang sama, sejak tahun 1997 dan tahun berikutnya,

---

[79] Disarikan dan diuraikan kembali dari Muhammad Mustafid, *BHMN: Pembajakan Sistematik Pasar, Negara dan Rektorat*, Makalah yang dipresentasikan pada acara Seminar dan Lokakarya Nasional: “Membongkar Realitas Pendidikan Indonesia”, ISTA, 24-27 Juli 2004.

[80] Transformasi ini untuk memenuhi kualifikasi lulusan perguruan tinggi agar dapat *berkompetisi secara global*. Maka, di Eropa pun terjadi restrukturisasi pendidikan tinggi yang didorong oleh empat stimulus (Jurgen Rosemann dan Andrea Peresthu).

adalah periode jatuh tempo hutang-hutang, baik swasta maupun pemerintah. Pada saat yang sama kurs rupiah masih anjlok. Hal ini berdampak *pertama*, terkurasnya atau bangkrutnya keuangan negara, *kedua*, terjadinya proses perampokan aset-aset rakyat melalui mekanisme yang disebut dengan *debt-to-equity-swap*.

Secara garis besar, persoalan ekonomi Indonesia terkait dengan dua hal besar. *Pertama*, neoliberalisasi di Indonesia (privatisasi, swastanisasi, deregulasi, pencabutan subsidi), dan *Kedua,* aspek internal (domestic affairs) yang berkaitan dengan hal di atas. Proses neoliberalisasi di Indonesia sebenarnya sudah didorong sejak lama, bahkan sejak tumbangnya ORLA. Hanya saja ekstensifikasi dan intensifikasi neoliberalisasi di Indonesia memuncak setelah krisis 1997, yang menjadikan Indonesia negara neoliberal, bahkan lebih liberal di bidang pertanian ketimbang Jepang atau Amerika Serikat.[81]

Pada pra-reformasi, ekonomi Indonesia diatur dengan managemen Keynesian. Andrew Macintyre (disertasinya, 1990), yang mengkaji bisnis tekstil, farmasi, dan asuransi, di Indonesia berhasil memberikan konfigurasi ekonomi Indonesia. Dalam bidang tekstil, konfigurasinya dibangun atas dasar pilar buruh yang murah (bahkan lebih murah dibanding China dan India), monopoli impor barang-barang modal, dan perselingkuhan dengan elite politik. Sementara Indonesia, pada saat itu, di bidang farmasi konfigurasinya didominasi oleh mekanisme penentuasn harga pasar, system distribusi, margin keuntungan yang tinggi yang dipungut jaringan distribusi. Dengan mekanisme ini, beaya pengobatan Indonesia termasuk termahal di dunia setelah jerman dan swiss.

Hanya saja, mahalnya beaya tersebut diiringi mirahnya produk farmasi di Indonesia. Kondisi tersebut jelas kurang menguntungkan bagi kerangka kerja kapitalisme. Maka, kemudian, didorong operasi untuk melakukan transformasi structural ekonomi Indonesia. Inilah transformasi neoliberal di Indonesia. Hasilnya, berbagai kebijakan protektif, perselingkuhan, berbagai perilaku pencarian rente, disapu habis oleh angin neoliberal. Kontradiksi internal, persaingan internal, dan tuntutan akumulasi modal menjadi variable penggeraknya. Pasca-reformasi kemudian dilembagakan dalam bentuk berbagai privtaisasi, swastanisasi, deregulasi, hingga pencabutan subsidi.[82]

Memahami Konsep Badan Hukum Milik Negara

BHMN, yang sering juga disebut sebagai “otonomi pendidikan” secara normatif dianggap sebagai pemberian lebih luas kepada perguruan tinggi untuk mengelola dan menata sumberdaya secara mandiri. Dengan otonomi, perguruan tinggi diberi kebebasan untuk menyusun program, struktur organisasi, manajemen, kurikulum, SDM, hingga infrastrukturnya. Universitas, misalnya, berhak menyusun kurikulum tanpa terbebani dengan kurikulum nasional, mengangkat pegawai, membentuk fakultas atau sebaliknya, menghapus suatu fakultas.[83]

Konsekuensi pemberian otonomi, subsidi pemerintah berkurang, dari 65% persen menjadi hanya sekitar 35%. Bantuan pemerintah ini disebut dengan *blockgrand*. Jika dulu dana SPP, misalnya, disetor dulu ke negara, kemudian untuk mengucurkannya menunggu proposal dari pemerintah, sekarang dana tersebut dikelola secara mandiri. Sisa kekurangannya dibebankan kepada mahasiswa, bantuan-bantuan, dan usaha-usaha bisnis universitas. Di titik inilah kemudian universitas diberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan bisnis yang berorientasi profit. Hanya saja, dalam hal kegiatan bisnis dibatasi oleh pasal 2 PP 61/99 dengan sifat nirlaba (semua keuntungan dikembalikan lagi kepada fungsi utama perguruan tinggi). Bisnis yang dilakukan universitas ini tidak berada dalam struktur organisasi universitas, namun di bawah sayap bisnisnya.

Membongkar Nalar Otonomi Pendidikan

Pertama, Nalar Kolonial/ Imperial/ Pasar. Nalar ini hendak meletakkan pendidikan sebagai ladang akumulasi keuangan, proses produksi dan reproduksi sosial terjadi, strategi kebudayaan dalam pertarungan hegemoni, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu bentuk objektifikasi kesadaran sosial yang terdesain. Nalar ini mengubah secara radikal sejarah pendidikan secara kelembagaan sebagai kekuatan transformatif menjadi secara personal atau sekelompok elite dengan keasyikan persetubuhannya dengan realitas yang memproduksi komodifikasi dan fetisisme pendidikan.

---

[81] Proses tersebut dipicu oleh krisis financial global yang mengikuti aliran global capital. Dalam aliran financial yang anarkis ini, Negara yang ditinggalkan modal akan mengalami krisis. Dan inilah yang terjadi di Indonesia. Banyak penjelasan terhadap krisis tersebut. Salah satu penjelasan adalah penjelasan ekonomi politik. Penjelasan ekonomi politik berarti memberikan penekanan pada peranan semua kekuatan (power)/segala hal baik proses social maupun kelembagaan, termasuk kekuatan ekonomi maupun elite yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan ekonomi (Todaro, 1994:4).

[82] Apabila dua konteks tersebut kita racik maka konteks politik otonomi pendidikan adalah, kebutuhan objektif mengkonsolidir kekuatan untuk menghadapi serangan terhadap legitimasi politik kekuasaan di satu sisi, dan kebangkrutan keuangan negara sebagai dampak pembusukan internal dan masa transisional neoliberal di Indonesia. Perjumpaan dua titik kepentingan inilah yang menjadi basis sosial material otonomi pendidikan.

[83] Dengan adanya BHMN ini terjadi perubahan kelembagaan pada Universitas. Sebelumnya, PT merupakan institusi di bawah Departemen Nasional, sekarang menjadi institusi mandiri yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum seperti badan hukum lainnya. Struktur organisasinya terdiri dari Majelis Wali Amanat (MWA/board of Trustee), Dewan Audit dan Akademik, Senat Akademik, dan lembaga-lembaga lainnya.

Kedua, Nalar Negara. Otonomi pendidikan merefleksikan kegagalan negara menjalankan tugasnya kepada warga negara. Pendidikan merupakan hak sipil yang harus dipenuhi warga negara. Kegagalan ini merupakan hasil dari proses panjang pembusukan struktural Orba dan sapuan neoliberalisme yang memporakporandakan struktur ekonomi politik yang tidak memadahi lagi menjamin kebebasan pasar. Respons terhadap kondisi tersebut, dalam konteks pendidikan, melahirkan otonomi pendidikan untuk memperingan beban keuangan negara. Strategi ini di-*launching* dengan konstruksi politik wacana untuk mencegah pemborosan anggaran, himpitan keuangan negara yang tengah kolaps, serta untuk menjawab tantangan globalisasi. Inilah nalar negara. Negara hendak mengatakan bahwa kondisi objektif negara tidak memungkinkan lagi memberikan subsidi pendidikan kepada rakyat. Atas dasar itu secara cantik logikanya dilanjutkan dengan mengatakan bahwa beban dana pendidikan harus dipikul bersama masyarakat. Inilah nalar tak terkatakan negara di balik otonomi pendidikan.

Ketiga, Nalar Rektorat. Salah satu institusi yang tidak terlepas dari proses pelembagaan otonomi pendidikan adalah rektorat. Bahkan dalam prosesnya, institusi ini yang mendesain konstruksi otonomi pendidikan. Nalar rektorat bertumpu pada tiga hal: 1] Keharusan universitas melakukan transformasi internal untuk menjawab tantangan globalisasi. 2] Memahami kondisi keuangan negara yang pada saat ini masih kedodoran. 3] Yang paling memahami dan berkompeten atas konsep otonomi pendidikan adalah mereka. Ini tercermin dalam proses perumusan yang tidak melibatkan seluruh civitas akademika seperti mahasiswa secara signifikan.

Keempat, Nalar Masyarakat. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Untuk meningkatkan harkat dan martabatnya masyarakat percaya pendidikan merupakan jalan terbaik. Pada titik ini nalar masyarakat dapat dibagi dua. 1] Nalar yang memandang pendidikan sebagai genesis transformasi sosial tanpa melihat arus dan gerak struktural di balik proses pendidikan, serta masih melihat pendidikann sebagai kewajiban mereka untuk memenuhinya. Nalar ini terbentuk melalui proses panjang secara sistemtik. 2] Nalar yang melihat secara kritis pada substansi pendidikan dan soal tanggung jawab negara dalam pendidikan. Dalam optik ini, substansi pendidikan sebenarnya instrumen kapitalisasi, dan jika diletakkan dalam konteks trasnformasi sosial, pendidikan hanya akan memperkukuh struktur sosial kolonial.[84]

Analisis Akar Masalah Keterpurukan Pendidikan: Perspektif Ekonomi-Politik

Dengan melihat paparan di atas, menjadi jelas bahwa pendidikan menjadi arena pertarungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Pertarungan ini menghasilkan konfigurasi negara-pasar vis-à-vis masyarakat. Negara bersekutu dengan kekuatan pasar untuk menjadikan pendidikan sebagai komodifikasi kapitalisme.

Masyarakat sendiri pada dasarnya telah lama menuntut otonomi pendidikan. Sebab selama ini pendidikan sudah terlalu jauh dipakai sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan. Penetrasi negara dalam pendidikan, misalnya, terlihat dalam proyek ideologisasi melalui penataran P4, PMP, kewiraan, dan campur tangan negara dalam berbagai proses kebijakan kampus. Instrumentalisasi tersebut menjadi bagian dari lokus perjuangan mahasiswa.

Desakan tuntutan otonomi ini kemudian dengan licik “dibajak” oleh negara dengan konsep Badan Hukum Milik Negara. Dengan konsep BHMN ini, negara memang memberikan otonomi relatif terhadap universitas, namun sebatas dalam hal-hal administratif dan manajerial. Hanya saja, dalam waktu bersamaan, dalam kanal otonomi itulah diselipkan agenda ekonomi politik tersembunyi dengan mendorong “otonomi keuangan”. Sekalipun demikian, secara politik, pemerintah masih tidak mau melepaskan kontrol politiknya terhadap pendidikan. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa pemerintah, melalui mendiknas, memiliki saham atau suara 35% dalam majelis wali amanat, lembaga yang secara politik berwenang menentukan rektor (pasal 14 (3) PP 61/99). Alasan bahwa itu bagian dari upaya pemerintah untuk mengontrol agar tidak terjerumus di luar kewenangannya, merupakan alasam ahistoris, dan semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak mempercayai masyarakat sebagai kekuatan kontrol. Sejarah menunjukkan gurita kekuasaan negara dalam pendidikan tidak pernah bermakna sebagai kontrol untuk menjaga kebebasan akademik dan politik di kampus.

Alasan negara bahwa negara tidak memiliki dana untuk membiarkan subsidi pendidikan hanyalah alasan akal-akalan dari negara. Argumentasi tersebut runtuh baik di tingkatan teoretik maupun praksis. Secara teoretik, BHMN merupakan implikasi tak terelakkan dari otonomi pendidikan, sedangkan otonomi pendidikan merupakan implikasi dari konstruksi *Letter of Intent* IMF yang mengharuskan pemerintah memangkas subsidi sosial. Artinya, kebijakan otonomi pendidikan merupakan strategi diskursif untuk menyembunyikan maksud tersembunyinya, yakni menaikkan beaya pendidikan. Implikasi realnya: semakin banyak rakyat yang tidak dapat menikmati pendidikan.

Pencabutan subsidi pendidikan pada dasarnya hanya mengurangi tidak lebih dari 20 trlyun. Bandingkan dengan data berikut ini: bahwa menurut Kwik Kian Gie, pertahun uang negara yang dikorup-

[84] Shiraishi mengatakan: Lahirnya pendidikan Barat di Indonesia tidak hanya sekuler, namun ia masuk dalam tatanan kolonial yang terbagi secara rasial dan linguistik, serta terpusat secara politik. Dalam pendidikan Barat ini, semakin tinggi sekolah seseorang, maka semakin dekat ia dengan pusat-pusat kota dunia kolonial. Dengan demikian, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang pantas semakin terbuka, namun akan semakin terhisap dalam cara hidup generasi tuanya kolonial. (Shiraishi,1997: 36).

dirampas sebesar 444 trilyun rupiah (dengan rincian 90 trlyun berasal dari ikan, pasir, dan kayu yang dimaling, 240 trilyun pajak yang dibayarkan tetapi tidak masuk ke kas Negara, 40 trilyun subsidi perbankan yang muspro, 74 trilyun kebocoran APBN). Jumlah tersebut berarti lebih besar dari keseluruhan APBN tahun 2003. Transparancy International pada tahun 2003 memberikan ranking sebagai Negara terkorup ke 122 dari 133 (paling korup). Artinya, persoalannya sebenarnya bukan pada ketidakmampuan negara secara objektif untuk memberikan pendidikan murah bagi rakyat, namun soal keberpihakan politik.

Dari berbagai logika di atas, terbangun rasionalitas dalam otonomi pendidikan: tantangan global memang real, dan karenanya harus direspons secara memadahi. Dunia pendidikan memegang kunci dalam konteks ini. Efiesiensi, akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan pendidikan juga merupakan keharusan tak terelakkan. Jika otonomi pendidikan diletakkan dalam konteks ini, maka hal itu memang merupakan kebutuhan real. Hanya saja dua tuntutan di atas menjadi naif dan menipu jika kemudian diterjemahkan dalam konteks otonomi keuangan. Pemaknaan ini manipulatif dan justru berbahaya bagi masa depan bangsa jika melihat problem real bangsa Indonesia. Kebijakan ini mengeksekusi hak rakyat akan pendidikan.

Dengan demikian, Konsep otonomi pendidikan atau BHMN harus direstrukturusasi secara radikal. Radikalisasi tersebut mencaku pada aspek perluasan konsep otonomi akademik dan politik yang melibatkan bukan hanya kalangan elite perguruan tinggi, namun juga mahasiswa dan elemen perguruan tinggi lainnya, dan pada saat yang sama soal subsdidi keuangan tetap menjadi tanggung jawab negara (pengekslusian konsep otonomi keuangan dalam otonomi pendidikan). Otonomi terlalu sempit jika dimaknai dalam konteks manajerial dan administratif, namun juga harus menyenuh soal desain kurikulum yang pararel dengan basis sosial, metode kuliah, membangun relasi demokratik dalam kampus dan lainnya. Hanya dengan Radikalisasi tersebut persoalan real pendidikan Indonesia dapat direspons.

Ketidakjelasan basis filsafat dan paradigma pendidikan Indonesia sehingga berkali-kali mengalami reorientasi yang tidak penah jelas. Dimulai pada awal kemerdekaan dengan krikulum 1947, kemudian kurikulum 1964, kemudian berganti lagi pada kurkulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum mutakhir yang disebut kurikulum berbasis kompetensi (2004).

Problem pada dalam sumber daya pendidikan Indonesia Menurut Depdiknas, kekurangan guru secara nasional mencapai angka 427.903 orang, sementara dalam APBN tahun 2004 hanya dialokasikan dana untuk mengangkat guru Bantu sejumlah 80.000 orang. Sementara menurut versi ketua PGRI, Mohammad Surya (kompas, 17 Desember 2003), guru yang tersedia hanya berjumlah sekitar 2,2 juta, pada saat yang sama jumlah yang dibutuhkan mencapai dua kali lipatnya, dan setiap tahun sekitar 2000 guru memasuki masa pensiun.

Problematika pendidikan Indonesia di atas masih diperparah dengan berbagai belenggu idoelogis yang berasal dari kultur feudal ratusan tahun hingga yang secara sistematik dilembagakan dalam system pendidikan. Berbagai belenggu di atas, misalnya, ideology neoliberal yang mensubordinasikan pendidikan dalam kepentingan akumulasi modal, ideology militerisme yang secara sistemik menyeregamkan mulai cara berpakaian sampai cara berpikir peserta didik, ideologi positifistik yang tidak berakar dalam dunia batin masyarakat Indonesia, menjadikan pendidikan gagal sebagai instrumen transformasi sosial.

BAGIAN III

Pendidikan Demokratis vis-à-vis Pendidikan Indoktrinasi

Belajar dari analisis Noam Chomsky[85] dari kondisi pendidikan pada sebuah negara, bahwa ada aparatus 'ideologis' yang digunakan oleh kelas berkuasa untuk menanamkan hegemoni dan ideologi kelasnya pada seluruh warga negara sehingga nilai-nilai, pandangan hidup, sistem kapitalisme diterima sebagai wajar dan normal. Jalur pertama dari aparatus ideologis yang digunakan adalah pendidikan. Di sebuah negara, jauh dari gambaran demokratis yang selama ini dicitrakan, pendidikan digunakan sebagai media untuk menanamkan kesadaran palsu, dan diciptakan sebagai institusi-institusi yang bertanggungjawab untuk mengindoktrinasi anak-anak muda.

Hal ini dilakukan sejak bangkitnya gerakan-gerakan kerakyatan yang menentang imperialisme, menuntut hak-hak sipil-politik, dan perlindungan ekonomi serta ekologi pada tahun 60-70an. Sebagai cara untuk membendung gerakan-gerakan rakyat itu, maka pemerintah Amerika Serikat mendirikan komisi Trilateral yang berfungsi "untuk menanamkan kepatuhan, untuk menghalangi kemungkinan lahirnya pemikiran yag mandiri, dan [dengan demikian] sekolah memainkan suatu peran kepranataan (*institutional role*) dalam suatu sistem kontrol dan koersi". Komisi Trilateral, menurut Chomsky, ini bertugas untuk mencari cara-cara yang efektif untuk mempertahankan hegemoni barat dan dominasi elit-elit berkuasa sembari terus mengkondisikan agar kalangan kelas menengah yang terdiri dari ilmuwan, para profesional dan kelas menengah, melalui sistem pengkajian terus menerus mendakwahkan mitos tentang kebajikan.

Merefleksikan gagasan Noam Chomsky bahwa hakikat pendidikan mestinya adalah untuk menstimulasi 'kesadaran kritis' dan mengajarkan peserta didik menemukan kebenaran bagi dirinya sendiri.

[85] Noam Chomsky pada awalnya menjelaskan kondisi pendidikan di Amerika Serikat yang dianggapnya sebagai pendidikan doktiner dan tidak demokratis. Pemikiran Chomsky ini kemudian penulis disarikan dan diuraikan kembali dengan konteks yang lebih universal, termasuk kondisi pendidikan di Indonesia. Diadaptasi oleh penulis dari Noam Chomsky, *op. cit.,* h. xvi-xix.

Kemudian Chomsky berpendapat bahwa hakikat pendidikan mestinya adalah bukan untuk menanamkan kepatuhan, melainkan untuk mendidik manusia dalam kemerdekaan, kesetaraan kebersamaan dan kerjasama, agar dapat tercapai tujuan-tujuan bersama yang telah disepakati secara demokratis. Dengan mengutip ungkapan indah Bertrand Russell, Chomsky mengatakan bahwa tujuan pendidikan yang sejati mestinya adalah: 'Untuk memahami nilai-nilai selain dari dominasi, untuk menciptakan warga-negara-warga negara dari suatu komunitas yang merdeka, untuk mendorong terciptanya suatu kombinasi antara kewarganegaraan yang bebas dan kreativitas individual' (B. Russell).

Ada dua hal yang terjadi akibat dari pengingkaran atas pendidikan yang demokratik dan setara. *Pertama,* kalangan kelas menengah dan terdidik tidak membiasan dirinya dengan model pendidikan kritis yang berupaya membongkar segala macam kekuasaan dan hegemoni. Dengan bertumpu pada kemampuan tehnik, maka model pendidikan tak diajarkan untuk membangun kesadaran kritis, membingkar kekuasaan dan membangun kemanusiaan. *Kedua,* dan sebagai akibat sampingannya, institusi negara menjelmakan dirinya sebagai sebuah negara imperialis utama yang berhak untuk mendikte, mendisiplinkan dan 'memperadabkan negara lain dan warga negara. Model pendidikan doktriner yang bersenyawa dengan politik aristokratik pada dasarnya telah memiliki preseden lama dalam sejarah negara. Gabungan dari pendidikan yang doktriner dan politik tiranik itu pada akhirnya menghasilkan suatu tipe kultur sosial dan politik yang terjinakkan. Hal inilah yang memungkinkan ketiadaan perlawanan dari kalangan terdidik, malahan tak mengherankan jika kalangan kelas terdidik itu justru berbondong-bondong mendukung resim kelas berkuasa yang secara rutin menyerukan demokrasi, hak asasi manusia, dan multilateralisme, dan bungkam seribu bahasa jika kelas berkuasa itu pula melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi.

Diskursus Pendidikan dan Kekuasaan

Akar tradisi kehidupan bangsa Indonesia adalah negara maritim dan negara agraris. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya sehingga banyak negara yang sudah maju berusaha untuk mengekspoitasi kekayaan. Kolonialiasme dan imperealisme dengan dalih akumulasi kapital telah membawa dampak keterbelakangan masyarakat Indonesia.

Setelah mengalami trauma yang berkepanjangan Indonesia berusaha bangkit merekonstruksi seluruh sistem tata negara dalam berbagai sektor. Yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah masyarakat sipil dilibatkan menjadi penentu kebijakan. Sehingga formulasi kebijakan negara yang diimplementasikan dalam kehidupan publik merepresentasikan kepentingan komunitas sipil. Hal ini menjadi persoalan serius untuk diapresiasi karena seringkali watak hegemonik dan represif negara masih menjadi karakter.

Jelasnya bahwa masyarakat sipil yang selalu dijadikan objek pemerintah, masyakakat Indonesia tidak ditempatkan dalam diskursus liberal kebebasan—berkumpul, berpendapat, berorganisasi, berekspresi terutama pada rezim Orde Baru. Proses depolitisasi sebagai praktek hegemonik rezim yang berwatak *otoritarian-birokratik* telah efektif melemahkan kritisisme dan progressifitas masyarakat sipil. *Govermentaly* tidak memahami negara dan masyarakat sipil dalam pengertian oposisi biner, yang selalu bertentangan satu sama lain dan berusaha saling melemahkan pengaruh pihak lain.[86]

Rose dan Miller, dalam *Political Power Beyond the State: Problematic of Government,* menjelaskan makna kekuasaan, sebagaimana disitir oleh Simon Philpott:

> Kekuasaan bukanlah persoalan menerangkan belenggu pada warga negara dengan tujuan 'membuat' mereka mampu mengemban bentuk kebebasan yang terkontrol. Otonomi personal bukanlah antitesis dari kekuasaan politik, melainkan merupakan istilah kunci dari praktik kekuasaan politik, karena sebagian besar individu hanya menjadi subyek kekuasaan tetapi juga berperan menjalankan operasi kekuasaan itu.[87]

Ketika praktik kekuasaan berimplikasi pada pendidikan maka akan berdampak pada pemenfaatan intitusi pendidikan sebagai alat untuk melanggengkan status penguasa. Hal ini pernah terjadi ketika rezim Orde Baru berkuasa. Maka ada empat persoalan yang muncul anatara lain; 1) domestifikasi dan stupidifikasi pendidikan, 2) Indoktrinasi, 3) demokrasi dalam pendidikan, 4) integrasi sosial.[88]

Selain telikungan kekuasaan negara pendidikan di Indonesia juga dihadapkan pada krisis multidimensi. Multi krisis yang ditandai dengan timbulnya konflik, ketegangan, dan aksi kekerasan antar kelompok sosial, etnis, suku dan agama dan antar partai politik seperti yang terjadi berbagai belahan nusantara telah membawa kerugian yang terhingga terhadap pendidikan nasional.[89]

---

[86] Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. I., 2003) h. 244.

[87] Rose dan Miller, *Political Power Beyond the State: Problematic of Government,* dalam *Britis Journal of Sociology*, Vol. 43, No. 2., Juni dalam Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. I., 2003) h. 245.

[88] H.A.R Tilaar, *Kukuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesiatera, Cet. I., 2003) h.90.

[89] Darmaningtiyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 1999) h. 145-146.

Visi dan Orientasi Pendidikan Nasional[90]

Dieksplorasi secara kritis oleh Thomas Hidya Tjaya tentang visi dan orientasi pendidikan berkaitan dengan sejarah filsafat pendidikan, pertama-tama, pendidikan dengan gaya skolastik cenderung bersifat abstrak dan spekulatif, sedangkan pendidikan humanistik bersifat praktis. Kemudian, pendidikan skolastik berfokus pada pengejaran kebenaran obyektif, sedangkan pendidikan humanistik, dengan fokus pada bahasa dan retorika, pada akhirnya lebih berorientasi pada usaha untuk mengabdi masyarakat banyak. Dalam zaman Renaissance memang terdapat debat besar antara kedua gerakan dan kultur pendidikan ini yang, karena keterbatasan ruang, tentu saja tidak dapat dibahas di sini. Yang akan penulis lakukan adalah memberikan beberapa butir refleksi atas visi dan orientasi pendidikan mereka, yang kiranya dapat membantu kita memikirkan visi pendidikan di Indonesia.

Pertama, orientasi untuk mencari kebenaran. Keinginan untuk mendapatkan kebenaran, baik yang bersifat filosofis, saintifik, maupun religius, inilah yang mendorong para tokoh skolastik untuk mencari tahu dan mengumpulkan berbagai macam teks serta menyusun ensiklopedi. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa mencari kebenaran adalah tugas utama dan layak (proper) bagi seorang manusia. Di antara makhluk yang ada, hanya manusialah yang memiliki akal budi, yang memungkinkannya untuk berpikir, mendapatkan pengetahuan, dan menemukan kebenaran. Pendidikan merupakan sarana bagi manusia untuk mewariskan kebenaran yang sudah ditemukan dalam sejarah manusia kepada generasi berikutnya. Yang patut direfleksikan di sini adalah apakah seluruh sistem dan program pendidikan kita memang diarahkan kepada usaha pencarian kebenaran. Adalah tantangan besar bagi para pendidik untuk menanamkan dalam diri siswa keberanian untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran. Sangatlah berbahaya kalau sistem, program, dan orientasi pendidikan di negeri kita dikompromikan oleh motif-motif politik atau ekonomi. Yang terjadi adalah, seperti sudah banyak dikeluhkan, pembodohan masyarakat.

Kedua, kemandirian dan profesionalitas. Baik tradisi skolastisisme maupun humansime berakar pada teks. Dalam program pendidikan mereka, peserta didik diajar untuk menafsirkan dan memberi komentar. Yang ditekankan di sini, seperti pada seorang master, adalah kemandirian dan profesionalitas dalam mengungkapkan pandangan pribadi. Metode pendidikan yang menekankan pada sekadar hafalan dan ketepatan menjawab sesuai dengan petunjuk jawaban yang ada jelas tidak mendukung pendidikan ke arah kemandirian. Cara semacam itu tidak merangsang siswa untuk berpikir sendiri dan tidak mempersiapkan mereka untuk membangun pendapat pribadi secara rasional dan bertanggung jawab. Bagaimanapun, pada akhirnya orang harus diajar untuk memberikan jawaban dan membuat keputusan sendiri, tidak melulu merujuk pada perintah dan petunjuk guru atau atasan.

Ketiga, pengabdian kepada publik. Para tokoh humanis yakin bahwa pendidikan pada akhirnya harus mengarahkan peserta didik pada pengabdian kepada masyarakat banyak. Alasannya adalah setiap manusia adalah makhluk sosial, yang secara hakiki terikat pada manusia lainnya; ia dilahirkan tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain juga. Menerapkan visi pendidikan yang demikian memang tidak mudah, terlebih ketika pendidikan ditempuh sekadar untuk mendapatkan gelar akademik dan dikejar supaya dapat membantu mendapatkan pekerjaan yang baik. Motif ekonomi pada peserta didik dalam mengejar pendidikan pada akhirnya hanya akan menyuburkan individualisme dalam masyarakat. Tantangannya di sini adalah menumbuhkan dalam diri siswa rasa keterikatan dengan negara dan masyarakat supaya selalu ada keinginan untuk memperbaiki situasi negara. Di tengah merosotnya nilai nasionalisme di negeri yang hampir masuk jurang karena korupsi ini, orientasi pelayanan kepada orang banyak patut mendapat perhatian serius.

Keempat, pendidikan hati. Berlainan dengan pendidikan skolastik yang cenderung menekankan pendidikan kognitif dan memuaskan rasa ingin tahu, pendidikan humanistik sangat memerhatikan pendidikan hati. Hal ini terlihat dalam penekanannya pada retorika sebagai sebuah metode untuk menggerakkan hati orang dan mengarahkannya pada tindakan positif. Dalam pendidikan humanistik peserta didik lebih banyak diajak untuk meningkatkan keterampilan dan mengungkapkan diri dalam bahasa dan seni. Visi pendidikan yang memadai, selain memuat dimensi kognitif, tentunya harus juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik agar ada keseimbangan. Keputusan yang kita buat pada akhirnya haruslah didasarkan pada pertimbangan hati dan tidak sekadar pertimbangan murni rasional belaka.

Kelima, tekanan pada dimensi moral. Pendidikan humanistik secara hakiki menekankan cara-cara untuk hidup dengan baik (*bene vivere*). Oleh karena itu, pendidikan moral memegang peranan penting. Bersama dengan metode retorika, metode pendidikan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kepribadian peserta didik dan supaya mereka akhirnya sungguh mencintai keutamaan (virtue) dan membenci kejahatan (*vice*). Bagi para tokoh humanis, pendidikan mestinya membuat orang menjadi lebih bermoral dan bukan sekadar menjadi lebih pandai. Maka dalam kerangka pendidikan mereka, kasus STPDN yang menyangkut kekerasan dan penganiayaan terhadap sesama calon pemimpin rakyat merupakan hal yang sangat memalukan, terlebih karena mereka adalah calon-calon pengabdi rakyat yang semestinya memegang moralitas tinggi. Kegagalan mereka untuk menghormati hak dan martabat rekan-rekannya tentunya menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepantasan mereka menjadi pemimpin rakyat.

---

[90] Disarikan dari tulisan Thomas Hidya Tjaya, *Mencari Orientasi Pendidikan; Sebuah Perspektif Historis*. Staf Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Dimuat dalam harian Kompas, Rabu, 04 Februari 2004

Habermas: Kririk Ideologi atas Kurikulum Emansipatoris

Karya awal Habermas berada pada tradisi kritik Mahzab Frankfurt yang didasarkan pada prinsip fundamental keadilan sosial, dukungan terhadap kesetaraan sosial, penciptaan dan pemeliharaan kepentingan umum, serta komitmen pada pencapaian masyarakat demokratis. Habermas mendefinisikan ideologi sebagai 'penindasan terhadap kepentingan umum' dimana sistem atau kelompok yang berkuasa beroperasi dengan cara-cara yang rasional yang lemah. Kririk ideologi merupakan kritik terhadap cara kerja kekuasaan dan dominasi cara kerja yang tidak sah dalam masyarakat kapitalis.

Teori kritik Habermas[91] mengusulkan agenda pendidikan dan memiliki metodologinya sendiri terutama kritik ideologi dan riset aksi. Habermas berpendapat kritik ideologi dijalankan pada empat tahap; *Pertama,* deskripasi dan interpretasi situasi yang ada penyelidikan hermeneutik (menggunakan pendekatan *vestehem* dari paradigma interpretatif dari Max Weber). *Kedua,* penerapan nalar, kritik dengan melibatkan individu dan kelompok atas pandangan dan praktik mereka akibat distorsi ideologis. *Ketiga,* Penyusunan agenda untuk mengubah situasi-menuju masyarakat egaliter. *Keempat,* evaluasi terhadap pencapaian situasi baru dan egalitarian yang telah terwujud.

Tiga kepentingan pembentuk pengetahuan dapat menghasilkan tiga rancangan kurikuium; *Pertama*, pandangan *rasionalis* dan *behavioris*; yaitu kurikulum sebagai produk, menunjukkan kepentingan teknis, sehingga menghasilkan kurikulum birokratis. *Kedua,* Pandangan *humanistic, interpretative* dan *pragmatis,* yaitu kurikulum sebagai praktik, pendekatan proses dengan *hermenetik curriculum project* untuk mewujudkan kepentingan hermenetik. *Ketiga,* pandangan *eksistensial* dan *kritik ideoiogy,* yaitu 'kurikulum sebagai praksis', mewujudkan kepentingan emansipatoris. Kepentingan emansipatoris rnempermasalahkan kurikulum melalui riset aksi. Kurikulum merupakan wiiayah pertarungan ideologi. Dari pemaparan tersebut jelaslah melacak epistemologi pendidikan menjadi diskursus penting dalam menggali dan merumuskan arah gerak perubahan kebijakan pendidikan yang berihak pada kaum lemah. Usaha strukturasi *(struturation)* yaitu penataan relasi-relasi sosial lintas ruang dan waktu harus menjadi agenda propaganda utama. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Gidden, maka sangat perlu perlu diciptakan kesadaran diskursif *(discursive consciousness)* yaitu ekspresi verbal oleh aktor-aktor perubahan pemikiran dari gerakan sosial atas tindakan individu dan masyarakat.

Hakikat Mengajar: Membiarkan Anak Belajar!

Belajar berarti membuat segala sesuatu yang kita jawab menjadi hakikat-hakikat yang menunjukkan dirinya sendiri pada kita setiap saat. Mengajar lebih sulit dari pada belajar, karena apa yang dituntut dari mengajar: membiarkan belajar! Belajar bagi sebagian anak di lembaga pendidikan adalah aktivitas yang membosankan dan menyebalkan. Alasannya bisa karena cara mengajar yang monoton, tidak ada metodologi yang variatif, didominasi peran guru yang selalu ceramah, atau guru yang selalu marah bila si anak bermain sendiri. Pengalaman penulis saat mengajar, baik itu anak didik tingkat menengah ataupun mahasiswa, mereka butuh ruang ekspresi, berpendapat dan mengkritik pada saat proses belajar. Kenyataan ini membuktikan bahwa pada hakikatnya anak didik dan realitas sosial juga menjadi sumber belajar. Maka, harus menjadi kesadaran bahwa guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan.

Sejalan dengan testimoni Heidegger, ia melihat proses belajar sebagai masalah yang sangat mendesak dan bersifat pastisipatoris, yang memerlukan keterlibatan penuh pelajar *(learner)* dan tentunya bukan sesuatu yang dapat ditanamkan dari luar melalui proses yang sangat didaktis. Menurutnya, proses belajar juga tidak dilakukan dalam pengertian tercapainya sekumpulan tujuan proses belajar rinci yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam kurikulum nasional. Guru harus membiarkan anak didiknya belajar, bukan memaksakan proses itu kepadanya. Tindakan itu akan membuat proses belajar bersifat pasif, interpretasinya bisa jadi sangat jauh dari kebenaran. Jadi peran guru tidak lebih sebagai fasilitator atau teman belajar. Proses pendidikan saat ini tidak lebih dari memperoleh ketrampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan kapitalisme global, bukan mendapat pengetahuan yang murni untuk pengetahuan itu sendiri. Maka, kebaikan pendidikan *(human proper)* terutama berkenaan dengan nilai dan makna yang kita peroleh dari pendidikan, bagaimana anak didik merasakannya seharusnya mempengaruhi pandangan dan tindakan mereka. Serta konsepsi anak didik baik sebagai individu yang bertanggungjawab maupun sebagai anggota dalam lingkungan manusia *(human condition).* Konsepsi pendidikan semacam itulah yang disebut pendidikan yang transformatif. Yaitu, model pendidikan yang kooperatif terhadap segenap kemampuan anak untuk menuju proses berfikir yang lebih bebas dan kreatif. Model pendidikan ini menghargai potensi yang ada pada setiap individu. Artinya, potensi-potensi individu itu tidak dimatikan dengan berbagai bentuk penyeragaman dan sanksi-sanksi, tetapi biarkan tumbuh dan berkembang secara wajar dan manusiawi.

Pendidikan transformatif menjelaskan adanya relasi sosial yang timpang, menindas, mendominasi dan mengeksploitasi. Relasi-relasi tersebut harus diubah agar menjadi setara, saling menghargai dan memiliki kepekaan. Dalam pelaksanaannya, anak didik tidak dijejali kurikulum yang dipaket oleh pemerintah, tetapi anak didik diajak untuk memahami realitas hidupnya. Realitas itu kemudian menjadi sumber inspirasi dan kreatifitas anak didik dalam membangun visinya. Model pendidikan semacam ini tidak menjadikan anak

[91] Palmer, Joy A., *50 Pemikir Pendidikan* (Yogyakarta: Jendela, Cet. I., 2003).

didik menjadi bejana kosong yang harus terus diisi *(bangking concept of education)*, seperti dikritik oleh Paulo Freire, melainkan mengajak anak didik secara kritis mempertanyakan realitas yang terjadi disekeliling mereka.

Agar kualitas proses belajar ini tercapai dibutuhkan suatu konsep guru-murid yang secara kualitatif berbeda dengan konsep yang sebagian besar masih dipakai sekarang ini. Alih-alih hubungan guru-murid dibayangkan sebagai wahana untuk menyampaikan (baca: memberikan) pengetahuan dan ketrampilan yang sudah ditentukan sebelumnya dimana guru ataupun murid dapat dianggap bertanggungjawab *(accountable)*, hubungan itu harus menjadi ruang dialektika terbuka yang secara terus menerus dalam proses belajar. Peran guru hakikatnya adalah sebagai "peran yang secara empatik menantang" *(emphatetic challenging)*, karena mensyaratkan guru untuk lebih reseptif, yaitu kepekaan guru untuk menerima ide-ide baru. Guru tersebut disyaratkan untuk menjalin hubungan yang simpatik dengan anak didik—namun bukan dengan cara menuruti kehendak dan dengan demikian mematikan hubungan ini—tetapi lebih memicu semangat dan menantang dalam pengertian apa yang harus ditawarkan mata pelajaran, apa "yang ada" *(on the move)* dalam mata pelajaran itu, dan apa yang mungkin menjadi persoalan penting bagi anak didik dalam hubungan ini.

Keterbukaan dan saling percaya merupakan karakter yang sangat menentukan, dimana guru menerima pemikiran atau menantang pemikiran anak didik dengan mendengarkan apa yang dipikirkan anak didik dalam belajar. Dengan proses belajar yang dialogis tentu tidak akan terjadi kekerasan dan pemaksaan kepada anak didik dalam belajar. Seperti refleksi kritis Neil, ia mengatakan; saya percaya bahwa memaksakan apapun dengan kekuasaan adalah salah. Seorang anak seharusnya tidak melakukan apapun sampai ia mampu berpendapat—pendapatnya sendiri—bahwa itulah yang harus dilakukan (A.S. Neil, *Summerhill*, 1968, hal 111).

Keterbukaan itu menyangkut terhadap segala aspek baru untuk memberikan peluang kepada anak didik dalam menumbuhkan sikap menghormati keberagaman (pluralitas), sebuah sikap yang menjadi dasar objektivitas anak didik dalam memahami pengetahuan. Fenomena pengembangan metodologi pembelajan saat ini sangat variatif, namun menurut hemat penulis metode-metode tersebut belumlah efektif untuk diaplikasikan dalam proses belajar. Karena keasikan belajar bagi anak tidak hanya ditentukan oleh metode dan fasilitas yang lengkap, tetapi juga kesempatan yang lebih banyak untuk bertanya dan mengkritik dalam upaya mengeksplorasi pengentahuan.

Kenyataan ini hendaknya memberikan kesadaran guru bahwa pendidikan bukan hanya menyampaikan nilai *(transfer of value)* atau menyampaikan pengetahuan *(transfer of knowledge)* tetapi juga mampu menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru dari realitas disekeliling anak didik dalam sebuah institusi sekolah.

Visi Pendidikan di Era Globalisasi

Dalam sebuah penelitiah ilmiah *Human Recource Development in the Globalization Era, Vision, Mission, and Programs of Action for Education and Training Toward 2020* H.A.R Tilaar, menjelaskan tentang program aksi menyeluruh dalam menghadapi gelombang globalisasi. Empat kekuatan yang perlu dicermati pendidikan nasional; 1) kerjasama regional dan internasional, 2) demokrasi dan peningkatan kesadaran HAM serta pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*), 3) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) identitas bangsa dan internasionalisme.[92]

Orientasi kebijakan negara yang mengendepankan ideologi developmentalisme telah menyeret masyarakat ke jurang kemiskinan, betapa tidak infrastruktur yang dibangun tentu hanya diperuntukkan bagi mereka yang kaya. Jarak (*detachment*) kelas sosial si kaya dan si miskin semakin jelas terlihat dari akses masyarakat kecil terhadap perlindungan hukum. Produk hukum hanya untuk melindungan pada pemegang modal. Implikasi pada dunia pendidikan adalah bahwa sekolah juga dijadikan ajang bisnis. Pendidikan semakin mahal dengan dalih fasilitas tehnologi canggih yang butuh modal hanya sebagai servis pendidikan.

Perubahan paradigma pendidikan atas campur tangan negara dalam pendidikan dalam arus globalisasi dapat dianalisa sebagai berikut:

[92] H.A.R Tilaar, *Human Recource Development in the Globalization Era, Vision, Mission, and Programs of Action for Education and Training Toward 2020* Jakarta 1997, dalam H.A.R. Tilaar, *op. cit.,* h.199.

Diagram 1
Pola Perubahan Paradigma Pendidikan (H.A.R. Tilaar, 2003)[93]

Peran Negara	Masa lalu	Masa depan
Pemerataan	Berorientasi target	Berorientasi kualitas
Kualitas	Dicapai melalui evaluasi dan strandarisasi semu melalui ujian terpusat dan kurikulum baku yang bersifat nasional	Sebagai prioritas utama sesuai dengan kebutuhan daerah
Proses	Tercapainya target kuatitatif	Tercapainya target kualitatif
Metodologi	Indoktrinasi	Dialogis
Manajemen	Negara dan birokrasinya memegang pernan sentral	Manajemen berpusat pada institusi sekolah
Supervisi	Pelaku utama	Pemerintah sebagai patner
Perubahan sosial	Terarah dan opresif	Demokratis dan berangkat dari arus bawah
Demokrasi	Menekan kehidupan demokrasi yang terbatas pada prosedur	Perubahan tingkah laku demokrasi secara subtantif
Perkembangan sosial ekonomi masyarakat	Tidak menjadi bahan pertimbangan penyusunan kurikulum	Komponen pokok penyusunan kurikulum
Perkembangan nilai moral dan agama	Ditentukan oleh pemerintah pusat	Berakat dari budaya dan agama setempat
Nasionalisme	Pemaksaan dari pemerintah dan bersifat formalistis mengabaikan identitas daerah	Pendekatan multikultural
Pendanaan	Sebagai alat melestarikan kekuasaan pemerintah	Selektif sebagai pemersatu nasional pemeratan demi kualitas pendidikan
Pelaksanaan pendidikan dasar 9-12 tahun	Ditentukan secara terpusat	Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah

Reparadigmatisasi Pendidikan di Era Global

Ignas Kleden memberikan analisa kritis bahwa pendidikan nasional. *Pertama*, harus menciptakan masyarakat yang mempunyai kemampuan berfikir logis dan bertindak logis. *Kedua*, pendidikan humaniora harus dibedakan dari ilmu-ilmu humaiora dalam pengertian epistemologis, sehingga pendidikan humaniora menekankan kualitas-kualitas manusiawi dari peserta didik. *Ketiga*, pendidikan bukan hanya menciptakan orang dengan keahlian, tetapi orang-orang dengan kemampuan belajar tinggi.[94]

Tanpa mengabaikan otoritas negara dan arus globalisasi yang terus menggerus kekuatan masyarakat sipil, sistem pendidikan Indonesia harus merobah fundamen paradigma pendidikan. *Pertama*, perlu penataan sistem pendidikan yang beradaptasi dengan kekuatan global. *Kedua*, penegakan supremasi hukum dan kedaulatan politik nasional demi menciptakan kondusifitas segala sektor kehidupan, demokrasi, agama, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, budaya, hankam. *Ketiga*, paradigma pendidikan untuk semua kalangan—*education for all*—dan pendidikan sepanjang hidup—*long life education*—harus menjadi *mainstream* kebijakan pendidikan nasional.

Pendidikan Revolusioner: Melawan Kapitalisme

Pendidikan revolusioner harus dipandu oleh filosofi pendidikan revolusioner. Sasaran pendidikan harus mengenali dan mengakui keterkaitan timbal balik antara kehidupan sosial dengan pendidikan. Pendidikan revolusioner harus menyikapi perkembangan masyarakat kapitalis. Pendidikan harus memposisikan dirinya sebagai alat kritik egalitarian dan anti-otoritarian kontemporer terhadap perkembangan wacana pendidikan dan masyarakat. Zaman dimana sekolah murah tampaknya memang sudah usai. Bahkan keinginan untuk menjadi guru yang manusiawi kini menjadi suatu keinginan yang tidak realistis. Hanya beberapa gelintir sekolah yang memberikan imbalan 'manusiawi' pada profesi guru. Jika diusut lebih jauh, komersialisasi pendidikan bersinggungan erat dengan tatanan serta pergeseran formasi kelas sosial yang berlangsung saat ini; formasi sosial yang meluluhlantakkan struktur dan sistem sosial yang lama. Termasuk didalamnya adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan adalah lingkaran yang berisi aktor-aktor yang mengalami perubahan sosial besar. Dunia harus sujud sepenuhnya pada demokrasi liberal yang saat ini menguasai arena kehidupan sosial. Tatanan ekonomi global ini yang menyebabkan kapitalisasi pendidikan.

Mengenai kapitalisme, kritik Karl Marx terhadap kapitalisme tidak hanya ditujukan kepada distribusi kekayaan, tetapi kapitalisme dipandang melanggengkan buruh menjadi terpaksa, teralienasi dan tidak bermakna, sehingga transformasi manusia menjadi 'sebuah barang aneh yang timpang'. Emansipasi keterasingan manusia dalam masyarakat kapitalisme adalah usaha bagaimana menemukan hakekat manusia yang terhegemoni ideologi kapitalisme yang mengeksploitasi hakekat dan mengasingkan manusia. Menurut Franz Magnis Suseno ciri masyarakat modern adalah (1) Masyarakat berdasar industrialisasi dan

[93] Analisa ini diadaptasi dari H.A.R. Tilaar, *Ibid.*, h.155-156.
[94] Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan,* (Magelang: Indonesiatera, Cet, I., 2004) h. 150.

perubahan total gaya hidup, (2) lahirnya masyarakat infomasi yang tidak tergantung alam, (3) Terjadi pertarungan ideologi, politik, budaya dan ekonomi modernisasi atau globalisasi hakekatnya bukan hanya perubahan institusional-melainkan juga perubahan kesadaran manusia. Problem modernitas menimbulkan budaya materialisme, konsumerisme, kriminalitas, pelecehan seksual, permisif, hedonisme dan tindakan asusila lainnya. Globalisasi telah memunculkan-masyarakat mekanis-masyarakat global yang pluralistik dan kapitalistik.

Globalisasi dan modernisme mempunyai kaitan erat dengan kapitalisme pendidikan, dimana pendidikan dijadikan ajang akumulasi modal, dan menjadi ajang bisnis elit-elit pendidikan. Maka tidak heran kalau banyak muncul lembaga pendidikan yang berorientasi pasar *(market oriented).* Seiring berkembangnya pasar modal, maka semakin tinggi pula kebutuhan tenaga kerja. Dan yang paling efektif untuk menghasilkan tenaga kerja pasar adalah lembaga pendidikan. Pada titik inilah lembaga pendidikan telah kehilangan ruh dan mengalami disorientasi paradigmatik dimana pendidikan seharusnya berperan sebagai medan transormasi sosial bukan sebagai alat reproduksi sosial. Masyarakat pasar global dengan perangkat industri dan perdagangan bebas menantikan out put pendidikan yang sesuai dengan kompetensi dalam berbagai bidang kerja.

Tantangan ekonomi liberal telah berdampak pada; *pertama,* semua negara terpacu untuk membuka pasar dan mecabut semua subsidi yang memiliki tujuan perlindungan. Pasar yang dibuka ini diharapkan akan memacu suatu negara untuk berkompetisi secara terus menerus. *Kedua,* melakukan privatisasi terhadap sektor publik. Pemerintah mulai dilucuti agar tidak melakukan kontrol, tetapi membiarkan sektor swasta untuk mengambil alih. Keyakinan *ketiga,* bahwa sistem ekonomi liberal menempatkan Negara sebagai penjamin bagi kelangsungan sistem ekonomi pasar. Terobosan ini bermula pada pencopotan semua layanan publik, namun lama kelamaan menjadi upaya untuk melakukan kapitalisasi atas semua bentuk layanan publik. Termasuk dalam hal ini pendidikan yang dulunya berorientasi pada pencerahan sekarang berorientasi pasar.

Posisi pendidikan dalam masyarakat global seharusnya melakukan refleksi kritis terhadap *the dominant ideology* kearah tranformasi sosial. Dan tujuan pendidikan adalah menciptakan 'manusia ideologis' yaitu manusia yang mempunyai kesadaran kritis. Manusia saat ini telah diberangus oleh perkembangan teknologi yang menciptakan kesadaran semu. Manusia menjadi sangat tergantung terhadap kemudahan-kemudahan teknologi. Secara terus-menerus manusia menjadi budak kapitalisme. Masyarakat modern adalah masyarakat yang mekanis dan statis, dimana manusia telah manusia rakus mengkonsumsi produk-produk industri.

Epilog: Refleksi & Aksi Pendidikan Kritis

Melalui tulisan ini penulis sadar bahwa dunia pendidikan telah terlihat wajah buramnya. Pendidikan telah tercerabut dari makna filosofisnya. Guru kemudian menjadi sosok yang berwajah letih. Dan si murid menjadi makhluk yang antusias melakukan kekerasan, teralienasi dari fitrahnya. Mereka menjadi mangsa dunia industri dengan melahap semua produk yang disodorkan oleh iklan. Kompetisi dan globalisasi telah menciutkan dunia dari jangkaun manusia. Semua manusia modern saling berkopentjsj melakukan akumulasi modal. Maka tak heran sekolah ibarat perusahaan katering yang menyediakan layanan menu enak dan siap antar untuk memenuhi kebutuhan perut. Semua sekolah berlomba untuk memberikan fasilitas yang lengkap, karena sekolah harus beradabtasi dengan iklim global.

Maka sekarang sudah saatnya melakukan aktualisasi issu pendidikan sebagai alat perlawanan dan transformasi sosial termasuk bagaimana merealisasikan pendidikan murah untuk rakyat. Langkah alternatif gerakan sosial yang bisa dilakukan adalah *pertama;* mendorong kemandirian politik para pendidik. Artinya para pendidik harus tanggap secara kritis setiap kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah yang berdampak pada sektor pendidikan. *Kedua,* membentuk organ independent yang mengusung issue-issue pendidikan. Dalam konteks ini sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar tetapi juga berperan dalam kerja-kerja pengorganisasian. *Ketiga,* penentuan basis ideologi gerakan yang mengikat organ itu sendiri. Dalam konteks penguatan basis ideologi inilah serangkaian prinsip pedagogi yang demokratis, partisipatoris, anti diskriminasi pada semua struktur pendidikan. *Keempat;* menghadirkan sekolah alternatif yang memungkinkan proses idelogisasi untuk mengusung gerakan sosial. Konteks pengalaman politik inilah yang menjadikan sekolah sebagai kawah pendidikan bagi seorang aktivis sosial.

Sekolah seharusnya menjadi tempat mengenal realitas sosial. Realitas dalam konteks sosial adalah realitas yang harus selalu dipertanyakan. Realitas yang harus diubah dengan pikiran dan tindakan nyata. Pendidikan merupakan instrument yang laten untuk melawan sistem yang tidak adil dan menindas. Pendidikan harus dijadikan ruang mediasi transformasi sosial menuju formasi sosial yang menjamin tatanan sosial yang lebih adil. Maka, realitas sosial sesunggunya memerlukan perlawanan besar dan panjang.

Bibliografi

AsiaDHRRA, h. 301-308. *Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Umat Manusia*, lihat Antony Giddens, *Runaway World* (terjemah, 2001, *Dunia yang Lepas Kendali*). dalam H.A.R Tilaar, *Kukuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesiatera, Cet. I., 2003).

Arif, Saiful, *Menolak Pembagunanisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 2000).

Arendt, Hannah, *Pembangunan Ekonomi, Studi Tentang Sejarah Pemikiran* (Jakarta: LP3ES, 1991).

Adelman dan Morris, C., *Economics Growth and Social Equaity in Developing Countries* (Standford: Standford University Press, 1973).

Budiman, Arif, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia, Cet. IV., 2000).

Bauman, Zygmunt, *Globalization: the Human Qonsequences* (NY: Columbia Univ. Press, 1998).

Beck, Ulrich, *What is Globalization?* (Cambridge: Polity Press, 2000).

Bell, Daniel, *The Cultural Contradictions of Capitalism* (New York: Basic Books, 1976).

Chomsky, Noam, *Neo Imperalisme Amerika Serikat* (Yogyakarta: Resist Book, 2008)

Clements, Kevin, *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Darsono, P., dalam *Globalisasi Suatu Strategi Penjajahan Bentuk Baru*, http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2006-november/000189.htm.

Darmaningtiyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 1999)

Escobar, M., *Sekolah Kapitalisme yang Licik* (Yogyakarta: LKiS, Cet. III., 2001).

Friedman, Thomas L., *The Lexus and The Oleive Tree* (London: Harper Collins Publisher, 2000)

Freire, Paulo, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3ES, Cet. III., 2000).

_____, *Pedagogi Pengharapan, Menghayati Kembali Pedagogi Kaum Tertindas* (Yogyakarta:, Kanisius, Cet. I., 2001).

_____, *Pendidikan Sebagai Proses* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,. I., 2001).

_____, & Ira shor, *Menjadi Guru Merdeka* (Yogyakarta: LKiS, Cet. I., 2001).

Faqih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan & Globalisasi* (Yogyakarta: Insist, 2001).

Fukuyama, Francis, *The End of History and Last Man* (London: Hamish Hamilton, 1992).

Giddens, Anthony, *Run Way World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita* (Jakarta: Gramedia, 2000).

_____, *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999).

_____, *Kapitalisme & Teori Sosial Modern* (Jakarta: UI Press, 1986).

Grant, Woods Alan & Ted, *Melawan Imperealisme* (Yogyakarta: Sumbu, 2001).

Hirst, Paul & Thompson, Grahame, *Globalisasi adalah Mitos* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

Hanafi, Hasan, *Cakrawala Baru Peradaban Global: Revolusi Islam Untuk Globalisme, Pluralisme, Egalitarianisme Antar Peradaban* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003).

Hebermas, Jurgen, *Ilmu dan Tekhnologi Sebagai Ideologi* (Jakarta: LP3ES, Tahun 1990).

Jhamtani, Hira, *Ancaman Globalisasi & Imperealisme Lingkungan* (Yogyakarta: Insist, 2003).

Jameson, Fredric, *Postmodernism or The Cultural of The Late Capitalism* (London: Verso, 1990).

Salmi, Jamil, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru dalam Melihat HAM* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Kristeva, Nur Sayyid Satoso, *Manifesto Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik* (Modul Pelatihan Basis, PMII, Tahun 2005).

Kellner, *Theorizing Globalization, Sociological Theory,* 2002 dalam George Ritzer—Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern,* (Jakarta: Prenada Media, Cet. III., 2005).

Komaruddin, *Pengantar untuk Memahami Pembangunan* (Bandung: Angkasa, 1985).

Kuncaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas & Pembangunan* (Jakarta, Gramedia,1997).

Kunio, Yoshihara, *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1990).

Khoor, Martin, *Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan* (Yogyakarta: Cindelaras, 2002).

Kleden, Ignas, *Masyarakat dan Negara, Sebuah Persoalan,* (Magelang: Indonesiatera, Cet, I., 2004).

Larrain, J., *Theories of Development, Capitalism, Colonialism & Dependensy,* (Dalas Brewely, 1989).

Miller, dan Rose, *Political Power Beyond the State: Problematic of Government,* dalam *Britis Journal of Sociology*, Vol. 43, No. 2., Juni dalam Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. I., 2003).

Mustafid, Muhammad, *BHMN: Pembajakan Sistematik Pasar, Negara dan Rektorat*, Makalah yang dipresentasikan pada acara Seminar dan Lokakarya Nasional: “Membongkar Realitas Pendidikan Indonesia”, ISTA, 24-27 Juli 2004.

Mander, Jerry, Debi Barker & David Korten*, Globalisasi Membantu Kaum Miskin*, dalam *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan* (Yogyakarta: Cindelaras, 2003).

Nugroho, Heru, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Naim, Ngainun, *Rekonstruksi Pendidikan Nasional; Membangun Paradigma yang Mencerahkan* (Yogyakarta: Teras, 2009).

Pieterse, Jan Nederveen, *“Globalization as Hybridization”,* individu Mike Featherstone et all. Edt, *Global Modernities* (London: Sage Publications, 1995).

Palmer, Joy A., *50 Pemikir Pendidikan* (Yogyakarta: Jendela, Cet. I., 2003).

Philpott, Simon, *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. I., 2003).

Piliang, Yasraf Amir, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan Mesin-mesin Kekarasan dalam Jagat Raya Chaos* (Bandung: Mizan, 2001).

Ritzer, George & Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada, 2005).

Sweezy, Paul M., “Kapitalisme Modern”, dalam *Kapitalisme: Dulu dan Sekarang: Kumpulan Karangan dari berbagai sumber asing* (Jakarta: LP3ES, 1987).

Soedjatmoko, *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan tentang Agama Kebudayaan Sejarah dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1984).

_____, *Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta, PLP2M, 1984).

Strahm, H. Rudolf, *Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999).

Smith, Adam, *The Wealth of Nations* (New York: 1937).

Sritua, Arif, *Pembangunaisme dan Ekonomi Indonesia, Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi* (Bandung: CPSM, Cet. I., 1998).

Tilaar, H.A.R., *Kekuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesiatera, Cet. I., 2003)..

_____, *Human Recource Development in the Globalization Era, Vision, Mission, and Programs of Action for Education and Training Toward 2020* Jakarta 1997, dalam H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan, Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, (Magelang: Indonesiatera, Cet. I., 2003).

Tjaya, Thomas Hidya, *Mencari Orientasi Pendidikan; Sebuah Perspektif Historis.* Staf Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Dimuat dalam harian Kompas, Rabu, 04 Februari 2004.

Topatimasang, Roem, *Sekolah Itu Candu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist, 2001).

Winarno, Budi, *“Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi”,* dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Edisi 1, Februari 2004.

Wahono, Francis, *Kapitalisme Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).

Weber, Max, *The Protestan Ethics and The Spirit of Capitalism* (London: Univin Hymn, 1990).

MATERI 13
PMII PERSPEKTIF IDEOLOGI, ORGANISASI, KEPEMIMPINAN & STRATAK

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.
ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

REPARADIGMATISASI NARASI KADERISASI PMII;
MEMBANGUN KONSTRUKSI PEMIKIRAN & KESADARAN UNTUK BERGERAK
Tantangan Ekonomi Politik Dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Global

Sekedar Mengingatkan Masih ingatkah anda sejarah yang mencatat bahwa Indonesia atas anjuran dan dukungan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF serta negara-negara kreditor Indonesia yang tergabung dalam CGI (dulu IGGI), pemerintah orde baru melaksanakan teori pembangunan “mengejar pertumbuhan tinggi, dan pemerataan terjadi melalui ‘trickle down effect’. Untuk mencapai pertumbuhan tinggi, pemerintah Orde Baru memberikan segala kemudahan seperti perizinan, perlindungan bea masuk, kredit bank, peruntukkan lahan dan sebagainya untuk mendukung perkembangan usaha besar swasta yang menjadi kroni penguasa. Tujuan Politik Ekonomi nasional : “Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan agar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi”; 2. Pilar Utama Ekonomi Nasional : “Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Peranan Pemerintah Mengoreksi Ketidaksempurnaan Pasar: “Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.” Kedua TAP MPR tersebut satu sama lain saling melengkapi, sehingga Indonesia telah memiliki politik ekonomi pembangunan era reformasi yang jelas dan tegas yang pokok-pokoknya.

UKMK Sebagai Tulangpunggung Ekonomi Nasional Mekanisme Pelaksanaan Politik Ekonomi Reformasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 merupakan arah dan pedoman bagi kebijakan penyelenggraan negara, termasuk lembaga tinggi negara, dan seluruh rakyat Indonesia, dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan, dalam kurun waktu tersebut.

Dalam Propenas telah diuraikan lebih mendetail ciri-ciri ekonomi kerakyatan yang merupakan sistem ekonomi yang hendak dibangun oleh Orde Reformasi sebagai berikut: Pertama, Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakkan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi, disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja, tanpa membedakan suku, agama, dan gender, mendapatkan kesempatan, perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memanfaatkan serta memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup.
Untuk itu, prioritas dilakukan bagi penghapusan praktek-praktek dan perilaku-perilaku ekonomi diluar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat seperti praktek monopoli, pengembangan sistem perpajakan progresif yang efektif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi beaya tinggi. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita sudah berada dalam alam kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang dicapai baru hanya di bidang politik. Hal itu terlihat pada kekuasaan negara yang berhasil kita pegang. Bung Karno dengan Pancasilanya berhasil merebut kekuasaan pemerintahan. Dia dan kawan-kawan seperti Bung Hatta, Mr Sartono, dr Radjiman, dr Tjipto Mangunkusumo, dan seterusnya, pada umumnya adalah para bangsawan dari berbagai tingkatan yang berhasil merebut kekuasaan negara dari tangan penjajah. Jika pada saat itu ada tokoh politik yang mengajukan gagasan kredit murah untuk kepentingan usaha ke cil dan menengah, tentu pembawa usul itu akan ditertawakan orang.

Dalam pikiran mereka, dunia ekonomi hanya akan mengalami kemajuan jika dikuasai oleh teman-teman mereka sendiri, para pengusaha dari “kalangan atas”. Inilah yang mereka anggap sebagai “kekuatan ekonomi nasional”. Mungkin dalam lingkup ini termasuk ayah penulis sendiri,yaitu dari kalangan petani bertanah (land owners). Kenyataan ini berjalan terus sampai demokrasi terpimpin digantikan oleh Orde Baru yang dibawa oleh Mayor Jenderal Soeharto. Secara efektif,Orde Baru meneruskan orientasi pembangunan nasional yang hanya mementingkan kalangan atas saja. Demikian pula dengan apa yang dinamakan masa

Reformasi pada 1998, yang dianggap membawa perubahan cukup besar. Namun tetap saja orientasi pembangunan kita, yang masih ditentukan oleh kepentingan "kalangan atas" itu, baru mengacu pada pertumbuhan (growth). Pembangunan ekonomi kita lalu menuju kepada penjualan barang (ekspor) secara besar-besaran. Karena itulah pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk impor barang secara besarbesaran pula.

Dengan demikian, jumlah barang yang diimpor harus dibiayai oleh kredit keluar negeri yang besar pula sehingga utang nasional kita terus-menerus ditambah. Ini membuat ketergantungan kita pada negara-negara lain membengkak. Orde Baru digantikan oleh apa yang dinamakan Orde Reformasi, yang segera saja direbut oleh para teknokrat. Sebenarnya mereka tidak lain adalah kaum profesional yang menganut paham pertumbuhan ekonomi di atas. Tercapailah pertumbuhan besarbesaran bagi negeri kita, yang tidak berumur lama. Segera saja perekonomian nasional kita dihadapkan pada krisis berkepanjangan yang belum selesai hingga saat ini. Salah satu penyebabnya, karena tidak ada perubahan berarti dalam pandangan para pimpinan parpol dalam pembangunan nasional dan kepemimpinan negara.Tidak ada seorang pun yang berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis ekonomi yang berkepanjangan itu dengan segenap konsekuensinya.

Padahal,kita harus mempunyai arah yang jelas dalam orientasi pembangunan kita. Kenyataan memaksa kita untuk mengikutinya sampai jarak tertentu. Juga sulit untuk memperhitungkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Walaupun prinsip pembangunan ekonomi nasional kita mengharuskan adanya kemerdekaan kebebasan berniaga dalam bentuk persaingan bebas (free competition). Karena itu kita harus memberikan kemerdekaan untuk bersaing secara bebas bagi perusahaanperusahaan asing di negeri kita. Tetapi, di samping itu harus diingat bahwa sisi lain dari dunia usaha kita justru menginginkan adanya perlindungan pemerintah atas usaha kecil dan menengah. Tentu saja hal ini terkait Pasal 33 UUD 1945 yang menyebut perlunya diberikan perhatian khusus untuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Hal ini pernah dialami Andrew Jackson, yang menjadi Presiden AS pada 1830-an. Dalam kebijakan Jackson, UUD AS menetapkan bahwa RAPBN (budget) mengharuskan seorang presiden untuk membiayai pendidikan, kerjakerja sosial,kesehatan,dan hal-hal sejenis untuk rakyat.

Oleh sebab itu dia mengangkat seorang gubernur bagi American Federal Reserve System (yang di negeri kita dikenal dengan nama Bank Indonesia). Dengan pengangkatan itu, Jackson tidak menyalahi liberalisme ekonomi yang mengharuskan adanya persaingan bebas dalam pengaturan ekonomi. Pelajaran ini sangat penting untuk kita perhatikan dengan serius. Namun, dalam menyelenggarakan perekonomian nasional ini, di samping perlunya kemakmuran negara kita sendiri, kita juga harus maju bersama dengan negara-negara dunia berkembang (developing countries) lain. Sewaktu menjabat sebagai presiden, penulis didatangi utusan Presiden Bill Clinton, yaitu Winston Lord, pembantu Menlu AS urusan Asia dan Pasifik. Lord bertanya kepada penulis, adakah kerja sama ekonomi yang diusulkan dengan membentuk Poros Indonesia- Republik Rakyat China-India dimaksudkan untuk mengeliminasi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi? Penulis menjawab tidak, melainkan untuk mengembangkan kemampuan ketiga negeri tersebut untuk bersaing dengan AS. Dua hari kemudian Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa AS mendukung gagasan kerja sama ekonomi itu. Jadi, agar segala sesuatu menjadi terbuka bagi semua pihak, perlu ada kejelasan dari kita sendiri. Jelaslah, dari apa yang disebutkan di atas bahwa dalam pemikiran penulis, hubungan antara ekonomi politik dan kekuasaan sangatlah besar. Nah, kesalahan kita selama ini adalah tidak jelasnya orientasi pembangunan ekonomi nasional kita sendiri. Seharusnya, kita juga menggunakan orientasi kehidupan yang dibawakan oleh agama, yaitu pentingnya akhlak mulia dan keadilan dalam kehidupan kita. Masalah yang sederhana tetapi juga sangat rumit, bukan? (IC) melakukan manipulasi kesadaran buruh agar tak menjadi kelas sosial yang revolusioner.

Buku *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca-Soeharto* yang ditulis oleh Vedi R. Hadiz ini merupakan suatu kajian historis analitis tentang perburuhan, khususnya di Indonesia. Yang menjadi sorotan Hadiz adalah posisi buruh dalam empat pemerintahan: Soeharto, Habibie, Gusdur, dan Megawati, yang selalu dalam posisi marjinal. Dalam buku ini, marginalisasi tersebut ditandai dengan posisi tawar buruh yang lemah, baik dalam kancah politik maupun ekonomi. Ketika Orde Baru mengisi kekuasaan, buruh tak mempunyai akses terhadap kegiatan-kegiatan politik. Atau buruh diputuskan dari aktivitas politik. Hal ini dibuktikan dengan dibubarkannya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) oleh Orde Baru, berbarengan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa Orde Baru, oraganisasi-organisasi buruh disatukan di bawah satu naungan, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dengan disatukannya organisasi buruh, maka perjuangan-perjuangan buruh diarahkan hanya dalam perjuangan-perjuangan ekonomi. Hubungan buruh dan partai, seperti SOBSI dan PKI, sudah tak lagi terlihat dalam masa Orde Baru. Dengan arti lain, peran buruh dihapuskan dari ranah politik.

Keterputusan ini terus berlanjut setelah runtuhnya kekuasaan politik Orde Baru. Di samping adanya keterkejutan karena terjadinya berbagai macam himpitan seperti diterpa krisis ekonomi, tapi karena juga kesadaran buruh sudah sedemikian termanipulasi sehingga kesadaran politisnya sekakan-akan sudah hilang. Memakai istilah Hadiz, warisan Orde Baru masih terdapat dalam kesadaran buruh. Artinya, buruh masih belum mendapatkan tempat dalam politik, walau Orde Baru telah runtuh. Begitu juga dengan kekuasaan. Relasi-relasi kekuasaan *(power relations)* yang terdapat dalam kekuasaan demokratis pasca

Orde Baru, bukan relasi kekuasaan yang baru. Ia masih merupakan warisan dari kekuasaan Orde Baru. Menurut Hadiz, yang terjadi setelah keruntuhan Orde Baru hanyalah "desentralisasi kekuasaan". Sementara relasi-relasi kekuasaan, kekuatan-kekuatannya, seperti partai dan penguasanya, tetap merupakan bagian dari yang lama.

Buruh dan Globalisasi

Selain kekuasaan, posisi buruh juga berhadapan dengan bentuk relasi ekonomi yang baru, yang kita sebut dengan globalisasi. Terlepas dari perselisihan para tokoh tentang makna globalisasi itu, yang pasti adalah bahwa relasi-relasi ekonomi pada zaman sekarang sudah sangat berbeda dengan sebelumnya. Apa yang terjadi pada masa Marx misalnya, adalah suatu bentuk relasi buruh-majikan yang sangat jelas dan dapat dipilah dengan jernih. Pada zaman global, definisi buruh-majikan semakin kabur. Buruh sudah nampak seperti majikan. Ia bisa menikmati hidup seperti majikannya. Oleh karena itu, definisi buruh kembali dipertanyakan. Hal yang sangat penting dalam globalisasi adalah relasi negara dan pasar yang semakin harmonis. Atau bahkan melemahnya kekuatan negara dihadapan modal internasional. Kondisi ini tentu saja sangat melemahkan posisi tawar buruh dihadapan pemilik modal. Ketika buruh tak mendapatkan akses kekuasaan, dan kekuasaan itu sendiri bermesraan dengan kapitalisme, maka buruh tak lagi bisa tawar-menawar dengan pemilik modal. Menjadi buruh hanyalah merupakan paksaan demi keberlangsungan hidup. Apa yang dipercayai oleh kaum liberal tentang akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam zaman global karena akan banyaknya investasi dan terbukanya ruang kerja yang banyak, masih belum terbukti karena selain begitu sangat melimpahnya pengangguran, karena juga sistem yang ada dalam ekonomi liberal itu sendiri, yaitu persaingan yang bebas (*equality of opportunity)*, tak memungkinkan kaum lemah untuk dapat bersaing dengan para pemilik modal yang besar. Kenyataan di atas tak memungkinkan posisi buruh memiliki daya tawar-menawar yang tinggi.

Maka itu, munculnya globalisasi dapat dikatakan sebagai keberlanjutan kelemahan kaum buruh. Kaum buruh dan buruh terorganisasi tak dapat berkutik di hadapan kaum pemilik modal besar. Isu terhangat yang sangat penting adalah munculnya istilah "buruh kontrak". Sebagai suatu bentuk posisi buruh yang baru di hadapan pemilik modal, buruh kontrak adalah bukti bahwa posisi tawar buruh semakin melemah. Melemah karena buruh tak mendapatkan posisi penting. Ia akan dibuang setelah perusahaan tak lagi menginginkannya. Dalam hal ini, hubungan buruh lebih diperhitungkan dalam relasinya dengan keuntungan dan modal. Buruh kontrak adalah bukti sejarah kelemahan buruh.

Politik Hukum Dalam Regulasi Perekonomian Global

Salah satu beban politik ekonomi Indonesia adalah hutang luar negeri yang terus membengkak. Hutang ini sudah begitu berat, mengingat pembayaran cicilan dan bunganya yang begitu besar. Biaya ini sudah melewati kapasitas yang wajar, sehingga biaya untuk kepentingan-kepentingan yang begitu mendasar dan mendesak menjadi sangat minim yang berimplikasi cukup luas. Tulisan-tulisan tentang hutang luar negeri sudah banyak yang ditulis para kalangan, baik itu sebagai politisi, pengamat, dan atau khususnya kalangan ilmuwan. Akan tetapi yang ditulis itu sudah tidak lagi relevan karena perkembangan ekonomi politik yang begitu cepat. Penelitian terakhir yang penulis ketahui adalah yang diseminarkan pada tahun 2004 di LIPI. Setelah itu belum ada penelitian yang seksama. Inilah yang melatarbelakangi penulis meneliti masalah hutang luar negeri ini, khususnya setelah beberapa negara lain mengusulkan akan melakukan moratorium.

Untuk pembahasan tulisan ini akan mengikuti alur yang diterapkan oleh Rudolph Strahm (1999). Dalam garis besarnya Strahm mengatakan sebab utama Negara-negara dunia ketiga adalah politik Negara industri yang menjual produk eksspornya dengan kredit yang diobral kenegara-negara dunia ketiga. Slogan mereka adalah "beli sekarang Bayar belakangan". Pola ini dilakukan untuk mengatasi krisis penjualan produk yang dihasilkan oleh industrinya. Politik ini selanjutnya akan membawa keruntuhan sistem ekonomi dan kekacauan politik. Adapun mengapa krisis hutang ini terus membengkak menurut Strahm, karena tiga hal, Pertama, Nilai Import Negara-negara berkembang lebih besar dari nilai eksportnya, sehingga praktis nilai import yang terus membengkak tersebut harus dibiayai dengan kredit luar negeri. Kedua, Anggaran belanja Negara-negara pengutang tersebut sangat besar karena laba yang sangat kecil, sebab laba yang dapat ditarik kembali dan keharusan membayar lisensi pada perusahaan-perusahaan MNCs yang membuka usahanya di negara-negara tersebut. Ketiga, pelarian modal secara illegal oleh orang-orang kaya setempat.

Konteks tersebut selanjutnya akan menimbulkan defisit neraca pembayaran yang harus ditutup oleh hutang luar negeri. Disisi lain bank-bank asing berlomba memberikan kredit dan pinjaman kepada Negara-negara berkembang yang pada akhirnya menyebabkan hutang membengkak karena tagihan yang jatuh tempo dan bunga yang jumlahnya melampaui kredit baru yang akan didapat. Apabila Negara penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya, negara dan bank-bank pemberi kredit akan bertindak bersama-sama dan melapor kepada IMFsebagai badan yang berwenang. Selanjutnya IMF akan hanya memberikan kredit baru kepada negara penghutang untuk membayar hutang berikut bunganya, bila negara tersebut bersedia menerima persyaratan-persyaratan politis yang diajukan. Persyaratan ini dikenal dengan sebutan "kencangkan ikat pinggang" yang lazimnya bermuara kepada kerusuhan sosial. Untuk mengatasi kerusuhan

ini digunakan aparat negara yakni militer. Kerangka seperti inilah yang dipakai membahas permasalahan tulisan ini.

Keinginan Negara-negara kaya, kuat dan besar untuk mempengaruhi Negaranegara kecil, lemah dan miskin sudah berlangsung sejak lama. Pasca Revolusi Industri di Inggris tahun 1800-an telah terbukti betapa negara-negara besar yang kelebihan produksinya melakukan politik perdagangan agar produk-produk industrinya tersebut dapat dipasarkan kenegara-negara lain. Dalam perjalanan sejarahnya, ternyata politik demikian menghasilkan imperialisme, penjajahan dan kolonialisme. Indonesia sejak kemerdekannya pada tahun 1945 sudah dibidik Amerika Serikat agar masuk lingkaran kekuasaannya. Bagaimana cara Negara adikuasa ini mempengaruhi Indonesia dilakukan dengan berbagai metode. Metode yang paling umum adalah dengan memberikan bantuan ekonomi. Berbagai fasilitas-fasilitas yang menggiurkan ditawarkan para elit Washington. Akan tetapi Soekarno yang sangat nasionalistik tidak tergiur dengan tawarantawaran tersebut. Soekarno dengan lantang menolak tawaran-tawaran tersebut dengan idiomnya yang terkenal “go to hell with your aid”. Hingga akhirakhir kekuasaannya, Soekarno terus lantang menolak bantuan-bantuan asing. Soekarno sangat sadar ekses negatif dari hutang luar negeri, ia berpendapat bahwa bantuan luar negeri, teknologi, mesin dan lain-lain instrument yang canggih dari negara-negara kapitalis itu tidak salah. Akan tetapi jangan sampai mengendalikan Indonesia. Indonesia boleh memanfaatkan hal-hal tersebut, apabila sikap mental dan karakter Indonesia sudah kuat, itu dalih mengapa Soekarno mendahulukan pembangunan karakter, politik, bangsa dengan idiomnya “character and nation building”. Dengan gempuran yang terus menerus dari kekuatan kapitalis, khususnya Amerika Serikat bersama-sama orang Indonesia sendiri yang tidak sejalan dengan Soekarno melakukan penggulingan terhadap Soekarno. Soekarno pun jatuh yang akhirnya digantikan dengan Soeharto yang merubah dengan drastis kebijakan ekonomi politik.

Kebijakan ekonomi politik yang ditempuh Soeharto sungguh bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya. Kalau Soekarno sangat anti modal asing dan hutang luar negeri, Soeharto sebaliknya, membuka pintu lebar-lebar untuk modal asing dan hutang luar negeri. Di bawah rezim Soeharto disusun pola ekonomi politik “pembangunan ekonomi”. Pembangunan ekonomi yang titik sentralnya adalah “pertumbuhan”. (Growth, atau GNP/GDP). Ukuran keberhasilannya adalah “presentasi”, semakin tinggi presentasinya semakin baik pertumbuhan ekonominya. PBB telah membuat tolok ukur keberhasilan itu adalah 5% ke atas. Jika GNP/GDP-nya telah mencapai 5% dianggap telah berhasil. (Mulyarto. Tj, 1995). Meskipun tidak dikatakan dengan jelas, sesungguhnya Indonesia telah

mengadopsi model pembangunan yang telah berlaku di negara-negara maju, negara-negara yang sudah industrialized. Suatu model yang banyak ditentang karena tidak menggambarkan atau memperjuangkan yang sesungguhnya. Indonesia berharap, (bermimpi) suatu waktu akan menjadi negara yang industrialized, yang kaya dan kuat seperti negara-negara maju lainnya. Ketergantungan ekonomi Politik Mahbub Ul Haq menggambarkan pola pembangunan seperti itu sebagai model pembangunan palsu (the catching up fallacy). Bagaimana mungkin negara-negara berkembang dengan mengandalkan hutang akan menyamai negara-negara kaya. Haq memberi illustrasi dengan angka pertumbuhan yang palsu. Negara kaya tumbuh dengan 5% tidak akan bisa dikejar dengan negara penghutang yang tumbuh kurang dari 5%. Negara penghutang tersebut akan terus ketinggalan terhadap Negara pemberi kredit. Pendapat seperti ini sesungguhnya sudah cukup membuktikan bahwa negara-negara penghutang akan terus tergantung kepada negara-negara pemberi hutang. Akan tetapi agar jelas dan kwantitatif akan dijabarkan dalam bentuk angka-angka sebagaimana ditulis Siswono Yudohusodo. Siswono Yudohusodo menyatakan bahwa hutang luar negeri RI di akhir pemerintahan Soekarno berjumlah US $. 2.5 milyar di akhir pemerintahan Soeharto US $. 54 milyar di akhir pemerintahan Habbibie US $. 74 milyar dan menjadi US $. 76 milyar di akhir pemerintahan Megawati. Hutang ini belum terhitung hutang swasta yang juga menjadi tanggungan pemerintah. Pada akhir tahun 2004 hutang luar negeri Indonesia keseluruhan adalah US $. 136 milyar. Hutang swasta berarti 136-74 = US $. 62 milyar.

Hutang yang sehat adalah hutang yang semakin lama semakin kecil, namun kasus Indonesia adalah sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena pola pembangunan yang tidak sesuai. Selain itu adalah : (1). Faktor korupsi, (2). Salah kelola, (3). Capital flight, (4). Bunga yang terlalu tinggi, dan (5). Maksud terselubung dari kekuatan adidaya. Menurut penelitian Prof Dr. Jeffrey Winters, Korupsi yang dilakukan bersamasama oleh elit-elit penguasa/birokrasi Indonesia bersama Bank Dunia mencapai sepertiga (33,3%) dari total hutang. Korupsi ini terutama untuk proyek-proyek yang di danai oleh Bank Dunia. Elit-elit dalam dua institusi tersebut melakukan kongkalingkong, pat-pat gulipat atau persekongkolan terhadap proyek yang akan dibangun. Sementara itu menurut ekonomi dari Klemens Johanes Sitanggang (Suara Pembaruan, 21 Mei 2004) kegagalan pemerintah mengelola hutang luar negeri disebabkan ketidakmampuan menghitung kelayakan proyek-proyek berdasarkan parameter yang ditetapkan Organization for Economic Co operation (OECD). Parameter tersebut adalah kelayakan ekonomi, teknik, keuangan, sosial dan distribusi, institusi dan lingkungan.

Faktor lain yang juga membuat hutang luar negeri terus membengkak adalah faktor pelarian uang ke luar negeri. Uang-uang tersebut banyak yang dilarikan kenegara-kenegara yang dianggap aman dan juga ada yang dimasukan dalam perusahaan-perusahaan asing yang dianggap bonafit. Untuk itu Stritua Arif berkomentar: “Penulis sungguh terkejut, tertegun dan terharu tatkala diperlihatkan hasil study yang berkaitan

dengan hutang luar negeri Indonesia. Seorang ekonom muda dari Center For Policy and Implementation Studies (CPIS) menunjukan bahwa kasus Argentina telah terjadi di Indonesia. Orang-orang yang menumpuk harta pribadi di luar negeri melalui pelarian modal dari Indonesia telah meninggalkan beban hutang luar negeri bagi nusa dan bangsa. (Arif. S. 1999 : 114). Karena hutang luar negeri Indonesia tidak semua berbentuk hibah/program yang berbunga tinggi, seperti kredit ekspor dan pinjaman-pinjaman swasta lainnya yang berbunga besar (8 sampai 12 persen) dan jangka waktu pembayaran yang sangat dekat (8 sampai 10 tahun) membuat hutang luar negeri Indonesia terus membengkak.

Di atas semua itu adalah hanya keinginan Negara-negara besar untuk membangkrutkan Indonesia. Seorang eks agen CIA yang sudah pensiun menulis buku yang isinya bagaimana penguasa Amerika Serikat memang sejak dulu sudah melakukan rencana jahat untuk membangkrutkan Indonesia. (Peter Rosler Garcia, Kompas 6 April 2005). Indonesia akhirnya tidak bisa lagi berbuat apa-apa, selain hanya membayar cicilan dan bunga hutang dari hari ke hari bulan ke bulan dan tahun ke tahun sampai waktu yang tidak dapat diprediksi. Yang mempunyai implikasi-implikasi sebagaimana dituturkan oleh Stritua Arif di bawah ini: Dalam situasi sekarang, kita harus terus meminjam dari luar negeri untuk membiayai pembayaran kepada pihak luar negeri. Kita terus membayar cicilan hutang luar negeri, bunga hutang luar negeri dan keuntungan investasi asing yang ditransfer ke luar negeri. Dalam situasi seperti ini, kita sebetulnya berada dalam suatu ekonomi tutup lubang gali lubang. Sementara itu kalau kita lihat kemana penerimaan bersih devisa yang kita terima (setelah memperhitungkan import barang dan penerimaan jasa-jasa). Maka kita lihat bahwa secara pukul rata hamper seluruhnya telah digunakan untuk pembayaran kepada pihak-pihak asing. Dalam situasi seperti ini, kita sebetulnya sadar atau tidak sadar bekerja untuk pihak asing. Penerimaan ekonomi luar negeri Indonesia dapat dikatakan adalah dari asing untuk asing dan kita adalah kuli pihak asing. Ini sungguh merupakan sesuatu yang menyedihkan sebagai bangsa yang berdaulat dan politis merdeka. (Arief S, 1987 :47)

Stritua Arif sebagaimana pakar-pakar lain telah menghitung bahwa hutang luar negeri itu sesungguhnya bukan hutang untuk membantu Indonesia menyelesaikan kemelut perekonomiannya, tetapi malah sebaliknya membawa hutang yang diberikan tersebut kembali kepada mereka. Dari mereka untuk keuntungan mereka. Bagaimana ia sampai kepada pernyataan demikian dapat dilihat dan dibuktikan. Karena pemberian hutang itu mempunyai syarat-syarat tertentu, dampak selanjutnya adalah terganggunya sistem perekonomian nasional. Para kreditor telah membuat beberapa syarat yang dalam jangka panjang membuat perekonomian nasional hancur. Syarat-syarat paling tidak karena dua hal : Faktor bilateral dan factor multilateral. Dalam factor bilateral adalah adanya permintaan-permintaan pemberi hutang, seperti tenaga ahli, barang-barang/jasa, pendistribusian dan pemasangan oleh mereka sendiri, yang menurut Stritua Arif adalah dari mereka untuk mereka (lihat table di atas). Khusus untuk hutang proyek hal ini sangat jelas. Barang-barang atau jasa yang mereka berikan telah dimark up kali. Sedangkan faktor multilateral adalah tekanan-tekanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mengatur dan menyalurkan hutang tersebut, seperti IMF. Bank Dunia, WTO. Sebelum sampai kepada pembahasan yang lebih seksama bagaimana factor-faktor ini merusak tatanan perekonomian nasional ada baiknya disimak kutipan di bawah ini:

"Pembayaran cicilan hutang luar negeri, yang sebagian besar sekarang sudah tidak lagi bersifat concessional, beserta bunga hutang luar negeri ini telah mengambil begitu banyak komponen pengeluaran agregat riil didalam negeri sehingga cukup menimbulkan dampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dapatkah menerima proposisi bahwa demi ketaatan membayar cicilan hutang luar negeri beserta bunganya, kita harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. (Arif S, 1987:48-49). Sebagai ilustrasi betapa beratnya beban hutang luar negeri karena cicilan dan bunganya cukup besar dilihat dalam angka-angka berikut: 1] Cicilan dan bunga hutang luar negeri 37%; 2] Gaji dan Pensiun 11%; 3] Subsidi BBM 16%; 4] Subsidi otonomi daerah 8%; 5] Subsidi pangan dan obat 15% Lain-lain 13%.

Tidak begitu berbeda dengan perhitungan INFID (2001). Menurut lembaga ini, pembayaran bunga atas hutang pada 2001 diperkirakan sekitar 35% dari pengeluaran pemerintah pusat. Sebagai perbandingan, pengeluaran pembangunan yang sangat dibutuhkan terhitung hanya sekitar17,5% dari pengeluaran dalam negeri pemerintah, dan lebih dari separuh dari jumlah ini berasal dari proyek pembangunan yang didanai donor. Pengeluaran sosial juga mengalami penurunan tajam, sekitar 40% secara riil di bawah pengeluaran tahun 1995/1996. Dengan kondisi keuangan seperti ini tidak mungkin akan berbuat apa-apa. Pendapatan dalam negeri habis hanya membayar cicilan dan bunga hutang yang dari waktu ke waktu terus bertambah. Sinyalemen ini dapat dianalogikan dengan penghasilan seseorang pekerja yang gajinya 40% dipotong untuk membayar cicilan dan bunga hutang dari para rentenir. Bagaimana mungkin sang pekerja ini dapat mengembangkan dirinya. Ia akan hidup hanya dari gali hutang tutup hutang.

Sisi lain yang juga membuat hutang luar negeri semakin merusak perekonomian nasional adalah masalah proyek-proyek yang didanai dengan hutang tersebut. Banyak kalangan mempertanyakan efisiensi dari proyek-proyek pemerintah yang dibiayai oleh hutang luar negeri, misalnya : proyek-proyek tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh negara-negara pemberi hutang. Dalam kebanyakan kasus, negara calon pemberi hutang mengharuskan penggunaan komponen-komponen yang berasal dari negeranya. Hal ini mengakibatkan kemencengan atau distorsi yang memungkinkan terjadinya inefisiency proyek-proyek tersebut. Proyek-proyek pinjaman luar negeri tersebut biasanya mengharuskan adanya komponen rupiah

yang berasal dari angaran pemerintah. Akibat mekanisme seperti tersebut diatas, penentuan prioritas proyek-proyek dan alokasi dana pemerintah sendiri ikut ditentukan berdasarkan agenda negara pemberi hutang. Ironisnya lagi proyekproyek ini banyak yang dimark up bahkan fiktif.

Krisis hutang luar negeri mulai terasa pada pertengahan 1980-an. Pada tahuntahun tersebut Indonesia telah mulai membayar cicilan-cicilan pokok yang sudah jatuh tempo. Cicilan-cicilan ini terutama dari kredit-kredit yang bersifat komersil dan pinjaman swasta yang jangka waktunya singkat dan bunganya cukup besar. Di sisi lain pendapatan negara belum memadai untuk membayar karena proyek-proyek yang diharapkan akan menghasilkan devisa jauh dari harapan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, hutang itu 33% dikorup, ditambah lagi dengan pengelolaan yang tidak professional plus pemaksaan proyek oleh Negara-negara kreditur, sangat jelas tidak akan memperbaiki perekonomian Indonesia. Dikelola dengan professional sekalipun, tanpa korupsi dan tanpa intervensi negara kreditur belum tentu berhasil. Apalagi kalau dikorup, tidak profesional dan diintervensi, sudah pasti ambruk. Pertengahan 1980-an, yakni ketika Indonesia mulai memasuki fase Pelita IV adalah puncak keambrukan ini.

Pemerintah Soeharto, lewat teknokrat-teknokratnya telah gagal membawa negara sebagai motor pembangunan ekonomi. Suatu hal yang sesungguhnya tidak begitu mengejutkan. Sejak awal sudah banyak yang memprediksi bahwa pembangunan ekonomi yang dibiayai hutang sangat riskan untuk gagal. Negara-negara yang melakukan pembangunan ekonomi dengan focus pertumbuhan adalah negara yang swastanya menjadi actor utama pembangunan. Bukan negara, Amerika serikat yag sukses melakukan pertumbuhan ekonomi adalah negara yang bertumpu pada kekuatan swastanya. Negara hanya terbatas sebagai penjaga keamanan, penegak hukum dan otoritas moneter. Singkatnya yang melaksanakan pembangunan itu di negara-negara yang sukses adalah swastanya bukan negara. Kebalikan dengan Indonesia. Setelah teknokrat-teknokrat Orde Baru melihat kegagalan tersebut, mereka mulai sadar bahwa peran swasta harus diutamakan, sebagaimana di negara-negara kapitalis. Sejak ini dimulailah gebrakan. Inti gebrakannya adalah “liberalisasi”. Pembangunan ekonomi akan diberikan pada swasta. Muncullah berbagai kebijakan, seperti debirokratisasi, deregulasi, gebrakan Sumarlin dan lain-lain gebrakan yang mencoba mendorong swasta menjadi motor ekonomi. Akan tetapi hal yang dilupakan oleh para teknokrat-teknokrat ekonomi ini adalah faktor-faktor luar ekonom, seperti faktor politik, kelembagaan/institusi dan atau khususnya faktor perilaku. Konsep ekonominya dibangun, namun tidak pada politik, institusi, dan perilakunya. Suatu hal yang pasti akan berantakan. Seakan akan liberal tapi tidak liberal. Seakan akan demokratis tapi tidak demokratis. Ekonominya liberal tapi dilaksanakannya tidak sesuai dengan pranata-pranata liberalisasi, yakni suatu sistem politik yang demokratis dan keunggulan individu-individu yang handal (individualisme). Indonesia dalam sejarah politiknya bukanlah negara yang demokrasinya seperti demokrasi di Amerika Serikat. Dalam konteks ilmu politik, system politik Indonesia sering dikonotasikan sebagai politik yang otoriter, bukan yang demokratis. Begitu pula sifat masyarakatnya bukanlah masyarakat yang egalitarian, tetapi sebaliknya masih berorientasi vertikal, feodal, dan kolektivsm/tidak individualism. Dengan gebrakan-gebrakan ekonomi pertengahan 1980-an tersebut para pengusaha-pengusaha swasta berlomba-lomba menghutang ke luar negeri. Dengan tuntutan sekilas dengan pemerasan birokrat terhadap para pengusaha-pengusaha yang meminjam hutang ke luar negeri ini berjalanlah liberalisasi dengan keanehankeanehannya. Meminjam Peter Evans yang terjadi kemudian adalah apa yang disebut persekongkolan segitiga, triple alliance, antar negara, pengusaha nasional dan modal asing/ MNCs.

Dalam persekutuan segitiga ini rakyat tidak mendapat tempat. Rakyat hanya korban dari ulah ketiga actor segitiga tersebut. Tugas negara adalah menjaga harmonisasi ketiga actor dan menekan rakyat untuk tetap tunduk pada persekongkolan segitiga. Rakyat yang melawan ditindas. Ditindas melalui aparat-aparat negara, seperti polisi, tentara dan sipil-sipil yang mendongak pada persekongkolan segitiga tersebut.

Indonesia Dalam Globalisasi Dan Pasar Bebas Sebagai Relitas dan Modal Gerakan

Dalam peradapan baru dunia global, kemajuan tekhnologi dan informasi menjadi infrastruktur penopang bergeraknya globalisasi dan liberalisasi ekonomi (baca neoliberal). Sebagai contohnya keberadaan pasar maya yang merupakan sistem dan tatanan baru bagi keuangan internasional yang kemudian banyak disebut dengan disebut dengan pasar modal dan pasar uang. Kemajuan elektronik global, membuat para pemegang modal diberbagai sektor seperti keuangan, perbankan, investasi langsung dan lain-lain, dengan mudahnya dapat memindahkan modalnya dalam jumlah besar dari negara yang lain ke negara yang lainnya hanya dengan memencet mouse kompiuter dengan jaringan internet yang terakses langsung disemua negara di dunia. Sehingga dengan mudahnya mereka malakukan intervensi terhadap perekonomian satu negara bahkan satu kawasan. Karena pergerakan aliran lalu lintas modal global sangat mempengaruhi pasar modal dalam satu negara. Selain itu terpakunya standar pertukaran internasional hanya pada dollar AS, mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi perputaran dan pergerakan pasar uang global.

Sistem dunia akan terus bergerak dan mempunyai kecenderungan untuk bergerak linier yang akan berproses secara kompleks serta akan selalu memunculkan kontradiktif atau pertentangan. Sistem dunia juga akan merasuki semua aspek kehidupan manusia dan negara, sehingga ada kecenderunagn suatu negara tak terkecuali Indonesia akan kehilangan sebagian kekuatan ekonominya. Dilain pihak globalisasi

akan mendorong kekuatan-kekuatan lokal (baca kearifan lokal) untuk mampu bertahan dalam dunia yang menglobal ini.

Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, "Globalisasi tidak hanya berkaitan dengan sistem-sistem besar, seperti tatanan keuangan dunia, globalisasi bukan sekedar apa yang ada diluar sana terpisah, dan jauh dari orang perorang. Ia juga merupakan fenomena di sini yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan kita yang intim dan pribadi. Perdebatan mengenai nilai-nilai keluarga yang tengah berlangsung di banyak negara misalnya, mungkin terkesan sangat jauh dari pengaruh globalisasi. Tidak demikian halnya, dibanyak belahan dunia, sistem keluarga tradisional kian berubah atau terdesak khususnya setelah kaum perempuan menuntut kesetaraan yang lebih besar. Sepanjang yang kita ketahui dari catatan sejarah, belum pernah ada masyarakat yang kaum perempuannya hampir setara dengan pria. Ini sunguh merupakan revolusi global dalam kehidupan sehari-hari yang konsekwensinya dirasakan diseluruh dunia , dari wilayah kerja hingga wilayah politik". (Anthony Giddens : 2001)

Keberadaan Indonesia tidak lepas dari pergerakan di luar apalagi dalam dunia yang menglobal. Dinamika perpolitikan internasional yang akan mendorong semakin menguatnya trend global kedepan dan trend ini tentunya akan terus berubah mengikuti irama pasar. Sistem dunia yang didukung sepenuhnya negara-negara di dunia pertama, sehingga mereka memainkan peran setrategis setiap pengambilan kebijakan mengenai aturan-aturan internasional melalui lembaga-lembaga tertentu. Sebagai contoh adalah adanya ISO (international Standart Organisation) yang menjadi salah satu aturan internasional dalam perdaganan barang lintas negara. Cara pandang penetapan aturan dengan mengunakan cara pandang barat, yang sudah barang tentu berbeda dengan cara pandang, kondisi dan potensi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ketiga. Aturan seperti ini sudah barang tentu akan mengalalahkan daya saing negara-negara ketiga, karena aturan ISO memiliki kecenderungan untuk menghadapkan pada hokum besi mekanisme pasar.

Mekanisme pasar sejauh membuka kesempatan kepada semua pihak untuk berinteraksi secara setara dapat di terima. Tetapi dalam sistem neoliberal seperti yang sekarang kita temui ini, dijumpai sebuah kondisi dimana prinsip kesetaraan tidak ada, atau terjadi interaksi yang asimetris. Prinsip perdagangan bebas yang dipandu dengan sistem monetarisme hampir-hampir tidak menyisakan ruang bagi ekonomi kecil untuk survive. Para pemilik modal besarlah yang memiliki kesempatan emas untuk bermain dalam sistem ini.

Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas dengan diresmikannya AFTA, tetapi jika di analisis lebih dalam Indonesia tidak akan dapat berbuat banyak dihadapan modal-modal asing raksasa. Kita dapat membayangkan bagaimana seandainya sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak akan di kuasai oleh segelintir individu yang dengan laluasa akan dapat memainkannya untuk kepentingan pribadinya. Negara yang seharusnya mengabdi demi hajad hidup orang banyak telah di pereteli kekuasaanya oleh pasar, sehingga tidak lebih hanya akan bertindak sebagai agen pasar berhada[an dengan masyarakat sendiri.

Dengan agenda payung privatisasi misalnya kita telah dan akan melihat bagaimana banyak BUMN di privatisasi demi memenuhi budget pemerintah yang telah mengalami defisit. Yang menarik adalah privatisasi itu terjadi atas desakan IMF yang merupakan kepanjangan tangan negara-negara core dalam moneter dunia. Ini secara gamblang menjelaskan bagaimana pemerintah (baca: negara) tidak berdaya di hadapan sistem pasar yang telah mapan (neoliberalisme). Yang sangat ironis, ditengah kencangnya gerak maju neoliberalisme justru tidak ada struktur lokal yang mampu menghadapinya. Struktur lokal telah terfragmentasi sedemikian rupa sehinga neoliberalisme dapat menjebol benteng Indonesia tanpa perlawanan sama sekali. Dalam hubungan antar negara bangsa, pemerintah dan rakyat yang sama sekali tidak saling terkait kita menyaksikan bahwa Indonesia telah benar-benar terkunci dalam gerak sejarah. Jika hari ini adalah lima puluh tahun yang silam dan kita telah memiliki keawasan seperti hari ini, niscaya kita akan memilih Mao Tse Tung atau Tan Malaka yang memilih kemerdekaan sepenuh-penuhnya, bukan negociated independence seperti yang kita alami. Seandainya kita memiliki kesempatan untuk berbenah diri ke dalam tanpa harus mengintegrasikan diri dalam interaksi global yang asimetris ini, maka politik isolasi mungkin adalah pilihannya. Resikonya adalah seperti apa yang telah di alami Cina (RRC), selama beberapa dekade sibuk berbenah diri melakukan reformasi struktur internal dan kemudian dalam hitungan dekade kelima telah mampu bersaing dengan hegemon dunia. Tentu Cina memiliki kekhasan yang tidak bisa disamakan dengan Indonesia, tetapi paling tidak ia merupakan gambaran bahwa there in (an) Alternative (TIA) selain blue-print AS yang harus di ikuti oleh negara pery-pery.

Konsolidasi politik negara-negara Eropa dan Amerika yang banyak menganut demokrasi liberal pasca perang dunia ke-2, untuk menciptakan format baru penjajahan dari kolonialisme dan imperalisme lama. Konsolidasi yang menghasilkan adanya pertukaran politik global sehingga memunculkan imperium global yag diikuti dengan perkembangan diplomasi multerateral dan regulasi internasional dan pembentukan instritusi-institusi politik global, seperti PBB dan institusi regional seperti Uni Eropa, NAFTA dan lain-lain. Institusi politik internasional inilah yang akan menciptakan aturan main percaturan politik global berskala internasional khususnya yang menyangkut isu-isu perdagangan, perang dan perdamaian. Perkembangan politik internasional yang ditopang dengan aturan internasional tersebut akan menghilangkan sekat-sekat batas negara sehingga akan memunculkan rezim internasional yang mempunyai pengaruh cukup signifikan dan memiliki otoritas untuk menentukan masa depan negara-negara yang lain. Perkembangan

internasionalisasi dan transnasional politik yang mempunyai kecenderungan hilangnya peran negara atas warganya, dan kecenderungan untuk membangun satu pemerintahan rezim global yang berlapis dengan kekuasaan mayanya, tetapi mampu mengerakkan struktur sosial dan politik dari sebuah negara. Konsekwensi dari politik transnasional ini adalah miunculnya hukum-hukum internasional yang kosmopolitan. Posisi Indonesia yang merupakan bagian dari dunia, tidak akan mungkin lagi terhindar dari proses internasionalisasi politik tersebut apalagi dengan kondisi geo-geografis Indonesia yang strategis. Indonesia akan kehilangan banyak peran dan hanya menjadi bagian kecil dalam pentas dunia. Pemerintah Indonesia dan negara-negara ketiga lainnya akan semakin kehilangan kontrol atas arus informasi, teknologi, penyakit, migrasi, senjata, dan transaksi finansial baik legal maupun ilegal yang melintasi batas-batas wilayahnya. Aktor non-negara, mulai dari kalangan bisnis hingga organisasi-organisasi non-profit akan semakin memainkan peranan penting dalam lingkup nasional maupun internasional. Kualitas pemerintahan nasional dan internasional akan ditentukan oleh tingkat keberhasilan negara dan masyarakat dalam mengatasi kekuatan-kekuatan global di atas.

Oleh karena itu, kita perlu melihat Indonesia dalam gambar dan ruang lebih besar lagi yaitu dunia. Dengan melihat Indonesia sebagai bagian dari sebuah sistem dunia yang sedang berjalan, kita dapat mengenali relasi apa yang sedang terjadi dalam sebuah peristiwa. Dengan mengenali relasinya kita dapat melihat pola-pola yang di gunakan oleh sistem tersebut untuk beroperasi, katakanlah kita perlu melihat dengan perspektif sistem dunia ini, lalu bagaimana kita menghubungkan perubahan-perubahan internal Indonesia dengan sistem dunia ini ?

Adalah Emanuel Wellerstain dan teman-temannya di Fernan Broudell Center Binghamton University yang mencoba memperkenalkan perspektif sistem dunia ini sebagai alat baca. Dalam pandangan para world sistemizer dunia ini terbagi ke dalam tiga wilayah kerja (internasional divisiopn of labour) yaitu: 1] *Core*, terdiri dari negara yang memiliki proses-proses produksi yang cangih, didaerah ini borjuis indigenous memiliki industri otonom yang memproduksi komoditas manufaktur untuk pasar dunia. Pola-pola kontrol buruh yang dominan adalah wage labour dan self-employment, negara-negara core biasanya dengan strong state machinesries. Negara core pada umumnya Northwest Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Australia; 2] *Periferi*, terdiri dari negara-negara yang memiliki proses produksi yang sederhana. Biasanya produk-produk negara periferi ikut menyumbang proses akumulasi kapital dinegara-negara core karena dagang memerlukan pertukaran-pertukaran yang tidak seimbang. Kontrol buruh juga dijalankan dengan kekerasan, dengan struktur negara yang lemah. Negara periferi menurut Wallerstain's tidak cukup kuat untuk mengintervensi lajunya komoditas, kapital dan buruh antar zona ini denfgan zona yang lainnya dalam system dunia. Tetapi cukup kuat untuk memfasilitasi flows yang sama; 3] *Semi Periferi*, mempunyai kompleksitas kegiatan ekonomi, modus kontrol buruh, mesin negara yang kuat dan sebagainya. Fungsi politik periferi adalah sebagai buffer zone antara dua kekuatan yang saling berlawanan. Secara historis, semi periferi terdiri dari negara-negara yang sedang naik atau turun dalam system dunia.

Transformasi Global

Transformasi global terkait erat dengan globalisasi. Prose inilah yang mendorong transformasi dalam aras global. Karenanya kita harus memahami logika dan makna globalisasi itu sendiri. Globalisasi memiliki banyak makna. Namun, pengertian paling memadahi globalisasi terkait dengan perkembangan kapitalisme. Dapat dikatakan ketika kita menyebut globalisasi, maka yang dimaksud tidak lain globalisasi kapitalisme. Inti dan jatung kapitalisme hanya satu, yaitu akumulasi modal. Kepentingan akumulasi modalnya inilah yang mendorong globalisasi. Menurut Herry Priyono, dalam dataran empirik, globalisasi berisi proses kaitan yang semakin erat dari hampir semua aspek kehidupan, suatu gejala yang muncul dari interaksi yang semakin intensif dalam perdagangan, transaksi finansial, media, dan teknologi. Lonjakan terbesar volume perdagangan mulai terjadi di paruh dasawarsa 1970-an. Antara 1973 dan 1995, porsi negara sedang berkembang dalam perdagangan global melonjak dari 6,6 persen menjadi 24,7 persen. Dari paruh dekade 1970-an sampai 1996, perdagangan valuta asing melonjak lebih dari seribu kali, dari 1 milyar menjadi 1,2 trilyun dollar AS per hari (Crafts 2000). Statistik ini bisa diperpanjang lagi.

Apa yang terlihat dalam statistik sederhana itu, menurutnya, bukanlah sebatas ramainya lalu-lintas barang dan uang, melainkan lonjakan drastis interaksi cara hidup, rasa, pikir, dan tindakan. Dengan itu berlangsung pula pergeseran arti 'masyarakat' (*society).* 'Masyarakat' bukan lagi sebatas negara-bangsa (*state-nation)*, tapi juga seluruh dunia (*the globe)*. Pergeseran ini tak hanya menyangkut tata ontologis (sosio-faktual) melainkan juga tata epistemologis (cara pandang). Artinya, globalisasi bukan hanya kaitan integral antara berbagai tindakan kita (misalnya, transaksi finansial), tetapi juga cara baru memandang persoalan. Ringkasnya, seluruh dunia merupakan unit tindakan dan pemikiran.

Dalan kaitan globalisasi dan pertanyaan tentang siapa dan apa, menurutnya terdapat tiga hal pokok. *Pertama*, di jantung globalisasi yang berlangsung dewasa ini adalah berbagai praktik bisnis transnasional (perdagangan, keuangan, media, perbankan, transportansi, jasa, dan sebagainya). *Kedua*, aktor utama ialah para pelaku bisnis yang terutama terkonsentrasi di berbagai perusahaan transnasional. *Ketiga*, corak globalisasi yang berlangsung dewasa ini hanya bisa berlanjut dengan perluasan kultur-ideologi konsumerisme.

Arus gerak dan gerak struktural akumulasi modal tersebut secara niscaya mendorong berbagai transformasi baik dalam aspek kelembegaan maupun aspek kesadaran dan perilaku manusia. Dalam aspek kesadaran dan perilaku inti transformasi itu menuju ke kultur konsumeresme. Kultur inilah, dan dengan demikian, masyarakat konsumeristik, yang akan mendorong putaran proses produksi terus berjalan. Dalam aspek kelembagaan, akumulasi modal membutuhkan kerangka operasional yang efektif, efisien, dan aman. Kebutuhan akan kerangka inilah yang melahirkan transformasi kelembagaan global. Transformasi ini bukan hanya terjadi dalam kelembagaan ekonomi, namun juga politik, budaya, dan sosial.

Berbagai kelembagaan yang tidak sesuai dengan kepentingan akumulasio modal global akan diterjang oleh transformasi globalisasi. Transformasi inilah yang mirip Tsunami. Dia menabrak menerjang siapapun. Tanpa ampun dan pilih-pilih. Rezim yang *emoh* untuk kooperatif dalam transformasi ini akan disingkirkan. Rezim Orba adalah salah satu contoh yang enggan untuk mengikuti dinamika transformasi global kapitalisme. Begitu juga dengan Afghanistan, Irak, dan mungkin sebentar lagi Iran, Korea Utara, dan negara2 lain yang melawan dominasi global.

Untuk menghadapi, atau menggunakan strategi *ngeli* dari gelombang Tsunami globalisasi, kita membutuhkan pemahaman terhadap karakter transformasinya dalam berbagai dataran. Dalam dataran politik, transformasi globalnya mengarah ke demokrai liberal, demokrasi legal-formal, atau prosedural. Berbagai program disorongkan untuk membangun kiblat tunggal politik dunia: demokrasi liberal. Hakekat demokrasi ini adalah memaknai rakyat sebatas legitimasi kekuasaan politik melalui panggung pemilu. Kebijakan pemerintah tidaklah identik dengan kadaulatan atau kepentingan rakyat. Kedaulatan rakyat dicukupkan dalam kontestasi politik formal pemilu. Namun, jika dikritisi lebih lanjut, ternyata transformasi tersebut bahkan jauh lebih radikal. Berbagai lembaga politik yang berfungsi mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingan rakyat secara sistematik dibonsai dengan berbagai lembaga ekonomi nasional dan internasional. WTO, IMF, WB, dan TNc's, merupakan lembaga inti yang saat ini mengambil alih proses pengambilan keputusan publik. Matinya negara-bangsa berakar dari realitas empiris ini.

Dalam bidang ekonomi, transformasi global tersebut mencakup liberalisasi perdagangan nyaris tanpa batas. Berbagai aturan yang membatasi batas investasi, proteksi, atau campur tangan negara dilucuti. Swastanisasi, privatisasi, pencabutan subsidi, dan pengendalian secara ketat gerakan buruh dan massa merupakan karakter lain dari transformasi ekonomi global. Semua negara didorong untuk meliberalisasikan ekonominya sehingga tercapai proses integrasi global dalam struktur ekonomi pasar. Dengan karakter semacam itu, maka komersialisasi sumber daya alam pun tidak lagi mengherankan. Undang-undang SDA, UU Paten, UU Desain Industri, maupun UU organisme hidup, merupakan bentuk-bentuk transformasi global.

Proses di atas adalah logika dan struktur globalisasi. Indonesia, atau masyarakat nahdliyyin adalah salah satu target empuk globalisasi. Yang menarik bagi kekuatan akumulasi kapital bagi negara seperti Indonesia adalah melimpahnya sumber daya alam, tenaga kerja yang murah, dan pasar yang sangat potensial. Mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum marjinal, dan mayoritas kaum marjinal adalah warga NU, maka korban paling potensial proses transformasi global adalah masyarakat nahdliyyin. Ketergantungan petani semakin kuat terhadap modal dan teknologi, gaji buruh kian ditekan dan kebebasan geraknya semakin dibelenggu, beaya pendidikan semakin mahal sehingga kapasitas masyarakat terhadap akses pendidikan kian lemah, berbagai sumber daya alam secara massif dikomersialisasikan dan eksploitasi hingga mengancam kelangsungan hidup masyarakat nahdliyyin.

KONSEP DAN ARAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tidak ada sebuah pengertian maupun model tunggal pemberdayaan. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Pemberdayaan (masyarakat desa) dapat difahami dengan beberapa cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah **obyek** penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai **subyek** (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Kedua, pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan (*needs)* masyarakat. Banyak orang berargumen bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang utopis (*ngayawara*) seperti demokrasi, desentralisasi, *good governance*, otonomi daerah,

masyarakat sipil, dan seterusnya. “Apa betul masyarakat desa butuh demokrasi dan otonomi desa? Penulis yakin betul, masyarakat itu hanya butuh pemenuhan sandang, pangan dan papan (SPP). Ini yang paling dasar. Tidak ada gunanya bicara demokrasi kalau rakyat masih miskin”, demikian tutur seseorang yang mengaku sering berinteraksi dengan warga desa. Pendapat ini masuk akal, tetapi sangat dangkal. Mungkin kebutuhan SPP itu akan selesai kalau terdapat uang yang banyak. Tetapi persoalannya sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu sangat langka (*scarcity*) dan terbatas (*constrain*). Masyarakat tidak mudah bisa akses pada sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan SPP. Karena itu, pemberdayaan adalah sebuah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah-tengah *scarcity* dan *constrain* sumberdaya. Bagaimanapun juga berbagai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya terbatas dan langka, melainkan ada problem struktural (ketimpangan, eksploitasi, dominasi, hegemoni, dll) yang menimbulkan pembagian sumberdaya secara tidak merata. Dari sisi negara, dibutuhkan kebijakan dan program yang memadai, canggih, *pro-poor* untuk mengelola sumberdaya yang terbatas itu. Dari sisi masyarakat, seperti akan penulis elaborasi kemudian, membutuhkan partisipasi (voice, akses, *ownership* dan kontrol) dalam proses kebijakan dan pengelolaan sumberdaya.

Ketiga, pemberdayaan terbentang dari **proses** sampai **visi ideal**. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan *voice*, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar. Hadirnya pihak luar (pemerintah, LSM, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi ruang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.

Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Tabel 7 menampilkan pemetaan pemberdayaan dari dua sisi: dimensi (yang terbagi menjadi psikologis dan struktural) dan level (personal dan masyarakat). Pemberdayaan **psikologis-personal** berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri individu. Pemberdayaan **struktural-personal** berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya. Pemberdayaan **psikologis-masyarakat** berarti menumbuhkan rasa memiliki, gotong rotong, *mutual trust*, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat. Sedangkan pemberdayaan **struktural-masyarakat** berarti mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Penulis menganggap pemberdayaan dari sisi struktural-masyarakat merupakan arena pemberdayaan yang paling krusial. Mengapa? Penulis yakin betul bahwa pemberdayaan tidak bisa hanya diletakkan pada kemampuan dan mental diri individu, tetapi harus diletakkan pada konteks relasi kekuasaan yang lebih besar, dimana setiap individu berada di dalamnya. Mengikuti pendapat Margot Breton (1994), realitas obyektif pemberdayaan merujuk pada kondisi struktural yang mempengaruhi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya di dalam masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa realitas subyektif perubahan pada level individu (persepsi, kesadaran dan pencerahan), memang penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil obyektif pemberdayaan: perubahan kondisi sosial. “Setiap individu tidak bisa mengembangkan kamampuan dirinya karena dalam masyarakat terjadi pembagian kerja yang semu, relasi yang subordinatif, dan ketimpangan sosial”, demikian tulis Heller (1994: 185). Bahkan James Herrick (1995) menegaskan bahwa pemberdayaan yang menekankan pada pencerahan dan emansipasi individu tidak cukup memadai memfasilitas pengembangan kondisi sosial alternatif.

Kelima, penulis membuat tipologi PMD berdasarkan arena (pemerintahan dan pembangunan) serta aktor (negara dan masyarakat) yang diletakkan dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi desa. Tipologi itu tertulis dalam bagan 1. Kuadran I (pemerintahan dan negara) pada intinya hendak membawa negara lebih dekat ke masyarakat desa, dengan bingkai desentralisasi (otonomi) desa, demokratisasi desa, *good governance* desa dan *capacity building* pemerintahan desa. Kuadran II (negara dan pembangunan) berbicara tentang peran negara dalam pembangunan dan pelalayanan publik. Fokusnya adalah perubahan haluan pembangunan yang *top down* menuju *bottom up,* membuat pelayanan publik lebih berkualitas dan semakin dekat dengan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Kudran III (pemerintahan dan masyarakat desa) hendak mempromosikan partisipasi masyarakat dalam konteks pemerintahan desa, termasuk penguatan BPD sebagai aktor masyarakat politik di desa. BPD diharapkan menjadi *intermediary* antara masyarakat dengan pemerintah desa yang mampu bekerja secara *legitimate*, partisipatif, dan bertanggungjawab. Kuadran IV (pembangunan dan masyarakat desa) terfokus pada *civil society* maupun

pemberdayaan modal sosial dan institusi lokal, yang keduanya sebagai basis partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Tipologi bagan 5 tidak dimaksudkan untuk membuat isu-isu pemberdayaan terkotak-kotak, melainkan semua kuadran tersebut harus dikembangkan secara sinergis dan simultan. Tetapi penulis juga yakin bahwa pemberdayaan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan harus ditopang secara kuat oleh kuadran IV (pembangunan dan masyarakat desa). Kuadran IV adalah pilar utama pemberdayaan yang akan memperkuat agenda pembaharuan pemerintahan dan pembangunan di level desa. Penulis juga yakin bahwa tipologi itu sangat berguna sebagai basis orientasi untuk kajian-kajian keilmuan, pengembangan kurikulum dan referensi bagi kebijakan pemerintah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

Tugas-tugas Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati.

Konsep pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa “kecil itu indah”, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Kalau konsep pembinaan cenderung mengabaikan prinsip kearifan semua orang itu. Dalam konteks pemberdayaan, semua unsur (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama. Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa menganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan bersama-sama, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik. Oleh karena itu, dalam hal pemberdayaan, tidak dikenal unsur yang lebih kuat memberdayakan terhadap unsur yang lebih lemah untuk diberdayakan. Unsur-unsur yang lebih kuat hanya memainkan peran sebagai pembantu, pendamping atau fasilitator, yang memudahkan unsur-unsur yang lemah memberdayakan dirinya sendiri.

Pada dasarnya “orang luar” jangan sampai berperan sebagai “pembina” atau “penyuluh”, melainkan sebagai “fasilitator” terhadap pemberdayaan masyarakat. Fasilitator itu adalah pendamping, yang bertugas memudahkan, mendorong, dan memfasilitasi kelompok sosial dalam rangka memberdayakan dirinya. Tugas-tugas itu dimainkan mulai dari analisis masalah, pengorganisasian, fasilitasi, asistensi, dan advokasi kebijakan.

Untuk memainkan peran-peran dalam pekerjaan PMD, para pekerja/fasilitator PMD harus profesional, memiliki sejumlah kemampuan dan keterampilan. Mereka harus kompeten, punya kemampuan dalam memahami teori secara holistik dan kritis, bertindak praktis, membuat refleksi dan praksis. Esensi praksis adalah bahwa orang dilibatkan dalam siklus bekerja, belajar, dan refleksi kritis. Ini adalah proses dimana teori dan praktik dibangun pada saat yang sama. Praksis lebih dari sekadar tindakan sederhana, tetapi ia mencakup pemahaman, belajar dan membangun teori. Para pekerja PMD tidak hanya butuh “belajar” keterampilan, tetapi juga “mengembangkan” keterampilan itu. Yang perlu dikembangkan adalah: kemampuan analisis, kesadaran kritis, pengalaman, belajar dari pihak lain, dan intuisi.

Karena alasan ini maka fokus studi ini adalah tentang pemberdayaan—sekalipun di sana masih tidak ada kebenaran mutlak mengenai apa terdapat pemberdayaan. Pendekatan yang dipakai dalam bagian empiris studi itu terutama diilhami oleh karya Freire, Zimmerman, Rappaport, Wallerstein, Rissel, Chavis, dan Minkler *et al*. Alat dan indikator pengukuran dikembangkan terutama dengan referensi pada Zimmerman dan Rappaport, yang juga penting dalam pengertian pemberdayaan sebagai sebuah proses yang terdiri dari aspek psikologi dan aspek masyarakat, dua-duanya. Penyesuaian pemberdayaan terhadap pendidikan kesehatan dan peningkatan kesehatan bersandar terutama pada karya Wallerstein. Model pemberdayaan dan tahap-tahap pengembanganya didasarkan pada Rissel, pengakuan rasa masyarakat sebagai sebuah katalis pemberdayaan pada Chavis, dan penerapan metodologi Freire dalam *settings* pemeliharaan kesehatan pada Minkler *et al*.

Definisi Zimmerman dan dan Rappaport tentang pemberdayaan dipilih sebagai dasar mendefinisikan pemberdayaan dalam studi ini. Definisi Zimmerman dan Rappaport kemudian dilengkapi oleh karakteristik pemberdayaan yang dikemukakan oleh beberapa pengarang lain. Menurut Zimmerman dan Rappaport *pemberdayaan adalah sebuah konsepsi yang menghubungkan kekuatan dan kompetensi individu,* ***natural helping systems****, dan perilaku proaktif terhadap permasalahan kebijakan sosial dan*

perubahan sosial. *Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengan proses itu individu memperoleh penguasaan dan kontrol atas hidup mereka sendiri dan partisipasi demokratis dalam kehidupan masyarakat mereka*. Zimmerman dan Rappaport membagi pemberdayaan pada tingkat *psikologi* dan *masyarakat*.

Pemberdayaan psikologi meliputi dimensi kepribadian (*personality dimension*), pemahaman (*cognitive dimension*), dorongan (*motivational dimension*), dan keadaan (*contextual dimension*). *Dimensi personalitas* pemberdayaan didefinisikan sebagai kepercayaan diri dan *self-efficacy* yang diperkuat, *locus* kontrol internal (menunjuk pada harapan seseorang bahwa dia dapat menggunakan kontrol terhadap lingkungannya), kontrol kesempatan (terdiri dari gagasan bahwa sesuatu bukan merupakan akibat dari kesempatan tetapi hasil dari tindakan individu sendiri, yang dia dapat mengkontrolnya), keyakinan orang lain sangat kuat (yang dalam studi ini termasuk perasaan menjadi lebih kuat dalam sebuah kelompok atau sebuah masyarakat daripada sendirian), ideologi kontrol (terdiri dari gagasan bahwa orang pada umumnya dan terutama diri sendiri dapat mempengaruhi sistem sosial dan politik). Definisi dimensi personalitas pemberdayaan psikologi disempurnakan dalam studi ini dengan karakteristik seperti rasa empati dan variabel emosi lain (misal rasa pemenuhan hidup, belajar untuk mengetahui diri sendiri melalui partisipasi dalam kehidupan kelompok dan masyarakat) (Wallerstein, 1992).

Dimensi kognitif pemberdayaan psikologi yang didefinisikan oleh Zimmerman dan Rappaport (1988) meliputi *self-efficacy* (terdiri dari keyakinan mampu mengorganisir dan melaksanakan jalannya tindakan yang diperlukan untuk menghadapi situasi prospektif dan yakin mampu mengatur motivasi seseorang, proses pemikiran, tahap-tahap emosi dan lingkungan sosial juga pencapaian perilaku, juga keyakinan pada kemampuan seseorang mengatasi kesulitan-kesulitan yang melekat dalam mencapai tingkat pencapaian perilaku khusus), harapan *self- and political efficacy* (terdiri dari keyakinan bahwa orang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk mencapai tujuan termasuk perbaikan keahlian dan pengetahuan yang dirasakan melalui partisipasi dalam tindakan masyarakat), *political efficacy* (terdiri dari keyakinan bahwa adalah mungkin untuk mempengaruhi proses politik dan pembuatan keputusan masyarakat) dan rasa *political efficacy* (meliputi perasaan bahwa tindakan politik individu sungguh mempunyai, atau dapat mempunyai, pengaruh kuat pada proses politik, yaitu, bahwa ia bermanfaat untuk melakukan kewajiban sipil orang. Ia adalah perasaan bahwa perubahan politik dan sosial adalah mungkin, dan bahwa warga negara perorangan dapat memainkan peran dalam mengadakan perubahan ini).

Dimensi motivasi meliputi keinginan untuk mengkontrol lingkungan, kewajiban sipil atau rasa keharusan sipil yang terdiri dari keyakinan bahwa orang harus ikut serta dalam proses politik sebagai sebuah pertanggungjawaban terhadap orang lain. Ia adalah perasaan bahwa diri sendiri dan orang lain harus ikut serta dalam proses politik, tanpa memperhatikan apakah aktivitas politik itu dilihat sebagai bermanfaat atau efektif. Ia meliputi perhatian terhadap kepentingan umum dan rasa terhubungkan dengan orang lain dan rasa kepentingan dan maksud sebab akibat.

Dimensi kontekstual meliputi keterlibatan orang dalam tindakan kolektif (Rappaport, 1985) untuk melakukan kontrol dalam lingkungan sosial dan politik, persepsi tentang kemampuan orang untuk mempunyai pengaruh ekologi dan budaya (Zimmerman, 1990b), kesadaran budaya seseorang yang meningkat (Zimmerman, 1990b; Wallerstein, 1992; Israel *et al*., 1994), dan kesadaran tentang persoalan masyarakat yang meningkat (Freire, 1970; Hart dan Bond, 1995).

Pemberdayaan masyarakat menurut Zimmerman dan Rappaport (1988) *berarti* ***self- and political efficacy****, kompetensi yang dirasakan,* ***locus*** *kontrol, dan keinginan untuk mengkontrol*. Karakteristik ini adalah unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, yang dalam studi ini disempurnakan dengan karakteristik berikut: Pemberdayaan masyarakat berarti *pencapaian pemerataan sumberdaya* (Katz, 1984; Rappaport *et al*., 1984; Rissel, 1994), *kemampuan mengidentifikasi persoalan dalam masyarakat dan solusinya* (Braithwaite, 1989), *partisipasi yang meningkat dalam kegiatan masyarakat* (Chavis dan Wandersman, 1990; Florin dan Wandersman, 1992), *tingkat pemberdayaan psikologi yang meningkat di kalangan anggota masyarakat* (Wallerstein, 1992), *perbaikan mata pencaharian sebagai akibat kegiatan masyarakat* (Chavis dan Wandersman, 1992), *rasa masyarakat yang lebih kuat diantara anggota masyarakat* (Chavis dan Wandersman, 1990), *kemampuan untuk membuat analisis kritis tentang dunia* (Wallerstein, 1992), *identifikasi diri mereka sendiri (dengan orang lain) sebagai anggota masyarakat* (Wallerstein, 1992*), perbaikan kualitas hidup masyarakat dan keadilan sosial* (Wallerstein, 1992), *tindakan politik* (Rissel, 1994; Minkler, 1994) yang berarti tindakan politik dalam kesehatan, dan kemampuan mengorganisir diri mereka sendiri untuk mengelola persoalan masyarakat, prakarsa dan partisipasi dalam pembuatan keputusan juga dalam perencanaan atau komite lainnya, *keberhasilan dalam redistribusi sumberdaya atau dalam pembuatan keputusan* (Rissel, 1994), *juga kontrol atas kesehatan* (Zimmerman, 1990b) dan *nasib* (Wallerstein, 1992). Menurut Zimmerman (1990b) masyarakat mempunyai kontrol atas kesehatan ketika orang telah belajarbagaimana mengelola waktu, mengorganisir diri mereka sendiri dan mengidentifikasi penyedia sumberdaya, (bagiamana) bekerja dengan orang lain untuk tujuan umum, dan (bagaimana) memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan.

Konsekuensi lain pilihan memfokuskan pemberdayaan sebagai konsep pokok adalah bahwa konsep partisipasi harus diubah ke posisi alat atau prasyarat bagi pemberdayaan. Ia dianggap bahwa orang harus, dalam contoh pertama, ikut serta untuk diberdayakan. Partisipasi disini dilihat bukan hanya sebagai alat tetapi juga sebagai sebuah konsekuensi, sebuah karakteristik individu: keterlibatan atau partisipasi aktif

(mula-mula dalam program dan intervensinya dan kegiatan peningkatan kesehatan dan akhirnya dalam pembuatan keputusan) menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari atau perilaku kesehatan orang. Pengertian partisipasi ini didasarkan pada Zimmerman dan Rappaport (1988).

STRATAK GERAKAN PMII

Sebuah gerakan yang rapi dan massif harus mengandaikan terbentuknya faktor-faktor produksi, distribusi dan wilayah perebutan. Tanpa mengunakan logika ini maka gerakan akan selalu terjebak pada heroisme sesaat dan kemudian mati tanpa meninggalkan apa-apa selain kemasyuran dan kebanggaan diri belaka. Katakanlah kita sedang akan membangun sebuah gerakan maka dimana wilayah perebutan yang akan kita temui dan oleh karena itu apa yang harus kita produksi dan mengunakan jalur distribusi seperti apa agar produk-produk gerakan kita tidak disabotase di tengah jalan. Rangkaian produksi-distribusi-perebutan ini adalah sebuah mata rantai yang tidak boleh putus, karena putusnya sebuah mata rantai ini berati matinya gerakan atau setidak-tidaknya gerakan hanya akan menjadi tempat kader-kadernya heroisme-ria. Dan yang lebih penting bahwa gerakan semacam ini akan lebih mudah untuk di aborsi.

Yang pertama-tama perlu di kembangkan di PMII adalah bahwa sejarah itu berjalan dengan masa lalu, bukan karena semata-mata masa lalu itu ada, tetapi karena masa lalu telah membentuk hari ini dan hari esok. Artinya capaian tertinggi dari sebuah gerakan adalah ketika satu generasi telah berhasil mengantar generasi berikutnya menaiki tangga yang lebih tingi. Visi historis inilah yang akan menjadikan PMII sebagai organisasi besar yang berpandangan kedepan dan universal, karena PMII tidak didirikan hanya untuk bertahan selama sepuluh atau dua puluh tahun, tetapi PMII didirikan untuk melakukan perubahan tata struktur dan sistem. Dengan demikian paradigma menempati posisi yang sangat vital dalam membangun gerakan PMII ke depan, bukan semata-mata karena kita membutuhkan paradigma, tetapi karena paradigma itu seharusnya memandu gerakan PMII dalam *longue duree* dalam bingkai dunia.

Selama ini, perdebatan paradigmatik di PMII hanya bersifat reaksioner, bukan sebuah inisiatif yang didasarkan pada gerak maju yang terencana. Kondisi seperti inilah yang kemudian membatasi ruang lingkup gerakan PMII yang hanya melingkar di orbit internal NU dan tidak mampu melakukan pendudukan dan perebutan sektor-sektor setrategis yang memiliki resonansi luas kepada publik. Sejauh berkaitan dengan perubahan struktural yang dicitakan PMII, maka pendudukan dan perebutan sektor-sektor publik adalah suatu keniscayaan. Masalahnya selama ini yang di puja-puja oleh sebagaian besar aktifis PMII adalah gerakan kultural *an sich* yang mengabaikan segala sesuatu yang bersifat struktur. Katakanlah dikotomi gerakan kultural-struktural yang menjadikan PMII sebagai penjaga gerbang kultural sementara organisasi kemahasiswaan yang lainnya, misalnya sebagai pemain struktural telah menimbulkan kesesatan berfikir sedari awal tentang gerakan yang dibayangkan (*imagined movement*) oleh kader-kader PMII, bahwa PMII cukup hanya bergerak di LSM-LSM saja dan tidak perlu berorientasi di kekuasan. Jadi paradigma merupakan suatu keniscayaan yang di bangun berdasakan atas pandangan PMII tentang dunia dalam realitas globalisasi dan pasar bebas yang saat ini sedang berjalan.

Konsistensi Kaderisasi PMII di Tengah Transformasi Global

Pemikir kontemporer Inggris, Anthony Giddens menggambarkan istilah globalisasi sebagai *runway world.* Dunia yang tunggang langgang. Istilah itu bukan sekedar menggambarkan seekor kuda yang berpacu dengan cepat, atau harimau yang sedang mengejar mangsanya. Kecepatan mereka tidaklah memiliki dampak siginifikan lingkungan sekelilingnya. Jika diqiyaskan, barangkali mirip dengan bencana Tsunami yang menimpa bangsa kita. Gelombang Tsunami, kita tahu, menyeret, menerjang, dan menghancurkan, apapun, di depannya. Namun, sedahsyat apapun gelombang tersebut, tetap ada yang survive. Demikianlah dengan apa yang terjadi di dunia ini. Transformasi global melanda semua wilayah, dari kota metropolitan hingga pelosok pedesaan. Transformasi global menembus semua dataran, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, hingga nilai.

Di berbagai negara maju yang rawan bencana alam, seperti Jepang, AS, dan lainnya, korban dari bencana dapat diminimalisir. Berbagai teknologi dan sumber daya manusia disiapkan untuk mengantisipasinya. Bencana alam yang selalu terjadi pun relatif dapat "dijinakkan." Kata kunci menjinakkan berbagai bencana tersebut adalah kemampuan memahami struktur tantangan bencana alam. Dengan memahami struktur tersebut, mereka menciptakan teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemadanan di atas dapat diterapkan dalam konteks transformasi global yang saat ini sedang terjadi. Transformasi yang berjalan cepat dan kompleks ini akan berubah menjadi bencana jika kita gagal memahami logika dan arahnya, kemudian merancang langkah dan strategi, agar bukan hanya mampu menghindar gelombang globalisasi, namun juga mampu memanfaatkan potensi globalisasi. Dalam pengertian inilah makna konsistensi kader harus diletakkan. Dengan demikian, ada tiga tugas besar kita dalam hal ini.

Pertama, memahami logika transformasi global. *Kedua*, melakukan kritrik otokritik terhadap kita dan organisasi kita. *Ketiga*, menyiapkan jawaban yang bertumpu pada bacaan kedua hal di atas. Yang pertama kita harus memahami aktor sosial dibalik proses-proses globalisasi, logika yang bekerja, ideologi dominannya, dan dampaknya terutama terhadap masyarakat marjinal seperti kalangan *nahdliyyin*. Dataran

keduanya mencoba untuk membangun tradisi agar kita mampu memandang komunitasnya sendiri. Dari peneropongan internal ini kita akan memahai kekuatan dan kelemahn kita. Sedangkan yang ketiga kita akan memahami secara konkret makna konsistensi kader di tengah transformasi global.

Konsistensi Kader

Demikianlah dampak dari apa yang disebut transformasi global. Tanpa memahaminya secara kritis kita akan benar-benar menjadi korban Tsunami globalisasi. Pemaknaan konsistensi kader diletakkan dalam konteks ini sehingga bukan hanya mampu mengelak dari dampak negatifnya, namun juga mampu merebut peluang dari globalisasi. Pemaknaan tersebut kemudian diterjemahkan dalam konteks kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi kita.

Paling tidak kita telah memiliki modal sosial dan kultural yang kaya. Kesatuan hati (ideologi), karakter kultur, dan bangun organisasi yang mencakup berbagai wilayah dan isu. Sehingga, konsistensi kader pun dimaknai dalam pengertian multilevel. Bukan sekedar konsistensi dalam pengertian kesetiaan mengawal agenda-agenda kultural. Namun harus dimaknai lebih maju daripada itu. Di sini penulis menawarkan paling tidak empat level pemaknaan konsistensi kader.

Pertama, pemaknaan paling dasar, yakni untuk tetap setiap mengawal kerja-kerja organisasi yang berorientasi penguatan masyarakat. Pemaknaan ini merupakan penolakan terhadap proses politisasi organisasi baik dalam pengertian politisasi kelembagaan, maupun personal dalam pengertian beraktivisme di PMII sebatas batu loncatan untuk meraih karir politik personal. Semangatnya adalah khidmah dengan segala resikonya: tidak populer dan miskin.

Kedua, konsistensi di atas diterjemahkan dalam kerja panjang mencetak SDM berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman. Salah satu karakter globalisasi adalkah persaingan dengan pola berbasis kualitas SDM. Artinya, untuk memenangkan kompetisi liar globalisasi tidak lain dengan memenangkan kualitas SDM. Reorientasi teologis menjadi penting untuk membangun pijakan bahwa kepakaran dalam ilmu fiqh, dalam konteks jamaah, tidak melebihi kepakaran dalam pertanian, kelautan, atau teknologi komputer.

Ketiga, konsistensi di atas ditransformasikan dalam konteks kelembagaan sehingga pemberdayaan kader seiring dengan penguatan organisasi. Kekuatan kepemimpinan kharismatik atau personal sudah saatnya ditransformasikan menjadi kekuatan kelembagaan. Sehingga tumpuan organisasi bukan lagi personal, namun sistem. Kekuatan kelembagaan ini menjadi penting untuk menopang sekian agenda penting organisasi.

Keempat, kekuatan kelembagaan di atas diberi ruh dengan perspektif yang kritis terhadap *living reality* dan *living issues* di masyarakat. Sehingga mampu merespons secara kreatif berbagai tantangan global. Pada titik ini gerakan organisasi bukan lagi bertumpu pada upaya merebut momen dari dinamika geopolitik dan geoekonomi global, namun ikut menciptakan momen atau menentukan arus strukturalnya.

REPARADIGMATISASI PRAXIS KADERISASI PMII

Dengan konteks problematik semacam itu lalu apa signifikansi deklarasi PMII ini? Paling tidak PMII menjadi penting dalam konteks membangun oposisi kritis di negeri ini. Oposisi kritis yang sejati susah disandarkan pada kekuatan parlementarian yang terjebak dalam nalar kalkukasi kekuasaan. Maka, oposisi kritis hanya bisa diharapkan dari kaum muda, salah satunya PMII. Apalagi dalam konteks daerah seperti Bantul yang posisi asosiasi masyarakat sipil belum begitu kuat. Manifestasi dari oposisi kritis ini adalah mendorong perlawanan terhadap penterasi kepentingan global dalam berbagai kebijakan terutama dalam bidang liberalisasi perdagangan, privatisasi, pencabutan subsidi sosial untuk melindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat, serta SDA; mendorong kebijakan publik yang berbasis pada kepentingan rakyat dan menuntaskan konsolidasi demokrasi (meletakkan basis material-konstitusional demokrasi substansial); membangun kesadaran kritis di masyarakat hingga mampu mengorganisir komunitasnya. Sedangkan secara internal, peran penting PMII adalah mencetak kader yang memiliki kekuatan analisis sosial tajam; berbasis pengetahuan global, nasional, dan lokal; memiliki kapasitas leadership dan teknikalitas organisasi handal; serta memiliki integritas moral yang tinggi.

Pertama, PMII haruslah tetap memposisikan diri sebagai bagian dari masyarakat sipil. Gerakan mahasiswa harus kembali ke khittah sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat. Pijakan ini, tidak dimaknai sebagai anti-negara, atau antiglobalisasi mutlak seperti sering disalahpahami, melainkan menempatkan gerakan mahasiswa sebagai *solidarity maker* dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness)*, dan melakukan advokasi sosial kerakyatan. Ketika era Orde Baru, semua elemen masyarakat sipil dalam satu barisan menentang otoritarianisme negara. Berhadap-hadapan dengan negara dan pasar. Begitu proses dekontruksi terjadi, dan terjadi proses liberalisasi politik, sebagian besar mereka, dari intelektual sampai aktifis LSM, dari akademisi sampai aktifis mahasiswa, melakukan proses negaranisasi. Di titik ini, terjadi kevakuman actor gerakan yang setia mendampingi dan memperjuangan hak-hak masyarakat. Di sinilah, gerakan mahasiswa harus menempatkan khittah perjuangannya.

Kedua, bergerak dengan basis lokalitas. Gerakan dengan basis lokalitas memiliki dua makna. Makna pertama, gerakan mahasiswa hendaknya tanggap terhadap persoalan riil yang terjadi di sekelilingnya. Penggusuran, biaya pendidikan mahal, harga pupuk yang melambung, akses kesehatan yang

mahal sampai persoalan Peraturan daerah sebagai implikasi logis otonomi daerah harus menjadi basis material gerakan. Isu-isu lokal semacam ini niscaya memiliki keterkaitan dengan desain global. Karenanya, bergerak dengan basis lokalitas bukan berarti abai dengan realitas global, namun justru mematerialkan berbagai isu global. Bergerak dalam ranah ini mensyaratkan pemahaman politik, sejarah, sosiologi, antropologi, dan ekonomi masyarakat lokal. Makna kedua, terkait dengan ranah pertarungan PMII di kampus. Merebut basis kampus adalah satu-satunya jawaban jika PMII hendak merebut masa depan.

Ketiga, rekonstruksi teologi sosial. Tantangan yang terkait dengan keagamaan dan keislaman merupakan tantangan yang kian membutuhkan respons serius. Paling tidak tiga hal yang mendasari hal ini. *Pertama,* liberalisasi telah menumbuhkan keberislaman yang cenderung ekstrem. *Kedua*, kemandegan pemikiran Islam kritis atau kiri Islam. Seperti terlihat, pemikiran tersebut kehilangan relevansi sosialnya seiring runtuhnya otoritarianisme negara. Pemikiran teologi keislaman kritis telah mengalami kemandegan. Pemikiran Islam kiri lahir dalam konteks berhadapan dengan negara. Ketika negara mengalami pergeseran, pemikiran tersebut kehilangan basis social, sehingga tidak berkembang dengan intensif. Pada saat yang sama lahir basis social baru yakni realitas globalisasi yang membutuhkan rekonstruksi teologi social baru keislaman agar gerakan social berbasis Islam dapat merespons secara kritis perkembangan globalisasi. *Ketiga*, keringnya spiritualitas warga pergerakan. Dekonstruksi dan "sekularisasi" yang terlalu berlebihan telah menyebabkan PMII gagal memberikan semacam keberislaman berbasis spiritualitas yang dibutuhkan masyarakat awam, sekaligus mendasari ruh perjuangan. Karenanya, pemikiran keislaman tersebut harus mneyatu dengan teori gerakan, lebih empiris, operasional, dan applicable.[]

CITRA DIRI ULUL ALBAB

Individu-individu yang membentuk komunitas PMII dipersatukan oleh konstruks ideal seorang manusia. Secara idelogis, PMII merumuskannya sebagai ulul albab-citra diri seorang kader PMII. Ulul albab secara umum didefinisikan sebagai seseorang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan (olah pikir) dan ia pun tak pula mengayun dzikir. Dengan sangat jelas citra ulul albab disarikan dalam motto *PMII dzikir, pikir dan amal sholeh*. Dalam Al Qur'an secara lengkap kader ulul albab digambarkan sebagai berikut:

1. **Al-Baqarah (2): 179**
   "Dan dalam hokum qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai **Ulul Albab**, supaya kamu bertaqwa.
2. **Al-Baqarah (2): 197**
   "Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku wahai **Ulul Albab."**
3. **Al-Baqarah (2); 296**
   "Allah menganugerahkan al-hikmah (kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan Hadits) kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi al-hikmah itu, maka ia benar-benar dianugerahi karunia yang banyak. Dan ha nya **Ulul Albab**-lah yang dapat mengambil pelajaran."
4. **Ali-Imran (3):190**
   "Dialah yang menurunkan al-kitab kepada kamu. Diantra (isi)nya ada ayat-ayat muhkamah itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat, Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari Tugas Akhir'wilnya, padahal tidak ada orang yang tahu Tugas Akhir'wilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan: "kamu beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami." Dan kami tidak dapat mengambil pelajaran (darinya) melainkan **Ulul Albab."**
5. **Ali Imran (3): 190**
   "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi **Ulul Albab."**
6. **Al-Maidah (5) 100**
   "Katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka betaqwalah kepada Allah hai Ulul Albab, agar kamu mendapat keuntungan."
7. **Al-ra'd (13): 19**
   "Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar-benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah Ulul Albab saja yang dapat mengambil pelajaran."
8. **Ibrahim (14); 52**
   "(Al-Quran) ini adalah penjelasan sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan denganya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan agar **Ulul Albab mengambil pelajaran."**
9. **Shaad (38): 29**
   "Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran **Ulul Albab**."
10. **Shaad (38): 29**
    "Dan kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rakhmat dari Kami dan pelajaran bagi **Ulul Albab**."

11. **Al-Zumar (39): 9**
"(Apakah kamu hai orang-orang musrik yang lebih beruntung)ataukah orang-orang yang beribadat diwaktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhanya? Katakanlah: "adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" sesungguhnya Ulul Albab-lah yang dapat menerima pelajaran."
12. **Al-Zumar: (39): 17-18**
"Dan orang-orang yang menjauhi taghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah **Ulul Albab**."
13. **Al-Zumar (39): 21**
"Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air langit dari bumi, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi **Ulul Albab."**
14. **Al-Mu'min (40): 53-54**
"Dan sesungguhnya telah Kami berikan petunjuk kepada Musa, dan kami wariskan taurat kepada Bani Israil untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi Bani **Ulul Albab**."
15. **Al-Talaq (65):10**
"Allah menyediakan bagi mereka (orang-orang yang mendurhakai perintah Allah dan rasul-Nya) azab yang keras, maka bertaqwalah kepada Allah hai **Ulul Albab,** yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu."

Dari elaborasi teks di atas, komunitas ulul-albab dapat dicirikan sebagai berikut: (secara skematik dapat dirumuskan dalam bagan)

a. Berkesadaran histories-primordial atas relasi Tuhan-manusia-alam.
b. Berjiwa optimis-transedental atas kemampuan mengatasi masalah kehidupan.
c. Berpikir secara dialektis.
d. Bersikap kritis.
e. Bertindak Transformatif

Sikap atau gerakan seperti ini bisa berinspirasi pada suatu pandangan keagamaan yang transformatif. Nah, Ulul Albab adalah orang yang mampu mentransformasikan keyakinan keagamaan atau ketaqwaan dalam pikiran dan tindakan yang membebaskan melawan thaghut.

Ulul Albab Adalah Kader Pelopor & Inti Ideologis

Ulul Albab itulah yang dalam bahasa pergerakan disebut dengan kader pelopor *(vanguardist)*. Kepeloporan dalam pengertian apa? Siapakah sebenarnya kader pelopor tersebut? Asal usul istilah pelopor berasal dalam khasanah politik. Pertama kali diperkenalkan oleh Lenin di Rusia pada sekitar tahun 1980-an. Istilah itu digunakan untuk menyebut suatu partai pelopor (*Vanguard party)*. Artinya, kepeloporan pada mulanya bermakna politik. Dalam pegnertian ini kepeloporan dimaknai sebagai kepeloporan politik atau propaganda.

Berkesadaran historis-primordial atas relasi Tuhan-Manusia-alam	Yang utama dari ayat-ayat tentang ulul albab adalah bahwa mereka merupakan manusia yang memiliki kesadaran teologi yang dibangun dari pandangan dunia bahwa : (1) manusia adalah makhluk yang terikat dengan "perjanjian primordial" dengan tuhan dan karenanya manusia selalu hidup dalam bingkai ke-tuhanan; dan (2) bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut keberagamaan manusia harus mampu mentransformasikan keyakinan dalam bentuk pemikiran atau filsafat hidup untuk mengelola dunia dengan segala persoalannya berdasarkan hukum-hukum sosial dan proses kesejarahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas proses sejarah yang terjadi dan dia tidak bisa mengelak atau melarikan diri dari tanggung jawab itu, Karen apertanggung jawaban dimaksud adalah pertanggung jawaban kepada Tuhan karena ia sudah terikat dalam perjanjian primordial sebagai insane berketuhanan dan sebagai khalifah di bumi.
Berjiwa optimis transedental atas kemampuan pribadi dalam mengatasi semua persoalan kehidupan	Sikap optimis-transedental sejatinya hanya dan selalu lahir dari jiwa orang-orang yang bertaqwa. Dalam al-quran disebutkan bahwa "barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan kepadanya jalan keluar." (al-Talaq (65): 2). Ketaqwaan atau juga kesadaran transendental sesungguhnya selalu berkorelasi positif dengan sikap sikap optimis. Artinya pesimisme adalah cermin dari orang-orang yang "bertaqwa", atau bertaqwa tetapi ia tidak mampu memaknai ketaqwaanya dan tidak bisa mentransformasikan ketaqwaan itu dalam kecakapan pribadi dan kepercayaan diri yang dipupuk dengan prinsip-prinsip hidup utama. Jadi kader ulul albab adalah kader yang bertaqwa (al-Talaq(65) :10; al-Maidah (5):100; al-Baqarah (2) 179, 197). Ini berarti taqwa harus dimaknai sebagai keyakinan yang hidup diatas kesadrab transedental yang darinya akan lahir pribadi yang

	teguh memegang prinsip dan disertai komitmen yang konsisten untuk membangun suatu orde keadilan. Komitmen itu sendiri lahir dari suatu pandangan teologis yang mapan, bahwa tugas manusia di dunia adalah "mengelola dunia dann menjaga agama"
Berpikir dialektis-struktural dalam melihat berbagai peristiwa sosial masyarakat	Dalam ayat-ayat tentang Ulul Albab diatas jelas dinyatakan pentingnya berpikir dialketis menyangkut fakta atau persoalan yang terkait dengan hokum-hukum alam yang permanen atau hukum-hukum sosial yang bisa direkayasa oleh manusia sendiri. (Misalnya dialektika sebab akibat, siang malam, tumbuh mati). Cara berpikir dialektis dengan sendirinya akan berporos pada usaha pengembangan struktur sosial yang lebih baik melalui kerangka aksi-refleksi-aksi, dst, konteks-teks-konteks, struktur-kultur-struktur, dst. Sebagai contoh, dalam melihat suatu fakta atau persoalan sosial dalam kerangka pikir dialektis structural, maka pertama akan melakukan aksi, melihat konteks, dan mengupayakan perubahan dengan pendekatan structural. Baru kemudian diperlukan refleksi, melihat kembali khazanah kulutural yang adadan juga mencari rujukan teks yang diperlukan. Setelah itu kembali lagi ke aksi, konteks, dan struktur.
Bersikap kritis-prasporsional menghadapi berbagai perbedaan dan pluralitas pendekatan, sudut pandang, dan ideologi yang berkembang dimasyarakat	Salah satu karakter utama dan menonjol kader ulul albab adalah bahwa ia selalu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan fakta yang ada ditengah masyarakat. Mampu mengambil pelajaran artinya ia bisa membuat suatu refleksi dan identifikasi/pemetaan masalah dengan mengedepankan cara berpikir kritis-proporsional. Kritis juga berarti berkemampuan untuk menyampaikan pesan secara akurat sehingga ulul albab selalu menjadi corong yang mampu melakukan perubahan sosial.
Bertindak transformatif cultural	Mampu menyampaikan dan menyelesaikan persoalan dengan bahsa kaumnya. Salah satu karakter utama dan menonjol kader ulul albab adalah bahwa ia selalu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan fakta yang ada ditengah masyarakat. Mampu mengambil pelajaran artinya ia biasa membuat suatu refleksi dan identitas/ pemetaan masalah dengan mengedepankan cara berpikir kritis-proporsional. Kritis juga berarti berkemampuan untuk menyampaikan pesan secara akurat sehingga ulul albab selalu menjadi corong yang mampu menyampaikan dan menyelesaikan persoalan dengan bahasa kaumnya.

Macam dan Pengertian Perakaderan PMII

Kaderisasi PMII pada hakekatnya adalah totalitas upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan potensi dzikir, fikir dan amal soleh setiap insan pergerakan. Secara kategoris dapat dipilih dalam tiga bentuk yakni: ***Perkaderan Formal Basic, Perkaderan Formal Pengembangan*** **dan** ***Perkaderan Informal*.** Ketiga bentuk ini harus diikuti oleh segenap warga pergerakan, sehingga pada saatnya kelak akan terwujud kader yang berkualitas ulul albab.

Perkaderan formal *basic* meliputi tiga tahapan dengan masing-masing *follow-up*-nya. Ketiganya itu adalah Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba), Pelatihan Kader Dasar (PKD), dan Pelatihan Kader Lanjutan (PKL). Ketiga tahapan dengan *follw-up* yang menyertai itu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, karena kaderisasi PMMI pada hakekatnya merupakan proses terus menerus, baik di dalam maupun di luar forum kaderisasi *(long-life-education)*.

Perkaderan Formal Pengembangan adalah berbagai pelatihan dan pendidikan yang ada di PMII. Perkaderan jjenis ini dibedakan dalam dua macam, yakni 1) yang wajib diikuti oleh segenap kader secara mutlak, dan 2) yang wajib di ikuti sebagai pilihan. Yang sifatnya wajib mutlak, disamping sebagai pembekalan mengenai hal-hal dasar yang harus dimiliki kader pergerakan, juga merupakan prasyarat bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKD atau PKL.

Sedang perkaderan informal adalah keterlibatan kader pergerakan dalam berbagai aktifitas dan peran kemasyarakatan PMII. Baik dalam posisi sebagai penanggung jawab, menjadi bagian dari *team work*, atau bahkan sekedar partisipan. Perkaderan jenis ini sangat penting dan mutlak diikuti. Disamping sebagai tolak ukur komitmen dan militansi kader pergerakan, juga jauh lebih real disbanding pelatihan-pelatihan formal lain, karena langsung bersinggungan dengan realitas kehidupan.

Di atas semua pelatihan tersebut terdapat satu pelatihan lagi yakni pelatihan fasilitator. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menciptakan kader-kader pergerakan yang secara terus menerus akan membina dan menangani berbagai forum perkaderan di PMII. Pelatihan lebih utama ditujukan bagi kader-kader potensial yang telah mengikuti semua bentuk perkaderan sebelumnya, dan yang telah teruji komitmennya terhadap PMII maupun aktifitas dan peran-peran sosial.[]

Diskursus PMII dan Kekuasaan Negara

Akar tradisi kehidupan bangsa Indonesia adalah negara maritim dan negara agraris. Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya sehingga banyak negara yang sudah maju berusaha untuk mengekspoitasi kekayaan. Kolonialiasme dan imperealisme dengan dalih akumulasi kapital telah membawa dampak keterbelakangan masyarakat Indonesia. Setelah mengalami trauma yang berkepanjangan Indonesia berusaha bangkit merekonstruksi seluruh sistem tata negara dalam berbagai sektor. Yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah masyarakat sipil dilibatkan menjadi penentu kebijakan. Sehingga formulasi kebijakan negara yang diimplementasikan dalam kehidupan publik

merepresentasikan kepentingan komunitas sipil. Hal ini menjadi persoalan serius untuk diapresiasi karena seringkali watak hegemonik dan represif negara masih menjadi karakter. Disinilah peran PMII dibutuhkan.

Jelasnya bahwa masyarakat sipil yang selalu dijadikan objek pemerintah, masyakakat Indonesia tidak ditempatkan dalam diskursus liberal kebebasan—berkumpul, berpendapat, berorganisasi, berekspresi terutama pada rezim Orde Baru. Proses depolitisasi sebagai praktek hegemonik rezim yang berwatak *otoritarian-birokratik* telah efektif melemahkan kritisisme dan progressifitas masyarakat sipil. *Govermentaly* tidak memahami negara dan masyarakat sipil dalam pengertian oposisi biner, yang selalu bertentangan satu sama lain dan berusaha saling melemahkan pengaruh pihak lain. Kekuasaan bukanlah persoalan menerangkan belenggu pada warga negara dengan tujuan 'membuat' mereka mampu mengemban bentuk kebebasan yang terkontrol. Otonomi personal bukanlah antitesis dari kekuasaan politik, melainkan merupakan istilah kunci dari praktik kekuasaan politik, karena sebagian besar individu hanya menjadi subyek kekuasaan tetapi juga berperan menjalankan operasi kekuasaan itu.

Ketika praktik kekuasaan berimplikasi pada gerakan PMII, maka PMII akan terjebak sebagai alat untuk melanggengkan status penguasa. Hal ini pernah terjadi ketika pemerintahan Abudurahman Wahid berkuasa. Disinilah independensi PMII dipertanyakan. Selain telikungan kekuasaan negara gerakan PMII di Indonesia juga dihadapkan pada krisis multidimensi. Multi krisis yang ditandai dengan timbulnya konflik, ketegangan, dan aksi kekerasan antar kelompok sosial, etnis, suku dan agama dan antar partai politik seperti yang terjadi berbagai belahan nusantara telah membawa kerugian yang terhingga terhadap masyarakat sipil.

Membaca Kondisi Obyektif PMII dan Langkah Strategis yang Dilakukan:

Berangkat dari refleksi kritis diatas maka yang harus dilakukan oleh PMII adalah merumuskan beberapa hal:

- *Pertama*, Reformulasi Ideologi PMII.
- *Kedua*, Reformulasi Platform Organisasi PMII.
- *Ketiga*, Reformulasi Sistem Kaderisasi PMII.
- *Keempat* , Reformulasi Konsep Independensi PMII.
- *Kelima*, Membentuk Sistem Organisasi yang Massif dan Progressif.
- *Keenam*, Manifestasi Basis Ideologi Gerakan yang Mengikat Organ.
- *Ketujuh*, Menciptakan Ruang Mediasi Intelektual yang Memungkinkan Proses Ideologisasi untuk Mengusung Gerakan Sosial.

Memposisikan PMII Sebagai Organ Ekstra Parlementer:

- Pertama, Influencing (Pengaruh)
- Kedua, Monitoring (Sosial Kontrol)
- Ketiga, Evaluating (Menilai)
- Keempat, Advocacy (Pembelaan)

APA YANG HARUS DILAKUKAN PMII

Tahapan ideologisasi kader inti ideologis dalam sistem kaderisasi PMII:

- *Pertama*, Pergumulan Kultural
- *Kedua*, Manifestasi Ikatan Emosional
- *Ketiga*, Manifestasi Solidaritas
- *Keempat*, Manifestasi Nilai
- *Kelima*, Manifestasi Ideologi

Kebutuhan Dasar PMII Sebagai Instrument Gerakan Sosial:

- Basis Ideologi
- Falsafah Gerak
- Positioning
- Segmenting

Tipologi Kader di PMII

- Kader Flooting Mass
- Kader Pelopor
- Kader Inti Ideologis

Parameter Kemampuan Wacana

- Deskriptif
- Analisis
- Kritik-Polemik

RUMUSAN KADERISASI REVOLUSIONER PMII (STRATEGI KADERISASI BERBASIS REALITAS)

A. PELATIHAN BASIC FORMAL

1. MAPABA (Masa Penerimaaan Anggota Baru)
2. PKD (Pelatihan Kader Dasar)
3. PKM (Pelatihan Kader Menengah)
4. PKL (Pelatihan Kader Lanjut)

B. PELATIHAN BASIC IN-FORMAL

1. PELATIHAN BASIS Kader Inti Ideologis Angkatan I
2. PELATIHAN BASIS Kader Inti Ideologis Angkatan II
3. PELATIHAN BASIS Kader Inti Ideologis Angkatan III

C. PELATIHAN BASIC NON-FORMAL

1. SEKOLAH FILSAFAT KRITIS Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
2. SEKOLAH GERAKAN SOSIAL Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
3. SEKOLAH TEORI SOSIAL KRITIS Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
4. SEKOLAH IDEOLOGI Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
5. SEKOLAH KRITIK IDEOLOGI Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
6. SEKOLAH MARXIS Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
7. SEKOLAH TAN MALAKA Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
8. SEKOLAH ANALISA SOSIAL Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
9. SEKOLAH PENDIDIKAN KRITIS Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
10. SEKOLAH GERAKAN PEREMPUAN Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
11. SEKOLAH POLITIK ISLAM Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)
12. SEKOLAH ASWAJA Kader Inti Ideologis (Tahap I, II, III)

D. PELATIHAN SKILL ORGANISASI

1. Pelatihan Kepemimpinan Transformatif (PKT)
2. Pelatihan Fasilitator Transformatif (PFT)
3. Pelatihan Manajemen & Adminstrasi Organisasi (PMAO)
4. Pelatihan Manajemen Konflik (PMK)
5. Pelatihan Kader Politik (PKP)
6. Pelatihan Advokasi Partisipatif (PAP)
7. Pelatihan Teknik Analisa Deliberatif (PTAD)
8. Pelatihan Fund-Rising (PFR)
9. Pelatihan Jurnalisme Investigatif (PJI)
10. Pelatihan Penulisan Ilmiah (PPI)

E. KURSUS KADER INTI IDEOLOGIS

1. Kursus Tehnik Agitasi & Propaganda
2. Kursus Tehnik Ekspansi Jaringan Prodem
3. Kursus Tehnik Ideologisasi & Penculikan Kader
4. Kursus Tehnik Infiltrasi & Penanaman Kader
5. Kursus Tehnik Spionase & Pembusukan Organ
6. Kursus Tehnik Pemogokan & Pembangkangan Massal
7. Kursus Tehnik Adu Domba & Pecah-Belah Musuh
8. Kursus Manajemen Aksi & Mobilisasi Massa

BUKU PANDUAN KADERISASI (yang sudah dicetak untuk komunitas terbatas):

[1] KATEGORI DISKURSUS PENGETAHUAN:

1. PELATIHAN BASIS JILID 1 & 2
2. PELATIHAN BASIS JILID 3
3. SEKOLAH IDEOLOGI
4. SEKOLAH KRITIK IDEOLOGI
5. SEKOLAH GERAKAN SOSIAL
6. SEKOLAH TEORI SOSIAL
7. SEKOLAH PENDIDIKAN KRITIS
8. SEKOLAH MARXIS
9. SEKOLAH TAN MALAKA
10. SEKOLAH GERAKAN PEREMPUAN
11. SEKOLAH ASWAJA

[2] KATEGORI SKILL ORGANISASI GERAKAN

1. PELATIHAN ANALISIS SOSIAL
2. PELATIHAN LEADERSHIP
3. PELATIHAN MANAJEMEN AKSI
4. PELATIHAN MANAJEMEN KONFLIK
5. PELATIHAN JURNALISTIK
6. PELATIHAN FASILITATOR[]

MATERI 14
NAHDLATUL ULAMA, PETA PEMIKIRAN & GERAKAN ISLAM

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA[95]

Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia

Terdapat beberapa pendapat yang berkembang tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebagai misal, dalam seminar bertema sejarah masuknya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada 1976 dan di Aceh pada 1980 para sejarawan Muslim menyepakati bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi langsung dari Arab. Pendapat lain yang berkembang dari para orientalis Barat, C. Snouck Horgronje misalnya, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia baru pada abad ke-13 M atau tahun 1200 M melalui tanah India dan baru sejak abad ke-17 mereka berkenalan dengan sumber aslinya di Mekah. Teori Barat ini berdasarkan ada masa berdirinya suatu kerajaan sebagai titik tolak masuknya Islam di Indonesia. Pada umumnya mereka mengajukan bukti penemuan batu nisan al-Malik al-Saleh, raja Muslim pertama, di Pasai, Aceh (Suminto, 1993: 313).

Islam awal yang berkembang di Idonesia ini bersifat *sinkretis*. Ada dua faktor yang mempengaruhi corak sinkretisme ini, yakni: *pertama*, sebelum kedatangan Islam, masyarakat nusantara telah dipengaruhi secara dominan oleh agama Hindu, agama Budha, dan kepercayaan *animisme* dan *dinamisme*, yang terlebih dahulu berkembang. *Kedua*, Islam yang masuk melalui jalur india, sebagai wilayah asal agama Hindu yang kental dengan tradisi *animistik* dan *dinamistik*, juga sangat membuka peluang tumbuh suburnya Islam sinkretis ini. Proses *purifikasi* atau pemurnian kembali ajaran Islam orisinal terjadi seiring dengan semakin banyaknya dan mudahnya orang Indonesia yang pergi Haji ke Mekah (Suminto, 7993:314).

Di masa penjajahan Belanda Islam di indonesia mendapatkan tantangan baru dengan hadirnya agama Kristiani yang masuk melalui proyek Kristenisasi secara sembunyi sebagai faktor penting untuk mendukung Proses penjajahan Belanda di Indonesia. Sebab, penjajah Belanda melihat bahwa penguasaan dan pengendalian terhadap perkembangan Islam di tengah bangsa Indonesia adalah sebuah hal yang signifikan mengingat semua yang menguntungkan Islam di kawasan ini akan merugikan kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia.

Antara Islam & Negara: Analisis Rezim Orba

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 kemudian muncul tantangan baru lainnya, yakni kesepakatan anak bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan bernegara dan berbangsa. Dengan demikian, Islam di Indonesia mau tidak mau harus mampu hidup berdampingan dengan Pancasila yang pada sila pertamanya berisi tentang pengakuan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Sila inilah yang menjadi pengikat dan pemersatu umat Islam dengan umat agama-agama lain di Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi perkembangan baru yang sekaligus menjadi tantangan baru lainnya yang dihadapi Islam di Indonesia berupa terjadinya peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan ini berhasil dirampas atas kerja sama bahu-membahu antara ABRI (kini TNI) yang berada di belakang Rezim Orde Baru (Orba) dengan segenap kekuatan umat Islam Indonesia. Namun, setelah kedatangan Dr. Stenly Spector, terjadi kerenggangan hubungan mesra yang telah terbangun antara umat Islam dengan rezim Orde Baru, antara Islam dan negara. Penyebabnya adalah rezim Orba sangat terpengaruh oleh pernyataan sang doktor dari Amerika Serikat ini bahwa setelah berhasil menumpas komunisme atau PKI ini maka Islam harus disingkirkan dari wilayah negara karena akan menjadi penghalang bagi pembangunan.

Pendapat ini tampaknya banyak didengar dan dianut oleh pimpinan rezim Orba yang kemudian meresponsnya dengan melakukan proyek-proyek rekayasa untuk menyudutkan masyarakat Islam. Contohnya, proyek Komando Jihad, yang berhasil menjaring tokoh dan umat Islam untuk dipenjarakan (Suminto, 7993: 314-16). Jadilah Islam dipinggirkan dari wilayah negara sehingga mengakibatkan munculnya masa-masa genting yang mempertaruhkan kemesraan hubungan Islam dan negara. Situasi yang tidak harmonis ini sangat mempengaruhi perkembangan Islam pada masa-masa selanjutnya.

Proses peminggiran Islam dari konstalasi negara, hingga perubahan kebijakan akomodasi terhadap Islam, di Indonesia digambarkan secara gamblang dalam skema yang disusun oleh almarhum M. Rusli Karim (1999: 32) di bawah ini:

[95] Syarif Hidayatullah, *Islam; Isme-isme, Aliran dan Paham Islam di Indoensia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 13-26.

A. Skema Corak Hubungan Agama (Islam) dan Negara di Indonesia[96]
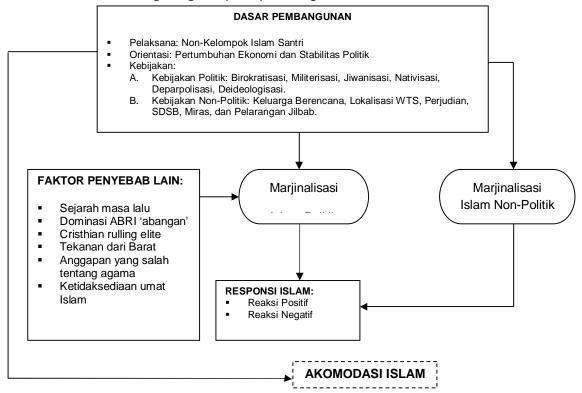
Menurut Karim, keberadaan Islam di Indonesia telah mempunyai sejarah yang panjang sehingga memberi peluang bagi munculnya banyak tafsiran yang berbeda-beda. Demikian pula dalam proses Pengislaman penduduk Indonesia juga mempunyai corak yang beragam. M.C. Ricklefs (1999: 33), misalnya, membagi Islamisasi di Indonesia ke dalam tiga tahap:

1. Tahap Konversi Agama (abad ke-14 hingga ke-i8);
2. Tahap pembedaan penganut yang "komited" dan yang tidak "komited" (abad ke-19); dan,
3. Tahap pemurnian orang Islam (abad ke-20).

Sementara A.H. Johns (1999:34) melihat dalam perspektif yang lebih luas untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang jawaban umat Islam terhadap proses Islamisasi, yakni melalui: kesetiaan pada ajaran fundamentalis, perluasan "teosofi " sinkretisme, penyerapan unsur-unsur Islam ke dalam agama yang telah ada sejak dahulu, "ekleteisisme", intelektual, dan campuran dari semuanya ini.

Dengan mengutip Landon, Karim menyimpulkan ke-Islaman orang Indonesia bersifat khas jika dibandingkan dengan masyarakat Muslim manapun di dunia ini, karena keislaman mereka tidak mempengaruhi atau mengubah praktik kehidupan sehari-hari. Bahkan, warna lokal justru sangat menentukan corak keislaman masyarakatnya sehingga akan dijumpai ada kawasan yang sangat dipengaruhi ajaran sufistik, sementara yang lainnya tidak. Jadi, Islam bagi masyarakat Muslim Indonesia bukanlah identitas yang homogen. Penelitian Karel A. Steenbrink (l984:15-26) sangat menggambarkan heterogenitas dan kekuatan wama lokal yang mempengaruhi identitas Muslim Indonesia pada abad ke-19. Beberapa peristiwa penting dipaparkan, Steenbrink dalam penelitiannya ini, mulai peristiwa perang yang dilakukan Pangeran Diponegoro dijawa, Perang padri di Minangkabau, Sumatera-yang dilakukan oleh Tuanku Nan Renceeh, Tuanku Nan Tuo, dan Tuanku Imam Bonjol, Jihad di Cilegon (9-30 Juli 1888), hingga Jihad di Aceh (1873 dan seterusnya). Beberapa peran ulama lokal pada abad ini iuga diungkap oleh Steenbrink, seperti Syeikh Mohammad Arsyad al-Banjari (1710-1,872), Haji Ahmad Rifangi dari Kalisalak, Batang, Jawa Tengah (1786-1875), Syekh Nawawi al-Bantani, Banten dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau (1860-1916). Steenbrink juga memaparkan tentang perkembangan kehidupan keagamaan pada masa itu, seperti pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan pesantren di Jawa dan Sumatera; perkembangan tarekat sufi, misalnya, Tarekat Alawiyah, Tarekat Syatariyah, Tarekat Naqsabandiyah, Tarekat Akmaliyah Kyai Nurhakim, Serat Centini, Serat Ciboleh Serat Darmogandul dan Babad Kediri, dan Suluk Gatoloco. Hal yang terakhir dibahas dalam penelitiannya ini adalah tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada kurun abad ke-19 ini. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi tentang: Pengadilan agama, hakim agama dan penghulu Masjid, masalah haji, dan perkara surat Wasiat.

[96] Diadopsi dari M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999) hlm. 32.

***Abangan*, *Santri*, dan *Priyayi*,**

Apa yang dtemukan dalam penelitian Clifford Geertz (1962: 6-9) di Mojokerto, Jawa Timur, selama enam tahun yang telah mengklasifikasikan umat Islam ke dalam tiga varian: *Abangan*, *Santri*, dan *Priyayi*, merupakan juga contoh yang baik untuk menggambarkan heterogenitas identitas masyarakat Muslim di Indonesia, setelah memasuki abad ke-20. *Abangan*, menurutnya, mewakili suatu titik berat pada aspek *animistis* dari *sinkritisme* Jawa yang meliputi semuanya dan secara luas dihubungkan dengan elemen santri. Sedangkan *Santri*, mewakili suatu titik berat pada aspek Islam dari *sinkritisme* itu dan pada umumnya dihubungkan dengan elemen dagang (dan kepada elemen tertentu di kalangan petani juga). Sementara *Priyayi* dihubungkan dengan elemen birokratik dan menekankan titik berat pada aspek-aspek Hindu.

Di awal abad ke-20 ini pula menurut M. Atho Mudzhar (Karim, 7999: 41), kita menyaksikan Islam menjadi sebab bangkitnya solidaritas nasionalisme Indonesia ditandai dengan berdirinya Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911, sebagai suatu unsur yang mempersatukan kebangkitan nasional. Namun pada era demokrasi terpimpin di bawah kepimimpinan rezim Orde Lama, presiden Soekarno, kedudukan kelompok Islam nasionalis beranjak melemah seiring dengan semakin dominannya pengaruh PKI dan meluasnya proyek *sekularisasi* pendidikan di Indonesia. Ketika Orde Lama ini tumbang dan berganti dengan kekuasaan rezim Orde Baru, di bawah pimpinan presiden Soeharto, Islam mengalami perkembangan yang dinamis dan transformatif, sebagaimana yang dapat dicermati dari skema M. Rusli Karim di atas.

Menurut Karim (1999: 42), Orde Baru bukan saja baru dalam orientasi dan perancangan pembangunannya, namun juga baru dalam hal orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang memerankan peranan penting dalam rezim Orba ini adalah kalangan ABRI dan kelompok Abangan. Selain pengaruh Dr. Stenly Spector di atas, hal ini dikarenakan orientasi pembangunan pada Orde Baru diarahkan untuk membangun ekonomi dan menciptakan stabilitas politik. Untuk memperkuat kedudukannya, Soeharto juga melakukan proses “Javanisasi”, yaitu dominasi elite oleh kelompok fawa berpaham “abangan”. Soeharto sendiri pada awalnya adalah penganut setia aliran kepercayaan. Sebab itu, para menteri yang ingin dipandang loyal kepada Soeharto mestilah menyesuaikan diri dengan menjadi pendukung setia aliran kepercayaan tersebut.

Dominannya perpaduan unsur Jawa-Abangan ini terindikasikan dengan munculnya tokoh-tokoh yang paling dominan di sekitar Soeharto, atau yang oleh Jenkins disebut “inner circle”, seperti Ali Moertopo, Yoga Sugama, Sudomo, dan Benny Murdani, yang ditambah dengan Amir Machmud dari kalangan pragmatik. Sementara dari “outer circle” muncul nama-nama, seperti: Panggabean, Widodo, M. Jusuf, Sutopo Juwono, dan Darjatmo. Dalam rangka Perencanaan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, Soeharto juga merekrui para ekonom dan teknokrat, yang kebanyakan dari kaum sosialis. Dengan demikian, di masa awal rezimnya ini, Soeharto dikelilingi oleh kelompok-kelompok “anti Islam”, yakni terdiri dari: tentara abangan nasionalis, ekonom dan teknokrat sosialis, dan Katolik. Kuatnya dominasi kelompok “anti Islam” ini menyebabkan tersingkirnya Alamsjah Ratuperwiranegara dari kabinet Soeharto, yang kemudian didubeskan oleh Soeharto ke negara Belanda (Karim, 1999: 44).

Tantangan Internal dan Eksterna Umat Islam

Sedikitnya tokoh Islam yang terlibat dalam fase awal Orba ini, menurut Karim (1999:45), disebabkan dua faktor, yaitu: *pertama*, oleh karena pimpinan tertingginya sendiri memang bukan dari kalangan santri, dan, *kedua*, keterbatasan jumlah sumber daya manusia dari kalangan santri yang layak untuk dilantik sebagai tokoh yang dapat diseiajarkan dengan tokoh-tokoh kelompok sosialis, nasionalis, dan Kristiani. Selain kedua problem internal tersebut, kelompok Islam juga dihadapkan pada tantangan eksternal dengan berupa serangan dari tokoh-tokoh nasionalis yang anti Islam. Hadi Subeno misalnya, seorang tokoh yang sangat gencar melontarkan gagasan bahwa kelornpok santri adalah musuh pancasila. Virus “Islam phobia” ini merasuk juga di tubuh militer Indonesia. Sebuah seminar Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1956 akhirnya menyimpulkan bahwa Islam dan umat Islam adalah ancaman terhadap Pancasila.

Tantangan eksternal lainnya adalah peminggiran Islam politik oleh rezim Orba dengan dua kebijakan “deparpolisasi”, yakni: *pertama*, mendukung Golkar (Golongan Karya) sebagai mitra kerja sama satu-satunya dan sekaligus sebagai partai pemerintah. *Kedua*, melakukan “monopolitisasi” ideologi, baik bagi partai politik maupun bagi organisasi kernasyarakaian (ormas) sesuai lima undang-undang di bidang politik, yang melegitimasi rezim untuk membubarkan partai atau ormas yang tidak mematuhinya, yakni menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasinya atau yang sering dikenal dengan kebijakan “azas tunggal”. Dampaknya, ada sejumlah partai politik dan ormas Islam yang dibubarkan. Secara non-poiitik, Islam dan umat Islam juga mengalami peminggiran oleh rezim Orba ini, misalnya, melalui kebijakan program Keluarga Berencana, membngun lokalisasi perjudian dan prostitusi, dan pelarangan jilbab di sekolah (Karim, 7999: 46-8). Menjelang akhir 1980-an mulai tampak adanya perubahan kebijakan politik dari rezim Orba dari “Islam phobia” menjadi Iebih membuka kebijakan “akomodasi Islam”. Pembentukan Kabinet Pembangunan Lima (KP V) menunjukkan perubahan ini secara menonjol. Salah satu peristiwa yang mendahului pembentukan KP V ini adalah pemberhentian Jenderal Benny Moerdani, tokoh kelompok militer Kristiani, dari kursi Panglima ABRI dan digantikan oleh Jenderal Try Sutrisno, tokoh militer dari kalangan Muslim, yang pada masa selanjutnya ditunjuk oleh Soeharto menjadi Wakil Presiden RI.

Secara perlahan kelompok "Islam phobia" ini justru semakin tersingkir seiring dengan semakin menguatnya kelompok santri di tubuh Kabinet pembangunan Kelima ini. Pergeseran ini akhirnya terjadi juga di dalam tubuh Golkar, sebagai partai pemerintah, dengan muncul nama-nama dari kalangan santri pada fase 1983-1988, seperti Akbar Tanjung, Mohammad Tarmudji, Ibrahim Hasary Anang Adenansi dan Qodratullah. Perubahan yang paling menonjol adalah ketika pada fase 1993-7998 ada campur tangan yang dilakukan oleh Prof. Habibie, orang yang terdekat di lingkaran Soeharto saat itu, dalam penyusunan pengurus Golkar, di mana dari 45 pengurusnya hanya empat orang saja yang berasal dari kalangan Kristiani (Karim, 1999: 227-9).

Kebijakan Akomodasi Islam

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kebijakan akomodasi Islam ini. Menurut Karim, secara eksternal dapat ditemukan dua faktor yang mempengaruhinya setelah dipicu oleh situasi kehancuran blok sosialis/ komunis di Eropa Timur pada 1989, yaitu: *pertama*, menguatnya arus tuntutan demokratisasi dari kalangan umat Islam, sehingga tidak memungkinkan lagi melanggengkan politik "penindasan" terhadap kelompok mayoritas yang dilakukan oleh kelompok minoritas yang selama ini menguasai arena kekuasaan "Islam phobia". *Kedua*, Negara-negara "donor" yang selama ini banvak membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia mengalihkan kekayaan mereka kepada negara-negara Eropa Timur, yang baru saja merintis demokratisasi setelah kejatuhan rezim sosialis-komunis dinegaranya masing-masing. Demi kelangsungan pembangunan perekonomiannya akhirnya rezim Soeharto "terpaksa" merangkul Timur Tengah sebagai alternatif sumber pinjaman keuangan untuk membiayai pembangunan di negeri ini. Oleh sebab itu, rezim harus melonggarkan sekat terhadap kelompok Islam, bahkan merangkul militer ke dalam lingkaran kekuasaan politik (1991: 229-30).

Secara internal, menurut Karim (1999: 232-3), terdapat faktor yang sangat mendnkung, yaitu:

- *Pertama*, berakhirnva masa penentangan kelompok Islam terhadap Pancasila setelah umat Islam menerima Pancasila sejak tahun 1985.
- *Kedua*, keberadaan dua tokoh Islam yang sangat dekat dengan Soeharto, yakni: Habibie dan Munawir Syadzali. Keduanva berhasil meyakinkan Soeharto bahwa kelompok Islam sesungguhnya bukan merupakan ancaman terhadap Pancasila dan rezim.
- *Ketiga*, meningkatnya kesadaran keagamaan di tengah umat Islam sekalipun ini mengalami ketertindasan dan justru mempersubur kehidupan keagamaan mereka di tengah kuatnya arus penindasan dari kelompok anti Islam selama ini.
- *Keempat*, munculnya kebangkitan cendekiawan atau intelektual Muslim, yang salah satunva adalah terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan sejumlah nama terkemuka lainnya, seperti Gus Dur (K.H. Abdurrahman Wahid), Cak Nur (Nurcholish Madjid), Cak Nun (Emha Ainun Najib), M. Amien Rais, dan lain-lain.
- *Kelima*, pribadi Soeharto sendiri yang semakin tua dan ingin "mandito" dan mengakhiri masa jabatannya dengan sikap arif dan tidak menyakiti kelompok Islam. Bahkan pula tahun 1990 ia untuk pertama kalinya menunaikan ibadah haji; sebuah tindakan yang pada waktu itu bisa dianggap sebagai upaya membangun kredensialnya sebagai seorang Muslim dan menimbulkan kegembiraan di lingkungan masvarakat Islam (Rizal Sukma dan Clara Joewono, 2007 : 7).
- *Keenam*, pertolongan dari Allah SWT atau yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai "Blessing in disguise", sebab mengganti sebuah "grant strategy" bukanlah sesuatu yang mudah sehingga umat Islam meyakini bahwa berkat inayah (pertolongan)-Nyalah maka ketertindasan mereka akhirnya bisa diatasi.

Islam modernis* dan *Islam tradisionalis

Terlepas dari proses ketegangan maupun rekonsiliasi selama kekuasaan rezim Soeharto, atau dalam ungkapan M. Rusli Karim di atas, "peminggiran" hingga "akomodasi" Islam, menurut Rizal Sukma dan Clara Joewono (2007: 8-9) ada hal yang patut menjadi catatan yakni kemampuan arus besar (*mainstream*) Islam Indonesia untuk tetap eksis tanpa harus terlalu tergantung kepada Negara. Kendati pun mengalami diskriminasi oleh rezim, namun organisasi-organisasi Islam terus berkembang dan memainkan Peranan signifikan sebagai organisasi kemasyarakatan dengan dukungan dan memiliki akar yang kuat dalam masyarakat serta bekerja untuk kepentingan publik ketimbang kepentingan pemerintah.

Tetapi, Islam bukanlah kekuatan yang bersifat monolitik. Keragaman dan pluralitas dalam umat justru menjadi karakteristik utama dari Islam di Indonesia. Kendati ada keragaman, deskripsi umum terhadap Islam di Indonesia bisa disederhanakan kepada karakteristik adanya dua aliran besar (*school of thought*), yakni *Islam modernis*, dengaan representasi utama pada Muhammadiyah (berdiri pada 1912) dan *Islam tradisionalis*, dengan representasi utama adalah NU, yang berdiri pada 1926.

Penggambaran Islam di Indonesia ke dalam kategori *modernis* dan *tradisionalis* ini telah menjadi kebiasaan baik di kalangan pengamat maupun umat Islam itu serrdiri. Namun, sejak berakhirnya era Orde Baru dengan memasuki era Reformasi pada 1998 maka penggambaran ke dalam dua kategori semacam ini tidak lagi mencerminkan realitas sebenarnya yang semakin kompleks. Dicabutnya tekanan dan pembatasan politik oleh negara telah membuka ruang bagi proses manifestasi berbagai ragam gerakan dan pemikiran dalam komunitas Islam di Indonesia.

Pasca rezim Orba tumbang terjadi perkembangan dan perubahan secara dinamis dan ekspresif di tengah umat Islam, ditandai dengan beberapa hal, seperti: *Pertama*, lahirnya sejumlah partai politik yang secara formal mengusung ideologi dan cita-cita Islam, yang sebelumnya dilarang secara tegas oleh rezim Orba. Fenomena ini mengindikasikan bangkitnya kernbali kekuatan-kekuatan Islam politik di Indonesia. *Kedua*, tampilnya berbagai gerakan-gerakan yang selama masa Orba kurang dikenal oleh masyarakat, dan, *ketiga*, kelahiran organisasi-organisasi Islam baru. Ciri dan lingkup kegiatan organisasi-organisasi Islam yang baru ini sangat beragam dan luas. Akibatnya, wajah Islam di Indonesia menjadi semakin beragam dan kompleks, sehingga penggambaran yang hanya menekankan pada eksistensi, aktivitas, dan pemikiran Islam mainstream, modernis dan tradisionalis, tidak lagi memberikan pemahaman yang menyeluruh dan utuh terhadap kehidupan Islam di Indonesia.[]

MENCARI ISLAM INDONESIA

To Stand within tradition does not limit of knowledge, but makes it possible.[97] Ada adagium yang diyakini kebenarannya di kalangan umat islam, yakni *al-islam sholih fi kulli al-zaman wal-makan*. Islam dipandang sebagai agama yang senantiasa sesuai, cocok, relevan di setiap konteks waktu dan ruang. Islam senantiasa meruang dan mewaktu. Tidak pernah ketinggalan zaman. Segala sesuatu telah diatur dalam Islam. Tidak ada yang diatur dalam Islam. Dalam bahasa filsafat dikatakan sebagai membawa kebenaran perenial. Hadits nabi dalam haji wada' atau isyarat Al Qur'an bahwa tidak ada satupun yang dilupakan oleh Alloh swt dalam kitab suci, merupakan rujukan yang menjadi dasar keyakinan teologis di atas. Namun posisi ontologis dan epistemologis seperti ini bukan tanpa persoalan, bahkan problematik, ketika berhadapan dengan tradisi intelektual yang menolak dogmatisme tanpa rasionalitas.

Gempuran rasionalitas tersebut di satu sisi meninggalkan sekian persoalan yang nyaris tak kunjung usai, di sisi internal intelektual Islam memunculkan beragam penafsiran, mulai dari yang apologetic sampai kritis, yang datang silih berganti. Semuanya bernafas sama, berkehendak mempertahankan tesa di atas. Bedanya, pandangan yang konservatif datang tanpa *reasoning* memadahi, sedangkan pandangan yang, katakanlah, kritis, muncul dengan sekian tesa. Dari penafsiran yang canggih hingga ada yang mengatakan bahwa beberapa surat Al Qur'an sudah tidak relevan lagi, dan karenanya lebih baik "dielimininasi" dari kitab suci. Begitulah.

Hiruk pikuk tersebut pada awalnya terjadi di dunia Arab sana. Muncullah apa yang disebut dengan *firoq* (sekte-sekte/aliran-aliran) dalam Islam. Dalam ilmu kalam klasik, kita menjumpai mereka sebagai *ahlus-sunnah, mu'tazilah, jabbariyyah, jahmiyyah, bathiniyyah, qodiriyyah, dhahiriyyah, syiah,* sampai *ikhwanus-shofa*. Keberadaan berbagai aliran ini juga dikonfirmasi oleh sebuah hadits. Inilah yang disebut dengan, dalam bahasa postmodernisme, narasi-narasi besar, yang sesungguhnya menyembunyikan sekian varian. Maksudnya, konteks budaya, social, politik, ekonomi, bahasa, tradisi, dan sebagainnya, menghasilkan suatu manifestasi Islam yang amat beragam sekalipun masih dalam narasi besar di atas. Antropolog Geertz menyebut, Islam ala Jawa, Islam ala Maroko, dan lainnya, sebenarnya tetaplah Islam, hanya konteks budayanya yang menjadikan manifestasi empirisnya kelihatan berbeda.

Mengapa Islam yang satu menjadi berwarna-warna? Paling tidak terdapat dua sebab yang dapat menjelaskannya. *Pertama*, dampak dari tekanan eksternal, yaitu munculnya realitas social baru atau problem social baru yang meniscayakan penjelasan teologis, yang dalam bahasa sosiologi disebut sebagai social forces. Yang *kedua*, pengaruh tradisi intelektualisme baik yang berasal dari mistisime Persia, rasionalisme Yunani, maupun mistisisme India, atau *intelectual forces.* Juga karena dinamika intelektual Islam sendiri. Seperti terungkap dalam alasan Imam Malik menolak ketika mazhabnyaa hendak dinegarakan, dijadikan mazhab resmi negara. Alasannya, negaranisasi mazhab berimplikasi pada homogenisasi wacana, padahal, para sahabat sudah tersebar di berbagai daerah, yang tentu memiliki konstruks wacana tersendiri sesuai *setting* sosial kultural politiknya.

Sering dengan pergerakan manusia, baik karena factor militer, politik, maupun ekonomi, menyebarlah Islam. Ke Eropa, Afrika, juga Asia. Sampailah juga ke Indonesia, melalui Aceh, kemudian masuk ke Jawa. Sebagaimana di dunia Arab, Islam di Indonesia pun memiliki wajah yang beragam. Hanya saja keberagaman ini memiliki corak berbeda dengan dunia Arab. Islam Indonesia memang mengenal narasi-narasi besar di atas. Namun sebatas wacana. Dalam pengertian, diperoleh melalui kitab-kitab yang dibawa atau dipelajari di Arab. Bukan merupakan hasil teorisasi kenyataan social. Narasi-narasi tersebut tidak memiliki basis social signifikan di bumi Indonesia, sebagaimana di Arab.

Sedangkan arus utama keislaman yang berkembang dapat dikatakan dalam garis besar *ahlus-sunnah*. Dalam garis ini kemudian muncul apa yang dalam ilmu social dikategorikan sebagai Islam modernis dan Islam tradisionalis. Akar intelektual keduanya sama-sama dari dunia Arab. Aliran kecil lainnya juga berkembang, seperti syiah, ahmadiyyah, islam kejawen, dan lainnya, hingga sekarang. Masing-masing varian diusung bukan hanya oleh satu organisasi social keagamaan.

Dalam waktu yang cukup lama, diskursus Islam di Indonesia diwarnai oleh dikotomi tersebut. Sejak decade 90-an muncul warna baru dalam diskursus keislaman. Muncullah apa yang disebut dengan Islam pembebasan, Islam kiri, Islam progresif, Islam Liberal, Islam transformatif, Islam pluralis, islam postdogmatik,

[97] Hans G. Gadamer, *truth and method*, London, 1975, hal 324

Islam emansipatoris, dan lainnya. Islam tradisionalisme, atau modernisme, sayup-sayup masih menunjukkan kekukuhannya di lapisan masyarakatnya masing-masing. Menjadi pijakan nilai, panduan keseharian, dan pusat orientasi hidup.

Seorang Islamolog, Dr Sunardi, memetakan kajian Islam di Indonesia berdasar basis epsitemologisnya. *Pertama*, islam yang berbasis ilmu-ilmu keislaman tradsional. *Kedua,* islam yang berbasis ilmu social humaniora. *Ketiga*, islam yang berbasis ilmu social kritis. *Keempat*, perkembangan terbaru, islam yang berbasis *cultural studies*. Pemetaan tersebut sebenarnya tidak saling berbenturan. Hanya saja, kajian yangt terakhir melihatnya dari sudut pandang epistemologis.

Pertanyaan yang menggelisahkan adalah, apakah warna-warni keislaman di atas, lebih merupakan kebutuhan obyektif, atau bagian dari *fashion?* Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menyelami atau memahami struktur yang disebut dengan kebutuhan obyektif. Pemahaman akan "kebutuhan obyektif" inilah yang akan menghasilkan suatu formula Islam Indonesia yang *indegenous*. Di sini penulis hanya akan memberikan beberapa sketsa besar yang menjadi tantangan bagi pengembangan keislaman. Pijakannya adalah Islam sebagai rahmat semesta alam. Artinya, Islam yang dikembangkan di Indonesia, dengan melihat pluralisme agama, etnis, ras, kultur, adat istiadat, problematik sosial ekonomi, jelas mustahil jika berbentuk tunggal, homogen.

- *Pertama*, problem ketidakadilan ekonomi politik yang secara massif melanda sebagian besar masyarakat Indonesia. Tradisi marxis menyebutnya sebagai problem penghisapan yang mendehumanisasi manusia. Jika dilihat dari basis sosialnya, inilah wacana keislaman yang dibutuhkan oleh masyarakat tertindas, akar rumput, atau dalam bahasa seorang penulis, disebut sebagai Islam proletar.
- *Kedua*, problem modernitas sosial yang menggiring masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dalam lautan kesadaran palsu, kultur konsumerisme, keterasingan, disorientasi, dan lainnya. Struktur, corak, dan format keislamannya memiliki karakter berbeda dengan yang pertama.
- *Keempat*, problem pluralitas kebudayaan, lokalitas, etnisitas, dan lainnya yang memiliki "kuping epistemologis" berbeda-beda. Problem ini menerobos dua problem di atas. Gus Dur merespons problem ini dengan konsep pribumisasi Islam. Lokalitas ini, seiring dengan mengglobalnya dunia, semakin penting sebab akan menjadi "habitus kekuasaan" paling real dalam tata dunia.
- *Kelima*, problem-problem kesetaraan, diskriminasi, isu-isu rasial, dan berbagai isu lainnya yang muncul seiring dengan berkembangnya *life-style.*
- *Keenam,* problem terjadinya pergeseran zaman dari modernisme ke postmodernis. Pergeseran ini, menurut Bordieu, di tingkatan sosiologis menggeser pijakan manusia dalam bertindak dari berpijak pada nilai ke berpijak pada strategi. Di tingkatan moral, terjadi pergeseran dari semakin kabur dan tidak relevannya batasan baik-buruk, halal-haram.

Masuknya Islam di Indonesia dalam berbagai dataran tersebut akan meletakkaan Islam bukan hanya sebagai kekuatan moral, kekuatan nilai, tapi juga kekuatan politik yang mampu mendorong proses transformasi sosial masyarakat, baik dalam level global, nasional, maupun lokal. Untuk pengembangan ke arah sana, dibutuhkan setidaknya dua hal. Yaitu mentransformasikan tradisi Islam dari kritik moral ke kritik sosial. Untuk tugas yang satu ini, tradisi ilmu-ilmu kritis sudah tidak memadahi lagi, sebab sejauh ini, perkembangan paling canggih baru dalam tahapan kritik sosial, emansipasi, liberasi, dan lainnya. Sudah saatnya dikembangkan tradisi pasca-liberasi, pasca-kritis. Jika tidak, Islam Indonesia pun akan bernasib sama dengan filsafat, yang seperti dikatakan Hegel, laksana burung minerva, burung yang baru mau terbang ketika hari telah senja. Alias selalu terlambat. Kedua, seperti disarankan Sunardi, membangun dialog antar-tradisi intelektual yang telah berkembang di Indonesia. Bagaimana memulainya? Jika ingin kukuh, harus menjadikan tradisi (bukan tradiseonalisme), sebagai basis espistemologi sosial.[]

PETA PEMIKIRAN & GERAKAN ISLAM DI INDONESIA

Prawacana

Islam sebagai suatu agama tentunya memiliki batasan dalam menyentuh aspek parksis kehidupan manusia. Karena, walaupun sumber-sumber utama ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) sering diklaim sebagai ajaran yang lengkap dan komprehensif, namun tentu tidak memberikan petunjuk-petunjuk praktis bagi umatnya dalam mengarungi kehidupan. Sehingga Islam memberikan ruang tafsir yang begitu luas bagi umatnya dalam rangka mengejawantahkan ajaran Islam ke dalam dunia keseharian. Hal ini didukung oleh pernyataan M. Imam Aziz dan juga Farid Wajidi berikut ini: bahwa pembahasan teologis tidak dapat berdiri sendiri tanpa penuntasanya melalui shari-ah. Islam adalah *relegion of action* yang lebih menekankan arti penting perbuatan dari pada niat, Islam terdiri dari Aqidah dan Syariah. Pemikiran teologis harus dibarengi dengan dengan perumusan hukum. Begitu juga hukum-hukum syari-ah mau tidak mau harus menyentuh dan berangkat dari doktrin teologis. Dengan demikian pembaruan teologis tanpa pembaruan syariah akan mengalami kegagalan.

Dalam upaya menjelaskan gradasi pemikiran Islam di setiap zaman, Fazlur Rahman misalnya dengan metode historisnya, membagi perkembangan pemikiran Islam menjadi lima yaitu; *tradisionalis, revivalis, modernisme klasik, neo revivalis,* dan *neo modernis.*

1. Pertama adalah kelompok *tradisionalis*, mereka adalah kelompok yang memiliki keterikatan kuat dengan ulama abad pertengahan. Kelompok tradisionalis menganggap pintu idjtihad sudah tertutup, hal ini berkaitan dengan pandangan bahwa ulama-ulama mahzab terdahulu telah merumuskan permasalahan kehidupan secara lengkap. Jadi, kalaupun ada masalah-masalah baru yang belum diputuskan oleh ulama-ulama terdahulu, tinggal dikiaskan saja dengan fatwa-fatwa mereka. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan mereka yang menganggap bahwa ulama sekarang tidak mampu melakukan ijtihad karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Jadi, secara singkat mereka begitu mengkultuskan ulama-ulama mahzab dan selalu merujuk kepada keputusan-keputusan mereka dalam mengatasi permasalahan yang berkembang dalam konteks kekinian.
2. Kedua adalah kelompok *revivalis*, pemikiran ini muncul diakibatkan adanya rasa keprihatinan yang dalam mengenai keterpurukan kaum muslimin. Sehingga hadirlah suatu gerakan pembaharuan yang mencoba mengangkat kembali derajat kaum muslimin. Gerakan mereka terutama berusaha menghindarkan umat Islam dari praktek tahayul dan khurofat dengan cara kembali kepada ajaran sumber utama Islam; Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai pembeda pemikiran kaum revivalis dengan pemikiran selanjutnya (modernis), mereka tidak mendasarkan pembaharuannya kepada konsep-konsep Barat. Tokoh sentral gerakan ini menurut Rahman adalah Ibn Abdul Wahab yang pada tahap selanjutnya menjelma menjadi kekuatan pemikiran besar yang disebut Wahabi.
3. Selanjutnya adalah *modernisme* klasik, kemunculannya adalah pada awal abad ke-19. Walaupun bertolak dari semangat yang dikobarkan kaum revivalis, namun kelompok pemikir ini sudah memiliki relasi dengan para pemikir Barat. Selain itu, kaum modernis juga memiliki perluasan isi ijtihad. Sehingga mereka mulai berani mengurai masalah-masalah sosial seperti mengenai demokrasi, kesetaraan pria-wanita, dan pembaharuan pendidikan yang diperoleh dari interaksi dengan dunia Barat. Walaupun begitu, mereka tetap menyandarkan pemikirannya dalam kerangka keIslaman. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah Sayyid Jamaludin Al Afgani dan Muhammad Abduh.
4. Berikutnya adalah *Neo-Revivalis*, pemikiran ini muncul sebagai respon terhadap pemikiran modernisme klasik (demokrasi dan juga kemajuan pendidikan). Namun relasi antara kaum neo-revivalis dengan kaum modernisme klasik tidak selamanya antagonis. Ada tiga hal yang menjadi penolakan kaum neo revivalis terhadap pemikiran kaum modernis yaitu mengenai bunga bank, aurat wanita dan juga keluarga berencana. Pemikiran ini muncul pada awal abad ke 20 di daerah Arab Timur Tengah, India-Pakistan, dan juga Indonesia.
5. Terakhir adalah *Neo-Modernis*, menurut Rahman, kehadiran kelompok ini adalah mencoba merespon pemikir-pemikir kelompok yang terlebih dahulu hadir. Keterkaitan mereka dengan pemikiran Barat begitu kuatnya bahkan mereka begitu tercelup dalam arus westrenisasi. Kelompok ini mencoba merekonstruksi pemikiran Islam secara radikal. Mereka mencoba menawarkan metode baru dalam memaknai Al-Qur'an, yaitu melalui pendekatan-pendekatan filsafat hermenetika (tafsir). Hal ini tentunya memunculkan gelombang kontroversi yang begitu besar dikalangan muslim dari golongan tradisionalis dan revivalis yang masih memiliki kerigidan metode dalam menafsirkan Al-Qur'an, terutama kaum tradisionalis yang masih sangat mengkultuskan ulama abad pertengahan.

Khusus di Indonesia pun banyak para peneliti yang mencoba menelaah lebih dalam peta pemikiran Islam di Indonesia secara spesifik. Menurut Fahri Ali dan Bachtiar Effendy, pemikiran Islam di Indonesia dapat dikategorikan menjadi *formalistik, substansialistik, transformatik, totalistik, idealistik,* dan *realistik*. Di sisi lain, Syafii Maarif membedakan corak pemikiran Islam Indonesia menjadi empat, modernis dilanjutkan oleh *neo modernis, neo tradisionalis, eksklusif Islam, modernis sekularis muslim.* Sedangkan M. Dawam Raharjo membedakannya menjadi *nasionalis Islam, humanis-sosialis, muslim-sosial, sekular-muslim* dan *modernis-sekular.*

Namun secara umum pemikiran Islam di Indonesia dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok besar yaitu pemikiran *formalistik, substansialistik,* dan juga *moderat*. Tipologi *formalistik* merujuk kepada golongan yang menekankan ideologisasi atau politisasi yang mengarah pada simbolisme keagamaan secara formal. Kelompok ini menganggap ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna dan lengkap, oleh karenanya tiap-tiap orang yang mengaku muslim haruslah menerima sistem-sistem kehidupan yang ada seperti sistem ekonomi, politik, pendidikan, budaya, dan juga sosial yang dianjurkan oleh Islam. Secara politis, kelompok ini sudah barang tentu sangat menginginkan pemberlakuan syariat Islam, sehingga gerakan mereka terkristalisasi dalam berbagai partai politik Islam ataupun gerakan keagamaan yang mengusung penerapan syariat Islam. Menurut Gus Dur, kelompok pengusung pemikiran formalistik yang disebutnya dengan 'garis keras', dipengaruhi oleh gerakan Islam transnasional dari Timur-Tengah, terutama yang berpaham Wahabi atau Ikhwanul Muslimin, atau gabungan keduanya.

Pemikiran selanjutnya merupakan antitesis dari pemikiran sebelumnya, yaitu *substansialistik*. Menurut pendangan kelompok ini, jalan yang paling tepat untuk melakukan Islamisasi di Indonesia adalah dengan mengedepankan sisi substansial dari ajaran Islam, ketimbang sisi formalnya. Sifat lebih utama dibanding bentuk, sehingga menurut kelompok ini tidak perlu pemberlakuan Syariat Islam, namun lebih strategis nilai-nilai (*value*) yang terdapat dalam ajaran Islam seperti; persamaan, keadilan dan kemerdekaan yang dapat diwujudkan di dalam masyarakat Indonesia. Golongan ini memiliki kemiripan dengan tipologi

neo-modernisme dalam kacamata Rahman. Karena memang kelompok substansialis sangat akrab dengan pembaharuan pemikiran Barat. Abdurrahaman Wahid, Nurcholish Madjid, Dawam Raharjo, Johan Efendi, serta tokoh muda Ulil Abshar Abdalla adalah orang-orang yang pemikirannya termasuk dalam golongan substansialistik. Karena golongan ini menggunakan metode yang bersandarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, maka golongan formalistik mengaggap pemikiran ini telah menghancurkan doktrin-doktrin Islam yang sebenarnya, bahkan lebih jauh mereka dianggap antek-antek Yahudi untuk menghancurkan kelompok Islam fundamentalis.

Terakhir adalah golongan *moderat*, pemikiran ini adalah jalan tengah antara pemikiran formalistik dan substansialistik. Mereka mencoba menjaga kemurnian doktrin Islam, namun di sisi lain tetap merespon perkembangan sosio-kultural yang ada. Dalam pandangan kaum moderat, nilai-nilai keIslaman harus tetap dijaga terutama yang mengenai hal prinsip seperti aqidah dan ibadah, namun dalam prinsip muamalah diberikan keleluasaan dalam merespon perkembangan zaman yang ada. Dalam konteks kekinian, kelompok moderat diwakili oleh dua organisasi besar di Indonesia, yaitu NU (*Nahdlatul Ulama*) dan juga Muhammadiyah. Oleh karenanya, kelompok moderat terfragmentasi menjadi dua, yaitu moderat tradisionalis dan juga moderat modernis.

Pemikiran ke-Islaman di Indonesia

Pemikiran ke-Islaman di Indonesia semakin ramai dan hiruk-pikuk. Lihat saja, di sana-sini muncul sekian istilah yang seolah-olah menjadi icon bagi suatu mazhab atau bangunan konseptual pemikiran keIslaman yang komprehensif. Di sini dapat dituliskan, mulai dari Islam Tradisional, Modernis, Neomodernis, Fundamentalis, Aiternatif, Rasional, Transformatif, Inklusif, Pluralis, hingga Islam Kiri, Liberal, Post-Puritan, dan Post-Tradisionalis. Bagi yang tidak memahami aspek kesejarahan dialektika Islam di Indonesia niscaya akan kebingungan memetakan, apalagi, menangkap tesis-tesis penting setiap pemikiran di atas.

Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, bagaimana membaca fenomena di atas, atau apa arti penting dari fenomena di atas? Tulisan ini, sebagai selingan atas formulasi pemikiran Islam Progresif-Transformatif, akan mencoba membaea secara singkat dengan (atau justru tidak) sikap kritis terhadap berbagai diskursus keIslaman di atas. Ukuran yang dipakai di sini, dengan meminjam istilah Ignas Kleden, adalah relevansi intelektual dan sosial. Artinya, setiap pemikiran akan diuji apakah memiliki relevansi intelektual dan relevansi sosial, atau tidak. Yang dimaksud dengan relevansi intelektual adalah sejauh mana sebuah gagasan memiliki koherensi internal (tidak *ta'arudh)* dan sejauh mana mampu mempertahankan asumsi-asumsi dasarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan relevansi sosial adalah sejauh mana sebuah gagasan mampu menjawab kebutuhan objektif problematik sosial yang dihadapi oleh Indonesia.

Berbicara tentang pemikiran dan gerakan Islam, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari amatan terhadap kekuatan-kekuatan politik yang sedang berlangsung sekarang ini dan momentum-momentum yang sedang akan segera berlangsung, baik dalam skala nasional maupun lokal. Jadi, Islam kini sudah berada di tengah arena pertarungan itu sendiri, entah sebagai landasan bertindak atau ideologi, dan dengan demikian, ditawarkan sebagai alternatif dari bentuk negara dan masyarakat yang telah ada dan berlangsung; entah sebagai komoditi politik untuk tujuan kekuasaan dan meraih dukungan semata; entah sebagai sebuah cita-cita ideal yang diimpikan sebagai bentuk ideal dari bentuk terbangunnya integrasi Islam-bangsa Indonesia yang otentik.

Pengelompokan Aliran Islam

Mark Woodward (2001), misalnya, mengelompokkan respon Islam atas perubahan paska Orde Baru ke dalam lima kelompok. Pengelompokan Woodward ini tampaknya melihat dari sudut doktrin dan akar-akar sosial di dalam masyarakat Islam Indonesia yang lama maupun yang baru.

1. *Pertama, indigenized* Islam. *Indigenized* Islam adalah sebuah ekspresi Islam yang bersifat lokal; secara formal mereka mengaku beragama Islam, tetapi biasanya mereka lebih mengikuti aturan-aturan ritual lokalitas ketimbang ortodoksi Islam. Karakteristik ini paralel dengan apa yang disebut Clifford Geertz sebagai Islam Abangan untuk konteks Jawa. Dalam hubungan politik dan agama, secara *given* mereka mengikuti cara berpikir sekuler dan enggan membawa masalah agama ke ranah negara dan sebaliknya.
2. *Kedua, kelompok tradisional* Nahdlatul Ulama (NU). NU adalah penganut aliran Sunny terbesar di Indonesia yang dianggap memiliki ekspresinya sendiri, karena di samping ia memiliki kekhasan yang tidak dimiliki kelompok lain seperti basis yang kuat di pesantren dan di pedesaan, hubungan guru murid yang khas, mereka juga dicirikan oleh akomodasi yang kuat atas ekspresi Islam lokal sejauh tidak bertentangan dengan Islam sebagai keyakinan. Ia tampaknya tidak berusaha untuk memaksakan "Arabisme" ke dalam kehidupan keIslaman sehari-hari.
3. *Ketiga, Islam modernis*. Mereka terutama berbasis pada Muhammadiyah, organisasi terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama. Ia berbasis pelayanan sosial seperti pendidikan & kesehatan. Ia memperkenalkan ide-ide modernisasi dalam pengertian klasik. Ia misalnya, arus utamanya, menolak ekspresi lokal & lebih mengukuhkan ekspresi puritanisme yang lebih menonjolkan "ke-Arab-an".
4. *Keempat, Islamisme* atau *Islamis*. Gerakan yang disebut terakhir ini tidak hanya mengusung Arabisme dan konservatisme, tetapi juga di dalam dirinya terdapat paradigma ideologi Islam Arab. Tidak heran kalau Jihad dan penerapan Syari'ah Islam menjadi karakter utama dari kelompok ini. Kelompok ini juga

tidak segan-segan membentuk barisan Islam paramiliter untuk melawan siapa saja yang diidentifikasi sebagai musuh Islam yang mereka definisikan.

5. *Kelima,* neo-modernisme Islam. Ia lebih dicirikan dengan gerakan intelektual dan kritiknya terhadap doktrin Islam yang mapan. Ia berasal dari berbagai kelompok, termasuk kalangan tradisional maupun dari kalangan modernis. Mereka biasanya tergabung dalam berbagai NGO dan institusi-institusi riset, perguruan tinggi Islam dan pemimpin Islam tradisional tertentu. Mereka juga melakukan pencarian tafsir baru terhadap berbagai doktrin Islam berlandaskan pada realitas masyarakat dan penggunaan filsafat dan metode-metode baru seperti hermeneutika.

Sementara itu, Peter G Riddel (2002) membagi menjadi empat kekuatan Islam Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru; yaitu *modernis*, *tradisionalis*, *neomodernis* dan *Islamis*. Secara umum, Riddel sepaham dari definisi masing-masing kategori dengan mengabaikan satu kategori dari Woodward, yaitu *indigenized Islam*. Bagi Riddel, masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri dalam menanggapi berbagai isu krusial di tahun-tahun periode pertama pasca Pemilu pertama runtuhnya Orde Baru, yaitu tahun 1999. Isu-isu tersebut antara lain, kembali ke Piagam Jakarta, krisis Maluku, membuka hubungan dagang dengan Israel, negara Indonesia federal, tempat kaum minoritas dalam sistem negara Indonesia, presiden perempuan, dan partai politik yang baru dibuka kran-nya setelah Orde Baru runtuh.

Aliran-Aliran Islam di Indonesia

1. Islam Tradisional

Istilah ini biasanya dilekatkan ke bangunan keIslaman komunitas tradisional, yang sering diasosiasikan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Istilah ini sendiri sesungguhnya bukan label yang diciptakan sendiri oleh mereka, namun dilekatkan oleh aktor di luar diri mereka, entah peneliti, atau organisasi keagamaan lain. Secara sederhana kata tradisional mengacu ke suatu adat kebiasaan. Tradisi bermakna kebiasaan yang terus menerus direproduksi dan dilembagakan oleh masyarakat. Tradisional adalah kata sifat dari sesuatu, sehingga tradisional berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi kebiasaan tadi. Dalam teori politik, faham yang memegang teguh tradisi disebut dengan tradisionalisme. Dalam dataran itu, tradisionalisme memiliki makna pejoratif sebab dikarakterisasikan sebagai komunitas yang konservatif. Dalam konteks pemikiran keIslaman, Islam tradisional, jika itu mengacu ke NU-tempo dulu, mendefinisikan dirinya sebagai pemikiran keIslaman yang dari sisi pemikiran kalam mengacu ke kalam Asy'ari dan Al-Maturidi, dari sisi hukum Islam membatasi diri pada *nzazahibul ar-ba'ah,* dan dari sisi tasawuf mistik, mengacu ke Al-Ghozali dan AI-Junaidi. Kalangan luar mendefinisikan sebagai corak ke-Islaman yang bercampur baur dengan budaya masyarakat setempat seperti Jawa. Ciri khas pemikiran tradisional adalah menundukkan realitas di bawah teks dan manifestasi sosialnya nampak dalam berbagai kegiatan ritual keagamaan seperti ziarah, *khaul,* dan lainnya. Namun teks yang dimaksud lebih mengacu, meski tidak secara mutlak, ke kitab-kitab yang sering disebut dengan *kutulrul mu'tabarah.* Kitab kitab Taqrib, Mu'in, I'anah, Wahhab, al-Mahalli, Mughnil Muhtaj, Bughyah, Asybah, Syarqowi, Jami'ul Jawami', Majmu', Jalalain, Ummul Barahin, Ihya', Hikam, untuk sekedar menyebut contoh, adalah referensi kuncinya.

2. Islam Modernis

Sama dengan istilah tradisional, Islam Modernis juga terkait erat dengan pengertian sosiologis dan epistemologis. Secara sosiologis, lahir dari kalangan masyarakat perkotaan, atau katakanlah kelas menengah ke atas. Secara historis, dapat dipandang sebagai antitesa terhadap praktek keberagamaan kaum tradisional yang dipandang menyimpang. Secara kelembagaan sering diasosiasikan dengan Muhammadiyah dan Persis. Istilah ini mengacu pada makna dasar kata modern itu sendiri. Yang sering diidentikkan dengan pembaharuan (modernisasi) alias rasionalisasi. Di Barat istilah Kiri dapat dilacak sejak *renaissance* yang mendeklarasikan kedaulatan manusia sebagai subjek yang otonom, menolak dominasi rezim kebenaran gereja, dan menumpukan akal sebagai basis paling otoritatif. Modernisasi di Barat berjalan seiring dengan industrialisasi atau perkembangan kapitalisme. Qalam konteks keIslaman, makna modern setidak-tidaknya mengacu ke dua hal. *Pertama,* pada teknologisasi infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas termasuk sistem pembelajaran model kelas. Kedua*,* berbeda dengan *renaissance* yang meneraikan agama, maka di sini yang dieraikan adalah epistemologi model kitab kuning. Sebagai gantinya, langsung kembali ke teks otentik Islam: Al-Qur'an dan Hadits. Menolak kewajiban bermazhab, dan lumayan anti terhadap berbagai budaya lokal secara antropologis-sosiologis tidak bertolak dari teks.

3. Islam Neo-modermis

Istilah ini dilekatkan pada pemikir Islam asal Pakistan, Fazlur Rahman. Kata *neo* di sini rnengacu ke seruan untuk menengok kembali ke warisan Islam klasik. Menurut aliran ini, pembaharuan pemikiran Islam harus berbasiskan pada warisan Islam klasik yang dipandang sangat kaya. Pembasisan ini akan memperkokoh bangunan pemikiran keIslaman modern sebab berakar secara kukuh pada khazanah keIslaman itu sendiri. Jika dilihat dalam optik Kuhnian, epistemologi yang dibangun merupakan epistemologi yang bukan diskontinuitas dengan epsiteme masa lalu. Di Indonesia aliran ini dibawa oleh pentolan Paramadina, Nurcholish Madjid. Intinya adalah apresiasi terhadap masa lalu bukanlah apresiasi terhadap

kebudayaan atau tradisi, namun mengacu ke sejarah pemikiran Islam global (dunia) seperti Ibn Shina, Ibn Thufail, Ibn Rusyd, dan lainnya.

4. Islam Fundamentalis

Istilah ini memiliki kesamaan dengan istilah tradisional, dalam arti tidak diciptakan oleh komunitas mereka, namun diciptakan oleh entitas di Iuar dirinya sendiri. Dalam sosiologi agama, istilah ini berasal dari sejarah pemikiran Kristen. Dalam kalangan Kristen istilah ini berarti penolakan terhadap penafsiran bibel yang tidak *lafdhiyyah.* Introduksi perangkat hermeneutik atau interpretasi non-tekstual ditolak sebab dipandang akan mengancam kemurnian ajaran. Di kemudian hari istilah ini mengglobal namun dengan pemaknaan negatif. Fundamentalisme diidentikkan dengan radikalisme, keras, galak, dan lainnya.

5. Islam Liberal

Istilah Liberal merupakan istilah yang sudah mapan dalam teori dan filsafat politik. Dalam literatur filsafat politik, liberalisme merupakan salah satu varian dari libertarianisme, yang merupakan teori politik sayap kanan. Liberalisme merupakan teori politik sayap kanan yang menerima kebebasan pasar, yang berbeda, misalnya, dengan sayap lainnya, anarkisme. Sargent mendefinisikan libertarianisme sebagai *"an ideology that wants radically reduced role for government.*" Kaum libertarian, menurut Will Kymlicka, berjuang untuk mempertahankan kebebasan pasar, dan menuntut pembatasan penggunaan negara dalam kebijakan sosial. Mereka percaya bahwa kebebasan pasar merupakan instrumen yang mendorong tercapainya faidah maksimal dan yang mampu melindungi kebebasan-kebebasaan politik dan sipil. Pada tingkatan yang radikal, misalnya, mereka menolak mekanisme kebijakan pajak untuk mewujudkan keadilan distribusi. Dalam filsafat politik dikenal dua liberalisme: liberalisme klasik dan liberalisme modern. Liberalisme klasik pada awalnya merupakan suatu ideologi kelas menengah Eropa yang menuntut reformasi sosiaI pada awal abad ke-19. Tokoh-tokohnya adalah Thomas Hobes, John Locke, Montesquie Rousseou, dan Adam Smith dengan konsep kund tentang *Social con track.* Kemudian Jeremy Bentham, James Mill, dengan konsep kunci utilitarianisrne. Sedangkan liberalisme modern, sambil mempertahankan berbagai pandangan liberalisme klasik tentang manusia, ekonomi, dan negara, juga mendorong demokratisasi negara, yang mucnul pada akhir abad 19, dan awal abad 21. Tokoh utamanya di antaranya adalah John Stuart Mill (1806-1873), T. H. Green (1836-1882), L. T. Hobhouse (1864-1929), John Maynard Keynes (1883-1946), William Beveridge (1879-1963).

Sedangkan liberalisme merupakan suatu pandangan filsafat yang mempercayai kemampuan manusia untuk menggunakan rasionya untuk menggerakkan reformasi sosial, cenderung menerima perubahan, bahkan tak dapat ditawar-tawar, walaupun dapat dikendalikan, dan memperjuangkan kebebasan berkehendak manusia. Tinjauan singkat di atas menunjukkan bahwa pandangan-pandangan liberal menyangkut setidaknya manusia, ekonomi, dan politik (negara). Manusia dipercaya sebagai makhluk rasional, dan menumpukan keputusan manusia pada rasionalitasnya. Secara ekonomi mengambil posisi pada pasar bebas, dan secara politik mendukung negara demokratis prosedural. Apa yang dirumuskan oleh intelektual liberal merupakan jawaban terhadap persoalan sosial yang ada. Persoalan itu di antaranya adalah nalar manusiayang ditundukkan oleh otoritas di luar akal seperti budaya, agama, mitos, dan lainnya, kondisi politik yang otoritarians karena bertumpu pada kekuasaaan yang absolut, dan kondisi ekonomi yang penuh dengan penyelewengan seperti KKN yang menggejala secara rnassif. Dengan kata lain, pemikiran bercorak liberal adakah pemikiran yang pro akal budi (akal bebas), pasar bebas, pemisahan agama dan negara (sekularisasi), perlindungan individu (kebebasan individu), dan lainnya.

Pemahaman akan konteks liberal dalam teori politik di atas akan mempermudah dalam memahami makna Islam liberal. Secara sederhana hanya akan diuraikan dua Islamolog yang sama-sama menggunakan istilah liberal, yaitu Leonard Binder dan Kurzman. *Binderme-examine* pararelisme antara liberalisme Barat dan liberalisme Islam. Dalam penelitiannya, dia menyimpulkan liberalisme memiliki akar-akar otentis dalam Islam, bahkan dalam diri tokoh yang dianggap fundamentalis seperti Sayyid Quthb. Dalam pemikiran politik (siyasy) liberalisme Islam ini merujuk pada pemikiran politik Al Abdurraziq, Tariq Al Bishri, yang berkesimpulan tentang tiadanya konsep negara dalam Islam. Selain konsep itu, yang dijadikan unit analisis lainnya adalah tentang toleransi, dan rasionalisrne. Toleransi ini dikaitkan dengan toleransi beragarna, dalam arti kebebasan memeluk agama, suatu doktrin yang juga diakui kalangan fundamentalis. Toleransi ini membuka peluang untuk terbentuknya suatu komunitas politik yang lebih luas, terciptanya suatu koeksistensi. Hanya saja toleransi ini terbatas dalam agama itu sendiri, dantidak dalam kaitan dengan politik. Filsafat liberal mengakui keberadaan pluralisme keagamaan, bahkan ateisme, namun tidak menjadikan salah satu nilai atau aliran agama sebagai basis nilai. Seluruh kebijakan publik ditentukan keabsahannya bukan oleh legitimasi teks, namun oleh rasionalitas kebijakan.

Sedangkan rasionalisme dalam liberalisme Islam dikaitkan dengan cara pandang terhadap teks. Kitab suci dianggap sebagai teks yang bebas ditafsirkan sesuai dengan rasionalitas manusia. Akal tidak secara hitam putih ditundukkan oleh teks. Namun teks secara dialektik memiliki relasi dengan entitas di luar dirinya. Ini dikontraskan dengan pandangan tradisionalis yang melihat teks secara harfiah-verbal, menganggap *pemahaman* agama sebagai suatu kebenaran mutlak, melihat agama bukan sebagai suatu tafsiran atau pendapat.

Ketiga wacana ini sebangun dengan liberalisme. Liberalisme dengan tegas memisahkan agama dengan politik dan membangun budaya toleransi dalam heterogenitas masyarakat. Agama dipandang sebagai urusan pribadi, dan selama tidak menganeam kebebasan-kebebasan politik masyarakat, negara tidak boleh mencampuri urusan tersebut.

Sedangkan Charles Kurzman *meng-examine* liberalisme Islam dengan tradisi Islam sendiri. Dengan konteks intelektual seperti im, Kurzman memetakan tiga varian utama Islam Liberal:

1. *Pertama,* Syariah Liberal, yakni suatu varian yang meyakini bahwa sikap liberal sebagai suatu wacana yang didukung secara eksplisit oleh syariah.
2. *Kedua,* Islam Liberal dalam pengertian kaum muslim bebas mengadaptasi nilai-nilai liberal dalam hal-hal yang oleh syariah diberikan kepada wewenang akal budi manusia.
3. *Ketiga,* syariah yang bersifat ilahiah ditujukan bagi berbagai penafsiran Islam yang beragam.

Dengan kerangka itu, ia mengkarakterisasikan Islam liberal dengan enam tesis dasar, yaitu: penentangan terhadap teokrasi *(against theocracy)* yang diwakili oleh Ali Abd al-Raziq, Muhammad Khalafullah, Taleqani, dan AI-Asmawi); prodemokrasi *(democracy)* yang diwakili oleh Muhammad Natsir, SM Zafar, Mehdi Bazargan, Dimasangeay A. Pundato, Ghannouchi, dan Sadek Jawad Sulaiman); pro hak-hak perempuan *(rights for women)* yang diwakili oleh Nazera Zein-ed-Din, Benazir Bhutto, Fatima Memisi, Amina Wadud-Muhsin, dan M. Syahrur; pro hak-hak non-muslim *(rights of non-Muslim)* yang diwakili oleh Humayun Kabir, Chandra Muzaffar, Mohammed Talbi, Ali Hulae, dan Rasmir Mahmuteehajic); kebebasan berpikir *(freedom of thaught),* yang diwakili oleh Syariati, Qaradhawi, Arkoun, Soroush, An-Nairn, Ajijola, dan Abdul Karim Soroush); dan gagasan tentang kemajuan *(progress)* yang diwakili oleh Iqbal, Mahmud Thaha, Nureholish madjid, Mamadiou Dia, Fazlur Raman, dan Shabbir Akhtar).

6. Islam Kiri/ Kiri Islam

Sebagaimana liberal, istilah kiri juga sudah baku dalam teori politik. Implikasinya terjadi tarik menarik apakah yang dimaksud dengan Islam kiri adalah aspek-aspek kiri dalam Islam, ataukah kiri/ sosialisme yang diramu dengan religiusitas, atau tesis-tesis kiri yang pararel dengan Islam. Hassan Hanafie, deklarator manifesto *Al-Yasar Al-Islamy*, menolak kiri Islam sebagai Islam yang ditafsirkan dalam konteks marxisme, marxisme yang ditafsirkan dalam konteks Islam. Dengan kata lain, Islam dalam dirinya memiliki aspek-aspek sosialistik yang bahkan sangat revolusioner. Dalam wacana sosial istilah kiri atau sosialis dikarakterisasikan oleh Tony Fizgeraald: *rationalist, scientific, optimistic; promotes and criticises industrial modernity; benefits of modernity to be Shared by all; to be built upon the most advanced forms of capitalism; assumes that the social conditions that determine character are alterable, dan; historicises the self-interested liberal individual.* Dalam wilayah pemikiran politik kontemporer Islam baik di dunia Arab maupun non-Arab, cukup banyak para aktifis dan pemikir yang dapat dikelompokkan dalam sayap ini, atau setidak-tidaknya dekat dengan kelompok ini. Misalnya, Salamah Musa, Tahtawi, Shamayyil, Fuad Mursi (mesir), Abdallah Laroui (maroko), Abdul Khaleq Mahgoub (Sudan), (Mesir), Aziz Al-haji (Iraq), Ben Bella, Ahmad ben saleh (Tunisia), Qathafi, Syari'ati (Iran), Cokro (Indonesia), Farid (Afrika Selatan), dan lainnya. Untuk memahami secara agak utuh gagasan Kiri Islam harus mengacu setidak-tidaknya ke Hassan Hanafie, atau Farid Essack. Pemikiran Kiri Islam Hanafie, menurut Isa Boullata, bertumpu pada *telaah kritis sejarah sosial Islam, hermeneutika teks,* dan *tafsir sosial kontemporer* dalam optik neo-marxian, meskipun Hanifie sendiri menolak analisis ini. Dengan kerangka itu, Hanafie menyodorkan *rekonstruksi Tasawwuf, rethinking tauhid,* dan *revitalisasi turats*. Intinya adalah bagaimana memaknai Islam sebagai kekuatan pembebas atau Islam revolusioner. Sedangkan Esack mendefinisikan teologi pembebasan Al-Qur'an sebagai "sesuatu yang bekerja ke arah pembebasan agama dari struktur serta ide sosial, politik, dan religius yang berdasarkan pada ketundukkan yang tidak kritis dan pembebasan seluruh masyarakat dari semua bentuk ketidakadilan dan eksploitasi ras, gender, kelas, dan agama". Dengan perspektif hermeneutika Al-Qur'an, Esack menggunakan takwa dan tauhid, manusia dan kaum tertindas, keadilan dan perjuangan (jihad), sebagai kunci-kunci dalam memahami pesan inti dari Al-Qur'an .

AI-Qur'an selalu mengaitkan taqwa dengan iman kepada Tuhan (Q.S. Yunus: 10: 63; Al-naml, 27:53; Fushshilat, 41:18, pencapaiannya sebagai tujuan ibadah kepada-Nya (AI-Baqarah, 2: 21), dan secara signifikan mengaitkan taqwa dengan interaksi sosial dan perhatian pada sesama yang lain seperti saling berbagai (Q.S. AI-Iail, 92: 5; AI-A'raf, 7: 152-3) menepati janji (Q.S. Ali "imran, 3: 76; AI-A'raf, 7: 52, dan amal baik (Q.S. Ali Imran, 32: 172; Al Nisa, 4:126; Al Maidah, 5:93; AI Nahl, 16:127, dan melawankan orang bertaqwa dengan orang yang selalu mengejar keuntungan sesaat di dunia (Q.S. An-Nisa, 4:77; AI-An'am, 6:32: Yusuf, 12:57), Esack mengatakan bahwa taqwa memiliki tiga konsekeunsi: pembebasan penafsiran dari nafsu pribadi dan prasangka (sekaligus tidak menggunakan tuduhan nafsu dan dzan untuk menutupi kecenderungan ideologis dan upaya menyingkirkan opini orang lain); terjadinya keseimbangan estetik dan spirirtual penafsir; dan membawa penfasir dalam wilayah dialektika personal dan transformasi sosial politik.

Taqwa adalah antitesis penipuan diri, yang mendorong seseorang, suatu pergerakan, atau pemerintah yakin bahwa ia masa berjuang untuk rakyat. Pamaknaan ini, dengan mengaitkan taqwa dengan prinsip keadilan, kebebasan, kejujuran, dan integritas, akan meminimilkan jumlah teks yang dapat dimanipulasi demi kepentingan pribadi maupun ideologi sempit. Tauhid dengan demikian tidak dimaknai dalam konteks teologis yang ahistoris, namun selalu dikaitkan dengan realitas sosial Dengan pijakan seperti

ini, baginya, juga adalah *syirk,* memisahkan teologi dengan analisis sosial. Konsep lain dari pemikiran Esack yang penting adalah tentang "*mustadh'afien*", istilah yang hampir sejajar dengan kaum tertindas dalam tradisi marxis. *Mustadh'afien* dikontraskan dengan kaum *mustakbirun* (05 Al Nahl, 16:22; Al Mu'minun, 23:67; Luqman:31:7), mala (aristokrasi atau penguasa) (05 Hud, 11:27,28; Al Mu'minun, 23: 24-33); Al Syu'ara, 26: 34; kaum mutrofun--orang yang hidup mewah--; Q.S. Saba', 34:34; Az-Zukhruf, 43:23). Istilah itu menunjukkan bahwa kondisi ketertindasan bukanlah sesuatu yang alamiah, namun terdapat sebab struktural yang melibatkan tangan-tangan manusia, atau dengan kata lain terdapat sekelompok manusia yang harus bertanggung jawab atas kondisi ketertinadasan tersebut.

7. Islam Alternatif, Rasional, Inklusif.

Selain yang di atas, juga dikenal istilah Islam altematif, Islam rasional, Islam inklusif, Islam pluralis, Islam post-tradisional, dan Islam post-puritan, dan Islam progresif-transformatif. Keterbatasan tempat memaksa tulisan ini untuk tidak mereview secara agak panjang, namun singkat. Islam alternatif mengacu pada sebuah tulisan karya Jalaluddin Rakhmat, terbitan Mizan, Islam rasional mengacu ke seorang rasionalis dari IAIN Jakarta, Harun Nasution, yang menulis tulisan dengan judul Islam rasional. Islam inklusif merupakan gagasan yang juga belum lama lahir di Indonesia, intinya suatu pemikiran yang tidak melakukan *truth-claim,* mengapresiasi pemikiran keIslaman di luar dirinya, dan bersedia berdialog dengan mereka. Biasanya dilawankan dengan Islam "garis keras" yang memahami Islam secara amat ketat. Tulisan yang mengusung wacana ini, salah satunya, adalah *lslam Inklusif* karya Alwi Shihab. Berbeda dengan Islam inklusif, Islam pluralis, sebagaimana dikatakan deklaratornya, Budi Munawar-Rahman, dalam tulisannya Islam Pluralis (Paramadina), lebih maju daripada Islam Inklusif. Islam ini, katanya, hanya sebatas apresiatif, namun secara diam-diam masih menganggap kebenaran hanya ada dalam Islam. Berbeda dengan itu, Islam Pluralis sampai pada suatu kesimpulan teologis bahwa kebenaran bukan hanya merekah dalam teks-teks otentik Islam, narnun dalam tradisi agama lain pun terdapat kebenaran. Mengakui jalan keselamatan di luar syarat-syarat formal keIslaman. Mirip filsafat perennial.

Islam post-trad, yang digagas kalangan muda NU, mencoba untuk menjawab kebuntuan-kebuntuan Islam tradisional, modernis, maupun neomodernis. Pada intinya tidak lagi memegang tradisi secara membabi buta, namun dengan kritis. Dengan kata lain, tradisi pun terbuka untuk diekslusifkan. Post-trad mencoba memaknai postmodernisme (fakta sosial kapitalisme *advance)* maupun post-strukturalis (perkembangan mutakhir filsafat bahasa), dari optik tradisi. Dalam gerakan sosial, tradisi dijadikan landasan atau pijakan gerakan ideologis. Berbeda dengan neo-modernisme, tradisi yang dimaksud di sini bukan hanya warisan pemikiran Islam klasik, namun juga tradisi budaya lokal suatu daerah. Di sinilah titik penting bedanya. Istilah post-puritan pertama kali dicetuskan oleh intelektual Muharnmadiyyah, Dr. Abdul Munir Mulkhan. Iswah ini pararel dengan post-dogmatik. Pada intinya mencoba untuk keluar dari belenggu ketetatan dalam memahami teks. Dalam bidang kebudayaan digagas ikhtiyar untuk "rujuk" terhadap budaya lokal. Latar belakangnya adalah bahwa kesenian adalah ekspresi estetik alias keindahan, dan keindahan dalam Islam merupakan salah satu *term* sentral. Karena itu berkesenian adalah bagian dari ibadah. Selain itu, disadari bahwa pola puritanisme yang selama ini dipegang ikut bertanggung jawab atas musnahnya sekian budaya atau kesenian rakyat lokal. Atas nama teks, berbagai kesenian rakyat itu dihancurkan, sehingga, setelah menyadari sebagai kekeliruan sejarah, melakukan rujuk kebudayaan.

Catatan Tambahan:

Menurut Hassan Hanafi, dalam otobiografinya, *al-ushuliyyah alIslamiyyah,* kemunculan sekian istilah di atas bukan a-historis. Hal yang sama juga terjadi di Barat. Para teolog, dalam pergulatannya antara teks dan konstruksi sosial, melahirkan sekian formula teologi. Disebutnya, antara lain, *lahut al-tsaury* (teologi pembebasan), *lahut al-taqaddumy* (teologi progresif) *lahut at-tahrier* (teologi pembebasan), *harakah nathban as-syabab* (gerakan pendeta muda), bahkan hingga yang amat kontroversial *lahut mautil ilah* (teologi kematian tuhan). Epistemologi kesemuanya, dalam bahasa Guterrez, adalah *"critical reflection on the reality in the light of christianity."* I'tibar seperti apa yang bisa diambil dari narasi Hanafie di atas? Sama dengan mukaddimah di atas, untuk menguji atau mengkaitkan setiap pemikiran dengan relevansi sosial dan intelektual. Dengan optik ini, kita menjadi tahu bahwa aliran pemikiran Islam yang cukup memiliki fondasi lengkap hanyalah Islam tradisional, modernis, neomodernis, Islam liberal, dan Islam Kiri di luar itu masih kabur dan belum jelas struktur pemikirannya. Persoalan mendasar kedua adalah apakah bangunan pemikiran keIslaman di atas mampu menjawab kebutuhan objektif masyarakat Indonesia alias memiliki relevansi sosial, atau sebaliknya? Alhasil ternyata tidak cukup memadahi. Persoalan kontemporer sekarang adalah ketertinggalan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan, kesadaran, dan neo-imperialisme dalam wujud eksplotasi kapitalisme global Problematik ini menghadirkan penindasan struktural yang kejam dan tak berperikemanusiaan, merusak lingkungan, dan menciptakan kesenjangan yang kian lebar baik dalam level lokal, nasional, maupun global. Islam tradisional sibuk dengan bahtsul masailnya (hakim pengetuk palu yang hanya bicara hitam-putih), Islam modernis, noe-modernis, dan juga Islam liberal terperangkap agenda kapitalisme global. Tesis-tesis besar dalam Islam liberal adalah tesis yang pararel dengan pemikiran dan praktik sosial dari neoliberalisme. Kelemahan paling mendasar dari Islam liberal adalah mengkontradiksikan ketidakadilan sosial atau keterbelakangan semata-mata pada kontradiksi internal suatu masyarakat. Artinya, gagal melihat struktur global sebagai bagian penting akar permasalahan sosial objektif. Bagaimana dengan Kiri Islam? Kiri Islam memang revolusioner, memiliki relevansi intelektual dan sosial yang kuat, hanya saja diragukan praksisnya dalam konteks gerakan sosial di Indonesia. Kiri Islam belum tuntas bicara soal stratak, atau tahapan-tahapan kerjanya, sehingga melahirkan kekosongan-kekosongan praktik revolusioner. Dengan kata lain, lahirnya berbagai istilah di atau lebih merupakan "kegenitan intelektual," atau bahkan justru "fashion" intelektual yang menjadi bagian dari subsistem produksi dan konsumsi ekonomi, ketimbang jihad, ijtihad, dan mujahadah, serius untuk menjawab tantangan sejarah.[] Sumber tulisan dalam *hand-out discussion* ini diambil dari buku Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A., *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 20014) ISBN: 978-602-229-415-3, juga disadur secara utuh dari artikel di internet, majalah, jurnal Islam, artikel media, buku primer & seunder, dan berbagai sumber lainnya.[]

MATERI 15
PANCASILA, DEMOKRASI, DAN SISTEM POLITIK INDONESIA

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

Prawacana: Sejarah Lahirnya Pancasila[98]

Tahun 1511 Bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk kepulauan Maluku, sebagai awal sejarah buramnya bangsa ini, disusul Spanyol dan Inggris yang juga berdalih mencari rempah-rempah di bumi Nusantara. Kemudian Tahun 1596 Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia dibawah pimpinan Houtman dan de Kyzer. Yang puncaknya bangsa Belanda mendirikan VOC dan J.P. Coen diangkat sebagai Gubernur Jenderal Pertama VOC. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia, sebab tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah melawan tentara Sekutu.

Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) Dalam maklumat tersebut sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.

Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut yang dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama tersebut 2 (dua) Tokoh membahas dan mengusulkan dasar negara yaitu Muhammad Yamin dan Ir. Soekarno. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai calon dasar Negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Selain secara lisan M. Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno (Bung Karno) mengajukan usul mengenai calon dasar negara yaitu :

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Perikemanusiaan)
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama PANCASILA, lebih lanjut Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:

1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan.

Selanjutnya oleh Bung Karno tiga hal tersebut masih bisa diperas lagi menjadi Ekasila yaitu GOTONG ROYONG. Selesai sidang pembahasan Dasar Negara, maka selanjutnya pada hari yang sama (1 Juni 1945) para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI.

[98] Sumber tulisan dari, Junaidi Farhan, *Sejarah Lahirnya Pancasila (Sebagai Ideologi & Dasar Negara)* 30 Mei 2011. Diolah dari berbagai sumber sejarah.

Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas 8 orang, yaitu:

1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Mr. Muh. Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata dan
8. Drs. Muh. Hatta

Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujui dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul - usul/ Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Muh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, K.H. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo dan Mr. Muh. Yamin. Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian dikenal dengan sebutan PIAGAM JAKARTA. Dalam sidang BPUPKI kedua, Tanggal 10 s/d 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan pada Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan mem-Proklamasi-kan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama :

1. Mengesahkan Rancangan Hukum Dasar dengan Preambulnya (Pembukaan)
2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang sangat panjang, sehingga sebelum mengesahkan Preambul, Drs. Muhammad Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata KETUHANAN yang berbunyi 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Bung Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya' di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan 'Yang Maha Esa', sehingga Preambule (Pembukaan) UUD 1945 disepakati sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preambule)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Ke-rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan untuk dapat melaksanakan PANCASILA sebagai ideologi & dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup seluruh Rakyat Indonesia, maka Pancasila diterjemahkan dalam butir-butir Pancasila yaitu:

1. **KETUHANAN YANG MAHA ESA:**
   - Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
   - Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
   - Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
   - Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
   - Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
   - Menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
   - Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
   - Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
2. **KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB:**
   - Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
   - Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
   - Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
   - Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
   - Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
   - Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
   - Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
   - Berani membela kebenaran dan keadilan.
   - Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
   - Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. **PERSATUAN INDONESIA:**
   - Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
   - Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
   - Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
   - Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
   - Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
   - Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
   - Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. **KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN :**
   - Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
   - Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
   - Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
   - Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
   - Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
   - Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
   - Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
   - Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
   - Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
   - Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai
   - kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
   - Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
5. **KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA:**
   - Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
   - Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
   - Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- Menghormati hak orang lain.
- Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- Suka bekerja keras.
- Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

DEMOKRASI: Prawacana

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Demokrasi di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang Pemilu.

A. HAKIKAT DEMOKRASI

1. Pengertian Etimologis Demokrasi

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos atau cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa, *demos-cratein atau demos-cratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM - abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani pada waktu itu berupa negara kota (polis) yang penduduknya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya yang berpenduduk sekitar 300.000 orang.

Disebabkan adanya perkembangan zaman dan juga jumlah penduduk yang terus bertambah maka keadaan seperti yang dicontohkan dalam demokrasi secara langsung yang diterapkan seperti di atas mulai sulit dilaksanakan, dengan alasan berikut.

a. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak
b. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan.
c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai, karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir
d. Masalah yang dihadapi negara semakin kompleks dan rumit schingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.

Maka untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, dibentuklah badan perwakilan rakyat. Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Namun pada prinsipnya rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sehingga mulailah dikenal “demokrasi tidak langsung” atau “demokrasi perwakilan. Jadi, demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macarn, yaitu

a. Demokrasi langsung adalah paliarn demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.
b. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Untuk negara-negara modern, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena berbagai alasan, antara lain:

a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan;
b. Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak;
c. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara.

2. Pengertian Terminologis Demokrasi

Dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi. Menurut Samuel Huntington adalah Sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melatui pernililian umurn yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem. itu para calon bebas bersaing untuk memperolch suara dan hampir sernua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer di antara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham. Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government ofthe people, by the people, and for the people).

Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara tersebut. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pernerintahan demokrasi. Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua (Maswadi Rauf 1997), yaitu:

a. kebebasan/persamaan (feedonilequality), dan
b. kedaulatan rakyat (people sovereignty).

Dengan konsep kedaulatan rakyat, pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal, pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan.

3. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan

Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato, dibedakan beberapa macam:

a) Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
b) Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang olch sescorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.
c) Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pernerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan unluk kepentingan rakyat banyak.
d) Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang olch sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.
e) Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dari dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
f) Mobokrasi/Oklilokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

Adapun bentuk pemerintahan yang dianut atau diterima dewasa ini adalah bentuk pernerintahan modem menurut Nicollo Machiavelli membedakan bentuk pemerintahan, yaitu;

a) Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan.
b) Republik adalah bentuk pernerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri.

4. Demokrasi sebagai Sistem Politik

Pada masa sekarang demokrasi dipahami tidak semata suatu bentuk pemerintahan tetapi sebagal sistem politik. Sistern politik cakupannya lebih luas dari sekadar bentuk pemerintahan. Beberapa ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik. Misalnya;

a. Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagal sistem, politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif olch rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
b. Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Sukarno dalam buku Demokrasi Vs Kediktatoran (1981) mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi, sebagai berikut:

1. pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda;
2. pemerintahan konstitusional;
3. pemerintahan berdasarkan hukum (Rule of Law);
4. pemerintahan mayoritas;
5. pemerintahan dengan diskusi;
6. pemilihan umum yang bebas;
7. partal politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya;
8. manaJemen yang terbuka;
9. pers yang bebas;
10. pengakuan terhadap hak-hak minoritas;
11. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
12. peradilan yang bebas dan tidak memihak;

13. pengawasan terhadap administrasi negara;
14. mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah;
15. kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun;
16. penempatanpejabat pemerintahan dengan merit system bukan poll system;
17. penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi;
18. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu;
19. konstitusi UUD yang demokratis;
20. prinsip persetujuan.

Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip ini bisa disebut sebagai prinsip nondemokrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatlf, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja.
2. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusi yang sifatnya konstitusional, tetapi pemerintatian dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
3. Rule of Power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum.
4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekrit.
5. demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerinta'h negara.
6. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

5. Demokrasi sebagai Sikap Hidup

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Pernerintahan atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku, yang senantiasa bersandar pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Pemerintahan demokratis membutulikan kultur demokrasi untuk membuatnya performed (eksis dan tegak). Perilaku demokrasi ada dalam manusia itu sendiri, baik selakii warga negara maupun pejabat negara.

B. DEMOKRATISASI

Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu

a. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokratis kepenguasa demokrasi;
b. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi;
c. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi;
d. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Dalam rumusan yang hampir sama, Samuel Huntington (2001), menyatakan bahwa proses demokratisasi melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu pengakhiran rezim nondemokratis, pengukuhan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap.

1. Nilai (Kultur) Demokrasi

Henry B. Mayo dalam Mirriam Budiardjo (1990) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu:

1. menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela;
2. menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu, masyarakat yang selalu berubah;
3. pergantian penguasa dengan teratur;
4. penggunaan paksaan sesedikit mungkin;
5. pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman;
6. menegakkan keadilan;
7. memajukan ilmu pengetahuan;
8. pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Kita mengetahui bahwa demokrasi yang semula merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik telah berkembang sebagai suatu pandangan atau budaya hidup, yaitu pandangan hidup demokratis.

2. Lembaga (Struktur) Demokrasi

Menurut Mirriam Budiardjo (1997), untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain sebagai berikut;

a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
b. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
c. Suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dwipartai, multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu dengan masyarakat.

d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan.

Dengan demikian untuk berhasilnya demokrasi dalam suatu negara, terdapat dua hal penting sebagai berikut.

a. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan.

Jadi, suatu negara dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi dua kriteria, yaitu :

- pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi (struktur) demokrasi;
- masyarakat demokratis yang berwujud pada adanya budaya (kultur) demokrasi.

3. Ciri Demokratisasi

a) Berlangsung secara evolusioner. Artinya Demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. Berjalan secara perlahan, bertahap, dan bagian demi bagian.
b) Proses perubahan secara persuasif bukan koersif. Artinya Demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan atau tekanan. Proses menuju demokrasi dilakukan dengan musyawarah dengan mellbatkan setiap warga negara.
c) Proses yang tidak pemah selesai. Demokratisasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus.

C. DEMOKRASI DI INDONESIA

1. Demokrasi Desa

Menurut Mohammad Hatta dalam Padmo Wahyono (1990), desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemililian kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut “demokrasi asli”. Demokrasi desa memiliki 5 (lima) unsur atau anasir, yaitu:

a. Rapat,
b. Mufakat,
c. Gotong-royong,
d. Hak mengadakan protes bersama, dan
e. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.

Demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Namun, kelima unsur demokrasi desa tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Moh. Hatta harus meliputi 3 (tiga) hal, yaitu

a. Demokrasi di bidang politik,
b. Demokrasi di bidang ekonomi, dan
c. Demokrasi dibidang sosial.

2. Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai, adil, dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi sebagai:

1) cita-cita masyarakat yang selanjutnya menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik;
2) alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kedaulatan rakyat
b. Republik
c. Negara berdasar atas hukum
d. Pemerintahan yang konstitusional
e. Sistem perwakilan
f. Prinsip musyawarah
g. Prinsip ketuhanan

Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagaiberikut.

1) Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politilc, ekonomi, dan sosial,
2) Secars sempit demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan perwakilan.

3. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan sesuai dengan usia Republik Indonesia itu sendiri. Lahimya konsep demokrasi dalam sejarah modem Indonesia dapat ditelusuri pada sidang-sidang BPUPKI antara bulan Mei sampai Juli 1945.

Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dan sejarah Indonesia. Menurut Mirriam Budiardjo (1997) dipandang dari sudut perkembangan

sejarah, demokrasi Indonesia sampal masa Orde Baru dapat dibagi dalam 3 (tiga) masa yaitu sebagai berikut;

a) Masa Republik I, yang dinamakan masa demokrasi parlementer.
b) Masa Republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin.
c) Masa Republik III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang menonjolkan sistem presidensil.

Afan Gaffar (1999) membagi alur periodisasi demokrasi Indonesia terdirl atas:

a) Periode masa revolusi kemerdekaan,
b) Periode masa demokrasi parlementer (representative democracy)
c) Periode masa demokrasi terpimpin (guided democracy),
d) Periode pemerintahan Orde Baru (Pancasila democracy).

Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat pula dibagi ke dalam periode berikut.

a) Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 sampai 1950.
b) Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri:
    - Masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959;
    - Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965.
c) Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998.
d) Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 sampai 1999,
e) Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 sampai sekarang.

Pada masa reformasi ini, masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan bebas untuk melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Pada masa transisi dan reformasi ini juga, banyak terjadi pertentangan, perbedaan pendapat yang kerap menimbulkan kerusuhan dan konflik antarbangsa sendiri. Setelah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan. Diharapkan penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat.

D. SISTEM POLITIK DEMOKRASI

1. Landasan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia

Berdasarkan pembagian sistem politik, ada dua pembedaan, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi (Samuel Huntington, 200 1). Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai. prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya adalah sistern politik demokrasi.

Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam:

1. Pernbukaan UUD 1945 pada Alinea 4 yaitu “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatn UUD Negara RI yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat ......”
2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD.

2. Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Indonesia

Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia sebagai berikut.

a. Ide kedaulatan rakyat
b. Negara berdasar atas hukum
c. Bentuk republik
d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi
e. Pemerintahan yang bertanggung jawab
f. Sistem perwakilan
g. Sistem pemerintahan presidensil

3. Mekanisme dalam Sistem Politik Demokrasi Indonesia

Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia sebagai berikut.

a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Di samping adanya pemerintah pusat terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonom.
b. Bentuk pernerintahan republik, sedangkan sistem pernerintahan presidensil.
c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun.
d. Kabinet atau mentri diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR. Di samping kabinet, presiden dibantu oleh suatu dewan pertimbangan.

e. Parlemen terdiri dari dua (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/ Kota dari kepala daerah.
g. Sistem multipartai. Banyak sekali partal politik yang bermunculan di Indonesia terleblh setelah berakhir Orde Baru. Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik.
h. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MahkarnahAgung dan badan peradilan di bawahnya yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
i. Lembaga negara lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Kornisi Yudisial.

4. Masa Depan Demokrasi

masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan-persyaratan atau demokrasi perlu syarat hidupnya. Proses demokrasi terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana bagi negara-negara tersebut, baik transisi dari sistem diktator maupun rezim militer ke arah sistem politik demokrasi. Negara-negara maju dan demokratis percaya bahwa transisi menuju demokrasi akan membawa stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi bangsa berkembang. 6 kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di negara-negara berkembang (David Beetharn dan Kevin Boyle, 2000), yaitu sebagai berikut. a. Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terwujudnya prinsip kesederajatan warga negara. b.Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan survive warga negara seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. c. Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga negara. d. Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi, dan rasa tanggung jawab kolektif warga negara khususnya masyarakat pemilih. c. Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber publik secara efisien. f. Pengakuan yang berkelanjutan dari negara-negara demokratis terhadap praktik demokrasi yang berjalan dan secara khusus bersedia menawarkan pelatilian dan penyebarluasan praktik demokrasi yang baik dan kredibel.

Pendapat lain menyatakan, diperlukan 6 kondisi yang dianggap mendukung pembangunan demokrasi yang stabil (Soerensen, 2003), yaitu sebagai berikut:

a. Para pernimpin tidak menggunakan instrumen kekerasan, yaitu polisi dan militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
b. Terdapatriya organisasi masyarakat pluralis yang modem dan dinamis.
c. Potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahankan pada level yang masih dapat ditoleransi.
d. Di antara penduduk negeri, khususnya lapisan politik aktif, terdapat budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide dan lembaga demokrasi.
e. Dampak dari pengaruh dan kontrol oleh negara asing dapat menghambat atau mendukung secara positif.

Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya telah mendapat pijakan kuat atas keberhasilan Orde Baru memajukan pendidikan dan keschatan warga negara.

NEGARA KONSTITUSI

Secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan: tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu. negara, Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi. Hal ini dapat dicemati dari kalimat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai berikut: "... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia." Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional (constitutional state). Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri dari konstitusionalisme (constitutionalism). Jadi, negara tersebut harus pula menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham.

A. KONSTITUSIONALISME

1 . Gagasan tentang Konstitusionalisme

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk), wilayah dan pemerintah. Pemerintah adalah satu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara. Di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenulmya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak

disalahgunakan, tidak sewenang-wenang serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Mengapa kekuasaan perlu dibatasi? Kekuasaan perlu dibatasi karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan. Ingat hukum besi kekuasaan dari Lord Acton yang mengatakan “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutcly”. Di dalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar sebagai lembaga mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negara (Mirriam Budiardjo, 1977). Jadi dapat disimpulkan, di dalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada konstitusi negara bercirikan dua hal pokok, yaitu sebagai berikut;

a. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidakbertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
b. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara.

Konstitusi atau undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil “Government by law, not by men” (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia). Pada permulaan abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme, mendapatkan perumusan secara yuridis. Daniel S. Lev memandang konstitusionalisme sebagai paham “negara terbatas”. Para ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedang ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah Rule ofLaw. Di Indonesia, istilah Rechisstaat atau Rule ofLaw biasa diterjemahkan dengan istilah “Negara Hukum” (Mahfud MD, 1993).

2. Negara Konstitusional

Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar. Inggris tetap merupakan negara konstitusional meskipun tidak memiliki undang-undang dasar. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai aturan pokok yang timbul dan berkembang dalam sejarah bangsa tersebut. Negara konstitusional bukan sekadar konsep formal, tetapi juga memiliki makna normatif. Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang menggambarkan pembagian dan tugas-tugas kekuasaan tetapi juga menentukan dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Sementara itu di lain pihak konstitusi juga berisi Jaminan akan hak-hak asasi dan hak dasar warga negara. Negara yang menganut gagasan konstitusionalisme inilah yang disebut negara konstitusional (Constitutional State). Adnan Buyung Nasution (1995) menyatakan negara konstitusional adalah negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaannya secara hukum.

B. KONSTITUSI NEGARA

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis “constituer” yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar. Para pendiri negara kita (the founding fathers) menggunakan istilah hukum dasar. Dalam naskah rancangan undang-undang dasar negara Indonesia yang dihasilkan oleh BPUPKI, sebelumnya juga dipergunakan istilah hukum dasar. Barulah setelah disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 diubah dengan istilah undang-undang dasar.

Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu:

a. Herman Heller; membagi pengertian konstitusi menjadi tiga:

1) Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
2). Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis,
3) Konstitusi yang ditulis dalam suatu. naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.

b. Prof Prayudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi sebagai berikut.

1) Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.
2) Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.
3) Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.

Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut.

a. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
b. Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar

2. Kedudukan Konstitusi

a. Konstitusi sebagai Hukum Dasar

Konstitusi berkedudukan sebagai Hukum Dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus konstitusi mernuat aturan tentang badan-badan pemerintahan (lembaga-lembaga negara), dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Jadi, konstitusi menjadi (a) dasar adanya dan (b) sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Oleh karena konstitusi juga mengatur kekuasaan badan legislatif (pembuat undang-undang), maka UUD juga mer.upakan (c) dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya.

b. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkis mempunyai kedudukan leblh tinggi (superior) terhadap aturan-aturan lainnya. Olch karena itulah aturanaturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesual atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.

Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara umumnya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum dan secara garis besar. Aturan-aturan itu selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada aturan perundangan di bawahnya.

Menurut Mirriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar 11mu Polilik, konstitusi atau undang-undang dasar mernuat ketentuart-ketentuan sebagai berikut.

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif Dalam negara federal, yaitu masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian,prosedur penyelesaian masalah pclanggaran yurisdiksi lembaga negara.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar.
4. Adakalanya mernuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu. dari undang-undang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya, Undang-Undang Dasar Jeman melarang untuk mengubah sifat federalisme sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler.

Apabila kita membaca pasal demi pasal dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 maka kita dapat mengetahui beberapa hal yang menjadi isi daripada konstitusi Republik Indonesia ini. Hal-hal yang diatur dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 antara lain:

1. Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara.
2. Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya.
3. Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk juga hak asasi manusia.
4. Konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesej ahteraan, ekonomi, sosial, dan pertahanan.
5. Hal mengenai perubahan undang-undang dasar.
6. Ketentuan-ketentuan peralilian atau ketentuan transisi.

Gagasan konstitusionalisme menyatakan bahwa konstitusi di suatu negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menj amin hak-hak dasar warga negara. Sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan, yaitu

a. memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;
b. melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri;
c. memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya (ICCE UIN, 2000).

Selain. itu, konstitusi negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (JimlyAsshiddiqie, 2002).

a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara.
b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara.
d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara,
f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol ofunity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta sebagai center of ceremony.

g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas meneakup bidang sosial ekonomi.
h. Fungsi sebagai sarana perekayasaart dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform).

C. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan olch Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar/Pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau Norma dasar.

1. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Dalam sejarahnya, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macarn undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut;

a. Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuli (16 bab), 3 7 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan bagian penjelasan.
b. Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
c. Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian.
d. Periode 5 Juli 1959-sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut:

a. UUD 1945 yang belum diamandemen,
b. UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahun 2000, tahun 200 1, dan tahun 2002).

Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut.

a. Mengesahkan Rancangan Pernbukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
c. Membentuk sebuah Kornite Nasional Indonesia Pusat (KN1P) untuk membantu presiden.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 hanya berlaku dalam waktu singkat yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sejak 27 Desember 1949 diberlakukan undang-undang dasar baru yang disebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) tahun 1949. Hal ini terjadi karena bentuk negara Indonesia berubah dari bentuk kesatuan ke bentuk serikat atau federal. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) atau (UUD) RIS 1949 berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Dengan demikian UUD RIS 1949 tidak diberlakukan lagi. Periode berlakunya UUD RIS 1949 dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, oleh Moh. Yamin disebut Konstitusi 11.

2. Proses Amandemen UUD 1945

Amandemen (bahasa Inggris: amendment) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UM Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian (Taufiqurohman Syahuri, 2004), yaitu

a. amandemen konstitusi (constitutional amendment);
b. pembaruan konstitusi (constitutional reform).

UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan.

Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yaitu sebagai berikut:

a) Amandemen Pertama Terjadi pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, Disahkan 19 Oktober 1999.
b) Amandemen Kedua Terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 18 Agustus 2000.
c) Amandemen Ketiga Terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 November 2001.
d) Amandemen Keempat TerjadipadaSidang Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002.

3. **Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945**

UUD 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea sebagai pemyataan luhur bangsa Indonesia. Selain berisi pemyataan kemerdekaan, ia juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu mencapai Masvarakat vang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan.

Alinea pertama berisi pemyataan objektif adanya penjaJahan terhadap Indonesia. Selanjutnya mengandung pernyataan subjektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea kedua berisi pemyataan bahwa perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia selama ini telah mampu menghasilkan kemerdekaan. Akan tetapi, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makinur.

Alinea ketiga ini mengandung makna adanya motivasi spiritual bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diyakini bukan hanya hasil perjuangan dan keinginan luhur bangsa tetapi juga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa.

Alinea keempat berisi langkah-langkah sebagai kelanjutan dalam bernegara. Dalam alinea keempat ini ditetapkan tujuan bernegara, bentuk negara, sistem. pemerintahan negara, konstitusi negara, dan dasar negara.

D. SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

1. Bentuk Negara Kesatuan

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian atau negara yang di dalamnya tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. pemerintahan pusat ini tertinggi, dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Maka di dalam negara kesatuan hanya terdapat seorang kepala negara, satu Undang-Undang Dasar Negara yang berlaku untuk seluruh warga negaranya, satu kepala pemerintahan, dan satu parlemen (badan perwakilan rakyat).

Dalam praktiknya, kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan negara tersebut dapat dijalankan melalui dua cara yaitu dengan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kata “sentralisasi” berasal dari kata Centrum yang artinya pusat atau memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan pemerintahan itu dipusatkan, yaltu pada pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan di seluruh wilayah negara itu. Kata “Desentralisasi” dari kata De dan Centrum, de artinya lepas atau melepas. Decentrum artinya melepas atau menjauh dari pusat. Dengan demikian, dalam Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat kekuasaan yang melepas atau menjauh dari kekuasaan yang ada di pusat. Kekuasaan itu nantinya ada di daerah. Negara kesatuan dengan asas desentralisasi menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah negara tersebut. Daerah tersebut menjadi otonom, dalam arti memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu

2. Bentuk Pemerintahan Republik

Secara teoretis, ada dua klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern, yaitu republik dan monarki atau kerajaan. Klasifikasi ini mengikuti ajaran Nicollo Machiavelli (1469-1527). Pembedaan ini didasarkan pada segi cara penunjukan atau pengangkatan kepala negara. Bentuk pemerintahan disebut republik apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pemilihan, sedangkan bentuk pemerintahan disebut kerajaan apabila cara pengangkatan kepala negara melalui pewarisan secara turun-temurun.

3. Sistem Pemerintahan Presidensil

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem. pemerintahan presidensil. Secara teoretis, sistem, pemerintahan dibagi dalam dua klasiflkasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensfil. Klasifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensil didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

Dalam sistern pemerintahan presidensfil, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistern pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Adapun ciri-ciri sistern pemerintahan presidensfil adalah sebagai berikut.

1) Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan/majelis.
2) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/ legislatif
3) Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal ini karena presiden tidak dipilih oleh. parlemen.
4) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5) Parlemen merniliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensifl adalah sebagai berikut:
1) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
2) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Scrikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia lima tahun.
3) Penyusunan program ke~a kabinet mudah disesuaikan denganjangka waktu masa jabatannya.
4) Legislatif bukan tempat kaderisasi untukjabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kelemahan sistem pemerintahan presidensfil adalah sebagai berikut.
1) Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
2) Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.
3) Pembuatan keputusan/kebij akan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terj adi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

4. Sistem Politik Demokrasi

Sistern politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Secara teoretis, klasifikasi sistem politik di era modem ini terbagi dua yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik otoritarian. Samuel Huntington dalam buku Gelombang Demokratisasi Ketiga (2001) membuat pembedazin antara sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Sistem politik nondemokrasi atau otoriter ini mencakup: monarki absolut, rezim militer, kediktatoran, rezim korminis, reziin otoritarian, dan fasis. Pembagian atas sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter ini didasarkan atas:

1. kewenangan pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan warganya
2. tanggung Jawab pemerintah terhadap warga negara.

Adapun sistem politik disebut demokrasi apabila kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warga negara amat terbatas. Pemerintah negara tidak turut campur atas semua aspek kehidupan warganya. Warga negara dapat mengatur sendiri kehidupannya. Di samping itu, adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya atas apa yang dijalankan.

Secara normatif sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila. Olch karena itu, sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dasar Pancasila.[]

MATERI 16
REINVENTING SISTEM KAPITALISME GLOBAL & GEO-EKOSOSPOL

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

A. TIGA FASE IMPERIALISME

Untuk mengawali proses analisis dalam sistem kapitalisme global perspektif ekonomi-politik, maka menurut hemat penulis perlu diuraikan mulai dari akar masalahnya. Berikut ini penulis uraikan sejarah imperialisme yang dipaparkan oleh Noam Chomsky,[99] dan selanjutnya penulis kaitkan dengan logika terjadinya proses sistemik dalam perspektif ekonomi-politik yang kemudian terjadi masalah sosial dalam era neo-liberalisme. Menurut Noam Chomsky, bahwa sepanjang beberapa dekade imperialisme telah menjadi bahan perdebatan serius diantara kalangan pemikir dan para pegiat gerakan revolusioner. Beberapa pemikir seperti Hannah Arendt, Eric J. Hobsbawm dan Vladimir Lenin adalah diantara orang-orang yang tercatat sebagai pemikir-pemikir yang meneorisasikan imperialisme. Seorang penggerak revolusi Rusia, Vladimir Ilyich mengaitkan antara imperialisme dengan perkembangan kapitalisme. Bagi Lenin, imperialisme adalah tahapan terkini yang tak terelakkan dalam logika perkembangan kapitalisme. Imperialisme lahir dari suatu krisis kapitalisme dari suatu negeri. Agar keluar dari krisis periodiknya, kapitalisme harus keluar untuk mencari pasar baru, mengekspansi batas-batas negara-bangsa untuk mencari lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan mentah untuk produksi kapitalis yang lebih murah. Dalam pandangan Lenin, imperialisme dicirikan oleh lima hal, *pertama,* konsentrasi kapital, baik dalam bentuk konglomerasi maupun monopoli; *kedua,* meleburnya kekuasaan kapital finans, industri dan birokrasi; *ketiga,* ekspor kapital dalam bentuk investasi-investasi industrial, *keempat,* pembagian ekonomi dunia oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan korporasi transnasional melalui kartel internasional; *kelima,* pembagian politik dunia oleh negara-negara maju. Meskipun teori Lenin banyak dikritik, tetapi ia telah meletakkan bangunan teori imperialisme yang penting dalam perdebatan selanjutnya, utamanya pengaitannya dengan kapitalisme dan perkembangan kapital finans.

Pendekatan Lenin atas imperialisme ini salah satunya dikritik oleh Samir Amin, seorang Marxis berkebangsaan Mesir. Bagi Samir Amin, imperialisme bukan merupakan *tahap,* melainkan *inheren* dalam setiap ekspansi kapitalisme. Sepanjang sejarahnya imperialisme telah memasuki dua fase dan sedang memasuki fase yang ketiga.

Fase pertama terjadi pada masa ekspansi kapital Eropa Atlantis yang menghancurkan benua Amerika. Dua aktor utamanya adalah Spanyol dan Inggris. Hasil yang terjadi akibat dari penaklukan kolonialis ini adalah hancurnya peradaban Indian, terjadinya Hispano-Kristenisasi, dan genosida total atas masyarakat Indian, dimana negara Amerika Serikat berdiri diatasnya. Penaklukan ini masih dibumbui oleh kehendak untuk memperadabkan ‘dunia lain’ dengan dalih agama. Imperialisasi tahap pertama ini pada akhirnya melahirkan sejumlah perlawanan seperti pemberontakan kaum budak di Haiti, serta revolusi Meksiko dan Kuba.

Fase kedua terjadi pada masa revolusi industri Inggris yang berujung pada penaklukan Asia dan Afrika. Penundukan kolonial ini berupaya untuk berupaya untuk mencari dan membuka ‘pasar baru’ bagi perdagangan Eropa. Cecil Jhon Rhodes adalah salah satu figur pendukung gagasan kolonialisme ini, dengan menyatakan bahwa kolonialisme Inggris di Afrika akan menyebabkan ekonomi Inggris bangkit kembali dan menghindarkan revolusi sosial di dalam negeri. Imperialisme fase kedua ini berakibat pada membesarnya jurang ketidakadilan sosio-ekonomi yang terus dihadapi oleh dunia hingga kini. Jika pada tahun 1800-an rasio ketidaksetaraan adalah dua berbanding satu, maka sejak terjadinya kolonilaisme hingga saat ini rasio ketidaksetaraan ini menjadi enampuluh berbanding satu, dengan sekitar 20% dari penduduk dunia yang bisa mengambil keuntungan dari sistem yang terjadi saat ini. Sementara 80% lainnya hidup dalam ketidakpastian dan ketidaksamaan sosio-ekonomi secara persisten. Imperialisme fase kedua ini menghasilkan perang-perang dunia besar antar kekuatan imperialis untuk mempertahankan koloninya. Namun juga mengahsilkan berbagai perlawanan yang terus menentang proyek-proyek imperialis, seperti lahirnya revolusi sosialis di Rusia dan China, dan tumbuhnya berbagai revolusi pembebasan nasional di negara-negara Asia dan Afrika.

Kemerdekaan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika tersebut tidak lantas menghancurkan sistem imperialis itu sendiri. Kekuatan-kekuatan imperialis, yang diantaranya merupakan kekuatan kolonialis lama seperti Belanda, Inggris dan Perancis serta negara kapitalis baru yang muncul pada Abad ke-19 seperti Jerman, Amerika Serikat dan Jepang, tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dengan ‘situasi baru’ ini. Kaum imperealis ini segera mengubah pandangan tradisionalnya bahwa pertumbuhan kapitalis mereka sangat tergantung dari berapa besar wilayah koloni yang mereka ekspansi. Dengan keunggulan yang

[99] Noam Chomsky, *Neo Imperalisme Amerika Serikat* (Yogyakarta: Resist Book, 2008) h. vii-x.

dimiliki sebagai negara yang maju, kaya-raya dan memiliki sumber daya manusia serta tehnologi yang tinggi, mereka segera mengubah modus dominasinya menjadi imperialisme baru, imperialisme tanpa koloni.

Saat ini sedang memasuki fase imperialisme ketiga yang ditandai oleh runtuhnya sistem Soviet dan rezim-rezim nasionalis-populis di Dunia Ketiga. Pada dasarnya, tujuan dari imperealisme fase ini masih sama dengan fase-fase sebelumnya, yaitu untuk mengukuhkan dominasi kapital, memperluas dan mengekspansi pasar baru, menjarah sumber daya agraria, dan melakukan supereksploitasi pada tenaga kerja di negara-negara pinggiran. Berbagai wacana ideologis disiapkan untuk megukuhkan hegemoni imperialisme tahap ketiga ini, diataranya dengan menggembar-gemborkan demokrasi, humanitarianisme, hak asasi manusia, pasar bebas dan kesejahteraan, pemerintahan yang bersih dan baik. Tetapi wacana-wacana ini dikerjakan oleh model standar ganda dan hanya dilakukan demi mempermulus akumulasi kapital oleh negara-negara maju pada negara-negara pinggiran.

Fase ketiga ini juga berhadapan dengan suatu zaman yang dicirikan oleh terjadinya persenyawaan yang halus antara menguatnya kekuasaan ekonomi korporasi dengan globalisasi teknologi informasi dan pengetahuan. Berbagai fenomena globalisasi seperti: meningkatnya kekuasaan perusahaan-perusahaan multinasional dan perdagangan global, revolusi informasi dan ilmu pengetahuan, serta munculnya masyarakat yang berbasis jaringan (*network sosiety*), menguatnya peranan-peranan lembaga keuangan internasional, serta zona-zona perdagangan bebas yang melampaui negara-bangsa, membuat para teoretisi tidak bersepaham satu sama lain dalam memandang tatanan global pada zaman ini. Sebagian mendefinisikan tatanan global ini dengan cara pandang baru, sembari mendeklarasikan suatu zaman 'pos-imperealis'. Sementara yang lain berpendapat bahwa imperialisme tak pernah berakhir, hanya memakai modus baru dengan motif lama yang tetap sama. Seperti anggur lama yang dituangkan dalam botol baru.

Dalam perspektif ekonomi-politik imperialisme ini berkaitan erat dengan sejarah perkembangan kapitalisme dan proses panjang transformasi masyarakat dari masyarakat feodal ke masyarakat modern, atau sering disebut pada masa kini dengan era globalisasi. Globalisasi inilah yang kemudian berdampak pada krisis masyarakat kapitalisme.

B. INTERNATIONAL TRADE TO IMPERIALISM: GLOBAL EXPANSION OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

Salah satu pemicu berkembangnya ekonomi politik internasional[100] adalah revolusi industri. Terjadinya revolusi industri menyebabkan berbagai perubahan dalam sektor industri, seperti misalnya negara yang awalnya mengembangkan agrikultur berubah menjadi perindustrian. Selain itu tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin demi memaksimalkan produksi. Akibat lain dari revolusi industri adalah terbentuknya kelas-kelas sebagai akibat dari penyebaran paham kapitalis dalam pembangunan dunia. Kelas-kelas yang terbentuk disini adalah berdasarkan pembagian kerja internasional yaitu negara yang memproduksi dan negara pemasok bahan baku.

Pada tahun 1873 hingga pertengahan 1890an terjadi depresi akut pada siklus perdagangan internasional di mana yang terjadi adalah depresi harga, depresi kebutuhan, dan depresi keuntungan. Pertanian adalah korban utama dari penurunan *profit* yang terjadi. *Great Deperession* ini bukanlah masa yang baik bagi seluruh petani yang ada di pasar dunia. Beberapa negara seperti Denmark, dengan bebas memodernisasi sektor pertanian mereka, menggantinya dengan produk ternak yang lebih menguntungkan. Sedang pemerintahan yang lain, seperti Jerman, namun terutama Perancis dan Amerika, lebih memilih *tariffs* guna menjaga stabilitas harga. Sementara bisnis juga menghadapi permasalahnnya sendiri. Ini adalah era pendoktrinasian kepercayaan bahwa suatu kenaikan harga (inflasi) merupakan suatu bencana ekonomi, di mana pada abad ke-19 hal ini merupakan suatu yang sulit diterima oleh anggapan umum para pelaku bisnis saat itu yang lebih mencemaskan akan terjadinya suatu kejatuhan harga (deflasi). *Great Depression* ini seolah telah mengakhiri era ekonomi liberal yang panjang, setidaknya pada komoditas dagangnya.[101] Persaingan ekonomi terjadi di antara negara-negara sebagai akibat adanya industrialisasi dan depresi ekonomi internasional tersebut. Pendapatan atau profit ekonomi suatu negara dipandang sebagai ancaman bagi negara lain. Hal ini direspon oleh banyak negara dengan menerapkan proteksionisme.

Hal ini serupa dengan tahun 1880, migrasi banyak terjadi. Banyaknya perpindahan yang terjadi memunculkan bentuk pemberontakan dan revolusi. Permasalahan di bidang industri, dirasakan pula pada bidang bisnis, dimana terjadi laju inflasi yang cukup tinggi pada abad ke 19, para pembisnis sangat takut akan turunnya harga pasar. Jauh sebelum itu, pada tahun 1873-1896 terjadi hal yang berkebalikan, yaitu adanya deflasi, dimana Inggris mengalami penurunan mata uang sampai 40 %. Deflasi mengakibatkan jatuhnya angka keuntungan, produksi barang begitu dicari namun pasar perkembangannya tidak sejalan

[100] Ekonomi Politik Internasional adalah salah satu kajian dalam studi Hubungan Internasional yang berkembang pesat pasca berakhirnya perang dunia pertama. Jika kita meniliki ke belakang, ekonomi politik itu sendiri sebagai akar dari ekonomi politik internasional, telah muncul sejak adanya revolusi industri. Abad pencerahan menandai beralihnya pola pikir manusia, yang sebelumnya bersifat mistis dan dikekang oleh doktrin gereja, menjadi lebih berpikir secara rasional dan menggunakan logika. Perkembangan yang signifikan dalam sistem ekonomi dari yang sebelumnya menekankan kolektivitas dan tradisional menjadi produksi massal yang modern dan efisien mengubah pola interaksi dalam masyarakat.

[101] Eric Hobsbawm, 1987. "An Economics Changes Gear" dalam *The Age of Empire 1875-1914*, London: Weidenfeld & Nicholson, hlm. 35. dalam http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html.

dengan tuntutan tersebut. Hal itu disebabkan kurang berkembangnya tekhnologi dan alat-alat industri. Perbandingan harga alat dengan harga hasil produksi, cukup jauh. Alat industri dijual mahal sedangkan hasil industri murah.[102]

Ekonomi politik modern internasional ditandai oleh globalisasi produksi dan keuangan (dominasi modal). Dalam tiga dasawarsa terakhir, masyarakat dunia menyaksikan perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan ekonomi politik global. Dunia menjadi demikian kompleks ketika fenomena interdependensi antar bangsa kian meningkat. Kemajuan inovasi teknologi, arus informasi, serta komunikasi yang dibarengi dengan semakin tingginya intensitas arus investasi, keuangan, dan perdagangan global menandai proses yang disebut sebagai globalisasi ekonomi. Proses tersebut juga dicirikan dengan kian massifnya peran aktor non negara dalam politik internasional. Tidak hanya institusi- institusi global seperti WTO, IMF, Bank Dunia, atau perusahaan-perusahaan multinasional, namun juga disertai dengan kemunculan gerakan masyarakat sipil yang lintas batas negara misalnya terjadinya pergolakan politik di berbagai negara yang mendorong orang bermigrasi.[103]

Berdasarkan tulisan Hobsbawm *"Economy Changes Gear"* terdapat beberapa karakteristik ekonomi internasional pada *age of empire*. Karakteristik-karakteristik tersebut antara lain adalah ekonomi yang berbasis geografis, ekonomi dunia yang lebih plural daripada sebelumnya, revolusi teknologi, transformasi struktur kapitalis, transformasi pasar baik secara kualitas maupun kuantitas, pertumbuhan pasar, serta meningkatnya keterkaitan antara ekonomi dan politik.[104] Sebagai dampak perluasan ekonomi secara geografis, sektor agrikultur berganti ke industri. Tak hanya Eropa yang mengembangkannya, tapi juga Amerika dan Jepang dan Rusia. Ekonomi dunia yg lebih prular bisa dilihat dari hubungan antara negara berkembang dan tidak berkembang semakin kompleks dan bervariasi. Didorong oleh revolusi teknologi, negara-negara telah banyak melakukan aktivitas ekonomi yang terbuka satu sama lain.

Ekonomi Politik Internasional sebagai suatu social practice muncul ketika tahun 1873-1890an terjadi suatu fenomena yang dikenal sebagai *great depression* dalam siklus perdagangan internasional. Sebelumnya telah terjadi revolusi industri yang memicu terjadinya *great depression* tersebut di mana adanya revolusi tersebut meningkatkan rivalitas negara-negara dalam perekonomian serta menyebabkan terjadinya transformasi dalam pola-pola ekonomi yang terjadi. Semakin kompleksnya perekonomian internasional tersebut memicu tumbuhnya titik temu antara politik dan ekonomi, di mana terdapat skeptisme mengenai efektivitas otonomi dan perbaikan diri sendiri dari ekonomi pasar seperti yang populer ditawarkan oleh Adam Smith sehingga menyebabkan perlunya campur tangan dari pemerintah dan otoritas publik untuk mengaturnya.

C. TATANAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Dinamika ekonomi politik internasional sejak tahun 1938 hingga saat ini menunjukkan bahwa ekonomi politik internasional merupakan interaksi dari berbagai aspek, dan bukan suatu sistem yang berjalan dengan sendirinya. Mekanisme pasar, kepemimpinan, pemerintah, maupun hegemoni bertujuan untuk menjaga stabilitas dunia. Apalagi dengan semakin berkembangnya globalisasi, menuntut semua aspek dalam tatanan ekonomi politik internasional untuk meningkatkan kualitas interaksinya. Menurut Gilpin, setidaknya ada tiga teori yang menerangkan tatanan ekonomi politik internasional. Ketiga teori tersebut adalah teori dualisme ekonomi, teori *modern world system,* dan teori *hegemonic stability.*[105] Dengan melihat ketiga teori tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai struktur yang sedang terjadi, siapa aktor-aktor dalam EPI dan peraturan yang mengatur berjalannya tatanan ekonomi politik internasional tersebut.

Teori dualisme ekonomi berasumsi bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan perubahan sektor-sektor yang pada awalnya bersifat tradisional menjadi modern.[106] Sektor tradisional disini maksudnya adalah belum banyaknya modernisasi dan efisiensi serta *self-sufficiency*, sedangkan sektor modern berarti banyak modernisasi dan efisiensi. Secara tradisional, kegiatan produksi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik saja, tapi dalam perkembangannya kini proses produksi dibuat lebih efisien bahkan mengintegrasikan keseluruhan aktivitas perekonomian negara-negara. Dengan demikian, institusi-institusi dan pasar terintegrasi secara global meningkatkan persaingan yang memicu para produsen untuk terus berkembang dan berinovasi. Teori ini bersifat liberalis karena menganggap manusia akan selalu berusaha menjadi baik.

Teori yang kedua adalah teori *modern world system*. Teori sistem dunia modern didefinisikan sebagai sebuah unit dengan divisi buruh tunggal dan sistem budaya yang jamak.[107] Teori ini menganut ideologi marxisme karena masih mempercayai adanya *class struggle* yakni adanya dominasi suatu kelas terhadap kelas yang lain. Wallerstein yang menganut marxisme membagi dunia menjadi tiga kelas yaitu

---

[102] *Ibid*., hlm. 38.
[103] *Ibid*., hlm. 36-37.
[104] *Ibid*., hlm. 51-55.
[105] Robert Gilpin, 1987. "The Dynamics of Internastional Political Economy" dalam *The Political Economy of Internastional Relations,* Princeton: Princeton University Press, hlm. 64. dalam http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36639-Geopolitik%20dan%20Geostrategi.html.
[106] *Ibid*., hlm. 66.
[107] *Ibid*., hlm. 74.

core, periphery, dan *semi-pheriphery.*[108] Dalam sistem dunia modern, *core* atau negara-negara kuat akan selalu mengeksplorasi *periphery* atau negara lemah dan *semi-periphery* demi mendapat keuntungan. Kapitalisme, sebagai salah satu kejadian yang telah mengglobal, turut memunculkan hirarki-hirarki dalam ekonomi domestik serta EPI. Dalam kehidupan nyata, bisa kita lihat bahwa negara-negara barat yang maju seperti Amerika, Inggris, dan Jerman cenderung selal mengeksploitasi negara-negara berkembang di Asia dan Afrika.

Teori yang terakhir adalah teori *hegemonic stability*. Teori ini pertama kali diuraikan oleh Charles Kindleberger (1973). Teori ini menjelaskan tentang tatanan dunia ekonomi yang liberal dan terbuka, yang di dalamnya terdapat keterlibatan kekuatan negara-negara hegemoni. Menyadari sulitnya kerjasama tanpa ada komando yang jelas dari satu negara untuk mengarahkan negara-negara yang tergabung dalam aktivitas ekonomi internasional, maka eksistensi kekuasaan dominan diperlukan (Keohane, 1980). Hegemoni tidak hanya akan menjadi pemimpin perekonomian internasional tetapi juga bertindak sebagai stabilisator yang mengawasi kelancaran perekonomian dunia, membatasi konflik antar negara, mendorong kerjasama dalam keseimbangan dan mencegah terjadinya kecurangan. Contohnya adalah Amerika Serikat yang berhasil memulihkan perekonomian internasional setelah perang dunia kedua.[109] Tanpa adanya Amerika Serikat yang muncul sebagai hegemon, kemungkinan perekonomian dunia akan terus mengalami kekacauan.

Tatanan ekonomi politik internasional yang ada saat ini berevolusi dari ketiga teori tersebut. Sesuai dengan teori dualisme ekonomi yang bersifat liberal, perekonomian dunia memang berubah dari yang tradisional menjadi modern dan penuh persaingan. Hal ini tidak lepas dari kompetisi yang dihadirkan oleh liberalisme itu sendiri sehingga manusia selalu berusaha menjadi lebih baik. Namun kebebasan serta persaingan dalam liberal tersebut juga memunculkan kelas-kelas serta eksploitasi dari *core* terhadap *periphery* dan *semi-periphery* sesuai dengan pandangan teori sistem dunia modern. Untuk menstabilkan perekonomian dunia diperlukan adanya hegemon seperti yang diungkapkan oleh teori stabilitas hegemoni.

Jika melihat sistem perekonomian internasional pada kenyataannya negara hegemoni saja tidak akan mampu menjaga kestabilan ekonomi internasional. Sesuai dengan tulisan Lairson (1993), bahwa kehegemonian Amerika Serikat pun mengalami dinamika yang cukup bervariasi. Dimulai dengan AS yang menjadi penyelamat perekonomian dunia, menjadi penguasa ekonomi internasional, menurunnya ekonomi AS, defisit keuangan, ketidakstabilan dollar, hinga mencapai keseimbangan kembali. Dari dinamika tersebut, terlihat bahwa pasar, organisasi internasional, dan *Multi National Corporation* (MNC) juga terlibat dalma ekonomi politik internasional. Namun peran hegemon tetap diperlukan disini sebagai stabilisator.

Tatanan ekonomi politik internasional terbentuk dari tiga teori yang diungkapkan oleh Gilpin sebagaimana diungkapkan di atas yaitu teori liberalis dualisme ekonomi, teori sistem dunia modern, dan teori stabilitas hegemoni. Ketiganya membentuk tatanan ekonomi politik internasional seperti yang ada saat ini dengan aktor-aktor yang tidak hanya negara saja tetapi juga organisasi internasional, institusi internasional, MNC, dan lain sebagainya, namun tetap ada hegemoni yang menjadi pengatur tatanan sistem ekonomi politik internasional tersebut. Teori dualisme ekonomi tak lagi relevan di tengah modernisasi yang memang telah terjadi. Teori ini masih bisa digunakan apabila dalam konteks pertengahan abad ke-20 yang memang masih terdapat banyak transformasi struktur ekonomi, sosial, serta politik. Tapi kini hampir semua negara sudah memiliki identitas serta karakteristik masing-masing mengenai dasar praktek ekonommi, sosial, serta politik mereka, termasuk pada negara-negara yang baru merdeka di dekade 90an. Secara struktur, EPI masih didominasi oleh aktor-aktor dominan (hegemon), seperti Amerika atau korporasi raksasa negara *core*.

D. VARIAN PENDEKATAN UTAMA DALAM EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL

Karena sedemikian kompleksnya studi Ekonomi Politik Internasional seperti yang telah dijelaskan oleh Robert Gilpin, maka kemudian terdapat beberapa ideologi yang dapat membantu dalam memahami lebih lanjut berkenaan dengan studi Ekonomi Politik Internasional dan dirasa merupakan ideologi besar dalam perkembangan studi ini, yakni liberalisme, marxisme serta nasionalisme. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan menjelaskan ketiga macam ideologi tersebut serta kontribusinya yang begitu besar dalam perekonomian dunia.

Yang pertama, dalam pandangan liberalisme, terdapat serangkaian nilai yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai teori liberal tentang ekonomi dan politik serta membuat kedua hal tersebut dapat berjalan beriringan. Dalam teori ekonomi liberal, hal yang menjadi fokus utama ialah bagaimana menciptakan pasar bebas serta meminimalisir intervensi pemerintah terhadap pasar atau yang biasa disebut sebagai *laissez-faire*. Sedang dalam teori politik liberal, yang menjadi kajian utamanya ialah berkenaan dengan kesetaraan individu serta kebebasan. Kemudian, hubungan ekonomi dan politik dalam liberalisme salah satunya dapat kita temui pada masa Adam Smith yakni ketika ide pasar bebas dengan non-

[108] I Wallerstein, 1974. *The Modern World System*. New York: Academic Press

[109] Thomas D. Lairson, And D. Skidmore, 1993. "The Political Economy of American Hegemony: 1938-1973, dalam *Internastional Political Economy: the Struggle for Power and Wealth,* Orlando: Harcourt Brace College Publishers, hlm. 66.

intervensionisme yang dikembangkannya atas asumsi filosofi dasar manusia sebagai makhluk bebas yang ternyata memang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian internasional.[110]

Tak jarang kaum liberalis menganggap antara politik dan ekonomi ibarat *guns and butter*, banyak yang percaya bahwa politik cenderung untuk memisahkan dan ekonomi cenderung untuk menyatukan. Akan tetapi, bagaimanapun juga untuk membuat ide tersebut menjadi sebuah kebijakan tentu tidak hanya berdasar pada asumsi yang berasal dari ekonom saja, namun juga berasal dari dukungan politik yang diberikan. *Laissez-faire* tidak dapat diterapkan jika bertujuan untuk benar-benar menghapus intervensi negara, karena bagaimanapun juga, seseorang tentu tinggal di suatu wilayah dan sistem tertentu yang disebut negara dalam menjalankan seluruh kegiatannya. Selain itu, para liberalis juga memiliki kekhawatiran akan terjadinya *market failure*, yakni tidak beroperasinya pasar sebagai harapan akan efisiensi dan keuntungan bersama.[111]

Berbagai regulasi politik tentu sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk memperbaiki ataupun menanggulangi terjadinya *market failure*. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa pasar merupakan keuntungan besar bagi manusia, namun juga memiliki resiko buruk akan ketidakpastian keuntungan. Situasi tersebut tentu hanya dapat diperbaiki melalui pengembangan manajemen politik tentang pasar. Keynes juga mengusulkan agar pasar 'diatur dengan bijak' (*wisely managed*) oleh Negara.[112] Karenanya, *laissez-faire* masih membutuhkan negara sebagai penyusun dasar-dasar yang dianggap sangat penting bagi pasar untuk dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dari itulah, dapat ditunjukkan bagaimana hubungan antara politik dan ekonomi. Jika dilihat lebih luas dalam kajian hubungan internasional, kaum liberalis percaya bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan dapat menjadi salah satu sumber hubungan yang damai antar negara dikarenakan sifat perdagangannya yang saling menguntungkan (*positive sum game*) akan sangat membantu hubungan antar negara yang kooperatif.[113]

Sedangkan ideologi ekonomi nasionalisme atau terkadang disebut juga sebagai ekonomi merkantilisme memiliki ide dasar bahwasanya segala bentuk aktivitas ekonomi hendaknya merupakan salah satu subordinat dalam tujuan pembangunan negara serta menjadi kepentingan negara dalam menjalankan fungsi sistem internasional.[114] Tentu saja dalam hal ini kemudian jelas terlihat bahwasanya kegiatan ekonomi sekaligus dijadikan sebagai alat politik suatu negara demi mendapatkan *power*. Berbeda dengan ekonomi liberalisme yang cenderung berusaha memainkan *positive sum game* dengan saling menguntungkan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi internasional, maka merkantilisme bergerak dengan memainkan *zero sum game* dan perekonomian internasional dipandang sebagai sebuah arena konflik yang terjadi antara berbagai kepentingan nasional yang saling berlawanan.[115]

Ekonomi merkantilisme sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni merkantilisme *benign* serta merkantilisme *malevolent*. Merkantilisme *benign* dapat disebut pula sebagai merkantilisme yang bersifat defensif, artinya suatu negara memandang bahwa kekuatan ekonomi digunakan sebagai alat perlindungan (*safeguarding*) sekaligus menjadi alat untuk mempertahankan diri dari saingan negara lain yang dianggap memiliki power yang besar.[116] Sebaliknya, merkantilisme *malevolent* lebih bersifat ofensif, artinya merkantilisme jenis ini memandang bahwasanya kekuatan ekonomi dan kekuatan politik serta militer bersifat saling melengkapi dengan tujuan untuk menyerang kekuatan ekonomi negara lain, karena itulah merkantilisme jenis ini sering menggunakan kebijakan-kebijakan ekspansi untuk mencapai tujuan tersebut.[117] Sebagai contoh nyata ialah kebijakan ekspansi kekuatan kolonial negara-negara Eropa ke Asia atau kebijakan ekonomi Jerman pada masa kepemerintahan NAZI yang dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian Hjalmar Schacht kepada negara-negara kawasan Eropa Timur pada sekitar tahun 1930an.

Selain ideologi ekonomi merkantilisme, ideologi ekonomi yang diusung marxisme juga muncul sebagai kritik terhadap ideologi liberalisme. Karl Marx menolak pandangan liberalisme tentang keuntungan bagi semua pihak (*benefits for all*) dan menganggapnya hanya sebagai alat untuk pengeksploitasian manusia serta ketidaksamaan kelas. Dalam hal ini, Marx lebih menaruh perhatian kepada prinsip *zero sum game* seperti halnya yang diterapkan oleh ekonomi merkantilisme, hanya saja, ketika merkantilisme mengaplikasikan hal tersebut dalam hubungan antar negara, maka Marx mengaplikasikan prinsip tersebut dalam hubungan antar kelas, proletar dan borjuis,[118] karena Marx menempatkan ekonomi menjadi prioritas utama daripada politik, berbeda dengan merkantilisme yang menempatkan politik menjadi prioritas utama.

---

[110] Robert Gilpin, (1987). *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press. hlm. 27. dalam http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36639-Geopolitik%20dan%20 Geostrategi.html.

[111] Robert Jackson, & Georg Sorensen. (1999). *International Political Economy*, dalam *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 182.

[112] Keynes dalam Jackson, Robert & Georg Sorensen. (1999). *International Political Economy*, dalam *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press. hlm. 183.

[113] Robert Gilpin, (1987). *Op. Cit.,* hlm. 31.

[114] *Ibid*., hlm. 31.

[115] Robert Jackson, & Georg Sorensen. (1999). *Op. Cit.,* hlm. 178.

[116] Robert Gilpin, (1987). *Op. Cit.,* hlm. 32.

[117] Robert Jackson, & Georg Sorensen. (1999). *Op. Cit.,* hlm. 179.

[118] *Ibid*., hlm. 184.

Dalam tulisannya, Robert Heilbroner juga menambahkan bahwa marxisme juga memiliki empat elemen dasar yang sangat penting, yang pertama yaitu pendekatan dialektis akan pengetahuan dan masyarakat yang menjelaskan sifat asli realitas yang dinamis dan konfliktual. Dalam hal ini, ketidaksamaan sosial dan perubahan konsekuen terjadi karena adanya perjuangan kelas serta berbagai kontradiksi yang melekat dalam berbagai fenomena sosial dan politik. Karenanya, Marx menganggap bahwa tidak ada harmoni sosial ataupun *equilibrium* sebagaimana yang dipercayai oleh kaum liberal.[119] Elemen dasar yang kedua ialah pendekatan materialis. Dalam elemen kedua ini, perkembangan kekuatan produksi dan aktivitas ekonomi menjadi faktor utama perubahan sejarah dan akan beroperasi melalui perjuangan kelas dalam rangka pendistribusian kesejahteraan sosial.[120]

Elemen dasar Marxisme yang ketiga ialah pandangan umum tentang perkembangan kapitalis. Dalam elemen ketiga ini mode produksi kapitalis dijalankan oleh serangkaian hukum gerak ekonomi dalam masyarakat modern. Dan elemen terakhir yang ditulis Robert Heilbroner ialah komitmen normatif akan sosialisme. Dalam elemen ini dijelaskan bahwasanya seluruh kaum marxis percaya bahwa masyarakat sosial merupakan cita-cita akhir yang sangat penting dan diharapkan dalam perkembangan sejarah.[121]

Meskipun marxisme muncul sebagai kritik terhadap liberalisme, namun kaum marxis menganggap bahwa kapitalisme yang diusung kaum liberal bukan merupakan sesuatu yang negatif dan membawa dampak buruk bagi perkembangan marxisme. Justru sebaliknya, kapitalisme merupakan proses yang sangat baik bagi kelas proletar untuk menggunakannya sebagai momentum revolusi. Kapitalisme dimanfaatkan melalui dua proses, yang pertama, kapitalisme akan menghancurkan sistem perekonomian yang pernah diterapkan sebelumnya, yaitu feodalisme, karena sistem feodalisme dianggap lebih bersifat eksploitatif terhadap kelas pekerja dengan menganggapnya sebagai budak yang tidak harus dibayar. Sedangkan kapitalisme memungkinkan para pekerja tersebut untuk bebas menjual kemampuan bekerjanya kepada pihak manapun dan mencari upah yang paling layak.[122]

Proses kedua, ketika kemudian proses produksi tidak dapat berjalan dengan sendirinya dan sangat membutuhkan tenaga pekerja untuk dapat menjalankannya, maka kelas pekerja akan memiliki kekuatan tawar yang lebih. Dari sinilah momentum revolusi terjadi, di bawah kontrol sosial, kelas pekerja akan mengambil alih tujuan awal produksi yang ditujukan bagi keuntungan individual menjadi tujuan produksi bagi keuntungan seluruh kelas pekerja yang merupakan kelas mayoritas dengan jumlah yang sangat banyak.[123]

Dalam memahami studi Ekonomi Politik Internasional, marxisme memiliki kerangka kerja bahwasanya negara tidak bergerak secara otomatis, namun negara digerakkan oleh kepentingan kelas yang berkuasa. Sebagai contohnya ialah negara-negara kapitalis yang digerakkan oleh kepentingan kaum borjuis. Hal tersebut kemudian berarti bahwa segala macam perjuangan antar negara haruslah dilihat dalam konteks ekonomi sebagai persaingan antar kelas kapitalis yang berbeda negara, karena marxis memiliki paham bahwa konflik kelas merupakan hal yang sangat fundamental daripada konflik antar Negara.[124]

E. EKSPANSI KAPITALISME

Sebagaimana bidang studi lain yang memiliki sejarah yang melatarbelakanginya, maka pada kesempatan ini pula penulis akan menjelaskan tentang sejarah Ekonomi Politik Internasional terutama pada masa ekspansi kapitalisme. Kapitalisme awalnya mungkin banyak dilihat sebagai cara pengaturan ekonomi dengan melibatkan ekspansi secara berangsur-angsur ke luar wilayah dalam jaringan pertukaran barang. Namun, kapitalisme sebenarnya memiliki cakupan yang lebih dari itu, hal ini dikarenakan ekspansi kapitalisme tidak hanya dianggap sebagai taktik pasar, melainkan juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cakupan tidak hanya pada aktifitas ekonomi saja, namun juga di bidang sosial dan politik.

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Ankie Hoogvelt dalam tulisannya yang berjudul *The History of Capitalist Expansion* bahwasanya dengan adanya revolusi industri, semakin mendorong minat negara-negara Eropa untuk melakukan penjelajahan di luar negaranya. Motif yang paling awal ialah dikarenakan oleh faktor perekonomian dalam negeri negara-negara Eropa yang mengharuskannya melakukan perdagangan di luar teritorial mereka (*mercantile phase*). Paul Baran menganggap fase yang terjadi sekitar tahun 1500 hingga 1800an ini tidak lebih dari sekedar bentuk penjarahan yang disamarkan, dengan alasan untuk mentransfer kembali surplus ekonomi kembali ke Eropa yang dapat membantu dalam pembiayaan revolusi industri serta pengembangannya.[125] Tentu saja, perdagangan yang dilakukan tidak hanya sekedar perdagangan biasa, namun negara-negara Eropa juga ‘mengamankan’ pasokan *raw materials* serta bahan makanan melalui berbagai peraturan dagang.

[119] Heilbroner dalam Gilpin, Robert. (1987). *Op. Cit.,* hlm. 35.
[120] *Ibid*., hlm. 35.
[121] *Ibid*.
[122] Robert Jackson, & Georg Sorensen. (1999). *Op. Cit.,* hlm. 184.
[123] *Ibid*.
[124] *Ibid*., hlm. 185.
[125] Baran dalam Hoogvelt, Ankie. (1997). *The History of Capitalist Expansion, dalam Globalization and Post-Colonial World: The New Political Economy of Development*. Baltimore: The John Hopkins University Press, hlm. 17. dalam http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36639-Geopolitik%20dan%20 Geostrategi.html.

Tidak berhenti pada fase merkantilisme, negara-negara Eropa yang telah melihat pasar dan sumber *raw materials* baru di luar wilayahnya kemudian merasa perlu untuk melegitimasi temuan-temuan tersebut, mengingat pada saat itu telah muncul kembali persaingan-persaingan antar negara Eropa yang didasarkan atas peningkatan kekuatan dan kekuasaan. Negara-negara Eropa merasa bahwa kontrol dan administrasi politik secara langsung pada teritori luar negara merupakan metode yang sesuai untuk mengatur sistem produksi dan meletakkan infrastruktur demi menambah lancarnya kegiatan perekonomian yang ada pada saat itu.[126] Disebutkan oleh Ankie Hoogvelt bahwa keadaan kolonialisme sebenarnya juga memberikan keuntungan bagi negara *periphery* karena keadaan ini melibatkan negara *periphery* untuk dapat turut serta ke dalam jaringan ekonomi yang intensif dan ekspansif dengan negara-negara *core.*[127]

Kolonialisme tentu identik dengan praktek aneksasi terhadap wilayah lain di luar teritori negara. Kebijakan aneksasi wilayah tersebut sangat mendapatkan dukungan dari para pembayar pajak di negara asal penjajah, karena melalui hal tersebut, maka kemudian negara pun akan mendapatkan tambahan pendapatan yang berasal dari pajak wilayah yang diduduki. Dengan demikian, negara akan memiliki pendapatan lebih dalam membiayai berbagai perkembangan sektor yang ada, serta semakin membuat negara tersebut untuk dapat bertambah besar dan kuat dalam persaingan antar Negara.[128] Kemudian, daerah jajahan juga dipandang sebagai hak milik negara penjajah. Karenanya, negara penjajah merasa perlu untuk menggalakkan kegiatan para misionaris demi memberikan ‘peradaban’ kepada masyarakat daerah jajahan yang dirasa kurang beradab (*civilizing the uncivilized*). Adapun maksud misi memberi peradaban ialah mengajarkan budaya-budaya Eropa hingga gaya hidup Eropa, sehingga diharapkan masyarakat daerah jajahan akan mampu berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan serta aktifitas industri yang lebih modern.[129]

Dengan adanya partisipasi tersebut, nantinya penjajah tidak akan hanya berfokus pada pencarian *raw materials* sebagai bahan baku kegiatan produksi mereka di Eropa namun lebih dari itu, para penjajah berharap masyarakat di wilayah jajahan akan tunduk terhadap peraturan negara penjajah dan dapat membantu mereka untuk semakin meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga penjajah akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Selain itu, kolonialisme juga dipandang sebagai satu-satunya kebijakan untuk dapat mempertahankan diri, karena jika suatu negara mengabaikan kolonialisme, maka negara tersebut akan dengan mudah dikuasai negara lain yang memiliki power lebih kuat.[130]

Analisis: Secara historis, ekspansi kapitalisme yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai motif, mulai dari masalah rivalitas antara negara-negara Eropa melalui pengembangan kekuasaan, kelangkaan *raw materials* hingga kelebihan produksi. Jika dilihat dari segi rivalitas dan pengembangan kekuasaan, negara-negara Eropa memiliki *norms* tersendiri mengenai masalah wilayah. Karenanya pada saat itu banyak negara-negara Eropa yang melakukan ekspansi di luar batas-batas teritorial negaranya dalam rangka pendistribusian *power* dan semakin memperluas wilayah karena didukung oleh terjadinya revolusi industri. Prinsip *bellum omni contra omnes* semakin meningkatkan situasi persaingan antar negara-negara Eropa pada saat itu, karena mereka memiliki asumsi bahwa manusia cenderung akan memerangi manusia lain dan semakin luas wilayah, maka suatu negara akan mendapatkan *power* yang semakin besar.

Selain itu, revolusi industri juga menimbulkan kebingungan bagi negara-negara Eropa berkenaan dengan masalah *raw materials*, mengingat negara-negara Eropa tidak memiliki banyak *raw materials* sebagai bahan baku produksi mereka. Kelangkaan tersebut yang kemudian juga mendorong negara-negara Eropa untuk melakukan ekspansi di luar Eropa demi mencari dan mendapatkan *raw materials* agar kegiatan produksi mereka dapat berjalan lancar. Kemudian, permasalahan tidak hanya sampai pada masalah *raw materials*. Revolusi industri yang pada saat itu terpusat di Eropa akhirnya membuat banyak sekali barang produksi yang menumpuk di Eropa. Mengapa demikian? Logikanya di negara-negara Eropa yang cenderung *profit oriented*, ketika revolusi industri terjadi, tenaga buruh semakin tergantikan perannya oleh tenaga mesin karena didasarkan oleh berbagai hal. Beberapa diantaranya ialah tenaga mesin dapat meminimalisir pengeluaran karena mesin dipakai secara gratis, sedangkan buruh harus dibayar upah.

Tenaga mesin juga dirasa lebih efisien dan sangat produktif dibandingkan dengan tenaga buruh. Sebagai misal, jika kinerja mesin selama 1 jam sama dengan kinerja 20 atau 30 orang buruh selama 1 jam, maka dapat dibayangkan betapa besar pengeluaran yang dapat dipangkas. Ketika kemudian produktivitas pabrik semakin besar, sedangkan daya beli masyarakat (terutama buruh) semakin menurun karena lapangan pekerjaan pun semakin berkurang, maka kemudian barang-barang produksi tersebut banyak yang tidak laku dijual. Hal ini dapat disebut pula sebagai fenomena *over-production, under-consumption*. Jika situasi yang ada dibiarkan terjadi, maka barang produksi tersebut akan mengalami penurunan harga dan industri akan mengalami kerugian besar. Hal ini yang juga menjadi salah satu faktor pendorong negara-negara Eropa melakukan ekspansi perdagangan demi mencari pasar-pasar baru yang potensial.

---

[126] *Ibid*., hlm. 18.
[127] *Ibid*., hlm. 19.
[128] *Ibid*., hlm. 20.
[129] *Ibid.*
[130] *Ibid.*

F. GLOBALISASI DAN SEJARAH EKONOMI INTERNASIONAL

Globalisasi kegiatan ekonomi dan persoalan pengelolaannya sering dianggap baru muncul setelah Perang Dunia II, khususnya pada tahun 1960-an. Masa sesudah tahun 1960-an adalah masa munculnya perusahaan multinasional (MNC) dan berkembangnya perdagangan internasional. Kemudian, setelah sistem nilai tukar setengah-tetap Bretton Woods ditinggalkan pada tahun 1971-1973, investasi dalam bentuk surat-surat berharga internasional dan pemberian kredit oleh bank mulai berkembang dengan cepat, seiring dengan meluasnya pasar modal ke seluruh dunia, yang menambah rumit hubungan ekonomi internasional dan membuka jalan bagi globalisasi ekonomi dunia yang terintegrasi dan saling tergantung.

Sejarah meluasnya kegiatan perusahaan ke seluruh dunia adalah sejarah yang teramat panjang, dan bukannya baru dimulai pada tahun 1960. kegiatan dagang, misalnya, telah ada sejak zaman peradaban kuno, tetapi pada Abad Pertengahan, barulah di Eropa, muncul kegiatan dagang yang teratur lintas Negara, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya korporasi swasta, meski seringkali mendapat dukungan dan bantuan yang besar dari pemerintahannya. Pada abad ke-14, para pedagang petualang memperdagangkan wol dan tekstil yang dihasilkan Inggris ke Belanda, Belgia, Luxemburg, dan Negara-negara lain. Selain itu, di Italia, perusahaan-perusahaan dagang dan bank-bank memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan ke seluruh dunia pada masa-masa awal Renaissance. Pada akhir abad ke-14, di Italia, ada sekitar 150 bank yang sudah melakukan kegiatan di berbagai Negara (Duning, 1993, hlm. 97-98). Dalam abad ke-17 dan ke-18 dukungan oleh Negara meluas dengan berdirinya perusahaan-perusahaan dagang besar kolonial, seperti Dutch East India Company, British East India Company, Muscovy Company, Royal Africa Company dan Hudson Bay Company. Semua perusahaan ini mempelopori perdagangan berskala besar di wilayah yang kelak menjadi wilayah jajahan yang penting.

Tetapi, penyebaran industri ke seluruh dunialah, sebagai akibat dari revolusi industri, yang paling dekat dengan perusahaan multinasional di zaman modern. Di sini peranan perusahaan Inggris sebagai perusahaan multinasional pertama penghasil barang pabrik tampak jelas. Mula-mula Amerika Utara dan Amerika Selatan membuka peluang untuk penanaman modal yang paling menguntungkan, disusul kemudian oleh Afrika & Australia. Muncul perdebatan apakah “investasi kolonial” dapat dianggap pendahulu penanaman modal asing, tetapi yang pasti produksi untuk pasar lokal mulai dengan cara ini. Perkembangan teknik & organisasi setelah tahun 1870-an memungkinkan berbagai jenis barang yang sama dapat dihasilkan di dalam & di luar negeri oleh perusahaan yang sama, eksplorasi & pengelolaan bahan tambang & bahan baku lainnya juga menarik penanaman modal asing dalam jumlah besar (Dunning, 1993, Bab 5).

Namun, salah satu masalah dengan klasifikasi yang berlaku surut seperti itu adalah konsep model “penanaman modal asing” di satu pihak (ada pengendalian dari luar) dan investasi “portofolio” di pihak lain (jual beli surat berharga yang diterbitkan lembaga luar negeri untuk mendapat keuntungan tanpa ikut serta mengendalikan atau mengelola) baru pada tahun 1960-an muncul, bersamaan dengan munculnya istilah MNC *(multinational corporation)*. Meski tidak ada klasifikasi data yang konsisten, pada umumnya disepakati, MNC sudah ada dalam ekonomi dunia setelah pertengahan abad ke-19 dan berdiri kokoh tidak lama sebelum Perang Dunia I. kegiatan bisnis intenasional tumbuh pesat pada tahun 1920-an ketika perusahaan multinasioanl yang benar-benar terdiversifikasi dan terintegrasi kokoh, tetapi kemudian menurun selama masa depresi tahun 1930-an, hancur lebur karena perang pada tahun 1940-an, dan bangkit kembali setelah tahun 1950.[131]

Sejarah bangsa-bangsa adalah sejarah perang berbasis kepentingan ekonomi. Perang meliputi perang senjata, perang ekonomi, dan perang budaya. Perang senjata adalah perangnya antar Negara penjajah dalam memperebutkan daerah jajahan yang kaya sumberdaya alam. Perang yang demikian adalah perwujudan dari kerakusan sistem kapitalisme-kolonialisme dalam akumulasi modal melalui peperangan, akibatnya adalah Negara-negara terjajah bangkit rasa nasionalismenya melawan penjajah dan melahirkan Negara-negara merdeka, yang lazim disebut Negara Sedang Berkembang (NSB).[132]

Kapitalisme sebagai suatu sistem dunia bermula pada akhir abad 15 dan awal abad 16 ketika orang-orang Eropa yang menguasai pengetahuan pelayaran jarak jauh, menghambur keluar dari sudut kecil dunia mereka dan mengarungi tujuh lautan, untuk melanklukan, merampas dan berniaga. Sejak itu kapitalisme terdiri dari dua bagian yang berbeda tajam: di satu pihak ada sejumlah kecil Negara-negara dominan yang memeras, dan di pihak lain, dengan jauh lebih besar Negara-negara yang dikuasai dan diperas. Keduanya terjalin secara tak terpisahkan dan tidak ada kejadian dalam kedua Negara itu yang dapat dimengerti jika dilihat terpisah dari sistem itu yang menjadi sebuah keharusan. Penting untuk menekankan bahwa hal itu benar, baik untuk *“kapitalisme modern”*, dalam arti sistem kapitalisme masa kini, maupun ketika ia masih merupakan kapitalisme merkantilis dari masa sebelum revolusi industri.[133]

Seperti sejarah yang mengalir mengikuti perubahan zaman, pola eksploitasi kapitalisme internasional pun mengalami perubahan wujud eksploitasinya. Pada awal abad ke-16 di Inggris terjadi revolusi industri yang memacu laju perkembangan kapitalisme awal. Proses ini didorong lagi oleh munculnya revolusi

---

[131] Paul Hirst & Grahame Thompson , *Globalisasi Adalah Mitos,* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001. Hlm. 31-34.

[132] Liaht Darsono P, dalam Globalisasi Suatu Strategi Penjajahan Bentuk Baru, http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2006-november/000189.htm.

[133] Paul M Sweezy, “Kapitalisme Modern”, dalam *Kapitalisme: Dulu dan Sekarang: Kumpulan Karangan dari berbagai sumber asing,* LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 5

Prancis pada tahun 1789, yaitu revolusi yang mengakhiri hegemoni kaum feodal di Eropa Barat dan mendorong matangnya kekuasan kaum borjuis. Di tangan para borjuis Eropalah kapitalisme mulai menanamkan kuku eksploitasinya sampai ujung dunia.[134]

Ketika di Eropa Barat terjadi over-produksi akibat maraknya industrialisasi, maka yang kemudian harus dilakukan oleh Negara-negara Eropa adalah ekspansi ke daerah-daerah terbelakang seperti Asia, Afrika, Pasifik dan Amerika. Maka lahirlah pembagian kekuasaan atas wilayah-wilayah tersebut untuk memasarkan hasil industri dari Eropa dan juga untuk mengambil bahan-bahan mentah bagi kepentingan industrialisasi di Eropa. Daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang ketika itu belum mengalami proses perubahan sejarah masyarakat seperti Eropa Barat zaman itu. Karena perubahan kepentingan pula, maka dua Perang Dunia dihasilkan oleh kepentingan kapitalisme internasional, Perang Dunia Pertama pada tahun 1918-1939 dan kemudian Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-1945 adalah sejarah nyata di mana kapitalisme Vs kapitalisme berperang untuk menanamkan pengaruhnya terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Jadi perang yang dilakukan antara Blok Sekutu dan Blok Fasis adalah perang antara dua kapitalis yang ingin melebarkan sayap eksploitasinya terhadap Negara-negara dunia ketiga.

James Petras mengatakan bahwa globalisasi telah dimulai pada abad 15, yaitu sejak mulai berkembangnya kapitalisme yang ditandai dengan ekspansi, penaklukan dan penghisapan Negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan bahkan Amerika Utara dan Australia oleh kekaisaran global pada waktu itu, Spanyol dan Portugis. Karena itulah globalisasi selalu diasosiasikan dengan imperialisme, yaitu hubungan global yang didasarkan pada akumulasi untuk Eropa, penghisapan dunia ketiga untuk akumulasi dunia pertama.[135] Menururt Pieterse, globalisasi dimulai sejak 1950-an. Menurut Marx dimulai 1500-an dengan tema kapitalisme modern. Wallerstein mencatat mulai 1500-an dengan tema sistem dunia baru. Robertson menilai globalisasi mulai 1870-1920-an dengan tema multidimensional, Giddens tahun 1800-an dengan tema modernitas, dan Tomilson tahun 1960-an dengan tema planetarisasi budaya.[136]

Sementara Scholte, menyatakan bahwa globalisasi berlangsung sejak tahun 1960-an, hal ini telah membantu memperluas jangkauan dalam tiga komodifikasi dalam tiga wilayah. ***Pertama,*** konsumerisme yang terhubungkan dengan produk-produk global yang diperluas oleh kapitalisme industri. ***Kedua,*** pertumbuhan lembaga-lembaga yang beroperasi dalam lingkup global *(supra territorial)* seperti *global banking* dan *global securities* sehingga memperluas jangkauan modal uang. ***Ketiga,*** globalisasi telah mendorong perluasan komodifikasi dalam wilayah baru yang melibatkan informasi dan komunikasi sebagai akibatnya, item-item *software* komputer dan telepon panggil telah menjadi objek akumulasi.[137]

Sebenarnya sejak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) berdiri pada tahun 1944 serta GATT (sekarang WTO) pada tahun 1947, praktis dunia sudah memasuki globalisasi ekonomi, karena masalah pembangunan menjadi tanggung jawab internasional. Bank Dunia mengucurkan dana pinjaman berbunga rendah bagi proyek-proyek pembangunan di berbagai Negara untuk memajukan ekonominya, sedangkan IMF memberikan pinjaman bagi Negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran luar negeri dan GATT berfungsi untuk mengatur perdagangan global.[138]

Pada fase pasca PD II, strategi ekonomi politik yang dilancarkan oleh AS dan para sekutunya adalah strategi *Developmentalisme*[139] (pembangunanisme), untuk mengamankan investasi modalnya, kapitalisme internasional memberikan dukungan bagi orang-orang kuat di sejumlah negara dunia ketiga yang berasal dari jajaran militernya. Di Amerika Latin kita jumpai sejumlah regime yang dipimpin oleh militer (otoriter), di Asia Tenggara dan Selatan juga dijumpai regime otoriter yang kebanyakan dipimpin oleh militer. Militer pada zaman ini adalah anak emas yang dibesarkan oleh kapitalisme dengan tujuan mengamankan investasi modal. Pada fase ini (1960-1970-an)[140] dekolonisasi ditawarkan pada sejumlah Negara-negara jajahan Eropa Barat dan Amerika Serikat di Asia, Afrika dan Pasifik serta sebagian Negara-negara Amerika Latin.[141]

Setelah perang dingin berakhir, komunis runtuh, Uni Sovyet pudar dan blok komunisme hancur, secara riil AS menghadapi musuh barunya: Negara-negara Eropa. Kelompok politik dan ekonomi ini telah menjadi musuh baru AS, sebab di satu sisi mereka memang mempunyai kemampuan untuk menyaingi AS dalam perdagangan dunia. Di sisi lain, Negara-negara Eropa itu telah mulai bergerak untuk menggabungkan Negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni Eropa setelah Negara-negara itu berpindah dari sosialisme ke sistem kapitalisme.

---

[134] Lihat www.westpapua.net/doc/paper/paper6/capitalism.htm

[135] Lihat, Links, International Journal of Sosialist Renewal, No. 7 tahun 1996, hlm. 59

[136] Jan Nederveen Pieterse, *"Globalization as Hybridization",* individu Mike Featherstone et all. Edt, *Global Modernities,* Sage Publications, London, 1995, hlm. 47

[137] Budi Winarno, *"Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi",* dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Edisi 1, Februari 2004, hlm. 7

[138] Lihat http://www.theindonesianinstitute.org/gglob02.htm.

[139] Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi pembangunanisme. Developmen-talisme adalah sebuah istilah ekonomi-politik. Sebuah konsep atau kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang dicetuskan pada masa Presiden Harry S Truman pada tahun 1949 untuk menjawab berbagai permasalahan kemiskinan atau keterbelakangan *(Underdevelopment)* yang terjadi di Negara-negara dunia ketiga, sekaligus sebagai alat ideologi untuk membendung sosialisme.

[140] Fase di mana dekolonisasi ditawarkan bagi dunia ketiga dan terjadi proses eksploitasi kapitalisme dari yang bersifat kolonilistik kepada fase yang bersifat lunak

[141] Lihat www.westpapua.net/doc/paper/paper6/capitalism.htm

Pergeseran dan perubahan konstelasi politik internasional itu telah mendorong AS untuk mengumumkan kelahiran Tata Dunia Baru. Prinsip utama Tata Dunia Baru di bidang ekonomi, tak lain adalah perdagangan bebas dan pasar bebas. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia bagi perdagangan dan pendapatan AS. Untuk mewujudkan strategi ekonominya ini, AS berupaya memperlemah dan memperlambat gerak pasar bersama Eropa dengan membentuk blok-blok perdagangan baru, menghidupkan kesepakatan-kesepakatan lama dan mengaktifkan kembali, mendirikan NAFTA yang beranggotakan Canada, AS, dan Mexiko dan juga, membentuk APEC.

Pada bulan November 1992, atas undangan Presiden Clinton, telah diadakan pertemuan puncak untuk membentuk organisasi kerjasama ekonomi bagi Negara-negara Asia Pasifik itu (APEC). Pendirian organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas, membuka pasar-pasar, dan menekan bea masuk. Pendiriannya tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan ekonomi dan mata uang sebagaimana pasar bersama Eropa. Pendirian APEC justru untuk tetap mengamankan pasar Asia Pasifik bagi AS dari persaingannya dengan pasar bersama Eropa.[142]

AS melihat bahwa Uni Eropa merupakan saingan kuat untuk menantang dan menyaingi AS di bidang ekonomi. Alasan-alasan AS itu adalah: ***Pertama,*** kesatuan Eropa secara politik dan ekonomi. ***Kedua,*** Eropa memiliki kemampuan bersaing di bidang perdagangan, sebab Eropa mempunyai kemampuan tinggi dalam produksi barang dan jasa. ***Ketiga,*** setelah berakhirnya perang dingin dan hancurnya Uni Sovyet, lenyaplah momok komunisme yang sebelumnya digunakan AS untuk mengancam Eropa. Eropa seluruhnya lalu berkonsentrasi dan bersiap-siap dengan serius untuk terjun ke dalam kancah ekonomi internasional. Diantara persiapan Eropa nampak dari fakta bahwa seluruh Eropa yang merupakan Negara-negara industri yang produktif telah menghilangkan hambatan bea masuk di antara mereka, membuka tapal batas Negara masing-masing untuk memudahkan pemindahan tenaga kerja, dan berusaha mewujudkan kesatuan mata uang.[143] Hal ini kemudian mendorong Eropa untuk memasuki pasar-pasar di Asia dan Afrika, di samping faktor utama bahwa Eropa memang mempunyai kapabilitas untuk bersaing dalam pasar bebas. Di samping itu AS terdorong pula untuk memperkokoh pasarnya di Asia dan Eropa dengan membentuk kelompok-kelompok ekonomi seperti APEC. Dan AS pun dalam hal ini telah sukses pula menunggangi WTO *(World Trade Orgazation)* untuk semakin melicinkan jalannya menguasai ekonomi dunia.

APEC mulai muncul ke permukaan sejak tahun 1989 atas prakarsa Australia. APEC menghimpun 17 negara yang berasal dari tiga benua; AS, Canada, Mexiko, Australia, Selandia Baru, RRC, Jepang, Hongkong, Papua Nugini, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Philipina, Korea Selatan, dan Thailand. Organisasi ekonomi internasional ini menggabungkan keanggotaan dua kelompok ekonomi besar, yaitu NAFTA yang beranggotakan Negara-negara Amerika Utara, dan ASEAN yang beranggotakan Negara-negara Asia Tenggara.

Negara-negara anggota APEC menguasai 40 % dari keseluruhan volume perdagangan dunia, sekaligus merupakan pasar yang jumlah konsumennya mencapai lebih dari 1 milyar jiwa. Dari seluruh penjelasan tersebut, nampak bahwa AS telah berhasil mencapai target-targetnya untuk merealisasikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan ekonominya. AS nampak terus mengembangkan dan membangunnya hingga stabil dan mantap, bahkan menjadikan prinsip-prinsipnya itu sebagai realitas global yang tidak bisa dihindari lagi. Akan tetapi, terwujud dan terbukanya pasar bebas secara internasional itu, niscaya akan menambah semangat untuk bersaing secara internasional pula. Di samping itu, produksi melimpah dari banyak Negara dan blok ekonomi akan terus melestarikan sikap saling bersaing, mendominasi, dan menguasai, yang didukung oleh kekuatan militer dan perluasan pengaruh untuk melindungi penimbunan-penimbunan produk yang melimpah.[144]

Dalam analisis Friedman, dunia saat ini adalah dalam era globalisasi kedua, yang dimulai sejak tahun 1989 setelah AS, Inggris dkk, memenangkan perang dingin. Jadi setelah era perang dingin itulah tonggak globalisasi dengan tahapan yang lebih massif. Globalisasi kedua hakikatnya adalah suatu proses dunia menjadi satu atap di bawah hegemoni dan dominasi pemenang perang dingin. Negara-negara dunia ketiga atau Negara-negara sedang berkembang mau tidak mau harus menerima kenyataan yang demikian, yaitu menjadi bawahan AS dkk. Thomas L Friedman menyatakan bahwa globalisasi diberi makna modernitas *(the lexus)* di mana masyarakat harus berpersepsi fungsional melalui solidaritas organik[145] yaitu menempatkan manusia (bangsa) sebagai fungsi manusia lain (bangsa lain) untuk mencapai tujuannya. Lawan dari *the lexus* (modernisasi) adalah *the olive tree* yaitu masyarakat yang berpersepsi mistis, di mana mereka merasa menikmati hidup dalam kungkungan tradisi. *The lexus* adalah symbol dari Negara-negara maju (Canada, AS, Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris) dan *the olive tree* adalah symbol dari negara-negara sosialis dan Negara-negara sedang berkembang. T*he olive tree* harus menyesuaikan diri dengan *the lexus*, jika mereka ingin tetap eksis.[146]

Globalisasi kedua ini ditandai oleh lahirnya revolusi tekhnologi, revolusi telekomunikasi, dan revolusi informasi. Ketiga revolusi itu mengakibatkan biaya produksi kapitalis rendah dan kapital bisa menjelajah

---

[142] http://www.al-islam.or.id/tampil.php?halaman=buletin&id=24
[143] *Ibid.*
[144] *Ibid*
[145] Istilah yang digunakan Talcot Person.
[146] Thomas L Friedman, *The Lexus and The Oleive Tree*, Harper Collins Publisher, London, 2000, hlm. 31

dunia tanpa kendala sehingga kapital dan komoditi Negara-negara maju *(the lexus)* dapat menguasai dunia. Bagi dunia kedua (blok sosialis) dan dunia ketiga harus menerima kenyataan ini. Anthony Giddens, bahkan mengatakan jika globalisasi yang ditopang oleh revolusi tekhnologi komunikasi tersebut tidak hanya baru, melainkan revolusioner.[147]

Akhirnya, globalisasi adalah bentuk baru hegemoni ekonomi, legitimasi baru terhadap pasar, kompetisi dan profit. Setelah dekolonisasi dan runtuhnya blok sosialis, globalisasi menjadi bentuk baru hegemoni atas nama pasar bebas, revolusi informasi, dunia sebagai satu dunia dan lain sebagainya. Akhir sejarah juga merupakan legitimasi baru kapitalisme setelah runtuhnya komunisme, seolah-olah sejarah berhenti dan waktunya habis. Revolusi informasi merupakan dalih baru untuk menyatukan dunia atas nama tekhnologi komunikasi baru, dunia sebagai satu desa dan hukum pasar.[148]

G. FAKTOR PENDORONG GLOBALISASI

Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dalam saling keterhubungan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Paham yang demikian itu disebut globalisasi atau neo-liberalisme. Beberapa faktor pendorong globalisasi yaitu: P*ertama,* kekuatan kaum kapitalis internasional, yaitu Negara-negara imperialis pusat, Negara menjadi motor penggerak globalisasi karena ia memiliki kekuasaan dalam mengatur formulasi strategis globalisasi, alokasi sumber daya ekonomi pada aktor-aktor global termasuk MNC. MNC yang mampu beroperasi hampir di seluruh dunia, dan merupakan sumber kekuatan dari globalisasi itu sendiri dikemudian hari yang pada akhirnya peran MNC dalam dinamika globalisasi ini begitu kuatnya seolah-olah MNC telah menjadi parasit yang memakan induk semangnya dan menjadi lebih kuat dan lebih besar. Kekuatannya ini didukung oleh *Bretton Woods Institution*, yaitu: Bank Dunia *(World Bank,* Dana Moneter Internasional (IMF) dan GATT/WTO kemudian diaplikasikan pada tiga sistem yaitu liberalisasi perdagangan, keuangan, investasi. *Kedua,* perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, khususnya di bidang telekomunikasi. *Ketiga,* dukungan pemerintah Negara-negara sedang berkembang (NSB) terhadap ekspansi kaum kapitalis internasional di Negara mereka.

[1] Kekuatan Kaum Kapitalis Internasional

Sejak lima abad yang lalu perusahaan-perusahaan di Negara-negara yang perekonomiannya telah maju, telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan, yang semakin intensif di masa penjajahan ke berbagai belahan dunia. Namun, sejak dua atau tiga dekade yang lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan tersebut sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti perkembangan tekhnologi dan terutama kebijakan-kebijakan liberalisasi yang telah menjalar ke seluruh dunia.

Liberalisasi perdagangan berarti menghilangkan segala peraturan yang bersifat melindungi industri dan pasar domestik. Menurut logika neo-liberal, ekonomi Negara akan berkembang bila ada kebebasan pasar. Liberalisasi ini juga berarti penghapusan beban-beban yang harus ditanggung oleh swasta. Liberalisasi berarti kebebasan yang seluas-luasnya bagi kapitalis untuk mengeruk keuntungan.[149] Aspek-aspek terpenting yang tercakup dalam proses globalisasi ekonomi adalah runtuhnya hambatan-hambatan ekonomi nasional, meluasnya aktivitas-aktivitas produksi, keuangan dan perdagangan secara internasional serta semakin berkembangnya kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional dan institusi-institusi Moneter Internasional. Walaupun globalisasi ekonomi merupakan proses yang terjadinya tidak secara merata, dengan peningkatan perdagangan dan investasi hanya terfokus di segelintir Negara saja, namun hampir semua Negara di dunia sangat dipengaruhi oleh proses tersebut. Sebagai contoh, sebuah Negara berpendapatan rendah yang pangsa perdagangannya sangat kecil dalam perdagangan dunia, namun perubahan permintaan atau harga komoditas-komoditas ekspornya atau kebijakan untuk secara cepat menurunkan bea-bea impornya dapat secara sosial dan ekonomi berpengaruh besar pada Negara tersebut. Negara tersebut mungkin hanya memiliki peran yang kecil dalam perdagangan dunia, namun perdagangan dunia memiliki pengaruh yang sangat besar atas Negara tersebut, yang mungkin saja pengaruhnya jauh lebih luas dibandingkan dengan pengaruhnya atas perekonomian-perekonomian yang telah maju.[150]

Liberalisasi eksternal dari perekonomian nasional mencakup penghapusan hambatan-hambatan nasional atas aktivitas ekonomi, meningkatkan keterbuakaan dan integrasi dari Negara-negara ke dalam pasar dunia. Di kebanyakan Negara, hambatan-hambatan nasional dalam bidang moneter dan pasar uang, perdagangan dan investasi asing langsung secara umumnya telah dihapus. Liberalisasi moneter adalah persoalan yang paling mendapat perhatian. Selama ini telah terjadi liberalisasi yang ekstensif dan progresif atas berbagai kontrol terhadap aliran dan pasar uang. Gugurnya sistem Bretton Woods pada tahun 1972-1973, telah membuka peluang perdagangan valuta asing, dan kegiatan tersebut telah berkembang secara

[147] Anthony Giddens, *Run Way World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 5

[148] Hasan Hanafi, *Cakrawala Baru Peradaban Global: Revolusi Islam Untuk Globalisme, Pluralisme, Egalitarianisme Antar Peradaban*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2003, hlm. 69

[149] Lihat http://www.pds.or.id/globalisasi_penghisapan_rakyat_htm.

[150] Martin Khoor, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2000, hlm. 10.

spektakuler. Volume yang diperdagangkan di pasar valuta asing dunia meningkat dari $ 5 milyar per hari di tahun 1973 menjadi melebihi $ 900 milyar di tahun 1992, dan saat ini bahkan telah melampaui $ 1000 milyar. Banyak dari transaksi tersebut merupakan transaksi spekulatif, dan diperkirakan hanya sebagian kecil (kurang dari 2 %) dari total valuta asing yang diperdagangkan digunakan sebagai pembayaran perdagangan. Sehubungan dengan saling terkaitnya antara pasar uang, sistem moneter dan aliran uang yang sangat besar, secara umum terdapat keprihatinan yang semakin meningkat mengenai kerentanan dan ketidakstabilan maupun resiko dari melemahnya bagian-bagian atau keseluruhan sistem yang ada, pada suatu saat kesalahan terjadi dan berkembang di satu bagian dunia atau suatu bagian sistem, dan dampaknya dapat tersebar luas.

Nilai tukar mata uang telah menciptakan ketidakstabilan nilai tukar yang sangat tajam yang berbalik mendorong terciptanya sebuah masa yang sangat besar pada dunia uang. Uang tesebut tidak memiliki eksistensi di luar ekonomi global dan itu adalah pasar-pasar uang utama. Hal itu belum pernah ada sebelumnya dalam praktek ekonomi tradisional mengenai definisi uang, apakah itu standar ukurannya, muatan nilainya, atau media pertukarannya. Benar-benar baru, tidak dikenal. Hal tersebut tampak maya *(virtual)* dibanding dengan hal yang nyata *(real)*. Tetapi kekuatannya begitu nyata. Volume peredaran uang dunia begitu besar pergerakannya yang masuk maupun yang keluar, mata uang memiliki dampak yang besar dan jauh dibandingkan arus keuangan di sektor perdagangan, atau investasi. Dalam satu hari uang maya *(virtual money)* yang diperdagangkan senilai dengan seluruh uang yang dibutuhkan dalam transaksi keuangan sektor perdagangan dan investasi selama satu tahun penuh. *Virtual money* ini memiliki daya gerak yang sangat tinggi karena tidak terkait dengan fungsi-fungsi ekonomi yang sudah ada. Masalah tersebut dimungkinkan karena hal tersebut tidak memiliki kaitannya dengan fungsi ekonomi maupun fungsi keuangan sama sekali, uang ini bahkan tidak mengikuti logika ekonomi maupun hal-hal yang rasional. Hal itu begitu rentan dan mudah panik oleh isu-isu dan rumor atau sesuatu peristiwa yang tidak diperkiraan. Satu contoh adalah ketika dollar Amerika diburu pada musim gugur 1995 yang membuat tekanan terhadap Presiden Clinton mengabaikan rencana dia tentang rencana pengeluaran dan neraca belanja seimbang. Kekacauan dimulai oleh kegagalan para politikus Partai Republik di senat untuk meloloskan amandemen konstitusi mengenai neraca belanja. Meskipun amandemen tersebut lolos hal itu tidak akan berarti apa-apa. Hal tersebut akan sulit karena harus melalui upaya ratifikasi di 38 negara bagian untuk dibuat menjadi peraturan yang biasanya akan memakan waktu selama satu tahun. Tentu saja hal itu membuat para pedagang mata uang menjadi panik dan mulailah kekacauan dollar Amerika. *Virtual money* selalu muncul sebagai pemenangnya, ini membuktikan bahwa ekonomi global telah menunjukkan kemampuannya menjadi penengah yang baik disektor keuangan dan kebijakan dalam sektor fiskal. Kekacauan mata uang, bagaimanapun juga bukan hal yang baik bagi ketidakstabilan fiskal suatu Negara. Kasus di Mexico sesuatu yang mengerikan telah terjadi yang konon lebih parah dari epidemik penyakit. Pada tahun 1995 kekacauan yang menimpa Peso menghempaskan perjuangan ekonomi selama enam tahun yang berhasil mengangkat Mexico dari Negara miskin menjadi Negara yang makmur. Sejauh ini belum ada yang dapat mengontrol ketidakstabilan fiskal.[151]

Satu-satunya sistem yang dapat bekerja ialah kebijakan fiskal dan keuangan satu Negara yang terbebas dari hutang jengka pendek. Mudah berubahnya uang yang mampu menutupi defisit. Jelas ini sepertinya membutuhkan suatu neraca seimbang atau sesuatu yang lebih cenderung ke bentuk keseimbangan, selama tiga atau lima tahun periode berjalan. Dan hal ini lalu menempatkan keterbatasan kepada otonomi kebijakan keuangan dan fiskal *nation-state* yang pada tahun 1973 nilai tukar mengambang telah terlepas sepanjang masa. Proses perbaikan di tingkat non nasional dan supranasional sedang berjalan. Bahwa keputusan ekonomi yang mendasar diputuskan oleh pengaruh ekonomi global daripada pengaruh yang terjadi di dalam negeri *nation-state*. Bentuk tidak mengekangnya keuangan dan kedaulatan kebijakan keuangan yang diberikan *nation-state* dalam nilai tukar mengambang 25 tahun yang lalu sama sekali tidak baik lagi bagi pemerintah. Terjadi pemindahan pengaruh, pengambil keputusan bukan lagi pemerintah tetapi malah para kelompok yang lebih khusus. Sehingga pemerintah kehilangan kewibawaannya dan hal itu tentu saja mengganggu jalannya kebijakan-kebijakan yang lain. Dan itu hampir terjadi di setiap Negara di dunia. Ada fenomena menarik, yaitu ketika *nation-state* kehilangan kedaulatan atas sistem keuangan dan fiskal malah terjadi penguatan.[152]

Keprihatinan-keprihatinan terhadap kemungkinan krisis moneter global diperkuat oleh krisis keuangan di Asia Timur, yang dimulai pada paruh kedua tahun 1997 dan menjalar hingga Rusia, Brasil dan Negara-negara lain, menyebabkan kekacauan moneter dan resesi ekonomi terburuk dalam periode pasca Perang Dunia II.

Liberalisasi perdagangan juga meningkat secara gradual, namun tidak seperti yang terjadi pada liberalisasi moneter. Peran perdagangan yang meningkat dibarengi dengan pengurangan tarif secara umum, baik di Negara-negara maju maupun di NSB (Negara sedang berkembang), sebagian sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan otonom dan sebagian lagi sebagai akibat dari babak-babak putaran perdagangan multilateral di bawah GTT *(General Agreement on Tariff and Trade)*. Namun demikian, tarif-tarif yang tinggi

---

[151] *Ibid.*
[152] *Ibid.*

tetap masih muncul di Negara-negara maju, dalam sektor-sektor seperti pertanian, tekstil dan produk-produk manufaktur tertentu, yang merupakan sektor dimana (NSB) memiliki keunggulan komparatif. Lebih jauh lagi, terdapat peningkatan penggunaan hambatan non tarif yang mempengaruhi akses dari NSB ke pasar Negara-negara maju.[153]

Juga telah terjadi pertumbuhan yang mantap dalam liberalisasi investasi asing langsung (FDI), meski pada skala yang lebih kecil dari aliran moneter internasional. Kebanyakan FDI dan peningkatannya merupakan akibat dari aliran-aliran dana invstasi langsung di antara Negara-negara maju. Akan tetapi, sejak awal tahun 1990-an, aliran FDI ke NSB telah meningkat secara relatif, dari rata-rata 17 % pada tahun 1981-1990 menjadi 32 % pada tahun 1991-1995. Hat tersebut sejalan dengan liberalisasi kebijakan-kebijakan investasi asing di kebanyakan NSB dalam waktu belakangan ini. Namun, banyak dari FDI tersebut memusat hanya di beberapa NSB. Secara khusus, Negara-negara terbelakang *(Least Developed Countries)* menerima bagian yang sangat kecil dari aliran-aliran FDI tersebut, meskipun mereka telah meliberalisasi kebijakan-kebijakannya. Dengan demikian, FDI bukan merupakan suatu sumber keuangan eksternal yang signifikan kebanyakan NSB, yang benar, kemungkinan masih tetap berlangsung dalam beberapa tahun mendatang.

Ciri utama dari globalisasi adalah peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumberdaya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan transnasional, maupun oleh perusahaan-perusahaan keuangan dan dana global. Proses ini sering diistilahkan sebagai transnasionalisasi, di mana semakin sedikit perusahaan transnasional yang mampu meraih pangsa besar atau peningkatan proporsi secara cepat dari pembagian sumberdaya ekonomi, produksi dan pangsa pasar. Jika dulu perusahaan multinasional mendominasi pasar dari sebuah produk tunggal, saat ini perusahaan transnasional yang besar secara khusus memproduksi dan menjual berbagai produk, pelayanan di bidang-bidang yang kian beragam. Melalui marger dan akuisisi, makin sedikit perusahaan transnasional yang saat ini mampu menguasai pangsa pasar global yang lebih besar, baik dalam komoditas, barang-barang manufaktur ataupun jasa.

[2] Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi

Pada permulaan abad 21 ini, trend global semakin variatif. Barang, uang, manusia, tekhnologi, dan informasi dalam era globalisasi telah menyebar secara luas melewati batas Negara *(nation state cross border)*, yang berimplikasi terhadap semakin saling terhubungnya setiap dinamika perubahan global saat ini, dan mengikat semakin kuat membentuk suatu komunitas tunggal yang terintegrasi dan dalam hal ekonomi telah menjadi semacam pasar tunggal. Hal ini telah menjadikan dunia sebuah *global village*. Kehadiran tekhnologi komputer yang merupakan terobosan baru sebagai infrastruktur global, bahkan sampai saat ini komputer telah menyandang sebagai simbol kedua dari globalisasi. Tidak ada satu arenapun (ekonomi, politik, sosial dan budaya) di dunia ini yang kebal dari tekhnologi komputer.[154] Pada saat ini lebih dari 400 juta komputer digunakan di dunia,[155] dan pertumbuhan penggunaan komputer saat ini menembus angka 18 sampai 20 juta pertahun. Salah satu penyebab utama dari pertumbuhan itu adalah tekhnologi mikroarsitektur yang memungkinkan komputer dapat dibuat dengan ukuran mini yang praktis.

Perusahaan multinasional (MNC) merupakan salah satu topik yang menarik dalam wacana kompetisi global. Karakteristik utama dari sebuah MNC adalah pengelolaan jaringan bisnis yang rumit dan mempunyai skala global oleh perusahaan induk, agar perusahaan cabang dapat melakukan proses-proses produksi dan juga pemasaran sehingga tercapai suatu bisnis secara global.[156] MNC sebagai salah satu pemain terbesar dalam kompetisi global tumbuh dengan cepat setelah era Perang Dunia II, kunci keberhasilan itu adalah temuan berbagai inovasi tekhnologi yang selalu direspon dengan positif oleh mereka.[157] Tekhnologi informasi sebagai perkembangan terbaru dalam dunia tekhnologi juga mendapatkan tempat yang strategis dalam dunia bisnis berskala global, seperti yang dilakukan oleh *Microsoft Corporation.* Dengan adanya tekhnologi komunikasi yang memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi, telah menyebabkan berakhirnya dominasi Negara-negara dalam melakukan monopoli dalam dunia telekomunikasi,[158] dengan adanya internet perusahaan dapat menyelenggarakan sistem informasi mereka sendiri secara lebih efisien tanpa campur tangan yang berarti dari Negara. Pemotongan birokrasi dalam proses-proses perdagangan antar Negara yang dapat dilakukan oleh tekhnologi ini akan berimplikasi terhadap efisiensi yang cukup tinggi.

Sistem syaraf digital yang merupakan suatu upaya eksplorasi tekhnologi informasi yang dibangun Microsoft layak disebut sebagai salah satu infrastruktur terjadinya globalisasi, karena sistem tersebut dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan hubungan komunikasi secara global dengan sistem yang tunggal yang melewati batas-batas Negara tanpa campur tangan yang berarti dari Negara yang

---

[153] Martin Khoor, *Op. Cit.,* hlm. 11

[154] Charles W. Kegley, Jr & Eugene R. Wittkopt, *World Politics: Trend and Transformation 7th* Edition, Worth Publishers, London, 1999, hlm. 249

[155] *Kompas*, "*Lengser a'la Bill Gates",* 22 Januari 2000

[156] Charles W. Kegley & Eugene R. Wittkopt, *Op. Cit,* hlm. 196

[157] David Held & Anthony Mc Grew, David Goldblat & Jonathan Peraton, *Global Transformation: Politics, Economics and Culture,* Polity Press, Great Britain, 1999, hlm. 260

[158] *Ibid*. hlm. 253

bersangkutan. Di masa datang jika sistem syaraf digital dapat di bangun dengan sempurna, maka akan terciptalah pola hubungan yang sangat komplek antar manusia di bumi di mana kegiatan sekelompok orang, individu maupun sebuah institusi di tempat lain dapat dipantau dengan kecepatan tekhnologi informasi tersebut. Di sinilah kemudian akan terjadi apa yang disebut *complex interdependence*, di mana jika sudah mencapai tahap *interlocking*, kehidupan manusia di bumi harus senantiasa selaras dengan meminimalisasi konflik, sebab jika pada tahap ini terjadi sebuah konflik yang besar akan memicu sebuah efek yang destruktif.

Era digital atau sering disebut dengan abad informasi yang ditandai dengan kehadiran tekhnologi internet, telah merubah segalanya, dan salah satu perubahan itu terjadi pada dunia bisnis. Terobosan-terobosan yang dapat dilakukan oleh tekhnologi informasi telah terbukti mampu meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Tekhnologi ini kemudian dijadikan sebagai salah satu infrastruktur utama di sebuah perusahaan ataupun pemerintahan suatu Negara dalam rangka menyusun strategi kompetisi global. Tekhnologi Informasi (TI) yang kini berkembang amat pesat, tak bisa dipungkiri memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seluruh proses globalisasi ini.

Mulai dari wahana TI yang paling sederhana berupa perangkat radio dan televisi, hingga internet dan telepon genggam dengan protocol aplikasi tanpa kabel (WAP), informasi mengalir dengan sangat cepat dan menyeruak ruang kesadaran banyak orang. Perubahan informasi kini tidak lagi ada dalam skala minggu atau hari atau bahkan jam, melainkan sudah berada dalam skala menit dan detik. Perubahan harga saham sebuah perusahaan farmasi di Bursa Efek Jakarta hanya membutuhkan waktu kurang dari sepersepuluh detik untuk diketahui di Surabaya. Indeks nilai tukar dollar yang ditentukan di Wall Street, AS, dalam waktu kurang dari satu menit sudah dikonfirmasi oleh Bank Indonesia di Medan Merdeka.

Hal ini akhirnya menuju pada sebuah *Global Brain* yang memungkinkan akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi di dunia. Dunia penelitian, bisnis, industri dimungkinkan untuk menggunakan suberdaya manusia maupun fasilitas lainnya tanpa terikat pada dimensi-dimensi ruang dan batas-batas Negara.[159]

Sebuah Negara, perusahaan, ataupun organisasi untuk memikirkan sebuah alternatif dalam tingkat persaingan yang tinggi yaitu mengembangkan sistem informasi dan menggunakan tekhnologi informasi semaksimal mungkin sebagai alat untuk melakukan persaingan dengan yang lainnya. Karena di era global ini setiap informasi yang didapat tidaklah dapat dilepaskan dari rantai tekhnologi, informasi adalah hasil pengolahan data mentah, sedangkan tekhnologi informasi merupakan tulang punggung pengolahan dan penyimpanan informasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Hanya pihak yang menguasai tekhnologi informasilah yang dapat eksis dalam era revolusi global saat ini. Joseph S. Nye menjelaskan bahwa globalisasi bukan menyengsarakan masyarakat miskin, tetapi justru menguntungkan. Dengan adanya perkembangan tekhnologi informasi dan modal internasional, manusia bisa mendapatkan keuntungan besar. Argumen ini dikuatkan oleh beberapa hasil penelitian di beberapa Negara berkembang, misalnya perbandingan antara Korea Selatan dan Ghana, pada tahun 1960-an kedua Negara tersebut mempunyai pendapatan perkapita yang sama, tetapi sekarang Korea Selatan lebih mampu memanfaatkan globalisasi, sehingga lebih kaya 30 kali lipat disbanding Ghana, dan dapat menghilangkan ketimpangan tingkat kesejahteraannya, dapat mengirit ongkos dan mempermudah informasi dengan Negara-negara industri yang telah lama maju.[160] Meskipun globalisasi berhasil mengembangkan berbagai tekhnologi dan komunikasi yang memudahkan atau dapat memecahkan persoalan-persoalan, tak urung pula secara faktual keberhasilan tersebut makin mempertajam kemiskinan, baik ditingkat nasional maupun hubungan antar Negara.

[3] Dukungan Pemerintah Negara-negara Sedang Berkembang

Pelaku utama dari globalisasi adalah Negara imperialis yang berkuasa[161] artinya Negara yang mempunyai prinsip ekonomi *world competitive* dan mereka tidak mempunyai kerugian apa-apa karena semua biaya yang dikeluarkan berasal dari pembukaan pasar *(open market)*. Kelompok ini hendak memperjuangkan globalisasi yang bebas *(unrestricted globalization)*, mereka cenderung untuk membuka perekonomian mereka dan sebagai gantinya mereka juga menuntut Negara lain agar membuka perekonomiannya. Kelompok kedua yang pro globalisasi adalah Negara-negara pelayan *(clients)* dari kelompok pertama. Kelompok kedua (NSB) ini mengkhususkan dirinya pada ekspor barang-barang agromineral, kelautan, dan kehutanan yang semua itu mendukung produk dan memberi keuntungan bagi kelompok pertama.[162]

Negara imperialis juga memainkan peran penting dalam membuka pintu perekonomian dunia dengan menciptakan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan GATT/WTO. Lembaga-lembaga

---

[159] http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/28/nasional/280846.htm

[160] Lihat. *Kita, Dunia dan Globalisasi: Menelisik Pemikiran Joseph S. Nye,* dalam http://isac.blogdrive.com/archive/10.htm

[161] Dari Negara-negar imperialis inilah muncul korporasi-korporasi global yang menjadi pelaku utama juga pada saat ini, dan agen utama eksploitasi berbagai sumberdaya di berbagai belahan dunia ketiga, yang pada akhirnya hasilnya dibawa kembali ke Negara-negara metropolis

[162] Lihat: James Petras, “Negara Sebagai Agen Imperialis”, dalam *Globalisasi Perspektif Sosialis,* Ali Sugihardjanto, dkk, Penerbit Cubuc, Jakarta, 2001, hlm. 164

ini dikontrol oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Negara imperialis di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa. Fungsi mereka adalah menggantikan peran pasar domestik dan produsen lokal serta menghancurkan lembaga sosial setempat dengan tujuan memfasilitasi masuknya MNC dan terjaminnya ekspor barang-barang kebutuhan Negara dunia pertama. Negara imperialis memainkan peran penting dalam pembangunan kembali ekonomi perusahaan-perusahaan raksasa, mereka memberikan bantuan militer dan perlindungan politik bagi perluasan MNC, sementara MNC tersebut membiayai lembaga keuangan internasional yang bertugas untuk membuka pasar baru dan tempat investasi yang baru. Di bawah bayang-bayang modal multinasional korporasi, Negara imperialis juga ikut mensubsidi dan membiayai ekspansi modal, sementara di sisi lain penghisapan terhadap pasar domestik terus dilakukan untuk membiayai ekspansi tersebut.[163]

Kebijakan domestik maupun internasional pemerintah Negara-negara berkembang itu ditransformasikan melalui introduksi dan adopsi semacam reformasi liberalisasi ekonomi yang diniatkan untuk menata kembali peran dan keterlibatan Negara dalam ekonomi.[164] Reformasi ini didukung dengan berbagai derajat antusiasme yang berlainan di berbagai Negara berkembang, tapi jelas efeknya mengarah pada sebuah reduksi internasional terhadap intervensi pemerintah dalam perekonomian, mengarah pada meningkatnya kepercayaan atas mekanisme pasar dan kebebasan yang lebih besar bagi sektor swasta, yaitu makin banyak dianutnya marketisasi dan privatisasi. Bahkan di Negara seperti India, Brasil, dan Nigeria di mana nasionalisme ekonomi mengakar secara historis, investor asing tidak hanya disambut dengan penghapusan pembatasan penanaman modal asing, melainkan juga dengan tawaran insentif bagi investasi baru.[165]

Sementara itu di Dunia Ketiga, peran Negara tidak bisa dihilangkan. Ada relasi yang dialektis antara peran Negara di pasar domestik dan proses globalisasi. Dengan kebijakan upah rendah, pengurangan subsidi, dan pemupukan modal swasta, Negara Dunia Ketiga mengonsentrasikan pendapatannya untuk ekspansi ke luar (globalisasi ataupun *capital relocation*). Proses ini sudah terlihat jelas dalam program yang dikenal dengan istilah *Struktural Adjustment Programs* (SAPs) atau program pengetatan ekonomi. Program ini dirancang oleh Bank Dunia dan IMF yang bekerja sama dengan elite Negara Dunia Ketiga, tujuannya adalah meningkatkan arus keluar modal dan kesediaan pasar nasional untuk melakukan swastanisasi bagi kepentingan MNC.[166] Berikut adalah contoh beberapa persyaratan SAP:[167]

1. *Penghapusan tarif-tarif yang membantu industri-industri kecil lokal agar tetap mampu bertahan hidup berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar global.* Padahal, tarif-tarif tersebut sesungguhnya memberi ruang bernafas bagi Negara-negara miskin untuk berkembang secara internal dalam menghadapi pesaing-pesaing yang lebih besar dan lebih kaya.
2. *Penghapusan berbagai peraturan dalam negeri yang mungkin dapat menghambat atau terlalu banyak mengatur masuknya investasi luar negeri*. Dengan demikian ini memungkinkan para pemodal dan korporasi global untuk secara bebas masuk dan dengan mudah menguasai bisnis-bisnis di tingkat lokal, bahkan tak jarang di seluruh lini perekonomian.
3. *Penghapusan kontrol harga (bahkan berkenaan dengan kebutuhan pokok seperti pengadaan air sekalipun) dan secara tidak adil mewajibkan pemberlakuan terhadap kontrol atas upah.* Alhasil, sudah dapat dipastikan para *pekerja yang upahnya sudah teramat kecil, menjadi semakin kecil kemampuannya untuk bertahan hidup.*
4. *Pengurangan secara drastis berbagai pelayanan sosial dan badan-badan yang menjalankannya,* seperti pelayanan kesehatan, perawatan medis, pendidikan, bantuan pangan, bantuan usaha kecil, angkutan, sanitasi, air dll. Kerap kali berbagai pelayanan tersebut diprivatisasi sehingga bantuan yang sebelumnya diterima Cuma-Cuma oleh rakyat, kini memerlukan biaya yang ujung-ujungnya harus dibayarkan kepada korporasi global. Akibatnya, begitu banyak orang tidak mampu membayarnya, sehingga secara otomatis mereka tersingkir keluar dari sistem.
5. *Penghancuran secara agresif atas program-program rakyat,* yang menjadi sarana bagi bangsa-bangsa untuk bisa mencapai kemandirian dalam hal kebutuhan pokok. Tentu saja, korporasi-korporasi global tidak bisa mendapatkan keuntungan jika bangsa-bangsa mampu memecahkan persoalan dalam negeri mereka sendiri, keuntungan korporasi global itu sendiri berasal dari pengembangan proses-proses penciptaan nilai tambah, khususnya melalui perdagangan global.
6. *Perubahan yang dilaksanakan secara cepat atas perekonomian dalam negeri untuk menekankan produksi ekspor,* yang biasanya dikelola tanpa ketatalaksanaan langsung dari investor asing dan korporasi global. Produksi yang terdiversifikasi secara lokal dan berskala kecil, seperti dalam bidang

[163] *Ibid,* hlm. 166

[164] Stephan Haggard & Robert R. Kaufman, ed., *Introduction: Institution and Economic Adjustment,* Princeton University Press, Princeton, NJ, 1992, hlm. 3

[165] Thomas J Bierstecker., “The Logic of Unfulfilled Pomise of Privatization individu Developing Countries”, individu Louis Puterman & Dietrich Ruescameyer, eds, *State and Market individu Development: Sinergy of Rivalry?,* Bouldera, CO: Liene Riener, Publisher, Inc, 1992, hlm. 106

[166] James Petras, *Negara Sebagai Agen Imperialis*, *Op. Cit.,* hlm. 1666-167

[167] Jerry Mander, Debi Barker & David Korten, “Globalisasi Membantu Kum Miskin”, dalam *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan,* Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hlm. 10-12

industri atau pertanian, akan digantikan dengan produksi berorientasi ekspor uang terspesialisasi dalam skala besar. Dalam hal ini, teori yang berlaku adalah ketika Negara-negara memusatkan produksi mereka pada sejumlah kecil produk ekspor, maka mereka akan mendapatkan cadangan devisa *(foreign exchange)* dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dengan demikian mereka akan mampu membeli barang-barang kebutuhan mereka di pasar-pasar asing.

H. GLOBALISASI DAN KRISIS MASYARAKAT KAPITALISME

Dampak perkembangan konstelasi politik-ekonomi internasional adalah efek globalisasi yang telah masuk ke segala sendi kehidupan manusia di dunia internasional. Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan telah timbul berbagai masalah. Ternyata perkembangan ilmu pengetahuan tidak mampu mengatasi, jurang yang besar antara Negara kaya dan miskin, masyarakat marginal, kelaparan, kemiskinan internasional, dan masalah perkembangan *indigeneous technology* di dunia ketiga.[168] Jelaslah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, dinamik yang menguasai jurusan-jurusan pertumbuhannya serta pilihan-pilihan masalahnya seperti juga tekhnologi, tidak berdiri sendiri, merupakan bagian dari sistem sosial, lengkap dengan tujuan-tujuan, kepentingan, prioritas, serta sistem nilainya.[169] Oleh karena itu pilihan tekhnologi tidak boleh diambil hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai implikasi sosialnya.[170]

Dalam hal ini ilmu pengetahuan dalam bidang tekhnologi informasi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan globalisasi dan pada akhirnya menimbulkan krisis di masyarakat kapitalisme. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang masyarakat kapitalisme, penulis paparkan lebih mendetail perihal relasi Negara, globalisasi dan logika neo-liberalisme. Karena paham tersebut merupakan sebuah ideologi sebagai dampak dari krisis kapitalisme. Dan tentunya seluruh sistem sosial.

Globalisasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor globalisasi yakni perusahaan-perusahaan transnasional (TNC, Trans-National Corporations) dan Bank Dunia/IMF melalui kesepakatan yang dibuat di World Trade Organization (WTO, Organisasi Perdagangan Dunia) sesungguhnya dilandaskan pada suatu ideologi yang dikenal dengan sebutan "neo-liberlisme". Neo-liberalisme pada dasarnya tidak ada bedanya dengan liberalisme. Para penganut neo-liberlisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil normal "kompetisi bebas". Mereka percaya bahwa 'pasar bebas" itu efisien, dan cara yang tepat untuk mengalokasikan sumberdaya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa menjadi indikator apakah sumberdaya telah habis atau masih banyak. Kalau harga murah, berarti persediaan memadai. Harga mahal artinya produksinya mulai langka. Harga tinggi maka orang akan menanam modal ke sana. Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Itulah alasan mengapa neo-liberalisme tidak ingin pemerintah ikut campur tangan dalam ekonomi. "Serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar", demikian keyakinan mereka. Keputusan individual atas interes pribadi diharapkan mendapat bimbingan dari *invisible hand* (tangan yang tidak tampak), sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individual tersebut. Kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut pada akhirnya akan *trickle down* (menetes ke bawah) kepada anggota masyarakat yang lain. Oleh karena itu sedikit orang tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. Kalau perlu jangan dipajaki.

Krisis berkepanjangan yang menimpa kapitalisme awal abad 19, yang berdampak depresi ekonomi 1930-an berakibat tenggelamnya paham liberalisme. Pendulum beralih memperbesar pemerintah sejak Roosevelt dengan *"New Deal"* tahun 1935. Tetapi dalam perjalanan kapitalisme, di akhir abad 20 pertumbuhan dan akumulasi kapital menjadi lambat. Kapitalisme memerlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan akumulasi kapital. Strategi yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi dan pasar bebas, dengan memberlakukan perlindungan hak milik intelektual, *good governance* (pemerintahan yang baik), penghapusan subsidi dan program proteksi rakyat, deregulasi, penguatan *civil society*, program anti-korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan suatu tatanan perdagangan global, dan sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan. Dengan demikian globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali paham liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neo-liberalisme. Neo-liberalisme sesungguhnya ditandai dengan kebijakan pasar bebas, yang mendorong perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggungjawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrat dan "parasit" pemerintah, yang tidak akan pernah mampu meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neo-liberal adalah "Liberalisasikan perdagangan dan keuangan", "Biarkan pasar menentukan harga", "Akhiri inflasi, Stabilisasi ekonomi-makro, dan privatisasi", "Pemerintah harus menyingkir dari menghalangi jalan". Paham inilah yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan *"consensus"* yang dipaksakan yang dikenal dengan "Globalisasi", sehingga terciptalah suatu tata dunia. Arsitek tata dunia ini ditetapkan dalam apa yang dikenal *"The Neo-Liberal Washington Consensus",* yang terdiri dari para pembela ekonomi swasta terutama wakil dari perusahaan-perusahaan

[168] Soedjatmoko, *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan tentang Agama Kebudayaan Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, LP3ES, 1984. hlm. 277.

[169] *Ibid.*

[170] *Ibid,* hlm. 282.

besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik.

Pokok-pokok pendirian neo-liberal meliputi, *pertama*, bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang perburuhan, investasi, harga serta biarkan perusahaan itu mangatur diri sendiri untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan. *Kedua*, hentikan subsidi Negara kepada rakyat karena bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Negara harus melakukan swastanisasi semua perusahaan Negara, karena perusahaan Negara dibuat untuk melaksanakan subsidi Negara pada rakyat. Ini juga menghambat persaingan bebas. *Ketiga*, hapuskan ideologi "kesejahteraan bersama" dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat "tradisional" karena menghalangi pertumbuhan. Serahkan manajemen sumberdaya alam kepada ahlinya, bukan kepada masyarakat "tradisional" (sebutan bagi masyarakat adaptif) yang tidak mampu mengelola sumberdaya alam secara efisien dan efektif.

I. TEORI SISTEM DUNIA

Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein, merupakan reaksi atas teori ketergantungan yang dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Dalam perspektif sistem dunia, setiap Negara atau kawasan dilihat sebagai entitas yang tak terpisahkan dari sistem dunia seperti sistem ekonomi global. Berdasarkan pandangan ini, fenomena mobilitas antar Negara merupakan dampak dari proses perkembangan ekonomi kapitalis di berbagai Negara. Semenjak kapitalisme tumbuh dan berkembang ke luar dari Negara intinya di Eropa, Amerika Utara, Oceania dan Jepang, belahan bumi ini seolah-olah terus membesar tanpa batas yang jelas dan akhirnya melahirkan suatu masyarakat yang global.[171]

Immanuel Wallerstein mendefinisikan sistem dunia sebagai *"A Unit With A Single Division of Labour And Multiple Cultural System".*[172] Ini merupakan sistem yang lahir dari proses transformasi struktural yang pernah ada dalam sejarah. Dalam bahasa Wallerstein, sistem ini merupakan sistem yang menyejarah *(Historical System)*: suatu sistem yang dengan isinya lahir, berkembang dan mati serta timbul kembali sebagai akibat adanya semacam proses pembagian kerja terus-menerus dan lebih canggih. Dalam perkembangan itulah Wallerstein menyebut adanya 3 sistem yang menyejarah: Sistem Mini *(The Mini System)*, Sistem Kekaisaran Dunia *(The World Empires)* dan Sistem Ekonomi Dunia *(The World Economic System).*

Farchan Bulkin menyebutkan empat hal mengapa pendekatan sistem dunia penting dalam memahami dunia ketiga. *Pertama*, sebagai usaha untuk meletakkan perkembangan politik dan ekonomi dunia ketiga ke dalam pergolakan ekonomi dan politik, serta dinamika dan potensi untuk perubahan dan transformasinya. Hal ini menjadi penting mengingat hampir sebagian besar Negara dunia ketiga telah terintegrasi ke dalam pergolakan dan ekonomi dunia. *Kedua,* watak dan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Negara dunia ketiga juga bisa diuraikan logikanya dan diurut pertumbuhannya dalam kaitannya dengan interaksinya dengan perekonomian dunia. *Ketiga,* pendekatan sistem dunia telah menawarkan suatu logika atas perbedaan-perbedaan substansial antara kekuatan-kekuatan politik yang tumbuh di wilayah kapitalisme pusat dan pinggiran *(peripheri)*, sehingga hubungan-hubungan antara kekuatan-kekuatan di kedua wilayah menjadi jelas, sekalipun tidak langsung dan masing-masing memainkan perannya dalam jaringan sistem ekonomi dunia. *Keempat,* dengan pendekatan ini kita dapat menempatkan kekuatan-kekuatan politik di dunia ketiga dalam suatu dinamika perubahan yang menyeluruh dan global sifatnya.[173]

Proyek perang Amerika atas Irak memiliki kecenderungan imperialistik, perang ini sejak awal tidak dilandasi oleh sebuah alasan masuk akal yang bisa digunakan untuk membenarkan invasi bersenjata sebuah Negara terhadap Negara lain. Karena perang tersebut dalam banyak Hal bersandar pada kepentingan Amerika untuk mempertahankan dominasinya dalam dunia internasional. Kepentingan untuk memperoleh keuntungan, terutama atas minyak, pembangunan ekonomi pasca perang, dan kontrol serta penguasaan terhadap pemerintah Irak yang baru oleh pemerintah Bush atau Amerika tanpa batas waktu. Dalam politik internasional, imperialisme sering didefinisikan sebagai penguasaan satu Negara kuat atas suatu wilayah atau Negara yang lebih lemah dengan maksud untuk mengambil dan menguasai penduduknya. Dalam pandangan kaum sosialis, imperialisme tidak dapat dipisahkan dari ideologi kapitalisme yang dianut oleh Amerika Serikat dan sekutunya, orang-orang kapitalis harus menguasai dan mengeksploitasi wilayah atau Negara lain agar modal atau kapital yang dimiliki tetap berjumlah banyak. Pandangan ini pernah secara eksplisit dikatakan Vladimir Ilych Lenin, pencetus Revolusi Bolshevik di tahun 1917 dan pendiri Republik Sosialis Uni Sovyet dalam bukunya *Imperialism: The Highest Stage of Capitalism* yang terbit di tahun 1919. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa Negara-negara kapitalis harus menjadi imperialis untuk mempertahankan pasar atas barang mereka dan akses atas sumberdaya alam. Bahwa penguasaan Negara kuat atas Negara lemah akan menyebabkan perang. Perang juga dapat ditimbulkan

---

[171] Lihat M. Arif Nasution, *Globalisasi & Migrasi Antar Negara,* Penerbit Alami, Bandung, 1999, hlm. 65

[172] Wallerstain, seperti dikutip Roland H Chilcote, *Theories of Development and Under-Development,* Westview Press, Colorado, 1994, hlm. 94

[173] Frachan Bulkin, dalam pengantarnya untuk *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia,* LP3ES, Jakarta, 1985

karena persaingan antar Negara kapitalis dalam memperebutkan wilayah jajahan. Irak dipilih sebagai Negara tujuan untuk dikuasai mengingat Negara ini mempunyai banyak kelebihan yang diperlukan untuk mempertahankan kebesaran Amerika. Cara-cara Amerika untuk menguasai dunia termasuk Irak bukan terjadi demikian saja, tetapi penuh dengan perencanaan dan strategi dalam kerangka politik global.

Teori Sistem-Dunia adalah perspektif makrososiologi yang berupaya menjelaskan dinamika "ekonomi dunia kapitalis" sebagai sistem yang bersifat total". Pendekatan ini dipakai oleh Immanuel Wallerstein terutama melalui karya *The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis* (1974). Pada 1976 Wallerstein mempublikasikan bukunya berjudul *The Modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. Dengan karya tersebut Wallerstein memberikan kontribusi besar di dalam pemikiran sejarah dan sosiologi dan memancing berbagai respon dan inspirasi bagi pemikir lainnya.[174]

Konsep-konsep utamanya dan juga blok bangunan intelektualnya berhasil menancapkan dampak sekaligus sambutan hangat dari negara-negara berkembang. Kajian Wallerstein mencakup sosiologi sejarah dan sejarah ekonomi. Karena tekanannya yang begtu besar terhadap pembangunan dan ketimpangan antar bangsa-bangsa, maka teori-teorinya dianut oleh para teoritikus dan praktisi pembangunan. Kombinasi ini membuat Proyek Sistem-Dunia bermakna intelektual sekaligus politik. Selain itu, pendekatan Wallerstein bersifat praxis, dalam arti antara teori dan praktek saling berkorelasi. Sementara itu tujuan aktifitas intelektual adalah menciptakan pengetahuan yang membongkar struktur-struktur tersembunyi yang memungkinkan seorang intelektual bertindak dan merubah dunia.

Metode Wallerstein seringkali diasosiasikan dengan sejarah dan sosiologi interpretatif, dan secara metodologis karya-karyanya berada di antara Marx dan Weber.

Wallerstein lahir pada 1930 di New York. Dia masuk Universitas Columbia dan meraih gelar BS, MA and PhD di sana. Mentor utamanya adalah C. Wright Mills. Dari Mill tersebut, Wallerstein belajar soal sensitifitas historis, soal makrostruktur, dia menolak liberalisme dan, dalam beberapa hal, Marxisme. Untuk beberapa saat, Wallerstein pernah tinggal di Paris. Di sana dia dipengaruhi oleh dua arus intelektual utama: kelompok sejarahwan Annales dan gagasan politik radikal. Paris saat itu merupakan pusat radikalisme politik dan intelektual di antara masyarakat Afrika, Asia dan Amerika Latin, dan menjadi penantang utama empirisisme dan liberalisme Anglo-Amerika. Dalam penelitiannya di Afrika, Wallerstein bersentuhan dengan dunia ketiga, dan dia menulis disertasinya mengenai proses pembentukan nasionalisme di Afrika Barat. Penelitiannya mengenai dunia ketiga berdampak besar terhadap karyanya. Dalam pengantar bukunya The Modern World System, Wallerstein menyatakan *"In general, in a deep conflict, the eyes of the downtrodden are more acute about the reality of the present. For it is in their interest to perceive correctly in order to expose the hypocrisies of the rulers. They have less interest in ideological deflection."* (p. 4).

Karya Wallerstein berkembang ketika teori modernisasi dan pembangunan diserang habis-habisan. Sementara dia mengaku bertujuan menciptakan suatu penjelasan alternatif sebagai kritik terhadap teori-teori tersebut. Wallerstein sendiri bertujuan membangun "perbedaan konseptual yang jelas dengan teori-teori modernisasi dan lalu memberikan paradigma teoritik yang baru untuk menginvestigasi muncul dan berkembangnya kapitalisme, industrialisme dan negara-negara nasional" (Skocpol, 1977, p 1075). Kritisismenya terhadap modernisasi meliputi: (1) reifikasi negara bangsa sebagai unit inti analisis, (2) asumsi bahwa semua negara hanya bisa mengikuti jalan perkembangan evolusioner yg tunggal, (3) mengesampingkan perkembangan sejarah dunia dari struktur transnasional yang membatasi perkembangan lokal dan nasional, (4) menjelaskan tipe-tipe ideal ahistoris tentang "tradisi" versus "modernitas, yang dielaborasi dan diterapkan dalam kasus-kasus nasional.

Di dalam merespon teori modernisasi, Wallerstein menyusun agenda penelitian dengan 5 tema utama. (1) fungsi ekonomi-dunia kapitalis sebagai sebuah sistem, (2) bagaimana dan mengapa asal muasalnya, (3) bagaimana relasinya dengan struktur-struktur kapitalis pada abad-abad terdahulu, (4) kajian komparatif terhadap mode-mode produksi alternatif, dan (5) proses transisi menuju sosialisme (Goldfrank, 2000, Wallerstein, 1979).

Ada 3 blok bangunan intelektual dari teori Sistem-Dunia yang dirujuk Wallerstein: Sekolah Annales, Marx dan Teori Ketergantungan (dependency theory). Blok bangunan ini diasosiasikan dengan pengalaman hidup Wallerstein dan keterlibatannya di dalam berbagai isu, teori dan situasi. Teori Sistem-Dunia berhutang pada Sekolah Annales yang diwakili oleh Fernand Braudel mengenai pendekatan kesejarahan (historical approach). Wallerstein mengambil gagasan Braudel perihal la long duree (long term). Dia juga melakukan studi dengan fokus pada kawasan geoekologis sebagai unit analisis, sejarah pedesaan, dan keyakinan pada material empiris dari Braudel. Dampak Annales ini bagi Wallerstein terletak pada level metodologis.

Dari Marx, Wallerstein belajar bahwa (1) realitas fundamental konflik sosial berbasis pada kelompok manusia, (2) konsen dengan totalitas yang relevan, (3) hakikat transiter bentuk-bentuk sosial dan teori-teori tentangnya, (4) sentralitas proses akumulasi yang menghasilkan perjuangan kelas secara kompetitif, dan (5) dialektika gerak melalui konflik dan kontradiksi. Melalui kajian ini, ambisi Wallerstein adalah hendak merevisi Marxisme itu sendiri.

[174] Herry Haryanto Azumi, *Immanuel Wallerstein, World-System & Geopolitics Global,* Makalah Bahan Kajian di Gedung NU, 11 Agustus 2006.

Teori Sistem-Dunia juga mengadaptasi teori ketergantungan (dependency theory). Dari teori ini Wallerstein menjelaskan pandangan neo-Marxis mengenai proses pembangunan, yang populer di negara-negara berkembang dan diantara tokohnya adalah Fernando Henrique Cardoso. Teori dependensia memahami "peripheri". dengan cara melihat relasi pusat-pinggiran yang tumbuh di kawasan periperal seperti Amerika Latin. Dari sanalah kritik terhadap kapitalisme global sekarang ini berkembang.

Pengaruh penting lainnya adalah Karl Polanyi dan Josep Schumpeter. Dari sini Sistem-Dunia tertarik pada lingkaran bisnis, dan juga gagasan mengenai tiga mode organisasi ekonomi: yakni mode reciprokal, mode redistribusi dan pasar. Tiga mode ini analog dengan konsep Wallerstein mengenai *mini-system, world-system dan world-economy.*

J. MARXISME, TEORI KRITIS DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dalam studi ilmu-ilmu Sosial membahas perspektif Marxisme dan Teori Kritis secara bersamaan, berarti menganalisis sebuah bangun pemikiran (*school of thoughts*) yang memiliki kecenderungan sama; baik akar filsafatnya, karakter pemikirannya, dan proyek masa depan yang bersifat emansipatoris. Dalam kategori Femia, Teori Kritis ditempatkan sebagai 'kelanjutan' dari Marxisme [orthodoks], bukan hanya karena para pemikir teori kritis banyak menggunakan kritik Marx terhadap kapitalisme (konsep keterasingan dan fethisisme) melainkan tetap juga memiliki kepentingan (sama dengan Marxisme melalui revolusi proletariat) untuk mengemansipasi struktur sosial yang timpang tersebut.[175] Sementara itu, Fakih menempatkan kedua perspektif tersebut kedalam apa yang disebut 'teori ilmu sosial kritik.'[176]

Tulisan ini akan mencoba mengurai dasar-dasar pemikiran Marxisme, bagaimana perkembangannya yang 'melahirkan' Teori Kritis, dan bagaimana keduanya menganalisis Studi Hubungan Internasional, berikut persamaan dan perbedaannya. Menempatkan Teori Kritis sebagai 'kelanjutan' dari Marxisme, bagi penulis adalah penting, selain karena kedua perspektif tersebut memiliki keterhubungan, dalam konteks Hubungan Internasional-pun, Istilah 'Teori Kritis' juga digunakan oleh para ilmuwan Hubungan Internasional untuk menjelaskan sejumlah perspektif yang didalamnya termasuk; Marxisme, Teori Kritis Mazhab Frankfurt, dan Teori Kritis yang dekat dengan pemikiran-pemikiran Gramsci [Neo-Gramscian].[177]

[1] Marxisme

Perspektif ini merujuk pada pemikiran-pemikaran Karl Marx (1818-1883). Marx banyak menganalisis mengenai perubahan-perubahan struktur ekonomi-politik di abad kesembilan belas, transformasi dari corak produksi feodalisme menuju kapitalisme. Berbeda dengan para pemikir sebelumnya (Adam Smith dan David Ricardo)–kedua tokoh tersebut sangat mempengaruhi pemikiran Marx–yang menganggap bahwa hubungan produksi dalam masyarakat kapitalis bersifat dinamis dan saling-menguntungkan, Marx justru menganggap bahwa hubungan produksi tersebut bersifat timpang dan eksploitatif.[178] Kapitalisme (sebagaimana Feodalisme) merupakan gerak dialektik yang menyejarah dari hubungan produksi dan menempatkan masyarakat kedalam dua bentuk kelas sosial yang bersifat antagonistik, yakni kelas Burjois (pemilik modal) dan kelas Buruh (Pekerja).

Teori *surplus value* ini adalah kontribusi penting Marx untuk melihat ekploitasi dan pencurian terhadap buruh yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme. Intinya adalah, adanya perbedaan antara kemampuan bekerja yang dibeli oleh majikan dengan pembelanjaan actual dari energi manusia dan keahlian, yang dimiliki oleh buruh ketika bekerja. Pada akhirnya, teori ini berpandangan bahwa dalam sistem kapitalis pemilik modal selalu mengupah buruh dengan harga yang kurang dari nilai yang diciptakan kemampuan tersebut digunakan dan komoditi diproduksi. Posisi buruh yang lemah dalam struktur kapitalis ketika berhadap-hadapan dengan pemilik modal, membuat situasi eksploitasi semakin besar.

Kapitalisme pada akhirnya akan mengakibatkan konsentrasi modal yang besar ditangan para kapitalis dan menyebabkan meluasnya kemiskinan dan pengangguran. Eksploitasi yang kejam terhadap kelas pekerja akan menimbulkan perlawanan dan solidaritas sesama kelas pekerja. Dalam kondisi yang penuh kontradiksi ini, kelas pekerja akan mengorganisir dirinya untuk mengambil-alih kepemilikan alat-alat produksi dari tangan pemilik modal, dan yang pada akhirnya mengubah seluruh relasi dan struktur produksi secara fundamental melalui sebuah revolusi sosial.

Pada titik ini, Marx adalah orang pertama yang menerapkan 'dialektika-materialisme-historis' untuk menganalisis fase-fase perkembangan masyarakat. Berbeda dengan idealisme Hegel, Marx memandang bahwa fase perkembangan masyarakat dipenuhi oleh kontradiksi antara kekuatan-kekuatan produksi. Kontradiksi tersebut melahirkan krisis, memicu terjadinya revolusi dan pada akhrinya membentuk sebuah formasi baru dalam tahap perkembangan masyarakat.

---

[175] Joseph V. Femia, 2001, *Marxisme dan Komunisme, dalam Ideologi Politik Kontemporer*, editor Eatwell & Anthony Wright (terj), Yogyakarta: Penerbit Jendela. Disadur dari http://www.timurmatahari.com

[176] Mansour Fakih, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

[177] Martin Griffiths, 2001, *Lima Puluh Pemikir Studi hubungan Internasional*, terj. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Sterling-Folker, Jennifer, 2006. Making Sense of Internatioanl Relations Theory, London: Lynne Rienner Publishers

[178] Mochtar Mas'oed, 1998, *Merkantilisme dan Strukturalisme: Gagasan anti-liberal, dalam Perspektif Ekonomi-Politik dalam Studi Hubungan Internasional,* Bahan Matrikulasi, Program Pasca Sarjana Konsentrasi Studi Hubungan Internasional, UGM.

Bagi Marx, hubungan produksi juga merupakan landasan bagi masyarakat, tempat ditegakannya supra-struktur hukum dan politik, dan menghubungankan bentuk-bentuk kesadaran tertentu. Sistem hukum, lembaga politik dan kebijakan hanyalah mengabdi pada hubungan kelas yang ada. Kesadaran umum masyarakat – ide, nilai – dibentuk oleh hakekat produksi.[179] Dengan kata lain, setiap fase sejarah selalu mencerminkan hubungan-hubungan produksi dan pertarungan kelas (terbagi menjadi dua dan bersifat antagonistik), bahwa kondisi material tersebutlah yang akan menghasilkan kesadaran.

Dititik ini, Marx sangat 'mengagungkan' determinisme ekonomi sebagai penggerak perubahan dalam struktur sosial-politik masyarakat. Dengan kata lain, dari sudut pandang materialisme historis, sejarah direduksi hanya sebagai manifestasi dari mode produksi. Sejarah bisa dianalisis sebagai proses objektif evolusi, tidak memiliki hubungan dengan kita dan apa yang kita perbuat, dan tunduk pada hukum-hukum yang tak terelakan.[180] Perubahan pada level mode of production (basis struktur) adalah determinan utama yang mempengaruhi perubahan pada level supra-struktur (ideologi, politik, sosial, kebudayaan, hukum). Konsekuensinya, fase menuju masyarakat komunisme sebagai 'akhir sejarah' (meminjam 'roh absolut' Hegel) adalah kemutlakan sejarah – sebuah Darwinisme Sosial.

Pada perkembangannya, pemikiran-pemikiran Marx tersebut berkembang menjadi suatu pandangan-dunia yang sitematis dan komprehensif yang menginspirasi banyak orang, baru muncul ketika Marx wafat–Marxisme.[181] Empat orang yang berperan besar untuk menjadikannya marxisme adalah Engles, Kautsky, Plekanov dan Lenin. Ketiga tokoh awal lebih banyak memfokuskan dirinya untuk mengembangkan Materialisme-Dialektika-Historis-nya Marx menjadi semacam doktrin 'sains sosial'. Determinisme ekonomi dikembangkan dengan mendasarkan pada hukum-hukum mutlak gerak materi pada alam. Akibatnya, Marxisme 'berubah' menjadi sangat 'ilmiah' dan berkarakter positivisme. Hal ini juga lah yang akhirnya menguatkan presepsi para Marxist orthodoks mengenai kemutlakan komunisme–ideologi gerakan buruh dibawah panji Sovyet–dan melahirkan beragam kritik dari 'dalam', terutama para 'Marxist Barat'; Gramsci dan para teoritisi Mazhab Frankfurt.

Disaat yang sama, Lenin (tokoh revolusi Rusia, 1917) mengembangkan sebuah teori yang sangat menarik mengenai Imperialisme – sebuah teori yang juga sangat berpengaruh dalam studi ilmu hubungan internasional. Dengan merujuk pada fenomena Perang Dunia I, Lenin memandang bahwa imperialisme berhubungan perkembangan internal kapitalisme serta hubungan antara negara maju dengan negara terbelakang. Fase kapitalisme internasional ini ditandai dengan (1) tumbuhnya monopoli, (2) bertambahnya kontrol lembaga-lembaga keuangan atas industri, (3) mengalirnya modal ke negara terbelakang untuk mengeksploitasi buruh murah dan terbelakang, (4) kontrol politik (neo-kolonial) yang langsung atau tidak langsung terhadap negara-negara yang kurang berkembang oleh kekuatan-kekuatan kapitalis.

Dengan kata lain, imperialisme sesungguhnya didorong oleh perkembangan dan krisis inhern kapitalisme. Eksploitasi terhadap negara-negara jajahan adalah cara untuk untuk menghasilkan laba tinggi dan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, tenaga buruh yang murah, dan dengan begitu mampu menghidari krisis internal kapitalisme akibat merosotnya tingkat keuntungan dan over-produsksi. Kemerosotan ekonomi dan pertumbuhan monopoli merupakan dua kata kunci yang mendorong terjadinya imperialisme.

Dengan demikian, teori imperialisme sesungguhnya hanya memindahkan pertarungan kelas yang bersifat domestik menjadi internasional–teori semacam inilah yang pada perkembangannya banyak mempengaruhi para sarjana Hubungan Internasional, semisal Wallerstein dengan 'Teori Sistem Dunia' dan para penganut teori Dependensia. Lebih lanjut, persaingan negara-negara kapitalis untuk merebut tanah jajahan memicu ketegangan internasional dan perang. Bagi Lenin, perang tersebut adalah indikasi bagi kemunduran (kehancuran) kapitalisme internasional–sebuah pandangan yang implisit merujuk pada kehancuran kapitalisme akibat perkembangan sejarah.

[2] Menuju 'Teori Kritis'

Perkembangan Marxisme [orthodoks] yang terlampau ekonomistik dan mereduksi manusia hanya sebagai 'objek' dari struktur produksi yang ada, mendorong Gramsci (seorang Marxis Italia) untuk 'menambahkan' unsur subjektif dalam pendekatan Marxisme. Bagi, Gramsci sains sosial yang dikembangkan oleh Marxisme orthodoks, mendistorsi peran-peran manusia sebagai 'agen', dimana fluktuasi ideologi dan politik hanya merupakan ekspresi dari basis struktur (ekonomi).[182]

Lebih lanjut, Gramsci berpendapat bahwa bertahannya kapitalisme dari krisis internalnya, bukan semata-mata karena mampu memperbaiki hubungan-hubungan produksinya menjadi fleksibel melainkan karena mampu membangun konsensus mengenai universalisasi ide-ide kapitalisme dengan kelompok subordinat. Artinya, manipulasi melalui mekanisme sosialisasi seperti media massa mengenai keunggulan spritul dan kultural kelas penguasa menjadikan kelas subordinat secara tak sadar menerima ketertindasan tersebut. 'Perang ide' merupakan gambaran Gramsci mengenai kondisi ini.[183]

---

[179] Joseph V. Femia, 2001, *Op. Cit.,* hlm. 144.
[180] Muhadi Sugiono, 1999, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 23.
[181] Joseph V. Femia, 2001, *Op. Cit.,* hlm. 148.
[182] Muhadi Sugiono, 1999, *Op. Cit.,* hlm. 22.
[183] Joseph V. Femia, 2001, *Op. Cit.*

Dalam konteks ini, Gramsci kemudian mengembangkan apa yang disebutnya sebagai 'hegemoni'; seluruh kompleks aktivitas pratiks dan teoritis dimana kelas berkuasa tidak hanya menjustifikasi dan menjaga dominasinya, tetapi juga berusaha memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasai. Artinya, sebuah hubungan hegemonik akan terjadi apabila kelompok berkuasa mendapat legitimasi dari kelompok subordinat atas subordinasinya. Legitimasi tersebut tidak ditatantang karena baik ideologi, nilai, kultur diinternalisasikan sedemikian rupa sebagai 'milik' kelompok tertindas.

Pada perkembangannya, terminologi teori kritis lebih banyak dihubungkan dengan pandangan *Frankfurt School* (Mazhab Frankfurt), seperti, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benyamin, Herbert Marcus, Erich Fromm dan Jurgen Habermas. Implisit dari karekter pemikiran mereka ialah upaya untuk membangun emansipasi manusia terhadap modernitas dan kemajuan kapitalisme yang 'menghancurkan' potensi kemanusiaan.

Karakter emansipatoris teori kritis tercermin melalui beberapa syarat, yaitu; a) bersikap kritis dan curiga terhadap zamannya; b) berpikir secara historis, berpijak pada masyarakatnya dalam kondisi yang 'historis'; c) tidak memisahkan teori dari praktek, tidak melepaskan fakta dari nilai semata-mata untuk mendapatkan hasil yang objektif.[184] Dengan demikian, teori kritis lebih bersifat reflektif (yaitu, 'membongkar' segala bentuk tatanan sosial yang dominatif, timpang, tidak adil dan tidak setara) ketimbang mengutamakan objektifitas ilmu pengetahuan. Pada titik ini, teori kritis sebenarnya beroposisi dengan pandangan kaum behavioralisme yang menekankan pada positivisme ilmu pengetahuan, bebas nilai, objektivitas dan pembedaan tegas antara subjek (peneliti) dan objek (yang diteliti), sehingga oleh beberapa ilmuwan teori kritis dikategorisasikan kedalam postbehavioralism.

Kemunculan teori kritis adalah 'reaksi' dan kritik terhadap positivisme ilmu pengetahuan yang sangat dijunjung oleh kaum behavioralism. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, kehadiran teori kritis bukanlah sesuatu yang muncul dari ruang hampa melainkan hasil dialektika dari pelbagai pemikiran tradisi kritis sebelumnya – sebuah perpaduan apik dari pemikiran Kant, Hegel, Marx dan Psikoanalisis Freud; Kant memahami kritik sebagai upaya untuk mengenal keterbatasan rasio dalam setiap klaim pengetahuan; Hegel memahami kritik sebagai refleksi diri atas berbagai rintangan, tekanan, dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan-diri dari rasio dalam sejarah; Marx memahami kritik sebagai usaha-usaha emansipatoris dari penindasan dan usaha-usaha alienasi yang dihasilkan oleh hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat, sementara Freud memahami Kritik sebagai pembebasan individu dari irrasionalitas, dari ketidaksadaran menjadi sadar.

Horkheimer menyebutnya Teori Kritis (sebagai pembeda atas Teori Tradisional – Behavioralisme), yang setidaknya memiliki empat karakter, yaitu; pertama, teori kritis bersifat historis, artinya diperkembangkan oleh berdasarkan situasi masyarakat yang konkret dan berpijak diatasnya; kedua, teori kritis disusun atas kesadaran akan keterlibatan para pemikirnya; ketiga, teori kritis memiliki kecurigaan kritis terhadap masyarakat aktual; dan keempat, teori kritis itu merupakan teori yang bersifat praktis.[185]

[3] Marxisme dan teori Kritis dalam Studi Hubungan Internasional

Dalam studi Hubungan Internasional, kedua perspektif ini memiliki kecenderungan yang sama, yakni sikap kritisnya terhadap kapitalisme internasional, yang eksploitatif dan timpang. Bahkan tak jarang digunakan secara 'bersamaan' untuk menganalisis dominasi sistem kapitalis dunia, sumber-sumber ketidakadilan struktural yang terdapat dalam sistem internasional, merefleksikan secara kritis kondisi-kondisi historis yang mendasari ketidakadilan tersebut, kekuatan-kekuatan material dan ideologis yang mempertahankannya, dan berupaya untuk menciptakan kekuatan-kekuatan potensial yang memungkinkan terjadinya transformasi radikal struktur internasional yang lebih adil.[186]

Selain itu, baik Marxisme maupun Teori Kritis memiliki kecenderungan untuk membangun konstruksi baru tatanan internasional yang memungkinkan tercapainya emansipasi universal. Jika perspektif Marxisme melalui Imanuel Wallerstein lebih menekankan pada upaya untuk menciptakan tata ekonomi dunia yang berkeadilan ekonomi dan politik, melalui gerakan sosial nasional menuju skala global, upaya untuk mencapai emansipasi universal tersebut bagi kelompok Teori Kritis, dapat dilakukan dengan membongkar diskurus dominan yang menguasai sistem internasional sekaligus mensubordinasi kelas sosial tertentu untuk mewujudkan seluruh kapasitas potensialnya.

Perbedaan pokok diantara keduanya ialah, jika Marxisme lebih menekankan pada analisis ekonomi (perdagangan internasional) untuk membongkar berbagai ketimpangan dalam sistem kapitalis dunia, dan 'mengabaikan' peran ide/subjek (manusia), Teori Kritis lebih memfokuskan dirinya pada 'agen', yakni berupaya untuk menjelaskan bagaimana peran agen (ide/diskurusus) dan hubungan-hubungan intersubjektif (melibatkan individu, kelas sosial tertentu) yang berupaya untuk 'melanggengkan' kekuasaan politik tertentu – dititik ini, penulis melihat bahwa Teori Kritis dalam studi Hubungan Internasional berada dalam konteks untuk 'menggenapi' beberapa hal yang tak mampu dijangkau oleh Marxisme.

---

[184]Doni Gaharal Adian, 2005, *Percik Pemikiran Kontemporer; Sebuah Pengantar Komprehensif*, Bandung: Jalasutra.

[185] Fransisco Budi Hardiman, 2004, *Kritik Ideologi; Menyingkap Kepentingan Ilmu Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas,* Yogyakarta: Buku Baik.

[186] Martin Griffiths , 2001, *Op. Cit.*, hlm. 147.

Teori '*Modern World System*' oleh Wallerstein, seringkali direpresentasikan sebagai salah satu pendekatan Marxisme dalam memahami ekonomi-politik internasional. Menurut Wallerstein, ekonomi dunia merupakan satu-satunya sarana pengorganisasian dalam sistem internasional. Sistem dunia modern itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut; suatu mekanisme pembagian kerja tunggal dimana masing-masing negara saling tergantung pada pertukaran ekonomi; penjualan produk dan barang untuk memperoleh keuntungan; dan yang terakhir adalah, pembagian dunia kedalam tiga wilayah fungsional atau unit-sosio ekonomi, yang sesuai dengan peran yang dimainkan oleh negara dari masing-masing wilayah tersebut didalam ekonomi internasional.[187] Ketiga wilayah tersebut terdiri dari *core, semi-peri-phery* dan *periphery*. Yang kaya dari wilayah *core* (Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang) digerakan atas penderitaan wilayah *periphery* (Dunia Ketiga).[188] Sementara wilayah *semi-periphery* adalah perantara dari dua kutub wilayah tersebut.

Secara umum Wallerstein, memandang bahwa politik kekuasaan dan perbedaan yang ada di dunia ini ditentukan oleh struktur ekonomi dunia yang bercorak kapitalistik. Negara-negara inti berupaya sedemikian rupa untuk untuk memaksimalisasi keuntungan ekonominya atas eksploitasi terhadap negara-negara pinggiran. Dengan demikian, politik global sesungguhnya ditentukan oleh kepentingan para kapitalis internasional untuk memonopoli pasar dan sengaja menciptakan ketergantungan bagi negara-negara pinggiran. Teori ini juga menekankan pada konsep 'unequal exchange' (pertukaran tak seimbang) antara pusat dan pinggiran yang memungkinkan negara-negara pusat untuk menyerap nilai-lebih dari negara pinggiran karena adanya 'perbedaan dalam upah.'[189]

Kritik terhadap struktur ekonomi global juga datang dari kelompok Dependensia (Gunder Frank, Codoso, Dos Santos) secara umum kelompok ini mempermasalahkan ketergantungan ekonomi negara-negara Amerika Latin terhadap struktur ekonomi 'eksternal', yang menyebabkan *underdevelopment* di kawasan tersebut. Ketergantungan tersebut disebabkan oleh integrasi penuh negara-negara Amerika Latin kepada sistem kapitalis global. Sistem perdagangan yang tak seimbang antara center dan periphery merupakan salah satu objek analisis dari kelompok ini untuk membongkar strktur kapitalisme internasional yang bersifat eksploitatif–kondisi dimana hegemoni AS menjadi sangat dominan dalam struktur ekonomi-politik di kawasan ini.

Secara umum, kedua pemikiran ini mengadopsi pendekatan Marxisme terutama mengenai struktur imperial dalam tatanan internasional yang dikembangkan oleh Lenin. Kendati demikian, pemikiran tersebut tidak serta merta merefleksikan perspektif Marxisme secara penuh, mengingat pendekatan mereka yang lebih memfokuskan pada ketimpangan dalam struktur perdagangan intenasional sebagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan para kapitalis internasional, ketimbang mempermasalahkan '*mode of production'*. Konteks ini jugalah yang kemudian banyak dikritik oleh para pemikir Marxist lainnya, yaitu kelompok 'produksionis' yang lebih menekankan pada mode produksi sebagai cara untuk menganalisis peralihan kapitalisme ke negara-negara dunia ketiga.[190]

Disisi lain, Perspektif Marxisme yang berpandangan bahwa negara merupakan refleksi dari pertarungan kelas, dan menjadi 'alat' bagi kelas pemilik modal (berkuasa) untuk menjaga kemapanan kekuasaannya, dengan sekaligus mensubordinasi pekerja (kelas tertindas) lewat aparatus negara. Maka dalam konteks Hubungan Internasional, Perspektif Marxisme juga memandang struktur internasional juga merupakan representasi dari kontradiksi kelas dalam batasan yang lebih luas. Kelas dominannya ialah kapitalisme internasional, yang beroperasi dengan memanfaatkan institusi internasional (lembaga keuangan dan perdagangan), pasar bebas, dan perkembangan teknologi. Dalam konsepsi Marxisme, globalisasi hanyalah bentuk lanjut dari perkembangan kapitalisme, yang pada masa lalu orang menyebutnya kolonialisme. Negara (baik *core-periphery*) bertugas untuk mengamankan kepentingan para kapitalis ini, begitu juga sistem internasional pun harus dikonstruksi sedemikian rupa untuk melanggengkan kepentingan kapitalisme internasional.

Sementara itu, seperti juga yang digambarkan sebelumnya, Teori Kritis dalam Hubungan Internasional dipengaruhi oleh dua bentuk pemikiran, yaitu Gramscian dan Teori Kritis Mazhab Frankfurt.[191] Secara umum mereka menentang pandangan kaum realis dan liberalis yang sangat percaya bahwa struktur hubungan internasional (termasuk negara) merupakan sesuatu yang 'taken for granted'. Menurut mereka, realitas hubungan internasional merupakan cerminan dari hubungan antara kekuatan-kekuatan sosial (material, ideologi, institusi) yang berada didalamnya. Olehnya, struktur internasional dipandang sebagai konstruksi kekuatan-kekuatan tersebut untuk mempertahankan kepentingannya.

Artinya, tidak ada politik internasional dan ekonomi global yang berjalan dengan hukum yang kekal. Segala sesuatu, termasuk hubungan internasional adalah historis sifatnya, sehingga dunia sosial merupakan konstruksi waktu dan tempat; sistem internasional merupakan konstruksi khusus dari negara-negara yang paling kuat. Sejak politik dunia dikonstruksi daripada ditemukan, tidak ada perbedaan mendasar antara

---

[187] Mochtar Mas'oed , 1998, *Op. Cit.*
[188] Robert Jackson & Sorensen, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[189] Bonnie Setiawan, 1999, *Peralihan Kapitalisme ke Dunia Ketiga: Teori-teori Radikal Klasik sampai Kontemporer,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
[190] *Ibid.*
[191] Jennifer Sterling-Folker , 2006. *Op. Cit.*

subjek (analis) dan objek (fokus analisis).[192] Karena bersifat emansipatoris, teoritisi kritis dalam hubungan internasional berupaya mengkondisikan adanya kemungkinan transformasi global, yang bertujuan untuk menghilangkan berbagai bentuk penindasan dalam hubungan internasional sehingga tercapai kebebasan universal dan kesetaraan.

Berbeda dengan Marxisme yang lebih mengedepankan relasi ekonomi semata, Teori Kritis lebih banyak berhubungan dengan peran ide dan gagasan dalam membentuk formasi politik, ekonomi, sosial, budaya yang mengukuhkan dominasi kelompok tertentu dalam struktur internasional. Bangun pengetahuan dan gagasan yang oleh kalangan Marxis tidak banyak dianalisis dan dianggap sekedar refleksi dari hubungan-hubungan produksi, oleh Teori Kritis dianggap bersifat ’otonom’ dan turut mempengaruhi perkembangan kapitalisme (fleksibilitas kapitalisme dan berhasil melewati krisis internalnya); pemberhalaan terhadap konsumen (consumen fetishism) dalam fase kapitalisme lanjut melalui reproduksi wacana konsumerisme, telah mendistorsi ide dan ’menghilangkan’ kemungkinan terwujudnya revolusi sosial.

Sebagaimana pandangan dasar teori kritis mengenai karakter teori (pengetahuan) yang bersifat politis, para teoritikus kritis Hubungan Internasional memandang bahwa pengetahuan bukan dan tidak dapat netral secara moral maupun secara politik atau ideologi. Pengetahuan dengan demikian membuka suatu kecenderungan–sadar atau tidak–selalu merupakan (berisi) kepentingan, nilai-nilai kelompok-kelompok, golongan-golongan, kelas-kelas, bangsa-bangsa tertentu dan seterusnya. Dengan kata lain, tak ada satupun teori Hubungan Internasional yang bisa dikatakan bebas nilai–semuanya memiliki kepentingan.

Robert Cox menunjukan pandangan tersebut dengan menyebutkan bahwa ” teori selalu bagi seseorang dan untuk tujuan tertentu”.[193] Dengan meminjam pembedaan teori (antara teori tradisional dan kritis) menurut Horkheimer, Cox kemudian membedakan teori hubungan internasional menjadi; pengetahuan penyelesaian masalah (*problem-solving knowledge*) dan pengetahuan emansipatoris *(emancipatory knowledege*). Bagi Cox ’pengetahuan penyelesaian masalah’ bersifat konservatif, memandang struktur hugungan internasional bersifat *given*, dan hanya untuk mengetahui (menjelaskan) tatanan dunia yang ada saat ini.

Sebaliknya, pengetahuan emansipatoris memandang klaim pengetahuan seperti ini sesungguhnya menyiratkan berbagai kepentingan dari kekuatan sosial dalam struktur internasional. Sehingga klaim realist mengenai dunia yang anarki maupun liberalis mengenai ’desentralisasi sistem politik internasional’ berada dalam konteks historis dan politis. Artinya, keduanya tak lebih dari refleksi kepentingan berbagai aktor untuk ’menguasai’ struktur politik internasional–status quo internasional. Dengan kata lain, teori kritis tidak bersifat netral; politis dan etis, untuk membebaskan kemanusiaan dari struktur internasional yang ’menindas’.

Cox adalah orang yang menerapkan pendekatan Gramscian dalam studi Hubungan Internasional. Dengan mengembangkan konsep hegemoni Gramsci pada level internasional, Cox berpandangan bahwa tatanan dunia bersifat hegemonik (dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan hegemon). Sistem hegemonik ini dikonstruksikan sedemikian rupa oleh ’blok historis’ tertentu (berupa negara, kelas sosial, institusi) untuk menjaga dominasinya dalam struktur internasional. Untuk menjamin dominasi tersebut, sebuah konsep universal mengenai tatanan dunia dikembangkan oleh negara hegemonik, sebuah tatanan yang dikonstruksi mampu berhubungan dengan kepentingan kebanyakan negara di dunia ini.

Lebih lanjut, hegemoni dalam hubungan internasional tidak hanya menyangkut tatanan antar negara, melainkan juga berhubungan dengan tatanan ekonomi dunia, dimana adanya penetrasi mode produksi dominan ke seluruh dunia dan mensubordinasi mode produksi lainnya. Hubungan internasional lebih merupakan refleksi dari hubungan antara kelas-kelas sosial dari berbagaimacam negara. Secara umum, tatanan dunia yang hegemonik, melahirkan berbagaimacam norma universal, institusi dan mekanisme, yang pada akhirnya menjadi aturan bersama yang mengatur hubungan-hubngan antar negara dan kelas sosial yang ada. Tentunya, aturan tersebut bertujuan untuk menyokong ’*mode of production*’ dominan.

Disisi lain, Teori Kritis yang dekat dengan pemikiran Habermasian (Mazhab Frankfurt) lebih banyak menekan pada upaya untuk menerapkan ’paradigma komunikasi’ guna mendekonstruksi meta-narasi liberalisme yang menghilangkan realisasi potensial individu-individu. Bagi kelompok ini, kebenaran dan etika merupakan sesuatu yang inheren dalam bahasa, sehingga diperlukan ruang komunikasi ideal yang bebas dan setara, yang memungkinkan tercapainya konsensus rasional. Jika kelompok Gramscian lebih menekankan pada counter-hegemony dan gerakan sosial sebagai ’pemicu’ emansipasi, maka teori kritis Habermasian lebih berfokus pada ’ketiadaan komunikasi’. Dengan demikian, teori kritis sesungguhnya percaya bahwa tatanan dunia bukanlah sesuatu yang bersifat eksternal, abadi dan statis. Melainkan selalu berubah seiring dengan perubahan-perubahan kekuatan sosial didalamnya.

Dalam pandangan penulis, perbedaan mendasar antara kedua perspektif ini adalah secara epistemologi, Teori Kritis lebih bersifat konstruktivis dengan tetap merujuk pada tradisi-tradisi Marxisme. Sementara, Marxisme lebih bersifat positivis dan lebih menkankan pada analisis ekonomi dalam hubungan internasional. Ini juga lah yang membuat Marxisme sebenarnya berada pada posisi yang sama dengan

---

[192] Robert Jackson, & Sorensen, 2005, *Op. Cit*.

[193] Robert W Cox, 1983, *Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method, Millenium:* Jurnal of International Studies Vol 12 (2).

Realisme dan Liberalisme, yakni kelompok behavioralisme dalam Hubungan Internasional. Namun demikian, menurut penulis dalam studi Hubungan Internasional, kedua perspektif ini terlihat sebagai suatu 'bangunan' pengetahuan yang saling menopang untuk menjelaskan 'realitas' tatanan internasional. Hal ini bukan berarti membangun generalisasi diantara keduanya, melainkan berpijak pada berbagai penjelasan diatas, bahwa baik para teoritisi sistem dunia dan dependensia maupun para teoritisi kritis dalam Hubungan internasional sangat kuat merujuk pada pemikiran-pemikiran Karl Marx mengenai struktur sosial dalam masyarakat.

K. ANALISIS GEO-EKONOMI, GEO-POLITIK DAN GEO-STRATEGI

[1] Napak Tilas Ekonomi Politik Orde Baru

Keberadaan rezim Orde Baru tidak lepas dari pergulatan dan pertarungan perebutan kekuasaan politik ditingkat global. Eric Nordlinger (1990) menyebut Keberadaan Orde Baru tidak lepas dari kudeta berdarah (*disguised of coup)* tahun 1965 yang disponsori negara-negara kapitalis untuk membendung perkembangan komunisme di Asia. Krisis ekonomi yang melanda rezim Orde Lama di bawah bendera "Nasionalisme-Sosialisme-Komunisme" (Nasakom) Soekarno, melahirkan secara prematur bayi tirani Orde Baru yang dibidani oleh agen-agen kapitalis. Tapi, bayi prematur ini akhirnya tumbuh menjadi bayi normal karena asuhan "tangan-tangan ajaib" negara kapitalis yang selalu memberinya makanan dan susu bergizi produksi mereka.

Orde Baru membangun kembali Indonesia yang tercabik krisis yang diwarnai kebangkrutan ekonomi dengan tingkat inflasi mencapai 650 persen dan pergolakan politik berdarah-darah dengan bantuan dukungan negara-negara kapitalis. Satu-satunya program pemulihan ekonomi yang yang dicanangkan pada masa awal pemerintahan Orde Baru adalah kebijakan menarik investor untuk mengalirkan modalnya ke Indonesia, bahkan dengan menerima semua persyaratan yang mereka tetapkan untuk merangsang mereka agar mau menanamkan investasi. Karenanya tak heran kalau tahun-tahun pertama berkuasanya Orde Baru ditandai dengan aturan dan kebijakan yang semuanya ditetapkan oleh IMF, Bank Dunia, USAID, dan konsultan asing yang pro paham kapitalis.

Alternatif ini menjadi pilihan praktis para ekonom Orde Baru untuk bisa segera keluar dari krisis dengan membuka diri pada investasi dan modal asing sebanyak-banyaknya.[194] Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Mochtar Mas'oed (1989), tentang bagaimana perjuangan dan upaya Orde Baru untuk mencari dukungan dana guna membiayai pembangunannya, bahkan sampai harus meminta-minta kepada negara-negara kreditor agar Indonesia diberi pinjaman utang. Apa yang menjadi cita-cita dari rezim sebelumnya tentang konsep "berdikari," sama sekali diabaikan.[195] Persoalan riil yang dihadapi pemerintah Orde Baru adalah bagaimana mencari sebanyak mungkin dana-dana pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja negara.[196]

Setidaknya ada tiga teori yang dijadikan pedoman kalangan intelektual Orde Baru tentang perlunya prioritas pembangunan ekonomi daripada pembangunan politik.[197] Pertama, mereka percaya dengan hipotesa Seymour M Lipset (1963: 2) bahwa, demokrasi politik didahului oleh pembangunan ekonomi. Hanya bangsa-bangsa yang telah mengalami pembangunan ekonomi tingkat tinggilah yang berhasil mencapai demokrasi liberal tingkat tinggi. Kedua, adalah pendapat Daniel Bell tentang "berakhirnya ideologi." Pada dasarnya kemajuan-kemajuan teknologi telah membawa pembangunan ekonomi di Barat berhasil memecahkan masalah yang dihadapinya selama revolusi industri. Dan bangsa-bangsa Barat sekarang melihat politik yang didasarkan pada ideologi sebagai sesuatu yang ketinggalan jaman. Bahkan Bell menyatakan bahwa, politik masa kini adalah politik berdasarkan konsensus atau kesepakatan.

---

[194] Ada dua pilihan rezim Orde Baru pada masa-masa awal pembangunannya, pertama, membangun koalisi dengan sebuah partai politik dan dengan demikian memungkinkan bekerjanya sistem politik yang mendorong partisipasi rakyat; kedua, mereformasi kerangka konstitusional yang ada sedemikian rupa guna menciptakan satu kesepakatan baru. Dan Soeharto menolak pilihan pertama karena strategi itu bertentangan dengan kebijakan ekonominya yang berorientasi ke luar, sementara partai-partai itu adalah kebanyakan pendukung usahawan pribumi. Soeharto meyakini keberhasilan program pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan yang cepat telah dijamin oleh modal asing, perusahaan-perusahaan negara yang diaktifkan kembali, dan para pengusaha dalam negeri yang memiliki koneksi internasional, serta Angkatan Darat. Soeharto menganggap pengusaha pribumi tidak bisa diharapkan untuk memberi jaminan semacam itu, sehingga dukungan mereka tidak dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya lihat Mochtar Mas'oed, 1989, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971,* Jakarta: Pustaka LP3ES, hlm. 128 dst.

[195] Dalam menentang pendekatan 'kembali dengan Barat,' Presiden Soekarno dalam pidatonya 1 September 1966 memperingatkan bahwa, "nilai kemerdekaan yang paling tinggi adalah berdiri di atas kaki sendiri," dan karena itu tidak boleh "meminta-minta" dalam usaha merehabilitasi ekonomi. *FEER*, 15 September 1966, dalam Mochtar Mas'oed, 1989, *ibid.,* hlm. 79.

[196] Dalam mencari sumber pendanaan baik untuk menggerakkan roda perekonomian nasional yang hampir ambruk oleh krisis yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi yang mencapai 650 persen maupun untuk menutup defisit anggaran negara akibat utang yang sudah mencapai 3,1 milyar dollar AS dan sudah akan jatuh tempo sebesar 727,7 juta dollar AS, maka secara ekonomis pilihan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah di Indonesia guna mendapatkan *cash flow* besar dalam waktu singkat adalah pilihan yang menguntungkan bagi rezim Orde Baru. Hal ini tercermin dalam peraturan yang melegalisasi eksploitasi kekayaan alam, seperti dalam UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

[197] Dalam menjalankan roda pemerintahan selama berkuasa, Orde Baru selalu berlindung di balik landasan konstitusi untuk memperoleh legitimasi yang sah dan kuat dalam membuat keputusan. Begitu juga dalam pembangunan ekonomi yang lebih bercorak kapitalistik dengan orientasi mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya melalui penetrasi modal asing. Orde Baru pun melakukan hal serupa dengan melakukan reformasi hukum yang bersifat instumental terhadap ekonomi untuk membuka diri bagi pembangunan kapitalisme seperti membuat peraturan mengenai Penanaman Modal Asing (UU No.1/1967) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 8/1968).

Ketiga, argumen yang diajukan Samuel P Huntington tentang akibat-akibat yang berbahaya dari mobilisasi sosial yang tidak terkendali dan pentingnya negara-negara yang kurang berkembang untuk terlibat langsung dalam pembangunan. karenanya, hal terpenting dari pendapat Huntington adalah perlunya pelembagaan politik. Agar dapat bertahan, pemerintah negara-negara baru harus mampu menyalurkan tuntutan rakyat terhadap partisipasi politik secara tertib.[198] Jadi pada paruh kedua 1960-an, kaum intelektual yang mendukung Orde Baru telah memiliki suatu dasar teoretis yang utuh untuk mengajukan suatu jenis politik baru yang bisa mendukung pembangunan ekonomi, yang "bebas dari konflik ideologis" serta didasarkan atas pragmatisme, rasionalitas, ketertiban, dan keahlian praktis.

Sebagai negara Dunia Ketiga yang mencapai kemerdekaannya pasca Perang Dunia II, keberadaan Indonesia dalam melaksanakan pembangunan tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Logika negara pembangunan Menurut Gerschenkron (1962), semakin terlambat suatu negara melakukan proses industrialisasi, maka semakin diperlukan campur tangan negara dalam proses pembangunannya. Artinya, jalan yang ditempuh negara industri generasi pertama (AS dan Eropa Barat) yang melakukan industrialisasi berbeda dengan negara-negara yang menyusul belakangan (Jerman, Jepang, Rusia, dan Asia Timur). Selain peran negara yang makin besar, jumlah modal yang harus dikumpulkan juga makin besar guna melakukan industrialisasi. Pada negara industri generasi pertama, proses industrialisasi membutuhkan modal relatif kecil sehingga dapat dijalankan oleh swasta, tanpa campur tangan negara. Pada negara industri generasi berikutnya, modal yang dibutuhkan makin besar sehingga negara terlibat proses industrialisasi. Keterlibatan negara dalam proses pembangunan ekonomi industri inilah yang disebut dengan model negara pembangunan *(model of developmental state*). Negara lalu terjun langsung dalam proses-proses ekonomi, seperti melakukan akumulasi kapital baik domestik maupun asing, mendirikan perusahaan-perusahaan negara, mendorong terciptanya kelas pengusaha, dan melakukan regulasi aktif di sektor fiskal, finansial, moneter, dan perdagangan. Inilah yang membedakan antara lahirnya kapitalisme di Eropa Barat dengan kapitalisme di Indonesia. Jika kapitalisme yang tumbuh di Eropa Barat murni dari swasta *(pure capitalism)*, maka kapitalisme di Indonesia berasal dari bentukan dan sokongan negara *(state-sponsored capitalism)*.[199]

Konsekuensinya dari pilihan ini adalah, kelas menengah yang amat diperlukan bagi tumbuhnya demokrasi tidak pernah lahir. Yang terbentuk justru adalah sekumpulan konglomerat atau pengusaha yang amat tergantung pada proteksi, patronase, dan subsidi negara. Oleh Kunio, gejala yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di sebagian besar negara-negara Asia Tenggara ini dinamakan dengan kapitalisme semu atau *erzatz capitalism*.[200]

Dalam konteks kapitalisme semu, terjadi persekutuan segitiga antara modal asing, negara, pengusaha domestik, serta di *back-up* kelompok militer sebagai kekuatan represi. Persekutuan yang oleh Peter Evans (1986) dinamakan *tripple alliance* ini diwujudkan dengan proyek-proyek kontrak karya seperti Freeport, Caltex, dan proyek-proyek industri strategis lain. Pada gilirannya aliansi segitiga ini amat merugikan rakyat karena sarat dengan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, suntikan modal asing hanya dialokasikan pada proyek-proyek "mercusuar" yang tidak mempunyai keterkaitan ke depan *(forward linkage)* dan keterkaitan ke belakang *(backward linkage)* yang dibutuhkan untuk membangun fondasi perekonomian rakyat (*rentier capitalism).* Pertanyaannya kemudian adalah mengapa aliansi segitiga ini berlangsung mulus, tanpa gejolak politik kelompok elite? Menurut Walden Bello (1998) ada tiga alasan. Pertama, para investor asing yang membawa modal besar dan mencari lahan untuk produksi menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Kedua, para teknokrat negara bersikap represif terhadap rakyat demi stabilitas politik. Ketiga, elite ekonomi menganggap, akumulasi kapital secara cepat merupakan strategi yang bisa menciptakan kemakmuran dan pertumbuhan secara cepat.[201]

[2] Interaksi Ekonomi Politik Orde Baru

Perjalanan ekonomi politik Orde Baru selama 32 tahun diwarnai oleh bagaimana modal dan kekuasaan saling berinteraksi.[202] Proses interaksi antara modal dan kekuasaan tersebut menimbulkan fluktuasi dan

---

[198] Samuel P Huntington, 1965, 'Political Development and Political Decay,' *World Politics,* 17,3 (April) dalam Mochtar Mas'oed, 1989*, loc.cit*., hlm. 137.

[199] Lihat Agus Subagyo, 'Mengurai Gagalnya Negara Pembangunan,' *Kompas Cyber Media*, 2002.

[200] Lebih jelasnya lihat Yoshihara Kunio, 1990, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara,* Jakarta: Pustaka LP3ES.

[201] Agus Subagyo, 2002, *op.cit.*

[202] Ada tiga kelompok yang terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi semasa awal Orde Baru. Ketiga kelompok itu adalah, kelompok teknokrat, kelompok intervensionis, dan kroni kapitalis. Kelompok teknokrat dimotori "Mafia Berkeley" terdiri atas para ekonom yang berorientasi pada bekerjanya mekanisme pasar dengan baik, sementara kelompok intervensionis terdiri dari banyak orang dengan latar belakang yang berbeda namun mementingkan perlunya pemerintah melakukan intervensi atau proteksi dengan alasan nasionalisme ekonomi murni, maupun dengan tujuan kepentingan kelompok/individu. Termasuk kelompok ini adalah lembaga-lembaga seperti Pertamina yang pada saat *oil boom* sangat aktif berperan melakukan investasi besar-besaran di berbagai bidang yang bukan merupakan bisnis inti *(core-business)*, Habibie dan kawan-kawan, kelompok pengusaha pribumi yang dipayungi oleh Ginandjar Kartasasmita, dan lain sebagainya. Kroni kapitalis tak lain adalah sekelompok pengusaha atau kroni dari penguasa—termasuk keluarga Soeharto—yang lebih mementingkan keuntungan perusahaannya dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Kroni kapitalis selalu terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah sebagai parasit ekonomi yang menghisap dan membebani setiap transaksi. Untuk lebih jelasnya lihat Anton H. Gunawan, 'Mengkaji Pengalaman Masa Lalu dan Menggagas Masa

distorsi ekonomi yang berdampak pada ketidakjelasan arah pembangunan dan rapuhnya basis fundamental ekonomi Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh dominannya intervensi tiga jajaran lembaga negara dalam struktur kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu lembaga kepresidenan, militer, dan birokrasi (R William Liddle, 1985). Semasa Orde Baru, militer memang terlihat memenangkan kekuatan ekonomi-politik baik dari tingkat nasional sampai tingkat regional, bahkan disemua lini jajaran birokrasi dipegang oleh militer dari tingkat presiden sampai kepala desa. Tetapi perlu dicatat bahwa, kekuatan ekonomi birokrat militer diperoleh bukan dengan modal pribadi, melainkan lebih didasarkan kepada kekuasaan birokrasi yang memungkinkan akses untuk menguasai pasar. Richard Robison (1990: 38) menjelaskan bahwa, komandan-komandan militer melakukan kontrol pengamanan terhadap berbagai bidang strategis dari aparatus negara yang mencakup departemen pemerintahan, kredit, dan kontrak. Para pejabat yang menduduki posisi strategis yang secara ekonomis dipegang oleh para pejabat militer, memanfaatkan sumber daya jabatan dan kekuasaannya untuk memperbesar kekayaan pribadi. Mereka menggunakan kekuasaan tersebut untuk mengalokasikan lisensi, konsesi, kredit, monopoli, kontrak, bahkan menilep dana pembangunan bantuan asing yang diperoleh dengan mengemis dan menjual kemiskinan rakyat.[203]

Dengan posisi-posisi strategis tersebut, para politiko birokrat membangun kekayaan pribadi para individu pemegang jabatan kekuasaan (Robison, 1982: 7). Pengelolaan keputusan penting dan mendasar seperti strategi ekonomi berada di tangan birokrasi—khususnya presiden—dan bukan dalam parlemen atau partai politik. Inilah yang oleh Robison disebut kelas “kapitalis birokrat,” yang awal titik singgung mereka dalam ekonomi memang terjadi melalui korupsi, ekonomi rente, dan bisnis *mark up,* yang kemudian mencoba mentransformasikan dirinya sebagai wiraswasta yang mengakumulasikan kapital untuk investasi yang produktif (Basri, 2001: 34).

Di samping itu watak patrimonialisme dimana keputusan ekonomi politik dibuat lebih untuk kepentingan pribadi birokrat yang memegang kekuasaan, membuat setiap keputusan ekonomi politik dibuat mengikuti filosofi *patron-client*: pengusaha yang berhasil adalah pengusaha yang memiliki hubungan pribadi dengan pembuat keputusan. Akhirnya, kebijakan yang muncul merupakan kebijakan yang menguntungkan keduanya.[204] Dengan pencampuran antara kekuasan politik dan otoritas birokrasi, sektor-sektor strategis dipakai aparatus negara sebagai barang jarahan, membagi-bagikan pada klan mereka atas departemen-departemen yang mengontrol perdagangan dan kebijakan ekonomi, bank-bank, juga perusahaan-perusahaan negara sebagai sapi perahan untuk akumulasi kapital. Munculnya kapitalisme kroni misalnya, kerap dijelaskan dalam kerangka pendekatan patrimonial.[205] Melalui hubungan-hubungan khusus dengan para elite politik dalam pemerintahan, beberapa pengusaha berhasil memperoleh banyak kemudahan hak-hak monopoli, duopoli, atau oligopoli.[206] Itulah kenapa fondasi ekonomi Indonesia sangat rapuh dan keropos karena gerak laju investasi produktif yang ada dibiayai dengan uang haram hasil kejahatan korupsi.

Begitu dalam dan luasnya pengaruh patronase ekonomi-politik yang ditancapkan oleh kuku-kuku Orde Baru dalam berbagai sektor strategis yang menjadi sendi-sendi perekonian Indonesia hingga membuat fundamental ekonomi Indonesia menjadi keropos. Dalam investigasi yang dilakukan oleh para koresponden majalah *Time* pasca terjadinya krisis moneter 1997 yang menumbangkan rezim otoriter Orde Baru, menemukan indikasi bahwa sekurang-kurangnya 73 milyar dollar transaksi bisnis melewati tangan-tangan keluarga Soeharto—baik lewat yayasan-yayasan[207] maupun lewat perusahaan-perusahaan yang dibentuk—

Depan,’ St. Kartono (ed.), 2000, *Menggugat Masa Lalu, Menggagas Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kompas, hlm. 13-14.

[203] Bank Dunia memperkirakan tak kurang dari 30 persen dari dana pembangunan bantuan asing yang diterima pemerintah Indonesia selama dua dekade telah menguap tanpa ketahuan rimbanya karena korupsi yang meluas di lingkungan birokrasi dari atas sampai ke bawah.

[204] Muhammad Chatib Basri, ‘Antara Marx dan Schindler: Perihal Modal dan Kekuasaan di Indonesia,’ dalam Kiri di Asia, *Jurnal Yayasan Kalam*, 2001, hlm. 31.

[205] Soeharto membuat fondasi untuk kekayaan keluarganya dengan menciptakan sistem patron yang berskala nasional yang mampu mempertahankannya dalam kekuasaan selama 32 tahun. Anak-anaknya, pada gilirannya memfungsikan kedekatan dengan Presiden kedalam peranan calo (perantara) untuk pembelian dan penjualan dari produk-produk minyak, plastik, senjata, bagian-bagian pesawat terbang dan petrokimia yang dimiliki pemerintah. Mereka memegang monopoli pada distribusi dan impor komoditi-komoditi utama. Mereka mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah melalui kerja sama dengan bankir-bankir, yang seringkali takut untuk menanyakan pembayaran kembali. Bahkan dalam laporan majalah *Time* mengenai harta jarahan keluarga Soeharto, enam anak Soeharto memiliki saham dalam jumlah signifikan sekurang-kurangnya di 546 perusahaan dengan total *cash flow* mencapai 15 milyar dollar, dan kekayaan luar negeri mereka mencakup ratusan perusahaan yang tersebar dari Amerika ke Uzbekistan, Belanda, Nigeria, dan Vanuatu.

[206] Chaniago (2001: 28 dst) mencatat bahkan sejak 1968 misalnya, hak impor cengkeh hanya diberikan kepada dua pengusaha, yaitu Liem Sioe Liong dan Probosutedjo. Keistimewaan lain yang diterima Liem Sioe Liong adalah hak monopoli pemasaran terigu di wilayah Indonesia bagian Barat yang terkenal di bawah bendera PT Bogasari Flour Mills. Keistimewaan ini tidak lepas dari politik balas jasa yang pernah dilakukannya ketika menjadi pemasok barang-barang kebutuhan tentara Divisi Diponegoro di akhir tahun 1940-an di mana Soeharto pernah menjadi panglima. Sedangkan pemberian privilese pada Probosutedjo tidak lepas dari hubungan darah sebagai adik tiri Soeharto. Nama lain yang cukup kental adalah Mohammad Hasan (The Kian Seng, atau yang lebih dikenal dengan Bob Hasan) yang mendapat konsesi dibeberapa bidang usaha, antara lain sebagai pemasok bijih besi PT Krakatau Steel, Pemasok barang-barang keperluan industri minyak lepas pantai, dan konsesi hak pengusahaan hutan.

[207] Dengan berkedok yayasan amal yang menyalurkan layanan sosial seperti untuk membiayai sejumlah besar rumah sakit, sekolah, dan Masjid, yayasan-yayasan yang didirikan Soeharto—George J Aditjondro menemukan 105 yayasan yang dibentuk Soeharto, istri, anak, dan kerabat dekatnya, empat di antaranya adalah yang terbesar yaitu Dharmais, Supersemar, Dakab, dan

antara tahun 1996-1998. Sebagian besar transaksi itu berasal dari pertambangan, perkayuan, dan komoditi-komoditi dari industri perminyakan. Meski krisis keuangan di Indonesia telah menurunkan jumlah kekayaan tersebut, tapi bukti mengindikasikan bahwa Soeharto dan enam anaknya tetap memiliki kekayaan $ 15 milyar dollar tunai dari saham-saham modal perusahaan, *real estete*, perhiasan, dan benda-benda seni.

Dibidang kehutanan, David W. Brown (1999: 14) mensinyalir adanya kecurangan dan permainan kotor dari terkonsentrasinya kepemilikan konsesi kayu pada lima perusahaan HPH terbesar,[208] dengan kesanggupan beberapa perusahaan untuk memberikan saham atau posisi-posisi penting di berbagai perusahaan konsesi kepada anggota keluarga Soeharto sebagai imbalan atas fasilitas dan izin yang diberikan kepada mereka (lihat tabel 3). Imbalan yang mereka berikan tidak cuma pembagian saham dan kedudukan penting di perusahaan-perusahaan tersebut, bahkan PT Barito Pacific (Prajogo Pangestu) sejak tahun 1991 telah membantu Soeharto mencapai ambisinya menjadi pemain dan wasit dalam dunia percaturan bisnis keuangan di Indonesia dengan menyediakan dana sekitar US$ 220 juta untuk memberi jaminan bagi Bank Duta—bank yang dimiliki oleh Nusamba (Nusantara Ampera Bhakti), perusahaan yang 80 persen sahamnya dikuasai tiga yayasan besar Soeharto—dan juga membantu Soeharto dengan memberikan jaminan kepada grup Astra ketika perusahaan itu nyaris ambruk akibat permainan valas.

Di bidang pertambangan, perusahaan *holding* milik keluarga Soeharto, Nusantara Ampera Bhakti (Nusamba)[209] sebagaimana dituturkan Schwarz (1994), menguasai pabrik lempeng timah di Indonesia. Perusahaan ini juga menguasai monopoli bisnis asuransi kerugian di sektor perminyakan yang sangat menguntungkan, yang pendapatan per tahunnya mencapai US$ 120 juta melalui perusahaan afiliasi Nusamba, yakni Tugu Pratama Indo. Di samping itu, perusahaan ini juga menguasai 10 persen saham dalam kontrak produksi Unocol di dua blok pantai Kalimantan Timur, di mana Pertamina memperkirakan bahwa selama Soeharto berkuasa, mereka telah melakukan sebanyak 159 kontrak karya dengan perusahaan milik keluarga dan teman dekat Soeharto. Lewat perusahaan Nusamba pula, Soeharto memperoleh 4,7 persen saham dari perusahaan Freeport Indonesia yang mengeksploitasi tembaga dan emas di Irian Barat dan termasuk perusahaan tambang terbesar di dunia. Bob Hasan dan Hutomo Mandala Putra, alias Tommy, bersama-sama menguasai jaringan bisnis yang cukup besar, yakni monopoli impor minyak mentah dan hasil bahan bakar yang dilakukan oleh Perta Oil Marketing, di mana kedua orang itu menguasai saham 50 persen, sementara sisanya dikuasai Pertamina.[210]

Di samping melalui kontrak-kontrak pemerintah yang menguntungkan karena akses kekuasaan yang dimiliki, keluarga Soeharto juga melakukan tindakan represi, kekerasan, dan pelanggaran HAM berat dalam membesarkan bisnisnya. Ketika Soeharto ingin membangun peternakan sapi modern (*ranch*) di Tapos Jawa Barat tahun 1971, ia merampas tanah lebih dari 751 ha yang dihuni oleh 5 desa tanpa ganti rugi. Pada tahun yang sama Soeharto juga mengusir sekitar 500-an keluarga dari tanah mereka ketika istrinya, Ny. Tien Soeharto, berencana membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Begitu juga ketika PT Bandung Asri Mulia yang sebagian sahamnya dimiliki anak-anak Soeharto merampas tanah petani Cimacan pada tahun 1987 untuk dijadikan Lapangan Golf Cibodas dan kawasan wisata. [211]

Banyak cerita sama. Di tahun 1996 sebuah perusahaan milik Tommy merampas tanah penduduk desa di Bali seluas 650 hektar untuk resort. Perusahaan itu sebenarnya hanya memperoleh izin untuk 130 ha, yang kemudian diperluas secara ilegal, demikian menurut Sonny Qodri, ketua LBH Bali. Penduduk yang menolak untuk menandatangani perjanjian menjual tanah, diintimidasi, dipukuli, dan sering direndam dalam air sebatas leher. Dan selama 32 tahun rezim Orde Baru berkuasa, tak terhingga jumlah yang menjadi korban kekerasan pembangunan yang dilakukan.

Argumentasi negara kekuasaan yang mementingkan patronase ekonomi seperti diuraikan di atas, terkadang mental ketika keadaan ekonomi memburuk dan memaksa ekonomi mengikuti kemauan pasar (baca: modal). Di sini kebijakan ekonomi yang merupakan representasi teknokrat dengan program ekonomi liberal dan propasar dianggap sebagai dewa penolong yang menyelamatkan ekonomi nasional dari parasit ekonomi yang mendistorsi pasar. Para teknokrat Orde Baru yang dimotori oleh "Mafia Berkeley" meletakkan dasar bagi bekerjanya mekanisme pasar bebas dengan melakukan sejumlah deregulasi sektor moneter dan

---

Amalbakti Muslim Pancasila—merupakan salah satu sumber penting untuk mengeruk dana raksasa tidak resmi untuk mendanai investasi proyek-proyek Soeharto, anak-anak, dan kroninya, maupun untuk membiayai mesin yang menjadi kendaraan politiknya, yaitu Golkar. Mantan Jaksa Agung saat Habibie berkuasa, Soedjono, melakukan penyelidikan atas yayasan-yayasan yang dikuasai Soeharto menemukan bahwa salah satu yayasan terbesar, Supersemar, telah menyebarkan 84 persen dananya pada sasaran yang tidak diketahui, termasuk pinjaman kepada perusahaan milik anak-anak dan teman-teman Soeharto. Lihat *Time* edisi 24 Mei 1999.

[208] Tak kurang dari 62 juta hektar areal hutan Indonesia dibabat dan dijarah oleh perusahaan-perusahaan pemegang HPH yang dilegalkan rezim Orde Baru dengan UU No.5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) sebagai jalan pintas mengeruk devisa. Kebijakan eksploitatif ini berdampak pada hancurnya kekayaan ekosistem hutan tropis Indonesia dan menyebabkan punahnya masyarakat adat yang hidup dari hutan-hutan yang dibabat tersebut karena terusir dari habitat hidup mereka.

[209] Perusahaan ini dipimpin Bob Hasan dengan 10 persen saham, Sigit Harjojudanto 10 Persen, dan sisanya (80 persen) dikuasai tiga yayasan sosial yang dibentuk Soeharto, Dharmais, Supersemar, dan Dakab (*Time*, 1999: 22).

[210] Lihat David W Brown, 1999, *Ketagihan Rente: Distribusi Korporasi dan Spesial Sumber Daya Hutan Indonesia; Implikasi bagi Kelestarian Hutan dan Kebijakan Pemerintah,* Jakarta: DFIF. hlm. 18-19. Bandingkan juga dengan riset George J. Aditjondro yang berusaha menelusuri kekayaan keluarga Soeharto dan para kroninya serta kekayaan yayasan yang dibentuknya dalam *Adili Soeharto: Upaya Mengungkap Kekayaan Keluarga dan Yayasan Soeharto*, yang bisa diperoleh lewat akses situs di internet.

[211] Untuk lebih memahami kasus ini, baca hasil penelitian Dianto Bachriadi dan Anton Lucas dalam *Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan* yang diterbitkan oleh Pustaka Gramedia.

fiskal dengan membuat tiga pilar utama untuk menopang pembangunan ekonomi Indonesia. Ketiga pilar itu adalah, kebijakan anggaran berimbang,[212] pembukaan ekonomi Indonesia bagi arus modal asing,[213] dan kebijakan lalu lintas devisa bebas.[214]

Inilah kemudian yang memunculkan kebijakan yang bersifat "tambal sulam," yang menjadi ciri tersendiri yang membuat roda perekonomian Indonesia tidak ubahnya seperti memaksa sebuah lokomotif tua berjalan di atas bantalan-bantalan rel yang seharusnya perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum rel menuju tempat pemberhentian berikutnya yang juga masih akan dibangun (Chaniago, 2001). Dengan ibarat seperti itu, Indonesia selalu menyelesaikan dua persoalan sekaligus di setiap etape perjalanan pembangunannya. Pertama, adalah mengganti ruas-ruas yang dirusak oleh para parasit ekonomi politik agar perjalanan dapat sampai ke stasiun tujuan; kedua, adalah desakan untuk membangun ruas-ruas baru untuk melayani tuntutan ekonomi global yang semakin liberal. Proses tarik-menarik ini menimbulkan distorsi pasar yang serius dan berakhir dengan krisis ekonomi pada medio tahun 1997.

Mungkin karena itulah, sulit sekali menyimpulkan satu pola kebijakan Orde Baru yang bersifat ideologis, sebagaiman dikemukakan Mohammad Chatib Basri (2001: 37-38):

> "Saya menduga aspek perdebatan ideologis dalam kebijakan ekonomi di Indonesia belum matang benar. Yang terjadi sebenarnya hanyalah satu proses keputusan ekonomis rasional tentang pilihan kebijakan yang paling menguntungkan bagi legitimasi pemerintah Orde Baru. Menguntungkan di sini harus diterjemahkan dalam arti memiliki biaya ekonomi dan politik yang paling murah. Dalam konteks ini, negara menjadi pragmatis dalam menjalankan kebijakan ekonominya. Di satu sisi negara bisa menjadi wahana bagi akumulasi modal, tetapi di sisi lain negara juga berangkat dari satu kepentingan mempertahankan legitimasi politik."

Dengan kata lain, peran ideologis muncul sebagai akibat dari pilihan kebijakan dan bukan merupakan sebab. Yang terjadi hanyalah sebuah upaya mempertahankan legitimasi Orde Baru—pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah—dengan biaya politik dan ekonomi yang paling murah, dan tarik-menarik kelompok kepentingan dalam pilihan kebijakan. Jika peran kelompok *interventionist* menguat, maka harga kebijakan yang propasar menjadi mahal dan pilihan kebijakan akan menuju kepada intervensi pemerintah. Sedangkan di masa krisis, ketika peran kelompok propasar menguat, maka harga intervensi pemerintah menjadi mahal, dan pilihan beralih kepada kebijakan yang propasar. Di sini tidak terlihat bagaimana bingkai ideologi berperan, karena kenyataan yang terjadi hanyalah mempertahankan legitimasi rezim dengan pelbagai alasan ideologis. Dengan kata lain, persoalannya liberal atau bukan liberal, tetapi seberapa jauh kelompok "kapitalis kroni" dengan ekonomi rentenya serta legitimasi politik Orde Baru dalam posisi terancam. Jika ada ancaman, kita akan mendengar seruan antiliberalisme, jika posisi kapitalis kroni membaik, kita akan mendengar perlunya privatisasi dan deregulasi. Semuanya kemudian seperti membantu kita membentuk satu mosaik: soalnya bukan pada liberal atau proteksionis, kapitalis atau sosialis, tetapi lebih kepada kebijakan ekonomi yang *hyper*-pragmatis dan demi mempertahankan *status quo*.[215]

[3] Nasib Kaum Miskin di Era Globalisasi

Meskipun menunjukkan prestasi yang luar biasa—ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu *newly industrial economics*—sistem ekonomi yang dibangun rezim Orde Baru ternyata menyimpan berbagai macam kebobrokan yang mendehumanisasikan dan menyengsarakan kehidupan rakyat kecil. Strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang digerogoti oleh parasit ekonomi rente (*rent seek*) para kroni, ternyata tidak hanya menimbulkan akibat samping yang serius dalam perekonomian masyarakat perkotaan saja, tetapi juga merembet pada sistem perekonomian dan sistem politik nasional. Dalam lingkup ekonomi nasional, strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan menimbulkan ketimpangan di berbagai aspek kehidupan antara lain: ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta, ketimpangan ekonomi antarsektor, kesenjangan antarwilayah, ketimpangan

[212] Konsep 'kebijakan angaran berimbang' adalah proses pembohongan publik yang dilakukan rezim Orde Baru karena pada dasarnya anggaran APBN selalu mengalami defisit. Dan untuk menyeimbangkan defisit tersebut, pemerintah menutupnya dengan pinjaman dan utang luar negeri yang jumlahnya kian membengkak. Lihat Ary Arryman, 'Momentum untuk Keluar dari Perangkap Utang Luar Negeri,' dalam Roem Topatimasang (Ed.), 1999, *Hutang itu Hutang*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, hlm. 174.

[213] Sritua Arif (1998) misalnya menyebut data neraca pembayaran tahun 1973-1990, bahwa arus masuk investasi asing ke Indonesia secara kumulatif sebesar 5,8 miliar dollar AS sedangkan nilai keuntungan kumulatif investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri mencapai 58,9 miliar dollar AS. Ini berarti setiap satu dollar yang dimasukkan investor asing ke Indonesia telah diikuti oleh mengalirnya sumber keuangan dalam nilai sepuluh kali lipat dari ekonomi Indonesia.

[214] Kebijakan ini ternyata justru malah memberi kontribusi signifikan terhadap pembengkakan utang luar negeri di Indonesia, terjadinya pelarian modal asing, dan instabilitas nilai tukar mata uang karena spekulasi. Selama periode 1970-1980, dalam catatannya Mubarik Ahmad (1993), secara kumulatif sebesar 9,4 miliar dollar AS atau sekitar 51 persen dari pertambahan utang luar negeri Indonesia yang nilainya sebesar 18,26 miliar dollar AS, telah digunakan untuk membiayai pelarian modal. Dan selama periode 1980-1991 sebesar 11,17 miliar dollar AS atau 42 persen dari pertambahan utang luar negeri Indonesia juga telah digunakan untuk membiayai pelarian modal.

[215] Muhammad Chatib Basri, 2001, "Antara Marx dan Schindler: Perihal Modal dan Kekuasaan di Indonesia," dalam Jurnal *Yayasan Kalam*, hlm. 38-44.

antarsubwilayah, ketimpangan antargolongan sosial ekonomi, ketimpangan pembangunan diri manusia Indonesia, dan ketimpangan kota-desa. Sementara dibidang politik, bersamaan melebarnya berbagai macam kesenjangan sosial-ekonomi tersebut menjadi bom waktu yang siap meledak setiap saat (Chaniago, 2001: 10).

Pembangunan memang telah menciptakan berbagai macam kemajuan yang mengagumkan. Setiap tahun terus bertambah pusat-pusat perbelanjaan yang menjamur di setiap kota besar, bandar udara modern dengan toko bebas cukai yang dipadati barang, jalan-jalan tol yang dipenuhi mobil-mobil model terbaru yang membawa orang dari bandara ke hotel-hotel berbintang lima yang mewah, gedung-gedung perkantoran dan apartemen mewah yang menjulang di setiap ruas jalan protokol. Makin banyak pula rumah-rumah besar lagi mewah ber-AC dan dipenuhi perlengkapan perabotan modern lainnya. Semua itu adalah penampilan depan dari pembangunan, dan merupakan 'tugu keberuntungan' sejumlah kecil orang yang telah diuntungkan oleh pembangunan itu. Tapi di balik itu semua, ada pula kenyataan lain yang mengenaskan. Di belakang kemegahan dan kemewahan pembangunan, terdapat berjuta-juta orang yang menjalani hidupnya dalam kemiskinan yang tidak manusiawi sebagaimana tampak di sudut-sudut gang kecil kota Jakarta yang kumuh. Banyak di antara mereka yang menjadi korban dari menyelusupnya pembangunan ke dalam kehidupan mereka. Karena adanya proyek pembangunan, sekumpulan manusia yang jumlahnya mengagetkan telah terusir keluar dari rumah, kampung halaman, dan masyarakat mereka, yang tadinya telah berhasil memberikan suatu kehidupan yang sederhana namun bermartabat bagi mereka.

Bendungan, proyek kehutanan, dan banyak investasi lainnya yang didanai Bank Dunia dan badan-badan bantuan asing dengan mengatasnamakan 'pembangunan,' telah mengacaubalaukan kehidupan mereka, karena tujuan-tujuan yang hanya menguntungkan elite penguasa dan orang yang memang telah kaya raya. David C Korten (2002: 6-7) mengingatkan bahwa, usaha yang tidak henti-hentinya dalam mengejar pertumbuhan ekonomi telah mempercepat kehancuran sistem pendukung kehidupan yang ada di planet ini, memperhebat persaingan dalam memperebutkan sumber daya, memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin, dan menggerogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat.

Beragam penjelasan muncul berusaha menganalisa penyebab terjadinya krisis yang menghantam Indonesia. Pertama, krisis finansial yang disebabkan oleh rapuhnya kebijakan makro. Analisa ini didasarkan pada model Krugman (1979) yakni model yang melihat krisis pada *balance of payment* (depresiasi uang, jatuhnya nilai tukar) yang dipicu oleh ekspansi kredit domestik bank sentral yang tidak konsisten dalam menetapkan nilai tukar. Kedua, terjadinya *financial panic*—sebuah argumen yang mulanya dikemukakan oleh Dybvig-Diamond (1983)—yakni kepanikan nasabah bank yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pasar uang dari peminjam.

Ketiga, adalah penjelasan yang umumnya diyakini paling dekat dengan krisis, yakni *moral hazard crysis* yang mulanya dikembangkan oleh Akerlof dan Romer (1996). Model ini percaya bahwa suatu krisis akan terjadi karena suatu alasan ketidakjujuran, yakni ketika bank-bank dapat meminjam dana negara hanya berdasarkan garansi liabilitas bank publik secara implisit maupun eksplisit. IMF sendiri percaya bahwa krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor *moral hazard*.

Keempat, penjelasan dari teori *bubble collapse* atau model gelembung pecah yang dinisbatkan oleh Blanchard (1983). Menurut model ini, krisis terjadi ketika para spekulator banyak membeli aset finansial di atas harga (*fundamental value*) dalam rangka mencari keuntungan. Dalam waktu singkat seringkali memang gelembung-gelembung itu membesar, tapi pada akhirnya gelembung balon tersebut akan meletus juga. Penjelasan ini cukup relevan untuk menjelaskan penyebab terjadinya krisis moneter jika kita menengok ke belakang tentang bagaimana sempitnya basis ekonomi akibat terkonsentrasi ke tangan para kroni yang tumbuh menjadi konglomerat, sistem perbankan yang keropos, dan sistem keuangan yang dililit utang sebagai salah satu fundamental ekonomi Indonesia, serta munculnya sektor 'ekonomi baru' yang difasilitasi pemerintah untuk tumbuh menjadi 'macan kertas' sejak akhir 1980-an. Sektor ekonomi baru tersebut adalah sektor properti dan sektor infrastuktur yang memanfaatkan lokasi dan ruang-ruang strategis bagi mobilitas publik. Sebelum sektor properti dan sektor infrastruktur tersebut menghantarkan Indonesia ke jurang krisis, oleh pemerintah sektor ini dianggap sebagai mukjizat ekonomi dalam mencapai angka pertumbuhan.

Lebih jauh, Korten (2002: 67) melihat pemasukan yang besar dari mata uang luar negeri dengan cepat sekali mencetuskan gelembung-gelembung keuangan yang berkembang dalam permainan saham dan *real estate*, dan suatu pertumbuhan yang cepat dalam impor dan penjualan barang-barang konsumsi mewah, sehingga menciptakan sebuah khayalan kemakmuran ekonomi yang tidak ada hubungannya dengan suatu pertambahan dalam hasil produktif yang sesungguhnya. Gelembung-gelembung yang semakin berkembang itu lalu menarik lebih banyak lagi uang, yang kebanyakan diciptakan oleh bank-bank internasional yang menerbitkan utang yang diperoleh karena aset-aset yang digelembungkan. Karena hasil keuntungan yang diperoleh dari investasi industri dan pertanian yang produktif tidak dapat bersaing dengan keuntungan dari spekulasi saham dan *real estate*, maka semakin cepat investasi asing masuk ke dalam sebuah negara, maka semakin cepat pula uang yang benar-benar mengalir keluar dari sektor-sektornya yang produktif, untuk ikut serta dalam spekulasi itu. Dampak dari dianutnya model pembangunan seperti ini adalah munculnya sektor baru yang komoditasnya bersifat *nontraded*—meliputi sektor properti yang menghasilkan komoditas berupa tanah, gedung apartemen mewah, gedung perkantoran, perumahan, lapangan golf, reklamasi pantai—yang hanya menciptakan gelembung ekonomi dan sangat rentan terhadap permainan

spekulasi. Dalam fase kehancuran, para investor bergegas menarik uang mereka keluar untuk mengantisipasi keambrukan, harga saham *real estate* jatuh, bank-bank dan lembaga-lembaga utang lainnya dibiarkan begitu saja dengan sejumlah besar daftar utang yang tidak dapat ditagih, dan kehancuran keuangan mengancam, karena likuiditas telah kering.

Tumbangnya rezim otoriter Orde Baru yang pembangunan ekonominya bercorak *hyper*-pragmatis dan hanya mengejar angka pertumbuhan oleh krisis moneter pada medio 1997 menjadi sebuah penanda baru bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam aroma *euforia* ekonomi-politik yang menghiasai setiap wajah rakyat di Indonesia, kita semua merayakan kejatuhan rezim diktator yang penuh ketidakadilan ini dengan suka cita. Pada masa Orde Baru berkuasa, kita mendapati betapa hegemoni dan dominasi negara mencengkeram sangat kuat segala aspek kehidupan bermasyarakat. Negara mendapat kesempatan untuk memiliki kekuasaan mengelola dan mengontrol sepenuhnya urusan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dasar negara. Namun amanat tersebut ternyata telah dikhianati dan diselewengkan sehingga mengakibatkan proses dehumanisasi dan kesengsaraan sebagian besar rakyat. Penggusuran, pencaplokan tanah demi untuk pembangunan serta berbagai pemaksaan program pembangunan seperti program KB, program pertanian maupun berbagai program kesehatan telah mengakibatkan jutaan rakyat menderita. Namun pada tahun 1997 model 'kapitalisme negara' ini akhirnya mengalami keruntuhan, dimana salah satu sebabnya adalah akibat ditenggelamkan oleh kekuatan neoliberalisme global.

Namun ironisnya, runtuhnya pembangunan dan paham *state-led development*, tidak ditangisi oleh rakyat sama sekali. Bahkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa rakyat justru ikut merendahkan dan memasung kewenangan negara, institusi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat sendiri. Rakyat sudah sangat marah dan trauma oleh kesewenang-wenangan aparat negara yang ditunjukkan rezim Orde Baru selama 32 tahun. Rakyat sudah muak dengan janji dan retorika pembangunan untuk mensejahterakan dan melindungi kepentingan rakyat, namun kenyatannya justru pembangunan menjadikan rakyat sebagai korban pembangunan. Pembangunan bagi rakyat tidak lebih dari penggusuran tanah demi untuk pembangunan proyek-proyek *mercusuar*, penangkapan, penghilangan paksa, dan pembunuhan.

Runtuhnya paham *state-led development* dan krisis yang dialami negara, justru dirayakan oleh rakyat sebagai kemenangan. Paham neoliberalisme segera menggantikan model pembangunanisme yang telah membawa bencana bagi rakyat. Namun kegembiraan rakyat ternyata tidak berlangsung lama. Harapan akan berakhirnya penderitaan yang disebabkan oleh hegemoni dan dominasi negara buyar. Bukan kebahagiaan yang didapat, tapi justru kehidupan rakyat miskin tambah berat ketika pemerintah mengadopsi paham neoliberalisme. Terlebih-lebih sejak negara kita menjadi anggota WTO sekaligus menjadi pasien IMF.

Sejarah terulang kembali sebagaimana setback kehidupan masyarakat kita. Kehidupan kita mungkin mundur ratusan tahun lalu di mana kekautan feonalisme mencengkeram kuat sendi-sendi rakyat kecil. Rakyat kecil ditindas dan dipaksa membayar upeti kepada kaum bangsawan dan mereka mendapatkan jaminan rasa aman dari tentara kerajaan. Namun setelah datangnya kaum penjajah Belanda, penindasan berganda pun terjadi, dimana kaum penjajah menekan kaum bangsawan untuk memberi upeti kepada mereka, dan kaum bangsawan kemduian mencekik leher rakyat kecil sampai mati.

Sejarah tentang hancurnya dan kegagalan pembangunan di Indonesia dan juga ekonomi negara-negara Dunia Ketiga lainnya tak bisa dipisahkan dari andil lembaga-lembaga keuangan internasional IMF dan Bank Dunia.[216] Banyak kalangan akademik dan para pakar yang menuding resep IMF untuk Meksiko, Argentina, Thailand, dan Indonesia justru memperburuk krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara tersebut. Sebab IMF menyarankan kebijakan moneter yang sangat ketat dan kenaikan pajak, sementara yang diperlukan untuk menggerakkan ekonomi yang mengalami krisis adalah menlonggarkan likuiditas dan menurunkan tarif pajak.

Sebelumnya, mantan wakil presiden bank dunia dan pemenang hadiah nobel ekonomi untuk tahun 2001, Prof Joseph E Stiglitz, bahkan secara keras mengkritik bahwa obat IMF justru semakin memperdalam krisis ekonomi di Asia. Stiglitz melakukan evaluasi kritis terhadap rendahnya efektivitas program IMF dan lemahnya profesionalisme IMF dalam menangani kasus negara berkembang. IMF tak ubahnya seperti seorang dokter pada abad pertengahan yang tak peduli apa pun penyakit yang diderita pasiennya, pokoknya pengobatannya adalah tempelkan lintah untuk menghisap habis darah kotor yang masih tersisa dalam tubuh si pesakitan. Dalam rangka menghemat sumber daya agar mampu membayar kembali utang-utang mereka kepada bank-bank tersebut, pemerintah negara-negara pengutang ditekan sedemikian rupa oleh IMF agar memotong anggaran bagi program-program kesejahteraan sosial dan kredit-kredit yang disubsidikan kepada para petani.

Bahkan dengan semakin terpusatnya kekuasaan yang semakin hebat ke tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah—baik yang demokratis maupun yang tidak—dari

[216] Lahir sebagai sepasang kembar siam dari Bretton Woods, New Hamspire, Juli 1944, IMF dan Bank Dunia ditugaskan bekerja sama menggalang ekonomi dunia setelah diporak-poranda perang dunia II. IMF bertugas menciptakan stabilitas ekonomi global, sedangkan Bank Dunia bertugas membiayai pembangunan. Namun, dengan paket kebijakan ekonomi "Consensus Washington," keduanya malah bahu-membahu mengusung paham neoliberalisme dan neokolonialisme di muka bumi, tulis peraih nobel ekonomi 2001 Joseph E Stiglitz dalam *Globalization and Its Discontent*.

kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka kepentingan umum yang lebih luas sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi dasar.

[4] Tatanan Ekonomi-Politik Indonesia

Jalan panjang yang telah ditempuh bangsa Indonesia untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih adil dan mensejahterakan seluruh rakyat, dapat dikatakan berawal dengan mencari alternatif terhadap ekonomi liberal zaman kolonial (1830-1870). Sebagai diketahui sistem kapitalisme Eropa meluas ke Benua Asia dan Afrika dalam wujud kolonialisme, sesuai dengan sifat kapitalisme yang ekspansif. Pertimbangan ekonomi-politik ekspansi tersebut ialah guna menguasai sumber-sumber kekayaan alam, tenaga murah dan pasaran yang sangat potensial karena ratusan juta penduduk, serta kesediaan tanah yang luas. (E. Wallerstein, 1974, Rutgers, 1937).

Disamping terjadinya eksploitasi tenaga kerja manusia (J. C. Breman, 1987) yang sudah melampaui batas-batas perikemanusiaan, meluasnya ekonomi uang ke dalam masyarakat pedesaan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat tersebut, sehingga ketergantungan dari perekonomian kita semakin kuat. Terhadap eksploitasi petani dan buruh perkebunan tadi, sejak awal abad ke-20 mulai timbul oposisi kaum sosialis di Belanda yang kemudian berpengaruh kepada golongan-golongan Belanda–Hindia juga “Politik Etnik” (1900) mulai diterapkan dengan memberikan pelayanan kesehatan umum yang lebih baik, memperluas kesempatan menempuh pendidikan, serta memberikan otonomi desa yang lebih besar (1906).

Di jajaran birokrasi Hindia–Belanda yang dipimpin oleh orang-orang Belanda juga, untungnya terdapat tokoh-tokoh yang progresif juga dan ajaran-ajaran sosial demokrat memasuki masyarakat kita (Rutgers, 1937). Perluasan kesempatan pendidikan membuka peluang bagi putera-puteri pribumi untuk mengenal dasar-dasar Demokrasi Barat yang memang tumbuh bersamaan dengan Liberalisme dan Kapitalisme. Tetapi di Eropa pengendalian “Kapitalisme dini” (vroeg-kapitalisme) sudah mulai menjelang abad ke-19, dan kaum sosial-demokrat diseluruh Eropa Barat memegang peranan penting dalam usaha ke arah membangun suatu negara sejahtera (welfare state).

Lebih-lebih setelah perang dunia pertama (1914 – 1918) dan krisis ekonomi dunia (1930) politisi dan pakar ekonomi Barat semakin yakin bahwa pemerintah mempunyai peranan penting dalam turut mengawasi perputaran roda ekonomi, apabila kesejahteraan rakyat ingin diciptakan secara merata. Sistem hukum, baik yang membatasi monopoli dan oligopoli, maupun yang mengatur hak buruh dan kewajiban para pemodal dikembangkan, agar segi-segi negatif kapitalisme dapat ditiadakan, atau paling tidak dikurangi dampaknya.

Bangkitnya Nasionalisme

Sebenarnya bangkitnya Nasionalisme terjadi di seluruh Asia, sejalan dengan perkembangan di Eropa tadi. Gerakan dipimpin oleh para cendekiawan di India, Tiongkok, Jepang, Asia Tenggara dan sebagainya, yang memahami Demokrasi, dan terlebih setelah perang Jepang–Rusia (1904 – 1905) yang untuk pertama kali dalam sejarah dimenangkan oleh satu bangsa Asia. Kesadaran inilah yang kemudian bagaikan angin taufan, mengembus di seluruh benua Asia dan menumbuhkan partai-partai nasional (Congres Party, Kuomintang, Sarekat Islam dan lain-lain). Nasionalisme yang mencari alternatif kehidupan politik, ekonomi dan sosial tersebut hampir diseluruh daerah jajahan di Asia sedikit banyak merangkul sosialisme (Tjondrongoro, 1996, Wertheim, 1959).

Lebih khusus di Indonesia (Blumbergerm, 1931, Rutgers, 1937) pendekar-pendekar nasional kita seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ir. Maruto Darusman, Syahrir dan masih lebih banyak lagi menggali nilai-nilai keadilan, kesamarataan, kesejahteraan rakyat dan sebagainya karena suatu proses yang mengakar terhadap penjajahan dan ketidakadilan. Pengaruh sosialisme tersebut secara paling jelas dikemukakan oleh Bung Karno dalam pidatonya mengenai Marhaenisme (1957) dan kemudian bahkan dijadikan kebijaksanaan : Sosialisme ala Indonesia. Unsur-unsur tersebut di atas yang dimuat dalam UUD 1945 maupun berbagai UU antara lain No. 5/1960 tercermin dari kebijaksanaan sampai 1965.

Setelah perkembangan ekonomi tidak mampu melahirkan kesejahteraan yang diidamkan, dan masalah pertanahan juga tak berhasil dipecahkan, dicarilah jalan keluar yang lain. Sistem ekonomi yang antara 1958–1965 cenderung tertutup untuk modal asing dibuka kembali dan dengan ketenangan/stabilitas politik tatanan ekonomi dapat diatur kembali dengan bantuan Bank Dunia dan negara-negara di luar blok Sosisalis. Pertumbuhan ekonomi meningkat juga karena sektor swasta diberi peluang lebih besar disamping BUMN, tetapi dalam periode Orde Baru setelah kita menghadapi pasaran dunia yang semakin terbuka ternyata BUMN semakin tidak sffisien dan kurang mampu menunjang kesejahteraan yang lebih merata. BUMN yang dimodali pemerintah mampu menumbuhkan suatu lapisan menengah, tetapi seberapa jauh mereka juga menunjang perusahaan-perusahaan yang lebih kecil dan sehat masih sangat dipertanyakan.

[5] Perpolitikan Untuk Mendukung Ekonomi Alternatif[217]

"The discipline (of economics) become progressively more narrow at precisely the moment when the problems demanded broader, more political, and social insights"[218] Kutipan ini adalah keluhan seorang ilmuwan ekonomi senior yang jengkel terhadap kecenderungan "myopic" dalam disiplin ilmunya. Yaitu, ketika masyarakat sedang memerlukan jawaban yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan, ilmuwan ekonomi datang dengan resep ekonomis-teknis. Ketika dihadapkan pada persoalan pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas, yang diajukan adalah usulan pembenahan mekanisme pasar. Seolah-olah, kalau mekanisme pasar berlangsung bebas dari gangguan campur tangan pemerintah, maka semua persoalan itu akan dengan mudah diselesaikan.

Untuk memahami konteks kejengkelan itu kita perlu menengok kembali perdebatan yang selama ini berlangsung antara dua kubu pendekatan: liberal neoklasik dan ekonomi-politik. Yang pertama adalah pendekatan (teoritis-cum-ideologis) yang mendominasi wacana mengenai pembangunan ekonomi di kalangan pemerintah Indonesia, terutama sejak Orde Baru. Sedangkan yang kedua adalah yang berkembang di kalangan oposisi.

Liberalisme Neo-Klasik versus Ekonomi-Politik Klasik

Menurut pendukung pendekatan liberal neo-klasik (yang sejak 1980-an dikenal juga dengan nama "neo-liberalisme"), isyu pokok yang ditangani ilmu ekonomi adalah bagaimana menciptakan atau meningkatkan kekayaan atau kemakmuran materiil. Karena itu, pembangunan ekonomi adalah upaya akumulasi kapital; yang keberhasilannya diukur dengan produk nasional bruto tahunan. Dalam proses itu, semua yang membantu akumulasi kapital harus digalakkan; yang tidak membantu dipersilahkan minggir.

Bagaimana cara mencapai tujuan itu? Proses akumulasi kapital itu diorganisasikan melalui mekanisme transaksi atau pertukaran dalam pasar. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkembang menjadi ilmu pertukaran. Yang menjadi pusat perhatian adalah kegiatan produktif yang melalui transaksi pasar, sedangkan yang tidak melalui transaksi pasar tidak dianggap penting. Akibatnya, hasil kerja petani yang menanam padi untuk dikonsumsi sendiri tidak dicatat sebagai kegiatan ekonomi, dan tidak termasuk dalam perhitungan produk domestik bruto, karena tidak melibatkan transaksi pasar. Begitu juga, hasil kerja wanita yang produktif dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga tidak dihargai dalam perhitungan haril kerja nasional itu karena, sekali lagi, tidak melibatkan transaksi pasar.

Bagaimana karakter metodologi yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi liberal? Yang menonjol adalah positivisme dan saintisme. Metodologi ini mendukung cara pandang yang memusat pada persoalan materiil, yang empirik dan kasat-indera; mengutamakan variable yang bisa diukur ("Yang tidak terukur, tidak bisa dianalisis"). Akibatnya, banyak persoalan penting yang bersifat normatif diabaikan. Bahkan pendukung metodologi ini cenderung bersikap netral terhadap nilai-nilai etika dan moral, seperti keadilan. Karena itu, tidak mengherankan kalau persoalan pokok yang dibahas oleh para pembuat kebijakan yang berpikir atas dasar ilmu pengetahuan positivistik itu adalah persoalan bagaimana "memperbesar kue nasional". Terutama bagaimana meningkatkan kekayaan dan kemakmuran materiil melalui penggalakan transaksi di pasar. Yaitu, akumulasi kapital melalui pasar. Dan ukuran keberhasilannya juga berujud prestasi dalam mendorong pertumbuhan kapital.

Ideologi yang mendasari ilmu ekonomi liberal itu juga mengajukan asumsi khas tentang hakeket manusia. Yaitu, manusia dipandang semata-mata sebagai "makhluk ekonomi" yang berperilaku seperti "utility-maximizing machine" (mesin yang berfungsi memaksimalkan keuntungan) dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Manusia dianggap banya akan bergerak kalau kepadanya ditunjukkan "iming-iming" yang sifatnya materiil. Karena itu sering muncul anggapan bahwa asal perutnya kenyang orang akan mudah diatur. Inilah yang mendasari munculnya kebijakan publik yang dalam praktek membanjiri warga masyarakat dengan kepuasan materiil, dengan harapan kepuasan itu akan menimbulkan ketenangan. Yang dilupakan adalah perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, tetapi juba oleh filantrofi, moralitas dan pertimbangan etika.

Terakhir, pendekatan liberal neo-klasik itu juga mengembangkan sikap yang khas mengenai organisasi dan lembaga sosial. Seperti sudah tersirat di atas, lembaga sosial yang paling diutamakan adalah pasar, sedangkan organisasi dan lembaga sosial lain dianggap "given". Yang paling penting adalah mekanisme pasar. Karena itu, mereka yang memiliki modal dan melibatkan diri dalam kegiatan pasar akan menentukan apa yang akan terjadi dalam proses ekonomi. Apa peran negara? Negara berperan mendefinisikan dan melindungi hak milik dan menciptakan lingkungan yang mendukung bekerjanya pasar.

Yang menarik adalah pandangan kaum ekonom liberal mengenai keluarga. Dalam ideologi ini, keluarga (rumah tangga) dipandang sebagai lembaga sosial yang berperan ganda. *Pertama*, sebagai rumah tangga yang berfungsi sebagai mesin yang diprogram untuk memaksimalkan kepuasan dengan mengkonsumsi barang yang diproduksi secara massal oleh perusahaan (yang juga berperan sebagai mesin

---

[217] Dr. Mohtar Mas'oed: Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIPOL), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Makalah disampaikan pada Seminar *"Pembangunan Alternatif di Indonesia"* ISEI Cabang Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 12 Agustus 2002.

[218] Abert O. Hirschman, *Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981). hal. v.

yang diprogram untuk memaksimalkan keuntungan). Karena itu tiap hari rumah tangga kita dibombardir dengan iklan yang menawarkan berbagai jenis barang dan jasa yang seringkali tidak jelas manfaatnya. Semakin getol rumah tangga mengkonsumsi barang dan jasa itu, semakin "maju" ekonomi itu, demikian argumennya.

Kedua, rumah tangga juga berfungsi sebagai produsen input abstrak yang disebut "tenaga kerja". Cara menyebut tenaga kerja dengan sebutan "sumberdaya manusia" juga memuat unsur ideologi kapitalistik itu. Istilah ini sebenarnya muncul dalam lingkungan pabrik. Di sana bisa ditemui mesin (sumberdaya fisik) dan manusia yang menanganinya (sumberdaya manusia). Status keduanya pada dasarnya disamakan, yaitu sebagai sumberdaya. Karena itu upaya memenuhi keperluan buruh seringkali berujud upaya memenuhi kebutuhan manusia ssebagai sumberdaya, bukan sebagai manusia utuh. Sebagai sumberdaya, manusia memerlukan ketrampilan, lapangan kerja, upah minimum yang memadai, dan sebagainya. Karena semata-mata dipandang sebagai sumberdaya, bukan sebagai manusia utuh, ia dianggap tidak memerlukan pemenuhan hak sebagai manusia utuh, misalnya hak untuk berserikat dan hak-hak lain demi pengembangan identitas dirinya.

Sementara itu, di sisi lain, ada pendekatan alternatif yang sebenarnya memiliki akar sejarah yang lebih jauh ke belakang, dengan argumen yang bertentangan dengan gagasan di atas, yang disebut *"ekonomi-politik klasik".* Yang menjadi fokus perhatian pendekatan ini bukanhanya bagaimana kemakmuran ditingkatkan, tetapi juga bagaimana produksi dan konsumsi itulah yang sangat menentukan *"who get what, when, how and how much".* Persoalan yang hanya bisa dipahami melalui pendekatan yang menggabungkan ekonomi debgab dimensi-simensi sosial lainnya.

Berbeda dengan pendekatan liberal, ekonomi-politik mengandalkan metodologi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Melalui metode impretivis dan instrokpetif, ekonomi politik mempelajari bukan hanya bagaimana mambuat individu menjadi makmur, tetapi yang lebih penting adalah menemukan penyelesaian bagi masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup manusia.

Mengenai hakekat manusia, pendukung pendekatan ekonomi-politik klasik yakin bahwa perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, tetapi juga oleh filantrofi, moralitas dan pertimbangan etika. Kepentingan manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga diimbangi dengan rasa tanggungjawab sosial. Pasar, menurut pendekatan ekonomi-politik, bukan lembaga sosial yang paling penting. Banyak proses produksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga sosial lain, seperti keluarga dan birokrasi. Di Indonesia, misalnya, proses produksi beras, gula, baja, semen, mobil, dan berbagai produk penting lain tidak bertumpu pada mekanisme pasar. Di masa Orde Baru, beberapa melalui keputusan birokratik; beberapa yang lain melalui pertemuan keluarga presiden. Karena itu, yang diutamakan oleh pendekatan ekonomi-politik adalah peran lembaga sosial dan politik, kekuasaan, dan manifesto sosio-kultural dalam kehidupan ekonomi. Dalam praktek, lembaga-lembaga itu memang sering dipakai oleh banyak orang untuk memproduksi kemakmuran.

Dalam konteks perdebatan dikotomis di atas, karya ilmiah yang berjudul *"A Development Alternative for Indonesia*" yang ditulis Prof. Mubyarto dan Prof Daniel Bromley mencerminkan keberpihakan pada yang kedua. *Pertama*, analisis dalam tulisan itu memusatkan pada masalah pengorganisasian sosial-politik proses produksi. Seperti dikatakan oleh kedua ilmuwan itu:

> *It is our contention that development will be sustainable if and only if it leads to new settings and circumstances that will enhance the emergence and persistence of new economic opportunities for the large mass of individuals … (Such) new policies ….represent the conscious modification in the specifics of prevailing economic institutions. Such innovations in the public policy always bring together a consideration of three essential elements ethics, economics, and the law.*[219]

Mengikuti logika argumen di atas. Yang diperlukan oleh para usahawan menengah dan kecil, petani plasma, buruh, dan berbagai aktor lain dalam perekonomian rakyat adalah suatu "enabling setting" yang memungkinkan mereka untuk berkembang. "Setting" itu bisa berujud kebijakan politik, ekonomi maupun hukum. *Kedua*, tulisan ini juga mengembangkan argumen dan diwarnai oleh isyu normatif. Persoalan etika ditekankan. Peroalan keadilan dijadikan ukuran pokok dan dibahas dengan penuh empati. Sebagai bagian dari proklamasi kelahiran Pusat Studi Ekonomi Pancasila, tulisan itu jelas mengungkapkan kecenderungan normatifnya, yaitu pemihakan pada ekonomi kerakyatan. *Ketiga*, analisis dalam tulisan ini adalah buah dari olah pikir yang eklektik, bersedia memanfaatkan metodologi dan metode yang relevan. Penulis tulisan itu memanfaatkan kerangka analisis sosiologis, antropologis, filsafat, politik, dan disiplin sosial lain dengan terbuka. Seperti dikatakan oleh Prof. Sartono Kartodirdjo dalam "Introduction" tulisan itu: "Instead of studying the new economics (Mubyarto) is pleading strongly for the study of economic with a multi-dimensional approach".[220]

---

[219] Mubyarto dan Daniel W. Bromley, *A Development Alternative for Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal. 9

[220] *Ibid*., hal. 5.

Dari "exchange" ke "sharing"

Pertanyaannya adalah mekanisme dan tindakan politik apa yang bisa mendukung keberhasilan reformasi ekonomi menurut jalan "ekonomi kerakyatan" yang digagas Pak Muby itu? Kenyataan menunjukkan bahwa para aktor dan mekanisme politik Indonesia masih belum bisa memahami gagasan itu. Mundurnya Prof. Mubyarto dan Prof. Dawam Rahardjo dari panitia ad hoc di MPR menunjukkan hal itu. Ilmuwan dan praktisi ilmu politik perlu dibantu mengembangkan konsep, teori, kebijakan dan lembaga-lembaga yang sesuai dengan tujuan penciptaan ekonomi kerakyatan itu.

Salah satunya adalah membongkar kembali konseptualisasi tentang politik dan ekonomi sebagai transaksi pertukaran. Praktek bisnis umumnya terdiri dari transaksi seperti itu: yaitu, A memberikan sesuatu pada B dan menerima sesuatu dari B sebagai balasan yang nilainya setara. Ini disebut "exchange" dengan hasil nol (zero-sum). Tetapi kalau A memberikan sesuatu pada B, tetapi si A tidak kehilangan sesuatu yang diberikan itu, maka yang terjadi bukan transaksi "exchange", tetapi suatu proses "sharing" yang bisa punya implikasi "positive-sum". Inilah yang terjadi dalam hal sumberdaya informasi. Berbeda dengan sumberdaya lain, yang berkurang kalau diberikan pada pihak lain, sumberdaya informasi justru semakin membesar ketika disebar pada pihak lain.

Sayangnya, ilmuwan politik maupun ilmuwan ekonomi belum mengembangkan teori untuk menjelaskan atau memikirkan tentang ekonomi dunia yang sebagian besar terdiri-dari transaksi "*sharing*". Ilmuwan politik juga belum menghasilkan teori tentang implikasi dari *"a politics of sharing a plentiful resource*" (seperti informasi) yang sangat berbeda dengan *"a politics of allocating scarce resources".*

Yang kita perlukan adalah lembaga dan perspektif yang lebih luas yang memusatkan perhatian pada persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga kemiskinan di seluruh dunia dan ketimpangan antar-bangsa. Inilah yang harus menjadi pusat perhatian ilmu politik dan ilmu ekonomi, kalau kita ingin membuatnya relevan bagi persoalan masa kini.

[6] Kilas Balik Keterpurukan Indonesia: Analisa Ekonomi-Politik[221]

Sejarah ekonomi bangsa selama masa penjajahan 3,5 abad menggambarkan eksploitasi sistem kapitalisme liberal atas ekonomi rakyat yang berakibat pada pemiskinan dan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat yang sangat pincang. Struktur sosial ekonomi yang tak berkeadilan sosial ini, melalui tekad luhur proklamasi kemerdekaan, hendak diubah menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dengan warisan sistem ekonomi dualistik dan sistem sosial-budaya pluralistik, bangsa Indonesia membangun melalui "eksperimen" sistem sosialis dan sistem kapitalis dalam suasana sistem ekonomi global yang bernaluri pemangsa (predator). Eksperimen pertama berupa sistem ekonomi sosialis (1959-66) gagal karena tidak sesuai dengan moral Pancasila dan pluralisme bangsa, sedangkan eksperimen kedua yang "demokratis" berdasar sistem kapitalisme pasar bebas (1966-1998) kebablasan karena paham internasional liberalisme cum neoliberalisme makin agresif menguasai ekonomi Indonesia dalam semangat globalisasi yang garang. Krisis moneter yang menyerang ekonomi Indonesia tahun 1997 merontokkan sektor perbankan-modern yang keropos karena sektor yang kapitalistik ini terlalu mengandalkan pada modal asing. Utang-utang luar negeri yang makin besar, baik utang pemerintah maupun swasta, makin menyulitkan ekonomi Indonesia karena resep-resep penyehatan ekonomi dari ajaran ekonomi Neoklasik seperti Dana Moneter Internasional (IMF) tidak saja tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan daya tahan ekonomi rakyat. Sektor ekonomi rakyat sendiri khususnya di luar Jawa menunjukkan daya tahan sangat tinggi menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Ekonomi Rakyat yang tahan banting telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kebangkrutan.

Krisis sosial dan krisis politik yang mengancam keutuhan bangsa karena meledak bersamaan dengan krisis moneter 1997 bertambah parah karena selama lebih dari 3 dekade sistem pemerintahan yang sentralistik telah mematikan daya kreasi daerah dan masyarakat di daerah-daerah. Desentralisasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan politik daerah, menghadapi hambatan dari kepentingan-kepentingan ekonomi angkuh dan mapan baik di pusat maupun di daerah. Ekonomi Rakyat di daerah-daerah dalam pengembangannya memerlukan dukungan modal, yang selama bertahun-tahun mengarus ke pusat karena sistem perbankan sentralistik. Modal dari daerah makin deras mengalir ke pusat selama krisis moneter. Undang-undang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dikembangkan melalui kelembagaan ekonomi dan keuangan mikro, dan peningkatan kepastian usaha di daerah-daerah. Kepastian usaha-usaha di daerah ditingkatkan melalui pengembangan sistem keuangan Syariah dan sistem jaminan sosial untuk

[221] Gagasan dasar Seminar Ekonomi Rakyat di Jakarta selama 6 bulan sejak 22 Januari hingga 2 Juli 2002, diselenggarakan oleh Pusat P3R-YAE (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat-Yayasan Agro Ekonomika), Komisi Ilmu-ilmu Sosial–AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia), Bina Swadaya Perhepi (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, ISI (Ikatan Sosiologi Indonesia), Gema PKM (Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia).

penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan program-program santunan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Krisis Moneter juga menciptakan suasana ketergantungan ekonomi Indonesia pada kekuatan kapitalis luar negeri, lebih-lebih melalui cara-cara pengobatan Dana Moneter Internasional (IMF) yang tidak mempercayai serta mempertimbangkan kekuatan ekonomi rakyat dalam negeri khususnya di daerah-daerah. Kebijakan, program, dan teori-teori ekonomi yang menjadi dasar penyusunannya didasarkan pada model-model pembangunan Neoklasik Amerika yang agresif tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat plural di Indonesia. Pakar-pakar ekonomi yang angkuh, yang terlalu percaya pada model-model teoritik-abstrak, berpikir dan bekerja secara eksklusif tanpa merasa memerlukan bantuan pakar-pakar non-ekonomi seperti sosiologi, ilmu-ilmu budaya, dan etika. Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan makro dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan telah secara rata-rata menaikkan peringkat ekonomi Indonesia dari negara miskin ke peringkat negara berpendapatan menengah, namun disertai distribusi pendapatan dan kekayaan yang timpang, dan kemiskinan yang luas. Reformasi ekonomi, politik, sosial-budaya, dan moral, membuka jalan pada reformasi total mengatasi berbagai kesenjangan sosial-ekonomi yang makin merisaukan antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin, antara daerah-daerah yang maju seperti Jawa dan daerah-daerah luar Jawa yang tertinggal.

Kemerosotan Etika Pembangunan khususnya di bidang hukum dan bisnis modern berkaitan erat dengan pemaksaan dipatuhinya aturan main global yang masih asing dan sulit dipenuhi perusahaan-perusahaan nasional. Aturan main globalisasi dengan paham Neoliberal yang garang terutama berasal dari ajaran "Konsensus Washington" telah menyudutkan peranan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) merupakan jalan pintas para pelaku bisnis untuk memenangkan persaingan secara tidak bermoral yang merasuk pada birokrasi yang berciri semi-feodal. Etika Ekonomi Rakyat yang jujur, demokratis, dan terbuka, yang menekankan pada tindakan bersama *(collective action)* dan kerjasama (*cooperation*), merupakan kunci penyehatan dan pemulihan ekonomi nasional dari kondisi krisis yang berkepanjangan. Inilah moral pembangunan nasional yang percaya pada kekuatan dan ketahanan ekonomi bangsa sendiri.

[7] Peta Baru Geo-Ekonomi Asia Timur Pasca ACFTA[222]

Begitu ACFTA dinyatakan berlaku pada 1 Januari 2010 yang lalu, Indonesia langsung minta negosiasi-ulang kepada Cina karena alasan belum siap. Ini dilakukan tanpa perasaan risih atau sungkan kepada Cina dan negara-negara Asean lainnya. Padahal Indonesia sudah meratifikasi ACFTA *(Asean-China Free Trade Agreement)* atau Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Cina sejak 15 Juni 2004 melalui Kepres Nomor 24 tahun 2004. Keikut-sertaan Indonesia selama ini di dalam diplomasi mempersiapkan ACFTA cukup menonjol. Tapi entah mengapa setelah ACFTA ini diberlakukan tiba-tiba ada pihak-pihak di dalam negeri yang menjerit dan protes karena tidak siap? Ternyata penyakit lama kita masih saja belum hilang. Walaupun untuk sebuah kesepakatan penting dan strategis seperti ACFTA, koordinasi antara diplomasi ke luar dan kesiapan di dalam negeri masih saja *kedodoran*.

Sudah lama kita mendengar pemeo yang mengatakan bahwa *koordinasi* bukanlah titik kekuatan bangsa Indonesia. Tapi kalau kita melihat cara bekerja para *markus* (makelar kasus) di negeri ini, yang mempunyai jejaring begitu luas, yang bisa bekerjasama lintas unit, lintas instansi bahkan lintas departemen secara rapi dan efektif, pemeo yang tersebut diatas seharusnya tidak ada. Para mafia hukum di Indonesia ternyata mampu berkoordinasi dengan baik secara "profesional" melebihi para *mafiosi* yang asli di negeri asalnya di Sicilia, Italia sana. Terus terang, hal ini harus menjadi keprihatinan kita semua. Kalau menghadap ACFTA saja kita sudah tidak siap, apalagi menghadapi pasca ACFTA, dimana peta geo-ekonomi Asean plus Cina, bahkan di seluruh Asia Timur diramalkan akan berubah total.

Ditinjau dari tingkat kesiapannya, negara-negara yang terlibat di dalam ACFTA dapat dibagi menjadi empat kategori. Yang pertama adalah kategori negara *inisiator* yaitu Republik Rakyat Cina dan Republik Singapura. Ke dua negara ini sudah lebih dari siap dan sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk mengimplementasikan ACFTA dengan segera. Kategori ke dua adalah negara-negara *pendukung*, yaitu Malaysia, Thailand, Brunei Darusalam yang sudah siap dengan konsep perdagangan bebas, namun masih mempersiapkan diri untuk program-program pendukungnya. Yang ke tiga adalah kategori negara-negara *pengikut* yaitu Filipina, Laos, Kamboja, Vietnam dan Myanmar, yang relatif cukup siap namun bersikap *low profile* dan mewaspadai setiap perkembangan yang terjadi. Kategori ke empat adalah negara kita, Indonesia. Sikap dan kedudukan Indonesia cukup unik karena "penyakit" sindroma negara besar yang dideritanya. Ini terlihat dari perilakunya yang *high profile* pada tingkat diplomasi, tapi pada kenyataannya tidak terlalu siap di berbagai sektor di dalam negeri. Indonesia seperti tidak sadar bahwa dirinya adalah "sasaran tembak" baik oleh Cina maupun oleh negara-negara tetangga sesama anggota Asean. Indonesia adalah pasar terbesar nomor tiga di Asia setelah Cina dan India. Namun, berbeda dengan Cina yang merupakan pasar terbesar tapi sekaligus produsen yang sangat kompetitif, Indonesia adalah bukan produsen yang kompetitif. Di mata negara-negara ACFTA yang lain, Indonesia adalah produsen yang tidak perlu ditakuti, dan mitra konsumen yang memiliki pasar yang sangat potensial.

[222] Suhandi Taman Timur, *Peta Baru Geo-Ekonomi Asia Timur Pasca ACFTA,* Jakarta, 26 April 2010.

Dari sudut kepentingan regional, ACFTA adalah sebuah kesepakatan strategis yang sudah dirintis secara komprehensif sejak lama. Visi kesepakatan ini sudah lama dirumuskan bersama-sama sejak lebih dari dua dasawarsa yang lalu. Untuk menunjang ACFTA sebagai kesepakatan induk, semua pihak kini sibuk merumuskan program-program pendukung di tingkat nasional dan regional. Di forum ini negara-negara anggota bersaing dan menguji kejelian mata mereka masing-masing untuk melihat peluang yang ada. Dengan berlakunya perdagangan bebas, sudah dapat dipastikan bahwa arus pergerakan orang dan barang diantara negara-negara ACFTA ini akan meningkat tajam. Dengan semakin tingginya intensitas interaksi antar pelaku usaha di kalangan negara-negara ACFTA ini, maka hubungan sosial-budaya akan semakin baik, tingkat saling pengertian akan semakin tinggi dan hubungan politik akan bertambah erat. Disinilah peran sektor transportasi dan telekomunikasi akan menjadi sangat penting.

Sub-sektor angkutan laut dan angkutan udara menjadi sektor andalan yang perlu diantisipasi dalam penyusunan program-program pendukung tersebut. Diantara program-program pendukung tersebut, ada rencana untuk mengkaji-ulang semua perjanjian-perjanjian bilateral yang masih berlaku antara Cina dan negara-negara Asean di bidang angkutan laut dan angkutan udara. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan umum ACFTA adalah untuk menghilangkan segala hambatan biaya-masuk *(tariff barriers)*. Oleh karena itu semua perjanjian bilateral mengenai hubungan angkutan laut dan angkutan udara yang sekarang berlaku di antara negara-negara Asean dengan Cina akan diselaraskan dengan kebijakan umum ACFTA tersebut. Semua klausul-klausul yang ada dan bersifat membatasi atau restriktif akan dirubah. Tujuannya adalah mendukung kelancaran perdagangan bebas. Bila kesepakatan pendukung ini nanti tercapai, maka pratis antara Cina dan Asean akan berlaku kebijakan pelabuhan bebas, baik di bidang angkutan laut maupun angkutan udara. Meski nantinya angkasa dan laut Indonesia akan menjadi terbuka bagi semua kapal-kapal dari negara-negara Asean dan Cina, dampaknya terhadap perkembangan industri angkutan laut dan angkutan udara niaga di dalam negeri tidak perlu terlalu dikuatirkan. Tapi dominasi Singapura di kawasan Asean akan lebih menonjol lagi. Tanpa memerlukan kesepakatan politik legal dari sesama negara Asean yang lain, Singapura akan menjadi “ibukota” atau titik-pusat Asean secara *de facto*. Untuk hal ini Singapura memiliki segalanya. Disamping letak geografis yang strategis, Singapura mempunyai sarana dan prasarana yang kuasi paripurna sebagai pelabuhan transit laut dan udara antara Asean dan Cina, dan sebaliknya. Kedudukan pelabuhan Singapura yang ideal di “beranda” teritori Asean, tepat dimuka Laut Cina Selatan siap untuk menampung lalulintas komoditas perdagangan laut antara ke dua kawasan ini. Secara emosional, Singapura juga memiliki kedekatan yang lebih khusus dengan Cina dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya. Jangan dilupakan bahwa Singapura juga dikenal sebagai negara Cina ke tiga *(the third China)* sesudah RRC dan Taiwan. Sementara itu di pihak Cina, secara historis mereka tidak menerapkan sistim bandar-pengumpul *(hub)* tunggal. Kota-kota seperti Beijing, Shanghai, Hongkong atau Guangzhou adalah bagian dari sistim *multi gateways* di Cina. Oleh sebab itu, dibawah naungan ACFTA nanti, Singapura berpotensi menjadi bandar penghubung tunggal antara kota-kota di Cina dan kota-kota di Asean. Inilah kira-kita gambaran peta geo-ekonomi Asia Timur yang akan datang.

Tibanya era keterbukaan adalah keniscayaan yang hanya menunggu waktu. Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali memperkuat diri. Tapi sementara Kuala Lumpur dan Bangkok berusaha untuk membayang-bayangi Singapura, kita masih berkutat di dalam negeri dengan masalah-masalah keselamatan penerbangan yang sangat mendasar. Kasus pesawat tergelincir dan ban pecah waktu mendarat masih jadi kejadian “rutin”! Di laut, kapal-kapal asing mendominasi laut interinsuler kita, karena Pemerintah alpa menerapkan asas cabotage tanpa pertimbangan yang jelas. Kasus-kasus kelebihan muatan masih selalu terjadi. Bagaimana dengan sektor telekomunikasi? Ingat bahwa jauh sebelum ACFTA ini, Indosat sudah kita *lego* ke asing! Lalu kapan kita akan mampu bangkit agar sumber daya alam kita bisa mencapai pasar melalui sektor angkutan niaga kita sendiri? Apa yang akan kita lakukan bila peta geo-ekonomi Asia Timur akan berubah kanti? Jawabannya adalah pekerjaan rumah kita bersama!

[8] PDB, Perubahan Geoekonomi Menuju Tahun 2050[223]

Riset yang dilakukan oleh Goldman Sachs memperkirakan bahwa pada sekitar tahun 2040, kemampuan ekonomi Brasil, Rusia, India, dan China (untuk selanjutnya disingkat BRIC) akan melampaui G-6, kelompok negara maju yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Jepang, Perancis, dan Itali. Kemampuan ekonomi di sini diukur dari produk domestik bruto (PDB). Kalau ini benar, akan terjadi perubahan geoekonomi yang pada gilirannya akan membawa pergeseran geopolitik.

Peranan Indonesia dalam perubahan geopolitik ini akan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengembangkan ekonomi nasional dalam dinamika Asia yang berkembang pesat. Pada tahun 2003, Goldman Sachs melakukan suatu proyeksi terhadap empat negara, yaitu China, India, Brasil, dan Rusia. Negara yang dipilih ini termasuk negara yang berpenduduk terbesar pertama, kedua, kelima, dan kedelapan di dunia.

[223] Bambang Prijambodo, *PDB, Perubahan Geoekonomi Menuju Tahun 2050,* Kompas, Senin, 19 November 2007 [Direktur Perencanaan Makro, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional], dalam http://www.madani-ri.com/2007/11/22/pdb-perubahan-geoekonomi-menuju-tahun-2050/

Dengan mempertimbangkan aspek demografi, pemupukan modal, produktivitas ekonomi, dan peningkatan nilai tukar mata uangnya, kemampuan ekonomi keempat negara ini (diukur dari PDB) akan melampaui G-6 pada tahun 2039. Kalau ini terus berlanjut, pada tahun 2050 ekonomi BRIC akan meningkat menjadi 1,5 kali lipat dari G-6. Gambaran ini tersusun dari perkiraan sebagai berikut. Ekonomi China diperkirakan akan tumbuh rata-rata 8,0 persen per tahun pada tahun 2000-2005 (pada kenyataannya tumbuh 9,4 persen per tahun) dan secara bertahap melambat menjadi 2,9 persen pada tahun 2045-2050. Perekonomian Brasil diperkirakan tumbuh 4,2 persen per tahun pada tahun 2005-2010 kemudian melambat menjadi 3,4 persen pada tahun 2045-2050. Ekonomi Rusia tumbuh 5,9 persen per tahun pada tahun 2000-2005 dan secara bertahap melambat menjadi 1,9 persen pada tahun 2045-2050. Adapun ekonomi India diperkirakan tumbuh rata-rata 5,3 persen per tahun pada tahun 2000-2005 (pada kenyataannya tumbuh 6,4 persen). Kemudian melambat dan meningkat lagi pada tahun 2030-2035 karena siklus demografi dan melambat lagi menjadi 5,2 persen pada tahun 2045-2050.

Dengan memperkirakan peningkatan nilai tukar mata uang BRIC sekitar 2,5 persen per tahun, PDB China diperkirakan akan melampaui Jerman pada tahun ini, Jepang pada tahun 2015, dan AS pada tahun 2040. Ekonomi India akan melampaui Italia pada tahun 2016, Perancis pada tahun 2019, Jerman pada tahun 2023, dan Jepang pada tahun 2032. PDB Rusia akan melampaui Itali pada tahun 2018, Perancis pada tahun 2024, Inggris pada tahun 2027, dan Jerman pada tahun 2028.

Adapun ekonomi Brasil diperkirakan akan melampaui Italia pada tahun 2025, Perancis pada tahun 2031, dan Jerman pada tahun 2026. Secara keseluruhan, pada tahun 2050, enam perekonomian terbesar di dunia diukur dari PDB dalam dollar AS akan ditempati oleh China, AS, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Adapun Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia akan bergeser ke posisi 7 sampai 10.

Meskipun kemampuan ekonomi BRIC melampaui PDB G-6, setiap negara BRIC belum menjadi negara terkaya di dunia. PDB per kapita China pada tahun 2050 baru akan mencapai sekitar 31.000 dollar AS, hampir sama dengan pendapatan per kapita rakyat AS pada tahun 2000, sedangkan PDB per kapita AS pada waktu itu akan mencapai hampir 84.000 dollar AS. Satu-satunya pendapatan per kapita BRIC yang akan melampaui beberapa negara G-6 adalah Rusia. Pada tahun 2050, PDB per kapita Rusia akan mencapai sekitar 50.000 dollar AS, melampaui pendapatan per kapita rakyat Italia dan Jerman.

Pengertian PDB per kapita sangat berbeda dengan PDB. PDB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan rakyat meskipun belum menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di dalam suatu negara. Adapun PDB lebih menggambarkan kemampuan ekonomi suatu negara, kekuatan pasar dalam negeri yang bisa digerakkan, dan pada gilirannya dapat menjadi kekuatan di dalam menentukan politik luar negerinya. Rakyat Swiss dan Singapura dengan pendapatan per kapita lebih dari 52.000 dollar AS dan 27.000 dollar AS dapat dikatakan lebih sejahtera dibandingkan dengan rata-rata rakyat China yang hanya berpendapatan 1.700 dollar AS. Namun secara agregat, kemampuan ekonomi Singapura dan Swiss jauh di bawah China. Demikian juga kekuatan politik dan pertahanannya.

Ada beberapa catatan yang cukup baik dari riset yang dilakukan oleh Goldman Sachs. *Pertama*, dengan tingkat pertumbuhan itu, pada tahun 2010 peningkatan pengeluaran BRIC diperkirakan melebihi peningkatan pengeluaran G-6. Adapun pada tahun 2025, peningkatan pengeluaran BRIC akan menjadi dua kali lipatnya dan pada tahun 2050 akan menjadi empat kali lipat dari peningkatan pengeluaran G-6. BRIC akan menjadi penggerak dari sisi permintaan dan pengeluaran yang sangat besar dan dapat mengimbangi pengaruh dari struktur penduduk yang menua dan pertumbuhan ekonomi yang lambat di negara-negara maju.

Kedua, tidak tertutup kemungkinan BRIC mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mencapai tingkat pembangunan sebagaimana yang diperkirakan. Peluang China untuk mencapai tingkat pembangunan tersebut sangat besar.

Data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, sejak tahun 1979-2005 ekonomi China tumbuh rata-rata 9,7 persen per tahun dengan hanya tiga tahun tumbuh di bawah 6 persen. India dan Rusia juga mempunyai histori yang cukup kuat, meskipun lebih singkat dan lebih fluktuatif dibandingkan dengan China. Ekonomi India dan Rusia berturut-turut tumbuh 6,3 persen per tahun (1996-2005) dan 6,7 persen (1999-2005). Keraguan terletak pada ekonomi Brasil. Gejolak eksternal dengan ketergantungan utang yang besar pada dasawarsa 1980-an serta transisi dari rezim militer ke demokrasi yang lemah masih berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Brasil. Meskipun negara ini sebelumnya pernah mengalami pertumbuhan yang tinggi, yaitu rata-rata 8,7 persen per tahun antara tahun 1971 dan tahun 1980, tren pertumbuhan ekonomi Brasil masih dalam kecenderungan melambat.

Ketiga, dengan BRIC yang mewakili Asia, Eropa, dan Amerika Latin, bagaimana dengan benua Afrika? Afrika tetap tertinggal dalam pembangunan. Afrika Selatan, perekonomian terbesar di benua Afrika, pada tahun 2050 PDB-nya diperkirakan hanya mencapai kurang dari seperlima PDB Brasil. Afrika tetap merupakan kawasan yang seakan-akan terkunci dalam sejarah pembangunan sejak beratus tahun yang lalu.

Perubahan Geo-Ekonomi

Meskipun gambaran yang diberikan oleh Goldman Sachs belum pasti akurat, ada beberapa implikasi yang penting:

Pertama, Asia akan menjadi kekuatan ekonomi yang terbesar di dunia. Pada tahun 2025, ekonomi Jepang, China, dan India akan melampaui PDB AS. Secara berangsur, kebijakan ekonomi dan politik Jepang dari yang selama ini lebih condong ke Barat akan bergeser ke Asia dengan semakin kuatnya China dan India. Pada tahun 2050, PDB ketiga negara Asia itu akan meningkat menjadi 2,2 kali lipat PDB AS. Ini belum memperhitungkan macan Asia lainnya seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Kegiatan perdagangan antara negara-negara Asia akan meningkat luar biasa, padahal sebelumnya banyak bergantung pada pasar AS dan Eropa.

Kedua, dengan semakin meningkatnya kekuatan ekonomi Asia, terbuka peluang bagi Asia untuk menyatukan ekonomi sebagaimana Eropa. Meskipun karakteristik ekonomi di Asia jauh lebih beragam dibandingkan dengan Eropa, peluang ini tetap ada. Kalau kemungkinan ini terbuka, beberapa negara Asia yang maju itu bukan tidak mungkin akan mempunyai mata uang tunggal sebagaimana euro. Potensi ini tetap ada dengan tren menurunnya nilai tukar dollar AS terhadap mata uang dunia lainnya. Goldman Sachs sendiri memperkirakan nilai tukar riil mata uang BRIC akan meningkat sekitar 300 persen selama 50 tahun.

Ketiga, kekuatan ekonomi China yang melampaui AS pada tahun 2040 akan membawa perubahan geopolitik. Politik luar negeri dan kekuatan pertahanan yang selama ini didominasi oleh AS secara berangsur-angsur akan terbagi menjadi tiga kekuatan besar, yaitu China, AS, dan Rusia. Perubahan ini secara bertahap telah terlihat dari politik luar negeri China yang lebih progresif serta meningkatnya anggaran dan kekuatan pertahanan China. Ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya perekonomian suatu negara. Selama satu dasawarsa terakhir anggaran pertahanan China meningkat dua digit setiap tahun. Ketertinggalan teknologi China dari AS, baik dalam bidang ekonomi maupun pertahanan, secara berangsur akan dikejar oleh China.

Implikasinya bagi Indonesia

Gambaran di atas memberi implikasi yang penting bagi Indonesia. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi mencakup aspek yang lebih luas termasuk politik luar negeri dan pertahanan.

Pertama, ekonomi Indonesia perlu menyiapkan diri sebaik-baiknya agar dinamika Asia yang berkembang cepat itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Semua potensi pembangunan, tidak hanya sumber daya alam, tetapi yang lebih pokok adalah sumber daya manusia, infrastruktur, ruang (teritori), dan teknologi harus dioptimalkan. Dua potensi pembangunan terakhir selama ini kurang dimanfaatkan secara baik bagi peningkatan kemampuan ekonomi kita. Di sini pentingnya strategi industrialisasi dan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan ekonomi mendatang.

Kedua, mempertegas arah pembangunan ekonomi yang akan ditempuh dalam jangka panjang. Secara konsep kita sudah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sampai tahun 2025. Yayasan Indonesia Forum juga menyusun Visi Indonesia 2030. Apa pun rencana dan visi pembangunan jangka panjang sampai tahun 2050, di dalam menjabarkannya kepada prioritas pembangunan untuk kurun waktu yang lebih pendek harus konkret, konsisten, dan berkelanjutan. Di sini peranan kepemimpinan dan pemerintah yang kuat serta sistem sosial, politik, dan budaya yang mendukung sangat besar. Ini kenapa China sewaktu di bawah kepemimpinan Mao tidak mampu memberi sinyal bahwa satu saat China akan menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Ketiga, meningkatkan peranan Indonesia paling tidak di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Agar berperan lebih besar dalam dinamika Asia menuju tahun 2050, Indonesia perlu secepatnya kembali memainkan peran yang lebih besar di ASEAN, baik bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan. Langkah ini penting mengingat geoekonomi dan geopolitik ASEAN sangat strategis. Dengan demikian, posisi tawar Indonesia tidak saja sebagai negara, tetapi satu kawasan yang sangat strategis. Kuncinya ekonomi kita harus maju, stabilitas politik dalam negeri harus mantap, dan politik luar negeri kita harus progresif.

[9] Geopolitik dan Geo-Strategi Indonesia di Antara Dua Samudera

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan dengan sejumlah 17.508 pulau-pulau besar dan kecil. Total luas wilayah Indonesia adalah sembilan juta kilometer persegi; terdiri dari tiga juta kilometer persegi dalam bentuk daratan pulau-pulau, tiga juta kilometer persegi perairan laut kedaulatan (*sovereignity*) yaitu perairan di antara atau sekeliling pulau-pulau tersebut, serta tiga juta kilometer persegi lagi berupa perairan laut yang mengelilingi laut kedaulatan sebagai sabuk sebesar 200 mil laut dengan hak berdaulat (*sovereign rights*) di atas maupun di bawah permukaan, serta lapisan bawah dasar lautnya (Wahyono SK. *Indonesia Negara Maritim.* Teraju, 2009. Dalam http://geostrategicpassion. blogspot.com /2011/08/geopolitik-indonesia-di-antara-dua.html).

Ditinjau dari konstelasi geografis, posisi Indonesia sangat strategis karena berada pada posisi silang dunia yakni berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia, yang juga merupakan jalur lalu lintas dunia baik laut maupun udara yang sangat padat.

Posisi Indonesia membentang di khatulistiwa, dari 95 derajat Bujur Timur sampai dengan 141 derajat Bujur Timur, serta dari 6 derajat Lintang Utara sampai dengan 11 derajat Lintang Selatan. Dengan panjang garis pantai pulau-pulaunya kurang lebih 81.000 kilometer. Di sepanjang garis pantai tersebut terdapat landas kontinen yang merupakan lanjutan daratan pantai yang menjorok ke luar sampai sejauh 200 mil laut. (*Ibid*).

Kondisi geopolitik Indonesia sangat sarat dengan unsur-unsur strategis, dari unsur sumber daya alam hingga *sea lanes of communication* (SLOC). SLOC atau jalur-jalur pelayaran/perhubungan aut tersebut secara politik dan ekonomi sangat strategis, karena menyangkut kelangsungan hidup berbagai negara. Jalur laut tersebut membentang dari Teluk Persia ke arah barat menuju Eropa Barat, dan ke arah Timur menuju Asia Timur dan Amerika Serikat. Jalur ini merupakan bentangan garis energi minyak dan gas bumi yang tidak boleh terputus, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan industri negara-negara maju. Dari 7 (tujuh) selat strategis di dunia, 4 (empat) di antaranya berada dalam wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan demikian lautan Nusantara menjadi lautan yang kedudukannya sangat strategis tapi juga rawan keamanan dan bahaya ekologis. (Ermaya Suradinata, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI,* Suara Bebas 2005)

Jika uraian di atas dikontekstualisasikan dengan kondisi geostrategik Indonesia maka bisa dilihat posisi geostrategis Indonesia, antara lain: (1) Indonesia menjadi bagian penghubung penting dari *Eurasian Blue Belt;* (2) Indonesia mengambil peranan sangat besar dalam *Global Logistic Support System* dan khususnya terkait dengan SLOCS (*Sea Lanes Of Communications*) dan COWOC (*Consolidated Ocean Web Of Communication*); (3) Wilayah lautan dan ALKI Indonesia menjadi penghubung penting dalam HASA (*Highly Accesed Sea Areas*) dimana ketiga lautan yaitu India, Southeast dan South Pacific bertemu didalamnyA; (4) Terkait dengan *World Shipping* yang melintasi ALKI dengan muatan *Dry Cargo* maupun *Liquid Cargo* (dalam http://indomaritimeinstitute.org, *Alur Laut Kepulauan Indonesia: Peluang dan Ancaman bagi NKRI*).[]

REFERENSI PRIMER

Adelman dan C. Morris, *Economics Growth and Social Equaity in Developing Countries,* Standford, Standford University Press, 1973.

Anthony Giddens, *Runway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Adam Smith, *The Wealth of Nations*, New York: The Modern Library, 1973.

Adian, Doni Gaharal, 2005, *Percik Pemikiran Kontemporer; Sebuah Pengantar Komprehensif*, Bandung: Jalasutra

Arif, Saiful, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar & Averroes, 2000.

Arendt, Hannah, *Pembangunan Ekonomi, Studi Tentang Sejarah Pemikiran,* Jakarta, LP3ES, 1991

Budi Hardiman, Fransisco, 2004, *Kritik Ideologi; Menyingkap Kepentingan Ilmu Pengetahuan Bersama Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Buku Baik

Budiman, Arif, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga,* Jakarta, Gramedia, Cet. IV., 2000.

Cox, Robert W, 1983, *Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method, Millenium:* Jurnal of International Studies Vol 12 (2).

Clements, Kevin, *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan,* Yogyakarta, PP, 1997.

Daniel Bell,*The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York: Basic Books, 1976.

Engels, Frederick, *Tentang Das Kapital,* Judul Asli: *On Marx's Capital,* Penerjemah: Oey Hay Djoen (Bandung: Ultimus dan Yayasan Akatiga, Cet. I., 2006).

_______, *Dialektika Alam,* Judul Asli: *Dialectics of Nature* (Moscow: Progress Publisher, 1964) Penerjemah: Oey Hay Djoen, (Jakarta: Jasta Mitra, 2005).

_______, *Anti Duhring; Revolusi Herr Eugen Duhring dalam Ilmu Pengetahuan,* Judul Asli: *Anti Duhring: Herr Eugen Duhring's Revolution in Science*, Foreign Languages Publishing House, (Jakarta: Hasta Mitra, 2005).

Francis Fukuyama, *The End of History and Last Man*, London: Hamish Hamilton, 1992.

Fredric Jameson, *Postmodernism or The Cultural of The Late Capitalism*, London, Verso, 1990.

Fakih, Mansour, 2001, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar.

_______, *Sesat Pikir Teori Pembangunan & Globalisasi,* INSIST, 2001.

Femia, Joseph V, 2001, *Marxisme dan Komunisme*, dalam *Ideologi Politik Kontemporer*, editor Eatwell & Anthony Wright (terj), Yogyakarta: Penerbit Jendela.

Giddens, Anthony, *Kapitalisme & Teori Sosial Modern, Jakarta,* UI Press, 1986.

Gilpin, Robert, 1987. *"The Dynamics of Internastional Political Economy*" dalam *The Political Economy of Internastional Relations,* Princeton: Princeton University Press, pp.66-117.

_______, (1987). *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.

Griffiths, Martin, 2001, *Lima Puluh Pemikir Studi hubungan Internasional*, terj. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Heru Nugroho, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

Hobsbawm, Eric. 1987. "*An Economics Changes Gear"* dalam *The Age of Empire 1875-1914*, London: Weidenfeld & Nicholson

Hoogvelt, Ankie. (1997). *The History of Capitalist Expansion, dalam Globalization and Post-Colonial World: The New Political Economy of Development*. Baltimore: The John Hopkins University Press, pp. 14-28.

http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/kategori_isi-36639-Geopolitik%20dan%20 Geostrategi.html dan http://www.timurmatahari.com

Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang, Indonesiatera, 2004.
Jamil Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme, Pendekatan Baru dalam Melihat HAM*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2003.
Jerry Mander, Debi Barker & David Korten, *Globalisasi Membantu Kaum Miskin*, dalam *Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003.
Jurgen Hebermas, *Ilmu dan Tekhnologi Sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES, Tahun 1990.
Jackson, Robert & Georg Sorensen. (1999). *International Political Economy*, dalam *Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
Jackson, Robert & Sorensen, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Komaruddin, *Pengantar untuk Memahami Pembangunan,* Bandung, Angkasa, 1985.
Kuncaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas & Pembangunan,* Jakarta, Gmd, Cet. XVIII., 1997.
Kunio, Yoshihara, *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, 1990.
Kristeva, Nur Sayyid-Santoso, *Negara Marxis & Revolusi Proletariat* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Cet. 1., 2011).
_______, *Manifesto Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik,* Buku Panduan Pelatihan Basis 1 (2007).
_______, *Teori Analisis Geo-Ekosospol,* Buku Panduan Pelatihan Basis 2 (2009).
_______, *Seri Ideologi Dunia (Marxisme, Sosialisme, Komunisme, Kapitalisme, Fasisme, Anarkisme, Sindikalisme, Anarko-Sindikalisme, Konservatisme, Sosialisme-Demorasi, dll),* Buku Panduan Sekolah Ideologi 1 (2008).
Lairson, Thomas D. And D. Skidmore, 1993. *"The Political Economy of American Hegemony: 1938-1973,* dalam *Internastional Political Economy: the Struggle for Power and Wealth,* Orlando: Harcourt Brace College Publishers, pp.63-94.
Larrain, J., *Theories of Development, Capitalism, Colonialism & Dependensy,* Dalas Brewely, 1989.
Marx, Karl, *Kapital I; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Jilid Pertama: Proses Produksi Kapital,* Judul Asli: *Capital; A Critique of Political Economy, Volume I: A Critical Analysis of Capitalist Production,* Penerjemah: Oey Hay Djoen (Jakarta: Hasta Mitra-Ultimus-Institute for Global Justice, Cet. I., 2004).
_______, *Kapital II; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Jilid Kedua: Proses Sirkulasi Kapital,* Judul Asli: *Capital; A Critique of Political Economy, Volume II: The Process of Circulation of Capital,* Penerjemah: Oey Hay Djoen (Jakarta: Hasta Mitra-Ultimus-Institute for Global Justice, Cet. I., 2006).
_______, *Kapita III; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Jilid Ketiga: Proses Produksi Kapitalis secara Menyeluruh,* Judul Asli: *Capital; A Critique of Political Economy, Volume III: The Process of Capitalist Production as a Whole,* Penerjemah: Oey Hay Djoen (Jakarta: Hasta Mitra-Ultimus-Institute for Global Justice, Cet. I., 2007).
_______, *The Poverty of Philosophy; Answer to The "Phylosophy of Poverty" By M. Proudhon* (Moscow: Foreign Languages Piblishng House, 1884).
Mas'oed, Mochtar, 1998, *Merkantilisme dan Strukturalisme: Gagasan anti-liberal*, dalam *Perspektif Ekonomi-Politik dalam Studi Hubungan Internasional,* Bahan Matrikulasi, Program Pasca Sarjana Konsentrasi Studi Hubungan Internasional, UGM.
Martin Khoor, *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2000.
Ritzer, George & D. J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern,* Jakarta, Prenada Media, 2005.
Strahm, H. Rudolf, *Kemiskinan Dunia Ketiga, Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang,* Jakarta, Pustaka Cidesindo, 1999.
Soejatmoko, dkk., *Krisis Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga,* Yogyakarta, PLP2M, Cet. I., 1984.
Sritua, Arif, *Pembangunaisme dan Ekonomi Indonesia, Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi,* Bandung CPSM, Cet. I., 1998.
Smith, Adam, *The Wealth of Nations*, NY, 1937.
Setiawan, Bonnie, 1999, *Peralihan Kapitalisme ke Dunia Ketiga: Teori-teori Radikal Klasik sampai Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sterling-Folker, Jennifer, 2006. *Making Sense of Internatioanl Relations Theory*, London: Lynne Rienner Publishers
Sugiono, Muhadi, 1999, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan Mesin-mesin Kekarasan dalam Jagat Raya Chaos*, Mizan, Bandung, 2001.
Wallerstein, I, 1974. *The Modern World System*. New York: Academic Press
Weber, Max, *The Protestan Ethics and The Spirit of Capitalism,* London, 1990.[]

MATERI 17
NEOLIBERALISME & PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

PENGARUH NEOLIBERALISME TERHADAP KEBIJAKAN PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA
Pendahuluan

Privatisasi merupakan fenomena ekonomi global dan anak kandung neoliberalisme. Privatisasi menghendaki pembatasan campur tangan negara dalam semua urusan ekonomi.[224] Sementara neoliberalisme sendiri cenderung menilai kehadiran negara dibidang ekonomi sebagai sesuatu yang buruk, merusak dan tidak efisien bagi kehidupan ekonomi dan bisnis. Negara yang beroperasi dalam logika politik kekuasaan dinilai kurang atau bahkan tidak memberi tempat bagi berkembangnya struktur pasar yang sehat dan kompetitif.

Negara adalah institusi yang dianggap mengganggu mekanisme pasar. Namun dia juga relatif memiliki kepentingan interventif. Konsekuensinya, struktur pasar tidak lagi ditentukan oleh kondisi obyektif yang melibatkan aktor-aktor pasar, melainkan diarahkan oleh kepentingan partisan pejabat pemerintah yang tak jarang mengambil peran sebagai pencari sekaligus pemburu rente ekonomi (*rent-seekers*).

Tuntutan untuk melakukan privatisasi sektor-sektor usaha yang dikuasai oleh negara (*state-owned enterprises)* berasal dari lingkungan eksternal. Dunia saat ini memang sedang bergerak kearah monolitik dengan tampilnya kapitalisme sebagai sistem ekonomi dunia yang dominan.[225]

Menurut Filomelo Sta., program dan proses privatisasi berasal dari kecenderungan global menuju pasar bebas (*free market)*, dan peranan ekonomi yang lebih besar, dengan asumsi sebagian besar dilakukan oleh sektor swasta (*private sector*). Faktor eksternal. Khususnya desakan lembaga-lembaga multilateral, memainkan peran penting dalam pelaksanaan berbagai kebijakan privatisasi di banyak negara.

Melalui IMF dan Bank Dunia, misalnya, program-program privatisasi memperoleh instrumen secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk hukum positif suatu negara. Privatisasi terhadap beberapa sektor usaha yang dikuasai oleh negara memang merupakan salah-satu agenda pokok dari perkembangan ekonomi global yang kerap dihubungkan dengan struktur pasar bebas dan praktik liberalisasi.[226] Untuk mempermudah menganalisa selanjutnya dipaparkan privatisasi dalam konfigurasi ideologi dunia, serta implementasi privatisasi pada level teoretik dan praktik.

Posisi Ideologis Privatisasi

Privatisasi sebagai salah satu bentuk restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (*state-owned enterprises*) memang tidak berada dalam ruang hampa ideologi.[227] Kehadiranya tidak dapat dipisahkan dari kampanya dunia internasional yang mendorong liberalisasi ekonomi dan pasar bebas (*free market).* Pasar bebas tidak akan tercipta tanpa perdagangan bebas (*free trade*).[228] Itulah sebabnya mengapa privatisasi

---

[224] Ideologi politik yang menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi adalah *laissez faire.* Ideologi ini kemudian mengilhami tesis pasar bebas Adam Smith, seorang ekonom skotlandia, dalam buku *The Wealth of Nations* (1776). Aplikasi praktisnya dikembangkan melalui adagium bahwa pemerintah yang baik adalah yang sedikit memerintah atau mengatur (*the government is best which governs least)*. Tesis itu diterjemahkan secara ekstrim oleh beberapa ekonom dan praktisi bisnis yang percaya jika pemerintah yang baik adalah yang memerintah atau mengatur sedikit, maka pemerintah terbaik adalah yang tidak memerintah atau mengatur sama sekali (*if that government is best which governs least, than the best government of all must be one that governs not at all).* Lihat Austin Ranney, *Governing, An Introductions to Political Science (7th)* (London: Prentice Hall Internatioal, Inc., 1996) hal. 80. dalam A. Effendi Khoirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 2003) hlm. 01.

[225] Kapitalisme disini bukan sebagai ideologi politik. Kapitalisme bukan berurusan dengan cara pemerintah mengambil keputusan. Dia adalah cara produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa berdasarkan kepemilikan pribadi atas perusahaan.

[226] Meminjam kalimat M. Shamsul Haque, "*privatization as a global development is rightly or wrongly associated with the free market and liberalization",* lihal, M. Shamsul Haque, "The Intelectual Crisis in Public Administration in The Current Epoch of Privatization, dalam *Administration and Society,* 27 Februari 1996. hal. 510. dalam A. Effendi Khoirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 2003) hlm. 01.

[227] Anthony Downs dalam buku *An Economic System of Democracy* (New York: Harper & Row, 1957) hlm. 96. mendefinisikan ideologi sebagai "*a verbal image of the good society, and of the chief means of constructing such a society."* Menurut Austin Ranney, setiap ideologi adalah seperangkat ide yang saling bertautan secara logis dan memiliki titik beda dengan ideologi lain. Gagasan yang terangkum dalam sebuah ideologi mencakup nilai-nilai (*values*), visi kemasyarakatan yang ideal (*vision of the idel polity)*, konsep asal-usul manusia (*conception of human nature),* strategi tindakan (*strategies of actions*), dan siasat politik (*political taktics)*; lihat Austin Ranney, *Governig; An Introduction to Political Science (7th Edition;* London: Prentice Hall International, Inc., 1996) hlm. 71-73. Sementara dalam bahasa yang agak lebih sederhana, pranarka menjelaskan ideologi yang menurut hakikat dan sifatnya adalah sebuah pegangan untuk perjuangan; lihat A.M.W. Pranarka, "Pasal 33 UUD 1945: Wawasan Dasar dan Konstruksi Operasionalnya, Suatu Tinjauan Ideologis,"dalam A*nalisa CSIS*, Tahun IV, No. 12, Desember 1986, Penjelasan tentang ideologi-ideologi dunia yang cukup komprehensif; lihat William Ebenstein dan Edwin Fogelman, *Isme-isme Dewasa ini,* terj. Alex Jemadu (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994).

[228] Perdagangan (*trade)* dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang berhubungan langsung dengan pertukaran barang-jasa yang didorong oleh hasrat memperoleh keuntungan (*profit taking)*. Karena pertukaran barang dan jasa merupakan salah satu sarana

selalu dihubungkan dengan pelaku-pelaku ekonomi, baik internasional maupun domestik, yang coba memperluas bidang usaha agar keuntungan bisa diperoleh secara maksimal. Negara mempunyai peran tetapi terbatas. Peran negara dibidang ekonomi dibatasi sedemikian rupa sehingga ekonomi dapat berjalan bebas dari pengaruh dan intervensi negara.

Dimana kita menempatkan privatisasi dalam konfigurasi ideologi dunia? Pertanyaan klasik ini tampaknya masih tetap aktual dan relevan, khususnya bagi negara-negara sedang berkembang. Debat tentang privatisasi akan memasuki ranah ideologis saat kita membahas peran pemerintah dalam hal kepemilikan perusahaan dan manajemen ekonomi. Yang menarik, debat tersebut juga masih berlangsung di negara-negara maju yang menganut *free enterprise system*. Perdebatan ideologis berjalan sengit, misalnya, di Amrika Serikat pada tahun 1980-an ketika presiden rezim Ronald Reagan mencoba melakukan privatisasi US Postal Service (UPS), tetapi ditolak oleh sebagian besar anggota Kongres.[229] Debat yang sama juga pernah terjadi di Jerman ketika pemerintah bermaksud melakukan privatisasi terhadap perusahaan telekomunikasi negara. Privatisasi memang akhirnya diberlakukan untuk jaringan telekomunikasi internasional, sedangkan jaringan telekomunikasi lokal tetap dikuasai oleh pemerintah.[230]

Perdebatan ideologis sekitar kontrol ekonomi yang berkaitan dengan peran negara (pemerintah) memunculkan empat varian utama, yaitu *laissez faire,* sosialisme, liberalisme modern, dan konservatisme modern. Pokok pertanyaan yang muncul dari debat tersebut adalah "*what role of government should play in the ownership and management of the economy*."[231] Kapitalisme selama ini sering diasosiasikan dengan *laissez faire.* Kapitalisme sendiri bukan ideologi politik, melainkan "*an economic system in with the means of productions, distributions and exchange are privately awned and operated*."[232] (suatu sistem ekonomi dimana cara produksi, distribusi serta pertukaran barang dan jasa dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta). *Laissez faire* merupakan ideologi politik yang sepenuhnya bersandar pada kapitalisme. Eksistensi dan aplikasinya dibidang ekonomi merujuk pada upaya bagaimana mewujudkan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi. Dengan demikian dikatakan bahwa kapitalisme adalah "tangan politik" *laissez faire* yang bekerja mengelola keputusan-keputusan pemerintah dalam berbagai urusan ekonomi dan bisnis.[233]

Semua penganut gigih *laissez faire* meyakini kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang terbaik. Mereka percaya bahwa ekonomi kapitalis akan berjalan dengan sendirinya jika pemerintah membatasi diri semata-mata pada urusan penyediaan kondisi dasar bagi persaingan ekonomi bebas: menjaga hukum dan ketertiban, memperkuat dan manjamin kontrak-kontrak, melindungi dan menjaga hak milik pribadi (*private property*), serta mempertahankan negara dari serangan musuh. Pemerintah harus membiarkan persaingan berjalan bebas diantara para pengusaha dan bisnis swasta. Semua keputusan dengan sendirinya akan diciptakan oleh pasar dan diatur secara alamiah oleh hukum ekonomi. Pemerintah tidak perlu membantu mereka yang berhasil atau gagal menjalankan usaha.

Laissez faire selanjutnya difahami sebagai aplikasi dari segala urusan ekonomi bersandar pada doktrin yang secara ringkas dinyatakan oleh Thomas Jefferson sebagai *that government is the best which governs least* (pemerintah yang baik adalah yang memerintah atau mengatur sedikit).[234] Gregorio S. Miranda, profesor ekonomi Univesitas Santo Thomas, Filiphina, menguraikan sebagai berikut:[235]

---

komunikasi antar manusia; bahkan antar negara, maka perdagagan dapat diproklamasikan sebagai jalan menuju peradaban modern (*the pathway to modern civilization*). Sedangkan perdagangan bebas (*free trade*) bukanlah berarti kebebasan absolut untuk berdagang, tetapi kebijakan yang mempunyai karakter dapat menghilangkan semua hambatan dan rintangan bagi berlangsungnya perdagangan; lihat Gregorio S. Miranda, *International Trade* (Manila: Business House, 1979) hlm. 14-14, 139.

[229] Lihat, Thoby Motis, *Cakrawala Demokrasi Ekonomi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002) hlm. 97-103.

[230] Peter Hermann, "Monopoly Watch," Dokumentasi Proses Seminar Sehari *Indonesian Business Competition: Present and Future Challenge,* Hotel Park Plaza, Jakarta, Mei 2002.

[231] Ranney, *op. cit.,* hlm. 79.

[232] *Ibid*., hlm. 81

[233] *Ibid.,* Sejarah *laissez faire* bermula di Perancis semasa pemerintahan Louis XIV. Menteri Keuangan Jean Babtiste Colbert (1619-1683) ketika itu mengadakan sebuah pertemuan khusus dengan saudagar Perancis dan menanyakan kepada mereka apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mereka. Salah seorang saudagar menjawab *"Laissez-nous faire!"* (*leave us alone*: biarkan kami berusaha sendiri). Selanjutnya dia menamakan *laissez faire* sebagai ideologi yang menghendaki campur tangan pemerintah sekecil mungkin dibidang ekonomi.

[234] Lihat, Robert L. Cord, *et. al., Political Science: An Introduction* (Second Edition; New Jersey: Prentice Hall Inc., 1985) hlm. 104. Slogan *laissez faire* yang menandai penghentian campur tangan negara dalam urusan ekonomi dikumandangkan pertamakali pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 oleh John Locke dan sekelompok ekonom Perancis yang disebut kaum *physiocrats.* Penjelasan paling terkenal dan berpegaruh tentang hal ini adalah buku *The Wealth of Nation* yang dipublikasikan pada 1776 oleh ekonom Skotlandia dan peletak dasar teori kapitalisme, Adam Smith. Dia kerap disalahpahami sebagai tokoh utama yang menentang campur tangan pemerintah dalam segala urusan ekonomi. Menurut Nathan Rosenberg, "seluruh argumen Smith berkaitan dengan perlunya membangun tata kelembagaan dimana para pengusaha yang mengejar kepentingan pribadi akan dipaksa sedemikian rupa untuk ikut memajukan kepentingan bersama. Smith sesungguhnya bukan pendukung mereka yang anti terhadap campur tangan pemerintah. Sikapnya menentang campur tangan pemerintah jangan dilihat sebagai dogma atau prinsip mutlak. Smith tidak membela dogma bahwa fungsi pemerintah dibidang ekonomi harus ditolak mutlak. Smith sesungguhnya menyodorkan kebijaksanaan ekonomi praktis, yaitu bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi saraya menjamin kebebasan setiap pelaku ekonomi. Pada dasarnya dia tidak menentang campur tangan pemerintah." Lihat, Nathan Rosenberg, "Adam Smith and Laissez Faire Revisited", dalam Gerald P. O'Driscoll (ed.), *Adam Smith and Modern Political Economy, Bicentennial Essays on "The Wealth of Nations"* (Lowa: Iowa State University Press 1979), hlm. 19-34.

[235] Miranda, *op. cit.,* hlm. 12. *Laissez faire* sering disamakan dengan liberalisme dari segala bentuk campur tangan atau pengaturan pemerintah; lihat. Ranney, *op. cit.,* hlm. 75. Liberalisme klasik (*classical liberalism*) itu disebut sebagai liberalisme negatif

"*Laissez faire may be defined as the doctrine with demand the minimum intervence by the government individu economic and politic affairs. Under the doctrie of laissez faire, the ideal society individu characterized by the competition of individuals armed with equal right who freely search for their interest individu the inraction of economic relationships. Form its beginnings, laissez faire is marked by an optimistic faith individu the power of uncontrolled action to produce social good. As a theory exchange, laissez faire leads to such a stabilization of proces as results, in a given market, individu the maximum possible satisfaction to all those participating therein."* (*Laissez faire* dapat didefinisikan sebagai doktrin yang menuntut campur tangan minimum pemerintah terhadap urusan-urusan ekonomi dan politik. Dibawah doktrin *laissez faire*, masyarakat yang ideal dicirikan oleh adanya persaingan antar individu dilengkapi dengan hak-hak setara, yang bebas berusaha mewujudkan kepentingannya dalam interaksi dengan hubugan-hubungan ekonomi. Sejak awal, *laissez faire* ditandai oleh keyakinan optimis akan kekuasaan tindakan tanpa kontrol dalam rangka memproduksi barang-barang sosial. Sebagai suatu teori pertukaran, *laissez faire* menghasilkan stabilisasi harga dalam pasar alamiah yang dapat memberikan kepuasan maksimal dari mereka yang ikut terlibat di dalamnya).

Kebijakan ekonomi yang semestinya dipilih oleh pemerintah, menurut pandangan sebagian besar pendukung *laissez faire,* adalah dengan membiarkan ekonomi sepenuhnya tidak diatur oleh siapapun, kecuali pasar bebas. Dengan demikian doktrin *laissez faire* dibawa masuk kedalam logika ekstrim anakhis. Bagi mereka berlaku logika *if that government is the best which govern least, then the government of all must be one that governs not at all* [236] (Jika pemerintah yang baik adalah yang sedikit memerintah atau mengatur, maka dapat dipastikan pemerintah yang terbaik adalah yang tidak memerintah atau mengatur sama sekali).

Sedangkan sosialisme adalah sistem ekonomi sekaligus ideologi politik. Sebagai sistem ekonomi, sosialisme merupakan lawan dari sistem ekonomi kapitalis. Sosialisme dapat dipahami sebagai *"an economic system ini which the means of production, distribution, and exchange are publicly awned and oprerated"*[237] (suatu sistem ekonomi dimana produksi, distribusi dan pertukaran barang-jasa dimiliki dan dioperasionalkan oleh publik). Karena sosialisme menganggap negara sebagai organisasi paling representatif, maka makna dimiliki dan dioperasikan oleh publik berarti kuasa kepemilikan dan operasionalisasi berada ditangan negara (pemerintah). Sebagai ideologi politik, dan dalam hubungannya dengan kontrol ekonomi, sosialisme percaya bahwa negara perlu mengembangkan perencanaan ekonomi dan pengendalian pasar.[238] Semua ditujukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi sekelompok orang atas kelompok lain, dan menjamin berlangsungnya distribusi keadilan bersama diantara anggota masyarakat.

Kaum sosialis memandang kebebasan dan persaingan terkait dengan struktur sosial secara keseluruhan. Kebebasan dan persaingan dalam suatu susunan masyarakat yang tidak adil akan mengukuhkan ketidakadilan itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa negara (pemerintah) harus megambil peran tertentu secara lebih aktif untuk melindungi mereka yang lemah dan membatasi kekuasaan mereka yang kuat. Campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi selain dapat dibenarkan secara moral dan politis juga bersifat mutlak demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama diantara anggota masyarakat.

Meskipun sosialisme memiliki banyak varian,[239] sama seperti liberalisme-kapitalisme, terdapat karakteristik yang amat khas yang mempertautkan masing-masing varian menjadi suatu *platform* dasar. Yang paling utama adalah penghisapan ekonomi dan ketidakadilan institusi dasar kapitalisme yang disebut hak milik pribadi (*private property*). Hak milik pribadi berarti *the legal ownerhip of tangible and intangible assets by private persons rather than government*[240] (kepemilikan legal atas asset yang nyata maupun tidak nyata oleh orang-seorang, bukan oleh pemerintah). Satu-satunya obab mujarab untuk menyembuhkan pederitaan massa dari penghisapan kapitalis, menurut pendukung sosialisme, adalah dengan merebut kembali seluruh cara produksi, distribusi, dan pertukaran supaya bisa dimiliki kembali oleh masyarakat dan dioperasikan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa pemerintah seharusnya yang mengambil-alih dengan

---

(*negative liberalism*) karena sering mengawali peran pemerintah dengan atau kalimat-kalimat negatif, misalnya, "pemerintah dilarang campur tangan….," "pemerintah sebaiknya tidak mengatur…," "pemerintah tidak boleh membatasi…," dan sebagainya.

[236] Posisi ini diajukan oleh tokoh pembaru dari Inggris abad ke-19 Tomas Hodgskin. Namun berbeda dengan para penyokong *laissez faire* yang dapat menerima penyimpangan dari prinsip tidak mengatur urusan ekonomi sama sekali. Adam Smith, umpamanya, percaya bahwa pemerintah tidak seharusnya membiarkan seorang warga—betatapun tidak efisiennya—menderita kelaparan. Bagaimanapun juga pemerintah mesti mengatur produksi dan konsumsi untuk memastikan pertahanan yang memadai terhadap serangan asing. Penyimpangan semacam ini, menurut Smith, dapat dibenarkan demi alasan kemanusiaan dan patriotisme, dengan kata lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan non-ekonomi; lihat Ranney, *op. cit.,* hlm. 80-81. Untuk tinjauan pemikiran, khususnya dinamika ekonomi-politik, Adam Smith yang sangat baik; lihat. A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Ekonomi Politik Adam Smith* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996).

[237] Ranney, *op. cit.,* hlm. 81.

[238] Lihat, Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional* (Jakarta: Grasindo, 1993) hlm. 145-146.

[239] Tentang varian sosialisme sebagai ideologi politik; lihat, Cord, *op.cit.,* hlm. 107-120; Carlton Clymer Rodee, *et. al., Pengantar Ilmu Politik,* terj. Zulkifli Hamid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) terutama Bab. 7. Bandingkan dengan Ebenstein dan Fogelman, *op. cit.,* terutama bagian pertama.

[240] Ranney, *op. cit.,* hlm. 81.

cara membeli atau menyita. Pengendali ekonomi tertinggi ini semestinya mendistribusikan barang-barang ekonomi kepada individu warga masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai manusia, bukan karena produktivitas ekonomi mereka.[241]

Liberalisme modern bertolak dari kritik terhadap liberalisme klasik Adam Smith dan gagasannya mengenai ekonomi pasar. Ekonomi pasar menjelang abad ke-19 terbukti tidak mampu mengatur pasar sebagaimana ditegaskan dalam tesis "*invisible hand"* Adam Smith. Persaingan ternyata berlangsung tidak sempurna dan "tangan-tangan tidak kelihatan" tidak juga menunjukkan kinerja yang cemerlang. Pelaku usaha cenderung memanipulasi pasar, suatu masalah yang sudah sejak dini diperingatkan oleh Adam Smith. Terdapat kecenderungan pasar yang semakin besar bagi sekelompok tertentu dan semakin kecil bagi kelompok lain, yaitu monopoli. Sistem ini menimbulkan depresi ekonomi dan melahirkan massa kelas bawah yang terbenam dalam lembah kemiskinan amat menyengsarakan. Pendek kata, masyarakat *laissez faire* mempunyai lebih banyak sisi negatif.[242]

Oleh karena fakta semacam itu, sekelompok pemikir mulai mempertanyakan liberalisme klasik yang dianggap terlalu menekankan pengertian "*freedom from*" (bebas dari) campur tangan pemerintah dalam urusan-urusan ekonomi. Kecenderungan ini kelas disebut sebagai "*negative freedom*" (kebebasan yang bersifat negatif). Masalahnya, penekanan pada kebebasan bersifat negatif ini justru "memakan" kebebasan itu sendiri.[243] Yang diperlukan disini adalah menekankan "*freedom to*" (bebas untuk), dalam kaitan dengan peran pemerintah diseluruh bidang kehidupan ekonomi. Pengertian "*freedom to*" kemudian dikenal sebagai "*freedom positive"* (kebebasan yang bersifat positif) yang mendorong pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memberikan jaminan kebebasan hidup bagi semua orang disetiap lapisan masyarakat. Ideologi yang dicetuskan oleh Thomas Hill Green pada tahun 1880-an itu kemudian dikenal sebagai liberalisme modern.

Liberalisme klasik mendesak pemerintah keluar dari pasar, sedangkan liberalisme modern memasukkannya kembali dengan dalih untuk melindungi orang dari sistem ekonomi yang kadang-kadang tidak adil. Liberalisme modern mempromosikan tentang hukum dan upah kerja, hak berserikat dan berorganisasi, asuransi pengangguran dan kesehatan, serta meningkatkan kesempatan pendidikan bagi semua orang. Untuk melaksanakan semua itu, kaum liberal modern mendorong pemberlakuan pajak lebih besar terhadap orang-orang kaya. Liberalisme semacam ini dikembangkan oleh Woodrow Wilson dan Franklin D. Roosevelt di Amerika Serikat pada abad ke-20. Tujuan dasar yang hendak dicapai adalah masyarakat yang bebas (*a free society*).[244]

Menurut Roseevelt, dan kolega-kolega *New Deal*-nya, [245] liberalisme sejati harus menjadi "liberalisme yang positif." Mereka menyatakan bahwa jaminan kebebasan yang diberikan kepada rakyat untuk berbicara dan memeluk agama tidak akan berarti jika rakyat sendiri tidak mampu memberi makan

---

[241] Pengambil-alihan alat-alat produksi oleh kaum sosialis dari kaum kapitalis dilakukan lewat revolusi. Kelas pekerja bahu-membahu mengorganisasikan gerakan berskala massif, dengan atau tanpa kekerasan, untuk membutuhkan kekuasaan politik rezim kaum kapitalis dengan menguasai alat-alat produksi yang ada. Seperti tanah, pabrik dan lain-lain. Dalam perkembangan kemudian, revolusi sebagai metode perubahan struktural masyarakat tidak menjadi satu-satunya cara. Kelompok lain yang sering disebut sebagai kaum revisionis percaya dengan perjuangan demokratis sebagai metode perlawanan terhadap kapitalis, misalnya, merebut kekuasaan melalui pemilihan umum bagi partai-partai sosialis. Metode gerakan merupakan tema pokok yang menjadi akar perpecahan kaum sosialis, yang pada gilirannya menumbuhkan berbagai varian sosialisme. Varian utamanya adalah komunisme (sosialisme ilmiah) yang percaya dengan revolusi kekerasan sebagai cara untuk merebut alat-alat produksi dan menghancurkan kapitalisme, serta mempertahankannya dengan model pemerintahan diktatur proletariat. Varian lain adalah sosialime itu sendiri (sering disebut sosialisme demokratis) yang percaya dengan cara-cara demokratis dan damai. Mereka berusaha menempatkan pemilu dan selanjutnya mengintrol pemerintahan demokratis serta berkehendak mengadopsi secara damai dan memperkuat kebijakan-kebijakan sosialistis. Sosialisme ilmiah (*scientific socialism)* dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dan Vladimir Illich Ulyanov Lenin, sementara sosialisme demokratis dikembangkan oleh Eduard Bernstein, seorang Marxis Revisionis dari Jerman.

[242] Cord, *op. cit.,* hlm. 105.

[243] Hubungan ekonomi liberalisme klasik berdasarkan kontrak diantara beberapa pihak tanpa pengawasan pemerintah. Pertanyaan dasarnya: "Jika anda tidak menyukai perjanjian kontrak, lepaskan saja, tidak usah diambil." Namun bagaimana jika tawar-menawar diantara dua pihak tidak seimbang, misalnya, antara majikan kaya dengan pencari kerja yang miskin. Apakah yang terakhir ini mempunyai pilihan bebas untuk menerima atau menolak pekerjaan dengan upah yang sangat rendah? Kaum liberal klasik mengatakan: "Biarkan saja, upah akan menentukan tempatnya sendiri." Namun bagaimana jika tingkat upah berada dibawah kebutuhan hidup minimal? Saat itulah, menurut Thomas Hill Green, pemerintah harus masuk. Dalam kasus ini tidak akan ada pertanyaan tentang pemerintah yang menyalahi kebebasan, karena pemerintah justru sedang melindunginya.; lihat, Cord, *op. cit.,* hlm. 106.

[244] *Ibid.*

[245] *New Deal* merupakan program sosial-ekonomi yang diajukan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roseevelt. Program ini dimaksudkan untuk mengatasi soal pengangguran, menghidupkan kembali kehidupan usaha dan pertanian, membantu mereka yang terancam kehilangan ladang dan tempat tinggal, membenahi perbankan nasional, serta memberi jaminan sosial dan menghapus buruh anak. Gagasan dasar *New Deal* adalah pemerintah harus campur tangan lewat proses demokratik dalam memecahkan masalah sosial-ekonomi; pemerintah harus menopang dan memikul tanggungjawab dalam membantu korban-korban tidak berdosa akibat depresi ekonomi; sektor pertanian berhak dilakukan sama dengan sektor industri; pekerja berhak melakukan tawar-menawar kolektif; perekonomian harus membuka lapangan kerja secara penuh dan menjamin setiap orang memiliki standar hidup minimal; semangat sosial kerja sosial antar kelompok dapat dan harus menggantikan falsafah kompetisi yang kejam; kecenderungan sentrifugal individualisme yang berlebihan harus diimbangi oleh pengertian lebih luas akan tanggungjawab individu dan kelompok dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan; semua masalah harus ditangani dalam kerangka demokrasi; lembaga dan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dan harus diperbaharui dan dipermodern untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul; pelaksana pemerintah Amerika Serikat harus memperhatikan penambahan kekuasaan federal, penggunaan para ahli secara luas, dan penyerahan kekuasaan legislatif yang tidak benar serta pengadilan sesat kepada agen-agen pemerintah; lihat, Krisna, *op. cit.*, hlm. 110.

anggota keluarganya, mendapatkan pendidikan yang layak, dan memperoleh jaminan kesehatan yang memadai.[246]

> *"True liberalism not only must prevent government from interfering with, people's basic liberties but also must require government to act positively to protect people agains life's worst economic and physical hardships so they can be free to enjoy their intellectual liberties."* (Liberalisme sejati bukan semata menjaga agar pemerintah tidak menyalahkan kebebasan dasar rakyat dari penderitaan fisik dan ekonomi, sehigga mereka dapat bebas bertindak secara positif melindungi rakyat dari penderitaan fisik dan ekonomi sehingga mereka dapat bebas menikmati kebebasan intelektualnya).

Kelompok *New Deal* berpendapat bahwa proteksi semacam itu harus dijamin sepenuhnya oleh negara. Jika pada era liberalisme klasik negara tidak dapat berbuat apa-apa dan memang dilarang melakukan apa-apa, maka mereka diarahkan menuju negara kesejahteraan (*welfare state*), sebuah sistem dimana pemerintah menjamin prasyarat kehidupan minimun warganya secara layak.[247] Prasyarat minimum ini meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Itu merupakan keadilan dasar yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap warga. Meskipun berbeda dalam standar persyaratan minimum, kaum liberal modern pada umumnya menerima premis pertanggungjwaban sosial-ekonomi negara.

Dalam urusan non-ekonomi, kaum liberal modern mengembangkan tradisi kebebasan individu dan pilihan bebas. Mereka menjaga intervensi pemerintah dibidang moral, agama dan intelektual. Campur tangan pemerintah dibidang-bidang tersebut harus seminimal mungkin. Misalnya, pemerintah memisahkan secara tegas fungsi gereja dan negara. Dengan demikian dapat dikatakan liberalisme modern condong menaruh campur tangan minimum pemerintah dibidang moral, agama dan intelektual.

Konservatisme pada dasarnya berurusan dengan pelestarian nilai-nilai dan institusi tradisional. Mereka sesungguhnya sedang berhadapan dengan berbagai perubahan radikal yang didorong oleh kaum liberal klasik abad ke-19. kaum konservatif berkeyakinan bahwa masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana adanya. Namun yang berkuasa disini adalah kaum bangsawan, bukan kelompok-kelompok bisnis yang baru muncul. Majikan wajib menjamin kehidupan sosial buruh-buruh pabrik dan kaum tani, serta memastikan kehidupan moral dipandu oleh nilai-nilai tradisi dan agama. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang hidup berdasarkan tradisi kemasyarakatan dan keagamaan. Mereka harus bisa memahami posisi dan peran masing-masing dalam hierarki sosial. Setiap Individu diasumsikan memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta berhak menikmati keuntungan yang diperoleh masyarakat.

Kaum konservatif Amerika Serikat banyak mengikuti gagasan yang dikemukakan oleh Milton Friedman. Ekonom peraih nobel ini pernah mengutarakan bahwa pasar bebas masih tetap merupakan jalan terbaik, dan doktrin Adam Smith adalah benar ketika dia menyatakan bahwa "dimanapun pemerintah melakukan campur tangan, dia mengacaukan banyak hal."[248] Dia mengatakan bahwa pilihan individual akan memberikan eksistensi moral yang lebih ketimbang dipilihkan oleh pemerintah.[249] Milton Friedman, dan Friedrich von Hayek, juga mengemukakan bahwa pemerintah seharusnya mengatur usaha swasta seminimal mungkin atau tidak sama sekali. Pemerintah harus menegaskan aturan-aturan dasar persaingan bebas dengan memperkuat kontrak dan melindungi hak milik pribadi. Pemerintah seyogyanya tidak membatasi keuntungan si pemenang dan mengatasi kerugian si kalah. Pengusaha yang kreatif, menurut pandangan kaum konservatif modern, akan berkembang seiring dengan tumbuhnya pasar serta produk-produk baru yang menarik dan bisa mencetak uang.

Mereka berharap setiap pengusaha diperbolehkan berusaha secara bebas sehingga dapat mengembangkan bisnis lama mereka dan membangun bisnis baru. Hal-hal tersebut pada gilirannya akan membuka dan menciptakan lapangan kerja baru serta kemakmuran bagi banyak orang. Jika para pengusaha dihambat oleh peraturan-peraturan pemerintah dan dibebani pajak tinggi, kaum konservatif modern percaya bahwa investasi akan berkurang drastis, produk menurun, dan lapangan kerja tertutup. Mereka bersikukuh untuk mengeluarkan pemerintah dari segala urusan yang membebani pelaku bisnis.[250] Dengan kata lain konservatisme modern cenderung memilih intervensi pemerintah seminimal mungkin

---

[246] Ranney, *op. cit.,* hlm. 88

[247] *Ibid.*

[248] Perekonomian merupakan unsur pembeda utama antara konservatisme klasik dengan konservatisme modern. Konservatisme klasik tidak berbicara sama sekali tentang peran pemerintah dibidang ekonomi, sedangkan konservatisme modern membahasnya panjang lebar dengan merujuk liberalisme klasik Adam Smith; Cord, *op. cit.,* hlm. 104-107. Bandingkan dengan Ranney, *op. cit.,* hlm. 89-91.

[249] Cord, *op. cit.,* hlm. 106

[250] Ranney, *op. cit.* hlm. 90. Margareth Thatcher dan Ronald Reagan merupakan representasi konservatisme modern yang paling kuat dan dianggap menandai kebangkitan liberalisme klasik pada tahun 1980-an. Hasilnya ternyata campur aduk. Inflasi menurun, tapi pengangguran meningkat. Anggaran negara mengalami defisit. Baik Inggris maupun Amerika Serikat akhirnya resesi ekonomi serius awal tahun 1980-an karena kebijakan-kebijakan yang bertumpu pada konservatisme modern atau liberalisme klasik; lihat, Cord, *op. cit.,* hlm. 106-107.

dibidang ekonomi dan mempertimbangkan campur tangan pemerintah di bidang-bidang moral, agama, dan intelektual.

Tabel 1. Asumsi Dasar Ideologi Kontrol Ekonomi dan Non-Ekonomi

Ideologi	Kontrol Pemerintah	
	Bidang Ekonomi	**Bidang Non-Ekonomi**
Laissez Faire	Pada dasarnya tidak diperlukan; atau intervensi minimum	Pada dasarnya tidak diperlukan; atau intervensi minimum
Sosialisme	Pada dasarnya diperlukan (sentralisasi)	Pada dasarnya diperlukan
Liberalisme Modern	Pada dasarnya diperlukan (menjamin kehidupan dasar)	Pada dasarnya tidak diperlukan; atau intervensi minimum
Konservatisme Modern	Pada dasarnya tidak diperlukan; atau intervensi minimum	Pada dasarnya diperlukan

Kita bisa melihat dan menelaah asumsi dasar ideologi dan kontrol ekonomi dalam tabel 1. jika privatisasi kita beri makna sebagai "cara mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta"[251] yang hakikatnya berkaitan erat dengan pengalihan kepemilikan Badan-badan Usaha Milik Negara, *contracting-out,* sekaligus pemberlakukan deregulasi, debirokrastisasi, dan lain-lain, maka posisinya akan terlihat jelas seperti tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Privatisasi dalam Konfigurasi Ideologi Kontrol Ekonomi

Ideologi	Privatisasi	Orientasi ke Pasar	Orientasi ke Negara
Laissez Faire	Ya	Total	Tidak ada
Sosialisme	Tidak	Tidak ada	Total
Liberalisme Modern	Ya	Semi-total	Semi-total
Konservatisme Modern	Ya	Total	Tidak ada

Privatisasi masuk dalam *mainstream* ideologi *laissez faire,* liberalisme modern dan konservatisme modern. Wacana mengenai kekuasaan pemerintah dalam urusan perekonomian dari ideologi *laissez faire* dan konservatisme modern dapat dikatakan sama. Kedua ideologi ini percaya dengan intervensi pemerintah harus seminimal mungkin atau bahkan tidak sama sekali. Perbedaan diantara keduanya terletak pada pandangan masing-masing terhadap campur tangan pemerintah dibidang-bidang non-ekonomi, seperti soal moral, agama dan intelektual. Pendukung *laissez faire* pada pokoknya menolak segala campur tangan pemerintah baik dibidang ekonomi maupun dibidang non-ekonomi. Penolakan tersebut hanya berlangsung didalam ranah ekonomi, tidak dalam ranah non-ekonomi. Pendukung gigih konservatisme modern jelas masih menerima campir tangan pemerintah dibidang-bidang non-ekonomi.

Posisi sebaliknya diambil oleh liberalisme modern. Ideologi ini cenderung mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa hal positif, dengan melindungi kebebasan warganya sekaligus menjamin kondisi hidup minimal bagi setiap warga. Tujuan utama liberalisme modern adalah mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka dan negara kesejahteraan, dimana setiap warga negara bisa memperoleh jaminan hidup yang layak. Pada titik tertentu varian dari sosisalisme yang biasa disebut "sosialisme demokratis" (kiri tengah) hampir sama dengan gagasan liberalisme modern, khususnya dalam kebijakan sosial-ekonomi yang dijalankan.[252] Privatisasi yang membawa berbagai implikasi berbeda dapat dikatakan ideologi *laissez faire*, liberalisme modern dan konservatisme modern. Semuanya tergantung pada tujuan, strategi, metode, dan operasionalisasi program privatisasi. Privatisasi yang menempatkan negara (pemerintah) sebagai "penjaga malam" tentu saja lebih dekat dengan ideologi *laissez faire* dan konservatisme modern. Sedangkan privatisasi yang mengarahkan negara (pemerintah) sebagai fasilitator dan regulator dalam kehidupan perekonomian dan bisnis lebih dekat dengan gagasan liberalisme modern.

Privatisasi sebagai Aktifitas Ekonomi Kapitalis

Analisis Privatisasi BUMN di Indonesia[253] yang ditulis oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto[254] adalah sebuah analisa tajam untuk mengurai bagaimana pengaruh neoliberalisme terhadap kebijakan privatisasi di Indonesia. Di antara berbagai istilah yang paling kontemporer dan paling global selama 20 tahun terakhir dan terus menjadi ikon peradaban sampai dua puluh tahun ke depan adalah privatisasi. Menurut Joseph

[251] J. A. Kay dan D. J. Thomson,"Privatization: A Policy individu Search of a Rationale," dalam *Economic Journal,* No. 96, Tahun 1986, hlm. 1838.

[252] Lihat, Anthony Giddens, *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial* (Jakarta: Gramedia: 2000).

[253] Tulisan ini pernah dipresentasikan pada diskusi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Jakarta, 17 Februari 2003

[254] Riant Nugroho Dwidjowijoto adalah konsultan manajemen strategis pada organisasi publik dan bisnis. Pernah menjadi anggota Tim Restrukturisasi BUMN Gelombang I (1998) dan Tim Restrukturisasi Gelombang II (1999). Ia adalah alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi dan Program MAP FISIPOL UGM Yogyakarta.

Stiglitz, mantan Presiden Bank Dunia, privatisasi adalah lawan dari nasionalisasi. Dalam Economics of Public Sector (1988) ia menyampaikan bahwa proses konversi perusahaan swasta (private enterprise) menjadi perusahaan negara (public enterprise) disebut nasionalisasi, sementara proses pengkonversian perusahaan negara menjadi perusahaan swasta disebut sebagai privatisasi. Logika ini berangkat dari asumsi dikotomis antara aliran ekonomi sosialis dan aliran ekonomi kapitalis.

Ekonomi kapitalis merupakan sebuah sistem ekonomi yang menempatkan pelaku-pelaku ekonominya adalah masyarakat (dalam konteks Amerika disebut sebagai "*private*" yang diindonesiakan sebagai "swasta"). Inti dari kesinambungan aktivitas ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar. Sebuah dalil yang dimulai sejak jaman Adam Smith menulis *The Wealth of Nations* di tahun 1776. Ekonomi sosialis diinspirasikan oleh pemikiran-pemikiran Karl Marx (1818-1883) yang mengambil asumsi bahwa kapitalisme hanyalah sebuah fase transisi menuju komunisme. Ekonomi sosialis justru lahir dari interpretasi Lenin dan Stalin di Rusia terhadap pemikiran Marx. Eksploitasi individu oleh individu lain di dalam sistem kapitalisme "diselesaikan" dengan cara negara mengambil alih seluruh alat produksi dan seluruh pelaku usaha adalah negara. Sejak dunia terbelah dua, Blok Barat dan Blok Timur, terjadi pula pemilahan antara negara-negara yang menganut ekonomi kapitalis dan negara-negara yang menganut ekonomi sosialis. Pemilahan gampangnya adalah Blok Barat (AS dan sekutunya) kapitalis, dan Blok Timur (Soviet dan sekutunya) sosialis.

Privatisasi pertama-tama bermakna sebuah transformasi yang lebih sempurna ke arah ekonomi kapitalis. David Clutterbuck dalam *Going Private: Privatisation Around the World* (1991) menegaskan bahwa gagasan privatisasi berawal dari semakin pudarnya keyakinan di dalam pemikiran ekonomi sosialis bahwa pengelolaan ekonomi oleh negara akan menciptakan kesejahteraan. Pada prakteknya tidak ada satu negara Barat pun yang murni melalukan ekonomi kapitalis. Salah satu kenyataannya adalah terdapatnya perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikelola negara, termasuk di negara kapitalis paling tua, Inggris, yaitu British Aerospace, British Telecom, British Airways, dan beberapa lain. Privatisasi dapat dikatakan gerakan "pemurnian" terhadap kapitalisme. Pada tahun 1980an, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Margareth Thatcher, Inggris melakukan privatisasi dari seluruh BUMNnya. Cristopher Johnson dalam *The Grand Experiment: Mrs. Thatcher's Economy and How It Spread* (1991) melukiskan betapa gerakan "pemurnian" kapitalisme oleh Thatcher menjadi sebuah gerakan global. Gerakan ini semakin mendapatkan kekuatannya dengan runtuhnya seluruh sistem politik sosialis yang dimulai dari Polandia, jatuhnya Tembok Berlin, disusul oleh hancurnya konfederasi Uni Soviet yang disusul oleh runtuhnya seluruh aliansi Blok Timur. Hanya Korea Utara dan Kuba yang masih setia dengan sosialismenya, sementara Cina lebih menggunakan sosialisme sebagai "alat", karena di dalamnya adalah kapitalisme –seperti slogan pragmatisme pemimpin Cina Deng Xiao Ping *tidak peduli kucing merah atau kucing putih yang penting bisa menangkap tikus*.

Kemenangan kapitalisme atas sosialisme dicatat oleh Francis Fukuyama dalam *The End of History and the Last Man* (1992) sebagai akhir dari peradaban manusia dari pergulatan antara peradaban kapitalisme dan sosialisme, dan peradaban kapitalisme yang terbukti lebih baik karena ia menjadi pemenangnya. Seperti dilukiskan oleh Lesther Thurow dalam *The Future of Capitalism* (1996) bahwa hari ini yang terjadi bukanlah persaingan antara ekonomi kapitalis dengan ekonomi sosialis, melainkan kapitalis ala Amerika bersaing dengan kapitalis ala Cina, kapitalisnya Jepang, kapitalisme Eropa, dan seterusnya. Filsuf modern Amerika, Robert Heilbrowner, dalam *Vison of the Future* (1995) dengan tegas mengatakan bahwa *it is likely that capitalism will be the principal form of socio economic organization during the twenty first century, at least for the advanced nations, because no blueprint exist for viable successor*. Kapitalisme akan menjadi ideologi peradaban abad 21 dan bahkan ke depan, karena belum ada konsep pengganti yang lebih baik dan lebih menarik. Heilbrowner mengemukakan bahwa kapitalisme akan terus bertahan dalam waktu yang lama karena melandaskan kepada mekanisme pasar yang merupakan hukum paling alami–*survival for the fittest* bukan? Seperti yang diperkenalkan oleh Charles Darwin. *Kedua*, kapitalisme memberi ruang yang lebih besar kepada "perubahan" dibanding ideologi lain. Padahal jaman ini ke depan adalah jaman yang dihela oleh perubahan yang cepat dan dalam kolosal. *The very essence of a capitalist order is change,* kata Heilbrowner. Jadilah privatisasi sebagai bagian dari penyebaran proses "pemurnian kapitalisme" ke seluruh dunia. Suka tidak suka, siap tidak siap, setiap negara harus menerima globalisasi. Globalisasi tidak lain adalah persebaran kapitalisme yang semakin murni.

Alasan kedua privatisasi adalah karena pudarnya keyakinan terhadap teori negara kesejahteraan seperti yang diperkenalkan oleh John Maynard Keyness (1883-1987), penyelamat malaise ekonomi AS di tahun 1930-an dan arsitek Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Menyerahkan pengelolaan sebagian kegiatan ekonomi, apalagi yang strategis, kepada negara adalah sia-sia. P.J. O'Rourke, pemikir libertarian AS mengatakan *giving money and power to government is like giving whiskey and car keys to teenage boys*". Privatisasi seluruh kegiatan ekonomi adalah jawaban untuk meningkatkan jaminan kesejahteraan masyarakat, karena dengan demikian mereka akan menjadi lembaga yang harus bersaing (versus monopoli). Privatisasi berjalan seiring dengan bangkitnya kembali filsafat *Libertarianisme*. Sebuah survey dilakukan di AS dengan pertanyaan: mana yang lebih Anda suka? "Pemerintah kecil dengan jumlah pelayanan yang (juga) sedikit, atau Pemerintah yang besar dengan jumlah pelayanan yang banyak?" Pada tahun 1984 pemilih alternatif pertama –pemerintah kecil dengan jumlah layanan sedkit—hanya 49%. Pada

tahun 1998 jumlah pemilih alternatif pertama menjadi 68%. Masyarakat AS menghendaki agar sebagian besar urusannya diurus sendiri, dengan akibat sejumlah "pekerjaan" yang dikerjakan "negara" *harus* diswastakan.

Thomas Friedman dalam *The Lexus and The Olive Three: Understanding Globalization* (2000) mengatakan bahwa bangsa yang paling cocok untuk tatanan global hanyalah Amerika (Serikat), jadi tidak aneh jika globalisasi identik dengan Amerikanisasi. Libertarianisme Baru dari Amerika pun menjadi gaya hidup yang mengglobal. Dengan tajam David Boaz mengatakan *Why is there libertarian revival now? The main reason is that the alternatives to libertarianism –fascism, communism, socialism, the welfare state— have all been tried in the twentieth century and have all failed to produce peace, prosperity and freedom* (*Libertarianisme, A Primer,* 1997). Jadi, fasisme, komunisme, sosialisme, dan negara kesejahteraan telah terbukti gagal. Pilihan satu-satunya *tinggal* libertarianisme yang sekandung dengan kapitalisme. Privatisasi adalah *anak* libertarianisme dan kapitalisme.

Alasan ketiga adalah alasan yang mengatakan bahwa pemerintah harus fokus kepada pekerjaan-pekerjaan pemerintahan saja, tidak usah mengurus hal-hal yang yang bukan *core competence*nya (Peter Drucker, 1986) atau agar pemerintah harusnya hanya *streeing* saja, dan tidak usah ikut *rowing* (Osborne dan Ted Gaebler dalam*Reinventing Government*, 1992; Gaebler dan Plastrik, 1996), atau bahwa tugas pemerintah *cuma* mengendalikan, tidak usaha ikut mendayung. Dengan demikian hal-hal yang di luar kompetensi pemerintah atau yang tidak dalam konteks "menyetir" (saja) harus dikeluarkan dari pemerintahan. Pemerintah menjalankan bisnis adalah *anomali.* Hasilnya, perusahaan-perusahaan negara tersebut pastilah lebih banyak memberikan *modharot* daripada manfaat.

Masalah Ekonomi Makro[255]

Tujuan ekonomi makro masih tetap berkisar pada output yang tinggi dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, tingkat kesempatan kerja yang tinggi atau tingkat pengguran suka rela yang rendah , stabilitas harga berlandaskan pasar bebas, keseimbangan neraca perdagangan yang disertai dengan tingkat kurs yang relatif stabil.

Permasalahan ekonomi makro secara tradisional tetap menggunakan kebijakan :

a. Kebijakan fiskal yaitu pengeluaran dan pajak ,
b. Kebijaksanaan moneter yaitu melalui pengontrolan jumlah uang yang beredar untuk mempengaruhi tingkat bunga,
c. Kebijakan perdagangan luar negri dan
d. Kebijakan pendapatan *(income policies)*

Walaupun tujuan dan instrumen-instrumen makro dengan adanya isu-isu atau maslah-masalah baru , mempunyai implikasi terhadap perkembangan ekonomi makro. Dalam situasi ekonomi yang dangat dipengaruhi oleh pihak luar, IMF , bukan berarti kita tidak memepunyai kedaulatan untuk mengurus ekonomi nasional, tatapi kita telah melakukan sesuatu untuk memulihkan krisis yang berkepanjangan. Seperti kita ketahui bahwa krisis moneter di Indondesia banyak disebabkan struktur ekonomi secara makro yang tidak kuat, serta aspek politik pada masa lalu.

Mengamati kondisi dan karakteristik yang ada di Indonesia serta melihat pengalaman beberapa negara, maka ilmu ekonomi makro tahun duaribuan dilandasi paradigma-paradigma sebagai berikut :

1. Teori pertumbuhan menjadi bagian integral dari ekonomi makro. Hal ini berkaitan dengan permasalahan produktifitas, dampak jangka panjang dari kebijaksanaan moneter dan fiskal di dalam mengurangi *GNP gap*.
2. Menuju kepada sintesa ekonomi mikro dan ekonomi makro . Hal ini berkaitan dengan masalah produktivitas, *output, employment* dan inflasi, yang dapat dengan jelas diterangkan melalui analisis *aggregate demand* dan *aggregate supply*.
3. Menuju kepada sintesa moneter. Kebijakan moneter telah digunakan bersama-sama dengan kebijakan fiskal untuk mengurangi *GNP gap*.
4. Menuju kepada internasionalisasi makro ekonomi. Ditandai dengan semakin dimasukannya ekonomi internasional kedalam ekonomi makro

Sedangkan masalah ekonomi nasional saat ini , dari hasil berbagai diskusi dengan data yang ada, maka secara ekonomi makro , adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan masyarakat
b. Perekonomia yang merosot drastis (*growing pain*)
c. Pemulihan ekonomi yang tidak lagi dapat disusun dalam kacamata ekonomi , semata, tetapi juga solusi ekonomi harus dengan akar politik.
d. Ekonomi akan pulih jika politik mantap (*settled*)
e. Tidak adanya prestasi dan solusi dari pemerintah yang sekarang

[255] **Nanang Sasongko**, Akuntan, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), kandidat Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi- Akuntansi pada Universitas Padjadjaran Bandung.

Dari masalah-masalah tersebut telah dilakukan program-program kegiatan untuk mengatasinya dengan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Meringankan kesulitan hidup yang dirasakan masyarakat dalam jangka pendek
2. Mengupayakan penghimpunan bantuan asing sebanyak mungkin
3. Menghidupkan kembali sistem finansial yang diinjeksikan kedalam sistem

Langkah-langkah yang ditempuh dari permasalahan setiap sektor sebagai berikut:

a. Mengatasi masalah yang dihadapi sektor perbankan yaitu : Negatif kapital, dibutuhkan rekapitalisasi , berarti membutuhkan investor baru, terutama investor asing
b. Hutang swasta , melalui INDRA (*Indonesia debt structuring agency)*, dan Prakarsa Jakarta (*Jakarta initiative taskforce*)
c. Rasionalisasi subsidi, dengan membatasi subsisdi hanya untuk beras.
d. Mewaspadai inflasi
e. Mendorong ekspor. Problema ekspor Indonesia, sejak 1993 penekanan investasi pada industri yang berorientasi dalam negri dari pada ekspor

Pinjaman yang diberikan CGI dan IMF hanya merupakan *life vest* (pelampung) dalam guncangan ekonomi, untuk pertanyaan-pertanyaan menyangkut masalah ekonomi dan politik harus ditanganai secara paralel

Masalah Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro, pandangan dari pelaku ekonomi di masyatakat (*worm eye*), melalui aktivitas produsen, konsumen dan tentu saja intervensi pemerintah, sedangkan makro ekonomi (*bird eye*), yang dibicarakan adalah masalah uang, pasar, barang dan perdagangan luar negri.

Menghadapi realita dimasyarakat, saat ini tuntutan pengembangan diarahkan kepada masalah bisnis yang sedang berlangsung yaitu : Globalisasi ekonomi, Teknologi informasi, *Quality management*, dan *Organization systems*, menyebabkan kebijakan perusahaan dituntut mengarah kepada hal-hal sebagai berikut :

a. Lebih profesional dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya manusia ,
b. Ber ‘visi dan misi’ yang jelas serta diarahkan untuk efektifitas dan efisiensi operasi diantaranya dengan cara *outsourcing*.

Hal ini akan mendorong timbulnya *Business process reengineering*,; suatu perubahan konsep yang drastis terhadap proses bisnis, *Total quality management,;* mengutamakan kualitas dari hasil pekerjaan secara menyeluruh, *Agile competition;* berkonpetisi secara mantap*, Virtual Corporation* ; perusahaan dengan kendali ‘*virtual’ ,*dan penggunaan *internet* untuk kegiatan strategis.

Gambaran Buruk Perusahaan Negara

Penelitian Bank Dunia menemukan empat hal yang memberikan gambaran buruk perusahaan negara. *Pertama*, BUMN, khususnya di negara berkembang, menyerap amat banyak sumberdaya finansial yang seharusnya bisa dialokasikan ke layanan-layanan sosial yang penting. *Kedua*, BUMN kebanyakan memperoleh kredit secara tidak proporsional dibanding yang diperoleh swasta karena kedekatan politiknya. *Ketiga*, pabrik-pabrik milik BUMN lebih polutif dibanding pabrik-pabrik milik swasta. *Keempat*, pembenahan BUMN, termasuk privatisasi, ternyata memberikan kontribusi fiskal yang positif bagi negara. (*Bureaucrats in Business: A World Bank Policy Research Report*, 1995). Pada intinya, tidak mungkin birokrat menjalankan bisnis dengan baik. *Bureaucrats typically perform poorly in business, not because they are incompetent, but because they face contradictory goals and perverse inventives that can distract and discourage even very and dedicated public servants.* Jadi, karena birokrat punya misi melayani secara adil, dengan kompetensi melayani secara adil, mana mungkin ia menjalankan bisnis yang *dari sono*nya sudah diskriminatif: melayani mereka yang mampu membayar saja.

BUMN sesungguhnya adalah *beban* dari pemerintah dan masyarakat daripada sebuah *kebaikan*. BUMN biasanya memang memegang bisnis yang monopolis. Monopoli biasanya dekat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Monopoli berada dalam posisi yang berjauhan dengan *transparansi* dan *akuntabilitas*, dua syarat terpokok dalam praktek *good corporate governance*. Dari ketiga asumsi tersebut, muaranya adalah *privatization is a must*. Itu juga yang dinasihatkan oleh Bank Dunia dan IMF kepada Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi. Bahkan dalam pertemuan dengan pejabat IMF di Jakarta tahun 2001 bahwa sebaiknya pemerintah merestrukturisasi dulu BUMN baru memprivatisasi, atau langsung memprivatisasi. Pertanyaannya adalah apakah memang sesungguhnya demikian adanya sehingga privatisasi menjadi harga mati? Termasuk *fast track privatization*?

Asumsi Dasar Privatisasi

Ketiga asumsi privatisasi di atas adalah *benar*. Ekonomi sosialisme tidak mungkin bertahan di dalam era kelangkaan ekonomi yang semakin meningkat seperti hari ini dan semakin meningkat di masa depan. Ekonomi adalah tentang hukum kelangkaan. Kelangkaan berkenaan dengan kompetisi. Hanya sistem kapitalisme yang memberi ruang kepada kompetisi.

Asumsi kedua, memang paradigma *welfare state* sudah tidak kontekstual lagi. Di dunia hanya beberapa gelintir negara saja yang masih mempertahankan *welfare state* seperti Inggris, Belanda, dan negara-negara di jasirah Skandinavia. Resikonya adalah tingginya pajak. Pajak yang tinggi dijauhi investor. Perginya investor berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya mempengaruhi kesejahteraan itu sendiri. Indonesia pun sudah mulai menjauhi konsep *welfare state* dengan mulai dihilangkannya subsidi kepada rakyat yang kurang mampu, seperti subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk (baru dikembalikan tahun ini setelah dihapus di tahun 1998), pembebasan bea masuk impor beras dan gula –komoditi dari petani. Konsep pemberdayaan adalah konsep memampukan rakyat membangun diri sendiri agar *tidak merepotkan negara*, sebab mereka yang mandiri bisa *disapih*, bukan? Dengan sumberdaya yang terbatas, gagasan *welfare state* menjadi utopia.

Untuk Indonesia, perubahan dari *welfare state* ke *non-welfare state* juga dikarenakan pemerintah tidak punya cukup dana untuk membiayai paradigma *welfare state* –berbeda dengan jaman *oil boom*. Sementara, menaikkan pajak sulit dilakukan karena selain infrastruktur dan *software* pengumpulan pajak belum memadai, di jaman sulit ini menggalakkan pajak adalah kegiatan yang paling tidak populer. Politisi paling tidak suka kebijakan yang tidak populer karena akan menyurutkan dukungan publik. Selain itu, publik pun banyak yang enggan memberikan kontribusi pajak mengingat pelayanan yang diberikan pemerintah pun tidak cukup memuaskan. Belum lagi ditambah kebiasaan *pungli* dari "oknum" (tapi jumlahnya banyak, lho) di dalam birokrasi (sekarang juga ada banyak di legislasi dan judikasi). Jadi, Indonesia meski mempunyai UUD yang *werlfare state*, untuk mempraktekkannya teramat sulit.

Asumsi ketiga, pemerintah hanya mengurusi pelayanan publik saja, dan jangan main bisnis karena itu bukan *core competence*nya, juga benar. Seperti diketahui, dalam masyarakat, terdapat tiga jenis tugas pokok (bahkan bisa disebut sebagai "misi") yang diperlukan agar masyarakat hidup, tumbuh, dan berkembang, yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan, tugas pemberdayaan. Ketiga tugas ini dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang memang dilahirkan untuk tugas-tugas tersebut. Setiap organisasi mengemban satu tugas dan kemudian menjadi misi atau *raison d'etre* atau "alasan keberadaan".

Tugas pelayanan (publik) adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun bisa menjangkaunya. Tugas ini diemban oleh negara yang dilaksanakan melalui salah satu lengannya, yaitu lengan eksekutif (pelaksana, pemerintah). Tugas pembangunan adalah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat. Tugas ini fokus kepada upaya membangun produktivitas dari masyarakat dan mengkreasikan nilai ekonomi atas produktivitas ekonomi tersebut. Tugas pembangunan menjadi misi dari organisasi ekonomi atau lembaga bisnis. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusaan dan kemasyarakatan. Tugas ini adalah tugas yang *non-for-protif.* Organisasi-organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki kompetensi pokok (*core competence*) di bidang pemberdayaan.

Pada saat Orde Baru mulai berjalan, tidak ada satu kekuatan di luar negara yang mampu menjalankan peran pembangunan dan pemberdayaan. Akhirnya negara/pemerintah melaksanakan ketiga peran tersebut sekaligus. Malangnya, di antara ketiga tugas tersebut, tugas yang "paling basah" adalah tugas pembangunan, karena di sana ada "proyek-proyek". Alhasil, dari ketiga misi tersebut, misi yang paling dikejar adalah misi "pembangunan." Bahkan di Indonesia pun muncul kosa kata "administrasi pembangunan." Tidak heran jika lebih banyak aparat birokrasi yang mempunyai mental "proyek" daripada mental "pelayanan publik". Administrasi pembangunan pun akhirnya difahami sebagai "administrasi proyek."

Merajalelanya korupsi juga karena birokrasi bekerja tidak pada *core comptence*nya. Demikian pula halnya dengan BUMN. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda akhirnya menjadi tempat bagi aparat pemerintah (khususnya tentara) untuk menjadi pemimpin-pemimpin usaha. Salah satu kasus yang paling spektakuler adalah korupsi di Pertamina yang melibatkan Direktur Utamanya sendiri yang kebetulan adalah seorang militer. Sementara itu, dengan menjadikan BUMN sebagai bagian dari kinerja pemerintahan, maka terjadi bias dalam penentuan ukuran kinerja. Acapkali kinerja korporasi yang baku dikalahkan oleh kedekatan politik. Seorang pimpinan BUMN yang berprestasi pun dapat dicopot sewaktu-waktu apabila "tidak loyal" kepada kekuasaan politik yang ada.

Jadi ketiga asumsi tersebut dapat dikatakan "membenarkan" privatisasi BUMN. Akan tetapi, ternyata kebenaran ketiga asumsi tersebut tidak secara absah berlaku untuk Indonesia. Ada asumsi-asumsi yang berbeda untuk Indonesia yang membuat privatisasi BUMN tidak bisa diterima begitu saja.

Pertama, Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan untuk bisa ikut memiliki BUMN apabila ada proses privatisasi. Terlebih, di dalam krisis ekonomi seperti ini, maka sebagian besar pelaku ekonomi besar terpuruk, sementara tidak ada kekuatan ekonomi menengah (*hollow middle,* meminjam istilah Fadel Muhammad), dan kekuatan ekonomi kecil adalah kekuatan yang hidup *day by day*. Privatisasi BUMN di Eropa, khususnya di Inggris, dilakukan melalui pasar modal yang sudah dewasa dan kekuatan pembeli domestik yang memadai sehingga begitu dilepas dalam rangka privatisasi, maka pembeli mayoritas adalah *domestic investor*. Privatisasi dengan demikian berjalan seiring dengan prinsip demokratisasi ekonomi, karena rakyat dapat memiliki kepemilikan perusahaan yang sebelumnya dimiliki negara. Di Indonesia, privatisasi akhirnya bermakna *asing-isasi*. Pembelinya adalah *orang asing, warga negara asing, perusahaan asing, negara asing*. Ada dua pasal. *Pertama,* karena tidak

ada daya beli yang memadai di dalam negeri. *Kedua,* karena kita pasti curiga kalau yang membeli orang kita sendiri. Penulis teringat pada tahun 1999 privatisasi PT Perkebunan Nusantara IV ditentang karena salah satu calon pembelinya adalah Kelompok Bakrie. Memang, sebagian besar pelaku ekonomi besar kita banyak yang "nakal," tetapi apakah ada jaminan 100% bahwa pemain asing "tidak nakal." Indosat, seperti disebut di atas, adalah contoh privatisasi mengundang tanda tanya karena privatisasi tersebut tidak dapat dikatakan *optimal*. Paling tidak ada lima hal penyebab penilaian kurang optimal.

a) Privatisasi ini "mengejar target" dengan demikian dilaksanakan dengan cara relatif tergesa-gesa dan mengutamakan nilai pembayaran, tidak beda dengan lelang ikan di TPI (tempat pelelangan ikan).
b) Privatisasi Indosat tidak memerlukan upaya yang luar biasa karena memang Indosat adalah *blue chip*-nya perusahaan-perusahaan *blue-chip* di BEJ.
c) Penjualan Indosat lebih menggunakan target "akunting" daripada target *maximum value* dari privatisasi, karena tidak mampu mencapai target harga yang ideal, yaitu sama dengan harga jual perdana dalam US dollar, yaitu US $ 32,02/saham atau dalam rupiah hari ini sekitar Rp 30.000 per saham. Indosat dilepas sedikit lebih tinggi dibanding harga di bursa, yaitu Rp 12.950/saham, sementara harga bursa adalah Rp 12.600/saham.
d) Terdapat kalkulasi aset yang cukup menjadi tanda tanya di Indosat. Sebelum privatisasi, Indosat mengambil alih 25% saham Deutsche Telekom di Satelindo, perusahaan operator telepon selular pertama di Indonesia, senilai US $ 325 juta. Dengan demikian total 100% nilai saham dari Satelindo adalah US $ 1,4 milyar Indosat menguasai 100% saham Satelindo. Dengan melepas 41,94% saham senilai Rp 5,62 trilyun, maka total aset Indosat adalah Rp 13 trilyun. Jika dikonversi dengan dollar dengan kurs Rp 9.000/dollar, maka total 100% saham Indosat "hanya" dinilai sekitar US $ 1,5 milyar saja. Harga tersebut selisih US $ 0,4 milyar dari 100% saham Satelindo[256].
e) STT yang mengambil alih Indosat adalah anak perusahaan dari Tamasek, BUMN milik Singapura, yang juga memilik anak perusahaan Singapore Telecom (Singtel) yang menguasai 35% saham Telkomsel, operator selular kedua di Indonesia. Jadi, secara strategis, sebenarnya Indonesia "kecolongan". *Pertama* --seperti dikemukakan oleh mantan Presiden Wahid dan Ketua MPR RI Amien Rais—bahwa Indosat mempunyai nilai strategis sebagai perusahaan terdepan dan terbesar dalam sambungan telepon internasional untuk Indonesia. Pengambil alihan ini merupakan pelepasan jaringan saraf global bagi Indonesia. BUMN telekomunikasi Australia, Telstra, hanya diprivatisasi sampai 49% saja, sementara sisanya tetap dipegang pemerintah karena arti strategisnya. *Kedua*, dengan pengambil alihan ini, praktis Singapura relatif menguasai industri dua jasa layanan telekomunikasi selular di Indonesia yaitu Satelindo dan Telkomsel yang diperkirakan menguasai sekitar 80% pangsa pasar selular Indonesia.
f) Padahal terdapat sejumlah BUMN yang lebih layak untuk diprivatisasi, khususnya karena kurang memiliki arti strategis seperti PT Perkebunan III, PT Perkebunan IV, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Tambang Batubara Bukit Asam. Memang, privatisasi pada BUMN- BUMN tersebut memerlukan usaha. Privatisasi Indosat, apalagi dengan model "lelang ikan", tidak memerlukan sebuah tim sekomprehensif seperti yang dilakukan sekarang ini.
g) transaksi privatisasi mengundang kecurigaan. Pemenang dari tender 41,94% saham Indosat adalah STT (Singapore Technologies Telemedia), namun transaksi yang terjadi adalah *bukan* antara Indosat dengan STT, melainkan antara Indosat dengan Indonesia Communication Limited (ICL). Dijelaskan bahwa adalah anak perusahaan STT. Namun, jika STT bermarkas di Singapura, maka ICL bermarkas di Mauritus, salah satu negara yang pernah dikecam oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) sebagai *negara surga* bagi perusahaan yang hendak menghindari perpajakan. Negara ini bahkan dituduh sebagai negara yang *sangat akomodatif* bagi perusahaan dunia yang tidak mengindahkan etika bisnis. Pertanyaan pertama, *who is the truly investor*? Kedua, ada apa di balik transaksi ini sehingga Singapura, sebuah negara yang terkenal terbaik kualitas *good governance* (ranking 4 dunia) dan *good corporate governance*nya (terbaik di Asia) menggunakan perusahaannya yang berada di negara yang berada dalam "daftar hitam" dalam *good governance* seperti Mauritus?[257] Belum lagi masih ada masalah dalam hal prosedur penyetoran divestasi.

---

[256] Lihat analisa *Kompas*, 16 Desember 2002, hlm. 15.

[257] Daftar hitam dari OECD termasuk Andorra, Angulla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, British Virgin Island, Cook Island, Dominika, Gibraltar, Guerney, Sark & Alderney, Isle of Man, Jersey, Liberia, Liechtenstein, Maldives, Marshall Islands, Monaco, Monserrat, Nauru, Netherlands Antilles, Niue, Panama, Samoa, Seychelles, St. Lucia, St Kitts & Nevis, St. Vincent & Grenada, Tonga, Turks & Caigos, US Virgin Islands, dan Vanuatu. OECD menyebutnya kawasan "surga" *money laundering* ini sebagai "*Non-Cooperative Offshore Centers*". Lihat, *Kompas*, 16 Januari 2003.

Tabel 1. GG, dan GCG Pengaruhnya Terhadap *Competitiveness* (Data Tahun 2001)

Negara	Indeks Good Governace*	Indeks GCG**	*World Competitivenss Rank****
Singapura	4	1	2
Hongkong	14	2	6
Jepang	21	3	26
Taiwan	27	4	18
Korsel	42	5	28
Malaysia	36	6	29
Cina	57	11	33
Thailand	61	8	38
Filipina	65	7	40
India	71	9	41
Indonesia	89	10	49

GG total ranking 91 (PERC); **GCG untuk Asia (PWC & FCGI); ***WCR total ranking 49 (WCR). Data diolah dari *Political and Economic Risk Consultany* 2001, *Pricewaterhouse Cooper 2001, World Competitiveness Report* 2002, *Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001*

Kedua, sebagian besar BUMN yang mempunyai kualitas siap jual ternyata adalah BUMN yang mempunyai makna sangat strategis bagi ketahanan nasional Indonesia. Indosat adalah *back-bone international communication* bagi Indonesia. Telkom adalah "raja"nya telekomunikasi Indonesia. Bahkan, uniknya lagi, kedua BUMN ini masih memegang posisi *monopoli*. Privatisasi tidak ada artinya jika bermakna *pemindahan monopoli ke swasta* –apalagi ke asing.

Ketiga, di saat krisis, BUMN ternyata menjadi *the only players in town*, karena konglomerat masuk *ICCU*, sementara koperasi dan usaha menengah belum bisa diharapkan perannya. Penjualan BUMN sebagai aset tunggal yang tersisa sama dengan menghabisi *national economic durability*, apalagi jika privatisasi bermakna asingisasi. BUMN seharusnya dapat didayagunakan sebagai lokomotif penarik pemulihan ekonomi. Apabila kepemilikan masih dapat dipertahankan di tangan pemerintah, maka tugas tersebut masih dapat "ditambahkan". Namun, jika sudah di tangan swasta, maka hukum yang berlaku adalah hukum ekonomi-bisnis murni. Mau memberikan beban tambahan kepada mereka pun menyalahi aturan.

Keempat, banyak pakar dan praktisi privatisasi yang tidak faham bahwa di Indonesia ada dua jenis BUMN yang pokok: yaitu BUMN yang sudah berada di dalam mekanisme pasar dan tidak di dalam mekanisme pasar atau yang sering disebut mempunyai *public service obligation* (PSO) yang tinggi. Perusahaan yang etis untuk diprivatisasi adalah BUMN yang berada di dalam mekanisme pasar, yaitu BUMN yang bergerak di properti dan konstruksi, perkebunan, pertambangan, perdagangan, keuangan dan investasi. BUMN yang mempunyai PSO yang tinggi adalah BUMN yang proses usahanya diatur oleh aturan pemerintah dalam rangka menjamin pelayanan yang bemutu dan terjangkau oleh rakyat banyak. BUMN seperti ini misalnya pupuk. Industri pupuk di Indonesia hari ini memperoleh subsidi harga gas. Jika gas alam diekspor, maka harganya berkisar US $ 3,2 per MMBTU, sementara pabrik pupuk boleh memberi antara US $ 1,3-2/MMBTU. Sementara pupuk didistribusikan dengan pola *least cost distribution*, artinya harga di Lampung, Jawa, Papua –dengan transportasi yangt berbeda—harus sama. BUMN yang sama adalah Biofarma. Indra Bastian dalam *Privatisasi di Indonesia* (2002) memasukkan Biofarma dalam daftar BUMN yang layak diprivatisasi karena sehat. Memang sehat, bagaimana tidak, selain usahanya efisien dibanding perusahaan sejenis di Asia, *market*nya tidak lain adalah Departemen Kesehatan, dan Depkes mendapatkan bantuan dana dari WHO. Biofarma adalah BUMN yang memproduksi vaksin, khususnya untuk anak-anak. Setiap tahun di Indonesia lahir bayi sebanyak 5 juta. Artinya 5 juta pasar yang dibayar oleh pemerintah. Konyol bukan, kalau mau memprivatisasi Biofarma. Apa bedanya dengan Bogasari yang memonopoli terigu. Ini bahkan lebih monopoli dan mendapatkan fasilitas penuh. Ketiga adalah PLN. Sulit dibayangkan jika PLN diserahkan kepada swasta di satu sisi, dan di sisi lain mengharapkan "kebaikan budi" PLN untuk menjaga harga yang dapat terjangkau oleh rakyat. Jadi, privatisasi tidak semudah yang dibayangkan dan dikatakan. BUMN yang mempunyai kadar PSO tinggi (lebih dari 50%) sepantasnya tidak masuk daftar privatisasi.

Kelima, studi dari Paul Ormerod yang dituliskan dalam bukunya yang menghebohkan, *The Economic of Butterfly* (1996), antara lain menyebutkan privatisasi di Inggris ternyata tidak memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal yang sama ditemukan oleh Indra Bastian (2002), yang antara lain menemukan bahwa dari hasil analisis daya saing berdasarkan rasio *sales/total assets*, hanya ada 1 (satu) BUMN yang mengalami peningkatan daya saing manajemen setelah privatisasi, yaitu PT Bank BNI sebesar 6%, sedangkan Semen Gresik, Indosat, Telkom, Aneka Tambang justru mengalami penurunan daya saing 1,5% sampai 53,75%. Pertanyaan sekarang, masih perlukan privatisasi? Jawabnya PERLU! Namun, tidak bisa sembarangan, karena ada tiga agenda penting, yaitu perihal *makna privatisasi, proses privatisasi,* dan *BUMN mana saja yang diprivatisasi*.

Makna dan Proses Privatisasi

Privatisasi penting, karena, seperti kata Sofyan Djalil, privatisasi menjadikan BUMN perusahaan yang transparan; sebuah langkah yang mirip upaya menjadikan rumah berjendela kaca yang memungkinkan cahaya matahari masuk dan membunuh kuman-kuman di dalam rumah secara alami. Bukankah matahari adalah disinfektan yang paling alami. Sama seperti transparansi adalah *dis*-KKN yang alami juga. Namun makna privatisasi *tidak boleh sekadar* menjual saham BUMN entah ke mana asal membayar tertinggi. Privatisasi dapat berupa empat langkah. *Pertama*, *profesionalisasi*, yaitu menjadikan BUMN sebagai perusahaan profesional sebagaimana perusahaan-perusahaan yang dikelola sebagaimana perusahaan swasta. Makna ini mempunyai beberapa konsekuensi, yaitu bahwa pemerintah dan publik (termasuk DPR dan Parpol) *harus* mendefinisikan BUMN sebagai *business entity* dan bukan lagi *political entity*, memungkinkan BUMN untuk bergerak secara leluasa, termasuk membentuk *holding* dalam rangka meningkatkan *business value*-nya, menjadikan pegawai BUMN sebagai pegawai perusahaan, dan bukan pegawai negeri, melarang BUMN mengerjakan hal-hal yang di luar misi usahanya, melarang fihak di luar BUMN untuk mencampuri urusan usaha BUMN, dan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*. *Kedua*, mengundang profesional bisnis dari swasta atau di luar BUMN (dari dalam negeri maupun luar negeri) untuk menjadi profesional pengelola BUMN, baik dalam arti komisaris, direksi, maupun manajer. *Ketiga*, melakukan kerjasama operasi dengan swasta –atau KSO. *Keempat*, seperti yang dapat dilihat bersama, menjual saham kepada fihak lain.

Proses privatisasi harus memenuhi dua kriteria: etis dan strategis. Secara etis artinya privatisasi tidak boleh bermaka *asing-isasi*. Bukan karena tidak percaya orang asing, atau anti asing, atau *xenofobia*. Melainkan agar privatisasi berjalan sesuai dengan *hakikat* privatisasi yaitu mengajak rakyat ikut memiliki BUMN, dan sepantasnya yang memiliki adalah rakyat di mana BUMN itu eksis. Secara strategis, maka privatisasi yang lebih ideal adalah privatisasi yang dimulai dari *restrukturisasi, profitisasi*, baru *privatisasi.* Jika yang ada BUMN kurus-kurus, maka ketika dijual, harganya jelas murah. Tetapi, jika sudah disehatkan (atau paling tidak setengah sehat, atau setengah gemuk), maka harga jualnya akan meningkat. Pelajaran yang harus dipetik, privatisasi adalah pekerjaan yang penuh upaya. Privatisasi yang asal jual adalah privatisasi yang paling konyol di muka bumi ini. Sementara itu, secara strategis, privatisasi tahap pertama sebaiknya dilakukan melalui *strategis sales* untuk mendapatkan mitra strategis yang dapat menjaga kinerja perusahaan, baru ke pasar modal. Privatisasi yang langsung ke pasar modal akan membuat BUMN mudah diombang-ambingkan harga sahamnya. Ketika BUMN sudah punya mitra kuat untuk mempertahankan harga di pasar modal, baru *go to stock exchange*.

Siapa atau BUMN mana yang dapat diprivatisasi adalah isu penting yang sering diabaikan. Yang pasti ada dua jenis BUMN yang sebaiknya tidak diprivatisasi (khususnya di-asingisasi), yaitu BUMN yang mempunyai derajad *public service obligation* yang tinggi, dan BUMN yang mempunyai makna sangat strategis bagi ketahanan nasional. Di sini perlu diperhatikan kritikan sahat Mohamad Ichsan, '*wah kalau begitu definisinya bisa menjadi definisi karet, dong.'* Pakar ekonomi ini memang mempunyai pandangan yang baik, bahwa keberadaan BUMN adalah transisional, yaitu sampai rakyat bisa mengerjakan sendiri, lantas lepas ke rakyat. Makna "strategis" memang relatif. Indosat dan Telkom di masa lalu sangat strategis, namun barangkali hari ini tidak. Industri senapan Pindad dan teknologi nuklir Batan masih strategis hari ini, namun barangkali tidak 10 tahun mendatang. Demikian pula dengan PSO. Barangkali karena ada diversifikasi pupuk dan enerji, maka Pusri dan PLN tidak lagi perlu dibebani dengan PSO yang sekarang ada. Di sinilah terdapat isu terpenting: privatisasi memerlukan *smart and wise judgement from the President of the Nation*.

Dalam sebuah pertemuan dengan Peter Drucker di Cleremont pada tahun 1999, rombongan Menteri BUMN beserta staf dan eksekutif puncak BUMN mendapatkan masukan dari empu manajemen yang visioner ini. Bahwa privatisasi BUMN di negara-negara berkembang *tidak harus* mengikuti pola di negara-negara maju. Kontekstualitas tetap memegang peranan. Zaenal Soedjais, Dirut Pusri, pernah mengatakan bahwa di Singapura BUMN tidak dipermasalahkan karena dikelola secara profesional sebagai sebuah perusahaan kelas dunia. Para eksekutif BUMN di Singapura tidak pernah dipanggil oleh Mentri, DPR, untuk tujuan yang tidak jelas. Jadi, kata kunci bagi BUMN Singapura adalah *profesionalisasi*, bukan *privatisasi*. Apa bahasa lain untuk ini? Mudah: implementasikan *good corporate governance*! Tujuannya untuk memberdayakan BUMN. Pemberdayaan BUMN pada akhirnya pun tidak bisa dikerjakan BUMN. Penegakan prinsip *corporate governance* pun bukan saja tugas direksi BUMN, melainkan juga pemegang sahamnya, dalam hal ini pemerintah. Tantangannya menjadi ganda. *Pertama*, kesediaan dari pengelola BUMN (Komisaris dan Direksi) untuk melaksanakan penadbiran korporasi (*corporate governance*), yang berarti meletakkan manajemen profesional sebagai tata cara pengelolaan usaha. *Kedua*, kesediaan dari pemerintah untuk melaksanakan penadbiran korporasi terhadap BUMN. Kenapa pemerintah? Karena salah satu bias governansi adalah terlalu kuatnya campur tangan pemilik dalam perusahaan sehingga membuat perusahaan itu sendiri tidak mampu mengembangkan governansi korporat. Pemerintah bukan saja Presiden dan Kabinet, namun juga parlemen (DPR). Bagi pemerintah, sebagai pemegang saham, tantangannya adalah sejauh mana kesediaan untuk meletakkan BUMN sebagai sebuah lembaga bisnis yang mandiri dan dikelola sebagaimana sebuah bisnis, dan bukan sebagai bagian dari organisasi publik atau politik atau bagian dari kekuasaan. Selama itu masih belum tercapai, maka pelaksanaan governansi

korporat di BUMN pasti mengalami kendala besar, dan berarti kendala besar bagi pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Karena BUMN akan menjadi bagian dari kepetingan kekuasaan daripada kepentingan rakyat, baik rakyat sebagai konsumen maupun sebagai pemilik.

Akhirnya, agenda krusial bagi BUMN sesungguhnya bukanlah *privatisasi*, melainkan *reformasi*; bahkan reformasi BUMN harus mengarah kepada tiga sasaran. *Pertama* reformasi BUMN diarahkan untuk memampukan BUMN sebagai lokomotif perekonomian Indonesia untuk keluar dari krisis, sekaligus memberdayakan para pelaku ekonomi lain, baik swasta maupun koperasi; mulai usaha besar, menengah, sampai usaha kecil. Program reformasi BUMN ini akan dijadikan sebagai langkah besar dalam membangun korporasi yang sehat, efisien, dan dimenejemeni secara profesional. Diharapkan, iklim ini akan menyebar dan menular ke sektor-sektor lain. *Kedua*, reformasi BUMN mempunyai tujuan jangka panjang untuk membangun BUMN-BUMN menjadi korporasi kelas dunia, yang secara simultan akan menjadi pilar bagi pembentukan *Indonesia Incorporated.*

Ketiga, dengan keberhasilan pemberdayaan dan pendayagunaan BUMN, maka pelunasan hutang Indonesia bisa dipercayakan kepada BUMN. Taruh kata, aset BUMN kita saat ini lebih kurang US $ 60 milyar. Dalam waktu lima tahun BUMN bisa diharap meningkatkan nilai pasarnya sampai 3 kali lipat, sehingga nilai assetnya menjadi US $ 180 milyar. Jika diasumsikan omsetnya tumbuh 20% per tahun, maka dalam tahun kelima nilai pasar dari seluruh BUMN kita bisa mencapai US $ 210 milyar. Jika 49% saja sahamnya dilepas, entah ke publik atau ke investor strategis, sudah bisa dikumpulkan dana sekitar US $ 100 milyar. Jumlah yang mencukupi untuk menutup pinjaman pemerintah bersama seluruh bunganya. Ke depan anak-anak cucu tidak dibebani dengan pinjaman. Kesemuanya hanya dengan satu prasyarat, BUMN harus benar-benar diberdayakan dan didayagunakan dengan sungguh-sungguh. Gagasan, konsep, strategi, dan cetak birunya pernah dimiliki, namun hari ini diterlantarkan di gudang Kantor Meneg BUMN.

Privatisasi dan Kebijakan Neoliberal[258]

Pertanyaan mendasar yang bisa diajukan adalah bagaimana kebijakan neoliberalisme diterapkan dalam berbagai kebijakan negara saat ini. Meskipun ada banyak pilar dari ekonomi globalisasi neoliberal, namun privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sengaja penulis pilih sebagai kasus untuk memahami penerapan kebijakan neoliberal di Indonesia. Penulis berharap dengan mengupas tuntas alasan politik ekonomi privatisasi ini semakin memperjelas argumen penulis sebelumnya bahwa kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar rakyat saat ini bersifat sistemik, yakni merupakan akibat dari suatu keputusan politik dan merupakan korban dari kebijakan ekonomi. Dengan begitu kita tidak segera dan dengan mudah menuduh bahwa penyebab persoalan kemiskinan terletak pada orang miskin sendiri, bahwa akar penyebab kemiskinan justru berasal dari luar orang miskin, melainkan mereka adalah menjadi korban dari suatu kebijakan politik ekonomi.

Privatisasi bersama dengan kebijakan neoliberal lainnya sesungguhnya merupakan salah satu ramuan kunci dari sistem ekonomi globalisasi (corporate-led globalization). Sistem ekonomi ini merupakan sistem yang didesakkan oleh korporasi global. Diantara ciri ciri ramuan dari kebijakan neoliberal itu adalah, pertama, paket kebijakan untuk melakukan deregulasi dan mengurangi atau menghilangkan hambatan terhadap bekerjanya korporasi atau peruahaan transnasional, meskipun seringkali harus mengorbankan rakyat maupun masyarakat adat. Kedua, kebijakan yang mengintegrasikan dan mengkonversikan ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi yang berorientasi ekspor, meskipun kebijakan tersebut harus mengorbankan lingkungan dan sistem sosial. Ketiga, kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh secara super cepat, untuk itu meskipun harus dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa mengenal batas, demi memicu pertumbuhan tersebut. Keempat, kebijakan yang mendukung meningkatnya konsentrasi korporasi secara dramatis. Kelima, kebijakan yang memangkas semua program pelayanan sosial, pelayanan kesehatan maupun perlindungan lingkungan. Keenam, kebijakan yang menggeser kekuasaan tradisional ataupun kebijakan yang melemahkan institusi demokratis pemerintah maupun komunitas lokal dan menggantinya dengan birokrat korporasi global. Ketujuh, kebijakan untuk mendorong homogenisasi budaya global, dan kebijakan yang mendorong atau mempromosikan budaya konsumtif secara intensif. Dan akhirnya, ciri penting dari kebijakan neoliberal adalah kebijakan privatisasi dan komersialisasi (komodifikasi) layanan publik, maupun kebijakan untuk komersialisasi dan privatisasi sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik komunal seperti air, udara, dan keanekaragaman hayati dan genetika. Ketujuh ciri kebijakan neoliberal tersebut diterapkan dalam bentuk dan menggunakan istilah yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika privatisasi layanan publik kesehatan dilaksanakan, mereka tidak menggunakan istilah privatisai Puskesmas, namun mereka menggunakan istilah 'Puskesmas Mandiri,' meskipun hakikatnya adalah privatisasi layanan kesehatan. Demikian hal ketika privatisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dilaksakan, istilah yang mereka pergunakan adalah "otonomi kampus" sehingga banyak mahasiswa yang merasa selama ini tidak ada otonomi di kampus mereka, berjingkrak dan menerimanya dengan gembira.

[258] Mansour Faqih, *Bebas Dari Neoliberalisme* (Yogyakarta: Insist Press, 2003).

Mengapa Badan Usaha Negara Harus Diprivatisasi?

Salah satu kebijakan neoliberal yang menyumbang terhadap proses kemiskinan adalah kebijakan privatisasi perusahaan milik negara. Privatisasi secara umum dipahami sebagai proses sistematis untuk memindahkan status kepemilikan Badan Usaha Milik Negara atau kekayaan publik lainnya dari tangan seluruh anggota masyarakat kepada para pemilik modal perorangan. Privatisasi jelas merupakan agenda neoliberal dan pasar bebas terpenting. Meskipun dibungkus dengan rapi, seolah-oleh privatisasi merupakan jalan untuk efisiensi perusahaan, atau usaha dalam rangka menyehatkan dan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, bahkan seringkali privatisasi dilaksanakan dengan dalih memberantas korupsi, sehingga mendapat dukungan publik. Siapa pun sependapat bahwa korupsi adalah kejahatan publik yang harus diberantas. Namun privatisasi sama sekali bukan jalan keluar untuk memberantas korupsi. Bukankah korupsi terbesar abad ini justru terjadi pada perusahaan-perusahaan transnasional raksasa seperti kasus Enron, WorldCom, dll. Perusahaan milik negara memang bagaikan buah simalakama, jika dilanjutkan tanpa sistem pengawasan yang ketat memang bisa menjadi sumber korupsi dan pemerasan. Tetapi sebaliknya, jika menyerahkannya kepada swasta global di mana hukum ekonomi berjalan—ada uang siapa pun bisa sehat dan berpendidikan, kalau tidak ada uang akan mati dan tak berpendidikan—maka jutaan nasib rakyat miskin di negeri ini akan segera tersingkir dan punah seperti dinosaurus. Namun sesungguhnya gagasan di balik privatisasi badan usaha milik negara yang saat ini melanda dunia, tidak ada sangkut pautnya dengan usaha penyehatan ataupun pemberantasan korupsi. Hakikat sesungguhnya dari privatisasi adalah dalam rangka menciptakan iklim ekonomi persaingan bebas. Dengan kata lain agenda privatisasi sesungguhnya lebih dimaksud sebagai usaha untuk menata ulang struktur perekonomian suatu negara guna melicinkan jalan bagi agenda neoliberal global sebagai jaminan keamanan bagi investasi mereka di negera tempat tujuan investasi mereka. Namun untuk memahami lebih lanjut apa sesungguhnya ideologi di balik kebijakan privatisasi tersebut, ada baiknya kita tinjau kembali pendirian neoliberalisme untuk kesekian kalinya, mengingat privatisasi sesungguhnya merupakan penerapan neoliberalisme.

Apa yang menjadi pendirian neoliberalisme sesungguhnya adalah kebijakan pasar bebas, untuk mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan pilihan konsumen berkembang. Karakter lain adalah penghargaan atas tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraswastaan. Sebaliknya, negara atau pemerintah bagi mereka adalah masalah, oleh karenanya muncul gagasan menyingkirkan birokrat yang dianggap sebagai “parasit” ekonomi. Bagi mereka, birokrat tidak akan pernah mampu meskipun dikembangkan. Secara lebih khusus, neoliberalisme muncul dalam kebijakan: “liberalisasikan perdagangan dan keuangan, “biarkan pasar menentukan harga,” akhiri inflasi (stabilisasi ekonomi makro, dan privatisasi), pemerintah haruslah “menyingkir dari menghalangi jalan” (Chomsky, 1999).

Dalam rangka bekerjanya pasar menurut hukum permintaan dan penawaran, maka negara tidak boleh ikut menjadi pemain ekonomi, apa lagi dengan alasan mensubsidi atau memproteksi kaum miskin. Atas dasar itu, negara harus menjual semua perusahan negara kepada investor swasta baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menyiapkan penjualan aset negara itu, seringkali negara juga harus melakukan penyehatan, supaya laku dijual. Masih dalam rangka supaya perusahaan negara laku dijual, perusahaan harus dibersihkan dari sengketa dengan rakyat. Privatisasi dilakukan tanpa pilih-pilih, termasuk sektor perbankan, industri strategis, perkeretaapian dan transarportasi umum, jalan bebas hambatan, PLN, kantor pos, perusahaan telpon, sekolah dan universitas, rumah sakit umum, bahkan privatisasi terhadap air bersih dan air minum.

Kebijakan privatisasi tersebut, dengan demikian sesungguhnya ini dilakukan dengan alasan selain demi keyakinan “persaingan bebas” yang biasanya dibungkus dengan demi “efisiensi dan mengurangi korupsi.” Namun sesungguhnya privatiasi tidak ada kaitannya dengan sehat tidaknya, ataupun efisien atau tidaknya perusahaan yang diprivatisasi. Oleh karena itu, semakin sehat maupun semakin efisien dan menguntungkan suatu poerusahaan negara, justru kenyataannya lebih cepat diprivatisasi. Sementara bagi perusahan negara yang merugi dan menurun justru di sehatkan supaya mudah diprivatisasi. Privatisasi bukan menjadikan perusahaaan semakin efisien, sebaliknya perusahaan yang diprivatisai produk layanan mereka semakin mahal. Sementara itu tidak ada bukti yang meyakinkan privatisasi perusahaan layanan umum, tidak serta merta menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik. Pengalaman dibeberapa negara yang melakukan privatisasi justru mengakibatkan bencana layanan publik. Dengan demikian jelas bahwa privatisasi perusahaan negara telah membawa akibat pada konsentrasi pemilikan kapital di tangan sedikit orang, sementara itu memaksa rakyat umum membayar lebih mahal atas kebutuhan dasar mereka. Seringkali banyak orang tertipu mereka bersedia membayar layanan publik lebih mahal, karena mereka sangka ikut membantu perusahaan negara yang itu berarti membantu negara dan bangsa mereka sendiri.

Dengan demikian golongan paling miskin dalam masyarakat akan menjadi korban dari kebijakan neoliberal dalam bentuk privatisasi tersebut. Kaum miskin harus memecahkan masalah mereka seperti masalah kesehatan, pendidikan, jaminan sosial serta masalah-masalah lainnya dengan usaha mereka sendiri. Tidak ada lagi perlindungan, maupun subsidi atas kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian kaum miskin justru yang dikorbankan, dan mereka justru yang selalu dipersalahkan, dianggap malas dan tidak kreatif. Untuk mencari jalan sementara masalah kaum yang dimiskinkan oleh kebijakan privatisasi tersebut lantas mereka membuat program Jaring Pengaman Sosial (JPS), mereka bahkan menciptakan strategi pengentasan kemiskinan. Sesungguhnya “Jaring Pengaman Sosial” maupun program pengentasan

kemiskinan tidak diperlukan oleh kaum miskin. Kaum miskin hanya memerlukan agar negera segera menghentikan semua kebijakan neoliberal yang dimaksud untuk melindungi kepentingan investor seperti privatisasi layanan publik dan pemotongan subsidi atas layanan sosial dsar yang sangat dibutuhkan oleh kaum miskin tersebut.

Dari Sentralisasi Peran Ekonomi Negara ke Persaingan Bebas

Kebijakan privatisasi sesungguhnya erat kaitannya dengan jatuhnya paham developmentalisme (pembangunanisme), atau paham kapitalisme negara selain diakibatkan oleh menguatnya paham kapitalisme pasar bebas. Namun jatuhnya paham pembangunanisme juga memberi kesempatan atas bangkitnya kembali liberalisme secara kuat, itulah mengapa jatuhnya paham developmentalisme juga dikenal dengan era bangkitnya neoliberalisme. Neoliberalisme ditandai dengan globalisasi pasar, investasi dan proses produksi dari perusahaan perusahaan transnasional (TNCs), dengan dukungan Lembaga Finansial Internasional, yang diatur melalui organisasi perdagangan Global yang dikenal dengan WTO, globalisasi memberikan janji-janji baru akan kesejahteraan. Namun sejak dilaksanakan, globalisasi justru melahirkan persoalan keadilan sosial dan HAM. Sementara negara kita masih menghadapi krisis utang akibat anjuran IMF pembangunan pertumbuhan dan industrialisasi, dengan ditandatanginya kesepakatan international perdagangan GATT, April 1994 di Marrakesh Maroko, negara kita akan menghadapi keadaan yang lebih sulit karena globalisasi telah dimulai.

GATT adalah kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antarpemerintah dan forum negosiasi dan pengadilan perdagangan antarpemerintah, jika terjadi perselisihan dagang antara bangsa pesertanya. Kesepakatan itu dibangun atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem proteksionis seperti era developmentalisme. Mereka yakin bahwa persaingan bebas akan meguntungkan bagi yang efektif dan efiesien. Pada tahun 1995 GATT dilembagakan dalam organisasi perdagangan dunia baru yang dikenal dengan World Trade Organizations (WTO).

WTO didirikan pada tanggal 1 Januari, 1995 mulanya beranggotakan 128 negara. WTO dikembangkan dari apa yang dikenal sebagai The General Agreement on Tariff and Trade (GATT), yang dasarnya diciptakan untuk mengatur persaingan antarkapitalisme. Tugas WTO pada dasarnya mengatur kapitalisme seluruh dunia. Sementara aturan GATT lebih terbatas pada melakukan regulasi atas perdagangan barang-barang, namun wewenang WTO lebih luas lagi, organisasi itu tidak hanya mengatur barang manufaktur, mereka juga mengatur jasa, termasuk jasa transportasi internasional, sistem komunikasi, bahkan mereka ingin mengatur perdagangan bebas dibidang produk pertanian dan benih. Pada akhir tahun 2000, WTO telah berhasil mengontrol 150 kesepakatan dagang regional. WTO bertindak berdasar komplain yang diajukan anggotanya. Dengan demikian WTO merupakan arena mekanisme globalisasi yang terpenting. Jika WTO adalah forum kesepakatan perdagangan tingkat global, di tingkat regional forum serupa yang lebih kecil ditetapkan, misalnya The North American Free Trade Agreement (NAFTA) antara Amerika Serikat dan Mexico, maupun tingkat regional seperti The Asia Pasific Economic Conference (APEC). Bahkan banyak kesepakatan lebih kecil lagi seperti segitiga pertumbuhan Singapore, Johor dan Riau (SIJORI) ataupun BIMPEAGA di kawasn timur. Ada lebih dari 14 kawasan serupa yang lebih kecil saat ini seperti Otorita Batam, yang memiliki kebijakan otonom.

Ada sejumlah elemen penting anatomi globalisasi, pertama, penciptaan mekanisme globalisasi sistem dan proses produksi, yakni konsolidasi sistem fabrikasi dunia melalui penciptaan hierarki jaringan produksi dan perdagangan skala global. Proses ekspansi sistem produksi global ini dikembangkan melalui penciptaan dan pengalokasian Zone Proses Ekspor (Export Proccessing Zones/EPZs). EPZs adalah suatu wilayah yang dikhususkan bagi ekspor dengan syarat mampu mengembangkan aturan duane, pajak domestik, dan perburuhan yang minimal, supaya menjadi menarik bagi TNCs. Dengan demikian jelas, bahwa TNCs-lah yang berkepentingan, karena merekalah yang diuntungkan. Tidak heran, mengapa selama dua dasawarsa menjelang berakhirnya abad Millenium, jumlah TNCs meningkat pesat, dari sekitar 7000 TNCs di tahun 1970, dalam tahun 1990 jumlah itu mencapai 37,000 TNCs. Selain jumlahnya TNCs juga berhasil menguasai perkonomian dunia. TNCs berhasil menguasai 67 persen perdagangan dunia. Lebih lanjut mereka juga telah berhasil menguasai 75 persen dari total investasi global. Ada 100 TNCs dewasa ini menguasai ekonomi Dunia. Mereka mengontrol 75 persen perdagangan dunia.

Selain TNCs, aktor lain yang memainkan peran besar dalam globalisasi adalah lembaga Finansial Internasional (IFIs), yang sering juga disebut “Multilateral Development Banks.” IFIs merupakan organisasi global yang beranggotakan negara-negara maju, bertugas memberi utang kepada negara miskin. Ada dua IFIs yang secara global dikenal yakni The World Bank dan International Monetary Fund (IMF). IMF ini adalah organisasi yang paling berkuasa di abad 20. Berpusat di Washington DC, IMF memiliki misi untuk mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui pemberian utang, guna meringankan penyesuaian neraca pembayaran dengan suatu “kondisionalitas” yang ditentukan. IMF saat ini beranggotakan 182 negara. Namun Amerika Serikat yang paling berkuasa atas segala keputusan IMF, karena negara itu memiliki hak voting mencapai 17.8 persen. Selain Amerika Serikat tidak ada yang memiliki hak voting lebih dari 6 persen. Sementara mayoritas negara anggota hanya memiliki kurang dari 1 persen. Padahal pada mula dicetuskan oleh Keynes dan Dexter, IMF bertujuan “untuk menciptakan lembaga demokratis yang menggantikan kekuasaan para bankir dan pemilik kapital internasional yang dituduh bertanggung jawab atas

resesi tahun 1930-an.” Selain IMF Bank Dunia juga aktor penting yang pada dasarnya adalah lembaga pemberi utang multilateral. Bank Dunia terdiri atas empat lembaga keuangan yang saling berkaitan, namun IBRD yang lebih sering disebut sebagai Bank Dunia. Misi Bank Dunia adalah sebagai lembaga internasional yang membantu mengurangi kemiskinan dan membiayai investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Namun berbagai program Bank Dunia seperti “Structural Adjustment Program” mengubah misi awalnya itu dan justru menjadi pendukung utama model ekonomi pasar bebas.

Akibat Kebijakan Neoliberal terhadap Negara

Semua mekanisme globalisasi didasarkan dan dipraktikkan melalui kebijakan neoliberalisme. Mereka percaya bahwa pertumbuhan dicapai sebagai hasil normal “kompetisi bebas” dan “pasar bebas” itu efisien, dan itulah cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Neoliberal mengatakan bahwa pasar bebas akan menjamin pangan murah sehingga keamanan pangan terjamin. Tapi kenyataannya berlaku sebaliknya, perdagangan bebas justru malah menaikkan harga pangan. Mitos neoliberal menyatakan bahwa WTO dan TNCs akan memproduksi pangan yang aman. Masyarakat miskin menolak GMO karena mereka percaya bahwa GMO serta pestisida dan kimia meracuni makhluk hidup. Mitos berikutnya, kaum perempuan akan diuntungkan pasar. Kenyataannya, kaum perempuan Indonesia menyadari bahwa selama Revolusi Hijau kaum perempuan tersingkir dari pertanian, sebagai produsen maupun konsumen. Mitos bahwa paten akan melindungi inovasi dan pengetahuan, kenyataannya paten dan hak kekayaan intelektual di bidang mikroorganisme dan germplasma, selain melegalisasi pencurian keanekaragaman hayati benih, juga menjualnya kembali pada masyarakat miskin demi keuntungan. Dengan kata lain, memberikan hak monopoli kehidupan secara eksklusif kepada perusahaan komersial akan meruntuhkan budaya pertukaran benih, yang vital bagi strategi bertahan hidup masyarakat miskin. Monopoli atas cara penghidupan akan menghancurkan beragam bentuk budaya bersama, budaya dimana hak masyarakat miskin atas sumber daya alam serta pengetahuan dan kearifan komunitas terjamin.

Jadi, sebagai akibatnya kita menyaksikan perusakan makhluk hidup dan penganiayaan hak asasi dan hak kultural masyarakat miskin. Kebalikan dengan mitos-mitos indah itu adalah banyak masyarakat miskin mulai menyadari bahwa kebijakan yang menyingkirkan masyarakat miskin dari pertaniannya demi keuntungan itu pada dasarnya adalah sebuah proses pemusnahan secara sistematis kehidupan masyarakat miskin dan harus dihentikan. Mitos yang menyebutkan bahwa pasar bebas pangan akan menguntungkan konsumen dengan harga murah dan pilihan yang beragam, juga adalah mitos palsu. Kenyataannya, pengalaman masyarakat miskin menunjukkan bahwa pasar bebas pangan hanya memaksimalkan keuntungan TNCs dan memarginalisasi masyarakat miskin. Semua mekanisme kebijakan neoliberalisme yang didukung Bank Dunia dan IMF melalui WTO didasarkan pada asumsi dan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai melalui pasar bebas dan kebijakan neoliberalisme.

Krisis ekonomi awal abad 20 yang berakibat depresi ekonomi di tahun 1930-an, menenggelamkan liberalisme. Pendulum ekonomi pun beralih ke tangan negara dan pemerintah. Sejak program “*New Deal*” dijalankan Roosevelt tahun 1935, peran negara dalam bidang ekonomi menguat. Kontrol negara atas ekonomi menyurutkan pertumbuhan kapitalisme. Konsep *state-led development,* seperti perlindungan dan keadilan sosial, serta manajemen sumber daya alam berbasis tradisi komunitas, dituding sebagai penyebab krisis ekonomi. Dengan argumentasi itu, pendulum kembali beralih ke liberalisme baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Strategi barunya adalah mengganti semua perlindungan dan intervensi negara dengan investasi swasta dan pasar bebas. Contoh dari hal ini adalah diterapkannya intellectual property rights, pemotongan subsidi, dan penghentian program-program kesejahteraan rakyat. Deregulasi, “good governance” dalam konteks ini adalah salah satu cara demi mempromosikan pasar bebas.

Posisi ideologis neoliberalisme sesungguhnya tidak berbeda dengan liberalisme: pasar bebas, pilihan konsumen, penghargaan atas tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, minimalisasi kontrol pemerintah dalam ekonomi. Implementasi dari tatanan neoliberal ini bermakna pemerintah harus menyediakan zona bebas pertumbuhan seperti AFTA, SIJORI (segitiga pertumbuhan Singapore, Johor, dan Riau), dan segitiga pertumbuhan ekonomi lain yang lebih kecil. Kebijakan neoliberalisme meminggirkan rakyat atau masyarakat miskin dari produksi pangan dengan agribisnis TNCs sebagai penyedia pangan dominan. Misalnya dalam sektor pertanian, terdapat kebijakan negara yang mengubah pertanian dari masyarakat miskin kecil ke industri beras dan agribisnis. Ini diwujudkan dengan pengenalan ‘*land consolidation’* bagi pemilik tanah dan masyarakat miskin kecil untuk bekerja sama dengan agribisnis yang bermanajeman profesional dalam sistem industri mode of production. Dalam konteks pendekatan neoliberal atas demokratisasi, penguatan civil society dilihat sebagai bagian dari diskursus pasar bebas dan kebijakan neoliberalisme.

Pada akhirnya, hal ini memungkinkan TNCs mengontrol kebijakan negara dan mengubahnya menjadi aturan yang mempermudah TNCs untuk mengambil alih sumber daya alam. Banyak kebijakan neoliberal telah diimplementasikan di Indonesia, seperti pemotongan subsidi negara dan pembebasan tarif bagi produk pertanian, privatisasi perusahaan-perusahaan negara, perguruan tinggi, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Negara juga dituntut untuk mengubah kebijakan termasuk hukum atas pajak, ekspor, paten, dan izin pemanfaatan GMO dalam pertanian. Semua kebijakan itu telah diadopsi oleh

pembuat undang-undang belum lama ini. Yang memperihatinkan adalah, tidak adanya perlawanan berarti dari organisasi atau Ornop civil society di Indonesia, meski semua kebijakan ini tidak saja akan menarik TNCs berinvestasi di Indonesia, melainkan juga memaksa masyarakat miskin untuk bersaing secara bebas dengan raksasa TNCs. Kompetisi yang tidak seimbang antara keduanya, akan berakibat hancurnya masyarakat miskin kecil. Studi FAO pada dampak negara yang mengimplementasikan kesepakatan pertanian dalam Uruguay Round terhadap masyarakat miskin di 16 negara berkembang menyimpulkan bahwa tren itu berdampak negatif pada kontrol sumber-sumber alam oleh masyarakat miskin, dan secara drastis mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.

Akses ke pasar dan 'bantuan domestik' untuk konsumsi perusahaan multinasional demi terwujudnya persaingan global, akan memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan mereka dari subsidi untuk masyarakat miskin kecil beralih ke TNCs agribisnis. Perubahan kebijakan dan proses ini akan meminggirkan kapabilitas masyarakat miskin kecil sebagai produsen pangan. Bahkan, kebijakan proyek 'penguatan civil society' dengan cepat akan mengubah pertanian Indonesia dari model produksi skala kecil menjadi industri agribisnis TNCs. Proses ini pada dasarnya merupakan sebuah perubahan besar di sektor pertanian Indonesia. Namun ironisnya di Indonesia, justru Monsanto perusahaan raksasa transnasional bidang agribisnis yang mendapat pelayanan istimewa di negeri ini. Perusahaan itu dengan mudahnya memperoleh izin penanaman secara terbatas kapas transgenik melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian (Mentan) No.107/Kpts/KB/430/2/2001 tentang pelepasan secara terbatas kapas transgenik Bt DP 56908 sebagai varietas unggul dengan nama NuCOTN 35 B (Bollgard). Indonesia sendiri sampai sat ini belum memiliki peraturan yang memadai mengenai produk rekayasa genetika. Namun demikian, walaupun tidak memadai, sesungguhnya ada ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa untuk mengintroduksi jenis tanaman, hewan, dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetika harus didahului dengan analisis dampak lingkungan yang memadai. Tetapi tanpa dilakukannya analisis dampak lingkungan sama sekali, Menteri Pertanian dengan mudahnya telah mengeluarkan SK yang memberi izin Monsanto untuk menanam kapas transgenik secara terbatas di tujuh kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu di Takalar, Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Bone, Soppeng dan Wajo. Celakanya, yang dimaksudkan penanaman secara terbatas tersebut tidak jelas ukurannya, karena ternyata meliputi lahan seluas 4.462 hektar. Kecerobohan ini bukan saja mendatangkan protes di sana sini, tetapi juga tuntutan pengadilan dari beberapa LSM (ICEL, Konphalindo, PAN Indonesia, YLKI, dan YLKSS) yang menuntut melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menuntut pembatalan SK Menteri Pertanian No.107/Kpts/KB/430/2/2001. Tetapi respon dari pemerintah atas keresahan itu, seolah-olah tidak ada masalah, Menteri Pertanian malah mengeluarkan izin penanaman terbatas untuk tahun kedua yang dituangkan didalam Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 03/Kpts/KB 403/2002 tertanggal 11 Januari 2002.

Sementara di lapangan para petani yang mulai sadar akan bahaya benih transgenik maupun benih GMO mulai marah dan memprotes program tersebut. Akhirnya persoalannya menjadi semakin sulit bagi negara, karena negara harus berhadapan dengan masa petani yang marah. Namun biar bagaimanapun protes petani, negara sejak menjadi anggota WTO terikat dengan perjanjian paten, maupun berbagai perjanjian yang sudah diratifikasi untuk merlindungi investasi yang dan sudah dituangkan dalam produk undang-undang tersebut, maka mau tak mau mereka harus melindungi investasi perusahaan tersebut. Akibatnya terjadilah bentrok antara aparat negara dengan petani di mana-mana, dan tidak jarang menimbulkan jatuhnya korban. Banyak rakyat tidak memahami mengapa negara yang seharusnya menjadi tempat untuk mereka mencari perlindungan dan dan alamat untuk meminta proteksi, sesungguhnya telah dilucuti karena terjebak oleh perjanjian atau konvensi WTO sehingga tidak sanggup lagi melindungi rakyatnya. Pertanyaan mengapa negara dalam kasus sengketa antara perusahaan transnasional dan rakyat justru negara memihak kepada perusahaan, memang sulit dipahami kalau kita tidak memahami bagaimana kebijkan neoliberalisme bekerja dan berkuasa.

Privatisasi dan Akibatnya pada Kemiskinan dan Hak-hak Dasar Manusia

Sejarah eksistensi perusahaan negara, sesungguhnya erat kaitannya dengan sejarah perkembangan peran negara dalam pembangunan sejak krisis ekonomi tahun 30-an. Katika era developmentalisme (*state-led development*) yang dimulai mendominasi dunia terutama era setelah pasca krisis ekonomi tersebut. Sejak saat itu kita menjadi terbiasa dengan model state-led development tersebut. Itulah suatu era yang dibangun atas paham bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi dan memimpin pembangunan ekonomi, perusahaan perusahaaan negara mempunyai fungsi sebagai sarana bagi negara untuk memenuhi amanat memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Model ini ditetapkan sebagai alternatif sejak krisis liberalisme pada zaman kolonialisme tahun 1930-an. Sejak saat itu, negara menjadi aktor utama atau diberi wewenang sebagai pengendali ekonomi dan politik. Namun, pada saat yang sama, negara juga harus bertanggung jawab untuk melindungi, mensubsidi, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk alasan itulah sesungguhnya perusahaan negara, sekolah dan universitas negeri, rumah sakit negara, Puskesmas negara, perusahaan transportasi atau angkutan umum milik negara, bahkan hotel dan pasar milik negara diciptakan. Masih banyak lagi sarana pelayanan publik seperti irigasi, saluran listrik, telpon, radio dan lain sebagainya dibuat, dimiliki dan dikelola oleh badan usaha

milik negara. Lebih lanjut negara bertanggung jawab untuk mencegah terhadap setiap bentuk pelanggaran HAM, termasuk hak pendidikan, hak kesehatan, hak informasi, hak atas tempat tinggal dan hak atas pangan dan hak hak dasar lainnya. Pada zaman developmentalisme tersebut, negara-negara menetapkan bahwa "pembangunan" adalah hak asasi, sehingga kita dengar "*The rights to Development.*" Karenanya peran negara sebagaimana ditetapkan oleh PBB adalah proteksi, prevensi, dan promosi warga negara atas HAM. Di era itu, ratifikasi konvensi PBB menjadi tolok ukur indikator kebudayaan suatu bangsa. Namun sesunguhnya puncak gemilang prestasi negara adalah pada saat negara-negara berhasil membentuk PBB sebagai lembaga untuk perlindungan HAM tingkat internasional. Pada saat itulah mula pertamanya negara tidak saja berhasil merebut kekuasaan ekonomi dari tagan pahan kapitalisme liberal, tapi juga kekuasaan politik secara internasional. Tetapi, penulisngnya, amanat untuk melindungi HAM itu era pembangunan itu mengecewakan rakyat, akibatnya kepercayaan rakyat pada konsep negara sebagai pelindung HAM runtuh bersamaan dengan runtuhnya paham pembangunan. Sebagai gantinya. pembangunan justru digantikan oleh paham pasar bebas yang berprinsip neoliberalisme.

Meskipun belum berjalan lama, kebijakan neoliberalisme ternyata telah membawa bencana bagi pemenuhan HAM. Di desa-desa, kebijakan 'akses pasar' dan domestic support terhadap MNCs demi alasan persaingan bebas ini telah memaksa pemerintah harus mengubah kebijakan dari subsidi bagi petani kecil menjadi subsidi kepada perusahaan agribisnis raksasa, dan proses ini sekaligus menggusur kemampuan petani kecil sebagai produsen. Akibatnya, petani kecil tidak ada pilihan lain kecuali melepaskan sumber alam terutama tanah mereka. Di sektor urban, kebijakan neoliberal dalam bentuk penghapusan subsidi, privatisasi, dan pemotongan anggaran kesejahteraan sosial, telah memarginalkan masyarakat miskin kota terutama kaum perempuan dan anak-anak. Dalam definisi HAM PBB, kebijakan negara yang memarginalkan rakyat miskin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi dan budaya. Kebijakan pendorong ekspor komoditi pangan secara bebas ini telah menggusur petani kecil sebagai penghasil pangan. Akibat dari kebijakan menghapus subsidi, dan tarif hasil pertanian, dalam rangka kompetisi bebas, petani tak sanggup bersaing dan gulung tikar. Atas dasar tekanan untuk menyediakan lingkungan persaingan yang sehat untuk persaingan bebas dan demi tegaknya pasar bebas, maka negara harus melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang pada dasarnya dibuat untuk memberikan subsidi kepada warga negara tersebut.

Di sektor urban, kebijakan privatisasi "pelayanan sosial dasar" seperti pelayanan transportasi publik, air bersih, listrik, dan kesehatan telah menjadikan hak-hak dasar rakyat miskin tidak terpenuhi, dan mengancam pemenuhan HAM. Privatisasi dengan demikian merupakan suatu kebijakan yang mengabdi kepada kepentingan pasar bebas dan persaingan bebas, suatu kebijakan yang justru dimaksud demi melindungi kapital internasional untuk dapat bersaing secara fair di negeri ini. Kebijakan ini harus dilaksanakan meskipun harus dibayar dengan marginalisasi rakyat miskin kota, karena kebijakan tersebut membawa dampak naiknya harga barang dan jasa, sehingga harga-harga tidak mampu dijangkau lagi oleh masyarakat miskin kota. Jadi masyarakat miskin kota menjadi semakin miskin dan tidak mampu menjangkau kebutuhan dasar mereka akibat dari kebijakan negara yang disandera oleh kebijakan neoliberal. Dengan kalimat lain, bahwa kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin kota bukanlah salah mereka, bukanlah karena mereka malas dan bodoh, melainkan mereka menjadi korban dari suatu kebijakan. Kebijakan neoliberal yang membawa akibat jatuhnya kemiskinan ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk bentuk pelanggaran HAM, terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat kota di masa datang.

Kekuasaan negara untuk mengontrol sumber daya alam dan ekonomi saat ini juga tengah dilucuti oleh paham neoliberalisme, yang memperjuangkan kembali berlakukanya pasar bebas dan mendesak negara untuk melepaskan kekuasaan mereka atas sumber-sumber ekonomi. Para penganut paham neoliberal menuntut agar negara membiarkan hukum pasar dan menuntut agar negara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya persaingan bebas. Mereka meminta agar hukum persaingan bebas yang mengatur harga-harga. Melalui kampanye privatisasi dan potong subsidi, akhirnya banyak negara yang tidak mampu lagi melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi (memproteksi) rakyatnya. Agar negara tidak bersalah karena melanggar konstitusi, maka ada desakan dari rezim pasar bebas untuk melakukan "reformasi kebijakan" dengan melakukan amandemen pada konstitusi UUD 1945, serta ditindaklanjuti dengan melakukan reformasi untuk menciptakan produk perundang-undangan baru yang bernafaskan neoliberal, sehingga pemerintah terhindar dari melakukan pelanggaran HAM Saat ini hampir semua perangkat perundang-undangan yang sesuai dengan neeoliberalisme telah ditetapkan, tinggal melaksanakannya. Dengan demikian saat ini negara telah dilucuti dan dipaksa melaksanakan kebijakan neoliberal sesuai dengan pendirian neoliberalisme dan pasar bebas seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pada akhirnya, pertanyaan yang masih tersisa tinggal siapakah yang paling diuntungkan dari kebijakan privatisasi yang saat ini juga telah menjadi kebijakan global tersebut? Pemerintah Amerika Serikat baru-baru mengeluarkan kebijakan "Farm Bill" yang intinya merupakan kebijakan untuk membantu perusahaan agribisnis besar untuk memasarkan produk mereka yang pasarnya sudah mulai jenuh tersebut. Ada indikasi yang menunjukkan bahwa di negara liberal tersebut, pemerintah justru memberikan subsidi dan proteksi serta memfasilitasi perusahaan agribisnis raksasa mereka. Melalui program akses pasar *"Farm Bill"* ini, mereka telah telah mendistribusikan sebanyak 100 milyar dollar kepada 67 grup perdagangan guna untuk mempromosikan hasil produksi pertanian Amerika ke seluruh pasar dunia. Tambahan sebesar 1,34

miliar dollar dari Dana Federal juga disediakan melalui program contoh kualitas, juga telah di alokasikan kepada 17 grup perdangan untuk meningkatkan pemasaran ekspor dengan melakukan ekspansi pasar pertanian baru. Itulah makanya tidak heran saat ini kekuatan pasar dan kesehatan perusahan agribisnis transnasional Amerika semakin menguat posisi mereka di Amerika dan di dunia. Empat perusahaan Amerika yakni Cargill, Cenex Harvest States, Archer Danields Midland/ADM, dan General Mills sekarang telah memiliki 60 persen dari fasilitas terminal penanganan padi yang siap bersaing dengan produsen padi tradiasional, para petani. Sementara itu tiga perusahaan lainnya yakni Cargill, ADM, dan Zen Noh diberi fasilitas untuk bertanggung jawab terhadap 82 persen dari ekspor jagung. Dibidang peternakan ada empat perusahaan yakni Tyson, ConAgra, Cargill, dan Farm Land Nation berhasil menguasai 81 persen industri pengemasan daging sapi. Sementara itu empat perusahaan yakni ADM, ConAgra, Cargill dan General Millssaat ini menguasi 61 persen penggilingan tepung. Tidak heran kalau saat ini ada dua TNCs top Amerika berhasil menguasai pemasaran produk pertanian terbesar di dunia, mereka adalah DuPont (Pioneer) dan Pharmacia (Monsanto).

Dengan program dan kebijakan Farm Bill Amerika Serikat, ditambah kemampuan mereka untuk mendedesakkan perubahan kebijakan pertanian neoliberal di Indonesia, para petani kita akan mengalami kekalahan telak dan akan mengalami gulung tikar meski bertarung dikandang sendiri. Dampak dari kebangkrutan para petani ini akan melahirkan ledakan pengangguran petani miskin yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya ledakan kemiskinan massal di desa. Pemiskinan massal di desa akan mendorong ribuan orang berbondong-bondong datang ke kota, dan urbanisasi pun meledak. Kebijakan neoliberal untuk memangkas subsidi atas pelayanan sosial dasar, akan semakin menambah jumlah kaum miskin kota. Sekali lagi kemiskinan adalah akibat dari kesalahan kebijakan, dan sekali lagi kemiskinan bukan karena melulu kesalahan kaum miskin sendiri.

Dampak Negatif Implementasi Kebijakan Neoliberal

Sejak kebijakan neoliberal diimplementasikan, kebijakan tersebut telah menuai banyak korban khususnya kaum miskin. Terdapat beberapa dampak negatif akibat perubahan kebijakan ke arah pasar bebas. Pertama, ia menyingkirkan peran negara dan rakyat dari subyek sentral proses ekonomi dan produksi. Kita ingat, di masa lampau peran negara sangat sentral dalam ekonomi. Salah satu dampaknya, rakyat khususnya kaum miskin tidak punya pilihan lain selain menyerahkan sumber ekonomi mereka. Rakyat terpaksa menjual tanah mereka. Neoliberalisme juga mereduksi peran tradisional petani miskin sebagai produsen pangan dengan membuka investasi bidang pangan bagi perusahaan agribisnis global yang akan menghancurkan kehidupan petani. Sebaliknya, investasi dan produksi pasar bebas dibidang pangan hanya akan menguntungkan perusahaan agibisnis global. Mereka mengubah strategi dari kontrol langsung atas tanah menjadi kontrol atas proses produksi melalui 'petani independen yang eksklusif', atau ikatan kontrak seperti konsep *corporate farming* yang telah dikenalkan di Indonesia. Perusahaan menyediakan benih, kredit, dan instruksi teknis yang detil kepada petani kecil—yang nanti mereka akan ditagih ongkosnya, dengan syarat mereka hanya akan menjual kepada perusahaan, dengan harga yang ditetapkan perusahaan secara sepihak. Dibanding mengubah minyak tanah dan produk industri lain menjadi sayuran kaleng yang dijual di supermarket, lebih berisiko menjalankan pertanian yang sesungguhnya. Risikonya terkonsentrasi pada iklim yang buruk dan hama. Jadi petani menanggung semua risiko akibat panen yang gagal, sedang perusahaan tetap mendapat untung dari penjualan pengolahan pupuk kimiawi hasil pertanian, proses pengangkutan, dan distribusi.

Meskipun demikian, proses ini juga memotivasi munculnya resistensi rakyat, baik laki-laki maupun perempuan di sektor pedesaan dan perkotaan. Resistensi rakyat terhadap kebijakan neoliberal terwujud dalam berbagai cara dan bentuk. Kini rakyat miskin semakin paham bahwa insititusi neoliberal global seperti IMF dan WTO berada di balik kebijakan-kebijakan neoliberal yang dilakanakan oleh pemerintah. Gerakan kaum miskin saat ini tidak lagi hanya menyalahkan negara sebagai penentu tunggal kebijakan-kebijakan neoliberal. Oleh karena itu, fenomena itu bisa dianggap melahirkan gerakan sosial sebagai usaha yang terorganisir dari banyak kelompok, seperti petani, masyarakat adat, buruh, kaum miskin urban, serta kaum perempuan, untuk melihat tidak hanya berusaha mengubah kebijakan negara yang mempengaruhi kehidupan mereka, tetapi juga mencegah agar negara tidak dikooptasi dan dipaksa oleh rezim pasar bebas untuk menjadi pelaksana kebijakan neoliberal mereka.

Oleh karena itu semakin banyak gerakan sosial mencoba untuk meningkatkan kesadaran kritis massa melalui pendidikan populer dan riset partisipatori, juga mentransformasi organisasi mereka dari organisasi *civil society* menjadi gerakan sosial melawan kebijakan neoliberal. Gerakan hak-hak kaum miskin yang merupakan gerakan yang didukung serikat petani, Non Government Organization (NGOs), organisasi hak asasi manusia, juga kalangan akademisi, pada dasarnya adalah Gerakan Sosial Baru (GSB) yang timbul sebagai respon atas kebijakan neoliberal. Konsorsium Pembaruan Agraria adalah sebuah konsorsium Non Government Organization (NGOs) yang berskala nasional. Ia adalah salah satu gerakan sosial yang luas di negara ini. Kenyataannya, Konsorsium Pembaruan Agraria pada awalnya merupakan sebuah aliansi advokasi LSM untuk merespon perselisihan dan kebijakan atas tanah dari *State-Led Development* di Indonesia. Selanjutnya, ia bertransformasi menjadi gerakan sosial melawan kebijakan neoliberal. Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) merupakan satu dari gerakan sosial yang kuat menentang modernisasi

dan kebijakan lingkungan neoliberal di Indonesia. Bahkan program *Integrated Pest Management* adalah sebuah gerakan sosial baru yang aslinya merupakan bagian dari proyek pembangunan pemerintah.

Gerakan sosial melawan Kebijakan neoliberal di Indonesia umumnya berangkat dari serikat petani *grassroot* dan masyarakat adat. Meskipun tidak setiap gerakan petani muncul sebagai reaksi terhadap neoliberalisme ataupun dengan kebijakan negara, namun kini semakin banyak rakyat miskin sadar bahwa ada kebijakan global yang mengontrol kebijakan negara dan berakibat pada pemiskinan mereka. Oleh karena itu saat ini sesungguhnya kita tengah menyaksikan bangkitnya aktivitas Non Government Organization (NGOs) yang berpotensi menjadi gerakan sosial untuk menghentikan neoliberalisme. Solidaritas perempuan merupakan sebuah jaringan nasional dari gerakan perempuan yang saat ini melihat kebijkan neoliberalsime sebagai ancaman kaum perempuan. Urban Poor Consortium (UPC) adalah gerakan sosial urban yang terkuat yang memiliki jaringan kaum miskin kota hampir di semua kota besar di Indonesia yang tengah bangkit untuk mempertahankan agar negara bebas dari kebijakan neoliberalisme. Sedang Koalisi Anti Utang merupakan gerakan sosial urban yang lain yang melihat pengaruh kebijakan neoliberisme pada kebijakan utang pemerintah. Konsorsium ini berupa aliansi luas dari NGOs yang *concern* pada utang dan kaitannya dengan kebijakan Bank Dunia, IMF dan WTO di Indonesia. Di banyak kota di Indonesia, terdapat NGOs yang membantu anak-anak jalanan memperjuangkan hak-hak anak. Hal ini sangat potensial menjadi gerakan sosial menentang pendekatan neoliberal atas komodifikasi pendidikan. Perhatian khusus perlu diberikan untuk mentransformasi jaringan advokasi dan program NGOs itu menjadi gerakan sosial melawan neoliberalisme dan kebijakan neoliberal. Bahkan, gerakan sosial terbesar lahir dari lingkungan organisasi non-sosial. Protes para buruh menolak privatisasi perusahaan semen terbesar dan tertua merupakan satu dari protes terbesar dalam industri. Protes serupa meledak di berbagai kota di Jawa menolak privatisasi PT Telkom merupakan fenomena kesadaran baru akan neokolonialisme. Tak lupa, mahasiswa dari berbagai universitas negeri yang berdemonstrasi menolak privatisasi perguruan tinggi negeri juga merupakan gejala bangkitnya perlawanan semesta menolak neoliberalisme. Tantangan terberat bagi tumbuhnya gerakan sosial di Indonesia adalah berhadapan dengan indoktrinasi ideologis dan hegemoni kultural dari dominasi kebijakan neoliberal dan globalisasi terhadap media massa dan kebijakan negara. Banyak pengajar di perguruan tinggi Indonesia malah 'mengamini' neoliberal di ruang-ruang kuliah. Gerakan *counter hegemony* harus disusun sebagai bagian dari strategi gerakan sosial merespon Kebijakan neoliberal. Salah satu strategi taktis *counter hegemony* adalah mendekonstruksi dan mendomistifikasi mitos-mitos neoliberal, seperti mitos dan diskursus *civil society*, mitos produk makanan genetis hasil GMO, mitos paten dan *intelectual property rights*, dan mitos seputar privatisasi.

Gerakan Sosial di Indonesia

Akhirnya yang harus dilakukan pada aras gerakan sosial di Indonesia adalah pertama, membela hak-hak rakyat dengan memastikan negara untuk menjaga dan melindungi hak ekonomi, budaya, dan sosial, serta mengimplementasikan ratifikasi Konvensi PBB atas Hak Asasi Manusia. Kedua, terus-menerus melakukan protes sosial untuk mengubah kebijakan negara dan mencermati kesepakatan negara dengan pasar bebas dan Kebijakan neoliberal. Ketiga, PR terbesar dan tersulit yang mesti dihadapi setiap gerakan sosial, adalah melakukan pegembangan kapasitas *counter discourse and hegemony* atas dominasi diskursus neoliberal terhadap demokratisasi, *good governance*, dan *civil society*. Kita di Indonesia, kini tengah menyaksikan tahap awal perkembangan gerakan sosial melawan kebijakan neoliberal. Kita juga berharap dapat terus mengikuti pertumbuhan gerakan rakyat untuk mendekonstruksi diskursus dominan dari perspektif neoliberal. Termasuk di dalamnya adalah gerakan mendekonstruksi diskursus *civil society* dan menggantinya dengan ide gerakan sosial melawan kebijakan neoliberal di Indonesia.

Pertempuran antara mereka yang mendukung kebijakan neoliberal dan mereka yang menghendaki rakyat sebagai pusat pengembangan ekonomi, dan bukan pula negara maupun modal, ternyata ada disegala tingkatan. Pada tingkat *policy* atau kebijakan, umumnya perebutan yang bersifat politik telah terjadi dan rakyat telah dikalahkan. Salah satu penyebab adalah mereka yang mewakili untuk membela rakyat di arena kebijakan juga dikalahkan. Gerakan Non Government Organization (NGOs) yang misi awalnya dirancang untuk membela kepentingan dan kedaulatan rakyat, justru telah dibajak agendanya untuk membela kepentingan kebijakan neoliberal dan sebagian malah menjadi pembela dari paham persaingan bebas. Tanpa mereka sadari, banyak gerakan NGOs telah menjadi bagian proses penyingkiran peran negara dari urusan ekonomi seperti dikehendaki oleh rezim persaingan bebas neoliberalisme.

Saat ini adalah saat yang baik bagi gerakan NGOs untuk menentukan pilihan, menjadi bagian resistensi rakyat dan "*social movement"* untuk tegaknya "*keadilan sosial."* Oleh karena sumber marginalisasi dan ketidakadilan sosial adalah invasi tekanan kebijakan neoliberal terhadap kebijakan negara, maka sudah waktunya gerakan sosial justru memfasilitasi lahirnya *social movement* atau menjadi bagian dari *social movement* untuk bebas dari neoliberalisme. Saat ini semakin banyak rakyat mulai menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari kebijakan neoliberalisme yang dianut oleh pemerintah. Oleh karena itu, pilihan bagi NGOs untuk bebas neoliberalisme atau justru menjadi subkontraktor neoliberalisme yang akan menentukan relevansi gerakan sosial di masa mendatang. Namun kelihatannya agenda yang semakin jelas yang harus diperjuangkan baik kaum miskin maupun gerakan sosial adalah bebas dari privatisasi yang didorong oleh kebijakan neoliberalisme.

Referensi Primer

Amin, Samir, 1976, *Development.* New York: Monthly Review Press.

____, 1990, *Capitalism in the age of Globalization: The management of contemporary Society,* London: Zed Book.

Arief**,** Saiful, 2000, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiman, Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia.

Bell, S., 1997, "Globalization, Neoliberalism and The Transformation of the Australian state", *Australian Journal of Political Science* 32 (3).

Bastian, Indra, 2002, *Privatisasi di Indonesia: Teori & Implementasi.* Jakarta: Salemba 4-PPA FE UGM.

Boaz, David, (1997). *Libertarianisme, A Primer.* New York: Free Press

Clutterbuck, David, Susan Kernaghan, & Deborah Snow, 1991, *Going Private: Privatisation Around the World.* London: Mercury Books

Chomsky, Noam, 1999, *Profit Over People, Neoliberalism and Global Order*. New York: Seven Stories Press.

Cord, Robert L., *et. al.,* 1985, *Political Science: An Introduction* (Second Edition; New Jersey: Prentice Hall Inc.,

1999, *Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan,* Jakarta: ELSAM,.

____, 1994, *Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Terjemahan. Jakarta: Forum Komunikasi Ormas/LSM untuk Perempuan.

____, 1999, *Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan,* Jakarta: ELSAM.

Downs, Anthony, 1957, *An Economic System of Democracy,* New York: Harper & Row,

Drucker, Peter, 1986, *The New Realities.* New York: Free Press

Dueck, Judith; Guzman, Manuel; Verstappen, Bert, 2000, *Huridocs Events Standard Formats: A Tool for Documenting Human Rights Violations,* Geneva: Huridocs.

Dueck, Judith; Guzman, Manuel; Verstappen, Bert, 2000, *Huridocs Events Standard Formats: A Tool for Documenting Human Rights Violations,* Geneva: Huridocs.

Ebenstein, William dan Edwin Fogelman, 1994, *Isme-isme Dewasa ini,* terj. Alex Jemadu, Jakarta: Erlangga,

Friedman,Thomas, 2000, *The Lexus and The Olive Three: Understanding Globalization*

Fakih, Mansour, 1996, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial; Pergolakan Ideologi LSM Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

____, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi,* Yogyakarta Insist Press.

_____, 2003, *Bebas Dari Neoliberalisme,* Yogyakarta: Insist Press.

Gill, S., 1995, "Globalization, Market Civilization and Disciplinary Neoliberalism,***"*** *Millenium,* 24: 3 399V 423.

Giddens, Anthony, 2000, *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial,* Jakarta: Gramedia.

Haque, M. Shamsul, "The Intelectual Crisis in Public Administration in The Current Epoch of Privatization, dalam *Administration and Society,* 27 Februari 1996.

Hermann, Peter, "Monopoly Watch," Dokumentasi Proses Seminar Sehari *Indonesian Business Competition: Present and Future Challenge,* Hotel Park Plaza, Jakarta, Mei 2002.

Khoirie, A. Effendi, 2003, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia,* Jakarta: LP3ES.

Keraf, A. Sonny, 1996, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Ekonomi Politik Adam Smith,* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Kay J. A., dan D. J. Thomson,"Privatization: A Policy individu Search of a Rationale," dalam *Economic Journal,* No. 96, Tahun 1986.

Krisna, Didi, 1993, *Kamus Politik Internasional,* Jakarta: Grasindo.

Madley, John, 1999, *Big Business, Poor Peoples; The impact of Transnational Corporations on the Worlds Poor,* London: Zed Book.

McMichael, Philip, 1996, *Development and social change; a global perspectiv*e, California: Pine Forge Press.

Miranda, Gregorio S., 1979, *International Trade,* Manila: Business House.

Motis, Thoby, 2002, *Cakrawala Demokrasi Ekonomi,* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Pranarka, A.M.W., "Pasal 33 UUD 1945: Wawasan Dasar dan Konstruksi Operasionalnya, Suatu Tinjauan Ideologis,"dalam A*nalisa CSIS*, Tahun IV, No. 12, Desember 1986,

Payer, C., 1985, "The IMF in the 1980s: What has it Learned; what have We Learned about it?" In Third World Foundation (Ed.), *Third World Affairs 1985,* Boulder, CO: WestView.

Ranney, Austin, 1996, *Governing, An Introductions to Political Science (7th),* London: Prentice Hall Internatioal, Inc.

Rostow, WW, 1960, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, New York: Cambridge University Press.

Roxborogh, I., 1985, *Theories of Underdevelopment.* London: MacMillan.

Rosenberg, Nathan, 1979, "Adam Smith and Laissez Faire Revisited", dalam Gerald P. O'Driscoll (ed.), *Adam Smith and Modern Political Economy, Bicentennial Essays on "The Wealth of Nations",* Lowa: Iowa State University Press.

Rodee, Carlton Clymer, *et. al.,* 2000, *Pengantar Ilmu Politik,* terj. Zulkifli Hamid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sachs, W. (Ed.). 1992, *The Development Dictionary, A Guide to Knowledge as Power*, London: Zed Books:

Shutt, H., *The Trouble with Capitalism: An Inquiry to the causes of Global Economic Failure,* London: Zed Book.

Smith, Adam, 1776, *The Wealth of Nations*.

Tjokrowinoto, Moeljarto, *Konsep dan Isu Pembangunan Nasional*, Diktat Kuliah MAP UGM, tanpa tahun.

Kompas, 16 Desember 2002

MATERI 18
DEVELOPMENTALISME & DAMPAK INDUSTRIALISASI NEGARA KETIGA

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

Developmentalisme & Dampak Industrialisasi Di Negara Dunia Ketiga (Perspektif Ekonomi-Politik)

Perspektif Diakronis Developmentalisme

Dalam dua dasawarsa terakhir, pembangunan dalam bahasanya Fakih (1996), telah menjadi semacam "agama baru" atau pun ideologi baru bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. Pembangunan menjanjikan harapan baru bagi perubahan dan perbaikan dalam nasib kehidupan mereka. Dari sekian banyak pembahasan tentang teori-teori pembangunan, lazimnya selalu berangkat dari dua urutan historisitas pemikiran ekonomi, yaitu dari paradigma ekonomi klasik dan neoklasik (Keynesian). Pada gerbong ekonomi klasik dimotori Adam Smith, David Richardo dan Thomas Malthus. Sementara itu, dalam paradigma yang berbeda dan bahkan bermusuhan, Karl Marx dan Lenin dengan sosialismenya memberikan kontribusi penting bagi perkembangan pemikiran ekonomi klasik.

Sementara pada gerbong lain, ekonomi neo-klasik dikomandani J.M. Keynes, R. Horrad dan E. Domar, serta WW. Rostow dkk. Pada periode inilah pemikiran ekonomi mulai diletakkan pada posisi penting konsep pertumbuhan ekonomi dalam skala makro. Secara sederhana bisa dilukiskan bahwa pandangan tersebut menyebutkan adanya hubungan antara agregat konsumsi dan investasi. Pada periode ini pula pendapat-pendapat ekonomi mulai diletakan pada pemikiran tentang perekonomian nasional serta dampaknya dalam rangka menurunkan angka pengangguran *(unemployment),* serta mulai memperkenalkan konsep stabilitas ekonomi dan politik secara nasional.

Berbeda dengan pandangan di atas, Peter Berger tampaknya cenderung lebih simpel dan tegas dalam membuat kategorisasi model teori pembangunan. Dia membagi teori pembangunan dalam dua perspektif besar yang saling kontradiktif, yaitu pembangunan yang berciri kapitalistik dan pembangunan yang berciri sosialistik. Tapi sayang, Berger terlalu terburu-buru mengatakan bahwa jika dalam sebuah negara terdapat ciri kepemilikan aset produktif ditangan individu maka disebutnya kapitalisme. Pengklasifikasian sistem ekonomi semacam itu sudah menjadi kebiasaan dan menjadi perbincangan umum, meskipun sebenarnya sulit diterima apalagi oleh negara-negara Dunia Ketiga yang jelas tidak mengalami kronologi historis kapitalisme-komunisme ala Barat.[259]

Arief Budiman (1995) mencoba membagi teori pembangunan menjadi tiga kategori besar, yaitu teori modernisasi, dependensi dan pascadependensi. Teori modernisasi menekankan pada faktor manusia dan budayanya yang dinilai sebagai elemen fundamental dalam proses pembangunan. Ketegori ini dipelopori oleh orang-orang seperti 1) Horrad Domar dengan konsep tabungan dan investasi, 2) Weber dengan tesis Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, 3) David McClelland dengan konsep kebutuhan berprestasi (N-ach), 4) W.W. Rostow dengan lima tahap pertumbuhan ekonomi, 5) Alex Inkeles dan Adam Smith dengan konsep manusia modern, serta 6) Bert Hoselitz dengan konsep faktor-faktor non-ekonomi.[260]

Sementara itu perspektif lain yang lebih rumit karena membagi teori pembangunan menjadi dua kategori besar yaitu perspektif diakronis yang berdasarkan urut-urutan terbentuknya atau historis paradigma pembangunan dan perspektif taksonomis yang berusaha membuat kategori dengan tolok ukur tertentu. Secara diakronis, teori pembangunan yang masuk dalam kategori ini adalah teori pertumbuhan (*growth*), teori kesejahteraan (*welfare*), teori neo-ekonomi, teori strukturalis yang terdiri dari teori dependensia dan teori pascadependensia, serta teori humanis. Sedangkan teori *equilibrium* yang meliputi teori psiko-dinamika, *behavioralisme, diffusionisme*, dualisme, fungsionalisme struktural serta teori konflik yang meliputi teori struktural marxis, teori struktural non-marxis dikategorisasikan dalam model *taksonomis.*[261]

Secara teoretis, diskursus pembangunan memang acap kali dilandasi perspektif yang berbeda dan kadang menimbulkan perdebatan sengit. Perbedaan teoretik ini dianggap wajar karena bermula dari perbedaan paradigma atau sudut pandang yang berupa ruang, waktu, sekaligus kepentingan yang berbeda pula. Tetapi meskipun paradigma yang dipergunakan untuk menjelaskan pembangunan tersebut berbeda, hal ini tetap tidak menghalangi penyimpulan yang menyatakan bahwa kajian pembangunan adalah kajian tentang perubahan sosial *(social change).* Hampir keseluruhan pembahasan pembangunan selalu menyinggung tentang proses perubahan dalam suatu masyarakat dari kondisi tertentu ke kondisi lain. Dengan bahasa lain, pembangunan bisa diartikan sebagai proses perubahan dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat industrial-modern. Oleh karena itu pembangunan acap diberi pengertian sebagai proses perubahan tatanan hidup masyarakat yang sengaja direncanakan *(planned social change).*

---

[259] Dalam Saiful Arief**,** 2000, *Menolak Pembangunanisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 97-99.

[260] Lihat Arief Budiman 1995 dalam *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia.

[261] Lihat Moeljarto Tjokrowinoto, *Konsep dan Isu Pembangunan Nasional*, Diktat Kuliah MAP UGM, tanpa tahun, hlm. 9-10.

Pembangunan Sebagai Konsep Perubahan Masyarakat

Sebagai konsep perubahan masyarakat yang direncanakan, pembangunan jelas bukan merupakan konsep yang netral dan bebas nilai *(value free).* Pembangunan adalah konsep yang sarat dengan muatan nilai atau *value loaded*[262] dan juga sarat dengan kepentingan. Hal ini tidak lepas dari konteks kegalauan dan kegelisahan negara-negara Dunia Ketiga dalam mewujudkan masyarakat dan negara yang dicita-citakan setelah memperoleh kemerdekaan. Dalam pikiran mereka, tidak mungkin mewujudkan cita-cita nasional dengan menyerahkannya pada proses evolusioner, spontan dan alami sebagaimana proses sejarah yang telah dilalui oleh negara-negara maju. Negara-negara Dunia Ketiga dituntut untuk mewujudkan cita-citanya dalam kurun waktu yang jauh lebih singkat dari proses sejarah yang dilalui negara-negara maju untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Tuntutan inilah yang mendorong negara Dunia Ketiga untuk melakukan proses perubahan sosial yang terencana *(a planned social change),* yang kemudian terkenal dengan sebutan "pembangunan."[263]

Secara normatif, konsep pembangunan didefinisikan sebagai proses transformasi segala bidang dari kondisi tertentu menuju kondisi lain yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah jalan untuk mencapai suatu masyarakat yang beradab dan sejahtera. Hal itu senada dengan pendapat Saul M. Katz, yang memberi penjelasan bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional tertentu menuju kondisi nasional lain yang dianggap lebih baik. Pembangunan terkait dengan apa yang dianggap baik dan buruk menurut pengalaman historis sebuah bangsa. Katz membagi pengertian pembangunan dalam dua model, yaitu 1) *culture spesific*, sebuah konsep pembangunan didasarkan pada negara mana yang melaksanakannya, dan 2) *time spesific*, didasarkan pada waktu pelaksanaannya.

Pembangunan menurut Michael P. Todaro dalam *Economic Development in the Third World,* adalah proses multidimensional yang meliputi reorganisasi dan reorientasi sistem sosial dan ekonomi. Sementara itu, Emmanuel Subangun (1994) memberikan definisi sekaligus interpretasi bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang bisa menjamin adanya konsolidasi sistem dan membuka peluang baru. Dalam artian seperti ini maka pembangunan harus ditafsirkan sebagai perbaikan tata pergaulan secara terus menerus yang melingkupi seluruh sistem pergaulan.

Untuk memahami model-model pembangunan yang diterapkan oleh sebuah negara, Martin Staniland (1985) membuat kategorisasi kedalam empat orientasi, yang selanjutnya menjadi fokus utama ke arah mana pembangunan itu dijalankan oleh negara tersebut. Pertama, *Orthodox Liberalism* adalah bentuk yang diterapkan oleh negara yang dalam proses pembangunannya sangat mengagungkan konsep individualisme. Konsep ini menganggap bahwa, masyarakat hanya bisa sekedar agregasi dari sintesa seluruh kepentingan individu. Model ini biasa dipakai negara-negara dengan sistem ekonomi kapitalis. Kedua, *Social Critique of Liberalism* adalah respon dari model yang pertama. Pandangan ini menghujat keras pandangan liberal ortodoks yang seolah-olah menegasikan kepentingan sosial dalam pembangunan ekonomi. Menurut pandangan ini, model pembangunan yang pertama mengesankan bahwa kehidupan individu berada dalam isolasi dan ruang kosong. Karenanya kepentingan sosial harus disertakan dalam pembangunan ekonomi. Termasuk dalam kategori model ini adalah *welfare theory, humanizing theory,* teori kritik. Ketiga, *Economism Perspective*. Sepintas model ini mirip dengan liberal-ortodoks. Perbedaannya adalah bahwa posisi kebijakan-kebijakan ekonomi dianggap sebagai segala-galanya. Kebijakan politik dan aktivitas kenegaraan atau non-ekonomi lainnya harus ditentukan oleh tindakan-tindakan ekonomi. Indonesia pada masa rezim Orde Baru dapat dikategorikan penganut model pembangunan ini. Keempat, *Politicism Perspective* merupakan kebalikan dari model *economism*. Menurutnya, justru faktor politiklah yang mesti dominan dalam seluruh rangkaian kebijakan ekonomi. Model ini dianut pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpinnya Soekarno.

Berikut beberapa definisi teori pembangunan dari beberapa tokoh dunia yang berhasil terangkum dalam tulisan ini. Harrod Domar dalam teori pertumbuhannya yang menginterpretasikan pembangunan sebagai identik dengan pembangunan ekonomi merumuskan bahwa "pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan *directly* atau *positively* oleh *saving ratio* dan *negatively* oleh *Capital Output Ratio* (COR)." Makin besar *saving* dan makin kecil COR, maka makin besar pertumbuhan ekonomi suatu negara.[264] Penganut teori pertumbuhan lainnya, Simon Kuznetz berpendapat bahwa, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan yang baik baru akan tercapai setelah melewati periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ketimpangan. Selama pertumbuhan agregat tumbuh *sustainable*, maka walau pada awal pertumbuhan terjadi *diverhensi* (ketimpangan yang naik), tapi pada saatnya akan terjadi *konverhensi* yang untuk mencapainya harus diciptakan pusat-pusat pertumbuhan. Pendapat di atas dikemukakan oleh Williamson dalam teori diverhensi dan konverhensi.[265]

$$\Delta \frac{Y}{Y} \approx \frac{s}{K}$$

[262] *Ibid*, hlm. 7.

[263] Lihat Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 89-90.

[264] Rumus yang buat Domar dalam menjelaskan teori pertumbuhan adalah dimana makin besar *saving* yang diinvestasikan dan makin kecil COR, maka makin besar pertumbuhan ekonomi. Domar juga menganggap bahwa ketimpangan adalah *social necessity* karena akan menjadi *productive base* karena dengan ketimpangan, golongan kaya akan dapat melakukan *saving* untuk investasi, lihat Moeljarto Tjokrowinoto dalam *Konsep dan Isu Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: Diktat MAP-UGM.

[265] *Ibid*, hlm. 15.

Rostow dengan teori pentahapannya *(linear theory)*, melihat bahwa proses transisi dari *underdevelopment* menuju *development* dapat digambarkan sebagai serangkaian tahap-tahap yang juga akan dilalui oleh semua negara.[266] Rosenstein Rodan dan Ragnar Nurkse dengan paradigma pertumbuhan yang berimbang *(balance growth)* menentang upaya pembangunan yang bersifat gradual dan incremental, Karena proses pembangunan ini tidak akan membawa suatu bangsa ke tataran hidup yang lebih baik. Untuk mengatasi diskontinuitas pembangunan perlu dorongan besar *(big push)* melalui investasi simultan di pelbagai sektor kegiatan ekonomi. Investasi kapital sinkronis pada aneka ragam industri merupakan tindakan tepat untuk mengatasi kegagalan pembangunan *(balance growth)*.[267]

Albert O'Hirschman tidak menolak pandangan di atas, tetapi ia mengusulkan adanya "*big push*" tidak secara simultan di sejumlah besar industri,[268] akan tetapi di beberapa industri yang dipilih secara strategis dengan asumsi bahwa pembangunan berproses melalui difusi pertumbuhan dari *leading sector* dalam ekonomi suatu negara menuju ke *lagging sector*. Industri yang bersifat strategis menurutnya adalah industri yang mempunyai keterkaitan ke belakang *(backward linkage)* dan keterkaitan ke depan *(forward linkage)* yang optimal.

Ketidakpuasan para pakar terhadap konsep paradigma pertumbuhan yang fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukur yang bersifat agregat seperti angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dipandang tidak dapat mengungkap apa yang dialami sebagian besar penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Karenanya muncul paradigma kesejahteraan yang yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Overseas development Council menggunakan ukuran kesejahteraan PQLI *(physical quality of live index)* yang mencakup angka kematian bayi, harapan hidup bayi umur satu tahun, dan tingkat literasi sebagai standar untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan.[269]

Sementara dalam buku *The Asian Drama* (1968), Gunnar Myrdal menegaskan bahwa, agar sasaran pembangunan yang berupa realisasi potensi kepribadian manusia dapat tercapai, maka syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok[270] harus terlebih dulu terpenuhi. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan mutlak (*absolute necessity*) yang harus dipenuhi.

Kemudian dalam konsep *redistribution with growth*, Hollis Chenery menyadari arti pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang pada khususnya dan negara-negara pada umumnya, akan tetapi di lain pihak dia juga melihat kecenderungan munculnya ketimpangan sosial akibat pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan terkonsentrasinya kekayaan dan kekuasaan pada beberapa negara maju dan pada golongan masyarakat lapisan atas, serta marginalisasi negara-negara berkembang dan golongan miskin dalam masyarakat. Untuk mengatasinya, ia mengusulkan penekanan pada pertumbuhan dengan redistribusi hasil pembangunan melalui paradigma *redistribution with growth,* dengan merekomendasikan agar supaya negara-negara kaya mentransfer 2% dari GNP-nya per tahun kepada negara miskin. Ia juga mengusulkan *transfer of resources* dari pelapisan atas ke pelapisan bawah, misalnya melalui sistem perpajakan progressif *(progressive tax system)*.[271]

Penganut teori akumulasi kapital Arthur Lewis memahami pembangunan sebagai upaya pembentukan modal dengan dukungan buruh dalam jumlah tak terbatas. Sementara definisi yang bertentangan dengan pendapat di atas dikemukakan oleh T.W. Shultz yang menyarankan agar kebijakan pembangunan mencakup juga sasaran-sasaran sosial dan ekonomi, dimana perlu tindakan nyata untuk membatasi konsentrasi kekayaan melalui pendidikan dan pajak redistribusi.

Para tokoh paradigma neo-ekonomi berpendapat bahwa pengalaman pembangunan tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa, meskipun banyak negara-negara berkembang yang berhasil mencapai target pertumbuhan ekonominya sebesar lebih dari 5 persen rata-rata pertahun—sebagaimana yang ditargetkan oleh PBB—akan tetapi nasib sebagian terbesar rakyat miskin tidak mengalami perbaikan. Karena itu mereka menghendaki *dethronement of GNP* sebagai tolok ukur pembangunan dan meredefinisikan kembali paradigma pertumbuhan (Todaro, 1997: 61). Dudley Seers yang juga Rektor

---

[266] Dalam gambaran Rostow, masyarakat di dunia ini akan mengalami tahapan-tahapan yang sama dalam mencapai kemakmuran. Tahapan yang harus dilalui itu adalah: 1) masyarakat tradisional, 2) pra kondisi untuk tinggal landas, 3) tinggal landas, 4) *self sustaining growth*, 5) bergerak ke kedewasaan, dan 6) *hight mass consumption*. *Ibid*, hlm. 17.

[267] Rosenstein Rodan (1943) melihat adanya kendala dan hambatan pembangunan yang diakibatkan oleh adanya mekanisme pasar. Untuk mengatasinya, diperlukan konsep *externalities* yang meliputi, pertama tidak dipisah-pisahkannya suplai *social overhead capital/infrastructure (lumpiness capital)*; kedua tidak dipisah-pisahkannya permintaan *(indivisibility of demand)*. Sementara itu, Ragnar Nurkse melihat bahwa kebanyakan negara Dunia Ketiga terperangkap dalam lingkaran setan keterbelakangan (*vicious circle of underdevelopment*) yaitu pendapatan yang rendah merefleksikan produktivitas yang rendah yang disebabkan kurangnya modal. Kurangnya modal disebabkan kemampuan menabung yang rendah. Karena itu untuk mengatasinya diperlukan suatu serangan frontal…gelombang investasi dalam sejumlah industri yang beraneka ragam. Untuk lebih jelasnya lihat Tjokrowinoto, *ibid*, hlm. 25-26.

[268] Konsep O'Hirschman ini lebih dikenal dengan paradigma pertumbuhan tidak berimbang *(unbalance growth)* yang mengamini adanya *big push* untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan investasi kapital secara simultan diberbagai industri. Tapi faktor modal menjadi kendala utama dalam pembangunan di negara berkembang untuk investasi simultan tersebut.

[269] Tjokrowinoto, *ibid*, hlm. 20-21.

[270] Tahun 1976, Dirjen ILO menjelaskan empat kategori kebutuhan pokok, yaitu Pertama, persyaratan minimum untuk keluarga, meliputi kecukupan pangan, rumah dan pakaian; kedua, akses masyarakat pada pelayanan publik; ketiga, peluang kerja bagi yang mau dan mampu; keempat, pemuasan kebutuhan yang bersifat kualitatif.

[271] Tjokrowinoto, *loc.cit.,* hlm. 37-38.

Unversitas Sussex mengatakan, "Dengan singkat, pembangunan ekonomi didefinisikan kembali ke dalam pengertian pemberantasan atau penurunan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran di dalam konteks pertumbuhan ekonomi."

Tokoh pembangunan asal Pakistan Mahbub Ul Haq mengkritik pembangunan yang di lakukan negara ketiga tahun 1960-an. Ada efek-efek buruk yang ditimbulkan oleh pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan yaitu pencitraan masyarakat Barat (*demonstration effect*) sebagai model masyarakat ideal yang ingin mereka wujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya (*compression effect*), pencampuradukkan sistem kapitalisme liberal dan sistem sosialisme dalam mengejar angka GNP setinggi-tingginya (*fusion effect*), dan kepercayaan bahwa kemiskinan dapat dihapuskan melalui mekanisme *trickle down effect* setelah terwujud pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena itu Mahbub Ul Haq mengusulkan agar negara-negara berkembang menerapkan gaya pembangunan (*style of development*) yang lain, yang tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Gaya pembangunan tadi harus lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dan tidak meniru gaya pembangunan negara-negara barat.[272]

Tokoh teori pembangunan manusia *(humanizing theory*) Misra menegaskan, "Pembangunan yang berkemanusiaan tidak berarti de-industrialisasi, tidak pula berarti penolakan terhadap teknologi modern. Hal itu tidak berarti ruralisasi masyarakat manusia, bukan pula berarti cara hidup sosio-teknologis penghuni gua-gua. Pembangunan berkemanusiaan bukan pembenaran *zero-growth economy*; bukan pula pembenaran pertumbuhan ekonomi yang amat tinggi demi pertumbuhan itu sendiri. Kesemuanya valid, selama hal itu memungkinkan manusia hidup lebih baik dan selama tidak memperbudak manusia, membawa kepada kekerasan, menyebabkan rakyat kehilangan keseimbangan mental dan kesehatan fisik dan mengakibatkan ketidakseimbangan masyarakat manusia."[273]

Pelopor teori pembangunan yang lebih manusiawi Ivan Illich ingin mengakhiri dominasi teknologi atas manusia dengan mewujudkan suatu bentuk masyarakat yang disebut "*masyarakat convivial.*" Dalam masyarakat tersebut akan berlangsung hubungan *(intercourse)* yang otonom dan kreatif antara orang yang satu dengan yang lain dan antara manusia dengan lingkungannya. Masyarakat ini merupakan kebalikan dari "*produktivitas industrial*" dimana respon manusia terhadap tuntutan sesama manusia dan terhadap lingkungan merupakan respon yang dipaksakan *(conditioned response)*. Masyarakat convivial merefleksikan kebebasan individual yang diwujudkan dalam bentuk interdependensi pribadi antara sesama manusia dan karenanya mempunyai nilai etis yang intrinsik. Masyarakat ini terwujud jika pengaturan sosial *(social arrangement)* menjamin akses yang luas dan bebas bagi setiap anggotanya kepada alat atau teknologi yang ada dalam masyarakat.

Hal senada juga dikemukakan Paulo Freire, pakar pendidikan asal Brazil yang melihat bahwa proses pembangunan dapat menumbuhkan sistem politik opresif yang cenderung mendegradasikan hakekat manusia, mendehumanisasikan manusia. Dan ini berakibat buruk pada: a) manusia mengalami proses konversi menjadi penonton pasif *(passive spectator)*, dikuasai oleh mitos-mitos yang diciptakan oleh kekuatan sosial yang berkuasa; b) manusia mengalami keterasingan kultural *(cultural alienation)* karena hidup terpisah dari realita yang ada karena tidak mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya; c) manusia juga menjadi objek masifikasi *(massification)*, di mana rakyat telah dimanipulir oleh elit menjadi "*unthinking manageable agglomeration*"; d) manusia mengalami *assistensialisme*, selalu menggantungkan diri pada bantuan orang lain; e) terjadi 'budaya bisu' *(the silence culture)* atau *mutism* di mana masyarakat tidak berani lagi mengemukakan pendapatnya. Untuk mengakhiri itu, perlu dilakukan dengan pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis atau *conscientizacao* melalui pendidikan yang bersifat dialogis. Kesadaran transitif yang kritis itu ditandai dengan mendalamnya interpretasi terhadap masalah; oleh digantinya penjelasan yang magistis dengan azas-azas sebab akibat; oleh pembuktian dari temuan seseorang dan keterbukaan terhadap revisi; oleh upaya menghindari distrorsi dalam melihat persoalan dan menghindari praduga dalam menganalisisnya; oleh penolakan menghindari tanggung jawab; oleh penolakan posisi yang pasif; oleh sukarnya argumentasi; oleh praktek dialogis dan polemik; oleh pembinaan idea baru bukan semata-mata karena baru dan akal sehat tidak menolak yang lain hanya semata-mata karena hal tadi lama semata-mata oleh penerimaan apa yang valid, baik dari yang lama maupun yang baru.

Denis Goulet dalam bukunya *The Cruel Choice* (1973) melihat keterbelakangan *(underdevelopment)* tidak semata-mata sebagai kemelaratan dan pendapatan yang rendah. *Underdevelopment* merupakan bentuk dehumanisasi, karenanya untuk dapat menghayatinya, orang harus memahami alam pikiran keterbelakangan tadi. Bagi Goulet, pembangunan tidak hanya masalah ekonomi, tetapi masalah kemanusiaan. Karenanya tolok ukur keberhasilan pembangunan menurutnya adalah, *life sustenance, self esteem,* dan *liberation.*

Alberto Guerreiro Ramos (1976) melihat terjadinya kecenderungan pembangunan nasional untuk menumbuhkan dominasi manusia oleh *enclave* pasar, pada hakekatnya telah menumbuhkan proses uni-dimensionalisasi kehidupan manusia menjadi makhluk yang hanya peka terhadap rangsangan-rangsangan yang ditumbuhkan oleh mekanisme pasar. Oleh Karena itu upaya untuk membebaskan manusia dari dominasi pasar, Ramos mengidealkan sebuah masyarakat yang ia sebut sebagai masyarakat isonomi,

---

[272] *Ibid*, hlm.44-48.
[273] *Ibid*, hlm.50.

dimana pasar hanya merupakan salah satu *enclave* dalam realita sosial yang bersifat multi-sentrik; sedangkan individu hanyalah secara kebetulan bersifat sebagai pemaksimum manfaat.

David Mc Clelland dalam bukunya *The Achieving Society* (1963) menunjuk faktor mikro individual dalam mencari penyebab keberhasilan atau kegagalan pembangunan. Faktor mikro indivudual tadi adalah faktor internal psikologis yang disebutnya sebagai "*achievement motivation*" atau N-ach. Alex Inkeles menyatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan pembangunan diakibatkan oleh faktor mikro atau psikologi individual yang berproses ke arah modernitas melalui transformasi karakteristik dari pribadi tradisional ke pribadi modern sebagai akibat proses belajar dari lingkungan eksistensi dan pengalaman hidup.

Daniel Lerner dalam hasil laporan penelitian yang ditulis dalam buku *The Passing of Traditional Society* (1968) melihat bahwa proses modernisasi sebagai problem kemanusiaan yang memerlukan transformasi yang sistematis terhadap gaya hidup seseorang. Modernisasi dipandang sebagai pergerakan atau pergeseran dari masyarakat *non-participant* yang ditandai dengan sempitnya cakrawala masyarakat dan ideologi nasional, menuju masyarakat partisipan dimana *public affairs* yang melintasi batas lokal dibuat oleh anggota masyarakat.

Arief Budiman menjelaskan bahwa pembangunan pada akhirnya mesti ditujukan pada manusianya lagi. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif, mereka harus merasa bahagia, aman dan bebas dari rasa takut. Karenanya mesti diciptakan lingkungan politik dan budaya yang kondusif, sehat dan dinamis. Dari berbagai macam konsep pembangunan di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak sepadan dengan pertumbuhan ekonomi, di mana pada saat bersamaan tidak ada pembangunan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan, dapat dikurangi dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan ekonomi. Karenanya, pembangunan merupakan proses perbaikan dan perubahan yang lama, *indegenous*, dan tiap negara punya konsep sendiri dalam pembangunan. Tetapi pembangunan juga bersifat global, karena segala sesuatu saling berkaitan. Tapi satu point yang harus tetap dipegang, sebagaimana yang diucapkan Johan Galtung, "Pembangunan adalah membangun manusia, bukan benda."[274]

Secara keseluruhan, pemahaman tentang konsep pembangunan yang dikemukakan di atas lebih bersifat teoretik dan terkesan imajinatif. Pandangan-pandangan tersebut bisa dipahami sebagai sebuah harapan dari diselenggarakannya pembangunan oleh negara Dunia Ketiga, yakni untuk mewujudkan cita-cita nasional mensejahterakan kehidupan rakyat. Secara normatif, konsep pembangunan bertujuan sangat mulia, yakni untuk mencapai *progress* dan menuju peradaban yang lebih tinggi (Stan Burkley, 1993: 27). Hal ini bisa dilihat dari parameter standar yang disepakati dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Arief Budiman (1995) dan Subarsono (1997) menggunakan parameter kekayaan rata-rata, tingkat pemerataan, tingkat kualitas kehidupan, kerusakan lingkungan, dan keadilan sosial dan kesinambungan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sesungguhnya ralita yang sedang terjadi? Bagaimana ihwal pembangunan bisa bergeser menjadi sebuah ideologi yang teramat mempesona yang bernama developmentalisme bagi Dunia Ketiga?

Relasi Pembangunan, Negara dan Masyarakat Dunia Ketiga

Developmentalisme, seperti yang sudah disinggung di awal tulisan ini, dalam praktiknya dianggap sebagai satu-satunya tujuan bagi kebanyakan masyarakat Dunia Ketiga dan dijadikan sebagai alternatif yang harus dilakukan. Pembangunan menjadi hal yang harus dilakukan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera secara ekonomis. Sebagaimana dikatakan oleh Fakih (1996), bahwa realitas pembangunan terkait erat dengan peran penting pemerintah sebagai penyelenggara negara. Di sebagian besar bangsa Dunia Ketiga, penafsiran konsep pembangunan dipahami sebagai perbaikan umum dalam standar hidup. Pembangunan juga dipahami sebagai sarana memperkuat negara, terutama melalui proses industrialisasi yang mengikuti pola yang seragam dari satu negara dengan negara lainnya. Dari perspektif seperti ini, peran pemerintah menjadi subjek pembangunan yakni memperlakukan rakyat sebagai objek, resipien atau penerima, klien bahkan partisipan pembangunan.[275]

Ini yang kemudian membuat pembangunan diterima begitu saja oleh birokrat, akademisi dan aktivis Ornop tanpa mempertanyakan landasan ideologis dan diskursusnya. Pertanyaan terhadap pembangunan semata-mata hanya mengenai metodologi atau pendekatan dan bagaimana teknik pelaksanaan pembangunan. Padahal yang seharusnya perlu dipertanyakan secara teoretis adalah justru pembangunan itu sendiri dianggap merupakan gagasan yang kontroversial atau bahkan kontra-produktif. Benarkan pembangunan benar-benar merupakan jawaban untuk memecahkan masalah bagi berjuta-juta rakyat Dunia Ketiga,[276] atau semata-mata merupakan alat untuk menyembunyikan penyakit yang lebih mendasar?

[274] Setidaknya Vivekananda melihat fenomena peningkatan penderitaan dan kemiskinan mayoritas orang miskin disebabkan oleh ketergantungan pembangunan dan *maldevelopment.* Dampak negatif pembangunan berakibat pada pemusatan kekayaan, ketimpangan distribusi pendapatan, terkonsen-trasinya kekuasaan pada militer dan tuan tanah. Ini membuka jalan bagi pengeluaran tak terencana, ketidaktepatan penggunaan bantuan asing dan proyek yang cacat, meningkatkan korupsi dan akhirnya kekerasan politik. Untuk lebih jelasnya lihat Franklin Vivekananda (ed.), 1987, *Promises and Process of Maldevelopment,* Stockholm: Bethany Books.

[275] Lihat Mansour Fakih**,** 1996, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 71.

[276] *Ibid*, hlm. 7.

Pemahaman yang lebih mendalam, sebenarnya konsep pembangunan Dunia Ketiga adalah konsep yang diberikan secara sepihak oleh kapitalisme Dunia Pertama. Seperti yang dikatakan oleh Mueller (1987), *Peasant and Professionals: The Production of Knowledge in the Third World*, bahwa pembangunan adalah seperangkat praktik yang dikendalikan oleh pranata-pranata Dunia Pertama. Hubungan antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga memang sengaja diciptakan. Dunia Ketiga diberi pengertian sebagai negara miskin dan terbelakang, sementara negara Dunia Pertama diberi label sebagai negara industri maju dan modern.

Pendapat di atas didukung oleh Fakih yang menyatakan bahwa, penciptaan dan globalisasi diskursus pembangunan dapat dipahami dengan sangat baik bila melihat sejarahnya yang dimulai pada akhir perang dunia kedua, yakni ketika presiden Harry S. Trumen untuk pertama kalinya memperkenalkan kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat yakni dengan melontarkan istilah "keterbelakangan" *(underdevelopment)* untuk menyebut negara-negara Amerika Selatan, Sub Sahara dan negara-negara continental yang baru merdeka dari penjajahan negara kolonial. Inilah saat pertama diskursus pembangunan secara resmi diluncurkan, yakni dalam kaitan dan konteks "perang dingin."[277] Maksud kebijakan ini adalah dalam rangka membendung pengaruh komunisme dan sosialisme di negara-negara Ketiga (Lummis dalam Fakih, 1996: 71). Setelah lebih dua dasawarsa developmentalisme dilaksanakan, mereka baru menyadari bahwa developmentalisme bukanlah merupakan solusi, melainkan bagian dari masalah itu sendiri. Meskipun pembangunan telah dilakukan, tapi jumlah kemiskinan absolut dan persentase pengangguran di Negara Dunia Ketiga terus meningkat, terjadi deteroriasi ekologis, penyusutan sumber alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi (Tjokrowinoto, 1996: 9). Hal ini disebabkan konsep pembangunan yang dominan yang diterapkan dikebanyakan negara Dunia Ketiga mencerminkan paradigma pembangunan model Barat. Dalam konsep ini pembangunan dipahami sebagai proses tahap demi tahap menuju "modernitas." Modernitas tersebut tercermin dalam bentuk kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dilalui oleh bangsa-bangsa industri maju. Hal ini kemudian mendorong munculnya teori dan analisa yang mengkritik diskursus pembangunan sebagai penyebab utama keterbelakangan dan kesengsaraan berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. Kritik pertama datang dari kelompok ahli ekonomi dan pakar ilmu sosial Amerika Latin yang mengajukan teori ketergantungan tentang keterbelakangan *(dependency theory of underdevelopment)*. Teori ketergantungan mempersoalkan keuntungan bersama dari perdagangan internasional dan pembangunan yang dinyatakan oleh penganjur modernisasi dan teori pertumbuhan *(growth theory)* dari Amerika. Argumen utama teori ketegantungan adalah ketergantungan sosio-ekonomi (neokolonialisme) meningkatkan keterbelakangan, yakni perkembangan keterbelakangan *(the development of underdevelopment)*.

Kritik kedua datang dari sejumlah pemikir di Massachusetts Institute of Technology dan Club Rome, yang memperingatkan akan adanya ambang batas *(threshold)* pertumbuhan, dan akan terjadi kehancuran planet bumi ini sebagai suatu sistem kalau laju pembangunan dunia dan pertumbuhan penduduk terus meningkat. Mereka menyadari adanya batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan batas kemampuan biosphere untuk dapat menyerap kegiatan manusia, meskipun melalui penguasaan teknologi batas bisa menjadi bersifat relatif. Kritik inilah yang kemudian memunculkan landasan bagi pemikiran ekologis yang kemudian dikenal dengan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan,[278] di mana pembangunan bukanlah suatu proses harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu proses perubahan di mana eksploitasi, sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan dasar saat ini dan di masa datang.[279]

Kritik lain terhadap pembangunan juga muncul dari kalangan intelektual di Barat. Sekelompok pemikir yang bergabung dengan *Dag Hammarskjold Foundaton* (Swedia) mengajukan apa yang disebutnya “pembangunan yang lain” *(another development).* Mereka percaya bahwa pembangunan harus: berorientasi kebutuhan, sanggup mempertemukan kebutuhan materi dan non-materi manusia; *indigenous*, berasal dari “hati” setiap masyarakat; percaya pada diri sendiri, yang secara tidak langsung menyatakan bahwa setiap

[277] Dengan dalih membendung paham sosialisme dan komunisme, Amerika Serikat dan negara Sekutu melancarkan serangan atas kekuatan, pemerintahan dan pemimpin yang berusaha menempuh jalan lain untuk membangun negerinya, dengan menggulingkan pemerintahan—seperti Soekarno di Indonesia, pembunuhan Patrice Lumumba di Kongo, penggulingan Salvador Allende di Chile, dan perang Vietnam—menculik dan membunuh pemimpin, bahkan dengan mendirikan pemerintahan tandingan atau oposisi bersenjata seperti di Mozambique, Angola dan Nikaragua. Kenyataan ini terjadi bukan tanpa rencana karena dalam Pedoman Perencanaan Pertahanan yang dikeluarkan Pentagon tahun 1994-99, menyatakan bahwa, “Amerika Serikat terus menghalangi negara lain yang ingin menyaingi kepemimpinannya atau ingin mengubah tatanan politik dan ekonomi sekarang....Kita harus memelihara mekanisme untuk menghambat para pesaing. Sekalipun mereka hanya ingin berperan lebih besar secara regional maupun global.” Hal ini didukung dengan pengakuan John Stockwell—mantan pejabat CIA yang kemudian menulis buku tentang pengalamannya—dinas intelijen itu melancarkan sekitar 3.000 operasi rahasia besar dan 10.000 operasi kecil, yang dirancang untuk merusak, menciptakan destabilisasi di negara lain, dan memaksa pemerintahnya untuk mengikuti kehendak Amerika Serikat (menegakkan perekonomian bebas dan terbuka). Hampir semuanya diarahkan kepada negara, pemerintahan, dan pemimpin yang kebijakannya bertentangan dengan kepentingan AS. Menurut perkiraannya sekitar 6 juta orang tewas akibat operasi-operasi tersebut. Lihat *Neoliberalisme*, Media Kerja Budaya No. 07-2001.

[278] Lihat Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *loc.cit*., hlm. 9-12.

[279] Definisi pembangunan berkelanjutan yang istilahnya diperkenalkan World Conservation Union—NGO internasional yang berbasis di Swiss—namun kemudian dipopulerkan Komisi Brundtland dalam laporan khusus *Our Commond Future* tahun 1987, adalah usaha untuk memberantas kemiskinan global pada tahun 2015, membebaskan generasi mendatang dari ancaman akibat eksploitasi sumber daya alam secara habis-habisan oleh kegiatan manusia. Lihat liputan khusus KTT Bumi 2002, ‘Menuju Istana Kristal “Pembangunan Berkelanjutan,”’ Kompas, 26 Agustus 2002.

masyarakat intinya mengandalkan kekuatan dan sumber dayanya sendiri; mempunyai pertimbangan ekologis, pemanfaatan secara rasional sumber daya *biosphere*; dan didasarkan transformasi struktural secara keseluruhan yang terpadu. Dalam satu hal, kelompok ini menolak gagasan jalan pembangunan yang universal dan menganjurkan bahwa setiap masyarakat harus menemukan strateginya sendiri.[280] Ada banyak kajian ekstensif yang menunjukan bahwa developmentalisme adalah "bungkus baru dari kua lama" kapitalisme. Dengan demikian pembangunan juga dilihat sebagai ideologi dominan baru yang tidak memungkinkan bagi Dunia Ketiga mencapai demokratisasi dan transformasi di bidang apa pun meliputi bidang ekonomi, politik, kultur, gender dan lingkungan, termasuk hubungan pengetahuan atau kekuasaan *(knowledge/power relationship)*. Dari perspektif ini, perlawanan bukan pada aras metodologi dan pendekatan tetapi juga terhadap konsep dan diskursus pembangunan secara menyeluruh. Wolfgang Sach (1993) secara sarkastis memperingatkan kita bahwa, "Sebenarnya, bukan kegagalan pembangunan yang harus ditakuti, tetapi justru keberhasilannya."

Akar Sejarah Developmentalisme

Penciptaan dan globalisasi diskursus pembangunan dapat dipahami dengan sangat baik bila melihat sejarahnya yang dimulai pada akhir perang dunia kedua. Sebagaimana yang dikatakan Mansour Fakih (1996) bahwa, "Gagasan pembangunan dilontarkan sekitar tanggal 20 Januari 1949, yakni ketika presiden Harry S. Trumen untuk pertama kalinya memperkenalkan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yakni dengan melontarkan istilah yang baru diciptakan yaitu "keterbelakangan" *(underdevelopment).*" Inilah saat pertama diskursus pembangunan secara resmi diluncurkan, yakni dalam kaitan dan konteks "perang dingin." Maksud kebijakan ini adalah dalam rangka membendung pengaruh komunisme dan sosialisme di negara-negara Ketiga.[281]

Untuk menyebarkan gagasan pembangunan ke Dunia Ketiga, pada tahun 1950 dan 1960-an para ahli ilmu sosial terutama pakar ilmu sosial yang tergabung dalam Centre for International Studies di Massachusetts Institute of Technology (MIT), berperan dalam membantu menyelenggarakan lokakarya yang berhasil menciptakan diskursus resmi dan akademis tentang pembangunan (Gendzier, 1985 dalam Fakih, 1996). Sepanjang periode itu para ahli ilmu sosial sangat produktif menciptakan pengetahuan dan teori tentang pembangunan dan modernisasi. Dalam masa itulah, pakar ekonomi seperti W.W. Rostow menciptakan teori pertumbuhan dan ahli ilmu sosial lainnya seperti McClelland dan Inkeles mulai mengembangkan teorinya mengenai modernisasi. Pada tahun 1968, para ahli ilmu sosial Amerika Serikat terlibat semakin jauh dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk mengglobalkan pembangunan. Para ahli ilmu sosial tersebut menyelenggarakan "Konferensi tentang pelaksanaan pasal IX UU Bantuan luar negeri 1961." Tugas utama mereka adalah mengkaji ketentuan mengenai Undang-undang Bantuan Luar Negeri tahun 1966 yang merupakan tafsiran kaum liberal atas konsep pembangunan. Kesimpulan pengkajian tersebut adalah "partisipasi rakyat"—yang merupakan sasaran pasal IX—harus diletakkan seiring dengan bantuan pembangunan ekonomi untuk menjadi dua pilar utama kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat. Sejak saat itulah diskursus mengenai partisipasi menjadi bahasa resmi di dalam developmentalisme.

Teori pembangunan kemudian didominasi oleh teori dan model yang diturunkan dari pengalaman sejarah ekonomi negara Barat yang meletakkan modernisasi sebagai landasan developmentalisme. Modernisasi dan pembangunan selanjutnya menjadi padanan kata (sinonim) jika dipandang dari segi asumsi dasar dan teorinya, karena berasal dari paradigma yang sama yaitu paradigma fungsionalisme dan positivisme (Fakih, 1996: 72). Sebagai bagian dari modernisasi, pembangunan menggunakan kerangka teoretis dan asumsi ideologis yang sama sebagaimana digunakan oleh modernisasi. Asumsi dasar modernisasi dikaitkan dengan proses perubahan dari struktur yang disebut tradisional menuju struktur yang dikenal sebagai modern, seperti perkembangan yang pernah terjadi pada masa awal Eropa.

Salah satu aliran dalam teori modernisasi adalah paham yang menggunakan metefora pertumbuhan (seperti dalam organisme). Bagi penganut paham ini, pembangunan dilihat dari perspektif evolusioner, yakni merupakan perjalanan panjang dari keadaan "tradisional" ke "modern," di mana semua masyarakat pernah mengalami keadaan yang sama (tradisional). Maka masyarakat Dunia Ketiga juga akan melewati perjalanan perubahan yang sama, sebagaimana terjadi di Barat. Paham modernisasi organisme ini yang sangat

[280] Fakih, 1996, *loc.cit.,* hlm. 8-9.

[281] Pendapat lain mengatakan bahwa, awal mula dari konsep developmentalisme adalah ketika para pejabat pemerintah, bankir, pemilik industri, dan pedagang dari Amerika Serikat dan Inggris berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire untuk membentuk lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. IMF menggunakan tabungannya untuk menalangi kerugian yang dilanda sebuah negara agar dapat melanjutkan perdagangan, Bank Dunia bertugas memberi pinjaman kepada pemerintah-pemerintah di dunia untuk membangun jalan raya, rel kereta api, jembatan, pelabuhan, dan semua infrastuktur yang tidak menghasilkan keuntungan dengan maksud agar pemerintah bersangkutan punya cukup uang sehingga tidak perlu menarik pajak terlalu besar dari pihak swasta. Tapi sebelum menerima pinjaman, negara yang bersangkutan harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengikuti pedoman pembangunan ekonomi yang dikenal dengan "program penyesuaian struktural" *(structural adjustment program*—SAP*)*. Program ini berarti mendobrak dan menghancurkan hambatan-hambatan di tingkat domestik, sehingga modal internasional bisa masuk dengan leluasa. Kajian dan tulisan yang mengulas tentang globalisasi dan pembangunan bisa dilihat dalam liputan pokok Tim Media Kerja Budaya, 'Merayakan Kesengsaraan,' *Neoliberalisme*, Media Kerja Budaya No. 07 hlm. 7, dan Bonnie Setiawan, 2001, *Menggugat Globalisasi,* Jakarta: Infid dan IGJ.

terkenal dengan teori skema lima tahap *(five stage scheme)* yang dikembangkan W.W. Rostow (1960), yang membayangkan perubahan masyarakat dari tradisi ke modernitas melalui proses pembangunan seperti yang pernah dijalani negara-negara industri. Dalam pemikirannya, Rostow menekankan perlunya kewiraswastaan dan akumulasi modal yang dijalankan swasta sebagai tema utama dalam literarur tentang pertumbuhan ekonomi yang akan merangsang proses pembangunan. Aliran kedua yang menjelaskan tentang paham modernisasi adalah paham yang dikembangkan oleh mereka yang menggunakan penjelasan sosiologis dan psikologis. Teori ini didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh David McClelland yang mendasarkan pada penafsiran Max Weber yang mengatakan bahwa, jika Etika Protestan—secara tidak sengaja—menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi di Barat, maka fenomena analog yang sama mestinya dapat di coba di tempat lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Menurut McClelland, apa yang ada di balik Etika Protestan Weber tersebut kuncinya adalah sifat personalitas yang disebut sebagai “kebutuhan berprestasi” (N-Ach). Penjelasan mengapa rakyat di negara-negara Dunia Ketiga terbelakang, menurutnya karena mereka tidak mempunyai dorongan dan motivasi untuk meraih kebutuhan berprestasi—yang dia maksud sebagai *prototype* “masyarakat berprestasi” sebenarnya adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri perilaku seperti yang ada dalam masyarakat kapitalis.

Dengan demikian, modernisasi sesungguhnya serupa dengan westernisasi yang didasarkan pada paham kapitalisme. Hasil studi tentang modernisasi ini secara cepat diubah menjadi bidang kajian—yang disebut *Development Studies*—yang mengelompokkan berbagai bahasan interdisipliner yang memusatkan perhatian pada analisis dan solusi masalah-masalah pembangunan, khususnya masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin, yang kemudian disebut sebagai negara berkembang. Melalui Development Studies yang diselenggarakan diberbagai universitas di negara Barat, kapitalisme dapat secara lancar disebarluaskan ke Dunia Ketiga dengan menggunakan label baru yang disebut sebagai pembangunan melalui para teknokrat, kalangan akademisi universitas, bahkan aktivis LSM dari Dunia Ketiga sendiri.[282]

Developmentalisme dan Gagasan Dasar Kapitalisme

Seperti yang telah disebutkan sebelumya bahwa, pembangunan adalah “bungkus baru dari kua lama” kapitalisme, maka pemahaman tentang developmentalisme tidak akan pernah bisa lepas dari gagasan kapitalisme. Dan kalau kita membicarakan tentang kapitalisme, maka kita tidak akan lupa pada peletak dasar dan orang yang dijuluki sebagai bapak kapitalisme, Adam Smith dengan bukunya yang mashur *An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nation* yang terbit pertama kali tahun 1776. Ia yang pertama-tama menyusun sistem yang konseptual padu, tentang komoditi, pembagian kerja, nilai, modal serta kerja sederhana dan kompleks. Ia mensistematisir pertama kali semua hal itu menjadi teori nilai kerja *(Theory of Labour Value)*. Ia juga menjelaskan hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi. Salah satu hal penting dalam membahas dasar kapitalisme adalah dengan mengetahui ciri mendasar sistem tersebut, yaitu pemaksimuman keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik. Makna kapitalisme tersebut diilustrasikan sangat jelas:

> “Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita, tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging, si pemasak bir atau tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk memajukan kepentingan publik dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan kejar hanyalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Di sini ia dituntun oleh tangan-tangan tak terlihat (*the invisible hands*) untuk mengejar tujuan yang bukan merupakan bagian dari kehendak sendiri. Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti sesuatu yang lebih buruk bagi masyarakat. Dengan mengejar kepentingan sendiri, ia kerapkali memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan jika ia sungguh-sungguh bermaksud memajukannya. Saya tidak pernah menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi kebaikan publik.”[283]

Inilah ungkapan yang sangat objektif yang dilukiskan oleh Adam Smith dalam menyongsong jaman baru. Adam Smith adalah seorang teoretisi yang mampu memberikan penjelasan secara teoretik tentang proses peralihan ke kapitalisme. Pengenalan inilah yang membedakan Adam Smith dari kaum *Physiokrat* yang melulu melihatnya dari kerja pertanian. Metode Smith adalah dengan mulai melihat hubungan-hubungan sederhana yang ada diantara orang-orang sebagai para produsen komoditi yang terpisah-pisah, tetapi saling tergantung satu sama lainnya. Menurut Smith, dalam setiap masyarakat beradab terdapat “tiga tatanan yang besar, orisinil dan terpilih,” yaitu, tuan tanah, kelas pekerja, dan kapitalis yang masing-masing pendapatannya adalah berupa sewa tanah, upah, dan laba modal yang secara keseluruhan menciptakan apa yang disebut pendapatan nasional. Dorongan nyata bagi perkembangan ekonomi dalam masyarakat

[282] Mansour Fakih, 1996, *loc,cit.,* hlm. 72-74.
[283] Premis ini dikemukakan oleh Adam Smith, 1937, *The Wealth Of Nation***,** New York: The Modern Library, hlm. 14, 423.

semacam ini adalah gerak dari ketiga tatanan tersebut untuk memaksimalkan laba mereka dan mengakumulasi modal.[284]

Proses ini hanya dapat terjadi bila kapitalis mempekerjakan tenaga upahan "produktif" selama masa-masa berlangsungnya produksi. Dengan mempekerjakan pekerja, maka dihasilkan komoditi yang kemudian akan dijual ke pasar. Melalui perbedaan harga jual, maka hasil jual tersebut telah cukup bukan saja untuk memberi upah dan mengganti bahan mentah, tetapi juga cukup untuk menghasilkan laba dan sewa pada tingkat yang "alamiah." Dengan tingkat upah yang sama pada periode berikutnya, kapitalis dapat menambah pekerja "produktif." Penambahan dari tenaga kerja inilah yang dapat dianggap sebagai ukuran akumulasi. Tapi dari manakah datangnya laba? Menurut Smith, makin besar kuantitas tenaga upahan yang akan menghasilkan komoditi, semakin besar pula kemampuannya untuk menambah tenaga kerja dan semakin besar pula jumlah yang dapat diakumulasi. Dapat dikatakan bahwa kuantitas kerja dari produk tersebut (yaitu dari nilai produk tersebut) secara umum akan lebih besar dibanding kuantitas kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi (yaitu biaya produk tersebut); dan perbedaan antara dua kuantitas kerja tersebut merupakan ukuran bagi jumlah akumulasi.[285]

Perkembangan kapitalisme juga tidak bisa lepas dari pemikiran seorang pedagang surat-surat berharga dan anggota parlemen Inggris, David Ricardo, yang dalam bukunya, *Principles of Political Economy and Taxation* menyatakan:

> "Bahwa prinsip ekonomi dan pajak adalah suatu upaya untuk memilah-milah kerangka dasar pemikiran Adam Smith dari kekuasaan. Nilai sebuah komoditi, atau kuantitas dari setiap komoditi yang akan dipertukarkan tergantung pada kuantitas kerja relatif yang diperlukan untuk berproduksi dan bukan pada sedikit atau banyaknya penggantian yang dibayarkan kepada kerja tersebut."[286]

Dengan demikian Ricardo telah melakukan kritik terhadap masalah yang diajukan oleh Smith yang justru mempertajam pengertian tantang teori nilai kerja. Seperti dikatakan Engels, yang menyimpulkan apa yang telah dilakukan oleh Ricardo:

> "Sosialisme modern, dengan berbagai macam kecenderungannya, selalu berawal dari ekonomi borjuis dan akan selalu mengaitkan dirinya dengan teori Ricardian, yaitu dengan dua proporsi yang diajukan oleh Ricardo pada bagian awal dari bukunya *Principles* yaitu: 1) bahwa nilai dari setiap komoditi ditentukan sepenuhnya dan satu-satunya oleh kuantitas kerja yang dibutuhkan dalam produksi; dan 2) bahwa produksi dari keseluruhan kerja sosial dibagi di antara tiga kelas: kelas tuan tanah (sewa), kelas kapitalis (laba), dan kelas pekerja (upah)."[287]

Dalam kritiknya terhadap Adam Smith, Ricardo membedakan antara apa yang disebutnya kerja (*labour*) dan tenaga kerja (*labour power*). Smith menganggap teori nilai, yaitu nilai sebuah komoditi dalam pengertian biaya kerja (*cost of labour*), sementara Ricardo beranggapan bahwa nilai komoditi terdapat kerja manusia berikut bahan-bahan mentah dan alat kerja. Bila Smith membedakan antara "produk kerja" dan produk untuk "akumulasi modal," maka Ricardo beranggapan bahwa yang disebut modal adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Nilai itu didasarkan atas jumlah kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dengan demikian Ricardo memperbaiki apa yang dinyatakan Smith secara sepotong-potong menjadi suatu teori nilai kerja yang bulat, yaitu bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi (yang diukur dalam jam kerja) satu-satunya ukuran untuk nilai tukar.

Franz Seda (1996) membuat interpretasi yang cukup lengkap dalam memahami *The Wealth of Nations* dengan menunjukan lima prinsip fundamental dari kapitalisme murni. Pertama, bahwa kapitalisme adalah pengakuan penuh pada hak milik perorangan atau individu tanpa batas-batas tertentu. Hak milik pribadi adalah jaminan bagi individu yang bersangkutan untuk menegakkan kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan individu akan menjadi suatu kenyataan bila ia dibenarkan untuk mempunyai miliknya sendiri secara terjamin tanpa digugat pihak atau individu lain. Kedua, kapitalisme merupakan pengakuan akan hak individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Ketiga, kapitalisme mengisyaratkan pengakuan akan adanya dorongan atau motivasi ekonomi dalam bentuk semangat untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin (*profit motive*). Keempat, kapitalisme juga memuat pengakuan akan adanya kebebasan melakukan kompetisi dengan individu lain *(freedom for competition*). Kelima, kapitalisme mengakui berlakunya hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar.[288] Pengakuan inilah yang disebut sebagai bentuk manifestasi dari konsep *laissez-faire, laissez passer*.

---

[284] Bonnie Setiawan**,** 1999, *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga: Teori-teori Radikal dari Klasik sampai Kontemporer*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, hlm. 19-21

[285] *Ibid*., hlm. 23.

[286] David Ricardo**,** *Principles of Political Economy*, seperti dikutip Setiawan, *loc.cit.,* hlm. 25.

[287] Friedrich Engels, 'Preface' dalam buku Marx, *The Poverty of Phylosophy*, dalam Setiawan, *loc.cit.,* hlm. 26.

[288] Lihat Frans Seda, 1996, *Kekuasaan dan Moral: Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia Indonesia, hlm. 272.

Lenin memberikan pengertian baru yang lebih pasti terhadap istilah *finance capital*, sebagai gejala kapitalisme dengan ciri-ciri: a) konsentrasi produksi dan kapital yang telah berkembang dalam tingkat yang demikian tinggi sehingga menciptakan monopoli yang memainkan peranan menetukan dalam kehidupan ekonomi, b) penggabungan kapital bank dan kapital industri serta penciptaan "oligharkhi finansial" diatas basis *finance capital*. Selanjutnya perkembangan *finance capital* yang telah melampau batas-batas suatu negara kapitalis akan menjelma menjadi *capitalism imperialism* yang merupakan gejala dengan ciri-ciri: a) ekspor kapital sebagai gejala yang berbeda dari ekspor komoditi, menjadi teramat penting peranannya, b) monopoli internasional yang merupakan gabungan kekuatan kapitalis yang memecah dunia, c) pembagian dunia ke dalam wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kapitalis terbesar. Perkembangan dari "kapitalisme persaingan bebas" menuju ke tahap *finance capital* dan akhirnya mencapai kesempurnaan dalam tahap *capitalistic imperialism*, menurut Lenin akan berlangsung dalam proses seperti yang digambarkan dalam ciri-ciri di atas.[289]

Bagi Marx, kapitalisme hanyalah suatu fase peralihan dalam perkembangan sejarah. Kapitalisme adalah merupakan "sistem eksploitasi yang brutal, langsung, tak bermula dan telanjang." Dari nilai lebih akan terjadi suatu proses 'akumulasi,' yaitu: "penghasilan-penghasilan besar semakin lama semakin bertumpuk pada beberapa orang saja." Persaingan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya melalui mekanisasi industri akan menimbulkan proses 'konsentrasi' yaitu: perusahaan-perusahan tertentu akan menjadi semakin besar, tapi jumlahnya akan makin berkurang, sedangkan perusahaan-perusahaan kecil akan kalah bersaing dan kemudian lenyap sehingga pada akhirnya produksi akan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar saja. Sementara itu, disamping upah yang semakin turun, akan terjadi pula 'pengangguran teknologis' *(technological unemployment)*. Ini makin lama makin membentuk apa yang disebut cadangan industri yang menganggur *(industrial reserve army of unemployed)* yang pada akhirnya juga akan menekan upah untuk makin turun. Dengan cara itulah akan terjadi suatu proses pemiskinan yang sering disebut dengan istilah-istilah, *immeserization, peuperization* atau *verelendung* pada kelas pekerja. Mereka itu juga mengalami suatu pengasingan *(alienation)*, yaitu karena terpaksa harus menjual satu-satunya yang mereka miliki: tenaga kerja. Kaum buruh telah dipisahkan dari alat-alat produksi sehingga tidak bisa memilih pekerjaan yang disukai. Dalam makna seperti tersebut di ataslah Marx berbicara tentang kemiskinan, yaitu kemiskinan yang disebabkan eksploitasi yang berlangsung dalam suatu proses industrialisasi di kota-kota.[290]

Dari uraian diatas, dapat kita tarik suatu unsur yang paling penting dalam kapitalisme—suatu unsur yang tampak dalam logika yang dipakai dalam dunia bisnis, namun berasal jauh di dalam sistem tersebut sebagai suatu aspek pokok dan bahkan primer dari orientasi perilakunya *(behavioral)*. Ini adalah dorongan kebutuhan untuk menarik kekayaan dari kegiatan produktif masyarakat dalam bentuk kapital. Ada surplus dalam setiap masyarakat yang berasal dari selisih antara volume produksi yang diperlukan untuk memelihara kekuatan kerja dan volume produksi yang dihasilkan kekuatan kerja itu. Tidak mudah untuk mengukur selisih ini, tapi gagasan umum mengenai adanya batas minimum kebutuhan yang diperlukan guna mempertahankan "reproduksi" masyarakat adalah suatu konsep dasar dari perekonomian politis klasik yang tidak bisa dibantah.[291]

Kapital adalah salah satu dari hal-hal yang dipakai untuk menggerakkan suatu proses transformasi berlanjut atas kapital-sebagai-uang menjadi kapital-sebagai-komoditi, diikuti oleh suatu retransformasi dari kapital-sebagai-komoditi menjadi kapital-sebagai-uang yang bertambah. Inilah rumusan M-C-M yang merupakan pen-skema-an Marx atas metamorfosis yang berulang dan meluas yang dijalani oleh "capital." Proses yang berulang dan ekspansif ini memang diarahkan untuk membuat barang dan jasa dengan pengorganisasian niaga dan produksi. Tetapi kenyataan-fisik adanya komoditi-komoditi itu tidak dihargai sebagai bukti dari keberhasilan pencarian kekayaan, selama benda dan jasa itu berada di tangan kapitalis. Sebaliknya eksistensi fisik benda dan jasa itu merupakan suatu rintangan yang harus diatasi dengan mengubah komoditi menjadi uang kembali. Bahkan kalau hal itu terjadi, bila sudah terjual, maka uang itu pada gilirannya tidak dianggap sebagai produk akhir dari pencarian, tetapi hanya sebagai suatu tahap dalam lingkaran yang tak berakhir. Karena itu kapital bukanlah suatu benda material melainkan suatu proses yang memakai benda-benda material sebagai tahap-tahap dalam eksistensi dinamikanya yang berkelanjutan.[292]

Kritik Marx pada masyarakat kapitalis adalah justru masyarakat ini menurut pandangannya telah menjadikan hasrat untuk "memiliki" (*to have)* dan mempergunakan *(to use*) sebagai keinginan utama manusia. Padahal Marx percaya bahwa, manusia yang didominasi oleh hasrat untuk memiliki dan mempergunakan adalah "manusia tuna" yang tidak sempurna. Tujuan Marx adalah suatu masyarakat yang disusun sedemikian rupa sehingga bukan laba dan harta kekayaan pribadi, melainkan perkembangan potensi manusiawi secara bebaslah yang merupakan tujuan utama. Karena itu menurut Fromm, baik masyarakat kapitalis maupun masyarakat sosialis Rusia dewasa ini, bertentangan dengan tujuan maupun

[289] Baca ringkasan 'Loucks Of Whitney,' dalam Dawam Raharjo, 1983, *Esai-Esai Ekonomi Politik,* Jakarta: LP3ES, hlm. 111.

[290] Rahardjo, 1983, *Ibid*, hlm. 112.

[291] Misalnya, Adam Smith**,** dalam *The Wealth of Nation*, menyebut surplus sebagai selisih dari produk tahunan dan konsumsinya.

[292] Robert L. Heilbroner, 1991, *Hakekat dan Logika Kapitalisme*, Terj: Hartono Hadikusumo, Jakarta: LP3ES, hlm. 19-21.

teori Marx, Karena sama-sama didasarkan pada pandangan manusia yang sama, yaitu manusia yang digerakkan oleh motif untuk "memiliki sebanyak-banyaknya."[293]

Marx mempergunakan teori nilai lebih sebagai basis ekonomi dan memperjuangkan kelas dibawah sistem kapitalis. Nilai lebih yang diambil oleh pemilik modal atau kapitalis yang menguasai alat-alat produksi ini merupakan dasar dari terjadinya akumulasi kapital. Kaum kapitalis yang didorong untuk memperoleh laba itu akan terus berusaha untuk meningkatkan nilai lebih. Cara untuk memperoleh laba yang makin besar dari nilai lebih dilakukan dengan tiga cara utama yaitu: memperpanjang jam kerja, mengurangi jam kerja yang dibutuhkan oleh buruh guna mendapatkan upah dan mempercepat proses pembuatan barang melalui perbaikan teknologi. Dari tiga cara itu yang paling dipilih oleh kapitalis adalah dengan meningkatkan produktivitas. Penggunaan mesin-mesin baru berakibat meningkatkan nilai lebih tapi di pihak lain mengurangi tenaga kerja. Yang terakhir ini akan menambah penawaran tenaga kerja sehingga terjadi persaingan dalam penawaran tenaga kerja yang berakibat menurunkan tingkat upah.[294]

Dalam sistem kapitalis, menurut Marx akan terjadi persaingan hebat di antara perusahaan untuk bisa memproduksi barang dengan harga termurah. Caranya adalah dengan memperkecil pemakaian tenaga kerja dengan meningkatkan penggunaan mesin-mesin. Mereka yang kalah dalam persaingan, akan gulung tikar atau dicaplok oleh industri yang bisa bertahan. Dari sinilah terjadi proses konsentrasi dengan tumbuhnya perusahaan-perusahana raksasa. Namun terjadi sesuatu yang aneh dari sistem kapitalis yaitu, walaupun persentase nilai lebih meningkat *(rasio antara nilai lebih dengan modal kerja plus modal permanen)* bisa turun. Malahan menurut Marx, kecenderungan dari kemajuan industri justru menurunkan tingkat laba, sebab perusahaan-perusahaan akan selalu berusaha untuk mempergunakan mesin-mesin sehingga memperbesar nilai modal permanen. Karena itu menurut analisis Marx, dalam sistem kapitalis akan terjadi di satu pihak, proses peningkatan nilai lebih yang berlanjut dengan proses akumulasi kapital, monopoli dan konsentrasi industri, dipihak lain terjadi proses peningkatan nilai lebih yang berlanjut dengan proses penurunan tingkat upah, makin kecilnya tingkat laba yang selanjutnya mengakibatkan proses pemiskinan, pengangguran dan runtuhnya perusahaan-perusahaan kecil ditelan oleh organisasi industri raksasa.[295]

Sistem tersebut di atas menurut Marx, dalam jangka panjang, tidak akan bisa bertahan. Proses pemiskinan *(peuperization)* dan kesengsaraan *(immiserization)* dan makin berkembangnya "cadangan tentara industri" *(industrial reserve army)* akan menimbulkan kesadaran kelas *proletariat* untuk menentang sistem yang berlaku. Tapi dipihak lain, rendahnya tingkat upah pada perkembangan dunia usaha, yaitu terjadinya kemerosotan daya beli yang menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi. Dengan kata lain, kekuatan permintaan pasar akan menurun hingga mengakibatkan perusahaan-perusahaan akan menurunkan produksinya. Inilah sumber terjadinya gerak fluktuasi yang bersifat siklis dalam perkembangan dunia usaha yang akan berakhir pada suatu krisis. Krisis ini menyediakan kondisi bagi kelas pekerja untuk mengambil alih pemilikan alat-alat produksi dalam suatu revolusi sosial. [296]

Marx juga bicara mengenai peranan negara dalam proses akumulasi kapital tersebut. Ia mengatakan bahwa, negara pada hakekatnya adalah "kekuatan pemaksa" *(coersive power*) dan merupakan alat dari kelas borjuasi untuk melindungi dan memajukan kepentingannya. Kekuasaan politik dalam sistem kapitalis adalah kekuatan yang terorganisasi dari suatu kelas untuk menindas yang lain. Ia merupakan produk dari antagonisme kelas yang tak tertemukan. Negara modern berdasarkan demokrasi representasi sebenarnya merupakan instrumen eksploitasi buruh upahan oleh pemilik kapital. Dengan cara itu kontrol dari penguasa dapat dilakukan secara langsung namun jauh lebih efektif dari penguasaan langsung. Di sini terjadi aliansi antara mereka yang duduk dalam pemerintahan dengan pemilik modal melalui teknik dukungan suara yang dapat diperoleh secara mudah dengan "pembelian suara" tak langsung.

Dari sketsa teori Marx tersebut di atas tampak bahwa, Marx dan Engels cukup konsisten dalam mengkombinasikan filsafat alienasi, pendekatan materialisme historis dan analisa ekonomi politik dalam alur gagasan untuk membangun suatu teori monistis tentang sosialisme, melalui kritiknya terhadap sistem ekonomi kapitalis modern yang tumbuh dengan hebatnya pada abad ke-19. Oleh para pengritiknya sering dikatakan bahwa Marx sebenarnya mengkombinasikan antara filsafat Jerman (terutama mensintesakan filsafat Hegel dan Feurbach), cita-cita sosialisme Perancis (menyempurnakan gagasan Proudhon, Saint-Simon, Guizot, Sismondi dan Fourier) dan teori politik ekonomi Inggris (terutama teori Ricardo mengenai nilai dan upah kerja dan akumulasi kapital yang dianjurkannya).

Gagasan Marx tentang sosialisme dan kritikan terhadap kapitalisme mendapat serangan melalui berbagai jurusan. Pertama, dari jurusan teori murni, yaitu apakah dibangun di atas dasar logika yang sehat dan benar. Di sini sasaran kritik terutama ditujukan pada teori nilai kerja dan teori upahnya dilihat dari analisa ekonomi mikro. Kritik kedua ditujukan kepada ketepatan teorinya berdasarkan data empiris serta

---

[293] Rahardjo, 1983, *loc.cit.*, hlm. 102.

[294] Baca ringkasan teori pokok Marx dalam William N. Louck dan William G. Whitney, *Comparative Economic System*, New York: Harper & Row Publishers, hlm 73-92, dan juga tentang hubungan antara teori nilai nilai lebih dan proses akumulasi kapital dan penciptaan tenaga industri cadangan baca M.L. Jhingan, *The Economics Development and Planning*, Vikas Publishing House Ltd., 1976 dalam Rahardjo, *ibid.*, hlm. 104.

[295] Dr. L.J. Zimmermen, 1962, *Sejarah Pendapat-pendapat tentang Ekonomi,* Terjemahan K. Siagian, Bandung: Sinar, hlm. 77.

[296] Di dari kutip louck & Whitney, *loc.cit.*, hlm. 117.

kemampuannya untuk meramalkan keadaan di masa mendatang (sesudah teori itu dikemukakan) berdasarkan data historis. Dan ketiga, kritik diarahkan kepada originalitas teori Marx yaitu apakah Marx mengemukakan satu teori baru ataukah hanya mengambil dan meramu gagasan orang lain sebelum atau pada masa hidupnya.[297] Pada tahun 1870 hingga 1900, empat ekonom besar (yang bekerja secara terpisah tapi mengemukakan hal yang sama dan sampai pada kesimpulan yang sama pula), yaitu Karl Menger (1840-1921), William Stanley Jevons (1835-1882), Leon Walras (1837-1910) dan Alfred Marshal (1842-1924) mengkritik teori nilai kerja dan kegunaan marginal. Dengan menempatkan teori nilai kerja dan upah buruh Marx dalam kerangka teori kegunaan marginal, maka teori Marx itu tidak saja dikatakan "Tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai nyata komoditi yang menjadi dasar pertukaran dalam perekonomian kapitalis.[298] Tapi juga tidak memberi sumbangan apa-apa dalam perkembangan teori ekonomi dan karena itu dapat diabaikan." Kritik ini tentu saja seolah-olah "meruntuhkan" seluruh bangunan teori ekonomi Marx mengenai perkembangan sistem kapitalis, lebih dari itu teori marginal, yang dinilai sebagai "revolusi kedua" yang menciptakan paradigma baru ekonomi dengan lahirnya teori neo-klasik, ternyata telah mampu menyediakan alat analisa yang ampuh bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensi ekonominya dan dengan begitu telah "menyelamatkan" sistem kapitalis dari kemungkinan krisis seperti yang diramalkan oleh Marx. Teori ekonomi neo-klasik seolah-olah membuktikan bahwa "gagasan Marx adalah salah."

Timbulnya teori-teori tentang "persaingan monopolistis" teori "persaingan tidak sempurna" yang dikembangkan Piero Sraffa (1926), Edward H. Chamberlein (1933) dan juga Joan Robinson (1933) yang merupakan "revolusi ketiga" karena menciptakan paradigma baru, telah ikut menyempurnakan teori marginal dalam membantu bekerjanya sistem ekonomi kapitalis yang sedang memasuki tahap baru, yaitu tahap perkembangan ekonomi atomistis masa Adam Smith yang terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil yang saling bersaing secara "sempurna bebas"—tahap persaingan diantara perusahaan—perusahaan besar yang masing-masing memiliki kedudukan monopolistis, sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat. Teori-teori itu seolah-olah memperingatkan dunia kapitalis agar lebih bersifat realistis dalam menempatkan diri ditengah-tengah situasi baru sehingga tidak mengalami perkembangan menuju situasi krisis seperti yang diramalkan Marx.[299]

Kejadian depresi besar tahun 1929-1933, hampir-hampir saja membenarkan ramalan Marx mengenai krisis kapitalisme yang berpangkal pada teori siklis dunia usaha. Keadaan ini mengingatkan orang pada teori Marx, walaupun tidak secara persis tentang, "merosotnya daya beli masyarakat" dalam sistem kapitalis. Tapi JM Keynes pada waktu terjadinya krisis mampu menjelaskan masalahnya yaitu, disekitar keseimbangan antara tabungan masyarakat dan investasi. Berdasar paradigma lama orang berpendapat, sebagaimana dinyatakan dalam hukum Say bahwa, jumlah investasi cenderung untuk selalu sama dengan jumlah tabungan masyarakat. Keynes mengatakan bahwa jumlah keduanya bisa tidak sama. Apabila tabungan lebih besar dari investasi, maka kegiatan ekonomi akan menurun, dan jika sebaliknya yang terjadi, maka kegiatan ekonomi akan meningkat. Apabila tabungan lebih besar, maka daya beli masyarakat berkurang dan permintaan masyarakat pun juga berkurang; ini bisa diatasi dengan menurunkan produksi untuk mencapai keseimbangan. Tapi tindakan ini akan menimbulkan pengangguran. Sebagai akibat menurunnya kegiatan produksi, tabungan masyarakat pun bisa menurun. Berdasar analisa ini, yang dikemukakan pada tahun 1930 dan disempurnakan dalam bukunya yang menciptakan "revolusi keempat," yaitu *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936), Keynes mengusulkan resep penyembuh depresi, yaitu untuk meningkatkan peran pemerintah dalam mengelola sistem uang untuk selalu menyeimbangkan tingkat investasi dan tabungan masyarakat, antara lain dengan melakukan investasi besar-besaran dalam proyek-proyek pekerjaan umum guna menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli serta permintaan umum masyarakat terhadap barang-barang yang selanjutnya akan mendorong industri meningkatkan kegiatan produksinya.[300]

Teori Keynes ini berarti penyelamatan terhadap sistem pasar dan persaingan bebas. Dengan demikian juga menghindarkan sistem kapitalis dari keadaan sebagaimana diramalkan Marx. Tidak jadi runtuhnya kapitalisme ini juga melemahkan validitas teori Marx yang daya ramalnya tidak terbukti. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan berkembangnya dunia usaha dan meningkatnya standar hidup kelas buruh di negara kapitalis, merupakan data empiris yang menyangkal kebenaran teori Marx. Tumbuhnya organisasi buruh yang cukup kuat tapi tidak revolusioner dan berkembangnya sistem negara kesejahteraan *(welfare state system)* yang paling tidak mengurangi tingkat "kesengsaraan" dan "kemiskinan" masyarakat tampaknya seperti membuktikan tidak relevannya teori Marx untuk memahami bekerjanya sistem kapitalisme. Dengan meningkatnya peranan pemerintah dalam mengatasi masalah depresi, resesi, inflasi dan pengangguran, juga membuktikan bahwa sistem kapitalis tidak saja mampu menyelamatkan dirinya dari krisis, malahan telah mampu tumbuh secara mandiri dalam jangka panjang.[301]

---

[297] Louck & Whitney, *loc.cit.,* hlm. 142.
[298] Rahardjo, 1983*, loc.cit.,* hlm. 114.
[299] Richard T. Gill, *Evolution of Modern Economics,* New Delhi: Prentice-Hall of India Private Ltd., 1972, hlm. 82.
[300] J.K. Galbraith & Nicole Solinger, 1979, *Almost Everyone Guide to Economics*, Chicago: Bantam Books, hlm. 18-19.
[301] Rahadrjo, 1983*, loc.cit.,* hlm. 105-108.

Industrialisasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Di Negara Dunia Ketiga

Dewasa ini, Dunia Ketiga mengalami krisis yang sangat hebat akibat gagalnya proyek yang dinamakan pembangunan. Sebagai suatu model kapitalisme Dunia Ketiga peninggalan 'perang dingin,' gagasan tentang pembangunan boleh dikata mengalami kegagalan. Kegagalan ini justru terjadi karena negara yang dijadikan 'model' contoh keberhasilannya adalah negara-negara yang dijuluki sebagai 'negara-negara industri baru' NICs *(Newly Industrial Countries)* seperti Korea Selatan, Taiwan, termasuk Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Lalu, terbuktilah bahwa prestasi ekonomi negara-negara tersebut tak bertahan lama, dihantam badai krisis ekonomi yang akar penyebabnya masih diselidiki hingga sekarang. Beberapa penjelasan umumnya lebih menyalahkan faktor *moral hazard*, seperti korupsi dan *bad governance* dari rezim negara-negara tersebut sebagai akar penyebabnya.[302]

Pembangunan sebagai suatu bentuk manisfestasi dari jaringan kapitalisme global, maka akan sulit menganalisa suatu masalah yang ditimbulkannya hanya dari satu perspektif. Persoalan pembangunan akan lebih objektif jika dianalisa dengan menggunakan perspektif dialektis, yaitu saling keterkaitan antara persoalan eksploitasi, dominasi dan penindasan politik. Dengan demikian konsep pembangunan akan dilihat dari berbagai aspek menyeluruh dan saling keterkaitan, termasuk kaitan antara proses kelas dengan proses hegemoni kultural. Demikian halnya kaitan antara hegemoni kultural dengan proses kelas utama (*fundamental class process*) dan kaitan politik antara proses kelas utama dan proses kelas menengah perantara (*subsumed class process*).[303] Dengan demikian, memahami masalah pembangunan seseorang tidak dapat hanya melihat melalui satu aspek atau menganggap hanya satu entitas yang menjadi penyebab masalah terpenting.
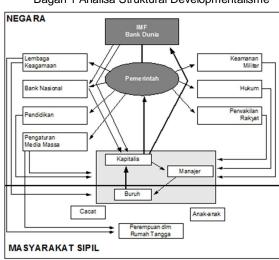
Bagan 1 Analisa Struktural Developmentalisme

Sumber: Mansour Fakih, 1996, hlm. 80.

Dari skema itu tampak bahwa dari perspektif dialektis, masalah Dunia Ketiga tampak sangat kompleks dan saling terkait. Pembangunan menciptakan masalah struktural dan sebaliknya proses ekonomi, politik dan kultural di Dunia Ketiga juga membentuk konsep pembangunan. Overdeterminisme antara pembangunan dengan proses ekonomi, politik, dan kultural ini berlangsung berkaitan secara kompleks melalui proses kelas dan kondisi yang melanggengkan seperti ideologi gender, kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, perdagangan inernasional, tekanan politik, hegemoni kultural Bank Dunia dan negara-negara kapitalis maju dan banyak hal lainnya. Sejak digulirkannya terminologi pembangunan di Dunia Ketiga pasca PD II hingga memasuki permulaan millenium ketiga, masalah pembangunan menurut Fakih (1996) dapat dikategorikan menjadi empat isu besar:

(1) Eksploitasi Ekonomi dan Ketergantungan

Meski proses pembangunan terus belangsung, tetapi angka kemiskinan rakyat di Dunia Ketiga ternyata terus meningkat. Jika demikian, kemiskinan berarti erat kaitannnya dengan sistem ekonomi yang ada dalam pembangunan. Untuk memahami masalah ekonomi dalam konteks pembangunan, uraian berikut akan meminjam analisis kelas dan teori ketergantungan. Dengan kata lain, pembahasan selanjutnya akan melihat pembangunan dari perspektif ekonomi-politik, dan teori ketergantungan.

[302] Lihat 'Pembangunan: Pelajaran Apa yang Kita Peroleh,' *Teori Pembangunan Alternatif*, dalam pengantar Jurnal Wacana Edisi 7 tahun 2001, Yogyakarta: Insist Press, hlm 3.

[303] Keseluruhan hubungan ekonomi dan politik ini juga mempengaruhi kondisi perempuan karena pelanggengan eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan berlangsung dengan ideologi patriarki dan paradigma positivistic yang menjadi dasar bagi tradisi liberal pembangunan, lihat Mansour Fakih, 1996, *loc.cit.*, hlm. 79-80.

Teori ekonomi-politik yang menggunakan perspektif kelas, sebagaimana yang disampaikan oleh Fakih (1996), lebih mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari proses pembangunan di Dunia Ketiga. Namun, sebelum melihat hubungan pembangunan dan ekonomi, terlebih dulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan teori kelas. Resnick dan Wolf (1987) mendefinisikan kelas sebagai proses di mana anggota masyarakat menduduki posisi tertentu dalam proses tersebut, yakni mereka bekerja dan menghasilkan nilai lebih (buruh maupun buruh tani) dan mereka yang tidak bekerja (majikan) tetapi mengambil nilai lebih dan mendistribusikannya. Meraka yang mengambil dan mendistribusikan nilai lebih tersebut dalam formasi sosial kapitalis disebut sebagai kaum kapitalis. Dengan demikian masyarakat dipahami terbagi dalam dua proses kelas yang berbeda, antara pengambil nilai lebih (kapitalis) dan penghasil nilai lebih tersebut (buruh). Proses kelas ini disebut sebagai proses kelas utama *(fundamental class process).* Hubungan antara posisi dua kelas menentukan keberadaan kelas menengah perantara atau *(subsumed class)*.[304]

Dalam pengertian ini, proses kelas berarti suatu proses dimana nilai lebih diambil dari buruh penghasil langsung nilai lebih tersebut. Dalam proses kelas utama, Sritua Arief (1998) melihat bahwa, pihak buruh berada dalam posisi *undercompensated*, sedangkan faktor modal berada dalam posisi *overcompensated*. Pihak buruh dibayar jauh dibawah produktivitasnya sehingga tingkat upah yang terbentuk mungkin hanya sama denga nilai subsisten saja atau bahkan dibawah nilai subsisten. Dalam hal ini terjadi transfer nilai yang berlebihan dari pihak buruh kepada pemilik faktor produksi yang tak lain adalah refleksi eksploitasi. Lalu timbul pertanyaan kenapa pihak buruh berada dalam posisi seperti itu? Ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, secara sadar atau tidak buruh telah dianggap sebagai suatu kelompok paria atau kuli oleh pihak berkuasa sehingga mereka tidak dimungkinkan untuk mempunyai suatu posisi tawar yang kuat dalam proses produksi. Kedua, situasi surplus buruh dalam ekonomi secara keseluruhan yang telah mengakibatkan banyaknya orang yang bersedia dibayar murah asal mendapat pekerjaan secara kelembagaan telah tidak dinetralisir dengan suatu ketentuan yang menjamin tingkat upah minimum yang wajar, sehingga tingkat kemakmuran buruh yang minimum tidak dapat dipertahankan.[305]

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi yang dipakai oleh pembangunan berarti mengandung ketidakadilan, di mana ada kelompok masyarakat yang memproduksi nilai lebih yang (kemudian) diambil oleh mereka yang tidak bekerja. Mereka tidak diajak negosiasi tentang berapa upah mereka, serta tidak diberi kebebasan untuk berorganisasi mendidik diri untuk mampu memperjuangkan nasibnya.[306]

Jikalau ekonomi-politik melihat hubungan kelas antara penghasil nilai lebih dan pengambil nilai lebih maupun bagian distributor nilai lebih, yakni kelas menengah perantara, teori ketergantungan lebih melihat kepada hubungan makro antara pembangunan dan keterbelakangan baik antara negara-negara dominan (pusat) dan Dunia Ketiga (pinggiran), maupun antara kaum elit dan kaum miskin negara pinggiran. Para penganjur teori ini meliputi Andre Gunder Frank (1973), Celco Furtado (1973), Samir Amin (1971) serta Cardoso dan Faleto (1979). Fakih memandang bahwa, asumsi teori ketergantungan adalah: pembangunan dan keterbelakangan merupakan konsep yang berkaitan. Keterbelakangan daerah atau masyarakat berkaitan dengan pembangunan daerah lain yang sering kali berada di luar daerah atau masyarakat itu.[307] Sementara Hadiz (1999) melihat teori dependensi memandang perekonomian internasional ditandai hubungan yang tidak seimbang antara negara-negaa kapitalis industri maju di satu pihak dan terbelakang di pihak lain. Dapat dikatakan bahwa, suatu premis umum yang dipegang oleh semua teoretisi dependensi menetapkan bahwa hubungan "pusat-periferi" tersebut sejak periode ekspansi kapitalisme melalui

---

[304] Keunikan teori ini dalam memahami kelas dan perannya dalam formasi struktur sosial dan perubahan sosial adalah terletak pada analisis hubungan antara penghasil dan pengambil nilai lebih (proses kelas utama) dan hubungannya dengan bagian nonkelas dalam masyarakat, yakni mereka yang berfungsi sebagai pendistribusi nilai lebih tersebut yang disebut sebagai proses kelas menengah perantara. Kelas menengah perantara tidak mengontrol produksi atau tidak terlibat dalam pengambilan nilai lebih secara langsung, melainkan hanya sebagai pendistribusi nilai lebih. Interaksi antara proses kelas utama dan kelas menengah perantara terjadi dalam formasi sosial tertentu. Namun demikian keberadaan proses kelas utama sangat tergantung kepada kelas menengah perantara dan sebaliknya. Dalam perusahaan misalnya, posisi pedagang perantara, yakni mereka yang menduduki kelas menengah perantara adalah distributor. Gaji mereka berasal dari sumber yang sama yaitu nilai lebih yang dihasilkan buruh. Keberadaan kelas menengah perantara inilah yang memunginkan proses kelas utama berlangsung. Dengan kata lain, proses kelas utama sangat tergantung pada keberadaan kelas menengah perantara. Kaitan antara kelas utama dan kelas menengah perantara tersebut dikenal sebagai proses kontradiksi tapi berkaitan. Kontradiksi juga terjadi antara kelompok kelas menengah perantara. Tiap-tiap kelas menengah perantara pada dasarnya saling bersaing untuk mendapatkan lebih banyak nilai lebih yang dihasilkan oleh proses kelas utama, lihat Fakih, 1996, *loc.cit.,* hlm. 82-84.

[305] Sritua Arief lebih jauh melihat terjadinya proses eksploitasi disebabkan etika sosial atau moralitas ekonomi telah tidak menjadi landasan dakan hubungan dan proses ekonomi. Terbukti dengan tumbuhnya secara kukuh kelas pemupuk rente ekonomi yang umumnya disebut konglomerat yang merupakan pemikiran ekonomi kapitalis abad 19 yang pada hakekatnya adalah sistem kapitalisme rampok yang merupakan ciri kapitalisme muda. Lihat Sritua Arief, 1998, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, hlm. 226-227.

[306] Sistem ekonomi liberal yang dianut suatu negara untuk mengintegrasikan diri dalam sistem ekonomi pasar, telah menyebabkan makin meningkatnya angka kesenjangan dan kemiskinan di mana lebih dari 1,2 milyar penduduk bumi ini hidup dalam kemiskinan yang ekstrem—kurang dari satu dollar AS/ hari karena repatriasi keuntungan investasi dan utang yang ditanamkan di negara-negara miskin—sementara pemilik perusahaan Microsoft Bill Gates, berpendapatan US$95 per detik. Bahkan kekayaan perusahaan-perusahaan multinasional—General Motors pada tahun 1997 telah mencapai US$ 164 milyar—sementara GDP Norwegia mencapai US$ 153 milyar, dan GDP Indonesia US$ 52,3 milyar.

[307] Fakih, 1996, *loc.cit.*, hlm. 85.

kolonialisme, hingga kini, ditandai oleh persistensi mekanisme-mekanisme “pertukaran yang tidak seimbang” yang melestarikan penyerapan surplus ekonomi dari periferi ke pusat. Implikasinya masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga berada dalam kondisi “perkembangan yang terhambat” *(blocked development)* yang bersifat permanen.[308]

Dalam hubungan ketergantungan antarnegara, tidaklah penting bagi negara kaya harus secara fisik menguasai atau menjajah negara miskin sebagaimana terjadi dalam masa atau model imperialisme klasik. Kiranya cukup dengan melakukan usaha untuk menciptakan agar pemimpin atau elit negara miskin *(lumpen bourgeois)*, memegang sikap, nilai atau kepentingan yang sama dengan pemimpin atau elit negara kaya (Frank, 1972).[309] Hal senada diungkapkan oleh Kay, Rey, dan Amin yang berpendapat bahwa perluasan ekonomi kapitalis dunia, pertama-tama bersentuhan dengan negara-negara pinggiran dengan menciptakan kelas kapitalis pedagang (Kay, 19975; Amin, 1976; Rey, 1976). Kelas ini memungkinkan pengiriman komoditi Dunia Ketiga ke negara-negara kapitalis maju pada tingkat pertukaran yang menguntungkan negara maju, namun kelas ini tidak terlibat atau mengelola proses produksi.

Di Indonesia misalnya, selama kurun waktu 1973-1990, nilai akumulatif keuntungan investasi asing yang direpatriasi ke luar negeri mencapai US$ 56,9 milyar untuk masuknya arus investasi asing sebesar US$ 5,8 Milyar. Dengan membandingkan kedua angka ini, maka setiap satu dolar Amerika Serikat yang dimasukan investor asing ke Indonesia telah diikuti oleh mengalirnya sumber keuangan dalam nilai sepuluh kali lipat dari ekonomi Indonesia.[310] Sementara itu akibat diberlakukannya Putaran Uruguay, Goldin (1993) dan kawan-kawan untuk OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) memproyeksikan bahwa pada tahun 2002 sesudah terjadinya penurunan tarif dan subsidi sebesar 30 persen, manfaat ekonomi tahunan yang diperoleh seluruh anggota GATT di dunia diproyeksikan akan bernilai sekitar US$ 213 milyar. Dari keseluruhan pertambahan manfaat ekonomis ini, sebesar US$ 141,8 dolar atau 67 persen akan jatuh ke negara-negara maju.[311] Tambahan lagi, banyak terjadi pelarian modal yang dibiayai dengan hutang luar negeri yang berdampak negatif terhadap distribusi kekayaan dan pendapatan. Di Indonesia saja pada kurun waktu 1970-1980 tejadi pelarian modal sebesar US$ 9,4 milyar rata-rata hampir US$ 1 milyar setahun. Dan selama periode 1988-1991 pelarian modal telah ditaksir sebesar US$ 11,17 milyar atau sebesar US$ 3,7 milyar setahun.[312]

Sampai saat ini, kita bisa memahami bahwa penjajahan baru negara kaya pada negara miskin sudah bergeser dari model penjajahan fisik dan geografis menuju model yang lebih halus dan tak kentara, yakni cukup dengan menciptakan ketergantungan ekonomi negara miskin pada negara kaya. Ketergantungan pada kapitalisme ini menyebabkan penderitaan, keterbelakangan, suburnya ketidakadilan dan kediktatoran militer, yang sebenarnya bukan warisan feodalisme atau modernisasi yang salah tempat. Bukti paling konkret adanya neo-kolonialisme atau neo-imperialisme ini adalah dengan kehadiran lembaga-lembaga dunia yang dijadikan simbolisasi kapitalisme dengan dalih membantu kesulitan ekonomi negara berkembang atau terbelakang. International Monotery Funds (IMF), International Bank of Restruction Development (IBRD) atau sekarang bernama World Bank dan berbagai badan PBB lain yang kesemuanya didominasi oleh Amerika, merupakan simbol kapitalis.[313]

(2) Hegemoni Kultural, Ideologi, dan Politik

Proses pembangunan dan industrialisasi yang terjadi di negara Dunia Ketiga bukan berarti kehadiran barang, jasa, teknologi dan informasi belaka. Tapi konsep pembangunan itu sarat dengan beban berat nilai-nilai dan budaya negara maju yang pada akhirnya menciptakan hegemoni kultural pada negara-negara Dunia Ketiga. Modernisasi adalah contoh terbaik bagaimana hegemoni berlangsung. Karena modernisasi pada dasarnya menciptakan ideologi baru dengan pengaruh kultural dan politik, melalui penciptaan diskursus sistemik dan terstruktur, serta propaganda yang canggih untuk mengganti ideologi, kultur dan politik rakyat yang tersubordinasi. Proses ini bekerja dengan baik di negara Dunia Ketiga ketika modernisasi dipahami sebagai perubahan perilaku tradisional secara kolektif kepada perilaku yang cenderung mengadopsi nilai dan budaya negara kapitalis maju atau negara Barat. Dan ini berakibat terjadinya perombakan tatanan sistem sosio-budaya dan ekonomi masyarakat Dunia Ketiga. Sistem ekonomi yang semula bersifat fatalistik dan subsistensial didekonstruksikan secara total oleh perangakat-

---

[308] Vedi R. Hadis, 1999, *Politik Pembebasan: Teori-teori Negara Pasca Kolonial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist, hlm. 35.

[309] Di samping itu, mereka juga membangun kader-kader ideologis yang luar biasa efisiennya karena mereka memahami apa yang disampaikan oleh pemikir Itali, Antonio Gramsci ketika ia bicara tentang konsep hegemoni kultural. “Bila kamu dapat menguasai kepala orang (pikiran), maka hati dan tangan mereka akan ikut,” kata Susan George.

[310] Lihat Sritua Arief, 1998, *loc.cit.,* hlm. 171-172.

[311] *Ibid*, hlm. 163.

[312] *Ibid*., hlm. 128.

[313] Menurut catatan Development GAP (NGO yang berbasis di Washington DC), sejak 20 tahun terakhir, IMF dan Wolrd Bank merawat pasien 83 negara dengan SAP *(Structural Adjustman Program)*. Hasilnya terjadi pengangguran yang meningkat, ekonomi tidak merata (timpang), kemiskinan meningkat, harga-harga naik, produksi perkapita turun, hutang meningkat, pajak mencekik, subsidi orang miskin dihapus, negara tidak lagi melayani rakyat karena privatisasi BUMN. Kajian yang mengupas secara mendalam tentang globalisasi dan dampaknya bisa dilihat dalam Jurnal Media Kerja Budaya edisi 07, 2001; Bonnie Setiawan, 2001, *Menggugat Globalisasi*, Jakarta: INFID dan IGJ; Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, 2002, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan*, Jakarta: INFID, Konphalindo, dan IGJ; Patricia Adams, 2002, *Odious Debt (Utang Najis),* Jakarta: INFID, Mansour Fakih, 2000, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.

perangkat kapitalisme dengan orientasi pemenuhan kebutuhan individu sebesar-besarnya. Budaya lokal dinegasikan dan diganti dengan nilai dan budaya barat (westernisasi). Karena itu pola, gaya hidup serta tingkah laku masyarakat Dunia Ketiga hampir sama (identik) dengan pola dan gaya hidup masyarakat kapitalis yang *profit oriented* untuk mencapai *high mass consumption* (Rostow) yang mengagungkan budaya konsumtif di dalam masyarakat yang berprestasi (masyarakat kapitalis–McClelland).[314]

Globalisasi gaya hidup yang acap ditunjukkan sebagai determininasi imperialisme budaya atau imperialisme media ini, boleh dikataka sebagai hedonisasi masyarakat Dunia Ketiga, terutama untuk elit kelas menengahnya. Dennis Goulet mengibaratkan industrialisasi dan teknologisasi yang terjadi di negara Dunia Ketiga bagaikan sebilah pedang bermata dua, yakni sebagai pembawa dan penghancur nilai-nilai.[315] Sebagai pembawa nilai-nilai yang borjuis kapitalis barat yang rasionalistik, individualistik, positivistik tapi juga sekaligus penghancur nilai budaya lokal yang religius-asketis, fatalis serta memegang teguh prinsip-prinsip *collective colligia.* Negara Dunia Ketiga terjebak pada upaya mengejar ketinggalan dan bisa sejajar dengan negara maju melalui pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada pemusatan yang berlebih pada pembangunan ekonomi. Konsentrasi berlebih ini, cenderung me-lupa-kan aspek pembangunan nilai-nilai dan budaya lokal dan lebih menikmati kehadiran budaya asing yang ter-infiltrasi lewat teknologi informasi.

Masyarakat Dunia Ketiga mengalami *cultural shock* karena imitasi budaya yang mereka lakukan tidak memiliki kemampuan kreatif untuk menggagas sendiri kebudayaan yang mereka kehendaki. Bahkan nilai-nilai sejarah dan kebesaran budaya lokal yang dikorbankan untuk komoditi dan konsumsi Barat, telah memporak-porandakan realitas budaya lokal sehingga tak lagi mampu mencirikan kekhasan lokalnya sebagai identitas dan harga diri. Wacana kapitalisme global mendobrak seluruh tatanan tradisional-agraris yang secara ideologi memang kontra-produktif dengan ornamen-ornamen kapitalis. Pembangunan juga telah menjadikan manusia sebagai makhluk uni-dimensional, yaitu hanya terfokus pada pencarian ekonomi, dengan mengabaikan peran dia sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya. Proses hegemoni kultural di negara Dunia Ketiga itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi melalui berbagai macam strategi yang bisa menopang berkembangnya ideologi kapitalis, yaitu meliputi jenis pendidikan yang diberikan di sekolah, media massa—cetak, radio, dan TV—dan semua jenis lembaga, gereja dan lembaga keagamaan lainnya. Dengan berbagai strategi yang ditanamkan itu, akhirnya gagasan dan ideologi kelas berkuasa diambil oleh rakyat yang dikuasai dan mereka menerima gagasan tersebut (Kruijer, 1987).

Para ahli ilmu-ilmu sosial memainkan peran yang besar dalam mengglobalkan ideologi pembangunan dengan mengajukan gagasan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk meggunakan berbagai cara dalam rangka mendeseminasikan ideologi *development* dan modernisasi dengan target khusus negara Dunia Ketiga.[316] Sarana pertama dengan menggunakan pengaruh Amerika Serikat terhadap kebijakan dan perencanaan ekonomi negara yang dibantunya. Para ahli ilmu sosial Amerika sangat memahami bahwa USAID sangat efektif mempengaruhi kebijakan dan perencanaan ekonomi. Sarana kedua, adalah mendidik pemimpin Dunia Ketiga, baik dalam bentuk *training* maupun perjalanan observasi ke Amerika Serikat. Strategi ini konon diusulkan berdasar pengalaman pemimpin mahasiswa dalam menghancurkan pemerintahan nasonalis di Indonesia tahun 1966 (Millikan dan Pye: 136). Sarana ketiga yaitu dengan menggunakan agama. Banyak studi agama diarahkan pada peran penyebarluasan diskursus dan penafsiran yang mendukung developmentalisme, sehingga perlunya 'sekulerisasi' menjadi bahasa resmi pemimpin agama Dunia Ketiga. Hal inilah yang pada akhirnya menggusur ajaran agama yang bercorak egalitarian, anti eksploitasi, teologi pembebasan serta agama keadilan sosial lainnya. Sedangkan sarana yang terakhir, adalah dengan menggunakan fungsi *training* dan *riset* dari tenaga universitas Amerika Serikat yang bekerja di luar negeri atas biaya USAID (Millikan dan Pye: 165).

Invasi kultural dan modernisasi juga dibantu oleh bantuan keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia (Hayter, 1985) mencatat bahwa ada beberapa prinsip dasar filosofi Bank Dunia yang terbukti konsisten sepanjang sejarahnya selama sepuluh tahun terakhir. Filosofi itu adalah mendukung kepercayaan kepada kekuatan pasar dan sektor swasta; mendorong investasi asing dan perlindungan terhadap investasi asing yang ada; mendukung prinsip perdagangan bebas dan keunggulan komparatif; keengganan untuk menggunakan pengendalian harga, impor dan pergerakan modal; keengganan untuk mensubsidi dan mendukung *full cost recovery* pada proyek investasi keuangan dan publik umumnya; mendukung kebijakan stabilisasi keuangan yang dicapai melalui berbagai program IMF, termasuk permintaan reduksi dan devaluasi; dan persyaratan bahwa utang-utang diperbaiki dan dibayar kembali (Heyter, 1985). Tentu saja Bank Dunia menolak dengan tegas segala bentuk subsidi dan pemilikan masyarakat secara komunal atas tanah dan menyambut baik penghentian *land reform* meskipun telah diundangkan oleh suatu negara.

Development Aid sering kali dikembangkan dalam rangka menjaga *status quo*, dan untuk mengikat negara Selatan pada ekonomi negara kaya. Bahkan bagian terbesar bagian terbesar dari apa yang disebut *aid* atau bantuan biasanya digunakan oleh pemerintah Dunia Ketiga untuk melayani kepentingan Bank Dunia. Sebagaian yang lain dijatahkan oleh pemberi bantuan dalam rangka melicinkan eksportir serta dukungan kepentingan bisnis mereka sendiri yang mereka tanamkan di Dunia Ketiga. Bantuan

---

[314] Lihat Saiful Arief, 2000, *loc.cit.*, hlm. 137-138 dan Fakih, 1996, *loc.cit.,* hlm 86-87.
[315] Nezar Patria dan Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 17.
[316] Lihat Fakih, 1996, *loc.cit.,* hlm 87-88

pembangunan juga digunakan untuk membeli pasokan bahan baku yang diperlukan dan untuk memberangus subversi (Kruijer, 1987). Demikianlah *discourse development* tersebut berkembang, dimasing-masing negara berkembang secara mendalam hingga sampai di pedesaan dengan pendekatan masing-masing.

(3) Hegemoni Pengetahuan

Semula orang beranggapan bahwa pengetahuan (*knowledge*) adalah bidang yang netral, objektif dan tak berdosa. Kesadaran orang tumbuh ketika Foucault, lewat analisis diskursus (*discourse analysis)* untuk pertama kalinya mempersoalkan bahwa pengetahuan ternyata mengandung kekuasaan (*power*). Kecenderungan memandang kekuasaan hanya terpusat pada negara atau kelas, bagi Foucault merupakan pengingkaran kenyataan, karena relasi kekuasaan terdapat pada setiap aspek kehidupan. Pengetahuan bukan sesuatu yang ada tanpa hubungan kekuasaan. Menurutnya, hubungan pengetahuan adalah hubungan kekuasaan. Pengetahuan adalah peredaran dengan mana perwakilan negara, perusahaan multinasional, universitas, dan organisasi formal lainnya memajukan masyarakat kapitalis.

Pengetahuan pembangunan dan modernisasi bukan sekedar hasrat untuk mengetahui, tetapi juga terkandung maksud untuk mengendalikan dan menguasai. Jadi antara pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan dijadikan sebagai sarana dan alat untuk melanggengkan ideologi dan kultur dominan melalui proses *hegemoni*.[317] Di sini, peran lembaga-lembaga ilmu pengetahuan berjasa melanggengkan proses kelas. Misalnya ketika Taylor menciptakan ilmu manajemen, ternyata atas pesanan kaum industrialis. Tujuan ilmu manajemen Taylor adalah untuk memotivasi buruh (baca: menjinakkan) demi keuntungan perusahaan melalui peningkatan produktivitas kerja. Bukankah hakekat ilmu kepemimpnan dan motivasi dalam manajemen yang dikembangkan McGregor adalah agar buruh yang menjual tenaganya itu “merasa memiliki perusahaan” yang dalam kenyataannya bukan milik mereka?

Hasrat itulah yang menurut Foucault memberi pengaruh terhadap ralasi ‘kekuasaan’ antara birokrat dan intelektual universitas yang ‘modern, ilmiah dan positivistik’ dan masyarakat adat atau masyarakat ‘awam, yang tradisional suku terasing, perambah hutan, tidak ilmiah, tahayul, tidak mampu mengelola SDA dan belum berbudaya’ sehingga perlu dibudayakan atau diberdayakan. Pengetahuan pembangunan yang dikirimkan kepada negara Dunia Ketiga pada dasarnya bukanlah pengetahuan netral. Bahkan sejak diskursus pembangunan mendominasi Dunia Ketiga, diskursus menjadi satu-satunya bentuk pengetahuan, ekonomi, politik dan kultur yang sah. Oleh karena itu diskursus pembangunan mengharamkan bentuk-bentuk cara mengetahui yang non-positivistik lainnya, seperti cara-cara pertanian tradisional digantikan oleh tipe pertanian modern. Diskursus pembangunan juga menghancurkan formasi sosial non-kapitalistik.

Kesimpulan sederhana yang dapat ditarik adalah bahwa pengetahuan, modernisasi, kekuasaan, dan pembangunan bermuara pada satu mata rantai, yaitu diskursus developmentalisme. Yang menyebabkan hancurnya bentuk proses politik lokal dan menggantinya dengan doktrin modernisasi politik yang menjadi gagasan dominan tentang pembangunan politik di Dunia Ketiga. semua itu menunjukkan hubungan yang saling terkait—intelektual, politik, ideologi—yang termasuk bagian integral dari diskursus pembangunan.[318]

(4) Kerusakan Lingkungan dalam Pembangunan

Pembangunan ekonomi yang menjadikan pertumbuhan setinggi-tingginya sebagai dasar filosofi, berimbas pada karakter anti lingkungan yang manimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dalam pembangunan, adalah suatu yang tidak terhindarkan. Sebab apabila saja konsep ekologi dan konsep ekonomi dipertemukan, maka kepentingan keduanya berbenturan satu sama lain. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, apakah memang kedua prinsip tersebut memang saling menegasikan, sehingga pembangunan ekonomi harus mengorbankan kelestarian lingkungan?[319]

Dan yang terkena imbas dari pelaksanaan industrialisasi seiring perkembangan diskursus pembangunan di Dunia Ketiga, adalah bidang pertanian. Industrialisasi adalah kekuatan progresif yang memanfaatkan teknologi kepada sumber daya alam dan membolehkan pengurangan ketergantungan kepada pertanian. Dengan mengikuti logika industrialisasi, pembangunan pertanian khususnya Revolusi Hijau dipraktekkan sebagai proses linear yang mengubah pengolahan ladang, metode penggunaan buruh dan tabungan kapital menjadi cara pengolahan ladang permanen dan melalui stimulus percepatan penduduk, menghasilkan pengaruh arus balik dari industri. Penelitian tanaman tanaman, pestisida pupuk, mekanisasi, jalan dan fasilitas kredit, semuanya membantu memperbesar tabungan buruh, pertanian modal intensif.[320] Produk industri yang berhasil menembus wilayah pertanian adalah bahan-bahan kimia seperti

---

[317] Dalam pengertian umum, *hegemoni* adalah loyalitas dari suatu kelompok ekonomi ditujukan untuk kelompok sosial dan ekonomi yang dominan. Gramsci (1972) menggunakan istilah hegemoni sebagai pengertian persekutuan kelas yang mendominasi kelas lain. Dominasi kultur yang tidak adil, domanasi politik yang harus dilegitimasi—merupakan proses penjinakan masyarakat sehingga mereka secara suka rela *(consent*) menerima tatanan *status quo* dan hubungan yang tidak adil tersebut, lihat Mansour Fakih, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm, 54.

[318] Tentang hegemoni pengetahuan dalam pembangunan, lihat Mansour Fakih, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press, hlm. 193, lihat juga Fakih, 1996, *loc.cit*., hlm. 55, juga *Masyarakat Sipil*, *loc.cit.,* hlm. 92-93, lihat juga Saiful Arief, 2000, *loc.cit.,* hlm. 146.

[319] Lihat Saiful Arif, 2000, *loc.cit., h*lm. 171.

[320] Lihat Fakih, 1996, *Masyarakat Sipil*, *loc.cit*., hlm. 100.

pestisida atau produk-produk bioteknologi lainnya. Namun kehadiran bioteknologi bersamaan dengan Revolusi Hijau justru dianggap sebagai biang kerusakan ekosistem dan tata lingkungan.

Bibit unggul (buatan) misalnya, ternyata tidak unggul dihadapan hama, maka diperlukan *pest control* dan *plant protection* dengan memakai pestisida secara besar-besaran. Kenyataanya, pestisida bukan racun yang mampu mengontrol hama seperti resep mereka, malah melahirkan hama baru, disamping meningkatkan daya tahan hama lama yang cenderung mendatangkan serangan baru. Belum lagi bahaya residu racun bagi manusia. Namun perang melawan hama itu sesungguhnya tidak perlu. Para petani selama ratusan tahun sesungguhnya paham, bahwa mekanisme kontrol terhadap hama sudah ada dalam ekoologi tanaman, yakni dengan cara menyeimbangkan antara *pest* dan predator dengan melalui diversitas tanaman itu sendiri. Maka bibit baru unggul jenis baru dan racun kimia yang menjadi masukan utama Revolusi Hijau telah mengakibatkan tercemarnya lingkungan yang tak ternilai kerugiannya.[321]

Hal senada dikemukakan Arief yang mengutip W.C. Clarke (1978), yang mengatakan bahwa kesalahan besar *(big mistake)* jika pertanian diindustrialisasikan, sambil menunjuk bebaikan-kebaikan pertanian pra-industrialisasi.[322] Selain dampak bioteknologi pada Revolusi Hijau di bidang pertanian, persoalan lain yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah pemanasan global. Pemanasan global sebagai gejala ekologi akibat industrialisasi, efek rumah kaca dan dampak teknologi lain yang bersifat destruktif. Pengaruh pemanasan global pada pertanian Dunia Ketiga berpengaruh pada persediaan air, polusi atmosfer, penyusutan tanah. Hal ini akan mengurangi keanekaragaman hayati spesies tumbuh-tumbuhan. Di bidang kelautan, dengan hadirnya teknologi pukat modern di Dunia Ketiga sebagai instrumen atau alat untuk meningkatkan hasil produksi, berakibat rusaknya ekosistem kehidupan laut. Penangkapan ikan dengan pukat modern yang diperkenalkan melalui program-program bantuan bilateral dan multilateral, menguras ikan dengan cara destruktif yang menyebabkan menipisnya persediaan sumber daya perikanan. Bahkan berjuta-juta nelayan tradisional juga ikut termarjinalisir karena hasil tangkapan dan pendapatannya terus merosot.

Ledakan penduduk dan emisi industri juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Peningkatan populasi penduduk secara cepat di desa-desa negara Dunia Ketiga membuat SDA semakin terbatas, karena kebutuhan akan bahan bakar kayu meningkat, pembukaan jalan baru menyebabkan kerusakan hutan, kualitas tanah juga merosot, erosi dan banjir di daerah hilir.[323] Ledakan penduduk yang kebanyakan terjadi di negara-negara miskin Dunia Ketiga, menurut Kennedy mustahil menghadapinya dengan cara menghentikan laju pertumbuhannya. Sedangkan cara mencegah emisi industri dengan membalikan industrialisasi, dinilai juga sulit dilakukan oleh Dunia Ketiga karena industrialisasi dinilai sebagai cara mutlak melepaskan diri dari kemiskinan sebagaimana yang pernah dilakukan negara maju dulu. Akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan sebenarnya tidak hanya menyerang lingkungan itu sendiri, akan tetapi juga pada manusia sebagai pelaku maupun resipien pembangunan.[324]

Kerusakan lingkungan, industrialisasi, dan kemiskinan adalah tiga serangkai yang saling berkaitan. Kemiskinan memaksa untuk mengadakan industrialisasi dan industrialisasi menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun meski tanpa industrialisasi, tapi jika ada kemiskinan, maka sebenarnya kerusakan lingkungan bisa terjadi seperti yang terjadi di Afrika, Asia dan negara-negara miskin lainnya yang mengeksploitasi sumber daya alamnya untuk mempertahankan hidup. Di sisi lain, kemiskinan juga telah mengakibatkan degradasi ekologis di mana penduduk miskin terpaksa membabat hutan dan menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi dan secara subsistensi untuk mempertahankan hidupnya. Akibatnya terjadilah kerusakan tanah, erosi, banjir, dan sebagainya.

Ini adalah kealpaan dalam memperhitungkan secara teoretis (termasuk kealpaan moral) di dalamnya yang menjadikan praktek pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga kacau. Paradigma pertumbuhan ekonomi dan mekanisme pasar yang selama ini diagung-agungkan ternyata memiliki kelemahan mendasar dalam mempertimbangkan penggunaan aset faktor produksi yang berasal dari alam. Mereka terus-menerus menerapkan paradigma pertumbuhan ekonomi secara konsisten, meski konsekwensinya ialah eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Pilar sistem lingkungan hidup dunia berada di ambang kehancuran. Perhatikan saja, 42% dari jumlah total hutan tropis di dunia sebelum masa kolonialisasi telah rusak tanpa bisa diperbaiki kembali. Di Afrika Barat dan Timur, rusak sekitar 72%, di Afrika Tengah dan Amerika Selatan 37%. Di daerah padat penduduknya seperti Asia Selatan, hutan telah rusak sekitar 63 persen dan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Filipina) telah rusak sekitar 38 persen.[325]

Bahkan dari data tentang keberadaan hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia dan kebanyakan berada di negara Dunia Ketiga, diperkirakan akan musnah dalarn kurun waktu kurang dari 200 tahun jika kerusakan tersebut tidak segera ditangani secara serius. Musnahnya hutan tropis ini akan diikuti oleh punahnya sekitar 1,2 juta spesies, atau seperempat dari spesies yang ada di dunia pada tahun 2020. Ini kenyataan yang sungguh sangat mengkhawatirkan. Kepunahan spesies dan hilangnya habitat dalam

---

[321] Lihat Fakih, 1996, *Analisis Gender, loc.cit*., hlm. 63-64.

[322] W.C. Clarke, 'Kemajuan Masa Lampau: Suatu Sistem Pertanian Tradisional Menunjang Lingkungan,' dalam Joachim Metzner dan N. Daldjoeni, Ekofarming, 1987, *Bertani Selaras Alam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 129-130.

[323] Lihat Michael Carley dan Ian Christie, 1992, *Managing Sustainable Development*, London, Earthscan Publication, p. 22.

[324] Lihat Arief, *2000, loc.cit.,* hlm. 176-177.

[325] Lihat Rudolf H. Strahm, 1999, *Kemiskinan Dunia Ketiga:* Terj. Rudy Bagindo dkk. Jakarta: Pustaka Cidesindo, hlm. 63.

lingkungan hidup juga akan berakibat pada degradasi tanah, air tidak mengalir dan erosi. Di Phillpina, kemelaratan dan kematian ratusan orang dalam banjir bandang tahun 1991 ada hubungannya dengan kerusakan hutan di daerah tersebut. Di Elsalvador, tiga seperempat penduduknya menderita karena erosi dan kerusakan hutan secara sempurna sudah dekat.

Alasan lain yang cukup signifikan bagi pengrusakan hutan adalah tanaman perkebunan (misalnya minyak kelapa sawit), peternakan sapi dalam skala besar, penggalian mineral, konstruksi jalan dan bendungan dan perubahan pertanian skala kecil, dan pengumpulan kayu bakar. Di Amazonia dan Amerika Tengah pendirian peternakan sapi skala besar untuk memenuhi permintaan daging sapi Amerika Utara, memberi sumbangan signifikan bagi kerusakan hutan. Sejak 1965-1983, pendirian 470 peternakan sapi dengan luas rata-rata 23,000 hektar tercatat 30% atas total kerusakan hutan di Amazonia.

Pertambangan juga berperan dalam kerusakan hutan. Di Grande Carajas salah satu wilayah di Bazil, proyek pertambangan besi yang mendapat subsidi dana dari World Bank dan Masyarakat Eropa menyebabkan pembabatan hutan 30.000 km persegi untuk peternakan, pertambangan besi, jalan, dan konstruksi kereta api dan pendirian industri berat. Lebih Jauh lagi, tiap tahun sekitar 15.000 km persegi hutan dibabat untuk menghasilkan arang guna peleburan besi gibal rel kereta api baru sepanjang 900 km ke pelabuhan air bagian dalam.[326]

Kerusakan hutan, meluasnya padang pasir, punahnya binatang dan tumbuh-tumbuhan, erosi, polusi udara, naiknya kandungan CO2 akibat rumah kaca dan menipisnya lapisan ozon, semua adalah realitas dari dekomposisi ekologi. Penebangan hutan dalam skala besar telah membawa perubahan iklim secara global dan tentu saja akan mengakibatkan menurunnya curah hujan tiap tahun. Kerusakan lingkungan sebagai ekses industrialisasi merupakan permasalahan global. Seperti developmentalisme dan kapitalisme yang sudah menjadi wacana global, masalah kerusakan lingkungan juga sudah tidak lagi mengenal batas wilayah nasional geografik tertentu. Persoalan gawat sehubungan dengan polusi udara dan pencemaran air, pemanasan global, *biodiversity*, penipisan sumber daya alam menuntut penanganan yang mendesak secara global.[327] Lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap semua persoalan ini? Kok Peng berkomentar bahwa sistem ekonomi kapitalis dan anteknya-lah yang harus bertanggung jawab. Sebab sistem ekonomi kapitalis telah mendorong manusia memiliki motivasi eksploitasi total sumber daya alam yang ada. Hadirnya kapitalisme dan developmentalisme akhimya menjadikan lingkungan kehilangan kemampuan keseimbangan alami karena eksploitasi besar-besaran.

Lingkungan hidup adalah universal dan karenanya perlu dikelola bersama. Pada satu sisi proses globalisasi seharusnya mampu mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Seyogianya keprihatinan bersama membuat negara manapun tidak bisa melakukan tindak kerusakan tanpa di protes masyarakat dunia. Namun pada sisi lain, karena globalisasi tidak berlangsung setara dan seimbang, keprihatinan ekologis justru dipakai oleh Utara untuk mengendalikan Selatan. Utara selalu menganggap sumber kerusakan lingkungan ada di Selatan, dan Utara yang mempunyai jawabannya. Padahal itu hanyalah akal-akalan negara kapitalis guna menipu negara-negara Dunia Ketiga. Sebuah memo internal yang diterbitkan media *The Economist* pada tanggal 8 Februari 1992, dibuat oleh Ahli Utama Bank Dunia, Lawrence Summers, seolah-olah membuktikan itu semua. Secara Singkat, memo tersebut berbunyi, "Tidakkah sebaiknya Bank Dunia mendorong lebih banyak migrasi industri kotor ke negara~negara kurang berkembang?" ada tiga alasan: pertama, ukuran biaya kerusakan kesehatan akibat pencemaran tergantung pendapatan yang hilang akibat meningkatnya morbiditas dan mortalitas, yang juga terkait tingkat upah. Logika ekonomi di balik dumping limbah beracun ke negara dengan tingkat upah paling rendah tidak terbantahkan; kedua, bahwa negara-negara Afrika belum cukup mendapat pencemaran *(under-polluted);* tingkat pencemaran udaranya mungkin amat rendah "secara tidak efisien" dibandingkan Mexico City dan Los Angeles; ketiga, tuntutan akan lingkungan bersih untuk alasan keindahan dan kesehatan kemungkinan berasal dari masyarakat yang kaya. Masyarakat yang mengalami kematian balita 200 per seribu tidak perlu mendapatkan barang mewah berupa udara bersih."[328]

Pada dasarnya memo tersebut menyatakan memindahkan industri pencemar dan beracun ke Dunia ketiga merupakan langkah ekonomi yang logis. Maka, Bank Dunia diminta mengambil langkah tersebut melalui pengaruhnya dalam pemberian pinjaman pembangunan Dunia Ketiga. Secara sederhana, alasanya adalah: pertama, nyawa orang di Dunia Ketiga bernilai lebih rendah akibat upah yang rendah di bandingkan negara maju; kedua, pencemaran di negara-negara Dunia Ketiga masih di bawah standar, ketiga, lingkungan yang bersih adalah barang mewah yang hanya dicari oleh negara-negara kaya di mana harapan hidup lebih tinggi, jadi memindahkan industri pencemar akan menurunkan biaya di seluruh dunia. Memang negara-negara Utara mempunyai standar ganda dalam hal lingkungan (juga hak asasi manusia). Pada suatu sisi mereka meminta Selatan melestarikan alam demi kebaikan seluruh dunia, tapi pada segi lain mereka melakukan dumping teknologi pencemar dengan dalih alih teknologi dan pembangunan. Shiva menyebut fenomena ini sebagai "apartheid lingkungan." Kasus Summers bukan satu-satunya yang terjadi di dunia.

---

[326] Lihat Carley, 1992, *loc.cit*., hlm. 23.
[327] Lihat Robert Garner, 1998, *Environmental Politics,* London: University of Leicester, MacMillan Press ltd., hlm. 15-28.
[328] John B. Foster, 1993, *Let Them Eat Pollution, The Logist of Free Market,* Third World Resurgence, No.34, Juni.

MATERI 19
PETA PEMIKIRAN KARL MARX

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.
ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

LATAR HISTORIS PEMIKIRAN KARL MARX
Riwayat Hidup Karl Marx

Karl Marx, lahir di bulan Mei 1818 di Trier, Jerman. Ayahnya seorang pengacara yang beberapa tahun sebelumnya pindah agama Yahudi menjadi Kristen Protestan. Pada masa-masa kuliahnya di Universitas Bonn, ia berada dibawah pengaruh Hegel, dan memepelajari filsafat bukannya hukum yang lebih diinginkan ayahnya. Selama hampir setahun ia menjadi pimpinan redaksi sebuah harian radikal 1843, sesudah harian itu dilarang oleh pemerintah Prussia, ia kawin dengan Jenny Von Westphalen, putri seorang bangsawan, dan pindah ke Paris. Di sana ia tidak hanya berkenalan dengan Friedrich Engels (1820-1895) yang akan menjadi teman akrab dan “penerjemah” teori-teorinya melainkan juga dengan tokoh-tokoh sosialis Perancis. Dari seorang liberal radikal ia menjadi seorang sosialis. Beberapa tulisan penting berasal waktu 1845, atas permintaan pemerintah Prussia, ia diusir oleh pemerintah Perancis dan pindah ke Brussel di Belgia. Dalam tahun-tahun ini ia mengembangkan teorinya yang definitif. Ia dan Engels terlibat dalam macam-macam kegiatan kelompok-kelompok sosialis. Bersama dengan Engels ia menulis Manifesto Komunis yang terbit bulan Januari 1848. Sebelum kemudian pecahlah apa yang disebut revolusi’48, semula di Perancis, kemudian juga di Prussia dan Austria. Marx kembali ke Jerman secara ilegal.

Tetapi revolusi itu akhirnya gagal. Karena diusir dari Belgia, Marx akhirnya pindah ke London dimana ia akan menetap untuk sisa hidupnya. Di London mulai tahap baru dalam hidup Marx. Aksi-aksi praktis dan revolusioner ditinggalkan dan perhatian dipusatkannya pada pekerjaan terories, terutama pada studi ilmu ekonomi. Tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun paling gelap dalam kehidupannya. Ia tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap dan hidup dari kiriman uang sewaktu-waktu dari Engels. Keluarganya miskin dan sering kelaparan. Karena sikapnya yang sombong dan otoriter, hampir semua bekas kawan terasing daripadanya. Akhirnya, baru 1867, terbit jilid pertama Das Kapital, karya utama Marx yang memuat kritiknya terhadap kapitalisme (jilid kedua dan ketiga baru diterbitkan oleh Engels sesudah Marx meninggal). Tahun-tahun terakhir hidupnya amat sepi dan tahun 1883 ia meninggal dunia. Hanya delapan orang yang menghadiri pemakamannya.

V.I. Lenin (1913): Tiga Sumber dan Tiga Komponen Marxisme[329]

Di segenap penjuru dunia yang beradab, ajaran-ajaran Marx ditentang dan diperangi oleh semua ilmu pengetahuan borjuis (baik yang resmimaupun yang liberal), yang memandang Marxisme semacam sekte yang jahat. Tidak bisa diharapkan adanya sikap lain, karena tidak ada ilmu sosial yang netral dalam suatu masyarakat yang berbasiskan perjuangan kelas. Lewat satu dan lain cara, semua ilmu pengetahuan borjuis, yang resmi dan liberal, membela perbudakan upahan (*wage slavery*). Sedangkan Marxisme telah jauh-jauh hari menyatakan perang tanpa henti terhadap perbudakan itu. Mengharapkan sikap netral dari ilmu pengetahuan dalam masyarakat perbudakan upahan adalah bodoh, sama naifnya dengan mengharapkan sikap netral dari para pemilik pabrik dalam menghadapi pertanyaan apakah upah buruh dapat dinaikkan tanpa mengurangi keuntungan modal.

Tapi bukan hanya itu. Sejarah filosofi dan sejarah ilmu-ilmu sosial memperlihatkan dengan jelas bahwa dalam Marxisme tidak terdapat adanya sektarianisme. Tidak terdapat adanya doktrin-doktrin yang sempit dan picik, doktrin yang dibangun jauh dari jalan raya perkembangan peradaban dunia. Sebaliknya, si jenius Marx dengan tepat menempatkan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan oleh pikiran-pikiran termaju dari umat manusia. Doktrin-doktrinnya bangkit sebagai kelanjutan langsung dari ajaran-ajaran besar dalambidang filosofi, ekonomi-politik, dan sosialisme. Doktrin-doktrin Marxist bersifat serba guna karena tingkat kebenarannya yang tinggi. Juga komplit dan harmonis, serta melengkapi kita dengan suatu pandangan dunia yang integral, yang tidak bisa dipersatukan dengan berbagai macam tahyul, reaksi, atau tekanan dari pihak borjuis. Marxisme merupakan penerus yang sah dari beberapa pemikiran besar umatmanusia dalam abad ke-19, yang direpresentasikan oleh filsafat klasik Jerman, ekonomi-politik

[329] Artikel ini ditulis oleh Lenin untuk memperingati 30 tahun kematian Marx dan dipublikasikan dalam *Prosveshcheniye* No. 3 tahun 1913. *Prosveshcheniye* (Pencerahan)—adalah terbitan teoritik bulanan kaum Bolshevik yagn diterbitkan secara legal di St.Petersburg mulai bulan Desember 1911 sampai Juni 1914. Oplahnya mencapai 5000 eksemplar. Lenin memimpin penerbitan ini dari luar negeri, awalnya di Paris, kemudian Cracow dan Poronin; dia mengedit artikel-artikelnya melalui korespondensi yang intense dengan para editor. Pada masa PD I majalah ini dibredel oleh rejim tsar. Kemudian terbit lagi pada musim gugur tahun 1917 tapi hanya sekali terbit. Sumber: Dari *Collected Works,* Volume 19, pp. 23-28. Penerjemah: Thanks to Lembaga Penerbitan, Pendidikan, dan Pengembangan Pers Mahasiswa (LP4M) and Situs Indo-Marxist–Situs Kaum Marxist Indonesia.

Inggris dan sosialisme Prancis.Inilah tiga sumber dari Marxisme, yang akan kita bahas secara ringkas beserta komponen-komponennya.

(I)

Filsafat yang dipakai Marxisme adalah materialisme. Sepanjang sejarah Eropa modern, dan khususnya pada akhir abad ke-18 di Prancis, di mana terdapat perjuangan yang gigih terhadap berbagai sampah dari abad pertengahan, terhadap perhambaan dalam berbagai lembaga dan gagasan, materialisme terbukti merupakan satu-satunya filosofi yang konsisten, benar terhadap setiap cabang ilmu alam dan dengan gigih memerangi berbagai bentuk tahyul, penyimpangan dan seterusnya. Musuh-musuh demokrasi selalu berusaha untuk menyangkal, mencemari dan memfitnah materialisme, membela berbagai bentuk filosofi idealisme, yang selalu,dengan satu dan lain cara, menggunakan agama untuk memerangi materialisme.Marx dan Engels membela filosofi materialisme dengan tekun dan berulangkali menjelaskan bagaimana kekeliruan terdahulu merupakan penyimpangan dari basis ini. Pandangan-pandangan mereka dijelaskansecara panjang lebar dalam karya Engels, Ludwig Feuerbach dan Anti-Duehring,[330] yang seperti halnya Communist Manifesto, merupakan buku-buku peganganbagi setiap pekerja yang memiliki kesadaran kelas. Tetapi Marx tidak berhenti pada materialisme abad 18, ia mengembangkannya lebih jauh, ke tingkat yang lebih tinggi.

Marx memperkaya materialisme dengan penemuan-penemuan dari filosofi klasik Jerman, khususnya sistem Hegel, yang kemudian mengarah kepada pemikiran Feuerbach. Penemuan yang paling penting adalah dialektika, yaitu doktrin tentang perkembangan dalam bentuknya yang paling padat, paling dalam dan amat komprehensif. Doktrin tentang relativitas pengetahuan manusia yang melengkapi kita dengan suatu refleksi terhadap materi-materi yang terus berkembang. Penemuan-penemuan terbaru dalam bidang ilmu alam: radium, elektron, transmutasi elemen,merupakan bukti nyata dari materialisme dialektis yang diajarkan Marx, berbeda dengan dengan ajaran-ajaran para filosof borjuis dengan idealisme mereka yang telah usang dan dekaden. Marx memperdalam dan mengembangkan filosofi materialisme sepenuhnya, serta memperluas pengenalan terhadap alam dengan memasukkan pengenalan terhadap masyarakat manusia.

Materialisme Historisnya yang dialektis merupakan pencapaian besar dalam pemikiran ilmiah. Kekacauan yang merajalela dalam berbagai pandangan sejarah dan politik digantikan dengan suatu teori ilmiah yang amat integral dan harmonis, yang memperlihatkan bagaimana, dalam konsekwensinya dengan pertumbuhan kekuatan-kekuatan produktif, suatu sistem kehidupan sosial muncul dari sistem kehidupan sosial yang ada sebelumnya dan berkembang melalui berbagai tahapan. Contoh kongkretnya: kapitalisme yang muncul dari feodalisme. Seperti halnya pengetahuan manusia merefleksikan alam (yang merupakan materi yang berkembang), yang keberadaannya tidak tergantung dari manusia, begitu pula pengetahuan sosial (berbagai pandangan dandoktrin yang dihasilkan manusia: filosofi, agama, politik, dan seterusnya) merefleksikan sistem ekonomi dari masyarakat. Berbagai lembaga politik merupakan superstruktur di atas fondasi ekonomi. Kita melihat, sebagai contoh, bahwa berbagai bentuk politis dari negara-negara Eropa modern memperkuat dominasi pihak borjuasi terhadap pihak proletariat. Filosofinya Marx merupakan filosofi materialisme terapan, yang mana membekali umat manusia, khususnya kelas pekerja, dengan alat-alat pengetahuan yang ampuh.

(II)

Setelah menyadari bahwa sistem ekonomi merupakan fondasi, yang di atasnya superstruktur politik didirikan, Marx mencurahkan sebagianbesar perhatiannya untuk mempelajari sistem ekonomi ini. Karya Marx yang prinsipal, Das Kapital, merupakan hasil studinya yang mendalam terhadap sistem ekonomi modern: kapitalisme. Ekonomi politik yang klasik, sebelum Marx, berkembang di Inggris, negeri kapitalis yang paling maju saat itu. Adam Smith dan David Ricardo, dengan investigasi mereka terhadap sistem ekonomi, meletakkan dasar-dasar dari teori nilai kerja. Marx melanjutkan karya mereka, ia menguji teori itu dan mengembangkannya secara konsisten. Ia melihat bahwa nilai dari setiap komoditi ditentukan oleh kuantitas waktu kerja yang diharuskan secara sosial, yang digunakan untuk memproduksi komoditi itu. Jika para ahli ekonomi borjuis melihat hubungan antar-benda (pertukaran antar-komoditi), Marx memperhatikan hubungan antar-manusia. Pertukaran komoditi mencerminkan hubungan-hubungan di antara para produser individual yang terjalin melalui pasar. Uang memperlihatkan bahwa hubungan itu menjadi semakin erat, yang tanpa terpisahkan menyatukan seluruh kehidupan ekonomi dari para produser. Modal (kapital) memperlihatkan suatu perkembangan lanjutan dari hubungan ini: tenaga kerja manusia menjadi suatu komoditi. Para pekerja upahan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik tanah, pemilik pabrik dan alat-alat kerja. Seorang pekerja menggunakan sebagian waktu kerjanya untuk menutup biaya hidupnya dan keluarganya (mendapat upah), sebagian lain waktu kerjanya digunakan tanpa mendapat upah, semata-mata hanya mendatangkannilai lebih untuk para pemilik modal. Nilai lebih merupakan sumber keuntungan, sumber kemakmuran bagi kelas pemilik modal.

[330] Referensinya adalah tulisan Engels *Anti Duhring*

Doktrin tentang nilai lebih merupakan batu-penjuru dari teori ekonomi yang dikemukakan oleh Marx. Modal, yang sebenarnya terbentuk dari hasil kerja para pekerja, justru menghantam para pekerja, memporakporandakan para pemilik modalkecil dan menciptakan barisan pengangguran. Dalam bidang industri, kemenangan produksi berskala besar segera tampak, tetapi gejala yang sama juga dapat dilihat pada bidang pertanian, di mana keunggulan pertanian bermodal besar semakin dikembangkan. Penggunaan mesin-mesin pertanian ditingkatkan, mengakibatkan ekonomi para petani kecil terjebak oleh modal-uang, kemudian jatuh dan hancur berantakan disebabkanteknik produksi yang kalah bersaing. Penurunan produksi berskala kecil mengambil bentuk-bentuk yang berbeda dalam bidang pertanian, akan tetapiproses penurunan itu sendiri merupakan suatu hal yang tidak terbantahkan. Dengan menghancurkan produksi berskala kecil, modal mendorong peningkatan produktivitas kerja dan menciptakan posisi monopoli bagi asosiasi kapitalis besar. Produksi itu sendiri menjadi semakin sosial–ratusan ribu, bahkan jutaan pekerja di-ikat dalam suatu organisme ekonomi reguler–tapi hasil dari kerja kolektif ini dinikmatioleh sekelompok pemilik modal. Anarki produksi, krisis, kekacauan harga pasaran, serta ancaman terhadap sebagian terbesar anggota masyarakat, semakin memburuk.

Dengan mengembangkan ketergantungan para pekerja pada modal, sistem ekonomi kapitalis menciptakan kekuatan besar dari persatuan parapekerja.Marx menyelidiki perkembangan kapitalisme dari ekonomi komoditi tahap awal, dari pertukaran yang sederhana, hingga bentuk-bentuknya yang tertinggi, produksi berskala besar. Dan dari pengalaman negeri-negeri kapitalis, yang lama dan baru, dari tahun ke tahun, terlihat dengan jelas kebenaran dari doktrin-doktrin Marxian ini. Kapitalisme telah menang di seluruh dunia, tetapi kemenangan inihanyalah merupakan awal dari kemenangan para pekerja terhadap modal yang membelenggu mereka.

(III)

Ketika feodalisme tersingkir, dan masyarakat merdeka kapitalis muncul di dunia, maka muncullah suatu sistem untuk penindasan dan eksploitasi terhadap golongan pekerja. Berbagai doktrin sosialis segera muncul sebagai refleksi dari dan protes terhadap penindasan ini. Sosialisme pada awalnya, bagaimanapun, merupakan sosialisme utopis. Ia mengkritik masyarakat kapitalis, mengutuknya, memimpikan keruntuhan kapitalisme. Ia mempunyai gagasan akan adanya pemerintahan yang lebih baik. Ia berusaha membuktikan kepada orang-orang kaya bahwa eksploitasi itu tak bermoral.

Namun sosialisme utopis tidak memberikan solusi nyata. Ia tak dapatmenjelaskan sifat sebenarnya dari perbudakan upahan di bawah sistem kapitalisme. Ia tak mampu mengungkapkan hukum-hukum perkembangan kapitalis atau memperlihatkan kekuatan sosial apa yang mampu membentuk suatu masyarakat yang baru. Sementara itu, berbagai revolusi terjadi di Eropa, khususnya di Prancis, mengiringi kejatuhan feodalisme, perhambaan, yang semakin lama semakin jelas mengungkapkan perjuangan kelas-kelas sebagai basisdan kekuatan pendorong dari semua perkembangan. Setiap kemenangan politis atas feodalisme merupakan hasil dari perlawanan serentak dan tiba-tiba. Setiap negeri kapitalis berkembangdi atas basis yang kurang-lebih demokratis, diakibatkan adanya perjuangan hidup-mati di antara kelas-kelas yang ada dalam masyarakat kapitalistik.

Kejeniusan Marx adalah karena ia yang pertama kalinya menyimpulkan pelajaran sejarah dunia dengan tepat dan menerapkan pelajaran itu secara konsisten. Kesimpulan yang dibuatnya menjadi doktrin dari perjuangan kelas. Rakyat selalu menjadi korban dari penipuan dan kemunafikan dunia politik, mereka akan selalu begitu sampai mereka mencoba mencari tahu apa kepentingan dari kelas-kelas yang ada dalam masyarakat, apa yangada di balik segala macam ajaran moral, agama dan janji-janji politik. Para pemenang dari proses reformasi dan pembangunan akan selalu terkecoh oleh para pendukung pemerintahan lama, sampai mereka menyadari bahwa setiap lembaga yang lama, sekeji apapun tampaknya, akan tetap dijalankan oleh kekuatan-kekuatan dari kelas-kelas tertentuyang berkuasa. Hanya ada satu kelompok yang mampu menghantam usaha perlawanan dari kelas-kelas itu, dan itu bisa ditemukan dalam masyarakat kita, kelompok yang mampu dan harus menggalang kekuatanuntuk perjuangan menyingkirkan yang lama dan mendirikan yang baru.

Filosofi materialisme yang dipaparkan Marx menunjukkan jalan bagi proletariat untuk bebas dari perbudakan spiritual yang membelenggu setiap kelas yang tertindas hingga kini. Teori ekonomi yang dijabarkan Marx menjelaskan posisi sebenarnya dari proletariat didalam sistem kapitalisme.Organisasi-organisasi independen milik proletariat semakin bertambah banyak jumlahnya, dari Amerika hingga Jepang, dari Swedia hingga Afrika Selatan. Proletariat menjadi semakin tercerahkan dan terdidik dengan membiayai perjuangannya sendiri. Mereka membuktikan kesalahan tuduhan-tuduhan masyarakat borjuis; mereka terus memperbaiki strategi perjuangan, menggalang kekuatan dan tumbuh tanpa bisa ditahan.

Prosveshcheniye No. 3, Maret 1913.
Ditandatangani V.I. Lenin.

Manifesto Komunis

Masyarakat borjuis modern yang muncul dari keruntuhan masyarakat feodal tidak menyingkirkan antagonisme kelas itu. Malah ia memunculkan kelas-kelas baru, kondisi baru untuk melakukan tekanan, bentuk-bentuk baru persaingan dengan menggantikan yang lama. Borjuis menempatkan negeri di tangan penguasa kota. Ia telah menciptakan kota-kota besar, telah banyak menambah penduduk kota dibanding penduduk pedesaan dan dengan demikian menyelamatkan sebagian besar penduduk dari kehidupan desa yang bodoh. Persis sperti yang berlaku bagi sesuatu negeri dengan ketergantungan pada kota, borjuis itu telah pula membuat negeri-negeri barbar dan semi barbar bergantung pada negeri beradab, bangsa petani (bergantung pada) bangsa borjuis, timur pada barat. Senjata yang dipergunakan borjuis untuk merobohkan feodalisme, ini dipergunakan untuk borjuis itu sendiri. Akan tetapi bukan saja borjuis itu mengumpulkan senjata untuk membunuh dirinya sendiri, ia juga membunuh orang-orang yang mengadakan senjata tersebut yaitu kelas pekerja modern dikalangan proletar. Dengan perkembangan industri, proletar bukan saja bertambah jumlahnya, ia berkumpul dalam kumpulan yang tambah besar, kekuatannya berkembang dan ia merasakan kekuatannya yang bertambah itupun mulai membentuk kombinasi (organisasi buruh) melawan borjuis. Di sana-sini pertentangan berkobar dan berkembang menjadi kerusuhan.

Sejarah Materialisme dan Dialektika

Pandangan materialis sejarah adalah teori Karl Marx tentang hukum perkembangan masyarakat. Inti pandangan ini ialah bahwa perkembangan masyarakat ditentukan oleh bidang produksi. Bidang ekonomi adalah basis, sedangkan dua dimensi kehidupan masyarakat lainnya, institusi-institusi sosial, terutama negara, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial merupakan bangunan atas.

Oleh karena faktor penentu adalah basis, maka harus memperhatikan dahulu bidang ekonomi. Ciri yang menurut Marx paling menentukan bagi semua bentuk ekonomi sampai sekarang adalah pemisahan antara para pemilik dan pekerja. Masyarakat terdiri dari kelas-kelas sosial yang membedakan diri satu sama lain berdasarkan kedudukan dan fungsi masing-masing dalam proses produksi. Pada garis besarnya (terutama semakin produksi masyarakat mendekati pola kapitalis) kelas-kelas sosial termasuk salah satu dari dua kelompok kelas. Yaitu kelas-kelas pemilik dan kelas-kelas pekerja. Yang pertama memiliki sarana-sarana kerja, sedangkan yang kedua hanya memiliki tenaga kerja mereka sendiri. Oleh karena kelas-kelas pemilik begitu berkuasa. Misalnya para pemilik tanah mengontrol para buruh tani. Itu berarti bahwa para pemilik dapat menghisap tenaga kerja para pekerja, jadi mereka hidup dari penghisapan tenaga mereka yang harus bekerja. Kelas-kelas pemilik merupakan kelas-kelas atas dan dan kelas-kelas pekerja merupakan kelas-kelas bawah dalam masyarakat. Jadi menurut Marx ciri khas semua pola masyarakat sampai sekarang ialah, bahwa masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas atas dan bawah. Struktur ekonomi tersusun sedemikian rupa hingga yang pertama dapat hidup dari penghisapan tenaga kerja yang kedua.

Bangunan atas mencerminkan keadaan itu. Negara adalah alat kelas-kelas atas untuk menjamin kedudukan mereka, jadi untuk seperlunya menindas usaha kelas-kelas bawah untuk membebaskan diri dari penghisapan oleh kelas-kelas atas sedangkan “bangunan atas idealis” istilah Marxis bagi agama, filsafat, pandangan-pandangan moral, hukum, estetis dan lain sebagainya berfungsi untuk memberikan legitimasi pada hubungan kekuasaan itu. Jadi Marx menolak paham bahwa negara mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Negara dikuasai oleh dan berpihak pada kelas-kelas atas, meskipun kadang-kadang juga menguntungkan kelas-kelas bawah. Walaupun negara mengatakan ia adalah milik semua golongan dan bahwa kebijaksanaannya demi kepentingan seluruh masyarakat namun sebenarnya negara melindungi kepentingan kelas atas ekonomis. Maka negara menurut Marx termasuk lawan kelas-kelas bawah. Negara bukan milik dan bukan kepentingan mereka. Dari negara mereka tidak dapat mengharapkan sesuatu yang baik. Seperti halnya negara, begitu pula agama, filsafat, pandangan tentang norma-norma moral dan hukum dan sebagainya menurut Marx tidak mempunyai kebenaran pada dirinya sendiri, melainkan hanya berfungsi untuk melegitimasikan kepentingan kedudukan kelas atas.

Seperti halnya negara, begitu pula agama, filsafat, pandangan tentang norma-norma moral, serta hukum dan sebagainya menurut Marx tidak mempunyai kebenaran pada dirinya sendiri, melainkan hanya berfungsi untuk melegitimasikan kepentingan kedudukan kelas atas. Cara suatu masyarakat berfikir, apa yang dianggapnya sebagai baik, bernilai, dan masuk akal, menurut Marx ditentukan oleh kelas-kelas yang menguasai masyarakat. Maka bentuk-bentuk kesadaran sosial itu menurut kekhasan masing-masing, mengemukakan sebagai baik bagi seluruh masyarakat apa yang sebenarnya hanya baik bagi kelas-kelas atas. “Bangunan atas ideologis” itu menciptakan kesan bahwa kesediaan masing-masing kelas untuk menerima kedudukannya dalam masyarakat adalah sesuatu yang baik dan rasional. Jadi fungsinya ialah membuat kelas-kelas bawah bersedia untuk menerima kedudukan mereka sebagai kelas-kelas bawah.

Bila tingkat produksi tadi yang diambil sebagai tesis, dan mulai dengan tingkat feodalisme (jadi ini merupakan tesis). Anti tesisnya adalah tingkat produksi borjuis atau kapitalisme, sintesisnya nanti adalah tingkat produksi sosialisme. Teori dialektika dengan tesis, antitesis, dan sintesis dapat diharapkan baik dalam hubungan dengan kelas-kelas itu, maupun pada tingkat-tingkat produksi itu sendiri. Demikian tesis golongan bangsawan (di Abad Tengah) menimbulkan antitesis golongan peminjam tanah, tetapi keduanya ini menumbuhkan sintesis golongan borjuis. Ini merupakan tesis kembali dan antitesisnya ialah golongan pekerja, sintesisnya ialah manusia komunis yang terdapat dalam masyarakat komunisme. Dengan demikian

maka Marx melihat negara sebagai alat belaka dari kelas penguasa (berpunya) untuk menindas kelas yang dikuasa (tidak berpunya). Negara dan pemerintahan identik dengan kelas penguasa, artinya dengan kelas berpunya, berturut-turut dalam sejarah umat manusia dikenal kelas pemilik budak, kelas bangsawan (atau tuan tanah), kelas borjuasi. Soal hak dan keadilan, oleh sebab itu adalah sekedar ucapan penghias bibir dari pihak yang berkuasa.

Dialektika Marx sebenarnya mengemukakan bahwa perkembangan masyarakat feodalisme ke masyarakat borjuasi atau kapitalisme dan seterusnya ke msyarakat sosialisme merupakan suatu kelanjutan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi ini tidak berarti bahwa manusia berdiam diri saja dengan menanti perkembangan itu berjalan sebagaimana maunya. Kelas-kelas itu sendiri adalah kelas-kelas yang berjuang untuk kelasnya, jadi manusia yang dilihat Marx adalah manusia yang berbuat. Bagi Marx masalah pokok bukanlah memahami sejarah atau dunia ini, melainkan bagaimana mengubahnya. "manusia membuat sejarahnya sendiri".

Oleh sebab itu, maka revolusi yang digambarkan oleh Marx itu terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah revolusi yang dipelopori oleh golongan Borjuis yang hendak menghancurkan feodal. Tahap kedua adalah revolusi yang dilakukan oleh kelas pekerja dalam menghancurkan golongan borjuis. Dengan lenyapnya kelas borjuis, fungsi pemerintahan tidak lagi mempunyai sifat politik. Kelas pekerja yang memegang kekuasaan itu pun tidak lagi merupakan kelas, sehingga tidak ada kelas yang ditindas dan negara akan lenyap. Masing-masing orang akan melakukan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Orang bekerja bukan karena ingin mencukupi nafkah tapi karena panggilan hati. Oleh karena itu tiap orang memberikan sumbangan sesuai dengan kesanggupannya. Pada saat ini tingkat produksi menjadi berlimpah, dan pendapatan tidak lagi berupa upah, melainkan bergantung pada keperluan manusia yang bersangkutan.

Teori Nilai Lebih

Dalam memahami teori Marx tentang masyarakat dan negara tidak boleh dilupakan sama sekali teorinya di bidang ekonomi. Teori ekonominya itu berupa teori nilai berdasar pada tenaga, teori nilai lebih, teori akumulasi kapital, teori konsentrasi kapital dan teori pemiskinan semuanya pada pokoknya merupakan teori eksploitasi untuk memperlihatkan bahwa golongan berpunya hidup dari tenaga golongan tidak berpunya. Tentu saja teori demikian ini timbul dalam pemikiran Marx setelah melihat masyarakat yang dihadapinya, sekurang-kurangnya mengingat masyarakat yang telah berupa negara. Marx berpendapat bahwa pada mulanya, dalam kehidupan primitif komunal dimana alat-alat produksi dimiliki bersama, pengisapan manusia oleh manusia tidak didapati. Kelas masyarakat tidak ada, penindasan pun tidak pula. Masyarakat pun tidak mengenal kekuasaan, dan oleh karena itu tidak mengenal negara. Marx berpendapat bahwa bentuk negara itu tidak selamanya ada.

Menurut pendiri komunisme ini, maka sejarah manusia sesudah terbentuknya negara memeperlihatkan empat tingkatan produksi. Produksi berdasar perhambaan, feodalisme, produksi kapitalis atau borjuasi dan produksi sosialisme. Sesuai pendapatnya tentang unerbau dan oberbau diatas, maka dalam tingkat-tingkat produksi kapitalisme atau borjuasi pembagian kelas itu lebih sederhana, yang terpenting ialah kelas-kelas yang bertentangan: kelas borjuasi atau kapitalis dan kelas pekerja. Teori dialektika dengan tesis, anti tesis, dan sintesis dapat diterapkan baik dalam hubungan dengan kelas-kelas itu, maupun pada tingkat-tingkat produksi itu sendiri. Demikianlah tesis golongan bangsawan (di abad tengah) menimbulkan anti tesis golongan peminjam tanah, tetapi keduanya ini menumbuhkan sintesis golongan borjuis. Hal itu merupakan tesis kembali dan anti tesis ialah golongan pekerja, sintesisnya ialah manusia komunis yang terdapat dalam masyarakat komunisme.

Bila tingkat produksi diambil sebagai tesis, dan kita mulai dengan tingkat feodalisme (merupakan tesis), maka anti tesisnya ialah tingkat produksi borjuis atau kapitalisme, sintesisnya adalah tingkat produksi sosialisme. Dengan demikian, maka Marx melihat negara sebagai alat belaka dari kelas penguasa (berpunya) untuk menindas kelas yang dikuasai (yang tidak berpunya). Negara dan pemerintahan identik dengan kelas penguasa, artinya dengan kelas berpunya, berturut-turut dalam sejarah umat manusia dikenal kelas pemilik budak, kelas bangsawan (atau tuan tanah), kelas borjuis. Soal hak dan keadilan, oleh karena itu adalah sekedar ucapan penghias bibir

Komunisme dan Masyarakat Tanpa Kelas

Yang dimaksud Marx dengan komunisme bukanlah sebuah kapitalisme negara, jadi dimana hak milik diadministrasikan oleh negara. Marx mengatakan bahwa hanya pada permulaan, sosialisasi berarti nasionaliasasi- jadi negara mengambil alih hak milik pribadi. Ciri-ciri masyarakat komunis adalah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi penghapus adanya kelas-kelas sosial, menghilangnya negara, penghapusan pembagian kerja. Kelas-kelas tidak perlu dihapus secara khusus sesudah kelas kapitalis ditiadakan karena kapitalis sendiri sudah menghapus semua kelas, sehingga hanya tinggal proletariat. Itulah sebabnya revolusi sosialis tidak akan menghasilkan mesyarakat dengan kelas atas dan kelas bawah.

Marx tidak pernah menguraikan bagaimana ia membayangkan organisasi masyarakat sesudah penghapusan hak milik pribadi. Ia hanya berbicara secara umum dan abstrak. Satu-satunya tempat ia berbicara banyak dengan agak romantis (dan bertolak dari sebuah teks Feuerbach) adalah dalam German

Ideology: “Dalam masyarakat komunis amsing-masing orang tidak terbatas pada bidang kegiatan ekslusif, melainkan dapat mencapai kecakapan dalam bidang apapun, masyarakat mengatur produksi umum, dengan memungkinkan hal ini saya kerjakan hari ini, hal itu besok, pagi hari berburu, siang hari memancing ikan, sore hari memelihara ternak, sesudah makan mengkritik….” (MEW 3,33).

Marx mempergunakan istilah sosialisme dan komunisme dalam arti yang sama, yaitu keadaan masyarakat sesudah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Langkah pertama adalah kediktatoran proletariat dan sosialisme negara, lalu sesudah kapitalisme dihancurkan, negara semakin kehilangan fungsinya. Sosialisme tercapai apabila tidak ada lagi sedangkan negara komunis yang dimaksud Marx adalah bahwa negara bukan hanya menghilang bahkan menjadi maha kuasa.

Analisis

Salah satu alasan mengapa Marx menjadi tokoh yang begitu penting ialah karena ia mewakili suatu campuran intelektual yang berhasil dalam politik, yang memandang dunia dengan perasaan dingin dan mencari suatu masa depan yang lebih bermoral dan lebih bebas bagi manusia; politisi praktis yang terlibat dalam konflik-konflik dengan musuh-musuh politiknya, kanan dan kiri; serta profesional yang mengembangkan suatu teori perubahan ilmiah aeperti materialisme dialektika. Serangan utama Marx difokuskan pada kapitalisme dan liberalisme politik, terutama karena dalam permulaan abad ke-19, telah nyata bahwa sistem liberal dapat berjalan. Secara fundamental, pengandaian-pengandaian abad ke-19 timbul dari kontradiksi-kontradiksi luar biasa dalam kapitalisme industri, yang tidak cukup dipahami oleh para teoritisi. Kontrak sosial terdahulu dan yang menimbulkan hal-hal yang tidak mampu ditangani baik oleh teori hak alamiah, maupun oleh penegasan kembali secara sederhana asas-asas moral publik (Apter, 1996: 104).

Bila paradigma sosialis ingin berhasil dalam menentang paradigma liberal, maka secara intelektual ia harus kuat. Memang, ia harus menangani secara teoritis apa yang tidak mampu ditangani oleh paradigma liberal, yaitu masalah konflik dan polarisasi kelas. Marx mengakui bahwa evolusi mengikuti suatu garis lengkung tertentu, tetapi bukan dalam cara-cara mudah atau segera. Rakyat perlu berusaha mewujudkan hasil revolusioner dengan menyadari peranan mereka dalam sejarah sebagai satu kelas. Jadi alam, kebebasan, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan hukum dinamis dari perkembangan industri dipadukan oleh Marx dalam sebuah sintesa revolusioner (Apter, 1966:123). Pandangan Marx mengenai Materialisme Dialektika, ia memadukan suatu yang empiris dengan yang deduktif dalam rumusan sejarah yang dinamakan materialisme dialektika. Materialisme dalam masalah manusia mengacu pada proses ekonomi dan cara produksinya. Hipotesa Marx adalah bahwa ketimpangan akan tumbuh bersama dengan produktivitasnya, ketika suatu lompatan besar pada karakter teknologi akan memungkinkan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, suatu keadaan yang berlebihan, bukan kelangkaan. Tetapi apa yang paling ditekankan oleh Marx, bukanlah aspek moral kondisi-kondisi sosial pada kekejaman kapitalisme melainkan ia berusaha menjelaskan bagaimana dialektika, jika diterapkan pada cara produksi, akan mengungkapkan cara kerja dinamika pertukaran, yang di bawah kapitalisme menghasilkan nilai-lebih atau keuntungan, dalam menggerogoti kapitalisme itu sendiri.

Marx dan Engels menggabungkan sejumlah unsur intelektual yang berlainan sebagai garis pemisah radikalisme. Marx berusaha menjadikan radikalisme kurang sebagai visi, dan lebih merupakan ilmu pengetahuan tentang sosialime dengan menerapkan suatu interpretasi sejarah yang khusus. Kini, tekanan perhatian dari pra-Marxis menjadi bagian diskusi atau perdebatan seksama mengenai bagaimana mendorong bentuk-bentuk politik baru. Rancangan-rancangan masa kini meliputi usaha mencari ide-ide generatif baru, yang telah timbul bukan hanya dari penolakan-penolakan terhadap teori-teori yang lebih utilitarian, tetapi juga dari pengalaman-pengalaman dengan sosialisme otokratis dan ekses-ekses stalinisme. Marx telah menjadi seorang monopolis yang berhasil dalam lingkungan ide-ide sosialis (Apter, 1996: 106 dan 111).

Bagi Marx perhatian pada kebebasan manusia menjadi masalah bagaimana orang menjadi tidak teralienasi secara sosial. Hal ini merupakan proses yang membutuhkan bentuk ekonomi khusus yakni sosialisme; suatu kondisi perkembangan khusus-suatu pemahaman bahwa rantai yang membelenggu rakyat adalah politik dan bahwa hal itu diakibatkan oleh dominasi kelas. Marx mengemukakan (1) metode penafsiran sejarah, dan (2) penerapan metode itu tujuan khusus.

PETA PEMIKIRAN KARL MARX (1818-1883): Materialisme Dialektika & Materialisme Historis
Karl Marx dalam Lintasan Sejarah

Karl Marx, pelopor utama gagasan *“sosialisme ilmiah”* dilahirkan tahun 1818 di kota Trier, ayahnya ahli hukum dan diumur tujuh belas tahun Karl Marx masuk Universitas Bonn, juga belajar hukum. Belakangan dia pindah ke Universitas Berlin dan kemudian dapat gelar doktor dalam ilmu filsafat dari Universitas Jena. Entah karena lebih tertarik, Marx menceburkan diri ke dunia jumalistik dan sebentar menjadi redaktur *Rheinische Zeitung* di Cologne. Tapi pandangan politiknya yang radikal menyeretnya kedalam kesulitan dan memaksanya pindah ke Paris. Disitulah dia mula pertama bertemu dengan Freidrich Engels. Tali persahabatan dan persamaan pandangan politiknya mengikat kedua orang ini selalu dwi tunggal hingga akhir hayatnya. Karl Marx tak bisa lama tinggal di Paris dan segera ditendang dari sana dan pindah ke Brussel.

Di kota inilah, tahun 1847, dia pertama kali menerbitkan buah pikirannya yang penting dan besar *The Poverty* of *Philoshophy* (Kemiskinan Filsafat). Tahun berikutnya bersama dengan Freidrich Engels mereka menerbitkan *Communist Manifesto,* buku yang akhimya menjadi bacaan dunia. Pada tahun itu juga Karl Marx kembaJi ke Cologne untuk kemudian diusir lagi dari sana hanya selang beberapa bulan. Sehabis terusir dari sana-sini, akhimya Marx menyeberang selat Canal dan menetap di London hingga akhir hayatnya.

Meskipun hanya sedikit uang dikoceknya berkat pekerjaan jumalistik, Marx menghabiskan sejumlah besar waktunya di London melakukan penyelidikan dan menulis buku-buku tentang politik dan ekonomi. (di tahun-tahun itu Marx dan familinya mendapat bantuan dari Freidrich Engels kawan karibnya). Jilid pertama *Das Kapital,* karya i1miah Marx terpenting terbit tahun 1867. Tatkala Marx meninggal di tahun 1883, kedua jilid sambungannya belum sepenuhnya rampung. Kedua jilid sambunganya itu disusun dan diterbitkan oleh Engels berpegang pada cacatan-catatan dan naskah yang ditinggalkan Marx. Karya tulisan Marx merumuskan dasar teoretis komunisme. Ditilik dari perkembangan luar biasa gerakan ini di abad ke-20. Komunisme mempunyai am penting jangka panjang dalam sejarah. Sejak timbulnya komunisme sebagai bagian tak terpisahkan dari masa kini, terasa sedikit sulit menentukan dengan cermat perspektif masa depannya. Kendati tak seorangpun sanggup memastikan seberapa jauh Komunisme bisa berkembang dan seberapa lama ideologi ini bisa bertahan, yang sudah pasti dia merupakan ideologi kuat dan tangguh serta berakar kuat menghujam ke Bumi, dan sudah bisa dipastikan punya pengaruh besar di dunia untuk paling sedikit beberapa abad mendatang.

Pada saat ini sekitar seabad sesudah kematian Marx jumlah manusia yang sedikitnya terpengaruh oleh Marxisme mendekati angka 1,3 Milyar banyaknya. Jumlah penganut ini lebih besar dari penganut ideologi manapun sepanjang sejarah manusia. Bukan sekedar jumlahnya yang mutlak, melainkan sebagai kelompok dari keseluruhan penduduk dunia. Ini mengakibatkan kaum komunis dan juga sebagian yang bukan komunis percaya bahwa, di masa depan tidak bisa tidak Marxisme akan merebut kemenangan diseluruh dunia Namun, adalah sukar untuk memantapkan kebenarannya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Telah banyak contoh-contoh ideologi yang tampaknya sangat punya pengaruh penting pada jamannya tapi akhimya melayu dan sirna. (Agama yang didirikan oleh Mani bisa dijadikan misal yang menarik). Jika kita surut ke tahun 1900, akan tampak jelas bahwa demokrasi konstitusional merupakan arus yang akan menjadi anutan masa depan.

Komunisme

Menyangkut komunisme, seseorang sangat percaya dan tahu persis betapa hebatnya pengaruh komunisme di dunia saat ini dan dunia masa depan, Orang pasti masih mempertanyakan arti penting Karl Marx di dalam gerakan komunis. Pemerintah Uni Soviet sekarang tidak terawasi oleh karya karya Mark yang menulis dasar dasar pikiran sepem dialektika gaya Hegel dan tentang teori "nilai lebih", Teori teori itu kelihatan kecil pengaruhnya dalam praktek perputaran roda politik pemerintah Uni Soviet, baik politik dalam maupun luar negeri.

Komunisme masa kini menitik beratkan empat ide: (1) Sekelumit kecil orang hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja yang teramat banyak jumlahnya bergelimang papa sengsara, (2) Cara untuk merombak ketidakadilan ini adalah dengan jalan melaksanakan sistem sosialis, yaitu sistem dimana alat produksi dikuasai negara dan bukannya oleh pribadi swasta, (3) Pada umumnya, satu-satunya jalan paling praktis untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revousi kekerasan, (4) Untuk menjaga kelanggengan sistem sosialis harus diatur oleh kediktatoran partai Komunis dalam jangka waktu yang memadai.

Tiga dari ide pertama sudah dicetuskan dengan jelas sebelum Marx, sedangkan ide yang keempat berasal dari gagasan Marx mengenai "diktatur proletariat", sementara itu lamanya berlaku kediktatoran Soviet sekarang lebih merupakan langkah-Iangkah Lenin dan Stalin daripada gagasan tulisan Marx, Hal ini nampaknya menimbulkan anggapan bahwa pengaruh Marx dalam Komunisme lebih kecil dari kenyataan sebenamya, dan penghagaan orang-orang terhadap tulisantulisannya lebih menyerupai etalase untuk membenarkan sifat "keilmiahan" dari pada ide dan politik yang sudah terlaksana dan diterima.

Sering dituding bahwa teori Marxis dibidang ekonomi sangatlah buruk dan banyak keliru. Tentu saja banyak dugaan-dugaan tertentu Marx terbukti meleset Misalnya Marx meramalkan bahwa dalam negeri-negeri kapitalis kaum buruh akan semakin melarat dalam pengalanan sang waktu. Jelaslah bahwa ramalan ini tidak terbukti. Marx juga meramalkan bahwa kaum menengah akan disapu dan sebagian basar orangnya akan masuk kedalam golongan proletar dan hanya sedikit yang bisa bangkit dan masuk dalam kelas kapitalis. Ini pun jelas tak terbukti. Marx tampaknya juga percaya, meningkatnya mekanisasi akan mengurangi keuntungan kapitalis, kepercayaan yang bukan saja salah tetapi juga tampak tolol. Tapi lepas apakah teori ekonomi benar atau salah, semua itu tidak ada sangkut pautnya dengan pengaruh Marx. Arti penting filosof bukan terletak pada kebenaran pendapatnya tetapi terletak pada masalah apakah buah pikirannya telah menggerakkan orang untuk bertindak atau tidak. Diukur dari sudut ini, tak perlu diragukan lagi bahwa Marx punya arti penting dalam perkembangan sejarah masyarakat.

Hakekat Manusia Menurut Karl Marx

Pendirian Marx tentang hakekat manusia sanagat menentukan jawaban yang diberikannya terhadap masalah, seperti, "Apakah negara itu? Dan "Apakah sejarah itu? Dipapakan oleh Louis O. Kattsoff tentang hakekat manusia dalam penyelesaian materialisme historis, yaitu; (1) hakekat manusia adalah berubah-rubah, manusia selalu berubah secara dialektis dan historis, (2) hakekat manusia adalah tingkah laku, manusia ialah apa yang mereka kerjakan, (3) hakekat manusia adalah menguasai dan merencanakan, manusia mengubah sejarah dengan teknologinya dan ia juga mengubah dirinya sendiri, (4) hakekat manusia ditentukan oleh alat-alat produksi, orang dapat membayangkan betapa pentingnya menguasasi alat produksi bagi penganut Marxisme. Sebab, manusia ialah apa yang mereka kerjakan, dan yang mereka kerjakan ditentukan oleh cara-cara produksi, maka menguasai alat-alat produksi berarti menguasai hakikat manusia.

Keterasingan & Emansipasi Manusia

Marx meletakkan dasar emasipasi atas keterasingan manusia pada tiga hal: *Pertama,* emansipasi atas keterasingan manusia Karl Marx berangkat dari kritik terhadap hukum negara Hegel. Hegel melukiskan masyarakat sebagai kacau balau, sebagai *bellum omnium contra omnes* (perang semua lawan semua) karena satu-satunya hukum batinnya adalah pemuasan kebutuhan individu-individu. Masyarakat semacam itu mesti menghancurkan diri sendiri karena semua anggota hanya mencari kepentingan egois mereka masing-masing. Oleh karena itu masyarakat tidak boleh dibiarkan begitu saja, tetapi harus ditampung oleh negara. Maka, Hegel menganggap negara sebagai realitas dan tujuan masyarakat yang sebenamya sedangkan keluarga dan masyarakat luas ini merupakan unsur-unsmya. Anggapan itu dikritik oleh Marx, pertama, Hegel memutar balikkan tatanan yang sebenarnya. Bukan negara sebagai subyek yang unsur-unsurnya adalah keluarga dan masyarakat luas, melainkan keluarga dan masyarakat luas adalah pengandaian-pengandaian negara. Dengan sarkasme tajam Marx menulis: *"Logika ini bukan unuk membuktikan negara, melainkan negara dipakai sebagai bukti logika".* Marx mengkritik bahwa masyarakat luas merupakan realitas yang terpisah dari negara. Masyarakat hidup dalam dunia *skizofren*: Dalam masyarakat luas ia hidup sebagai individu egois terisolasi, sedangkan hakikat sosialnya terpisah daripadanya dijadikan negara yang menghadapinya sebagai kekuatan represif. Manusia harus memecahkan hakikatnya, eksistensi negara sebagai pemerintah selesai tanpa anggota masyarakat, dan eksistensinya dalam masyarakat luas selesai tanpa negara". Marx mengkritik Hegel pada dua hal; (1) Bahwa ia memutar membalikkan subyek dan obyek: Hegel menyatakan negara sebagai subyek dan masyarakat sebagai obyek, padahal kenyataan adalah kebalikannya, (2) Hegel hendak mengatasi egoisme masyarakat melalui negara sebagai penertib, hal ini berarti bahwa kesosialan (anti-egoisme) tidak masuk kembali kedalam masyarakat, melainkan hanya dipaksakan dari luar kepadanya oleh negara; padahal yang perlu adalah mengembalikan kesosialan manusia sendiri.

Kedua, emansipasi atas keterasingan manusia Karl Marx berangkat dari kritik terhadap agama. Gagasan Karl Marx tentang kritik terhadap agama bertolak dari pemikiran Feurbach (1804-1872). Feurbach memandang Hegel sebagai puncak rasionalisme modern, tetapi dalam suasana semacam ini dominasi agama tetap mewamai kehidupan sehingga dunia materi khususnya "manusia" tidak ditempatkan pada martabat semestinya. Feurbach menggariskan filsafatnya dengan corak materialistis, tetapi nama yang lebih disukainya adalah filsafat organisme. Kecenderungan ini timbul karena Feurbach pun tidak setuju dengan paham materialisme kasar yang dikembangkan oleh penganut materialisme mekanis-menurut Marx materialisme Feurbach tetap vulgar karena manusia sehakikat dengan mesin. Pada bagian ini Marx menentang paham Feurbach, karena manusia tidak semata tergantung pada kondisi materi, tetapi pada kondisi sosial, yaitu hidup dalam masyarakat *'social being that it, the live of community".* Disini Feurbach telah mengabaikan corak historis serta hubungan sosial manusia. Bagi Marx agama hanyalah pemyataan radikal manusia yang menjadi korban sistem ekonomi yang tidak manusiawi, manusia terasing secara sosial. Kritik agama bagi Marx, adalah sekunder. Yang seharusnya dikritik adalah keterasingan nyata manusia dalam masyarakat modem. "Kritik surga menjadi kritik bumi, kritik agama menjadi kritik hukum, kritik teologi menjadi kritik politik". Tuntutan emansipasi manusia berubah membawa Marx secara konsekuen ke kritik masyarakat

Ketiga, emansipasi dari keterasingan manusia Karl Marx berangkat dari kritik terhadap masyarakat kapitalisme. Terjadinya masyatakat borjuis erat kaitannya dengan kapitalisme. Hakekat masyarakat borjuis adalah uang, "pelacur umum, makcomblangnya orang-orang dan bangsa-bangsa". Uang menjadikan manusia menjadi budak, yang tergantung, yang ditentukan dari luar. Ia menjadi komoditi. Emansipasi berarti penghapusan masyarakat seperti itu. Oleh karena itu masyakat kapitalis berdasarkan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, emansipasi menurut Karl Marx hanya dapat tercapai kalau hak milik pribadi itu dihapus. Marx menggambarkan dehumanisasi ini terjadi dibawah sistem produksi kapitalis dengan sebulan "keterasingan" *(Etfremdung).* Bahwa emansipasi manusia itu perlu diusahakan dan tercapai apabila manusia dapat mewujudkan diri secara bebas dari heteronomi, secara sosial, bebas dari kepentingan, secara produktif. Hubungan masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalistik bersifat eksploitatif.

Tendensi Akar Materialisme

Materialime dalam konteks pembahasan filsafat sering dilawankan dengan idealisme, sebab kedua aliran *(school)* ini memiliki kawasan yang bertitrik pisah dan masing-masing mempunyai ciri atau penganut dalam sejarah kemanusiaan. Materialisme yang juga lazim disebut serba zat merupakan bagian dari filsafat metafisika dan terutama ontologi. Zatlah yang menjadi sifat dan keadaan terakhir kenyataan. Segala keadaan dan kejadian berasal dari metari. Unsur dasar seluruh kenyataan adalah zat. Tendensi akar materialisme terlihat pada filosof Ionian, dan filsafat Yunani Kuno.

Materialisme Dialektis

Materialisme dialektika timbul dari perjuangan sosial yang hebat, yang muncul sebagai akibat dari Revolusi Industri. Ide tersebut banyak kaitannya dengan Karl Marx (1818-1883) dan Freidrich Engels (1820-1895), dan telah menjadi filsafat resmi dari Rusia dan RRC; doktrin Marx dan Engels telah diberi tafsiran dan diperluas oleh *Lenin, Stalin, Mao Tse Tung* dan lain-lainnya.

Materialisme dialektik walaupun sangat menghormati sains dan menyatakan bahwa persepsi indrawi sains memberi kita pengetahuan yang riil, adalah suatu pendekatan dari segi politik dan sejarah dan bukan dari segi sains alam. Disitu ditekankan pandangan bahwa perkembangan sejarah dimana materi dalam bentuk organisasi ekonomi dalam masyarakat dianggap sebagai dasar. Dengan begitu maka dipakai istilah: materialisme sejarah dan determinisme ekonomi.

Untuk memahami materialisme dialektik, kita harus memahami dan menelusuri kembali ide-ide George Hegel (1770-1831). Hegel, seorang idealis yang pikirannya banyak mempengaruhi Marx, berpendapat bahwa alam ini adalah proses menggelarnya fikiran-fikiran. Disitu timbullah proses alam, sejarah manusia, organisme dan kelembagaan masyarakat. Bag; Hegel, materi adalah kurang riil dari pada jiwa, karena jiwa atau pikiran adalah esensi dari alam. Marx menolak idealisme Hegel ia membalikkan filsafat Hegel dan mengatakan bahwa materilah (dan bukan jiwa atau ide) yang pokok. Materi, yang khususnya diperlihatkan oleh organisasi ekonomi dari masyarakat serta cara-cara produksi, menentukan kelembagaan politik dan sosial dari masyarakat. Kemudian hal-hal tersebut mempengaruhi pemikiran, filsafat, etika dan agama.

Walaupun Karl Marx dan Freidrich Engels menolak idealisme Hegel, tetapi mereka menerima metodologi filsafatnya, hampir seluruhnya. Dunia menurut Hegel adalah selalu dalam proses perkembangan. Proses-proses perubahan tersebut bersifat dialektik, artinya, perubahan-perubahan itu berlangsung dengan melalui tahap afirmasi atau tesis, pengingkaran atau antitesis dan akhimya sampai pada integrasi atau Sintesa.

Salah satu contoh proses dialektika yang berasal dari Hegel misalnya, menyangkut tiga bentuk negara. Bentuk negara yang pertama ialah diktatur. disini masyarakat diatur dengan baik, tetapi warga negara tidak mempunyai kebebasan apapun juga (tesis). Keadaan ini menampilkan lawannya: anarki (antitesis). Dengan bentuk negara seperti ini para warga negara mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hid up kemasyarakatan menjadi kacau. Tesis dan antitesis ini diperdamaikan dalam suatu sintesis, yaitu demokrasi konstitusional. Dalam bentuk negara yang ketiga ini dijamin dan dibatasi oleh undang-undang dan kehidupan masyarakat berjalan dengan memuaskan.

Seperti semua Hegelian haluan kiri, Marx pun sangat mengagumi metode dialektika yang diintroduksikan Hegel kedalam filsafat Tetapi dialektika Hegel-katanya-berjalan pada kepalanya dan ia mau meletakkannya diatas kakinya. Maksudnya ialah bahwa pada Hegel dialektika ialah dialektika pada ide, dan ia mau menjadikannya dialektika materi. Untuk hegel dan dialektika pada umumnya, alam merupakan buah dart roh, tetapi bagi Marx dan Engels segala sesuatu yang bersifat rohani merupakan buah hasil materi dan bukan sebaliknya.

Dengan demikian Marx dan Engels memihak pada usaha Feuerbach untuk mengganti idealisme dengan materialisme. Dengan menganut suatu materialisme yang bersifat dialektis, Marx dan Engels menolak materialisme abad ke-18 dan juga materialisme abad ke-19 yang kedua-duanya bersifat mekanistis. Menurut materialisme abad ke-18 tidak ada perbedaan prinsipil antara sebuah mesin dan makhluk hidup (termasuk manusia). Hanya dalam hal terakhir ini mekanisme adalah lebih pelik. Salah satu prinsip materialisme dialetik adalah perubahan dalam hal kualitas. Itu berarti bahwa kejadian pada taraf kuantitatif (misalnya pengintergrasian lebih rapat dari bagian-bagian materi) dapat menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru. Dengan cara itulah kehidupanm berasal dart materi mati dan kesadaran manusiawi berasal dari kehidupan organis.

Materialisme Historis

Produksi ditentukan oleh alat Alat-alat itu adalah materi, yang dihasilkannya juga materi. Perkembangan sejarah adalah history (sejarah). History ditentukan oleh materi. Oleh karena itulah filsafat Marx disebut sebagai *historis materialime.* Manusia dapat menggunakan yang lain dart alam untuk keperluan-keperluannya. Ialah satu-satunya makhluk yang dapat mengganti kehidupannya, dan ikut mengganti sejarahnya. Tetapi pendorong untuk tindakan tidak terdapat dalam ide atau dalam keinginan seseorang atau dalam otaknya, akan tetapi pada pokoknya dalam proses produksi dan hubungan kelas masyarakat. Pada tahun 1848 Karl Marx dan Freidrich Engels menerbitkan *Manifesto Komunis,* suatu

dokumen yang banyak mempengaruhi gerakan revolusioner. Akhimya Karl Marx menerbitkan karyanya yang besar, *Das Kapital,* Jilid pertama terbit pada tahu 1867. Marx membentuk interpretasi ekonomi tentang sejarah, dan interpretasi tersebut telah berpengaruh kuat selama seratus tahun terakhir ini. Bagi Marx faktor ekonomi adalah faktor yang menentukan dalam perkembangan sejarah manusia. sejarah digambarkan sebagai pertempuran kelas, dimana alat-alat produksi, didistribusi dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi dari masyarakat menyebabkan perubahan dalam hubungan kelas, dan ini semua mempengaruhi kebiasaan dalam tradisi politik, sosial, moral dan agama

Terdapat lima macam sistem produksi, empat macam telah muncul bergantian dalam masyarakat manusia. Sistem kelima diramalkan akan muncul pada hari esok yang dekat, dan sekarang sudah mulai terbentuk; (1) Sistem komunisme primitif, (2) Sistem produksi kuno yang didasarkan atas perbudakan, (3) Tingkatan dimana kelompok-kelompok feodal menguasasi penduduk-penduduk, (4) Timbullah sistem borjuis atau kapitalis dengan meningkatnya perdagangan, penciptaan dan pembagian pekerjaan, sistem pabrik menimbulkan industrialis kapitalis, yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi, (5) Masyarakat tanpa kelas atau komunisme murni.

Pikiran dasar materialisme historis adalah arah yang ditempuh sejarah sama sekali ditentukan atau dideterminasi oleh perkembangan sarana-sarana produksi yang materiil. Jika sebagai contoh kita memilih pengolahan tanah, maka perkembangan sarana produksi adalah; tugal, pacul, bajak, mesin. Biarpun sarana-sarana produksi merupakan buah hasil pekerjaan manusia, tetapi sejarah tidak tergantung pada kehendak manusia. Menurut pendapat Marx manusia memang mengadakan sejarahnya, tetapi ia tidak bebas dalam mengadakan sejarahnya. sebagaimana juga materi sendiri, sejarahpun dideterminasi secara dialektis bukan secara mekanistis.

Kemanakan arah perkembangan sejarah? Apakah titik akhir dari sejarah? Marx berkeyakinan bahwa sejarah manusia menuju ke suatu keadaan ekonomis tertentu, yaitu komunisme, dimana hak milik pribadi akan diganti dengan milik bersama. Perkembangan menuju fase sejarah ini bertangsung secara mutlak dan tidak mungkin dihindarkan. Tetapi manusia dapat mempercepat proses ini dengan menjadi lebih sadar dan dengan aksi-aksi revolusioner yang berdasar atas penyadaran itu.

Epilog

Dari uraian yang dipaparkan diatas, penulis setidaknya memiliki harapan kepada segenap insan pergerakan untuk selalu menyadarkan diri sendiri akan realitas disekeliling kita yang timpang, tidak adil, dan menindas. Akan menjadi suatu hat yang sangat fatal dan busuk jika manusia selu diam melihat dan merasakan penindasan tetapi diam dan acuh. Pemikiran Karl Marx memberikan inspirasi bagi gerakan buruh di seluruh dunia untuk bergerak melawan sistem ekonomi kapitalis yang mengekspolitasi, menghisap dan menindas hakekat kesosialan manusia. Pemikiran Karl Marx bisa dijadikan alat atau kaca mata analisa atas sekian ketidakadilan yang disebabkan oleh negara yang repressif dan intstrumen kapitalistik internasional yang memiskinkan dan mengasingkan manusia dari fitrahnya. Maka, revolusi sosial menjadi penting untuk segera praxiskan.

PEMIKIRAN KARL MARX TENTANG KRITIK EKONOMI-POLITIK

Prawacana: Tentang Das Kapital

Proses Produksi Kapital[331], adalah suatu pembahasan yang mendalam tentang ekonomi politik yang ditulis oleh Karl Marx. Marx melakukan suatu analisis kritis terhadap kapitalisme dan aplikasi praktisnya dalam ekonomi serta dalam bagian tertentu, merupakan kritik terhadap teori-teori terkait lainnya. Kekuatan pendorong utama kapitalisme, menurut Marx, terdapat dalam eksploitasi dan alienasi tenaga kerja. Sumber utama dari keuntungan baru dan nilai tambahnya adalah bahwa majikan membayar buruh-buruhnya untuk kapasitas kerja mereka menurut nilai pasar, namun nilai komoditi yang dihasilkan oleh para buruh itu melampaui nilai pasar. Para majikan berhak memiliki nilai keluaran (*output*) yang baru karena mereka memiliki alat-alat produksi (*kapital*) yang produktif. Dengan menghasilkan keluaran sebagai modal bagi majikan, para buruh terus-menerus mereproduksikan kondisi kapitalisme melalui pekerjaan mereka.

Namun, meskipun Marx sangat prihatin dengan aspek-aspek sosial dari perdagangan, bukunya bukanlah sebuah pembahasan etis, melainkan sebuah upaya (yang tidak selesai) untuk menjelaskan tujuan dari “hukum gerak” *(“laws of motion”)* dari sistem kapitalis secara keseluruhan, asal-usulnya dan masa depannya. Ia bermaksud mengungkapkan sebab-sebab dan dinamika dari akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja bayaran, transformasi tempat kerja, konsentrasi modal, persaingan, sistem bank dan kredit, kecenderungan tingkat keuntungan untuk menurun, sewa tanah, dan banyak hal lainnya. Marx memandang komoditi sebagai "bentuk sel" atau satuan bangunan dari masyarakat kapitalis—ini adalah obyek yang berguna bagi orang lain, tetapi dengan nilai jual bagi si pemilik. Karena transaksi komersial tidak menyiratkan moralitas tertentu di luar apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksinya, pertumbuhan

[331] Marx menerbitkan jilid pertama dari Das Kapital pada 1867, tetapi ia meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan jilid kedua dan ketiganya yang sudah dibuat naskahnya. Buku-buku ini kemudian disunting oleh teman dan rekan kerjanya Friedrich Engels dan diterbitkan 1885 dan 1894; jilid keempat, yang berjudul, yang disebut *Theories of Surplus-Value*, pertama-tama disunting dan diterbitkan oleh Karl Kautsky pada 1905-1910. Naskah-naskah persiapan lainnya diterbitkan baru beberapa dasawarsa kemudian.

pasar menyebabkan dunia ekonomi dan dunia moral-legal menjadi terpisah dalam masyarakat: nilai subyektif moral menjadi terpisah dari nilai obyektif ekonomi.

Ekonomi politik, yang mulanya dianggap sebagai “ilmu moral” yang berkaitan hanya dengan distribusi kekayaan yang adil, atau sebagai suatu "aritmetika politik" untuk pengumpulan pajak, dikalahkan oleh disiplin ilmu ekonomi, hukum dan etika yang terpisah.Marx percaya bahwa para ekonom politik dapat mempelajari hukum-hukum kapitalisme dalam cara yang “obyektif”, karena perluasan pasar pada kenyataannya telah mengobyektifikasikan sebagian besar hubungan ekonomi: cash nexus membuang semua ilusi keagamaan dan politik sebelumnya (namun kemudian menggantikannya dengan ilusi jenis lain—fetishisme komoditi). Marx juga mengatakan bahwa ia memandang "formasi ekonomi masyarakat sebagai suatu proses sejarah alam". Pertumbuhan perdagangan terjadi sebagai suatu proses di mana tak seorangpun dapat menguasai atau mengarahkan, menciptakan suatu kompleks jaringan kesalingterkaitan sosial yang sangat besar secara global. Dengan demikian, suatu "masyarakat" terbentuk "secara ekonomi" sebelum orang benar-benar secara sadar menguasai kapasistas produktif yang sangat beasr dan kesalingterkaitan yang telah mereka ciptakan, untuk membangunnya secara kolektif untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Jadi, analisis Marx dalam Das Kapital, difokuskan terutama pada kontradiksi-kontradiksi struktural, daripada antagonisme kelas, yang mencirikan masyarakat kapitalis–“gerakan kontradiktif” (*gegensätzliche Bewegung*) yang berasal pada sifat ganda pekerjaan,” bukannya dalam perjuangan antara tenaga buruh dan modal, atau antara kelas pemilik dan kelas pekerja. Lebih jauh, kontradiksi-kontradiksi ini beroperasi (seperti yang digambarkan oleh Marx dengan menggunakan suatu ungkapan yang dipinjam dari Hegel) “di belakang punggung” kaum kapitalis maupun buruh, artinya, sebagai akibat dari aktivitasaktivitas mereka, namun demikian tidak dapat diminimalkan ke dalam kesadaran mereka baik sebagai individu maupun sebagai kelas. Oleh karena itu, Das Kapital, tidak mengusulkan suatu teori revolusi (yang dipimpin oleh kelas buruh dan wakil-wakilnya) melainkan teori tentang krisis sebagai kondisi untuk potensi revolusi, atau apa yang dirujuk oleh Marx dalam Manifesto Komunis sebagai "senjata" potensial, "ditempa" oleh para pemilik modal, "berbalik memukul kaum borjuis sendiri" oleh kelas pekerja. Krisis seperti itu, menurut Marx, berakar dalam sifat komoditi yang kontradiktif, bentuk sosial yang paling dasar dari masyarakat kapitalis. Dalam kapitalisme, perbaikan-perbaikan dalam teknologi dan meningkatnya tingkat produktivitas menambah jumlah kekayaan materi (atau nilai pakai) dalam masyarakat sementara pada saat yang bersamaan mengurangi Nilai (ekonomi) dari kekayaan ini, dan dengan demikian merendahkan tingkat keuntungan—suatu kecenderungan yang membawa kepada situasi tertentu, yaitu ciri khas dalam kapitalisme, yakni "kemiskinan di tengah kelimpahan," atau lebih tepatnya, krisis produksi yang berlebihan di tengah konsumsi yang terlalu rendah.

Marx mendasarkan karyanya pada para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan bahkan Benjamin Franklin. Namun, ia mengolah kembali gagasan-gagasan para pengarang ini, sehingga bukunya merupakan sintesis yang tidak mengikuti gagasan pemikir manapun. Buku ini juga mencerminkan metodologi dialektis yang diterapkan oleh G.W.F. Hegel dalam bukunya *The Science of Logic* dan *The Phenomenology of Mind*, dan pengaruh para sosialis Perancis seperti Charles Fourier, Comte de Saint-Simon, dan Pierre-Joseph Proudhon. Marx sendiri mengatakan bahwa tujuannya adalah "membawa suatu ilmu [artinya, ekonomi politik] melalui kritik kepata suatu titik di mana ia dapat secara dialektis digambarkan", dan dalam cara ini "mengungkapkan hukum gerak masyarakat modern". Dengan memperlihatkan bagaimana perkembangan kapitalis itu adalah pendahulu dari suatu cara produksi sosialis yang baru, ia berusaha memberikan dasar ilmiah bagi gerakan buruh modern. Dalam mempersiapkan bukunya ini, ia mempelajari literatur ekonomi yang tersedia pada masanya selama dua belas tahun, terutama di British Museum di London. Aristoteles, dan filsafat Yunani pada umumnya, merupakan pengaruh penting lainnya (meskipun seringkali diabaikan) dalam analisis Marx terhadap kapitalisme. Pendidikan Marx di Bonn terpusat pada para penyair Yunani dan Romawi. Disertasi yang diselesaikannya di universitas adalah tentang perbandingan antara filsafat alam dalam karya Demokritus dan Epikurus. Lebih dari itu, sejumlah pakar telah mengajukan pendapatnya bahwa rancangan dasar Das Kapital–termasuk kategori-kategori penggunaan dan nilai tukar, serta "silogisme" untuk sirkulasi sederhana dan diperluas (M-C-M dan M-C-M’)–diambil dari Politik (Aristoteles) dan Etika Nikomakea. Lebih dari itu, gambaran Marx tentang mesin di bawah hubungan-hubungan produksi kapitalis sebagai “otomat” yang bertindak sendiri, adalah sebuah rujukan langsung kepada spekulasi Aristoteles kepada alat-alat yang tidak bernyawa yang mampu mengikuti perintah sebagai kondisi untuk penghapusan perbudakan.

Dasar Kritik Ekonomi-Politik

Dalam studi kritik ekonomi-politik pandangan Karl Heinrich Marx (1818-1883) dianggap paling berpengaruh. Dari segi teoritis, banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi saja, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah dan sebagainya. Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Untuk menunjukkan kebenciannya Marx menggunakan berbagai argumen untuk “membuktikan” bahwa sistem liberal atau

kapitalis itu buruk. Argumen-argumen yang disusun Marx dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari sisi moral, sosiologi maupun ekonomi.[332]

Menurut ramalan Marx sistem kapitalis hancur bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain, melainkan karena keberhasilannya sendiri. Sistem kapitalis dinilai Marx mewarisi daya self destruction, suatu daya dari dalam yang akan membawa kehancuran bagi sistem perekonomian liberal itu sendiri. Bagi Marx sistem kapitalis adalah suatu sistem yang "sudah busuk dari dalam" dan tidak mungkin diperbaiki. Untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, tidak ada jalan lain, sistem liberal atau kapitalis tersebut harus dihancurkan dan diganti dengan sistem yang lain yang lebih manusiawi, yaitu sistem sosialis atau komunis.

Dalam buku Manifesto Komunis dapat diikuti bagaimana teori Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Di zaman kuno ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menggarap tanah bukan kepunyaannya. Bahkan di zaman modern ini juga ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan.

Disamping itu juga ada masyarakat kelas kaya (*the haves*) dan kelas masyarakat tak berpunya (*the haves not*). Semua kelas-kelas masyarakat ini dianggap Marx timbul sebagai hasil dari kehidupan ekonomi masyarakat.Menurut pengamatan Marx, di seluruh dunia ini di sepanjang sejarah, kelas yang lebih bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Sekarangpun (maksudnya di masa Marx) tak terkecuali, tetap ada perjuangan kelas. Dengan anggapan seperti ini Marx meramal bahwa kaum proletar yang terdiri dari para buruh akan bangkit melawan kesewenang-wenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa. Bagaimana Marx menganggap bahwa kaum proletar dihisap dan diproses oleh para pemilik modal? Teori yang digunakan untuk menjelaskan penindasan tersebut adalah teori lebih (*theory of surplus value*), yang sebenarnya berasal dari kaum klasik sendiri.

Menurut pandangan kaum klasik (Ricardo), nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang tersebut, yang di dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami (*natural wages*). Upah alami yang diterima oleh para buruh hanya cukup sekedar penyambung hidup secara subsistem, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok-pokok saja. Padahal nilai dari hasil kerja para buruh jauh lebih besar dari jumlah yang diterima mereka sebagai upah alami. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami inilah yang disebut Marx sebagai nilai lebih (*surplus value*)[333], dinikmati oleh para pemilik modal. Makin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal, yang bagi Marx berarti makin besar penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal atau kaum buruh.

Di sini tampak perbedaan yang sangat nyata antara Marx dan Smith dalam memandang persaingan. Kalau Smith menganggap persaingan bebas sebagai prasyarat bagi terbentuknya masyarakat sejahtera, sebaliknya Marx memandangnya sebagai penyebab terjadinya konsentrasi-konsentrasi ekonomi atau monopoli. Kompetisi dinilai Marx mengandung sesuatu daya yang kalau tidak diawasi akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Perusahaan-perusahaan besar akan mencaplok yang kecil. Yang lemah akan tergusur dari pasar. Akibatnya jumlah golongan menengah menciut, jumlah kaum proletar akan semakin banyak. Sebagai ekses dari persaingan yang tidak sehat tersebut maka sebagian

---

[332] Dari segi *moral* Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Walau ada pengakuan bahwa sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar ini lebih efisien, akan tetapi sistem ini tetap dikecam sebab sistem liberal tersebut tidak perduli tentang masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Dengan menerapkan sistem "upah besi" kaum buruh dalam sistem perekonomian liberal tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi karena—sebagaimana diucapkan Marx—"pasar bebas memang telah mentakdirkannya demikian". Untuk mengangkat harkat para buruh yang sangat menderita dalam sistem liberal tersebut Marx mengajak kaum buruh untuk bersatu, dan sistem perekonomian liberal-kapitalis harus digantikan dengan sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua untuk semua, yaitu sistem perekonomian sosialis-komunis. Dari segi *sosiologi*, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Dalam sistem liberal-kapitalis yang diamati Marx ada sekelompok orang (yaitu para pemilik modal) yang menguasai kapital, dan ada sekelompok orang lainnya (yaitu kaum buruh) sebagai kelas proletar yang seperti sudah ditakdirkan untuk selalu menduduki posisi kelas bawah. Jika tidak dilakukan sesuatu, demikian argumentasi Marx, jumlah kaum nestapa ini akan semakin besar. Sebagai langkah antisipasi, Marx menganjurkan agar sistem liberal yang menyebabkan kaum buruh menderita tersebut harus diperbaiki, atau lebih tepat lagi, diganti dengan sistem sosialis yang lebih "berpihak" pada golongan kaum buruh. Dari segi *ekonomi*, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitasil memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi pembangunan dalam sistem kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal. Untuk bisa membangun secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan perombakan struktur melalui revolusi sosial. Jika langkah ini berhasil, maka langkah berikutnya yang harus diambil ialah penataan kembali hubungan produksi (khususnya dalam sistem pemilikan tanah, alat-alat produksi dan modal). Menurut Marx, hanya atas dasar hubungan yang lebih manusiawi ini pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan rakyat. Atas pandangan yang sangat skeptis di atas, tidak heran jika Marx meramal bahwa suatu masa sistem kapitalis akan hancur.

[333] Sebagaimana yang tertulis oleh Marx dalam *Das Capital* (yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Samuel Moore dan Edward Aveling menjadi: *Capital: A Critique of Political Economy* (1984): *The Rate of surplus-value is therefore an expression for the degree of exploitation of labour-power by capital, or of the labourer by capitalist.* Menurut Marx, sebagian dari nilai surplus itu merupakan hak para pekerja, tetapi semuanya dikangkangi oleh para pemilik modal. Mereka (para pemilik modal tersebut) telah memakan yang bukan hak mereka. Sebagian dari nilai lebih tersebut kembali ditanamkan untuk investasi, apakah perluasan usaha yang ada atau membuka lapangan usaha baru. Dari hasil investasi ini para pemilik modal akan menerima hail yang lebih besar. Kekayaan mereka terus menumpuk, sehingga makin lama semakin besar. Akumulasi kapital akan semakin berhasil jika para kapitalis bisa menindas kaum buruh sekeras-kerasnya, yaitu dengan memberikan tingkat upah yang sangat rendah.

yang kalah tercampak dari pasar. Mereka yang tergusur dari pekerjaan semula akan mengumpul di pusat-pusat industri, membentuk perkampungan-perkampungan kumuh. Tetapi adanya pemusatan para penganggur ini justru menguntungkan kaum kapitalis, sebab mereka bisa dijadikan sebagai cadangan tenaga kerja murah. Dengan banyaknya orang yang antri mencari pekerjaan, maka kaum buruh yang "cukup beruntung memperoleh pekerjaan" walau dengan upah sangat rendah tersebut tidak akan bisa macam-macam. Kalau mereka membuat ulah, dengan segera mereka bisa dipecat (PHK) dan seribu orang siap menggantikannya. Akibat yang lebih nyata dari keadaan ini: kehidupan buruh kian lama semakin tergencet. Tetapi dengan praktek "gencet menggencet" seperti ini siapa sesungguhnya yang rugi? Kaum buruh jelas rugi, sebab mereka hanya bis memperoleh nafkah sekedar penyambung hidup belaka. Bagaimana dengan pemilik modal? Pada mulanya dengan menekan upah buruh mereka memang untung. Tetapi dengan jumlah buruh yang sangat banyak, sedang pendapatan mereka sangat rendah, siapa yang akan membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik? Karena daya beli masyarakat rendah, barang-barang yang dihasilkan menjadi tidak laku. Pabrik-pabrik terpaksa tutup. Semua ini bukan karena salah siapa-siapa, melainkan karena tingkah kaum kapitalis sendiri. Lebih lanjut Marx menganalisis: jika pabrik-pabrik pada tutup, pengangguran akan semakin merajalela, yang akan membawa kekalutan pada masyarakat. Marx meramal akan datang suatu masa, di mana terjadi krisis besar-besaran, yang akan mengakhiri riwayat sistem kapitalistis.

Dari setiap argumen yang dilontarkan Marx di atas jelas sekali bahwa ide tentang konflik selalu ditekankan: konflik antara ideal dan realitas; antara kapital dan labor; juga antara pertumbuhan dan stagnasi. Dari setiap konflik akan muncul perubahan, dan untuk alasan ini Marx berpendapat bahwa sistem kapitalisme mesti diganti dengan sistem lain di mana konflik diganti dengan harmoni atau keselarasan etis, sosial dan ekonomi. Proses pembangunan melalui konflik merupakan proses dialektik.[334] Proses ini mempunyai basis dalam pembagian masyarakat atas kaum pekerja dan kapitalis. Bagi Marx, pangkal dari semua perubahan adalah karena dilakukannya penghisapan atau eksploitasi dari para kapitalis terhadap kaum buruh. Eksploitasi terhadap buruh tersebut telah memungkinkan terjadinya akumulasi kapital di pihak pemilik modal, tetapi menyebabkan pemiskinan di kalangan buruh. Perbedaan yang sangat menyolok antara pemilik kapital dan kaum proletariat sebagaimana dijelaskan di atas akan membawa ke arah revolusi sosial. Bagaimana revolusi sosial tersebut terjadi sebagai akibat dilakukannya eksploitasi terhadap labor. Uraian tentang dasar kritik-ekonomi politik diatas dapat dijadikan kerangka teoretik dan kemudian membatasi sekaligus sebagai alat analisa dan verifiksi terhadap logika perkebangan masyarakat dalam menyusun teori negara menurut Marx.

Kelas dan Kapitalisme[335]

Kritik Marx terhadap konsep negara liberal dan Hegelian perlu dipahami dalam kerangka pemikian Marx yang lebih luas tetang posisi Indonesia dalam masyarakat, hubungan-hubungan produksi, dan sistem produksi modern yang ia sebut kapitalisme. Pada dasarnya Marx bisa menerima keberadaan individu sebagai organisme yang memiliki kapasitas unik, hasrat dan kepentingan untuk memilih secara bebas. Namun, ia menolak pandangan liberal yang melihat individu sebagai organisme yang abstrak tanpa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang besifat riil. Ia juga mengkritik kecenderungan menempatkan individu sebagai entitas sosial yang paling utama untuk memahami kehidupan politik dan perilaku negara. (Giddens and Held, 1982). Dalam *Critique Hegel's Philosophy of Right* (1843a). Marx menegaskan, *"man is not an abstrac being squatting outside the world. Man is the human world, the state, society"* (h. 131). Keberadaan individu karenanya hanya bisa diterima dalam kaitannya dengan sesama individu lainnya. Individu bukanlah sekumpulan organisme yang bertindak secara otonom yang terlibat aktif dalam produksi dan kehidupan politik, melainkan humam beings yang hidup dalam jaring-jaring interaksi dan relasi sosial dengan sesama manusia lainnya. Sifat-sifat dasar dan perilaku setiap individu merupakan produk sejarah yang bersumber dari berbagai bentuk interaksi sosial antara manusia. Bagi pemikir liberal, perbedaan antara seorang budak dan majikan menjadi tidak penting karena kedua-duanya merupakan individu yang berdaulat. Akan tetapi bagi Marx perbedaan itu sangat nyata karena merupakan produk interaksi antar manusia yang membawa efek ekonomi dan sosial yang bertolak belakang (Marx, 1858).

Kunci untuk memahami perilaku individu adalah struktur kelas. Akan tetapi tidak semua masyarakat mengalami proses pemilahan berdasarkan kelas. Masyarakat tribal, diantaranya, tidak

---

[334] Bagi Marx, dialektika sejarah merupakan suatu keniscayaan: sesuatu yang pasti bakal terjadi. Yang jelas, jika kaum proletar sudah tidak tahan lagi, mereka akan melancarkan revolusi. Para pekerja akan menghancurkan pabrik-pabrik dan merusak segala milik kaum kapitalis. Tetapi jika ini terjadi, semua pihak akan rugi; baik kaum kapitalis maupun mereka sendiri. Sebab, jika pabrik-pabrik hancur, berarti mereka akan tergusur dari lapangan kerja. Untuk menghindari tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak, di sinilah peran kaum komunis diharapkan. Menurut Marx, kaum komunis yang memperjuangkan nasib kaum proletar harus menuntun revolusi yang dilancarkan kaum proletar ke arah yang benar, dan revolusi harus dilancarkan sebaik-baiknya.

Agar revolusi berjalan sukses, Marx menganjurkan agar kaum komunis mendukung setiap gerakan melawan tatanan sosial politik sistem kapitalis. Kaum proletar yang sudah sangat menderita dan tidak memiliki apa-apa di bawah sistem kapitalis tidak akan kehilangan apa-apa dalam memperjuangkan revolusi. Bagi Marx, untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri kaum buruh di seluruh negeri harus bersatu memperjuangkan sebuah sistem baru yang lebih berpihak kepada kaum buruh, yaitu sistem sosialis atau komunis.

[335] Lih. Eric Hiariej, *Teori Negara Marxis*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas ISIPOL UGM, Volume 7, Nomor 2, November 2003 (261-282) h. 268-272.

mengenal kelas karena masyarakat tidak mengenal *surplus* dan tidak mengakui pemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Sistem produksi dijalankan secara gotong royong dan dibagikan secara merata kepada setiap anggota masyarakat. Sebaliknya, pemilahan kelas hanya berkembang dalam sistem produksi yang mengejar *surplus* dan mengakui hak-hak pemilikan pribadi. *Surplus* tersebut dicapai setelah kelas sosial non-produktif berhasil menguasai alat-alat produksi dan memaksakan eksploitasi atas kelas sosial produktif (Marx, 1867). Kelas sosial yang menguasai alat-alat produksi menjadi kelas dominan, sementara kelas sosial produktif yang ditindas atas nama keuntungan menjadi kelas sub-ordinan. Pada gilirannya, ketika sistem produksi yang mengejar *surplus* dan mengakui hak-hak properti ini berkembang menjadi sistem produksi yang utama, kelas dominan dan subordinan akanmenjadi dua kelas uatam yang membelah masyarakat. Hubungan antara kedua kelas ini selalu ditandai oleh eksploitasi dan konflik, yang berpengaruh besar terhadap dinamika sebuah masyarakat. (Marx dan Engels, 1848). Sayangnya tulisan Marx tidak memberikan perhatian cukup serius pada kemungkinan hubungan yang saling tumpang tindih antar penindasan berdasarkan kelas dan penindasan berbasiskan gender. Topik ini baru menjadi perhatian yang cukup serius dalam tulisan Engels, *On Origins of The Family, Private Property and The State.* Menurut Engels (1881), dalam masyarakat kuno yang bersifat *matriarchal* posisi perempuan sedikit lebih dominan dibanding laki-laki. Namun hubungan antara keduanya berubah total setelah pengakuan atas hak-hak pemilikan pribadi. Laki-laki menjadi lebih beruntung karena hak atas warisan memungkinkan laki-laki menguasai hak-hak pemikiran tersebut.

Dalam masyarakat modern struktur kelas merupakan produksi sisten kapitalisme. Sistem ini dibangun berdasarkan hak pemilikan pribadi atas faktor produksi, kebebasan mempertukarkan barang dan jasa, dan relasi yang tidak seimbang antara modal dan tenaga kerja. Produksi ditujukan untuk mengahasilkan *profit* dan *surpluse value* dan bukan untuk kepentingan jangka panjang memuaskan kebutuhan manusia. (Held, 1996; Brown, 1995; MacEwan, 1999). Menurut Marx, sistem ini pada dasarnya mengandung ketegasan-ketagasan yang melekat secara inheren dalam keseluruhan proses menghasilkan *profit* dan *surpluse value.* Perkembangan sejarah dalam banyak hal ditentukan oleh hasil ketegangan-ketegangan ini, diataranya ketegangan hubungan produksi dan tehnik produksi dan konflik kelas. Menurut Marx, sistem produksi kapitalisme terdiri dari, setidaknya, dua macam struktur dasar yang disebut Marx dengan *social formation* dan *mode of production* (Marx, 1859). Formasi sosial merupakan sekumpulan kumpulan interaksi dan lembaga-lembaga sosial yang membentuk sebuah masyarakat. Struktur ini meliputi seluruh aspek kehidupan sosial termasuk sistem ekonomi, sistem kekuasaan dan kehidupan budaya yang saling berhubungan satu sama lain. Formasi sosial dibentuk oleh determinasi *mode of production* atau infrastruktur ekonomi atas kesadaran sosial, kehidupan budaya dan sistem politik.

Di lain pihak, infrastruktur ekonomi—atau sering juga disebut *economic base*—merupakan kombinasi dari *relation of production* menyangkut tiga jenis relasi sosial: *pertama,* hubungan-hubungan produksi yang bersifat primer seperti hubungan butuh dan majikan, *kedua,* hubungan-hubungan produktif yang bersifat sekunder seperti serikat buruh, asosiasi pemilik modal dan pola-pola dasar kehidupan keluarga yang berkaitan erat dengan sistem produksi kapitalistik; dan *ketiga* hubungan-hubungan politik dan sosial yang bersumber dari hubungan produksi primer dan sekunder seperti negara, lembaga-lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya yang mencermikan hubungan buruh-majikan. Sementara itu, *forces of productions* meliputi alat-alat produksi, tehnik produksi, sumber daya alam dan manusia dan pengorganisasian produksi berdasarkan alat, tehnik dan sumber daya yang dimiliki. Menurut Marx, infrastruktur ekonomi berpengaruh besar terhadap bentuk dasar masyarakat. Hubungan produksi, diantaranya, menentukan proses menghasilkan *surplus.* Sebuah formasi sosial dapat dikategorikan kapitalistik jika hubungan produksi ini ditujukan untuk merebut *use value* yang dihasilkan pekerja dan mengubahnya menjadi *exchange value* yang dilekatkan pada komoditi tertentu sebelum mengahasilkan *profit.* Pemisahan antara kelompok sosial yang menghasilkan *profit*—dan karenanya menguasai kapital—dan kelompok sosial yang hanya mempu menjual tenaga kerjanya bukan saja menentukan hubungan kelas, tetapi juga menjadi basis eksploitasi dan konflik sosial dalam masyarakat modern.

Pemahaman tentang kelas dan kapitalisme membawa implikasi luas terhadap pemahaman Marx dan Engels tentang negara. Bertolak belakang dengan Hegel yang memisahkan negara dari masyarakat (sipil) sembari menempatkan negara sebagai aktor yang otonom dan menentukan. Marx memahami kehadiran negara sebagai bagian dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat, terutama hubungan antar kelas sosial yang konfliktual. Marx dan Engels juga berbeda dengan para pemikir liberal yang memusatkan perhatiannya pada ketegangan antara hak-hak individu dan netralitas negara karena ia melihat keberadaan otoritas politik dalam konteks sistem produksi untuk menghasilkan *surplus value* yang menjadi basis material hubungan tidak seimbang antara kelas dominan dan subordinan. Bagi Marx, gagasan tentang negara harus selalu dikaitkan dengan dua faktor: *pertama,* negara merupakan orde politik yang merepresentasikan kepentingan kelas sosial dominan, termasuk didalamnya menjamin keberlangsungan dominasi modal atas tenaga kerja. *Kedua,* negara juga merupakan orde politik yang menjamin keberlangsungan akumulasi kapital tanpa gangguan perjuangan kelas.[]

MATERI 20
PEMIKIRAN POLITIK & TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

PEMIKIRAN POLITIK & TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI (1891-1937)
Prawacana

Delapan tahun pasca kelahiran Benito Amilcare Andrea Musollini (1883), tepatnya tanggal 22 lanuari 1891 disebuah kota kecil Ales, propinsi Cagliari Sardinia, telah lahir seorang Antonio Gramsci. la merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, ayahnya (Fransesco Gramsci) hanyalah seorang pegawai disebuah kantor panitera daerah di Ghilarza dan Giuseppina Marcias. Pada tahun 1897, tepat di usianya yang keenam tahun, ayahnya diskors dari pekerjaannya tanpa dibayar, atas tuduhan penyimpangan adminstrasi. Setahun kemudian dia didakwa bersalah atas korupsi, namun motivasi sebenarnya adalah oposisinya terhadap partai politik yang berkuasa di daerahnya, sebab korupsi sudah menjadi wabah yang menjalar dan merupakan tipe umum masyarakat Italia saat itu.

Ditengah himpitan ekonomi keluarganya, gangguan kesehatan yang diderita Gramsci kecil makin menambah pemlasalahan. la menderita cacat tulang belakang yang memaksanya untuk berada ditempat tidur dalam waktu yang lumayan lama. Saat beranjak dewasa tubuhnya bungkuk dan sulit berjalan tegak. Ia tumbuh dengan tekanan psikologis, introvert dan paranoid pada penyangga tubuhnya. Diusianya yang ketujuh (l898), Gramsci kecil mulai memasuki masa pendidikan dasamya di Ghilarza, namun ditahun l903 ia terpaksa meninggalkan sekolahnya dan bekerja selama dua tahun pada kantor panitera setempat setempat guna menopang ekonomi keluarganya. Kebebasan ayahnya memungkinkan gramsci kecil untuk menyambung kembali studinya yang sempat terputus di kota tetangga Santulussurgiu, hingga pada tahun l908 ia berhasil menyelesaikan studinya dan meneruskan studi pada liceo senior di Cagliari. Adalah Genarro, seorang sosialis militan yang Juga kakaknya yang memperkenalkan Gramsci pada dunia politik. Sejak l906, Genarro mulai mengirim brosur tentang sosialisme pada adiknya. Ketertarikan Gramsci pada bacaan dan aktivitas kelompok sosialisme bahkan berlanjut hingga ia masuk dunia perkuliahan lewat beasiswa yang didapatnya(l9ll). Ketertarikan tersebut mendorongnya untuk bergabung dengan Partai Sosialis Italia di tahun l9l3. Pada tahun l9l4 Gramsci menulis artikel pertamanya bagi surat kabar sosialis II Grido del Popolo, dua tahun kemudian ia mulai bekerja sebagai jurnalis bagi surat kabar Partai Sosialis A vanti, serta menulis untuk II Grido del Popolo. Saat terjadi perpecahan di tubuh partai Sosialis italia, yang kemudian disusul dengan berdirinya Partai Komunis Italia, Gramsci terpilih sebagi pengurus pusat. Seiring dengan berjalannya waktu, perjalanan kehidupan Gramsci sebagai aktivis semakin menunjukkan arah pembentukan kepribadian sebagai aktifis dan minatnya untuk menekuni bidang media massa, kebudayaan, dan kritik ideologi semakin kokoh. Gramsci semakin tertarik mendalami bidang pengembangan pemikiran dan konsepsi ideologi kritik dan counter terhadap ideologi dominan yang dikembangkan oleh negara. Perjalanannya ini mengantarkannya menjadi pemimpin mingguan terbitan kaum sosialis yang sangat disegani di Turin ordine Nouvo (l9l9).

Pada tahun l922-l924, Gramsci mendarat di Rusia, ia datang sebagai anggota ekskutif komintern internasional komunis. Di sana ia menghabiskan waktu beberapa bulan, ia juga telibat aktif dalam berbagai macam perdebatan, diskusi, serta menelorkan pemikran-pemikiran kritisnya tentang sosialisme. Gramsci akhimya kembali ke Italia dan kemudian terpilih sebagai anggota parlemen Italia dari Partai Komunis (l924). Tahun l926 adalah tahun yang paling memilukan dalam perjalanan kehidupan Gramsci sebagai aktifis, namun tahun itu juga yang merupakan awal tahun yang membuatnya menjadi pemikir kritis yang besar hingga sekarang. Ia ditahan dan dijatuhi hukuman 20 tahun oleh rezim fasis Mushollini karena dituduh sebagai provokator. Dalam kehidupannya di penjara, berbekal sisa tenaga yang terus digerogoti oleh penyakit yang dideritanya, Gramsci memulai aktifias penulisan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan cemerlangnya, ia juga banyak berdiskusi dengan para tahanan yang juga tokoh-tokoh komunis. Gramsci akhimya meninggal di kamar penjaranya karena mengalami pendarahan otak (27 april l937), namun gagasan revoluisioner Gramsci berhasil diselundupkan oleh Tatiana yang kemudian dikirimkan ke Moskow, dan sampai saat ini gagasan cemerlang Gramsci telah memberikan sumbangsih yang begitu berarti bagi perkembangan pemikiran dan teori perubahan sosial.

Konsep Hegemoni Gramsci

"*Mengapa dan bagaimana negara modern bisa mendapatkan konsensus atas kekuasaannya terhadap masyarakat".* Salah satu pandangan Gramsci yang cukup dominan adalah pandangannya tentang hegemoni yang merupakan ide sentral, orisinil dalam teori sosial dan filsafatnya. Gramsci pemah mengatakan bahwa 'jilsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi konsepsi tentang

dunia yang total dan integral dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi mmyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia'. (Gramsci, "Selections from Prison Notebooks", I933) Dasar epistemologi gramsci tentang hegemoni didasarkan pada kesadaran. Suatu keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, pembiasaan maupun dengan doktrinasi kedalam atmosfer kesadaran kolektif-massif, yang kemudian memunculkan kesadaran yang relatif barul4. Hegemoni merupakan kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas tertentu, hal yang demikian ini telah terkonstruk dengan sendirinya pada kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Pandangan gramsci tentang hegemoni berangkat dari pandangannya bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni menegasikan hubungan dominasi dengan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Jika memang demikian halnya, maka hegemoni adalah suatu organisasi konsensus yang standar keberhasilannya ditentukan oleh kesepakatan yang diciptakan.

Konsep hegemoni gramsci ini diambil secara dialektis melalui dikotomi tradisional yang berkarakteristik pemikiran Italia, yakni dari Machiavelli (force), Pareto (Consent), serta Lenin (Strategy). Hegemoni merujuk pada pengertian tentang situasi sosial-politik yang dalam terminologi gramsci disebut 'momen', dimana filsafat dan praktik sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dari relitas yang menyebar dalam masyarakat melalui lembaga dan manifestasi perorangan, hal tersebut dapat berbentuk moralitas, adat, budaya, religi, prinsip politik, dan semua relasi sosial, terutama dari kalangan intelektual. Dalam hal ini Gramsci mencoba memperluas pengertian hegemoni sehingga tidak hanya menjelaskan relasi antar kelas-kelas politik (rulling class/ ruled class), akan tetapi relasi-relasi sosial yang lebih luas, seperti relasi gender, ras, agama bahkan gaya hidup.

Konsep 'hegemoni' tidak hanya berkaitan dengan dominasi politik, berupa 'kekuatan' (force), tetapi juga dengan dominasi lewat budaya, termasuk dominasi bahasa. Di dalam sebuah sistem kekuasaan tidak hanya diperlukan 'kekuatan' (senjata, militer), tetapi diperlukan juga 'penerimaan publik' (public consent) yang diperoleh lewat mekanisme kepemimpinan kultural

Antonio gramsci juga membedakan antara dominasi (kekerasan) dengan kepemimpinan moral dan intelektual "suatu kelompok sosial, bisa, bahkan harus, menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan (hal ini jelas merupakan salah satu sarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut); kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan tetap berada ditangan kelompok, mereka harus tetap memimpin". Makna strategi (sebagaimana menurut Lenin) diubah oleh Gramsci menjadi sebuah konsep hegemoni yang, seperti halnya konsep Marxis tentang kekuatan dan hubungan produksi, kelas dan negara, menjadi sarana dalam memahami masyarakat dengan tujuan untuk mengubahnya.

Teori hegemoni Gramsci pada dasamya merupakan kritik terselubung terhadap reduksionisme dan essensialism yang melekat pada penganut Marxisme maupun pemikiran non-Marxisme, yakni konsep yang mereduksi dan menganggap essensi terhadap suatu entiti tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak.ex; perselisihan tafsiran konsep seputar basic (ekonomi) dan super struktur (ideologi, politik, pendidikan, budaya), dimana tafsiran ortodoks Marxisme percaya bahwa basic ekonomi menentukan superstucture. Akibatnya sosialisme direduksi menjadi gerakan ekonomisme, dan bahkan perjuangan kelas direduksi menjadi hanya kelas ekonomi, sehingga gerakan itu hanya gerakan buruh, dan mengabaikan gerakan lainnya.

Salah satu prinsip lain hegemoni adalah kemampuan sebuah kelas untuk menyuarakan kepentingan kelompok sosial lainnya atas nama dirinya sendiri. Ada dua cara penyuaraan ini yang sangat berbeda: pertama, kepentingan-kepentingan kelompok ini diserap untuk menetralisimya agar tidak berkembang lebih jauh serta dapat diterima kalangan publik. Salah satu kunci memenangkan penerimaan publik adalah melalui penciptaan mekanisme commonsense. Yakni, pandangan umum bahwa sebuah gagasan dari kelompok hegemonis itu alamiah sifatnya,bukan ideologis.

Hubungan kekuasaan

Menurut Herbert Rosinski, kekuasaan merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan esensi manusia, yakni sebagai karakteristik yang khas dalam posisinya terhadap alamo Keberadaan manusia merupakan suatu mahluk yang spesifik karena meskipun dia diperlengkapi dengan kemapuan-kemampuan biologis, tetapi Lenin tidak sepakat dengan Marx bahwa untuk menuju sosialisme hams menunggu matangnya kapitalisme yang akan memunculkan revolusi proletar secara alamiah. Bagi Lenin, revolusi tidak hams ditunggu, tapi hams diusahakan dan direkayasa. Untuk itulah maka Lenin tidak segan menggunakan kekuatan bersenjata guna mewujudkan revolusi.

Dengan demikian, Lenin mengugurkan pemikiran Marx, bahwa revolusi tergantung dari proses ekonomi. Bagi Lenin, revolusi hanya tergantung dari proses politik yang akan dilakukan (Sosialisme Marx dimata revisionis). Kehidupan manusia tidak sepenuhnya diprogram oleh keberadaan biologisnya. Dalam hal ini manusia mempunyai kemampuan untuk bertindak (action). Rosinski juga menyebut manusia sebagai Homo Agent, yaitu mahluk yang mempunyai self programming. Dengan pengertian yang luas, kekuasaan merupakan kemampuan manusia untuk berbuat sesuatu yang lain dan yang lain. Inilah yang menurut Giafranco Poggi disebut sebagai homo Potens. Bagi Poggi, kekuasaan merupakan sifat kritis dalam

hubungan antara manusia dengan alamo Dalam hal kekuasaan sosial, Poggi juga sependapat dengan Max Weber yang mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu kemungkinan dalam rangka hubungan-hubungan sosial untuk melaksanakan keinginan seseorang, sungguhpun terdapat tantangan, dan tidak tergantung kepada dasar-dasar dari kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Catatan penting gramsci mengenai kekuasaan berangkat dari pernyataan bahwa tingkat perkembangan suatu kekuatan material produksi menjadi dasar bagi munculnya berbagai kelas sosial, yang masing-masing mempunyai kelas khusus dalam produksi. Dalam hal ini Gramsci mencoba menganalisa mengenai hubungan berbagai kekuatan politik. Disini Gramsci membaginya pada tiga fase perkembangan kesadaran politik kolektif dan organisasi. Dua fase pertama adalah fase ekonomi-korporasi, sedang yang ketiga adalah fase hegemonik. Fase ekonomi-korpoarsi lebih didasari oleh adanya tuntutan persamaan hak, kepentingan bersama semua kelas, akan tetapi masih dalam batasan bidang ekonomi. Sedangkan fase ketiga adalah tahapan pertarungan ideologiideologi yang ada hingga salah satunya, ataupun persekutuan ideologi tersebut dapat memenangi dan menyatukan tujuan ekonomi, politik, moral, intelektual, sehingga perjuangan berlangsung pada aras universal, bukan lagi sekedar korporasi. Hal yang demikian ini, pada akhirnya dapat menciptakan hegemoni kelompok sosial yang kuat atas kelompok lain yang ada dibawahnya. Bagi Gramsci, suatu kelas akan menjadi hegemoni jika mampu melewati fase korporasinya, dan berhasil menyatukan kepentingan kelas dan kelas sosial lain dengan kepentingan sendiri, serta berhasil menjadi representasi penuh dari kekuatan sosial yang ada.

Nasional-kerakyatan

Bagi Gramsci, suatu kelas tidak akan akan mampu mencapai kepemimpinan nasional, dan menjadi kelas yang hegemonik, jika mereka masih bersifat eksklusif, membatasi diri pada kepentingan kelasnya. Disini, mereka dituntut untuk menampung dan mempertimbangkan aspirasi dan perjuangan dari kelas-kelas dibawahnya, ataupun dari orang-orang yang tidak mempunyai karakter kelas. Dalam hal ini, Gramsci menjelaskan peran yang menentukan yang dimainkan oleh Jacobin dalam menciptakan bangsa prancis, ia menekankan watak kerakyatan dari hegemoni yang mereka bangun, mengorganisir kehendak kolektif nasional-rakyat, dan mendirikan negara-negara modern. Dalam situasi yang demikian ini, hegemoni tak lagi hanya mempunya dimensi kelas, tetapi juga mempunyai dimensi nasional-kerakyatan. Penyatuan berbagai perjuangan dan gerakan dalam prosesnya tidak terlepas dari perubahan pandangan dan kesadaran masyarakat yang terlibat, yang menurut Gramsci, terlibat dalam reformasi moral dan intelektual. Gagasan nasional-kerakyatan mungkin paling tepat dan akan mudah dipahami sebagai penjelasan akan suatu bentuk dari 'blok historis, antara aspirasi nasional dengan aspirasi rakyat dalam sebuah formasi dimana kaum intelektual memainkan peran perantara penting didalamnya.

Revolusi Pasif

Perbedaan yang mencolok antara revolusi Prancis dan risorgimento italia mendorong Gramsci untuk mengembangkan konsep revolusi pasif (Passive revolution). Dalam revolusi prancis, Jacobin mampu memobilisir rakyat untuk melakukan perjuangan revolusioner dengan cara mendukung tuntutan kaum tani dan membangun aliansi dengan mereka. Apa yang dilakukan oleh Jacobin sangat berbeda dengan apa yang dilakuakn oleh Cavour dan Partai Moderat dalam penyatuan Italia dan naiknya kaum borjuis pada puncak kekuasaan yang sarna sekali tidak melibatkan perjuangan rakyat. Mereka hanya menggunakan negara piedmont dengan tentara, serta kerajaan dengan birokrasinya. Tidak ada upaya untuk mengkoordinasikan tuntutan ataupun kepentingan-kepentingan kaum buruh, tani ataupun kelas-kelas dibawahnya.

Risorgimento mengambil bentuk 'revolusi dari atas', yang digerakkan melalui agen negara piedmont. Strategi kaum borjuis italia ini mempunyai karakter revolusi pasif, dimana kelompok moderat hanya membangun hegemoni mereka melaui partai aksi, tidak mencoba membangun hegemoni atas kaum tani, buruh, dan mayoritas penduduk. Dalam revolusi pasif, negara mempunyai peran yang sangat signifikan, dimana negara manggantikan peran kelompok sosial dalam memimpin perjuangan pembaruan. Hal ini berarti negara telah menggantikan, bahkan telah merebut hegemoni kelas ataupun kelompok tertentu. Upaya penjinakan rakyat pada masa risorgimento juga tidak dapat berjalan dengan baik, bahkan rakyat cenderung herois, seperti yang terjadi di kota Milan dan Roma tahun l848-l849 dan ekspedisi Garibaldi ke Sisilia tahun l860. Menurut Gramsci, revolusi pasif dalam risorgimento tidak mempunyai kualitas nasional-kerakyatan. Dalam hal ini, kaum borjuis Italia hanya mampu mencapai tingkat hegemoni yang terbatas. Bagi Gramsci, munculnya fasisme pada tahun l920-an di. Italia juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah risorgimento.

Konsep revolusi pasif masih dapat diperluas sehingga mencakup revolusi sosialis disamping revolusi borjuis. Dalam transisi menuju sosialisme ini, strategi kelas pekerja harus mempunyai karakter revolusi anti-pasif (anti-passive revolution), yang dibangun dengan memperluas jaringan perjuangan kelas dan demokrasi kerakyatan dengan tujuan memobilisasi seluruh lapisan masyarakat dalam memnperjuangkan reformasi demokrasi. Tentunya strategi anti-pasif ini masih membutuhkan analisa yang mendalam terhadap masyarakat sipil, pembagian wilayah perjuangan kelas, dan demokrasi kerakyatan.

Masyarakat Sipil, Negara, dan Watak Kekuasaan

Masyarakat sipil adalah suatu wadah perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi kerakyatan, dengan kata lain, masyarakat sipil juga memberikan kesempatan bagi kelompok sosial yang dominan untuk mengatur konsensus dan hegemoni. Bagi kelompokkelompok sosial yang lebih rendah (subordinate), masyarakat sipil juga merupakan wadah bagi mereka dalam menyusun perlawanan dan membangun hegemoni altematif-hegemoni tandingan (Counter hegemony).

Gramsci juga membedakan masyarakat sipil dengan masyarakat politik: "apa yang bisa kita lakukan, untuk saat ini, adalah menyatukan dua 'tingkat' suprastruktur utama; yang pertama bisa disebut 'masyarakat sipil', yaitu bagian dari kelompok yang disebut 'private', dan kedua 'masyarakat politik' atau 'negara '. Keduanya disatu sisi, memiliki fungsi-fungsi 'hegemoni' yang dilakukan oleh kelompok dominan dalam masyarakat, dan, disisi lain, juga mempunyai fungsi-fungsi 'dominasi langsung' yang dilakukan oleh negara dan pemerintahan 'hukum'. Masyarakat sipil disini mencakup semua apa yang disebut dengan organisasi swasta (private) seperti gereja, serikat dagang, partai politik, dan asosiasi budaya yang berbeda dari proses produksi dan aparat negara. Namun gramsci memisahkan salah satu perangkat lembaga-lembaga tersebut dari organisasi masyarakat sipil, yakni aparat yang membentuk negara, hal ini karena mereka dinilai mempunyai monopoli yang bersifat koersif.

Dalam beberapa paragraf dalam prison Notebooks Gramsci juga mengatakan bahwa masyarakat sipil adalah masyarakat etika atau moral, karena dalam masyarakat sipil-Iah hegemoni kelas dominan dibangun melalui mekanisme perjuangan politik dan ideologis. Istilah masyarakat politik dipakai Gramsci bagi hubungan-hubungan koersif yang terwujud dalam berbagai lembaga Negara - angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum, dan penjara, semua departemen yang mengurusi pajak, keuangan, perdagangan, industri, keamanan, sosial, dll, yang tergantung pada upaya akhir dari efektifitas monopoli negara dalam melakukan tindakan koersif. Dalam konteks yang demikian ini, aparat negara memegang peranan yang begitu dominan dalam menciptakan kesepakatan.

Gramsci juga menilai bahwa negara merupakan suatu kompleks dari aktifitas praktis dan teoritis dimana kelas penguasa tidak hanya mempertahankan dominasinya namun juga memperoleh persetujuan dari kelompok lain yang berada dibawah kekuasaannya. Hal ini sejalan dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa negara adalah masyarakat sipil ditambah dengan masyarakat politik. Dengan kata lain, hegemoni yang dilindungi tameng koersif. Gramsci menyebutnya negara integral yang dipertentangkan dengan negara dalam arti umum, yang kadang disebut juga 'negara sebagai pemerintahan' (stato-governo) disamping istilah 'masyarakat politik'. Gramsci mencoba membedakan antara masyarakat sipil (wilayah hegemoni) dan Negara (wilayah koersif), Gramsci juga menggunakan negara dalam arti umum dan negara dalam arti kekuasaan.

Hubungan sosial dari masyarakat sipil adalah hubungan kekuasaan seperti halnya hubungan koersif negara, walaupun dengan cara yang berbeda. Kekuasaan dijalankan oleh kelas hegemoni atas kelas-kelas yang dikuasainya disamping kekuasaan negara yang menjalankan dominasinya dalam negara. Kekuasaannya menjelma dalam aparat koersif negara yang tersebar dalam masyarakat sipil. Marxisme klasik, termasuk Leninisme, memandang bahwa kekuasaan itu terpusat pada negara dan berada dibawah control penuh kelas pemilik modal. Watak kekuasan pun masih sarna dengan sebelumnya ; kekuasaan masih berada dalam genggaman negara. Namun, konsep Gramsci tentang negara integral menunjukkan arah yang berbeda dalam menjelaskan watak kekuasaan yang dianggapnya sebagai 'hegemoni yang dilapisi kekerasan,. Baginya, kekuasaan hams dipahami sebagai suatu hubungan. Termasuk hubungan so sial dalam masyarakat sipil dalam membentuk masyarakat sipil, demikian juga aparat negara yang bersifat koersif. Gramsci menginginkan kekuasaan ini merata kedalam selumh lapisan masyarakat sipil agar tercapai tingkat hegemoni yang kuat dalam masyarakat sipil.[]

MATERI 21
PERSPEKTIF PEMIKIRAN TAN MALAKA TENTANG MADILOG

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.
ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

PRAWACANA

Membaca, menganalisis dan membedah pemikiran Tan Malaka memerlukan usaha yang keras dan serius, karena itu pemikiran kita harus dipersenjatai dahulu dengan perangkat ilmu filsafat dan ilmu sosial. Secara garis besar kita harus memahami terlebih dahulu filsafat materialisme, tentang dialektika dan logika berfikir. Melalui pemikiran Tan Malaka yang terangkum dalam Madilog, nalar kita seolah diperas untuk memahami hakekat realitas dan masyarakat dengan pendekatan filsafat revolusioner. Tak dipungkiri karena begitu beratnya pemikiran Tan Malaka ini, orang awam akan kesulitan mengambil sari pemikiran dalam buku Madilog. Namun secara prinsipil buku Madilog adalah sebuah metode berfikir.

Buku Madilog, ditulis di Rawajati dekat pabrik sepatu Kalibata Cililitan Jakarta. Disini saya berdiam dari 15 juli 1942 sampai dengan pertengahan tahun 1943, mempelajari keadaan kota dan kampung Indonesia yang lebih dari 20 tahun ditinggalkan. Waktu yang dipakai buat menulis Madilog, ialah lebih kurang 8 bulan dari 15 juli 1942 sampai dengan 30 maret 1943 (berhenti 15 hari), 720 jam, ialah kira-kira 3 jam sehari.[336]

Madilog karya Pahlawan Kemerdekaan Nasional Tan Malaka ini, mengajak serta memperkenalkan cara berfikir kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum intelektual, terutama kaum pemuda, cara berfikir ilmiah. Mengkaji secara ilmiah bukanlah mengkaji buta dan hanya dengan menghafalkan, akan tetapi mampu melakukan interpretasi terhadap keilmuan yang terdapat dalam Madilog.

Pandang Tan Malaka mengenai Revolusi Indonesia adalah pandangan menyeluruh tentang kemasyarakatan baik politik, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu Tan Malaka meneliti sebab-sebab apa dan bagaimana bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Revolusi dalam pandangan Tan Malaka adalah revolusi keseluruhan baik mental maupun fisik, yang berarti revolusi dalam pemikiran dan mentalitas, penentangan terhadap imperealisme maupun revolusi dalam persamaan sosial. Mental baru yang dinginkan Tan Malaka agar dimiliki oleh bangsanya adalah mental yang mengandung nilai-nilai yang mendorong orang untuk menjadikan otaknya bekerja aktif serta pikirannya berjalan dinamis sehingga dengan demikian ia akan menjadi manusia rasional yang percaya pada dirinya sendiri, dan oleh karena itu tidak mau memerima penjajahan dalam bentuk apapun.[337]

Tan Malaka dengan tegas menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang masih terkungkung dalam apa yang disebutnya “riwayat perbudakan”.[338] Menurutnya ada dua hal hal yang harus dihilangkan (dihapuskan) sekaligus dalam perjuangannya: 1] imperealis kapitalis Belanda yang telah menjajah bangsanya sejak lama; 2] mengeyahkan feodalisme yang telah memperbudak bangsanya sebelum penjajah belanda datang.[339]

Tan Malaka menginginkan kemerdekaan 100% adalah dengan cara perjuangan yang sesungguhnya, bukan dengan cara diplomasi. Tan Malaka melihat kemerdekaan sebagai *self-determination*, yaitu kesanggupan setiap kelompok sosial menentukan nasibnya sendiri dan tidak menggantungkan peruntungannya pada kelompok sosial lainnya. Kemerdekaan sebagai *self-determination* menampik segala jenis penindasan dan pembodohan.[340]

Bangsa Indonesia selama ini hanya mendatangkan nilai-nilai dari luar dan tidak mempunyai nilai-nilai sendiri, inilah yang mengecewakannya.[341] Tan Malaka dalam hal ini berusaha menumbuhkan semangat kemajuan, dan Indonesia haruslah mampu memproduksi kemajuan tersebut termasuk sistem nilainya. Selanjutnya ia ingin mengubahnya menjadi sejarah yang lebih baik, maka harus ada perombakan dalam sistem berfikir. Tawaran tersebut ada dalam Madilog, sebuah karya terbesar Tan Malaka yang ditulisnya tahun 1942-1943—sebuah karya filsafat yang ia nyatakan sebagai cara berfikir baru, sebuah warisan pusaka dari intelektual barat—Marxis Leninis yang dinilainya rasional.[342] Marxisme itu bukanlah satu dogma,

---

[336] Tan Malaka, *MADILOG* (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2008) hal. iii

[337] Revolusi pemikiran manusia akan menjadi faktor fundamental dalam revolusi sosial (pen.), Harry A. Poeze, *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik 1897-1925* (Jakarta: Grafiti, Cet. II., 2000) hal. xxvii.

[338] Tan Malaka, *Massa Actie,* (Jogjakarta: Widjaya, 1964) hal. 13.

[339] Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka; Kajian terhadap Perjuangan Sang Kiri Nasionalis, Jalan Penghubung Memahami Madilog* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hal. 88. Lihat dan bandingkan juga dengan Harry A. Poeze, *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik, Op. Cit.,* hal. xxv-xxx.

[340] Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Nasionalisme*, Makalah Ilmiah Diskusi Kultural, pernah dipresentasikan pada PKD PC PMII Cilacap & Pelatihan Basis Kader Pergerakan (Cilacap, 2012) hal. 2-3

[341] Tan Malaka, *Massa Actie, Op. Cit.,* hal. 7-8.

[342] Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka; Op. Cit.,* hal. 89-90.

satu kaji apalan. Melainkan satu pedoman perjuangan klas. Satu metode, dialektis-materialistis yang mesti dilaksanakan cocok dengan tempoh dan tempat.[343]

ESENSI PEMIKIRAN MADILOG

Didalam Madilog esensi pemikirannya bertitik tolak pada keperluan untuk memiliki dan mengembangkan cara dan pola berfikir aktif yang rasional itu. Selanjutnya Tan Malaka mengatakan bahwa jalan yang terbaik menuju kesana adalah melalui pengembangan cara dan pola berfikir baru yang diperkenalkannya dengan formulasi: materiealisme, dialektika dan logika. Yang dimaksudkan dengan materialisme pada esensinya adalah cara berfikir realistis, pragmatis dan fleksibel didalam memahami problem yang dihadapi. Bagi mereka yang mengetahui materialisme menurut pemikiran barat, seperti materialisme menurut pemikiran Karl Marx, perhatian materialisme Tan Malaka diatas akan jelas Nampak berbeda. Setelah berhasil mengaktifkan otaknya untuk berfikir realistis, selanjutnya ia perlu mengembangkan pemikirannya secara dialektis, yaitu berfikir dalam proses "tesis-antitesis-sintesis" yang dinamis. Agar rangkaian berfikir realistis (aktif) dan dialektis (dinamis) itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka ia perlu dilandasi dengan akal sehat atau logika (logis).[344]

Menurut pengakuan Tan Malaka sendiri, cara dan pola fikir Madilog yang dikemukakannya berasal dari cara berfikir barat yang rasional, dan dimaksudkannya untuk dipakai sebagai senjata guna melawan cara berfikir Timur yang dianggap pasif itu. Berdasarkan penelitian Rudolf Mrazek (1972), meskipun tampak kehadiran pengaruh pemikiran Barat yang rasional, dialektis dan logis, pada dasarnya cara dan pola berfikir yang diperkenalkannya itu justru berasal dari visi yang lahir dari struktur pengalamannya yang sudah lama terbentuk oleh falsafah adat dan kebudayaan bangsanya sendiri, dalam hal ini falsafah Minangkabau. Jadi menurut Mrazek Kebudayaan Minangkabau sesungguhnya mengandung nilai-nilai yang mendorong orang berfikir aktif-realistis, dialektis-dinamis dan logis ala Madilog. Menurut Tan Malaka, memang Madilog berasal dari cara dan pola fikir bangsa barat—terutama Marxisme—akan tetapi diterapkan sesuai dengan keadaan dan kondisi Indonesia.[345]

Madilog ialah cara berpikir berdasarkan materialisme, dialektika, dan logika, dalam mencari sebab akibat, dengan mengandalkan bukti yang cukup, dan eksperimen yang sahih. Sementara kepercayaan model logika mistika (berbau takhayul) adalah segala faham (pemikiran) yang tidak berdasarkan pada basis kebendaan (materi), tidak berpatok pada kenyataan, atau dengan kata lain segala paham yang tidak berdasarkan bukti dan tidak bisa dieksperimentasi. Masalahnya, hukum berpikir seperti ini, menurut Tan Malaka, telah mengakar, dan berproses sangat jauh. Melalui tahap kepercayaan Indonesia asli (yaitu era Pra Hindu), kepercayaan Hindustan, kepercayaan Islam, dan kepercayaan Tiongkok.

Sementara logika, adalah disiplin berpikir runut, sistematik, melalui silogisme, memiliki definisi yang jelas, dan paling penting adalah bisa dieksperimentasi. Sedangkan materialisme adalah faham yang berpijak pada bukti-bukti kebendaan. Dan terakhir, dialektika adalah gerak, perubahan, dan dinamika. Satu hal pasti, keseluruhan prosedur berpikir seperti itu sajalah yang sanggup menafsirkan berbagai fenomena dengan ilmiah, scientis (ilmu bukti), dan menjadi solusi.

Madilog adalah sebuah metode berpikir, sebuah epistemologi yang menjadi landasan yang, menurut Tan Malaka, diperlukan bagi kaum proletar Indonesia untuk mencapai pencerahan dan *"merebut kekuasaan dari imperialisme Belanda"* alias Indonesia merdeka.

SEJARAH MASYARAKAT INDONESIA

Gagasan atau cara berfikir berdasarkan Madilog tidak akan tercapai sampai dimulainya "Indonesia merdeka dan sosialis". Indonesia dan sosialis itu merupakan sintesa dari masa Indonesia asli (thesis) dan masa Hindu-Budha (antithesis).[346] Menurut Tan Malaka Masyarakat Indonesia asli memiliki kepercayaan terhadap kekuatan yang melekat pada benda-benda yang bersifat material dan spiritual.[347] Mereka belajar untuk memahami dunia lebih realistis dan dinamis. Nilai-nilai Indonesia asli dalam batas tertentu sekarang masih terlihat di Minangkabau tanah kelahirannya. Nilai-nilai dinamis Islam telah menyatu dalam orde masyarakat Minangkabau, penekanan Islam pada pentingnya cara berfikir yang dinamis dan rasional ini amat sesuai dengan nilai-nilai Indonesia asli.

Periode selanjutnya adalah masa kegelapan, pada masa ini Indonesia asli kedatangan hindu dan kemudian menggusurnya. Nilai-nilai positif yang berdasarkan kedinamisan dan rasionalitas diganti oleh agama hindu yang pasif dan penuh dengan logika mystika. Materialisme Indonesia asli digantikan dengan idealisme yang tidak berdasarkan kenyataan dan pengalaman, "hilang fakta, hilang bukti, hilang ketenangan, hilang kebebasan menilai, demikian tulis Tan Malaka.[348]

---

[343] PARI semenjak hampir 20 tahun, ber-filsafat Marxisme, yang dengan siasat Leninisme, menuju kearah Revolusi Nasional, Revolusi Sosial, ke-Masyarakat Sosialistis, sampai ke-Masyarakat Komunistis diseluruh Dunia. Dalam Tan Malaka, *Thesis* (Jakarta: Penerbit Murba, 10 Juni 1946).

[344] Harry A. Poeze, *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik, Op. Cit.,* hal. xxviii.

[345] *Ibid*., hal. xxviii-xxix.

[346] Rudolf Mrazek*, Semesta Tan Malaka* (Jogjakarta: Bigraf Publising, 1994) hal. 45-47.

[347] Tan Malaka, *MADILOG*, *Op. Cit.,* hal. 281-282, Rudolf Mrazek*, Semesta Tan Malaka*, *ibid.,* hal. 49.

[348] Tan Malaka, *MADILOG*, *Op. Cit.,* hal. 137, Rudolf Mrazek*, Semesta Tan Malaka*, *ibid.,* hal. 52

Tan Malaka menunjukkan pada fakta bahwa periode pertengahan ini bangsa Indonesia kehilangan identitas atau keaslian mereka, karena saat ini seluruh kebudayaan yang ada tidak lagi mencerminkan sikap energik dan dinamis. Tan Malaka mensinyalir bahwa mundurnya peradaban bangsa Indonesia adalah disebabkan oleh datangnya Hindu dan Imperealisme Belanda.[349] Oleh karena itu bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia dilakukannya dengan cara memeras habis kekayaan bumi Indonesia. Imperealisme Belanda hanya akan menambah inferioritas bangsa Indonesia, membuat kemunduran, memperkokoh cara berfikir kuno dan menjungkirbalikkan kesadaran bangsa Indonesia.[350] Tan Malaka menganalisis bahwa masyarakat Indonesia harus lepas dari cara berfikir yang mistik, harus berfikir rasional, dinamis dan logis. Kenyataan ini memantik semangat Tan Malaka dalam menulis Madilog sebagai petunjuk berfikir tentang masyarakat Indonesia.

ISLAM DALAM TINJAUAN MADILOG

Tan Malaka menyampaikan bahwa: Sumber yang saya peroleh buat Agama Islam, inilah yang hidup. Seperti saya sudah lintaskan lebih dahulu dalam buku ini, saya lahir dalam keluarga Islam yang taat. Pada ketika sejarahnya Islam buat bangsa Indonesia masih boleh dikatakan pagi, diantara keluarga tadi sudah lahir seorang Alim Ulama, yang sampai sekarang dianggap keramat! Ibu Bapa saya keduanya taat dan orang takut kepada Allah dan jalankan sabda Nabi. Saya saksikan ibu saya sakit menentang malaikat maut menyebut "Djuz Yasin" berkali-kali dan sebagian besar dari Al-Qur'an, diluar kepala. Orang kabarkan bapak saya didapati pingsan setelah badannya dalam air. Dia mau menjawat air sembahyang, sedang menjalankan terikat, setelah bangun sadar, dia bilang dia berjumpa dengan saya yang pada waktu itu di negeri Belanda. Masih kecil sekali saya sudah bisa tafsirkan Al-Qur'an, dan dijadikan guru muda. Sang Ibu menceritakan Adam dan Hawa dan Nabi Yusuf. Tiada acap diceritakannya pemuka, piatu Muhammad bin Abdullah, entah karena apa, mata saya terus basah mendengarnya. Bahasa Arab terus sampai sekarang saya anggap sempurna, kaya, merdu jitu dan mulia.[351]

Selanjutnya Tan Malaka mengatakan: Itulah maka saya anggap bahwa Agama Monotheisme nabi Muhammad yang paling consequent terus lurus. Maka itulah sebabnya menurut logika maka Muhammad yang terbesar diantara nabinya monotheisme. Kaum Kristen boleh memajukan kedudukan, tingginya kaum ibu maka tingginya kasih sayang dan ta'at setia pada dasar sebagai pusaka dari Nabi Isa. Jadi menurut Madilog Yang Maha Kuasa itulah bisa lebih kuasa dari undang alam. Selama Alam ada dan selama Alam Raya itu ada, selama itulah pula undangnya Alam Raya itu berlaku. Menurut undang Alam Raya itu bendanya itulah yang mengandung kodrat dan menurut undang itulah caranya benda itu bergerak berpadu, berpisah, menolak dan menarik dan sebagainya. Kodrat dan undangnya yang berpisah sendirinya tentulah dikenal oleh ilmu bukti. Berhubungan dengan ini maka Yang Maha Kuasa jiwa terpisah dari jasmani, surga atau neraka yang diluar Alam Raya ini tiadalah dikenal oleh ilmu bukti, semuanya ini adalah diluar daerahnya Madilog. Semuanya itu jatuh ke arah kepercayaan semata-mata. Ada atau tidaknya itu pada tingkat terakhir ditentukan oleh kecondongan persamaan masing-masing orang. Tiap-tiap manusia itu adalah merdeka menentukannya dalam kalbu sanubarinya sendiri. Dalam hal ini saya mengetahui kebebasan pikiran orang lain sebagai pengesahan kebebasan yang saya tuntut buat diri saya sendiri buat menentukan paham yang saya junjung.[352]

Walaupun seringkali Tan Malaka mendasarkan teorinya pada buruh terorganisasi, namun beum ada yang begitu mempengaruhi langsung pada kehidupannya. Lain halnya dengan Islam, simpati dan pengaruhnya dalam kehidupan langsung terlihat jelas dalam Madilog, pada bab tentang kepercayaan Islam. Tidak berlebihan kiranya Hamka menilai Tan Malaka sebagai pemimpin Islam.[353]

Dalam Islam keselarasan antara akal dan rasionalitas yang berpuncak pada *science*, selalu dijaga keseimbangannya dengan suara hati yang merupakan manifestasi dari iman. Sejarah Islam tidak pernah menunjukkan penundukkan akal smpai pada titik nadir terendah dibawah iman, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Nasrani Eropa dahulu. Islam dalam pandangan Tan Malaka menyempurnakan apa yang disebutnya dengan dielektika Ke-Tuhan-an. Islam memiliki doktrin Ketuhanan yang sesuai dengan hukum logika.[354]

LOGIKA MYSTIKA

Bangsa Indonesia mengalami kemunduran dan masa kegelapan yang begitu panjang, menurut Tan Malaka disebabkan oleh mulai berkuasanya logika mystika dan filsafat idealism. Logika mystika penuh dengan kegaiban dan menyebabkan kelumpuhan akal, akal tidak dipakai dan semata-mata takluk pada kepercayaan mistik. Logika mystika tidak berbasiskan pada *matter* yang dapat diuji, dan dengan sendirinya tidak dapat dipakai karena bertentangan dengan hukum alam yang mengatur dunia.[355]

---

[349] Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka, Op. Cit.,* hal. 93-94.
[350] Tan Malaka, *MADILOG*, *Op. Cit.,* hal. 137
[351] Tan Malaka, *Islam dalam Tinjauan Madilog* (Penerbit Widjaja, Jakarta 1951).
[352] *Ibid*.
[353] Lihat kata pengantar Hamka untuk penerbitan pasal tentang *Islam dalam Tinjauan Madilog.*
[354] Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka, Op. Cit.,* hal. 98-111.
[355] Ibid. hal. 112.

Logika mystika menurut Tan Malaka, dari doktrin ke-Tuhanan saja pada agama manapun sudah bertentangan dengan logika Aristoteles yang diyakini kebenarannya. Pda mistik, orang merasakan penyatuan dengan Tuhan, padahal pada agama manapun Tuhan dan ciptaan-Nya digambarkan terpisah. Penyatuan antara manusia dan Tuhan ini terjadi sebagai tahap tertinggi dari kontemplasi seorang ahli mistik. Logika mystika tentunya berlawanan dengan *common sense* (pikiran sehat/ anggapan umum).

FILSAFAT IDEALISME DAN MATERIALISME

Didalam bab filsafat Tan Malaka memulainya dengan menjelaskan filsafat idealisme dan materialisme, dan setelah itu memberikan penilainnya. Dengan menggunakan materialisme sebagai cara berfikirnya, Tan Malaka mengecam Idealisme yang abstrak. Berikut penulis jelaskan dahulu tentang—Idealisme; Dasar Epistemologi Idealisme; Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872); Materialisme Feuerbach dan Dialektika Hegel; Dialektika Hegel; Materialisme: Alasan-alasan Serbazat; dan Ontologi Kaum Materialis—untuk memberikan dasar teoretik memahami pemikiran Tan Malaka tentang filsafatnya.

[1] Idealisme[356]

Premis pokok yang diajukan oleh idealisme ialah jiwa mempunyai kedudukan yang diutamakan oleh alam semesta. Pengikut paham realisme memang berpendirian bahwa alam semesta terdiri dari atau erat hubungannya jiwa, ide, aku atau pikiran dalam suatu makna tertentu yang dikandung oleh istilah-istilah tersebut. Cukup jelas kiranya, yang demikian ini berarti, pada dasarnya kenyataan itu berbeda dengan apa yang menampak kepada kita. Tetapi sebagaimana yang penulis tunjukkan, seorang penganut idealisme sampai pada pendiriannya mengenai kenayataan tersebut berdasarkan atas analisa tentang hakekat perbuatan mengetahui. Bagi seorang penganut idealisme, dunia dan bagian-bagiannya, harus dipandang sebagai hal-hal yang mempunyai hubungan seperti organisme dengan bagian-bagiannya. Dunia merupakan suatu kebulata—bukannya—yang sedemikian rupa sehingga suatu bagian darinya mengungkapkan sesuatu dari kebulatan tersebut. Kebulatan ini harus dipandang sebagai kebulatan yang logis tau rohani, dengan makna sebagai intinya yang terdalam.

Hendaknya disadari dengan jelas, sebenarnya, penganut idealisme berpendirian bahwa apa yang dinamakan mater merupakan suatu gagasan yang menggelikan. Untuk dapat memikirkan materi dalam hakekatnya yang terdalam, orang harus sekaligus memikirkan akal atau roh. Dikatakan jika kita ingin mengetahui apakah pada akhirnya dan sesungguhnya materi itu, maka kita harus meneliti apakah pikiran itu, dan apakah nilai itu, bukannya apakah meteri itu. Bahasa yang dipakai oleh pengikut idealisme diawali dengan istilah-istilah yang sangat berbeda dengan yang dipakai oleh seorang penganut realisme. Istilah-istilah terpokok yang dipergunakan oleh penganut idealisme meliputi, roh, akal, nilai dan kepribadian.

[2] Dasar Epistemologi Idealisme

Pandangan idealisme nampaknya begitu jauhnya dari gagasan kita yang lazim, sehingga kelihatannya aneh. Bagaiama mungkin seseorang mengetahui bahwa hakekat terdalam kenyataan ialah hakekat yang bersifat akal? Tidaklah benar jika seorang pengikut positivisme mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut diatas tidak mengandung makna, karena pada akhirnya pengalaman-pengalaman manakah yang mungkin ada untuk membuktikan kebenaran atau kesesatan pernyataan-pernyataan tersebut? Seorang pengikut idealisme akan memberikan jawaban sebagai berikut:

Pertama, jika kita meneliti: (1) hakekat terdalam pengalaman anda, (2) ketertiban dan susunan alam semesta, (3) adanya nilai di alam semesta, maka kita akan sampai pada pendirian penganut idealisme berdasarkan atas tuntutan akan keruntutan dan akal kita. Pengalaman dan pengetahuan tergantung pada akal yang mengetahuinya. Apapun juga yang diketahui pada akhirnya berupa ide, artinya, sesuatu yang berhakekat akal. Karena itu maka sama sekali tidak mungkin ada pengetahuan, kecuali jika dunia yang nyata atau obyek pengetahuan berhakekat akal juga.

Kedua, dimana-mana di alam semesta ini kita menjumpai watak yang logis; hubungan sebab dan akibat, ketertiban, watak sistematik, ketaatan pada hukum, dan sebagainya. Menurut penganut idealisme semuanya itu merupakan ciri-ciri khas yang dipunyai oleh akal. Kiranya dapatlah disimpulkan bahwa alam semesta itu bagaimanapun juga merupakan bahan bukti akan adanya akal.

[3] Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872)[357]

Semula Feuerbach sangat tertarik dengan kemutlakan identitas yang terkandung dalam rangkaian dialektis tesis-antitesis-sintesis dari Hegel. Namun seperti halnya dengan eksponen Hegelian Kiri yang lain, Feuerbach akhirnya berbalik menyerang Hegel. Feuerbach memandang filsafat Hegel sebagai puncak

---

[356] Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat,* Judul Asli: *Elements of Philosophy,* Alih Bahasa: Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. VII., 1996) h. 126-129.

[357] Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis,* (Yogyakarta: LKiS, Cet. IV., 2004) h. 65-71.

rasionalisme modern, tetapi dalam suasana semacam ini dominasi agama tetap mewarnai kehidupan sehingga dunia materi khususnya “manusia” tidak ditempatkan pada martabat semestinya.[358]

Metode Hegel diakui oleh Feuerbach mengandung unsur pembebasan manusia dari belenggu yang mengikatnya melalui proses penyadaran roh yang kontinyu. Walaupun pembebasan ini menurut Feuerbach tidak mencukupi karena pada Hegel pikiran adalah tesis, sedang penampakan kanyataan (*antitesis*) tempatnya juga dalam pikiran. Padahal Feuerbach yakin bahwa hanya materi saja yang nyata, akan halnya pikiran meskipun dalam bentuk yang paling murni hayalah merupakan alienasi dari kenyataan materiil (alam).

Untuk membuktikan oposisinya terhadap Hegel, Copleston dalam *A History of Philosophy* menyebutkan bahwa bagi Feuerbach ide-ide yang menjelma dalam kesadaran (*conscience*) tidak lain dari pernyataan alam, oleh karena itu ide menyusul alam, bukan alam yang menyusul ide. Selanjutnya dalam hal manusia mengetahui sesuatu ia terikat oleh alam, dan realitas alam ini tidak tergantung pada pengetahuan manusia. Dengan demikian, Feuerbach mendeskripsikan bahwa dasar seluruh realitas sekaligus dasar manusia dan hidupnya tidak terletak pada ide (rumusan Hegel) tetapi terletak pada alam. Seperti halnya Marx, Feuerbach pun sebelumnya sudah membalikkan Hegel agar berdiri diatas kakinya, yakni idealismenya menjadi materialisme.[359] Dan persis pada titik inilah Feuerbach mempengaruhi Marx “*it was Feuerbach who made Marx a materialism.*”[360]

Di tahun 1841 terbit buku Feuerbach yang berjudul *Das Wessen des Christentums (Essence of Christiany)* yang menimbulkan banyak protes terutama dari Gereja. Namun disatu segi dari “Hakekat Agama Kristen” inilah timbul antusiasme Marx untuk mempolakan corak filsafat dan mempengaruhi karya-karyanya pada tahap awal. Pengaruh yang dimaksud dapat dibaca pada tulisan Engels yang diterbitkan pada tahun 1888:

> …we all become at once Feuerbachians. How enthusiatically Marx greeted the new conception and how much—in spite of all critical reservation—he was influenced by it, on my read in The Holy Family.[361]

Feuerbach menggariskan filsafatnya dengan corak meterialistis, meskipun filsafat yang disenanginya adalah filsafat organisme. Kecenderungan ini timbul karena Feuerbach pun tidak setuju dengan faham materialisme kasar yang dikembangkan oleh penganut materialisme mekanis sebelumnya—menurut Marx materialisme Feuerbach tetap vulgar menggambarkan manusia sehakikat dengan mesin.

Kecenderungan materialisme vulgar Feuerbach tersimpul pada pendirian bahwa “*matter is not product of mind, but mind it self is merely the highest product of matter.*”[362] Kemudian Feuerbach secara tajam merumuskan suatu dalil yang pada akhirnya menjelma dalam semangat antropologisnya, yaitu *“Der Mensch ist was man isst” (Man is what he eats) ...all the product of the human mind were the reflection of the condition.”* [363]

Pada bagian ini Marx menentang faham Feuerbach, karena manusia tidak semata tergantung pada kondisi materi tetapi pada kondisi sosial, yaitu hidup dalam masyarakat *“social being that is, the life of the community*”.[364] Disini Feuerbach telah mengabaikan corak historis serta hubungan sosial manusia. Apabila Feuerbach telah mengecam filsafat Hegel, maka pada gilirannya Marx mengecam Feuerbach seperti tercermin dalam tesis IX:

> “The highest point attained by contemplation materialism, that is, materialism which does not understand sensuousness as practical activity, is the contemplation of single individuals in “civil” society”.[365]

Disamping permasalahan yang telah disebutkan, sesungguhnya filsafat Feuerbach lebih bernuansa dalam pembahasan yang bersifat teologis—bukunya yang lain berjudul *Das Wesen der Religion* (Hakikat Agama)—karena titik filsafatnya lebih banyak bermuara di kawasan ini.

Dalam penelitiannya, Feuerbach sampai pada kesimpulannya bahwa manusia beragama karena terikat oleh alam. Manusia lemah dan alam yang didapatinya kuat dan ganas. Oleh karena itu untuk mengatasi, tepatnya, untuk membebaskan diri dari alam yang ganas ini manusia membayangkan suatu

---

[358] K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1981) h. 78; William T. Bluhm, *Theories of The Political System* (New York: Prentice-Hall Private Limite, 1981) h. 411. *“…that Hegel was wrong in understanding history as the progress of Geist,or spirit, throught alienation to self realization in the life of mankind”.*

[359] Theo Huijbers, *Allah, Ulasan-ulasan mengenai Allah dan Agama,* Jilid II., (Yogyakarta: Kanisius, 1997) h. 167.

[360] Alexander Gray, *The Socialist Tradition Moses to Lenin* (London: Longmas Green and Co., 1974) h. 300.

[361] Friedrick Engels, *Ludwig Feuerbach and The End of Classical German Philosophy,* termuat dalam *Selected Work* Vol. II., (Moscow: Foreign Language Publishing House, 1962) h. 368.

[362] *Ibid*., h. 373.

[363] Sedney Hook, *From Hegel to Marx: Studies in The Intelectual Development of Karl Marx* (New York: Humanities Press, 1958) h. 220.

[364] *Ibid*. h. 220.

[365] Karl Marx, *Theses on Feuerbach*, termuat dalam *Selected Work* Vol. II., (Moscow: Foreign Language Publishing House, 1962) h. 405.

kekuatan berpribadi sempurna.[366] Dengan bayangan ini manusia mampu mengatasi segala macam penderitaannya. Ringkasnya bayangan Allah hanyalah refleksi dari jiwa manusia yang sengsara. Seseorang yang miskin mempunyai Tuhan yang kaya, orang-orang cinta damai memiliki Tuhan yang belas kasih. Feuerbach dengan konsekuen membalik satu ayat Al-Kitab "manusia menciptakan Allah menurut citranya (Kitab Genesis 1: 26)."[367]

Sebagai jalan keluar dari penolakan agama, Feuerbach merencanakan agar teologi (ilmu ketuhanan) diganti dengan antropologi (ilmu pengathuan tentang manusia), dan karena sejak semula timbulnya ide tentang Allah merupakan kekeliruan mendasar, maka perlulah ide tentang Allah itu dibuang. Manusia dengan kehendak, perasaan dan akal budinya seyogyanya menciptakan hidup bahagia di dunia, bangkit dari impian religius karena agama yang sejati adalah mencintai manusia. *"Feuerbach endervoured to create a new religion, a religion without God, a religion of love*."[368]

Begitu pokok-pokok pikiran Feuerbach, khusus serangan terhadap agama kristen nampak sekali ciri ateisnya. Dan memang benar, Feuerbach merupakan tokoh ateisme Modern yang pertama. Gregory Baum dalam *Cultural Causes for The Change of The God Question* menulis: "*Feuerbach had stiil to deal with the classical God question: 'is there a God'? His answer had been negative.*"[369]

Selanjutnya, suatu kenyataan bahwa Marx tidak begitu mencurahkan perhatian khusus terhadap kritik agama, berbeda dengan anggota Hegelian Kiri lainnya yang rata-rata untuk meluangkan waktunya untuk hal yang dimaksud. Bruno Baeur dan David Frederick Strausz (1808-1874) untuk menyebut dua nama. Bagi Marx agama hanyalah pertanyaan radikal manusia yang menjadi korban sistem ekonomi yang tidak manusiawi, manusia yang terasing secara sosial. Manusia beragama karena lapar dan menurut Marx jika sosialisme sudah terwujud, maka tidak seorangpun lapar, karena itu agama dengan sendirinya akan lenyap. Dengan demikian, nisbah utama Feuerbach terhadap Marx terletak pada kecenderungan Marx untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat rohani kepada hal jasmani, dan yang lain perhatian yang sama atas manusia meskipun dalam tinjauan yang berbeda, "manusia pribadi" menurut Feuerbach dan "manusia sosial" menurut Marx.

[4] Materialisme Feuerbach dan Dialektika Hegel[370]

Hegel menjadi salah satu raksasa dalam dunia filsafat karena ia memperkenalkan kembali sebuah metode berfikir yang dulu digunakan oleh para materialis Yunani,kaum *stoician* yakni Dialektika. Pada dasarnya, dialektika adalah sebuah cara berfikir yang melihat segala sesuatu sebagai proses yang penuh dengan benturan (kontradiksi). Pada awalnya, dialektika digunakan untuk menguji kesahihan sebuah argumen dengan membenturkannya pada kondisi-kondisi umum dan kondisi-kondisi khususnya. Hegel mengembangkan metode ini menjadi sebuah logika proses yang memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Dengan menerapkan dialektika, filsafat Hegel menjadi sebuah filsafat yang garang dan radikal. Salah satu penerapannya yang luar biasa adalah melalui *Philosophy of History* dimana sejarah manusia dipandang sebagai proses yang semakin hari semakin membawa manusia bergerak maju menuju kesadaran yang semakin tinggi, melalui sebuah proses yang kontradiktif dan penuh dengan lompatan.

Sedangkan Feuerbach adalah salah satu humanis yang menerapkan materialisme secara konsisten untuk membedah aspek-aspek kemanusiaan. Melalui karyanya yang terpenting, *Des wesen des Christentums* (1842; *Hakikat Kristianitas*), Feuerbach mengungkapkan pandangannya bahwa manusia adalah objek pemikiran dari dirinya sendiri. Dan bahwa agama tidak lain adalah sebuah kesadaran manusia tentang ketidakberhinggaan. Pandangan ini adalah sebuah terobosan dimana kemanusiaan dilihat sebagai hasil karya manusia itu sendiri.

Ditangan Marx, kedua keunggulan ini dilebur dan ditempa ulang menjadi sebuah filsafat pembebesan yang revolusioner. Dialektika Hegel didudukkan ulang pada Materialisme, sedangkan materialisme Feuerbach diperluas dan ditempatkan dalam konteks kesejarahan. Dalam karya bersamanya dengan Engels, *Ludwig Feuerbach and the end of Classical German Philosophy,* Marx mengajukan tesis tentang filsafat Feuerbach.[371]

---

[366] Irving M. Copy, *Introduction to Logic* (New York: McMillan Publishing Co., 1978) h. 30. sebetulnya sejak aman Yunani Kuno refleksi manusia tentang Dewa sudah jadi bahan perbindangan, Xnopanes (Abad 6 SM), dengan nada mengejek manulis: *"if oxen and horses or lions had hands, and could paint whith their hand, and produce work of art as man do, horses would paint the gods like horses and oxen, and make their bodies in the image of their several kinds."*

[367] K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat, Op. Cit*., h. 77

[368] O. Yakhot, *What Dialectical Materialism* (Moskow: Progress Publisher, 1965) h. 32.

[369] Theo Huijbers, *Allah, Ulasan-ulasan mengenai Allah, Op. Cit*., h. 171.

[370] Saiful Arif dan Eko Prasetyo, *Lenin: Revolusi Oktober 1917, Sanggahan atas Pemikiran Franz Magnis Suseno* (Yogyakarta: Resist Book, Cet. I., 2004) h. xii-xiv.

[371] Tesis Tentang Feuerbach, Karl Marx (1845). Ditulis oleh Marx dalam musim semi 1845. Mula-mula diterbitkan oleh Engels dalam 1888 sebagai Lampiran pada edisi yang tersendiri dari karyanya Ludwig Feuerbach. Dicetak menurut naskah edisi tersendiri pada tahun 1888 dan diperiksa dengan manuskrip Karl Marx. (Tesis I) Kekurangan utama dari semua materialisme yang ada sampai sekarang-termasuk materialisme Feuerbach-ialah bahwa hal ihwal (*Gegenstand*), kenyataan, kepancainderaan, digambarkan hanya dalam bentuk *benda* (*Objekt*) atau *renungan* (*Anschauung*), tetapi tidak sebagai *aktivitet pancaindera manusia, praktek,* tidak secara subyektif. Karena itu terjadilah bahwa segi *aktif*, bertentangan dengan materialisme, dikembangkan oleh idealisme-tetapi hanya secara abstrak, karena, sudah barang tentu, idealisme tidak tahu akan aktivitet pancaindera yang nyata sebagai hal yang sedemikian itu. Feuerbach membutuhkan benda-benda kepancainderaan, yang benar-benar dibedakan dari benda-benda pikiran, tetapi dia tidak

Dikritiknya kecenderungan Feuerbach untuk membatasi penggunaan filsafatnya sendiri pada studi kemanusiaan secara personal. Menurut Marx, Feuerbach membatasi filsafatnya sampai pandangan manusia secara teoretik dan statis. Marx mengatakan bahw objek pemikiran itu seharusnya adalah aktivitas praktis kritis manusia. Dengan tepat, Feuerbach telah keluar dari tradisi pemikiran abstrak dan mendasarkan pemikiran itu pada penangkapan inderawi manusia. Tapi ia masih belum melihat bahwa penangkapan inderawi itu sendiri merupakan sebuah aktivitas objektif yang bersifat praktis. Dan, yang terpenting, sebuag filsafat harus "direvolusionerkan melalui praktek". Hal ini kemudian disimpulkan Marx dalam sebuah maxim yang terkenal: "Para ahli filsafat hanya telah *menafsirkan* dunia, dengan berbagai cara; akan tetapi soalnya ialah *mengubahnya."*

Sedangkan terhadap Hegel, Marx mengkritik penggunaan dialektika hanya pada proses pergerakan ide, tanpa memandang asal-usul ide itu. "Metode dialektika saya," tulis Marx dalam *Capital,* "bukan hanya berbeda dengan Hegel, tapi persi kebalikannya. Bagi Hegel, proses kehidupan dari otak manusia, *yaitu proses* berfikir, yang dibawah panji 'Ide' bahkan diubahnya menjadi satu objek yang independen, adalah inti hakikat dari dunia nyata, dan dunia nyata hanyaah sekedar bentuk 'Ide' yang eksternal dan fenomenal. Bagi saya, sebaliknya,ide bukanlah apa-apa melainkan dunia nyata yang tercermin dalam pikiran manusia, dan diterjemahkan dalam bentuk-bentuk pikiran."

Di tangan Marx, peleburan ini menghasilkan filsafat baru, yang kemudian dikenal dengan nama materialisme-dialektik. Pada dasarnya, filsafat ini adalah sebuah filsafat yang humanis, dalam arti memusatkan perhatiannya pada manusia. Ia menjadi sebiah filsafat materialis yang amat luas karena ia tidak hanya memusatkan diri pada manusia sebagai individu, namun juga pada tingkat masyarakat sosial dan lingkungan alam dimana masyarakat itu hidup dan berkembang. Lebih jauh lagi, ia melihat keberadaan manusia dan kemanusiaan sebagai hasil dari sebuah proses yang masih dan akan terus berjalan bahkan kalaupun masyarakat manusia itu sudah punah.

[5] Dialektika Hegel[372]

Hegel beranggapan bahwa Kant telah berhasil menemukan otonomi akal budi manusia. Dan kini nampaknya otonomi akal budi itu harus direalisasikan. Pada Kant, realisasi itu tak mungkin terjadi, karena ajran Kant membatasi otonomi akal budi menjadi semata-mata subyektif. Artinya akal budi sungguh tidak mungkin menjadi obyektif, karena hal diluar dirinya tetap *das Ding an sich* (benda atau hal pada dirinya sendiri). *Das Ding an sich* itu tidak mungkin diketahui atau dipengaruhi oleh akal budi manusia. Akibatnya,

---

mengartikan aktivitet manusia itu sendiri sebagai aktivitet *obyektif* (*gegenständliche*). Oleh karena itu, dalam *Hakekat Agama Kristen*, dia memandang sikap teoritis sebagai Satu-satunya sikap manusia yang sejati, sedang praktek digambarkan dan ditetapkan hanya dalam bentuk permunculannya yang keyahudian dan kotor. Karena itu dia tidak menangkap arti penting aktivitet "revolusioner", aktivitet "kritis-praktis". (Tesis II) Soal apakah kebenaran obyektif (*gegenständliche*) bisa dianggap berasal dari pemikiran manusia bukanlah soal teori melainkan soal *praktek.* Dalam praktek manusia harus membuktikan kebenaran itu, yaitu, kenyataan dan daya, kesegian-ini (*Diesseitigkeit*) dari pemikirannya. Perdebatan mengenai kenyataan atau bukan kenyataan dari pemikiran yang terasing dari praktek merupakan soal *skolastik* semata-mata. (Tesis III) Ajaran materialis bahwa manusia itu adalah hasil keadaan dan didikan, dan bahwa, oleh karenanya, manusia yang berubah adalah hasil keadaan-keadaan lain,dan didikan yang berubah, melupakan bahwa manusialah yang mengubah keadaan dan bahwa pendidik itu sendiri memerlukan pendidikan. Karena itu, ajaran ini menurut keharusan sampai pada membagi masyarakat menjadi dua bagian, satu di antaranya adalah lebih unggul daripada masyarakat (pada Robert Owen, misalnya). Terjadinya secara bersamaan perubahan keadaan dengan perubahan aktivitet manusia bisa dibayangkan dan dimengerti secara rasionil hanya sebagai *praktek yang merevolusionerkan*. (Tesis IV) Feuerbach bertolak dari kenyataan pengasingan-diri secara keagamaan, dari pendobelan dunia menjadi dunia khayali yang bersifat keagamaan dan dunia nyata. Pekerjaannya berupa melebur dunia keagamaan ke dalam dasar duniawinya. Dia mengabaikan kenyataan bahwa sesudah menyelesaikan pekerjaan itu, hal yang utama masih tetap harus dilakukan. Karena kenyataan bahwa dasar duniawi itu melepaskan diri dari dirinya dan menegakkan diri di awang-awang sebagai kerajaan yang berdiri sendiri sesungguhnya hanyalah dapat diterangkan dengan pembelahan-diri dan sifat pertentangan dengan diri sendiri dari dasar duniawi itu. Karena itu yang tersebut belakangan itu sendiri lebih dulu harus dipahami dalam kontradiksinya dan kemudian, dengan ditiadakannya kontradiksi itu, direvolusionerkan dalam praktek. Dengan begitu, misalnya, sekali keluarga duniawi itu ditemukan sebagai rahasia dari keluarga suci, maka yang tersebut duluan itu sendiri harus dikritik dalam teori serta direvolusionerkan dalam praktek. (Tesis V) Feuerbach tidak puas dengan *pemikiran abstrak,* berpaling kepada *kontemplasi kepancainderaan*; tetapi dia tidak menganggap kepancainderaan sebagai aktivitet *praktis,* aktivitet pancaindera-manusia. (Tesis VI) Feuerbach melebur hakekat keagamaan ke dalam hakekat *kemanusiaan*. Tetapi hakekat kemanusiaan bukanlah abstraksi yang terdapat pada satu-satu individu. Dalam kenyataannya ia adalah keseluruhan dari hubungan-hubungan sosial. Oleh karenanya, Feuerbach, yang tidak memasuki kritik terhadap hakekat yang nyata itu, terpaksa: 1) Mengabstraksi dari proses sejarah dan menetapkan sentimen keagamaan (*Gemüt*) sebagai sesuatu yang dengan sendirinya dan mengandaikan.perorangan manusia yang abstrak-*yang terisolasi*. 2) Karena itu, baginya hakekat kemanusiaan bisa dimengerti hanya sebagai "jenis", sebagai suatu keumuman intern yang bisu yang hanya *dengan wajar* mempersatukan perorangan yang banyak itu. (Tesis VII) Oleh karenanya, Feuerbach tidak melihat bahwa "sentimen keagamaan" itu sendiri adalah *hasil sosial*, dan, bahwa perorangan yang abstrak yang dianalisanya nyatanya termasuk bentuk khusus dari masyarakat. (Tesis VIII) Kehidupan sosial pada hakekatnya adalah *praktis*. Segala keghaiban yang secara menyesatkan membawa, teori kepada mistik menemukan pemecahannya yang rasionil dalam praktek manusia dan dalam pemahaman praktek itu. (Tesis IX) Titik tertinggi yang dicapai oleh materialisme *kontemplatif,* yaitu, materialisme yang tidak memahami kepancainderaan sebagai aktivitet praktis, adalah renungan satu-satu individu dalam "masyarakat sipil". (Tesis X) Pendirian materialisme lama ialah masyarakat "sipil"; pendirian materialisme baru ialah masyarakat *manusia*, atau umat manusia yang bermasyarakat. (Tesis XI) Para ahli filsafat hanya telah *menafsirkan* dunia, dengan berbagai cara; akan tetapi soalnya ialah *mengubahnya.*

[372] Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional; Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt* (Jakarta: Gramedia, 1982) h. 32-40.

meskipun mengakui otonomi akal budi manusia, otonomi itu tidak berarti apa-apa terhadap hal diluar dirinya ia tidak dapat menjadi obyektif.[373]

Hegel "mencoret" *Das Ding an sich* tersebut. Dan ia mengajarkan bahwa akal budi harus dan dapat merealisasikan dirinya tanpa halangan apapun. Akal budi tidak perlu lagi "kritis" terhadap dirinya, ia harus menjadi "affirmatif" (membenarkan dan menyatakan dirinya), karena pada hakekatnya akal budi tlh mencapai kesempurnaan pada dirinya sendiri, yakni kesempurnaan dalam roh. Kira-kira Hegel menganggap roh tersebut sebagai ancaman *Akal Budi Absolut* yang menjelma dalam akal budi manusia. Dengan demikian akal budi manusia juga menjadi sempurna dalam roh.

Dengan dialektikanya, Hegel hendak mengetengahkan bahwa akal budi dalam usahanya untuk menjadi kesadaran diri yang sempurna ternyata mengalami proses yang tidak terlalu sederhana. Ia mengalami pelbagai halangan & pembatasan untuk menjadi dirinya. Meski demikian justru semuanya itu yang makin menjadikan & menetapkan kesadaran diri manusia. Menurut Hegel, malahan halangan & pembatasan itulah merupakan tempat dimana potensi manusia yang tersembunyi harus menyatakan diri.

Hegel misalnya mengutarakan bagaimana seorang budak akan mempunyai kesadaran diri yang lengkap justru karena tekanan tuannya.[374] Maka seluruh proses itu harus digali dengan teliti, kalau tidak kita hanya akan mendapat kesadaran diri yang tidak lengkap. Itulah tujuan dialektika Hegel. [375] Berikut ini djelaskan bagaimana dialektika Hegel tersebut. Dan dialektika Hegel meliputi;

Pertama, berfikir secara dialektik berarti berfikir dalam *totalitas*. Totalitas ini bukan berarti semata-mata keseluruhan, dimana unsur-unsurnya yang bertentangan berdiri sejajar. Tetapi totalitas itu berarti keseluruhan yang mempunyai unsur-unsur yang *saling bernegasi* (mengingkari dan diingkari) *saling berkontradiksi* (melawan dan dilawan) dan *saling bermediasi* (memperantarai dan diperantarai). Pemikiran dialektis menekankan bahwa dalam kehidupan yang nyata pasti unsur-unsurnya saling berkontradiksi, bernegasi dan bermediasi. Tidak mungkin unsur-unsur itu hanya berdiri sejajar atau bergabung tanpa kontradiksi, negasi dan mediasi. Yang terakhir ini hanya dapat dibayangkan secara abstrak, sehingga hanya merupakan kesadaran yang kosong belaka. Pemikiran dialektis menolak kesadaran yang abstrak itu. Misalnya antara individu dan masyarakat. Menurut pemikiran dialektis, individu selalu saling berkontradiksi, bermediasi dan bernegasi terhadap masyarakatnya.

Kalau individu tidak saling berkontradiksi, bernegasi dan bermediasi dengan masyarakatnya, maka individu tidak jadi menemukan dirinya yang sesungguhnya; sebaliknya masyarakat juga tidak dapat menjadi makin sempurna, tinggal seperti semula, tanpa perubahan apa-apa. Dalam hubungan ini mesti dicatat bahwa pemikiran dialektis mempunyai kontradiksi, negasi dan mediasi sebagai ciri dan sifatnya. Kompromi dengan gampang dicapai dengan persetujuan, dimana unsur-unsurnya yang bertentangan dengan mudah pula diabaikan. Kompromi dengan demikian menjadi sekedar perpaduan. Malahan dalam arti tertentu kompromi bisa berarti saling meniadakan unsur-unsur yang saling bertentangan. Lain dengan pemikian dialektis. Pemikian dialektis justru mengharuskan unsur-unsur tersebut saling bertarung; semua unsur dianggap mempunyai potensi kebenaran, jadi tidak boleh ditiadakan. Juga unsur-unsur tersebut dibiarkan saling bernegasi; dengan saling mengingkari dan diingkari, setiap unsur berhak mempertahankan dirinya serentak juga makin memahami kebenaran dirinya, sementara ia juga melihat bahwa unsur lain tidak boleh dikorbankan demikian saja, justru karena unsur lain tersebut mati-matian mempertahankan dirinya dengan cara mengingkari kebenaran lawannya. Lalu unsur-unsur tersebut saling bermediasi: tiap pihak merasa diperkaya jika ia diperantarai oleh lawannya, lawannya ternyata memberikan sesuatu yang tidak dipunyainya, demikian pula sebaliknya. Jelaslah bahwa proses dialektis tidak dapat sekedar dirumuskan sebagai *"thesis"—"antithesis"—synthesis".* Rumusan sederhana ini bisa menggabungkan proses dialektis yang sesungguhnya menjadi semata-mata kompromi yang berarti perpaduan dan malah bisa berarti saling meniadakan.[376] Proses dialektis tidak mengarah pada sintesis dalam arti perpaduan, melainkan mengarah pada tujuan baru sama sekali, yakni "rekonsiliasi" (*aufhebung),* dimana tercakup pengertian "pembaharuan", "penguatan" dan "perdamaian".

Kedua, seluruh proses dialektis itu sebenarnya merupakan "realitas yang sedang bekerja" (*working reality*).[377] Disini akan menjadi jelas bahwa proses dialektis yang meliputi kontradiksi, negasi dan mediasi itu bukan semata-mata abstrak, melainkan terjadi dalam realitas.

Makin akan jelas pula bahwa "rekonsiliasi" itu bukan sekedar perpaduan yang statis, melainkan suatu realitas yang senantiasa bekerja. Realitas yang sedang bekerja itu merupakan proses dari pernyataan diri akal budi manusia yang telah mencapai kesempuraannya dalam Roh Absolut:

---

[373] Lih. Nicholas Lobkowicz, *Theory and Practice: History of a Concept from Aristotle to Marx* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1967) h. 144-145.

[374] Lih. G.W.F. Hegel, *The Fenomenology of Mind,* translate, with as introduction and notes by J.B. Baillie (London: George Allen and Unwin Ltd., 1966) h. 234-240.

[375] Sebagai garis umum penjelasan tentang dialektika Hegel dalam hubungan dengan Sekolah frankfurt kami ambil dari Andrew Arato dan Eike Gebhardt (ed.), *The Essential Frankfurt School Reader* (New York: Urizen Book, 1978) h. 396-404.

[376] *Ibid*., h. 398.

[377] *Ibid*.

> Buat Hegel, realitas bukan sesuatu yang statis, jadi bulat, sesuatu “subtansi”, melainkan berkembang, mengasingkan diri, menemukan diri kembali, menyadari diri melalui *taraf-taraf dialektis yang semakin mendalam;* realitas itu “subyek”. Dibelakang realitas alam dan manusia dengan masyarakat dan pemikirannya berlangsunglah “proses” pernyataan diri roh alam semesta.[378]

Kalau proses dialektis itu dimengerti, sebagai realitas yang sedang bekerja, jadi bukan kesadaran semata-mata, maka proses dialektis itu juga merupakan sesuatu yang obyektif. Bahwa proses dialektis itu sungguh sesuatu yang obyektif, ini menjadi amat jelas dalam pandangan Hegel tentang pekerjaan manusia. Manusia yang akal budinya telah mencapai kesempurnaan dalam Roh, harus berkembang, harus menemukan diri, dan makin menjadi dirinya sendiri. Itu semuanya harus terjadi dalam dunia obyektif. Caranya, yakni lewat pekerjaannya. Bagaimana ini diterangkan? Secara singkat dapat dikatakan demikian: manusia dalam proses menyatakan dirinya ternyata menghadapi suatu dunia obyektif yang berada diluar dirinya, asing dan mengancam kediriannya, tetapi dunia itu ternyata dibutuhkannya, tanpa dunia obyektif itu, manusia tak mungkin berhasil menyatakan dirinya. Manusia tiba-tiba merasa bahwa dunia obyektif itu merupakan bagian dari dirinya, jadi meski dunia itu mengancam kediriannya, ia tidak boleh ditiadakan, karena meniadakannya sama dengan menghancurkan kedirian manusia sendiri.

Maka masalahnya, bukan bagaimana menghancurkan dunia obyektif itu, tetapi bagaimana manusia dapat “berekonsiliasi” dengan dunia obyektif itu. Rekonsiliasi itu terwujud bila dunia obyektif merupakan obyektifitas, dari kedirian manusia. Disinilah letak pekerjaan manusia “memanusiakan” obyek-obyek diluar dirinya, sehingga obyek itu tidak tinggal alamiah dan terasing dari manusia melainkan merupakan pernyataan diri manusia. Proses “mamanusiakan” itu tidak terjadi dengan begitu mudah dan sederhana, sebab dunia obyektif itu sungguh merupakan hal asing bagi manusia. Malahan Hegel menggambarkan manusia pertama-tama sebagai keterasingan manusia dari dirinya sendiri, karena dengan pekerjaan manusia dipaksa meninggalkan kediriannya, masuk kedalam dunia obyektif, yang ternyata membelenggu dirinya dan memisahkannya dari kesadarannya. Tapi justru dalam keadaan inilah manusia dipaksa untuk makin menyadari kediriannya: lingkungannya yang asing itumakin memaksa manusia untuk “memanusiakannya”, sementara manusia juga menyadari makin ia berhasil “memanusiakan” lingkungannya lewat pekerjaannya, makin ia menjadi manusia.[379] Bukan kesempatannya disini untuk membicarakan filsafat pekerjaan Hegel. Maksudnya hanyalah untuk menunjukkan bahwa proses dialektis sebagai “realitas yang sedang bekerja” itu terlihat dalam pekerjaan manusia: kontradiksi dan negasi antara manusia dan dunia obyektif, juga mediasi antara manusia terhadap lingkungannya, ini semua akhirnya mengarah kepada “rekonsiliasi” antara manusia dan lingkungannya, dan dengan demikian manusia juga makin memahami kediriannya, serentak lingkungannya juga diangkat ke derajat lebih tinggi, karena telah “dimanusiakan” oleh manusia.

Ketiga, berfikir dialektis berarti berfikir dalam perspektif empiris-historis.[380] Disini perlu dibedakan antara kontradiksi dialektis dan kontradiksi logis. Menurut logika tradisional, dua proposisi (tesis dan antitesis) tidak pernah benar kedua, duanya. Menurut pemikiran dialektis, anggapan tersebut sangat tidak memadai dengan kenyataan empiris hitoris. Dalam kenyataan empiris, setiap proposisi mempunyai hak untuk berada dan dianggap benar, sehingga tidak begitu saja ditiadakan atau dianggap tidak benar oleh proposisi lawannya. Jelaslah bahwa pemikiran dialektis menolak pemikiran yang sama sekali formal. Pemikiran formal dapat membayangkan secara abtrak adanya satu kebenaran yang dapat meniadakan kebenaran-kebenaran lainnya. Sedangkan pemikiran dialektis menekankan isi atau subtansi dari masing-masing kenyataan empiris yang tidak boleh saling mengecualikan. Pemikian dialektis dengan demikian mengarah pada pendekatanyg lebih kaya dan dalam.

Misalnya ia tidak berfikir tentang “lurus” sebagai lawan “tidak lurus” melainkan sebagai berlawanan dengan “bengkok”, “melengkung”, “zig-zag” dan sebagainya. Sehubungan dengan pengertian dialektis yang menekankan perspektif empiris historis ini, patus dikemukakan pula bahwa pemikiran dialektis menolak teori identitas subyek-obyek. Teori identitas subyek-obyek menekankan bahwa kesadaran (subyek) sudah mencapai kesatuannya dengan hal-hal diluar kesadaran (obyek), sehingga hal-hal diluar kesadaran sudah merupakan obyektifikasi paripurna dari kesadaran, dan dengan demikian tercapai pula identitas antara apa yang memahami (subyek) dan apa yang dipahami (obyek). Paham identitas obyek-obyek ini akhirnya yakin bahwa kesadaran (subyek) mampu mengadakan realitas. Teori identitas ini sama sekali bertentangan dengan pemikiran dialektis yang empiris-historis. Dilihat dari perspektif historis-empiris, kesadaran dan relitas selalu mengasingkan: realitas selalu menjadi hambatan bagi kesadaran untuk merealisasikan dirinya secara penuh dan sebaliknya kesadaran terlalu miskin untuk menuntut dirinya sebagai “sama kaya” denga realitas. Dalam kehidupan ini selalu terjadi konflik antara keduanya, sebab kehidupan ini *bukan suatu realitas melainkan realisasi*: realisasi yang mengarah pada kesatuan subyek-subyek secara makin

---

[378] Franz Magnis-Suseno, *Manusia dan Pekerjaannya, Berfilsafat bersama Hegel dan Marx* dalam Soejanto Poespowardojo dan K. Bertens (ed.), *Sekitar Manusia, Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia* (Jakarta: Gramedia, 1979) h. 76.

[379] Tentang Filsafat Pekerjaan Hegel, lih. *Ibid.,* h. 73-83.

[380] Andrew Arato dan Eike Gebhardt (ed.), *Op. Cit.,* h. 398-399.

sempurna. Teori identitas subyek-obyek menyempitkan kehidupan ini semata-mata sebagai realitas. Ini hanya bisa digambarkan sebagai angan-angan naif, yang menyingkirkan sama-sekali ciri kehidupan yang empiris dan historis, dimana terjadi banyak konflik. Hegel sendiri menyebut periode tanpa konflik karenanya juga periode kebahagiaan sebagai "periode mati" dari sejarah.[381] Jadi menurut faham dialektis, kontradiksi antara subyek dan obyek tidak bakal diselesaikan, justru dalam kontradiksinya itu keduanya diangkat kedalam derajat lebih tinggi lewat proses dialektis sehingga terjadi "rekonsiliasi" (penguatan, pembaharuan, dan perdamaian) yang sungguh baru.

Keempat, berfikir dialektis berarti berfikir dalam kerangka kesatuan teori dan praxis.[382] Sering terjadi kesalah-pahaman bahwa persoalan kesatuan teori dan praxis dianggap sebagai persoalan bagaimana suatu teori itu *applicable* (dapat diaplikasikan atau diterapkan) untuk suatu kehidupan praktis. Kesalah-pahaman ini muncul karena kurangnya pengertian akan asal-usul persoalan kesatuan teori dan praxis. Aristoteles yang pertama memunculkan persoalan itu.[383] Menurut Aristoteles, masalah kesatuan teori dan praxis muncul bukan disebabkan oleh pertanyaan bagaimana suatu teori itu *applicable* melainkan disebabkan oleh pertanyaan orang Yunani terhadap dua dimensi kehidupan: manakah yang lebih luhur, teori (bidang kontemplatif atau teoretis) atau praxis (bidang kegiatan praktis). Bidang teori memang luhur, karena disinilah manusia berhubungan dengan "yang ilahi". Aristoteles sendiri memuji kontexplasi sebagai *athanatizien* (imortalitas). Tapi praxis, yang pada zaman Aristoteles dimengerti sebagai kegiatan hidup berpolitik, tidak bolek diabaikan, karena justru kalau manusia aktif dalam bidang inilah maka ia disebut sebagai manusia. Aristoteles menyebut bidang kegiatan politik itu sebagai *antropeuesthai* (berada sebagai manusia). Orang memang harus mengejar lebih jauh daripada sekedar menjadi manusia, jadi ia harus berteori. Tapi kalau melulu berteori, ia tidak dapat menjadi warga negara yang baik, akibatnya ia akan terasing dari sesama manusia (*bios xenikos*) dan tidak dapat ikut dalam *koinomia* (persaudaraan). Disinilah awal mula munculnya ketegangan teori da praxis. Jadi orang Yunani menganggap teori sebagai dua dimensi hidup dari manusia yang satu dan sama, da keduanya harus dijalankannya tanpa saling mengecualikannya. Ini jelas berbeda dengan pengertian orang yang salah faham bahwa persoalan teori dan praxis mesti dipikirkan sebagai persoalan bagaimana agar suatu teori itu dapat diaplikasikan pada kehidupan praktis, sebab pengertian ini seakan menganggap bahwa teori dan praxis sebagai dua budang yang berbeda (padahal teori dan praxi hanyalah dua dimensi dari manusia yang satu dan sama) sehingga satu sama lain memang dapat saling dipisahkan dan saling mengecualikan. Befikir dialektis adalah sama dengan berfikir dalam kesatuan teori dan praxis seperti dalam pengertian Aristoteles.[384] Pemikiran dialektis tidak mengandaikan adanya kesenjangan antara teori dan praxis yang harus dijembatani, melainkan bagaimana suatu teori *dapat membuahkan* praxis. Menurut Hegel teori semacam itu berpangkal pada realitas, a harus meliputi kesadaran kita tentang realitas, termasuk kemampuan kita untuk mengubah realitas. Teori macam ini tidak lagi membutuhkan aplikasi terhadap realitas, sebab realitas sudah termasuk didalamnya. Teori macam ini sifatnya "afirmatif", artinya mau menyatakan diri menjadi realitas. Hegel yakin hal tersebut bisa dilaksanakan karena pada hakekatnya kesadaran (teori) sudah mencapai kesempuraan dalam roh, didalamnya terkandung realitas yang sudah saatnya "diafirmasikan" (dinyatakan keluar), kelak murid-murid Hegel, lebih-lebih golongan kiri, tidak setuju dengan anggapan Hegel itu, tetapi pada hakekatnya mereka semua sepakat bahwa sudah saatnya teori melahirkan diri ke dunia, menumbuhkan praxis.[385] Mereka berusaha untuk menemukan teori yang benar-benar tepat dalam hubungannya dengan praxis. Filsafat mereka tidak lagi bersifat kontemplatif, tetapi filsafat praxis, filsafat yang ingin aktif "mengubah dunia". Sekolah Frankfurt sendiri mempunyai keprihatinan mendalam terhadap praxis. Kata Martin Jay dalam bukunya *Dialectical Imagination*:

> Untuk sebagian dapat dikatakan bahwa Sekolah Frankfurt kembali kepada keprihatinan kaum Hegelian Kiri pada tahun 1840. seperti generasi pertama pemikir kritis (kaum Hegelian Kiri), Sekolah Frankfurt menaruh minat pada integrasi filsafat dan analisa sosial. Mereka memakai metode dialektika warisan Hegel, dan seperti pendahulunya, mereka meletakkan metode tersebut pada arah yang sifatnya materialis. Dan akhirnya, seperti beberapa dari kaum Hegelian Kiri, mereka terutama tertarik untuk memeriksa kemungkinan untuk merubah tatanan sosial lewat praxis manusiawi.[386]

Jay juga menyebut Sekolah Frankfurt sebagai "kebangunan kembali kaum Hegelian Kiri di abad ini".[387] Meskipun sekolah Frankfurt sangat mengagumi filsafat Hegel, dan malah menurunkan arti kritis dari pengertian dialektis dari Hegel, mereka juga mengkritik idealisme Hegel sebagai kurang memadai untuk

---

[381] *Ibid*., h. 401
[382] *Ibid*., h. 403-404.
[383] Penjelasan tentang teori dan praxis, lih. Nocholas Lobkowich, *Op. Cit.,* h. 3-33.
[384] Bedakan dengan Andrew Arato dan Eike Gebhardt (ed.), *Op. Cit.,* h. 403.
[385] Lih. Nocholas Lobkowich, *Op. Cit.,* h. 193-214.
[386] Martin Jay, *The Dialectical Imagination, A History of The Frankfurt School and The Institute of Social Research 1923-50* (London: Heinemann Educational Books, 1973) h. 42.
[387] *Ibid*., h. 43.

suatu teori kritis. Hegel memang sudah mengetangahkan tentang "rekonsiliasi" antara realitas dan kesadaran, tapi "rekonsiliasi" tersebut hanya terdapat dalam pemikiran, hanya difahami saja, sedangkan pada kenyataannya, kesesuaian itu belum terjadi, pemahaman Hegel benar-benar suatu pemahaman belaka, artinya Hegel belum mengeluarkan pemahaman itu sebagai suatu kenayataan. Disini dialektika Hegel lalu menjadi semata-mata "transfiguratif" (mengatasi kenayataan tapi hanya dalam angan-angan belaka). Max Horkheimer mengatakan tuduhan itu dalam karyanya *Concerning the Problem of Truth*:

> Hegel percaya bahwa pemikirannya telah merangkul esensi dari semua yang ada, dan dalam sistemnya telah menyatukan semua esensi itu kedalam suatu hirarki yang sempurna dan mencukupi dirinya sediri, tak terpegaruh oleh perkembangan dan perilaku individu-individu. Itu semuanya semata-mata berarti pengabadian kondisi-kondisi dasar manusiawi dalam pemikiran. Dialektika Hegel dengan demikian mengandaikan suatu fungsi "transfiguratif". Tatanan sosial dimana menurut Hegel masih terdapat penjajahan dan perbudakan, kekayaan dan kemiskinan, dibenarkan dalam suatu pemikiran konseptual dalam mana mereka diserap. Semuanya itu dihadirkan sebagai bernilai lebih tinggi, sebagai "Ilahi" dan "Absolut".[388]

Jelaslah bahwa menurut pemahaman Hegel, penindasan, kemiskinan itu sudah tidak ada lagi, malah sudah dianglat untuk mendapat nilainya yang lebih tinggi, padahal kenyatannya semuanya itu masih ada. Hegel dengan mudah juga menyebut sudah tercapa identitas antara kesadaran dan realitas, tapi itupun hanya terjadi dalam pemahamanya saja, yakni pemahama oleh akal budi yang telah mencapai kesempurnaanya dalam Roh Absolut. Pada Hegel, kebahagiaan dan kebebasan hanya ada dalam kontemplasi, sedangkan yang terjadi dalam kenyataan adalah ketidakbahagiaan dan penindasan.

[6] Materialisme: Alasan-alasan Serbazat[389]

Alasan-alasan materialisme untuk membenarkan pahamnya, antara lain berdasarkan antropologi dan metafisika. Bagi pemikiran bersahaja adalah wajar untuk berpahamkan serbazat, sebab cocok dengan pikiran dan pengalaman sehari-hari yang kongkret. Yang kelihatan, yang dapat diraba, dirasa, didengar, adalah yang nyata. Yang nyata itu adalah zat. Maka zatlah merupakan kebenaran terakhir.

Pikiran bersahaja tidak mungkin memikirkan sesuatu diluar ruang dan waktu atau yang abstrak. Ada berarti mempunyai tempat, berbentuk, berbadan, konkret. Karena itu ruh dan dewa juga mempunyai tempat. Ruangyang ditempati ruh adalah badan. Yang ditempati dewa ialah patung.

Berdasarkan pengalaman dan penelitian, keadaan jiwa, keadaan jiwa bergantung sekali kepada badan. Keadaan rapat berhubugan dengan syaraf. Kerusakan pada jasad, menimbulkan sakit pada jiwa. Kerusakan pada organ-organ vital[390] mengakibatkan jiwa itu meninggalkan badan. Dokter dalam menulis *vesum et reportum* tentang kematian seseorang, selalu menunjuk kepada sebab jasmaniah. Badan, syaraf dan organ itu adalah zat.

Peristiwa jiwa dan kesadaran adalah peristiwa jasmani. Pendengaran, penglihatan dan pikiran pun adalah bersifat materi. Bunyi adalah getaran udara (zat) yang mengenai syaraf telinga (zat). Yang dilihat adalah yang menempati ruang (zat). Berfikir adalah karena zat fosfor. Sehingga *Moleschott* berdalil: "Tidak ada fosfor, tidak ada pikiran".

Menurut anatomi perbandingan, kesadaran atau pikiran ialah karena kesempurnaan susunan syaraf (zat). Perbandingan otak monyet, *pithecantropus erectus* dan *homo sapiens* (manusia modern kini) adalah 600 cc, 900 cc dan 1.350 cc. Makin besar otak (zat) binatang, makin cerdik dia. Perbandingan antara berat *otak* dan berat *badan* bronto sauria adalah 1:160.000, ikan paus 1:40.000, kerbau 1:700, gajah 1:500, kuda 1:400, kambing 1:350, anjing 1:250 danmanusia 1:40.

Fisiologi dan patologi membuktikan hubungaN rapat antara otak dan jiwa. Psikomatik, membuktikan hubungan mesra antara *pike* dan *soma* atau ruhani dan jasmani. Demikianlah beberapa alasan yang diantaranya dipakai sebagai dasar teori serbazat.

Hegel berteori, bahwa alam (zat) bukanlah hakikat,bukan kebenaran yang terakhir, yang hakikat ialah cita (bersifat ruhaniah). Yang disebut alam hanyalah ruh atau cita yang berbentuk sebagai lawan dirinya sendiri. Feuerbach yang diperguru oleh Marx, mambalikkan teori Hegel. Bagi dia bukan ruh yang hakikat, tapi alam.

Kalaulah zat yang dianggap hakikat segala kenyataan yang ada, timbullah masalah tentang jiwa, atau ruh, budi, pikiran atau ide dan lain sebagainya, yang tidak menempati ruang. Masalah ini mula-mula dijawab oleh *materialisme dualistis* (serbazat-serbadua), sesudah itu oleh *materialisme monistis* (serbazat-serbaesa).

---

[388] Max Horkheimer, "One The Problem of Truth" dalam Andrew Arato dan Eike Gebhardt (ed.), *OP. Cit.,* h. 417.
[389] Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat; Buku Ketiga, Op. Cit.,* h. 5-6.
[390] Vital (Belanda: *vitaal*); berhubungan dengan hidup. Kerusakan organ vital menyebabkan mati.

[7] Ontologi Kaum Materialis[391]

Dewasa ini pandangan yang dianut materialisme baru tersebut terdapat dalam buku *Philosophy for The Future* (Filsafat untuk Masa Depan), sebagai usaha sekelompok ilmuwan dan filsuf untuk melakukan penjajakan serta perumusan kembali mengenai materialisme, didalam kata pengantarnya dikatakan:

> Materialisme modern, sebagaimana yang kita pahami mengatakan sebagai berikut: pola anorganis materi ada lebih dahulu daripada organisme yang hidup, berjiwa serta berarah tujuan; yang belakangan ini muncul secara perlahan-lahan dan hanya sebagai akibat suatu perkembangan secara evolusioner yang berliku-liku. Prinsip-prinsip fisika dan kimia pasti dapat diterapkan, meskipun secara tidak memadai, pada tingkatan makhluk hidup. Hal-hal yang bersifat anorganis dan organis merupakan satuan-satuan penyusun pada tingkat berbeda, yang dapat dikatakan tingkat-tingkat yang lebih rendah dan lebih tinggi dan lebih liku-liku, yang menunjukkan tanda-tanda gerak-gerik yang baru. Materi yang tersusun semacam itu membuka jalan bagi tingkatan-tingkatan susunan yang secara keseluruhan merupakan kebulatan yang ciri pengenalnya ialah keadaannya yang diatur oleh hukum-hukum yang berbeda.[392]

Dalam hubungannya yang lain, Sellar mengungkapkan pendirian kaum materialis di bidang ontologi. Hal tersebut akan dikutip dibawah ini:

> (1) Pengertian yang jelas mengenai "materi" dapat diperoleh berdasarkan sejumlah kategori yang diterapkan secara empiris, seperti kesinambungan, eksistensi, kegiatan sebab-akibat, yang dihubungkan dengan fakta-fakta empiris yang terperinci mengenai struktur, gerak-gerik dan daya pengaruh dalam kerangka ruang-ruang tertentu. Kategori-kategori semacam ini diperoleh dengan cara memahami secara akali serta kerja atas dasar tangkapan inderawi dan kesadaran diri.
> (2) Naturalisme yang sudah dewasa tidak akan memulangkan segala sesuatu kepada satu jenis subtansi belaka dan juga tidak mengajarkan bahwa segala sesuatu tersusun dari atom-atom yang serba ditentukan oleh hukum-hukum mekanika.
> (3) Alam semesta bersifat abadi dan sebagai keseluruhan tidak terarah serta lurus kepada suatu tujuan tertentu.
> (4) Jiwa merupakan kategori ruhanimaupun jasmani dan bersangkut-paut dengan kegiatankeg serta kemampuan-kemampuan yang melekat pada diri yang bersifat orgais yang berada dalam tingkatan penggunaan otak.
> (5) Subtansi-subtansi material atau zat-zat yang berkesinambungan terjadi serta rusak dalam rangka kelestarian segenap hal yang bersifat metarial sebagai keseluruhan.
> (6) Kesadaran merupakan suatu kualitas tersembunyi yang didalamnya manusia mendapatkan sumber bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.[393]

DIALEKTIKA & LOGIKA

[1] Dialektika Kuantitas dan Kualitas[394]

Azas pertama dan paling penting mengenai sifat-sifat logika yang mendasar akan keberadaan mengacu pada peniadaan kontradiksi. Kontradiksi merupakan suatu kategori yang hanya dapat termasuk pada suatu perpaduan pikiran-pikiran, tetapi tidak dengan realitas. Tiada kontradiksi-kontradiksi dalam hal-hal, atau, untuk mengatakannya secara lain, kontradiksi yang diterima sebagai realitas itu sendiri adalah puncak absurditas… Antagonisme dalam arah-arah berlawanan dalam kenyataan merupakan bentuk dasar dari semua aksi dalam kehidupan dunia dan ciptaan-ciptaannya. Tetapi pertentagan arah-arah yang ditempuh oleh kekuatan-kekuatan unsur-unsur dan individu-individu tidak sedikitpun bertentangan dengan ide kontradiksi-kontradiksi yang absurd… Kita dapat berpuas disini karena telah membersihkan kabut yang lazimnya lahir dari yang dianggap misteri-misteri logika degan menyajikan suatu gambaran yang jelas mengani absurditas aktual dari kontradiksi-kontradiksi dalam realitas, dan dengan menunjukkan ketidak-bergunanya dupa yang telah dibakar disana-sini untuk menghormati dialektika kontradiksi—boneka kayu yang diukir secara sangat ganjil yang menggantikan skematisme dunia yang antagonistik.

Ini boleh dikata adalah semua yang diberitahukan pada kita tentang dialektika dalam proses filsafat. Dalam sejarah kritiknya, sebaliknya, dialektika mengenai kontradiksi, dan dengannya khususnya Hegel, diperlakukan secara berbeda sekali. Kontradiksi, menurut logika Hegelian, atau lebih tepatnya menueut doktrin Logos, secara objektif tidak hadir dalam pikiran, yang karena sifatnya hanya dapat dipahami sebagai subjektif dan sadar, tetapi dalam hal-hal dan proses-proses mereka sendiri dan dapat dijumpai dalam—boleh dikata—bentuk nyata atau berwujud, sehingga absurditas tidak tetap sebuah

---

391 Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat,* Judul Asli: *Elements of Philosophy,* Alih Bahasa: Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. VII., 1996) h. 220-223.

392 Rey Wood Sellar, dkk., (eds.), *Philosophy for The Future* (New York: McMillan Co., 1949) h. vi-vii.

393 Rey Wood Sellar, "Is Naturalism Enough", dalam *Journal of Philosophy,* Vol. XI, No. 20 (September 1944) h. 541.

394 Frederich Engels, *Anti Duhring; Revolusi Herr Eugen Duhring dalam Ilmu Pengetahuan,* Judul Asli: *Anti Duhring: Herr Eugen Duhring's Revolution in Science*, Foreign Languages Publishing House, (Jakarta: Hasta Mitra, 2005) h. 160-161.

perpaduan pikiran yang tidak mungkin tetapi menjadi suatu kekuatan aktual. Realitas dari yang absurd merupakanpasal kepercayaan pertama didalam kesatuan Hegelian mengani yang logikal… Semakin kontradiktif sesuatu hal, semakin besar ia adanya, atau dalam kata-kata lain, semakin absurd, semakin kredibel ia adanya. Maksim ini, yang bahkan tidak baru diciptakan tetapi telah dipinjam dari theologi Pewahyuan dan dari Mistisisme, adalah pernyataan telanjang dari apa yang isebut azas dialektika.

[2] Dialektika Negasi dari Negasi[395]

Sketsa sejarah ini (mengenai genesis dari yang dinamakan akumulasi kapital primitif di Inggris) secara relatif merupakan bagian terbaik dari buku Marx, dan bahkan akan lebih baik lagi seandainya ia bersandar atau mengandalkan diri pada penopang dialektika untuk membantu penopang keterpelajarannya. Negasi dari negasi Hegelian, karena ketiadaan sesuatu yang lebih baik dan lebih jelas, dalam keyataan mesti berlaku disini sebagai seorang bidan untuk melahirkan masa-depan dari perut masa-lalu. Penghapusan dari milik perseorangan yang sejak Abad ke-16 telah dilaksanakan dengan cara yang diindikasikan diatas, merupakan negasi pertama. Ia akan disusul dengan yang kedua, yang mempunyai watak suatu negasi dan karenanya suatu pemulihan hak-milik perseorangan ini oleh Herr Marx juga disebut hak milik masyarakat, dan dalam hal ini muncullah kesatuan Hegelian yang lebih tinggi, dimana kontradiksi dianggap telah disublasi, yaitu, dalam sulap kata-kata Hegelian, ditunggangi maupun dilestarikan… Menurut ini, perampasan terhadap kaum perampas adalah, sepertinya, hasil dengan sendirinya dari realitas sejarah dalam hubungan-hubungan eksternalnya secara material… Akan sulit meyakinkan seseorang yang berfikiran sehat mengani keharusan hak-pemilikan bersama atas tanah dan kapital, berdasarkan kepercayaan pada sulap-kata Hegelian seperti negasi dan negasi…Hibrida berkabut dari konsepsi-konsepsi Marx, namun tidak akan tampak asing bagi siapa saja yang menyadari bahwa nonsens dapat diramu dengan dialektika Hegelian sebagai landasan ilmiah, atau lebih tepatnya nonses yang tidak-bisa-tidak lahir darinya. Demi kepentingan para pembaca yang tidak terbiasa dengan kelicikan-kelicikan ini, mestilah ditunjukkan secara tegas-tegas bahwa negasi pertama Hegel adalah ide katekisma mengani hilangnya kepercayaan dan negasinya yang kedua adalah dari suatu kesatuan lebih tinggi yang membawa pada penebusan. Logika kenyataan-kenyataan nyaris tidak dapat didasarkan pada analogi among-kosong yang dipinjam dari bidang religius… Herr Marx tetapi gembira dalam dunia kepemilikan yang berkabut, yang sekaligus individual dan sosial dan menyerahkannya pada para ahlinya untuk memecahkan bagi mereka sendiri teka-teki dialektika yang sangat besar ini.

Maka bagi Marx tiada jalanlain untuk membuktikan keharusan revolusi sosial, untuk menegakkan hak milik bersama atas tanah dan alat-alat produksi yang diproduksi oleh kerja, kecuali dengan mengutip negasi dari negasi Hegelian; dan karena ia mendasarkan teori sosialis-nya atas analogi-analogi omong kosong yang dipinjam dari agama. Ia sampai pada hasil bahwa dalam masyarakat masa depan akan terdapat suatu hak-pemilikan dominan yang sekaligus individual dan sosial, sebagai kesatuan lebih tinggi Hegelian mengenai kontradiksi yang telah disublasikan.

Tetapi untuk sementara kita biarkan dulu negasi dari negasi itu dan mari kita memperhatikan *hak-pemilikan* yang *sekaligus individual dan sosial* itu. Herr Duhring mengkarakterisasi ini sebagai *dunia yang berkabut,* dan anehnya ia sesungguhnya benar dalam hal ini. Tepat sebagaimana kecekatannya dalam menangani metode *ocehan gila* Hegelian yang memungkinkan dirinya tanpa sedikitpun kesulitan menentukan apa yang pasti akan dimuat dalam jilid-jilid *Capital* yang masih belum selesai, maka disini, juga, tanpa sesuatu daya upaya yang berarti ia dapat meluruskan Marx ala Hegel, dengan mempertalikan padanya kesatuan lebih tinggi dari suatu kepemilikan, yang tentangnya tidak ada sepatah-katapun dalam (tulisan) Marx.

Marx mengatakan:

> Itu adalah negasi dari negasi. Ia tidak menegakkan kembali hak-milik perseorangan bagi produser, tetapi memberikan padanya hak-milik perseorangan yang didasarkan pada perolehan-perolehan era kapitalis; yaitu, pada koperasi dan pemilikan bersama atas tanah dan alat-alat produksi. Transformasi hak milik perseorangan yang terpencar-pencar, yang lahir dari kerja individual, menjadi hak milik perseorangan kapitalisme adalah, dengan sendirinya, suatu proses, yang jauh lebih berkepanjangan, keras, dan sulit, dari pada transformasi hak-milik perseorangan kapitalistik, yang secara praktikal sudah bersandar pada produksi yang disosialisasi, menjadi hak-milik yang disosialisasi.[396]

[395] Frederich Engels, *Anti Duhring; Revolusi Herr Eugen Duhring dalam Ilmu Pengetahuan,* Judul Asli: *Anti Duhring: Herr Eugen Duhring's Revolution in Science*, Foreign Languages Publishing House, (Jakarta: Hasta Mitra, 2005) h. 174-175.

[396] Karl Marx, *Capital,* Jilid 1, Moscow 1958. h. 763-64.

MATERIALISME DIALEKTIKA & MATERIALISME HISTORIS

[1] Dasar Epistemologis Materialisme Dialektis[397]

Materialisme dialektis ialah nama sistem kefilsafatan yang dibangun oleh Karl Marx, dan merupakan landasan teoretis dari masyarakat komunis dewasa ini. Materialisme merupakan suatu bentuk realisme, karena paham ini menjumbuhkan yang nyata dengan materi. Tanpa mengecualikan sesuatu, seorang penganut materialisme menganggap bahwa materi ialah satu-satunya yang nyata. Materi ialah hal yang terdalam dan bereksistensi atas kekuatan sendiri, dan tidak memerlukan suatu prinsip yang lain untuk menerangkan eksistensi sendiri. Materi itu sendiri merupakan sumber serta keterangan terdalam bagi bereksistensinya segala sesuatu yang ada, bahkan juga bagi adanya jiwa manusia. Sebelum diketahui orang, materi sudah ada dan dari materi itulah segala sesuatu berkembang. Materialisme merupakan salah satu diantara ajaran-ajaran "tiada lain kecuali", yang berusaha untuk melacak segala sesuatu sampai kepada tiada lain kecuali materi yang bergerak. Pada pokoknya, seorang penganut materialisme berpendirian, hanya materi yang merupakan hal-hal hakiki yang menyusun alam semesta, dan alam semesta bergerak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan serta azas-azas yang menguasai materi itu.

Didalam pikiran seorang penganut Marxisme, dialektika ialah suatu teori mengenai proses perubahan. Menurut pandangan ini, segala sesuatu saling berhubungan dan senantiasa mengalami perubahan. Proses perubahan itu berjenis khusus, dan terjadi melalui pertentangan diantara hal-hal yang berlawanan. Jika orang mempunyai sekadar perhatian kepada barang sesuatu, maka ia akan melihat, barang sesuatu itu terus-menerus dalam keadaan berubah menjadi barang sesuatu yang lain. Dan perubahan diri ini, merupakan hasil kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan.

Perubahan ini timbul melalui sintesa yang meliputi dan mengatasi faktor-faktor yang bertentangan. Ini berarti jika orang ingin mengetahui kebenaran mengenai kejadian-kejadian, maka ia harus memahami sejarah kejadian-kejadian tersebutm hal-hal yang berlawanan, dan arah kejadian-kejadian itu. Marx xendiri menerapkan konsepsi ini hampir semata-mata terhadap sejarah dan masyarakat, tetapi Hegel yang sangat berpengaruh terhadap Marx menerapkannya terhadap segala perubahan.

Selanjutnya penulis beri contoh mengenai dialektika. Menurut Marx, kapitalisme berdasarkan atas hakekatnya sendiri yang berusaha untuk menambahkan keuntungan. Tetap ini berarti bahwa buruh harus diberi upah sedikit mungkin, dengan akibat bahwa ketika kapitalisme meluas para buruhnya tidak mempunyai cukup uang untuk membeli barang yang mereka hasilkan. Agar dapat tetap meluas, maka kapitalisme harus beralih pada usaha-usaha yang bersifat imperialis yang menyebabkan suatu modal bertentangan dengan modal ditempat lain, dan pertentangan ini menimbulkan peperangan. Secara demikian berdasarkan atas hakekatnya sendiri sebuah negara kapitalis pasti akan menghancurkan diri sendiri.

Masalah epistemologi memperoleh jawaban dari materialisme dialektis dengan gaya yang sangat menarik. Maksud pokok *mengetahui* ialah untuk mengubah objek yang diketahui, dan bukan sekedar untuk mengetahui, mengathui suatu objek berarti dipengaruhi olehnya dan memberikan reaksi terhadapnya. Hasilnya ialah suatu konsepsi yang dinamik tentang pengetahuan, baik tentang objek yang diketahui maupun tentang subyek yang mengetahui. Segala sesuatu mengalami perubahan. Tidak ada hakikat manusia yang statis dan tidak ada dunia yang statis.

Kelanjutannya ialah tidak ada hal-hal seperti pengetahuan murni, yang tidak mengandung kepentingan, dan tidak ada kebenran yang objektif. Pengetahuan dan kebenaran dihubungkan dengan pengetahuan subyek dan tidak dipandang secara abstrak terlepas dari subjek tersebut. Kenyataan yang terakhir ini sangat penting sekali, karena kebenaran selalu dihubungkan dengan kegiatan subjek, dan berhubung dengan itu dihubungkan dengan ideologi yang dianut oleh subyek tersebut, meskipun dengan cara tertentu seorang penganut materialisme dialektis mengakui bahwa dunia yang nyata sepenuhnya bersifat objektif, dan tidak tergantung pada akal atau pengetahuan seseorang.

Sebagai akibat adanya relativisme tentang kebenaran tersebut, maka mau tidak mau terjadi perjuangan diantara mereka yang karena berbeda mengenai tujuan yang hendak dicapainya, atau karena berbeda dalam mengakui kebenaran-kebenaran yang berlainan yang tak dapat didamaikan. Apa yang benar bagi seorang buruh misalnya, mungkin sesat bagi seoarang kapitalis. Dan karena tidak terdapat landasan yang sama, maka kebenaran-kebenaran ini saling bertentangan dan hanya dapat diselesaikan dengan jalan kekerasan. Kenisbian tentang kebenaran ini dialihkan kedalam lapangan kesusilaan, hukum dan pengertian-pengertian yang logis. Tidak ada hak-hak serta keadilan yang bersifat abstrak; yang ada ialah hanya hak serta keadilan sebagai pencerminan suatu masyarakat tertentu atau kelas tertentu.

[2] Materialisme Historis[398]

Konsep materialisme sejarah (*historical materialism*) sudah demikian melekat pada nama Karl Marx. Seolah-olah konsep itu kreasi langsung dari Marx. Padahal sama seperti konsep materialisme dialektis (*dialectical materialism*) yang juga bukan kreasi Marx tetapi hasil formulasi konseptual Engels

---

[397] Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat,* Judul Asli: *Elements of Philosophy,* Alih Bahasa: Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. VII., 1996) h. 123-126.

[398] Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembagan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) h. 281-285.

setelah kematian Marx, konsep materialisme sejarah sebenarnya kreasi Plekanov. Plekanov adalah seorang teoritisi dan filosof Marxis Soviet yang banyak melakukan kajian mendalam tentang Marxisme. Meskipun secara eksplisit Marx tidak pernah menyebut istilah materialisme sejarah, Marx dalam berbagai karyanya telah meletakkan dasar-dasar pemikiran, metode-metode, konseptualisasi teoretis berkaitan dengan materialisme sejarah itu.

Menurut Marx sejarah umat manusia sejak zaman primitif dibentuk oleh faktor-faktor kebendaan. Awal sejarah manusia dimulai dengan adanya pemilikan pribadi yang kemudian menimbulkan pertarungan memperbutkan materi atau kekayaan materi atau kekayaan ekonomi.materi atau bendalah yang menjadi faktor kontitutif proses sosial politik historis kemanusiaan. Marx menyangkal argumen Hegel maupun Max Weber[399] yang melihat faktor non-bendawi, roh (*spirit*) dan gagasan (*idea*) berpengaruh dan menentukan sejarah. Inilah faham materialisme sejarah Marx.

Memahami pikiran materialisme sejarah Marx tidak bisa dipisahkan dari pemikirannya tentang dialektika dan Marxisme. Konsep ini memiliki posisi sentral dalam tradisi pemikiran Marxis. Dalam merumuskan gagasannya tentang dialektika. Marx memperoleh inspirasi dari gurunya, Hegel. Tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa subtansi dialektika Marx tidak lain melainkan penjungkirbalikan saja dari dialektika Hegel. Ini bisa dimengerti karena Marx, seperti diakuinya sendiri, sangat dipengauhi oleh filosof Jerman itu. Bahkan dimasa mudaya dengan bangga Marx mengakui dirinya sebagai Hegelian.

Bagaimana gagasan dialektika Hegel itu? Hegel berpendapat bahwa dialektika itu merupakan proses antagonisme tesis versus antitesis yang kemudian melahirkan sintesis. Dari sintesis itu timbul tesis dan antitesis baru. Demikian seterusnya proses itu berlangsung. Proses dialektika Hegel terjadi dalam dunia gagasan atau jiwa. Hegel percaya dengan adanya 'jiwa'—suatu entitas mistis—yang menjadi penyebab perkembangan sejarah manusia melaluiproses dialektika.[400] Proses dialektika itu baru berhenti bila sudah tercapai ide mutlak. Bagi Engels, sahabat dekat Marx, dialektika adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum gerak dan perkembangan alam, masyarakat manusia dan pemikirannya.[401] Untuk membuktikan kebenaran hukum dialektika dalam siklus kehidupan, Engels menerapkan konsep itu dalam kontek ilmu biologi.[402]

> Marx berpendapat dialektika merujuk pada pertentangan, kontradiksi, antagonisme atau konflik antara tesis dan antitesis yang kemudian melahirkan sintesis. Persis sama seperti pandangan Hegel, menurut Marx proses dialektis itu terjadi buka di dunai gagasan atau ide melainkan dunia material. Pemahaman terhadap dialektika dimaksudkan untuk mengubah dunia, dan tidak seperti yang dimaksudkan Hegel, yaitu sekedar memahami dunia. Karena itu, Marx mengklaim dialektikanya tidak saja berbeda dengan dialektika Hegel tetapi juga bertentangan. Dalam *Das Capital* Marx menulis: "Metode dialektikal saya tidak hanya berbeda dari metode Hegel, tetapi merupakan pertentangan langsung. Bagi Hegel… proses berfikir marupakan demiurgos (?) dari dunia nyata, dan dunia nyata hanya merupakan bagian eksternal, bentuk fenomenal dari "pemikiran". Bagi saya, sebaliknya, pemikiran tersebut tidak lain adalah dunia material yang direfleksikan oleh pemikiran manusia."[403]

Marx tidak mengakui adanya persamaan dialektikanya dengan dialektika Hegel secara keseluruhan. Buat penulis ini agak mengherankan, karena—seperti yang dikemukakan diatas—secara subtansial gagasan dialektika, sebagai antagonisme tesis versus antitesis, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi penolakan Marx itu mengherankan. Bagi William Ebenstain, pengambilalihan Marx sedemikian rupa atas dialektika Hegel mendorongnya mengambil kesimpulan, bahwa "*it is just to be upside down".*

Untuk memahami materialisme sejarah, kita juga perlu memahami materialisme Marx. Materialisme adalah faham serba benda. Bertitik tolak dari asumsi itu, Marx meyakini bahwa tahap-tahap perkembangan sejarah 'ditentukan'—oleh keberadaan material. Bentuk dan kekuatan produksi material tidak saja menentukan proses perkembangan dan hubungan-hubungan sosial manusia, serta formasi politik, tetapi juga pembagian kelas-kelas sosial.[404]dalam *Poverty of Philosophy,* Marx, seperti ditulis Senderson berpendapat bahwa hubungan-hubungan sosial sangat erat kaitannya dengan kekuatan-kekuatan produksi dan dalam menciptakan kekuatan produksi baru manusia akan mengubah bentuk-bentuk atau cara produksi mereka.

---

[399] Max Weber, "The Role of Ideas in History", dalam Emitai Etzioni and evant Etzioni Hapevy (eds) *Social Change, Sources, Pattern and Consequences* (New York: Basic Books, Inc., 1973) h. 40-42.

[400] Russel, *Hitory of Western Philosophy* (London: Routledge, 1991) h. 750.

[401] Lauer, *Perspective on Social Change* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1973) h. 55.

[402] Donald, *Western Political Theory* (Pamona College, 1968) h. 493.

[403] Dikutip dalam Sanderson, *An Interpretation of the Political Ideas of Marx and Engels* (London and Harlow: Longmans, 1969) h. 17.

[404] Lihat Donald, *Western, Op. Cit.,* h. 489.

“Cara mendapatkan penghidupan mereka, tulis Marx lebih jauh, mereka mengubah semua hubungan sosial mereka. Penggilingan tangan memberikan anda masyarakat dengan penguasa feodal; penggilingan uap, masyarakat dengan kapitalis industri.”[405]

Jadi, materi baik dalam bentuk modal kekuatan-kekuatan maupun alat-alat produksi merupakan basis sedangkan kehidupan sosial, politik, filsafat agama, seni dan negara—dengan segala perkembangan dan dinamikanya—merupakan suprastruktur. Inilah faham materialisme Marx yang kemudian menjadi dasar intelektual konsep determinasi ekonomi dalam sejarah.[406] Dan, pemikiran Marx itu pula yang kemudian dijadikan dasar klasifikasi Sejarah Peradaban Eropa kedalam empat periode: Komunisme Primitif, Perbudakan, Feodalisme, Kapitalisme. Periode sejarah yang terakhir, kapitalisme, merupakan masa transisi ke zaman yang mengarah terbentukya diktatur proletariat.[407]

Berdasarkan gagasan diatas, Marx dan Engels, seperti ditulis Lauer, merumuskan beberapa premis teoretis yang merupakan inti dari pemikiran materialisme sejarah: *Pertama,* sebab-sebab terjadinya perubahan dan proses sejarah harus dilacak dalam bentuk-bentuk dan cara produksi ekonomi masyarakat dan bukan dalam gagasan atau filsafat. Bukanlah cara berfikir manusia yang menentukan perubahan sosial dan sejarah, melainkan bagaimana hubungan-hubungan produksi materialnya. Marx mengatakan: “*Social existence determines social consciousness”* (Keberadaan sosial seseorang menentukan kesadaran sosialnya).

Kedua, setiap masyarakat selalu dicirikan oleh adanya basis dan suprastruktur. Basis menentukan suprastruktur, bukan sebaliknya. *Ketiga,* perubahan disebabkan oleh adanya antagonisme, kontradiksi kelas sosial atau proses dialektis antara kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi.

Keempat, masyarakat kapitalis melahirkan kondisi-kondisi material yang pada akhirnya mengahncurkan masyarakat tersebut. Karena, dalam masyarakat kapitalis menurut Marx selalu berlangsung kontradiksi internal. Yaitu pertarungan atau konflik tak pernah henti antara kekuatan-kekuatan sosial yang terdapat dalam masyarakat kapitalis itu sendiri. Perkembangan dialektis dengan demikian berarti bahwa kontradiksi dalam masyarakat kapitalis tidak berasal dari ‘kekuatan luar’ masyarakat itu melainkan di dalam tubuhnya sendiri. Semua itu disimpulkan oleh Lauer:

“Tidak ada tantangan eksternal, tidak ada proletariat eksternal yang dibutuhkanlagi bagi Marx dan Engels; masyarakat budak, feodal dan kapitalis masing-masing membawa bibit kehancuran diri sendiri.”[408]

Kelima, kontradiksi antara kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi termanifestasi dalam bentuk konflik kelas. Konflik kelas ini berlangsung dalam semua sejarah manusia. Dalam *Manifesto of the Communist Party,* Marx mengatakan bahwa sejarah seluruh masyarakat yang ada (sejak dahulu sampai sekarang) tidak lain adalah sejarah perjuangan kelas. Dalam masyarakat kapitalis, kelas yang selalu berseteru itu adalah kelas borjuis-kapitalis dan kelas proletariat. Kelas borjuis-kapitalis dicirikan oleh kekuasaannya yang dominan terhadap negara, akat dan cara produksi serta kapital sedangkan kelas proletariat tidak memiliki apa-apa kecuali tenaga kerja.

ANALISIS MADILOG: KONGKLUSI

Tan Malaka menjelaskan: Jika persoalan itu didasrkan atas *matter* maka Madilog dapat menyelesaikannya. Sesuatu yang didasarkan pada benda dan faktanya, yang dirasakan oleh panca indera kita, bisa “diperalamkan” dan di eksperimenkan berulah persoalan ini dapat dibahas dan diperiksa. Karena segala bukti yang nyata yang bisa “diperalamkan” itu akan menjadi premis pembahasan, karena itu pula Madilog dinyatakan sebagai cara berfikir yang berdasarkan ilmu bukti (maksudnya science/ ilmu pengetahuan), sehingga benar-benar terutama cara berfikir bukan filsafat.[409]

Memahami pemikiran Tan Malaka, disatu sisi ia menyatakan dirinya sebagai seorang komunis, marxis dan materialis, dan disi yang lain pikiran dan tindakannya menunjukkan ia seorang idealis, nasionalis dan sekaligus Islam. Tan Malaka juga memberikan tekanan pada perlunya front persatuan Islam dan Komunisme.

Penting juga dijelaskan kembali, bahwa materialisme Tan Malaka berlainan dengan materialisme dalam ontologi filsafat barat. Kalau kita lihat uraian Tan Malaka tentang masyarakat Indonesia asli yang didalamnya terdapat kepercayaan atas dinamisme yang mendasarkan diri kepada terhadap kepercayaan benda mirip dengan materialismenya atau *matter of fact,* ada benda dan ada bukti. Ini adalah logis dan sebuah sikap rasional. Sedangkan materialism dalam filsafat barat menganggap segala sesuatu yang ada

[405] Sanderson, *An Interpretation, Op. Cit.,* h. 30.
[406] George Sabine, *History of Political Theory* (New York: Henry Holt and Company, 1954) h. 760-765
[407] Sanderson, *An Interpretation, Op. Cit.,* h. 27.
[408] Lauer, *Perspective, Op. Cit.,* h. 58.
[409] Wasid Soewarto dalam *Memperingati 44 Tahun Wafatnya Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Tan Malaka* (Jakarta: Yayasan Massa, 1993) hal. 22-23.

adalah berasal dari benda. Menurut Tan Malaka dasar dan aksioma materialisme dalam filsafat barat tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Materialisme-Dialektika Tan Malaka lebih banyak merupakan “cara berfikir dinamis dan realistis”, dari suatu proses perjalanan masyarakat. Tan Malaka menyatakan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi cara berfikir seseorang, namun juga pemikiran itu kreatif dan pada gilirannya dapat “merubah masyarakat” yang dalam bahasa Tan Malaka disebutnya dengan “pelantunan antara keduanya”. Tan Malaka juga menyatakan bahwa cara berfikir realistis, dinamis dan logis (materialism, dialektika, logika-pen.) dapat merubah masyarakat. Tan Malaka mengakui penyelesaikan kemasyakatan adalah dengan menggunakan analisa meterialisme dialektis dan materialism historis.

Dengan memperhatikan dari ketiga kata kunci, matter atau benda atau ilmu bukti, dielektika atau pertentangan dan logika atau cara berfikir, maka yang dimaksud dengan Madilog ialah cara berfikir yang realistis, pragmatis dan fleksibel yang harus dioperasikan dengan menggunakan hukum dialektika dan dengan demikian merupakan cara berfikir yang dinamis.

Tan Malaka mengakui sepenuhnya kontribusi Marx dan Engels, tetapi bagi Tan Malaka yang penting adalah penerapan “metoda Marx berfikir” tersebut harus disesuaikan dengan “bahan” politik, ekonomi, sosial-budaya, sejarah dll. Tan Malaka menegaskan bagi seorang Marxis yang tetap sama pada semua tempat dan waktu ialah; cara memahamkan dan menyelesaikan soal masyarakat dengan cara dialektika, faham dan teori tentang kejadian dalam masyarakat didasarkan atas materialism dan semangat pemeriksaan serta penjelasan soal masyarakat haruslah didasarkan pada semangat kemajuan revolusioner.[]

MATERI 22
IDEOLOGI DUNIA (KAPITALISME, SOSIALISME, KOMUNISME, FASISME)

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

PRAWACANA

1. Pengertian Ideologi

Pada dasarnya ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata: *ideos* artinya pemikiran, dan *logis* artinya logika, ilmu, pengetahuan. Dapatlah didefinisikan ideologi merupakan ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita.[410] Ideologi merupakan kata ajaib yang menciptakan pemikiran dan semangat hidup diantara manusia terutama kaum muda, khususnya diatara cendekiawan atau intelektual dalam suatu masyarakat.[411] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat diberbagai subyek atau kelompok masyarakat yang ada, dijadikan dasar untuk direalisasikannya. Dengan demikian, ideologi tidak hanya dimiliki oleh negara, dapat juga berupa keyakinan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam negara, seperti partai politik atau asosiasi politik, kadang hal ini sering disebut subideologi atau bagian dari ideologi. Ideologi juga merupakan *mythos* yang menjadi *political doctrin* (doktrin politik) dan *political formula* (formula politik).[412] Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaliknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi mereka.[413] Ideologi juga memiliki arti: konsepsi manusia mengenai politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan untuk diterapkan dalam suatu masyarakat atau negara.[414]

2. Ideologi dalam Ilmu Sosial

Persoalan ideologi merupakan pusat kajian ilmu sosial.[415] Menurut Frans Magnis Suseno,[416] ideologi dimaksud sebagai keseluruhan sistem berfikir, nilai-nilai dan sikap dasar rohaniah sebuah gerakan, kelompok sosial atau individu. Ideologi dapat dimengerti sebagai suatu sistem penjelasan tentang eksistensi suatu kelompok sosial, sejarahnya dan proyeksinya ke masa depan serta merasionalisasikan suatu bentuk hubungan kekuasaaan. Dengan demikian, ideologi memiliki fungsi mempolakan, mengkonsolidasikan dan menciptakan arti dalam tindakan masyarakat. Ideologi yang dianutlah yang pada akhirnya akan sangat menentukan bagaimana seseorang atau sekelompok orang memandang sebuah persoalan dan harus berbuat apa untuk mensikapi persoalan tersebut. Dalam konteks inilah kajian ideologi menjadi sangat penting, namun seringkali diabaikan.

Istilah ideologi adalah istilah yang seringkali dipergunakan terutama dalam ilmu-ilmu sosial, akan tetapi juga istilah yang sangat tidak jelas. Banyak para ahli yang melihat ketidakjelasan ini berawal dari rumitnya konsep ideologi itu sendiri. Ideologi dalam pengertian yang paling umum dan paling dangkal biasanya diartikan sebagai istilah mengenai sistem nilai, ide, moralitas, interpretasi dunia dan lainnya. Menurut Antonio Gramsci,[417] ideologi lebih dari sekedar sistem ide. Bagi Gramsci, ideologi secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya ideologi 'mengatur' manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka dan sebagainya.

3. Logika Dasar Ideologi

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan[418]. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang

---

[410] Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim* (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1982) hlm. 7.

[411] *Ibid.,* hlm. 145.

[412] Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ketiga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm. 238.

[413] Alfian, *Pemikian dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981) hlm. 187.

[414] Sukarna, *Suatu Studi Ilmu Politik Ideologi* (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 113.

[415] Jorge Lorrain, *Konsep Ideologi* (Yogyakarta: LKPSM, 1996) hlm. 10.

[416] Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991) hlm. 230.

[417] Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 83.

[418] Anthony Downs dalam buku *An Economic System of Democracy* (New York: Harper & Row, 1957) hlm. 96. mendefinisikan ideologi sebagai "*a verbal image of the good society, and of the chief means of constructing such a society.*" Menurut Austin Ranney, setiap ideologi adalah seperangkat ide yang saling bertautan secara logis dan memiliki titik beda dengan ideologi lain. Gagasan yang terangkum dalam sebuah ideologi mencakup nilai-nilai (*values*), visi kemasyarakatan yang ideal (*vision of the idel polity)*, konsep asal-usul manusia (*conception of human nature),* strategi tindakan (*strategies of actions*), dan siasat politik (*political taktics)*; lihat Austin Ranney, *Governig; An Introduction to Political Science (7th Edition;* London: Prentice Hall International, Inc., 1996) hlm. 71-73. Sementara dalam bahasa yang agak lebih sederhana, pranarka menjelaskan ideologi yang menurut hakikat dan sifatnya adalah sebuah pegangan untuk perjuangan; lihat A.M.W. Pranarka, "Pasal 33 UUD 1945: *Wawasan Dasar dan Konstruksi Operasionalnya, Suatu*

komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu (bandingkan *Weltanschauung*), secara umum (lihat Ideologi dalam kehidupan sehari hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit. (definisi ideologi Marxisme). Ideologi sama pentingnya dengan silogisme (baca: logika berfikir yang benar) bagi setiap proposisi (dalil atau pernyataan) yang kita buat. Ideologi secara etimologis berarti permulaan. Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun diatas pemikiran-pemikiran (cabang). Ideologi adalah pemikiran mendasar dan patokan asasi tingkah laku. Dari segi logika Ideologi adalah pemahaman mendasar dan asas setiap peraturan.

4. Proses Kelahiran Ideologi

Tentang bagaimana ideologi lahir, pada dasarnya ideologi terumuskan dengan sejumlah kemungkinan: *pertama,* ideologi lahir karena diinspirasikan oleh sosok tokoh yang luar biasa, dalam sejarah bangsanya. Ia hadir membawa sekaligus mampu memberikan inspirasi serta pengaruh kuat terhadap orang lain secara luas. Pada keadaan ini, gagasan seseorang yang 'luar biasa' itu atas kehendak pelaku dan dukungan pengikut, alam pemikirannya mengenai cita-cita masyarakat yang diperjuangkan dalam gerakan politik diakui dan dirumuskan secara sistematis, telah menjadi ideologi. Ideologi itu lahir dari pemikiran seseorang. *Kedua,* berdasarkan alam pikiran masyarakat, ideologi itu dirumuskan oleh sejumlah orang yang berpegaruh dan merepresentasikan kelompok masyarakat kemudian disepakati sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bilaperlu diciptakan mitos-mitos untuk mendapatkan pengakuan legal dan kultural dari masyarakat bersangkutan sehingga mereka tunduk dan meyakini. *Ketiga,* berdasarkan keyakinan tertentu yang bersifat universal, ideologi itu lahir dan dibawa oleh orang yang diyakini sebagai kehendak Tuhan, dengan pesan untuk melakukan pembebasan dan memberikan bimbingan dalam mengatur kehidupan yang sebenarnya serta konsekuensi moral dikemudian hari yang akan diterima bila melanggarnya. Ideologi ini syarat dengan pesan moral yang sesuai dengan nurani serta dasar primordial manusia. Oleh sebab itu, ideologi yang lahir dari suatu keyakinan Iman dan bersifat universal akan hidup secara permanen tidak akan goyah dan mati. Biasanya ideologi ini lahir diinspirasikan oleh spirit agama.[419] Namun demikian, terlepas dengan cara apa dan bagaimana suatu ideologi itu lahir, pada dasarnya ideologi sering disamakan sebagai suatu keyakinan, sebab ia mengandung suatu mitos dan cita-cita yang harus direalisasikan dan memiliki nilai kebenaran. Bagi pengikutnya tidak hanya diakui dan diikuti, lebih dari itu dihayati sebagai sesuatu yang memiliki spirit hidup serta perjuangan dalam menjawab tantangan yang dirasakan.[420]

5. Dimensi dan Tahapan Ideologi

Ada tiga dimensi yang perlu dipenuhi oleh suatu ideologi agar tetap mampu mempertahankan relevansinya sebagai berikut: *pertama,* dimensi realitas, adalah kemampuan ideologi untuk mencerminkan realitas dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya. Karena hanya dari situlah anggota masyarakat akan merasa bahwa ideologi itu memang miliknya. *Kedua,* dimensi idealisme, adalah kemampuan dasar ideologi yang terkandung di dalam nilai-nilai dasar ideologi itu. *Ketiga,* dimensi fleksibilitas, dimensi ketiga ini menuntut kemampuan ideologi bukan saja untuk melandasi dan meneropong perubahan atas pembaruan masyarakat, tetapi juga sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu.[421]

Ali Syariati memberikan argumentasi atau pendapatnya bahwa suatu ideologi dalam mengoperasionalisasikan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai suatu kebenaran untuk dapat diperjuangkan menjadi keyakinan atau pandangan hidup dalam kolektif masyarakat memiliki tahapan-tahapan sehingga terbentuk sebuah ideologi, ini meliputi: *pertama,* adalah cara kita melihat dan mengungkapkan alam semesta, eksistensi, dan manusia. *Kedua,* cara khusus dalam kita memakai dan menilai semua benda dan gagasan atau ide-ide yang membentuk lingkungan sosial dan mental kita, *Ketiga,* mencakup usulan, metode sebagai pendekatan dan keinginan yang kita manfaatkan untuk mengubah *status quo* yang kita tidak puas.[422] Pada tahap ketiga inilah ideologi mulai menjalankan misinya dengan memberikan para pendukungnya pengarahan, tujuan dan cita-cita serta rencana praktis sebagai dasar perubahan dan kemajuan kondisi sosial yang diharapkan.[423]

Tinjauan Ideologis,"dalam A*nalisa CSIS*, Tahun IV, No. 12, Desember 1986, Penjelasan tentang ideologi-ideologi dunia yang cukup komprehensif; lihat William Ebenstein dan Edwin Fogelman, *Isme-isme Dewasa ini,* terj. Alex Jemadu (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994). Lihat catatan kaki dalam A. Effendi Khoirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 2003) hlm. 22.

[419] Firdaus Syam, *op. cit.,* hlm. 240-241.

[420] *Ibid.*, hlm. 241.

[421] Ali Syariati, *op. cit.,* hlm. 148.

[422] Firdaus Syam, *op. cit.,* hlm. 242.

[423] Ali Syariati, *op. cit.,* hlm. 148.

6. Akar Ideologi dari Tiga Pendekatan Filsafat

Semenjak masa kelahiran para pemikir di Yunani, Romawi, Kelahiran kejayaan Yudea-Kristiani, kemudian Islam dan Abad Pencerahan di Eropa Konstruk Filsafat yang melahirkan ideologi-ideologi besar dunia sesungguhnya berakar dari tiga pendekatan filsafat, yakni: *Pertama,* Filsafat Idealisme (*philosophy of idealism*), ini mengedepankan faham rasionalisme dan individualisme, yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan ideologi Liberalisme dan Kapitalisme. Ide yang menjadikan kekuatan dasar menempatkan manusia sebagai pusat di alam semesta (*centre of nature*), manusia sebagai titik pangkal terjadinya perubahan sejarah. Ini melahirkan faham dalam membangun kehidupan kenegaraan dalam konteks hubungan agama dengan negara adalah terpisah (*separation*) walau dalam hal-hal ceremonial dan ritual agama masih diberikan peran. Pandangan kehidupan yang berdasar ideologi liberalisme-kapitalisme, melahirkan faham Sekulerisme-Moderat[424] dalam mengatur kehidupan politik-kenegaraan.

Kedua, Filsafat Materialisme (*philosophy of materialism*), ini mengedepankan faham emosionalisme berupa perjuangan kelas dengan kekerasan dan kolektivisme, yang dalam kehidupan berpolitik telah melahirkan ideologi Sosialisme-Komunisme. Materi (ekonomi), yang menjadi kekuatan dasar menempatkan kondisi ekonomi sebagai faktor penentu terjadinya perubahan sejarah. Ini melahirkan faham dalam membangun kehidupan kenegaraan dalam konteks hubungan agama dengan negara adalah dipertentangkan (*conflic*). Agama dianggap sebagai faktor penghambat, candu bagi masyarakat, karena itu tidak diberikan peran sama sekali. Pandangan kehidupan yang berdasar ideologi Sosialisme-Komunisme melahirkan faham Sekularisme-Radikal[425] dalam mengatur kehidupan politik-kenegaraan.

Ketiga, Filsafat Teologisme (*philosophy of teologism*). Dalam faham ini masih dibagi menjadi dua: 1] faham agama yang menempatkan ajaran Tuhan memegang peran sentral dalam kehidupan politik-kenegaraan, tetapi dalam konstruk politiknya, menjadikan pemuka agama sebagai tokoh yang dikultuskan. 2] faham agama yang memang menempatkan ajaran Tuhan sebagai sumber inspirasi, motivasi dan ekspresi. Ini menempatkan ajaran Tuhan sebagai faktor integratif dan pencerahan. Dalam hubungannya dalam kehidupan politik-kenegaraan, agama sebagai suatu yang suci kekuatannya bukan di pengkultusan dan pemistikan melainkan agama sebagai pembimbing (*guidens*). Agama dapat didialogkan untuk terlibat sebagai wacana sekaligus sumber etika, moral dan hukum, maka dalam kehidupan politik-kenegaraan itu dapat dikatakan agama bersifat dinamis, dapat disebut pula sebagai filsafat teologisme-dinamis.[426]

7. Tiga Kategorisasi Ideologi

Secara sederhana, Franz Magnis Suseno[427] mengemukakan tiga kategorisasi ideologi. *Pertama*, ideologi dalam arti penuh atau disebut juga ideologi tertutup. Ideologi dalam arti penuh berisi teori tentang hakekat realitas seluruhnya, yaitu merupakan sebuah teori metafisika. Kemudian selanjutnya berisi teori tentang makna sejarah yang memuat tujuan dan norma-norma politik sosial tentang bagaimana suatu masyarakat harus di tata. Ideologi dalam arti penuh melegitimasi monopoli elit penguasa di atas masyarakat, isinya tidak boleh dipertanyakan lagi, bersifat dogmatis dan apriori dalam arti ideologi itu tidak dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman. Salah satu ciri khas ideologi semacam ini adalah klaim atas kebenaran yang tidak boleh diragukan dengan hak menuntut adanya ketaatan mutlak tanpa reserve. Dalam kaitan ini Franz Magnis-Suseno mencontohkan ideologi Marxisme-Leninisme.

Kedua, ideologi dalam arti terbuka. Artinya ideologi yang menyuguhkan kerangka orientasi dasar, sedangkan dalam operasional keseharianya akan selalu berkembang disesuaikan dengan norma, prinsip moral dan cita-cita masyarakat. Operasionalisasi dalam praktek kehidupan masyarakat tidak dapat ditentukan secara apriori melainkan harus disepakati secara demokratis sebagai bentuk cita-cita bersama. Dengan demikian ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang.

Ketiga, Ideologi dalam arti implisit atau tersirat. Ideologi semacam ini ditemukan dalam keyakinan-keyakinan masyarakat tradisional tentang hakekat realitas dan bagaimana manusia harus hidup didalamnya. Meskipun keyakinan itu hanya implisit saja, tidak dirumuskan dan tidak diajarkan namun cita-cita dan keyakinan itu sering berdimensi ideologis, karena mendukung tatanan sosial yang ada dan melegitimasi struktur non demokratis tertentu seperti kekuasaan suatu kelas sosial terhadap kelas sosial yang lain.

8. Fungsi dan Faktor Pendukung Ideologi

Ideologi adalah suatu sistem keyakinan yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau bangsa yang bersifat menyeluruh yang mendalam mengenai segala segi kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan, dan kebagsaan. Ideologi mengandung kehendak dan cita-cita tentang suatu kehidupan masyarakat yang ideal yang diyakini kebenarannya dan harus diperjuangkan agar terwujud dengan kongkrit. Oleh karena itu ideologi merupakan panduan bagi penganutnya untuk melakukan tindakan-tindakan secara praktis dan

[424] Sekulerisme-Moderat melihat agama sebagai urusan pribadi yang berkaitan dengan masalah-masalah ruhani manusia, dan karena itu tidak boleh mencampuri urusan publik yang berkaitan dengan politik serta menyangkut dunia materi. Dalam Amien Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 124.

[425] Sekularisme-Radikal melihat agama sebagai musuh, karena dianggap sebagai perintang kemajuan. *Ibid*.

[426] Firdaus Syam, *op. cit.,* hlm. 242-244.

[427] Franz Magnis-Suseno, *op. cit.,* hlm. 232.

strategis untuk mewujudkan kehendak dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi tersebut. Ideologi mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi *Etis*, yaitu sebagai panduan dan sikap serta perilaku kelompok masyarakat dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.
2. Fungsi *Integrasi*, yaitu nilai yang menjadi pengikat suatu bangsa atau masyarakat.
3. Fungsi *Kritis*, yaitu sebagai ukuran nilai yang dapat digunakan untuk melakukan kritik terhadap nilai atau keadaan tertentu.
4. Fungsi *Praxis*, yaitu sebagai acuan dalam memecahkan masalah-masalah kongkrit.
5. Fungsi *Justifikasi*, yaitu ideologi sebagai nilai pembenar atas suatu tindakan atau kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh suatu kelompok tertentu.

Menurut tokoh psyco-analisis Foucault, ideologi menyangkut empat faktor atau hal penting: 1] Ekonomi sebagai basis, 2] Kelas yang berkuasa, 3] Kekuatan repressif, 4] Sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran sejati. Menurut Gianfranco, seorang pakar sosiologi ada tiga kekuatan sosial yang mempengaruhi masyarakat: 1] Kekuatan politik, 2] Kekuatan ekonomi, 3] Kekuatan normatif atau ideologi.

KAPITALISME

1. Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran kapital (modal), yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya (Bagus, 1996). Ebenstein (1990) menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar sistem perekonomian. Ia mengaitkan perkembangan kapitalisme sebagai bagian dari gerakan individualisme. Sedangkan Hayek (1978) memandang kapitalisme sebagai perwujudan liberalisme dalam ekonomi.

Menurut Ayn Rand (1970), kapitalisme adalah *"a social system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned".* (Suatu sistem sosial yang berbasiskan pada pengakuan atas hak-hak individu, termasuk hak milik di mana semua pemilikan adalah milik privat) Heilbroner (1991) secara dinamis menyebut kapitalisme sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika yang historis-unik. Logika formasi sosial yang dimaksud mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat. Istilah "formasi sosial" yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas. Dalam Legitimation Crisis (1988), Habermas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial (*primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme*).

2. Sejarah Perkembangan Kapitalisme

Robert E. Lerner dalam *Western Civilization* (1988) menyebutkan bahwa revolusi komersial dan industri pada dunia modern awal dipengaruhi oleh asumsi-asumsi kapitalisme dan merkantilisme. Direduksi kepada pengertian yang sederhana, kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang didisain untuk mendorong ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju skala nasional dan internasional. Pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan internasional, di mana pasar berada dan bagamana memanipulasi pasar untuk keuntungan mereka. Penjelasan Robert Learner ini paralel dengan tudingan Karl Marx bahwa imperialisme adalah kepanjangan tangan dari kapitalisme.

Sistem kapitalisme, menurut Ebenstein (1990), mulai berkembang di Inggris pada abad 18 M dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat laut dan Amerika Utara. Risalah terkenal Adam Smith, yaitu *The Wealth of Nations* (1776), diakui sebagai tonggak utama kapitalisme klasik yang mengekspresikan gagasan *"laissez faire"* dalam ekonomi. Bertentangan sekali dengan merkantilisme yaitu adanya intervensi pemerintah dalam urusan negara.

Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan-kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara (Robert Lerner, 1988). Awal abad 20 kapitalisme harus menghadapi berbagai tekanan dan ketegangan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Munculnya kerajaan-kerajaan industri yang cenderung menjadi birokratis uniform dan terjadinya konsentrasinya pemilikan saham oleh segelintir individu kapitalis memaksa pemerintah (Barat) mengintervensi mekanisme pasar melalui kebijakan-kebijakan seperti undang-undang anti-monopoli, sistem perpajakan, dan jaminan kesejahteraan. Fenomena intervensi negara terhadap sistem pasar dan meningkatnya tanggungjawab pemerintah dalam masalah kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan indikasi terjadinya transformasi kapitalisme. Transformasi ini, menurut Ebenstein, dilakukan agar kapitalisme dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan ekonomi dan sosial. Lahirlah konsep negara kemakmuran (*welfare state*) yang oleh Ebenstein disebut sebagai "perekonomian campuran" (*mixed economy*) yang mengkombinasikan inisiatif dan milik swasta dengan tanggungjawab negara untuk kemakmuran sosial.

Habermas memandang transformasi itu sebagai peralihan dari kapitalisme liberal kepada kapitalisme lanjut (*late capitalism. organized capitalism, advanced capitalism*). Dalam *Legitimation Crisis* (1988), Habermas menyebutkan bahwa *state regulated capitalism* (nama lain kapitalisme lanjut) mengacu kepada dua fenomena: (a) terjadinya proses konsentrasi ekonomi seperti korporasi-korporasi nasional dan internasional yang menciptakan struktur pasar oligopolistik, dan (b) intervensi negara dalam pasar. Untuk melegitimasi intervensi negara yang secara esensial kontradiktif dengan kapitalisme liberal, maka menurut Habermas, dilakukan repolitisasi massa, sebagai kebalikan dari depolitisasi massa dalam masyarakat kapitalis liberal. Upaya ini terwujud dalam sistem demokrasi formal.

3. Tiga Asumsi Kapitalisme Menurut Ayn Rand

Ayn Rand dalam *Capitalism* (1970) menyebutkan tiga asumsi dasar kapitalisme, yaitu: (a) kebebasan individu, (b) kepentingan diri (selfishness), dan (c) pasar bebas. Menurut Rand, kebebasan individu merupakan tiang pokok kapitalisme, karena dengan pengakuan hak alami tersebut individu bebas berpikir, berkarya dan berproduksi untuk keberlangsungan hidupnya. Pada gilirannya, pengakuan institusi hak individu memungkinkan individu untuk memenuhi kepentingan dirinya.

Menurut Rand, manusia hidup pertama-tama untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain. Rand menolak keras *kolektivisme, altruisme, mistisisme.* Konsep dasar bebas Rand merupakan aplikasi sosial dan pandangan epistemologisnya yang natural mekanistik. Terpengaruh oleh gagasan *"the invisible hand"* dari Smith, pasar bebas dilihat oleh Rand sebagai proses yang senantiasa berkembang dan selalu menuntut yang terbaik atau paling rasional. Smith pernah berkata: *"...free marker forces is allowed to balance equitably the distribution of wealth"*. (Robert Lerner, 1988).

4. Sistem Perekonomian/ Tata Ekonomi Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

5. Teori Dasar Ekonomi-Kapitalis

Membincarakan dasar teori ekonomi kapitalisme, sosok Adam Smith dengan buku termasyhurnya, *The Wealth of Nations,* dapat disebut sebagai Bapak Kapitalisme. Dalam membahas teori dasar kapitalisme adalah dengan mengetahui ciri dasar sistem tersebut, yaitu pemaksimalan keuntungan individu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimaksudkan membantu kepentingan publik.

Makna kapitalisme untuk kepentingan publik tersebut, oleh Adam Smith diilustrasikan dengan sangat jelas: "Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging, si pemasak bir atau si tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk memajukan kepentingan publik dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan ia kejar adalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Di sini ia dituntun oleh tangan-tangan yang tak terlihat (*the invisible hands)* untuk mengejar yang bukan bagian dari kehendak sendiri. Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti suatu yang lebih buruk dari masyarakat. Dengan mengejar kepentingan sendiri, ia kerap kali memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan jika ia sungguh-sungguh bermaksud memajukannya. Saya tidak pernah menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi kepentingan publik".[428] Penjelasan ilustratif tersebut sebenarnya tidak bermaksud lain kecuali kehendak untuk memaknai kapitalisme dengan memadukan kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan publik di pihak yang lain. Dari premis itu ialah bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi secara individu. Meskipun demikian, orientasi individu tetap merupakan tahapan awal bagi kepentingan publik atau sosial. Motif sosial yang tersembunyi (*hidden social motive)* yang disebut Smith sebagai *the invisible hands.*

Kehendak untuk memadukan kepentingan privat dan publik ini selanjutnya dijelaskan bahwa setiap manusia, dengan demikian, dipimpin langsung oleh kepentingan dan tindak tanduk ekonominya. Manusia yang bersangkutanlah yang mengetahui apa kepentingan mereka sesungguhnya. Oleh sebab itu, dialah yang dapat memenuhi kepentingan dengan sebaik-baiknya. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan kepentingan bersama, tetapi mereka berfikir bahwa kepentingan bersama ini akan dapat diperhatikan dengan sebaik-baiknya pula apabila setiap individu mendapat kesempatan untuk memenuhi, memuaskan, dan mengekspresikan kepentingannya masing-masing tanpa restriksi.

[428] Premis ini di kemukakan Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* pendahuluan dan catatan pinggir oleh Edwin Cannan, New York: The Modern Library, 1973, hlm. 14, 423.

Setelah ia menulis *The Wealth of Nations,* Smith sudah mengemukakan dalam *Theory of Moral Sentiments* sebagai dasar filsafat teori ekonominya. Ia menentang dengan tegas pendapat de Mandeville bahwa *privet vice makes public benevit.* De Mandeville memandang bahwa kemewahan atau pengejaran keuntungan ekonomi itu dosa, meski dosa itu sendiri diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Smith justru melihat sebaliknya, dengan meniru gurunya Francis Hutcheson, ia mengatakan bahwa kebajikan adalah pengendali nafsu dan bukan sebuah antipati yang mutlak. Dalam *The Wealth of Nations* sendiri, Smith pernah mengatakan bahwa: *"The nature and causes of the wealth of nations is what is properly called political economy"*. Ini menunjukkan bahwa nama bukunya saja sudah cukup untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang menjadi tujuan dari aktifitas ekonomi.[429]

Mempelajari paradigma dan ide dasar kapitalisme juga bisa dilakukan dengan membuat interpretasi-interpretasi karya Smith seperti yang banyak dilakukan. Kita memahami bahwa *masterpiece* Smith tersebut sesungguhnya hanya meletakkan gagasan-gagasan cemerlangnya secara umum saja. Sjahrir (1995) menerjemahkan *The Wealth of Nations* yang membidani lahirnya teori kapitalisme itu dengan membuat rincian sederhana seperti, apa yang harus diproduksi dan dialokasikan, bagaimana cara memproduksi dan mengalokasikan sumber daya, serta bagaimana cara mendistribusikan sumber daya dan hasil produksi.[430]

Pemahaman lain tentang ide dasar kapitalisme juga diberikan oleh Max Weber[431]. Ia mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem produksi komoditi berdasarkan kerja berupah untuk dijual dan diperdagangkan guna mencari keuntungan. Ciri produksi berdasarkan upah buruh itu merupakan karakter mendasar bagi kapitalisme. Bagi Weber, ciri kapitalisme yang lebih mendasar lagi adalah pada sistem pertukaran di pasar. Sistem di pasar ini menimbulkan konsekuensi logis berupa rasionalisasi yang mengacu pada bagaimana cara meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, bagaimana melakukan akumulasi kapital secara terus menerus. Akumulasi kapital itu dimaksudkan untuk melakukan produksi barang atau jasa yang lebih menguntungkan (*more profitable).* Keuntungan inilah yang secara dominan bagi rasionalitas tekhnologi.

Sedangkan bagi Marx, kapitalisme tidak didefinisikan oleh motif atau orientasi kaum kapitalis. Apapun motif yang mereka sadari, mereka sebenarnya didorong oleh logika sistem ekonomi untuk memupuk modal. Kapitalisme bagi Marx suatu bentuk masyarakat kelas yang distrukturasikan dengan cara khusus di mana manusia diorganisasikan untuk produksi kebutuhan hidup.[432]

Sejalan dengan zaman, kapitalisme terus berkembang, bergerak dan beradaptasi dengan sejarah. Jorge Larrain mengemukakan, "Kapitalisme dicirikan oleh dominasi obyek atas subyek, modal atas pekerja, kondisi produksi atas produsen, buruh mati atas buruh hidup. Bahkan menurut Marx, kapitalisme adalah hasil dari praktek reproduksi manusia. Marx menganalisa hal tersebut tidak hanya untuk mengetahui bagaimana sistem itu bekerja dan memproduksi diri sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan kondisi yang mampu menggantikannya".[433]

Kapitalisme yang dibuat oleh Lorens Bagus, berasal dari bahasa Inggris, *capitalism* atau kata latin, *caput* yang berarti kepala. Kapitalisme itu sendiri adalah sistem perekonomian yang menekankan peranan kapital atau modal.[434] Poin-poin penting yang bisa dilihat dan biasa digunakan untuk mengartikan kapitalisme adalah: *Pertama*, kapitalisme adalah ungkapan kapitalisme klasik yang dikaitkan dengan apa yang dimaksud oleh Adam Smith sebagai permainan pasar yang memiliki aturan sendiri. Ia yakin bahwa dengan kompetisi, pekerjaan dari tangan yang tidak kelihatan akan menaikkan harga pada tingkat alamiah dan mendorong tenaga kerja atau modal mengalami pergeseran dari perusahaan yang kurang menguntungkan. Ini berarti kapitalisme merupakan usaha-usaha kompetitif manusia yang akan dengan sendirinya berubah menjadi kepentingan bersama atau kesejahteraan sosial (*social welfare). Kedua*, kapitalisme merupakan ungkapan Prancis *laissez-faire, laissez-passer,* yang berarti 'semaunya', yang dilekatkan sebagai ungkapan penyifat. Ungkapan *laissez-faire* menekankan sebuah pandangan bahwa dalam sistem ini, kepentingan ekonomi dibiarkan berjalan sendiri agar perkembangan berlangsung tanpa pengendalian Negara dan dengan regulasi seminimal mungkin. *Ketiga,* kapitalisme adalah ungkapan Max Weber bahwa ada keterkaitan antara bangkitnya kapitalisme dengan protestanisme. Kapitalisme merupakan bentuk sekuler dari penekanan protestanisme pada Individualisme dan keharusan mengusahakan keselamatan sendiri.

---

[429] L. J. Zimmerman, *Sejarah Pendapat-pendapat tentang Ekonomi*, Bandung: N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, 'S-Gravenhage, 1995, hlm. 42-43. Edisi Indonesia dikerjakan oleh K. Siagian. Periksa buku aslinya yang berjudul *Geschiedenis Van Het Economisch Denken.*

[430] Sjahrir, *Formasi Mikro-Makro ekonomi Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 113-114.

[431] Max Weber, *The Protestant ethic of Spirit Capitalism,* New York, Scribner, 1958, Edisi Inggrisnya dikerjakan oleh Talcot Parson dengan Pengantar RH Tawney.

[432] Pada tahun 1887, muncullah *Das Capital*-nya Marx yang amat termashur itu. Marx mengatakan bahwa kapitalisme itu mempunyai ciri mutlak, yakni borjuis dan eksploitasi. Oleh karenanya, begitu Marx, dengan revolusi kekerasanlah pemerintah sosialis harus didirikan. Demi terjaminnya stabilitas sistem ini, maka ia harus dijaga oleh sistem kepemimpinan yang diktator proletariat.

[433] Lihat Jorge Larrain, *The Concept of Ideology*, Forteword by Tom Bottomore, First Published, Australia: Hotchinson Publishing Group, 1979, versi Indonesia oleh Ngatawi al Zastrouw (editor) dan Ryadi Gunawan (penerjemah), Yogyakarta: LKPSM, 1997, hlm. 55.

[434] Lorens Bagus, *Kamus Filsafat,* Jakarta, Gramedia, 1996, hlm.391.

6. Akar Historis Kapitalisme

Sistem perekonomian kapitalisme muncul dan semakin dominan sejak peralihan zaman feodal ke zaman modern. Kapitalisme seperti temuan Karl Marx menjadi sistem yang dipraktekkan di dunia bermula di penghujung abad XIV dan awal abad XV. Kapitalisme sebagai sistem perekonomian dunia terkait erat dengan kolonialisme. Pada zaman kolonialisme ini akumulasi modal yang terkonsentrasi di Eropa (Inggris) didistribusikan ke penjuru dunia, yang menghadirkan segenap kemiskinan di wilayah jajahannya.

Kelahiran kapitalisme ini dibidani oleh tiga tokoh besar, yaitu Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik, Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik dan Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonominya. Martin Luther yang memberi dasar-dasar teosofik adalah seorang Jerman yang melakukan gerakan monumentalnya, 31 Oktober 1571 dengan menempelkan tulisan protesnya di seluruh penjuru Roma. Ia tidak menerima kenyataan praktik pengampunan dosa yang diberlakukan gereja Roma. Kemudian ia meletakkan ajaran dasarnya, yaitu: "Manusia menurut kodratnya menjadi suram karena dosa-dosanya dan semata-mata lewat perbuatan dan karya yang lebih baik saja mereka dapat menyelamatkan dirinya dari kutukan abadi". Sedangkan bagi Benjamin Franklin yang memberi dasar-dasar filosofik, mengajak orang untuk bekerja keras mengakumulasi modal atas usahanya sendiri. Kemudian Franklin mengamanatkan: "Waktu adalah Uang". Bagi Adam Smith yang memberikan dasar-dasar ekonominya dan tarcantum dalam buku *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations,* Adam Smith lebih mengkongkretkan spirit kapitalismenya dalam sebuah konsep sebagai mekanisme pasar. Basis fologisnya adalah *laissez-faire, laissez-passer.* Ia mengatakan bahwa barang langka akan menyebabkan harga barang tersebut menjadi mahal sehingga menjadi sulit didapatkan terutama oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Tetapi menurut Smith bahwa yang harus dilihat adalah perilaku produsen. Ketika harga barang mahal, maka keuntungan akan meningkat. Ketika keuntungan yang dijanjikan atas barang tersebut tinggi, maka banyak produsen yang memproduksinya. Sehingga dengan demikian kelangkaan barang tersebut akan terpenuhi dan menjadi murah dan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Sehingga masalah yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan oleh *the invisible hands.*

Banyak pakar memberikan penjelasan bahwa kapitalisme sebagai sistem perekonomian dunia baru dimulai sejak abad XVI. Menurut Dudley Dillard pada zaman kuno sebenarnya sudah terdapat model-model ekonomi yang merupakan cikal-bakal kapitalisme. Bagi Dillard, kapitalisme tidak saja dipahami sebagai sistem ekonomi pasca abad XVI. Kantong-kantong kapitalisme sebagai cikal-bakal dan ruh kapitalisme justru mulai berkembang diakhir abad pertengahan. Dillard membagi urutan perkembangan kapitalisme menjadi tiga tahapan.[435] Secara kronologis dalam tahapan sejarah perkembangannya: Kapitalisme Awal, Kapitalisme Klasik dan Kapitalisme Lanjut.

a. Kapitalisme Awal (1500-1750).

Kapitalisme untuk periode ini masih mendasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok yang ditandai dengan kehadiran industri sandang di Inggris sejak abad XIV sampai abad XVIII. Meski industri sandang tersebut masih menggunakan mesin pemintal yang sangat sederhana, pada gilirannya mampu meningkatkan apa yang disebut sebagai surplus sosial. Seperti dijelaskan Dillar, dalam prakteknya industri sandang mengahadapi banyak problem dan kesulitan. Namun demikian, berbagai kendala tersebut tak mampu menjadi penghalang bagi kesuksesan industri tersebut. Bahkan di beberapa wilayah pelosok Inggris, industri tersebut terus berkembang pesat selama kurun waktu abad XVI sampai XVII. Surplus sosial yang didapatkan terus menerus secara produktif ternyata mampu menjadikan kapitalisme mampu bersaing dengan sistem ekonomi sebelumnya. Kelebihan itu didayagunakan untuk usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi dan variasi untuk kekayaan yang lain.

Perluasan demi perluasan dengan argumentasi produktifitas yang dilakukan selanjutnya mengahdirkan fenomena dramatis dengan munculnya kolonisasi atau imperealisme ke daerah-daerah lain yang tak memiliki keseimbangan produksi. Lebih lanjut pada informasi yang sama, Dillar juga pernah menguraikan bahwa perkembangan kapitalisme pada tahapan ini didukung oleh tiga faktor yang sangat penting yaitu: (1) dukungan agama dengan menanamkan sikap dan karakter kerja keras dan ajuran untuk hidup hemat, (2) hadirnya logam mulia terhadap distribusi pendapatan atas upah, laba dan sewa, serta (3) keikutsertaan Negara dalam membantu membentuk modal untuk berusaha.

Studi Russel, *Modes of Productions individu Wolrd History* London and New York, Routledge, 1988, menjelaskan bahwa kapitalisme pada fase ini tidak bisa tidak menyebut bahwa Eropa dan Inggris abad ke-12 adalah sebagai lokasi awal perkembangan kapitalisme. Russel menunjuk wilayah perkotaan untuk mencontohkan bahwa saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi mereka dalam suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula mereka hanya menjual barang kepada teman sesama saudagar perjalanan. Kegiatan ini kemudian berkembang menjadi perdagangan publik.

[435] Sudono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Makalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1985, hlm. 10.

b. Kapitalisme Klasik (1750-1914).

Pada fase ini terjadi pergeseran perilaku para kapitalis yang semula hanya perdagangan publik, ke wilayah yang mempunyai jangkauan lebih luas yaitu industri. Transformasi dari dominasi modal perdagangan ke dominasi modal industri yang seperti itu merupakan ciri Revolusi Industri di Inggris. Perubahan dalam cara menentukan pilihan tekhnologi dan cara berorganisasi berhasil memindahkan industri dari pedesaan ke sentra-sentra perdagangan lama di perkotaan selama Revolusi Industri. Akumulasi kapital yang terus menerus membengkak selama dua atau tiga abad mulai menunjukkan hasil yang baik pada abad XVIII. Penerapan praktis dari ilmu pengetahuan teknis yang tumbuh selama berabad-abad dapat sedikit demi sedikit dilakukan. Kapitalisme mulai menjadi penggerak bagi perubahan tehnologi karena akumulasi modal memungkinkan penggunaan berbagai inovasi.

Tepat pada fase ini kapitalisme mulai meletakkan dasarnya yaitu *laissez-faire, laissez-passer* sebagai doktrin mutlak Adam Smith. Dillar menerangkan bahwa perkembangan kapitalisme pada fase kedua ini semata-mata menggunakan argumentasi ekonomis. Perkembangan ini tentu saja menjadi parameter keberhasilan bagi kaum borjuis dalam struktur sosial masyarakat. Kesuksesan ekonomis berimbas pada kesuksesan di bidang politik, yaitu hubungan antara kapitalis dan Negara. Proses ini menguntungkan kapitalisme terutama dalam penentuan gaya eksplorasi, eksploitasi dan perluasan daerah kekuasaan sebagai lahan distribusi produksi. Periode kapitalisme klasik erat kaitannya dengan karya Adam Smith *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth Nations* (1776) melalaui karya ini terdapat analisa bahwa kapitalisme kuno sudah berakhir dan bergeser menjadi kapitalisme klasik.

c. Kapitalisme Lanjut (Pasca 1914).

Kapitalisme lanjut dijelaskan mulai berkembang sejak abad XIX, tepatnya tahun 1914, Perang Dunia I sebagai momentum utama. Abad XX ditandai oleh perkembangan kapitalisme yang sudah tidak lagi bisa disebut sebagai kapitalisme tradisional. Kapitalisme fase lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh tiga momentum. *Pertama,* pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. *Kedua,* bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa sebagai ekses dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. *Ketiga,* Revolusi Bolzhevik Rusia yang berhasrat meluluhlantakkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan kapital secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan kemapanan agama. Dari sana kemudian muncul ideologi tandingan, yaitu komunisme.

Kapitalisme abad XX berhasil tampil meliuk-liuk dengan *performance* yang selalu bergerak mengadaptasikan kebutuhan umat manusia pada zaman dan situasi lingkungannya. Bagi Daniel Bell,[436] fleksibilitas ini sukses membawa kapitalisme sebagai akhir ideologi *(The End of Ideology)* yang mengantarkan umat manusia tidak hanya menuju gerbang yang penuh pesona ekstasi melainkan juga pada gerbang yang berpeluang besar untuk kehancuran umat manusia.

Budiman (1997: 86) menyebut bahwa kapitalisme seolah menjadi pesolek tanpa tanding dalam merebut perhatian para teoritisi sosial dunia. Salah satu hal yang membuat kapitalisme bertahan adalah kelenturan produk yang ditawarkan. Produk-produk yang disediakan bersifat adaptif dengan zamannya. Citra-citra yang disodorkan tidak pernah dibiarkan begitu saja dan menjadi sebentuk kesombongan ideologis yang menjenuhkan, melainkan disesuaikan dengan berbagai desakan pluralisasi wacana kehidupan. Kapitalisme berhasil tetap bertahan karena ia mampu menghadirkan demokrasi ekonomi dan politik sebagai bentuk keinginan umat manusia yang paling mutakhir, tapi sebatas citra, demokrasi yang semu. Produk kapitalisme yang menggairahkan tersebut dipandang Guy Debord sebagai *trap*, bahwa saat ini kapitalisme sedang menyiapkan perangkat kebudayaan yang mengantarkan umat manusia pada kondisi komoditi yang final dan melelahkan.[437]

Produk lain yang ditunjukkan oleh kapitalisme lanjut adalah sedemikian menjamurnya korporasi-korporasi modern. Korporasi sudah tidak lagi bergerak di bidang industri manufaktur, melainkan jasa dan informasi. Ia berusaha mendominasi dunia dengan kecanggihan tekhnologi serta orientasi menghadapi ekonomi global. Ia lazim berbentuk MNC/TNC *(MultiNational Corporation/Trans National Corporation)*. Kehadirannya semakin mempertegas bahwa pelaku aktifitas ekonomi sesungguhnya bukanlah institusi Negara, melainkan para pengusaha bermodal besar. Sebab hanya dengan modal mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi apa dan di mana saja.

Dengan semakin pentingnya modal, peranan Negara menjadi tereduksi, tapi juga hilang sama sekali. Negara hanya sekedar menjadi aktor pelengkap *(Complement Actor)* saja dalam percaturan ekonomi

---

[436] Penjelasan ini sekaligus mengawali kajian tentang Kapitalisme fase lanjut atau kapitalisme mutakhir seperti yang diratapi oleh Daniel Bell. Beberapa kajian dalam poin ini sepenuhnya mengacu ke sana. Untuk memperjelas keterangan ini periksa karya Bell seperti (1) *The End of Ideology,* New York: Free Press, 1960; (2) *The Coming of Post Industrial Society*, New York: Penguin Books Edition, 1973; (3) *The Cultural Contradictions of Capitalism,* New York: Basic Books, 1976. Sedangkan untuk edisi Indonesia, karya Bell ini dapat diperhatikan di Y.B. Mangunwijaya (ed.), *Tekhnologi dan Dampak Lingkungannya,* Volume II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985; atau Daniel Bell dan Irving Kristol (ed.), *Model dan Realita di Dalam Wacana Ekonomi, Dalam Krisis Teori Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1988.

[437] Guy Debord, *The Society of The Spectacle*, seperti dikutip oleh Fredric Jameson, *Postmodernism or The Cultural of The Late Capitalism*, London, Verso, 1990, hlm. 8.

dunia, meski dalam beberapa kasus peran Negara tetap dibutuhkan sebagai fasilitator untuk mendukung roda ekonomi yang sedang diputar kapitalis. Inilah yang dinubuat Galbraith dengan mengatakan bahwa korporasi modern menerapkan kekuasaan melalui pemerintahan. Para kapitalis ini tetap membutuhkan keterlibatan Negara untuk memfasilitasi setiap produk yang dipasarkan. Hubungan simbiosis mutualisme ini selanjutnya menjadi karakter dasar dari kapitalisme lanjut. Peristiwa ini menyebabkan para pakar menyebut bahwa kapitalisme lanjut adalah kapitalisme monopoli *(monopoly capitalism)* atau kapitalisme kroni *(crony capitalism).*[438]

Korporasi modern dan Negara menjalin hubungan yang didasarkan pada distribusi kekuasaan dan profit. Hubungan yang berkembang antara korporasi modern dan birokrasi publik, seperti kapitalis yang membuat mobil dan Negara yang membangun jalan raya, kapitalis yang membuat pesawat tempur dengan Negara yang mengendalikan Departemen Udara dan sebagainya.[439] Selain hal itu, apa yang diungkap Galbraith sebagai kapitalisme lanjut adalah pemfungsian institusi Negara sebagai jaminan kontrol dari doktrin mekanisme pasar. Bahkan para kapitalis dengan sengaja berani membiayai dan merekayasa Negara. Tujuannya adalah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya disintegrasi sistem soaial dalam struktur masyarakat yang diakibatkan oleh kontradiksi-kontradisi dalam tubuh kapitalisme itu sendiri. Asumsi ini diperkuat oleh fakta pertumbuhan industri-industri kapitalisme hingga menciptakan sindroma korporasi-korporasi modern ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kekuasaan politik.

Dalam hal ini Galbraith memperkuat argumentasinya dengan uraian yang mendalam tentang keterkaitan Negara dalam dimensi politis dan kapitalis dalam dimensi ekonomis. Semakin menguatnya campur tangan institusi Negara ke dalam aktifitas-aktifitas ekonomi acap mendisfungsionalisasikan fungsi dari Negara itu sendiri. Hal itu bisa ditunjukkan dengan merosotnya atensi Negara yang bersangkutan terhadap persoalan-persoalan lain di luar masalah teknis administratif.

Sementara menurut pandangan Clauss Offe dalam Habermas, sejauh kegiatan Negara diarahkan pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, politik selalu menampilkan sifat negatif yang khas. Politik diarahkan untuk mengatasi disfungsionalitas dan menghindari resiko-resiko yang membahayakan sistem. Politik tidak diupayakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan, melainkan pada pemecahan masalah-masalah teknis. Kegiatan Negara dibatasi hanya pada persoalan-persoalan teknis yang bisa dipecahkan secara administratif sehingga dimensi praksisnya hilang.[440] Hubungan faktor politik-kapitalis dengan melakukan kolaborasi adalah cara pandang Keynes, dan persoalan itu susah untuk dihindarkan. Keynes sangat tertarik pada keseluruhan adegan sosial dan politik yang diproduksi secara bersamaan. Ia memandang teori ekonomi sebagai suatu alat kebijakan politik. Ia membelokkan apa yang disebut metode ilmu ekonomi klasik yang bebas nilai untuk melayani tujuan dan target mental, dan untuk itu ia membuat ilmu ekonomi menjadi persoalan politik dengan cara yang berbeda.

Keterkaitan Negara-kapitalis yang ditunjukkan dengan bergesernya mekanisme kapitalisme bisa dipahami dari Negara Amerika. Yang terjadi di Amerika dewasa ini bukanlah paham kapitalisme yang asli yang menganut paham *laissez-faire, laissez-passer*, melainkan suatu sistem ekonomi yang tetap menggunakan prinsip dasar kapitalisme yang disesuaikan dengan berbagai rambu hukum yang membatasi penguasaan *resaources* dan konsumsi yang berlebihan, baik secara individual maupun pada tingkat perusahaan.[441] Nilai-nilai yang berlaku pada sistem kapitalisme Amerika selalu mempertimbangkan beberapa aspek.

Pertama, asas kebebasan *(freedom)*, dengan pengertian, bebas berkonsumsi dan berinvestasi *(free entry individu consumption and investment)* serta pembatasan investasi pemerintah sekaligus mengikhtiarkan model politik yang demokratis. *Kedua,* asas keseimbangan *(equality)*, dengan pengertian, adanya difusi antara kekuatan politik dan ekonomi; adanya *bargaining power* yang sama untuk produsen dan konsumen serta adanya kesempatan yang sama sekaligus upaya untuk menciptakan pemerataan. *Ketiga,* asas keadilan *(fairness)*, dengan pengertian, sebuah upaya untuk menghindari praktik yang tidak adil seperti adanya upah buruh yang tidak memenuhi standar; hubungan tuan dan majikan yang eksploitatif dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap praktek ekonomi harus dilandasi dengan sikap yang penuh dengan kejujuran dan keterbukaan *(full honesty and disclosure). Keempat,* asas kesejahteraan *(welfare),* dengan pengertian, adanya pertimbangan efisiensi alokasi dan produksi. Parameter kesejahteraan bisa diketahui melalui pengawasan pemerintah terhadap stabilitas harga serta upaya untuk menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang bersifat *full employment.* Kesehatan dan keselamatan lingkungan hidup juga mendapat perhatian yang besar. *Kelima,* asas pertumbuhan berkesinambungan *(sustainable growth)* yang

---

[438] Kapitalisme monopoli sebagai bentuk dari kapitalisme fase lanjut seringkali diberi pengertian yang merujuk pada peran penting dari kolaborasi di tingkat birokrat Negara dan pengusaha kapitalis untuk menguasai lahan produksi yang ditujukan pada kepentingan-kepentingan publik.

[439] Lihat John Kenneth Galbraith, *The New Industrial State*, New York: Mentor Book Paperback Edition, 1972, hlm. 258. Periksa juga Budiman, *Op. Cit.*

[440] Jurgen Hebermas, *Ilmu dan Tekhnologi Sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 76-77.

[441] Dalam banyak hal, pembahasan kapitalisme fase lanjut tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pembahasan tentang sistem ekonomi kapitalisme yang ada di Amerika. Sebab seperti yang sudah dijelaskan terdahulu bahwa salah satu ciri pokok yang mendasari kapitalisme fase lanjut adalah pergeseran modal dari kapitalisme klasik yang didominasi oleh Negara-negara Eropa menuju kapitalisme Amerika. Posisi Amerika sebagai pusat perdagangan dunia *(world trade center)*, dengan demikian, bisa dijadikan referensi dan parameter perkembangan kapitalisme global selanjutnya.

indikasinya adalah pertumbuhan pendapatan riil dan kemajuan tekhnologi. Ada beberapa kebijaksanaan pemerintah Amerika yang menjadi prioritas dalam menjamin kebesaran kapitalisme. Di antaranya adalah kebijaksanaan yang menjamin terciptanya kompetisi seperti terciptanya UU *Anti Trust (Sherman Act and Clayton Act)*. Tujuannya untuk mencegah persaingan yang tidak sehat diantara pihak yang bersaing. Peraturan ini secara teknis bertujuan untuk menjamin kebebasan dan keamanan dalam berinvestasi *(free exit and entry)*. Kemudian kebijaksanaan yang mengatur ke mana arah kompetisi digerakkan. Pengaturan-pengaturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dan produsen. Hal itu bisa dilakukan dengan menetapkan etika periklanan dan standarisasi barang-barang dari segi kualitas maupun kuantitas. Perlindungan merk dagang dan hak cipta juga mendapatkan perhatian yang cukup serius. Selain itu, adanya kebijaksanaan yang menjadi jaminan bagi distribusi pendapatan, yakni melalui pajak. Pajak bisa difungsikan sebagai sarana pemerataan, insentif serta regulator untuk mempengaruhi alokasi produksi maupun konsumsi.

Yang penting lagi adalah adanya kebijaksanaan yang mengatur *public utility*. Ide dasar kapitalisme klasik *laissez-faire, laissez passer* dan jargon *the invisible hand* merupakan asas fundamental yang terus-menerus diperbaiki dan digunakan untuk mencirikan kapitalisme. Mereka berpandangan bahwa teori ekonomi secara jelas menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak akan mampu menyelesaikan proses alokasi barang-barang publik seperti hukum, pertahanan dan lingkungan. Padahal barang-barang ini merupakan sesuatu yang vital bagi terjaminnya hidup manusia. Jika mekanisme pasar dibiarkan dengan sendirinya untuk menentukan alokasi barang-barang publiknya, maka penyediaannya akan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan permintaan masyarakat *(socially desirealible)*. Karenanya diperlukan peranan pemerintah untuk menyediakannya. Tindakan ini menjamin produksi barang-barang kebutuhan dasar *(merit goods)* diproduksi pada tingkat optimal secara sosial.[442]

Suasana lain dari kapitalisme lanjut adalah kompetisi *(competition),* dan kompetisi dalam kapitalisme Amerika merupakan poin penting dari buku *The New Industrial State* (1971) yang ditulis Galbraith. Menurutnya, dalam ilmu ekonomi klasik persaingan adalah banyaknya penjual yang memperoleh bagian yang kecil dari pasaran. Galbraith kemudian mengatakan bahwa model persaingan klasik ini sebagian besar sudah lenyap karena banyak pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Galbraith juga mengatakan bahwa dalam perkembangan kapitalisme, timbul institusi yang berusaha mengimbangi kelas kapitalis, yang disebutnya sebagai kekuatan pengimbang *(countervailing power)*. Kekuatan tersebut bisa berupa lembaga konsumen yang mengontrol perilaku dan pengaruh produsen, himpunan buruh yang mengimbangi kekuatan kelas pemilik modal dan kelas manajer. Lembaga pelindung konsumen, pelindung alam serta organisasi-organisasi *volunteer* lain yang berusaha untuk mempertahankan sekaligus memperjuangkan kepentingan golongan lemah *(marginal)* dalam masyarakat, yang tentunya mayoritas. Deskripsi awal dengan menyebut Amerika sebagai pusat segala sesuatu untuk mengkaji kapitalisme lanjut harap dimaklumkan mengingat kita tidak bisa menolak bahwa Amerika adalah sentral kapitalisme dunia dari pasca perang dingin atau awal abad XIX sampai detik ini. Namun *sample* ini bukan serta merta ingin menunjukkan bahwa kapitalisme lanjut hanya terbatas *(limited)* seperti yang tercermin di Amerika.

Seorang sejarawan peranakan Jepang, Francis Fukuyama, yang kemudian tenar dengan karyanya, *The End of History and Last Man,* menyatakan bahwa demokrasi liberal dan kapitalisme Amerika merupakan titik akhir dari perkembangan ideologi manusia.[443] Fukuyama menjelaskan bahwa sejarah manusia ini sudah berhenti pada satu titik yang ekstrim, yakni kapitalisme. Karenanya akhir sejarah akan merupakan saat yang menyedihkan. Tatkala keberanian, semangat, imajinasi, idealisme dan humanisme mulai digantikan dengan perhitungan-perhitungan ekonomi yang rasional. Pada saat itu pula manusia akan terjebak pada pemecahan masalah teknis yang tidak ada habis-habisnya. Kapitalisme sibuk merancang kebutuhan konsumen yang bercita rasa melangit. Sehingga Galbraith dalam karya yang sama juga menuturkan bahwa selama paruh terakhir abad ini hampir tidak ada topik lain yang dibahas secara serius dan mendalam kecuali tentang masa depan kapitalisme *(The Future of Capitalism)*.[444]

Akumulasi modal sekarang tidak sekedar menjadi kebiasaan. Ia telah menjadi sebuah hukum, di balik nuansa ini, tersimpan keniscayaan akan adanya alienasi bagi mereka, para kelompok mayoritas seperti buruh, petani dan perempuan. Kita menyadari bahwa kapitalisme model baru menyimpan keniscayaan atas penindasan kelompok mayoritas. Segitiga konspirasi ala O'Donnel sampai hari ini masih relevan dalam menjelaskan mekanisme ketertindasan struktural rakyat. Secara empiris konspirasi itu dapat dilihat dari bagaimana kebijakan-kebijakan Negara terbentuk atas pengaruh kepentingan TNC.

---

[442] Ini semakin memperjelas bahwa teori mekanisme pasar tidak bisa dibiarkan sebebas apa yang sudah didoktrinkan dalam teori ekonomi kapitalisme klasik. Pemerintah atau Negara dibutuhkan kehadirannya dalam mengurusai bidang-bidang yang bersangkut-paut dengan kebutuhan publik seperti penjelasan di atas. Dengan demikian, hadirnya Negara sebagai wasit adalah berfungsi untuk mengatur pasar.

[443] Lihat Francis Fukuyama, *The End of History and Last Man*, London: Hamish Hamilton, 1992. bandingkan dengan pandangan-pandangan dalam literatur abad ke-19 yang dikenal sebagai abad ideologi *(the age of ideology)*. Bandingkan juga dengan literatur abad ke-20 yang dianggap sebagai abad: (1) Akhir Ideologi *(The End of Ideology)* karya sosiolog Daniel Bell, (2) Akhir Alam Semesta *(The End of Nature)* karya Paul MacKiben.

[444] Lihat Galbraith, *op. cit.*

Tiga pilar neo klasik, TNC/ MNC, World Bank/ IMF, dan WTO berjalan linier, sevisi, setujuan menuju kepentingan yang sama, yakni liberalisasi pasar. Di samping itu ketiga institusi itu adalah kekuatan terbesar dunia abad ini. Sehingga kita tidak pernah menemukan kebijakan internasional yang tanpa memuat kepentingan ketiganya. Kita memang bisa menyadari bahwa kapitalisme lanjut tidak hanya dipahami sesederhana itu. Jika hujatan terpedas hari ini pada kapitalisme diserangkan oleh kelompok Marx dengan asumsi konflik kelas, sesungguhnya saat ini kita juga menyaksikan bagaimana kapitalisme menghadapinya dengan dada terbuka. Cita-cita Marx yang tertuang dalam kata-kata msayarakat tanpa kelas, justru secara mengejutkan, bukan terjadi dalam masyarakat komunisme, melainkan dalam masyarakat kapitalisme. Konsep pilihan publik *(public choice)* yang mencoba mengagregasikan kebutuhan-kebutuhan individu berhadapan dengan Negara, justru pada akhirnya mampu menciptakan masyarakat tanpa kelas. Maka pada saat kapitalisme, dalam kaitannya dengan Negara, mampu memelihara Negara dengan mengupayakan *reinventing government*, bukan barang mustahil apabila masyarakat tanpa kelas adalah milik kapitalisme, bukan komunisme. Masyarakat tanpa kelas ternyata gagal dipraktekkan oleh komunisme. Barangkali inilah yang disebut sebagai akhir sejarah itu, *threshold capitalism.*

SOSIALISME

1. Pengertian Sosialisme

Sosialisme pada hakekatnya berpangkal pada kepercayaan diri manusia, melahirkan kepercayaan pula bahwa segala penderitaan dan kemelaratan yang dihadapi dapat diusahakan melenyapkannya.[445] Penderitaan dan kemelaratan yang diakibatkan pembajakan politik dan ekonomi dimana penguasa dan pengusaha dengan semangat liberal dan kapitalnya, memiliki kekuatan penuh mengatur kaum kebanyakan warga negara, dengan segala keserakahan yang didasarkan rasionalisme dan individualisme itu, mendorong sebagian orang mencari cara baru guna pemecahan masalah sosial tanpa harus dilakukan dengan kekerasan.

George Lansbury, pemimpin partai buruh, menulis dalam bukunya *My England* (1934), dijelaskan:

> “Sosialisme, berarti cinta kasih, kerjasama, dan persaudaraan dalam setiap masalah kemanusiaan merupakan satu-satunya perwujudan dari iman Kristiani. Saya sungguh yakinapakah orang itu tahu atau tidak, mereka yang setuju dan menerima persaingan dan pertarungan satu dengan yang lain sebagai jalan untuk memperoleh roti setiap hari, sungguh melakukan penghianatan dan tidak menjalankan kehendak Allah.”[446]

Sosialisme adalah sebuah masyarakat dimana kaum pekerja sendiri yang menguasai alat-alat produksi dan merencanakan ekonomi secara demokratik; dan semua ini secara internasional. Istilah “sosialisme” atau “sosialis” dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan: ideologi atau kelompok ideologi. sistem ekonomi. negara. Kata ini mulai digunakan paling tidak sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, pertama digunakan untuk mengacu kepada pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Prancis, digunakan untuk mengacu pada pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 dan kemudian oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam *l'Encyclopedie nouvelle*. Penggunaan kata sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda oleh berbagai kelompok, namun hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 dan ke-20, yang berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian, yang dengan sistem ekonomi, menurut mereka, dapat melayani masyarakat banyak, ketimbang hanya segelintir elite.

Sosialisme sebagai ideologi menurut penganut Marxisme (terutama Friedrich Engels), model dan gagasan sosialis dapat dirunut hingga ke awal sejarah manusia, sebagai sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Pada masa Pencerahan di abad ke-18, para pemikir dan penulis revolusioner seperti Marquis de Condorcet, Voltaire, Rousseau, Diderot, abbe de Mably, dan Morelly mengekspresikan ketidakpuasan berbagai lapisan masyarakat di Perancis. Kemudian Sistem Ekonomi dalam sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Berpijak pada konsep Marx tentang penghapuskan kepimilikan hak pribadi, prinsip ekonomi sosialisme menekankan agar status kepemilikan swasta dihapuskan dalam beberapa komoditi penting dan kepentingan masyarakat banyak, Seperti Air, Listrik, bahan pangan dll.

Sejumlah pemikir, pakar ekonomi dan sejarah, telah mengemukakan beberapa masalah yang berkaitan dengan teori sosialisme, termasuk di antara mereka adalah antara lain Milton Friedman, Ayn Rand, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, dan Joshua Muravchik. Kritik dan keberatan tentang sosialisme dapat dikelompokkan menjadi kategori berikut: Insentif, Harga, Keuntungan dan kerugian, Hak milik pribadi. Keuntungan dalam anutan sosialisme kekinian telah dimungkinkan. Berhubungan dalam keuangan dari suatu negara sosialis, untuk transaksi atas barang, walaupun bukan terhadap pertanian.

---

[445] Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat* (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 188.
[446] William Ebenstein & Edwin Fogelman, *Isme-isme Dewasa ini,* Edisi 9 (Jakarta: Erlangga, 1990) hlm. 220.

2. Sejarah Kelahiran Sosialisme

Setelah melebarnya sayap-sayap ideologi liberalisme dan kapitalisme, maka dunia telah tersebtuh ideologi ini dipenuhi dengan pragmatisme hidup, sikap individualistis, konsumeris, hedonisme, materialisme, dan sekulerisme. Ini telah menimbulkan masalah sosial sampai pada tingkat unit sosial terkecil, seperti melemahkan ikatan emosional dalam keluarga, disorientasi, disorganisasi sosial, pada skala yang besar timbulnya aliansi sosial sebab jauh dari agama dan kepentingan sosial dalam kehidupan sosiali dan ekonomi masyarakat. Lahirlah faham sosialisme. Mereka menentang individu sebagai dasar pribadi, juga kebebasan ekonomi yang perlu melibatkan negara. Faham sosialis mengusahakan indutri negara bukan semata untuk digunakan mencari keuntungan yang melebihi usaha keuntungan kapitalis yang meungkin berhasil, mungkin tida. Akan tetapi untuk penyelenggarakan industri yang lebih demokratis, bermanfaat dan bermartabat, penggunaan mesin yang lebih memperhatikan manusia dan penggunaan hasil kecerdasan manusia yang lebih bijak.[447] Lahirlah tokoh-tokoh sosialis, seperti St. Simon (1760-1825), Fourier (1837), Robert Owen (1771-1858), Louis Blane (1813-1882), Bakunin (1814-1876).

3. Sistem Politik Sosialisme

Sosialisme dengan demokrasi, memiliki hubungan yang sangat penting, ia menjadi bagian dari kebijakan sosialis. Sosialisme dalam konteks demokrasi memiliki tujuan dengan inti yang sama, yakni untuk lebih mewujudkan demokrasi dengan memperluas penerapan prinsip-prinsip demokrasi dari hal-hal yang bersifat politis sampai pada yang bersifat non-politis dalam masyarakat. Oleh sebab itu untuk mencapai cita-citanya, sosialis menggunakan cara-cara yang demokratis:

Pertama, sosialisme menolak terminologi proletariat yang menjadi bagian konsep komunisme. *Kedua,* kepemilikan alat-alat produksi oleh negara harus diusahakan secara perlahan-lahan atau secara bertahap. *Ketiga,* kaum sosialis menuntut pendirian umum yang demokratis bahwa pencabutan hak milik warga negara harus melalui proses hukum dan warga negara tersebut harus mendapat kompensasi. *Keempat,* kaum sosialis menolak pengendalian kekuasaan oleh sekelompok minoritas yang mengatasnamakan kekuatan revolusioner.[448] *Kelima,* tidak sependapat bahwa dalam demokrasi hanya ada dua pilihan antara liberalis-kapitalis dan komunisme. Partai-partai yang demokratis tidak menyibukkan dirinya untuk menyelesaikan perjuangan seribu tahun dalam sehari, melainkan mereka berusaha untuk memecahkan persoalan yang relatif dapat ditangani dan dihindarkan pemecahan kaku yang tidak dapat ditarik kembali.[449]

4. Sistem Ekonomi Sosialisme

Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya. Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pada dasarnya sosialisme mewarisi tujuan pokok yang sama dari kapitalisme, yakni melestarikan kesatuan faktor tenaga kerja dan pemilikan. Pada abad ke-17 dan ke-18, saat kapitalisme melewati tahap awal perkembangannya, kesatuan itu menjadi kenyataan. Inggris di zaman John Locke masih hidup dan Amerika di zaman Thomas Jefferson menyaksikan pertanian yang berukuran rata-rata, toko-toko,bengkel hanya dalam skala kecil keluarga saja. Tenaga kerja dan pemilik berada dalam keseiringan. Ancaman utama dalam kesatuan ini justru datang dari negara, yang berusaha untuk menetapkan dan mengatur.

Singkatnya negara memainkan peranan suatu badan yang berkuasa penuh dalam urusan ekonomi. Akan tetapi, tatkala ekonomi kapitalis mengalami kemajuan, tanggungjawab individu dan keluarga dalam urusan kepamilikan alat-alat produksi serta pengaturan tenaga kerja perlahan-lahan digantikan oleh sistem ekonomi dalam mana perusahaan besar mengambil alihfungsi-fungsi tersebut. Ketika bentuk usaha industri tumbuh semakin besar, tanggungjawab tenaga kerja semakin beralih ke tangan masyarakat, sementara pemilikan tetap secara perorangan.[450]

Isu yang dalam mengembangkan sosialisme di Eropa berkaitan erat dengan masalah ekonomi adalah: *Pertama,* pemerataan sosial, salah satu kekuatan pendorong, yakni penentangannya terhadap ketimpangan kelas sosial yang diterima oleh negara Eropa (maupun bagian dunia yang lain) dari zaman feodal dimasa lalu.

Kedua, penghapusan kemiskinan. Yakni kemiskinan sebagai akibat dari akumulasi sistem kapitalisme, maka bagi sosialisme; 'tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi, bahwa alat produksi harus menjadi kepemilikan komunal'. Dengan menekankan solidaritas sosial dan kerjasama sebagai sarana

---

[447] Mas'ud An Nadwi, *Islam dan Sosialisme* (Bandung: Risalah, 1983) hlm. 32-36.

[448] Clement Attle, Perdana Menteri Inggris tahun 1945-1951, juga seorang Pemimpin Partai Buruh 1935-1955, menulis dalam buku *The Labour Party in Perspective* (1937) bahwa kekuatan partainya bukan bergantung pada kepemimpinan, melainkan kualitas rakyat jelata.

[449] William Ebenstein & Edwin Fogelman, *op. cit.,* hlm. 210.

[450] *Ibid.*, 217-218.

untuk mengembangkan ekonomi dan membangun suatu jaringan ikatan sosial dan ekonomi yang kuat guna membantu membentuk kepaduan nasioal. Karena, begitu jauhnya kenyataan ekonomi dan politis telah melahirkan kegagalan.[451]

5. Prinsip-prinsip Sosialisme

Sosialisme memiliki prinsip-prinsip dalam menegakkan suatu pemerintahan dan negara dalam mewujudkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ini meliputi masalah agama, idealisme etis dan estetis, empirisme febian dan liberalisme. Prinsip-prinsip ideologi sosialisme menurut Sydney Webb sebagaimana dalam bukunya *Fabian Esseys* (1889) itu, menganggap sosialisme sebagai hasil yang tidak dapat diletakkan dari keberhasilan demokrasi dengan kepastian yang datang secara bertahap (*inevitability of gradualness*) yang berbeda dengan pandangan Karl Marx tentang kepastian revolusi.[452] Prinsip-prinsip ideologi sosialisme adalah sebagai berikut:

Pertama, masalah agama. Dalam pembentukan gerakan sosialis pengaruh agama merupakan yang paling kuat. Menemukan berbagai hal yang berhubungan dengan doktrin keagamaan, sosial dan ekonomi serta banyaknya jumlah sekte keagamaan telah membuktikan betapa adanya berbagai ajaran yang dipegangnya. Hal ini tampak terlihat di Inggris pada masa itu menurut Attle.[453] Hal ini karena dulu ada gerakan Kristiani Sosialis yang beranggapan bahwa agama itu harus disosialisasikan dan sosialisme harus dikristianikan.[454]

Kedua, idealisme etis dan estetis. Ini menjadi sumber sosialisme di Inggris, John Ruskin dan William Morris mengungkapkan ini bukan suatu program politik dan atau ekonomi, tetapi merupakan pemberontakan melawan kemelaratan, kebosanan, dan kemiskinan hidup dibawah kapitalisme industri. Sebagaimana kedua tokoh itu, Charles Dickens dan Thomas Carlyle serta pengarang lainnya yang melihat pengaruh peradaban industri terhadap pribadi seseorang sebagai manusia. Pemberontakan etis dan estetis masa Inggris Victoria merusak rasa percaya diri yang tumbuh pada masa itu. Sebab keraguan itu, dirinya mendapatka banyak sosialis yang positif dapat dikembangkan mengenai langkah demi langkah.[455] Ini bukan merupakan program politik dan ekonomi, melainkan pemberontakan dari kehidupan yang kotor dan keadaan masyarakat yang miskin akibat kapitalis industri.[456]

Ketiga, empirisme fabian. Ini merupakan ciri gerakan sosialis Inggris yang paling khas. Masyarakat fabian didirikan pada tahun 1884, serta mengambil nama seorang Romawi, yakni Quintus Fabius Maximus Cunctator, si "penunda'. Moto awal dari masyarakat itu adalah 'Engkau harus menunggu saat yang tepat; kalau saat yang tepat itu tiba engkau harus melakukan serangan yang dahsyat, sebab jika tidak, penundaan yang engkau lakukan itu sia-sia dan tidak akan membawa hasil. Tokoh-tokoh dari kalangan ini antara lain George Bernand Shaw, Sydney dan Beatrice Webb, H.G. Wells dan Graham Walls, mereka bukan berasal dari kalangan miskin. Dalam hal politik menghendaki suatu perubahan masyarakat secara konstitusional. Perubahan itu jangan sampai melalui revolusi yang radikal dengan membalikkan struktur politik dengan cara paksa atau kekerasan. Prinsip bahwa tidak mungkin ada kemajuan kecuali kepada kelas menengah dan atas ditunjukkan bahwa tuntutan dasar pikiran serta politik sosialis tadi masuk akal dan bersifat adil.[457]

Keempat, liberalisme. Ini telah menjadi sumber yang semakin penting bagi sosialisme, terutama sejak Partai Liberal merosot peranannya, dan meningkatnya peran oleh Partai Buruh. Dalam sosialisme juga ada kecenderungan berorientasi pada negara, masa dan kolektivitas. Kedua kecenderungan itu masih Sunan Kalijaga menjadi seorang pribadi dan bukan menjadi seorang anggota dalam daftar nasional. Namun demikian, dalam 40 tahun terakhir semakin banyak orang Liberal yang menggabungkan diri dengan Partai Buruh.[458] Hal ini penting terutama setelah partai liberal terjadi tidak berarti banyak beralih ke partai buruh. Sebab dalam partai buruhlah, gagasan mereka dapat dikembangkan.[459]

Oleh sebab itu sosialisme sebagai bentuk kekuatan politik, sosial dan ekonomi sangat berpihak kepada tindakan populis dan untuk rakyat, ini dilakukan berupa pemberian kesempatan kerja, menghapus

---

[451] Lyman Tower Sargen, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer; Sebuah Analisis Komparatif* (Jakarta: Erlangga, 1987) hlm. 149.

[452] Mas'ud An Nadwi, *op. cit.,* hlm. 32-36.

[453] Adanya gerakan Sosialis Kristiani yang dipimpin oleh dua orang biarawan, yaitu Fredrick Maurice dan Charles Kingsley mencapai puncak kejayaannya dalam pertengahan abad kesembilan belas serta menjadi sumber penting untuk perkembangan organisasi kelas buruh serta sosialis kemudian. Prinsip yang menjadi pedoman bagi kalangan Sosialis Kristen adalah konsep yang menandaskan bahwa sosialisme harus dikristenkan dan Kristianitas harus disosialisasikan. Lihat dalam William Ebenstein & Edwin Fogelman, *op. cit.,* hlm. 219-220.

[454] Firdaus Syam, *op. cit.,* hlm. 50.

[455] William Ebenstein & Edwin Fogelman, *op. cit.,* hlm. 222-223.

[456] *Ibid*.

[457] Firdaus Syam, *op. cit.,* hlm. 50.

[458] Dalam pemilihan umum pasca perang yang diadakan pada tanggal 5 Juli 1945, partai buruh meraih 394 dari 640 kursi, dengan demikian untuk pertama kalinya dalam sejarah Inggris pemerintahan Partai Buruh dibentuk dengan mayoritas yang mantap di Majelis Rendah. Antara tahun 1900 sampai 1918, partai buruh secara resmi tidak terikat dengan sosialisme, meskipun mereka menghimpun banyak individu yang berhalauan sosialis. Pada tahun 1918, ketika partai itu mengambil sosialisme sebagai programnya, komitmennya kepada nasioalisasi industri hampir penuh. Partai buruh berubah secara drastis pandangannya dan mendorong nasionalisasi *hanya* kalau secara pragmatis telah terbukti bahwa pemilikan oleh negara akan mendatangkan lebih banyak manfaat bagi kemakmuran negara daripada pemilikan secara perorangan. Lihat dalam William Ebenstein & Edwin Fogelman, *op. cit.,* hlm. 223 & 229.

[459] Firdaus Syam, *op. cit.,* hlm. 50.

diskriminasi, memperjuangkan mengenai persamaan hak, memperjuangkan hak-hak pekerja, kerjasama serta menghapuskan persaingan dan mengatur mekanisme ekonomi untuk kepentingan seluruh rakyat.

6. Sosialisme Utopis

Sosialisme Utopis atau Sosialisme Utopia adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Para sosialis utopis tidak pernah benar-benar menggunakan ini untuk menyebut diri mereka; istilah "Sosialisme Utopis" awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis setelahnya, untuk menggambarkan awal kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotetis masa datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri dengan suatu cara dimana komunitas masyarakat seperti itu bisa diciptakan atau diperjuangkan.

Kata utopia sendiri diambil dari kisah pulau Utopia karangan Thomas Moore. Karena Sosialisme utopis ini lebih merupakan sebuah kategori yang luas dibanding sebuah gerakan politik yang spesifik, maka sebenarnya sulit untuk mendefinisikan secara tepat istilah ini. Merujuk kepada beberapa definisi, desinisi sosialisme utopis ini sebaiknya melihat para penulis yang menerbitkan tulisan-tulisan mereka pada masa antara Revolusi Perancis dan pertengahan 1930-an. Definisi lain mengatakan awal mula sosialisme utopis jauh lebih ke masa lalu, dengan mengambil contoh bahwa figur Yesus adalah salah satu diantara penganut sosialisme utopis. Walaupun memang terbuka kemungkinan siapapun yang hidup dalam waktu kapanpun dalam sejarah dapat disebut sebagai seorang sosialis utopis, istilah ini lebih sering dipakai terhadap para sosialis utopis yang hidup pada seperempat masa pertama abad 19. Sejak pertengahan abad 19 dan selanjutnya, cabang-cabang sosialisme yang lain jauh melebihi versi utopisnya, baik dalam perkembangan pemikirannya maupun jumlah penganutnya. Para sosialis utopis sangat penting dalam pembentukan pergerakan modern bagi komunitas intentional dan koperasi, techno komunisme.Istilah "sosialisme ilmiah" kadang digunakan oleh para penganut paham Marxisme untuk menguraikan versi sosialisme mereka, terutama untuk tujuan membedakannya dari Sosialisme Utopis dimana telah terdeskripsi dan idealistis (dalam beberapa hal mewakili suatu yang ideal) dan bukan ilmiah, yaitu, yang dibangun melalui pemikiran dan berdasarkan pada ilmu-ilmu sosial.

7. Pemikir Utama Sosialisme Utopis

Robert Owen (1771-1858) adalah seorang pelaku bisnis sukses yang menyumbangkan banyak laba dari bisnisnya demi peningkatan hidup karyawannya. Reputasi dia meningkat ketika dia mendirikan suatu pabrik tekstil di New Lanark, Skotlandia dan memperkenalkan waktu kerja lebih pendek, membangun sekolah untuk anak-anak dan merenovasi rumah-rumah tempat tinggal pegawainya. Ia juga merancang suatu komunitas Owenite yang disebut New Harmony (Keselarasan Baru) di Indiana, AS. Komunitas ini bubar ketika salah satu dari mitra bisnisnya melarikan diri dengan membawa semua laba yang ada. Kontribusi utama Owen bagi pikiran kaum sosialis adalah pandangan tentang dimana perilaku sosial manusia tidaklah tetap atau absolut, dan manusia mempunyai kehendak bebas untuk mengorganisir diri mereka ke dalam segala bentuk masyarakat yg mereka inginkan. Otienne Cabet (1788-1856) dipengaruhi oleh pemikiran Robert Owen. Di dalam bukunya *Travel and adventures of Lord William Carisdall in Icaria* (1840) ia memaparkan suatu masyarakat komunal idealis. Usaha nya untuk membuatnya kembali (gerakan Icarian) gagal. Charles Fourier (1772-1837) sejauh ini adalah seorang sosialis yang paling utopis. Menolak semua tentang Revolusi Industri dan semua permasalahan yang timbul menyertainya, ia membuat berbagai pendapat fantastis tentang dunia yang ideal yang ia impikan. Selain beberapa kecenderungan yang jelas-jelas tidak sosialis, ia tetap memberi kontribusi berarti bagi gerakan sosialis. Tulisan-tulisannya membantu Karl Marx muda dan membantunya memikirkan teori alienasinya. Fourier juga seorang feminisme radikal.

KOMUNISME

1. Pengertian Komunisme

Komunis mulai populer dipergunakan setelah revolusi di tahun 1830 di Peracis. Suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskannya raja. Istilah komunis, awalnya mengandung dua pengertian. *Pertama,* ada hubungannya dengan komune (*commune*) suatu satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasian *komune-komune* itu. *Kedua,* ia menunjukkan milik atau kepunyaan bersama. Pada esensinya adalah sebuah alra berfikir berlandaskan kepada *atheisme,* yang menjadikan materi sebagai asal segala-galanya. Ditafsirkannya sejarah berdasarkan pertarungan kelas faktor ekonomi. Karl Marx dan Frederich Engels adalah tokoh utamanya dalam mengembangkan faham ini.[460]

Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh.Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut *"Marxisme-Leninisme".* Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya,

[460] Abu Ridho, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran* (WAMY, 1999) hlm. 198.

perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai *think-tank*. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak lagi diminati. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi.

Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Secara umum komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama adalah racun yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata. Komunisme sebagai ideologi mulai diterapkan saat meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos.

2. Ide Dasar Komunisme

Komunisme masa kini menitik beratkan empat ide: 1] Sekelumit kecil orang hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja yang teramat banyak jumlahnya bergelimang papa sengsara, 2] Cara untuk merombak ketidakadilan ini adalah dengan jalan melaksanakan sistem sosialis, yaitu sistem dimana alat produksi dikuasai negara dan bukannya oleh pribadi swasta, 3] Pada umumnya, satu-satunya jalan paling praktis untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revousi kekerasan, 4] Untuk menjaga kelanggengan sistem sosialis harus diatur oleh kediktatoran partai Komunis dalam jangka waktu yang memadai.

Tiga dari ide pertama sudah dicetuskan dengan jelas sebelum Marx, sedangkan ide yang keempat berasal dari gagasan Marx mengenai “diktatur proletariat”, sementara itu lamanya berlaku kediktatoran Soviet sekarang lebih merupakan langkah-langkah Lenin dan Stalin daripada gagasan tulisan Marx, Hal ini nampaknya menimbulkan anggapan bahwa pengaruh Marx dalam Komunisme lebih kecil dari kenyataan sebenamya, dan penghagaan orang-orang terhadap tulisantulisannya lebih menyerupai etalase untuk membenarkan sifat “keilmiahan” dari pada ide dan politik yang sudah terlaksana dan diterima.

3. Ciri-ciri Inti Masyarakat Komunis

Ciri-ciri inti masyarakat komunis adalah; 1] penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, 2] penghapusan kelas-kelas sosialisme, 3] menghilangnya negara, 4] pengahpusan pembagian kerja. Kelas-kelas tidak perlu dihapus secara khusus sesudah kelas kapitalisme ditiadakan karena kapitalisme sendiri sudah mengahapus semua kelas, sehingga hanya tinggal proletariat. Itulah sebabnya revolusi sosialis tidak akan menghasilkan masyarakat atas dan masyarakat bawah lagi.[461]

4. Filsafat Perubahan Sosial dalam *Manifesto Komunis*[462]

Dalam materialisme dialektik, tindakan adalah yang pertama dan fikiran adalah yang kedua. Aliran ini mengatakan bahwa tak terdapat pengetahuan yang hanya merupakan pemikiran tentang alam; pengetahuan selalu dikaitkan dengan tindakan. Pada zaman dahulu, menurut Marx, para filosof telah menjelaskan alam dengan cara yang berbeda-beda. Kewajiban manusia sekarang adalah untuk mengubah dunia, dan ini adalah tugas dan misi yang bersejarah dari kaum komunis. Dalam melakukan tugas ini, mereka tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan dan menggunakan kekerasan guna mencapai maksud mereka. Sesungguhnya, kebanyakan orang komunis percaya bahwa kekerasan adalah perlu untuk menghilangkan kejahatan dari masyarakat.

Masyarakat, seperti benda-benda lain, selalu dalam proses perubahan. Ia tidak dapat diam (statis) karena meteri itu sedniri bergerak (dinamis). Akan tetapi perubahan atau proses perkembangan itu tidak sederhana, lurus atau *linear.* Selalu terjadi perubahan-perubahan yang kecil, yang tidak terlihat, dan kelihatannya tidak mengubah watak benda yang berubah itu, sampai terjadilah suatu tahap dimana suatu benda tidak dapat berubah tanpa menjadi benda lain. Pada waktu itu terjadi suatu perubahan yang mendadak. Sebagai contoh, air dipanaskan pelan-pelan, ia menjadi bertambah panas sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya secara mendadak, pada suatu tahap, ia menjadi uap, dan terjadilah perubahan keadaan. Ada perkembangan yang lalu dari perubahan kuantitatif yang sangat kecil dan tidak berarti, kemudian menjadi perubahan yang penting terbuka dan kemudian menjadi perubahan kualitas; terjadi juga suatu perkembangan dimana perubahan kualitatif terjadi dengan lekas dan mendadak, berupa suatu loncatan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain.[463] Begitu juga dalam hubungan ekonomi dari suatu masyarakat dan dalam pertarungan kepentigan antara kelas, situasi revolusioner akan muncul. Jika ditafsirkan dengan cara ini maka materialisme dialektik memberi dasar kepada perjuangan kelas dan tindakan revolusioner.

---

[461] Franz Magnis-Suseno, *Pemikian Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia, 2000) hlm. 171.

[462] Titus Smith Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Judul Asli: *Living Issues in Philosophy,* Seven Edition, D. Van Nostrand Company, New York, 1979. Penerjemah: Prof. Dr. H.M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h. 304-306.

[463] Joseph Stalin, *Dialectical and Historical Materialism* (New York: Inter. Publisher, 1950) h. 8.

Pada tahun 1848 Karl Marx dan Freidrich Engels menerbitkan *Manifesto Komunis*, suatu dokumen yang banyak mempengaruhi gerakan revolusioner. Akhirnya Karl Marx menerbitkan karyanya yang besar, Das Kapital, Jilid pertama terbit pada tahu 1867. Marx membentuk interpretasi ekonomi tentang sejarah, dan interpretasi tersebut telah berpengaruh kuat selama seratus tahun terakhir ini. Bagi Marx faktor ekonomi adalah faktor yang menentukan dalam perkembangan sejarah manusia. Sejarah digambarkan sebagai pertempuran kelas, dimana alat-alat produksi, didistribusi dan pertukaran barang dalam struktur ekonomi dari masyarakat menyebabkan perubahan dalam hubungan kelas, dan ini semua mempengaruhi kebiasaan dalam tradisi politik, sosial, moral dan agama.

Terdapat lima macam sistem produksi, empat macam telah muncul bergantian dalam masyarakat manusia. Sistem kelima diramalkan akan muncul pada hari esok yang dekat, dan sekarang sudah mulai terbentuk. Yang *pertama* adalah sistem komunisme primitif. Sistem ini adalah tindakan ekonomi yang pertama dan mempunyai ciri-ciri pemilikan benda secara kolektif, hubungan yang damai antar perorangan dan tidak adanya tehnologi. Tingkat *kedua* adalah sistem produksi kuno yang didasarkan atas perbudakan. Cirinya adalah timbulnya hal milik pribadi, yang terjadi ketika pertanian dan pemeliharaan binatang mengganti perburuan sebagai sarana hidup. Dengan lekas, kelompok aristokrat dan kelas tinggi memperbudak kelompok lain. Pertarungan kepentingan timbul ketika kelompok minoritas menguasai sarana hidup. Tingkatan *ketiga* adalah tingkatan dimana kelompok-kelompok feodal menguasasi penduduk-penduduk. Pembesar-pembesar feodal menguasai kelebihan hasil para penduduk yghanya dapat hidup secara sangat sederhana.

Pada tingkatan *keempat*, timbulah sistem borjuis atau kapitalis dengan meningkatnya perdagangan, penciptaan dan pembagian pekerjaan; sistem pabrik menimbulkan industrialis kapitalis, yang memiliki dan mengontrol alat-alat produksi. Si pekerja hanya memiliki kekuatan badan, dan terpaksa menyewakan dirinya. Sebagai giliran tangan menimbulkan masyarakat dengan pengusaha kapitalis.

Sejarah masyarakat mulai pecahnya masyarakat primitif bersama adalah sejarah pertarungan kelas. Selama seratus lima puluh tahun terakhir, kapitalisme industri dengan doktrin *self-interest* (kepentingan diri sendiri)-nya telah membagi masyarakat menjadi dua kelompok yang bertentangan: borjuis atau kelompok yang memiliki dan proletar atau kaum buruh. Oleh karena kelas yang memiliki menguasai lembaga-lembaga kunci dari masyarakat dan tidak mengizinkan perubahan besar dengan jalan damai, maka jalan keluarnya adalah penggulingan kondisi sosial yang ada dengan kekerasan.

Setelah revolusi, menurut materialisme dialektik dan filsafat komunis, akan terdapat dua tingkat masyarakat. Pertama tingkat peralihan, yaitu periode kediktatoran dari kaum proletar. Dalam waktu tersebut orang mengadakan perubahan sosial yang revolusioner, dan kelas-kelas masyarakat dihilangkan dengan dihilangkannya hak milik pribadi terhadap sarana produksi, distribusi dan pertukaran (*excange*). Tingkat kedua setelah revolusi adalah tingkat kelima dan tipe terakhir dari sistem produksi. Itu adalah “masyarakat tanpa kelas” atau komunisme murni. Pada tingkatan tersebut bentrokan dan eksploitasi akan telah selesai, dan semua orang, pria dan wanita akan terjamin kehidupannya yang layak. Negara tidak lagi menjadi alat kelas dan dialektik tidak berlaku lagi dalam masyarakat tanpa kelas. Akan terdapat kemerdekaan, persamaan, perdamaian dan rizki pun melimpah. Masyarakat akan menyaksikan realisasi kata-kata: dari setiap orang menurut kemauannya, bagi setiap orang menurut kebutuhannya.

5. Kedudukan Proletariat dalam Komunisme

Komunisme adalah doktrin mengenai keadaan bagi kemerdekaan proletariat.[464] Bahwa terwujudkanya komunisme membutuhkan keniscayaan terciptanya proletariat, dan proletariat adalah Proletariat merupakan kelas dalam masyarakat yang hidup hanya dengan menjual tenaga kerjanya dan tidak menarik keuntungan dari mana-mana jenis kapital; kebiluran dan kesengsaraan mereka, hidup dan mati mereka, kewujudan semena-mena mereka bergantung kepada keperluan tenaga pekerja–dan oleh kerana itu, bergantung kepada keadaan perniagaan yang senantiasa berubah, dan ketidak-tentuan persaingan yang tidak terkawal. Proletariat, atau kelas proletariat, merupakan, dalam sekata dua, kelas pekerja abad ke-19.[465]

---

[464] Diambil dari Prinsip-prinsip Komunisme, oleh Frederick Engels, Ditulis pada Oktober-November 1847, Dari *Selected Works*, Jilid1, muka surat 81-97, diterbitkan oleh Penerbit Progress, Moskow; 1969.

[465] Marx-Engels*, Selected Works*; Peking, Penerbit Foreign Languages, 1977. [Mukadimah] Pada tahun 1847, Engels menulis dua program draf untuk Liga Komunis dalam bentuk soalan bersiri, satu pada bulan Jun dan satu pada bulan Oktober. Yang kedua, yang dikenali sebagai Prinsip-prinsip Komunis, diterbitkan buat kali pertama pada tahun 1914. Dokumen Draf Pengakuan Keimanan Komunis yang lebih awal, hanya dijumpai pada tahun 1968. Ia diterbitkan buat kali pertama pada tahun 1969 di Hamburg, dengan empat dokumen yang lain berkaitan dengan kongres pertama Liga Komunis, dalam risalah bertajuk *Grundungs Dokumente des Bundes der Kommunisten (Juni bis September 1847*) atau *Dokumen Pengasas Liga Komunis.* Di Kongress Liga Keadilan pada bulan Jun 1847, yang juga merupakan kongres pengasasan Liga Komunis, mereka mengambil keputusan untuk meluluskan sebuah draf ‘pengakuan keimanan’ untuk diperdebatan oleh Liga itu. Dokumen yang dijumpai itu sudah pasti merupakan draf ini. Bandingan di antara dua dokumen itu menunjukkan bahawa Prinsip-prinsip Komunisme merupakan edisi yang disemak. Dalam Prinsip-Prinsip Komunisme, Engels tidak menjawab tiga soalan, dalam dua kes dengan nota ‘tidak berubah’ (*bleibt*); ini jelasnya merujuk kepada jawapan yang diberi dalam draf awal. Draf baru untuk program ini diusahakan oleh Engels di bawah arahan badan pemimpin Liga Komunis cawangan Paris. Arahan tersebut disetujui selepas kritikan tajam Engels pada 22hb Oktober, 1847 terhadap program draf yang ditulis oleh ‘sosialis benar’ Moses Hess, yang kemudiannya ditolak. Sambil mempertikaikan Prinsip-Prinsip Komunisme sebagai draf awal, Engels menyatakan pendapat beliau, dalam surat kepada Karl Marx bertarikh 23-24hb November 1847, bahwa ia mungkin baik untuk

Proletariat menjelma semasa revolusi perindustrian, yang berlaku di England pada hujung abad ke-18, dan yang diulangi di setiap negara bertamadun di seluruh dunia. Revolusi perindustrian ini dijana oleh penciptaan enjin stim, mesin menenun mekanikal dan pelbagai peralatan mekanikal yang lain. Mesin-mesin ini, yang begitu mahal sekali dan, oleh karena itu, hanya dapat dibeli oleh kapitalis besar, mengubah cara pengeluaran dan mengambil tempat bekas pekerja, kerana mesin-mesin tersebut menghasilkan komoditi yang lebih murah dan lebih baik daripada yang dapat dihasilkan oleh para pekerja dengan roda penenun dan penenun tangan mereka yang tidak memadai. Mesin-mesin tersebut menghadiahkan bidang indutsri ke dalam tangan kapitalis besar dan menghancurkan nilai harta para pekerja (peralatan, alat penenun dan sebagainya). Akibatnya, pihak kapitalis berjaya merangkul kesemuanya dalam tangan mereka dan tidak terdapat apa-apa yang tinggal untuk para pekerja. Ini menandakan pengenalan sistem perkilangan kepada industri tekstil. Selepas dorongan bagi pengenalan mesin-mesin dan sistem perkilangan diberi, sistem ini menjalar dengan pantas ke setiap bidang indutsri yang lain, khususnya pencetakan buku dan pengecapan kain, pembuatan barangan tembikar, dan indutsri logam.

Pekerjaan-pekerjaan semakin dibahagikan di kalangan individu sehingga pekerja yang dahulunya melaksanakan tugas yang menyeleruh, sekarang hanya melaksanakan sebahagian daripada tugas tersebut. Pembahagian tugas ini membenarkan benda-benda dihasilkan dengan lebih cepat dan lebih murah. Ia mengurangkan aktiviti pekerja kepada gerakan mekanikal senang dan beterusan yang dapat dilaksanakan dengan lebih baik oleh mesin-mesin. Dalam cara ini, segala industri tersebut jatuh, satu demi satu, di bawah kekuasaan sistem, mesin-mesin dan sistem perkilangan, seperti yang berlaku kepada penenunan dan penganyaman.

Tetapi, pada masa yang sama, bidang-bidang tersebut turut jatuh ke dalam tangan kapitalis besar, dan para pekerja dilucutkan kebebasan mereka. Lama-kelamaan, bukan sahaja pengilangan tulin bahkan juga kraftangan jatuh ke dalam cengkaman sistem perkilangan, apabila kapitalis besar mengambil tempat tukang mahir kecil dengan mendirikan bengkel-bengkel besar, yang lebih menjimatkan dan membenarkan pembahagian tugas yang lebih terperinci.

Begitulah hampir segala jenis pekerjaan diusahakan di kilang-kilang di setiap negara bertamadun-dan, dalam hampir setiap bidang kerja, kraf-tangan dan pengeluaran telah dilintasi. Proses ini telah menghancurkan kelas menengah lama pada tahap yang lebih teruk lagi, khususnya tukang kraftangan kecil-kecilan; ia telah mengubah keadaan pekerja secara menyeluruh; dan dua kelas baru telah diwujudkan yang, secara perlahan-lahan, sedang menelan kelas-kelas yang lain. Ini merupakan: 1] Kelas kapitalis besar yang, di setiap negara bertamadun, memiliki secara eksklusif segala keperluan hidup dan peralatan (mesin-mesin dan kilang-kilang) dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penghasilakn keperluan hidup. Ini merupakan kelas borjuas, atau borjuasi. 2] Kelas yang tidak berharta, yang terpaksa menjual tenaga pekerja mereka kepada borjuasi untuk mendapat, secara berbalas, keperluan hidup untuk kesenangan mereka. Mereka diberikan nama kelas proletariat, atau pendek kata, proletariat.

6. Sejarah Perkembangan Komunisme

Rusia, merupakan pusat kegiatan pembaharuan untuk menegakkan negara yang berdasarkan faham komunisme setelah meletusnya Revolusi Bolshevik di tahun 1917. Pada tahun 1919 didirikan *Third International* atau yang dikenal dengan Komunisme Internasional. Sosialisme-komunis dikenal juga dengan istilah Boshevism, kelompok ini yang memenangkan puncak revolusi di Rusia di tahun 1917 itu. Sebelumnya pada tahun 1989, setelah berdiri *Social Democracy Party* yang membuka cakrawala berfikir baru bagi parpenulis Rusia. Rapat kerja yang dilakukan di kota Perlizt dipenuhi dengan tantangan yang tajam sesama mereka, sampai akhirnya kemudian terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama memilih cara kerja memalui cara berjuang yang tidak revolusioner diberi nama Menshevic atau kelompok minoritas. Adapun golongan kedua dengan pengikut mayoritas memilih perjuangan dengan cara revolusioner, kelompok ini disebut Bolshevic. Golongan ini berhasil memegang kekuasaan tertinggi di Rusia dibawah kepemimpinan

---

mengetepikan susunan soalan bersiri dan menulis sebuah program dalam bentuk manifesto. "Timbangkanlah Pengakuan Keimanan sedikit. Saya percaya kita harus mengetepikan sususan soalan bersiri dan memanggilkannya: Manifesto Komunis. Kerana sedikit sebanyak sejarah harus dikaitkan dengannya, cara susunannya sekarang tidak berapa sesuai. Saya akan membawa apa yang saya sudah selesaikan dengan saya; ia dalam susunan penceritaan, tetapi tidak ditulis dengan baik, kerana saya menulisnya dengan cepat…" Pada kongres kedua Liga Komunis (9hb November – 8 Disember 1847), Marx dan Engels mempertahankan prinsip-prinsip saintifik komunisme dan diberi tugas menulis program dalam bentuk manifesto untuk Parti Komunis. Dalam menulis manifesto tersebut, pengasas Marxsisme menggunakan kalimah-kalimah yang ditulis dalam Prinsip-prinsip Komunisme. Engels menggunakan ungkapan *Manufaktur* dan usulan seperti itu, yang telah diterjemahkan sebagai 'pengeluaran,' 'bidang pengeluaran' dan sebagainya. Engels menggunakan perkataan ini secara benar, untuk menandakan pengeluaran dengan tangan, bukannya pengeluaran kilang, yang Engels memberi nama 'industri besar.' *Manufaktur* berbeda daripada kraftangan (pengeluaran tukang di pekan-pekan Zaman Pertengahan), di mana kraftangan diusahakan oleh artisan bebas. *Manufaktur* diusahakan oleh pekerja yang bekerja untuk pedagang kapitalis, atau oleh kumpulan tukang kraf yang bekerja di bengkel-bengkel besar yang dimiliki oleh kapitalis. Oleh kerana itu, ia merupakan keadaan peralihan di antara kesatuan tukang (kraftangan) dan cara pengeluaran moden (kapitalis). Dalam karya mereka yang ditulis pada waktu-waktu lain, Marx dan Engels menggantikan ungkapan 'penjualan tenaga pekerja,' 'nilai tenaga pekerja' dan 'harga tenaga pekerja' yang digunakan di sini dengan ungkapan 'penjualan *kuasa* tenaga pekerja,' 'nilai *kuasa* tenaga pekerja' dan 'harga *kuasa* tenaga pekerja' (yang diperkenalkan oleh Marx) yang lebih tepat.

Lenin, didukung Trotsky[466], yang dilanjutkan oleh Stalin, Kruschev, Beznev, Androvov, Chernenko sampai Gorbachev.

7. Sistem Politik Komunisme

Secara teoretis, pemerintahan komunis yang didasarkan ideologinya memperlakukan semua negara bagian mereka, rakyat dan cita-citanya menciptakan masyarakat sama rata-sama rasa. Dalam kenyataannya kekerasan, penyingkiran lawan-lawan, pembuangan, pengasingan, agitasi dan propaganda untuk menghancurkan bagi mereka yang tidak sejalan merupakan tindakan yang biasa dan harus dijalankan dengan cara revolusioner dan radikal. Dengan demikian ideologi komunisme dengan Marxisme-nya cenderung untuk melahirkan sistem politik yang otoriter dan tiranik seperti yang diperlihatkan oleh penguasa Stalin dan Lenin di Rusia, Mao Tse Tung di China, Fidel Castro di Kuba, Rezim Kemer Merah dengan Polpot dan Khi Smpan di Kamboja, Kim Sung di Korea Utara, Afganistan di masa Babrak Karmal. Sejumlah negara dikawasan Eropa Timur yang menjadi satelit Uni Sovyet seperti Hingaria, Bulgaria, Jerman timur, Latvia, Lithuania, Estonia, Rumania, Polandia. Kemudian negara dibawah Konfederasi Rusia yang menjadi Uni Sovyet seperti Georgia, Turkistan, Azerbaijan, Turmikistan, Kazakstan, Armenia. Selain itu negara yang berporos kepada faham Marxis dikawasan Afrika, Asia dan Amerika Latin.

Melalui partai komunis yang menganut *single party* memegang kekuasaan dengan mutlak-diktator. Rakyat tidak mungkin mengembangkan buah pikirannya, apalagi melakukan partisipasi politik yang berbeda dengan partai komunis yang berkuasa, termasuk untuk mengemukakan kebijaksanaan partai negara.[467] Bagaimana Stalin dan Breznev, menumpas sejumlah negara yang menuntut persamaan hak atau keinginan melepaskan diri dari satelit Uni Sovyet seperti Geogia, Rumania, Polandia, Hongaria, Chekoslovakia dan Afganistan di era 1950-an sampai 1970-an.

Dalam membawa misi komunismenya untuk mencapai dan menguasai politik dalam masyarakat maupun negara, kalangan ini bila mungkin membentuk partai politik berupa partai komunis. Dalam struktur politik, negara yang berfaham ideologi komunis menganut sistem komando, hierarkis dari atas, dengan pola yang sentralistik, dan diktatur atas nama proletar, sehingga sering disebut diktatur proletariat. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan ada tiga tingkat atau jalur untuk lahirnya suatu kebijakan politik, yakni; 1] Polit Biro (*vanguard*) merupakan pimpinan tertinggi dan pemutus, 2] partai atau parlemen, 3] negara terakhir masyarakat. Secara resmi, negara komunis mengaku kemajemukan masyarakat, sebagai realisasinya ada wadah yakni partai. Akan tetapi masyarakat komunis, Marxisme, Leninisme mengajarkan bahwa sosialisme dibentuk dan dipertahankan melalui "Kediktaturan Proletariat."[468] Kediktaturan Proletariat dilakukan melalui partai hanya mungkin melalui kediktaturan Polit Biro. Inilah doktrin Sentralisme Demokrasi.

8. Sistem Perekonomian/ Tata Ekonomi Komunisme

Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.

Lenin dalam melihat kemakmuran ekonomi yang menjadi syarat utama untuk mencapai cita-cita komunis. Ia bersandar kepada tiga prinsip untuk mencapai tujuan tersebut: *Pertama,* industrialisasi secara pesat, teruatama sekali dengan mengandalkan pembangunan indutri; *Kedua,* perencanaan menyeluruh degan mengkoordinasikan kehidupan anggota masyarakat secara seksama oleh suatu organisasi tehnik birokratis (kita harus meniru kapitalis); *Ketiga,* perlembagaan persaingan sebagai cara untuk model dan rangsangan bagi usaha individu dan kolektif, melalui pemberian rangsangan bagi kepentingan pribadi dalam bentuk gaji serta imbalan yang tidak sama, dan insentif material dan jabatan untuk mereka yang ahli secara tehnis dan cakap secara administratif.[469]

Pada hakikatnya dalam penerapannya, ideologi komunisme dalam satu negara dengan masyarakatnya tercipta bentuk pemerintahan serta sistem politiknya yang diktatur dan otoriter penguasa dan partai terhadap rakyatnya. Dalam bidang ekonomi, telah menciptakan kelas baru antara pemegang kekuasaan dengan rakyat, yakni ditindasnya hak rakyat dalam berkreativitas dibidang ekonomi serta pemilikan. Dibidang sosial budaya telah menciptakan manusia yang tidak lagi memiliki harkat kemanusiaan yang asasi dan universal.

---

[466] Dalam pertarungan perebutan kekuasaan di Rusia sepeninggal Lenin, Trotsky orang kepercayaan Lenin, pada akhirnya disingkirkan oleh Stalin sebagai penguasa baru Rusia. Trotsky memiliki perbedaan pendapat, disingkirkan dari Dewan Tertinggi Organisasi, kemudian terusir dari negaranya tahun 1928, serta terbunuh di pengasingan.

[467] Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982) hlm. 45.

[468] Firdaus Syam, *op. cit.,* hlm. 59.

[469] Ali Syariati, *Kritik Islam atas Marxisme* (Bandung: Mizan, 1983) hlm. 139.

9. Prinsip-prinsip Komunisme

Pertama, yang dimasud dengan ideologi komunisme ialah sistem politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan ajaran Marxisme-Leninisme. *Kedua,* ideologi komunis yang berasal dari pemikiran Marx memberikan ekspresi harapan. Filsafat Marx yang komunis telah menyadarkan janji penyelamatan sosial.[470] *Ketiga,* orang komunis percaya bahwa historical materialis, sebab mereka memandang soal-soal spiritual hanya sebagai efek sampingan hakikat dari keadaan perkembangan materi termasuk ekonomi. Agama muncul menurut Marx disebabkan adanya perbedaan kelas sosial. Agama menjadi produk perbedaan kelas. Agama merupakan perangkap yang dipasang kelas penguasa untuk menjerat kelas proletariat yang tertindas. Apabila perbedaan kelas itu hilang, maka agama dengan sendirinya akan lenyap sebab pada saat itu perangkap (agama) tidak dibutuhkan lagi.[471] Komunisme juga tidak menerima pikiran orang lain (*distrust of others reasons*), penyanggahan terhadap persamaan manusia (*denial of human equality*), dan interpretasi secara ekonomi sistem terhadap sejarah (*economic interpretation of history*). Oleh karena itu mereka tak segan-segan melakukan penipuan, pengkhianatan dan pembunuhan untuk melenyapkan lawan-lawannya, meskipun dari anggota partainya sendiri.[472] *Keempat,* karena cara mencapai tujuan, sangat menghalalkan segala cara, sangat menghalalkan kekerasan radikal, revolusioner dan perjuangan kelas, dengan sendirinya etika tingkah laku didasarkan atas kekerasan (*code of behavior of violence*) serta tidak mengakui pernyataan hak asasi manusia (*denial of declaration of human right*). *Kelima,* cita-cita perjuangannya adalah membangun masyarakat tanpa negara, tanpa kelas dengan konsep sama rata-sama rasa, ideologi komunis itu bersifat international dibidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. *Keenam,* pengendalian segala kebijakan berada ditangan segelintir orang yang diebut Polit Biro, dengan sendirinya kebijakan ekonomi juga dilakukan secara tersentral (*central economic s ystem*) dengan manajemen yang juga secara diktator (*dictatoral management*) dan pemerintahan yang dikendalikan oleh sejumlah orang yang sedikit (*government by the few*).[473]

FASISME

1. Pengertian Fasisme

George Mosse menilai kemunculan fasisme sebagai reaksi terhadap liberalisme dan positivisme[474] yang terlihat dari kecenderungannya yang 'anti-intelektualisme' (*anti intellectualism*) dan dogmatisme. Fasisme merupakan manifestasi kekecewaan terhadap kebebasan individual (*individual freedom*) dan kebebasan berfikir (*freedom of thought*). Liberalsme dan positivisme, ini agak aneh, membuat individu 'takut akan kebebasan'. dengan menjadi fasis—menganut fasisme—individu merasa 'bebas' setelah melarikan diri dari kebebasan. ia 'menikmati' kebebasan justru dalam belenggu kebebasan. Kemuncuan fasisme juga merupakan ekses industrialisasi, modernisasi serta demokratisasi. Kemunculannya merupakan reaksi terhadap berbagai kesenjangan, penderitaan berkepanjangan, rasa ketakutan akan ketiadaan harapan masa depan yang lebih baik. Demokratisasi misalnya dianggap hanya ilusi dan melahirkan dominasi dan hegemoni struktural minoritas terhadap mayoritas, kebebasan anarkis dan lain-lain. Dalam kasus Jerman di masa perang Dunia I dan II, kemunculan fasisme distimulasi oleh anarki sosial yang diakibatkan kekacauan domestik dan politik internasional.

Fasisme ditinjau dari akar-akar pemikirannya tergolong unik. Ia, seperti dikatakan Hayes merupakan percampuran berbagai teori yang paling radikal, reaksioner dan mencakup berbagai gagasan ras, agama, ekonomi, sosial, dan moralitas akar-akar filosofis. Akar-akar fasisme bisa dilacak dalam pemikiran Plato, Aristoteles, Hegel, Rosenberg, Doriot, Farinasi, Gobinau, Sorel, Darwin, Nietzsche, Marinetti, Oswald, Spengler, Chamberlain dan lain-lain.[475] Jadi fasisme, memiliki akar-akar intelektual dan filosofis ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dalam bentuknya yang modern dan kontemporer, dan dalam formatnya yang *par exellence* terjadi ketika Borneo Mussolini menguasai Italia (1922), Hitler dengan Nazinya mendominasi Jerman (1933) Franco berkuasa di Spanyol (1936), Tenno Heika memerintah Jepang (1930-an) dan Amerika Latin dimasa pemerintahan Juan Peron (1950-an).

Mussolini dan Hitler merupakan tokoh fasisme yang fenomenal. Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengangungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat kentara. Kata fasisme diambil dari bahasa Italia, *fascio*, sendirinya dari bahasa Latin, *fascis*, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa di depan pejabat tinggi. Fascis ini merupakan simbol daripada kekuasaan pejabat pemerintah. Pada abad ke-20, fasisme muncul di Italia dalam bentuk Benito Mussolini. Sementara itu di Jerman, juga muncul sebuah paham yang masih bisa dihubungkan dengan

---

[470] Sjafruddin Prawiranegara, *Agama dan Ideologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971) hlm. 9.

[471] Murtadho Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah Kritik Islam atas Marxisme dan Teori lainnya,* lihat dalam Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembagan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) h. 292. Kajain mengenai Marxisme dalamperspektif sosiologis dapat dilihat dalam tulisan Ali Syariati, *Kritik atas Marxixme dan Aliran Barat Lainnya* (Bandung: Mizan, 1982).

[472] *Ibid.*

[473] Sukarna, *Ideologi* (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 45, 48 dan 68.

[474] Paul Hayes, *Fascism* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1973) hlm. 17., dalam Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembagan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal. 333.

[475] Paul Hayes, *Fascism* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1973) hlm. 18.

fasisme, yaitu Nazisme pimpinan Adolf Hitler. Nazisme berbeda dengan fasisme Italia karena yang ditekankan tidak hanya nasionalisme saja, tetapi bahkan rasialisme dan rasisme yang sangat sangat kuat. Saking kuatnya nasionalisme sampai mereka membantai bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih rendah.

2. Konteks Sosial-Psikologis Fasisme

Munculnya fasisme dan komunisme di suatu negara disebabkan karena latar belakang sosial yang berbeda. William Ebenstein mencatat bahwa komunisme pada umumnya lahir dalam masyarakat yang masih terbelakang (*underdevelopment societies*)[476] dengan struktur sosial feodalistik-aristokratik da semi agraris. Komunisme dalam masyarakat demikian, memiliki daya pikat yang kuat terhadap kelas-kelas sosial tertindas. Sehingga komunisme dianggap sebagai ideologi penyelamat dan pemberi harapan akan masa depan yang lebh baik. Dilain fihak fasisme umumnya, dengan pengecualian tertentu, muncul dalam masyarakat yang telah maju (*developed countries*) dan makmur serta telah mengalami proses industrialisasi dan modernisasi yang pesat serta relatif berhasil mengembangkan tehnologi tinggi (*high technology*).[477]

Penelitian empirik membuktikan semakin modern dan semakin pesat masyarakat mengalami industrialisasi, masyarakat itu semakin kurang merasa memiliki (*sense of belonging*) atas segala sesuatu disekitarnya. Rasa tak memiliki itu mengakibatkan masyarakat industrial dan modern itu dihinggapi rasa frustasi, marah dan merasa tidak aman dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dan memiliki watak vandalistik dan destruktif. Kondisi psikologis ini memberikan lahan subur bagi munculnya fasisme. Fasisme juga lahir dalam negara yang mengalami kegagalan demokratisasi. Dengan kata lain, fasisme akan mudah berkembang dalam negara *post-democracy,*[478] negara yang 'pernah' mengalami demokrasi. Kegagalan proses demokratisasi, yang disebabkan faktor domestik dan internasional, memberikan lahan subur bagi pertumbuhan fasisme. Indikator kegagalan itu diantaranya sentralisasi kekuasaan pada segelintir elit penguasa, terbentuknya monopoli dan oligopoli dibidang ekonomi, besarnya tingkat pengangguran baik dikalangan kelas bawah seperti buruh, petani atau kelas menengah atas seperti cendekiawan, kaum industrialis maupun pemilik modal (kapitalis).

Masyarakat luas kecewa terhadap demokrasi yang dianggap hanya ilusi keadilan politik dan tidak dapat dijadikan standar nilai bagi pembentukan sistem politik-ekonomi yang lebih baik. Kekecewaan itulah yang menyebabkan fasisme memperoleh basis legitimasi dan dukungan luas massa berbagai kalangan industrialis, buruh, petani, cendekiawan, dan perwira militer. Itu berbeda dengan latar belakang struktur sosial politik tempat bekambangnya komunisme. Faham Marxis-Leninis itu cenderung akan berkembang dalam masyarakat pra-demokrasi dengan mayoritas penduduk belum mengalami 'pendewasaan politik', struktur sosialnya yang hierarkis-tradisional.

Erich Fromm dalam *Escape from Freedom*[479] menguraikan teori menarik mengenai konteks psikologis fasisme. Ia berteori bahwa ada kaitan erat antara vaiabel-variabel ekonomi dengan variabel psikologis. Karena itu from menolak tesis fasisme semata-mata muncul sebagai akibat determinisme ekonomi, kecenderungan-kecenderungan ekspansif imperealisme-kapitalisme atau penaklukan negara oleh partai tunggal yang didukung kaum industrialis dan *The Jungkers.* Fromm juga keberatan dengan tesis L. Mumford yang menilai fasisme semata-mata sebuah fenomena psikopatologi yang tidak terkait dengan determinisme ekonomi. Teori psikopatologis memiliki asumsi bahwa fasisme tidak lain merupakan sebuah manifestasi mereka yang mengidap penyakit neurotik (*neurotic*), kegilaan (*madness*), dan berkepribadian tidak seimbang (*mentally unbalanced*).

Berpijak pada kasus Jerman, Fromm berteori bahwa variabel-variabel psikologis fasisme tidak berdiri sendiri sebab ia terbentuk oleh variabel-variabel ekonomi. Nazisme misalnya, memang merupakan masalah ekonomi (dan politik) tapi sepenuhnya bisa difahami bila melihatnya dari pendekatan psikopatologi. Hal terakhir inilah yang dibahas Fromm dalam karyanya diatas. Variabel psikologis itu menurut Fromm adalah keadaan mental yang letih dan pasrah total. Keadaan psikologis ini dialami para pekerja Jerman sesudah Revolusi 1918. Dan pada pasca perang mereka memiliki harapan-harapan besar akan terjadinya perbaikan ekonomi, sosialisme, politik. Tetapi semuanya hancur tahun 1930 akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis itu mengakibatkan penderitaan diluar batas kesanggupan mental kelas pekerja untuk menanggungnya. Akhirnya mereka letih dan pasrah menghadapi persoalan hidup dan merasa kurang percaya (*skeptis*) terhadap akseptabilitas dan kapabilitas para pemimpin dan semua organisasi politik di Jerman.

3. Latar Belakang Individu dalam Perkembangan Fasisme

Menurut Eberstein[480] perkembangan fasisme juga dilatarbelakangi oleh kecenderungan-kecenderungan tertentu dalam kepribadian individu-individu dalam masyarakat. *Pertama,* kecenderungan

---

[476] William Ebenstein, *Today Isms; Communism, Fascism, Capitalism, Socialism* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1970) hlm. 121.

[477] *Ibid.* hlm. 121.

[478] *Ibid.*

[479] Erich Fromm, *Escape from Freedom* (New York: Avon Books, 1965)

[480] Diringkas dari Eberstein, *op. cit.,* hlm. 127-131. Tinjauan psikoanalisis mendalam dan kritis tentang kepribadian seorang fasis otoriter bisa dibaca dalam T. W. Adorno, *The Authoritarian Personality* (New York: Harper & Row, 1950).

individu untuk menyesuaikan diri secara terpaksa dengan cita-cita dan praktik-praktik kuno. *Kedua,* kepribadian yang kaku secara emosional dan kurang memiliki imajinasi intelektual yang luas dan terbuka. Individu bersangkutan berpandangan '*inward looking*' dan menilai sesuatu secara hitam putih. *Ketiga,* individu memiliki watak mementingkan status dan kekuasaan atau pengaruh. Ia merasa dengan memiliki keduanya akan dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. *Keempat,* individu tersebut memiliki kecenderungan loyalitasyg kuat pada kelompoknya sendiri. Ia melihat kelompoknya sebagai yang kuat, memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandigkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Kadang individu seperti itu merasa benar sendiri, yang lainnya salah. *Kelima,* ia memiliki disiplin dan kepatuhan yang kuat dan cenderung kurang Sunan Kalijaga akan kebebasan dan spontanitas dalam hubungan-hubungan kemanusiaan.

4. Doktrin dan Gagasan Utama Fasisme

Fasisme memiliki gagasan-gagasan dan doktrin-doktrin, sebagaimana diuraikan oleh Hayes[481], Ebenstein[482], dan Bracher[483]; doktrin *Pertama,* adalah gagasan mengenai mitos ras unggul (*the myth of race*). Konsep keunggulan atau superioritas ras merupakan doktrin sentral fasisme. Menurut fasisme secara rasial manusia tidak sama. Ada ras superior dan ras inferior. Ras superior inilah yang telah ditentukan secara alamiah akan menjadi penguasa atas ras inferior. Mereka berhak untuk memperbudak ras inferior. Atas dasar mitos ras itu Gobineau mengembangkan gagasan anti-egalitarianisme. Masyarakat manusia menurutnya bersifat hierarkis. Ada yang secara alamiah ditakdirkan jadi penguasa dan dikuasai tergantung dari jenis ras apa mereka berasal. Maka menurutnya elit merupakan lapisan sosial yang paling esensial bagi usaha melestarikan masyarakat manusia yang beradab.[484]

Kedua, doktrin anti-semitisme. Mitos ras itu melahirkan sikap-sikap kebencian mendalam kepada ras lain, khususnya Yahudi. Kebencian itu termanifestasi dalam berbagai bentuk. Dari bentuknya yang paling 'halus' seperti sindiran dan caci maki hingga bentuknya yang paling vulgar dan kejam seperti penyiksaan dan pembantaian massal terhadap orang-orang Yahudi. Dalam terminologi Barat, sikap-sikap demikian dinamakan anti-semitisme. Inilah doktrin fasisme kedua yang berkembang pesat di Jerman pada masa perang Dunia I dan II. Bila dilacak akar historis kulturalnya sebenarnya telah berkembang di Eropa sejak ratusan, bahkan ribua tahun yang lalu.

Berdasarkan kajian Dimont[485], Arendt[486], Sartre[487] dan Stokes[488] bisa dikatakan bahwa anti-semitisme telah terjadi ribuan tahun lalu di Mesir ketika Fir'aun berkuasa. Yahudi disiksa dan dijadikan budak, menjadi objek penyiksaan dan diusir ketika Nebukadnezar menguasai Babilonia. Dimasa Imperium Romawi, orang-orang Yahudi mengalami penderitaan berkepanjangan akibat loyalitas mereka diragukan penguasa imperium. Di abad pertengahan, Yahudi juga mengalami penderitaan lahir batin karena mitos dan cerita takhayul yang berkembang pada masa itu menganggap mereka sebagai 'Penghianat Kristus' saingan umat Kristen sebagai 'orang-orang pilihan' (*the chosen people*) kaki tangan setan, penyembah-penyembah setan dan hantu yang berwujud manusia.

Ketiga, doktrin totalitarianisme. Giovanni Gentile (1819-…), seorang ideolog fasis menilai fasisme sebagai suatu doktrin totaliter. Artinya, fasisme tidak sekedar suatu istem organisasi politik atau pemerintahan melainkan juga keseluruhan kehendak (*will*), pemikiran (*thought),* dan perasaan (*feeling*) suatu bangsa.[489] Jadi watak dasar fasisme menurut Gentile adalah 'totaliter', komprehensif dan mencakup semua. Doktrin totalitarianisme dalam fasisme ini memiliki akar-akar intelektualnya dalam gagasan-gagsan Herakleitus, Palto, Aristoteles dan Hegel.

Menurut pemikir Yunani Kuno Herakleitus, totalitarianisme muncul dari kepercayaan bahwa dunia merupakan suatu totalitas. Sesuatu yang ada di dunia ini merupakan bagian integral dari tatanan keseluruhan dan kesatuan. Individu misalnya, hanya akan berarti bila mereka dalam totalitas kolektif individu. Gagasan Plato yang digunakan sebagai dasar perumusan doktrin totalitarianisme fasis adalah teori negara kesatuan, komunisme primitif, etos kemiliteran Sparta, dan kesatuan antara kepentingan individu dengan kepentingan negara. Sumbangan Aristoteles adalah gagasannya tentang negara organik, sistem etika sosial terpadu, pembenaran fisik dan moral terhadap perbudakan manusia oleh manusia. Mengenai yang terakhir Aristoteles menulis bahwa kelas inferior haruslah dijadikan budak bagi kelas superior.[490]

[481] Paul Hayes, *Fascism* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1973).
[482] William Ebenstein, *Today Isms; Communism, Fascism, Capitalism, Socialism* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1970).
[483] Karl Dietrich Bracher, *The German Dictatorship; The Origins, Structure and Consequences of National Socialism,* Trans. By J. Steinberg (London: Penguin Book, 1988).
[484] Paul Hayes, *op. cit.*, hlm. 23.
[485] Lihat Max Dimont, *Jews, God and History* (The New York: The New York American Library, 1962) juga *The Indestructible Jews* ((The New York: The New York American Library, 1973).
[486] Hannah Arendt, *Anti-Semitisme, Part one of the Origins of Totalitarianisme* (New York: Harcourt and Brace World. Inc., 1968).
[487] Jean Pail Sartre, *Anti-Semite and The Jew,* Trans. By George J. Backer (New York: Schoker Books, 1972)
[488] Roger Stokes, *The Jew, Rome and Armageddon* (Adelaide Hills Christadelphian Ecclesia, 1987)
[489] Hitler dikutip dalam David Coopeman and Walter, *Power and Civilizations, Political Thought in The Twetieth Century* (New York: Thomas Y. Crowell Company, 1962) hlm. 261.
[490] Aristoteles dikutip dalam Hayes, *op. cit.,* hlm. 50.

Hegel merupakan filosof yang gagasannya paling banyak dijadikan sebagai dasar doktrin totalitarianisme fasis. Menilai Hegel dalam meletakkan dasar intelektual totalitarianisme fasis, Karl Popper menyebut Hegel sebagai; "*the seminal factors in the rise of totalitarian philosophy and fascist practice"* dan "*link between totalitarian philosophy of the past and of the present."* Hegel, misalnya kata Karl Popper, telah menemukan kembali gagasan-gagasan Plato tentang pemberontakan dan kebebasan dan akal.[491] Menurut Hayes, Hegel telah memperkenalkan pada masyarakat politik dan intelektual Jerman suatu filsafat aneh dan unik yang sepenuhnya bernuansa totalitarianisme. Filsafatnya adalah suatu pencampuran berbagai gagasan mistisisme, universalisme, aristokratisme, anti-demokrasi dan utilitarianisme. Pencampuran gagasan-gagasan itu, meskipun aneh dan tidak koheren tetap memiliki daya pikat yang kuat bagi penganut fasisme di negara-negara Eropa, khususnya Jerman.[492]

Doktrin negara totaliter fasis yang berprinsip bahwa negara merupakan pusat dan tujuan akhir eksistensi manusia memiliki akar intelektualnya dalam gagasan kenegaraan Hegel. Filosof Jerman ini mengatakan bahwa keberadaan suatu bangsa, dan tujuan subtansialnya haruslah negara. Maka, negara merupakan dasar dan pusat seluruh unsur-unsur kongkret dalam kehidupan manusia seperti seni, hukum, moral, agama, dan ilmu pengetahuan.[493] Disisi lain Hegel juga mengemukakan gagasan negara organis yang diterapkan dalam praktik fasisme di Jerman. Negara organis adalah negara yang tidak memiliki kewajiban moral terhadap individu-individu. Ia bebas melakukan apapun yang dikehendakinya tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral kepada siapapun.

Keempat, doktrin tentang elite dan pemimpin. Fasisme percaya bahwa manusia secara alamiah telah ditentukan untuk menjadi penguasa (*the ruler*) dan yang dikuasai (*the ruled*). Jadi, ada sebagian manusia yang memiliki kualitas kemanusiaan superior dan yang lainnya tidak memiliki kualitas itu. Pandangan ini merupakan konsep dari *ocial destiny* dalam fasisme. Menurut doktrin ini massa (rakyat) tidak berhak dan tidak memiliki kemampuan memerintah sebab hanya kelompok elite yang memiliki kualitas itu. Demokrasi, dengan demikian hanyalan ilusi politik yang tak akan pernah terwujud dalam kenyataan. Doktrin ini memiliki akar pemikirannya dalam tradisi intelektual Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Fichte, Herder, dan Hegel.

Di Jerman, Herder mengkombinasikan gagasan elitisme ini dengan semangat nasionalisme dan penolakan terhadap rasionalisme. Hasilnya adalah sebuah kredo intelektual dan filsafat yang secara berhasil digunakan untuk membangkitkan kesadaran nasionalisme dan kesadaran elite Jerman. Kesadaran itu membuat bangsa Jerman yakin bahwa mereka adalah manusia pilihan yang berhak menguasai dan memerintah dunia. Hegel dilain pihak juga merumuskan premis-premis yang dijadikan alat pembenaran doktrin fasisme ini. Hegel berpendapat bahwa sejarah dunia tidak lain hanyalah sejarah orang-orang besar. Manusia unggul, atau meminjam konsep Hegel *heroic leader* (pemimpin heroik), yang sebenarnya 'pencipta' sejarah kemanusiaan dan peradaban, bukan massa. Doktrin ini berpegaruh da diterima oleh para nasionalis dan fasis Eropa, khususnya di Jerman dan Italia. Mussolini dan Hitler mengakui dipengaruhi oleh konsep '*heroic leader'* Hegel ini. Pengaruh Hegel ini tampak dalam tulisan Hitler ketika ia menulis bahwa dalampendapat umum, semuanya salah dan semuanya orang besar. Dan, untuk menemukan apa yang benar merupakan tugas orang besar (*The Great Man*). Orang besar inilah yang mampu mengekspresikan kehendak zamannya, dan pelaksana kehendak itu.

Referensi

Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

Friedrich Engels, *The Origin Of The Family, Private Property And The State*, Zurich, 1884

Elie Halevy, *Histoire du Socialisme Europen*. Paris, Gallimard, 1937

Market Socialism: the debate among socialists, ed. Bertell Ollman (1998)

G.D.H. Cole, History of Socialist Thought, in 7 volumes, Macmillan and St. Martin's Press (1965),

John Weinstein, *Long Detour: The History and Future of the American Left,* Westview Press, 2003, Leo Panitch, *Renewing Socialism: Democracy, Strategy, and Imagination.*

Michael Harrington, *Socialism*, New York: Bantam, 1972

Edmund Wilson, *To the Finland Station: A Study in the Writing and Acting of History,* Garden City, NY: Doubleday, 1940.

Albert Fried, Ronald Sanders, eds., *Socialist Thought: A Documentary History,* Garden City, NY: Doubleday Anchor, 1964.

Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim* (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1982)

Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ketiga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Alfian, *Pemikian dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981)

Sukarna, *Suatu Studi Ilmu Politik Ideologi* (Bandung: Alumni, 1981)

Jorge Lorrain, *Konsep Ideologi* (Yogyakarta: LKPSM, 1996)

Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991)

Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

Anthony Downs dalam buku *An Economic System of Democracy* (New York: Harper & Row, 1957)

---

[491] *Ibid*., hlm. 40. Pemikiran Popper tentang Hegel bisa ditelaah dalam karya karya monumentalnya, *The Open Society and Its Enemiesm* vol. II., *The High Tide of Propechy Hegel and Marx, The Aftermath* (London: Routledge and Keagan Paul, 1962).

[492] Hayes, *op. cit.,* hlm. 45.

[493] *Ibid.*, hlm. 45.

Austin Ranney, *Governig; An Introduction to Political Science (7th Edition;* London: Prentice Hall International, Inc., 1996)
A.M.W. Pranarka, "Pasal 33 UUD 1945: *Wawasan Dasar dan Konstruksi Operasionalnya, Suatu Tinjauan Ideologis*,"dalam A*nalisa CSIS*, Tahun IV, No. 12, Desember 1986
William Ebenstein dan Edwin Fogelman, *Isme-isme Dewasa ini,* terj. Alex Jemadu (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994).
A. Effendi Khoirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 2003)
Amien Rais, *Cakrawala Islam; Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1999)
Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* pendahuluan dan catatan pinggir oleh Edwin Cannan, New York: The Modern Library, 1973
L. J. Zimmerman, *Sejarah Pendapat-pendapat tentang Ekonomi*, Bandung: N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, 'S-Gravenhage, 1995. Edisi Indonesia dikerjakan oleh K. Siagian. Periksa buku aslinya yang berjudul *Geschiedenis Van Het Economisch Denken.*
Sjahrir, *Formasi Mikro-Makro ekonomi Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1995
Max Weber, *The Protestant ethic of Spirit Capitalism,* New York, Scribner, 1958, Edisi Inggrisnya dikerjakan oleh Talcot Parson dengan Pengantar RH Tawney.
Jorge Larrain, *The Concept of Ideology*, Forteword by Tom Bottomore, First Published, Australia: Hotchinson Publishing Group, 1979, versi Indonesia oleh Ngatawi al Zastrouw (editor) dan Ryadi Gunawan (penerjemah), Yogyakarta: LKPSM, 1997
Lorens Bagus, *Kamus Filsafat,* Jakarta, Gramedia, 1996
Sudono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Makalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1985
Daniel Bell, (1) *The End of Ideology,* New York: Free Press, 1960; (2) *The Coming of Post Industrial Society*, New York: Penguin Books Edition, 1973; (3) *The Cultural Contradictions of Capitalism,* New York: Basic Books, 1976.
Y.B. Mangunwijaya (ed.), *Tekhnologi dan Dampak Lingkungannya,* Volume II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985;
Daniel Bell dan Irving Kristol (ed.), *Model dan Realita di Dalam Wacana Ekonomi, Dalam Krisis Teori Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1988.
Guy Debord, *The Society of The Spectacle*, seperti dikutip oleh Fredric Jameson, *Postmodernism or The Cultural of The Late Capitalism*, London, Verso, 1990
John Kenneth Galbraith, *The New Industrial State*, New York: Mentor Book Paperback Edition, 1972
Jurgen Hebermas, *Ilmu dan Tekhnologi Sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES, 1990
Francis Fukuyama, *The End of History and Last Man*, London: Hamish Hamilton, 1992.
Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat* (Bandung: Mizan, 1999)
Mas'ud An Nadwi, *Islam dan Sosialisme* (Bandung: Risalah, 1983)
Clement Attle, Perdana Menteri Inggris tahun 1945-1951, juga seorang Pemimpin Partai Buruh 1935-1955, menulis dalam buku *The Labour Party in Perspective* (1937)
Lyman Tower Sargen, *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer; Sebuah Analisis Komparatif* (Jakarta: Erlangga, 1987)
Abu Ridho, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran* (WAMY, 1999)
Franz Magnis-Suseno, *Pemikian Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jkt: Gramedia, 2000)
Titus Smith Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Judul Asli: *Living Issues in Philosophy,* Seven Edition, D. Van Nostrand Company, New York, 1979. Penerjemah: Prof. Dr. H.M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
Joseph Stalin, *Dialectical and Historical Materialism* (New York: Inter. Publisher, 1950)
Frederick Engels, *Prinsip-prinsip Komunisme* Ditulis pada Oktober-November 1847, Dari *Selected Works*, Jilid1, muka surat 81-97, diterbitkan oleh Penerbit Progress, Moskow; 1969.
Marx-Engels*, Selected Works*; Peking, Penerbit Foreign Languages, 1977.
Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1982)
Ali Syariati, *Kritik Islam atas Marxisme* (Bandung: Mizan, 1983)
Sjafruddin Prawiranegara, *Agama dan Ideologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971)
Murtadho Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah Kritik Islam atas Marxisme dan Teori lainnya,* lihat dalam Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembagan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
Ali Syariati, *Kritik atas Marxixme dan Aliran Barat Lainnya* (Bandung: Mizan, 1982).
Sukarna, *Ideologi* (Bandung: Alumni, 1981) hlm. 45, 48 dan 68.
Paul Hayes, *Fascism* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1973)
Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembagan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)
Paul Hayes, *Fascism* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1973)
William Ebenstein, *Today Isms; Communism, Fascism, Capitalism, Socialism* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1970)
Erich Fromm, *Escape from Freedom* (New York: Avon Books, 1965)
T. W. Adorno, *The Authoritarian Personality* (New York: Harper & Row, 1950).
Paul Hayes, *Fascism* (London: George Allen and Unwin Ltd., 1973).
Karl Dietrich Bracher, *The German Dictatorship; The Origins, Structure and Consequences of National Socialism,* Trans. By J. Steinberg (London: Penguin Book, 1988).
Max Dimont, *Jews, God and History* (The New York: The New York American Library, 1962) juga *The Indestructible Jews* ((The New York: The New York American Library, 1973).
Hannah Arendt, *Anti-Semitisme, Part one of the Origins of Totalitarianisme* (NY: Harcourt & Brace World. Inc., 1968).
Jean Pail Sartre, *Anti-Semite and The Jew,* Trans. By George J. Backer (New York: Schoker Books, 1972)
Roger Stokes, *The Jew, Rome and Armageddon* (Adelaide Hills Christadelphian Ecclesia, 1987)
Hitler dikutip dalam David Coopeman and Walter, *Power and Civilizations, Political Thought in The Twetieth Century* (New York: Thomas Y. Crowell Company, 1962) hlm. 261.
Karl Popper, *The Open Society and Its Enemiesm* vol. II., *The High Tide of Propechy Hegel and Marx, The Aftermath* (London: Routledge and Keagan Paul, 1962).

MATERI 23
TEORI REVOLUSI SOSIAL & REVOLUSI POLITIK

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

[1] Hakekat Revolusi[494]

Didalam *Manifesto Komunis,* Marx menguraikan tahapan revolusi seperti yang dicita-citakannya:

1) Perlawanan individu dari kaum buruh yang sudah tidak tahan ditindas oleh majikannya. Individu-individu yang berani inilah yang memulai seluruh tahapan peruangan kaum buruh;
2) Pemogokan yang dilakukan di pabrik oleh mayoritas pekerja. Perjuangan individu ini akan segara memecah dinding kebekuan dan semangat perlawanan akan seketika meluap. Pada awal tahapan ini, kaum buruh masih bertindak destruktif dimana pola perlawanan adalah dengan merusak pabrik yang dianggapnya sebagai sumber kesengsaraan. Ini adalah tahapan spontanisme dari gerakan buruh;
3) Dengan semakin berkembangnya industri, kaum buruh pun berkembang baik dalam pengalaman organisasi kerjanya maupun dalam perspektifnya tentang pergerakan. Disinilah kaum buruh mulai berfikir tentang perlunya satu serikat sekerja (*union*). Tahapan ini disebut sebagai tahapan *ekonomisme.* Pemogokan dengan serikat sekerja lebih efekstif dan menghasilkan banyak kemenagan disana-sini bagi kaum buruh seperti jam kerja yang lebih pendek maupun upah yang lebih tinggi. Menyadari bahwa serikat sekerja ini sangat efektif dalam memperjuangkan tuntutannya, kaum majikan pun menghadapi pemogokan dengan kekerasan. Salah satu contoh yang amat baik menjelaskan hal ini adalah sejarah serikar buruh di Amerika Serikat dimana pawai menuntut 8 jam kerja sehari di Haymarket Square (1 Mei 1886) berubah menjadi ajang pembantaian oleh polisi terhadap buruh. Sebuah bom yang tidak perah terungkap dari mana datangnya tiba-tiba meledak dan polisi seketika itu juga membuka tembakan. Peristiwa ini menjadi alasan untuk sebuah *crackdown* terhadap semua serikat buruh di Amerika Serikat dan gerakan menuntut 8 jam kerja sehari terbungkam selama beberapa tahun. Peristiwa inilah yang kelak akan terus diperingati oleh kaum buruh sedunia sebagai *May Day.*
4) Kemajuan tehnologi komunikasi adalah jembatan yang akan menghubungkan serikat-serikat sekerja inidan menempanya menjadi satu partai proletariat. Partai proletariat inilah yang akan membawa kaum buruh menuju puncak perlawanannya; berhadapan dengan kaum kapitalis sebagai kelas, bukan sebagai individu atau organisasi.
5) Setelah itu, kaum proletar sebagai kelas penguasa yang baru harus;

> Mengambil alih, secara bertahap seluruh kapital dari tangan borjuasi, memusatkan seluruh alat produksi di tangan Negara, yaitu di tangan proletariat sebagai kelas penguasa; dan untuk meningkatkan produktifitas total selekas mungkin.

Bagi Marx, peralihan kekuasaan politik merupakan langkah awal, syarat perlu bagi revolusi yang sesungguhnya. Marx mencermati mutlak pentingnya peralihan kekuasaan politik ketangan kaum borjuiasi dalam rangka penegakan sistem ekonomi kapitalisme. Bahkan, tanpa peralihan kekuasaan politik ini, sistem ekonomi kapitalisme tidak akan tumbuh subur, bahkan bisa saja tidak tumbuh sama sekali karena terhalang oleh keseluruhan sistem ekonomi-politik kaum feodal. Hanya setelah kekuasaan ada ditangan kelas yang berbeda, pola produksi masyarakat akan dapat diubah sesuai dengan pola produksi yang memberikan keuntungan bagi kelas yang berkuasa tersebut.[495] Demikian Marx merumuskan:

> Langkah pertama dalam revolusi oleh klas pekerja adalah menaikkan kaum proletariat ke tampuk kekuasaan untuk memenagka pertempuran demi demokrasi.

[2] Revolusi Sosial & Revolusi Politik[496]

Semakin stabil masyarakat berkelas, maka dominasi kelas berkuasa semakin kurang ditantang, dan semakin pula perjuangan kelas terserap dalam konflik terbatas yang tidak mempertanyakan struktur masyarakat tersebut, yang disebut oleh kaum Marxis sebagai dasar *hubungan produksi* atau *modus produksi.* Tetapi semakin stabilitas ekonomi dan sosial dari sebuah modus produksi tergoncang, semakin dominasi kelas berkuasa ditantang, dan semakin pula perjuangan kelas akan berkembang pada suatu titik untuk mengajukan pertanyaan *penggulingan* donimasi tersebut—pertanyaan mengenai revolusi sosial.

---

[494] Ken Budha Kusumandaru, *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan terhadap Franz Magnis-Suseno* (Yogyakarta: Resist Book, Cet. II., 2004) h. 138-139.

[495] *Ibid.*, h. 141

[496] Ernes Mendel, *Tesis-tesis Pokok Marxisme,* Penerjemah: Ing. Mahendra K., (Yogyakarta: Resist Book, 2006) h. 21-23.

Sebuah revolusi sosial terjadi ketika kelas yang dieksploitasi dan tertindas tidak lagi menerima dominasi tersebut sebagai tidak dapat dihindari, permanen dan pantas; revolusi sosial terjadi ketika mereka tidak lagi membiarkan dirinya diintimidasi dan ditindas pemaksaan dengan kekerasan oleh penguasa, ketika mereka tidak lagi menerima ideologi yang membenarkan tatanan tersebut, ketika mereka mengumpulkan kekuatan material dan moral yang dibutuhkan untuk menggulingkan kelas yang berkuasa.

Perubahan ekonomi yang sangat besarlah yang mengolah kondisi bagi terjadinya revolusi sosial. Organisasi sosial yang ada dan modus produksinya yang memungkinkan tenaga produktif dan kekayaan material masyarakat berkembang selama periode tertentu, telah menjadi rem bagi berkembangnya dominasi. Ekspansi produksi mengalami benturan dengan organisasi sosialnya, dengan hubungan sosial dalam produksi. Disanalah terdapat sumber utama revolusi sosial dalam sejarah.

Sebuah revolusi sosial menggantikan tatanan satu kelas dengan kelas yang lainnya. Revolusi sosial mensyaratkan penyingkiran kelas berkuasa sebelumnya dari kekuasaan negara. Setiap revolusi sosial diiringi oleh revolusi politik Revolusi borjuis dicirikan oleh penyingkiran monarki absolut dan menggantikan dengan kekuasaan politik ditangan majelis-majelis yang dipimpin oleh borjuasi. Estates-General menekan kekuasaan Philip I dari Spanyol pada Revolusi Belanda. Parlemen Inggris mengancurkan absolutisme Charkes I pada Revolusi Inggris 1649. Kongres Amerika menghancurkan dominasi George III atas tiga belas koloni. Berbagai majelis saat Revolusi Perancis menghancurkan monarki Bourbon.

Jika setiap revolusi sosial pada saat yang bersamaan juga berujud reolusi politik, tetapi setiap revolusi politik belum tentu berujud revolusi sosial. *Sebuah revolusi yang hanya politik* menunjukkan perubahan, dengan cara-cara revolusioner, dari *satu bentuk dominasi*, satu *bentuk negara* sebuah kelas, *dengan bentuk negara yang lain dari kelas yang sama.*

Demikian juga Revolusi Perancis 1830, 1848 dan 1870 adalah revolusi politik yang berturut-turut menempatkan Monarki Juli, Republik Kedua, Kerajaan Kedua dan Republik Ketiga, semua bentuk politik pemerintahan yang berbeda dari kelas sosial yang sama—borjuasi. Secara umum, revolusi politik menggulingkan bentuk negara dari kelas sosial yang sama sebagai fungsi kepentingan utama dari berbagai lapisan, dan fraksi kelas yang sama, lain dalam kekuasaan. Tetapi modus produksi pokok tidak akan digulingkan oleh revolusi-revolusi tersebut.

[3] Revolusi dalam Perspektif Sosialisme[497]

Sebagaimana termuat dalam tesis ke XI-nya kepada Feuerbach[498], bahwa tugas filsafat bukan sekedar menginterpretasikan dunia, tapi justru yang pokok adalah mendobraknya. Endapan pemikiran ini mencuat dua tahun kemudian ketika Marx menulis Manifesto Komunis yang diakhiri kalimat-kalimat agitatif yang ditunjukkan kepada kaum buruh, yakni anggota dan simpatisan Partai Komunis yang didirikannya. Disini Marx tidak menyembunyikan nada revolusioner dan dari ajarannya. Bahwa kaum komunis tidak perlu lagi menyembunyikan pendapat dan tujuan-tujuannya. Hendaknya kaum komunis mengumumkan niat mereka untuk merobohkan segenap susunan masyarakat dengan cara kekerasan. Sebab "*the proletarians"* begitu tulis Marx "*have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working man of all countries, unit!".*[499]

Dalam upaya merealisir cita-cita masyarakat tanpa kelas, Marx memberikan rumusan bahwa masyarakat yang ingin dicapai adalah bentuk sosialis, yakni dari tiap orang diminta menurut kecakapannya dan kepada tiap-tiap orang diberikan menurut kebutuhannya, "*from each according to his ability, to each according to his needs".*[500] Masyarakat semacam ini tidak dapat ditunggu tapi harus dibuat, untuk itu kaum proletar yang kini tergabung dalam partai komunis memainkan peranan pentingnya. Yaitu merebut kekuasaan dari tangan kapitalis dengan cara merebut segala alat produksi dan melalui tahap transisi yang disebut dengan diktatur proletariat. Jadi barisan proletar dengan partai komunislah sebagai barisan pelopor dalam usaha mencapai kekuasaan.[501] Marx, meskipun sedikit menulis tentang diktatur proletariat ini, namun ketua Partai Komunis ini pernah merumuskan bahwa:

[497] Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis,* (Yogyakarta: LKiS, Cet. IV., 2004) h. 157-161. Khususnya pada BAB. III.

[498] *"The philosopher have only interpreted the wolrd, in various ways; the point, however, is to change it"*. Tesis XI Tentang Feuerbach Karl Marx (1845). Ditulis oleh Marx dalam musim semi 1845. Mula-mula diterbitkan oleh Engels dalam 1888 sebagai Lampiran pada edisi yang tersendiri dari karyanya Ludwig Feuerbach. Dicetak menurut naskah edisi tersendiri pada tahun 1888 dan diperiksa dengan manuskrip Karl Marx. Diterjemahkan dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris.

[499] Karl Marx and Frederick Engels, *Manifesto The Communist Party* (1948) h. 65.

[500] Karl Marx, "*Critique of The Gotha Programma,* termuat dalam Selected Work Vol. I., (Moskow: Foreign Languages Publishing House, 1962). h. 24.

[501] Karl Marx and Frederick Engels, *Manifesto The Communist Party, Op. Cit.,* h. 46. Kepeloporan kaum komunis ini menurut Marx didasarkan pada kenyataan bahwa: The Communist, practically, the most advanced and resolutesection of the working parties of every country, that section which pushes forward all other, on other hand, theoritically, they have over the great mass of the proletariat the advantage of clearly understanding the line of march, the conditions, and the ultimate general result of the proletariat movement. (Kaum Komunis, praktisnya adalah bagian yang termaju dan teguh dari partai-partai kelas pekerja di negeri mana saja, bagian yang memberikan dorongan bagi lain-lain, sebaiknya secara teoretis juga mereka itu dibanding dengan massa besar dari proletariat mempunyai kelebihan dalam memahami dengan jelas garis perjuangan, kondisi serta hasil-hasil umum terakhir dari gerakan proletar).

> Between capitalist and communist society lies the period of the revolutionary transformation of the one into the other. There corresponds to this also of political transtition period individu which the state can be nothing but the revolutionary dictatorship of the proletariat.[502]

Revolusi yang dijabarkan oleh Karl Marx dapat dijabarkan dalam dua tahap. *Pertama,* revolusi-revolusi yang dipelopori oleh golongan borjuis yang hendak menghancurkan golongan feodal. *Kedua,* adalah revolusi yang dilakukan oleh kelas pekerja dalam upaya meruntuhkan kelas borjuis. Sewaktu revolusi pertama berlangsung kelas buruh modern sebenarnya sudah eksis membantu borjuis meruntuhkan golongan feodal. Bantuan yang diberikan oleh kelas pekerja dalam revolusi tahap awal semata-mata dimaksudkan sebagai ajang latihan dan pematangan tekad mengantisipasi kekuasaan, melatih diri berorganisasi serta memahami cara-cara mengatur negara.

Setelah mencapai kekuasaan, kaum komunis sebagai juru bicara kelas buruh mempunyai tugas untuk mempergunakan kekuasaannya di zaman peralihan sampai tiba di suatu zaman sisa-sisa persoalan kelas tidak menjadi beban pikiran. Persis pada tempat inilah masyarakat tanpa kelas (*class less society)* terbangun bersamaan dengan hilangnya negara.

Persoalan hilangnya negara—*the withering away of the state*—sesudah kemenangan kelas buruh ini bertitik tolah dari ajaran bahwa negara bagi komunis adalah bersifat internasional, dan sesungguhnya komunis yang asli seperti yang disinyalir Marx tidak memiliki negara. Negara modern hanyalah suatu panitia belaka yang menjalankan urusan bersama dari seluruh kelas borjuis. Bahkan dalam Manifesto Komunis dinyatakan bahwa, negara modern apapun bentuknya pada hakekatnya adalah suatu mesin kapitalisme, negara dari kelas kapitalis. Dengan demikian negara tidak mempunyai fungsi selain sebagai alat penindas, "*and the modern representative state Islam an instrument of the exploitation of wage labour by capital".*[503]

Dalam pemerintahan proletariat setelah runtuhnya kaum kapitalis, kelas-kelas dalam masyarakat dengan sendirinya turut hilang. Alienasi juga akan hilang sebab alat produksi—selalu dipahami sebagai penentu hubungan sosial—tidak lagi menjadi milik pribadi, tapi kini menjadi milik kolektif dan dikelola secara kolektif pula. Marx menggambarkan masyarakat macam ini terdiri dari orang-orang yang mudah pindah kerja, segalanya akan gampang dilakukan, tidak ada pembedaan antara kerja otak dengan kerja mesin dam karenanya "pembagian ini" diberikan tidak didasarkan atas jenis kerja sebagaimana dalam masyarakat kapitalis, tetapi kepada keperluan hidup atau dengan kata lain dalam masyarakat ini pengelolaan kebutuhan masing-masing orang menjadi dasar tujuannya.

[4] Materialisme Historis Teori Multidimensional[504]

Piotr Sztompka menjelaskan tentang materialisme historis dalam perpektif perubahan sosial; bahwa asumsi utama materialisme historis adalah sebuah teori mutidimensional tentang sejarah yang diuraikan di tiga tahap bahasan yang berbeda: sejarah dunia, struktur sosial, dan tindakan individual. Dengan kata lain, sebenarnya ada tiga bagian teori materialisme historis yang saling berkaitan: (1) teori formasi sosial-ekonomi ditingkat puncak; (2) teori perjuangan kelas ditingkat menengah; dan (3) teori tindakan individual (disebut Marx '*species-being*') ditingkat bawah. Masing-masing menerangkan masalah pokok yang berbeda, terletak didalam pikiran Marx yang berbeda dan dirumuskannya dalam bahasa yang berbeda pula. Beberapa teori kelas dan teori tindakan individual dalam bahasa empiris kongkret yang digunakan Marx dalam melukiskan fenomena, segera akan terlihat; individu dengan tindakan mereka, kelompok dengan bentuknya, produk dengan tenaga kerjanya, dan seterusnya. Contoh bahasan empiris kongkret itu terdapat dalam *The Class Struggle in France* (1850), *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (1852), *The Civil War in France* (1871) dan ada kalanya sebagai ilustrasi dalam karya yang lain.

Tetapi jelas perhatian Marx tidak pada tingkat realitas empiris itu. Masalah yang menantangnya ketika menganalisis realitas empiris itu adalah justru untuk menemukan "mekanismenya" atau "hukum perubahannya". Bahasa empiris dibuangnya dan kita berhadapan dengan pemikiran teoretis abstraknya. Sebagian besar karyanya (misalnya, teori formasi sosial-ekonomi, sebagian besar teori kelas dan beberapa bagian teori tindakan individual dan alienasi individual) dibahas menurut pemikiran teoritis-abstrak itu. Konsep-konsep utama yang digunakan Marx tak segera dapat kita hubungkan dengan fenomena empiris karena memang merupakan *konstruk, model* atau *idealisasi* yang berguna untuk menata pengalaman empiris yang sangat kompleks itu. Ditingkat teoretis abstrak ini tak ada lagi pembicaraan mengenai individu atau kelompok, tetapi bicara tentang nilai surplus; hubungan sosial-produksi; basis ekonomi; superstruktur; kesadaran kelas; kepentingan kelas objektif; kelas untuk dirinya sendiri; keterasingan; dan sebagainya. *The German Ideologi* (1859) dan *The Capital* (1867) mnerupakan dua contoh yang bagus mengenai gaya pemikir Marx yang unik itu.

Tiga teori yang dibedakan diatas saling berkaitan logis dan merupakan satu bangunan teori bertingkat. Ketiganya dikaitkan oleh hubungan interpretasi (dari atas ke bawah) dan oleh hubungan agregat

---

[502] Karl Marx, *Op. Cit.,* h. 32-33.

[503] Frederick Engels, "*The Origin of The Family, Private Property and The State,* termuat dalam *Selected Work* Vol. I., (Moskow: Foreign Languages Publishing House, 1962). h. 320.

[504] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,* Judul Asli: *The Sociology of Social Change,* Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Prenada, Cet. III., 2007) h. 181-209.

(dari bawah ke atas). Teori yang berada di ditingkat yang lebih rendah, menjelaskan mekanisme proses yang ditetapkan ditingkat yang lebih tinggi, memberikan interpretasi yang kongkret atas pernyataan teoretis yang dikemukakan di tingkat lebih tinggi itu. Teori ditingkat lebih tinggi, melukiskan efek gabungan dari proses yang terjadi ditingkat lebih rendah, menggenalisir kemungkinan hasil gabungan yang sering tak diharapkan dan tak disadari.

Mekanisme perubahan formasi sosial-ekonomi disediakan oleh teori kelas sosial. Contoh, pernyataan umum mengenai kehancuran sendiri kapitalisme yang tak terelakkan itu diberi "daging empiris" melalui mekanisme pemiskinan relatif dan mobilisasi kelas buruh yang akhirnya meledak dalam bentuk revolusi antikapitalis. Meminjam komentar Raymod Aron: *Mekanisme kehancuran sendiri kapitalisme adalah sebuah mekanisme sosiologis dan bekerja melalui perilaku kelompok sosial.*[505]

Tetapi alasan mengapa kelas-kelas muncul dan mengapa terjadi perjuangan kelas, hanya dapat ditemukan dalam teori yang lebih rendah, yakni dalam teori individu dan tindakan mereka. Manusia mewarisi kecenderungan khusus, "kekuasaan", dan aspirasi mereka.

Teori individual inipun menerangkan mengapa individu yang mengalami keterasingan menyebabkan mereka mempunyai kepentingan ekonomi serupa dan mengakibatkan munculnya kelas sosial. Perkembangan perjuangan antar kelas mencapai titik puncaknya dalam revolusi dan menghasilkan perubahan keseluruhan formasi sosial-ekonomi.

Pertama, kita akan menelusuri implikasi ketiga kerangka teoretis itu bagi semua masalah utama dinamika sosial. Jelas ada tiga pandangan tentang masa depan yang akan dituju oleh gerakan masyarakat, tiga keadaan akhir yang akan dipakai sebagai kriteria kemajuan. Pada tingkat sejarah dunia, Marx membayangkan kemunculan sosialisme, yakni terutama melimpahnya komoditi ekonomi yang dipelihara oleh ledakan perkembangan kekuatan produktif (tehnologi), lenyapnya sistem pemilikan pribadi dan lenyapnya negara. Pada tingkat struktur sosial, ia meramalkan akan terciptanya masyarakat yang adil dan merata, terwujudnya prinsip "setiap orang akan terpenuhi kebutuhannya". Pada tingkat tindakan individual, ia berharap keterasingan anggota masyarakat akan lenyap sama sekali, dalam arti tercapainya kebebasan penuh: secara negatif bebas dari semua hambatan struktural dan secara positif bebas untuk membentuk lembaga dan organisasi sosial menurut keinginan orang.

Kedua, ada tiga jalan yang dilalui oleh perubahan sosial, tiga tempat pola perubahan spiral mewujudkan dirinya sendiri dalam sejarah. Pada tingkat sejarah dunia, terjadi pergeseran dari pemilikan bersama dan pengaturan diri sendiri masa primitif, melalui pemilikan pribadi dan kekuasaan politik, ke perekonomian komunis dan persamaan politik, "kebebasan berserikat dan kebebasan berproduksi". Pada tingkat struktur sosial, terjadi gerakan dari komunitas yang sebelumnya tidak mengenal kehidupan kelas, melalui masyarakat yang terbagi-bagi atas kelas-kelas, ke masyarakat tanpa kelas dimasa mendatang. Pada tingkat tindakan individual, terjadi pergeseran dari spontanitas primitif, melalui keterasingan dan kongkretisasi individu, menuju lenyapnya keterasingan dan timbulnya emansipasi dan kebebasan.

Ketiga, ada tingkat gagasan tentang revolusi yang menandai permulaan perubahan kualitatif dalam perjalanan sejarah. Pada tingkat sejarah dunia, revolusi menandai transformasi fundamental keseluruhan formasi sosial ekonomi. Pada tingkat struktur sosial, revolusi berarti pergantian kelas penguasa oleh kelas penentangnya. Pada tingkat individual, revolusi mengacu pada tindakan kolektif raksasa dimana kepentingan (terutama ekonomi) orang tertentu mengungguli kepentingan orang lain.

Keempat, gagasan tentang kepentingan pun mempunyai tiga makna. Pada tingkat sejarah dunia, *vested-interest* yang sistematif adalah objektif, diperjuangkan melalui posisi didalam formasi sosial-ekonomi, yakni di dalam sistem produksi. Pada tingkat struktur sosial, kepentingan kelas dipandang sebagai kepentingan subjektif dan kesadaran mereka berubah menjadi kesadaran kelas. Pada tingkat tindakan individual, kepentingan berarti pamrih, motivasi dan tujuan pribadi. Diantara berbagai pamrih, motivasi dan tujuan pribadi, kepentingan ekonomi dianggap menempati posisi tertinggi.

Kelima, ada tiga urutan mekanisme dialektika perubahan sejarah. Pada tingkat sejarah dunia, terdapat kontradiksi objektif antara segmen-segmen formasi sosial-ekonomi dan ada urutan standar (rantai) pemecahan masalahnya, mulai dari basis ekonomi menuju superstruktur politik dan hukum, dan bentuk-bentuk kesadaran sosial. Pada tingkat struktur sosial, terdapat konflik kelas yang berkembang dari kontradiksi kelas objektif, melalui antagonisme kelas dan permusuhan, ke perjuangan kelas sesungguhnya dan pecahnya revolusi. Pada tingkat tindakan individual, terdapat dorongan kreatif yang dihambat oleh kondisi alam atau sosial, adanya upaya terus-menerus untuk mengatasi hambatan itu, yang menghasilkan peningkatan kontrol manusia terhadap alam dan lingkungan sosial.

Keenam, ada tiga jenis faktor penyebab perubahan yang bekerja ditingkat yang berbeda. Jawaban untuk pertanyaan mendasar, yakni apakah perubahan sosial itu suatu keharusan atau tergantung, ataukah ditentukan oleh sebagian fakultatif, ataukah ada akhirnya atau tak terbatas, semuanya akan tergantung ditingkat teoretis mana perubahan itu dilihat. Ditingkat sejarah dunia, Marx menegaskan determinisme yang kuat. Proses sejarah menyeluruh dilihat sebagai sesuatu yang pasti, tak dapat ditawar-tawar, berlangsung melalui tahapan yang seragam dan tanpa terelakkan menuju terciptanya komunisme. Ditingkat struktur sosial, pengaruh faktor penentu jauh lebih lemah. Kelas yang menetukan tindakan kolektif akhirnya dipandu

[505] Raymod Aron, *Main Currens in Sociological Thought,* Vol I., (Gardem City: Doubleday Anchor, 1968) h. 174.

oleh kepentingan ekonomi mereka dan bertujuan untuk menguatkan atau mempertahankannya. Mereka mungkin kekurangan kesadaran, telah keliru atau mempunyai kesadaran palsu mengenai kepantingan mereka. Adakalanya mereka mungkin disesatkan dan ditipu untuk bertindak oleh pemimpin yang tak bertanggungjawab, demagog, atau oleh agen provokasi. Dalam semua kasus itu mungkin kelas bertindak bertentangan dengan kepentingan ekonomi mereka. Ditingkat tindakan individual, terdapat unsur terkuat kesukarelaan, pilihan bebas, keputusan spontan, kemungkinan, atau peluang. Pada dasarnya setiap individu dapat bertindak bertentangan dengan kepentingan ekonominya. Banyak orang yang mengutamakan pertimbangan lain diluar pertimbangan ekonomi (misalnya, emosi, tradisi dan ideologi). Tetapi secara keseluruhan, manusia adalah rasional dan kepentingan ekonomi memberikan alasan mendasar bagi pamrih, motivasi dan tujuan mereka. Jadi, meskipun tindakan secara individual tak ditentukan oleh pertimbangan ekonomi tetapi secara kolektif faktor ekonomi menentukan tindakan massa. Setiap orang bebas memilih tetapi juga dapat diramalkan pilihan apa yang diambil orang banyak.

Marx melukiskan perubahan sejarah melalui tiga tahap. Proses perubahannya bermula ditingkat tindakan individual. Tindakan individualah yang menjadi kekuatan penggerak perubahan sosial dan sejarah. Individu adalah agen perubahan terakhir. Tetapi dalam tindakannya, individu harus menyadari kondisi struktural disekitar mereka. Kesamaan kepentingan ekonomi (dan pertentangan kepentingan ekonomi dengan orang lain) mempersatukan orang menjadi sebuah kelas sosial dan sekaligus mempertentangkan mereka, kelas sosial memasuki perjuangan kelas dengan kelas yang berlawanan. Kelas yang progressif, yakni yang berkepentingan mengembangkan “kekuatan produktif” (tehnologi modern), akan lebih unggul. Mereka menciptakan produksi baru. Kelas lain sisanya terpaksa menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi yang baru ini. Lengkaplah transformasi fundamental seluruh masyarakat, yakni revolusi sosial. Kemudian cerita ini akan terulang dengan sendirinya.

[5] Revolusi Sosial[506]

Revolusi adalah wujud perubahan sosial paling spektakuler, sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis; pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan pembentukan ulang manusia. Revolusi tak menyisakan apapun seperti keadaan sebelumnya. Revolusi menutup epos lama dan membuka epos baru. Di saat revolusi, masyarakat mengalami puncak agennya, meledakkan transformasi dirinya sendiri. Segera sesudah revolusi, masyarakat dan anggota seperti dihidupkan kembali, hampir menyerupai kelahiran kembali. Dalam artian ini revolusi adalah tanda kesejahteraan sosial.[507]

Dibandingkan dengan bentuk perubahan sosial lain, revolusi berbeda dalam lima hal; (1) menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas, menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat: ekonomi, politik, kultur, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia, (2) dalam semua bidang tersebut, perubahan radikal, fundamental, menyentuh inti bangunan dan fungsi sosial, (3) perubahan yang terjadi sangat cepat, tiba-tiba, seperti ledakan dinamit ditengah aliran lambat proses historis, (4) dengan semua alasan itu, revolusi adalah pertunjukkan perubahan paling menonjol; waktunya luar biasa cepat dan karena itu sangat mudah diingat. Revolusi membangkitkan emosi khusus dan reaksi intelektual pelakunya dan mengalami ledakan mobilisasi massa, antusiasme, kegemparan, kegirangan, kegembiraan, optimisme dan harapan; perasaan hebat dan perkasa; keriangan aktivisme; dan menggapa kembali makna kehidupan; melambungkan aspirasi dan pandangan utopia masa depan.[508]

Konsep revolusi modern berasal dari dua tradisi intelektual: filsafat sejarah dan sosiologi. Konsep filsafat sejarah tentang revolusi berarti terobosan radikal terhadap kontinuitas jalannya sejarah (Brinton 1965: 237). Perhatian ditujukan pada pola umum proses sejarah dan revolusi menandai terobosan kualitatif pola umum ini. Tokoh teori perkembangan sangat sering berasumsi demikian. Contoh khususnya adalah pandangan Marx tentang rentetan formasi sosial-ekonomi dimana “revolusi sosial” menandai lompatan kualitatif ke fase perkembangan lebih tinggi.[509]

Konsep sosial tentang revolusi mengacu pada penggunaan gerakan massa atau acaman paksaan dan kekerasan terhadap penguasa untuk melaksanakan perubahan mendasar dan terus-menerus dalam masyarakat mereka. Pusat perhatian bergeser dari pola menyeluruh, dari arah dan hasil akhir yang dipentingkan, ke agen penyebab, mekanisme, dan skenario alternatif dari proses sosial yang berarti bahwa orang digunakan untuk membentuk dan membentuk ulang sejarah. Revolusi dipandang sebagai perwujudan terkuat kreativitas manusia yang dinyatakan dalam tindakan kolektif disaat proses historis berada di titik kritis. Ini berarti pandangan yang lebih bebas, yang menekankan pada agen dan peluang. Konsep ini lebih khas digunakan dalam teori perubahan-sosial tokoh post-perkembangan kini. Tokoh ini membuang gagasan “hukum besi” sejarah.[510]

---

[506] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,* Judul Asli: *The Sociology of Social Change,* Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Prenada, Cet. III., 2007) h. 357-379.
[507] *Ibid.*, h. 357.
[508] *Ibid.*
[509] *Ibid.*, h. 360.
[510] *Ibid.*

Cerminan kedua tradisi itu (filsafat sejarah dan sosiologi) terdapat dalam devibisi revolusi sekarang. Definisi revolusi dapat digolongkan menjadi tiga kelompok[511]; (1) revolusi mengacu pada perubahan fundamental, menyeluruh dan multidimensional, menyentuh inti tatanan sosial. Menurut pengertian ini, perombakan sebagian dari hukum dan administrasi, penggantian pemerintahan dan sebagainya tak terhitung sebagai revolusi, (2) revolusi melibatkan massa rakyat yang besar jumlahnya yang dimobilisasi dan bertindak dalam satu gerakan revolusioner. Dalam banyak kasus melibatkan pemberontakan petani (Jenkins 1982) dan pemberontakan urban. Menurut pengertian ini, meski suatu gerakan dapat menimbulkan perubahan paling dalam dan fundamental, tetapi jika dipaksakan oleh penguasa dari atas (misalnya, restorasi Meiji di Jepang, revolusi Attaturk di Turki, reformasi Nasser di Mesir, perestroika Ghorbachev) maka ia tak terhitung sebagai revolusi. Begitu pula, meski terjadi perubahan fundamental, jika ditimbulkan oleh kecenderungan sosial spontan, tak termasuk pengertian revolusi (kecuali dalam kata kiasan ketika kita berbicara tentang revolusi tehnologi atau ilmu pengetahuan, (3) Kebanyakan pakar yakin bahwa revolusi memerlukan keterlibatan kekerasan dan penggunaan kekerasan.

[6] Teori Utama Revolusi[512]

Berikut ini dibahas empat aliran utama teori revolusi. Masing-masing adalah aliran: tindakan, psikologi, struktural, dan politik.

Pertama, teori revolusi tindakan. Teori revolusi modern pertama diajukan oleh Sorokin tahun 1925 (1967). Kesimpulannya terutama didasarkan pada pengalaman revolusi Rusia 1917, tempat ia berpartisipasi dan memerakan peran politik tertentu. Teorinya dapat dianggap sebagai contoh pendekatan tindakan karena ia memusatkan perhatian pada tindakan individu yang menandai revolusi (1967: 367). Penyebab tindakan menyeleweng itu dicarinya dalam bidang kebutuhan dasar (naluri) individu. Pertunjukan tragedi besar, drama dan tragedi revolusi di panggung sejarah, terutama dibawa oleh naluri menindas bawaan (*Ibid*., h. 372). Revolusi ditandai oleh perubahan mendasar ciri perilaku manusia. Perilaku beradab cepat dibuang dan digantikan oleh perilaku seperti binatang buas yang hendak saling memangsa (*Ibid*., h. 372). Sorokin meneliti dan mencatat perubahan seperti itu di enam bidang: (1) transformasi reaksi terhadap ucapan, (2) penyelewengan reaksi terhadap pemilikan, (3) penyelewengan reaksi seksual, (4) penyelewengan reaksi terhadap tugas, (5) penyelewengan reaksi terhadap kekuasaan dan bawahan, (6) reaksi terhadap agama, moral, estetika dan berbagai bentuk perilaku yang dipelajari lainnya (*Ibid*., h. 41-169). Berbagai bentuk penyelewengan ini menghancurkan kepekaan naluriah. Orang bertindak tanpa menghiraukan kepatuhan, disiplin, aturan, dan berbagai kriteria perilaku beradap lainnya. Manusia berubah menjadi gerombolan buas manusia gila (*Ibid*., h. 367).

Kedua, teori revolusi psikologi. Aliran psikologi mengabaikan bidang tindakan reflek atau nalurian dasar dan beralih ke bidang orientasi sikap dan motivasi. Teori ini paling erat kaitannya dengan pemikiran akal sehat (*common sense*). Karena itu tak heran, teori itu paling populer dan paling rinci dari semua pendekatan yang ada. Teori paling berpengaruh diajukan oleh James Davis (1962) dan Ted Gurr (1970) dengan teori kerugian relatif. Revolusi disebabkan sindrom mental yang menyakitkan yang tersebar di kalangan rakyat, diperburuk karena menjangkiti banyak orang sehingga memotivasi perjuangan kolektif untuk meredakannya.

Ketiga, teori revolusi struktural. Teori struktural memusatkan perhatian pada tingkat struktur makro dengan mengabaikan faktor psikologi. Menurut teori ini revolusi adalah hambatan dan ketegangan struktural dan terutama bentuk hubungan khusus tertentu antara rakyat dan pemerintah. Penyebab revolusi lebih dicari ditingkat hubungan sosial khusus, yakni dalam kondisi hubungan antar kelas dan antar kelompok (nasioal dan internasional) ketimbang di kepala rakyat, dalam arti mentalitas atau sikap mereka. Tokoh terkenal teori ini, Theda Skocpol, menyebutknya “perspektif struktural” dengan maksud untuk lebih menekankan pada hubungan dan konflik obyektif yang terjadi antar kelompok dan antar bangsa dalam revolusi tertentu (1979: 291). Dengan mengutip Eric Hibsbawm, ia menyatakan: *Pentingnya bukti peran aktor dalam revolusi tak berarti bahwa mereka juga adalah pelaku, pencipta dan perencananya*. (*Ibid*., h. 18).

Dengan membandingkan bukti historis revolusi Perancis, Rusia dan Cina, Skockpol mengahasilkan analisis struktural umum tentang penyebab, proses dan hasil ketiga revolusi itu. Revolusi itu ternyata mengikuti pola tiga tahap: (1) terjadi kehancuran struktural dan krisis politik dan ekonomi dalam rezim lama. Mereka terjepit dalam tekanan bersilang antara struktur kelas domestik dan kepentingan hubungan internasional, penguasa otokrasi, administrasi sentral dan kekuatan militernya tercerai-berai. Keadaan ini membuka jalan bagi transformasi revolusioner yang dimulai dengan pemberontakan di bawah (*Ibid*., h. 47), (2) krisis rezim membuka peluang pemberontakan petani dan atau buruh perkotaan. Kehancuran rezim lama adalah perlu (*necessary*), tetapi tak cukup (*sufficient*) untuk menyulut revolusi. Pemberontakan petani telah menjadi unsur huru-hara penting dalam revolusi sosial hingga kini (*Ibid*., h. 112-13), tetapi revolusi hanya dapat terjadi dalam kondisi kehancuran politik sebelumnya. Melemahnya kemampuan menindas dari

[511] *Ibid*., h. 360-362.

[512] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,* Judul Asli: *The Sociology of Social Change,* Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Prenada, Cet. III., 2007) h. 366-373.

pemerintah yang sebelumya bersatu dan terpusatlah yang akhirnya menciptakan kondisi yang secara langsung menyebabkan, atau yang pada akhirnya menguntungkan bagi, meluasnya pemberontakan petani menentang tuan tanah (*Ibid*., h. 117), (3) tema revolusi utama selama tahap ketiga ini adalah bidang politik yakni, konsolidasi ulang, penataan ulang, dan penyatuan ulang pemerintah dan administrasinya oleh elit politik baru yang mulai berkuasa setelah berhasil menyingkirkan rezim lama. Revolusi hanya dapat diwujudkan dengan sempurna segera setelah organisasi negara yang baru (administrasi dan militer) dikoordinasikan oleh eksekutif yang memerintah atas nama simbol revolusi yang dibentuk ditengah-tengah konflik situasi revolusioner (*Ibid*., h. 163). Keunikan teori Skockpol adalah penekanannya pada faktor politik dan hubungan internasional. Baik itu terciptanya situasi revolusioner maupun wujud rezim baru yang muncul dari konflik revolusioner itu, keduanya pada dasarnya tergatung pada struktur organisasi negara, derajat otonominya dan hubungan dinamis dengan kelas-kelas dan kekuatan politik dalam negeri serta posisinya dalam hubungan dengan negara lain (*Ibid*., h. 284). Ia memprediksi: *Dalam revolusi dimasa mendatang, seperti di masa lalu, bidang kehidupan negara tetapi akan menjadi pusat perhatian* (*Ibid*., h. 293).

Teor struktural pun dituduh berat sebelah dan mengabaikan psikologi individual. Teori jelas memusatkan perhatian pada kondisi dan dampak struktural, mengabaikan keseluruhan proses kompleks yang terjadi diantara keduanya. Ketika massa rakyat diorganisir dan dimobilisasi oleh pemimpin yang melakukan revolusi. Skockpol lupa bahwa manusia yang berfikir dan bertindak itu (meski dengan sembrono) merupakan mata rantai yang menghubungkan antara kondisi struktural dan hasil sosialnya. Kondisi struktural tak bisa menentukan secara mutlak tentang apa yang akan dilakukan manusia. Kondisi struktural semata meletakkan batas tertentu terhadap tindakan manusia atau menetapkan sederetan peluang (Kommel, et. al., 1981: 1153). Pesan kritik yang diperoleh dari analisis struktural, sama dengan yang dikemukakan sebelumnya: memerlukan pendekatan sistesis atau multidimensional. Skockpol lebih melihat analisis struktural dan voluntaris sebagai *saling bertentangan ketimbang sebagai dua unsur penting dari penjelasan sosiologis yang lengkap* (*Ibid*., h. 1154).

Keempat, teori revolusi pendekatan politik. Pendekatan ini melihat revolusi sebagai sifat fenomena politik yang muncul dari proses yang khusus terjadi dibidang politik. Revolusi dilihat sebagai akibat pergeseran keseimbangan kekuatan dan perjuangan memperebutkan hegemoni antara pesaing untuk mengendalikan negara (Aya, 1979: 49). Contoh yang baik dari pemikiran serupa itu dikemukakan oleh Tilly (1978). Ia yakin revolusi bukanlah fenomena luar biasa, kekecualian atau penyimpangan tetapi justru kelanjutan proses politik dengan cara lain. Artinya, berbagai proses politik normal dimana berbagai kelompok berupaya mewujudkan tujuannya dengan merebut kekuasaan. Revolusi adalah bentuk ekstrim pertikaian untuk mengontrol politik. Revolusi hanya akan terjadi bila pesaing mampu memobilisasi sumber daya secara besar-besaran yang diperlukan untuk merebut kekuasaan dari rezim lama (Goldstone, 1982: 193). Kondisi lebih luas untuk menempatkan revolusi secara konseptual, disebut "model negara". Ini adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan, diantaranya: "pemerintah" yakni organisasi yang mengontrol cara utama penggunaan paksaan terhadap rakyat. "Pesaing" yakni kelompok yang selama periode tertentu menghimpun sumber daya untuk mempegaruhi pemerintah. Pesaing ini mencakup penantang dan anggota (aparatur) negara. Anggota adalah pesaing yang memiliki akses murah untuk mendapatkan sumber daya yang dikendalikan pemerintah. Penantang adalah pesaing lainnya (Tilly, 1978: 52). Memobilisasi kekuatan revolusioner terjadi dikalangan penantang yang tak mempunyai cara lembaga dan yang sah untuk mewujudkan kepentingan mereka. Mobilisasi berarti peningkatan sumber daya yang berada dibawah kontrol kolektif penantang atau peningkatan derajat kontrol kolektif (*Ibid*., h. 5). Mobilisasi adalah syarat tindakan kolektif untuk mencapai tujuan akhir besama. Revolusi adalah bentuk tindakan kolektif khusus yang dibedakan oleh kondisi khusus (situasi revolusioner). Ciri terpenting situasi revolusioner adalah "kedaulatan ganda" atau dengan kata lain pelipatgandaan pemerintah yang sebelumnya dibawah kotrol tunggal kemudian menjadi sasaran persaingan antara dua atau lebih kekuatan yang berbeda. Situasi ini akan berakhir bila kontrol atas pemerintahan diraih kembali oleh kekuasaan tunggal (*Ibid*., h. 191). Rakyat dihadapkan sekurangnya pada dua pusat kekuasaan dengan kepentingan yang bertentangan: pememrintah terdahulu dan yang menentang. Dalam hal ini ada empat jenis situasi politik: (1) sebagai taklukan, jika suatu negara berdaulat menaklukan negara berdaulat yang lain, (2) ketika sebuah negara taklukan menyatakan kemerdekaannya (misalnya, sebuah koloni yang tunduk kepada kekuasaan asing). Pola dasar situasi ini adalah pemberontakan anti kolonial atau pemberontakan nasional, (3) ketika penantang memobilisasi dan mendapatkan kontrol atas sebagian aparatur negara, (4) ketika negara terpecah menjadi dua blok atau lebih, masing-masing blok mendapat sebagian kontrol atas pemerintahan (*Ibid*., h. 191-2). Revolusi meledak jika sebagian besar rakyat mengalihkan kesetiaan mereka ke pusat kekuasaan tandingan. Revolusi menang bila pengalihan kekuasaan benar-benar terjadi dan perangkat pemegang kekuasaan digantikan oleh yang lain. Revolusi besar bersifat ekstrim dalam dua hal: *kekuasaan terbelah dua dan terjadi pergantian besar-besaran aparatur negara.*[]

MATERI 24
MANAJEMEN AKSI, AGITASI & PROPAGANDA, RETORIKA

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

TEHNIK & MANAJEMEN AKSI MASSA
Komunikasi Politik

Adalah proses penyampaian politik dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi politik dapat terjadi secara intern, ekstern , horisontal, vertikal. Tujuan komunikasi politik adalah mengkomunikasikan kehendak, kepentingan, tuntutan, aspirasi, nilai-nilai.

Jenjang dan Jenis Komunikasi Politik

Jenjang komunikasi politik terdiri dari: komunikasi politik vertikal dan horisontal dan dilihat dari jenisnya komunikasi politik internal dan eksternal.

Teori Komunikasi Politik

1. Teori Jarum Suntik hipodermik/ teori peluru. Mempunyai asumsi bahwa khalayak atau penerima tidak berdaya. Dalam organisasi militer, birokrasi tero ini sangat efektif digunakan. Bentuk kegiatannya antara lain; indoktrinasi, perintah, instruksi, dll.
2. Teori Khalayak Kepala Batu (*The ordinate audience).* Mempunyai asumsi bahwa khalayak sangat cerdas, kuat dan kritis. Khalayak melakukan reaksi keras, protes, pembangkangan dan penolakan, maka yang dilakukan adalah dengan persuasif.
3. Teori Empati dan Hemofili. Mempunyai asumsi bahwa khalayak dijasikan sahabat. Empati adalah kemampuan menempatkan diri pada orang lain, seedangkan hemofili adalah kemampuan menciptakan kebersamaan (fisik dan mental). Kegiatan yang paling sesuai dengan teori ini adalah *lobbiying* atau komunikasi antar pribadi.
4. Teori komunikasi non-verbal. Mempunyai asumsi bahwa bertindak sama dengan berkomunikasi. Kegiatan dalam teori ini; pakaian, panji-panji, umbul-umbul, spanduk dll.

Bentuk Komunikasi Politik

1. Dialog, Diskusi, Pelatihan Kader, Forum Interaktif.
2. Agitasi, Propaganda, Perang Urat Syaraf.
3. Komunikasi Politik Dua Arah. (*public understanding, public convidence, image building)*
4. Kampanye *(informaif, edukatif, persuasif, koersif)*

Efektifitas Komunikasi Politik

1. Memberikan pengaruh pola pikir massa, dengan komunikasi politik yang efektif.
2. Menyusun pesan politik secara taktis; AIDDA:
   a. Attention (perhatian).
   b. Interest (kepentingan)
   c. Desire (hasrat, keinginan)
   d. Decision (keputusan)
   e. Action (tindakan)
3. Sifat komunikasi politik; informative, edukatif, persuasif, instruktif.
4. Kesiapan psikologis massa.
5. Kredibilitas komunikator.

Tehnik Orasi Politik

1. Orasi politik adalah kemampuan menyamoaikan gagasan dimuka umum (public speking/ retorika dengan melakukan Persiapan tehnis, fisik, mental.
2. Memenuhi public speaing yang baik;
   a. pengetahuan
   b. penguasaan tema pokok
   c. kepercayaan publik
   d. semangat
   e. motivasi
3. Langkah yang harus disiapkan;
   a. perkiraan situasi dan kondisi khalayak
   b. pilihan materi dan logika urutan pidato/ orasi

c. garis besar pidato
4. Hal-hal yang mempengaruhi;
   a. penampilan/ performance
   b. kata-kata yang lugas, jelas dan ritme yang tepat
   c. memastikan khalayak mendengar pesan
5. Hambatan dalam orasi;
   a. bahasa yang berbeda dengan khalayak
   b. massa/ suasana yang tidak terkondisikan

PENGERTIAN AKSI MASSA

Aksi massa adalah suatu metode perjuangan yang mengandalkan kekuatan massa dalam menekan pemerintah/pengusaha untuk mencabut atau memberlakukan kebijakan yang tidak dikehendaki massa. Aksi massa merupakan bentuk perjuangan aktif dalam rangka merubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak massa, oleh karena aksi massa mengambil bentuk yang paling dekat dengan dinamika sosial yang berjalan dalam masyarakat.

Latar Belakang Psiko-Sosiologis Aksi Massa

Dorongan terpokok yang melahirkan aksi massa adalah keinginan massa akan perubahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa demonstrasi mahasiswa, aksi rakyat, dan gerakan lain dari kelompok kepentingan dalam rangka mewujudkan mimpi perubahan. Manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan pemenuhannya. Secara sosiologis ada tiga kategori kebutuhan: 1] Kebutuhan biologis/primer, yaitu kebutuhan manusia terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan jasmani manusia. Tergolong kebutuhan ini adalah makanan dan minuman, pakaian, bernafas dan istirahat, dan lain-lain. 2] Tergolong kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan biologis/primer. Tergolong kedalam kebutuhan ini adalah pendidikan, rekreasi, komunikasi, hubungan sosial, dan lain-lain. 3] Kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut kerinduan manusia akan hal-hal yang bersifat kerohanian, supranatural, dan metafisik. Misalnya kebutuhan akan shalat, kebaktian, klenteng, dan lain-lain. Semua kebutuhan teersebut bisa dituntut sesuai dengan tuntutan yang didiskusikan sebelum melakukan aksi.

Setiap manusia memiliki ketiga jenis kebutuhan tersebut, karenanya dalam pemenuhannya harus diatur supaya tidak terjadi penumpukan dan benturan. Peraturan mutlak diperlukan untuk tujuan keseimbangan dalam masyarakat. Peraturan atau hukumlah yang menentukan batasan antara hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan sosial pranata diperlukan untuk mengatur tata kehidupan antar manusia dalam masyarakat. Pranata sosial menjadi kebutuhan bersama dan karena itu pula harus disepakati bersama serta dilaksanakan secara konsisten secara bersama-sama pula. Namun demikian, walaupun perwakilan yang duduk pada institusi (trias politika dalam istilah Montesqueu) dipilih rakyat, tidak mustahil dapat terhindar dari penyimpangan terhadap aturan-aturan, membuat aturan untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya, mempertahankan kelangsungan kekuasaan dan mempertahankan status quo. Kelemahan utama dari sistem demokrasi adalah fasifnya rakyat dalam kebijakan, seolah rakyat hanya terlibat dalam pemilihan umum semata. Kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintah inilah yang menimbulkan jalan lain perjuangan aspirasi, yaitu jalan ekstra parlementer yang sering mengambil bentuk aksi massa atau demonstrasi.

BENTUK-BENTUK AKSI MASSA

Aksi massa dikenal dalam berbagai bentuk sesuai dengan target dan sasaran aksi. Di lihat dari aktivitas, aksi massa dibedakan dalam dua bentuk, yaitu aksi aksi statis dan aksi dinamis. Aksi statis adalah aksi massa yang dilakukan pada satu titik tertentu dari awal hingga aksi berakhir. Aksi dinamis adalah aksi yang dimulai dari titik kumpul tertentu lalu berpindah sesuai dengan sasaran aksi: 1] Rapat akbar, 2] Rally/ long march, 3] Mimbar bebas, 4] Panggung kesenian, dll. Hampir tidak ada aksi massa yang berjalan spontan. Umumnya aksi massa dipersipkan secara matang, mulai dari kekuatan massa yang akan terlibat, perangkat aksi, isu dan tuntutan serta institusi yang dituju.

TAHAPAN-TAHAPAN AKSI MASSA

Persiapan

Gagasan untuk melakukan aksi massa biasanya lahir dari adanya syarat objektif bahwa isntitusi/lembaga berwenang tidak tanggap terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu diperlukan adanya tekanan (*pressure*) massa untuk mendorong persoalan rakyat menjadi perdebatan luas dan terbuka di intra parlemen maupun dimuka pendapat umum (*public* opinion) di luar parlemen. Semua hal yang berkaitan dengan tekanan mengandalkan kekuatan massa harus dipersiapkan sehingga dapat berjalan optimal. Persiapan aksi massa berjalan dalam lingkaran-lingkaran diskusi yang diorientasikan mampu memunculkan:

Isu/ Tuntutan

Isu atau tuntutan yang akan diangkat dalam aksi massa harus dibicarakan dan diperdebatkan. Penentuan isu sangat penting karena akan memberi batasan gerak secara keseluruhan dari proses aksi massa di lapangan.

Prakondisi aksi

Prakondisi aksi adalah aktivitas yang dilakukan sebelum aksi massa berlangsung. Pra kondisi tersebut biasanya dalam bentuk aksi penyebaran selebaran, penempelan poster, grafiti action, dst. Tujuan pra kondisi aksi adalah untuk mensosialisasikan rencana aksi massa beserta isu/tuntutannya, serta memanaskan situasi pada sasaran kampanye atau sasaran aksi.

Perangkat aksi massa

Perangkat aksi adalah mbagian kerja partisipan aksi massa. Perangkat aksi massa disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya diperlukan perangkat sebagai berikut:

1. **Koordinator Umum**. Pemimpin umum dan penanggungjawab umum massa aksi. Kordum berfungsi sebagai pengendali utama jalannya aksi. Semua panitia aksi harus tunduk pada keputusan kordum saat aksi berjalan.
2. **Koordinator lapangan**. Korlap bertugas memimpin aksi di lapangan, berhak memberikan instruksi kepada peserta aksi/ massa. Keputusan untuk memulai ataupun membubarkan/mengakhiri aksi massa ditentukan oleh korlap. Korlap hendaknya orang yang mempunyai kemampuan agitasi, propaganda, orasi dan komunikatif.
3. **Wakil koordinator lapangan**. Wakorlap adalah pembantu korlap di lapangan dan berfungsi sama dengan korlap.
4. **Divisi Acara**. Divisi acara bertugas menyusun acara yang berlangsung pada saat aksi massa dan bertugas mengatur dan mengemas jalannya acara agar massa tidak jenuh. Termasuk mencatat kronologi aksi.
5. **Orator.** Orator adalah orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-tuntutan aksi massa dalam bahasa orasi, serta menjadi agitator yang membakar semangat massa.
6. **Humas dan Jaringan Aksi**. Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal aksi massa kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama pers.
7. **Negosiator**, berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. Misalnya pendudukan gedung DPR/DPRD sementara target tersebut tidak dapat tercapai karena dihalangi aparat keamanan, maka negosiator dapat mendatangi komandannya dan melakukan negosiasi agar target aksi dapat tercapai. Karenanya seorang negosiator hendaknya memiliki kemampuan diplomasi.
8. **Mobilisator**. Bertugas memobilisasi massa, menyerukan kepada massa untuk bergabung pada aksi massa yang akan digelar. Kerja mobilisasi massa berlangsung sebelum aksi dilaksanakan.
9. **Kurir**. Berfungsi sebaga penghubung ketika sebuah aksi massa tidak bisa dipastikan hanya dimanfaatkan oleh satu komite aksi atau kelompok saja. Bisa jadi pada saat bersamaan komite aksi lainnya sedang menggelar aksi massa, menuju sasaran yang sama. Oleh karena karena itu untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diperlukan fungsi kurir untuk menghubungkan kedua atau lebih komite aksi yang menggelar acara yang sama. Selain itu kurir juga berfungsi menjembatani komi aksi-komite aksi agar terjadi penyatuan massa atau aliansi taktis di lapangan. Dalam hal ini kurir bertugas memberikan laporan pada korlap perihal aksi massa yang dilakukan komite aksi lain.
10. **Advokasi**. Perbenturan antara kedua massa dengan aparat keamanan perlu dihindari, akan tetapi jika hal itu terjadi dan berakhir dengan penangkapan terhadap aktivis massa diperlukan peran tim advokasi yang bertugas membela dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
11. **Asisten teritorial/ keamanan/ sweaper/ dinamisator lapangan**. Sering terjadi aksi masa radikal menjadi aksi massa anarkis karena emosi terpancing untuk melakukan tindakan destruktif. Antisipasi, terhadap kecenderungan semacam ini dilakukan dengan melengkapi aksi massa dengan perangkat asisten teritorial (aster). Aster atau disebut juga keamanan atau sweaper bertugas mencegah terjadinya penyusupan oleh pihak luar yang bertujuan memperkeruh suasana. Tugasnya mengamati kondisi massa. Selain itu juga aster berfungsi mengagitasi massa dengan yel-yel dan lagu-lagu perjuangan agar aksi massa tetap tampil semangat.
12. **Logistic dan medical rescue**. Perangkat logistic bertugas menyediakan perlengkapan-perlengkapan fisik yang diperlukan dalam aksi massa seperti spanduk, poster, selebaran, pengeras suara, dan pernyataan sikap. Sedangkan medical rescue bertugas menyediakan obat-obatan dan memberikan bantan p3k terhadap masa yang kesehatan fisiknya terganggu ketika aksi massa berlangsung.
13. **Dokumentasi**. Divisi ini bertugas mengabadikan penyelenggaraan aksi massa dalam bentuk gambar atau dalam bentuk tulisan kronologi.
14. **Sentral informasi.** Sentral informasi adalah nomor telepon yang dijaga oleh seseorang yang bertugas mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi masa, situasi lapangan, sampai dengan informasi-informasi lainya.

KELENGKAPAN AKSI MASSA

Selain kelengkapan struktur berupa perangkat aksi massa, dibutuhkan pula kelengkapan material yang berupa instrumen aksi massa.

1. **Poster** adalah kertas ukuran lebar yang bertuliskan tuntutan aksi massa dipermukaanya. Poster berisi tuntutan aksi yang ditulis tebal dengan spidol atau cat agar jelas dibaca oleh massa ditulis dengan singkat dan jelas.
2. **Spanduk** adalah bentangan kain yang ditulis tuntutan-tuntutan atau nama komite aksi yang sedang menggelar aksi massa.
3. **Selebaran** adalah lembaran kertas yang memuat informasi agitasi dan propaganda kepada massa yang lebih luas agar memberikan dukungan terhadap aksi massa.
4. **Pengeras suara** adalah perangkat keras elektronika yang berfungsi memperbesa suara.
5. **Pernyataan sikap/ statemen** adalah pernyataan tertulis yang memberikan gambaran sikap massa terhadap satu kebijakan satu institusi/perorangan dibacakan dibagian akhir proses aksi massa. Penyusunannya dilakukan oleh humas atau dvisi logistik.
6. **Rute Aksi,** harus dipersiapkan dan dipahami semuruh massa aksi.

NAMA KOMITE AKSI/ ORGAN TAKTIS

Aksi massa meskipun bersifat temporer, tetap membutuhkan nama sebagai identitas pelaksana kegiatan. Nama komite aksi harus ditentukan, baik melalui perdebatan pada saat persiapan aksi massa. Apalagi kalau aksi massa merupakan tindakan bersama dari beberapa kelompok/orgaisasi, nama komite mutlak dibutuhkan agar tidak terjadi klaim dan kesalahpahaman antar organisasi. Nama awal komite aksi yang lazim dipakai untuk mengidentifikasi diri massa, sebagai berikut: Forum, Front, Barisan, Persatuan, Kesatuan, Solidaritas, Jaringan, Aliansi, Koalisi, Gerakan, Pergerakan, Himpunan, Serikat, Komite, Liga, Gabungan, Asosiasi, Dewan...dsb

LANGKAH TAKTIS SELANJUTNYA

Semua nama diatas sebenarnya mempuyai hakekat yang satu bahwa komite aksi yang sedang menyelenggarakan aksi massa mempunyai basis massa yang solid, bersatu, maju, dan tidak dapat dpecah oleh kekuatan dari luar organisasi komite bersangkutan. Namun demikian komite aksi yang profesional persoalan nama sudah tidak menjadi hal penting yang perlu dibicarakan apalagi diperdebatkan, karena hanya akan memakan waktu yang sia-sia saja. Beberapa organisasi yang namanya sudah populer dan mapan tak perlu merumuskan nama komite aksi karena hal yang demikian tidak lagi menjadi kebutuhan.

1. **Massa persiapan aksi.** Kehadiran massa dalam jumlah yang massif dalam aksi massa merupakan faktor yang menentukan keberhasilan aksi massa. Semakin besar kemampuan aksi suatu komite aksi dalam hal mobilisasi massa untuk memberikan support akan semakin memberikan kontribusi positif terhadap aksi massa. Maka pada tahap persiapan aksi massa dipersiapkan perangkat aksi/divisi khusus bekerja memobilisasi sebelum aksi berlangsung.
2. **Target aksi.** Target aksi adalah tujuan-tujuan minimal dan maksimal yang akan diraih dalam aksi massa tersebut. Misalnya aksi massa dengan target membangun persatuan dan solidaritas target mengkampanyekan isu/tuntutan, target memenangkan tuntutan dll.
3. **Sasaran dan waktu.** Mobilisasi massa akan diarahkan kemana senantiasa dibicarakan dalam pra aksi massa. Instansi atau lokasi yang dituju disesuaikan dengan isu isi tuntutan yang diangkat. Oleh karena itu ditentukan pula metode aksi massa yang diterapkan: rally dari satu titik awal menuju sasaran atau massa langsung memobilisasi kesasaran tujuan. Sasaran aksi massa adalah institusi perwakilan rakyat atau institusi lain yang relevan dengan tuntutan massa . misalnya : tuntutan aksi massa tentang pencabutan dwi fungsi ABRI/TNI maka sasaran yang relevan untuk tuntutan tersebut adalah instansi militer. Sedangkan waktu aksi ditentukan berdasarkan kebutuhan yang paling mungkin dengan segala pertimbangan seperi basis massa, sasaran aksi massa, jika basis massa direncanakan mahasiswa, maka aksi diselenggarakan pada hari libu mahasiswa, begitu pula dengan sasaran kantor-kantor pemerintah indonesia aktif dari senin hingga jumat dari pukul 08.00 hingga pukul 14.00 maka aksi tidak menarik jika dilaksanakan diluar waktu tersebut misalnya pada hari sabtu dan minggu dan tanggal merah lainya.momentum aksi massa yang jelas sangat menentukan. Aksi pada satu momentum bersejarah akan membuka kembali memori massa akan satu peristiwa yang tidak dihendaki terjadi oleh semua. Maka momentum dapat dibagi 2 yaitu:
   a) Momentum yang dibuat sendiri (ourself made momentum). Momentum pengajuan tuntutan terhadap pemerintah untuk mencabut atau mengukuhkan kebijakan saat tertentu yang tidak ada basis materialnya pada massa lalu, bahwa pernah terjadi suatu peristiwa penting yang diketahui orang banyak pada hari atau tanggal yang bersangkutan.
   b) Momentum yang disediakan(privided momentum). Yaitu saat penyelenggaraan aksi massa yang dipaskan dengan memperingati satu kejadian pada masa silam. Misalny aksi massa buruh pada tanggal 1 mei memperingati hari buruh sedunia. Aksi massa yang dilaksanakan pada momentum yang disediakan ini akan dapat mengingatkan kembali massa luas kepada peristiwa yang tragis atau bahkan monumental yang pernah terjadi pada masa lalu.

PELAKSANAAN AKSI MASSA/ DEMONSTRASI

Pada saat aksi massa dilakukan, segala tindakan massa di setting sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan para perangkat yang telah diberi tugas. Semua bekerja sesuai dengan tugas yang telah disepakati bersama dalam persiapan sebelum aksi massa digelar penyimpangan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat bersama akan dikoreksi pada saat forum evaluasi diadakan.

EVALUASI

Evaluasi adalah tahap akhir dari rangkaian aksi massa. Merupakan forum atau wadah tempat mengoreksi kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan setting aksi massa yang telah disepakati bersama. Evaluasi ini berfungsi melahirka ide-ide baru yang dapat membagun struktur pemikiran alternatif terhadap pola aksi yang telah dilaksanakan oleh komite aksi.dialektika pola aksi massa justru dapat terungkap ketika evaluasi terhadap pelaksanaan aksi masa digelar. Aksi massa atau sering disebut demontsrasi telah marak di indonesia sejak periode akhir kejayaan rejim soeharto. Fenomena aksi massa ini tidaklah lahir secara spontanitas belaka, kemunculanya lebi dilatar belakangi oleh latar belakang sosiologis dan psikologis massa yang tidak puas terhadap keadaan sosial yang meligkupinya. Keadaan sosial tersebut disebabkan oleh sistem sosial, ekonomi, politik dan kompleksitas siste yang lain.

LANGKAH TAKTIS ADVOKASI

1. MENGUPAYAKAN ADANYA KPEMIMPINAN ORGANISASI YANG KUAT
2. MELAKUKAN INVESTIGASI ISU YANG MENDESAK
3. PEMBACAAN, ANALISIS DATA ATAU ISU/ PENCARIAN DAN PENELITIAN FAKTA
4. MERUMUSKAN STRATEGI DINAMIS
   a. Statement missi (*Mission statement)*
   b. Tujuan dan sasaran advokasi
   c. Rancangan stragi dan tindakan
   d. Rencana aksi *(plan of actions)*
5. MENCARI DUKUNGAN YANG BESAR DARI KONSTITUEN ATAU KELOMPOK PENDUKUNG
6. MOBILISASI DAN AKSI YANG TERLIBAT
   a. Pertemuan para pembuat keputusan
   b. Pertemuan para pelanggar HAM
   c. Interview media massa
   d. Public Hearing
   e. Public Meeting
   f. Parlementary Hearing
   g. Kesaksian Pengadilan
   h. Pengajuan Petisi
   i. Boikot, Pawai Protes, Aksi Massa

TEKNIK AGITASI DAN PROPAGANDA

Pengantar

Istilah agitasi, propaganda, dan retorika atau orang sering menyebutnya AGITOP (Agitasi, Orasi dan Propaganda) adalah bagian dari “cara” berkomunikasi. Sebetulnya ada banyak cara berkomunikasi lainya seperti penerangan, jurnalistik, humas, publisitas, pameran, dll. Seperti apa yang menjadi tujuan umum dari komunikasi maka AGITOP ditujukan juga untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku orang lain seperti yang diharapkan oleh komunikator (pengirim pesan). Karena terkait masalah perilaku individu dalam situasi sosial, AGITOP tidak lepas dari masalah psikologi sosial. AGITOP akan menjadi efektif apabila disertai dengan pemahaman atas faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi sikap, maupun perilaku individu maupun kelompok. Faktor internal seperti kepribadian, sistem nilai, motivasi, serta sikap terhadap sesuatu yang ada disekitarnya, sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh sistem nilai yang hidup ditengah masyarakat, kondisi lingkungan alam, tata ruang dan kondisi sosial ekonomi. AGITOP menjadi penting bagi organisasi masyarakat (ormas) maupun partai politik (parpol) hingga perusahaan komersial sekalipun karena menyangkut upaya-upaya untuk mecapai kemenangan maupun mempengaruhi sikap, pendapat maupun perilaku dari pihak-pihak lain baik itu pihak musuh (politik, ideologi, saingan bisnis), pihak netral maupun kawan. Bagi ormas atau Parpol, muara dari AGITOP ditujukan bagi sasaran pencapaian ke arah cita-cita perubahan sosial dari ideologi ormas, atau parpol yang bersangkutan. Seorang Komunikator (agitator, propagandator, ataupun orator) yang baik, setidak-tidaknya harus mengerti unsur-unsur dasar komunikasi. Pakar komunikasi Harold Lasswell (1972) menyebutnya dalam pertanyaan: Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect ?. (Siapa mengatakan apa melalui apa untuk siapa dan pengaruhnya apa ?). Siapa (Komunikator), mengatakan apa (Pesan), melalui apa (Media), untuk siapa (komunikan/penerima pesan), pengaruhnya apa (efek). Analisa yang mendalam terhadap unsur-unsur komunikasi diatas juga akan turut mempertajam strategi komunikasi bagi sebuah organisasi.

Agitasi

Dalam makna denotatifnya, agitasi berarti hasutan kepada orang banyak untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan dan lain sebagainya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh tokoh/aktivis partai politik, ormas dan lain sebagainya dalam sesi pidato maupun tulisan. Dalam praktek, dikarenakan kegiatan agitasi yang cenderung "menghasut" maka seringkali disebut sebagai kegiatan "provokasi" atau sebagai perbuatan untuk membangkitkan kemarahan. Bentuk agitasi sebetulnya bisa dilakukan secara individual maupun dalam basis kelompok (massa).

Beberapa perilaku kolektif yang dapat dijadikan sebagai pemicu dalam proses agitasi adalah:

1. Perbedaan kepentingan, seperti misalnya isu SARA (Suku, Agama, Ras). Perbedaan kepentingan ini bisa menjadi titik awal keresahan masyarakat yang dapat dipicu dalam proses agitasi
2. Ketegangan sosial, ketegangan sosial biasanya timbul sebagai pertentangan antar kelompok baik wilayah, antar suku, agama, maupun pertentangan antara pemerintah dengan rakyat.
3. Tumbuh dan menyebarnya keyakinan untuk melakukan aksi, ketika kelompok merasa dirugikan oleh kelompok lainya, memungkinkan timbul dendam kesumat dalam dirinya. Hal ini bisa menimbulkan keyakinan untuk dapat melakukan suatu aksi bersama;

Dalam politik, ketiga perilaku kolektif diatas akan menjadi ledakan sosial apabila ada faktor penggerak (provokator)nya. Misalnya ketidakpuasan rakyat kecil terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada mereka juga bisa menjadi sebuah alat pemicu yang efektif untuk mendongkel sebuah rezim. Dalam tahap selanjutnya, mobilisasi massa akan terbentuk apabila ledakan sosial yang muncul dapat memancing solidaritas massa. Hingga pada eskalasi tertentu mebisa munculkan kondisi *collaps*. Dalam proses agitasi pemahaman perilaku massa menjadi penting. Agar agitasi dapat dilakukan secara efektif maka perlu diperhatikan sifat orang-orang dalam kelompok(massa) seperti ; massa yang cenderung tidak rasional, mudah tersugesti, emosional, lebih berani mengambil resiko, tidak bermoral. Kemampuan seorang agitator untuk mengontrol emosi massa menjadi kunci dari keberhasilan proses agitasi massa. Sedangkan pendekatan hubungan interpersonal merupakan kunci sukses dalam agitasi individu.

Propaganda

Propaganda sendiri berarti penerangan (paham, pendapat, dsb) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang lain agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Kegiatan propaganda ini banyak dipakai oleh berbagai macam organisasi baik itu orgnisasi massa, parpol, hingga perusahaan yang berorientasi profit sekalipun baik kepada kawan, lawan maupun pihak netral. Propaganda juga merupakan inti dari kegiatan perang urat syaraf (nerve warfare) baik itu berupa perang ideologi, politik, ide, kata-kata, kecerdasan, dll. Kegiatan propaganda menurut bentuknya seringkali digolongkan dalam dua jenis, yaitu propaganda terbuka dan tertutup. Propaganda terbuka ini dilakukan dengan mengungkapkan sumber, kegiatan dan tujuannya secara terbuka. Sebaliknya, propaganda tertutup dilakukan dengan menyembunyikan sumber kegiatan dan tujuannya. Para pakar organisasi menggolongkan 3 (tiga) jenis model propaganda. Menurut William E Daugherty, ada 3 (tiga) jenis propaganda :

1. Propaganda putih (white propaganda), yaitu propaganda yang diketahui sumbernya secara jelas, atau sering disebut sebagai propaganda terbuka. Misalnya propaganda secara terang-terangan melalui media massa. Biasanya propaganda terbuka ini juga dibalas dengan propaganda dari pihak lainya (counter propaganda).
2. Propaganda Hitam (black propaganda), yaitu propaganda yang menyebutkan sumbernya tapi bukan sumber yang sebenarnya. Sifatnya terselubung sehingga alamat yang dituju sebagai sumbernya tidak jelas.
3. Propaganda abu-abu (gray propaganda), yaitu propaganda yang mengaburkan proses indentifikasi sumbernya.

Penerbit Harcourt, Brace and Company menyebarkan publikasi berjudul The Fine Art of Propaganda atau yang sering disebut sebagai the Device of Propaganda (muslihat propaganda) yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis propaganda sebagai berikut:

1. Penggunaan nama ejekan, yaitu memberi nama-nama ejekan kepada suatu ide, kepercayaan, jabatan, kelompok bangsa, ras dll agar khalayak menolak atau mencercanya tanpa mengkaji kebenaranya.
2. Penggunaan kata-kata muluk, yaitu memberikan istilah muluk dengan tujuan agar khalayak menerima dan menyetujuinya tanpa upaya memeriksa kebenaranya.
3. Pengalihan, yaitu dengan menggunakan otoritas atau prestise yang mengandung nilai kehormatan yang dialihkan kepada sesuatu agar khalayak menerimanya.
4. Pengutipan, yaitu dilakukan dengan cara mengutip kata-kata orang terkenal mengenai baik tidaknya suatu ide atau produk, dengan tujuan agar publik mengikutinya.
5. Perendahan diri, yaitu teknik propaganda untuk memikat simpati khalayak dengan meyakinkan bahwa seseorang dan gagasannya itu baik.
6. Pemalsuan, yaitu dilakukan dengan cara menutup-nutupi hal-hal yang faktual atau sesungguhnya dengan mengemukakan bukti-bukti palsu sehingga khalayak terkecoh.

7. Hura-hura, yaitu propaganda dengan melakukan ajakan khalayak secara beramai-ramai menyetujui suatu gagasan atau program dengan terlebih dahulu meyakinkan bahwa yang lainya telah menyetujui.

Seperti halnya komunikasi lainya maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan propaganda :

1. Siapa yang dijadikan sasaran propaganda, kawan, lawan, atau pihak netral
2. Media apa yang akan dipergunakan, surat kabar, radio, majalah, televisi, sms, buku, film, pamlet, poster dll. Untuk musuh misalnya melalui desas-desus dan pihak netral dengan negosiasi atau diplomasi
3. Pesan apa yang akan disebarkan
4. Apa yang menjadi tujuan dari propaganda, misalnya ketakutan , kekacauan, ketidakpercayaan dsb.

TEHNIK RETORIKA

Retorika menurut arti katanya adalah ilmu bicara (rhetorica). Menurut Cleanth Brooks dan Robert Penn Warren adalah seni penggunaan bahasa secara efektif. Namun sebagian besar pakar komunikasi mengartikan retorika tidak hanya menyangkut pidato (public speaking), tapi juga termasuk seni menulis. Menurut A. Hitler hakekat retorika adalah senjata psikis untuk untuk memelihara massa dalam keadaan perbudakan psikis. Retorika sebagai seni berbicara sudah dipelajari sejak abad ke lima sebelum masehi, yaitu sejak kaum Sophis di Yunani mengajarkan pengetahuan mengenai politik dan pemerintahan dengan penekanan utama dalam kemampuan berpidato. Georgias (480-370 SM) sebagai tokoh aliran Sophisme menyatakan kebenaran suatu pendapat hanya dapat dibuktikan jika tercapai kemenangan dalam pembicaraan.

Namun karena dalam praktek retorika lebih cenderung dimaksudkan untuk memutarbalikan fakta demi kemenangan, maka Plato mendirikan akademia sebagai proses pencarian kebenaran dengan pengembangan thesa dan antithesa. Menurut Plato sendiri retorika bertujuan untuk memberikan kemampuan menggunakan bahasa yang sempurna dan merupakan jalan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan dalam terutama dalam bidang politik. Menurut Effendy, dengan mencontohkan pada figur Bung Karno, seorang orator politik yang baik setidak-tidaknya harus memiliki tiga prasyarat sebagai berikut: Ethos, kredibilitas sumber. Pathos, menunjukan imbauan emosional. Logos, menunjukan imbauan logis. Menurut teori, setidaknya ada empat bagian dalam pidato :

1. Exordium (kepala), adalah bagian pendahuluan. Fungsinya sebagai pengantar ke arah pokok persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk menyiapkan mental para hadirin. Yang terpenting adalah membangkitkan perhatian. Beberapa cara untuk mengundang perhatian adalah sebagai berikut : Mengemukakan kutipan, mengajukan pertanyaan, menyajikan ilustasi yang spesifik, memberikan fakta yang mengejutkan, menyajikan hal yang mengundang rasa manusiawi, mengetengahkan pengalaman yang ganjil. Tentu dari sekian cara tersebut juga harus disesuaikan dengan latar belakang kebudayaan dan pendidikan.
2. Protesis (Punggung), adalah bagian pokok pembahasan yang ditampilkan dengan terlebih dahulu mengemukakan latar belakangnya.
3. Argumenta (Perut), adalah batang tubuh dari pidato yang merupakan satu kesatuan dengan punggung atau pokok pembahasan. Argumenta adalah alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian protesis.
4. Conclusio(ekor), adalah bagian akhir dari naskah pidato yang merupakan kesimpulan dari uraian keseluruhan sebelumnya. Konklusia adalah merupakan sebuah penegasan , hasil pertimbangan yang mengandung justifikasi si orator. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun conclusio: jangan mengemukankan fakta baru, jangan menggunakan kata-kata mubazir, jangan menampilkan hal-hal yang menimbulkan antiklimaks.

NOTE: Pidato dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan teks dan tanpa teks. Namun semuanya harus tetap dipersiapkan dengan baik. Pepatah tua mengatakan “Qui ascendit sine labore, desendit sine honore” (siapa yang naik tanpa kerja, akan turun tanpa penghormatan”.

MATERI 25
ADVOKASI & PENGORGANISIRAN MASYARAKAT

OLEH: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA, M.A.

ALUMNUS S1 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA | ALUMNUS S2 SOSIOLOGI FISIPOL UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) JOGJAKARTA | PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | DIREKTUR INSTITUTE FOR PHILOSOPHICAL & SOCIAL STUDIES (INSPHISOS) JOGJAKARTA | DOSEN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL-GHOZALI (UNUGHA) CILACAP | CONTAC PERSON: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA) | E-MAIL: NURIEL.UGM@GMAIL.COM / FB: NUR SAYYID SANTOSO KRISTEVA | PIN BBM: 5221 7134, WEBSITE: WWW.NEGARAMARXIS.BLOGSPOT.COM

[1] STUDI ADVOKASI DASAR

Definisi Advokasi

- Advocate dalam bahasa Inggris dapat berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis. Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (*incremental*).
- Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik.
- Sedangkan menurut Sheila Espine-Villaluz, advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pijakan Advokasi

- Dalam literature sosial, advokasi secara umum dapat didefinisikan sebagai serangkaian gerakan sistemik, terorganisir, yang dilakukan dengan sadar, untuk mendorong perubahan sosial dalam kerangka system yang ada.
- Yang menjadi pusat pijakan advokasi adalah nilai-nilai keadilan, kebenaran, accountability, transparansi, dan nilai-nilai luhur lainnya.

Jenis Advokasi

- Advokasi secara umum dibagi menjadi dua, pertama advokasi litigasi. Kedua, advokasi nonlitigasi.
- Yang dimaksud dengan advokasi litigasi adalah advokasi yang dilakukan sampai ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang pasti atau resmi. Advokasi litigasi memiliki beberapa bentuk seperti class-action, judicial review, dan legal standing.
- Sedangkan advokasi nonlitigasi dapat berupa pengorganisasian masyarakat, negosiasi, desakan massa (demosntrasi, mogok makan, pendudukan, dan lainnya) untuk memperjuangkan haknya

Sistem Hukum Dalam Advokasi

- ***Pertama*, isi hukum (*content of law*)** yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk UU, PP, Keppres dan lain sebagainya atau karena adanya 'kesepakatan umum' (konvensi) tidak tertulis yang dititikberatkan pada naskah (teks) hukum tertulis atau aspek tekstual dari sistem hukum yang berlaku.
- ***Kedua*, tata laksana hukum (*structure of law*)** yang merupakan seperangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. Dalam pengertian ini tercakup lembaga-lembaga hukum (pengadilan, penjara, birokrasi, partai politik dll) dan para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen).
- ***Ketiga,* adalah budaya hukum (*culture of law*)** yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran, penafsiran terhadap dua aspek hukum diatas, isi dan tata-laksana hukum. Oleh karena itu idealnya suatu kegiatan atau program advokasi harus mencakup sasaran perubahan ketiga-tiganya. Dengan demikian, suatu kegiatan advokasi yang baik adalah yang secara sengaja dan sistematis didesain untuk mendesakkan terjadinya perubahan, baik dalam isi, tata-laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Perubahan itu tidak harus selalu terjadi dalam waktu yang bersamaan, namun bisa saja bertahap atau berjenjang dari satu aspek hukum tersebut yang dianggap merupakan titik-tolak paling menentukan.

Kerangka Kerja Advokasi

- **Proses-proses legislasi dan juridiksi**, yakni kegiatan pengajuan usul, konsep, penyusunan academic draft hingga praktek litigasi untuk melakukan judicial review, class action, legal standing untuk meninjau ulang isi hukum sekaligus membentuk preseden yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum selanjutnya.

- **Proses-proses politik dan birokrasi**, yakni suatu upaya atau kegiatan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana peraturan melalui berbagai strategi, mulai dari lobi, negoisasi, mediasi, tawar menawar, kolaborasi dan sebagainya.
- **Proses-proses sosialisasi dan mobilisasi**, yakni suatu kegiatan untuk membentuk pendapat umum dan pengertian yang lebih luas melalui kampanye, siaran pers, unjuk rasa, boikot, pengorganisasian basis, pendidikan politik, diskusi publik, seminar, pelatihan dan sebagainya. Untuk membentuk opini publik yang baik, dalam pengertian mampu menggerakkan sekaligus menyentuh perasaan terdalam khalayak ramai, keahlian dan ketrampilan untuk mengolah, mengemas isu melalui berbagai teknik, sentuhan artistik sangat dibutuhkan.

Aspek-Aspek Strategi Advokasi

- *Pertama*, bahwa dalam advokasi kita harus menentukan target yang jelas. Maksudnya kita harus menentukan kebijakan publik macam apa yang akan kita ubah. Apakah itu UU, Perda atau produk hukum lainnya.
- *Kedua*, kita juga harus menentukan prioritas mengingat tidak semua kebijakan bisa diubah dalam waktu yang cepat. Karena itu, kita harus menentukan prioritas mana dari masalah dan kebijakan yang akan diubah.
- *Ketiga*, realistis. Artinya bahwa kita tidak mungkin dapat mengubah seluruh kebijakan public. Oleh karena itu kita harus menentukan pada sisi-sisi yang mana kebijakan itu harus dirubah. Misalnya pada bagian pelaksanaan kebijakan, pengawasan kebijakan atau yang lainnya.
- *Keempat*, batas waktu yang jelas. Alokasi waktu yang jelas akan menuntun kita dalam melakukan tahap-tahap kegiatan advokasi, kapan dimulai dan kapan akan selesai.
- *Kelima*, dukungan logistik. Dukungan sumber daya manusia dan dana sangat dibutuhkan dalam melakukan kegiatan advokasi.
- *Keenam*, analisa ancaman dan peluang.

Kebutuhan Sebelum Melakukan Advokasi

- Memiliki jumlah anggota aktif yang memadai
- Mampu menjangkau ke banyak kelompok massa
- Mampu membangun aliansi dengan kelompok lain yang kuat
- Memiliki kelompok inti yang terdiri dari orang-orang yang berpengaruh dan dikenal luas
- Memiliki kredibilitas
- Mempunyai legitimasi
- Memiliki informasi yang cukup dan memadai
- Mampu merumuskan issu
- Memiliki kemampuan dan kewenangan yang diakui dan dihormati
- Memiliki keteguhan moral

Riset Advokasi dan Riset Akademis

Keterangan	Riset Akademis	Riset Advokasi
Tujuan	▪ Pembuktian teori/ hipotesa ▪ Kebenaran ilmiah	▪ Pembuktian kasus/kejadian ▪ Kebenaran issu yang diadvokasi
Manfaat	▪ Pengakuan akademis ▪ Pengembangan teori	▪ Pengakuan hak atau pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat ▪ Umpan-balik perubahan kebijakan publik
Isi dan Objek	▪ Teori/hipotesa ilmiah ▪ Fakta/data berkaitan dengan teori atau hipotesa tersebut	▪ Kebijakan publik ▪ Fakta/data tentang pelaksanaan dan dampak kebijakan publik
Metodologi	▪ Nomotetik (harus objektif, netral, sistematika baku, umumnya kuantitatif	▪ Ideografis (subjektif, memihak, tidak ada kaidah baku, umumnya kualitatif
Pelaksana	▪ Pakar, professional	▪ Campuran dengan melibatkan rakyat
Penyajian hasil	▪ Sangat rinci, dingin, penuh data, pakai istilah teknis ▪ Sistematika baku; hipotesa, data pembuktian, baru kesimpulan ▪ Bentuk resmi/formal ▪ Harus disajikan oleh peneliti	▪ Singkat, padat, jelas, tegas ▪ Gaya bahasa populer ▪ Statistik seperlunya saja ▪ Sedikit istilah teknis ▪ Sistematika terbalik; kesimpulan, pernyataan sikap/tuntutan, baru data dan ilustrasi ▪ Bisa disajikan oleh orang lain

Tahapan Advokasi

- **Membentuk lingkar inti:** Langkah pertama dari proses advokasi adalah memebentuk lingkar inti, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas serta pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Sedemikian pentingnya posisi ini, sehingga orang atau organisasi yang berada didalamnya haruslah memiliki kesamaan visi dan analisis (bahkan ideologi) yang jelas terhadap issu yang diadvokasi.
- **Memilih issu strategis:** Tugas pertama dari lingkar inti adalah merumuskan issu tertentu yang diadvokasi. Issu yang dirumuskan tersebut dapat dikatakan menjadi suatu issu strategis jika: Aktual, Penting dan mendesak, Sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Berdampak positif pada perubahan sosial yang lebih baik, Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar.
- **Merancang sasaran dan strategi:** Dalam merancang sasaran dan strategi dapat digunakan metode SMART, yaitu: *Spesifik*; dalam arti rumusan sasaran memang spesifik, kongkrit, dan jelas. *Measurable*; dalam arti hasilnya punya indikator yang jelas sehingga dapat dipantau dan diketahui. *Realistis*; dalam arti apakah sasaran mungkin dapat dicapai. *Time Bound*; dalam arti punya batas waktu yang jelas.
- **Mengolah data dan mengemas informasi:** Salah satu cara yang dikenal dalam mengolah data dalam proses advokasi adalah dengan melakukan riset advokasi. Riset advokasi sebenarnya lebih merupakan riset terapan, terutama dalam bentuk kajian kebijakan dengan tujuan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolahnya sebagai informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses advokasi; dalam rangka memilih dan merumuskan issu strategis, sebagai bahan proses legislasi, untuk keperluan lobby dan kampanye, dan sebagainya.

Ciri Dan Unsur Aliansi Yang Efektif

- Fokus pada tujuan dan sasaran advokasi yang disepakati bersama
- Tegas dalam menetapkan dan menggarap satu atau beberapa issu yang disepakati bersama
- Ada pembagian peran dan tugas yang jelas antara para pihak yang terlibat
- Terbentuk sebagai hasil atau dampak dari adanya pertentangan dalam masyarakat
- Memanfaatkan konflik yang muncul sebagai upaya konstruktif dalam menjaga dinamika dan perimbangan (perlu fleksibilitas)
- Ada kemungkinan lahir bentuk-bentuk kerjasamabaru yang lebih berkembang di masa mendatang
- Ada mekanisme komunikasi yang baik dan lancar
- Dibentuk dengan jangka waktu yang jelas

Langkah Taktis Advokasi

1. MENGUPAYAKAN ADANYA KEPEMIMPINAN ORGANISASI YANG KUAT DAN KREDIBEL
2. MELAKUKAN INVESTIGASI ISU YANG MENDESAK
3. PEMBACAAN, ANALISIS DATA ATAU ISU/ PENCARIAN DAN PENELITIAN FAKTA
4. MERUMUSKAN STRATEGI DINAMIS: (1) Statement missi (*Mission statement)*, (2) Tujuan dan sasaran advokasi, (3) Rancangan stragi dan tindakan, (4) Rencana aksi *(plan of actions)*
5. MENCARI DUKUNGAN YANG BESAR DARI KONSTITUEN ATAU KELOMPOK PENDUKUNG
6. MOBILISASI DAN AKSI YANG TERLIBAT: (1) Pertemuan para pembuat keputusan, (2) Pertemuan para pelanggar HAM, (3) Interview media massa, (4) Public Hearing, (5) Public Meeting, (6) Parlementary Hearing, (7) Kesaksian Pengadilan, (8) Pengajuan Petisi, (9) Boikot, Pawai Protes, Aksi Massa.

Bagaimana mengemas informasi untuk advokasi?

Keperluan	Jenis data/informasi yang dibutuhkan	Bentuk, cara, dan media penyajian
Litigasi	▪ Kronologis kasus ▪ Rekaman pernyataan (wawancara) narasumber ▪ Data statistik/informasi yang mendukung	▪ Laporan tertulis resmi dan rinci ▪ Kompilasi data dan informasi ▪ Rekaman suara, gambar foto/video ▪ Barang bukti asli dan salinan atau peragaannya
Legal drafting/counter draft	▪ Naskah RUU/Raperda ▪ Contoh RUU/Perda sejenis dari daerah/negara lain ▪ Naskah UU/Perda yang ada kaitannya; hasil riset/kajian kebijakan yang berkaitan ▪ Data statistik/informasi lain yang mendukung	▪ Laporan tertulis resmi dan rinci ▪ Kompilasi dan anotasi naskah RUU/UU/Perda/Raperda ▪ Kompilasi hasil riset/kajian kebijakan
Lobby pejabat dan politisi	▪ Kronologi kasus ▪ Laporan investigasi lapangan ▪ Laporan kajian kebijakan ▪ Guntingan pemberitaan media massa yang berkaitan ▪ Pernyataan pendapat/sikap berbagai pihak dan kalangan ▪ Hasil jajak pendapat ▪ Data statistik dan informasi lain yang mendukung ▪ Profil organisasi/jaringan	▪ Laporan tertulis resmi dan rinci ▪ Ringkasan (executive summary) kasus/hasil investigasi/laporan kajian ▪ Surat-surat pernyataan resmi ▪ Kompilasi data statistik ▪ Kompilasi informasi (guntingan berita, hasil jajak pendapat, dll) ▪ Rekaman foto/slide/video ▪ Brosur, leaflket, lembar fakta ▪ Surat-surat elektronik
Kampanye/ pendapat umum	▪ (sama dengan diatas)	▪ Rekaman foto/slide/video ▪ Brosur, leaflet, selebaran, factsheet ▪ Pernyataan dan siaran pers ▪ Poster, spanduk, baliho, stiker, kaos, komik, kartu pos, dan kalender ▪ Pertunjukkan teater, musik, pameran lukisan/senirupa instalasi ▪ Surat-surat elektronik berantai
Galang sekutu dan pendukung	(sama dengan diatas)	(sama dengan diatas)
Pelatihan kader dan pendidikan berbasis massa	(sama dengan diatas)	➢ (sama dengan diatas) ➢ Panduan pelatihan

[2] PENGORGANISIRAN MASYARAKAT

Prawacana

Proses membangun organisasi masyarakat disebut pngorganisasian masyarakat. Pengorganisasian dalam masyarakat mungkin bagi sebagian warga merupakan istilah yang baru, tetapi konsep ini sudah dikenal luas di kalangan organisasi umum yang lain. Pengorganisasian bisa menjadi kebutuhan ketika realitas kehidupan sosial masyarakat sudah berkembang sedemikian kompleksnya, sehingga sebuah usaha tidak bisa dilakukan secara individual lagi (warga-perwargaan) melainkan harus menjadi usaha bersama dalam bentuk kelompok. Dengan demikian, pada pengertian yang paling sederhana, Konsep serba bersama ini merupakan batas pembeda antara upaya pengorganisasian masyarakat dengan upaya perwargaan maupun strategi menyerahkan segala sesuatunya pada pemimpin yang sudah pasti dilakukan secara individual. Dalam membangun organisasi masyarakat ada beberapa penekanan dan pemisahan secara manajemen pengorganisasiannya. Pemisahan manajemen pengorganisasian ditujukan untuk mengahadapi permasalahan-permasalahan yang muncul di tingkatan masyarakat . Permasalahan yang muncul bisa dibedakan dalam dua hal, secara internal dan eksternal. Begitu pula cara membangun organisasi masyarakat dengan internal dan eksternal dengan harapan organisasi mampu mengatasi dua persoalan ini secara baik.

Landasan & Tujuan pengorganisasian

- **Landasan Pengorganisasian**

Landasan filosofis dari kebutuhan untuk membangun organisasi adalah membangun kepentigan secara bersama–sama pada seluruh masyarakat, karena masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang mendasar dari kondisi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Dalam konteks masyarakat, perubahan sosial juga menyangkut multidemensional. Dalam demensi ekonomi seringkali 'dimimpikan' terbentuknya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat . Dalam segi politik selalu diinginkan keleluasaan dan kebebasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berkompetisi serta diakui hak-hak sipil dan politiknya. Sedangkan dalam sisi budaya, dirasakan ada keinginan untuk mengekspresikan kearifan kebudayaan lokal. Landasan filosofis pengorganisasian lainnya adalah melakukan adalah *pemberdayaan*. Karena pada dasarnya masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial. Pengorganisasian masyarakat bertujuan agar masyarakat menjadi penggagas, pemrakarsa, pendiri, penggerak utama sekaligus penentu dan pengendali kegiatan-kegiatan perubahan sosial yang ada dalam organisasi masyarakat .

- **Tujuan Pengorganisasian**

Pengorganisasian dalam sebuah organisasi masyarakat ditujukan untuk membangun dan mengembangkan organisasi. Pengorganisasian mempunyai peranan yang luar biasa bagi organisasi secara internal dan eksternal. Secara internal tujuan pengorganisasian adalah membangun organisasi masyarakat. Secara eksternal tujuan pengorganisasian adalah membangun jaringan antar organisasi masyarakat untuk menghadapi masalah–masalah bersama atau lebih ditujukan untuk membangun kekuatan bersama yang lebih besar lagi. Selain itu, tujuan pengorganisasian adalah mnyelesaikan konflik–konflik atau masalah masalah yang terjadi di tengah warga masyarakat yang setiap saat muncul dan harus segera diselesaikan untuk menuju perubahan sosial yang lebih baik.

Manfaat Melakukan Pengorganisasian

Mengorganisir diri punya manfaat dalam *jangka pendek*, mengorganisir diri adalah suatu alat effektif untuk membuat sesuatu terlaksana; memperbaiki pelayanan pada masyarakat, termasuk pelayanan dalam bidang ekonomi (modal-teknologi), menurunkan beban pajak, memastika jaminan lapangan kerja, perubahan kebijakan di tingkat masyarakat atau di luar, memperbaiki pelayanan angkutan umum dan kesehatan, melindungi lingkungan hidup dan alam sekitarnya, serta sebagainya. Intinya, banyak diantara masalah keseharian yang kita hadapi saat ini dapat dipecahkan dan dirubah dengan cara mengorganisir diri.

Mengorgansir diri juga punya manfaat *jangka panjang* yang mungkin jauh lebih penting. Melalui proses-proses pengorganisasian, masyarakat bisa belajar sesuatu yang baru tentang diri sendiri. Masyarakat akan menemukan bahwa harga diri dan martabat mereka selama ini selalu diabaikan dan diperdayakan. Dengan pengorganisasian, masyarakat, warga dapat menemukan bahwa kehormatan dan kedaulatan mereka selama ini justru tidak dihargai *karena ketiadaan kepercayaan diri di antara warga masyarakat sendiri*. Warga masyarakat dengan demikian akan mulai belajar bagaimana caranya mendayagunakan semua potensi, kemampuan dan ketrampilan yang mereka miliki dalam proses-proses pengorganisasian; bagiamana bekerja bersama dengan warga lain, menyatakan pendapat dan sikap mereka secara terbuka, mempengaruhi kebijakan resmi, menghadapi lawan atau musuh bersama. Akhirnya, melalui pengorganisasian, masyarakat mulai mengenal dan menemukan diri mereka sendiri. Warga masyarakat akan bisa menemukan siapa mereka sebenarnya selama ini, berasal dari mana, seperti apa latar belakang mereka, sejarah mereka, cikal-bakal mereka, akar budaya mereka serta kepentingan bersama mereka. Warga masyarakat akan menemukan kembali sesuatu yang bermakna dalam lingkungan

keluarga mereka, kelompok suku atau bahasa asal mereka yang memberi mereka kembali martabat dan kekuatan baru.

Kerja Pengorganisasian (Pengorganisiran)

Salah satu kerja penting dari pengorganisasian adalah pengorganisiran. Hal menakjubkan dalam keseluruhan proses mengorganisir adalah tenyata hal itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Pengorganisiran seringkali dikesankan sulit atau bahkan musykil. Tetapi dalam kenyataannnya, mengorganisir adalah suatu proses yang sebenarnya tidak ruwet. Itu tergantungan pada *ketrampilan dasar* yang sebagian besarnya sebenarnya sudah dimiliki oleh masyarakat dalam kadar yang sama dan memadai. Salah stau contoh yang cukup relevan dengan hal ini adalah ketrampilan sehari-hari untuk hidup bersama yang sudah dimiliki oleh masyarakat . Pelembagaan kerja bersama sudah terwujudkan ke dalam berbagai macam kerja organisasi asli seperti "upacara ", "gotong–royong", dan sebagian. Memang tidak ada resep serba jadi dalam proses pengorganisiran, ada beberapa langkah tertentu yang perlu dilakukan dalam keadaan tertentu pula. Tetapi semua langkah itu sebenarnya sederhana dan mudah dipelajari oleh warga sekalipun. Dengan demikian, semua warga dapat mengorganisir. Semua warga dapat belajar tentang asas-asas pengorganisasian. Tidak ada yang lebih hebat dibandingkan dengan yang lain.

Mengapa Warga Mengorganisir Diri atau Menolak untuk itu?

Warga-warga masyarakat mengorganisir diri karena beberapa alasan yang mungkin berbeda. Adakalanya diperlukan pendekatan agar alasan yang beragam itu bisa dijadikan satu landasan untuk menghimpun diri bersama-sama. Dengan demikian salah satu landasan awal dari upaya mengorganisir diri adalah tersedianya landasan bersama *(common platform),* baik berupa nilai, institusi dan mekanisme bersama. Misalnya, pengorganisasian harus jelas visi dan misi yang ingin dicapai dari upaya pengorganisasian itu. Visi dan Misi itulah kemudian diturunkan ke dalam strategi dan program yang bisa menjawab kebutuhan anggota secara lebih jelas. *Mengapa sebagian warga tidak mengorganisir diri?* Tidak semua warga yang mempunyai masalah lantas mengorganisir diri. Beberapa warga akan tetap berkutat mencoba menyelesaikannya sendirian, meskipun sudah terbukti berkali-kali gagal atau kurang berhasil. Ada banyak alasan mengapa warga menolak berhimpun dengan warga lain: ada sebagin warga pengorganisasian merupakan hal baru, merasa cemas karena akan dimintai sesuatu atau melakukan sesuatu yang mereka yakini belum pasti, takut dimintai pertanggungjawaban atau menyatakan pendapatnya di depan umum. Alasan lain adalah takut pada apa yang bakal terjadi jika pengorganisasi itu nanti sudah berjalan, mereka akan mendapatkan tantangan, rintangan ataupun akibat-akibat lain yang dirasakan memberatkan. *Karena alasan-alasan tersebut di atas menyebabkan banyak warga lebih memilih untuk menggunakan* cara-*cara pemecahan persoalan secara perwargaan, terhadap banyak persoalan yang sebnarnya dirasakan oleh banyak warga.*

Dimana melakukan Kerja–Kerja Pengorganisasian

Tempat terbaik untuk untuk memulai suatu pengorganisasian adalah suatu pengorganisasian adalah berada, dengan warga-warga yang ada di sekitar anda, tentang masalah yang memang oleh warga diprihatinkan bersama, tentang sesuatu yang oleh warga masyarakat menginginkan terjadi perubahan atasnya. Mulailah dengan bekerja dan hidup bersama warga, warga masyarakat seperti anda juga, mereka yang membagi minat dan perhatian yang sama dengan anda dan yang lainnya. Pengorganisasian tidak perlu merupakan sesuatu yang serba besar pada awal mulanya, jika ingin berhasil. Pengorganisasian bisa dimulai dari sebuah kelompok yang kecil.

Apa yang harus Kita Kerjakan dalam Pengorganisasian?

Langkah Pertama, salah satu yang bisa dilakukan adalah mempelajari situasi sosial kemasyarakatan di masing-masing. sebagai entitas politik, ekonomi bisa dipilah berdasarkan kategori; region (dusun), profesi (petani-pengrajin-pengusaha), ataupun kekerabatan (trah). Di sebuah masyarakat yang meletakkan konteks kewilayahan sebagai sesuatu yang penting, maka pengorganisasian bisa menggunakan pemilihan regional yang berbasisikan dusun. Demikianpula apabila, basis pengorganisasian lebih tepat menggunakan kreteri profesi maka strategi yang dipilih bisa menyesuaikan dengan keadaan sosial tersebut.

Langkah Kedua, pengorganisasian juga seharusnya memperhatikan titik masuk institusional (kelembagaan). Pertanyaan yang relevan adalah apakah upaya pengorganisasian dilakukan dengan menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti kelompok masyarakat , assosiasi lembaga ekonomi atau lembaga lain resmi yang seringkali dalam pembentukannya *'dibidani'* oleh pemerintah. Atau upaya pengorganisasian dilakukan dengan membentuk wadah baru sama sekali. Tentu saja kedua jalan itu mempunyai sejumlah kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penggunaan lembaga yang sudah ada adalah relatif tersedianya prasarana dan sarana bagi kerja-kerja pengorganisasian. Kelamahan jalan ini adalah bentuknya yang sangat kaku karena *diin* dari atas. Sedangkan jalan pembentukan wadah baru mempunyai kelebihan karena relatif lebih mandiri dan partispatif namun mempunyai kelemahan yang bersumber dari belum terlembaganya mekanisme organisasi sehingga bersifat *trial and error*.

Langkah Ketiga, melakukan dan memperkuat kerja-kerja basis. Yang dimaksud dengan kerja-kerja basis adalah kerja-kerja yang dilakukan oleh kelompok inti (yang mengorganisir diri terus menerus) secara internal berupa; 1] Upaya membangun basis warga masyarakat (melakukan rekruitmen dan pendekatan pada komunitas yang senasib agar mau bergabung dalam pengorganisasian); 2] Pendidikan pada anggota mengenai visi, misi, dan kepentingan bersama dari organisasi masyarakat; 3] Merumuskan strategi untuk memperjuangkan kepentingan bersama organisasi masyarakat.

Membangun Jaringan

Untuk mencapai tujuan bersama, sebuah pengorganisasian memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan berbagai spesifikasi yang berbeda dalam suatu koordinasi yang terpadu dan sistematis. Tidak ada satupun organisasi yang mampu mencapi tujuannya tanpa bantuan dari pihak-pihak lain yang juga mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama. Semakin banyak warga masyarakat /organisasi menyuarakan hal yang sama maka, semakin kuat kepercayaan bagi timbulnya perubahan yang diinginkan. Hal ini secara sederhana disebut sebagai kebutuhan untuk membangun jaringan.

Secara garis besarnya kerja-kerja jaringan dapat dipilah menjadi tiga bentuk:

1. *Kerja Basis.* Kerja basis merupakan kerja yang dilakukan oleh kelompok inti (pengorganisir) dengan melakukan langkah-langkah; membangun basis masa, pendidikan dan perumusan strategi.
2. *Kerja Pendukung*. Kerja pendukung ini dilakukan oleh kelompok-kelompok sekutu yang menyediakan jaringan dana, logistik, informasi data dan akses. Kelompok sekutu bisa berasal dari kalangan LSM, kelompok intelektual/ akademisi, Lembaga pendana (donor) dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap persoalan yang diperjuangkan.
3. *Kerja Garis Depan*. Kerja garis depan dilakukan terutama berkaitan dengan advokasi kebijakan, mobilisasi massa, mempeluas jaringan sekutu, lobbi dan melaksanakan fungsi juru runding. Kerja-kerja garis depan bisa dilakukan oleh kelompok organisasi/invidual yang memiliki keahlian & ketrampilan tentang hal ini.

Dengan pembagian tugas maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari individu dan kelompok yang bersedia membantu warga dalam melakukan perubahan sosial, baik melalui strategi advokasi, maupun penguatan komunitas basis. Akhirnya, pembangunan jaringan merupakan salah satu cara untuk menambah “kawan”, sekaligus mengurangi “lawan” dalam memperjuangkan perubahan yang diinginkan.[]

REFERENSI_10 KITAB SALAF WAJIB PESANTREN PERGERAKAN

1. Kitab Tasawuf: Dzurratun Nasikhin
2. Kitab Tafsir: Tafsir Yasin Khamami
3. Kitab Tarikh: Qishatul Mi'raj
4. Kitab Tarikh: Madaarijus Su'ud
5. Kitab Fiqh: Buluughul Maram
6. Kitab Fiqh: Riyaadul Badi'ah
7. Kitab Hadits: Arba'in Nawawi
8. Kitab Aqidah: Hujjah Ahlussunah Wal Jama'ah
9. Kitab Akhlaq: Minaakhussaniyyah
10. Kitab Nahwu/Sorof: Jurumiyah & Amsilatut Tasrifiyyah

REFERENSI_100 BUKU WAJIB PESANTREN PERGERAKAN

Daftar Buku Rujukan Utama: Ilmu Filsafat-Sosial-Keilsaman (5 Buku)

1. Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Negara Marxis & Revolusi Proletariat* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
2. Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Teologi Islam & Akar Pemikiran Aswaja* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
3. Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Kapitalisme, Negara & Masyarakat* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
4. Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia* (Jogjakarta: Lentera Kreasindo, 2015)
5. Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Manifesto Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015)

Daftar Buku Rujukan Utama: Philosophy & Sociology Sciences (10 Buku)

6. Adam Smith, *The Wealth of Nation* (London: David Campbell Publisher, Ltd., 1991)
7. Karl Marx, *The Poverty of Philosophy; Answer to The "Philosophy of Poverty" By. M. Proudhon* (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1892)
8. Herbert Marcuse, *Reason and Revolution; Hegel and The Rise of Social Theory* (New York: Oxford University Press, Inc., 1941)
9. Georg Lukacs, *History and Class Consciousness; Studies in Marxist Dialectics* (Cambridge: MIT Press, 1971)
10. Lenin, *A Biography* (Moscow: Progress Publishers, 1983)
11. David Held, *Introduction to Critical Theory; Horkheimer to Habermas* (Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1980)
12. Lewis A. Coser, *Masters of Sociological Thought; Ideas ini Historical and Social Context* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1971)
13. Max Weber, *Economy and Society; An Outline of Interpretative Sociology* (London: University of California Press, Ltd., 1978)
14. Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontens* (London: Pinguin Books, Ltd., 2002)
15. Enrique Larana, Hank Johnston and Joseph R. Gusfield (ed.), *New Social Movements; from Ideologi to Identity* (Philadelphia: Temple University Press, 1994)

Daftar Buku Rujukan Utama: Ilmu Marxisme (20 Buku)

16. Karl Marx, *Kapital; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Buku I; Proses Produksi Kapital* (Jakarta: Hasta Mitra, 2004)
17. Karl Marx, *Kapital; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Buku II; Proses Sirkulasi Kapital* (Jakarta: Hasta Mitra, 2006)
18. Karl Marx, *Kapital; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Buku III; Proses Produksi Kapitalis Secara Menyeluruh* (Jakarta: Hasta Mitra, 2007)
19. Frederick Engels, *Anti-Duhring; Revolusi Herr Eugen Duhring dalam Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Hasta Mitra - Ultimus, 2005)
20. Frederick Engels, *Dialektika Alam* (Jakarta: Hasta Mitra, 2005)
21. Frederick Engels, *Tentang Kapital Marx* (Bandung: Ultimus & Yayasan Akatiga, 2006)
22. Antony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx* (Jakarta: Teplok Press, 2000)
23. Franz Magnis-Suseno, Karl Marx; dari Perselisihan Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme (Jakarta: Gramedia, 2000)
24. Franz Magnis-Suseno, *Dalam Bayang-bayang Lenin; Enam Pemikir Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka* (Jakarta: Gramedia, 2000)
25. Franz Magnis-Suseno, *Dari Mao ke Marcuse; Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin* (Jakarta: Gramedia, 2013)
26. C. Wright Mills, *Kaum Marxis; Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

27. Herbert Marcuse, *Rasio & Revolusi; Menyuguhkan kembali Doktrin Hegel untuk Umum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
28. Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx; Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis* (Yogyakarta: LKiS, 2004)
29. Jacques Derrida, *Hantu-hantu Marx* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000)
30. Isaiah Berlin, *Biografi Karl Marx* (Yogyakarta: Jejak, 2007)
31. Karl Marx, *Kemiskinan Filsafat* (Jakarta: Hasta Mitra, 2004)
32. Ernest Mendel, *Tesis-tesis Pokok Marxisme* (Yogyakarta: Resist Book, 2006)
33. Etiene Balibar, *Anti Filsafat; Metode Pemikiran Marx* (Yogyakarta: Resist Book, 2013)
34. Olle Tornquist, *Penghancuran PKI* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011)
35. Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Sukarno; Ideologi dan Politik 1959-1965* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Daftar Buku Rujukan Utama: Ilmu Filsafat (10 Buku)

36. Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996)
37. Stephen Palmquis, *Pohon Filsafat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
38. Titus Smith Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
39. Bertran Russel, *Sejarah Filsafat Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
40. K. Berten, *Filsafat Sejarah Kontemporer; Jerman dan Inggris,* Jilid 1 (Jakarta: Gramedia, 2014)
41. K. Berten, *Filsafat Sejarah Kontemporer; Prancis,* Jilid 2 (Jakarta: Gramedia, 2014)
42. K. Berten, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999)
43. Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat,* Jilid 1 (Yogyakarta: Kanisius, 1980)
44. Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat,* Jilid 2 (Yogyakarta: Kanisius, 1980)
45. Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: UI Press & Tintamas, 1986)

Daftar Buku Rujukan Utama: Ilmu Sosial (17 Buku)

46. George Ritzer, *Teori Sosiologi; dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
47. George Ritzer & Barry Smart, *Handbook Teori Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2012)
48. George Ritzer, *Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005)
49. Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik & Modern, Jilid I.,* (Jakarta: Gramedia, 1998)
50. James S. Coleman, *Dasar-dasar Teori Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2008)
51. Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial; Observasi terhadap Para Filosofis Terkemuka* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
52. Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism & Democracy* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
53. Hans Fink, *Filsafat Sosial; dari Feodalisme hingga Pasar Bebas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
54. Aholiab Watloly, *Sosio-Epistemologi; Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 2013)
55. Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber* (Jakarta: UI-Press, 1986)
56. Anthony Giddens, *Problematika Utama dalam Teori Sosial; Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
57. Anthony Giddens, *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan; Masa Depan Politik Radikal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
58. Stepen K. Sanderson, *Makro Sosiologi; Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)
59. Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
60. Max Weber, *Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
61. Brian S. Turner (ed.), *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
62. Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)

Daftar Buku Rujukan Utama: Ilmu Keislaman (20 Buku)

63. Adonis, *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam, Volume 1* (Yogyakarta: LKiS, 2007)
64. Adonis, *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam, Volume 2* (Yogyakarta: LKiS, 2007)
65. Adonis, *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam, Volume 3* (Yogyakarta: LKiS, 2007)
66. Adonis, *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam, Volume 4* (Yogyakarta: LKiS, 2007)
67. Hasan Hanafi, *Studi Filsafat 1; Pembacaan Atas Tradisi Islam Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2015)
68. Hasan Hanafi, *Studi Filsafat 2; Pembacaan Atas Tradisi Barat Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2015)
69. Abdullahi Ahmed An-Naim, Mohammed Arkoun, dkk., *Dekonstruksi Syariah, Jilid 1* (Yogyakarta: LKiS, 1996)

70. Abdullahi Ahmed An-Naim, Mohammed Arkoun, dkk., *Dekonstruksi Syariah, Jilid 2* (Yogyakarta: LKiS, 1996)
71. Asy-Syahrastani, *Al-Milal Wa An-Nihal* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006)
72. Ali Rahmena, *Ali Syari'ati; Biografi Politik Intelektual Revolusioner* (Jakarta: Erlangga, 2000)
73. Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
74. Michael Lowy, *Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
75. Imam Al-Ghazzali, *Tahafut Al-Falasifah* (Bandung: Marja, 2010)
76. Ibnu Rusyd, *Tahafut At-Tahafut; Sanggahan terhadap Tahafut Al-Falasifah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
77. Arnold Toynbee, *Sejarah Umat Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
78. Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam; Antara Modernisme dan Postmodernisme* (Yogyakarta: LKiS, 2011)
79. Eko Prasetyo, *Islam Kiri; Melawan Kapitalisme Modal dari Wacana Menuju Gerakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
80. Leonard Binder, *Islam Liberal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
81. Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading, 2015)
82. Clifford Geertz, *Agama Jawa; Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014)

Daftar Buku Rujukan Utama: Ilmu Pendidikan Kritis (10 Buku)

83. William F. O'neil, *Ideologi-ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
84. Neil Postman & Charles Weintgartner, *Mengajar sebagai Aktivitas Subversif* (Yogyakarta: Jendela, 2001)
85. Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3ES, 2000)
86. Paulo Freire, *Pendidikan sebagai Proses* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
87. Paulo Freire, *Pedagogi Pengharapan* (Yogyakarta: Kanisius, 2001)
88. Paulo Freire & Antonio Faundez, *Belajar Bertanya; Pendidikan yang Membebaskan* (Jakarta: Gunung Mulia, 1995)
89. Ira Shor & Paulo Freire, *Menjadi Guru Merdeka* (Yogyakarta: LKiS, 2001)
90. Joy A. Palmer, *50 Pemikir Pendidikan; dari Piaget sampai Masa Sekarang* (Yogyakarta: Jendela, 2003)
91. M. Escobar, dkk., *Sekolah Kapitalisme yang Licik* (Yogyakarta: LKiS, 1998)
92. William A. Smith, *Conscientizacao; Tujuan Pendidikan Paulo Freire* (Yogyakarta: Kanisius, 2001)

Daftar Buku Rujukan Utama: Kamus Bahasa Arab & Filsafat-Sospol (8 Buku)

93. Ahmad Warson Munawwir, *Almunawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
94. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1973)
95. L. Harry Gould, *Kamus Ketjil Istilah Marxis,* Penerjemah: Rollah Sjarifah (Jakarta: Jajasan Pembaruan,1952)
96. Simon Blackburn, *Kamus Filsafat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
97. Ali Mudhofir, *Kamus Filsafat Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
98. Roger Scruton, *Kamus Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
99. Dieter Nohlen (ed.), *Kamus Dunia Ketiga* (Jakarta: Tiara Grasindo, 1984)
100. Pius A. Partanto, & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994)

REFERENSI_63 BUKU WAJIB KAJIAN MARXISME & FILSAFAT SOSIAL

Kelompok Pustaka Primer: Karangan Marx dan Engels

1. Karl Marx, *Kapital I; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Jilid Pertama: Proses Produksi Kapital,* Judul Asli: *Capital; A Critique of Political Economy, Volume I: A Critical Analysis of Capitalist Production,* Penerjemah: Oey Hay Djoen (Jakarta: Hasta Mitra-Ultimus-Institute for Global Justice, Cet. I., 2004).
2. Karl Marx, *Kapital II; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Jilid Kedua: Proses Sirkulasi Kapital,* Judul Asli: *Capital; A Critique of Political Economy, Volume II: The Process of Circulation of Capital,* Penerjemah: Oey Hay Djoen (Jakarta: Hasta Mitra-Ultimus-Institute for Global Justice, Cet. I., 2006).
3. Karl Marx, *Kapita III; Sebuah Kritik Ekonomi Politik, Jilid Ketiga: Proses Produksi Kapitalis secara Menyeluruh,* Judul Asli: *Capital; A Critique of Political Economy, Volume III: The Process of Capitalist Production as a Whole,* Penerjemah: Oey Hay Djoen (Jakarta: Hasta Mitra-Ultimus-Institute for Global Justice, Cet. I., 2007).
4. Karl Marx, *The Poverty of Philosophy; Answer to The "Phylosophy of Poverty" By M. Proudhon* (Moscow: Foreign Languages Piblishng House, 1884).

5. Frederick Engels, *Tentang Das Kapital,* Judul Asli: *On Marx's Capital,* Penerjemah: Oey Hay Djoen (Bandung: Ultimus dan Yayasan Akatiga, Cet. I., 2006).
6. Frederich Engels, *Dialektika Alam,* Judul Asli: *Dialectics of Nature* (Moscow: Progress Publisher, 1964) Penerjemah: Oey Hay Djoen, (Jakarta: Jasta Mitra, 2005).
7. Frederich Engels, *Anti Duhring; Revolusi Herr Eugen Duhring dalam Ilmu Pengetahuan,* Judul Asli: *Anti Duhring: Herr Eugen Duhring's Revolution in Science*, Foreign Languages Publishing House, (Jakarta: Hasta Mitra, 2005).

Kelompok Pustaka Sekunder: Karangan yang Membahas Pemikiran Marx

8. Isaiah Berlin, *Biografi Karl Marx,* Judul Asli; *Karl Marx; His Life and Environment,* Penerjemah: Eri Setiawati dan Silvester G. Sukur (Yogyakarta: Jejak, Cet. II., 2007).
9. Dave Renton (ed.), *Karl Marx; Membongkar Akar Krisis Global* (Yogyakarta: Resist Book, Cet. I., 2009).
10. Ernes Mendel, *Tesis-tesis Pokok Marxisme,* Penerjemah: Ing. Mahendra K., (Yogyakarta: Resist Book, Cet. I., 2006).
11. Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx,* Judul Asli: *A Guide to Marx's Capital,* Penerjemah: Joebaar Ajoeb (Jakarta: Teplok Press, Cet. III., 2000).
12. Muhammad Hatta, *Ajaran Marx atau Kepintaran Sang Murid Membeo* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. I., 1975).
13. C. Wright Mills, *Kaum Marxis; Ide-ide Dasar dan Sejarah Perkembangan,* Judul Asli: *The Marxists,* Penerjemah: Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 2003).
14. Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis,* (Yogyakarta: LKiS, Cet. IV., 2004).
15. Erich Fromm, *Konsep Manusia Menurut Marx,* Judul Asli: *Marx's Concept of Man,* Penerjemah: Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II., 2002).
16. Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx; Dari Sosialisme Utopis sampai ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. IV., 2000).
17. Mutiulah, *Gagasan Post-Maxisme dalam Pemikiran Sosial Jurgen Habermas dan Antonio Gramsci,* Tesis Pascasarjana Filsafat UGM 2005.

Kelompok Pustaka Sekunder: Karangan Pemikiran Penerus Marx

18. Lenin, *A Biography,* Translated From The Russian, Designed by Vadim Corin (Moscow: Progress Publishers, Fourth Printing, 1986)
19. Christoper Hill, *Lenin; Teori dan Praktek Revolusioner,* Judul Asli: Lenin and The Russian Revolution (1972) (Yogyakarta: Resist Book, Cet. I., 2009).
20. Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci; Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II., 2003).
21. Leon Trotsky, *Revolusi Permanen* (Yogyakarta: Resist Book, Cet. I., 2009).
22. Saiful Arif dan Eko Prasetyo, *Lenin: Revolusi Oktober 1917, Sanggahan atas Pemikiran Franz Magnis Suseno* (Yogyakarta: Resist Book, Cet. I., 2004).

Kelompok Pustaka Sekunder: Karangan tentang Revolusi dan Sosialisme

23. Edward Kardej, *Jalan Menuju Sosialisme Sedunia,* Judul Asli: *Socialism and War,* Penerjemah: Endah Dwi Pratiwi (Yogyakarta: Terawang Press, 2001).
24. Andre Gorz, *Sosialisme dan Revolusi,* (Yogyakarta: Resist Book, Cet. I., 2005).
25. Michael Newman, *Sosialisme Abad 21; Jalan Alternatif atas Neoliberalisme* Penerjemah: Eko Prasetyo Darmawan (Yogyakarta: Resist Book, Cet. I., 2006).
26. Arif Budiman, *Jalan Demokratis Ke Sosialisme; Pengalaman Chili di Bawah Allende* (Jakarta: Sinar Harapan, Cet. I., 1987).
27. Ken Budha Kusumandaru, *Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan terhadap Franz Magnis-Suseno* (Yogyakarta: Resist Book, Cet. II., 2004).

Kelompok Pustaka Sekunder: Karangan tentang Filsafat Sosial

28. G.W.F. Hegel, *Filsafat Sejarah,* Judul Asli: *The Philosophy of History,* Penerjemah: Cuk Ananta Wijaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III., 2007).
29. Herbert Marcuse, *Rasio dan Revolusi; Menyuguhkan Kembali Doktrin Hegel untuk Umum,* Judul Asli: *Reason and Revolution; Hegel and The Rise of Social Theory,* Penerjemah: Imam Baehaqie (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 2004).
30. Hans Fink, *Filsafat Sosial, Dari Feodalisme Hingga Pasar Bebas,* Judul Asli: *Social Philosophy*, Methuen & Co. Ltd., London, dan Methuen & Co. New York, 1981, Penerjemah: Sigit Djatmiko, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 2003).
31. Richard Schacht, *Alienasi: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif,* Judul Asli: *Alienation* (Anchor Books: New York, 1970) Penerjemah: Ikramullah Mahyuddin (Yogyakarta: Jalasutra, 2009).

32. John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global; Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa,* Judul Asli: *Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Mass Communication* (California: Stanford University Press, 1990), Penerjemah: Haqqul Yakin (Yogyakarta: Ircisod, Cet. I., 2004).
33. Franscisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi; Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan* (Yogyakarta: Kanisius, Cet. I., 1990).
34. Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional; Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt* (Jakarta: Gramedia, 1982).
35. Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme; Sejarah Kemunculan dan Ramalan tentang Perkembangan Kultur Industrial Kontemporer secara Menyeluruh,* Judul Asli: *The Protestant Ethic Spirit of Capitalism* (London and New York: Routledge,1992) Penerjemah: T. W. Utomo dan Yusup Priya Sudiarja (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 2006).
36. Titus Smith Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Judul Asli: *Living Issues in Philosophy,* Seven Edition, D. Van Nostrand Company, New York, 1979. Penerjemah: Prof. Dr. H.M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Kelompok Pustaka Sekunder: Karangan tentang Filsafat Politik

37. Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern,* Judul Asli: *A History of Political Philosophy,* Penerjemah: Ahmad Baidhowi dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II., 2005).
38. Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ketiga* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I., 2007)
39. Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembagan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
40. Arif Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. III., 2002).
41. David Held, *Models of Democracy* (Jakarta: The Akbar Tandjung Institute, Cet. I., 2007).

Kelompok Pustaka Sekunder: Karangan Tentang Teori Sosial

42. Talcott Parsons (ect.), *Theories Of Society; Foundations of Modern Sociological Theory* (New York: The Free Press, 1965).
43. Lewis A. Coser, *Master of Sociological Thought; Ideas in Historical and Social Context* (New York: HBJ, 1971).
44. David Held, *Introduction to Critical Theory* (Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1980).
45. Wardi Bahtiar, *Sosiologi Klasik; Dari Comte Hingga Parsons* (Bandung: Rosda Karya, Cet. I., 2006).
46. Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka,* Judul Asli: *Social Theory: A Guide to Central Thinkers,* Penerjemah: Sigit Jatmiko (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. III., 2005).
47. George Ritzer and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Judul Asli: Modern Sosiological Thought, 6th Edition, Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Kencana, Cet. III., 2005).
48. Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Judul Asli: *Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspective*, Penerjemah: Robert M.Z. Lawang (Jakarta: Gramedia, Cet. II., 1988).
49. Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber,* Judul Asli: *Capitalism and Modern Social Theory: an Analysis of Writing of Marx, Durkheim and Max Weber*, Cambidge University Press, Cambridge CB2 1 RP, London NW1 2DB (Edisi Inggris), Penerjemah: Soeheba Kramadibrata (Jakarta: UI-Press, Cet. I., 1986)
50. Noam Chomsky, *Neo Imperalisme Amerika Serikat* (Yogyakarta: Resist Book, Cet. I., 2008).
51. Mansour Faqih, *Jalan Lain; Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Insist Press, Cet. I., 2002).

Kelompok Pustaka Sekunder: Karangan Tentang Teori Perubahan Sosial

52. Enrique Larana, ect., (ed.) *New Social Movement; From Ideologi to Identity* (Philadelphia: Temple University Press, 1994).
53. John Friedmann, *Empowerment*, *The Politic of Alternative Development* (USA: Cambridge: 1992).
54. Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,* Judul Asli: *The Sociology of Social Change,* Penerjemah: Alimandan (Jakarta: Prenada, Cet. III., 2007).
55. Robert H, Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1993).

Kelompok Pustaka Sekunder: Karangan Tentang Teori Pembangunan

56. Kevin P. Clements, *Teori Pembangunan dari Kiri ke kanan,* judul asli: *From Right to Left individu Development Theory,* Penerjemah: Endi Handoyo (Dosen FISIP UPN Yogyakarta), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II., 1999).
57. Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia, Cet. IV., 2000).
58. Mansour Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, Cet. I., 2001).

Kelompok Pustaka Sekunder: Karangan Pemikir Marxian Indonesia

59. Harry A. Poeze, *Tan Malaka; Pergulatan Menuju Republik 1897-1925* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cet. II., 2000).
60. Safrizal Rambe, *Pemikiran Politik Tan Malaka; Kajian Terhadap Perjuangan Sang Kiri Nasioalis, Jalan Penghubung Memahami Madilog* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I., 2003).
61. Hary Prabowo, *Perpektif Marxisme; Tan Malaka: Teori dan Praksis Menuju Republik* (Yogyakarta: Jendela, Cet. I., 2002).
62. Sutan Sjahrir, *Pikiran dan Perjuangan* (Yogyakarta: Jendela, Cet. I., 2000).
63. Sutan Sjahrir, *Sosialisme Indonesia Pembangunan* (Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional—LEPPENAS, Cet. I., 1982).

PETIKAN WAWANCARA
ANALISIS TENTANG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

[HASIL WAWANCARA DENGAN BUNG KRISTEVA, PEWAWANCARA AKTIVIS JOGJAKARTA, DAN JAWABAN MERUPAKAN PENDAPAT PRIBADI]

1. Bagaimana menurut anda tentang Masyarakat Ekonomi Asean 2015?

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibuat dalam Deklarasi Concord II di Bali, Indonesia, pada tanggal 7 Oktober 2003; pada KTT ASEAN Ke-12 pada bulan januari 2017; dan para pemimpin negara-negara ASEAN ini menegaskan komitmen untuk mempercapat komunitas asean pada tahun 2015. MEA memiliki tujuan untuk melakukan integrasi ekonomi regional yang berimplikasi internasional. MEA secara spesifik memiliki kepentingan untuk menciptakan; (1) pasar tunggal dan basis produksi tunggal; (2) kawasan ekonomi yang kompetitif; (3) wilayah pembangunan ekonomi yang terbuka, tanpa batas-batas negara; (4) integrasi ekonomi global; (5) mendorong kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai teknologi; (6) menkondisikan negara sebagai penjamin keberlangsungan ekonomi neo-liberal.

Dalam analisa kritis saya, MEA adalah sebuah gagasan yang mendukung berjalannya sistem kapitalisme global. Kita harus mampu melacak dan membongkar kepentingan terselubung atas seolah-olah niat baik gagasan MEA. Secara sistematis ideologi kapitalisme membutuhkan liberalisme berfikir dan bertindak manusia, serta meniscayakan sistem sosial yang mendukung arus dan gelombang neo-liberalisme. Bahwa masyarakat modern dicirikan dengan faham dan watak *individualisme*, *liberalisme*, *pragmatisme*, *irasional*, *hedonisme*, juga ditunjang skill atau kemampuan memanfaatkan teknologi dalam segenap kehidupannya. Watak masyarakat semacam itu memang sengaja diciptakan oleh seperangkat sistem ide dari kapitalisme dan liberalisme. Sekali lagi dalam MEA terdapat selubung kepentingan ideologis dari kapitalisme, dimana manusia digiring untuk mampu berkompetisi secara bebas dalam dunia pasar kerja. Pada titik ini sebetulnya terjadilah keterasingan (*alienasi*) manusia dalam sistem masyarakat kapitalis.

MEA didorong oleh kepentingan politik-ekonomi internasional tingkat tinggi, terutama Negara-negara eropa dan Negara Asia yang mulai berkembang, baik yang tergabung dalam kaukus G-8 atau G-20, sehingga Negara-negara perlu menciptakan atmosfir ekonomi yang kondusif di Asia. Gagasan MEA adalah usaha sistematis untuk memilah-milah peta wilayah eksploitasi baru di Asia, disertai sedikit upaya memberikan “wajah manusiawi” dalam kerja-kerja eksploitatif watak kapitalisme melalui gagasan MEA. MEA berkeinginan membentuk manusia mekanistik yang mampu menjalankan mesin-mesin produksi, birokrasi Negara yang menjamin inverstasi dan mampu memanfaatkan teknolologi untuk mendukung transaksi-transaksi pasar. MEA harus kita curigai karena memiliki motif untuk mendorong terbentunya sistem sosial dengan ambisi yang *destruktif* yang *irasional*. Ini sebenarnya sangat membahayakan bagi kepentingan kohesi sosial dan kedaulatan rakyat Indonesia.

2. Apakah dampak positif bagi bangsa ini tentang MEA 2015?

MEA sebagai sebuah kepentingan atas ideologi kapitalisme pasti akan mengekspansi batas-batas negara-bangsa khususnya di Asia untuk mencari lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan mentah untuk produksi kapitalis yang lebih murah. Nampaknya bagi saya sulit mencari sisi positif yang akan didapatkan dari gagasan MEA. Namun bisa dianalisis MEA paling tidak mendorong manusia Indonesia untuk menunjukan jati dirinya sebagai bangsa yang mampu memimpin bangsanya sendiri secara ekonomistik, mengolah sumber daya alam sendiri, menjadi bangsa yang mampu berdiri diatas kaki sendiri (bangsa berdikari).

Jika kita analisa dengan jernih dan kritis, kepentingan ekonomi politik modern internasional ditandai oleh globalisasi produksi dan keuangan (dominasi modal). Dalam tiga dasawarsa terakhir, masyarakat dunia menyaksikan perubahan yang sangat signifikan dalam tatanan ekonomi politik global. Dunia menjadi demikian kompleks ketika fenomena interdependensi antar bangsa kian meningkat. MEA saya pikir adalah bagian dari interdependensi antar Negara-negara Asia dalam kepentingan ekonomi.

Kemajuan inovasi teknologi, arus informasi, serta komunikasi yang dibarengi dengan semakin tingginya intensitas arus investasi, keuangan, dan perdagangan global menandai proses yang disebut sebagai globalisasi ekonomi. Proses tersebut juga dicirikan dengan kian massifnya peran aktor non-negara dalam politik internasional. Tidak hanya institusi-institusi global seperti WTO, IMF, Bank Dunia, atau perusahaan-perusahaan multinasional, namun juga disertai dengan kemunculan gerakan masyarakat sipil yang lintas batas negara misalnya terjadinya pergolakan politik di berbagai negara yang mendorong orang bermigrasi.

Dalam analisa kiritis ini, sekali lagi hal positif yang berdampak adalah bahwa Indonesia akhirnya harus mampu berkompetisi melindungi asset SDA demi kesejahteraan rakyat, mendorong birokrasi yang bersih dan akuntabel. Pada akhirnya juga harus menciptakan manusia yang sesuai dengan watak dan karakter bangsa Indonesia.

3. Apakah hal ini berdampak negatif bagi kemajuan ekonomi, sosial dan politik bangsa ini?

MEA sebagai representasi dari kepentingan ideologi kapitalisme awalnya mungkin banyak dilihat sebagai cara pengaturan ekonomi dengan melibatkan ekspansi secara berangsur-angsur ke luar wilayah dalam jaringan pertukaran barang. Namun, kapitalisme sebenarnya memiliki cakupan yang lebih dari itu, hal ini dikarenakan ekspansi kapitalisme tidak hanya dianggap sebagai taktik pasar, melainkan juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cakupan tidak hanya pada aktifitas ekonomi saja, namun juga di bidang sosial dan politik. Maka, MEA berujung pada kepentingan menciptakan watak manusia yang pragmatis-konsumtif dan birokrasi Negara yang terbuka terhadap kepentingan pasar.

Indonesia sebagai Negara kaya tapi berpendapatan rendah yang pangsa perdagangannya sangat kecil dalam perdagangan dunia, namun perubahan permintaan atau harga komoditas-komoditas ekspornya atau kebijakan untuk secara cepat menurunkan bea-bea impornya dapat secara sosial dan ekonomi berpengaruh besar pada Negara tersebut. Negara Indonesia mungkin hanya memiliki peran yang kecil dalam perdagangan dunia, namun perdagangan dunia memiliki pengaruh yang sangat besar atas Negara Indonesia.

Liberalisasi eksternal dari perekonomian nasional Indonesia mencakup penghapusan hambatan-hambatan nasional atas aktivitas ekonomi, meningkatkan keterbuakaan dan integrasi dari Negara-negara Asean ke dalam pasar dunia. Di kebanyakan Negara Asean, hambatan-hambatan nasional dalam bidang moneter dan pasar uang, perdagangan dan investasi asing langsung secara umumnya telah dihapus. Jika Negara Indonesia tidak mampu mengendalikan kekuatan pasar di Asean maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami depresi ekomoni atau krisis moneter yang parah.

Meminjam analisis dan pemikiran Marxist, bahwa Karl Marx sangat benci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Untuk menunjukkan kebenciannya Marx menggunakan berbagai argumen untuk “membuktikan” bahwa sistem liberal atau kapitalis itu buruk. Argumen-argumen yang disusun Marx dapat dilihat dari berbagai segi, baik dari sisi moral, sosiologi maupun ekonomi. Dari segi moral Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Dalam sistem liberal-kapitalis yang diamati Marx ada sekelompok orang (yaitu para pemilik modal) yang menguasai kapital, dan ada sekelompok orang lainnya (yaitu kaum buruh) sebagai kelas proletar yang seperti sudah ditakdirkan untuk selalu menduduki posisi kelas bawah. Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitasil memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Akan tetapi pembangunan dalam sistem kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal. Untuk bisa membangun secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan perombakan struktur melalui revolusi sosial. Bagi Marx, pangkal dari semua perubahan adalah karena dilakukannya penghisapan atau eksploitasi dari para kapitalis terhadap kaum buruh.

Maka, kemajuan ekonomi, sosial dan politik bangsa ini sangat ditentukan oleh kedaulatan rakyat. Kekuatan rakyat jangan sampai dihisap oleh kekuasaan yang cenderung korup, partai yang melakukan depolitisasi massa, dan pemodal yang merampok pajak rakyat. Kekuatan bangsa ini sangat bergantung pada *political will* para pemimpin bangsa.

4. Menurut BPS (Badan Pusat Statistika) jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai jumlah 28,28 Juta orang atau sekitar 11, 25%. Menurut anda, apakah Indonesia saat ini sudah siap menghadapi MEA 2015? Jika siap, hal apa sajakah yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia terutama pemerintah?

MEA pada dasarnya sangat dekat dengan istilah globalisasi, dimana kepentingannya adalah peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumberdaya manusia dan sumber daya alam serta kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan transnasional, maupun oleh perusahaan-perusahaan keuangan dan dana global.

Pelaku utama dari globalisasi adalah Negara imperialis yang berkuasa artinya Negara yang mempunyai prinsip ekonomi *world competitive* dan mereka tidak mempunyai kerugian apa-apa karena semua biaya yang dikeluarkan berasal dari pembukaan pasar *(open market)*. Kelompok ini hendak memperjuangkan globalisasi yang bebas *(unrestricted globalization)*, mereka cenderung untuk membuka perekonomian mereka dan sebagai gantinya mereka juga menuntut Negara lain agar membuka perekonomiannya.

Dalam kaitan dengan IMF, juga mendesak bagi pemerintah untuk segera menghentikan kontrak dengan lembaga internasional tersebut, walaupun sebenarnya juga sudah terlambat. “Jeratan” IMF pada kendali kebijakan perekonomian Indonesia, sehingga menurunkan kedaulatan nasional ekonomi kita, sudah berjalan sangat lama dengan hasil yang minimal, menelan biaya sosial-ekonomi yang mahal.

Jika kita mengatakan IMF gagal membantu pemulihan ekonomi Indonesia, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Karena sejauh ini peran IMF dengan filosofi yang dipegangnya tak selalu cocok

untuk negara berkembang. Kebijakan-kebijakan IMF yang me-liberalkan perekonomian dengan membuka pasar barang dan modal seluas-luasnya, sistem kurs bebas, mengetatkan APBN, menjual BUMN, dan membatasi intervensi pemerintah, tidak jarang justru bersifat kontra produktif bagi perbaikan ekonomi negara berkembang. Tak kurang dari *Joseph E. Stiglitz*, ekonom dunia terkemuka peraih nobel tahun 2001, menohok IMF yang dikatakannya dengan ahli ekonom “kelas tiga” ingin mengatur negara-negara yang sangat komplek permasalahan ekonominya. Hasilnya, menurut Stiglitz dalam “*Globalization and Its Discontents*”, justru mendorong penyebaran resesi ekonomi dari satu negara ke negara lain, menyulitkan kaum miskin karena IMF sangat berorientasi pada kepentingan elit para kreditor, menimbulkan pengangguran, dan sebagainya.

Globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali paham liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neo-liberalisme. Neo-liberalisme sesungguhnya ditandai dengan kebijakan pasar bebas, yang mendorong perusahaan swasta dan pilihan konsumen, penghargaan atas tanggungjawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrat dan “parasit” pemerintah, yang tidak akan pernah mampu meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum neo-liberal adalah “Liberalisasikan perdagangan dan keuangan”, “Biarkan pasar menentukan harga”, “Akhiri inflasi, Stabilisasi ekonomi-makro, dan privatisasi”, “Pemerintah harus menyingkir dari menghalangi jalan”. Paham inilah yang saat ini mengglobal dengan mengembangkan *“consensus”* yang dipaksakan yang dikenal dengan “Globalisasi”, sehingga terciptalah suatu tata dunia. Arsitek tata dunia ini ditetapkan dalam apa yang dikenal *“The Neo-Liberal Washington Consensus”,* yang terdiri dari para pembela ekonomi swasta terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik.

Coba selanjutnya kita analisis tentang neo-liberalisme, bahwa pokok-pokok pendirian neo-liberal meliputi, *pertama*, bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang perburuhan, investasi, harga serta biarkan perusahaan itu mangatur diri sendiri untuk tumbuh dengan menyediakan kawasan pertumbuhan. *Kedua*, hentikan subsidi Negara kepada rakyat karena bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Negara harus melakukan swastanisasi semua perusahaan Negara, karena perusahaan Negara dibuat untuk melaksanakan subsidi Negara pada rakyat. Ini juga menghambat persaingan bebas. *Ketiga*, hapuskan ideologi “kesejahteraan bersama” dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat “tradisional” karena menghalangi pertumbuhan. Serahkan manajemen sumberdaya alam kepada ahlinya, bukan kepada masyarakat “tradisional” (sebutan bagi masyarakat adaptif) yang tidak mampu mengelola sumberdaya alam secara efisien dan efektif.

Dari analisa ekonomi politik diatas, yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia terutama pemerintah adalah: menyiapkan regulasi yang mampu melindungi asset ekonomi, menyiapkan birokrasi yang bersih dan transparan, mendorong kinerja struktur pemerintahan yang cepat dan tanggap bekerja untuk berkompetisi dalam dunia ekonomi, menolak eskploitasi SDA minimal dengan renegosiasi dengan investor asing, memperjelas subsidi untuk rakyat, menolak privatisasi BUMN dan segala aset SDA oleh pemilik modal asing.

5. Konsep ekonomi yang bagaimana yang menurut anda cocok dengan budaya bangsa ini?

Sebagai prawacana jawaban saya berangkat dari analisis tentang globalisasi. Bahwa, globalisasi dalam perspektif ekonomi bukan hanya momok tetapi juga merupakan kekuatan serakah dari sistem kapitalisme-liberalisme yang harus dilawan dengan kekuatan ekonomi-politik nasional yang didasarkan pada ekonomi rakyat. Para ilmuwan Ekonomi Politik Internasional lebih tertarik pada fakta bahwasanya dunia perekonomian memiliki dampak yang patut untuk dipertimbangkan pada kekuatan (*power*), nilai, dan otonomi politik dari suatu masyarakat nasional. Hal ini tentu karena negara idealnya memiliki faktor pendorong yang kuat dalam pengambilan keputusan demi mengamankan nilai serta kepentingannya sendiri, sehingga kemudian negara bisa saja memanipulasi kekuatan pasar dalam rangka meningkatkan kekuatan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lawan maupun negara kawannya.

Untuk memahami hukum gerak ekonomi kita bisa melihat dengan analisis teori marxis. Dalam memahami studi Ekonomi Politik Internasional, marxisme memiliki kerangka kerja bahwasanya negara tidak bergerak secara otomatis, namun negara digerakkan oleh kepentingan kelas yang berkuasa. Sebagai contohnya ialah negara-negara kapitalis yang digerakkan oleh kepentingan kaum borjuis. Hal tersebut kemudian berarti bahwa segala macam perjuangan antar negara haruslah dilihat dalam konteks ekonomi sebagai persaingan antar kelas kapitalis yang berbeda negara, karena marxis memiliki paham bahwa konflik kelas merupakan hal yang sangat fundamental daripada konflik antar Negara.

Nah, dari pandangan marxisme ini, kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu mengendalikan dan menguasai kekuatan ekonomi dalam negeri. Negara seharus mampu melindungi asset-aset ekonomi penting, tidak ada lagi eksploitasi atas nama rakyat. Kekuatan ekonomi Negara ada dalam kekuatan massa rakyat yang melindungi asset-nya. Bisa dikatakan kita butuh sistem ekonomi nasional, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi rakyat, atau sistem ekonomi pancasila.

Sistem ekonomi yang tepat untuk Indonesia saya kira adalah Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar. SEP juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Kasus terbelenggunya kita pada utang, dan juga terperosoknya Indonesia dalam krisis ekonomi yang terjadi sekarang, merupakan "peringatan" kepada bangsa kita untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yakni nilai-nilai sistem Ekonomi Pancasila, dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Adalah juga menjadi tanggung jawab kita semua, terutama kalangan intelektual, akademisi, aktivis sosial, untuk melakukan kajian-kajian empirik dalam merumuskan nilai-nilai yang membentuk perilaku ekonomi orang Indonesia.

6. Apa yang harus kami (PMII) lakukan untuk mengawal MEA 2015?

Pertama yang harus kita fahami adalah bahwa, negara imperialis memainkan peran penting dalam membuka pintu perekonomian dunia dengan menciptakan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF dan GATT/WTO. Lembaga-lembaga ini dikontrol oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Negara imperialis di bawah pimpinan Negara-negara Eropa dan negara-negara sedang berkembang (NSB). Fungsi mereka adalah menggantikan peran pasar domestik dan produsen lokal serta menghancurkan lembaga sosial setempat dengan tujuan memfasilitasi masuknya *multy national corporation* (MNC) dan terjaminnya ekspor barang-barang kebutuhan Negara dunia pertama.

Negara imperialis memainkan peran penting dalam pembangunan kembali ekonomi perusahaan-perusahaan raksasa, mereka memberikan bantuan militer dan perlindungan politik bagi perluasan *multy national corporation* (MNC), sementara *multy national corporation* (MNC) tersebut membiayai lembaga keuangan internasional yang bertugas untuk membuka pasar baru dan tempat investasi yang baru. Di bawah bayang-bayang modal multinasional korporasi, Negara imperialis juga ikut mensubsidi dan membiayai ekspansi modal, sementara di sisi lain penghisapan terhadap pasar domestik terus dilakukan untuk membiayai ekspansi tersebut.

Gambaran di atas memberi implikasi yang penting bagi Indonesia. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi mencakup aspek yang lebih luas termasuk politik luar negeri dan pertahanan. *Pertama*, ekonomi Indonesia perlu menyiapkan diri sebaik-baiknya agar dinamika Asia yang berkembang cepat itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Semua potensi pembangunan, tidak hanya sumber daya alam, tetapi yang lebih pokok adalah sumber daya manusia, infrastruktur, ruang (teritori), dan teknologi harus dioptimalkan. *Kedua*, mempertegas arah pembangunan ekonomi yang akan ditempuh dalam jangka panjang. Dalam menjabarkannya kepada prioritas pembangunan untuk kurun waktu yang lebih pendek harus konkret, konsisten, dan berkelanjutan. Di sini peranan kepemimpinan dan pemerintah yang kuat serta sistem sosial, politik, dan budaya yang mendukung sangat besar. *Ketiga*, meningkatkan peranan Indonesia paling tidak di Asia Tenggara dalam waktu dekat. Agar berperan lebih besar dalam dinamika Asia menuju tahun 2050, Indonesia juga perlu secepatnya kembali memainkan peran yang lebih besar di ASEAN, baik bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan.

Hal yang dilakukan kader pmii dalam jangka panjang adalah melakukan: (1) nasionalisasi asset bangsa; (2) mendidik kader muda untuk memiliki watak dan sikap negarawan yaitu: nasionalisme, patriotisme dan heroisme yang matang; (3) melawan investor asing yang semena-mena mengeksploitasi sumber daya alam kita yang berlimpah; (4) melawan segala bentuk ketidak adilan termasuk birokrasi dan rezim pemerintahan yang tiranik; (5) menolak intervensi asing atas perundang-undangan dan semua regulasi yang mengatur tata kelola pemerintahan dan perlindungan asset ekonomi; (6) menyaring imperealisme budaya yang menegasikan watak asli masyarakat Indonesia sebagai bangsa angraris dan maritim.

Sebagai pesan ideologis untuk kader PMII, saya jadi teringat kata-kata Tan Malaka: *"Sebelum imperialis itu meninggalkan pesisir kita belumlah akan kita sarungkan belati kita ke sarungnya. Kembali kita ke alam kita, ke penghidupan yang sederhana. Kita bisa dan kita terpaksa berlaku begitu! Dengan hidup sederhana dan senjata sederhana kita bisa bertahan bertahuntahun. Camkanlah bahwa kekayaan Indonesia yang istimewa itu mengizinkan kita bertarung lama dengan hidup miskin. Semua kekayaan dan kemegahan Indonesia itu kelak akan jatuh kembali ke tangan kita apabila kita sudah menang! Semboyan kita: Rencana Ekonomi Berjuang! Kemerdekaan 100%! Rencana Ekonomi Sosialistis!"*[]

PROVIDENT MOMENT_KALENDER AKSI

BULAN JANUARI
01 JANUARI ~ TAHUN BARU MASEHI
01 JANUARI ~ HARI PERDAMAIAN DUNIA
03 JANUARI ~ HARI DEPARTEMEN AGAMA
05 JANUARI ~ HARI KORPS WANITA ANGKATAN LAUT (KOWAL)
05 JANUARI ~ HARI ULANG TAHUN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
10 JANUARI ~ HARI LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
10 JANUARI ~ HARI TRITURA
10 JANUARI ~ HARI ULANG TAHUN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI)
15 JANUARI ~ HARI PERISTIWA LAUT DAN SAMUDERA
25 JANUARI ~ HARI GIZI DAN MAKANAN
25 JANUARI ~ HARI KUSTA INTERNASIONAL
31 JANUARI ~ HARI LAHIR NAHDLATUL ULAMA (NU)

BULAN PEBRUARI
02 FEBRUARI ~ HARI LAHAN BASAH SEDUNIA (KONVENSI RAMSAR)
05 FEBRUARI ~ PERISTIWA KAPAL TUJUH PROVINSI (ZEVEN PROVINCIEN)
09 FEBRUARI ~ HARI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)
09 FEBRUARI ~ HARI KAVALERI
13 FEBRUARI ~ HARI PERSATUAN FARMASI INDONESIA
14 FEBRUARI ~ HARI VALENTINE
14 FEBRUARI ~ HARI PERINGATAN PEMBELA TANAH AIR (PETA)
19 FEBRUARI ~ HARI KOHANUDNAS
20 FEBRUARI ~ HARI PEKERJA NASIONAL
21 FEBRUARI ~ HARI BAHASA IBU INTERNASIONAL
22 FEBRUARI ~ HARI ISTIQLAL
23 FEBRUARI ~ HARI ROTARY CLUB
28 FEBRUARI ~ HARI GIZI NASIONAL INDONESIA

BULAN MARET
01 MARET ~ HARI KEHAKIMAN NASIONAL
01 MARET ~ PERISTIWA SERANGAN UMUM 1 MARET 1949
06 MARET ~ HARI KONVENSI CITES (PERDAGANGAN SATWA LIAR)
06 MARET ~ HARI KOMANDO STRATEGIS ANGKATAN DARAT (KOSTRAD)
08 MARET ~ HARI WANITA/PEREMPUAN INTERNASIONAL
09 MARET ~ HARI MUSIK NASIONAL
10 MARET ~ HARI PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA (PARFI)
11 MARET ~ HARI SURAT PERINTAH 11 MARET (SUPERSEMAR)
18 MARET ~ HARI ARSITEKTUR INDONESIA
20 MARET ~ HARI KEHUTANAN SEDUNIA
21 MARET ~ HARI SINDROM DOWN
22 MARET ~ HARI AIR INTERNASIONAL
23 MARET ~ HARI METEOROLOGI SEDUNIA
24 MARET ~ HARI PERINGATAN BANDUNG LAUTAN API
24 MARET ~ HARI TUBERKULOSIS SEDUNIA
27 MARET ~ HARI WOMEN INTERNATIONAL CLUB (WIC)
29 MARET ~ HARI FILATELI INDONESIA
30 MARET ~ HARI FILM INDONESIA

BULAN APRIL
01 APRIL ~ HARI BANK DUNIA
06 APRIL ~ HARI NELAYAN INDONESIA
07 APRIL ~ HARI KESEHATAN SEDUNIA
09 APRIL ~ HARI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI AU)
15 APRIL ~ HARI ZENI
16 APRIL ~ HARI KOMANDO PASUKAN KHUSUS (KOPASSUS)
18 APRIL ~ HARI PERINGATAN KONFERENSI ASIA-AFRIKA DI BANDUNG
19 APRIL ~ HARI PERTAHANAN SIPIL (HANSIP)
21 APRIL ~ HARI KARTINI
22 APRIL ~ HARI BUMI/EARTH DAY/KTT BUMI
23 APRIL ~ HARI BUKU SEDUNIA
24 APRIL ~ HARI ANGKUTAN NASIONAL
24 APRIL ~ HARI SOLIDARITAS ASIA-AFRIKA
27 APRIL ~ HARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA

BULAN MEI
01 MEI ~ HARI BURUH SEDUNIA
01 MEI ~ HARI PERINGATAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT
02 MEI ~ HARI PENDIDIKAN NASIONAL
03 MEI ~ HARI SURYA
05 MEI ~ HARI LEMBAGA SOSIAL DESA (LSD)
08 MEI ~ HARI PALANG MERAH INTERNASIONAL
10 MEI ~ HARI LUPUS DUNIA
11 MEI ~ HARI POM - TNI
15 MEI ~ HARI KORPS RESIMEN MAHADJAYA/JAYAKARTA (MENWA JAYAKARTA)
17 MEI ~ HARI BUKU NASIONAL
19 MEI ~ HARI KORPS CACAT VETERAN INDONESIA
20 MEI ~ HARI KEBANGKITAN NASIONAL
21 MEI ~ HARI PERINGATAN REFORMASI
29 MEI ~ HARI LANJUT USIA NASIONAL
31 MEI ~ HARI ANTI TEMBAKAU INTERNASIONAL

BULAN JUNI
01 JUNI ~ HARI LAHIRNYA PANCASILA
03 JUNI ~ HARI PASAR MODAL INDONESIA
05 JUNI ~ HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA
15 JUNI ~ HARI DEMAM BERDARAH DENGUE ASEAN
17 JUNI ~ HARI DERMAGA
21 JUNI ~ HARI KRIDA PERTANIAN
22 JUNI ~ HARI ULANG TAHUN KOTA JAKARTA
24 JUNI ~ HARI BIDAN INDONESIA
26 JUNI ~ HARI ANTI NARKOBA SEDUNIA
29 JUNI ~ HARI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BULAN JULI
01 JULI ~ HARI BHAYANGKARA
05 JULI ~ HARI BANK INDONESIA
09 JULI ~ HARI PELUNCURAN SATELIT PALAPA
12 JULI ~ HARI KOPERASI INDONESIA
15 JULI ~ HARI PT. ASKES (PERSERO)
22 JULI ~ HARI KEJAKSAAN
23 JULI ~ HARI KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI)
23 JULI ~ HARI ANAK NASIONAL
29 JULI ~ HARI BHAKTI TNI ANGKATAN UDARA
31 JULI ~ HARI LAHIR KORPS PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII) WATI

BULAN AGUSTUS
05 AGUSTUS ~ HARI DHARMA WANITA NASIONAL
08 AGUSTUS ~ HARI ULANG TAHUN ASEAN
10 AGUSTUS ~ HARI VETERAN NASIONAL
12 AGUSTUS ~ HARI WANITA TNI ANGKATAN UDARA (WARA)
12 AGUSTUS ~ HARI REMAJA INTERNASIONAL
13 AGUSTUS ~ HARI PERINGATAN PANGKALAN BRANDAN LAUTAN API
14 AGUSTUS ~ HARI PRAMUKA (PRAJA MUDA KARANA)
17 AGUSTUS ~ HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
18 AGUSTUS ~ HARI KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
19 AGUSTUS ~ HARI DEPARTEMEN LUAR NEGERI INDONESIA
21 AGUSTUS ~ HARI MARITIM NASIONAL
24 AGUSTUS ~ HARI TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI)
24 AGUSTUS ~ HARI ANAK JAKARTA MEMBACA

BULAN SEPTEMBER
01 SEPTEMBER ~ HARI POLISI WANITA (POLWAN)
03 SEPTEMBER ~ HARI PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
04 SEPTEMBER ~ HARI PELANGGAN NASIONAL
08 SEPTEMBER ~ HARI AKSARA INTERNASIONAL
08 SEPTEMBER ~ HARI PAMONG PRAJA
09 SEPTEMBER ~ HARI OLAH RAGA NASIONAL
09 SEPTEMBER ~ HARI ULANG TAHUN PARTAI DEMOKRAT
11 SEPTEMBER ~ HARI RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)

14 SEPTEMBER ~ HARI KUNJUNG PERPUSTAKAAN
17 SEPTEMBER ~ HARI PERHUBUNGAN NASIONAL
21 SEPTEMBER ~ HARI PERDAMAIAN INTERNASIONAL
24 SEPTEMBER ~ HARI AGRARIA NASIONAL/HARI TANI
26 SEPTEMBER ~ HARI STATISTIK
27 SEPTEMBER ~ HARI POS TELEKOMUNIKASI TELEGRAF (PTT)
28 SEPTEMBER ~ HARI KERETA API
29 SEPTEMBER ~ HARI SARJANA INDONESIA
30 SEPTEMBER ~ HARI PERINGATAN PEMBERONTAKAN G30S/PKI

BULAN OKTOBER
01 OKTOBER ~ HARI KESAKTIAN PANCASILA
02 OKTOBER ~ HARI BATIK SEDUNIA
02 OKTOBER ~ SUSU NASIONAL
03 OKTOBER ~ HARI ARSITEKTUR DUNIA-WORLD ARCHITECTURE DAY UIA
05 OKTOBER ~ HARI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
08 OKTOBER ~ HARI TATA RUANG NASIONAL
09 OKTOBER ~ HARI SURAT MENYURAT INTERNASIONAL
10 OKTOBER ~ HARI KESEHATAN JIWA SEDUNIA
14 OKTOBER ~ HARI PENGLIHATAN SEDUNIA
15 OKTOBER ~ HARI HAK ASASI BINATANG
16 OKTOBER ~ HARI PANGAN SEDUNIA
16 OKTOBER ~ HARI PARLEMEN INDONESIA
17 OKTOBER ~ HARI PENGENTASAN KEMISKINAN INTERNASIONAL
20 OKTOBER ~ HARI ULANG TAHUN GOLONGAN KARYA
24 OKTOBER ~ HARI DOKTER INDONESIA
24 OKTOBER ~ HARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
27 OKTOBER ~ HARI LISTRIK NASIONAL
27 OKTOBER ~ HARI PENERBANGAN NASIONAL
28 OKTOBER ~ HARI SUMPAH PEMUDA
29 OKTOBER ~ HARI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
30 OKTOBER ~ HARI KEUANGAN

BULAN NOVEMBER
03 NOVEMBER ~ HARI KEROHANIAN
10 NOVEMBER ~ HARI GANEFO
10 NOVEMBER ~ HARI PAHLAWAN
12 NOVEMBER ~ HARI KESEHATAN NASIONAL
14 NOVEMBER ~ HARI BRIGADE MOBIL (BRIMOB)
14 NOVEMBER ~ HARI DIABETES SEDUNIA
16 NOVEMBER ~ HARI KONFERENSI WARISAN SEDUNIA
20 NOPEMBER ~ HARI ANAK SEDUNIA
21 NOVEMBER ~ HARI POHON
22 NOVEMBER ~ HARI PERHUBUNGAN DARAT
25 NOVEMBER ~ HARI GURU/HUT PGRI

BULAN DESEMBER
01 DESEMBER ~ HARI AIDS SEDUNIA
02 DESEMBER ~ HARI KONVENSI IKAN PAUS
03 DESEMBER ~ HARI PENYANDANG CACAT INTERNASIONAL
04 DESEMBER ~ HARI ARTILERI
09 DESEMBER ~ HARI ARMADA REPUBLIK INDONESIA
09 DESEMBER ~ HARI PEMBERANTASAN KORUPSI SEDUNIA
10 DESEMBER ~ HARI HAK ASASI MANUSIA
12 DESEMBER ~ HARI TRANSMIGRASI
13 DESEMBER ~ HARI KESATUAN NASIONAL
15 DESEMBER ~ HARI CINTA PUSPA DAN SATWA NASIONAL
15 DESEMBER ~ HARI INFANTRI
19 DESEMBER ~ HARI BELA NEGARA
19 DESEMBER ~ HARI TRIKORA
20 DESEMBER ~ HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL
22 DESEMBER ~ HARI KORPS WANITA ANGKATAN DARAT (KOWAD)
22 DESEMBER ~ HARI SOSIAL
22 DESEMBER ~ HARI IBU
25 DESEMBER ~ HARI NATAL
29 DESEMBER ~ HARI KEANEKARAGAMAN HAYATI
29 DESEMBER ~ HUT KOPERASI PEGAWAI PERPUSTAKAAN NASIONAL (KOPTANAS)

CURRICULUM VITAE PENULIS

Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A., Lahir di Cilacap, 27 Juli 1980, adalah anak terakhir dari empat bersaudara pasangan H. Nursayidi Bin H. Ahmad Syarif Ismail dan Hj. Khamidah Binti Bpk. Sanurji. Aktifitas sekarang selain terus menjadi aktivis, santri dan menulis berbagai karya bidang *sosial*, *filsafat*, *pendidikan*, dan *pemikiran ke-Islam-an*, juga menjadi Dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali (UNUGHA) Cilacap, serta menjadi Direktur Institute for Philosophycal and Social Studies (INPHISOS) Jogjakarta-Cilacap, dan ikut mengasuh santri Pondok Pesantren *Al-Madaniyyah As-Salafiyyah* Cilumpang Cilacap. Penulis memiliki hobby: *Membaca, Menulis, Diskusi, Organisasi, dan Travelling.* Buku Favorit yang menjadi inspirasi untuk selalu menulis antara lain: *Ihya 'Ulumaddin*-Imam Ghazali, *Tetralogi Buru*-Pramoedya Ananta Toer, *Madilog*-Tan Malaka, *Das Kapital*-Karl Marx. Motto hidup yang selalu menjadi inspirasi penulis untuk terus membentuk jati diri dan melahirkan karya: "*Bunuhlah waktumu dengan aktivitas produktif dan progressif, jangan engkau terbunuh waktu karena aktivitas yang mengasingkan rasionalitas*"

Pendidikan formal yang pernah ditempuh antara lain: SD Negeri Mertasinga III (1987-1993), SMP Negeri 5 Cilacap (1993-1996), Madrasah Aliyah Ponpes Miftahussalam Banyumas (1996-1999) dipercaya oleh pengasuh ponpes K.H. Zaeni Muhajjat, B.A., untuk menjadi lurah pondok, kemudian penulis menempuh Studi S1 di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (1999-2005) dengan Skripsi kontroversial dan dianggap keluar dari tradisi akademik Fakultas Tarbiyah UIN, dengan judul: *"Emansipasi Keterasingan Manusia Menurut Karl Marx: Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam"*. Kemudian melanjutkan S2 Pascasarjana Sosiologi Fisipol UGM Jogjakarta (2008-2010) dengan Tesis ambisius berjudul: "*Negara Marxis & Revolusi Proletariat: Studi Analisis Ajaran Marxis Tentang Negara & Tugas-Tugas Proletariat di dalam Revolusi Sosial"* yang kini menjadi buku diterbitkan Pustaka Pelajar Jogjakarta.

Bersamaan dengan pendidikan formal juga penulis menempuh Pendidikan Non-Formal di beberapa Pesantren untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam klasik seperti ilmu *tafsir, hadits, nahwu-sharaf*, *fiqih*, *tauhid*, & *kajian Islam kontemporer,* antara lain di: Pondok Pesantren *Miftahussalam Al-Islamiyyah Al-Haditsah* Banyumas, Pondok Pesantren *Al-Munawwir As-Salafiyyah* Krapyak Jogjakarta, Pondok Pesantren *Fatkhul 'Ulum* Kewagean Kediri Jawa Timur, dan Pondok Pesantren *Al-Madaniyyah As-Salafiyyah* Cilumpang Cilacap.

Selama menjadi mahasiswa organisasi kemahasiswaan yang pernah diikuti antara lain: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Jogjakarta, Bidang Kaderisasi Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Paradigma UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Kelompok Studi Ilmu Pendidikan (KSiP) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Presidium Mahasiswa (Presma) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Himpunan Mahasiswa Sunan Kalijaga Cilacap (HIMMAH SUCI) Jogjakarta, Himpunan Mahasiswa Cilacap (HIMACITA) Di Jogjakarta, Voulentir Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Jogjakarta, Direktur Institute for Philosophycal and Social Studies (INPHISOS) Jogjakarta.

Kegemarannya berorganisasi, berdiskusi dan berdialektika melahap *buku kiri, filsafat* dan *sosial* sejak SMU telah menciptakan pemikiran dan pengaruh di lingkungan organisasi dan kelompok studi terus dilanjutkan selama menjadi mahasiswa di Jogjakarta. Di Intra kampus ia terlibat secara politik di PRM dan didelegasikan untuk *menjabat posisi prestisius* sebagai Sekretaris Jenderal DEMA UIN Sunan Kalijaga, dan karena nalar pemberontakan jalanan gerakan intra kampus, ia juga terlibat demonstrasi pembubaran Seminar Nasional dan *penolakan konversi* IAIN menjadi UIN, aksi penolakan SISDIKNAS dan aksi pembubaran partai Golkar setelah penumbangan Rezim Orde Baru '98. Sebagai aktivis, penulis sering turun kejalan dalam berbagai aksi, unjuk rasa, untuk menentang berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Penulis pernah terlibat di pendampingan petani di Klaten Jogjakarta dengan Jaringan Petani Katolik, Pendampingan Anak Jalanan dengan Komunitas HUMANA Jogjakarta dan Pendampingan Prostitusi dengan Komunitas Griya Lentara di Lokalisasi Sarkem Jogjakarta. Selama menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga selain aktif turun jalan dan lapangan, ia juga aktif di kancah pemikiran dengan membentuk dan mengikuti berbagai forum diskusi, seperti T-Visionary Club, Forum Diskusi KIPAS, Voulentir Kajian LKiS, Forum Lintas Organ Ektra dan Forum Diskusi Komunitas Kultural.

Jaringan intelektual yang pernah dan sedang digelutinya antara lain: Center for Asia Pasific Studies Gadjah Mada University (PSAP) Jogjakarta, Institute for Islamic and Social Studies (LKiS) Jogjakarta, Indonesia Sanitation Sector Development Program (WSP/ BAPPENAS) Jakarta, Institute for Human Resources Studies and Development (LKPSM) Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LAPPERA) Jogjakarta, Institute for Women and Children's Studies & Development (LSPPA) Jogjakarta, Institute for Human Resources Studies and Development (LKPSM) Cilacap, Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Cilacap, Institute for Research and Empowerment (IRE) Jogjakarta, Institute Sosiologi Dialektis (INSIDE) Gadjah Mada University, Institute for Philosophycal and Social Studies (INPHISOS) Yogyakarta, Forum Diskusi Eye on The Revolution + Revdem Yogyakarta.

Sekarang penulis juga terlibat aktif di organisasi sosial kemasyarakatan, antara lain: Majelis Pembina Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Cilacap, Lembaga Kajian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM NU) Kabupaten Cilacap, Pimpinan Cabang Lembaga Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Cilacap Utara, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cilacap, Lajnah Bahsul Masail (LBM NU) Eks-Kotatip Kabupaten Cilacap, PC Lajnah Ta'lif wan Nasr Nahdlatul Ulama (LTN NU) Kabupaten Cilacap, Pimpinan Redaksi Buletin Tajalla LBM NU Eks-Kotatip Kabupaten Cilacap.

Produktifitas menulis karya ilmiah berupa buku yang sudah dipublikasikan antara lain: *(1) Negara Marxis & Revolusi Proletariat* (Pustaka Pelajar-Jogjakarta, 2011); *(2) Sejarah Teologi Islam & Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama'ah* (Pustaka Pelajar-Jogjakarta, 2014); *(3) Kapitalisme, Negara & Masyarakat* (Pustaka Pelajar-Jogjakarta); *(4) Manifesto Wacana Kiri: Membentuk Solidaritas Organik* (Pustaka Pelajar-Jogjakarta); *(5) Sejarah Ideologi Dunia* (Lingkar Media-Inphisos-Jogjakarta); *(6) Revolusi & Manajemen Aksi* (Inphisos-Jogjakarta); *(7) Training of Facilitator: Metodologi Pelatihan Transformatif* (Inphisos-Jogjakarta); *(8) Kepemimpinan Demokratik Transformatif* (Inphisos-Jogjakarta); *(9) Strategi Gerakan Sosial* (Inphisos-Jogjakarta); *(10) Sosiologi Pendidikan Kritis* (Inphisos-Jogjakarta); *(11) Gender, Gerakan Perempuan & Developmentalisme* (Inphisos-Jogjakarta); *(12) Marxisme untuk Revolusi Demokratik* (Inphisos-Jogjakarta); *(13) Pemikiran Marx tentang Kritik Ekonomi Politik* (Inphisos-Jogjakarta); *(14) Manifesto Ideologi Kiri: Melacak Akar Ideologi Dunia* (Inphisos-Jogjakarta); *(15) Paradigma & Sosiologi Perubahan Sosial* (Inphisos-Jogjakarta); *(16) Teori Analisis Geo-Ekosospol* (Inphisos-Jogjakarta).

Hingga sekarang masih tetap aktif Menulis, mengisi Workshop Penulisan Ilmiah, Seminar Nasional & Regional, Pelatihan/*Training-Short Course*, pembicara Forum-forum Ilmiah, Pembasisan Kader dan Gerakan Sosial. Secara formal dan kultural sampai sekarang juga terlibat aktif menjadi Narasumber & Fasilitator di berbagai seminar dan pelatihan ilmiah serta mediasi intelektual di lingkungan PMII antara lain: di MAPABA, PKD, PKL di wilayah PMII Jogjakarta, PKC PMII Jawa Timur, PKC PMII Jawa Tengah, PKC PMII Jawa Barat, dan bersentuhan secara kultural di Wilayah Bidang Kaderisasi PB PMII, serta PMII Wilayah Luar Jawa-Sulawesi, Kalimantan, Sumatra. Hingga kini penulis tetap aktif dalam perintisan pendidikan kritis antara lain: *Sekolah Marxis, Pelatihan Basis, Sekolah Ideologi Dunia, Sekolah Kritik Ideologi, Sekolah Tan Malaka, Sekolah Filsafat Barat & Islam, Sekolah Aswaja, Sekolah Pendidikan Kritis, Sekolah Teori Sosial Klasik & Modern, Sekolah Analisis Sosial, Sekolah Gerakan Sosial, Sekolah Gerakan Perempuan, Sekolah Anti Globalisasi, Sekolah Politik Islam, Pelatihan Manajemen Aksi dan Revolusi, Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Training of Facilitator (TOF), Pelatihan Pendidikan Politik, Pelatihan Advokasi, Pelatihan Analisis Kebijakan, Pelatihan Jurnalisme Investigatif, Pelatihan Karya Tulis Ilmiah,* dan menginisiasi Lembaga Penerbitan Karya Ilmiah Ideologis.

Penulis sekarang tinggal di Pondok Pesantren *Al-Madaniyyah As-Salafiyyah Al-Islamiyyah* Cilacap, Jl. Pucang D.37 Gumilir Cilacap Jateng/ Jl. Urip Sumoharjo 71 Mertasinga-Cilacap Jawa Tengah. Contac Person: HP. 085 647 634 312 (IM3) / 087 838 178 226 (XL/WA), E-Mail: nuriel.ugm@gmail.com/ FB: nur sayyid santoso kristeva, PIN BBM Android: 5221 7134, Website: www.negaramarxis.blogspot.com.[]

*“Bunuhlah waktumu dengan aktifitas produktif dan progressif, jangan engkau terbunuh waktu karena aktifitas yang mengasingkan rasionalitas.”**(Nur Sayyid Santoso Kristeva)***

“The philosopher have only interpreted the wolrd, in various ways; the point, however, is to change it—Para ahli filsafat hanya telah menafsirkan dunia, dengan berbagai cara; akan tetapi soalnya ialah mengubahnya. ***(Tesis XI Tentang Feuerbach Karl Marx, 1845)***

“Dalam negara ini akan terdapat tugu peringatan manusia najis, penghianat negara, penjual akyat, kusta masyarakat. Puluhan, ya ratusan nama dan gelar manusia najis yang dituliskan disemua sisi tugu raya ini. Yang termasuk golongan manusia najis nomor satu ialah mereka yang langsung membantu penjajah, penindas, penghisap dan pembunuh rakyat Indonesia.” ***(Tan Malaka)***

Disiplin itu, ialah nyawanya suatu pergerakan revolusioner. Dari aksi kita hari-hari itulah kita bisa memperoleh kepercayaan, pengaruh dan Contract yang kekal, dan dari aksi kecil-kecil itulah bisa lahirnya aksi yang besar. Marxisme itu bukanlah ilmu "hapalan" melainkan satu pedoman buat aksi, atau satu richtsnur tot handelen (guide to action). Revolusi bukanlah peperangan imperialisme, yang dilakukan buat bunuh membunuh dan rampas merampas. Revolusi ialah satu pertarungan lahir dan batin, dimana satu Bangsa Tertindas atau Kasta Tertindas, melahirkan dan mengumpulkan sifat-sifat manusia yang termulia untuk maksud yang tersuci. Kalau saatnya datang, berdirilah tegak di tengah-tengah Rakyat, menentang peluru dan bayonetnya musuh. Jangan dilupakan ideal kita komunis: “Menang atau mati dalam Massa Aksi." Di tanganmu tergenggam Kemerdekaan-Indonesia, yakni Kekapaan, Keselamatan, Kepandaian dan Peradaban... Kamu Kaum Revolusioner !! Kelak Rakyat keturunanmu dan Angin Kemerdekaan akan berbisik-bisik dengan bunga-bungaan di atas kuburanmu: "Disini bersemayam Semangat Revolusione” **[‘Semangat Muda’ Tan Malaka (1926)]**

“Pada dasarnya, semua orang punya potensi menjadi intelektual sesuai dengan kecerdasan yang dimilikinya, dan dalam cara menggunakannya. Tetapi tidak semua orang adalah intelektual dalam fungsi sosial” ***(Antonio Gramsci)***

*“Revolusi harus tahu mana lawan mana kawan, Aku cinta kaum nasionalis tetapi kaum nasionalis yang revolusioner, Aku cinta kaum agama tetapi kaum agama yang revolusioner, Aku cinta komunis tetapi kaum komunis yang revolusioner”**(Ir. Soekarno, McTurnan)***

*Dehumanisasi, meskipun sebuah fakta sejarah yang kongkret, bukanlah takdir yang turun dari langit, tetapi akibat dari tatanan yang tidak adil yang melahirkan kekerasan dari tangan-tangan para penindas, yang pada gilirannya mendehu-manisasikan kaum tertindas.**(Paulo Freire, 1968).***

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA JARINGAN INTI IDEOLOGIS